



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan keputusan Wali kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun yang dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perangkat Daerah Kota Semarang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 5 Agustus 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1. DINAS PENDIDIKAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

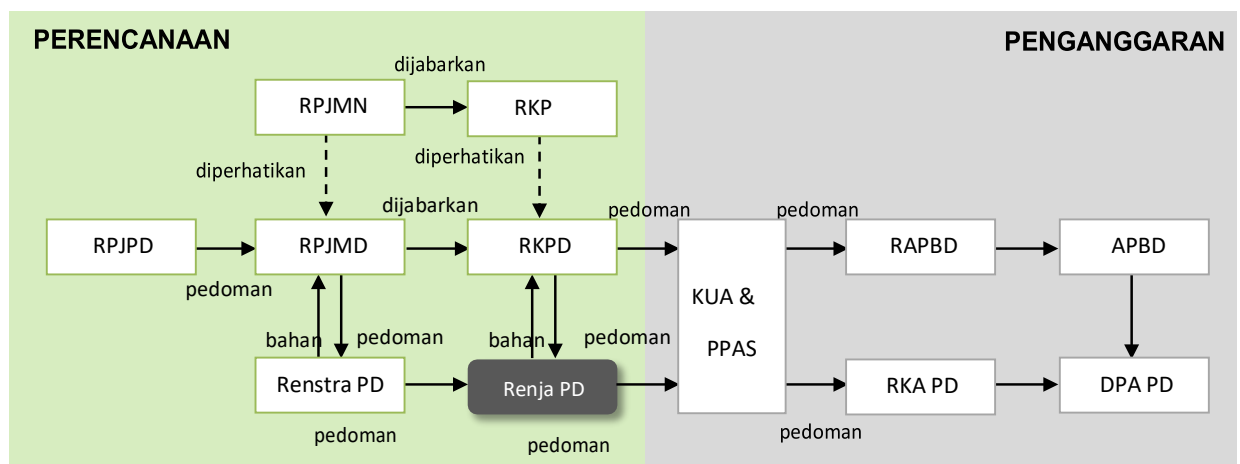
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. untuk penyusunan Renja tahun 2023, maka yang menjadi pedoman adalah Renstra, yaitu pada tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 92);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 40).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang di tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan sebanyak 5 (lima) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 1.088.877.448.112. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 1.010.223.853.237 atau sebesar 92,78%.

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%		9 dokumen	100%
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Lainnya	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%		17 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%		12 dokumen	100%
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%		3 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.02.05	Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		2 dokumen	100%
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognolisi Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		2 dokumen	100%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada OPD	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		1 unit	100%
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langgan Listrik, Telepon, Air, dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		1 unit	100%
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	124 unit	124 unit	124 unit	124 unit	100%		124 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%		3 unit	100%
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	5 unit
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	6 ruang	30 ruang	19 ruang	20 ruang	23 ruang		30 ruang	128 ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	10 ruang
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	17 unit
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 unit	2 unit	3 unit	2 unit	3 unit		3 unit	14 unit
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		4 unit	24 unit
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		35 ruang	32 ruang	30 ruang	35 ruang		35 ruang	253 ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 ruang	4 ruang	4 ruang	4 ruang	4 ruang		4 ruang	24 ruang
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	9 ruang	4 ruang	4 ruang	4 ruang	4 ruang		4 ruang	29 ruang
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	13 ruang
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13 unit	8 unit	5 unit	6 unit	5 unit		6 unit	43 unit
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		14 unit	13 unit	16 unit	12 unit		14 unit	69 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		42 unit	48 unit	30 unit	36 unit		30 unit	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar		4831 siswa	5.555 siswa	5.611 siswa	5.667 siswa		5.712 siswa	27.376 siswa
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.918 siswa	6.700 siswa	7.700 siswa	8.800 siswa	10.100 siswa		11.300 siswa	50.518 siswa
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	2.510 siswa	4.800 siswa	5.000 siswa	5.000 siswa	5.500 siswa		5.500 siswa	28.310 siswa
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	326 paket	326 set	327 set	327 paket	328 paket		328 paket	1.636 paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	3 unit
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	3 ruang	12 ruang	32 ruang	24 ruang	10 ruang		12 ruang	93 ruang
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1 ruang	2 ruang	2 ruang	1 ruang		2 ruang	8 ruang
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1 ruang	2 ruang	2 ruang	1 ruang		2 ruang	8 ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang		1 ruang	6 ruang
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	3 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang		1 ruang	8 ruang
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		1 ruang	1 ruang	1 ruang				3 ruang
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang		1 ruang	7 ruang
		Jumlah pengadaan sarpras		5 unit	5 unit	5 unit	5 unit		5 unit	25 unit
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		6 ruang	6 ruang	6 ruang	6 ruang		6 ruang	30 ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		55ruang	96 ruang	66 ruang	56 ruang		56 ruang	329 ruang
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		12 ruang	12 ruang	12 ruang	12 ruang		12 ruang	60 ruang
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3 ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang		3 ruang	15 ruang
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	11 ruang
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	13 ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	10 ruang
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	10 ruang
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang	2 ruang		2 ruang	12 ruang
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	6 unit
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah		1 sekolah	6 sekolah
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama		1.109 siswa	1.120 siswa	1.131 siswa	1.143 siswa		1.221 siswa	5.724 siswa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	2.580 siswa	3.250 siswa	4.000 siswa	4.600 siswa	5.600 siswa		6.500 siswa	26.530 siswa
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	1.030 siswa	800 siswa	1.000 siswa	1.000 siswa	1.000 siswa		1.000 siswa	5.830 siswa
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah		1 sekolah	5 sekolah
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan		12 kegiatan	12 kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen		10 dokumen	50 dokumen
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Terlaksananya lomba-lomba di tingkat SMP dan PPDB	100%							100%
		Jumlah Lomba	5 lomba	14 lomba	14 lomba	14 lomba	14 lomba		14 lomba	14 lomba
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 Tahun								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6 unit	5 unit	3 unit	2 unit	4 unit		4 unit	24 unit
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		4 unit	22 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	849 siswa	1.750 siswa	2.100 siswa	2.150 siswa	2.800 siswa		3.100 siswa	12.749 siswa
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	9 sekolah	11 sekolah	14 sekolah	16 sekolah	18 sekolah		20 sekolah	88 sekolah
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100%							100%
		Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD		5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan		5 kegiatan	5 kegiatan
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	13 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	8 dokumen		4 dokumen	59 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, pendampingan akreditasi dan lomba	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49.205 siswa	49.205 siswa	49.205 siswa	49.205 siswa	49.205 siswa		49.205 siswa	295.230 siswa
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	4 lembaga	6 lembaga	8 lembaga	10 lembaga	12 lembaga		14 lembaga	14 lembaga
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	7 unit
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	6 unit
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	6 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen	3 dokumen
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3.515 siswa	3.515 siswa	3.515 siswa	3.515 siswa	3.515 siswa		3.515 siswa	21.090 siswa
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
2,01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	6 kegiatan
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan		5 kegiatan	30 kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.281 orang	5.334 orang	5.387orang	5.411 orang	5.495 0rang		5.627 orang	5.627 orang
		Jumlah non ASN		1.737 orang	2.197 orang	2.788 orang	3.190 orang		3.392 orang	3.392 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%							
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2,01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah		4 sekolah	24 sekolah
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah		1 sekolah	6 sekolah
2,02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	290 lembaga	290 lembaga	290 lembaga	290 lembaga	290 lembaga		290 lembaga	1.740 lembaga
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 lembaga	200 lembaga	200 lembaga	200 lembaga	200 lembaga		200 lembaga	1.200 lembaga
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	3 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg		4 keg	4 keg

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Pendidikan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan Wajib, 5 Program dan 12 Indikator Kinerja Program serta 16 Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja Kegiatan.
 - b) Dari 12 Indikator Kinerja Program, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 7 indikator sesuai target, serta 3 indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 8 program dengan 55 indikator program dan 462 kegiatan dengan 462 indikator kegiatan.
 - b) Dari 55 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang dapat melampaui target, dan 52 Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 897 indikator kinerja kegiatan, terdapat 853 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, dan 44 indikator tidak dapat memenuhi Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
	Urusan Wajib Pendidikan			
	Dinas Pendidikan	1.088.877.448.112	1.010.223.853.237	92.78
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	671.351.494.413	622.680.071.346	92.76
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	790.000.000	573.105.600	72.55
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	715.000.000	511.138.800	71.49
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.500.000	12.195.000	97.56
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.500.000	12.072.500	96.58
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	11.464.000	76.43
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	10.717.500	71.45
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	5.749.050	57.49
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.768.750	97.69
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	645.248.997.518	605.684.867.267	93.87
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	640.120.872.518	600.977.956.465	93.89
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.063.925.000	4.649.212.302	91.81
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.000.000	25.916.000	99.68
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.000.000	25.285.500	90.31
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.200.000	6.497.000	63.70
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	35.931.500	71.86
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	35.931.500	71.86
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.452.425.322	3.003.506.416	67.46
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.999.320	66.512.250	67.87
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	324.999.104	170.282.428	52.39
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.049.957	200.634.870	64.92
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.430	158.363.750	63.35
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	699.990.500	147.353.599	21.05
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.574.376	462.671.519	62.47
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.029.811.635	1.797.688.000	88.56
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.114.690	583.985.000	93.27

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	626.114.690	583.985.000	93.27
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.988.437.103	11.518.650.705	64.03
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.514.037.103	11.123.312.070	63.51
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.400.000	395.338.635	83.33
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.195.519.780	1.315.956.358	59.94
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.350.000	152.514.538	71.15
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	860.960.000	494.445.550	57.43
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.901.250	242.141.700	66.91
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	695.810.930	387.386.070	55.67
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.497.600	39.468.500	63.15
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	416.231.120.697	382.480.806.474	91.89
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	255.333.224.189	242.788.771.068	95.09
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.800.399.796	8.839.398.084	81.84
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.220.000.000	2.443.668.809	75.89
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	299.999.943	285.148.500	95.05
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.999.999.974	1.971.912.000	98.60
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.386.876.775	9.703.280.129	85.21
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	493.745.879	462.636.000	93.70
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	323.511.038	318.225.750	98.37
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.832.517.727	5.629.816.212	96.52
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.523.717.142	1.454.333.000	95.45
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.195.140.805	3.893.480.168	92.81
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	10.656.000.000	10.287.540.000	96.54
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.488.778.800	0	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.198.482.379	689.464.850	57.53
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1.519.999.775	1.465.324.500	96.40
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.152.159.816	1.080.477.000	93.78
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	110.978.700.000	109.308.743.901	98.50
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000	590.400.000	98.40
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.734.179.826	83.489.757.918	99.71
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	224.999.849	202.728.800	90.10
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	189.084.665	160.720.447	85.00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	514.930.000	511.715.000	99.38

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	111.942.483.918	107.010.796.350	95.59
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.349.999.843	4.231.350.119	79.09
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	230.000.000	230.000.000	100.00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	100.000.000	100.000.000	100.00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	35.000.000	35.000.000	100.00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.999.307.443	5.555.004.887	79.37
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.237.598.273	2.237.347.750	99.99
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.636.902.028	3.531.263.600	97.10
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.317.851.480	5.614.791.950	88.87
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	599.999.655	341.204.300	56.87
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.989.977.475	1.968.056.030	98.90
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.250.393.360	1.117.070.360	89.34
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.355.379.000	39.614.574.263	98.16
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	299.999.836	109.907.060	36.64
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	39.292.434.231	39.139.294.787	99.61
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	164.148.520	102.438.560	62.41
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	443.661.565	443.661.475	100.00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.639.831.209	2.639.831.209	100.00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	41.399.850.113	32.436.701.464	78.35
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6.287.845.561	4.830.728.196	76.83
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	590.000.000	583.096.200	98.83
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	446.476.173	445.594.868	99.80
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000	285.498.195	95.17
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	300.000.030	282.260.000	94.09
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	362.318.032	328.463.900	90.66
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.268.800.012	1.104.607.000	87.06
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	156.424.830	148.565.000	94.98
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	285.304.445	212.495.300	74.48
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	600.000.000	428.707.975	71.45
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.034.572.518	927.742.471	89.67
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	245.108.512	205.995.500	84.04
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.523.000.000	22.652.946.859	76.73
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.555.562.477	4.588.617.959	60.73
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	39.702.124	99.26
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46.689.130	44.260.000	94.80
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	214.507.960	206.165.750	96.11

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100.000.096	25.475.000	25.47
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	55.986.383	49.620.000	88.63
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	145.787.168	113.934.200	78.15
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	534.066.855	375.263.000	70.27
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	313.478.658	313.398.658	99.97
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	407.246.227	407.166.227	99.98
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.697.800.000	3.013.633.000	52.89
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	274.234.359	196.642.050	71.71
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	274.234.359	196.642.050	71.71
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	125.000.000	80.248.800	64.20
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	149.234.359	116.393.250	77.99
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	500.000.000	290.553.000	58.11
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pend. Nonformal/Kesetaraan	500.000.000	290.553.000	58.11
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500.000.000	290.553.000	58.11
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	520.598.643	192.768.500	37.03
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	195.598.925	240.000	0.12
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	164.998.925	240.000	0.15
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30.600.000	0	0.00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	324.999.718	192.528.500	59.24
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	149.999.987	74.807.000	49.87
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	74.999.800	37.870.000	50.49
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	99.999.931	79.851.500	79.85
	TOTAL	1.088.877.448.112	1.010.223.853.237	92.78

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.088.877.448.112. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 1.010.223.853.237 (92,78%) dengan sisa sebesar Rp 78.653.594.875 (7,22%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan adalah melaksanakan fungsi sebagai OPD pelaksana urusan wajib pendidikan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	IPM		82,40 %	83,23%				83,55 %		
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah		15,00 %	15,07%						
	Rata-rata Lama Sekolah		10,88 %	10,96%						

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul ”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 83,55% dari target sebesar 83,23%
- b. Sasaran **“Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan”** memiliki 2 indikator sasaran sebagai berikut:
- 1) Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 15,53% dari target 15,07%;
 - 2) Indikator “Angka Rata-rata Lama Sekolah” belum dapat mencapai target sebesar 10,96%, dengan realisasi sebesar 10,78%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Renja SKPD dan Dokumen Pendukung Perencanaan secara tepat waktu	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
6	Tersedianya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD secara tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
7	Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD secara tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2021

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang di urusan wajib pendidikan, ketersediaan dokumen perencanaan pendidikan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pendidikan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan di bidang pendidikan adalah kesesuaian program, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5

**Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang Dengan Tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2021

Pada tahun 2021, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%; dimana 8 program Perubahan Renstra yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di pendidikan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai OPD pengampu urusan wajib pendidikan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	82,40-82,80	82,80-83,20	83,20-83,60	83,60-84,00	83,05	83,05 - 83,20	83,20-83,60	83,60-84,00
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,53	10,55	10,57	10,59	10,53	10,55	10,57	10,59
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,52	15,54	15,56	15,58	15,52	15,54	15,56	15,58
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	85,73	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%								
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	83,3	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	67,62	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	11,73	100	100	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	27,44	37,34	47,24	57,14	NA	NA	47,24	57,14
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%			25,56	51,43	NA	NA	51,43	51,43
6	Angka Partisipasi Kasar									
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	81,4	81,5	81,6	81,7	83,01	81,5	81,6	81,7
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	111,67	100	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	115,59	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni :									
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90	90	90	97,66	90	90	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80	80	80	83,8	80	80	80
8	Angka Putus Sekolah:									
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,06	0,04	0,03
10	Angka Kelulusan:									
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	99,44	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,94	99,9	99,9	99,9
11	Angka Melanjutkan (AM):									
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	103,47	100	100	100
12	Fasilitas Pendidikan:									
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94	94,5	95,5	96	86,44	95	95,5	96
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99	99	99,1	99,2	92,95	99	99,1	99,2
13	Rasio Guru/Murid perkelas Rata -rata									
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
	a. Jenjang PAUD	%	98	98	98,2	98,4	72,87	98	98,2	98,4
	b. Jenjang SD/MI	%	96	97	98	99	96,43	97	98	99
	c. Jenjang SMP/MTs	%	98	98	99	100	96,95	98	99	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2021

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota

Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan, terutama yang terkait dengan pendidikan;
- b. Penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
 - Kinerja Sektor Pendidikan
Meskipun RLS Kota Semarang sudah mencapai 10,53 tahun namun dalam konteks pelaksanaan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka kewajiban pemerintah kota masih belum terpenuhi. Pemerintah kota masih harus mendorong agar 100% anak di Kota Semarang mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai tingkat SMA/MA/ sederajat (Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal).
 - Sarana Prasarana
Kuantitas dan kualitas sarana - prasarana yang terstandar secara tidak langsung ikut menunjang naiknya capaian bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kota Semarang yang mana belum mencapai 100% pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.
 - Tenaga Pendidik
Dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni maka diharapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan serta transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik akan lebih maksimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pendidikan adalah “Kualitas Sumber Daya Manusia baik pegawai maupun guru untuk mencapai pendidikan yang bermutu”.

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Keterbatasan jumlah guru ASN;
- Kurangnya kompetensi guru terkait teknologi informasi;
- Menurunnya pendidikan karakter dan munculnya masalah psikososial saat

dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dampak dari Belajar Dari Rumah (BDR);

- Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat yang secara substansi berbeda dengan standar kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka;
- Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mewujudkan proses PTMT dengan menggunakan *blended learning* dan *hybrid learning*.

b. Peluang:

- Mengangkat tenaga guru non ASN;
- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, bimbingan teknis, *In House Training* (IHT) dan pendampingan pelaksanaan program terkait;
- Menyiapkan guru dengan membentuk tim Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya penanganan menurunnya karakter dan psikososial;
- Penyesuaian terhadap kurikulum darurat mulai dari penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan dan evaluasinya;
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan PTMT dengan model *blended learning* dan *hybrid learning*.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

a. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas meliputi :

- Peningkatan kinerja sektor pendidikan;
- Tenaga pendidik;
- Sarana dan prasarana pendidikan.

b. Pengoptimalan kurikulum yang sudah dilaksanakan dan kurikulum adaptasi yang dikembangkan karena situasi pandemi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKP Kota Semarang Tahun 2023

Penyusunan RKP Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke-dua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKP Kota Semarang Tahun 2023 adalah

“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2 : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4 : Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi

- 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas

- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

- 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum

- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan manajemen risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Kompetitif dan Produktif”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kota Semarang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANGDIK / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	82,40-82,80	82,80-83,20	83,20-83,60	83,60-84,00	83,05	83,05 -83,20	83,20-83,60	83,60-84,00
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,53	10,55	10,57	10,59	10,53	10,55	10,57	10,59
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,52	15,54	15,56	15,58	15,52	15,54	15,56	15,58
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	85,73	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%								
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	83,3	100	100	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	67,62	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	%	100	100	100	100	11,73	100	100	100

	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
	a. Jenjang PAUD	%	98	98	98,2	98,4	72,87	98	98,2	98,4
	b. Jenjang SD/MI	%	96	97	98	99	96,43	97	98	99
	c. Jenjang SMP/MTs	%	98	98	99	100	96,95	98	99	100

Rancangan awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Pendidikan Tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan (Musrenbangdik) secara berjenjang pada tahun 2020, yaitu melalui usulan dari sekolah. Dari hasil pelaksanaan Musrenbangdik tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan untuk Peningkatan Kader/Tutor POS PAUD, Peningkatan Pemahaman Tentang Administrasi POS PAUD dan Pelatihan DAPODIK	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01 Lamper Kidul	Peningkatan Kader/Tutor POS PAUD tentang Administrasi	50 orang	Sudah masuk dalam anggaran dinas, baik di Bidang PAUD/PNF maupun di Subbag Perencanaan (terkait DAPODIK)
2	Alat Rebana	Gerung RT 02 RW 01 Karangmalang		1 paket	
3	Pengadaan Perlengkapan Kegiatan PAUD	Kel. Gondoriyo		5 PAUD	BOP PAUD
4	Alat Peraga Edukasi untuk PAUD	Kel. Gondoriyo		5 PAUD	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
5	Meja dan Kursi Pos Paud Bintang Utama	Jalan Palie Utama V B-125 RT 02 RW 12 Podorejo		15 paket	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
6	Meja dan Kursi untuk Pos PAUD	Beringin RT 000 RW 000 Bringin		66 set	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
7	Pengadaan Rak Buku	Beringin RT 000 RW 000 Bringin		4 buah	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
8	Meja dan Kursi Pos Paud	Jl. Sriwiodod Utara RT 02 RW 01 Purwoyoso		15 paket	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
9	Ape Ayunan	POS PAUD Tambakaji		2 paket	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
10	Balok	POS PAUD Tambakaji		3 paket	2026
11	Perosotan	POS PAUD Tambakaji		4 paket	
12	Sarpras PKB	BKB Tambakaji		5 paket	Bukan kewenangan Dinas Pendidikan
13	Perpustakaan Anak	Tambakaji		1 paket	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
14	Perpustakaan Untuk Warga	Kelurahan Wonosari RT 1 RW 8 Wonosari		2 paket	2026 Bisa diusulkan melalui Kanperpus, kecuali jika berupa TBM (taman bacaan masyarakat)
15	Ayunan	Wates		5 buah	Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
16	Prosotan	Wates		5 buah	2026 Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021
17	Jungkat-jungkit	Wates		5 buah	2026 Dapat mengusulkan melalui hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021

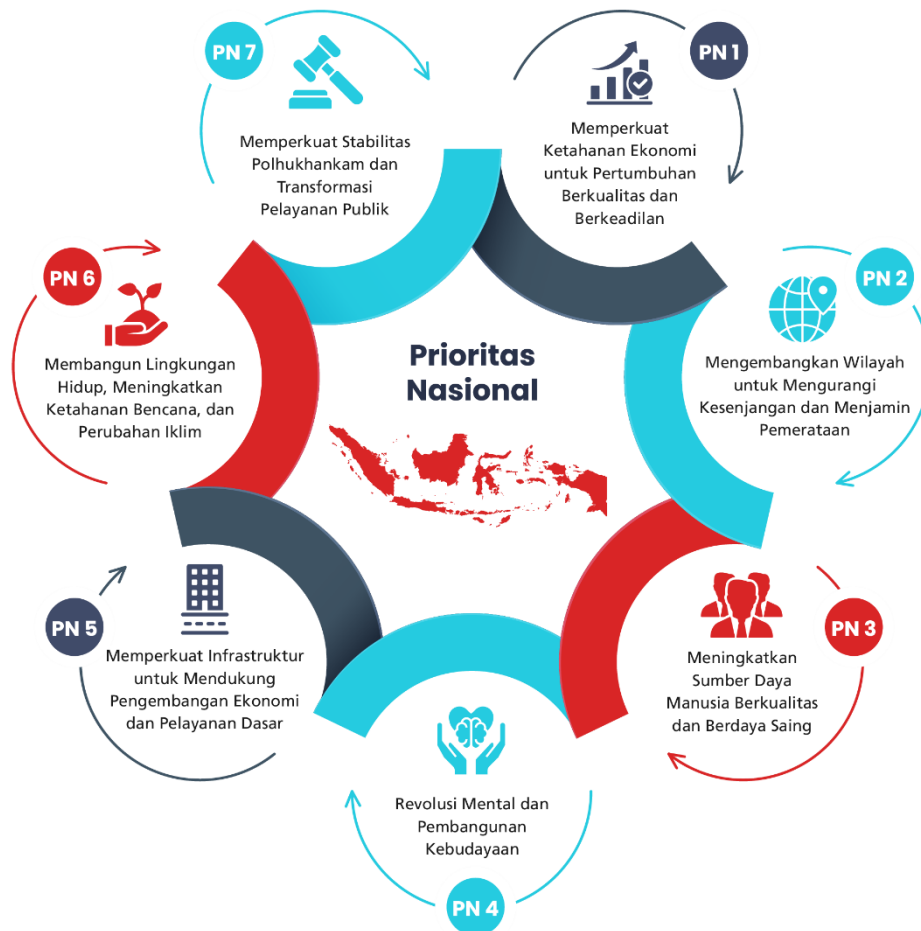
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:



Program Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan

- Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8 %
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali dengan target 2023 74,05-82,43 %
 - 3) Persentase penduduk miskin wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76 %
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter

- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun target pembangunan di bidang pendidikan yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% ;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro sebesar 7,5-8;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan tahun 2021 target nasional IPM telah telah terlampaui, sebesar 83,55%.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKPD Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;

- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pendidikan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas pendidikan Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Disparitas APL SMA/SMK/SLB sebesar 6,79 %;
- b. Persentase sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar sebesar 80,43 %;
- c. Rasio guru terhadap rombongan belajar pada SMA/SMK/SLB sebesar 0,08;
- d. Persentase guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademik sebesar 91,55 %;
- e. Persentase Jenis seni budaya yang terlayani sebesar 6,82 %

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul”

dengan indikator tujuan **“Angka Partisipasi Kasar (APK)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu **“1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah, 2. Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai AKIP;
- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS);
- c. Angka Partisipasi Murni (APM).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)		103,46	
	a. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,15	
	b. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)		80,15
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)		86,73

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pendidikan Kota Semarang bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (3 indikator).
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pendidikan di Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang, dan 4 program pelaksanaan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan pelaksanaan. Dari 9 kegiatan pelaksanaan tersebut, terdapat 3 kegiatan yang mengakomodir kegiatan pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang;

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.405.602.534.440 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp 852.616.360.440 untuk program dan kegiatan penunjang;
 - b. Rp 552.986.174.000 untuk program dan kegiatan pelaksanaan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN		Kota Semarang		766.297.863.750	APBD Kota Semarang	-		948.492.547.748
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Kota Semarang		766.297.863.750	APBD Kota Semarang	-		948.492.547.748
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	Kota Semarang	115.62%	92.137.657.887	APBD Kota Semarang	-	115.62%	72.310.685.748
		APK PAUD 5-6 tahun	Kota Semarang	85.87%		APBD Kota Semarang	-	85.87%	
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	Kota Semarang	8.00 lembaga		APBD Kota Semarang	-	8.00 lembaga	
		APK SD/MI	Kota Semarang	111.71%		APBD Kota Semarang	-	111.71%	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	100.00%	30.568.500.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	37.507.760.000
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	19.00 Ruang	2.184.417.000	APBD Kota Semarang	-	19.00 Ruang	4.000.000.000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	4.00 Unit	613.000.000	APBD Kota Semarang	-	4.00 Unit	800.000.000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Semarang	32.00 Ruang	7.332.144.000	APBD Kota Semarang	-	32.00 Ruang	4.500.000.000
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	4.00 Ruang	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	4.00 Ruang	400.000.000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	2.00 Ruang	200.439.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Ruang	400.000.000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Kota Semarang	5.00 Unit	1.050.000.000	APBD Kota Semarang	-	5.00 Unit	900.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Prasarana dan Utilitas Sekolah							
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	13.00 Unit	920.000.000	APBD Kota Semarang	-	13.00 Unit	1.200.000.000
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	48.00 Unit	500.000.000	APBD Kota Semarang	-	48.00 Unit	2.100.000.000
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	Kota Semarang	5555.00 set	600.000.000	APBD Kota Semarang	-	5555.00 set	897.760.000
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	Kota Semarang	8688.00 Siswa	14.051.300.000	APBD Kota Semarang	-	8688.00 Siswa	16.700.000.000
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	Kota Semarang	4727.00 Siswa		APBD Kota Semarang			
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	327.00 set	100.000.000	APBD Kota Semarang	-	327.00 set	1.760.000.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	Kota Semarang	28665.00 Siswa	295.300.000	APBD Kota Semarang	-	28665.00 Siswa	800.000.000
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	Kota Semarang	24.00 Dokumen	430.000.000	APBD Kota Semarang	-	24.00 Dokumen	1.200.000.000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	Kota Semarang	42.00 Lomba	596.800.000	APBD Kota Semarang	-	42.00 Lomba	900.000.000
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	319.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	200.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	941.500.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	450.000.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	234.600.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	300.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	100.00 %	49.108.040.000	APBD Kota Semarang	-	100.00 %	22.186.385.748
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	1.00 Unit	20.000.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Unit	1.500.000.000
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	32.00 Ruang	11.405.000.000	APBD Kota Semarang	-	32.00 Ruang	3.000.000.000
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	1.00 Ruang	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Ruang	1.200.000.000
		Jumlah pengadaan sarpras	Kota Semarang	5.00 Unit		APBD Kota Semarang			
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kota Semarang	2.00 Ruang	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Ruang	150.000.000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	2.00 Ruang	550.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Ruang	1.000.000.000
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	1.00 Sekolah	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Sekolah	500.000.000
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	1.00 set	449.640.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 set	400.000.000
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	1120.00 set	225.000.000	APBD Kota Semarang	-	1120.00 set	223.938.000
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	Kota Semarang	5329.00 Siswa	13.209.300.000	APBD Kota Semarang	-	5329.00 Siswa	9.885.000.000
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	Kota Semarang	4670.00 Siswa		APBD Kota Semarang	-	4670.00 Siswa	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	1.00 Sekolah	250.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Sekolah	400.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	12.00 Kegiatan	897.700.000	APBD Kota Semarang	-	12.00 Kegiatan	1.200.000.000
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	Kota Semarang	10.00 Dokumen	500.000.000	APBD Kota Semarang	-	10.00 Dokumen	600.000.000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	Kota Semarang	14.00 Lomba	596.000.000	APBD Kota Semarang	-	14.00 Lomba	1.352.447.748
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	197.600.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	175.000.000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi Sekolah	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	148.200.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	300.000.000
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	179.600.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	300.000.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Semarang	100.00%	11.150.240.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	10.534.420.000
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	3.00 Unit	6.150.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Unit	2.000.000.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	4.00 Unit	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	4.00 Unit	700.000.000
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	2.00 Unit	295.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Unit	400.000.000
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	2.00 Unit	280.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Unit	400.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	2.00 Unit	205.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Unit	130.000.000
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	14.00 Sekolah	245.000.000	APBD Kota Semarang	-	14.00 Sekolah	800.000.000
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	Kota Semarang	860.00 Siswa	100.000.000	APBD Kota Semarang	-	860.00 Siswa	134.420.000
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	Kota Semarang	1795.00 Siswa	2.548.040.000	APBD Kota Semarang	-	1795.00 Siswa	3.000.000.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	14.00 Sekolah	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	14.00 Sekolah	640.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	5.00 Kegiatan	333.200.000	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	1.250.000.000
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	Kota Semarang	12.00 Dokumen	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	12.00 Dokumen	600.000.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	150.000.000
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	194.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	330.000.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	100.00%	1.310.877.887	APBD Kota Semarang	-	100.00%	2.085.120.000
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	1.00 Unit	700.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Unit	200.000.000
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Kota Semarang	199.00 Siswa	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	199.00 Siswa	57.120.000
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	61.400.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	190.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Didik Nonformal/ Kesetaraan							
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	1.00 Setpen	91.877.887	APBD Kota Semarang	-	1.00 Setpen	60.000.000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	166.600.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	1.200.000.000
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	Kota Semarang	3.00 Kegiatan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	125.000.000
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	166.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	250.000.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	Kota Semarang	100.00%	1.244.670.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	3.975.000.000
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	100.00%		APBD Kota Semarang	-	100.00%	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	Kota Semarang	100.00%	841.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	3.600.000.000
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	197.600.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	800.000.000
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	147.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	800.000.000
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	800.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	296.400.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	1.200.000.000
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	Kota Semarang	100.00%	403.670.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	375.000.000
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	1.00 Kegiatan	183.200.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	125.000.000
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	5.00 Kegiatan	70.470.000	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	100.000.000
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	1.00 Kegiatan	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	150.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	Kota Semarang	89.50%	69.977.129.144	APBD Kota Semarang	-	89.50%	152.356.400.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	100.00%	69.977.129.144	APBD Kota Semarang	-	100.00%	152.356.400.000
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	Kota Semarang	5387.00 Orang	69.977.129.144	APBD Kota Semarang	-	5387.00 Orang	152.356.400.000
		Jumlah non ASN	Kota Semarang	2395.00 Orang		APBD Kota Semarang	-	2395.00 Orang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	2.00 Kegiatan	3.348.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 Kegiatan	350.000.000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	Kota Semarang	100.00%	641.600.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	1.200.000.000
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	Kota Semarang	100.00%		APBD Kota Semarang	-	100.00%	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	100.00%	278.600.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	400.000.000
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	Kota Semarang	4.00 Sekolah	133.200.000	APBD Kota Semarang	-	4.00 Sekolah	200.000.000
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	Kota Semarang	1.00 Sekolah	145.400.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 Sekolah	200.000.000
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	100.00%	363.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	800.000.000
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	Kota Semarang	290.00 Lembaga	142.000.000	APBD Kota Semarang	-	290.00 Lembaga	250.000.000
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	Kota Semarang	200.00 Lembaga	93.600.000	APBD Kota Semarang	-	200.00 Lembaga	150.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Diselenggarakan oleh Masyarakat								
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	Kota Semarang	4.00 Kegiatan	127.400.000	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	400.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100.00%	602.296.806.719	APBD Kota Semarang	-	100.00%	718.650.462.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100.00%		APBD Kota Semarang	-	100.00%	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Kota Semarang	100.00%		APBD Kota Semarang	-	100.00%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	Kota Semarang	100.00%	78.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	1.479.000.000
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	Kota Semarang	100.00%		APBD Kota Semarang	-	100.00%	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	Kota Semarang	17.00 dok	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	17.00 dok	1.350.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	Kota Semarang	1.00 dok	15.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1.00 dok	15.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Kota Semarang	1.00 dok	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1.00 dok	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	Kota Semarang	12.00 dok	8.000.000	APBD Kota Semarang	-	12.00 dok	21.500.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	Kota Semarang	3.00 dok	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100.00%	580.695.284.805	APBD Kota Semarang	-	100.00%	687.856.416.880
		Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100.00%		APBD Kota Semarang	-	100.00%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	100.00%	575.428.004.405	APBD Kota Semarang	-	100.00%	681.313.416.880
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100.00%	5.239.880.400	APBD Kota Semarang	-	100.00%	6.500.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	1.00 dok	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	1.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	Kota Semarang	2.00 dok	17.400.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 dok	21.500.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	100.00%	44.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	34.000.000
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	2.00 dok	44.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.00 dok	34.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	Kota Semarang	100.00%	2.343.560.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	5.973.045.120
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	Kota Semarang	100.00%	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	300.000.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	100.00%	250.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	328.474.886
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	Kota Semarang	100.00%	250.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	450.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	100.00%	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	539.570.234
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	13000.00 Orang	125.568.000	APBD Kota Semarang	-	13000.00 Orang	805.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Semarang	500.00 Orang	892.992.000	APBD Kota Semarang	-	500.00 Orang	1.150.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	100.00%	325.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	2.400.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	100.00%	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	800.000.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	100.00%	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	800.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	Kota Semarang	100.00%	16.957.115.427	APBD Kota Semarang	-	100.00%	19.350.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	100.00%	16.099.825.427	APBD Kota Semarang	-	100.00%	18.800.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	100.00%	857.290.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	550.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	Kota Semarang	100.00%	1.878.846.487	APBD Kota Semarang	-	100.00%	3.158.000.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1.00 Unit	194.863.630	APBD Kota Semarang	-	1.00 Unit	320.000.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Semarang	124.00 Unit	903.982.857	APBD Kota Semarang	-	124.00 Unit	960.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	Kota Semarang	3.00 Unit	400.000.000	APBD Kota Semarang	-	3.00 Unit	500.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	100.00%	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	1.178.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kota Semarang	100.00%	80.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00%	200.000.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang

Rencana program Dinas Pendidikan ada 5 Program, dengan program 1 ada 4 kegiatan dengan indikatornya. Program 2 ada 2 kegiatan dengan indikatornya. Program 3 ada 2 kegiatan dengan indikatornya. Program 4 ada 1 kegiatan dengan indikatornya. Dan, program 5 ada 2 kegiatan dengan indikatornya. Untuk perkiraan pagu indikatif tahun 2024 (n+1) sebesar Rp. 948.492.527.748

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pendidikan padaprinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan;
3. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pendidikan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

2. DINAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

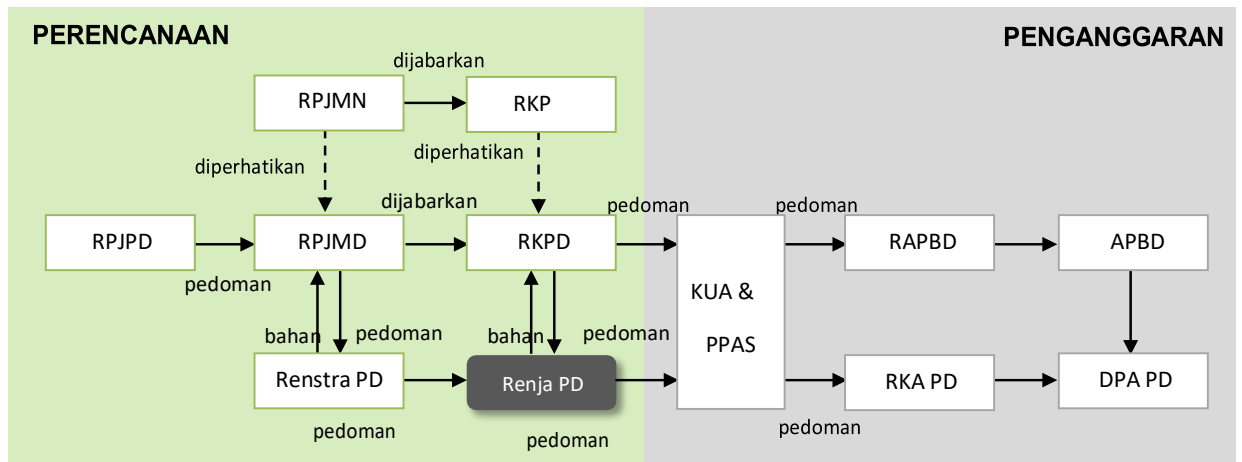
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah Dok perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan Dok perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dok perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar Dok perencanaan yang dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dok terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar Dok perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

- tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan DINAS KESEHATAN Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DINAS KESEHATAN Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Dok rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DINAS KESEHATAN Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai Dok perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINAS KESEHATAN Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Kesehatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp.590.502.827.055 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.546.270.403.687 atau sebesar 92,51%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dok		11 Dok	11 Dok	100%	11 Dok	11 Dok	100%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Renja renstra, masterplan kesehatan	4 Dok		4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	jumlah Dok RKA	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dok RKA Perubahan	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA Perubahan	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	jumlah Dok LKPJ, LKJiP, SPM	3 Dok		3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok		4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	4 unit		100%	100%	100%	4 unit	4 unit	100%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket		5 paket	5 paket	100%	7 paket	7 paket	70%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit		6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 unit		150 unit	150 unit	100%	150 unit	150 unit	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
		kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase penanganan stunting	50%		40%	40%	100%	48%	48%	96%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%		85%	85%	100%	85%	85%	85%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan	83 fasyank		60 fasyank	60 fasyankes	100%	63 fasyankes	63 fasyank	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	proporsi strata posyandu	100%		38%	38%	100%	88%	88%	88%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Kesehatan Kota Semarang :
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan di akhir target renstra 2021-2016 kegiatan 1.02.01.2.07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya baru mencapai 5 paket atau 50%, akan tetapi untuk target 2021 sudah tercapai;
 - b) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan di akhir target renstra 2021-2016 kegiatan 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan indicator persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan baru mencapai 48%, akan tetapi untuk target 2021 sudah tercapai.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar 100% sesuai target renstra 2021-2016 100%;
 - b) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT sebesar 100% sesuai target renstra 2021-2016 100%;
 - c) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN sebesar 100% sesuai target renstra 2021-2016 100%;
 - d) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN sebesar 96% sesuai target renstra 2021-2016 96%;
 - e) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN sebesar 100% sesuai target renstra 2021-2016 100%;

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun
2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN WAJIB KESEHATAN	590.502.827.055	546.270.403.687	92,51	44.232.423.368
02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	279.215.732.634	252.584.440.545	90,46	26.631.292.089
2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.219.497.891	26.209.124.310	78,90	7.010.373.581
01.02	Pembangunan Puskesmas	6.396.116.525	1.020.075.149	15,95	5.376.041.376
01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.918.316.000	3.802.388.850	97,04	115.927.150
01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	266.728.460	254.456.000	95,40	12.272.460
01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	958.213.602	196.935.000	20,55	761.278.602
01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.943.248.551	2.877.534.535	97,77	65.714.016
01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.094.085.658	4.051.785.678	98,97	42.299.980
01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99.053.000	94.608.800	95,51	4.444.200
01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.808.177.251	5.375.332.028	92,55	432.845.223
01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.735.558.844	8.535.971.462	97,72	199.587.382
2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.350.376.208	218.129.364.577	91,90	19.221.011.631
02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.468.039.827	2.466.552.679	99,94	1.487.148
02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.123.817.579	725.043.358	64,52	398.774.221
02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	56.740.000	56.740.000	100,00	0
02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	579.475.250	579.475.250	100,00	0
02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	486.460.090	486.033.970	99,91	426.120
02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.500.000	4.500.000	100,00	0
02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	169.423.119	169.202.400	99,87	220.719
02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.113.500	15.250.000	94,64	863.500
02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.309.500	5.700.000	77,98	1.609.500
02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.365.000	17.645.000	96,08	720.000
02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	106.953.500	106.953.500	100,00	0
02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	69.953.500	67.253.500	96,14	2.700.000
02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	7.706.552.600	6.857.635.800	88,98	848.916.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				
02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	31.980.164.479	17.834.490.268	55,77	14.145.674.211
02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.428.493.203	2.254.917.019	92,85	173.576.184
02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	194.967.100	194.272.100	99,64	695.000
02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	680.649.857	657.287.438	96,57	23.362.419
02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	624.573.435	605.451.923	96,94	19.121.512
02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	21.125.000	19.325.000	91,48	1.800.000
02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.116.644.020	1.567.335.800	74,05	549.308.220
02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	36.031.100	36.031.100	100,00	0
02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.962.559.518	2.794.439.198	94,33	168.120.320
02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	167.706.531.601	167.670.770.719	99,98	35.760.882
02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.185.416.091	734.104.000	61,93	451.312.091
02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	192.630.920	192.597.740	99,98	33.180
02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.592.044.909	3.780.935.162	82,34	811.109.747
02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Laboratorium Kesehatan)	1.109.618.721	1.038.935.040	93,63	70.683.681
02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi)	1.129.326.200	1.074.892.269	95,18	54.433.931
02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	5.133.275.166	3.599.556.037	70,12	1.533.719.129
02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.940.000	3.420.000	69,23	1.520.000
02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	16.340.000	16.340.000	100,00	0
02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.421.341.423	2.277.126.173	94,04	144.215.250
2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.203.155.251	1.120.994.300	93,17	82.160.951
03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	109.637.543	90.723.340	82,75	18.914.203
03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.003.900.600	963.858.160	96,01	40.042.440
03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	89.617.108	66.412.800	74,11	23.204.308
2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.442.703.284	7.300.560.300	98,09	142.142.984
04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.330.000	9.330.000	100,00	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	571.099.000	501.403.500	87,80	69.695.500
04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.862.274.284	6.789.826.800	98,94	72.447.484
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	39.748.062.982	36.996.575.549	93,08	2.751.487.433
2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	39.151.163.835	36.743.770.540	93,85	2.407.393.295
02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	180.684.238	158.183.602	87,55	22.500.636
02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	38.940.806.871	36.555.952.446	93,88	2.384.854.425
02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.672.726	29.634.492	99,87	38.234
2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	596.899.147	252.805.009	42,35	344.094.138
03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	596.899.147	252.805.009	42,35	344.094.138
04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	417.757.525	298.245.698	71,39	119.511.827
2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	140.725.582	98.646.198	70,10	42.079.384
01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.201.380	92.021.198	76,56	28.180.182
01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.524.202	6.625.000	32,28	13.899.202
2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	123.881.943	99.979.500	80,71	23.902.443
03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	123.881.943	99.979.500	80,71	23.902.443
2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	153.150.000	99.620.000	65,05	53.530.000
06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan	153.150.000	99.620.000	65,05	53.530.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	666.797.103	649.875.486	97,46	16.921.617
2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.509.654	159.596.000	90,42	16.913.654
01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	176.509.654	159.596.000	90,42	16.913.654
2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	490.287.449	490.279.486	99,99	7.963
03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	490.287.449	490.279.486	99,99	7.963
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.454.476.811	254.805.703.622	94,21	15.648.773.189
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.951.055	12.086.000	20,50	46.865.055
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.382.455	866.000	62,64	516.455
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.484.745	1.500.000	27,35	3.984.745
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.187.418	2.588.000	49,89	2.599.418
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.225.382	3.273.000	17,96	14.952.382
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.225.382	2.359.000	12,94	15.866.382
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.445.673	1.500.000	14,36	8.945.673
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.103.198.356	184.481.911.441	96,03	7.621.286.915
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	191.491.237.956	183.944.431.441	96,06	7.546.806.515
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	603.600.000	534.680.000	88,58	68.920.000
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.786.800	-	0	2.786.800
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.786.800	2.300.000	82,53	486.800
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.786.800	500.000	17,94	2.286.800
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.519.128.151	584.422.040	38,47	934.706.111
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.877.172	12.181.000	48,96	12.696.172
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.161.029	49.376.296	87,92	6.784.733
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	343.540.000	182.629.796	53,16	160.910.204
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	1.689.000	56,30	1.311.000
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	854.315.000	120.176.948	14,07	734.138.052

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	237.234.950	218.369.000	92,05	18.865.950
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.521.822	236.575.000	84,33	43.946.822
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.521.822	236.575.000	84,33	43.946.822
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.884.689.976	1.493.540.000	79,25	391.149.976
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	1.095.000	10,95	8.905.000
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	674.264.976	508.192.463	75,37	166.072.513
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.750.000	-	0	37.750.000!
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.162.675.000	984.253.321	84,65	178.421.679
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.681.383.600	2.486.540.249	67,54	1.194.843.351
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.350.000	50.976.910	23,78	163.373.090
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.337.830.000	1.516.740.547	64,88	821.089.453
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.128.600	148.966.094	66,76	74.162.506
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	830.425.000	753.681.000	90,76	76.744.000
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.650.000	16.175.698	21,38	59.474.302
2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	70.926.603.851	65.694.224.579	92,62	5.232.379.272
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Poncol)	1.500.000.000	1.430.932.913	95,40	69.067.087
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Miroto)	1.342.172.038	1.312.677.873	97,80	29.494.165
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bandarharjo)	2.336.176.000	2.189.401.450	93,72	146.774.550
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bulu Lor)	1.828.618.560	1.709.020.482	93,46	119.598.078
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Halmahera)	1.887.500.000	1.772.688.524	93,92	114.811.476
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bugangan)	1.025.512.593	1.005.986.792	98,10	19.525.801
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karangdoro)	2.116.500.000	2.108.854.630	99,64	7.645.370
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandanaran)	2.104.822.142	2.064.371.687	98,08	40.450.455
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lamper Tengah)	1.512.027.896	1.461.235.341	96,64	50.792.555
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karangayu)	1.215.697.348	1.171.392.515	96,36	44.304.833
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lebdosari)	1.484.012.174	1.441.100.005	97,11	42.912.169
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manyaran)	1.399.805.685	1.331.616.960	95,13	68.188.725
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Krobokan)	1.358.427.756	1.238.230.178	91,15	120.197.578
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ngemplak Simongan)	1.095.214.642	1.084.571.181	99,03	10.643.461
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayamsari)	3.139.599.989	2.761.716.771	87,96	377.883.218

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Candilama)	1.956.935.420	1.751.941.761	89,52	204.993.659
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kagok)	1.500.000.000	1.429.680.847	95,31	70.319.153
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pegandan)	1.710.000.000	1.694.420.244	99,09	15.579.756
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Genuk)	1.800.000.000	1.788.349.905	99,35	11.650.095
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bangetayu)	2.835.421.000	2.686.956.929	94,76	148.464.071
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tlogosari Wetan)	3.047.508.921	2.488.137.890	81,64	559.371.031
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tlogosari Kulon)	2.765.046.106	2.642.588.465	94,76	122.457.641
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kedungmundu)	3.993.598.521	3.600.342.234	90,15	393.256.287
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rowosari)	2.722.440.200	2.412.390.610	88,61	310.049.590
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ngesrep)	1.773.640.342	1.633.525.535	92,10	140.114.807
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padangsari)	1.938.787.000	1.914.647.151	98,75	24.139.849
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sronдол)	1.563.980.937	1.548.458.648	99,01	15.522.289
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Puduk Payung)	1.431.590.483	1.290.452.052	90,14	141.138.431
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gunungpati)	2.971.739.960	2.760.376.780	92,89	211.363.180
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mijen)	2.644.190.144	2.137.893.781	80,85	506.296.363
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karangmalang)	1.304.102.181	1.288.491.867	98,80	15.610.314
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tambakaji)	1.406.189.320	1.404.421.867	99,87	1.767.453
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Purwoyoso)	1.045.537.709	1.041.394.465	99,60	4.143.244
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ngaliyan)	2.402.095.035	2.197.459.891	91,48	204.635.144
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mangkang)	1.784.154.749	1.699.553.260	95,26	84.601.489
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karanganyar)	1.036.285.000	1.031.370.000	99,53	4.915.000
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sekaran)	1.947.274.000	1.770.927.756	90,94	4.915.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan wajib kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang adalah sebesar Rp 590.502.827.055, Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 546.270.403.687, dengan sisa sebesar Rp 44.232.423.368, (7,49%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup [tahun]			77,26	77,38	77,40		77,51	77,51	
Sasaran : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (<i>accessible</i>), terjangkau (<i>affordable</i>), dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]			181 kasus	6,08	6,07		133 kasus	6,08	
	Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]			23 kasus	71,34	71,33		21 kasus	71,34	
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]				11,71	11,21			11,71	
Sasaran : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]				1,31	1,34			2,51	
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]			90%	100 %	100 %		90%	100 %	
Sasaran : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri				22,00 %	22,60 %			22,00 %	
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP				72,40	72,45			72,40	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup [tahun], target 2021 sebesar 77,26, dengan realisasi 2021 sebesar 77,51;
- b. Sasaran Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH] target di tahun 2021 adalah 181 kasus sedangkan realisasi sebesar 131 kasus.
 - 2) Indikator Angka Kematian Ibu [per 100.000 penduduk] target di tahun 2021 adalah 23 kasus sedangkan realisasi 21 kasus.
- c. Sasaran Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Persentase proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar belum dapat mencapai target 2021 sebesar 90%, sedangkan realisasi sebesar 90%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Ketersediaan Dok Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Renja	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tersedianya Dokumen RDPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersedianya Dokumen DPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tersedianya Dokumen DPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tersedianya Dokumen evaluasi seperti : LKJIP, SAKIP, LPPD, SPM, PUG, LKPJ		3	3	3		3	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan Dok perencanaan pembangunan serta Dok perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan Dok perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %. Begitu juga proyeksi untuk tahun 2022 dan 2023 adalah 100%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam Dok perencanaan, dalam hal ini Dok RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Usulan	Usulan			38	1				
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan			4	1				
3	Persentase Usulan yang %Terakomodir				10	100				

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 sebesar 100 %. Usulan bisa terakomodir mengenai sosialisasi dan pembinaan PMT (pembagian makanan tambahan) bagi posyandu di Kecamatan Pedurungan.

Disamping itu Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan produktifitas dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Pemerintah memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada warga miskin. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk kurun waktu 2022, yaitu sebagai berikut;

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
 - b. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas & RS
 - c. Pengadaan Alat Kesehatan

2. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
 - b. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Laboratorium Kesehatan
 - c. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Instalasi Farmasi
 - d. Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas
 - e. Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan
 - f. Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
 - g. Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - h. Pendistribusian Obat Dan Logistik
 - i. Pengembangan Kemitraan

3. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dan Kemitraan

4. Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin
 - b. Penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemi, Gangguan Akibat Kurangyodium
 - c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

5. Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
 - b. Penyehatan Lingkungan

6. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
 - b. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

7. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - a. Integrasi JamkesmasKot ke JKN, KIS
 - b. Pendampingan JamkesmasKot

8. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 - a. Pembangunan puskesmas pembantu

- b. Pengadaan sarana prasarana puskesmas
 - c. Rehab Sedang/Berat Puskesmas pembantu
 - d. Rehab Sedang/berat Puskesmas
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - a. Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita
 10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - a. Pendidikan Pelatihan Perawatan Kesehatan
 11. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
 12. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
 - b. Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan KB
 13. Informasi Kesehatan
 - a. Manajemen informasi kesehatan.
 14. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular
 - a. Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
 - b. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemic
 - c. Peningkatan Imunisasi
 - d. P2 PTM
 - e. Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang
 - f. Pelayanan Pengendalian Penyakit HIV AIDS dan IMS
 15. Peningkatan Pelayanan BLUD 37 Puskesmas

Disamping dirumuskan berbagai program utama seperti diatas, terdapat pula program penunjang yang membantu pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Program penunjang ini sebelum diberlakukannya Permendagri 59/2007 banyak dikenal sebagai kegiatan rutin bagi operasionalisasi sehari-hari organisasi. Adapun program penunjang adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan perlengkapan
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

- f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen listrik
 - i. Penyediaan bhn bacaan & peraturan
 - j. Penyediaan makanan minuman
 - k. Rakor & konsultasi luar daerah
 - l. Rakor & konsultasi dalam daerah
 - m. Penyelesaian pengelolaan administrasi
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung
 - d. Pengadaan peralatan gedung
 - e. Pengadaan mebelair
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan pelatihan formal
 - b. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan LKPJ SKPD
 - b. Penyusunan LAKIP
 - c. Penyusunan laporan capaian realisasi kinerja SKPD
 - d. Penyusunan laporan keuangan semester
 - e. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
 - f. Penyusunan Renja SKPD
 - g. Penyusunan RENSTRA SKPD
 - h. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan
 - i. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDOKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT											
Fokus Kesehatan											
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%			0,36%	0,37%			0,36%	0,37%	
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	%			84,38%	90,60%			84,38%	90,60%	
3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	99,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	99,00%	100%	100%	100%	98,00%	100%	100%	100%	
6	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	94,70%	100%	100%	100%	85,00%	100%	100%	100%	
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%	100%	100%	
8	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	
9	Persentase usia lansia yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	90%	100%	100%	100%	85,98%	100%	100%	100%	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	88,60	99%	100%	100%	
11	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	
13	Persentase orang terduga tuberculosis mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	34,17%	103%	100%	100%	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i> mendapatkan	%	100%	100%	100%	100%	98,16%	99,72%	100%	100%	

NO	INDOKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar										
15	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 KH	25 kasus	23 kasus	71,33	71,32	17 kasus	21 kasus	71,33	71,32	
16	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 KH	185 kasus	181 kasus	6,08	6,07	127 kasus	133 kasus	6,08	6,07	
17	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (AKABA)	%	7,81%	7,56%	6,90%	6,88%	7,07%	6,95%	6,90%	6,88%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa target rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk di tahun 2020 dan 2021 tidak ada dikarenakan adanya penyederhanaan indikator sesuai dengan renstra 2021-2026 sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 0,36% dan 0,37%. Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase rumah sakit rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi di tahun 2020 dan 2021 tidak ada dikarenakan indikator baru sesuai dengan renstra 2021-2026 sedangkan untuk tahun targetnya sebesar 84,38% 2022 dan 2023 90,60%. Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di tahun 2020 99,50% dan 2021 100% dengan realisasi 100% di kedua tahun tersebut. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di tahun 2020 99,50% dan 2021 100% dengan realisasi 100% di kedua tahun tersebut. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di tahun 2020 99% dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 98% dikarenakan pandemic covid-19 dan di tahun 2021 100%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar di tahun 2020 94,70% dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 85% dikarenakan pandemic covid-19 dan di tahun 2021 100%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 95,65% dikarenakan pandemic covid-19 dan di tahun 2021 100%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 100% dan di tahun 2021 98%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase usia lansia yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar di tahun 2020 90% dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 85,98% dikarenakan pandemic covid-19 dan di tahun 2021 100%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 dan 2021 100%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 dan 2021 100%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 100% dan 2021 98%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase orang terduga tuberculosis mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 34,17% dikarenakan pandemic covid-19 tetapi di tahun 2021 103%. sedangkan untuk tahun

2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Persentase orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus (HIV)* mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di tahun 2020 dan 2021 100% dengan realisasi di tahun 2020 98,16% dan di tahun 2021 99,72%. sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 targetnya sebesar 100%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020 25 kasus dan 2021 23 kasus dengan realisasi di tahun 2020 17 kasus dan di tahun 2021 21 kasus. sedangkan untuk tahun target 2022 sebesar 71,33 dan 2023 sebesar 71,32, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Angka kematian bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020 185 kasus dan 2021 181 kasus dengan realisasi di tahun 2020 127 kasus dan di tahun 2021 131 kasus. sedangkan untuk tahun target 2022 sebesar 6,08 dan 2023 sebesar 6,07, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (AKABA) di tahun 2020 7,81% dan 2021 7,56% dengan realisasi di tahun 2020 7,07% dan di tahun 2021 6,95%. sedangkan untuk tahun target 2022 sebesar 6,90% dan 2023 sebesar 6,88%, Proyeksi realisasi sama dengan target yang ditentukan di renstra 2021-2016.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan Program KIA
 1. Masih adanya Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang walaupun masih dibawah target;
 2. Masih adanya Kematian Bayi (AKB) di Kota Semarang walaupun masih dibawah target.
- b. Permasalahan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan
 1. Puskesmas Kota Semarang belum semuanya terakreditasi

2. FKTP Puskesmas belum maksimal sebagai fungsi UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
- c. Permasalahan tentang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular seperti DBD.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan Ibu dan Anak
- Adanya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan terutama kesehatan Ibu dan Anak
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit DBD
- Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas

b. Peluang:

- Adanya program pemerintah pusat dalam pemenuhan upaya kesehatan masyarakat yang mencakup pendampingan dan pelayanan terhadap Ibu hamil dan pasca melahirkan;
- Program KIE Kesehatan Ibu dan Anak dengan media online bisa efektif dikarenakan masyarakat secara umum sudah sadar akan perkembangan elektronik berbasis online;
- Program penyuluhan tentang PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas sangat disambut baik oleh masyarakat;
- 37 Puskesmas Kota Semarang semuanya berstatus BLUD yang artinya puskesmas bisa meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- Adanya program pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada semua Puskesmas dalam pengajuan akreditasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai

berikut:

Isu – isu strategis

- a. Angka Kematian Ibu (AKI);
- b. Angka Kematian Bayi (AKB);
- c. Pencegahan Penyakit Menular Demam Berdarah Dengue (DBD);
- d. Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada Dok RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi

- 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas DINAS KESEHATAN untuk

pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Dinas Kesehatan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan mendukung misi pertama, yaitu “Meingkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial”. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					378,496,560,319	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					378,496,560,319
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	289,271,714,331	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	289,271,714,331		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dok	39,396,080	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dok	39,396,080		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah Dok Renja rensta, masterplan kesehatan	4 Dok	6,108,800	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah Dok Renja rensta, masterplan kesehatan	4 Dok	6,108,800		
	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok RKA	1 Dok	8,188,500	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok RKA	1 Dok	8,188,500		
	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok RKA Perubahan	1 Dok	8,734,400	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok RKA Perubahan	1 Dok	8,734,400		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok DPA	1 Dok	2,940,820	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok DPA	1 Dok	2,940,820		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok DPA Perubahan	1 Dok	3,486,720	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	jumlah Dok DPA Perubahan	1 Dok	3,486,720		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	Kota Semarang	jumlah Dok LKPJ, LKJiP, SPM	3 Dok	9,936,840	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	Kota Semarang	jumlah Dok LKPJ, LKJiP, SPM	3 Dok	9,936,840		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	4 Dok	204,715,879,769	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	4 Dok	204,715,879,769		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	203,948,903,769	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	203,948,903,769		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	100%	756,860,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	100%	756,860,000		

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	3,372,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	3,372,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	3,372,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	3,372,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok	3,372,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok	3,372,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	2,779,648,725	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	2,779,648,725	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	23,091,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	23,091,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	67,954,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	67,954,800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	250,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	250,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	3,630,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	3,630,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100%	1,196,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100%	1,196,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	4 unit	1,238,972,925	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	4 unit	1,238,972,925	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	989,443,028	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	989,443,028	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket	989,443,028	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket	989,443,028	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3,868,971,484	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3,868,971,484	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	100%	12,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	100%	12,100,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1,066,674,384	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1,066,674,384	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	2,790,197,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	2,790,197,100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	3,874,411,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	3,874,411,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit	226,572,720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit	226,572,720	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 unit	2,038,703,580	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 unit	2,038,703,580	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	persentase perbaikan peralatan kantor	100%	1,000,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	persentase perbaikan peralatan kantor	100%	1,000,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	100%	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	100%	500,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	100%	109,135,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	100%	109,135,000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%	73,003,963,945	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%	73,003,963,945	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	100%	1,754,500,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	100%	1,754,500,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	100%	1,295,426,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	100%	1,295,426,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	100%	2,659,698,459	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	100%	2,659,698,459	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	100%	1,736,710,580	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	100%	1,736,710,580	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Bulu Lor					Puskesmas Bulu Lor					
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	100%	2,239,105,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	100%	2,239,105,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	100%	1,158,304,485	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	100%	1,158,304,485	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	100%	2,057,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	100%	2,057,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	100%	2,105,400,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	100%	2,105,400,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	100%	1,343,684,430	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	100%	1,343,684,430	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	100%	1,448,994,360	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	100%	1,448,994,360	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	100%	1,555,328,603	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	100%	1,555,328,603	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas manyaran	100%	1,279,916,488	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas manyaran	100%	1,279,916,488	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	100%	1,329,363,596	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	100%	1,329,363,596	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	100%	1,200,804,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	100%	1,200,804,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	100%	3,143,045,233	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	100%	3,143,045,233	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Gayamsari					Puskesmas Gayamsari					
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	100%	2,089,651,955	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	100%	2,089,651,955	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	100%	1,454,420,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	100%	1,454,420,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	100%	1,735,061,350	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	100%	1,735,061,350	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	100%	1,939,459,995	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	100%	1,939,459,995	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	100%	3,430,859,410	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	100%	3,430,859,410	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	100%	2,983,267,403	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	100%	2,983,267,403	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	100%	3,114,540,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	100%	3,114,540,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	100%	4,134,592,082	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	100%	4,134,592,082	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	100%	2,866,705,012	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	100%	2,866,705,012	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	100%	2,028,657,428	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	100%	2,028,657,428	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	100%	1,611,059,340	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	100%	1,611,059,340	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	1,676,781,057	Pelayanan dan Penunjang	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	1,676,781,057	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	BLUD Puskesmas Srandol		Puskesmas Srandol			Pelayanan BLUD Puskesmas Srandol		Puskesmas Srandol			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudakpayung	100%	1,374,560,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudakpayung	100%	1,374,560,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	100%	3,144,776,206	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	100%	3,144,776,206	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	100%	2,279,640,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	100%	2,279,640,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	100%	1,530,686,845	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	100%	1,530,686,845	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	100%	1,280,180,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	100%	1,280,180,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	100%	1,132,620,500	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	100%	1,132,620,500	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	100%	2,616,090,906	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	100%	2,616,090,906	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	100%	1,391,869,322	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	100%	1,391,869,322	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	100%	1,092,187,440	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	100%	1,092,187,440	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	100%	1,789,016,460	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Kota Semarang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	100%	1,789,016,460	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	88,575,474,788	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	88,575,474,788	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						KESEHATAN MASYARAKAT					
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	100%	20,678,594,236	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	100%	20,678,594,236	
	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	jumlah pembangunan rumah sakit	1 unit	4,300,000,000	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	jumlah pembangunan rumah sakit	1 unit	4,300,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	jumlah pustu menjadi puskesmas induk	2 Unit	1,400,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	jumlah pustu menjadi puskesmas induk	2 Unit	1,400,000,000	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	1 Unit	3,239,849,020	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	1 Unit	3,239,849,020	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	16 Paket	4,026,860,216	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	16 Paket	4,026,860,216	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Semarang	alat kesehatan yang terkalibrasi	100%	7,711,885,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Semarang	alat kesehatan yang terkalibrasi	100%	7,711,885,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	58,233,145,312	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	58,233,145,312	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	38,530,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	38,530,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	96,790,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	96,790,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	96,945,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	96,945,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	47,850,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	47,850,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	40,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	40,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	65,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	65,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Lanjut					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	65,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	65,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	65,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	65,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	65,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	65,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	192,817,609	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	192,817,609	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	263,817,850	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	263,817,850	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Semarang	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	100%	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Semarang	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	100%	15,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Semarang	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100%	1,400,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Semarang	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100%	1,400,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Prosentase penanganan stunting	50%	540,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Prosentase penanganan stunting	50%	540,800,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	15,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	83 fasyanke	65,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	83 fasyankes	65,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah kelurahan yang telah mengimplemantasikan kebijakan PHBS	95%	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah kelurahan yang telah mengimplemantasikan kebijakan PHBS	95%	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah puskesmas yang membina penyehatan tradisional	37 Puskesmas	24,750,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah puskesmas yang membina penyehatan tradisional	37 Puskesmas	24,750,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	persentase kelengkapan laporan W1, W2 dan C1	100%	80,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	persentase kelengkapan laporan W1, W2 dan C1	100%	80,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100%	45,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100%	45,000,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	515,511,688	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	515,511,688	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	100%	48,187,458,828	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	100%	48,187,458,828	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	cakupan rating kelurahan sehat	100%	1,420,136,021	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	cakupan rating kelurahan sehat	100%	1,420,136,021	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui layanan telemedicin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas		750,000,000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui layanan telemedicin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas		750,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	1,324,369,600	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	1,324,369,600	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	857,059,375	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	857,059,375	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	37 Puskesmas	1,227,771,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	37 Puskesmas	1,227,771,000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	jumlah kejadian KIPI	100%	10,000,000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	jumlah kejadian KIPI	100%	10,000,000	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%	248,060,000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%	248,060,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Kota Semarang	cakupan pelayanan PSC	100%	289,865,400	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Kota Semarang	cakupan pelayanan PSC	100%	289,865,400	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Darurat Terpadu (SPGDT)					Darurat Terpadu (SPGDT)					
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis	Kota Semarang		100%	47,182,941	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis	Kota Semarang		100%	47,182,941	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang			44,100,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang			44,100,000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Kota Semarang			34,330,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Kota Semarang			34,330,000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	1,671,263,230	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	1,671,263,230	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	238,554,420	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	238,554,420	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehataan	100%	906,513,380	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehataan	100%	906,513,380	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Semarang	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	100%	526,195,430	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Semarang	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	100%	526,195,430	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	7,992,472,010	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	7,992,472,010	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	100%	9,900,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	100%	9,900,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	70%	5,044,962,610	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	70%	5,044,962,610	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	100%	2,937,609,400	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	100%	2,937,609,400	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	2,937,609,400	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	2,937,609,400	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	DAYA MANUSIA KESEHATAN					SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMk	100%	167,698,100	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMk	100%	167,698,100	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	rasio dokter umum	2.11 per 1000 penduduk	21,300,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	rasio dokter umum	2.11 per 1000 penduduk	21,300,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMk di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	59,671,200	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMk di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	59,671,200	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	persentase pembinaan dan pengawasan SDMk untuk puskesmas dan RS	100%	86,726,900	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	persentase pembinaan dan pengawasan SDMk untuk puskesmas dan RS	100%	86,726,900	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDMk yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	126,223,100	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDMk yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	126,223,100	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	2 kegiatan	126,223,100	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	2 kegiatan	126,223,100	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	250,000,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	250,000,000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100%	74,141,530	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100%	74,141,530	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	Kota Semarang	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	100%	74,141,530	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Kota Semarang	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	100%	74,141,530	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	109,139,230	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	109,139,230	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	100%	109,139,230	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	100%	109,139,230	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	66,719,240	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	66,719,240	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100%	66,719,240	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100%	66,719,240	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	105,450,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	105,450,000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	70,450,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	70,450,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring	100%	70,450,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring	100%	70,450,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	35,000,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	35,000,000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	proporsi strata posyandu	100%	35,000,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	proporsi strata posyandu	100%	35,000,000	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kesehatan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi dan Pembinaan PMT bagi Posyandu	Pedurungan			Dapat diakomodir

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, antara lain:

- 1. Melakukan koordinasi dengan semua lintas sector berkaitan dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Semarang untuk melakukan pemantauan dan juga pemberantasan jentik nyamuk (PjN) secara serentak di seluruh Kota Semarang. Selain pengasapan atau fogging.**

Tanggapan:

Dinas kesehatan telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor melalui POKJANAL DBD Kota Semarang. Selain itu juga telah dilakukan pembuatan Surat Edaran Walikota No. B/6228/443.42/XII/2021 mengenai Kewaspadaan peningkatan kasus Dengue. Dinas Kesehatan juga telah membuat Surat Edaran Sekda No. 443.42/338 mengenai kewaspadaan

infeksi dengue melalui pelaksanaan pemantauan jentik nyamuk (PJN) di seluruh OPD yang ada di Kota Semarang. Seluruh kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

- 2. Program vaksinasi untuk masyarakat juga minta lebih diintensifkan dengan kewajiban vaksin diberikan pada usia diatas 50 tahun dan anak-anak usia sekolah, karena sekarang ini kewajiban pada masyarakat berusia lansia banyak yang tidak berjalan optimal karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat lansia banyak yang takut vaksin dan banyak faktor kesehatannya sudah menurun dsb. Oleh karena itu, pemerintah kota semarang untuk bisa menurunkan batasan usia vaksin pada masyarakat, minimal bisa diusulkan kepada gugus depan penanganan covid-19 ini agar program vaksin covid 19 lebih berjalan efektif.**

Tanggapan :

Pelaksanaan Vaksin Covid-19 sampai saat ini dr Dinas Kesehatan Kota Semarang tetap dilakukan setiap harinya baik oleh Puskesmas dan RS layanan vaksinasi Covid-19.

Untuk sentra vaksin saat ini masih ada di tentrem mall, Poltekkes Semarang dan Rumah Dinas Walikota yg melayani 24 jam selama 7 hari.

Selain itu untuk menggerakkan masyarakat untuk booster dilakukan koordinasi lintas sektor beserta pemangku wilayah untuk layanan door to door dan juga layanan vaksinasi di tingkat RW serta kelurahan.

Koordinasi linsek juga kita lakukan dalam kolaborasi event dimasyarakat, baik yg berhubungan dengan hiburan ataupun dengan kegiatan social

Untuk capaian layanan vaksinasi kota Semarang per 14 September 2022 sebanyak 3.918.487 dengan rincian :

Dosis 1 : 1.655.527

Dosis 2 : 1.514.220

Dosis 3 : 735.324

Dosis 4 : 13.416

- 3. Perlu terus mengedukasi masyarakat perihal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan dan keluarga.**

Tanggapan :

Mengadakan kegiatan Edukasi kepada Masyarakat melalui kegiatan

“Lawangsewu” Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu yang di lakukan pada :

- 37 Puskesmas Se Kota Semarang dgn dukungan 42 Orang

- Di TTU yang ada di Kota Semarang setiap 2 Minggu Sekali Edukasi melalui Media Elektronik dan Media KIE

4. Peningkatan kualitas kesehatan bagi warga tidak mampu dan pada program kematian ibu hamil yang akan melahirkan di wilayah Tanggungrejo, Tambakrejo, dan Gayamsari.

Tanggapan :

Dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), upaya yang telah dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Edukasi kepada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan deteksi dini tanda bahaya kehamilan
2. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan
3. Pemeriksaan ANC sesuai standart
4. Penunjukan Puskesmas PONEK (Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan RS PONEK (Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). Di wilayah Kecamatan Gayamsari terdapat RS PW Citarum, RSWN, RS PW Dr. Cipto
5. Pengajuan UHC bagi ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan
6. RAISA (Rawat ibu bersalin secara GRATIS)

a. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan demikian diharapkan bisa menekan keberadaan penyakit non infeksius atau penyakit tidak menular yang memang harus diwaspadai.

Tanggapan :

Mengadakan kegiatan Edukasi Germas Masyarakat melalui kegiatan

1. "Lawangsewu" Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu
2. Melakukan Kegiatan Kesorga (Kesehatan Olah Raga) di 37 Puskesmas dengan meliputi kelompok kelompok Kebugaran olah raga yang ada di wilayah 37 Puskesmas

Gemar Makan Buah dan sayur Mengadakan kegiatan Edukasi kepada Masyarakat melalui kegiatan "Lawangsewu"

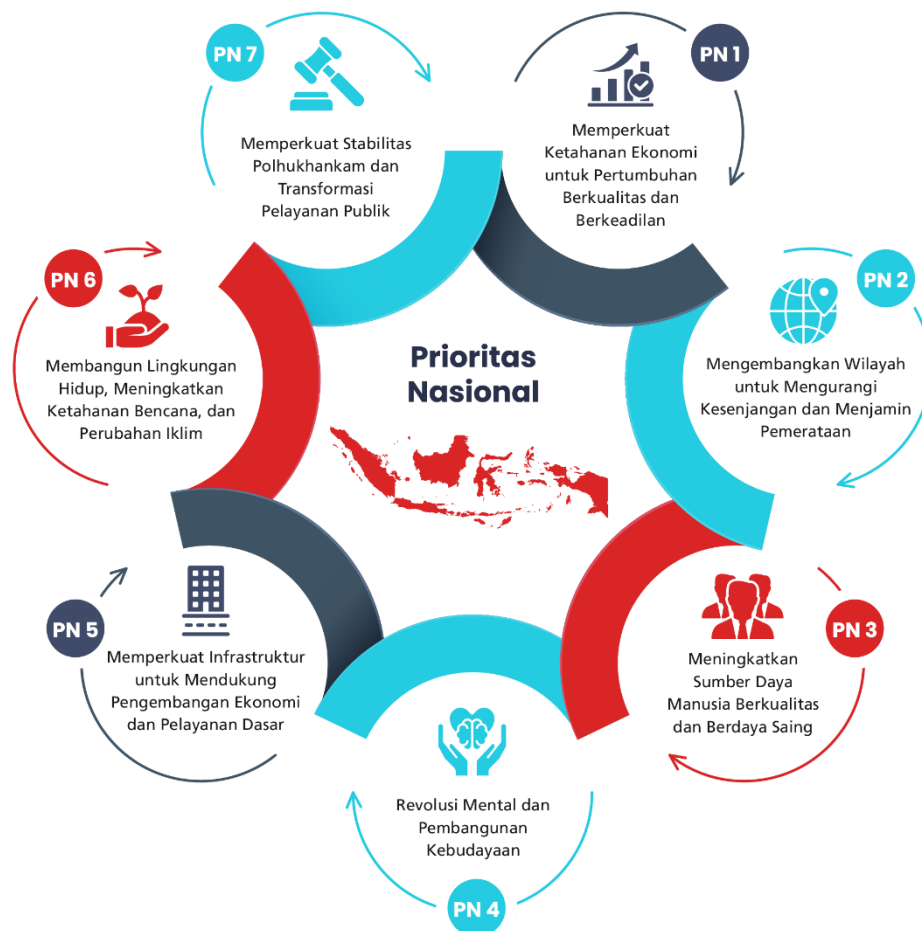
Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan

- Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,

- Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro

7,5-8;

- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan Dok RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Dok RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Kesehatan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Dok perencanaan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target

pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan”,

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan bidang kesehatan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu;
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya Kesehatan;
3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas
Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,40
SASARAN : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (<i>accessible</i>), terjangkau (<i>affordable</i>), dan bermutu	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6,07
	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	71,33
	Angka Morbiditas	Per 1.000 pddk	11,21
SASARAN : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 1.000 pddk	1,34
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	Persentase	100
Sasaran : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktifmandiri	Persentase	22,60
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kesehatan bertugas “Aspek Kesehatan Masyarakat” dengan 17 indikator. Namun secara khusus, Dinas Kesehatan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Angka Harapan Hidup”** dan indikator sasaran “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan”;
3. Keresasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang, dan 1 program pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada

tahun 2023 adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 17 kegiatan penunjang, dan 1 kegiatan pembangunan. Kegiatan tersebut meliputi 1 unit Pembangunan Puskesmas, 2 unit Rehabilitas Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Induk dan 1 unit Puskesmas yang direhabilitasi.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 378.496.560.319, yang bersumber dari dana APBD Kota dan pendapatan BLUD, dengan perincian:
 - a. Rp. 369.556.711.299 untuk program dan kegiatan penunjang.
 - b. Rp. 8.939.849.020 untuk program dan kegiatan pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				378,496,560,319				378,496,560,319
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	Kota Semarang	100 %	289,271,714,331			100 %	289,271,714,331
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	Kota Semarang	11 Dok	39,396,080			11 Dok	39,396,080
5.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dok Renja rensta, masterplan kesehatan	Kota Semarang	4 Dok	6,108,800	Pendapatan Asli Daerah		4 Dok	6,108,800
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	jumlah Dok RKA	Kota Semarang	1 Dok	8,188,500	Pendapatan Asli Daerah		1 Dok	8,188,500
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dok RKA Perubahan	Kota Semarang	1 Dok	8,734,400	Pendapatan Asli Daerah		1 Dok	8,734,400
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA	Kota Semarang	1 Dok	2,940,820	Pendapatan Asli Daerah		1 Dok	2,940,820
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA Perubahan	Kota Semarang	1 Dok	3,486,720	Pendapatan Asli Daerah		1 Dok	3,486,720
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	jumlah Dok LKPJ, LKJiP, SPM	Kota Semarang	3 Dok	9,936,840	Pendapatan Asli Daerah		3 Dok	9,936,840
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	Kota Semarang	4 Dok	204,715,879,769			4 Dok	204,715,879,769
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	100%	203,948,903,769	Pendapatan Asli Daerah		100%	203,948,903,769
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	Kota Semarang	100%	756,860,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	756,860,000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Kota Semarang	1 Dok	3,372,000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dok	3,372,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	2 Dok	3,372,000	Pendapatan Asli Daerah		2 Dok	3,372,000
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 Dok	3,372,000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dok	3,372,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%	2,779,648,725			100%	2,779,648,725
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	Kota Semarang	100%	23,091,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	23,091,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	Kota Semarang	100%	67,954,800	Pendapatan Asli Daerah		100%	67,954,800
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Semarang	100%	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	250,000,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	100%	3,630,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	3,630,000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	Kota Semarang	100%	1,196,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	1,196,000,000
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	Kota Semarang	4 unit	1,238,972,925	Pendapatan Asli Daerah		4 unit	1,238,972,925
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	989,443,028			100%	989,443,028
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor	Kota Semarang	10 paket	989,443,028	Pendapatan Asli Daerah		10 paket	989,443,028
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	3,868,971,484			100%	3,868,971,484
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	Kota Semarang	100%	12,100,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	12,100,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	100%	1,066,674,384	Pendapatan Asli Daerah		100%	1,066,674,384
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	100%	2,790,197,100	Pendapatan Asli Daerah		100%	2,790,197,100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	Kota Semarang	100%	3,874,411,300			100%	3,874,411,300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	Kota Semarang	6 unit	226,572,720	Pendapatan Asli Daerah		6 unit	226,572,720
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kota Semarang	100 unit	2,038,703,580	Pendapatan Asli Daerah		100 unit	2,038,703,580
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase perbaikan peralatan kantor	Kota Semarang	100%	1,000,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	1,000,000,000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	Kota Semarang	100%	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	500,000,000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	Kota Semarang	100%	109,135,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	109,135,000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	Kota Semarang	100%	73,003,963,945			100%	73,003,963,945
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Kota Semarang	100%	1,754,500,000	Pendapatan BLUD		100%	1,754,500,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Kota Semarang	100%	1,295,426,000	Pendapatan BLUD		100%	1,295,426,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	Kota Semarang	100%	2,659,698,459	Pendapatan BLUD		100%	2,659,698,459
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu Lor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	Kota Semarang	100%	1,736,710,580	Pendapatan BLUD		100%	1,736,710,580
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Kota Semarang	100%	2,239,105,000	Pendapatan BLUD		100%	2,239,105,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Kota Semarang	100%	1,158,304,485	Pendapatan BLUD		100%	1,158,304,485
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Kota Semarang	100%	2,057,000,000	Pendapatan BLUD		100%	2,057,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Kota Semarang	100%	2,105,400,000	Pendapatan BLUD		100%	2,105,400,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Kota Semarang	100%	1,343,684,430	Pendapatan BLUD		100%	1,343,684,430
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Kota Semarang	100%	1,448,994,360	Pendapatan BLUD		100%	1,448,994,360
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Kota Semarang	100%	1,555,328,603	Pendapatan BLUD		100%	1,555,328,603
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas manyaran	Kota Semarang	100%	1,279,916,488	Pendapatan BLUD		100%	1,279,916,488
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Kota Semarang	100%	1,329,363,596	Pendapatan BLUD		100%	1,329,363,596
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	Kota Semarang	100%	1,200,804,000	Pendapatan BLUD		100%	1,200,804,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Kota Semarang	100%	3,143,045,233	Pendapatan BLUD		100%	3,143,045,233
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Kota Semarang	100%	2,089,651,955	Pendapatan BLUD		100%	2,089,651,955
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Kota Semarang	100%	1,454,420,000	Pendapatan BLUD		100%	1,454,420,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Kota Semarang	100%	1,735,061,350	Pendapatan BLUD		100%	1,735,061,350
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Kota Semarang	100%	1,939,459,995	Pendapatan BLUD		100%	1,939,459,995
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Kota Semarang	100%	3,430,859,410	Pendapatan BLUD		100%	3,430,859,410
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Kota Semarang	100%	2,983,267,403	Pendapatan BLUD		100%	2,983,267,403
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Kota Semarang	100%	3,114,540,000	Pendapatan BLUD		100%	3,114,540,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Kota Semarang	100%	4,134,592,082	Pendapatan BLUD		100%	4,134,592,082
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Kota Semarang	100%	2,866,705,012	Pendapatan BLUD		100%	2,866,705,012
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Kota Semarang	100%	2,028,657,428	Pendapatan BLUD		100%	2,028,657,428
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Kota Semarang	100%	1,611,059,340	Pendapatan BLUD		100%	1,611,059,340
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srandol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srandol	Kota Semarang	100%	1,676,781,057	Pendapatan BLUD		100%	1,676,781,057
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Kota Semarang	100%	1,374,560,000	Pendapatan BLUD		100%	1,374,560,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Kota Semarang	100%	3,144,776,206	Pendapatan BLUD		100%	3,144,776,206
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Kota Semarang	100%	2,279,640,000	Pendapatan BLUD		100%	2,279,640,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Kota Semarang	100%	1,530,686,845	Pendapatan BLUD		100%	1,530,686,845
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Kota Semarang	100%	1,280,180,000	Pendapatan BLUD		100%	1,280,180,000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Kota Semarang	100%	1,132,620,500	Pendapatan BLUD		100%	1,132,620,500
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Kota Semarang	100%	2,616,090,906	Pendapatan BLUD		100%	2,616,090,906
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Kota Semarang	100%	1,391,869,322	Pendapatan BLUD		100%	1,391,869,322
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Kota Semarang	100%	1,092,187,440	Pendapatan BLUD		100%	1,092,187,440
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Kota Semarang	100%	1,789,016,460	Pendapatan BLUD		100%	1,789,016,460

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	88,575,474,788			100%	88,575,474,788
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	Kota Semarang	100%	20,678,594,236			100%	20,678,594,236
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	jumlah pembangunan rumah sakit	Kota Semarang	1 unit	4,300,000,000	Pendapatan Asli Daerah		1 unit	4,300,000,000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah pustu menjadi puskesmas induk	Kota Semarang	2 Unit	1,400,000,000	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	1,400,000,000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	3,239,849,020	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	3,239,849,020
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Semarang	16 Paket	4,026,860,216	Pendapatan Asli Daerah		16 Paket	4,026,860,216
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	alat kesehatan yang terkalibrasi	Kota Semarang	100%	7,711,885,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	7,711,885,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Kota Semarang	100%	58,233,145,312			100%	58,233,145,312
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kota Semarang	100%	38,530,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	38,530,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kota Semarang	100%	96,790,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	96,790,000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kota Semarang	100%	96,945,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	96,945,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kota Semarang	100%	47,850,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	47,850,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	40,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	40,000,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	65,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	65,000,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	Kota Semarang	100%	35,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	35,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		standar							
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	65,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	65,000,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	65,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	65,000,000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kota Semarang	100%	65,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	65,000,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kota Semarang	100%	192,817,609	Pendapatan Asli Daerah		100%	192,817,609
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Kota Semarang	100%	263,817,850	Pendapatan Asli Daerah		100%	263,817,850
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	Kota Semarang	100%	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	15,000,000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	Kota Semarang	100%	1,400,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	1,400,000,000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase penanganan stunting	Kota Semarang	50%	540,800,000	Pendapatan Asli Daerah		50%	540,800,000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	Kota Semarang	100%	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	15,000,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Kota Semarang	83 fasyankes	65,000,000	Pendapatan Asli Daerah		83 fasyankes	65,000,000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelurahan yang telah mengimplementasikan kebijakan PHBS	Kota Semarang	95%	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah		95%	20,000,000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang membina penyehatan tradisional	Kota Semarang	37 Puskesmas	24,750,000	Pendapatan Asli Daerah		37 Puskesmas	24,750,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase kelengkapan laporan W1, W2 dan C1	Kota Semarang	100%	80,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	80,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	Kota Semarang	100%	45,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	45,000,000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	88%	515,511,688	Pendapatan Asli Daerah		88%	515,511,688
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	Kota Semarang	100%	48,187,458,828	Pendapatan Asli Daerah		100%	48,187,458,828
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	cakupan rating kelurahan sehat	Kota Semarang	100%	1,420,136,021	Pendapatan Asli Daerah		100%	1,420,136,021
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui layanan telemedicin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Semarang		750,000,000	Pendapatan Asli Daerah			750,000,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	100%	1,324,369,600	Pendapatan Asli Daerah		100%	1,324,369,600
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	100%	857,059,375	Pendapatan Asli Daerah		100%	857,059,375
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	Kota Semarang	37 Puskesmas	1,227,771,000	Pendapatan Asli Daerah		37 Puskesmas	1,227,771,000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah kejadian KIPI	Kota Semarang	100%	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	10,000,000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	Kota Semarang	100%	248,060,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	248,060,000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	cakupan pelayanan PSC	Kota Semarang	100%	289,865,400	Pendapatan Asli Daerah		100%	289,865,400
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis		Kota Semarang	100%	47,182,941	Pendapatan Asli Daerah		100%	47,182,941
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Kota Semarang		44,100,000	Pendapatan Asli Daerah			44,100,000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria		Kota Semarang		34,330,000	Pendapatan Asli Daerah			34,330,000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai	Kota Semarang	100%	1,671,263,230			100%	1,671,263,230

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		standar							
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	Kota Semarang	100%	238,554,420	Pendapatan Asli Daerah		100%	238,554,420
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehatan	Kota Semarang	100%	906,513,380	Pendapatan Asli Daerah		100%	906,513,380
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	Kota Semarang	100%	526,195,430	Pendapatan Asli Daerah		100%	526,195,430
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	Kota Semarang	100%	7,992,472,010			100%	7,992,472,010
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	Kota Semarang	100%	9,900,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	9,900,000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	Kota Semarang	70%	5,044,962,610	Pendapatan Asli Daerah		70%	5,044,962,610
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	Kota Semarang	100%	2,937,609,400	Pendapatan Asli Daerah		100%	2,937,609,400
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	2,937,609,400			100%	2,937,609,400
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	Kota Semarang	100%	167,698,100			100%	167,698,100
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio dokter umum	Kota Semarang	2.11 per 1000 penduduk	21,300,000	Pendapatan Asli Daerah		2.11 per 1000 penduduk	21,300,000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	100%	59,671,200	Pendapatan Asli Daerah		100%	59,671,200
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase pembinaan dan pengawasan SDM untuk puskesmas dan RS	Kota Semarang	100%	86,726,900	Pendapatan Asli Daerah		100%	86,726,900
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	Kota Semarang	100%	126,223,100			100%	126,223,100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	Kota Semarang	2 kegiatan	126,223,100	Pendapatan Asli Daerah		2 kegiatan	126,223,100
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	Kota Semarang	98%	250,000,000			98%	250,000,000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	Kota Semarang	100%	74,141,530			100%	74,141,530
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	Kota Semarang	100%	74,141,530	Pendapatan Asli Daerah		100%	74,141,530
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Kota Semarang	100%	109,139,230			100%	109,139,230
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	Kota Semarang	100%	109,139,230	Pendapatan Asli Daerah		100%	109,139,230
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	Kota Semarang	100%	66,719,240			100%	66,719,240

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	Kota Semarang	100%	66,719,240	Pendapatan Asli Daerah		100%	66,719,240
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kota Semarang	100%	105,450,000			100%	105,450,000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	Kota Semarang	100%	70,450,000			100%	70,450,000
1.02.05.2.03.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring	Kota Semarang	100%	70,450,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	70,450,000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	Kota Semarang	100%	35,000,000			100%	35,000,000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	proporsi strata posyandu	Kota Semarang	100%	35,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	35,000,000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dok Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kesehatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kesehatan;
3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar Dok perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

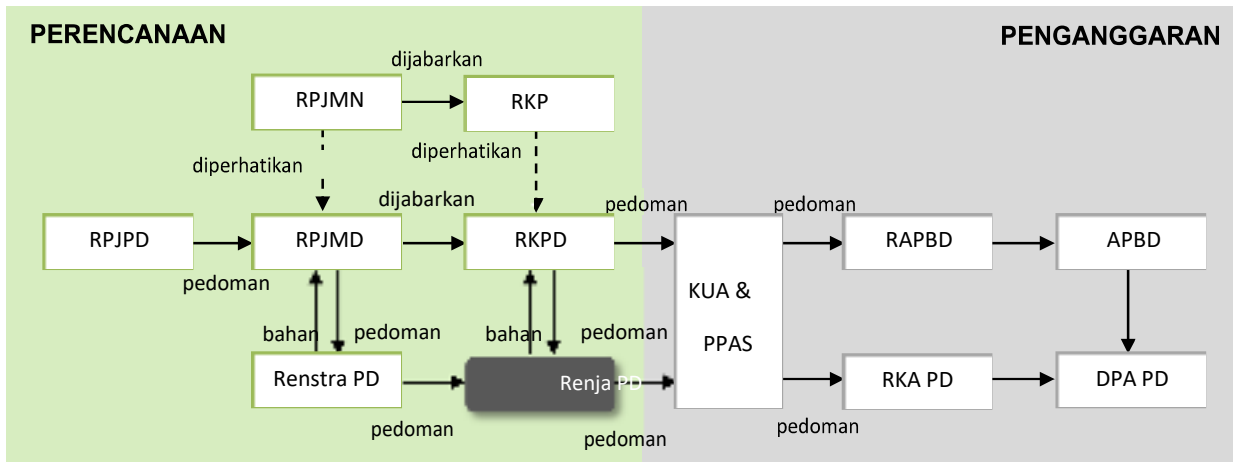
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di

- Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 2 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD dan BLUD sebesar Rp 436.692.479.050 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp453.178.402.830 atau sebesar 103,77%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Terbayarnya gaji TPHL	100%	1.00 tahun	100%	100%		100%		
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD									
		Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%		100%		
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100 %	100%	100%	100%		100%		

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, yang terdiri dari 2 Program dan 13 Indikator Kinerja Program dan 3 Kegiatan dengan Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 13 Indikator kinerja program, semua Indikator.

 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, 2 Program dengan 2 indikator program dan 3 kegiatan .
 - b) Dari 13 indikator kinerja program, semua indikator yang dipekirakan dapat melampaui target, 13 Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan
- Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.681.121.036	50.435.704.385	95,73
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.628.554.036	50.390.554.385	95,74
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.567.000	45.150.500	85,89
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	384.011.358.014	402.742.698.445	102,85
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.044.220.754	30.788.820.725	99,18
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
4	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	352.967.137.260	371.953.877.720	105,38
		436.692.479.050	453.178.402.830	103,77

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 4 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 436.692.479.050. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 453.178.402.830.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro adalah melaksanakan fungsi sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3

**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS										
Sasaran :										
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS		74,00	75,00	97,00	97,50	96,11	95,90	96,50	97,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik		A (70,00)	A (83,00)	A (84,00)	A (84,50)	A (71,85)	A (73,20)	A (83,50)	A (84,00)
Meningkatkan sarana dan prasarana	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan soisal”** memiliki indikator kinerja yaitu “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100%;

b. Sasaran “**Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima**” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 95,50% dari target sebesar 74,00%
- 2) Indikator “Nilai Kinerja BLUD Baik” belum dapat mencapai target sebesar 70,00%, dengan realisasi sebesar 73,20%
- 3) Indikator “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 %

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Kesehatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T Wongsonegoro, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang di bidang urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusunan kebijakan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Penambahan alat medis, bahan habis pakai, dan perbekalan farmasi.
- b. Penambahan SDM dengan merekrut tenaga keperawatan baru dan tenaga sukarela.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
- d. Pengembangan / pembangunan gedung pelayanan kesehatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan diantaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Dana

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Mutu pelayanan yang masih kurang sesuai harapan
Dari uraian data tentang kinerja pelayanan di atas diketahui bahwa indikator-indikator mutu layanan masih belum seperti yang diharapkan. Belum tercapainya target sebagian besar indikator mutu pelayanan tersebut berdampak pada tingkat capaian indikator. Hal ini menjadi tantangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro untuk memperbaiki / meningkatkan mutu layanan sekaligus agar target indikator dapat semakin baik.
- Sistem rujukan berjenjang yang berakibat kunjungan pasien menurun Rumah sakit kelas B sebaiknya memang menjadi tempat rujukan dari sistem pelayanan rujukan rumah sakit tipe C. Adanya kebijakan rujukan berjenjang membuat pasien tidak bisa langsung datang ke Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang karena harus melalui rujukan dari Rumah Sakit tipe C.
- Adanya Rumah Sakit baru disekitar Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS. Primaya dan RS Gigi dan Mulut Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
- Teknologi yang terus berkembang semakin cepat
Teknologi alat kesehatan semakin berkembang dan canggih membuat Rumah Sakit Daerah harus mengikuti perkembangan tersebut.
- Teknologi informasi yang mengutamakan percepatan dalam pelayanan.
Adanya era digitalisasi menuntut Rumah Sakit Daerah untuk meningkatkan keterampilan SDM serta meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

b. Peluang:

- Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk penerapan BLUD.
Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan kontinyu setiap tahun.
- Lingkungan geografi dan demografi yang strategis
Letak Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun.
Aksesibilitas :
 - Mudah dicapai dari berbagai arah;
 - Kondisi jalan baik;
 - Dilewati jalur angkutan umum.
- Ditetapkannya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama Universitas Wahid Hasyim.
- Lokasi RS berada di wilayah Pengembangan Pemukiman baru yang berkembang
- Peningkatan jumlah pasien stroke memungkinkan dibangunnya Unit Stroke Center dengan alasan penyakit stroke karena hipertensi termasuk dalam 10 besar penyakit di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.
- Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
- Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD.
- Jumlah dan jenis tenaga medis dan paramedis yang cukup dan lengkap.
- Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

a. Menurunkan angka kematian

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI 2017:88,58/100.000 KH; AKB 2017: 8,93/1.000 KH) meskipun angka ini sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI:226/100.000 KH; AKB:24/1.000 KH).

Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sangat berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Pelaksanaan RS PONEK memerlukan prasarana dan sarana yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan sumber daya manusia juga harus diperhatikan dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan sehingga Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro menjadi tempat rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Pandemi covid

Berdasarkan KMK No HK 01.07/Menkes/169/2020 tentang penetapan RS rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu maka Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro termasuk dalam salah satu RS yang dipilih sebagai rujukan lini pertama dalam menangani penderita covid 19. Oleh karena itu Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro harus mempersiapkan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Perubahan ruang rawat inap biasa menjadi ruang rawat inap isolasi rawat inap, penambahan ruang ICU isolasi, IGD ruang isolasi, pembangunan laboratorium biomolekuler sesuai dengan biosafety laboratorium level 3, alat - alat medis maupun sarana non medis lainnya harus segera dipenuhi untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ada.

- b. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan rumah sakit.

Nilai kinerja rumah sakit BLU pada rerata lima tahun (2016 sd 2020) masih bernilai total skor 71,85 yang artinya bahwa Rumah Sakit dikategorikan SEHAT dengan Nilai A ($65 > TS \leq 80$).

Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variable indicator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pelayan public maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Permenpan No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang merupakan penyelenggara pelayanan public, sehingga wajib melakukan SKM.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang biasanya melakukan SKM setiap 6 bulan sekali.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor

- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
- 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan

- 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik

- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**. Namun sebagai Bidang Kesehatan di Kota Semarang, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				451.344.224.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				400.186.886.000	
1.02.0.0 0.0.00.0 2.0000	RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO				451.344.224.000	RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO				400.186.886.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	84.200.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	1.000.000.000	
			Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %				Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %		-
1.02.02. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	100%	84.200.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	29 Unit	1.000.000.000	-
			Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %				Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %		-
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100 %				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100 %		-
1.02.02. 2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit		Pembangunan Gudang umum	1 unit	1.700.000.000	Pengembangan Rumah Sakit		Pembangunan Gudang umum	100 %	500.000.000	-
1.02.02. 2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pembangunan Gedung Parkir	100 %	82.000.000.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pembangunan Gedung Parkir	100 %		-
1.02.02. 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100 %	500.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100%	500.000.000	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD		367.144.224.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD		399.186.886.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KABUPATEN/KOTA					KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		
X.XX.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	3 dokumen	300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	3 dokumen		
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	60.456.552.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	66.502.207.000	
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	60.392.946.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	66.432.241.000	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Honor TPHL	1 tahun	63.606.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Honor TPHL	1 tahun	69.966.000	
X.XX.01 .2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	306.687.372.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	332.684.679.000	
X.XX.01 .2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	306.687.372.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	332.684.679.000	
TOTAL					451.344.224.000					400.186.886.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Khusus untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperawatan Tahun 2023 Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jl. Fatmawati No 1 , Semarang	1. Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 2 2. Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai		Pada tahun 2023 RSWN Kota Semarang akan melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Diharapkan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Dapat Meningkatkan fasilitas pelayanan
2	Pembangunan Gudang Aset		Pembangunan Gudang Aset		
3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pembangunan Gedung Parkir		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;**
dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;**
dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;**
dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;

- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;

dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

3.3

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial”,

dengan indikator tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yaitu Meningkatkan Kinerja RS BLUD, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
- b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- c. Nilai Kinerja BLUD Sehat

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	≥95,90
	Nilai Kinerja BLUD Sehat	≥83,00

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”** dan indikator sasaran **“Meningkatkan Kinerja RS BLUD”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 kegiatan, yang terdiri dari 2 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 2 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota

Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 111.127.021.558 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

- a. Rp 57.986.075.635 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 53.140.945.927 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 314.040.141.470 yang bersumber dari dana BLUD.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.0.00.0.00.02.000	RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO				425.167.163.028				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	Kota Semarang	100 %	314.040.141.470		-	100 %	
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit		100 %			-	100 %	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit		100%	97.506.364.000		-	29 Unit	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit		100 %			-	100 %	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						-	100 %	
		Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 2		1 unit	13.006.364.000		-	100 %	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit				2.000.000.000				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pembangunan Gudang Aset		1 unit	2.000.000.000				
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				82.000.000.000				
		Pembangunan Gedung Parkir		100 %	82.000.000.000		100 %		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100 %	500.000.000		-	100 %	
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Rumah Sakit		100 %	500.000.000			100 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD		100 %	111.127.021.558			100 %	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD		100 %				100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)		1 dokumen	300.000			100 %	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit		100 %	60.456.552.000			100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	60.392.946.000			100 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				63.606.000				
		Tersedianya Honor TPHL		1 tahun	63.606.000			100 %	
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD		100 %	306.687.372.000			100 %	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				306.687.372.000				
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		100 %	306.687.372.000			100 %	

BAB V

PENUTUP

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro;
3. Penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

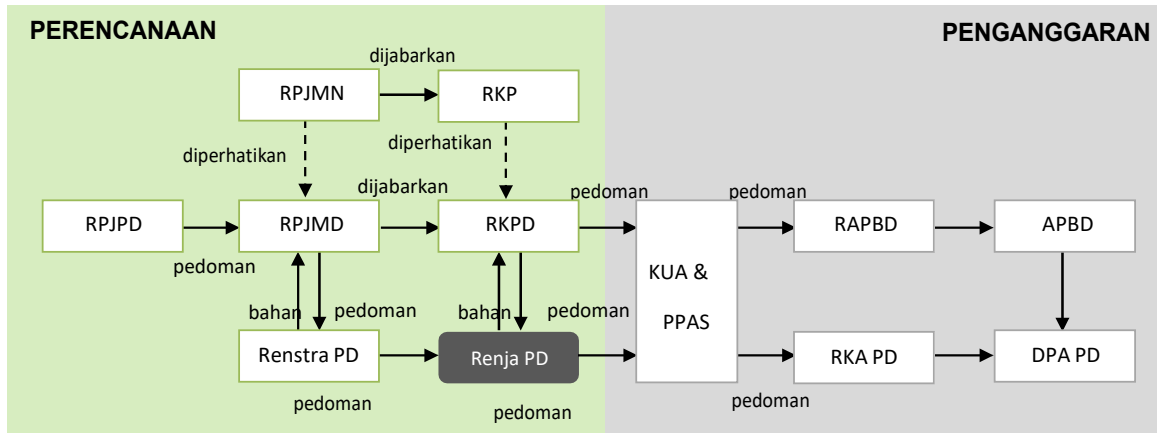
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunanann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 382.588.579.794,- Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp 265.844.276.969,- atau sebesar 69,49%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun	
			4		5		6		7	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100%	339.900.000.000		19.923.598.505	100%	29.636.159.289	94.29	8.416.198.921
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan	98.75				97.57 %		92.00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	321.200.000.000		16.182.737.717	100%	26.910.456.650	95.18	7.165.401.496
		Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh	98.24				95.61 %		91.00	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan		100%	3.200.000.000		0	100%	1.010.456.650	50.00%	9.071.400
		Dokumen Database Bendungan, Embung,	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00	
		Review DED Pembangkit Listrik	1.00 dokumen		0		1 dokumen		0.00	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		100%	9.000.000.000		1.590.266.628	100%	2.000.000.000	100.00%	0
		Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		1.00	
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		100%	35.000.000.000		0	100%	4.000.000.000	100.00%	0
		Stasiun Pompa Banjir	1.00 lokasi		0		1 lokasi		1.00	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air		100%	11.000.000.000		2.121.757.110	100%	2.500.000.000	100.00%	680.746.300
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		1.00	

1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		100%	162.000.000.000		12.470.713.979	100%	16.400.000.000	100.00%	6.198.501.796
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		1.00	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		1.00	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		1.00	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		1.00	
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		100%	9.000.000.000		0	100%	1.000.000.000	0.00%	277.082.000
		jumlah Kegiatan Operasional dan	1.00 Kegiatan		0		1 Kegiatan		0.00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha		100%	18.700.000.000		3.740.860.788	100%	2.725.702.639	98.29	1.250.797.425
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	86.80				81.80 %		80.40	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		100%	1.200.000.000		0	100%	225.702.639	100.00%	47.421.740
		Dokumen Database	1.00 dokumen		0		1 dokumen		1.00	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100%	12.000.000.000		3.740.860.788	100%	2.500.000.000	98.73%	1.203.375.685
		Panjang jaringan irigasi kewenangan kota	79.00 persen		0		79 persen		78.00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM		100%	722.167.054.000		57.116.225.569	100%	44.633.385.750	95.31	18.838.220.288
		Tingkat pengelolaan dan pengembangan	68.00				64.00 %		61.00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	722.167.054.000		57.116.225.569	100%	44.633.385.750	93.27	18.838.220.288

		Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang	100.00				98.64 %		92.00	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem		100%	6.900.000.000		1.203.561.566	100%	1.162.741.750	50.00%	217.530.690
		Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem	2.00 Kegiatan			0	2 Kegiatan		1.00	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase		100%	216.344.183.944		14.030.771.317	100%	22.321.148.000	0.00%	0
		Peningkatan saluran	5.00 lokasi			0	5 lokasi		0.00	
		Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan Talud	1.00 Kegiatan			0	1 Kegiatan		0.00	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan		100%	209.850.000.000		27.090.902.227	100%	0	0.00%	12.222.989.659
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat	15.00 Jenis			0	0 0		0.00	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		100%	288.572.870.056		14.790.990.459	100%	21.149.496.000	0.00%	6.397.699.939
		Jumlah Kegiatan Operasional dan	1.00 Kegiatan			0	1 Kegiatan		0.00	
		Jumlah Bahan dan Material pendukung	15.00 Jenis			0	0 0		0.00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100%	1.685.507.796.000		97.581.357.847	100%	116.751.098.961	99.02	38.642.535.600
		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan	75.75				74.13 %		73.40	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan		100%	1.685.507.796.000		97.581.357.847	100%	116.751.098.961	106.67	38.642.535.600
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88.98				86.98 %		92.78	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan		100%	11.110.000.000		3.537.977.301	100%	2.621.453.267	50.00%	901.370.805
		Dokumen Database dan Rencana Teknis	1.00 dokumen			0	1 dokumen		1.00	
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Penyusunan	1.00 dokumen			0	1 dokumen		0.00	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		100%	559.095.348.947		13.408.643.862	100%	0	0.00%	15.450.081.671

		Rintisan Semarang Outer Ring Road	1.00 Kegiatan		0	0 0		0.00		
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah	1.00 Kegiatan		0	0 0		0.00		
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Pengadaan Lahan dan	1.00 Kegiatan		0	0 0		0.00		
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan		100%	1.740.000.000		284.951.989	100%	328.908.745	50.00%	81.558.450
		Jumlah dokumen leger	2.00 dokumen		0	2 dokumen		1.00		
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100%	3.600.000.000		888.600.708	100%	700.736.949	50.00%	403.002.368
		jumlah data survey dan	2.00 dokumen		0	2 dokumen		1.00		
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan		100%	537.338.601.368		0	100%	45.200.000.000	0.00%	0
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli	1.00 Kegiatan		0	1 Kegiatan		0.00		
		Rintisan Semarang Outer Ring Road	1.00 Kegiatan		0	1 Kegiatan		0.00		
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan		100%	204.673.095.509		21.996.402.065	100%	0	0.00%	3.926.223.968
		Jumlah Bahan dan Material pendukung	100.00 Jenis		0	0 0		0.00		
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan		100%	291.050.750.176		47.530.738.669	100%	49.500.000.000	23.95%	16.997.239.198
		Operasi Pemeliharaan	167.00 km		0	167 km		40.00		
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan	250.00 ruas		0	0 0		0.00		
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan	250.00 ruas		0	0 0		0.00		
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan	250.00 ruas		0	0 0		0.00		
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan	250.00 ruas		0	0 0		0.00		
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan		100%	5.800.000.000		23.204.250	100%	15.400.000.000	0.00%	0
		Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan	1.00 Kegiatan		0	1 Kegiatan		0.00		
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100%	3.500.000.000		744.105.437	100%	1.000.000.000	100.00%	81.200.000
		Operasi Pemeliharaan	1.00 unit		0	1 unit		1.00		
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		100%	6.300.000.000		0	100%	2.000.000.000	10.00%	801.859.140
		Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1.00 Jenis		0	1 Jenis		0.00		
		Jumlah Alat Pengujian	1.00 Jenis		0	1 Jenis		0.00		
		Jumlah Alat Pengujian	14.00 Jenis		0	14 Jenis		7.00		

		Jumlah dokumen sertifikasi dan	1.00 dokumen		0	1 dokumen		0.00		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat	1.00 Kegiatan		0	1 Kegiatan		0.00		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	244.507.290.000		24.640.453.375	100%	35.891.813.900	50.00	15.622.478.131
		Persentase perencanaan dan	100.00			100.00 %		50.00		
		Persentase kinerja administrasi dan	100.00			100.00 %		50.00		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana	100.00			100.00 %		50.00		
		Persentase peningkatan	100.00			100.00 %		50.00		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	271.000.000		10.823.500	100%	42.000.000	50.00	0
		Persentase Perencanaan,	100.00			100.00 %		50.00		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100.000.000		1.675.500	100%	15.000.000	100.00%	0
		Jumlah Dokumen	2.00 dokumen		0	2 dokumen		2.00		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	12.000.000		1.636.500	100%	2.000.000	100.00%	0
		Jumlah Dokumen RKA	1.00 dokumen		0	1 dokumen		1.00		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	15.000.000		1.604.750	100%	2.500.000	0.00%	0
		Jumlah Dokumen	1.00 dokumen		0	1 dokumen		0.00		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-		100%	18.000.000		1.608.500	100%	3.000.000	100.00%	0
		Jumlah Dokumen DPA	1.00 dokumen		0	1 dokumen		1.00		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	27.000.000		530.500	100%	4.500.000	0.00%	0
		Jumlah Dokumen	1.00 dokumen		0	1 dokumen		0.00		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	39.000.000		831.250	100%	5.000.000	0.00%	0
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1.00 dokumen		0	1 dokumen		0.00		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	60.000.000		2.936.500	100%	10.000.000	100.00%	0
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi	1.00 dokumen		0	1 dokumen		1.00		

X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat		100%	152.369.141.000		15.722.359.977	100%	21.570.046.000	50.00	9.120.571.013
		Persentase Administrasi dan	100.00				100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		100%	149.916.101.000		15.597.794.777	100%	21.182.036.000	50.00%	9.076.771.013
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan	100.00 persen		0		100 persen		50.00	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	2.377.040.000		122.200.000	100%	377.010.000	50.00%	43.800.000
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi	100.00 persen		0		100 persen		50.00	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100%	18.000.000		0	100%	3.000.000	0.00%	0
		Jumlah Laporan	1.00 dokumen		0		1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		100%	29.000.000		1.637.200	100%	4.000.000	50.00%	0
		Jumlah Laporan	2.00 dokumen		0		2 dokumen		1.00	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi		100%	29.000.000		728.000	100%	4.000.000	0.00%	0
		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis	1.00 dokumen		0		1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	221.000.000		0	100%	16.000.000	50.00	0
		Persentase Administrasi Barang	100.00				100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100%	48.000.000		0	100%	8.000.000	0.00%	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan	1.00 dokumen		0		1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	48.000.000		0	100%	8.000.000	0.00%	0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang	1.00 dokumen		0		1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	264.961.000		0	100%	14.961.000	50.00	0
		Persentase Administrasi	100.00				100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100%	35.000.000		0	100%	10.000.000	40.00%	0
		Jumlah Kegiatan Pendidikan dan	5.00 Kegiatan		0		5 Kegiatan		2.00	

X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100%	29.961.000	0	100%	4.961.000	50.00%	0
		Nilai Indeks Kepuasan	100.00 skor 1-100		0	100 skor 1-100		50.00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat		100%	12.113.692.000	784.882.647	100%	2.202.629.810	50.00	1.016.687.114
		Persentase kelengkapan sarana	100.00			100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		100%	900.000.000	79.859.996	100%	150.000.000	70.00%	110.506.268
		umlah Komponen Instalasi	50.00 Jenis		0	50 Jenis		35.00	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	2.073.740.000	0	100%	673.740.000	60.00%	376.845.750
		Jumlah Alat Tulis	25.00 Jenis		0	25 Jenis		15.00	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah		100%	460.000.000	52.004.852	100%	60.000.000	60.00%	15.153.500
		umlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan	25.00 Jenis		0	25 Jenis		15.00	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	900.000.000	111.304.850	100%	149.937.810	50.00%	94.136.310
		Jumlah bahan cetak	100.00 Jenis		0	100 Jenis		50.00	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	30.000.000	0	100%	5.000.000	0.00%	0
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	5.00 Jenis		0	5 Jenis		0.00	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	649.952.000	0	100%	149.952.000	40.00%	35.462.600
		Jumlah Kunjungan	125.00 Orang		0	125 Orang		50.00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	4.100.000.000	87.372.900	100%	514.000.000	50.00%	135.465.686
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.00 Kegiatan		0	40 Kegiatan		20.00	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	3.000.000.000	204.999.999	100%	500.000.000	0.00%	249.117.000
		Akselerasi pelaksanaan	1.00 Kegiatan		0	1 Kegiatan		0.00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100%	12.101.000.000	64.889.000	100%	100.751.090	50.00	66.960.000
		Persentase Tersedianya peralatan dan	100.00			100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100%	851.000.000	64.889.000	100%	100.751.090	30.00%	66.960.000
		Jumlah mebel perkantoran yang	10.00 Jenis		0	10 Jenis		3.00	

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	44.566.496.000		6.327.109.044	100%	9.245.426.000	50.00	4.236.263.585
		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	100.00				100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	289.996.000		34.011.000	100%	39.996.000	50.00%	35.611.000
		Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100.00 persen		0		100 persen		50.00	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	19.000.000.000		2.904.127.618	100%	4.000.000.000	50.00%	1.987.895.085
		Persentase Jasa Komunikasi, Sumber	100.00 %		0		100%		50.00	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan		100%	25.276.500.000		3.388.970.426	100%	5.205.430.000	50.00%	2.212.757.500
		Persentase jasa	100.00 persen		0		100 persen		50.00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100%	22.600.000.000		1.730.389.207	100%	2.700.000.000	50.00	1.181.996.419
		Persentase	100.00				100.00 %		50.00	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	10.550.000.000		1.275.676.002	100%	1.800.000.000	75.00%	994.151.494
		Jumlah Jasa Pemeliharaan dan	4.00 Jenis		0		4 Jenis		3.00	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%	425.000.000		640.000	100%	50.000.000	60.00%	0
		Jumlah mebel perkantoran yang	5.00 Jenis		0		5 Jenis		3.00	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	1.025.000.000		146.938.630	100%	150.000.000	60.00%	83.897.420
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	10.00 Jenis		0		10 Jenis		6.00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		100%	10.600.000.000		307.134.575	100%	700.000.000	0.00%	103.947.505
		Jumlah Gedung Kantor yang	1.00 Jenis		0		1 Jenis		0.00	

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, dengan 4 Program dan 7 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 7 Indikator kinerja program, sejumlah 7 indikator berhasil memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, dengan 4 Program dan 7 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 7 Indikator kinerja program, sejumlah 7 indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Tahun 2021

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.312.416.520	29.598.207.344	91,60
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.189.366	29.103.360	90,41
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.502.091	3.724.000	57,27
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.944.891	1.896.500	97,51

1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.899.728	1.874.750	98,69
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.905.728	1.878.500	98,57
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.899.637	1.814.250	95,51
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.320.920	4.245.250	98,25
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.716.371	13.670.110	99,66
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.711.650.566	17.809.320.439	95,18
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.378.872.886	17.622.449.739	95,88
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	325.320.000	179.700.000	55,24
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.958.200	4.792.700	96,66
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.499.480	2.378.000	95,14
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.423.693.940	1.165.881.325	81,89
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.817.630	126.735.196	70,87
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.023.417	64.942.250	92,74
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	378.953.949	312.921.950	82,58
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	202.084.727	201.676.050	99,80
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.157.000	143.881.880	61,19
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	358.657.217	315.723.999	88,03
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.143.045	90.050.400	85,65
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	105.143.045	90.050.400	85,65
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.030.698.840	7.944.984.154	87,98
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.499.000	63.502.000	90,08
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.978.999.840	3.455.051.728	86,83
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.981.200.000	4.426.430.426	88,86
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.009.040.763	2.558.867.666	85,04
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			92,22

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.802.532.000	1.662.347.161	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	52.800.000	8.159.600	15,45
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.803.763	166.415.830	92,04
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	972.905.000	721.945.075	74,21
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.073.655.897	25.595.877.901	88,04
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.559.528.060	21.313.155.763	86,78
1030220106	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.780.559.833	1.590.266.628	89,31
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.859.066.937	2.454.287.110	85,84
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	19.919.901.290	17.268.602.025	86,69
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.514.127.837	4.282.722.138	94,87
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.514.127.837	4.282.722.138	94,87
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	71.559.936.169	61.963.119.484	86,59
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.559.936.169	61.963.119.484	86,59
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.711.337.880	1.474.309.066	86,15
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	23.685.200.969	16.035.882.828	67,70
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.786.461.860	10.596.107.100	98,24
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	6.546.535.798	5.559.286.820	84,92
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	28.830.399.662	28.297.533.670	98,15
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	249.642.571.208	148.687.072.240	59,56
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	249.642.571.208	148.687.072.240	59,56
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.173.223.703	5.694.917.228	92,25
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			92,20

		1.093.154.100	1.007.916.558	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	638.617.640	545.451.959	85,41
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	28.808.757.210	18.948.490.841	65,77
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	40.454.307.284	39.803.807.443	98,39
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	12.149.599.600	97.619.250	0,80
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.427.560.000	2.381.163.058	98,09
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan I	2.918.794.010	2.898.923.181	99,32
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan II	5.734.940.790	5.651.371.760	98,54
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan III	3.831.931.296	3.725.173.256	97,21
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan IV	3.133.962.392	3.123.206.911	99,66
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	43.499.699.500	38.363.524.955	88,19
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	98.778.023.683	26.445.505.840	26,77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 10 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 382.588.579.794,-. Dari jumlah anggaran tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 265.844.276.969,- atau 69,49%.

Analisis Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan umum Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pekerjaan umum Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan umum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN RENSTRA								
Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	97.30 %	98.75 %	97.57 %	97.86 %	98.15 %	98.44 %	98.75 %
Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	73.95 %	75.75 %	74.13 %	74.50 %	74.90 %	75.30 %	75.75 %
SASARAN RENSTRA								
Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	3.40 %	1.50 %	3.02 %	2.64 %	2.26 %	1.88 %	1.50 %
Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan rob	2.00 %	1.00 %	1.85 %	1.65 %	1.45 %	1.25 %	1.00 %
Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92.38 %	94.50 %	92.50 %	93.00 %	93.50 %	94.00 %	94.50 %
Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	55.51 %	57.00 %	55.75 %	56.00 %	56.30 %	56.60 %	57.00 %
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.27 (skor 1 - 100)	75.70 (skor 1 - 100)	74.50 (skor 1 - 100)	74.80 (skor 1 - 100)	75.10 (skor 1 - 100)	75.40 (skor 1 - 100)	75.70 (skor 1 - 100)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob”, belum dapat memenuhi target, dimana data capaian sebesar 97,30% dari target sebesar 98,75%. Sedangkan **“Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”, belum dapat memenuhi target, dengan data capaian sebesar 73,95% dari target sebesar 75,75%.
- b) Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 3,40% dari target sebesar 1,50%;
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob” belum dapat mencapai target sebesar 1,00%, dengan realisasi sebesar 2,00%;
- c) Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 92,38% dari target sebesar 94,50%;
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik” belum dapat mencapai target sebesar 55,51%, dengan realisasi sebesar 57,00%;
- d) Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 74,27% dari target sebesar 75,70%;

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai

suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Kota Semarang, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan konektivitas regional, yang mendukung penguatan posisi kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
2. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
3. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
4. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
5. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
6. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.
7. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan.
8. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.
9. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
10. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
11. Pembangunan infrastruktur kota dan utilitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.

12. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.

Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan

- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara

berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman

- 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;”**. Namun sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum di Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 2
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

Rancangan RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Kebutuhan Anggaran
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM				345.163.444.958	DINAS PEKERJAAN UMUM				366,313,444,958.00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86%	28.471.938.141	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86%	30,921,938,141.00
			Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86%				Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86%	
1.03.02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17	26.071.938.141	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17	28.521.938.141
			Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17				Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17	
1.03.02.201.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00 dokumen	545.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00 dokumen	545.000.000
1.03.02.201.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	10.00 lokasi	2.000.000.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	10.00 lokasi	2.000.000.000
1.03.02.201.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1.00 lokasi	3.000.000.000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1.00 lokasi	3.000.000.000

1.03.02 .2.01.4 6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Semarang		0	1.500.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Semarang		0	1.500.000.000
1.03.02 .2.01.4 9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.00 kegiatan	1.084.766.388	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.00 kegiatan	1.084.766.388
1.03.02 .2.01.5 5	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah I	1.00 kegiatan	17.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah I	1.00 kegiatan	18.450.000.000
1.03.02 .2.01.5 6	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.00 kegiatan	942.171.753	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.00 kegiatan	1.942.171.753
1.03.02 .2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Semarang	<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.</i>	83.00%	2.400.000.000	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Semarang	<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.</i>	83.00%	2.400.000.000
			<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.</i>	83.00%				<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.</i>	83.00%	
1.03.02 .2.02.0 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Dokumen Database Irigasi	1.00 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Dokumen Database Irigasi	1.00 dokumen	100.000.000
1.03.02 .2.02.2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	80.00 persen	2.300.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	80.00 persen	2.300.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00%	68.545.911.137	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00%	76.845.911.137
			Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00%				Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00%	

1.03.06 .2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Semarang	<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>	99.17%	68.545.911.137	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Semarang	<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>	99.17%	76.845.911.137
			<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>	99.17%				<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>	99.17%	
1.03.06 .2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.00 dokumen	1.405.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.00 dokumen	1.405.000.000
1.03.06 .2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Peningkatan saluran drainase perkotaan	5.00 lokasi	20.500.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Peningkatan saluran drainase perkotaan	5.00 lokasi	20.500.000.000
1.03.06 .2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15.00 jenis	26.328.252.045	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15.00 jenis	26.328.252.045
1.03.06 .2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1.00 kegiatan	20.312.659.092	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1.00 kegiatan	28.612.659.092
		Kota Semarang	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	15.00 jenis	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum		Kota Semarang	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	15.00 jenis	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum.
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50%	214.054.433.430	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50%	224.154.433.430
			Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50%				Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50%	
1.03.10 .2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Kota Semarang	<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	87.48%	214.054.433.430	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Kota Semarang	<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	87.48%	224.154.433.430
			<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	87.48%				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	87.48%	
1.03.10 .2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00 dokumen	2.550.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00 dokumen	2.650.000.000

	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
1.03.10 .2.01.0 2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Semarang	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	1.00 kegiatan	2.000.000.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Semarang	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	1.00 kegiatan	2.000.000.000
1.03.10 .2.01.0 3	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah dokumen leger jalan	2.00 dokumen	450.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah dokumen leger jalan	2.00 dokumen	450.000.000
1.03.10 .2.01.0 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	jumlah data survey dan kondisi jalan	2.00 dokumen	575.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	jumlah data survey dan kondisi jalan	2.00 dokumen	575.000.000
1.03.10 .2.01.0 5	Pembangunan Jalan	Kota Semarang	Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1.00 kegiatan	20.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kota Semarang	Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1.00 kegiatan	20.000.000.000
1.03.10 .2.01.0 8	Rekonstruksi Jalan	Kota Semarang		1.00 kegiatan	1.500.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kota Semarang		1.00 kegiatan	1.500.000.000
1.03.10 .2.01.0 9	Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Peningkatan jalan wilayah kota dan pedestrian	10.00 ruas jalan	49.386.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Peningkatan jalan wilayah kota dan pedestrian	10.00 ruas jalan	49.386.000.000
1.03.10 .2.01.1 0	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100.00 jenis	50.948.978.468	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100.00 jenis	50.948.978.468
1.03.10 .2.01.1 1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	250.00 ruas jalan	71.250.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	250.00 ruas jalan	81.250.000.000
			Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah III	250.00 ruas jalan				Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah III	250.00 ruas jalan	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
			Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah I	250.00 ruas jalan				Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah I	250.00 ruas jalan	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
			Operasi Pemeliharaan jalan	167.00 kilometer				Operasi Pemeliharaan jalan	167.00 kilometer	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah II	250.00 ruas jalan				Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah II	250.00 ruas jalan	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II

1.03.10 .2.01.1 6	Penggantian Jembatan	Kota Semarang		0	12.500.000.000	Penggantian Jembatan	Kota Semarang		0	12.500.000.000
1.03.10 .2.01.1 9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1.00 unit	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1.00 unit	1.000.000.000
1.03.10 .2.01.2 2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1.00 jenis	1.894.454.962	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1.00 jenis	1.894.454.962
X.XX	NON URUSAN				34.091.162.250	NON URUSAN				34.091.162.250
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas PU	100.00%	34.091.162.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas PU	100.00%	34.091.162.250
			Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas PU	100.00%				Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas PU	100.00%	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100.00%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100.00%	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100.00%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100.00%	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100.00%				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100.00%	
X.XX.01 .2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100.00%</i>	<i>42.000.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100.00%</i>	<i>42.000.000</i>
			<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100.00%</i>				<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100.00%</i>	
X.XX.01 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2.00 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2.00 dokumen	15.000.000
X.XX.01 1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	2.000.000
X.XX.01 1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	2.500.000

						SKPD				
X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokume n	3.000.000
X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokume n	4.500.000
X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokume n	5.000.000
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokume n	10.000.000
X.XX.01 .2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100.00%</i>	<i>18.287.313.298</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>18.287.313.298</i>
			<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100.00%</i>				<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	18.055.553.298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	18.055.553.298
X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	218.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	218.760.000
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokume n	3.000.000
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokume n	5.000.000
X.XX.0 1.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokume n	5.000.000
X.XX.01 .2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>100.00%</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>10.000.000</i>

			<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100.00%				<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100.00%	
X.XX.0 1.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	5.000.000
X.XX.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 dokumen	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 dokumen	5.000.000
X.XX.01 .2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100.00%	10.000.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100.00%	10.000.000
			<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100.00%				<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100.00%	
X.XX.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1.00 dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1.00 dokumen	5.000.000
X.XX.0 1.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00 Skor 1-100	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00 Skor 1-100	5.000.000
X.XX.01 .2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>	100.00%	2.374.892.492	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>	100.00%	2.374.892.492
			<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>	100.00%				<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>	100.00%	
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.00 Jenis	150.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.00 Jenis	150.000.000
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25.00 Jenis	995.461.545	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25.00 Jenis	995.461.545
X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25.00 Jenis	75.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25.00 Jenis	75.000.000

X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10.00 jenis	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10.00 jenis	150.000.000
X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.00 jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.00 jenis	5.000.000
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	125.00 orang	127.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	125.00 orang	127.000.000
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.00 kegiatan	372.430.947	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.00 kegiatan	372.430.947
X.XX.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik baru yang tersedia	1.00 aplikasi	500.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik baru yang tersedia	1.00 aplikasi	500.000.000
X.XX.01 .2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00%</i>	<i>100.000.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00%</i>	<i>100.000.000</i>
			<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00%</i>				<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00%</i>	
X.XX.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10.00 jenis	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10.00 jenis	100.000.000
X.XX.01 .2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100.00%</i>	<i>9.941.956.460</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100.00%</i>	<i>9.941.956.460</i>
			<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100.00%</i>				<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100.00%</i>	
X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100.00 persen	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100.00 persen	10.000.000
X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100.00 persen	4.431.956.460	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100.00 persen	4.431.956.460
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase jasa pelayanan umum kantor	100.00 persen	5.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase jasa pelayanan umum kantor	100.00 persen	5.500.000.000

X.XX.01 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00%	3.325.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	3.325.000.000
			Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00%				Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	
X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4.00 jenis	2.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4.00 jenis	2.000.000.000
X.XX.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5.00 jenis	50.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5.00 jenis	50.000.000
X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10.00 jenis	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10.00 jenis	150.000.000
X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1.00 jenis	1.125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1.00 jenis	1.125.000.000

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Dari hasil Musrenbang tersebut telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada OPD Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

**HASIL VERIFIKASI/VALIDASI USULAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
FORUM SKPD TAHUN 2022**

#	Usulan	Lokasi	Volume	Usulan Musrenbang	Sumber	Anggaran	Keterangan
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM						172.109.000.000	
KECAMATAN SEMARANG SELATAN						750.000.000	
06 WONODRI						750.000.000	
1.	Perbaikan Saluran dan Peremajaan Talud Saluran	Jl. Singosari Timur (Samping & Belakang PIP) RT 1 RW 1, 7, 9, 1 WONODRI	16000 m2	SKPD (<i>baru</i>)		750.000.000	Diakomodir
KECAMATAN SEMARANG UTARA						425.000.000	
05 KUNINGAN						425.000.000	
2.	BETONISASI JALAN	TAMAN HASANUDIN RT 3 RW 5 KUNINGAN	600 meter	SKPD (<i>baru</i>)		425.000.000	Diakomodir
KECAMATAN SEMARANG BARAT						2.350.000.000	
06 KALIBANTENG KIDUL						1.500.000.000	
3.	PENGASPALAN JALAN	jl. sri rejeki i RT 0 RW 2 KALIBANTENG KIDUL	3906 m ²	SKPD (<i>baru</i>)		500.000.000	Diakomodir
4.	SALURAN AIR DAN PENDESTRIAN BAHU JALAN	SEPANJANG JALAN ABDUL RAHMAN SALEH RT 0 RW 0 KALIBANTENG KIDUL	1428 m ²	SKPD (<i>baru</i>)		1.000.000.000	Diakomodir
15 TAWANGMAS						500.000.000	
5.	PENINGGIAN JEMBATAN	SEMARANG INDAH BLOK B RT 0 RW 7 TAWANGMAS	600 M2	SKPD (<i>baru</i>)		500.000.000	Diakomodir
16 KEMBANGARUM						350.000.000	
6.	Talud Sungai Hilir	Jl. Saptamarga RT 10 RW 4 KEMBANGARUM	500 m3	SKPD (<i>baru</i>)		350.000.000	Diakomodir
KECAMATAN SEMARANG TIMUR						1.000.000.000	
02 REJOMULYO						1.000.000.000	
7.	Betonisasi Jalan	jl pedalangan raya RT 6 RW 4 dan 5 REJOMULYO	1 kegiatan	SKPD (<i>baru</i>)		1.000.000.000	Diakomodir

KECAMATAN SEMARANG TENGAH						4.150.000.000	
03 JAGALAN						250.000.000	
8.	Pengaspalan Jalan	Jl. Karangсарu RT 4 RW 3 JAGALAN	1820 m2	SKPD (<i>baru</i>)		250.000.000	Diakomodir
06 KEMBANGSARI						900.000.000	
9.	PENGERUKAN SEDIMEN	JL.GAJAH MADA RT 0 RW 0 KEMBANGSARI	700 M2	SKPD (<i>baru</i>)		300.000.000	Diakomodir
10.	PENGERUKAN SEDIMEN	JALAN DEPOK RT 0 RW 0 KEMBANGSARI	600 M2	SKPD (<i>baru</i>)		300.000.000	Diakomodir
11.	PENGERUKAN SEDIMEN	JL.THAMRIN RT 0 RW 0 KEMBANGSARI	700 M2	SKPD (<i>baru</i>)		300.000.000	Diakomodir
07 SEKAYU						3.000.000.000	
12.	Pemuda	Jalan Pemuda RT 0 RW 0 SEKAYU	1 paket	SKPD (<i>baru</i>)		3.000.000.000	Diakomodir
KECAMATAN GUNUNGPATI						11.800.000.000	
01 SUKOREJO						1.400.000.000	
13.	Jalan Utama Kialialang Lama	Kialialang Lama RT 04 RW 1 SUKOREJO	750 meter	SKPD (<i>baru</i>)		600.000.000	Diakomodir
14.	Bendosari	Kialialang Lama RT 1 RW 1 SUKOREJO	800 meter	SKPD (<i>baru</i>)		800.000.000	Diakomodir
04 SEKARAN						10.400.000.000	
15.	Saluran + trotoar	Sepanjang Jl. Taman Siswa RT 0 RW 2,3,4,5 SEKARAN	2.000 m3	SKPD (<i>baru</i>)		10.000.000.000	Diakomodir
16.	Pembangunan Jembatan	Persen-Bangkong RT 0 RW 0 SEKARAN	1 paket	SKPD (<i>baru</i>)		400.000.000	Diakomodir
KECAMATAN TUGU						2.000.000.000	
06 Mangkang Kulon						2.000.000.000	
17.	Normalisasi dan Pengerukan Sedimentasi Sungai Plumbon	Kelurahan Mangkang Kulon RT 0 RW 0 Mangkang Kulon	50000 m2	SKPD (<i>baru</i>)		2.000.000.000	Diakomodir
KECAMATAN MIJEN						102.000.000.000	
03 KARANGMALANG						500.000.000	
18.	Pembangunan Talud Irigasi	DK. GERUNG RT 3 RW 1 KARANGMALANG	900 Meter	SKPD (<i>baru</i>)		250.000.000	Diakomodir
19.	Pengecoran Jl. Dawung	DK. DAWUNG RT 4 RW 2 KARANGMALANG	300 Meter	SKPD (<i>baru</i>)		250.000.000	Diakomodir
10 KEDUNGPANE						1.500.000.000	
20.	Pembangunan Saluran dan Talud Saluran	Sepanjang Jl. Untung Suropati RW. 01 - RW. 04 RT 00 RW 00 KEDUNGPANE	800 m2	SKPD (<i>baru</i>)		1.500.000.000	Diakomodir

13 JATISARI							100.000.000.000	
21.	Pelebaran Jalan	Jl. RM Hadi Soebeno Mijen RT 0 RW 0 JATISARI	1600000 m ²	SKPD (<i>baru</i>)		100.000.000.000	Diakomodir	
KECAMATAN GENUK							6.550.000.000	
06 GEBANGSARI							550.000.000	
22.	Normalisasi Saluran dan Peninggian talud saluran	Jl. Raya Gebanganom raya RT 00 RW 09 GEBANGSARI	1 Paket	SKPD (<i>baru</i>)		550.000.000	Diakomodir	
09 MUKTIHARJO LOR							6.000.000.000	
23.	Peningkatan Jl. Muktiharjo Raya	Jl. Muktiharjo Raya RT 3 RW 4 MUKTIHARJO LOR	800 m	SKPD (<i>baru</i>)		6.000.000.000	Diakomodir	
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR							1.000.000.000	
04 SAMPANGAN							1.000.000.000	
24.	Normalisasi Sungai	Jalan Menoreh Raya RT 00 RW 07-05 SAMPANGAN	4000 m ²	SKPD (<i>baru</i>)		1.000.000.000	Diakomodir	
KECAMATAN TEMBALANG							4.784.000.000	
03 MANGUNHARJO							2.184.000.000	
25.	Normalisasi Saluran	Jl. Prof Suharso RT 1 RW 6 MANGUNHARJO	420 meter kubi	SKPD (<i>baru</i>)		2.184.000.000	Diakomodir	
04 BULUSAN							1.600.000.000	
26.	Pembangunan Jalur Penyelamatan	Jalan Kol Iman Soeparto Tjakrajoeda / sigar bencah RT 7 RW 3 BULUSAN	1 unit	SKPD (<i>baru</i>)		1.600.000.000	Diakomodir	
11 SENDANGMULYO							1.000.000.000	
27.	Talud Sungai	Jl Ketileng II RT 4 RW 25 SENDANGMULYO	500 m ²	SKPD (<i>baru</i>)		1.000.000.000	Diakomodir	
KECAMATAN CANDISARI							300.000.000	
04 JOMBLANG							300.000.000	
28.	DRAINASE JL TENTARA PELAJAR	TENTARA PELAJAR RT 00 RW 01 JOMBLANG	1 Paket	SKPD (<i>baru</i>)		300.000.000	Diakomodir	
KECAMATAN BANYUMANIK							12.700.000.000	
03 JABUNGAN							1.300.000.000	

29.	Pengaspalan Jalan Utama	Jl.Mr Abdoel Madjid Djojoadingrat (Jl.Jabungan-Kramas , Jl.Jabungan- Penggaron) RT 0 RW 0 JABUNGAN	10400 m2	SKPD (<i>baru</i>)		1.300.000.000	Diakomodir
04 PEDALANGAN						4.000.000.000	
30.	PELEBARAN JALAN	JL KLENTENGSARI RAYA RT 3 RW 2 PEDALANGAN	1350 meter	SKPD (<i>baru</i>)		4.000.000.000	Diakomodir
05 BANYUMANIK						400.000.000	
31.	RAYA RT.02/RW.08 KEL.BANYUMANIK	JL. GRAFIKA RAYA RT 02 RW 08 BANYUMANIK	2500 M2	SKPD (<i>baru</i>)		400.000.000	Diakomodir
11 SUMURBOTO						7.000.000.000	
32.	PERBAIKAN JALAN,SALURAN DAN PENDESTRIAN JALAN SEPANJANG JL. PROF.SOEDARTO, SH	JL. PROF. SOEDARTO, SH NO.71 RT 01 RW 04 SUMURBOTO	700 m ¹	SKPD (<i>baru</i>)		7.000.000.000	Diakomodir
KECAMATAN NGALIYAN						15.000.000.000	
03 Bringin						3.600.000.000	
33.	PENINGKATAN JALAN KRT.WONGSONEGORO	JL. KRT WONGSONEGORO RT 0 RW 0 Bringin	12000 M2	SKPD (<i>baru</i>)		3.600.000.000	Diakomodir
04 PURWOYOSO						2.400.000.000	
34.	PENINGKATAN JL. GATOT SUBROTO	JL. GATOT SUBROTO RT 0 RW 0 PURWOYOSO	8000 M2	SKPD (<i>baru</i>)		2.400.000.000	Diakomodir
09 WONOSARI						9.000.000.000	
35.	PENINGKATAN JALAN KOPTU SUYONO	JL. KOPTU SUYONO RT 0 RW 0 WONOSARI	30000 M2	SKPD (<i>baru</i>)		9.000.000.000	Diakomodir
KECAMATAN GAYAMSARI						5.300.000.000	
01 TAMBAKREJO						300.000.000	
36.	BETONISASI JALAN	JL. PURWOSARI RAYA RT 05 RW 03 TAMBAKREJO	1440 METER	SKPD (<i>baru</i>)		300.000.000	Diakomodir
02 KALIGAWA						500.000.000	
37.	Normalisasi kali	JL. SAWAH BESAR RAYA RT 5 RW 6 KALIGAWA	900 meter	SKPD (<i>baru</i>)		500.000.000	Diakomodir

03 SAWAHBESAR							4.500.000.000	
38.	Peninggian dan Betonisasi Jalan Raya	Jl. Tambak Dalam Raya RT 1-7 RW 3 SAWAHBESAR	3600 m2	SKPD (<i>baru</i>)			4.500.000.000	Diakomodir
KECAMATAN PEDURUNGAN							2.000.000.000	
02 TLOGOMULYO							1.000.000.000	
39.	Saluran U Ditch Kanan Kiri	Jl. Taman Tlogomulyo Raya RT 5 RW 5 TLOGOMULYO	500 m'	SKPD (<i>baru</i>)			1.000.000.000	Diakomodir
05 Muktiharjo Kidul							750.000.000	
40.	Pembersihan Saluran di Dempel Raya	Jl. Dempel Raya RT 00 RW 16 Muktiharjo Kidul	1500 M3	SKPD (<i>baru</i>)			750.000.000	Diakomodir
08 Pedurungan Kidul							250.000.000	
41.	Pembuatan Pintu Air untuk lokasi kali tenggang	Jalan Zebra Raya samping SMK Pandanaran RT 05 RW 05 Pedurungan Kidul	1 paket	SKPD (<i>baru</i>)			250.000.000	Diakomodir
JUMLAH							172.109.000.000	

Reses / Pokir DPRD Tahun 2023

#	Masalah	Uraian Pekerjaan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kelurahan	Anggaran	Nama Pengusul	Keterangan
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Pembangunan talud saluran	di lingkungan RT 1	1	2	Karangroto	GENUK	112.460.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving dantalud saluran	di lingkungan RT 6	6	6	PENGGARON LOR	GENUK	102.800.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 1	1	4	Genuksari	GENUK	140.400.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving dan talud saluran	di lingkungan RT 3	3	4	Genuksari	GENUK	140.400.000	Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Peninggian jalan	JL. AL BAROKAH 2	x	6	BANGETAYU WETAN	GENUK	333.200.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Perbaikan jalan dan taman	di lingkungan RT 1 dan RT 5	1	6	BANGETAYU WETAN	GENUK	117.200.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Pembangunan talud saluran	di lingkungan RT 10	10	3	TLOGOMULYO	PEDURUNGAN	112.460.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Peninggian jalan	di lingkungan RT 14	14	3	TLOGOMULYO	PEDURUNGAN	285.000.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Pembangunan talud dan saluran air	di lingkungan RW 6	x	6	Genuksari	GENUK	121.740.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 4	4	4	BANGETAYU WETAN	GENUK	117.200.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 6	6	5	BANGETAYU WETAN	GENUK	117.200.000	H. Sodri, SH Fraksi : PKB	
3	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Cor Beton	JL. SURTIKANTI RAYA	9	1	BULU LOR	SEMARANG UTARA	496.930.800	H. Budiharto, ST, MM Fraksi : Nasdem	
11	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan Jalan	JL. NOROYONO	1	2	BULU LOR	SEMARANG UTARA	336.000.000	H. Budiharto, ST, MM Fraksi : Nasdem	
14	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Beton	JL. EROWATI SELATAN	5	2	BULU LOR	SEMARANG UTARA	372.698.100	H. Budiharto, ST, MM Fraksi : Nasdem	
15	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Beton	RT 03 / RW 01	3	1	PANGGUNG KIDUL	SEMARANG UTARA	476.610.800	H. Budiharto, ST, MM Fraksi : Nasdem	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	PEDURUNGAN LOR	1	8	PEDURUNGAN LOR	PEDURUNGAN	500.000.000	Meidiana Kuswara, A.MD Fraksi : PDI-P	

NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	PEDURUNGAN LOR	2	8	PEDURUNGAN LOR	PEDURUNGAN	500.000.000	Meidiana Kuswara, A.MD Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Crossing saluran (L:1m)	JL. PETEMPEN	5	1	KEMBANGSARI	SEMARANG TENGAH	7.434.000	Novi Sikmawati A, SE Fraksi : PDI-P
	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	betonisasi	JL. TAMBAK LOROK	5	12	TANJUNGMAS	SEMARANG UTARA	1.490.792.400	Novi Sikmawati A, SE Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Jalan yang sudah ada saat ini, perlu adanya penambalan aspal agar	JL. KARANGBENDO GG. 2 RT. 02/RW. 03	1	3	KARANGREJO	GAJAHMUNGKUR	226.400.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Imbas intensitas curah hujan, menyebabkan banyaknya sampah yang tertinggal menyebabkan	JL. KINTELAN	0	0	BENDUNGAN	GAJAHMUNGKUR	128.700.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Penambalan aspal diperlukan dikarenakan jalan yang ada saat ini	JL. LEMPONGSARI TIMUR 4	0	0	LEMPONGSARI	GAJAHMUNGKUR	254.700.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Jalan yang ada saat ini sudah banyak yang	JL. LEMPONGSARI BARAT 6	0	0	LEMPONGSARI	GAJAHMUNGKUR	364.650.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Jalan yang ada saat ini kurang memadai	JL. KELUD TIMUR 2	0	0	PETOMPON	GAJAHMUNGKUR	88.950.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	saluran air yang ada kurang memadai/ ambles	Jl. Raya Papandayan (Makam Karang Kempel)	0	0	GAJAHMUNGKUR	GAJAHMUNGKUR	58.168.500	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Jalan yang ada saat ini kurang memadai, sudah banyak lumut	JL. PERSEN RT. 01/RW. 06	0	0	SEKARAN	GUNUNGPATI	174.500.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Saluran yang ada saat ini sudah perlu adanya perbaikan	JL. WELIRANG 1	0	0	KARANGREJO	GAJAHMUNGKUR	181.580.000	Yosi Yonardo GRP, SE Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	Jl. Sembungharjo	8	2	SEMBUNGHARJO	GENUK	347.019.300	Adi Subkhan Ifana Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	JL. PERBAL	0	1	SEMBUNGHARJO	GENUK	694.038.600	Adi Subkhan Ifana Fraksi : PDI-P
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	JL. WIDORO 4	0	2	SEMBUNGHARJO	GENUK	694.038.600	Adi Subkhan Ifana Fraksi : PDI-P
4	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	drainase tidak berjalan lancar	JL. TANGGUL MAS BARAT 1	9	10	PANGGUNG LOR	SEMARANG UTARA	105.361.200	Melly Pangestu Fraksi : PSI
1	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	JL. KAUMAN RAYA	0	1	Karangroto	GENUK	150.000.000	Hanik Khoiru Solikah, SE Fraksi : PDI-P

2	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	JL. ZAENUDIN	6	2	Karangroto	GENUK	150.000.000	Hanik Khoiru Solikah, SE Fraksi : PDI-P	
3	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Betonisasi	JL. JATIMAS RAYA TENGAH	0	5	Karangroto	GENUK	150.000.000	Hanik Khoiru Solikah, SE Fraksi : PDI-P	
4	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Perbaiki Saluran	JL. KALICARI IV	3	3	KALICARI	PEDURUNGAN	150.000.000	Hanik Khoiru Solikah, SE Fraksi : PDI-P	
6	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Talud Sungai	JL. KALICARI IV	0	8	KALICARI	PEDURUNGAN	150.000.000	Hanik Khoiru Solikah, SE Fraksi : PDI-P	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	JL. KARANG ANYAR	x	1	BANYUMANIK	BANYUMANIK	105.200.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengerasan Jalan dengan cor beton	JL. EMPU SENDOK 1	x	1	BANYUMANIK	BANYUMANIK	182.289.380	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di jalan Trangkil Jaten Asri RT 7 dan Jl.	x	10	SUKOREJO	GUNUNGPATI	96.000.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	JL. TANJUNGSARI 3 DALAM	x	2	SUMURBOTO	BANYUMANIK	96.000.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	Jalan Kunir dan Jalan Temulawak	1	5	BANYUMANIK	BANYUMANIK	96.000.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	Jl. Kruing Raya	7	17	SRONDOL WETAN	BANYUMANIK	96.000.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya	Pembangunan talud saluran	JL. KALILANGSE GG. 2 RT. 09/RW. 03	9	3	GAJAHMUNGKUR	GAJAHMUNGKUR	99.700.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pembangunan Saluran Crossing	GG. WARU TIMUR RAYA	8	1	PEDALANGAN	BANYUMANIK	138.340.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Pembangunan Selokan	JL. RASAMALA UTARA DALAM	7	5	SRONDOL WETAN	BANYUMANIK	181.580.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	JL. MOEDAL 2	x	3	SUMURREJO	GUNUNGPATI	96.000.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	JL. TAMAN WATULAWANG 6	x	6	GAJAHMUNGKUR	GAJAHMUNGKUR	96.000.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	pengaspalan jalan	Jl. Bukit Umbul	5	4	SUMURBOTO	BANYUMANIK	85.800.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	

NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	pengaspalan jalan	di kawasan RT 5	5	2	TINJOMOYO	BANYUMANIK	85.800.000	Gumilang Febri W, ST,MM Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	PEMBUATAN JEMBATAN	GAYAMSARI	7	9	GAYAMSARI	GAYAMSARI	250.000.000	Rahmulyo Adiwibowo, Fraksi : PDI-P	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Aspal	JL. BUKIT MANYARAN PERMAI BLOK B1-C	2	10	SADENG	GUNUNGPATI	78.900.000	DR. H. Anang Budi Utomo, Fraksi : Golkar	
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Perbaiki Saluran	JL. BUKIT MANYARAN PERMAI BLOK O-P	3	5	SADENG	GUNUNGPATI	122.370.000	DR. H. Anang Budi Utomo, M.Pd Fraksi : Golkar	
NA	Berkurangnya kapasitas saluran/drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi	Saluran Drainase	JL. JETIS GG. 6 RT. 06/RW. 09	6	9	GUNUNGPATI	GUNUNGPATI	81.580.000	DR. H. Anang Budi Utomo, M.Pd Fraksi : Golkar	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Aspal	JL. KI SAPIN	4	2	KALISEGORO	GUNUNGPATI	169.800.000	DR. H. Anang Budi Utomo, M.Pd Fraksi : Golkar	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Aspal Dan Saluran tertutup	GG. COKRO	7	5	SEKARAN	GUNUNGPATI	0	DR. H. Anang Budi Utomo, M.Pd Fraksi : Golkar	
9	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan Jalan Abimanyu Raya dari Taman Indraprasta sampai Rel KA	Jl. ABIMANYU RAYA	0	4	PENDRIKAN LOR	SEMARANG TENGAH	350.000.000	H. Supriyadi, S.Sos, MA Fraksi : PDI-P	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di lingkungan RT 10	10	18	SENDANGMULYO	TEMBALANG	480.000.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di lingkungan RT 11	11	18	SENDANGMULYO	TEMBALANG	456.000.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di lingkungan RT 1	1	15	SENDANGMULYO	TEMBALANG	360.000.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 4	4	15	SENDANGMULYO	TEMBALANG	468.800.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di lingkungan RT 7	7	15	SENDANGMULYO	TEMBALANG	360.000.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di lingkungan RT 14	14	28	SENDANGMULYO	TEMBALANG	360.000.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 14	14	16	SENDANGMULYO	TEMBALANG	468.800.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengerasan Jalan dengan cor beton	di lingkungan RT 3	3	4	ROWOSARI	TEMBALANG	1.735.096.500	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 4	4	3	ROWOSARI	TEMBALANG	175.800.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RW 5	1	5	ROWOSARI	TEMBALANG	439.500.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	

NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengerasan Jalan dengan cor beton	di lingkungan RT 2`	2	4	ROWOSARI	TEMBALANG	2.602.644.750	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pemasangan Paving	di lingkungan RT 1	1	5	ROWOSARI	TEMBALANG	439.500.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Pengaspalan jalan	di lingkungan RT 9	9	4	WONOTINGAL	CANDISARI	432.000.000	H.M. Rohaini Fraksi : PKB	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Jalan Rusak perlu adanya perbaikan	lokasi di daerah kelurahan Sampangan	8	5	SAMPANGAN	GAJAHMUNGKUR	52.600.000	Hj. Umi Surotuddiniyah, Fraksi : PAN	
NA	Menurunnya kualitas fisik jalan kota	Jalan Rusak perlu adanya perbaikan	lokasi di daerah kelurahan Sampangan	9	6	SAMPANGAN	GAJAHMUNGKUR	96.000.000	Hj. Umi Surotuddiniyah, Fraksi : PAN	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan

masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dengan sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dan sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan serta kinerja sumber daya air dengan dukungan teknis agar terwujud Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 berpedoman Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka

pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Tujuan dan Sasaran Renja

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

Tujuan 1: **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob

Tujuan 2 **“Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir”
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob”
- b) Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap”
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik”

- c) Sasaran “**Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD**” memiliki 1 indikator yaitu Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	%	97,68
SASARAN: Meningkatkan kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	%	2,64
	Persentase kawasan rob	%	1,65
TUJUAN: Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	%	74,50
SASARAN: Meningkatkan fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	93,00
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	56,00
SASARAN: Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	74,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bertugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 258.839.007.046,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 34.046.468.726,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 224.792.538.320,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Semarang
Tahun 2023**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM				366,313,444,958.00	APBD		336.608.295.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				311.072.282.708	APBD		297.596.565.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	Kota Semarang	97.86%	30,921,938,141.00	APBD	97.86%	39.500.000.000
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	Kota Semarang	97.86%		APBD	97.86%	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Kota Semarang	96.17%	28.521.938.141	APBD	96.17%	37.900.000.000
		Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Kota Semarang	96.17%		APBD	96.17%	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	1.00 dokumen	545.000.000	APBD	1.00 dokumen	400.000.000
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	Kota Semarang	10.00 lokasi	2.000.000.000	APBD	10.00 lokasi	1.000.000.000
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	Kota Semarang	1.00 lokasi	3.000.000.000	APBD	1.00 lokasi	5.000.000.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai		Kota Semarang	0	1.500.000.000	APBD	0	0
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	1.00 kegiatan	1.084.766.388	APBD	1.00 kegiatan	1.500.000.000
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah I	Kota Semarang	1.00 kegiatan	18.450.000.000	APBD	1.00 kegiatan	29.000.000.000
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	1.00 kegiatan	1.942.171.753	APBD	1.00 kegiatan	1.000.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	Kota Semarang	83.00%	2.400.000.000	APBD	83.00%	1.600.000.000
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	Kota Semarang	83.00%		APBD	83.00%	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Database Irigasi	Kota Semarang	1.00 dokumen	100.000.000	APBD	1.00 dokumen	100.000.000

1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	Kota Semarang	80.00 persen	2.300.000.000	APBD	80.00 persen	1.500.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kota Semarang	65.00%	76.845.911.137	APBD	65.00%	82.101.888.000
		Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kota Semarang	65.00%	.	APBD	65.00%	
1.03.06.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>	Kota Semarang	99.17%	76.845.911.137	APBD	99.17%	82.101.888.000
		<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>	Kota Semarang	99.17%	.	APBD	99.17%	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	2.00 dokumen	1.405.000.000	APBD	2.00 dokumen	1.500.000.000
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan saluran drainase perkotaan	Kota Semarang	5.00 lokasi	20.500.000.000	APBD	5.00 lokasi	13.751.888.000
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	Kota Semarang	15.00 jenis	26.328.252.045	APBD	15.00 jenis	31.850.000.000
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	Kota Semarang	1.00 kegiatan	28.612.659.092	APBD	1.00 kegiatan	35.000.000.000
		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	Kota Semarang	15.00 jenis	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum.	APBD	15.00 jenis	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Kota Semarang	74.50%	224.154.433.430	APBD	74.50%	175.994.677.000
		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Kota Semarang	74.50%		APBD	74.50%	
1.03.10.2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	Kota Semarang	87.48%	224.154.433.430	APBD	87.48%	175.994.677.000
		<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	Kota Semarang	87.48%		APBD	87.48%	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kota Semarang	1.00 dokumen	2.650.000.000	APBD	1.00 dokumen	1.800.000.000
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	Kota Semarang	1.00 kegiatan	2.000.000.000	APBD	1.00 kegiatan	32.000.000.000
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	Kota Semarang	2.00 dokumen	450.000.000	APBD	2.00 dokumen	300.000.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah data survey dan kondisi jalan	Kota Semarang	2.00 dokumen	575.000.000	APBD	2.00 dokumen	600.000.000
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	Kota Semarang	1.00 kegiatan	20.000.000.000	APBD	1.00 kegiatan	65.000.000.000
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan		Kota Semarang	0	1.500.000.000	APBD	0	0
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan wilayah kota dan pedestrian	Kota Semarang	10.00 ruas jalan	49.386.000.000	APBD	10.00 ruas jalan	5.000.000.000
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	Kota Semarang	100.00 jenis	50.948.978.468	APBD	100.00 jenis	26.394.677.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	Kota Semarang	250.00 ruas jalan	81.250.000.000	APBD	250.00 ruas jalan	43.500.000.000
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah III	Kota Semarang	250.00 ruas jalan	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	APBD	250.00 ruas jalan	

		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah I	Kota Semarang	250.00 ruas jalan	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	APBD	250.00 ruas jalan	
		Operasi Pemeliharaan jalan	Kota Semarang	167.00 kilometer	DINAS PEKERJAAN UMUM	APBD	167.00 kilometer	
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah II	Kota Semarang	250.00 ruas jalan	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II	APBD	250.00 ruas jalan	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan		Kota Semarang	0	12.500.000.000	APBD	0	0
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasi Pemeliharaan Jembatan	Kota Semarang	1.00 unit	1.000.000.000	APBD	1.00 unit	500.000.000
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	Kota Semarang	1.00 jenis	1.894.454.962	APBD	1.00 jenis	900.000.000
X.XX	NON URUSAN		Kota Semarang		34.091.162.250	APBD		39.011.730.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	Kota Semarang	100.00%	34.091.162.250	APBD	100.00%	39.011.730.000
		Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
		Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
<i>X.XX.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>	<i>42.000.000</i>	APBD	<i>100.00%</i>	<i>46.000.000</i>
		<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>		APBD	<i>100.00%</i>	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Kota Semarang	2.00 dokumen	15.000.000	APBD	2.00 dokumen	17.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	2.000.000	APBD	1.00 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	2.500.000	APBD	1.00 dokumen	2.500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	3.000.000	APBD	1.00 dokumen	3.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	4.500.000	APBD	1.00 dokumen	4.500.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	5.000.000	APBD	1.00 dokumen	7.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	10.000.000	APBD	1.00 dokumen	10.000.000
<i>X.XX.01.2.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>	<i>18.287.313.298</i>	APBD	<i>100.00%</i>	<i>25.754.730.000</i>
		<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>		APBD	<i>100.00%</i>	

X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100.00 persen	18.055.553.298	APBD	100.00 persen	25.341.730.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100.00 persen	218.760.000	APBD	100.00 persen	400.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	1.00 dokumen	3.000.000	APBD	1.00 dokumen	3.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	2.00 dokumen	5.000.000	APBD	2.00 dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1.00 dokumen	5.000.000	APBD	1.00 dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Kota Semarang	100.00%	10.000.000	APBD	100.00%	16.000.000
		<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	5.000.000	APBD	1.00 dokumen	8.000.000
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	1.00 dokumen	5.000.000	APBD	1.00 dokumen	8.000.000
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kota Semarang	100.00%	10.000.000	APBD	100.00%	10.000.000
		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1.00 dokumen	5.000.000	APBD	1.00 dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Semarang	100.00 Skor 1-100	5.000.000	APBD	100.00 Skor 1-100	5.000.000
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>	Kota Semarang	100.00%	2.374.892.492	APBD	100.00%	1.985.000.000
		<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>	Kota Semarang	100.00%		APBD	100.00%	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	50.00 Jenis	150.000.000	APBD	50.00 Jenis	150.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Semarang	25.00 Jenis	995.461.545	APBD	25.00 Jenis	300.000.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	Kota Semarang	25.00 Jenis	75.000.000	APBD	25.00 Jenis	80.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	Kota Semarang	10.00 jenis	150.000.000	APBD	10.00 jenis	150.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	5.00 jenis	5.000.000	APBD	5.00 jenis	5.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kota Semarang	125.00 orang	127.000.000	APBD	125.00 orang	100.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	40.00 kegiatan	372.430.947	APBD	40.00 kegiatan	700.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik baru yang tersedia	Kota Semarang	1.00 aplikasi	500.000.000	APBD	1.00 aplikasi	500.000.000
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Kota Semarang	100.00%	100.000.000	APBD	100.00%	150.000.000

		<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>		APBD	<i>100.00%</i>	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	Kota Semarang	10.00 jenis	100.000.000	APBD	10.00 jenis	150.000.000
<i>X.XX.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>	<i>9.941.956.460</i>	APBD	<i>100.00%</i>	<i>7.050.000.000</i>
		<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>		APBD	<i>100.00%</i>	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	Kota Semarang	100.00 persen	10.000.000	APBD	100.00 persen	50.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kota Semarang	100.00 persen	4.431.956.460	APBD	100.00 persen	3.000.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	100.00 persen	5.500.000.000	APBD	100.00 persen	4.000.000.000
<i>X.XX.01.2.09</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Aset SKPD</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>	<i>3.325.000.000</i>	APBD	<i>100.00%</i>	<i>4.000.000.000</i>
		<i>Persentase Pemeliharaan Aset SKPD</i>	Kota Semarang	<i>100.00%</i>		APBD	<i>100.00%</i>	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan yang disediakan	Kota Semarang	4.00 jenis	2.000.000.000	APBD	4.00 jenis	1.750.000.000
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	Kota Semarang	5.00 jenis	50.000.000	APBD	5.00 jenis	75.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	10.00 jenis	150.000.000	APBD	10.00 jenis	175.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	Kota Semarang	1.00 jenis	1.125.000.000	APBD	1.00 jenis	2.000.000.000

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis;
3. Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

5. DINAS PENATAAN RUANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

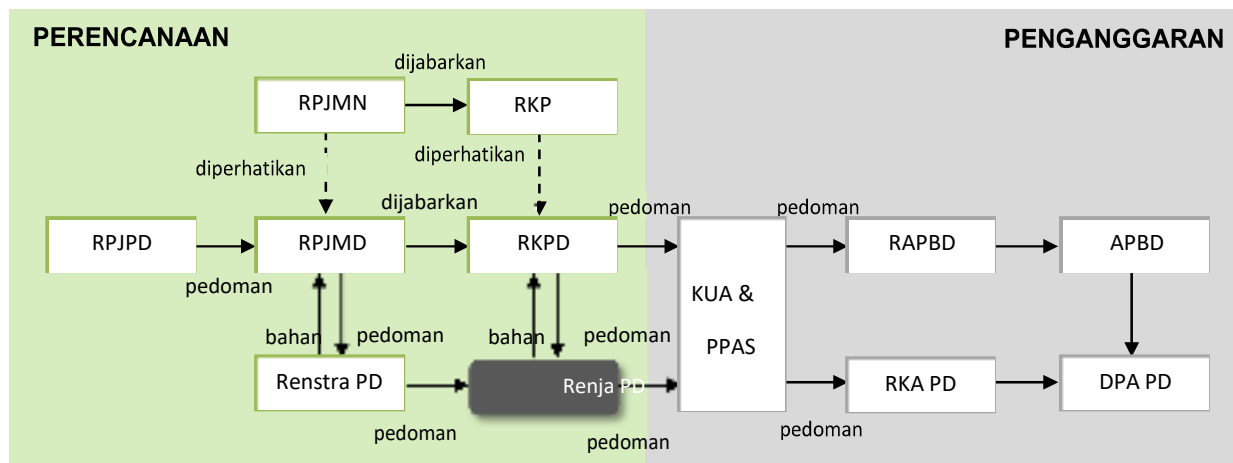
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah
(Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Dalam Gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan

Gender;

- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60); dan
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penataan Ruang sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Dinas Penataan Ruang melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp.239.832.727.078,- Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.161.606.166.224,- atau sebesar 67,38%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan hasil seperti pada Tabel 2.1 Terlampir.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.1.03.1.1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen Surat Menyurat Kantor		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi perkantoran alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi perkantoran barang cetak penggandaan pada tahun berkenaan		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi perkantoran komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi perkantoran peralatan rumah tangga yang		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Aparatur	Aparatur									
1.1.03.1.1.03.0 2.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional dinas		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan operasional dinas		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.02.083	Peenyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Pajak kendaraan operasional dinas yang dibayar pada tahun berkenaan		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1.03.1.1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan pembantu		100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	Dokumen LKPJ		1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.010	Penyusunan LAKIP	Dokumen LJKIP / LAKIP		1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	1 Dok	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen pelaporan keuangan semesteran		2 Dokumen	2 Dok	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.02.06.028	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen renja SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1.03.1.1.03.0 2.06.031	Penyusunan RKA dan DPA Murni	Dokumen RKA dan DPA Murni		2 Dokumen	2 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.03.1.1.03.0 2.06.033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Dokumen RKA Perubahan & DPA Perubahan		2 Dokumen	2 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas SDM	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Peningkatan kualitas SDM							100,00 %	100,00 %	100,00
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang						100,00 %	100,00 %	100,00
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang							100,00 %	100,00 %	100,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD						100,00 %	75,00 %	75,00	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00	
		Dokumen Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00				
		Dokumen Renstra			1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00				
		Tersusunnya Perencanaan; Penganggaran; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)								2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00	
		Dokumen RKA Murni	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Dokumen DPA Murni	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Dokumen DPA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	2 laporan	2 laporan	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Penyusunan LKPJ SKPD		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD							2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Belanja Jasa (Honor PA, KPA, PPK, SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Belanja Jasa TPHL		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN yang optimal							100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	50,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							100,00 %	50,00 %	50,00
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD						100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Peningkatan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00			
		Tercapainya kkoordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						12 Bulan	9 Bulan	75,00
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								100,00 %	100,00 %	100,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Administrasi perkantoran komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						20 Jenis	10 Jenis	50,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Administrasi perkantoran peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga							80 Jenis	60 Jenis	75,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Administrasi perkantoran alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersedianya Bahan Logistik kantor							100 Jenis	75 Jenis	75,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	80,00 %	80,00
		Administrasi perkantoran barang cetak penggandaan pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersedianya bahan logistic kantor							50 Jenis	40 Jenis	80,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	83,33 %	83,33
		Administrasi perkantoran bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							30 Buah	25 Buah	83,33
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyediaan Snack Makan Minum Tamu		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	15,00 %	15,00
		Penyediaan Snack Makan Minum Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							500 Kegiatan	75 Kegiatan	15,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00			
		Pengadaan Operasional Dinas Roda Empat		0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00 %					100,00 %	100,00 %	100,00
		Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat		100,00 %					1 Unit	1 Unit	100,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00 %		100,00 %	93,33 %	93,33	100,00 %	75,00 %	75,00
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Dokumen surat menyurat kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Terlaksananya surat menyurat kantor							100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100,00 %		100,00 %	80,00 %	80,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	80,00 %		100,00 %	80,00 %	80,00			
		Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan						100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Pemenuhan pemeliharaan aset tetap lainnya		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								100,00 %	100,00 %	100,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan						1 Bua	1 Buah	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	dibayarkan Pajaknya								
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Dinas		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
1.1.03.1.1.03.02.29	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun				66,00%					
1.1.03.1.1.03.02.29.001	Kajian Perencanaan Tata Ruang	Penataan dan Penunjukan Kawasan			66,67%						
1.1.03.1.1.03.02.29.002	Kajian Penataan dan Pemanfaatan Bangunan	Draft revisi Raperda Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan tertentu			100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1.03.1.1.03.02.29.005	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Penyusunan Dokumen RTBL			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.009	Optimalisasi pelayanan keterangan rencana kota	Peningkatan pelayanan keterangan rencana kota			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.014	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Dokumen nama rupa bumi sesuai peta RTRW			100,00%						
		Remote Sensing			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.015	Penyusunan DED	Dokumen DED Penataan Ruang			100,00%						
		DED Pengembangan Kawasan			0,00%						
		DED Ruang Publik			0,00%						
		DED Ruang Terbuka Hijau			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.016	Review DED	Review DED 1			100,00%						
		Review DED 2			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.017	Sosialisasi Perda RTRW Kota Semarang	Penyusunan dan Pensosialisasian Perda RTRW			100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1.03.1.1.03.02.29.019	Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik DISTARU	Pengembangan Aplikasi 1 (Android Ukur)			100,00%						
		Pengembangan Aplikasi 2 (Web GIS Ukur)			100,00%						
		Pengembangan Aplikasi 3 (Web GIS PBB)			100,00%						
		Perawatan Sistem Aplikasi Pelayanan			100,00%						
		Penyediaan Fitur Bahas Internasional one Click Investasi			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.021	Pengembangan Jaringan Titik Kontrol Horisontal	Pengembangan jejaring titik control horisontal			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.29.044	Sosialisasi KRK	Pembuatan Audio visual Informasi Distaru			100,00%						
		Pembuatan materi Informasi Distaru			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02.32	Program Pengelolaan Reklame	Persentase reklame berizin			75,83%						
1.1.03.1.1.03.02.32.024	Pembuatan Sarana Informasi / Reklame Non Komersial	Sarana Informasi/Reklame Non Komersial			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02.32.031	Penyusunan Perwal tentang Perda Reklame	Kajian perencanaan potensi Reklame di Sarpras			100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	9
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kawasan Semarang (non permanen)									
1.1.03.1.1.03.02.32.037	Pengawasan Reklame	Validasi data pengawasan titik reklame paket I			100,00%						
		Validasi data pengawasan titik reklame paket II			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.32.038	Pengendalian dan penertiban Reklame	Konsultan pembongkaran reklame paket I			100,00%						
		Konsultan pembongkaran reklame paket II			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.32.039	Sosialisasi dan Bimbingan Penyuluhan Reklame	Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan reklame			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02.32.042	Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Tata Ruang	Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan tata ruang			100,00%						
1.1.03.1.1.03.02.32.043	Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	Pengendalian bangunan gedung secara terpadu dengan instansi terkait			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase bangunan yang ber-IMB			54,94%	54,94%					
1.1.03.1.1.03.02.34.048	Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan SLF, Tim pelestari cagar	berita acara rekomendasi bangunan gedung tinggi (5 lantai keatas), sertifikat			90 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	budaya	laikfungsi, dan rekomendasi bangunan cagar budaya									
1.1.03.1.1.03.02. 34.050	Studi inventarisasi bangunan	Pembuatan Perwal Bangunan Gedung (RTBL Kota Lama)			1 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02. 34.056	Optimalisasi penataan, pemanfaatan dan pengawasan bangunan	Optimalisasi penataan, pemanfaatan dan pengawasan bangunan			1 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02. 34.057	Kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya	Kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Semarang			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02. 34.061	Workshop penerapan SLF di Kota Semarang	Workshop pemahaman akan SLF di Kota Semarang			0,00%						
1.1.03.1.1.03.02. 34.063	Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Nara Sumber Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan Gedung			1 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02. .35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun			43,70%						
1.1.03.1.1.03.02. 35.001	Operasional Iptb (ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)				1 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02. 35.002	Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Teknis				1 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1.03.1.1.03.02.35.005	Pembangunan Gedung Pemerintahan Kelurahan				1 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.006	Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan				0,5 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.007	Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang				6 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.008	Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan/ Kecamatan				0,3 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.009	Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang				0 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.010	Pembangunan Fasilitas Publik				3 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.011	Pembangunan Sport Center				4 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.35.019	Sosialisasi IPTB				0 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.36	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	Dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan yang tersusun (sesuai di buku RPJMD Perubahan)			33,00%						
1.1.03.1.1.03.02.36.001	Kajian Underground Kawasan Simpang Lima				0,00 %						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1.03.1.1.03.02.36.003	Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan				0,00 %						
1.1.03.1.1.03.02.36.004	Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan				0,00 %						
1.1.03.1.1.03.02.36.005	Kajian Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang				0,00 %						
1.1.03.1.1.03.02.36.008	Kajian Kawasan Perkotaan				3 Kegiatan						
1.1.03.1.1.03.02.36.010	Optimalisasi Perencanaan Penataan Ruang				7 Kegiatan						
1.03.08	Program Bangunan Gedung	Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00			
		Persentase tertatanya bangunan gedung								100,00 %	75,00 %
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			100,00 %		100,00 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	93,59 %	93,59
		Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG						5 Dokumen	0 Kegiatan	0,00	
		Kajian Implementasi SIMBG								1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang								1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
		Labelisasi SLF								1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
		Optimalisasi Penyelenggaraan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG								12 Kegiatan	9 Kegiatan	75,00
		Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG								1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00
		Penyusunan SLF Bangunan Gedung								1 Dokumen	2 Dokumen	200,00
		Perjalanan Dinas								1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
		Review Perwal SLF								1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Seleksi TPA Tim Ahli Cagar Budaya 2022								1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
		Sosialisasi Implementasi							8 Kegiatan	6 Kegiatan	75,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		SIMBG									
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	99,65 %	99,65	100,00 %	85,69 %	85,69
		Juklak Juknis Pengendalian Bangunan Gedung di Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Kajian Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Kajian Identifikasi Bangunan Gedung yang ber-SLF di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Kajian Identifikasi Bangunan Kelurahan di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Kajian Kebutuhan Bangunan Sport Center di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Kajian SIMBG di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Kajian Sistem SIMBG di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kajian Tingkat kerusakan Gedung Milik Pemerintah Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Pembangunan Alun-Alun Johar Tahap IV		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Balai Penyuluhan KB, Pagar, & Papan Nama Balai		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan & Dinas Pertanian		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Gedung Gudang Banjardowo		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Gedung Inspektorat		11.00 Kegiatan		11.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	9,09			
		Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS Multiyears		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Balaikota		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Kantor Kecamatan Banyumanik		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Lapangan Futsal Akpol		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Pagar & Pembangunan Cafe		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Balaikota									
		Pembangunan Puskesmas Mijen		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan RS Type D Tahap II		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan SD Cangkiran		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan Sentra PKL di Lapangan Olahraga (5 Titik)		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pembangunan SMP 45 Tahap II		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Penyusunan DED		15.00 Dokumen		15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	100,00			
		Review Perwal SLF di Kota Semarang		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100,00			
		Sport Center Kecamatan 1		2.00 Kegiatan		2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100,00			
		Sport Center Kecamatan 2		2.00 Kegiatan		2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100,00			
		Sport Center Kelurahan 1		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Sport Center Kelurahan 2		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembangunan Fasilitas Publik							9 Gedung	7 Gedung	77,77
		Pembangunan Gedung							10 Gedung	8 Gedung	80,00
		Pembangunan Sport Center							8 Lokasi	8 Lokasi	100,00
		Perencanaan Pembangunan							28 Dokumen	21 Dokumen	75,00
		Supervisi Pembangunan							23 Kegiatan	22 Kegiatan	95,65
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Studi Inventarisasi Bangunan		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	0 Dokumen	0,00			
		Juklak Juknis Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Kajian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Review Perda Bangunan Gedung							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Review Perda Retribusi Perijinan tertentu							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Kebijakan Pengelolaan bangunan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Kebijakan Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang							1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota								100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	0,00 %	0,00
		Pemberian Kompensasi; Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik; Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif						10 Paket	0 Paket	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan								100,00 %	87,50 %	87,50
		Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik Bangunan di Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan						48 Kegiatan	36 Kegiatan	75,00
		Juklak Juknis penilik Bangunan di Kota Semarang							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi								100,00 %	75,00 %	75,00
		Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi						48 Kegiatan	36 Kegiatan	75,00
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis			100,00 %		100,00 %	62,50 %	62,50	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	Daerah Kabupaten/Kota											
		Rehab Balai Kelurahan Karang Tempel	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00				
		Rehab Balai Kelurahan Kebon Agung		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00				
		Rehab Balai Kelurahan Lempongsari		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00				
		Rehab Gedung B Balaikota		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00				
		Renovasi Kantor Kel. Trimulyo		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	0.00 Kegiatan	0,00				
		Renovasi Kel. Sronдол Kulon		1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00				
		Rehab Mall Pelayanan Publik		2.00 Kegiatan		2.00 Kegiatan	0.00 Kegiatan	0,00				
		Perencanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung								2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung								8 Gedung	8 Gedung	100,00
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Fasilitas Publik								2 Gedung	2 Gedung	100,00
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Sport Center							2 Lokasi	2 Lokasi	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung							8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	80,00 %	80,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Pemeliharaan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	1.00 Tahun		1.00 Tahun	1.00 Tahun	100,00	1.00 Tahun	0.75 Tahun	75,00
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan		1.00 Tahun		1.00 Tahun	1.00 Tahun	100,00	1.00 Tahun	0.75 Tahun	75,00
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan		1.00 Tahun		1.00 Tahun	0.00 Tahun	0,00	1.00 Tahun	0.75 Tahun	75,00
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang		1.00 Tahun		1.00 Tahun	1.00 Tahun	100,00	1.00 Tahun	0.75 Tahun	75,00
		Pemeliharaan Sport Center		1.00 Tahun		1.00 Tahun	1.00 Tahun	100,00	1.00 Tahun	0.75 Tahun	75,00
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan yang ber-IMB	Persentase reklame yang berizin	55,45%		55,45%					
		Persentase Reklame yang Berizin		74,50%		74,50%	77,98 %	105,25	100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Daerah Kabupaten/Kota										
		terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Kajian Pendataan Reklame Permanen di Kota Semarang		1.00 dokumen		1.00 dokumen	3 Dokumen	100,00			
		Penyusunan Perwal tentang Perda Reklame	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1.00 dokumen		1.00 dokumen	3 Dokumen	100,00			
		Review Perwal Reklame di Kota Semarang		1.00 dokumen		1.00 dokumen	12 Dokumen	100,00			
		kajian teknis pembongkaran bangunan							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		kajian teknis pembongkaran reklame							1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan			1.00 dokumen		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	37,50 %	37,50
		Pembuatan Billboard Sarana Reklame Non	Jumlah Penataan	1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	6 Kegiatan	100,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Komersial	Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
		Pembuatan Videotron		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	0 Kegiatan	0,00			
		Optimalisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan (non asn)							12 Bulan	9 Bulan	75,00
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan								100,00 %	75,00 %	75,00
		Opersionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						48 Kegiatan	36 Kegiatan	75,00
		Pembongkaran reklame							96 Kegiatan	72 Kegiatan	75,00
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan dan Pengawasan Bangunan		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Tata Ruang		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Pengawasan reklame		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.20 Kegiatan	120,00			
		Pengendalian dan penertiban reklame		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.20 Kegiatan	120,00			
		Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan reklame bagi penyelenggaran reklame (Sosialisasi Masterplan Reklame)		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 Kegiatan	100,00			
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan								12 Kegiatan	9 Kegiatan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase perencanaan konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	terampil konstruksi						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								100,00 %	66,67 %	66,67
		Terselenggaranya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan						3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			100,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Sertifikasi Bintek dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	0 Kegiatan	0,00			
		Tersedianya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat							2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kelembagaan Konstruksi										
		Operasionalisasi Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunan gedung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	100,00			
		Sosialisasi Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunan gedung/tiahan Pelaku teknis bangunan gedung yang sesuai kriteria		1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	100,00			
		Operasionalisasi Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)							12 Kegiatan	9 Kegiatan	75,00
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	100,00%		100,00%	100,00%	100,00	100,00%	75,00%	75,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	90,39 %	90,39	100,00%	75,00%	75,00%
		Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang						100,00%	75,00%	75,00%
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan								100,00 %	66,67 %	66,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota										
		Tersusunnya dokumen Regulasi Tata Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						3 Dokumen	2 Dokumen	66,67
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota								100,00 %	100,00 %	100,00
		Kajian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota						2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			100,00 %		100,00 %	80,78 %	80,78	100,00 %	70,00 %	70,00
		Amdal Underground Simpang Lima	Jumlah Dokumen	1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.80 Dokumen	80,00			
		Andalalin IKM	Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Andalalin Undergorund Simpang Lima	Kabupaten/Kota	1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.80 Dokumen	80,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		DED Gapura Masjid Layur		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		DED Gerbang Masuk Kawasan Kampung Melayu		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		DED Underground Simpang Lima		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Kawasan Perkotaan		3.00 dokumen		3.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Manajemen Plan Kota Semarang Lama		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Penyusunan Dokumen Teknis RTBL		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Review Gedung Creative Hub TBRS		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00			
		Review Masterplan Kantor Pusat Pemerintahan		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Studi Keandalan Bangunan Gedung Shopping Center Johar (SCJ) Semarang		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 dokumen	80,00			
		UKL/UPL IKM		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0,80 dokumen	0,00			
		UKL/UPL Kantor Ketapang dan Pertanian		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		UKL/UPL Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		UKL/UPL SD Cangkiran I		1.00		1.00	1.00	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				dokumen		dokumen	dokumen				
		UKL/UPL Technopark		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang							10 Dokumen	7 Dokumen	70,00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Sosialisasi KRK		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Sosialisasi Perda RTRW/ Sosialisasi Perda Tata Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang							4 Kegiatan	3 Kegiatan	75,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	75,00 %	75,00
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang						100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			di Kota Semarang								
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota								100,00 %	100,00 %	100,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perda RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								100,00 %	100,00 %	100,00
		Sosialisasi KRK	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat						1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	9,09 %	9,09	100,00 %	75,00 %	75,00
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi			100,00 %		100,00 %	18,18 %	18,18	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Pembangunan Daerah										
		Dokumen Buku Saku Pelayanan KRK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Draft Raperda RDTD Kecamatan Tugu		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Azas Keadilan Retribusi KRK		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00			
		Kajian Daya Dukung Wilayah Pesisir Kota Semarang (Batimetri, Gelombang, Angin, Daya Dukung Tanah)		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Kajian Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Kajian Penyederhanaan Perijinan		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Kajian Penyediaan RTH		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Kajian Percepatan Perijinan (Paperless, IT, dll)		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Kajian Perubahan Garis Pantai Semarang		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Penyusunan Manual Book Pelayanan		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		TKPRD	1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00				
		Forum Penataan Ruang							1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kota Semarang									
		Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko							1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100,00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			100,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	93,75 %	93,75
		Belanja Jasa Konsultansi Android Reklame		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Belanja Jasa Konsultansi Dashboard KRK		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Belanja Jasa Konsultansi Upgrade Android Ukur		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Belanja Jasa Konsultansi WEBGIS Reklame		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Belanja Jasa Konsultansi Dashboard PBB	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Jejaring Titik Kontrol Horisontal		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Pembankuan Nama Rupa Bumi		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Video (iklan layanan Informasi Tata Ruang), Leaflet/Pamflet Tata Ruang, Buku Profil Tata Ruang		1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi							100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penataan Ruang									
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1							100,00 %	100,00 %	100,00
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1							100,00 %	100,00 %	100,00
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1							100,00 %	100,00 %	100,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	27,00 %	27,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang						100,00 %	75,00 %	75,00
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang								100,00 %	75,00 %	75,00
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang						12 Kegiatan	9 Kegiatan	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			100,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00			
		Kajian Pengendalian Tata Ruang Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
		Kajian SOP Pengawasan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.00 dokumen		1.00 dokumen	0.00 Dokumen	0,00			
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			100,00 %		100,00 %	54,00 %	54,00	100,00 %	75,00 %	75,00
		Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00 %		100,00 %	54,00 %	54,00			
		Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						36 Kegiatan	27 Kegiatan	75,00
		Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						12 Bulan	9 Bulan	75,00
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
1.2.04.1.1.03.02.15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tertib administrasi pertanahan			88,27%						
1.2.04.1.1.03.02.15.003	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di Kelurahan	Persentase tertib administrasi pertanahan			95,40%						
1.2.04.1.1.03.02.15.004	Survey Primer Data Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan			65,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.2.04.1.1.03.02.15.006	Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Tata Ruang dan Bangunan	Persentase tertib administrasi pertanahan			97,97%						
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian kasus tanah Negara (%) (fasilitasi penyelesaian kasus tanah negara)		100,00 %	100,00 % (15 kasus)	100,00 % (23 kasus)	100,00 % (27 kasus)	100,00			
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota Semarang						100,00 %	80,00 %	80,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00			
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota Semarang						100,00 %	75,00 %	75,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertaahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	75,00 %	75,00
		terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100,00 %	75,00 %	75,00
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah			100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten/Kota										
		Kajian Analisa Peran PPNS dalam Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Model Mediasi Sengketa		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Pembengkalan Mediator Kepada Aparatur Wilayah Kel. dan Kec.		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Penapisan Hukum Sengketa		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Penguatan SDM Penanganan Sengketa Tata Ruang Tanah dan Bangunan		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Penyusunan Database Sengketa yang Terintegasi Berbasis Teknologi Informasi		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Kajian Review Perwal 38 Tahun 2012		1.00 dokumen		1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00			
		Terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan							100,00 %	75,00 %	75,00
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Terselenggaranya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk						100,00 %	95,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembangunan		pembangunan								
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	65,00 %	65,00
		terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	75,00 %	75,00
		terselenggarakannya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah						12 kegiatan	9 kegiatan	75,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terkoordinir penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						12 kegiatan	9 kegiatan	75,00
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						100,00 %	85,00%	85,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	95,00 %	95,00
		ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						100,00 %	95,00 %	95,00
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan								100,00 %	75,00 %	75,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Objek Redistribusi Tanah										
		terinventarisasikan subjek dan objek redistribusi tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						12 kegiatan	9 kegiatan	75,00
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah								100,00 %	75,00 %	75,00
		terlaksanakannya inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						12 kegiatan	9 kegiatan	75,00
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								100,00 %	75,00 %	75,00
		terkoordinasikan penyelenggaraan redistribusi tanah objek	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah						12 kegiatan	9 kegiatan	75,00
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								100,00 %	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						48 kegiatan	24 kegiatan	50,00
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	65,00 %	65,00
		ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota							100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	50,00 %	50,00
		terlaksanakannya inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee							12 kegiatan	6 kegiatan	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	50,00 %	50,00
		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee							12 kegiatan	6 kegiatan	50,00
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat								100,00 %	65,00 %	65,00
		Terselesaikannya penempatann tanah ulayat							100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	65,00 %	65,00
		terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota							100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terselesaikannya koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat							12 kegiatan	6 kegiatan	50,00
2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	50,00 %	50,00
		terselenggarakannya koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat							12 kegiatan	6 kegiatan	50,00
2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku								100,00 %	50,00 %	50,00
		terlaksanakannya penetapan tanah ulayat dalam 1 daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang							48 kegiatan	24 kegiatan	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		berlaku									
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Tertib administrasi pertanahan	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	75,00%		75,00%	99,95%	133,27			
		Terselesaikannya permasalahan tanah kosong							100,00 %	94,50%	94,50
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong								100,00 %	65,00 %	65,00
		Terselesaikannya permasalahan tanah kosong	Terselesaikannya permasalahan tanah kosong						100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	50,00 %	50,00
		Terkoordinasi dan tersinkronisasikannya penyelesaian tanah kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong						12 kegiatan	6 kegiatan	50,00
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			100,00 %		100,00 %	99,11%	99,11%	100,00 %	95,00 %	95,00
		terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah						100,00 %	95,00 %	95,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			kosong								
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			100,00 %		100,00 %	99,11%	99,11%	100,00 %	100,00 %	100,00
		Fasilitasi proposal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1.00 kegiatan		1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	100,00			
		Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di Kelurahan		4.00 dokumen		4.00 dokumen	4.00 dokumen	100,00			
		Survey Primer Data Pertanahan		10.00 dokumen		10.00 dokumen	10.00 dokumen	100,00			
		Terlaksananya inventarisasi tanah kosong								12 kegiatan	12 kegiatan
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong								100,00 %		
		Termanfaatkannya tanah tanah kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong						12 kegiatan		
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah								100,00 %	65,00 %	65,00
		Terkelolanya izin membuka tanah	Terkelolanya izin membuka tanah						100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah								100,00 %	65,00 %	65,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Tertibnya izin membuka tanah	Tertibnya izin membuka tanah						100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah								100,00 %	75,00 %	75,00
		terkoordinasi dan tersinkronisasikannya pemberian izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah						12 kegiatan	9 Kegiatan	75,00
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara								100,00 %	75,00 %	75,00
		terkendalinya pemanfaatan tanah negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara						12 kegiatan	9 Kegiatan	75,00
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah								100,00 %	65,00 %	65,00
		terselesaikannya penatagunaan tanah	terselesaikannya penatagunaan tanah						100,00 %	65,00 %	65,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								100,00 %	65,00 %	65,00
		tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu	tergunakannya tanah yang hamparannya						100,00 %	65,00 %	65,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
						Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		daerah kab/kota	dalam satu daerah kab/kota								
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								100,00 %	75,00 %	75,00
		terkoordinasi dan tersinkronisasikannya perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam (Satu) Kabupaten/Kota						12 kegiatan	9 Kegiatan	75,00
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota								100,00 %		
		terpetakannya zona nilai tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya						12 kegiatan		
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota								100,00 %		
		terkoordinasi dan terlaksananya konsolidasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan						12 kegiatan		

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 2 urusan, 7 program dan 11 Indikator Kinerja Program dan 15 Kegiatan dengan 15 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 11 Indikator kinerja program, terdapat 4 Indikator yang melampaui target, 6 Indikator memenuhi target, serta 1 Indikator tidak memenuhi target.
 - c) Dari 15 Indikator kinerja kegiatan, terdapat 1 indikator yang tidak memenuhi target.
- 2) Evaluasi Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan, 7 Program dengan 11 indikator program dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan;
 - b) Dari 11 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 6 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 1. Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 1 Indikator masih dalam proses.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.610.849.388	176.216.035.653	83,67
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.080.214.996	17.483.909.252	82,94
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.618.920	36.946.500	88,77
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.737.200	11.216.000	88,06

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.417.880	2.176.750	90,03
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.417.880	2.176.750	90,03
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.412.930	2.172.250	90,03
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.412.930	2.172.250	90,03
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.368.700	5.708.000	89,63
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.851.400	11.324.500	88,12
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.302.664.556	12.439.174.108	93,51
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.422.422.621	11.800.385.408	94,99
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	868.034.740	627.120.700	72,25
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.125.265	3.855.100	93,45
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.040.965	3.783.700	93,63
5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.040.965	4.029.200	99,71
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0,00
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.294.992.898	4.235.762.379	67,29
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.392.855	20.888.000	85,63
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.529.646.874	3.578.205.260	79,00
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.282.254	55.286.250	76,49
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.492.440	241.599.597	91,00
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	245.866.268	177.323.094	72,12
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.613.207	8.051.000	25,47
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.000.000	820.500	1,22
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.058.699.000	153.588.678	14,51
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pemerintah Daerah			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.291.622	374.451.141	61,97
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.917.000	1.500.000	18,95
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.815.840	34.948.141	66,17
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	543.558.782	338.003.000	62,18
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	836.647.000	397.575.124	47,52
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	836.647.000	397.575.124	47,52
B	Program Penataan Bangunan Gedung	172.732.167.386	114.118.096.061	66,07
I	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	172.732.167.386	114.118.096.061	66,07
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.297.689.061	1.097.510.125	78,63
2	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	126.347.124.003	89.375.245.556	70,74
3	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	16.695.206	0	0,00
4	Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	344.793.455	294.091.750	85,30
5	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21.854.584.547	14.951.538.668	68,41
6	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	22.871.281.114	8.399.709.962	36,73
C	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.354.827.750	3.120.748.559	93,02
I	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.354.827.750	3.115.355.359	92,86

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	166.170.378	159.005.010	95,69
2	Sub Kegiatan Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2.800.045.897	2.600.793.350	92,88
3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab/Kota	388.611.475	360.950.199	92,88
D	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	134.940.464	63.923.351	47,37
I	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	134.940.464	63.923.351	47,37
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	134.940.464	63.923.351	47,37
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	0	0	0,00
E	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.308.698.792	8.245.353.560	61,95
I	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6.497.662.290	2.652.050.602	40,82
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	6.033.902.610	2.630.403.729	43,59
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	463.759.680	21.646.873	4,67
II	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5.358.503.795	4.560.827.858	85,11
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2.152.182.410	1.659.807.677	77,12
2	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	3.206.321.385	2.901.020.181	90,48
III	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.452.532.707	1.032.475.100	71,08
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	436.945.147	79.650.500	18,23
2	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	3.206.321.385	2.774.160.740	86,52
	URUSAN PERTANAHAN	29.221.887.690	28.800.081.677	98,56
A	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	681.427.723	520.298.001	76,35
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.427.723	520.298.001	76,35

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	681.427.723	520.298.001	76,35
B	Program Pengelolaan Tanah Kosong	28.540.449.967	18.053.837.440	63,26
I	Kegiatan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong	28.540.449.967	18.053.837.440	63,26
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	28.540.449.967	18.053.837.440	63,26
	DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG	239.832.818.078	161.606.166.224	67,38

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 7 program dan 15 kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebesar Rp. 239.832.818.078,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp161.606.166.224,00 dengan sisa sebesar Rp78.226.651.854,00 (32.61%) dengan uraian berikut :

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp. 76.544.927.377,00 dengan realisasi sebesar Rp54.137.605,00 (70.80%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.348.789.772,00 (29,20%)
- b. **Belanja Modal** : anggaran sebesar Rp163.287.799.701,00 dengan realisasi sebesar Rp107.410.028619,00 (65.78%) dan sisa anggaran sebesar Rp55.877.771.082,00 (34.22%).

2.2 Analisis Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Penyelenggaraan Dinas Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tahun 2016-2021										
Tujuan : Mewujudkan tata ruang yang berdaya guna	Persentase pengembangan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna		77	96	0	0	68	75	0	0
	Persentase kesesuaian tata ruang		84	85			96,73	97,59	0	0
Sasaran 1 : Tertatanya kawasan strategis	Persentase kawasan strategis yang tertata (jumlah 22 kawasan)		72,73	81,82			86,36	90,91	0	0
	Persentase cakupan layanan OPD		100	100			100	100	0	0
Sasaran II : Meningkatnya kawasan / bangunan yang sesuai dengan peraturan perijinan	Persentase bangunan yang ber-IMB		54,9	55,45			54,49	55,56	0	0
	Persentase kawasan / bangunan yang dibangun sesuai dengan izin		69,5	74,5			75,83	74,58	0	0
Tujuan 2021-2026										
Tujuan : Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan				83	85			83	85,07
Sasaran I : Meningkatnya kesesuaian tata ruang	Persentase kawasan strategis yang tertata				77,72	81,82			92	93
	Persentase kesesuaian tata ruang				100	100			100	100
Sasaran II : Meningkatnya bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan	Persentase kepatuhan bangunan yang ber-IMB				59,60	62,18			59,60	62,31
	Persentase reklame berizin				78,23	80			78,3	80
Sasaran III : Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan				83,33	84,21			100	100
	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				77	78			76,49	78
Sasaran IV : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah										

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan tata ruang yang berdaya guna”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) “persentase pengembangan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna”, dimana realisasinya sebesar 75% dari target sebesar 96%;
 - 2) “persentase kesesuaian tata ruang”, dimana realisasinya sebesar 95,98% dari target sebesar 85%.
- b. Sasaran **“Tertatanya kawasan strategis”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase kawasan strategis yang tertata (jumlah 22 kawasan)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 90,91% dari target sebesar 81,82% (capaian sebesar 111,11%). Keberhasilan pencapaian atas indikator tersebut tidak lepas dari pelaksanaan program kegiatan berikut:
 - 2) Indikator “Persentase cakupan layanan OPD” belum dapat mencapai target sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%).
- c. Sasaran **“Meningkatnya kawasan/bangunan yang sesuai dengan peraturan perijinan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase bangunan yang ber-IMB” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 55,56% dari target sebesar 55,45% (capaian sebesar 100,19%);
 - 2) Indikator “Persentase reklame berizin” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 74,58% dari target sebesar 74,5% (capaian sebesar 100,24%).
 - 3)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari keenam indikator sasaran, Sasaran **“Tertatanya kawasan strategis”** dengan Indikator “Persentase kawasan strategis yang tertata (jumlah 22 kawasan)” menunjukkan tren yang sangat baik sekali, hal ini menyangkut berbagai hal, antara lain regulasi dari pemerintah sendiri dan kerja sama dengan pihak lain sudah cukup bersinergi.

Di samping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4

**Indikator Program Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100% (38 dokumen)	100%	100%	100%	66% (25 dokumen)	100% (30 dokumen)	100%	100%
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah negara	100% (15 kasus)	100% (23 kasus)			100% (15 kasus)	100% (27 kasus)		
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang			100%	100%			100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tertib administrasi pertanahan	66%	75%			88,27%	99,95%		
		Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong			100%	100%			100%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%			100%	100%		
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%			100%	100%		
		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang ber-IMB	54,9%	55,45%			54,94%	55,56%		
		Persentase sarpras dasar perkotaan yang terbangun	100% (48 gedung)	100%			43,7% (21 gedung)	84,85% (28 gedung)		
		Dokumen perencanaan sarpras dasar yang tersusun	100%	100%			33%	100%		
		Persentase tertatanya bangunan gedung			100%	100%			100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	Persentase pelaku teknis yang sesuai kriteria		100%			100%	100%		
		Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan			100%	100%			100%	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame berizin	69,5%	74,5%	100%	100%	75,83%	74,58%	100%	100%

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

Capaian indikator program pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa secara garis besar angka yang ditarget hingga tahun 2023 optimis tercapai

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD

serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Kesesuaian program RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2021 sebesar 100 %. Sehingga sudah ada kesesuaian antara program RPJMD, program RKPD serta program APBD. hal ini menyangkut berbagai hal, antara lain regulasi dari pemerintah sendiri dan kerja sama dengan pihak lain sudah cukup bersinergi

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6**Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021 / 2022	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Usulan	Usulan					4.567	4.235		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					3.390	3.182		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	71,00	72,00	73,00	74,00	74,23	75,14	75,00	75,00

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 75,14 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 74,23 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7**Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase kesesuaian tata ruang	84	85			96,73	97,59			
2	Persentase bangunan ber-IMB / Jumlah Bangunan (%)	54,90	55,45			54,94	56,86			
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota			59,6	62,1					
3	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan database pertanahan)	66	75			88,27	99,95			

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
4	Penyelesaian kasus tanah negara (%) (fasilitasi penyelesaian kasus tanah negara)	100 (22 kasus)	100 (23 kasus)			100 (15 kasus)	100 (27 kasus)			
5	Luas lahan produktif di Kota Semarang	34.739	34.739			34.739	34.739			
6	Luas wilayah perkotaan	37.370,56	37.370,56			37.370,56	37.370,56			

Sumber : Dinas Penataan Ruang, 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat kita jelaskan bahwa pencapaian realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat terealisasi rata-rata melebihi 100% dari target yang ditentukan sehingga dapat disampaikan bahwa target kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berhasil. Hal ini terwujud berkat adanya perencanaan yang matang dan dedikasi sumber daya manusia yang tinggi dalam melaksanakan sasaran, program kerja dan kegiatan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah yang kurang optimal;
- b. Penataan kawasan strategis yang kurang tertata;
- c. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. Masih banyak bangunan Gedung yang penataan dan pemanfaatannya melanggar/tidak sesuai dengan Perda RTRW;
- e. Masih banyaknya pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan;
- f. Banyaknya pelanggaran pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan aturan dan masih banyak reklame yang belum berizin;
- g. Tertib administrasi tanah dengan memberikan fasilitasi untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penataan ruang dan pertanahan di antaranya:

- a. Penyusunan RTRW dan RDTR beserta peraturan zonasi perlu mensinkronkan UU Cipta Kerja beserta PP dan turunan peraturan yang baru;
- b. Kebijakan permukiman perkotaan serta menyelesaikan kebutuhan rumah adalah vertical building yang ramah lingkungan, sehingga perlu menyediakan infrastruktur sarana prasarana perkotaan dan dapat mengurangi konflik sosial.
 - Kurangnya alokasi lahan-lahan non private untuk dimanfaatkan sebagai RTH publik dan pemenuhan minimal RTH 20% pada RTR perkotaan;
 - Masih tumpang tindihnya pengawasan pemanfaatan Ruang dengan OPD lain;
 - Belum optimalnya penegakkan peraturan/sanksi;
 - Masih minimnya pemahaman terhadap perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang yang ditetapkan;
 - Rencana tata ruang yang terbaru harus selalu diinformasikan kepada masyarakat baik melalui media sosial, media masa, aplikasi sistem informasi maupun tatap muka;
 - Kurangnya tenaga pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
 - Kurangnya sarana pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
 - Belum terlaksananya penegakan peraturan / sanksi;
 - Kecenderungan masyarakat dalam pembangunan tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan;
 - Belum optimalnya koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang hingga tingkat kelurahan.
- c. Pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan;
- d. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu : belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya terkait dengan terbitnya regulasi yang sangat berpengaruh pada struktur keuangan, perencanaan pembangunan dan pengawasan internal daerah
- e. Minimnya ketersediaan tenaga terampil konstruksi dan Tenaga Jasa Konstruksi yang bersertifikasi dan masyarakat yang belum memahami fungsi dan aturan Penyelenggaraan IPTB;

- f. Kecenderungan pemahaman masyarakat yang kurang terkait konstruksi Bangunan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.
- g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pemanfaatan Tanah warga dan Tanah Desa dan banyaknya sengketa warga terkait pertanahan;
- h. Banyaknya Tanah milik pemerintah yang hilang akibat tergerus oleh sungai, parit, jalan, maupun menjadi Tanah Milik sehingga data jumlah bidang yang didaftarkan berbeda dengan data hasil inventarisasi;
- i. Banyaknya Tanah Desa hasil tukar menukar maupun jual beli dengan tanah warga yang secara administrasi belum terselesaikan sehingga belum dapat didaftarkan;
- j. Adanya tanah warga yang overlay (tumpang tindih) dengan Tanah Desa maupun sebaliknya sehingga belum dapat didaftarkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin demi kepastian hukum;
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan tata ruang kota dan kurangnya konsistensi masyarakat dalam melaksanakan aturan tata ruang;
- Penataan tata ruang kota yang lebih tertata sesuai dengan RTRW dan RTDR;
- Kurang tertatanya administrasi pertanahan di Kota Semarang.
-

b. Peluang:

- Adanya sinkronisasi Renstra Kementrian PU dan Renstra Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan RTRW Kota Semarang;
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, Renstra dan RKPD yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
- Adanya bidang Pertanahan diharapkan akan tercapai peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kota Semarang
- Adanya koordinasi dan sinkronisasi Lintas OPD dalam pelaksanaan program/kegiatan terutama Urusan Penataan Ruang;
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang;
- Dukungan stakeholder dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan IMB/PBG & KRK pada saat akan mendirikan bangunan semakin meningkat;

- Adanya pengembangan aplikasi secara online guna meningkatkan pelayanan pada bidang Tata Bangunan dan Bidang Tata Ruang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan strategis yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan.
2. Optimalisasi reforma agraria
3. Optimalisasi pembangunan kantor Kecamatan dan kelurahan sebagai dukungan pelayanan publik;
4. Optimalisasi fasilitasi dan mediasi konflik pertanahan;
5. Wilayah Kota Semarang belum seluruhnya memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sehingga belum optimal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga perlu adanya peningkatan penataan dan pemanfaatan bangunan gedung / Menurunnya Bangunan yang melanggar Perda RTRW;
6. Optimalisasi Pengelolaan dan Penertiban Reklame;
7. Optimalisasi pelayanan ijin pemanfaatan ruang (KRK); dan
8. Optimalisasi penertiban pelanggaran tata guna lahan dan bangunan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan social
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh

- 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko

- 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar”**. Namun sebagai OPD pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertahanan di Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan focus “Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan”, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				185.674.959.038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				200.349.959.038	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100 %	23.797.791.708	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100 %	23.867.232.694	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan dan rencana anggaran SKPD	100 %	180.178.660	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan dan rencana anggaran SKPD	100 %	180.178.660	-
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97.458.360	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97.458.360	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.492.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.492.700	-
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.167.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.167.300	-
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	7.608.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	7.608.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.167.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.167.300	-
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	16.704.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	16.704.000	-
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	23.581.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	23.581.000	-
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	15.274.195.503	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	15.274.195.503	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.647.539.103	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.647.539.103	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	1.596.266.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	1.596.266.400	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10.230.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10.230.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	10.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	10.080.000	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	10.080.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	10.080.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	620.711.950	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	680.711.950	
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	125.045.050	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	125.045.050	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	495.666.900	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	555.666.900	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.644.031.675	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.653.502.661	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	180.267.581	Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	180.267.581	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	474.605.883	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	480.205.078	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kantor										
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	161.162.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	161.162.700	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	229.899.624	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	229.899.624	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	507.900.535	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	507.900.535	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	23.839.338	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	23.839.338	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	930.429.620	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	930.429.620	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	3.135.926.394	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	3.139.798.185	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	952.307.940	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	952.307.940	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 laporan	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 laporan	9.500.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75 Laporan	315.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75 Laporan	315.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	627.807.940	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	627.807.940	
1.03.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	1.126.335.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	1.126.335.980	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	666.559.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	666.559.250	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	423.458.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	423.458.550	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Kota Semarang	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	144.774.095.314	Program Penataan Bangunan Gedung	Kota Semarang	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	159.104.870.889	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	144.774.095.314	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	159.104.870.889	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	4.100.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	4.144.647.366	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	118 Dokumen	99.561.058.979	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	118 Dokumen	105.561.058.979	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	550.000.000	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	596.128.209	
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	135 Unit	746.000.000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	135 Unit	796.000.000	
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat	Kota Semarang	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	10 Pengelola	325.000.000	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat	Kota Semarang	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	10 Pengelola	325.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kabupaten/Kota		Bantuan teknis			Kabupaten/Kota		Bantuan teknis			
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10	300.000.000	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10	300.000.000	
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2310 Unit	496.955.000	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2310 Unit	546.955.000	
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	53 Unit	399.814.000	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	53 Unit	449.814.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	36 Unit	24.802.431.972	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	36 Unit	32.892.431.972	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	13.492.835.363	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	13.492.835.363	
1.03.09	Program Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya	Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	4.900.000.000	Program Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya	Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	4.900.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	4.900.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	4.900.000.000	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	600.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	600.000.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	3.300.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	3.300.000.000	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	850.000.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	850.000.000	
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	150.000.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	1.257.746.036	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kota Semarang	Persentase reklame yang berizin	100%	1.357.746.036	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	1.257.746.036	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	1.357.746.036	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	276.049.765	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	376.049.765	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang	208.675.981	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang	208.675.981	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi yang terselenggara	370 Orang	547.007.198	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi yang terselenggara	370 Orang	547.007.198	
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen	226.013.092	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen	226.013.092	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Semarang	Persentase Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	10.945.355.980	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Semarang	Persentase Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	11.120.109.419	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	5.532.211.011	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	5.581.964.450	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.235.792.837	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.235.792.837	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	770.914.595	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	770.914.595	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.234.833.174	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.234.833.174	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	290.670.405	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	340.423.844	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	386.053.986	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	386.053.986	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	209.236.884	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	209.236.884	
1.03.12.2.01.02	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan	1 Dokumen	176.817.102	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan	1 Dokumen	176.817.102	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			tanggung jawab Masyarakat					tanggung jawab Masyarakat			
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	2.681.921.143	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	2.781.921.143	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	821.243.044	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	921.243.044	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	1.860.678.099	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	1.860.678.099	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	2.345.169.840	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	2.370.169.840	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	297.382.873	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	297.382.873	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	285.605.592	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	310.605.592	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	2 Dokumen	1.762.181.375	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	2 Dokumen	1.762.181.375	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penataan Ruang					Penataan Ruang			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				24.190.801.010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				24.315.801.010	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang	100 %	781.158.501	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang	100 %	804.751.409	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	781.158.501	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	804.751.409	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokume	322.802.107	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokum	322.802.107	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara	458.356.394	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara	481.949.302	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	6.637.818.927	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	6.486.473.136	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.637.818.927	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.486.473.136	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0 Dokumen		0	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	6 Dokumen	20.606.929	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	6.637.808.927	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	6.465.866.207	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	778.617.566	7	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	819.831.424	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	778.617.566	7	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	819.831.424	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	587.935.298	8	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	587.935.298	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	190.682.268	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	190.682.268	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	0 Dokumen	0	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	3 Dokumen	20.606.929	
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	20.606.929	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100 %	15.497.917.035	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	15.650.947.322	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100 %	205.479.035	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100 %	230.479.035	
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	205.479.035	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	230.479.035	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	15.292.438.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	15.420.468.287	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1 Laporan	15.292.438.000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1 Laporan	15.399.861.358	
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	0 Dokumen	0	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	20.606.929	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kota Semarang	Terkelolanya izin membuka tanah	100 %	313.621.984						
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah ventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Terkelolanya izin membuka tanah	100 %	313.621.984	Penerbitan Izin Membuka Tanah ventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Terkelolanya izin membuka tanah	100 %	313.621.984	
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5 Dokumen	198.575.714	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kota Semarang	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 Dokumen	198.575.714	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	115.046.270	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	115.046.270	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Semarang	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100 %	181.666.997						
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	181.666.997	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100 %	240.175.735	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	181.666.997	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	198.961.877	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penggunaan Tanah		Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Penggunaan Tanah		Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen		0 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	20.606.929	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0 Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.606.929	

Rancangan Awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Penataan Ruang tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Penataan Ruang. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Pagu anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 209.865.760.048,-. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 224,665,760,048,-. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan dan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan serta adanya usulan aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.9

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (hasil musrenbang)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kajian untuk membuat Ruang Terbuka Hijau di eks Alun-Alun Gunungpati sehingga menjadi ikon kecamatan.	Depan Satpolantas Kecamatan Gunungpati	Tersedianya kajian untuk membuat Ruang Terbuka Hijau di eks Alun-Alun Gunungpati	1 kegiatan	Diharapkan dengan adanya kajian tersebut akan menjadi acuan pembangunan ruang terbuka hijau di eks alun-alun Gunungpati dan dijadikan sebagai icon kecamatan
2	Kelurahan Sadeng tidak memiliki sarpras olahraga sepakbola/lapangan voli. Terdapat bidang tanah PTSL di pinggiran sungai dengan luas 1 hektar yang bisa digunakan untuk sarana olahraga	Kecamatan Gunungpati	Tersedianya sarpras olahraga sepakbola/lapangan voli di Kelurahan Sadeng	1 kegiatan	Diharapkan kegiatan pembangunan sarana prasarana olahraga sepakbola/lapangan voli bisa dilaksanakan di tahun 2024
3	Pembangunan Lapangan Mangkang Kulon yang telah dianggarkan 5M dinaikkan menjadi 7M	Kecamatan Tugu	Tersedianya lapangan Mangkang Kulon yang representatif	1 kegiatan	
4	Gedung Kantor Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari agar pembangunannya tidak di renovasi tetapi dibangun 2 lantai. Dikarenakan ruangan yang kurang luas dan tempat parkir yang sekarang juga sudah dipakai untuk tempat parkir jama'ah Masjid yang ada di sebelah kantor Kelurahan.	Kecamatan Candisari	Tersedianya bangunan Gedung kelurahan Jatingaleh yang representatif dan megah	1 kegiatan	Diharapkan Kantor Kelurahan memiliki lokasi yang strategis di sebelah pintu masuk tol Jatingaleh agar terlihat megah saat dipandang
5	Pembangunan perumahan yang ada disamping MAJT berdampak pada warga Kelurahan Siwalan karena dalam pembangunan perumahan selisih dengan jalan cukup tinggi yaitu 1,5 meter dan jika hujan akan menyebabkan genangan atau banjir di sekitar wilayah Siwalan. Mohon Dinas Tata Ruang untuk meninjau kembali pembangunan	Kecamatan Gayamsari	Terlaksananya peninjauan dan monitoring pembangunan perumahan yang ada di samping MAJT	1 kegiatan	Diharapkan dengan adanya peninjauan dan monitoring pembangunan perumahan di samping MAJT akan menyelesaikan permasalahan warga kelurahan siwalan terkait genangan atau banjir dampak dari pembangunan perumahan tersebut.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	perumahan tersebut dan selisih ketinggiannya dengan jalan				
6	Rencana Pemindahan Gedung Kantor Kelurahan Karangkidul dan Kantor Kelurahan Kembang Sari	Kecamatan Semarang Tengah	Terlaksananya pemindahan Gedung Kantor Kelurahan Karangkidul dan Kantor Kelurahan Kembang Sari	1 kegiatan	
7	Rehab Balai Kecamatan (BPKLMD) Kecamatan Semarang Tengah	Kecamatan Semarang Tengah	Tersedianya balai kecamatan (BPKLMD) yang memadai	1 kegiatan	
8	Pengurukan dan Kanopi balai Kelurahan Tlogosari Wetan	Kecamatan Pedurungan		1 kegiatan	
9	Pembangunan halaman kantor Kelurahan Tlogomulyo karena masih tanah dan kalau hujan berlumpur	Kecamatan Pedurungan	Tersedianya halaman kantor Kelurahan Tlogomulyo yang memadai	1 kegiatan	
10	Pembangunan Balai Kelurahan Penggaron Kidul yang masih belum direalisasikan sejak tahun 2018	Kecamatan Pedurungan	Tersedianya balai Kelurahan Penggaron Kidul	1 kegiatan	Diharapkan tahun 2023 teralisasi pembangunan balai kelurahan Penggaron Kidul yang tertunda pembangunannya sejak tahun 2018

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

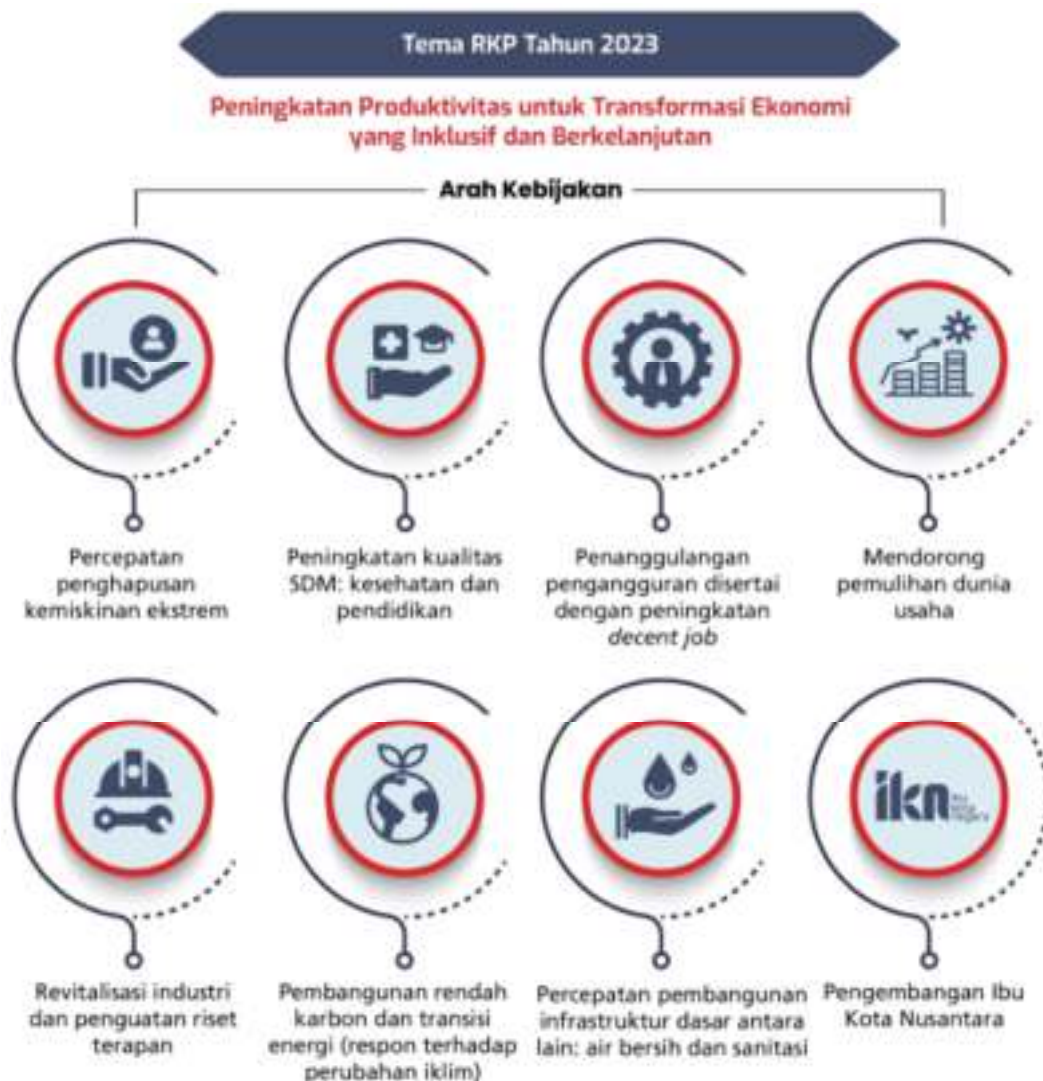
Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, antara lain :

1. Peninjauan kembali ijin pendirian Toko modern yang sekarang merajalela yang seharusnya di jalan protokol sekarang sudah merambah ke jalan-jalan kampung perlu dilakukan kajian yang mendalam;
2. Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit type D di daerah pinggiran seperti Gunungpati;
3. Program PTSL sangat membantu masyarakat karena dapat mengurus surat tanah dengan murah dan mudah;
4. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar dibangun taman bermain serta ruang terbuka publik disetiap kelurahan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023
(Sumber: Permen PPN/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023)



Gambar 3.2 Strategi Pembangunan Tahun 2023
 (Sumber: Permen PPN/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023)



Gambar 3.3 Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023
 (Sumber: Permen PPN/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023)

Proyek Prioritas Startegis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 73,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP 1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP 6 Penguatan Kemiskinan
 - PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

- PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMN 7,0-7,5% atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8,5%;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6,0% atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,9%;

- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4,0-4,6% atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6,0%;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2022 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,55 dan. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,56 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2022.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan hidup dan ketahanan bencana;** selaras dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang (P1) “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan”, dengan fokus:

1. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah;
2. Peningkatan nilai investasi;
3. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
4. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa; dan
5. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Serta (P4) “Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar”, dengan fokus:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
2. Pengembangan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah yang

Berkelanjutan;

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang Hijau dan Tangguh;
5. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu; dan
6. Penguatan Ketahanan Bencana.

P2 **Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);** selaras dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang (P2) “Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran” dengan fokus:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
4. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
5. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; dan
6. Perluasan kesempatan kerja.

P3 **Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;** selaras dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang (P3) “Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif” dengan focus:

1. Peningkatan kualitas dan tata Kelola layanan pendidikan berbasis teknologi;
2. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas;
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
4. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan
5. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

P4 **Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;** selaras dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang (P5) “Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif” dengan focus:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;

3. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan
5. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 7,48-6,48%;
- d. Indeks Gini sebesar 0,30;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00%;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6-6,0%;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 45,35 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,56;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,25;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,26;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,15.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2022 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,55, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,67, serta PDRB per kapita sebesar 123.98 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,56% menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16 %, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 71,03, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,54 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 48,40. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada

Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi keempat indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”,

dengan indikator tujuan **“persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”**. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yaitu sebagai berikut.

1. **Meningkatnya kesesuaian tata ruang**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase kawasan strategis yang tertata;
 - b. Persentase kesesuaian tata ruang;
2. **Meningkatnya banguann dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase kepatuhan bangunan yang ber-IMB;
 - b. Persentase reklame berizin;
3. **Meningkatnya tertib administrasi pertanahan**, dengan indikator sasaran Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan;
4. **Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**, dengan indikator sasaran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	85
Sasaran I : Meningkatnya kesesuaian tata ruang	Persentase kawasan strategis yang tertata	%	81,82
	Persentase kesesuaian tata ruang	%	100
Sasaran II : Meningkatnya banguann dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan	Persentase kepatuhan bangunan yang ber-IMB	%	62,18
	Persentase reklame berizin	%	80
Sasaran III : Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan	%	84,21
Sasaran IV : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	%	78

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penataan Ruang bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur” dan indikator sasaran “Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 program terdiri dari 5 program urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan/pembangunan, dan 6 Program urusan Pemerintahan

Bidang Pertanahan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 kegiatan berupa 13 kegiatan pada program urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, 1 kegiatan merupakan kegiatan pendamping dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang. Serta 7 kegiatan dari Program urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 244.665.760.048,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 200.349.959.038,- untuk program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan uraian :
 - Rp 23,867.232.694,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin);
 - Rp 159.104.870.889,- untuk program dan kegiatan Penataan Bangunan Gedung;
 - Rp 4.900.000.000,- untuk program dan kegiatan Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya;
 - Rp 1.357.746.036,- untuk program dan kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - Rp 11.120.109.419,- untuk program dan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. Rp 24,315.801.010,- untuk program dan kegiatan Urusan Bidang Pertanahan dengan uraian :
 - Rp 804.751.409,- untuk program dan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - Rp 6.486.473.136,- untuk program dan kegiatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - Rp 819.831.424,- untuk program dan kegiatan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - Rp 15.650.947.322,- untuk program dan kegiatan pengelolaan tanah kosong;

- Rp 313.621.984,- untuk program dan kegiatan pengelolaan izin membuka tanah;
- Rp 240.175.735,- untuk program dan kegiatan penatagunaan tanah;

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				200.349.959.038			209.833.594.500	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang		100 %	23.867.232.694	APBD	-	100 %	26.294.108.500
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan rencana anggaran SKPD	Kota Semarang	100 %	180.178.660	APBD	-	100 %	212.529.000
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 Dokumen	97.458.360	APBD	-	3 Dokumen	120.000.000
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	12.492.700	APBD	-	1 Dokumen	15.000.000
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	11.167.300	APBD	-	1 Dokumen	12.500.000
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	7.608.000	APBD	-	1 Dokumen	8.369.000
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kota Semarang	1 Dokumen	11.167.300	APBD	-	1 Dokumen	12.285.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	16.704.000	APBD	-	1 Dokumen	18.375.000
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	5 Dokumen	23.581.000	APBD	-	5 Dokumen	26.000.000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100 %	15.274.195.503	APBD	-	100 %	16.890.154.000
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		88 Orang/bulan	13.647.539.103	APBD	-	100 %	15.100.000.000
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	80 Dokumen	1.596.266.400	APBD		100 %	1.755.894.000
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	5 Laporan	10.230.000	APBD	-	5 Laporan	11.260.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	10 Laporan	10.080.000	APBD	-	10 Laporan	11.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	10 Dokumen	10.080.000	APBD	-	10 Dokumen	11.500.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	Kota Semarang	100 %	680.711.950	APBD	-	100 %	683.250.000
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	24 Dokumen	125.045.050	APBD	-	24 Dokumen	138.000.000
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	500 Orang	555.666.900	APBD	-	500 Orang	545.250.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Semarang	100 %	5.653.502.661	APBD	-	100 %	6.221.671.000
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		20 Paket	180.267.581	APBD	-	20 Paket	199.000.000
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	100 Paket	480.205.078	APBD		100 Paket	530.000.000
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	80 Paket	161.162.700	APBD	-	80 Paket	177.279.000
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	100 Paket	229.899.624	APBD	-	100 Paket	252.890.000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	100 Paket	507.900.535	APBD	-	100 Paket	559.000.000
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Kota Semarang	30 Dokumen	23.839.338	APBD	-	30 Dokumen	26.250.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Disediakan							
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	500 laporan	930.429.620	APBD	-	500 laporan	1.023.473.000
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	50 Dokumen	3.139.798.185	APBD	-	55 Dokumen	3.453.779.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Kota Semarang	100 %	952.307.940	APBD		100 %	1.047.539.000
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	1200 laporan	9.500.000	APBD	-	1200 laporan	10.450.000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	75 Laporan	315.000.000	APBD	-	75 Laporan	346.500.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	100 Laporan	627.807.940	APBD	-	100 Laporan	690.589.000
1.03.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Kota Semarang	100 %	1.126.335.980	APBD		100 %	1.238.965.500
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	36.318.180	APBD	-	1 Unit	39.945.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	54 Unit	666.559.250	APBD	-	54 Unit	733.215.500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	4 Unit	423.458.550	APBD	-	4 Unit	465.805.000
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	Kota Semarang	100%	159.104.870.889	APBD		100 %	164.851.450.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Kota Semarang	100 %	159.104.870.889	APBD		100 %	164.851.450.000
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Semarang	5 Dokumen	4.144.647.366	APBD	-	5 Dokumen	4.504.200.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	118 Dokumen	105.561.058.979	APBD	-	118 Dokumen	115.017.165.000
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Semarang	5 Dokumen	596.128.209	APBD		5 Dokumen	600.742.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Kota Semarang	135 Unit	796.000.000	APBD		135 Unit	820.600.000
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	Kota Semarang	10 Pengelola	325.000.000	APBD		10 Pengelola	357.500.000
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Kota Semarang	10 Pengelola	300.000.000	APBD		10 Pengelola	330.000.000
1.03.08.2.01.09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Kota Semarang	2310 Unit	546.955.000	APBD		2310 Unit	601.651.000
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Kota Semarang	53 Unit	449.814.000	APBD		53 Unit	494.796.000
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Kota Semarang	36 Unit	32.892.431.972	APBD		36 Unit	36.181.676.000
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Kota Semarang	80 Unit	13.492.835.363	APBD		80 Unit	14.842.120.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.09	Program Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya	Persentase reklame yang berizin	Kota Semarang	100%	4.900.000.000	APBD		100 %	5.390.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	100 %	4.900.000.000	APBD		100 %	5.390.000.000
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Dokumen	600.000.000	APBD	- 12 Dokumen		660.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Semarang	1 Kawasan	3.300.000.000	APBD	- 1 Kawasan		3.630.000.000
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Semarang	1 Kawasan	850.000.000	APBD	- 1 Kawasan		935.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	2 Dokumen	150.000.000	APBD	-	2 Dokumen	165.000.000
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase reklame yang berizin	Kota Semarang	100%	1.357.746.036	APBD		100 %	1.466.701.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	100 %	1.357.746.036	APBD		100 %	1.466.701.000
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kota Semarang	150 Orang	376.049.765	APBD	-	150 Orang	359.373.000
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kota Semarang	440 Orang	208.675.981	APBD	-	440 Orang	229.544.000
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi yang terselenggara	Kota Semarang	370 Orang	547.007.198	APBD	-	370 Orang	558.317.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	2 Dokumen	226.013.092	APBD	-	2 Dokumen	319.467.000
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	Kota Semarang	100%	11.120.109.419	APBD		100 %	12.039.627.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	Kota Semarang	100 %	5.581.964.450	APBD		100 %	6.085.164.000
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 Dokumen	1.235.792.837	APBD	-	4 Dokumen	1.359.373.000
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Dokumen	770.914.595	APBD	-	2 Dokumen	848.007.000
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	3.234.833.174	APBD	-	1 Dokumen	3.558.317.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kota Semarang	1 Dokumen	340.423.844	APBD	-	1 Dokumen	319.467.000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	Kota Semarang	100 %	386.053.986	APBD		100 %	424.660.000
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	209.236.884	APBD	-	1 Dokumen	230.161.000
1.03.12.2.01.02	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Semarang	1 Dokumen	176.817.102	APBD	-	1 Dokumen	194.499.000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	Kota Semarang	100 %	2.781.921.143	APBD		100 %	2.950.114.000
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	2 Dokumen	921.243.044	APBD	-	2 Dokumen	903.368.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Semarang	5 Dokumen	1.860.678.099	APBD	-	5 Dokumen	2.046.746.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	Kota Semarang	100 %	2.370.169.840	APBD		100 %	2.579.689.000
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	1 Dokumen	297.382.873	APBD	-	1 Dokumen	327.122.000
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	1 Dokumen	310.605.592	APBD	-	1 Dokumen	314.167.000
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	2 Dokumen	1.762.181.375	APBD	-	2 Dokumen	1.938.400.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				24.315.801.010				26.951356.000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang		100 %	804.751.409		-	100 %	885.228.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	Kota Semarang	100 %	804.751.409	APBD	-	100 %	885.228.000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	55 Dokumen	322.802.107	APBD	-55 Dokumen	355.083.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	35 Berita Acara	481.949.302	APBD	-35 Berita Acara	530.145.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		100 %	6.486.473.136		-	100 %	7.135.121.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 %	6.486.473.136	APBD	-	100 %	7.135.121.000
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kota Semarang	6 Dokumen	20.606.929	APBD	- 6 Dokumen	22.668.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Dokumen	6.465.866.207	APBD	-	2 Dokumen	7.112.453.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100 %	819.831.424		-	100 %	901.733.000
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Kota Semarang	100 %	819.831.424	APBD	-	100 %	901.733.000
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen	587.935.298	APBD	-	3 Dokumen	646.729.000
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen	190.682.268	APBD	-	3 Dokumen	209.668.000
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kota Semarang	3 Dokumen	20.606.929	APBD	-	3 Dokumen	22.668.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen	20.606.929	APBD	-	3 Dokumen	22.668.000
2.10.08	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100 %	15.650.947.322		-	100 %	17.687.772.000
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	Kota Semarang	100 %	230.479.035	APBD	-	100 %	253.527.000
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Kota Semarang	2 Laporan	230.479.035	APBD	-	2 Laporan	253.527.000
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	100 %	15.420.468.287	APBD	-	100 %	17.166.518.000
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Kota Semarang	1 Laporan	15.399.861.358	APBD	-	1 Laporan	16.939.850.000
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	1 Dokumen	20.606.929	APBD	-	1 Dokumen	22.668.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah ventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terkelolanya izin membuka tanah	Kota Semarang	100 %	313.621.984	APBD	-	100 %	345.034.000
2.10.08.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	Kota Semarang	5 Dokumen	198.575.714	APBD	-	5 Dokumen	218.434.000
2.10.08.2.02.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang	2 Dokumen	115.046.270	APBD	-	2 Dokumen	126.600.000
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Terseselaikannya Hamparannya dalam satu penatagunaan tanah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang	100 %	240.175.735	APBD	-	100 %	264.195.000
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Laporan	198.961.877	APBD	-	1 Laporan	218.859.000
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kota Semarang	1 Dokumen	20.606.929	APBD	-	1 Dokumen	22.668.000
2.10.10.2.01.03	Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Dokumen	20.606.929	APBD	-	2 Dokumen	22.668.000

Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah 11 program, terdiri dari 20 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program kegiatan tersebut adalah Rp 224.665.760.048,- dengan sumber dana dari APBD, DAU, dan Bankeu. Sedangkan untuk prakiraan maju rencana anggaran Tahun 2023 terdiri dari 11 program terdiri dari 20 kegiatan dengan rencana kebutuhan dana/pagu indikatif Rp. 245.892.242.500,-.

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penataan Ruang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang ini berpedoman pada Renstra Dinas Penataan Ruang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang;
3. Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023.

b. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

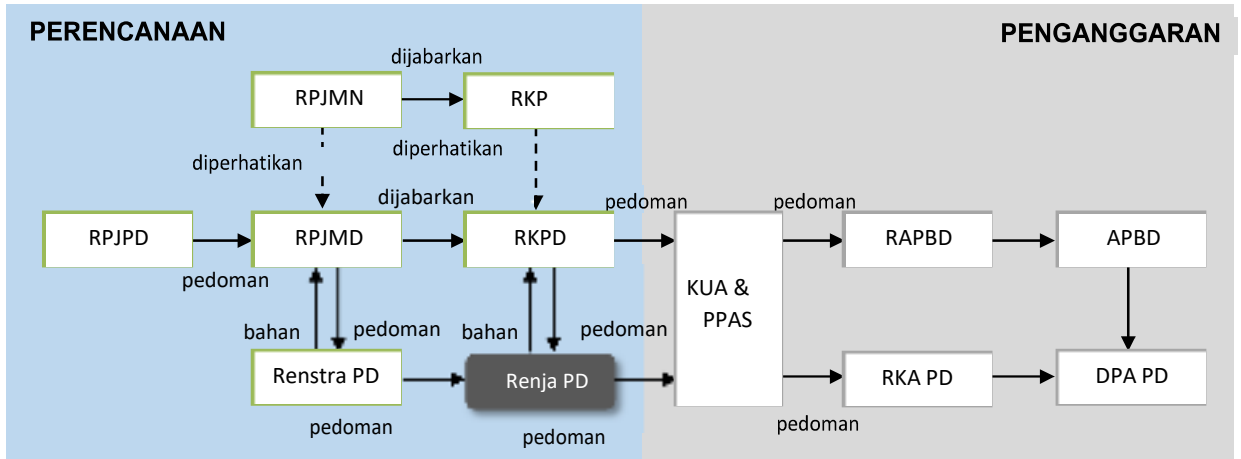
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021–2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan sebanyak 10 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp.244.497.099.286 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.220.052.024.931 atau sebesar 90%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disperkim pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	76,96%	100% (20%)	96,28%	100% (20%)	104%	66,64% (18,49)	58,49%	76
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	-	Pembangunan & Perawatan Sumur	100 unit (100%)	3 unit (3%)	20 unit	10 unit (10%)	50	20 unit (20%)	33%	33
01.03.02	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	-	100%	97,14% (19,43)	97,14	100% (20%)	39,43%	39,43
1.03.02.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	-	100%	97,14%	97,14	50 unit (20%)	20%	20
1.03.02.2.01.07	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	250 SR (100%)	-	-	-	-	50 unit (20%)	20%	20
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	Persentase rumah tangga bersanitasi	92,75% (100%)	-	100% (20%)	98,93% (19,79)	98,93	88,51% (19,34%)	39,13	42
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	- Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	55 unit (100%)	-	100%	100% (20%)	100	11 unit (20%)	40%	40
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	- Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5 unit (100%)	-	100%	100% (20%)	100	1 unit (20%)	40%	40
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	10 unit (100%)	-	100%	100% (20%)	100	2 unit (20%)	40%	40
		- Pengoperasian dan Pemeliharaan IPLT	100%	-	-	-	-	100% (20%)	20%	20
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	- Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	100%	-	100%	99,86% (19,97%)	99,86	26% (8,07%)	28,04%	28,04
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100%	-	100%	99,86% (19,97%)	99,86	100% (20%)	39,97%	39,97
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran di lingkungan permukiman	16 kecamatan (100%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (60%)	60
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12 bulan (100%)	12 bulan (20%)	12 bulan (20%)	12 bulan (20%)	100	12 bulan (20%)	12 bulan (60%)	60
01.03.02	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	- Pemanfaatan Hunian yang Tertata	-	-	75,32%	96,32% (19,26)	127,88%	100% (20%)	100% (39,26%)	39,26
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah	- Bangunan Rumah Susun yang Tertata	-	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten/Kota									
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- Terpeliharanya bangunan dan sarpras rusun	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
		- Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
		- Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
		- Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renstra & Renja	2 dokumen (100%)	1 dokumen (10%)	2 dokumen (20%)	2 dokumen (20%)	100	2 dokumen (20%)	50%	50
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LAKIP	2 dokumen (100%)	2 dokumen (20%)	2 dokumen (100%)	2 dokumen (20%)	100	2 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan & verifikasi keuangan	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan semesteran realisasi anggaran	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60
1.04.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	2000 set (100%)	-	100%	100% (20%)	100	400 set (20%)	40%	40
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	5 kegiatan (100%)	-	100%	100% (20%)	100	1 kegiatan (20%)	40%	40
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kegiatan sosialisasi	5 kegiatan (100%)	-	100%	0%	0	1 kegiatan (20%)	40%	40
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Terlaksananya bimbingan teknis	20 kegiatan (100%)	-	100%	100% (20%)	100	4 kegiatan (20%)	40%	40
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	10 jenis (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	25 jenis (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jenis Peralatan dan Rumah Tangga	100 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	25 jenis (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	100 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	25 jenis (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	50 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	10 jenis (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Penataan dan penertiban arsip dinas	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	- Terpenuhiya dukungan pelaksanaan SPBE	100%	-	100% (20%)	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	3 unit (20%)	3 unit (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	6 unit (100%)	-	3 unit (20%)	3 unit (20%)	100	2 unit (30%)	40%	40
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100% (20%)	100%	100%	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Jasa Surat Menyurat	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terwujudnya Peningkatan Sistem Informasi	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	60%	60
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	- Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Peralatan Gedung Kantor Terpelihara Rutin/Berkala	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100%	-	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	40%	40
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	100%	100%	100	100%	40%	40
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	- Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	16 kecamatan (100%)	-	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan terkelola dengan baik	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	- Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	5 kegiatan (100%)	-	1 kegiatan (20%)	1 kegiatan (20%)	100	1 kegiatan (20%)	40%	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Umum/Rumah Susun Umum									
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Persentase rumah layak huni	98,16%	-	100%	98,63%	98,63	98,87%	100%	98,16
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100%	-	100% (20%)	0	0	100% (20%)	20%	20
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	- Database survey	1 dokumen (100%)	-	1 dokumen (100%)	0 dokumen	0	1 dokumen (20%)	20%	20
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	-	100%	50%	50	100%	50%	50
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	- Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	5 dokumen (100%)	-	-	-	-	1 dokumen (20%)	20%	20
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Rehabilitasi RTLH	16 kec. (100%)	16 kec. (20%)	16 kec. (20%)	16 kec. (20%)	100	16 kec. (20%)	60%	60
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	- Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	-	100%	96,96% (19,39)	96,96	100% (20%)	39,99%	39,96
		- Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,46%	-	44,21% (100%)	96,96% (19,39)	96,96	44,26% (20%)	39,99%	39,96
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	- Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100%	-	100%	96,96% (19,39)	96,96	100% (20%)	39,99%	39,96
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Persentase Lampu PJU Terpasang	99%	-	95,87% (20%)	85% (17%)	85	97% (20%)	37%	37

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	16 kecamatan (20%)	-	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40
		- Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	16 kecamatan (20%)	-	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	- Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40
		- Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	20,84%	-	-	-	-	17,70% (20%)	20%	20
		- Terkelolanya ruang terbuka hijau	16 kecamatan (100%)	-	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40
		- Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16 kecamatan (100%)	-	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40
		- Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	16 kecamatan (100%)	-	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	- Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100%	-	100%	100% (20%)	100	100% (20%)	40%	40

Sumber : Renstra Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kota Semarang 2021-2026 dan Hasil Analisis, 2022

Adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tanggal 18 Oktober 2019, dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Disperkim s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Pemerintah Kota Semarang seperti yang telah diuraikan pada tabel diatas, karena terdapat perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada peralihan tahun 2020 dan tahun 2021, namun capaian indikator program masih tetap berjalan hingga akhir tahun perencanaan seperti yang telah tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dituangkan dalam kertas kerja Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Pemutakhiran berlaku pada bidang urusan yang menjadi kewenangan Disperkim Kota Semarang, yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) bidang urusan yaitu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, dan Urusan Bidang Lingkungan Hidup dimutakhirkan menjadi hanya 2 (dua) bidang urusan yaitu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman.

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 3 Urusan, 10 Program dan 10 Indikator Kinerja Program, 18 Kegiatan dan 53 sub kegiatan.
 - b) Dari 10 Indikator kinerja program, tidak terdapat Indikator yang melampaui target, 3 indikator memenuhi target, serta 7 Indikator tidak memenuhi target.

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan, 10 Program dengan 10 indikator program dan 18 kegiatan dengan 18 indikator.
- b) Dari 10 indikator kinerja program, kegiatan, maupun sub kegiatan, mayoritas indikator diperkirakan masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra Periode 2021-2026.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperkim Tahun 2021 sebagian besar masih belum mencapai target namun tetap mengalami peningkatan progress capaian dari tahun sebelumnya terdapat beberapa program/ kegiatan seperti pada rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyediaan & Pengelolaan Air Minum dengan capaian 97,14% dari target sebesar 100% atau mengalami peningkatan sebesar 0,86% dari tahun 2020;
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan jangkauan Air Limbah dengan capaian 98,93% dari target sebesar 100% atau mengalami peningkatan sebesar 12,42% dari tahun 2020;
- 3) Program Pengembangan Permukiman dengan capaian 99,86% dari target 100% atau mengalami peningkatan sebesar 0,07% dari tahun 2020;
- 4) Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan capaian 96,32% dari target 100% atau seluas 155,14 Ha. Hal ini meningkat 5,51% dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 90,82%
- 5) Program Kawasan Permukiman dengan capaian 98,63% dari target 100% meningkat 0,46% dari tahun 2020;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum dengan capaian 96,96% dari target 100%;
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian 83,86% dari target 100%.
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian 44,23% dari target 46,26%;
- 9) Program Pengembangan Perumahan berhasil mencapai target dengan capaian 100%;

Pada pelaksanaan periode tahun 2021 merupakan tahun peralihan periode Renstra Tahun 2016-2021 ke periode Renstra Tahun 2021-2026 dan adanya pemutakhiran nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan dan output kegiatannya sehingga terdapat beberapa program yang kurang selaras dalam

melakukan perkiraan pencapaian target pada Renstra Tahun 2016-2021 dan Renstra Tahun 2021-2026.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.650.156.400	109.825.079.185	91,03%	10.825.077.215
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.589.077.000	2.143.655.419	82,80%	445.421.581
I.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.589.077.000	2.143.655.419	82,80%	445.421.581
1	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	2.589.077.000	2.143.655.419	82,80%	445.421.581
II.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	250.000.000	249.995.000	100%	5.000
II.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	249.995.000	100%	5.000
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	250.000.000	249.995.000	100%	5.000
III.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.365.743.000	3.270.785.429	97,18%	94.957.571
III.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.365.743.000	3.270.785.429	97,18%	94.957.571
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	1.983.098.000	1.916.167.730	96,62%	66.930.270
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.049.845.000	1.049.817.699	100,00%	27.301

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	332.800.000	304.800.000	91,59%	28.000.000
IV.	Program Pengembangan Permukiman	109.245.336.400	99.016.267.181	90,64%	10.229.069.219
IV.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	109.245.336.400	99.016.267.181	90,64%	10.229.069.219
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	82.538.702.400	76.365.745.175	92,52%	6.172.957.225
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	26.706.634.000	22.650.522.006	84,81%	4.056.111.994
V.	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	5.200.000.000	5.144.376.156	98,93%	55.623.844
V.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.200.000.000	5.144.376.156	98,93%	55.623.844
1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5.200.000.000	5.144.376.156	98,93%	55.623.844
	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.715.031.079	76.440.332.068	88,15%	10.274.699.011
VI.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	37.627.018.204	31.554.678.077	83,86%	6.072.340.127
VI.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	460.851.000	146.358.800	31,76%	314.492.200
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.720.000	2.329.500	85,64%	390.500
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.203.000	1.126.500	93,64%	76.500
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.203.000	1.168.300	97,12%	34.700
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.203.000	1.065.000	88,53%	138.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.203.000	1.018.500	84,66%	184.500
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	451.820.000	138.415.000	30,63%	313.405.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
7.	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.499.000	1.236.000	82,45%	263.000
VI.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.326.666.587	20.473.837.788	91,70%	1.852.828.799
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.823.247.587	19.955.949.788	95,83%	867.297.799
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.495.310.000	509.970.000	34,10%	985.340.000
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000	1.950.400	97,52%	49.600
4.	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.203.000	2.099.700	95,31%	103.300
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.203.000	2.187.000	99,27%	16.000
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.703.000	1.680.900	98,70%	22.100
VI.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.071.000	135.847.000	87,60%	19.224.000
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	131.856.000	125.497.000	95,18%	6.359.000
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.840.000	6.650.000	97,22%	190.000
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00%	0
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.375.000	3.700.000	22,60%	12.675.000
VI.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.017.494.727	1.362.097.969	67,51%	655.396.758
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.758.000	32.681.000	96,81%	1.077.000
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570.305.000	316.358.500	55,47%	253.946.500
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.096.000	78.456.400	88,06%	10.639.600
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.185.000	136.929.000	99,81%	256.000
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.401.000	53.676.880	98,67%	724.120
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.576.000	37.232.500	99,09%	343.500
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.165.000	43.696.689	70,29%	18.468.311

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.053.000	7.000.000	99,25%	53.000
9	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1.025.955.727	656.067.000	63,95%	369.888.727
VI.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.715.000.000	1.614.426.000	94,14%	100.574.000
1	Pengadaan Alat Besar	1.715.000.000	1.614.426.000	94,14%	100.574.000
VI.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.600.808.890	2.243.292.683	86,25%	357.516.207
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.086.000	6.337.000	69,74%	2.749.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	741.501.000	648.766.683	87,49%	92.734.317
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	787.553.890	622.137.000	79,00%	165.416.890
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.668.000	966.052.000	90,91%	96.616.000
VI.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.351.126.000	5.578.817.837	66,80%	2.772.308.163
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.831.695.000	795.068.600	43,41%	1.036.626.400
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	4.708.057.000	3.281.840.650	69,71%	1.426.216.350
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	528.905.000	401.711.350	75,95%	127.193.650
4	Pemeliharaan Mebel	134.400.000	32.504.255	24,18%	101.895.745
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	927.189.000	911.239.402	98,28%	15.949.598
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.880.000	156.453.580	70,83%	64.426.420
VI.	Program Pengembangan Perumahan	295.404.000	268.330.000	90,83%	27.074.000
VI.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	229.930.000	229.330.000	99,74%	600.000
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	229.930.000	229.330.000	99,74%	600.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN		REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN (Rp)
		(Rp)		Rp	%	
VI.2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0	0	0,00%	0
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		0	0	0,00%	0
VI.3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	65.474.000		39.000.000	59,57%	26.474.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	65.474.000		39.000.000	59,57%	26.474.000
VII.	Program Kawasan Permukiman	18.839.130.875		18.533.578.500	98,38%	305.552.375
VII.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100.000.000		0	0,00%	100.000.000
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000		0	0,00%	100.000.000
VII.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	18.739.130.875		18.533.578.500	98,90%	205.552.375
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	18.739.130.875		18.533.578.500	98,90%	205.552.375
VIII.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	29.953.478.000		26.083.745.491	87,08%	3.869.732.509
VIII.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	29.953.478.000		26.083.745.491	87,08%	3.869.732.509
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	27.743.712.000		24.050.117.542	86,69%	3.693.594.458
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2.209.766.000		2.033.627.949	92,03%	176.138.051
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	37.131.911.807		33.786.613.678	90,99%	3.345.298.129
IX.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	37.131.911.807		33.786.613.678	90,99%	3.345.298.129
IX.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	37.131.911.807		33.786.613.678	90,99%	3.345.298.129
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	37.131.911.807		33.786.613.678	90,99%	3.345.298.129

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
	JUMLAH	244.497.099.286	220.052.024.931	90,00%	24.445.074.355

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 9 program dan 19 kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebesar Rp.244.497.099.286,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp.220.052.024.931,00 dengan sisa sebesar Rp.24.445.074.355,00 (90%) dengan uraian berikut:

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Belanja Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	109.429.647.180	96.991.642.040	88,63
a.	Belanja Pegawai	22.477.027.587	20.556.514.788	91,46
b.	Belanja Barang dan Jasa	85.740.619.593	75.463.127.252	88,01
c.	Belanja Hibah	1.212.000.000	972.000.000	80,20
2.	Belanja Modal	135.067.452.106	123.060.382.891	91,11
a.	Belanja Modal Tanah	2.780.926.891	2.576.717.200	92,66
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.351.307.180	2.770.155.101	82,66
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.011.640.931	34.122.836.6666	94,76
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigrasi	92.526.131.784	83.193.273.924	89,91
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	397.445.320	397.400.000	99,99
	JUMLAH	244.497.099.286	220.052.024.931	90,00

Sumber : DPA Perubahan Disperkim Tahun 2021

Pada tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 244.497.099.286,00 namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 220.052.024.931,00 atau 90%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sejumlah Rp.109.429.647.180,00 dan belanja modal sebanyak Rp. 135.067.452.106,00. Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja operasi adalah sebanyak Rp. 96.991.642.040,00 (88,63%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 109.429.647.180,00. Belanja modal dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 135.067.452.106,00 direalisasikan sebesar Rp.123.060.382.891,00 atau 91,11%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat		100%	100%	97%	97,50%	96,34%	98,77%	97%	97,50%
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan		74,54%	75,32%	76,53%	77,53%	75,53%	80,04%	76,53%	77,53%
	Persentase luasan kawasan kumuh		0%	0%	26%	48%	0,21%	0,14%	26%	48%
	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau		45,76%	46,26%	44,26%	44,31%	44,21%	44,23%	44,26%	44,31%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Sasaran 2: Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		-	71,49	72	72,5	-	71,49	72	72,5

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”, masih kurang dari target, dimana realisasinya sebesar 98,77% dari target sebesar 100%;
- b. Sasaran 1 **“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan”** memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 80,04% dari target sebesar 75,32% (capaian sebesar 106,27%), “Persentase luasan kawasan kumuh” belum memenuhi target 0% dari realisasi sebesar 0,14%, dan “Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau” juga masih belum memenuhi target 46,26% dengan realisasi sebesar 44,23%.
- c. Sasaran 2 **“Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 71,49.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase luas lingkungan permukiman kumuh	0	0	-	-	0,21	0,21	-	-
2.	Persentase jumlah rumah layak huni	100	100	-	-	98,17	98,63	-	-
3.	Persentase ketersediaan lubang pemakaman	52,40	55,00	-	-	41,23	37,54	-	-
4.	Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik	100	100	-	-	90,82	96,32	-	-
5.	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	74,54	75,32	-	-	75,53	80,04	-	-
6.	Persentase lampu penerangan yang terpasang	100	100	-	-	95,87	96,96	-	-
7.	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	45,76	46,26	-	-	44,21	44,23	-	-
8.	Persentase rumah tangga bersanitasi	100	100	-	-	86,51	98,93	-	-
9.	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	100	100	-	-	96,28	97,14	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Pada tabel diatas, proyeksi capaian tahun 2022 secara detail telah dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode perencanaan tahun 2021-2026 yang disusun dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan nomenklatur dan indikator kinerja pelayanan yang ditetapkan sebagaimana program kegiatan yang diusulkan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perubahan nomenklatur pada program, kegiatan, dan sub kegiatan telah diberlakukan mulai periode perencanaan tahun 2021, sedangkan periode tahun 2022 akan melanjutkan periode tahun 2021 dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disesuaikan.

Capaian indikator kinerja persentase luas lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2021 sebesar 0,14% dari target sebesar 0%. Jumlah luasan kawasan kumuh yang berhasil ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2021 seluas 26,75 Ha. Pada tahun 2021 capaian indikator persentase kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah sebesar 75,93% atau meningkat sebesar 0,4% dari capaian tahun sebelumnya. Indikator ini merupakan perhitungan rata-rata dari capaian Persentase lampu penerangan yang terpasang sebesar 96,96%, Persentase ruang terbuka hijau sebesar 44,23% dan Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 86,58%.

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman dan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Pada tabel diatas, proyeksi capaian tahun 2022 dan tahun 2023 secara detail telah dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode perencanaan tahun 2021-2026 yang disusun dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan nomenklatur dan indikator kinerja pelayanan yang ditetapkan sebagaimana program kegiatan yang diusulkan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perubahan nomenklatur pada program, kegiatan, dan sub kegiatan telah diberlakukan mulai periode perencanaan tahun 2021, sedangkan periode tahun 2022 akan melanjutkan periode tahun 2021 dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disesuaikan.

Dalam RPJMD tersebut dimuat visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Untuk mewujudkan visi tersebut, yang telah tertuang dalam Renstra Disperkim Tahun 2021-2026 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Disperkim 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR SASARAN (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	97	97,50	98	99	100
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	75	60	40	20	0
		Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	76,53	77,53	78,53	79,53	80,53
		Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	44,26	44,31	44,36	44,41	44,46
	Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72	72,5	73	73,5	74

Sumber : Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021-2026

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi, khususnya misi ke-3, yaitu “Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan” yang terfokus pada program perlindungan dan jaminan sosial, yaitu bedah rumah tuntas. Serta misi ke-4, yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang

secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- d. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- f. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- g. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- e. Bidang Permukiman;
- f. Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- g. UPTD, dan

h. Jabatan Fungsional.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Terjadinya perubahan lokasi pekerjaan karena sudah dikerjakan OPD lain, kecamatan dan kelurahan, sehingga mengakibatkan pengunduran waktu pelaksanaan kegiatan dan perubahan desain;
- b. Masih kurang sesuainya usulan pekerjaan yang diajukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Munculnya persepsi kurang tepatnya sasaran penerima bantuan karena adanya perbedaan kriteria dan persyaratan mekanisme bantuan dari masing-masing sumber dana;
- d. Belum terpenuhinya inventarisasi data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang baik milik pribadi maupun swasta;
- e. Kurang tepatnya lokasi pembukaan lahan TPU yang berada di daerah berkontur curam dengan sudut kemiringan tinggi.
- f. Belum terpenuhinya target luasan Ruang Terbuka Hijau pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2021 sebesar 46,26% dari wilayah Kota Semarang atau seluas 17.287,54 Ha;
- g. Perlu disusunnya peraturan daerah terkait pemakaman, yang berisi tentang mekanisme pengelolaan lahan makam, penyediaan lahan makam, petunjuk teknis pelayanan makam dan pengaturan pembayaran retribusi pemakaman.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemenuhan rumah tidak layak huni adalah ketersediaan data yang tidak valid. Data penduduk penerima bantuan terkadang berbeda dengan yang ada di

lapangan. Selain itu kesepakatan dengan penghuni rumah terkadang tidak ditaati dengan baik.

- Kurang validnya data lapangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang baik milik pribadi maupun swasta.
- Lokasi pekerjaan pembangunan infrastruktur seperti jalan berbentrok/bersinggungan dengan OPD lain dan disaat pelaksanaan kegiatan telah dikerjakan oleh OPD lain. Pemindahan lokasi kegiatan akibat dari penolakan warga terkait desain yang ditawarkan.
- Batalnya pembangunan taman saninten kruwing karena sulitnya komunikasi dan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait, mengingat pekerjaan yang akan dikerjakan merupakan layanan masyarakat. Selain itu masalah yang dihadapi adalah belum terpenuhinya target luasan Ruang terbuka Hijau dengan luas target renstra tahun 2020 seluas 17.287,54 Ha (46,26%) di tahun 2021 tertangani seluas 16.530,58 Ha, Sehingga seluas 756,96 Ha Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang yang belum terbangun.

b. Peluang:

- Perlu adanya verifikasi data kembali sesuai dengan data lapangan sehingga data yang didapatkan cocok dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
- Perlunya menyelenggarakan sosialisasi dan pengumpulan data TPU yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang dengan menghadirkan Camat dan Lurah Kota Semarang.
- Perlunya pendekatan persuasif kepada warga untuk mencari kesepakatan dan perubahan lokasi atau melanjutkan ruas jalan yang telah dikerjakan oleh OPD lain.
- Perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait secara lebih intensif, dan meningkatkan kunjungan lapangan secara intensif pula agar pekerjaan berjalan sesuai yang direncanakan dan juga meningkatkan penambahan ruang terbuka hijau dengan melakukan kerjasama kepada pihak-pihak yang dapat membantu sebagai CSR sehingga dapat meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang seperti yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Kurang terinventarisasinya database yang akurat, valid dan update untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan & rencana pembangunan tahun selanjutnya;
- b. Kurang maksimalnya lahan hijau pemanfaatan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan bangunan vertikal sebagai hunian untuk mengentaskan kawasan kumuh;
- d. Belum meratanya pengentasan kawasan kumuh untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
- e. Kurang memadainya jumlah ketersediaan lubang pemakaman umum dalam memenuhi layanan kebutuhan masyarakat
- f. Kurangnya jangkauan akses layanan rumah tangga bersanitasi untuk menunjang kualitas hidup sehat di lingkungan masyarakat
- g. Kurangnya pemenuhan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan
- h. Kurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk penyediaan sarana prasarana utilitas dasar di kawasan perkotaan;
- i. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan dan pengelolaan akses air minum & air limbah;
- j. Kurang optimalnya pemeliharaan & pengawasan fasilitas keberadaan taman dalam memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau yang berkualitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor

- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

- 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis

teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

4. *Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:*

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana

- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Penyediaan infrastruktur yang berkualitas.”** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kewajiban dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan & tupoksi Disperkim Kota Semarang.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				120.883.527.501	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				131.583.527.501	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	69,69 %	290.462.481	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	69,69 %	290.462.481	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pembangunan dan perawatan sumber daya air bawah tanah yang baik	100 %	290.462.481	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pembangunan dan perawatan sumber daya air bawah tanah yang baik	100 %	290.462.481	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	290.462.481	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	290.462.481	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,86 %	976.028.762	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,86 %	976.028.762	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah air domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih	100 %	976.028.762	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah air domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih	100 %	976.028.762	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100 Rumah Tangga	676.447.485	Pembangunan/Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100 Rumah Tangga	676.447.485	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Semarang	Kapasitas IPLT Terbangun	75 M ³ /Hari	299.581.277	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Semarang	Kapasitas IPLT Terbangun	75 M ³ /Hari	299.581.277	
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	48 %	112.749.649.507	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	48 %	123.449.649.507	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman dengan kondisi baik	100 %	112.749.649.507	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman dengan kondisi baik	100 %	123.449.649.507	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177 Sistem Jaringan	82.006.181.134	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177 Sistem Jaringan	82.006.181.134	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177 Sistem Jaringan	30.743.468.373	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177 Sistem Jaringan	41.443.468.373	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	6.867.386.751	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	6.867.386.751	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya bangunan dan sarpras Rusun, Rusunawa, Pondok Boro/ Sosial yang tertata & terpelihara dengan baik	100 %	6.867.386.751	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya bangunan dan sarpras Rusun, Rusunawa, Pondok Boro/ Sosial yang tertata & terpelihara dengan baik	100 %	6.867.386.751	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	35.400.000	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	35.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9 Kawasan	6.831.986.751	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9 Kawasan	6.831.986.751	
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				121.390.503.272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				158.890.503.272	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	46.447.853.524	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	46.447.853.524	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya perencanaan, penganggaran yang akuntabel	100 %	66.188.260	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya perencanaan, penganggaran yang akuntabel	100 %	66.188.260	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.870.650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.870.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.378.440	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.378.440	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.133.440	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.133.440	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.260.425	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.260.425	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.294.925	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.294.925	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.125.190	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.125.190	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.125.190	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.125.190	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya pelaporan capaian kinerja keuangan yang tertib dan optimal	100%	20.462.427.689	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya pelaporan capaian kinerja keuangan yang tertib dan optimal	100%	20.462.427.689	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/bu	20.009.707.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/bu	20.009.707.989	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	418.440.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	418.440.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	7.525.050	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	7.525.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.701.860	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.701.860	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	8.831.674	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	8.831.674	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.221.116	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.221.116	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	574.874.001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	574.874.001	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	355.795.230	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	355.795.230	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.994.688	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.994.688	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	201.329.992	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	201.329.992	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	14.754.091	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	14.754.091	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi umum perkantoran yang optimal	100 %	4.037.416.003	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi umum perkantoran yang optimal	100 %	4.037.416.003	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.725.655.147	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.725.655.147	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	201.123.586	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	201.123.586	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	61.519.431	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	61.519.431	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	79.768.057	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	79.768.057	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	51.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	51.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.286.041	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.286.041	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	164 Dokumen	13.063.741	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	164 Dokumen	13.063.741	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	700.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	700.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan baik	100 %	5.500.835.974	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan baik	100 %	5.500.835.974	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.629.068.751	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.629.068.751	
	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	2.506.310.280	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	2.506.310.280	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	1.365.456.943	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	1.365.456.943	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan optimal	100 %	2.803.276.606	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan optimal	100 %	2.803.276.606	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	699.255.504	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	699.255.504	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	221.653.902	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	221.653.902	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.871.367.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.871.367.200	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan optimal	100 %	13.002.834.991	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan optimal	100 %	13.002.834.991	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 Unit	1.644.161.282	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 Unit	1.644.161.282	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.858.229.694	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	6.858.229.694	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20 Unit	112.342.079	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20 Unit	112.342.079	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	121.078.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	121.078.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.930.529.733	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.930.529.733	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 Unit	336.493.403	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 Unit	336.493.403	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100 %	4.260.207.921	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100 %	4.260.207.921	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tertanganinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Dengan Baik	100 %	400.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tertanganinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Dengan Baik	100 %	400.000.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	400.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	400.000.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Terwujudnya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni rusun dengan baik	100 %	3.337.950.075	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Terwujudnya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni rusun dengan baik	100 %	3.337.950.075	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	3.337.950.075	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	3.337.950.075	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pendukung kegiatan perumahan umum/ rumah susun umum	100 %	522.257.846	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pendukung kegiatan perumahan umum/ rumah susun umum	100 %	522.257.846	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	522.257.846	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	522.257.846	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Rumah Layak Huni	99,14 %	9.624.631.895	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Rumah Layak Huni	99,14 %	11.624.631.895	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Meningkatnya kualitas kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	100 %	9.624.631.895	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Meningkatnya kualitas kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	100 %	11.624.631.895	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	10 Dokumen	610.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	10 Dokumen	610.000.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 Unit Rumah	9.014.631.895	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 Unit Rumah	11.014.631.895	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100 %	61.057.809.932	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100 %	96.557.809.932	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum Perumahan yang menunjang fungsi hunian dengan baik	100 %	61.057.809.932	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum Perumahan yang menunjang fungsi hunian dengan baik	100 %	96.557.809.932	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	25.393.683.194	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	27.393.683.194	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	34.026.013.762	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	67.526.013.762	

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	1.638.112.976	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	1.638.112.976	
TOTAL					242.274.030.773	TOTAL					290.474.030.773

Total nilai anggaran semula pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebesar Rp.242.274.030.773,00 menjadi Rp.290.474.030.773,00 sesuai dengan hasil rapat pembahasan anggaran dengan penambahan anggaran sebesar Rp.48.200.000.000,00. Alokasi penambahan anggaran berdasarkan dari hasil analisis penyesuaian kebutuhan dapat dirinci seperti berikut:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan anggaran bertambah sebesar Rp.33.500.000.000,00 dialokasikan untuk Pengembangan Wisata Religi Makam Mbah Syafi'I, OM Bidang Pertamanan & Pemakaman, dan Pengadaan Lahan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 dialokasikan untuk menunjang OM Kegiatan Penerangan Jalan Umum.
- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 dialokasikan untuk menunjang OM Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni.
- Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp.10.700.000.000,00 dialokasikan untuk menunjang OM Kegiatan bidang Permukiman.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Disperkim Kota Semarang

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Kawasan Permukiman				
1	Bedah rumah	Wilayah Kelurahan Karangayu RT - RW - KARANGAYU	10 titik	250.000.000	Diakomodir
2	Pembangunan Rehab RTLH	ROWOSARI, RW IV, V RT 0 RW 4 ROWOSARI	10 Paket	210.000.000	Diakomodir
3	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	WILAYAH KALIBANTENG KIDUL RT 0 RW 0 KALIBANTENG KIDUL	13 Unit	260.000.000	Diakomodir
4	RTLH	RW.04, RW.05, RW.07, RW.08 & RW.10 RT 0 RW 0 METESEH	20 Unit	400.000.000	Diakomodir
5	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kedungmundu RT 4,5,6 RW 2,5 KEDUNG MUNDU	10 Rumah	210.000.000	Diakomodir
6	Rehab RTLH di Kelurahan Wonodri	Jl. Wonodri Baru, Jl. Wonodri Joho, Jl. Wonodri Kopen, Jl. Wonodri Grajen, Jl. Wonodri Sendang, Jl. Wonodri Kebondalem, Jl. Wonodri Krajan RW. 1, 2, 3, 4, 5,	1 paket	300.000.000	Diakomodir

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
		7, 8 dan 12 RT RW WONODRI			
7	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	RT01, RW 01 RT5 RW2 RT6 RW3 RT6 RW4 RT2 RW5 RT5 RW6 RT2 RW7 RT6 RW9 RT2 RT3 RW10RT14 RW11 RT6 RW12 RT6 RT11 RW 13 RT5 RT7 RW14 Kel. Tandang RT RW 01-14 TANDANG	18 rumah	360.000.000	Diakomodir
8	Rehab rumah tinggal warga yang tidak layak huni Bu Malikhah, Lutfi Kholifatur, Mulyani, Sudarmadi, Dhidhik Suhirman, Hartono, Muhayati, Kasminah, Suwarno, Lasimah, Sanuri	Jatirejo RT - RW - JATIREJO	330 meter ²	550.000.000	Diakomodir
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
9	Jamban / MCK	rw 1 sampai rw 7 RT 41 RW 1 - 7 REJOMULYO	12 unit	210.000.000	Diakomodir
10	Perbaikan MCK Umum	Jl. Pedurungan Tengah VI RT 1 RW 2 PALEBON	5 titik	250.000.000	Diakomodir
11	Penyambungan saluran dari closet ke saluran IPAL	Sekayu RT 0 RW 1 SEKAYU	85 titik	425.000.000	Diakomodir
12	Lampu Penerang Jalan	Ngijo RT 3, 5, 6 RW 2 RT 03 RW 02 NGIJO	15 titik	210.000.000	Diakomodir
13	Lampu Penerangan Jalan	JL. TAMBAKHARJO RT 1 RW 7 TAMBAKHARJO	7 Titik	210.000.000	Diakomodir
14	Lampu Penerangan Jalan	kp bedug, kp pedalangan, kp manisharjo RT 3,5,6 dan RW 4 dan 7 REJOMULYO	63 titik	202.000.000	Diakomodir
15	Lampu Penerangan Jalan	Wilayah Kelurahan Karangturi RT 01 RW 03 KARANGTURI	30 titik	300.000.000	Diakomodir
16	Lampu Penerangan Jalan	WILAYAH KELURAHAN KEMBANGSARI RT 0 RW 0 KEMBANGSARI	15 unit	300.000.000	Diakomodir
17	Lampu Penerangan Jalan	Jl. Margasatwa dan Kalimasada RT RW 5 SEKARAN	45 titik	210.000.000	Diakomodir
18	Lampu Penerangan Jalan	RT. 1, 3 RT 0 RW 5 MANGUNSARI	30 Unit	300.000.000	Diakomodir
19	Lampu Penerangan Jalan	Sumurrejo RT 01 RW 04 SUMURREJO	45 Titik	250.000.000	Diakomodir
20	Lampu Penerangan Jalan	JL. GUNUNG TUGEL DAN SENDANG PAKEL RT 5 RW 3 GEDAWANG	7 Titik	210.000.000	Diakomodir
21	Lampu Penerangan Jalan	Jl. Tlogo Timur RT 3 RW 11 PALEBON	5 titik	350.000.000	Diakomodir
22	Lampu Penerangan Jalan Umum	JL. PUSPOWARNO	30 Titik	205.000.000	Diakomodir

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
		SELATAN RAYA RT 00 RW 00 SALAMANMLOY O			
23	Lampu Penerangan Jalan Umum	Jln Kandri Raya RT 01-07 RT 01 RW 01 KANDRI	60 unit	800.000.000	Diakomodir
24	Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl Siwarak Ray RT 01-05 RT 01 RW 02 KANDRI	40 unit	400.000.000	Diakomodir
25	Lampu Penerangan Jalan Umum	Wilayah Pakintelan 2 Penghubung antar RW 2 dan RW 5 RT 0 RW 5 PAKINTELAN	20 unit	250.000.000	Diakomodir
26	Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Sitrombo (Penghubung RW 001 dengan RW 003) RT 0 RW 1 PAKINTELAN	10 unit	210.000.000	Diakomodir
27	Lampu PJU	Jatisari RT 05 RW 02 JATISARI	1 paket	201.000.000	Diakomodir
28	Pekerjaan Penerangan jalan Umum	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02 RT 0 RW 02 NGADIRGO	0 unit	201.000.000	Diakomodir
29	Pekerjaan PJU	WONOLOPO RT 04 RW 03 WONOLOPO	15 Titik	210.000.000	Diakomodir
30	Pemasangan Lampu dan Penerangan Jalan	Jl. Tanggul Mas Raya, Jl. Pasir Mas Raya, Jl. Kuala Mas Raya RT 00 RW 00 PANGGUNG LOR	90 titik	300.000.000	Diakomodir
31	Pemasangan Lampu PJU	Sekayu - Bedagan RW.01 - RW.02 RT 0 RW 0 SEKAYU	20 titik	250.000.000	Diakomodir
32	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	KARANGANYAR GUNUNG RT 0 RW 0 KARANGANYAR GUNUNG	105 Titik	210.000.000	Diakomodir
33	Pemasangan PJU	JL. Tampomas Selatan I RT 1 RW 2 PETOMPON	100 titik	250.000.000	Diakomodir
34	Pekerjaan penerangan jalan	Mangkang Kulon RT 0 RW 3 Mangkang Kulon	7 Titik	250.000.000	Diakomodir
35	Pembangunan Jalan Raya Bandungsari	Bandungsari RT 00 RW 04 TAMBANGAN	240 meter	350.000.000	Diakomodir
36	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Jalan raya Wonoyoso RW.04 RT 0 RW 4 WONOPLUMBO N	25 titik	250.000.000	Diakomodir
37	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso RT 0 RW 3 WONOPLUMBO N	30 titik	300.000.000	Diakomodir
38	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan Djahuri RT 6 RW	30 titik	300.000.000	Diakomodir

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
		2 WONOPLUMBO N			
39	Penerangan jalan	Sepanjang Jalan Lumba Lumba Raya RW 09,10, Jl. Kp Sleko RW 11 & Jl. Tengiri 7 RT 07 RW 06 RT 00 RW 00 BANDARHARJO	30 Buah	300.000.000	Diakomodir
40	Penerangan Jalan	Dk. Sadeng RT 1 RW 2 SADENG	20 pal	250.000.000	Diakomodir
41	Penerangan Jalan	Dk. Desel RT 1 RW 3 SADENG	40 pal	250.000.000	Diakomodir
42	Penerangan Jalan	Jl. Raya Banaran RT 5 RW 4 SEKARAN	35 titik	205.000.000	Diakomodir
43	Penerangan Jalan	pongangan RT 02 RW 02 PONGANGAN	30 Buah	250.000.000	Diakomodir
44	Penerangan Jalan	pongangan RT 03 RW 02 PONGANGAN	30 Buah	250.000.000	Diakomodir
45	Penerangan Jalan	jatisari RT 08 RW 05 PONGANGAN	30 Buah	250.000.000	Diakomodir
46	Penerangan Jalan	JL. JEDUNG RT 3 RW 3 NONGKOSAWIT	1 Paket	210.000.000	Diakomodir
47	Penerangan Jalan	JL. KALAAN RAYA RT 3 RW 4 NONGKOSAWIT	1 Paket	210.000.000	Diakomodir
48	Penerangan Jalan	JL. JEDUNG UTARA RT 4 RW 3 NONGKOSAWIT	1 Paket	210.000.000	Diakomodir
49	Penerangan Jalan	NGREMBEL-SEKALONGAN RT 08 RW 01 GUNUNGPATI	30 Pal	250.000.000	Diakomodir
50	Penerangan Jalan	NGLARANG-SIROTO RT 02 RW 09 GUNUNGPATI	30 Pal	250.000.000	Diakomodir
51	Penerangan Jalan	TK. Magersari-Perbalan RT 01 RW 02 GUNUNGPATI	30 Pal	250.000.000	Diakomodir
52	Penerangan Jalan	MALON RT 03 RW 06 GUNUNGPATI	30 Pal	250.000.000	Diakomodir
53	Penerangan Jalan	Jalan baru RT 1,2,3 RW 003 GUNUNGPATI	20 pal	250.000.000	Diakomodir
54	Penerangan Jalan	Jalan Maryadi RT 00 RW 01, 02 BUBAKAN	32 Tiang	960.000.000	Diakomodir
55	Penerangan Jalan	Srondol Kulon RT 01 RW 08 SRONDOL KULON	20 Titik	250.000.000	Diakomodir
56	Penerangan Jalan	Jl. Potrosari Balaidesa No. 6 RT 01 RW 02 SRONDOL KULON	20 Titik	250.000.000	Diakomodir
57	Penerangan Jalan Umum	Kp. Utri - Kp. Pederesan Besar (RW 1 : RT 1 - RT 8, RW 2 : RT 1- RT 4, RW 3 :	100 unit	400.000.000	Diakomodir

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
		RT 1 - RT 8, RW 4 : RT 1 - RT 7) RT 27 RT RW 4 RW KEBONAGUNG			
58	Penerangan Jalan Umum	JL. REJOLEKSONO RT 01,03,04 RW 01 & JL. CITANDUI RAYA 1 RT 01 RW 066 RT 1,3,4 RW 1,6 MLATIHARJO	20 Titik	250.000.000	Diakomodir
59	Penerangan Jalan Umum	RW 1, 2, DAN 3 KELURAHAN KARANGMALAN G RT 1 RW 2 KARANGMALAN G	33 Tiang lamp	500.000.000	Diakomodir
60	Penerangan jalan umum	Jl. Wisma Prasetya Barat I RT 5 RW 16 PADANGSARI	300 m ²	250.000.000	Diakomodir
61	Penerangan lampu jalan	Mundingan, Jetis, Sukorame RT 5,1,3,5 RW 2,3 CEPOKO	70 Titik	900.000.000	Diakomodir
62	Penerangan Lampu Jalan	Jl. Kyai Achmad RT 01, 02 RW 03, 04 PENGGARON LOR	80 Titik	300.000.000	Diakomodir
63	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Jl. Bulustalan I,V dan Jl. Lemah gempal I,IIIB RT 0 RW 01 s/d 04 BULU STALAN	41 unit	205.000.000	Diakomodir
64	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Kelurahan Mangkang Wetan RT 0 RW 0 MANGKANG WETAN	50 buah	350.000.000	Diakomodir
65	PJU	WILAYAH KELURAHAN KARANGAYU RT - RW - KARANGAYU	55 Titik	220.000.000	Diakomodir
66	Peremajaan Tiang Lampu dan Lampu Penerangan	KELURAHAN PLOMBOKAN RT - RW - PLOMBOKAN	1 paket	300.000.000	Diakomodir
67	Taman Kota	DK. KRAJAN RT 01 RW 2 KARANGMALAN G	1 paket	750.000.000	Diakomodir
68	Pembuatan Taman Kota	Jl. Tanggul Mas Raya RT 01 RW 09 PANGGUNG LOR	800 m ²	250.000.000	Diakomodir
69	Pembuatan Taman Untuk Ruang Terbuka Hijau	KANTOR KECAMATAN SEMARANG SELATAN RT 8 RW 3 LAMPER LOR	1045 M ²	550.000.000	Diakomodir
70	Pembangunan Taman	jl. Sedane RT 09 RW 3 BUGANGAN	1875 m ²	300.000.000	Diakomodir
71	Pembangunan Taman Bermain*	Jl. Plamongansari V RT 03 RW 09	200 M ²	300.000.000	Diakomodir

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
		PLAMONGANSARI			
	Program Pengembangan Permukiman				
72	Betonisasi dan Pembuatan Saluran di Cumi-Cumi Raya	Betonisasi Jalan Cumi-Cumi Raya RT 00 RW 04 06 07 RT 00 RW 00 BANDARHARJO RT 0 RW 0 BANDARHARJO	560000 M ²	2.500.000.000	Diakomodir
73	betonisasi jalan	Gendong utara RT 04 RW 06 SARIREJO	300 M ²	250.000.000	Diakomodir
74	Betonisasi Jalan	Jalan Sapin RT 06 RW 02 KALISEGORO	1250 M ²	250.000.000	Diakomodir
75	Jalan Tembus	Spoorlan RT 04 RT 05 RW 03 RT 04 RW 03 KEMIJEN	1 Kegiatan	300.000.000	Diakomodir
76	Normalisasi Saluran dan Tutup Saluran	Jl. Banowati RT 1 RW 5 BULU LOR	150 m	201.000.000	Diakomodir
77	Paket Renovasi Pagar Makam Bendan Ngisor (Pagar Makam Keliling, Gapura Makam, Penerangan Jalan Umum Makam)	RW 05 RT 0 RW 0 BENDAN NGISOR	1 Paket	235.000.000	Diakomodir
78	pavingisasi Jalan	Wilayah RT 2,3,7,8 RW 4 BARUSARI	1160 M ²	215.000.000	Diakomodir
79	Pavingisasi Peninggian jalan	Jl. Bukit Seruni I RT 9 RW 19 SENDANGMULO	660 m ²	300.000.000	Diakomodir
80	Pembangunan Pagar Makam	Makam Bunda Maria RT 10 RW 3 SUKOREJO	100 meter	250.000.000	Diakomodir
81	Pembangunan Pagar Makam	Makam Astana Puri RT 1 RW 12 SUKOREJO	200 meter	250.000.000	Diakomodir
82	Pembangunan Saluran ke Makam antara Makam penduduk asli dan makam warga Plamongan Indah*	Jl. Plamongansari RT 03 RW 02 PLAMONGANSARI	300 Meter	350.000.000	Diakomodir
83	Pembangunan Talud Beronjong Jl. Rumpun Diponegoro (Kali Teleng Belakang Pasar Banyumanik) RT.01/RW.07 Kel. Banyumanik	JL. RUMPUN DIPONEGORO (KALI TELENG BELAKANG PASAR BANYUMANIK) RT 01 RW 07 BANYUMANIK	700 M ²	350.000.000	Diakomodir
84	Pembangunan Talud Jalan Rawan Longsor	KARANGANYAR LEGOK RT 06 RW 04 RT 6 RW 4 KARANGANYAR GUNUNG	750 METER	275.000.000	Diakomodir
85	Pembangunan Talud Saluran	JL. GEDONGSONG O RT 11,15 RW 01 MANYARAN	80 M	280.000.000	Diakomodir
86	Pembangunan talud saluran air	Jl. Widoro Raya RT 0 RW 1.2.34.9.1 SEMBUNGHARJO	600 m ²	2.550.000.000	Diakomodir
87	Pembuatan Saluran Sektor Timur - Barat Got U - 30 cm Kanan Kiri dan Tutup	Jl. Patiunus I Wil. RT.5/6 RW XI RT 05 RW 11 PANDEAN LAMPER	500 Meter	368.800.000	Diakomodir

No. 1	Program/ Kegiatan 2	Lokasi 3	Volume 4	Anggaran 5	Catatan 6
88	Pembuatan Sumur Resapan & Pembuatan Jamban Komunal di Wilayah RW 01 s.d RW 05	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05 RT 0 RW 1,3,5 BENDAN NGISOR	1 Paket	305.000.000	Diakomodir
89	Pembuatan Talud Makam/pondasi	Jl. Durenan Indah RT 7 RW 2 MANGUNHARJO	1 PAKET	250.000.000	Diakomodir
90	Pengaspalan Jalan	Jalan Menoreh Utara IV RT 03 RW 01 SAMPANGAN	1000 m ²	400.000.000	Diakomodir
91	Pengaspalan Jalan	Jl. Panda Raya RT 3 & 10 RW III RT 3 RW 3 PALEBON	300 m ³	250.000.000	Diakomodir
92	Peninggian & Peningkatan Paving Jalan	Jl Kanguru V RT 1 RW 4 GAYAMSARI	131 Meter	200.500.000	Diakomodir
93	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	CUCUT RT 2 RW 7 KUNINGAN	480 METER	210.000.000	Diakomodir
94	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Urugan 45 Cm	KESEHATAN RT 10 DAN 13 RW 2 KUNINGAN	425 METER	205.000.000	Diakomodir
95	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	JL. GEMBONGSARI RT 03 RW 07 TAMBAKREJO	80 Meter	230.000.000	Diakomodir
96	Perbaikan Jalan Curam	JL. BUKIT BERINGIN SELATAN BLOK G RT 00 RW 12 GONDORIYO	300 M ³	400.000.000	Diakomodir
97	Perbaikan Saluran Got U - 30 cm	Jl. Bintoro I RT 3 RW 07 PANDEAN LAMPER	320 Meter	200.500.000	Diakomodir
98	Saluran Air	Jalan Karang Gawang Lama RT 16 RW 01 RT 16 RW 01 SENDANGGUWO	200 Meter	210.000.000	Diakomodir
99	Talud dan Saluran	Jalan Candi Penataran RT 05 dan RT 11 RT 0 RW 03 KALIPANCUR	301 M ³	384.979.000	Diakomodir
100	Talud Jalan Pucung	PUCUNG RT 0 RW 01 BAMBANKEREP	250 M ³	319.995.000	Diakomodir
JUMLAH				34.314.774.000	

Sumber : Usulan Musrenbang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023 dari masyarakat kepada Disperkim Kota Semarang diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, total terdapat 318 usulan yang diarahkan ke Disperkim Kota Semarang, namun setelah ditelaah hanya terdapat 100 usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang seperti pada tabel diatas, sedangkan usulan lainnya terdapat 177 usulan yang tidak diakomodir karena alasan lain, 41 usulan tidak diakomodir

karena bukan kewenangan SKPD.

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, antara lain:

- Kebutuhan pemakaman warga kedepan semakin besar sehingga kami meminta agar setiap tahun pemkot menganggarkan pengadaan lahan makam

Tanggapan:

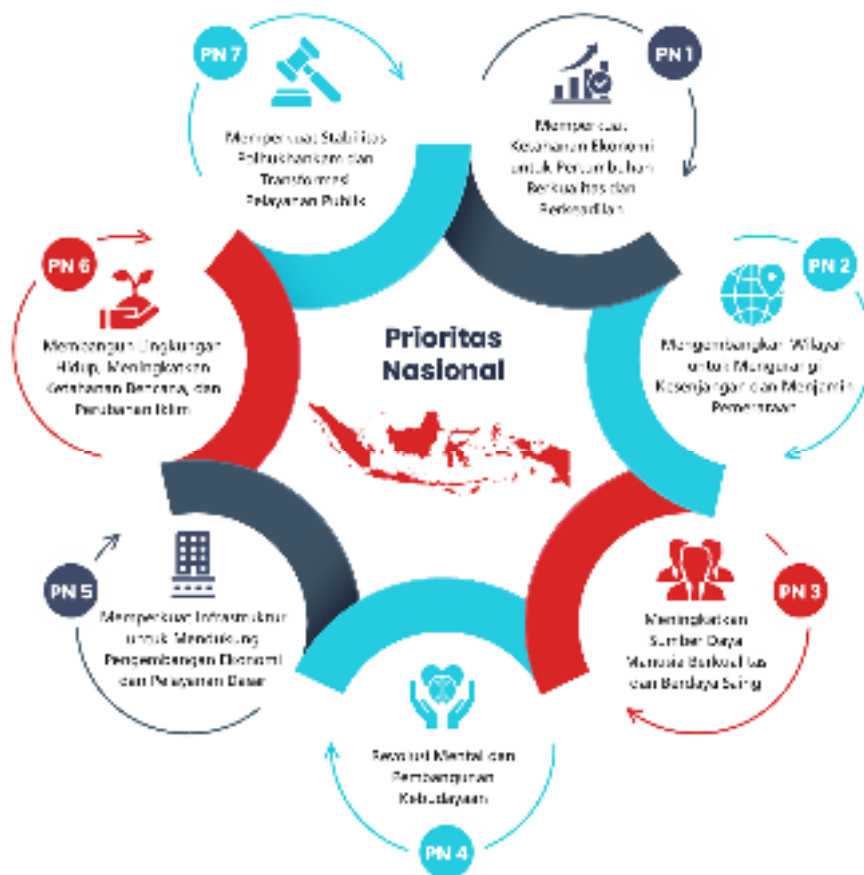
Pemerintah Kota Semarang sudah menghitung perkiraan kebutuhan lahan pemakaman untuk 5 s.d 10 tahun mendatang, untuk itu setiap tahun sudah menganggarkan penambahan lahan. Pada tahun 2022, Disperkim menganggarkan penambahan lahan untuk TPU sebesar 21 M. Namun demikian, karena adanya keterbatasan anggaran, maka penambahan lahan yang dilakukan masih belum bisa memenuhi kebutuhan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung

- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas yaitu **“Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.**

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Disperkim maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pada Prioritas ke- 5. Kebijakan pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan ketersediaan infrastruktur melalui pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan. Kebijakan tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Semarang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Semarang, sangat dibutuhkan peran serta dari semua pihak, baik oleh Pemerintah dengan kebijakan maupun oleh masyarakat dan seluruh stakeholders. Tujuan dan strategi yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis melalui pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Dinas pada Akhir Tahun Anggaran.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;

b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap

melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;

- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan

prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas”

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan.

Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam RPJMD tersebut dimuat visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SATUAN TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	97,50%
SASARAN 1: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan	Presentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	60%
	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	77,53%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SATUAN TUJUAN / SASARAN	TARGET
	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	44,31%
SASARAN 2: Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,5%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang bertugas memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan yaitu **“Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”** dan 3 indikator sasaran yaitu **“Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan, Persentase luasan kawasan kumuh, Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau”**;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan program dan kegiatan bidang permukiman, rumah umum & swadaya, pertamanan & pemakaman, dan prasarana, sarana, & utilitas agar selaras dan terintegrasi guna mencapai penyediaan infrastruktur yang berkualitas dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan pembangunan daerah untuk memenuhi penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, termasuk dapat mengakomodir pemberdayaan gender;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program eks rutin), dan 8 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 53 kegiatan, yang terdiri dari 1 kegiatan penunjang (kegiatan eks rutin), dan 52 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Terdapat 2 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan untuk mengakomodir kegiatan dari pusat yang bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yaitu Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp.242.274.030.773,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 46.447.853.524,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp.195.826.177.,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					120.883.527.501	136.203.097.000			
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak		69,69 %	290.462.481	2.148.893.000			
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembangunan dan perawatan sumber daya air bawah tanah yang baik		100 %	290.462.481	2.148.893.000			
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kota Semarang	4 Titik	290.462.481	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69,69 %	2.148.893.000
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		90,86 %	976.028.762	5.630.453.000			
1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah air domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih		100 %	976.028.762	5.630.453.000			
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Semarang	100 Rumah Tangga	676.447.485	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90,86 %	3.536.574.500
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	Kota Semarang	75 M ³ /Hari	299.581.277	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90,86 %	436.632.900
1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah		48 %	112.749.649.507	120.207.533.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani							
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman dengan kondisi baik		100 %	112.749.649.507				120.207.533.000
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	177 Sistem Jaringan	82.006.181.134	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 %	81.675.751.500
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	177 Sistem Jaringan	30.743.468.373	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 %	34.901.748.500
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata		100 %	6.867.386.751				7.991.353.000
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya bangunan dan sarpras Rusun, Rusunawa, Pondok Boro/ Sosial yang tertata & terpelihara dengan baik		100 %	6.867.386.751				7.991.353.000
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Semarang	1 Kawasan	35.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	298.798.500
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Semarang	9 Kawasan	6.831.986.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	5.302.165.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				121.390.503.272			188.639.428.000	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD		100 %	46.447.853.524				41.761.936.000
				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman			100 %						
				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman			100 %						
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman			100 %						
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, pengangan yang akuntabel		100 %	66.188.260			64.137.500	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 Dokumen	7.870.650	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	17.682.500
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	11.378.440	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	13.133.440	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	17.260.425	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	8.294.925	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	4.125.190	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 Laporan	4.125.190	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	8.011.500
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja keuangan yang tertib dan optimal		100%	20.462.427.689				24.654.643.500
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	164 Orang/ bulan	20.009.707.989	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	22.990.272.000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 Dokumen	418.440.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.630.103.900
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	7.525.050	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	11.201.500
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	2 Laporan	8.701.860	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest e SKPD	Kota Semarang	18 Laporan	8.831.674	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	2 Dokumen	9.221.116	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	574.874.001			264.899.000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Semarang	1 Paket	355.795.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	179.574.500
1	04	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	12 Dokumen	2.994.688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	13.647.500
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Semarang	100 Orang	201.329.992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	17.851.000
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Semarang	120 Orang	14.754.091	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	53.826.000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi umum perkantoran yang optimal		100 %	4.037.416.003			3.530.103.000	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	26.049.000
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket	2.725.655.147	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	621.715.500
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket	201.123.586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	75.781.500
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket	61.519.431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	116.847.500
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket	79.768.057	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	59.305.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 Laporan	51.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	40.963.500
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	155.286.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	701.682.500
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	164 Dokumen	13.063.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.688.000
1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.880.070.500
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan baik		100 %	5.500.835.974				1.496.455.000
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	2 Unit	1.629.068.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	0
1	04	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Semarang	1 Unit	2.506.310.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.496.455.000
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	20 Unit	1.365.456.943	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	0
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan optimal		100 %	2.803.276.606				2.565.451.000
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	12 Laporan	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	13.468.000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	699.255.504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	728.156.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	221.653.902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	728.156.500
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	1.871.367.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.095.670.000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan optimal		100 %	13.002.834.991				9.186.247.000
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	270 Unit	1.644.161.282	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.996.812.500
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	110 Unit	6.858.229.694	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	5.132.462.500
1	04	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Semarang	20 Unit	112.342.079	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	576.582.500
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	300 Unit	121.078.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	146.515.500
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	5 Unit	3.930.529.733	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.093.082.500
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	200 Unit	336.493.403	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	240.791.500
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan		100 %	4.260.207.921				4.576.599.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tertanganinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Dengan Baik		100 %	400.000.000				821.696.000
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kota Semarang	15 Unit Rumah	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	522.898.000
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terwujudnya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni rusun dengan baik		100 %	3.337.950.075				3.286.786.000
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	4 Laporan	3.337.950.075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	3.286.786.000
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pendukung kegiatan perumahan umum/ rumah susun umum		100 %	522.257.846				69.720.000
1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	1 Laporan	522.257.846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	69.720.000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni		99,14 %	9.624.631.895				25.424.302.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya kualitas kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha		100 %	9.624.631.895				25.424.302.000
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Semarang	10 Dokumen	610.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,14 %	1.815.016.000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kota Semarang	730 Unit Rumah	9.014.631.895	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,14 %	23.609.286.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU		100 %	61.057.809.932				116.876.591.000
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya penyediaan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum Perumahan yang menunjang fungsi hunian dengan baik		100 %	61.057.809.932				116.876.591.000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	16 Lokasi	25.393.683.194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	24.995.176.000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	16 Laporan	34.026.013.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	89.889.313.000
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kota Semarang	10 Laporan	1.638.112.976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.992.102.000
TOTAL									242.274.030.773				324.842.525.000

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah RKPD - Penetapan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

Rencana kerja pada anggaran belanja Tahun 2023 dialokasikan untuk Pengembangan wisata religi untuk Makam Mbah Syafi'i, Sunan Kuning, KH Sholeh Darat, pengadaan lahan makam, dan kegiatan-kegiatan OM. Adapun kegiatan prioritas walikota pada tahun 2023 yaitu Pembangunan Sentra PKL di Taman, Bedah Rumah Tuntas, Pematangan Lahan Rusun Tambak Lorok, Penyusunan DED *Vertical and Roof Garden/ Farming* (untuk Rusun/ Permukiman), Rehabilitasi Pembangunan Taman Tematik, Persetujuan Lingkungan Kampung Pecinan, Penyusunan DED Kampung Kauman, dan Dukungan Pelaksanaan SPBE.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Penyesuaian indikator kinerja & output sub kegiatan pada nomenklatur baru nama perubahan program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja yang telah diubah sesuaikan melalui beberapa tahapan pemutakhiran dan usulan kegiatan dari pusat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023.
4. Penyesuaian indikator kinerja & output sub kegiatan telah dilakukan pemutakhiran pada indikator kinerja & output sub kegiatan tiap program yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

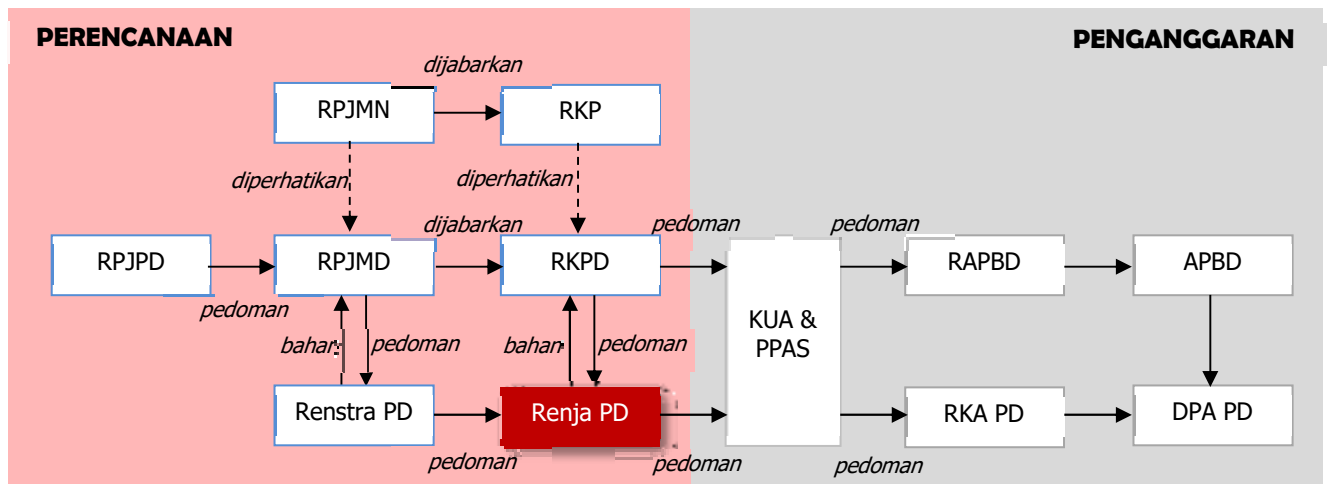
7. SATPOL PP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Satuan Polisi Pamong Praja **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Adanya penyesuaian belanja yang dilakukan mengingat adanya efisiensi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang; (2) Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- q. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;

- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- bb. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- cc. Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
- dd. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- ee. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- ff. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di

Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, review terhadap

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan Rencana Kerja (Renja) serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022 (kalau ada)	Ambil Monev 2021 Kolom 6	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD									
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.01.2.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.01.2.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.01.2.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD									
1.05.02.2.02.0.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.02.2.02.07	Koordinasi dan	Jumlah laporan keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	semesteran		(100 %)	(100%)	(100%)					
1.05.02.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD									
1.05.02.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	43 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	8 kegiatan	100	18 kegiatan	14 kegiatan	100 %	100 %
1.05.02.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD									
1.05.02.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	75 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	13 jenis	80 %	100 %
1.05.02.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	140 jenis	28 jenis	28 jenis	28 jenis	100	28 jenis	21 jenis	78 %	100 %
1.05.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	300 jenis	60 jenis	60 jenis	60 jenis	100	60 jenis	45 jenis	75 %	100 %
1.05.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	529.405 lembar	105.881 lembar	105.881 lembar	105.881 lembar	100	105.881 lembar	26.470 lembar	25 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Ketertiban Umum										
		Persentase pemberdayaan Linmas									
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)									
		Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum									
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %
		persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.01.04	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	177 orang	177 orang	177 orang	100	177 orang	177 orang	100 %	100 %
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100 %	100 %
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar	Jumlah koordinasi antar lembaga	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	2 kali	2 kali	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	yang dilaksanakan									
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	0	0	0	0	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.01.10	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)									
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100	12 kali	0	0	100 %
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		persentase pengendalian trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02.03	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS									
1.05.02.2.03	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	2 kali	1 kali	50 %	100 %
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	18 orang	12 orang	12 orang	12 orang	100	14 orang	14 orang	100 %	100 %

Adapun hasil analisis rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2022 dan capaian renstra sampai dengan triwulan II tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Pada sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan indikator kinerja jumlah sosialisasi yang dilaksanakan, sama dengan triwulan II kegiatan tidak dapat telaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia, belum terrealisasi penuh karena menyesuaikan kebutuhan selama satu tahun .

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PERENCANAAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.728.819.047	13.666.783.622	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.144.350	10.845.000	5.9
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.949.000	0	0,00
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.627.710	0	0,00
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	0	0,00
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	0	0,00
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	0	0,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.567.640	10.845.000	12,11
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.342.409.090	8.298.220.473	40.8
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.098.467.000	8.298.220.473	41.2
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.144.650	0	0,00
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.680.000	0	0,00
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9.218.720	0	0,00
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.898.720	0	0,00
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.400.000	87.816.000	40.9
1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	84.216.000	42.1
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000	3.600.000	25
2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.868.452.944	4.319.339.964	88.7
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.932.028	656.000	2.4
2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.995.812	13.907.000	57.9
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.697.760	11.571.160	32.4
2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.463.069	7.012.475	26.4
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	239.700.000	143.842.550	60.1
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.249.817.903	3.992.140.775	93.9
2.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	265.846.372	150.210.004	56.5
2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.145.789	121.822.550	59.6
2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.145.789	121.822.550	59.6
2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.000.554	273.351.563	42.5
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.000.554	97.851.563	33.8
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.000.000	175.500.000	49.5
2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.272.266.320	555.388.072	43.6
2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	35.095.917	96.6

	(SATPOL PP)			
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	951.363.390	278.048.155	29.2
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.986.550	30.845.000	51.4
2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.508.600	211.399.000	99.9
2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.089.600	0	0.00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.448.608.673	4.334.912.836	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.876.666.413	4.183.229.526	47.1
2.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	75.000.000	18.317.200	24.4
2.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	346.607.880	224.010.000	64.6
2.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	181.680.000	75.025.000	41.2
2.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.407.579.400	3.636.882.426	49.1
2.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDMSatuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	423.845.850	195.368.150	46.1
2.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.000.000	33.626.750	9.6
2.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (SATPOL PP)	85.078.283	0	0,00
2.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	6.875.000	0	0,00
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	441.942.260	150.783.310	34.1
2.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	60.000.000	2.331.810	3.8
2.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	181.558.360	148.451.500	81.7
2.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	200.383.900	19.150.000	9.5
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	130.000.000	900.000	0.6
2.2.03.01	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	130.000.000	900.000	0.6

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022 "Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2 program, dan 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan pada Satpol PP kota

Semarang adalah sebesar Rp 37.177.427.720 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 18.001.696.458 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 19.175.731.262.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP adalah melaksanakan fungsi mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Satpol PP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI 2022
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %		-	-	-	-	5 %
Sasaran : meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	50 %	-	-	-	-	100,00 %
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,68 %	-	-	-	-	100,00 %
Terwujudnya	Nilai		70	71	72	73	74		70.61	-	-	-	-	70

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)													

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satpol PP tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, target sebesar **5% per tahun belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar ... % (capaian ... %); (tanya bu Ima)**
- b. Sasaran pertama meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat memiliki dua indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50 %);
 - 2) Indikator Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50 %);
- c. Sasaran kedua Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Satpol PP dalam pelaksanaan fungsinya di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Satpol PP Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP Kota Semarang di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan teknis menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Satpol PP di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %;. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 2 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Satpol PP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme;
- b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota .

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai .
- c. Pada tahun 2020 terdampak pandemi COVID 19 yang mengakibatkan reffocusing anggaran, dan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Menurunkan angka gangguan trantibum
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah

b. Peluang

- 1) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kapstian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang
- 2) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanism.
- b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang

menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Satpol PP Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	24.165.022.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	24.165.022.313	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	66.584.382	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	66.584.382	-
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	1 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	5 Dokumen	0	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	5 Dokumen	0	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	1 Dokumen	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	5 Dokumen	6.200.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	0	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	4.016.742	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	4.016.742	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	56.367.640	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	56.367.640	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD								
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota	Penyediaan Gaji dan	100 %	16.813.055.904	Penyediaan Gaji dan	Kota	Penyediaan Gaji dan	100 %	16.813.055.904	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	ASN	Semarang	Tunjangan ASN			Tunjangan ASN	Semarang	Tunjangan ASN			
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	190.364.650	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	190.364.650	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	0	
5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	0	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD								
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	300.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	300.000.000	
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	14.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	14.400.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD								
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis	28.158.140	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis	28.158.140	
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 jenis	23.995.812	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 jenis	23.995.812	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	60 jenis	24.473.550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	60 jenis	24.473.550	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	105.881 lembar	23.727.259	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	105.881 lembar	23.727.259	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	201.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	201.700.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat konsultasi dan kooordinasi SKPD yang terlaksana	60 kegiatan	4.109.883.903	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat konsultasi dan kooordinasi SKPD yang terlaksana	60 kegiatan	4.109.883.903	
7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kota	Jumlah Barang yang	9 jenis	168.546.738	Dukungan Pelaksanaan		Jumlah Barang yang	9 jenis	168.546.738	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	mendukung sistem pemerintahan yang Berbasis Elektronik yang tersedia			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		mendukung sistem pemerintahan yang Berbasis Elektronik yang tersedia			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		204.145.789						
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air)	6 unit	204.145.789	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air)	6 unit	204.145.789	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor		616.882.873	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor		616.882.873	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	262.882.873	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	262.882.873	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	354.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	354.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD		1.379.123.313	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD		1.379.123.313	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	36.318.180	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	45 unit	854.208.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	45 unit	854.208.850	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya	100 unit	65.813.780	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya	100 unit	65.813.780	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota	Jumlah Pemeliharaan	2 gedung	409.692.903	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota	Jumlah Pemeliharaan	2 gedung	409.692.903	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Gedung dan Bangunan Kantor			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Gedung dan Bangunan Kantor			
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	13.089.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	13.089.600	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda		8.261.701.400	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda		8.261.701.400	
			Persentase pemberdayaan Linmas					Persentase pemberdayaan Linmas			
8.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)		7.943.506.978	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)		7.943.506.978	
		Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum				Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Semarang	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	18.589.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Semarang	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	18.589.000	
		Kota Semarang	persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %			Kota Semarang	persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %		
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	225.107.690	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	225.107.690	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	75.025.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	75.025.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	7.208.287.400	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	7.208.287.400	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	310.871.138	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	310.871.138	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	33.626.750	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	33.626.750	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	0	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	0	
	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Semarang	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	0	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Semarang	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	0	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)		233.882.672	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)		233.882.672	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	4.611.810	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	4.611.810	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	148.839.650	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	148.839.650	
		Kota Semarang	persentase pengendalian trantibum	100 %			Kota Semarang	persentase pengendalian trantibum	100 %		
	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	80.431.212	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	80.431.212	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS		84.311.750	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS		84.311.750	
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	84.311.750	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	84.311.750	
		Kota Semarang	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	14 orang			Kota Semarang	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	14 orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 akan mengacu pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya, sedangkan tema untuk RKP 2022 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing”** yang dijabarkan melalui lima prioritas nasional, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Pengentasan kemiskinan;
 - e. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Konektivitas dan pemerataan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil;
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam daerah (TKDN);
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan EBT;
 - b. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - c. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
 - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Penguatan kemampuan pertahanan;
 - b. Peningkatan diplomasi publik dan ekonomi;
 - c. Penguatan sistem hukum dan upaya anti korupsi;
 - d. Pencegahan dan pemberantasan narkoba serta peningkatan kamtibmas;
 - e. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, keamanan laut dan wilayah perbatasan.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Tengah, tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023 serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas sbb :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan fiskal daerah.

Prioritas tersebut dijabarkan lebih rinci dalam empat fokus pembangunan, yaitu:

1. **Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**
 - ◆ dengan fokus pengurangan kemiskinan pada : penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, penguatan sustainable livelihood, penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan;
 - ◆ Dengan fokus menurunkan angka pengangguran pada : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
2. **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah** dengan fokus pada perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
3. **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan** dengan fokus pada :
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian
 - b. meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;

- c. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah;
 - g. perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
 - i. peningkatan kualitas lingkungan;
 - j. peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah** dengan fokus :
- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services);
 - b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
 - c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Dengan memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang

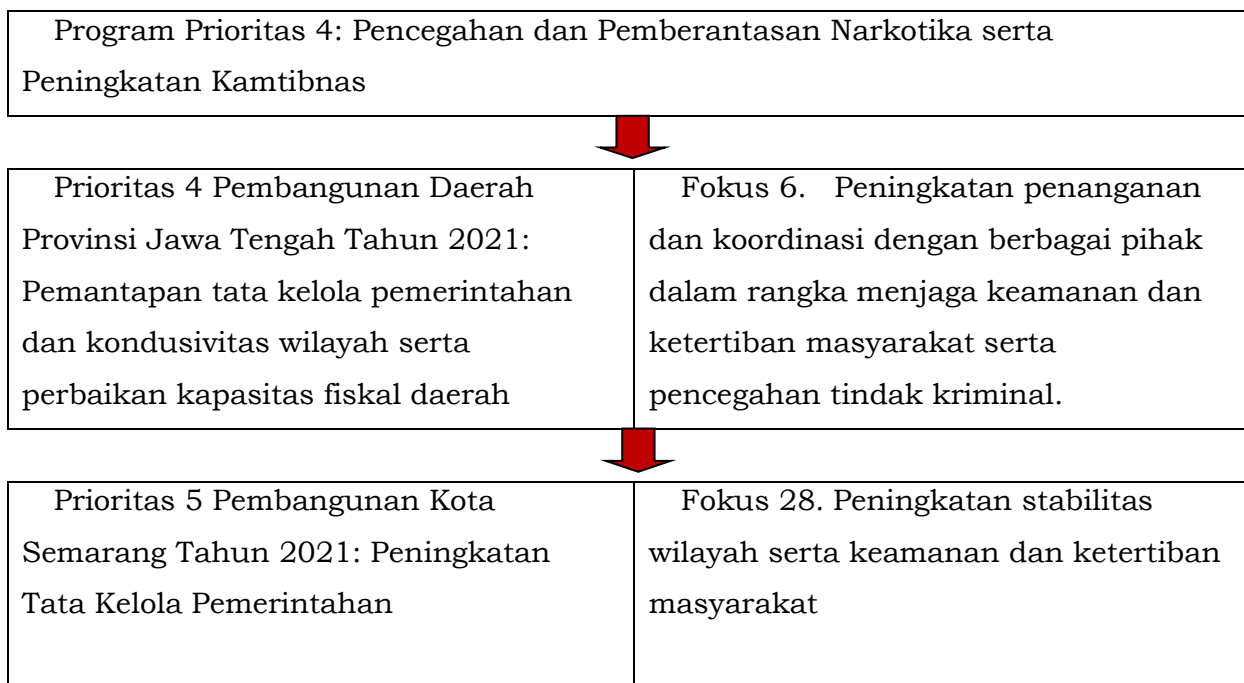
Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta prioritas pembangunan nasional maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh, dan Berdaya Saing”** yang dijabarkan ke dalam lima prioritas daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan guru jenjang PAUD;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
 - c. Penurunan angka pengangguran;
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan;
 - e. Peningkatan upaya promotif dan preventif.
2. Penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin;
 - b. Perlindungan PMKS;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial;
 - d. Pengembangan dan penguatan kampung tematik;
 - e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat miskin.
3. Pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan, yang dijabarkan dalam sebelas fokus :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana strategis perkotaan;
 - b. Peningkatan lahan pemakaman;
 - c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
 - d. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
 - e. Peningkatan penggunaan transportasi publik;
 - f. Penurunan luasan kawasan kumuh;
 - g. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
 - i. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - j. Pengembangan kawasan strategis;
 - k. Pengembangan fungsi ruang terbuka.
4. Penguatan daya saing ekonomi daerah, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Pembangunan sarana prasarana perdagangan;

- b. Peningkatan produktivitas pangan;
 - c. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi;
 - d. Peningkatan produktivitas usaha mikro kecil;
 - e. Peningkatan kunjungan wisatawan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, yang dijabarkan dalam empat fokus :
- a. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. Peningkatan stabilitas wilayah serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sapol PP Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

‘meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat’

dengan indikator tujuan **“persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satpol PP Kota Semarang yaitu **“meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman ;
- b. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	5
SASARAN : meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	%	100
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	70

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SATPOL PP KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (2 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban**” dan indikator sasaran “Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman” dan “Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat”;
3. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait
4. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
5. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
6. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Satpol PP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	23.945.469.047	15.196.208.877	15.631.064.524		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	184.144.350	184.144.350	66.584.382		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	34.949.000	34.949.000	0		
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	6.200.000	1 Dokumen	19.627.710	19.627.710	0		
1.05.01.2.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	6.200.000		
1.05.01.2.01.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	4.016.742	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0		
1.05.01.2.01.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	100 %	56.367.640	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.016.742		
1.05.01.2.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	89.567.640	89.567.640	56.367.640		
1.05.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	20.342.409.090	20.342.409.090	17.003.420.554		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.02.2.020.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	20.098.467.000	20.098.467.000	16.813.055.904		
1.05.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	100 %	100 %	223.144.650	223.144.650	190.364.650		
1.05.02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000	4.680.000	0		
1.05.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.218.720	9.218.720	0		
1.05.02.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.898.720	3.898.720	0		
1.05.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	464.400.000	464.400.000	314.400.000		
1.05.02.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	450.000.000	450.000.000	300.000.000		
1.05.02.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	100%	100%	14.400.000	14.400.000	14.400.000		
1.05.02.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	100%	100%	835.102.944	835.102.944	4.580.465.402		
1.05.02.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis	15 jenis	15 jenis	26.932.028	26.932.028	28.158.140		
1.05.02.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 jenis	28 jenis	28 jenis	23.995.812	23.995.812	23.995.812		
1.05.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	60 jenis	60 jenis	60 jenis	35.697.760	35.697.760	24.473.550		
1.05.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	105.881 lembar	105.881 lembar	105.881 lembar	26.463.069	26.463.069	23.727.259		
1.05.02.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	600 orang	600 orang	106.500.000	106.500.000	201.700.000		
1.05.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi SKPD yang terlaksana	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	349.667.903	349.667.903	4.109.883.903		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.02.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang mendukung sistem pemerintahan yang Berbasis Elektronik yang tersedia	9 jenis	9 jenis	9 jenis	265.846.372	265.846.372	168.546.738		
1.05.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	204.145.789	204.145.789	204.145.789		
1.05.02.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0		
1.05.02.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air)	6 unit	6 unit	6 unit	204.145.789	204.145.789	204.145.789		
1.05.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	643.000.554	643.000.554	616.882.873		
1.05.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	100 %	100 %	289.000.554	100 %	262.882.873		
1.05.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	100 %	100 %	354.000.000	100 %	354.000.000		
1.05.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	100 %	1.272.266.320	1.272.266.320	1.379.123.313		
1.05.02.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180		
1.05.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	45 unit	45 unit	45 unit	951.363.390	951.363.390	854.208.850		
1.05.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan	100 unit	100 unit	100 unit	59.986.550	59.986.550	65.813.780		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		pemeliharaan								
1.05.02.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2 gedung	2 gedung	2 gedung	211.508.600	211.508.600	409.692.903		
1.05.02.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	60 unit	60 unit	13.089.600	13.089.600	13.089.600		
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda				9.820.934.673	9.820.934.673	8.261.701.400		
		Persentase pemberdayaan Linmas								
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %	100 %	100 %	9.100.550.913	9.100.550.913	7.943.506.978		
		Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	8 %	8 %	8 %					
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	18.589.000		
		persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %	100 %	100 %					
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	100 %	100 %	570.492.380	570.492.380	225.107.690		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase pengerahan linmas dan monitoring	100 %	100 %	100 %	181.680.000	181.680.000	75.025.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	poskamling yang dilaksanakan								
1.05.02.2.01.04	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	177 orang	177 orang	7.407.579.400	7.407.579.400	7.208.287.400		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	3 kali	423.845.850	423.845.850	310.871.138		
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	350.000.000	350.000.000	33.626.750		
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	100 %	100 %	85.078.283	85.078.283	0		
1.05.02.2.01.10	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	100 %	100 %	6.875.000	6.875.000	0		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)	64 %	64 %	64 %	590.383.760	590.383.760	233.882.672		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali	60.000.000	60.000.000	4.611.810		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	329.999.860	329.999.860	148.839.650		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		persentase pengendalian trantibum	100 %	100 %	100 %					
1.05.02.2.02.03	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	100 %	100 %	200.383.900	200.383.900	80.431.212		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	8 kasus	8 kasus	8 kasus	130.000.000	130.000.000	84.311.750		
1.05.02.2.03	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	130.000.000	130.000.000	84.311.750		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	14 orang	14 orang	14 orang					

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Satpol Pp Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol Pp Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait.
2. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
4. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Satpol PP ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Satpol PP Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

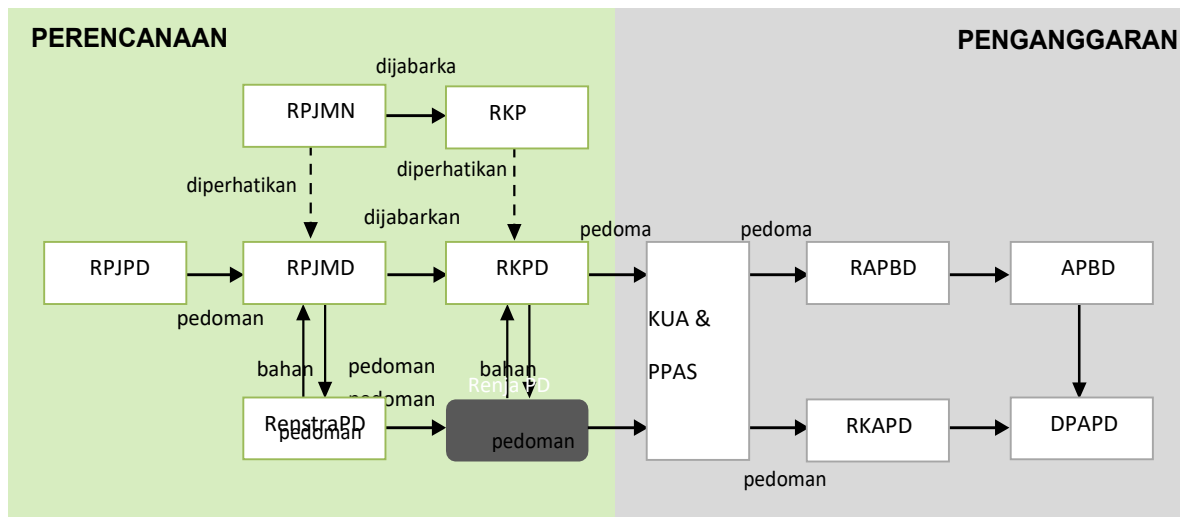
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara

simultan/parallel dengan penyusunan RKPD dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemadam Kebakaran, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD (Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

- Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
 20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023(Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota

- Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagaidasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp27.020.225.728,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp25.948.342.774,- atau sebesar 96,03%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Dinas Pemadam Kebakaran**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen (100%)	100%	2 dokumen (20%)	2 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA perubahan Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	10 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	2 dokumen (20%)	2 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen (100%)	100%	2 dokumen (20%)	2 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen (100%)	100%	12 dokumen (20%)	12 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen (100%)	100%	12 dokumen (20%)	12 dokumen (20%)	100% (20%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen (100%)	100%	12 dokumen (20%)	12 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen (100%)	100%	12 dokumen (20%)	12 dokumen (20%)	100% (20%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dinas Pemadam Kebakaran								
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen (100%)	100%	12 dokumen (20%)	12 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1750 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen (100%)	100%	350 dokumen (20%)	350 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen (100%)	100%	12 dokumen (20%)	12 Dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dinas	5 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100% (20%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemadam Kebakaran								
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	-	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan (100%)	100%	12 bulan (20%)	12 bulan (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ketersediaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	-	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintah Daerah	kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran								
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 jenis	-	-	-	-	1 jenis (33,33%)	1 jenis (33,33%)	100% (33,33%)
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 jenis	-	-	-	-	1 jenis (20%)	1 jenis (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel	30 jenis	-	-	-	-	10 jenis (33,33%)	10 jenis (33,33%)	100% (33,33%)
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	25 jenis	-	-	-	-	5 jenis (20%)	5 jenis (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 jenis	-	-	-	-	3 jenis (20%)	3 jenis (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi jasa penunjang urusan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan Kantor	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tertib pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Pemadam	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	Kebakaran								
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	100%	-	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100%	-	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	90,17% (18,03%)	90,17% (18,03%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah, Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	96,51% (19,30%)	96,51% (19,30%)
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya pencegahan kebakaran melalui rekomendasi teknis gambar dan sosialisasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan (100%)	100%	200 dokumen (20%)	200 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan efisien	2000 kejadian	12 bulan	12 bulan	12 bulan (100%)	100%	400 kejadian (20%)	200 kejadian (10%)	50% (10%)
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2150 kejadian	12 bulan	12 bulan	12 bulan (100%)	100%	10 kejadian (20%)	200 kejadian (9,30%)	46,51% (3,81%)
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kota Semarang	12 kejadian	-	-	-	-	3 kejadian (25%)	3 kejadian (25%)	100% (25%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen (20%)	5 dokumen (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	200 jenis	-	-	-	-	40 jenis (20%)	40 jenis (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	60 orang	-	-	-	-	12 orang (20%)	0 orang (0%)	0% (0%)
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25 kegiatan	-	-	-	-	5 kegiatan (20%)	5 kegiatan (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	74% (14,80%)	74% (14,80%)
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi	Didapatkannya data proteksi kebakaran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan (100%)	100%	250 gedung	250 gedung	100% (20%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kebakaran	gedung di Kota Semarang						(20%)	(20%)	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	dihasilkan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran sesuai standar yang berlaku	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan (100%)	100%	250 gedung (20%)	120 gedung (9,60%)	48% (9,60%)
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	-	-	-	-	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	2000 kejadian	-	-	-	-	400 kejadian (20%)	400 kejadian (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	100% (20%)	66,67% (13,33%)	66,67% (13,33%)
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui	5310 orang	-	-	-	-	1080 orang (20,33%)	0 orang (0%)	0% (0%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	masyarakat	sosialisasi dan edukasi masyarakat								
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	360 orang/ke-lurahan (20%)	360 orang/ke-lurahan (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100% (100%)	100%	6 jenis (20%)	6 jenis (20%)	100% (20%)
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	70 kejadian	-	-	-	-	400 kejadian (14,28%)	450 kejadian (642,60%)	4500% (642,60%)
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan	25 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen (20%)	1 dokumen (4%)	20% (4%)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan evakuasi								
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 jenis	-	-	-	-	6 jenis (25%)	0 jenis (0%)	0% (0%)
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	200 orang	-	-	-	-	40 Orang (20%)	0 orang (0%)	0% (0%)

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 2 Program dan 2 Indikator Kinerja Program dan 11 Kegiatan dengan 11 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 2 Indikator kinerja program, seluruhnya memenuhi target.
 - c) Dari 11 Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 2 Program dengan 2 indikator program dan 14 kegiatan dengan 14 indikator.
 - b) Dari 2 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target, serta 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 14 indikator kinerja, terdapat 1 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 9 Indikator masih dalam proses serta 4 Indikator tidak dapat memenuhi Renstra kerana terkena refocusing.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021

No	Kode Keg.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.194.473.310	12.563.643.230	95,22	630.830.080
I.1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.957.778	4.616.844	77,49	1.340.934
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.552	935.125	93,55	64.427
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	990.125	899.725	90,87	90.400
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	981.891	874.400	89,05	107.491
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	992.492	919.225	92,62	73.267
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	994.855	892.025	89,66	102.830
6	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	998.863	962.000	96,31	36.863
I.2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.814.172.264	10.479.985.953	96,91	334.186.311
7	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.614.341.728	10.299.764.863	97,04	314.576.865
8	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195.800.000	178.100.000	90,96	17.700.000
9	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	403.709	43.709	10,83	360.000
10	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	290.000	50.000	17,24	240.000
11	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.048.371	748.371	71,38	300.000

No	Kode Keg.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)
12	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	240.000	0	0	240.000
13	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.279.010	1.279.010	100	0
14	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	769.446	0	0	769.446
I.3	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	550.000	150.000	27,27	400.000
15	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	290.000	0	0	290.000
16	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	110.000	0	0	110.000
17	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000	150.000	100	0
I.4	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	447.418	327.418	73,18	120.000
18	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	84.709	84.709	100	0
19	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	138.709	138.709	100	0
20	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	224.000	104.000	46,43	120.000
I.5	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.543.500	102.996.500	90,71	10.547.000
21	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	113.543.500	102.996.500	90,71	10.547.000
I.6	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.429.439	183,366,281	71,79	72.063.158
22	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	41.486.170	22.190.140	53,49	19.296.030
23	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.034.049	33.402.520	65,45	17.631.529

No	Kode Keg.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)
24	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.689.220	36.147.400	86,71	5.541.820
25	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.690.000	20.402.500	66,48	10.287.500
26	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.530.000	71.223.721	78,67	19.306.279
1.7	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.944.610	452,557,941	95,09	23.386.669
27	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.663.584	282.557.866	92,74	22.105.718
28	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.281.026	170.000.075	99,25	1.280.951
1.8	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.428.301	1,339,642,293	87,65	188.786.008
29	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.115.720.601	1.018.437.237	91,28	97.283.364
30	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.664.960	80.197.000	78,88	21.467.960
31	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.391.540	222.027.896	83,35	44.363.644
32	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.651.200	18.980.160	42,51	25.671.040
II	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	13.825.752.418	13,383,833,888	96,80	441.918.530
II.1	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	12.219.825.732	11,935,981,895	97,68	283.843.837

No	Kode Keg.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)
		dalam Daerah Kabupaten/Kota				
33	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	136.629.610	116.779.133	85,47	19.850.477
34	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12.072.279.082	11.809.780.262	97,83	262.498.820
35	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	10.917.040	9.422.500	86,31	1.494.540
II.2	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.015.929.895	907,245,343	89,30	108.684.552
36	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	14.723.116	11.946.784	81,14	2.776.332
37	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.001.206.779	895.298.559	89,42	105.908.220
II.3	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	589.996.791	540,606,650	91,63	49.390.141
38	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	261.496.278	245.586.650	93,92	15.909.628
39	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	328.500.513	295.020.000	89,81	33.480.513
Total			27.020.225.728	25.948.342.774	96,03	1.071.882.954

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 11 kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp 27.020.225.728,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 25.948.342.774,- dengan sisa sebesar Rp 1.071.882.954,- (3,97%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp 25.510.411.668,- dengan realisasi Rp 24.671.602.071,- (96,71%) dan sisa anggaran sebesar Rp 838.809.597,- (3,29%).

- b. **Belanja Modal**, anggaran sebesar Rp 1.509.814.060,- dengan realisasi sebesar Rp 1.276.740.703,- (84,56%) dan sisa anggaran sebesar Rp 233.073.357,- (15,44%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA			CAPAIAN TAHUN 2020
				TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	
1	Terciptanya Rasa Aman Masyarakat Kota Semarang Dari Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	25,22	25,22	30,43	120,65	30,43
2		Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	88,00	88,00	79,87	90,76	77,04
3		Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang)	100,00	100,00	96,61	96,61	71,19
4		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	70,00	70,00	15,00	21,43	5,62

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Berhasil meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dari yang ditargetkan 25,22% menjadi 30,43% (tercapai 120,65%).

Hal ini sama jika dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 30,43%.

- b. Tidak berhasil mencapai target penanganan kasus kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dari yang ditargetkan 88,00%, hanya tercapai 79,87% (tercapai 90,76%).

Hal ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 77,04%.

- c. Tidak berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui pemberdayaan Satlakar. Target selama 2016-2021 sebesar 100,00% hanya tercapai 96,61%.

Ada kenaikan capaian dari tahun 2020 sebesar 71.19%.

- d. Tidak berhasil mencapai target bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran. Target 70,00% tercapai 15,00% (tercapai 21,43%).

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 5,62%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Jumlah pos sektor pemadam kebakaran yang ada saat ini masih kurang untuk mencakup Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang yang mengakibatkan tingkat waktu tanggap (*response time*) tidak dapat memenuhi target.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 7 Pos Sektor Pemadam Kebakaran untuk mencakup 16 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang, diantaranya Pos Semarang Barat (Pos Induk), Pos Sektor Ngaliyan, Pos Sektor Gunungpati, Pos Sektor Banyumanik, Pos Sektor

Pedurungan, Pos Sektor Semarang Timur, dan Pos Sektor Genuk. Masih terdapat 9 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang yang belum memiliki Pos Sektor Pemadam Kebakaran, yaitu Semarang Tengah, Tembalang, Tugu, Candisari, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Mijen, dan Gayamsari.

- b. Masyarakat merupakan ujung tombak dalam penanganan api awal terjadinya kebakaran, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dapat diminimalisir. Maka perlu adanya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan dukungan sarana prasarana penanganan kebakaran dari pemerintah.
- c. Peralatan proteksi kebakaran yang handal pada bangunan/gedung merupakan suatu aset bagi pemilik bangunan/gedung. Dengan adanya peralatan proteksi kebakaran, bangunan/gedung dapat mengurangi resiko kebakaran dan melindungi aset yang berada didalamnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Semarang, para pemilik bangunan/gedung diwajibkan membayar retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Hal ini memberatkan pemilik bangunan/gedung karena disamping harus menyiapkan peralatan proteksi yang handal juga harus membayar retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya:

- a. Jumlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di tiap Kecamatan (Wilayah Manajemen Kebakaran) untuk meningkatkan response time;
- b. Keterampilan dan pengetahuan personil pemadam kebakaran di bidang penyelamatan belum tersertifikasi sementara penanganan kejadian yang membahayakan keselamatan manusia sudah menjadi tanggungjawab personil pemadam kebakaran.
- c. Personil pemadam kebakaran membutuhkan ketrampilan khusus yang perlu ditingkatkan dan selalu diasah, namun Dinas Pemadam Kebakaran belum memiliki tempat latihan dan menara vertikal untuk mendukung kebutuhan tersebut.

- d. Mobil tangga yang dimiliki sudah tidak dapat dioperasikan.
- e. Keterbatasan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta alat pelindung diri menyebabkan kerawanan saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan. Alat pelindung diri seperti baju tahan panas, sarung tangan, dan masker rawan penularan penyakit jika digunakan secara bergantian.
- f. Belum adanya sertifikasi bagi petugas investigasi pasca kebakaran sebagai dasar mengambil langkah lanjutan pencegahan kebakaran di lingkungan tersebut;
- g. Pengurangan anggaran menyebabkan pembuatan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan baru pada tahap penetapan wilayah WMK dan pembuatan Manajemen Pemadaman Kebakaran tingkat Kota Semarang belum dilaksanakan;
- h. Perda penanggulangan kebakaran di Kota Semarang belum diganti dari tahun 1994, pada tahun 2021 baru membuat Naskah Akademis dan draft Raperda penanggulangan kebakaran. Tahun 2022 tidak terlaksana karena pengurangan anggaran.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Semarang perlu di perbarui, hal ini mengingat semakin bertambahnya gedung tinggi, kawasan insdustri, kepadatan permukiman, dan kepadatan lalu lintas;
 - Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran;
 - Layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;
 - Terbatasnya petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi;

- Belum memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan seperti pos pemadam, mobil pemadam kebakaran, mobil penyelamatan, alat pelindung diri, sumur dan bak tandon pemadam;
 - Fireground (tempat latihan) guna menjaga dan melatih ketrampilan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - Kesadaran dunia usaha dalam memenuhi kelengkapan pemasangan proteksi kebakaran.
- b. Peluang:
- Militansi aparaturnya pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mengenai pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
 - Dinas Pemadam Kebakaran sudah membentuk relawan pemadam kebakaran yang berada di seluruh Kelurahan di Kota Semarang, tinggal mengupayakan partisipasi dalam memadamkan kebakaran.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Kemiskinan Kota
- b. Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Good Governance

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun keduadua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKPD Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;

- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industry kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdayasaing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor

- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

- 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan social bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan social kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif,

dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM sertasarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga

- 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan dan

berkelanjutan

- 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:

- 1) Konservasi sumber daya air
- 2) Pendayagunaan sumber daya air
- 3) Pengendalian daya rusak air

f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas system pengelolaan keuangan daerah
- 2) Optimalisasi barang milik daerah

b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
- 2) Pengembangan alternative pembiayaan
- 3) Optimalisasi BUMD

c. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
- 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan system teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan system inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Penyediaan pelayanan dasar”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	15.300.149.928	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	14.224.925.197
Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran			100%	-			-	100%	
Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran			100%	-			-	100%	
Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,			100%	-			-	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	-		-	100%	
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	12.597.342.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.046.176.414
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	100%	-		-	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Penyelamatan Non Kebakaran						
			Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	-		-	100%	
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	201 Dokumen	440.000.000		Jumlah orang yang bertambah kesadaran terhadap kewajiban pemasangan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung/tempat usaha di Kota Semarang	50 orang	50.000.000
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	11.000.000.000		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	300 Laporan	9.284.659.616

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
						Kabupaten/Kota			
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	8.284.403
4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	4.383.416
5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala	3 Dokumen	30.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	3 Dokumen	2.038.938

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			(Setiap Tahun), Sah, dan Legal				Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	900.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	2.689.766.397
7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	106.342.500		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0
8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau	12 Desa/Kelurahan	15.000.000		Tersedianya dokumen Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran	2 dokumen	1.243.644

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya						
9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	6.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5.800.000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	1.060.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentaselayak operasionalProteksiKebakaranbangunangedung	100%	718.000.000
10	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki	12 Dokumen	14.464.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
							Sistem Proteksi Kebakaran		
11	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	1.010.000.000		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	703.535.200
							Draft Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Semarang	1 dokumen	
							Smoke Detector Tester Gas	1 unit	
							Handy Talky	3 buah	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	80.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	23.884.403
12	Investigasi iKejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	300 Dokumen	80.000.000		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan	300 Dokumen	23.884.403

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
							Penelitian		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	702.807.428	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	489.868.917
13	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		JumlahWarga Masyarakat yang MendapatkanSosi alisasiEdukasiPence gahan dan PenanggulanganKe bakaranSetiapTahunnya	180 Orang	114.729.824		JumlahWarga Masyarakat yang MendapatkanSosi alisasiEdukasiPence gahan dan Penanggulangan KebakaranSetiap Tahunnya	40 Orang	64.548.950
14	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		JumlahDesa/Kelurahan yang Terbentuk dan TerbinaRelawanPemadamKebakaranpada LingkupSistemKeta hananKebakaranLingkungan (SKKL) SetiapTahunnya	36 Desa/Kelurahan	238.752.676		JumlahDesa/Kelurahan yang Terbentuk dan TerbinaRelawanPemadamKebakaranpada LingkupSistemKeta hananKebakaranLingkungan (SKKL) SetiapTahunnya	36 Desa/Kelurahan	194.673.775
15	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		JumlahDokumen yang MemuatJumlah SKKL Desa/Kelurahan yang TelahTersediaDukunganSaprasDamka	12 Dokumen	349.324.928		JumlahDokumen yang MemuatJumlah SKKL Desa/Kelurahan yang TelahTersediaDukunganSaprasDa	12 Dokumen	230.646.192

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			r				mkar		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	860.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	946.995.463
16	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	80.000.000		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	58.184.403
17	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen	30.000.000		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen	15.245.060
18	Pengadaan Sarana		Jumlah Sarana	10 Unit	700.000.000		Jumlah Sarana	146 Unit	833.666.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		
19	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	8 Laporan	50.000.000		Jumlah orang yang lulus pembinaan aparatur dengan predikat minimal "baik"	2 orang	39.900.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PersentasePerencanaan dan PelaporanKinerjaDinasPemadamKebakaran	100%	17.012.224.415	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	21.553.426.484
			Persentase tersedianyasarana dan prasaranaperkantoranDinasPemadamKebakaran	100%				100%	
			Persentasekinerjaa	100%				100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			dministrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen perencanaan dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	41.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	22.685.540
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	4 Dokumen	7.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.446.040
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	6.000.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.568.720
22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.232.630
23	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.000.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.513.680

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Dokumen DPA SKPD				Penyusunan Dokumen DPA SKPD		
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.995.590
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.500.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	896.480
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.500.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.032.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	11.961.598.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	18.224.372.021

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
							an		
27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang/bulan	11.704.515.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 orang/bulan	17.940.212.871
28	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250.083.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	277.979.000
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	750.000		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	746.540
30	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	750.000		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	632.550
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.319.790
32	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	12 Dokumen	1.500.000		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	12 Dokumen	1.393.830

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pemeriksaan		Tindak Lanjut Pemeriksaan				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.500.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.234.560
34	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	852.880
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	101.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.375.660
35	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	402.880

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
36	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	500.000		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	402.880
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.500.000		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	569.900
			Jumlah Dokumen Manajemen Aset	1 Dokumen					
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.400.850
38	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	500.000		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	442.890
39	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	500.000		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	555.080
40	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	500.000		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	402.880
	Administrasi Kepegawaian	DINAS PEMADAM	Pelayanan Administrasi	100%	426.000.000	DINAS PEMADAM	Pelayanan Administrasi	100%	519.460.171

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Perangkat Daerah	KEBAKARAN	kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran			KEBAKARAN	kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran		
41	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	425.000.000		Jumlah Training dan Kaos Lengan Panjang	329 pasang	518.056.126
42	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.404.045
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	477.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	334.762.050
43	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.500.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.692.777
44	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.783.824
45	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000		Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	0 Paket	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.000.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	81.349.739
47	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.000.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.534.030
48	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	80.000.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42 Laporan	45.450.000
49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.951.680
50	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	60.000.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.216.056.375	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	483.352.506

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
51	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	27.285.820
52	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0
53	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.000.000		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5.103.700
54	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	713.056.375		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	363.550.902
55	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.000.000		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.230.200
56	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5.000.000		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	844.260
57	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Dokumen Masterplan dan DED Kantor Dinas Pemadam	1 Dokumen	395.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0 Unit	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Kebakaran				Disediakan		
			Jumlah Dokumen Kajian Gedung Perpustakaan dan Arsip	1 Dokumen					
58	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	95.000.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	83.337.624
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	510.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran		491.269.099
59	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	334.426.099
60	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.843.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan	100%	2.252.070.040	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan	100%	1.474.748.587

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran				mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran		
			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
61	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.600.000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	252.722.130
62	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	1.596.060.115		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	921.449.388
63	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0
64	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	131.409.925		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	29.802.211
65	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0
66	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	6.000.000		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
67	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	315.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	160.617.000
68	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115 Unit	150.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115 Unit	110.157.858
JUMLAH					32.312.374.343				35.778.351.681

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran, tidak ada usulan/aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran**

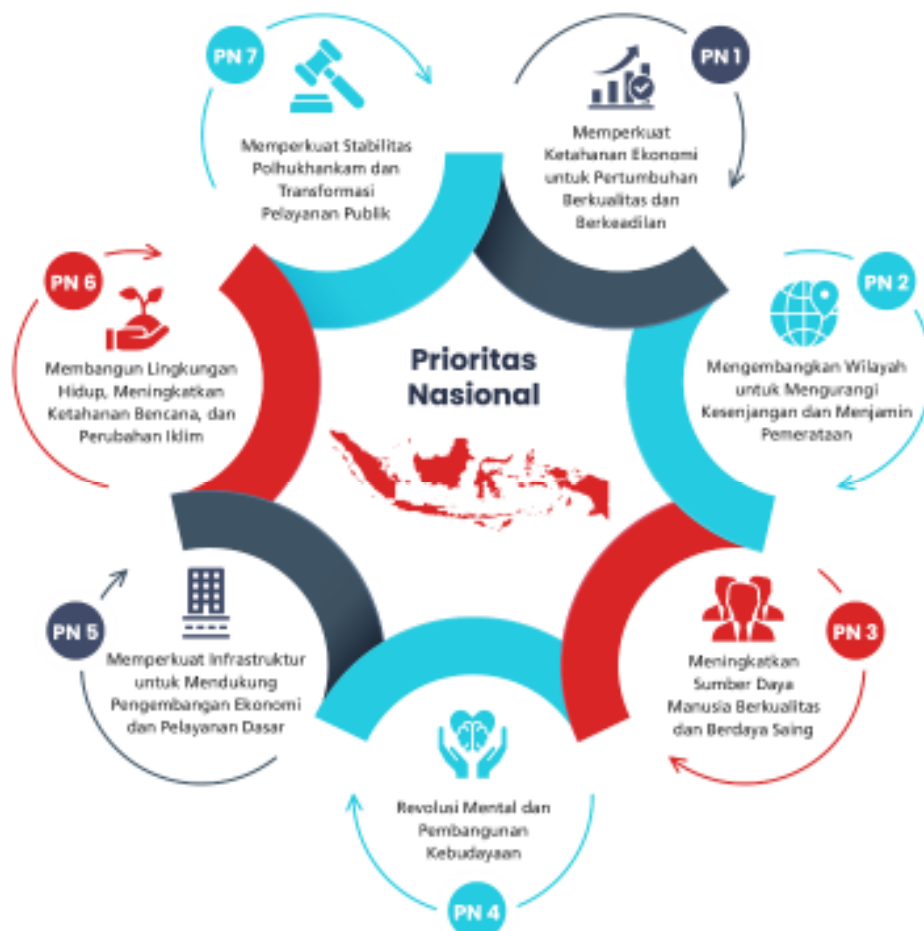
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 PenguatanPelaksanaanPerlindunganSosial
 - PP3 PeningkatanAkses dan MutuPelayananKesehatan
 - PP4 PeningkatanPemerataanLayanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 PeningkatanKualitasAnak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 PenguatanKemiskinan
 - PP7 PeningkatanProduktivitas dan DayaSaing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum sub urusan

kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6% atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52%. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14% dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29% yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKPD Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
a. *Direct services* (pelayanan public langsung kepada masyarakat);
b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;

- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pemadam Kebakaran juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana khususnya kebakaran di Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut diatas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yangtersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52%, Indeks Pembangunan Manusia

sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14%, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar $2,5\pm 1\%$ menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29%, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat Kota Semarang dari Bahaya Kebakaran”,

dengan indikator tujuan “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, yaitu “Meningkatnya Tingkat Waktu Tanggap Response Time Rate/Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadaman

Kebakaran” dan “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran” dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran.
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran

Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat Kota Semarang dari Bahaya Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	100%
SASARAN : - Meningkatnya Tingkat Waktu Tanggap Response Time Rate/Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadaman Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%
- Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73,28%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur”** dan indikator sasaran **“Indeks Risiko Bencana”**;
2. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), dan 1 (satu) program pelaksana/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), dan 5 (lima) kegiatan pelaksanaan/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran);

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.778.351.681,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp21.553.426.484,- untuk program dan kegiatan penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).
 - b. Rp14.224.925.197,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran) .

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1.05.0.00 .0.00.02. 0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			35.778.351.681		APBD KOTA		28.334.987.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			35.778.351.681		APBD KOTA		28.334.987.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persentas e	14.224.925.197		APBD KOTA		13.560.779.000	
		pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persentas e						
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh	100.00 %						

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
		relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran							
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persentas e						
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 %						
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan	100.00 persentas e						

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
		Penyelamatan							
1.05.04.2. 01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.00 %	12.046.176.414		APBD KOTA		11.173.138.993	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 %						
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	100.00 %						

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.04.2. 01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	200.00 dokumen	50.000.000				185.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemadaman Kebakaran	300.00 Kejadian	9.284.659.616				10.478.138.993	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.00 Kejadian	8.284.403				90.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di Kota Semarang	10.00 kejadian	4.383.416				75.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	3.00 dokumen	2.038.938				30.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
	Pelindung Diri	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
1.05.04.2. 01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	15.00 jenis	2.689.766.397				285.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Efisien dan Akurat	12.00 kegiatan	1.243.644				20.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terseleng ggaranya Kerjasama dan	5.00 kegiatan	5.800.000				10.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
		Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar							
1.05.04.2. 02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100.00 %	718.000.000		APBD KOTA		1.082.640.007	
1.05.04.2. 02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	350.00 gedung	14.464.800				55.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	260.00 gedung	703.535.200				1.027.640.007	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100.00 %	23.884.403		APBD KOTA		80.000.000	
1.05.04.2. 03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	300.00 Kejadian	23.884.403				80.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100.00 %	489.868.917		APBD KOTA		810.000.000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1.05.04.2. 04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180.00 orang/kelurahan	64.548.950				160.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	360.00 orang/kelurahan	194.673.775				280.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6.00 jenis	230.646.192				370.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	100.00 %	946.995.463		APBD KOTA		415.000.000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
		Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100.00 %						
1.05.04.2. 05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	500.00 kejadian	58.184.403				55.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	3.00 dokumen	15.245.060				30.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2. 05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan	Tersedianya sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan	10.00 jenis	833.666.000				275.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
	n dan Evakuasi	manusia/penyelamatan dan evakuasi							
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.00 orang	39.900.000				55.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX	NON URUSAN			21.553.426.484				14.774.208.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	21.553.426.484		APBD KOTA		14.774.208.000	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %						
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %						

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	22.685.540		APBD KOTA		9.000.000	
X.XX.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	4.00 dokumen	3.446.040				1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00 Dokumen	3.568.720				1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00 dokumen	4.232.630				1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00 dokumen	2.513.680				1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00 dokumen	2.995.590				1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	2.00 dokumen	896.480				1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	3.00 dokumen	5.032.400				1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	18.224.372.021		APBD KOTA		11.921.872.000	
X.XX.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00 persen	17.940.212.871				11.665.322.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100.00 persen	277.979.000				250.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan keuangan terverifikasi	12.00 Bulan	746.540				1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam	12.00 Dokumen	632.550				1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
		Kebakaran							
X.XX.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	1.00 dokumen	1.319.790				1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 persen	1.393.830				550.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran	12.00 Dokumen	1.234.560				1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran	1.00 dokumen	852.880				1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persentase	1.375.660		APBD KOTA		1.786.000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.00 dokumen	402.880				750.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan laporan Barang Milik Daerah	12.00 dokumen	402.880				536.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12.00 dokumen	569.900				500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persentase	1.400.850		APBD KOTA		1.500.000	
X.XX.01.2 .04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan dan Target Retribusi Daerah	1.00 dokumen	442.890				500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	350.00 surat	555.080				500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	12.00 dokumen	402.880				500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persentase	519.460.171		APBD KOTA		400.750.000	
X.XX.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00 persen	518.056.126				400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	1.00 Dokumen	1.404.045				750.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persentase	334.762.050		APBD KOTA		262.000.000	
X.XX.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	100.00 persen	30.692.777				41.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 persen	35.783.824				2.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor selama 1 tahun	100.00 persen	81.349.739				51.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	100.00 persen	47.534.030				42.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamunya	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamunya selama 1 tahun	100.00 persen	45.450.000				60.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan dalam daerah	100.00 persen	93.951.680				65.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	483.352.506		APBD KOTA		38.200.000	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 persentase						

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0.00	27.285.820				20.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebel	5.00 jenis	5.103.700				5.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan mesin dan lainnya	15.00 jenis	363.550.902				3.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.00 Jenis	3.230.200				3.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.00 jenis	844.260				4.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	11.00 jenis	83.337.624				3.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persentase	491.269.099		APBD KOTA		510.000.000	
X.XX.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 persen	334.426.099				330.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100.00 persen	156.843.000				180.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	1.474.748.587		APBD KOTA		1.629.100.000	
		Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persentase						
X.XX.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	100.00 persen	252.722.130				50.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00 persen	921.449.388				1.060.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100.00 persen	29.802.211				104.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100.00 persen	160.617.000				290.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100.00 persen	110.157.858				125.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JUMLAH				35.778.351.681				28.334.987.000	

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran;
3. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

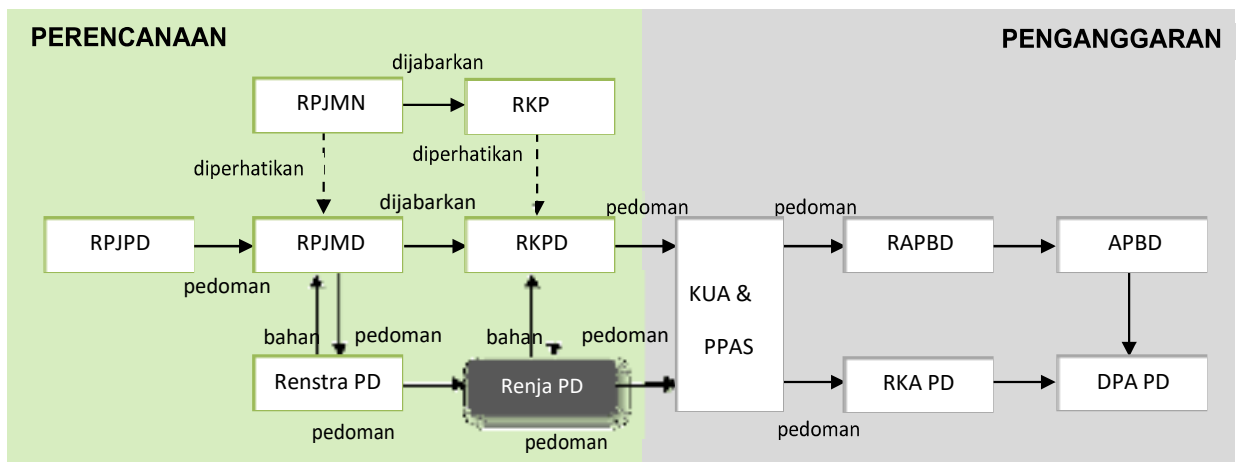
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 24.275.681.669 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 23.006.530.038 atau sebesar 94,77 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016 - 2021 dengan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100,00 %		100,00 %			100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	25 %	16,00	100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100,00 %		100,00 %			100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100,00 %		100,00 %			100,00 %	50%	50%	50%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	100%	100%	50%	50%	1 dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100%	100%
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	2 Dokumen	100%	100%	50%	50%	2 dokumen (100%)	1Dokumen (50%)	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	2 Dokumen	100%	100%	50%	100%	2 dokumen (100%)	1 dokumen (50%)	50,00%	50,00%
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 Dokumen	100%	100%	%	100%	1 dokumen (100%)	0 dokumen	0	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	50%	100%	100%	60.50%	60.50%	60.50%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	50%	100%	100%	44.64%	44.64%	44.64%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	50%	100%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	50%	100%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	100%	-	-	-	-	50 orang (100%)	50 orang (100%)	100%	100%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Installasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis	100%	100%	50%	100%	10 jenis (100%)	6 jenis (60%)	60%	60%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	100%	100%	50%	100%	3 jenis (100%)	2 jenis (66.67%)	66.67%	66.67%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	100%	100%	50%	100%	5 jenis (100%)	3 jenis (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	100%	100%	50%	100%	10 jenis (100%)	5 jenis (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1000 lembar	100%	100%	50%	100%	1000 lembar (100%)	500 lembar (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	100%	100%	50%	100%	1000 orang	400 orang	40%	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
								(100%)	(40%)		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	100%	100%	50%	100%	100 kegiatan (100%)	50 kegiatan (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	100%	100%	50%	100%	5 jenis (100%)	3 jenis (60%)	60%	60%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	100%	100%	50%	100%	1 unit (100%)	1 unit (100%)	100%	100%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	100%	100%	50%	100%	1 gedung (100%)	0	0	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	27 (100%)	-	-	-	-	100 %	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	-	-	-	-				
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	60 dokumen	100%	100%	50%	100%	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	6 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	0	0	0
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	1500 orang	-	-	-		200 orang	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	500 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	100%	0	0	5 jenis (100%)	2 jenis (40%)	40%	40%
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	15 titik	7 titik	1 titik	-	-	3 titik (100%)	0	0	0
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	32 kelurahan	26 kelurahan	100%	25%	25%	8 kelurahan (100%)	4 kelurahan (50%)	50%	50%
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	45 sekolah	16 sekolah				10 sekolah	-	-	-
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100%		100%	50%	100%	100%	25%	25%	25%
		Pendampingan Bantuan Sosial	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	1500 orang	-	-	-	-	200 orang (100%)	48 orang (24%)	24%	24%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	60 dokumen	100%	100%	50%	100%	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	300 orang (100%)	245 orang (81.67%)	81.67%	81.67%
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	1500 orang	100%	100%	50%	100%	300 orang (100%)	245 orang (81.67%)	81.67%	81.67%
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 Urusan, 2 Program dan 4 Indikator Kinerja Program dan 10 Kegiatan dengan 10 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 4 Indikator kinerja program, terdapat, 4 Indikator memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 2 Program dengan 5 indikator program dan 10 kegiatan dengan 10 indikator
 - b) Dari 5 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator yang dipekrirakan dapat melampaui target, 5 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 5 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 10 indikator kinerja akegiatan, terdapat 1 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 9 Indikator masih dalam proses serta 1 Indikator tidak dapat memenuhi Renstra.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24.275.681.669	23.006.530.038	94,77
	OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.820.384.228	8.312.419.209	94,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.264.010	18.264.010	100,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.724.218	10.724.218	100,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.632.733	1.632.733	100,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.614.600	1.614.600	100,00
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.588.050	1.588.050	100,00
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.704.409	2.704.409	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.919.591.919	6.569.133.328	94,94
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.687.682.669	6.391.803.328	95,58
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.931.000	176.730.000	77,88
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.557.300	300.000	19,26
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.556.350	300.000	19,28
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.336.330	438.766.050	88,76
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.095.998	10.869.000	89,86
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.801.560	10.675.000	90,45
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.533.974	56.295.100	96,18
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.343.617	9.543.000	92,26
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.945.981	41.299.000	91,89
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000	14.375.000	91,27
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.838.000	119.638.450	95,83
	h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	216.027.200	176.071.500	81,50
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.978.005	594.778.061	97,67
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.996.000	2.970.000	99,13
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.105.296	190.040.893	93,57
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.876.709	401.767.168	99,72
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.213.964	691.477.760	88,74
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	303.410.000	274.772.900	90,56

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.170.000	235.322.200	82,81
	c. Pemeliharaan Mebel	4.400.000	4.345.000	98,75
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.944.264	88.276.700	92,01
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.289.700	88.760.960	97,23
B	Program Penanggulangan Bencana	15.455.297.441	14.694.110.829	95,07
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	384.939.000	362.046.500	94,05
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	87.839.000	87.100.000	99,16
	b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	297.100.000	274.946.500	92,54
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12.419.864.024	11.887.279.850	95,71
	a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	107.083.489	101.985.540	95,24
	b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	375.789.740	359.480.000	95,66
	c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	391.537.094	343.256.400	87,67
	d. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	11.545.453.701	11.082.557.910	95,99
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.449.443.512	2.280.349.546	93,10
	a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.411.960.972	1.263.432.536	89,48
	b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.037.482.540	1.016.917.010	98,02
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	201.050.905	164.434.933	81,79
	a. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	201.050.905	164.434.933	81,79

Sumber : BPBD Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang adalah sebesar Rp (24.275.681.669). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp (23.006.530.038) dengan sisa sebesar Rp 1.269.151.631 (5,23%) dengan urain berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 6.687.682.669, realisasi Rp. 6.391.803.328 dan sisa anggaran sebesar Rp. 295.879.341
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 17.587.999.000 Dengan realisasi sebesar Rp. 16.614.726.710 (94,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 973.272.290 (5,53%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	115%	113%	111%	108.63%	113%	111%
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	100%	100%	-	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	75,60%	100%	100%

Sumber : BPBD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana”** memiliki indikator kinerja yaitu **“Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang”**, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 108.63 % dari target sebesar 115% (capaian sebesar 105,86%);

- b. Sasaran “**Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana**” dengan indikator “**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
- c. Sasaran “**Meningkatnya upaya penanganan saat bencana**” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut dengan indicator “**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
- d. Sasaran “**Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut dengan indicator “**Nilai SAKIP**” tidak dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 75,60% dari target sebesar 100% .

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang merupakan usaha berbagai pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana diharapkan agar menjadi kesadaran untuk setiap pihak tentang pentingnya pengurangan resiko bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan walaupun capaiannya sudah mencapai 100% karena pada kenyataan dilapangan banyak masyarakat yang belum peduli terhadap bencana.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Belum optimalnya ketangguhan bencana
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
 - Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.

- Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, rescue, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.
 - Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.
- b. Peluang:
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
 - Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
 - Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
 - Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a) Meningkatnya ancaman bencana yang dipengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang;
- b) Ancaman bencana non alam (pandemi);
- c) Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana;
- d) Perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan
 - 2) hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 3) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan

- 4) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan

- 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG**

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				14.919.845.058	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				14.919.845.058	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	8,932,447,919	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	8,932,447,919	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %				Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	3,520,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	3,520,000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	880,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	880,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	880,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	880,000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	880,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	880,000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	880,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	880,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %	6,901,312,658	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	6,901,312,658	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6,677,792,658	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6,677,792,658	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207,240,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207,240,000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	880,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	880,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	15,400,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	15,400,000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %	36.588.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %	36.588.000	
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen (100%)	27,588,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen (100%)	27,588,000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (100%)	9,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (100%)	9,000,000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	334,322,917	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	334,322,917	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19,927,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19,927,150	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	17.190.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	17.190.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	38.141.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	38.141.000	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	26.637.767	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	26.637.767	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.000.000	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	15.000.000	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	157.637.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	157.637.000	
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	20.080.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	20.080.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	713.402.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	713.402.000	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	3.927.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	3.927.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	237.575.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	237.575.000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	471.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	471.900.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	943.302.344	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	943.302.344	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	312.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	312.420.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	316.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	316.920.000	
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	2.908.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	2.908.800	
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	46.705.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	46.705.000	
1.6.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	264.348.544	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	264.348.544	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	5,987,397,139	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	5,987,397,139	
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	703.948.400	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	703.948.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	418.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	418.000.000	
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 Orang	285.948.400	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 Orang	285.948.400	
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	2.866.892.656	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	2.866.892.656	
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	900 orang	1.073.694.556	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	900 orang	1.073.694.556	
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	75.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	75.000.000	
2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi	10 unit	993.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi	10 unit	993.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			
2.2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	4 kawasan	228.447.560	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	4 kawasan	228.447.560	
2.2.5	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	421.750.540	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	421.750.540	
2.2.6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	75.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	75.000.000	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.875.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.875.000.000	
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1255 Orang	1.575.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1255 Orang	1.575.000.000	
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1255 Orang	300.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1255 Orang	300.000.000	
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan	100 orang	541,556,083	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan	100 orang	541,556,083	
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 dokumen	376.233.242	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 dokumen	376.233.242	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	165.322.841	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	165.322.841	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SEMARANG

3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renstra ini akan berusaha menterjemahkannya sasaran di atas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

3.2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan penanggulangan Bencana adalah **“Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah”**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan Masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistikbencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;

- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana”,

dengan indikator tujuan **“Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
 2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
 3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
- , dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1.1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal;
- 1.2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 1.3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 1.4. Nilai SAKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang	%	111,00
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	%	100,00
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	75,60 (100)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan/ pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14,919,845,058 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 8,932,447,919 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

- b. Rp. 5,987,397,139 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.919.845.058				15.718.437.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana		13%	5,987,397,139			20%	5.489.696.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi		500 orang	703.948.400			500 orang	589.696.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	Kota Semarang	1 dokumen	418.000.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	204.696.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	Kota Semarang	12 dokumen	285.948.400	APBD Kota Semarang		12 dokumen	385.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan		3 dokumen	2.866.892.656			4 dokumen	2.175.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	Kota Semarang	300 orang	1.073.694.556	APBD Kota Semarang		300 orang	675.000.000
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	Kota Semarang	400 orang		APBD Kota Semarang		300 orang	
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	Kota Semarang	5 jenis	75.000.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	100.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	Kota Semarang	2 titik	993.000.000	APBD Kota Semarang		3 titik	350.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	Kota Semarang	2 kelurahan	228.447.560	APBD Kota Semarang		3 kelurahan	375.000.000
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	Kota Semarang	2 sekolah		APBD Kota Semarang		5 sekolah	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	Kota Semarang	12 dokumen	421.750.540	APBD Kota Semarang		12 dokumen	550.000.000
		Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	Kota Semarang	100 orang	75.000.000	APBD Kota Semarang		200 orang	125.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana		12 dokumen	1.875.000.000			12 dokumen	2.350.000.000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	Kota Semarang	12 dokumen	1.575.000.000	APBD Kota Semarang		12 dokumen	1.850.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Kota Semarang	100%	300.000.000	APBD Kota Semarang		100%	500.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan		100 orang	541.556.083			200 orang	375.000.000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	Kota Semarang	100 orang	376.233.242	APBD Kota Semarang		200 orang	125.000.000
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	Kota Semarang	12 dokumen	165.322.841	APBD Kota Semarang		12 dokumen	250.000.000
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase perencanaan dan		100%	8.932.447.919			100%	10.228.741.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelaporan kinerja BPBD							
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD		100%				100%	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD		100%				100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD		100%				100%	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD		100%	3.520.000			100%	6.000.000
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	Kota Semarang	1 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Kota Semarang	2 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	1.500.000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	Kota Semarang	2 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	1.500.000
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	Kota Semarang	1 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD		100%	6.901.312.658			100%	8.077.431.625
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%	6.677.792.658	APBD Kota Semarang		100%	7.824.431.625
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%	207.240.000	APBD Kota Semarang		100%	250.000.000
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	1 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	15.400.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia		100.00	36.588.000			100.00	10.000.000
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Kota Semarang	1 kegiatan	27.588.000	APBD Kota Semarang		1 kegiatan	5.000.000
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kota Semarang	1 kegiatan	9.000.000	APBD Kota Semarang		1 kegiatan	5.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan		100.00	334.322.917			100.00	589.825.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Prasarana Perkantoran SKPD							
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kota Semarang	5 jenis	19.927.150	APBD Kota Semarang		5 jenis	5.325.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	3 jenis	32.900.000	APBD Kota Semarang		3 jenis	30.000.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	5 jenis	38.141.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	55.000.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Semarang	10 jenis	26.637.767	APBD Kota Semarang		10 jenis	27.000.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaaan yang disediakan	Kota Semarang	1000 lembar	24.000.000	APBD Kota Semarang		1000 lembar	37.500.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang	15.000.000	APBD Kota Semarang		1000 orang	65.000.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Kota Semarang	100 kegiatan	157.637.000	APBD Kota Semarang		100 kegiatan	195.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 jenis	20.080.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	175.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		100%	713.402.000			100%	730.484.375
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	Kota Semarang	100%	3.927.000	APBD Kota Semarang		100%	3.484.375
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	100%	237.575.000	APBD Kota Semarang		100%	282.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	Kota Semarang	100%	471.900.000	APBD Kota Semarang		100%	445.000.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD		100%	943.302.344			100%	815.000.000
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kota Semarang	10 unit	312.420.000	APBD Kota Semarang		10 unit	330.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	10 unit	316.920.000	APBD Kota Semarang		10 unit	325.000.000
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	1 unit	2.908.800	APBD Kota Semarang		1 unit	4.000.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	10 unit	46.705.000	APBD Kota Semarang		10 unit	78.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	Kota Semarang	1 gedung	264.348.544	APBD Kota Semarang		1 gedung	78.000.000
JUMLAH					14.919.845.058				15.718.437.000

Pada tabel 4.1 diketahui tahun 2023 untuk anggaran program Penanggulangan Bencana di fokuskan pada sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 418.000.000 yang mendukung tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dengan tersedianya dokumen Indeks Ketahanan Daerah, Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Update Peta Resiko Bencana. Anggaran sebesar Rp. 1.073.694.556 dialokasikan untuk Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, yang berisi kegiatan FPRB, Dawis Tangguh, Gladi lapang, Inklusif Disabilitas, Kelompok Rentan, Peningkatan Forum kesehatan, Peningkatan SDM relawan, SPAB. Anggaran sebesar Rp. 993.000.000 dialokasikan untuk Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang mana ini mendukung program dedicated yaitu pemasangan Early Warning System.

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

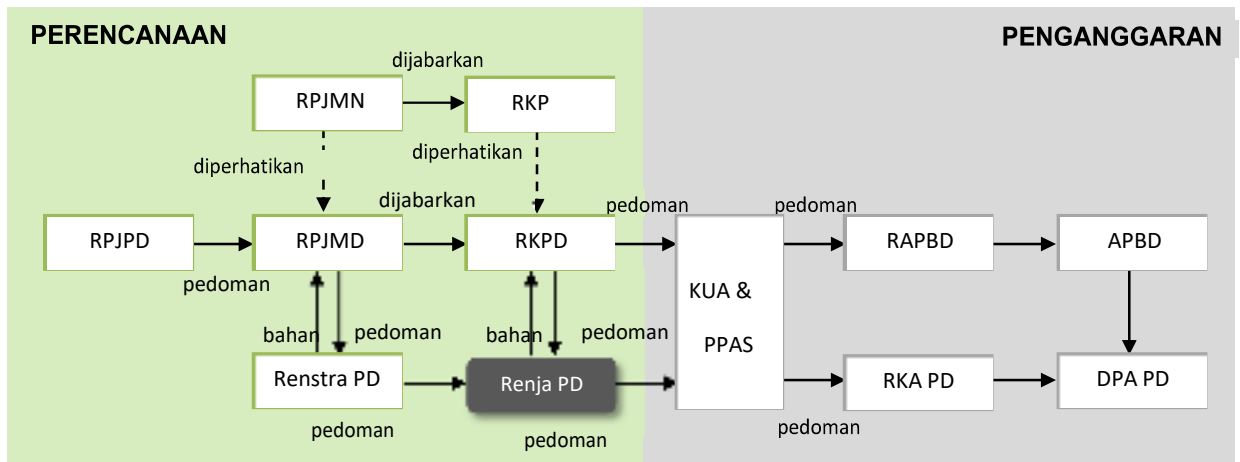
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023

dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran

- Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan

kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Semarang melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 33.774.292.665,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 26.895.135.409,00 atau sebesar 79,63%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Dinas Sosial Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Sosial) (100%)	100,00 %	100,00 % (13,33 %)	100,00 %	100,00 % (13,12 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	46,45 %	46,45
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (8,57 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	48,57 %	48,57
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 dokumen)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	40,00
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	40,00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	40,00
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	40,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 dokumen)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 dokumen)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Administrasi Keuangan SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (10,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	50,00 %	50,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan (1 dokumen)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (12 dokumen)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 dokumen)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (7 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga (12 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (35 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan (10 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (36 Exemplar)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat (1500 dos) - Jumlah penyediaan minuman dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat (2000 dos) - Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat (500 pack)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (80 orang)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD (2 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (100%)	100,00 %	100,00 % (10,00 %)	100,00 %	100,00 % (10,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Mebel (4 jenis)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis (30 jenis)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya kebutuhan jasa kantor (100%)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Rekening listrik, telepon, air (3 rekening)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Pemeliharaan aset SKPD (100%)	100,00 %	100,00 % (13,33 %)	100,00 %	100,00 % (13,33 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	46,66 %	46,66
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (1 unit)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (45 unit)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Mebel yang dipelihara (10 buah)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi (4 bangunan)	100,00 %	100 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (1 jenis)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (7 jenis)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	- Dokumen Kelembagaan SKPD (100%)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan (1 dokumen)	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	- Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi (66,67%)	100,00 %	-	91,60 %	71,42 % (20,00 %)	66,67	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (1 kegiatan) - Fasilitasi dan pengelolaan CSR (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (66,67%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM (1 kegiatan) - Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (100%) - Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat (177 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (1 kegiatan) - Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (16 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)) (1 kegiatan)	100,00 %	-	95,00 %	100,00 % (20,00 %)	105,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota (6 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (1 kegiatan) - Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan (6 kegiatan) - Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro (1 kegiatan) - Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3 (1 kegiatan) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	40,00 %	40,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal (10 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani (99,75%)	100,00 %	-	98,00 %	100,00 % (98,04 %)	102,04	100,00 % (20,00 %)	118,04 %	118,04
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (85 orang/hari)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang (150 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	- Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter (18 buah)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan social - Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	- Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis (6 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan (50 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar (100 orang) - Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter (1 orang) - Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia (1 paket) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng (100 orang) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan (100 orang) - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau (400 orang) - Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan (100%) 	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga (75 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (96,07 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	116,07 %	116,07
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (100%) - Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
		- Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 kegiatan)								
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau (100 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan (5000 orang) - Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (12 kegiatan) - Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
		- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Perumahan (457 orang)								
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang (48 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu (45 orang)	100,00 %	-	100,00 %	45,00 % (45,00 %)	45,00	100,00 % (20,00 %)	65,00 %	65,00
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	- Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (1 paket)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	- Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	- Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan) - Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	- Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia (6 kegiatan) - Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA) (1 kegiatan) - Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (30 orang) - Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial (69,15%)	100,00 %	-	16,45 %	24,23 % (100,00 %)	52,71	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	- Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau (10 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk (10 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Menurunnya angka DTKS (16,10%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (50,89 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	70,89 %	70,89
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang (1 kegiatan) - Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang (1 kegiatan) - Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan) - Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 keg) - Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan) - Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (103,59 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	123,59 %	123,59

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) (12 kegiatan) - Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian (12 kegiatan) - Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (12 kegiatan) - Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN (12 kegiatan) - Jumlah Bantuan Santunan Kematian (1.413 orang) 	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube (12 kegiatan) 	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (20,00 %)	20,00 %	20,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani (100%) 	100,00 %	-	4,00 %	20,00 % (100,00 %)	500,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	- Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji (373 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids (373 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana (5 unit)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak) (75 orang)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (10 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota (100%)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial (1 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (2 kegiatan)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (100,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	120,00 %	120,00

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Sosial Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (Satu) Urusan, 6 (Enam) Program dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Program, 15 (Lima belas) Kegiatan dengan 15 (Lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan dan 67 (Enam puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan 82 (Delapan puluh dua) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
 - b) Dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Program, terdapat 3 (Tiga) Indikator yang melampaui target, 2 (Dua) Indikator memenuhi target, serta 1 (Satu) Indikator tidak memenuhi target.
 - c) Dari 15 (Lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 14 (Empat belas) Indikator yang memenuhi target, serta 1 (Satu) Indikator yang tidak memenuhi target.
 - d) Dari 82 (Enam puluh tujuh) Indikator Sub Kegiatan, terdapat 2 (Dua) Indikator yang melampaui target, 78 (Tujuh puluh delapan) Indikator yang memenuhi target, serta 2 (Dua) Indikator yang tidak memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (Satu) Urusan, 6 (Enam) Program dengan 6 (Enam) indikator program, 15 (Lima belas) kegiatan dengan 15 (Lima belas) indikator kegiatan, dan 67 (Enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan 82 (Delapan puluh dua) indikator sub kegiatan
 - b) Dari 6 (Enam) indikator kinerja program, terdapat 2 (Dua) indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 2 (Dua) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 2 (Dua) Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 15 (Lima belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 15 (Empat belas) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Semarang
Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.766.086.604	9.690.443.221	82,36	2.075.643.383
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.713.069	18.533.500	16,02	97.179.569
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.713.069	16.899.500	14,99	95.813.569
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	370.000	37,00	630.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.264.000	63,20	736.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	785.595.911	659.505.100	83,95	126.090.811
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.203.412.465	6.748.509.393	93,68	454.903.072
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	781.595.911	655.725.600	83,90	125.870.311
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	959.000	95,90	41.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.000.000	900.500	90,05	99.500
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	974.000	97,40	26.000
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1.000.000	946.000	94,60	54.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.698.050.009	1.134.963.914	66,84	563.086.095
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	982.000	98,20	18.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.791.690	48.655.800	61,75	30.135.890

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	10.336.091	60,80	6.663.909
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.490.000	30.459.500	75,23	10.030.500
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.763.780	27.315.800	62,42	16.447.980
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000	4.320.000	100	0
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.000.000	126.492.500	99,60	507.500
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.402.000	205.160.423	36,94	350.241.577
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	830.282.539	681.241.800	82,05	149.040.739
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.935.550	319.854.100	56,12	250.081.450
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.182.000	247.247.000	79,45	63.935.000
2	Pengadaan Mebel	258.753.550	72.607.100	28,06	186.146.450
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.357.500	70.171.080	69,92	30.186.420
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.357.500	70.171.080	69,92	30.186.420
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.022.100	738.906.134	57,15	554.114.966
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	705.930.000	509.040.034	72,11	196.889.966
2	Pemeliharaan Mebel	5.280.000	5.235.000	99,15	45.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.818.000	77.055.000	89,79	8.763.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	495.994.100	147.576.100	29,75	348.418.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		9.187.924.633	6.488.055.965	70,62	2.699.868.668
G	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.680.725	56.070.000	77,15	16.610.725
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	72.680.725	56.070.000	77,15	16.610.725
H	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9.115.243.908	6.431.985.965	70,56	2.683.257.943
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.615.347.210	3.379.624.405	93,48	235.722.805
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	343.270.080	315.343.745	91,86	27.926.335

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	513.540.080	391.121.134	76,16	122.418.946
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.906.442.290	1.942.198.680	49,72	1.964.243.610
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	736.644.248	403.698.001	54,80	332.946.247
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		40.560.000	575.000	1,42	39.985.000
I	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	40.560.000	575.000	1,42	39.985.000
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	40.560.000	575.000	1,42	39.985.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10.136.269.060	8.413.950.486	83,01	1.722.318.574
J	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.641.693.156	3.224.215.122	88,54	417.478.034
1	Penyediaan Permakanan	44.765.000	25.600.000	57,19	19.165.000
2	Penyediaan Sandang	15.000.000	15.000.000	100	-
3	Penyediaan Alat Bantu	1.270.150	1.259.950	99,20	10.200
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	15.000.000	100	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	93.400.000	92.400.000	98,93	1.000.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	71.900.000	36.415.000	50,65	35.485.000
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.025.790	8.852.235	88,29	1.173.555
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.000.000	15.000.000	100	-
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	55.000.000	34.280.000	62,33	20.720.000
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	3.106.332.216	2.788.542.937	89,77	317.789.279
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.000.000	12.150.000	81,00	2.850.000
12	Pemberian Layanan Rujukan	199.000.000	179.715.000	90,31	19.285.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
K	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.494.575.904	5.189.735.364	79,91	1.304.840.540
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	602.394.345	525.939.000	87,31	76.455.345
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	42.570.000	10.209.868	23,98	32.360.132
3	Penyediaan Permakanan	5.048.482.400	4.295.887.816	85,09	752.594.584
4	Penyediaan Sandang	19.457.096	0	0	19.457.096
5	Penyediaan Alat Bantu	590.687.818	295.585.680	50,04	295.102.138
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	11.291.345	4.608.000	40,81	6.683.345
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	98.467.900	33.975.000	34,50	64.492.900
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000	0	0	25.000.000
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	11.025.000	1.350.000	12,24	9.675.000
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.700.000	1.425.000	13,32	9.275.000
11	Pemberian Layanan Rujukan	10.700.000	0	0	10.700.000
12	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	23.800.000	20.755.000	87,21	3.045.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.314.312.508	1.185.192.737	90,18	129.119.771
L	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	105.927.930	93.641.500	88,40	12.286.430
1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	53.281.930	45.685.500	85,74	7.596.430
2	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	52.646.000	47.956.000	91,09	4.690.000
M	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.208.384.578	1.091.551.237	90,33	116.833.341
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	964.399.290	875.862.741	90,82	88.536.549
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	243.985.288	215.688.496	88,40	28.296.792
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.329.139.860	1.116.918.000	84,03	212.221.860
N	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.095.669.860	937.381.520	85,55	158.288.340
1	Penyediaan Makanan	532.535.710	452.744.060	85,02	79.791.650
2	Penyediaan Sandang	190.632.350	165.233.000	86,68	25.399.350
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.000.000	4.700.000	94,00	300.000
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	232.676.800	202.372.240	86,98	30.304.560
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	134.825.000	112.332.220	83,32	22.492.780

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
O	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	233.470.000	179.536.480	76,90	53.933.520
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100.000.000	73.820.500	73,82	26.179.500
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	133.470.000	105.715.980	79,21	27.754.020

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebesar Rp 33.774.292.665. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 26.895.135.409 dengan sisa sebesar Rp 6.879.157.256 (79,63%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3. 1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<u>Tujuan :</u>										
-Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan		4,60 %	4,53 %	-	-	4,34 %	4,56 %	-	-
-Peningkatan Pelayanan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan PMKS		97 %	98 %	-	-	99,69 %	100 %	-	-
<u>Sasaran :</u>										
-Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk Miskin (menurut indicator Pemerintah Kota Semarang)		17,32 %	16,45 %	-	-	16,15 %	24,23 %	-	-
-Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		97 %	98 %	-	-	99,69 %	100 %	-	-
	Sarana sosial seperti panti Asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi		103 panti	103 panti	-	-	119 panti	105 panti	-	-
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial		16.000 Orang	16.200 orang	-	-	513.287 orang	168.505 orang	-	-
	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		91,60 %	91,60 %	-	-	66,67 %	71,42 %	-	-

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Dinas Sosial ada 2 (dua) dengan 2 (dua) Indikator Kinerja
 - 1) Tujuan **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”** memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Indikator **“Angka Kemiskinan”**, belum dapat mencapai target, dimana realisasi sebesar 4,56 % dari target sebesar 4,53 % , di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih besar dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
 - 2) Tujuan **“Peningkatan Pelayanan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”** memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Indikator **“Persentase Penanganan PMKS”**, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 98 %;

b. Sasaran **“Menurunnya Angka Kemiskinan”** dan **“Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”** memiliki 5 (Lima) indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Persentase penduduk miskin (pendataan menurut indikator Pemkot Semarang)” tidak mencapai target, dimana realisasinya sebesar 24,23% dari target sebesar 16,45% (capaian sebesar 52,71%), di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih besar dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
- 2) Indikator “Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100,00%, dari target sebesar 98% (capaian sebesar 102,04%);
- 3) Indikator “Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 105 panti dari target sebesar 103 panti (capaian sebesar 101,94%).
- 4) Indikator “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 168.505 orang dari target sebesar 16.200 orang (capaian sebesar 1.040,15%).
- 5) Indikator “Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 71,42% dari target sebesar 91,60% (capaian sebesar 77,97%).

Tabel 2. 3. 2

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
- Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	-	-	16,10 %	15,80 %	16,15 %	-	15,80 %	15,50 %	
- Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	-	-	99,75 %	99,81 %	99,69 %	-	99,81 %	99,87 %	
- Menghasilkan Laporan Kinerja Yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
Sasaran :										
- Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	-	-	16,10 %	15,80 %	16,15 %	-	15,80 %	15,50 %	
- Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	-	-	99,75 %	99,81 %	99,69 %	-	99,81 %	99,87 %	
- Peningkatan Laporan Kinerja Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhannya Di Luar Panti	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	-	-	66,67 %	78 %	66,67 %	-	78 %	89 %	
	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	-	-	69,15 %	69,85 %	68,47 %	-	69,85 %	70,54 %	
	Persentase Penyelesaian Manajemen Internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang sosial juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang)	17,32%	16,45%	16,10%	15,80%	16,15%	24,23%	16,10%	15,80%
2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	96%	98%	99,75%	99, 81%	99,69%	100%	99,75%	99, 81%
3	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	103 panti	103 panti	0	0	119 panti	105 panti	0	0
4	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	16.000 orang	16.200 orang	69,15%	69,85%	513.287 orang	168.505 orang	69,15%	69,85%
5	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	91,60%	91,60%	66,67%	78%	66,67%	71,42%	66,67%	78%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang di bidang sosial menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang, Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
2. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

3. Melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) dalam pembinaan atau penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik dan lanjut usia terlantar. Dimana yang terjaring penjangkauan diberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial di UPTD Among Jiwo.
4. Pemberian bantuan sosial permakanan bagi warga panti/yayasan pengasuhan anak dan beberapa yasanan/panti jompo berupa pemberian tambahan gizi (permakanan) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Adapun jumlah panti/yayasan binaan di Kota Semarang sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) panti yang seluruhnya merupakan panti/yayasan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial di Kota Semarang.
5. Pemberian bantuan permakanan kepada warga Kota Semarang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 3.718 jiwa.
6. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah setiap tahun berupa peringatan hari-hari bersejarah yaitu Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir Pancasila, Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Hari Pahlawan di setiap tahunnya.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Semarang.
8. Melaksanakan fasilitasi penjangkauan berupa pendampingan kepada penderita atau eks penderita dan atau keluarga psikotik yang dilaksanakan atas kerjasama dengan TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Dinas Kesehatan serta Puskesmas.
9. Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 24.588 KK, sampai dengan tahun 2021 jumlah SDM PKH sebanyak 101 orang, terdiri dari Koordinator Kota 1 orang, Operator 2 orang dan pendamping PKH sebanyak 98 orang;
10. Pembinaan dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) bersama tim terpadu penanggulangan bencana dan fasilitasi kegiatan/simulasi pengamanan diri terhadap resiko bencana alam dan kebakaran dengan sasaran kegiatan sekolah/pelajar.
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) bersama tim terpadu penanggulangan bencana sosial dan fasilitasi kegiatan terhadap resiko bencana sosial dengan sasaran kegiatan kelompok masyarakat di wilayah yang beresiko tinggi terjadi gesekan antar kelompok masyarakat di kota Semarang.

12. Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber dan Potensi Kesejahteraan lainnya dalam rangka ikut serta dalam penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

13. Pemberian bantuan alat bantu bagi warga disabilitas yang membutuhkan sesuai surat permohonan dan atau mendapat rekomendasi dari kelurahan dan puskesmas.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal :

- a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
- c. Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
- d. Tersedianya jaringan system informasi yang ada
- e. SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan

B. Lingkungan Eksternal :

- a. Letak Kota Semarang yang strategis.
- b. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
- e. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang sosial diantaranya:

- a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya Fakir Miskin.
- b. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- d. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
- e. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSR yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- f. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
 - Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.
 - Identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

b. Peluang:

- Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
- Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
- Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal
- Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca Pandemi Covid 19.
- b. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial.
- c. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
- d. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.

- e. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan

- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara

berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Sosial Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19.070.660.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19.145.744.000	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial 2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial 3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100 %	4.795.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial 2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial 3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100 %	4.396.744.000	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	4.257.260	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	4.257.260	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	487.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	487.800	-
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	355.890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	355.890	-
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	355.890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	355.890	-
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.933.200	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.933.200	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	617.280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	617.280	-

Rancangan Awal RKPD 2023	Hasil Analisis Kebutuhan
---------------------------------	---------------------------------

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan SKPD	100 %	8.154.360.956	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan SKPD	100 %	8.154.360.956	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.825.768.436	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.825.768.436	-
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	324.643.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	324.643.200	-
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	263.980	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	263.980	-
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	3.167.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	3.167.760	-
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	263.980	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	263.980	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 %	628.572.522	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 %	628.572.522	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.600.000	-
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.000.000	-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.727.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.727.000	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.369.712	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.369.712	-
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	5.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	5.760.000	-
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	99.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	99.000.000	-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	252.075.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	99.000.000	-
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	215.040.810	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	215.040.810	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	226.286.513	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	226.286.513	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	197.073.443	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.825.768.436	-
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	29.213.070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	29.213.070	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	129.782.784	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	129.782.784	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	129.782.784	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	129.782.784	-
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset SKPD	100 %	1.421.131.531	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset SKPD	100 %	1.421.131.531	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.313.180	-
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	610.978.814	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	610.978.814	-
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.636.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.636.000	-
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	491.336.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	491.336.000	-
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	173.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	173.450.000	-
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	101.417.537	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	101.417.537	-
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi		Dokumen Kelembagaan SKPD	100 %	150.818.400	Penataan Organisasi		Dokumen Kelembagaan SKPD	100 %	150.818.400	
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	150.818.400	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	150.818.400	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100 %	7.197.369.600	Program Pemberdayaan Sosial		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100 %	7.197.369.600	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	117.666.700	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	117.666.700	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	117.666.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	117.666.700	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100 %	7.079.702.900	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100 %	7.079.702.900	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	5.121.772.620	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	5.121.772.620	-
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	341.711.228	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	341.711.228	-
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	303.462.910	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	303.462.910	-
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	452.534.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	452.534.800	-
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 sertifikat	860.221.342	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 sertifikat	860.221.342	-
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100 %	54.023.060	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100 %	54.023.060	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	54.023.060	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	54.023.060	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	54.023.060	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	54.023.060	-
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100 %	6.629.844.930	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100 %	6.629.844.930	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2.546.166.460	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2.546.166.460	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	960.700.000	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	960.700.000	-
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	10.705.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	10.705.000	-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	804.100	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	804.100	-
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	77.540.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	77.540.000	-
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	752.408.140	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	752.408.140	-
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	140.547.500	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	140.547.500	-
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	13.295.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	13.295.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	1.702.720	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	1.702.720	-
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	391.424.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	391.424.000	-
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.000.000	-
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	76.040.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	76.040.000	-
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	77.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	77.000.000	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	4.083.678.470	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	4.083.678.470	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	494.340.800	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	494.340.800	-
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50.850.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50.850.000	-
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	2.552.309.450	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	2.552.309.450	-
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	20.315.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	20.315.000	-
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	133.284.400	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	133.284.400	-
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	155.220.100	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	155.220.100	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	129.851.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	129.851.000	-
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	52.899.920	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	52.899.920	-
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	55.517.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	55.517.000	-
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	16.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	16.500.000	-
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	16.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	16.500.000	-
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	31.900.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	31.900.000	-
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 dokumen	374.190.800	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 dokumen	374.190.800	-
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	100 %	4.743.785.480	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	100 %	4.743.785.480	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	220.809.710	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	220.809.710	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	151.912.400	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	151.912.400	-
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	35.209.210	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	35.209.210	-
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.688.100	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	33.688.100	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Menurunnya angka DTKS	100 %	4.522.975.770	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Menurunnya angka DTKS	100 %	4.522.975.770	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	499.115.790	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	499.115.790	-
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	600.053.180	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	600.053.180	-
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	3.188.446.800	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	3.188.446.800	-
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	235.360.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	235.360.000	-
1.06.06	Program Penanganan Bencana		Persentase Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100 %	1.097.748.400	Program Penanganan Bencana		Persentase Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100 %	1.097.748.400	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100 %	612.885.400	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100 %	612.885.400	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	224.700.000	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	224.700.000	-
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	70.860.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	70.860.000	-
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	44.220.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	44.220.000	-
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	66.050.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	66.050.000	-
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	207.055.400	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	207.055.400	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pernerdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya pernerdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	484.863.000	Penyelenggaraan Pernerdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya pernerdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	484.863.000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	247.965.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	247.965.000	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	236.898.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	236.898.000	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Sosial Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Sosial Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Sosial Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi tentang Disabilitas	Jl. Sendangguwo Raya No. 56 RT. 13 RW 02 Sendangguwo Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	45 orang	Akan dilaksanakan Di Tahun 2023 dengan Prioritas lokasi di Kecamatan Tembalang
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rebana	Kelurahan Gondoriyo		2 set	Selama ini Dinas Sosial tidak pernah memberikan alat bantu berupa alat kesenian kepada masyarakat, saran agar diusulkan ke Sekda (Kewenangan Bagian Kesra Setda Kota Semarang)
3	Bantuan alat bantu dengar untuk disabilitas	Disabilitas Kelurahan Wonosari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	3 paket	Harap mengajukan permohonan ke dinsos dilampiri fotocopy KK, KTP, DPPS yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga miskin dan membutuhkan alat bantu dan akan di assessment Dinas Sosial

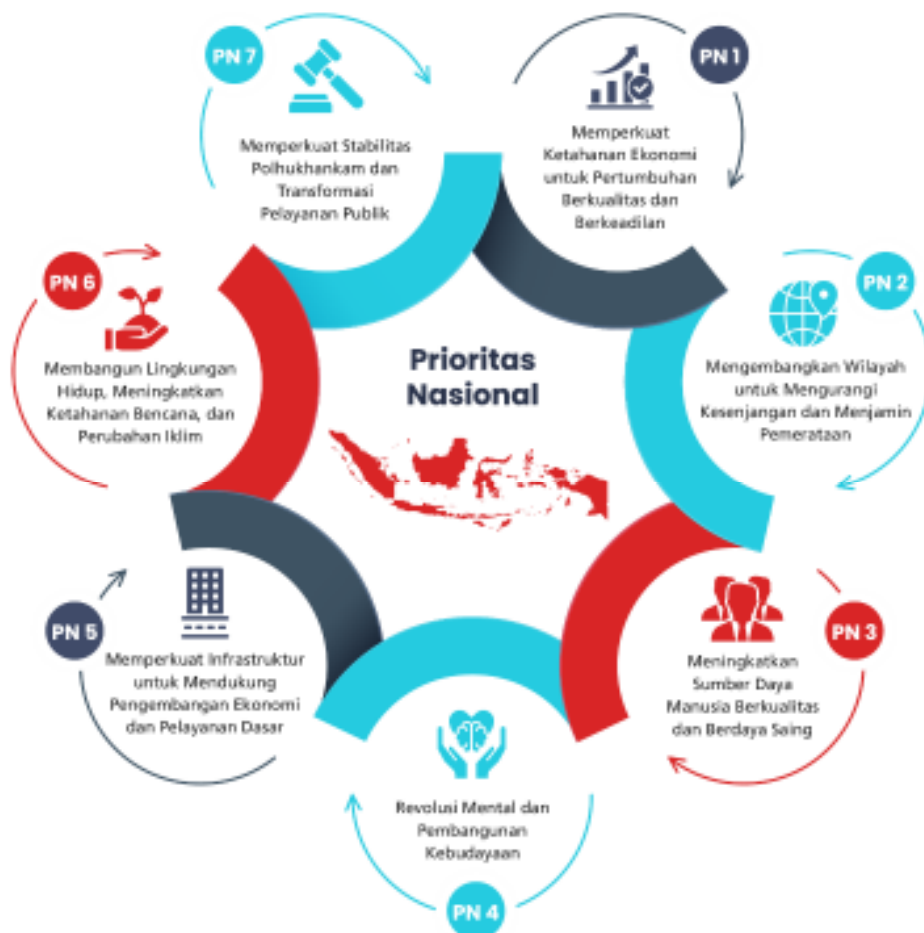
Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan

prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;

- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Sosial juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

- a. “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat”
(Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin)
- b. “Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”
(Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)
- c. “Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
(Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

- a. Menurunnya angka kemiskinan
- b. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya angka DTKS
- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
- Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi
- Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial
- Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	- Persentase Penduduk Miskin	%	15,80
2. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,81
3. Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas	- Persentase penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100,00
SASARAN :			
1. Menurunnya angka kemiskinan	- Menurunnya angka DTKS	%	15,80
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,81
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00
	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00
	- Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	78,00
	- Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	69,85
	- Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Sosial Kota Semarang bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (3 indikator) dan indikator sasaran (7 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Persentase Penduduk Miskin”** dan **“Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani”** dan indikator sasaran **“Menurunnya Angka DTKS”** dan **“Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 (Enam) program, yang terdiri dari 1 (Satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (Lima) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 (Enam belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 9 (Sembilan) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 78 (Tujuh puluh delapan) sub kegiatan, yang terdiri dari 32 (Tiga puluh dua) sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 46 (Empat puluh enam) kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 48.040.553.000,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 12.751.665.000,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 35.288.888.000,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				48.040.553.000			48.598.497.000	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>4. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial</p> <p>5. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial</p> <p>6. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial</p>		100 %	12.751.665.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	13.169.049.000
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD		100%	9.001.000	APBD Kota Semarang		100%	57.000.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	2.001.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	50.000.000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	1.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.500.000
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	12 laporan	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	1.000.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD		100%	9.671.712.000	APBD Kota Semarang		100%	9.977.887.000
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	49 orang/bulan	8.807.957.000	APBD Kota Semarang	-	100%	9.028.156.000
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dokumen	859.755.000	APBD Kota Semarang	-	100%	945.731.000
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	1.000.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 laporan	1.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	1.000.000
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD		100%	1.217.140.000	APBD Kota Semarang		100%	1.345.434.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	5.700.000	APBD Kota Semarang	-	7 jenis	5.900.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	500.000.000	APBD Kota Semarang	-	25 jenis	500.000.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	30.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 jenis	30.000.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	50 jenis	60.500.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	15.000.000	APBD Kota Semarang	-	15 jenis	25.000.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Semarang	50 dokumen	5.940.000	APBD Kota Semarang	-	36 exemplar	6.534.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	11 laporan	137.500.000	APBD Kota Semarang	-	3.500 dos dan 500 pack	147.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	6 laporan	250.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 orang	350.000.000
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 dokumen	248.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	220.000.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	458.212.000	APBD Kota Semarang		100%	330.520.000
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	4 unit	100.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 jenis	200.000.000
1.06.01.2.07.10	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	5 unit	358.212.000	APBD Kota Semarang	-	13 jenis	130.520.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor		100%	200.000.000	APBD Kota Semarang		100%	200.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 rekening	200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD		100%	1.166.600.000	APBD Kota Semarang		100%	1.204.208.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 unit	39.950.000	APBD Kota Semarang	-	1 unit	39.950.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	46 unit	769.370.000	APBD Kota Semarang	-	47 unit	804.250.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	10 unit	5.280.000	APBD Kota Semarang	-	10 buah	5.808.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	7 unit	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 jenis	300.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	5 unit	30.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 jenis	30.000.000
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	5 unit	22.000.000	APBD Kota Semarang	-	7 jenis	24.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD		100%	29.000.000	APBD Kota Semarang		100%	54.000.000
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	1 dokumen	29.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	54.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi		100 %	9.725.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	8.925.000.000
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial		100%	305.000.000	APBD Kota Semarang		100%	325.000.000
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	3 dokumen	305.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 kegiatan	325.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi		78%	9.420.000.000	APBD Kota Semarang		100%	8.600.000.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	260 orang	6.650.000.000	APBD Kota Semarang	-	177 orang	5.156.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	16 orang	60.000.000	APBD Kota Semarang	-	16 orang	353.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 keluarga	360.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 kegiatan	400.000.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 lembaga	1.050.000.000	APBD Kota Semarang	-	6 kegiatan	1.100.000.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	9 sertifikat	1.300.000.000	APBD Kota Semarang	-	9 kegiatan	1.591.000.000
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani		100 %	40.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	40.000.000
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani		100%	40.000.000	APBD Kota Semarang		100%	40.000.000
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	13 orang	40.000.000	APBD Kota Semarang	-	13 orang	40.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani		99,81 %	18.528.888.000	APBD Kota Semarang		100 %	18.735.158.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	4.316.193.000	APBD Kota Semarang		100%	3.715.483.000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	85 orang	1.396.127.000	APBD Kota Semarang	-	70 orang/hari	1.149.753.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	150 orang	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	150 orang	75.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 orang	71.897.000	APBD Kota Semarang	-	-	-
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	30 orang	85.500.000	APBD Kota Semarang	-	100 orang	85.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	250 orang	450.350.000	APBD Kota Semarang	-	265 orang	450.350.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	7 orang	334.000.000	APBD Kota Semarang	-	8 kegiatan	55.000.000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	15.884.000	APBD Kota Semarang	-	50 orang	15.900.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	130 orang	98.300.000	APBD Kota Semarang	-	130 orang	101.500.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 orang	50.000.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	1.555.535.000	APBD Kota Semarang	-	500 orang	1.548.880.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 orang	92.400.000	APBD Kota Semarang	-	75 orang	92.400.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 orang	91.200.000	APBD Kota Semarang	-	100 orang	91.200.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial		100%	14.212.695.000	APBD Kota Semarang		100%	15.019.675.000
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	205.500.000	APBD Kota Semarang	-	100%	206.050.000
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 orang	54.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 orang	55.000.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5.000 orang	10.605.875.000	APBD Kota Semarang	-	5.000 orang	10.605.875.000
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 orang	23.548.000	APBD Kota Semarang	-	48 orang	25.897.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	12.420.000	APBD Kota Semarang	-	1 paket	13.662.000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	135 orang	90.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	100.000.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	60 orang	55.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 kegiatan	65.000.000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	30 orang	55.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	60.500.000
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	72.604.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	74.604.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 orang	12.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	14.000.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 orang	12.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	14.000.000
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 orang	27.500.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	30.250.000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 dokumen	2.987.248.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	3.754.837.000
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial		69,85 %	6.115.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	6.794.290.000
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar		100%	80.000.000	APBD Kota Semarang		100%	108.786.000
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 orang	35.786.000
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 orang	35.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 orang	30.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	38.000.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS		15,50%	6.035.000.000	APBD Kota Semarang		15,50%	6.685.504.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Semarang	180.000 orang	1.055.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 kegiatan	1.275.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1.500 keluarga	1.503.000.000	APBD Kota Semarang	-	6 kegiatan	1.783.504.000
1.06.04.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50.000 keluarga	3.427.000.000	APBD Kota Semarang	-	48 kegiatan	3.577.000.000
1.06.04.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 orang	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani		100 %	880.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	935.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	630.000.000	APBD Kota Semarang		100%	665.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	373 orang	315.000.000	APBD Kota Semarang	-	373 orang	330.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	373 orang	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	373 orang	150.000.000
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 unit	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 unit	25.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	75 orang	30.000.000	APBD Kota Semarang	-	75 orang	30.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	11 orang	110.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	130.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota		100%	250.000.000	APBD Kota Semarang		100%	270.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 kampung	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 kegiatan	50.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	51 orang	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	220.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

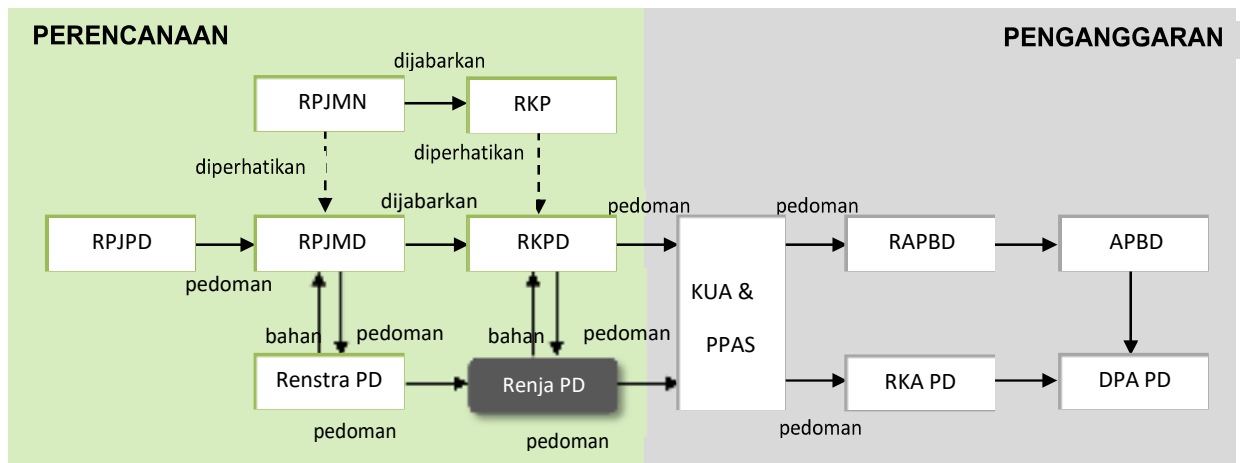
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; diseusai

masing-masing opd

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 15.792.121.269 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 14.253.710.171 atau sebesar 90,26%.

- a. **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang**

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100 %	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	40 %	40 %
X.XX.01.2.0 1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja OPD	5 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	2 doc	40,00 %
			Tersusunnya dokumen Renstra OPD	1 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	0 doc	0 doc	0,00 %
X.XX.01.2.0 1.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA OPD	5 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	2 doc	40,00 %
X.XX.01.2.0 1.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	5 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	2 doc	40,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.0 1.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA OPD	5 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	2 doc	40,00 %
X.XX.01.2.0 1.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	5 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	2 doc	40,00 %
X.XX.01.2.0 1.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	10 doc	0 doc	2 doc	2 doc	100 %	2 doc	4 doc	40,00 %
X.XX.01.2.0 1.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja OPD	5 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	2 doc	40,00 %
X.XX.01.2.0 2.01	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 %	0 %	12 %	12 %	100 %	12 %	24 %	40,00 %
X.XX.01.2.0 2.02	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	60 %	0 %	12 %	12 %	100 %	12 %	24 %	40,00 %
X.XX.01.2.0 2.07	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan OPD	20 doc	0 doc	4 doc	4 doc	100 %	4 doc	8 doc	40,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.0 6.01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	100 jenis	0 jenis	10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	20 jenis	20,00 %
X.XX.01.2.0 6.02	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	25 jenis	0 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	2 jenis	4 jenis	16,00 %
X.XX.01.2.0 6.03	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	175 jenis	0 jenis	30 jenis	30 jenis	100 %	30 jenis	60 jenis	34,29 %
X.XX.01.2.0 6.04	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	200 jenis	0 jenis	59 jenis	59 jenis	100 %	59 jenis	118 jenis	59,00 %
X.XX.01.2.0 6.05	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	75 jenis	0 jenis	10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	20 jenis	26,67 %
X.XX.01.2.0 6.06	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	3650 eksem	0 eksem	730 eksem	730 eksem	100 %	730 eksem	1460 eksem	40,00 %
X.XX.01.2.0 6.08	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	1750 org	0 org	350 org	350 org	100 %	350 org	700 org	40,00 %
X.XX.01.2.0 6.09	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas	1000 keg.	0 keg.	182 keg.	182 keg.	100 %	182 keg.	364 keg.	36,40 %
X.XX.01.2.0 6.10	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tatakelola arsip OPD	5 keg.	0 keg.	0 keg.	0 keg.	0 %	0 keg.	0 keg.	0,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.0 6.11	20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sarpras TIK	25 jenis	0 jenis	12 jenis	12 jenis	100 %	12 jenis	24 jenis	96,00 %
X.XX.01.2.0 7.01	21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 %	0 unit	0 unit	0,00 %
X.XX.01.2.0 7.05	22	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler	20 jenis	0 jenis	5 jenis	5 jenis	100 %	5 jenis	10 jenis	50,00 %
X.XX.01.2.0 8.02	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	60 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	24 bln	40,00 %
X.XX.01.2.0 8.04	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium non ASN	120 orang	0 orang	24 orang	24 orang	100 %	24 orang	48 orang	40,00 %
X.XX.01.2.0 9.01	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	5 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	2 unit	40,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.0 9.02	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	120 unit	0 unit	24 unit	24 unit	100 %	24 unit	48 unit	40,00 %
X.XX.01.2.0 9.06	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	90 jenis	0 jenis	11 jenis	11 jenis	100 %	11 jenis	22 jenis	24,44 %
X.XX.01.2.0 9.09	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	15 gedung	0 gedung	2 gedung	2 gedung	100 %	3 gedung	5 gedung	33,33 %
2.07.02	II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 %	0 %	60 %	60 %	100 %	65 %	65 %	81,25 %
2.07.02.2.0 1.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 doc	0 doc	0 doc	0 doc	0 %	0 doc	0 doc	0,00 %
2.07.02.2.0 1.02	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	150 org	0 org	0 org	0 org	0 %	30 org	30 org	20,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.07.03	III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80 %	0 %	76 %	76 %	100 %	77 %	77 %	96,25 %
2.07.03.2.0 1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	460 org	0 org	160 org	160 org	100 %	100 org	260 org	56,52 %
			Jumlah peserta uji kompetensi	400 org	0 org	60 org	60 org	100 %	120 org	180 org	45,00 %
			Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT)	880 org	0 org	440 org	440 org	100 %	250 org	690 org	78,41 %
			Pendaftaran tenaga kerja kompetensi	5 keg.	0 keg.	1 keg.	1 keg.	100 %	1 keg.	2 keg.	40,00 %
2.07.03.2.0 1.03	2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan pelatihan	25 jenis	0 jenis	5 jenis	5 jenis	100 %	3 jenis	8 jenis	32,00 %
			Pengadaan peralatan pelatihan	9 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100 %	0 paket	1 paket	11,11 %
2.07.03.2.0 2.01	3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan LPK swasta	100 LPK	0 LPK	20 LPK	20 LPK	100 %	20 LPK	40 LPK	40,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.07.04	IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72 %	0 %	64 %	64 %	100 %	66 %	66 %	91,66 % 6667
2.07.04.2.0 1.02	1	Pelayanan antar Kerja	penempatan calon transmigran	12 KK	0 KK	3 KK	1 KK	33 %	3 KK	4 KK	33,33 %
			sosialisasi identifikasi peminat transmigrasi	10 kali	0 kali	2 kali	1 kali	50 %	2 kali	3 kali	30,00 %
			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	10.000 orang	0 orang	2000 orang	2500 orang	125 %	2000 orang	4500 orang	45,00 %
			Jumlah Lowongan	12.500 org	0 org	2500 org	1000 org	40 %	2500 org	3500 org	28,00 %
			Pelayanan antar kerja	60 keg.	0 keg.	12 keg.	12 keg.	100 %	12 keg.	24 keg.	40,00 %
2.07.04.2.0 1.03	2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	12 kali	0 kali	220 kali	0 kali	0 %	2 kali	2 kali	16,67 %
2.07.04.2.0 1.04	3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	pelayanan disabilitas	155 org	0 org	0 org	0 org	0 %	0 org	0 org	0,00 %
2.07.04.2.0 1.05	4	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan Wirausaha Baru	190 org	0 org	30 org	30 org	100 %	40 org	70 org	36,84 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.07.04.2.0 2.02	5	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	565 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 %	165 kali	165 kali	29,20 %
2.07.04.2.0 3.02	6	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	pelayanan IPK online	60 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	40,00 %
			penempatan tenaga kerja melalui IPK	1000 orang	0 orang	200 orang	200 orang	100 %	200 orang	400 orang	40,00 %
			Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	2250 lowngn	0 lowngn	400 lowngn	400 lowngn	100 %	400 lowngn	800 lowngn	35,56 %
			Forum komunikasi pengguna kerja	400 org	0 org	100 org	100 org	100 %	100 org	200 org	50,00 %
			Jumlah pencari kerja terdaftar (AK1)	1200 org	0 org	2400 org	2400 org	100 %	2400 org	4800 org	40,00 %
			Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	3 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100 %	0 kali	4 kali	133,33 %
2.07.04.2.0 3.03	7	Job Fair/Bursa Kerja	Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja	3750 org	0 org	500 org	750 org	150 %	1 org	751 org	20,03 %
			pelaksanaan bursa kerja	5 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	2 kali	40,00 %
			Jumlah Lowongan melalui bursa kerja	1200 lowngn	0 lowngn	1500 lowngn	1500 lowngn	100 %	1500 lowngn	3000 lowngn	25,00 %
2.07.04.2.0 4.01	8	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Pelatihan CPMI/PMI	130 org	0 org	0 org	0 org	0 %	0 org	0 org	0,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
2.07.04.2.0 4.03	9	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	pelatihan wirausaha purna PMI	82 org	0 org	30 Org	30 Org	100 %	12 Org	42 Org	51,22 %
2.07.04.2.0 5.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	1000 TKA	0 TKA	200 TKA	200 TKA	100 %	200 TKA	400 TKA	40,00 %
2.07.05	V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	62 %	0 %	52 %	52 %	100 %	54 %	54 %	87,09 6774 %
2.07.05.2.0 1.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	250 peru sh.	0 perush.	50 peru sh.	50 peru sh.	100 %	50 peru sh.	100 perush.	40,00 %
2.07.05.2.0 1.02	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	250 peru sh.	0 perush.	50 peru sh.	50 peru sh.	100 %	50 peru sh.	100 perush.	40,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.07.05.2.0 1.03	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Koordinasi dewan pengupahan	60 kegiatan	0 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	100 %	12 Keg.	24 Keg.	40,00 %
			Bimtek peraturaran perundang-undangan dan jamsos	250 perush.	0 perush.	50 perush.	50 perush.	100 %	50 perush.	100 perush.	40,00 %
			Jumlah data dan informasi sarana HI dan Jamsos	250 perush.	0 perush.	100 perush.	100 perush.	100 %	50 perush.	150 perush.	60,00 %
2.07.05.2.0 2.01	4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Pencegahan Perseisihan Hubungan Industrial	250 perush.	0 perush.	40 perush.	40 perush.	100 %	50 perush.	90 perush.	36,00 %
			Konsolidasi Hubungan Industrial	250 perush.	0 perush.	50 perush.	50 perush.	100 %	50 perush.	100 perush.	40,00 %
			Deteksi kerawanan ketenagakerjaan	200 perush.	0 perush.	8 perush.	8 perush.	100 %	20 perush.	28 perush.	14,00 %
			Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	100 perush.	0 perush.	10 perush.	10 perush.	100 %	10 perush.	20 perush.	20,00 %

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2019) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.0 2.02	5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK	800 kasus	0 kasus	150 kasus	150 kasus	100 %	160 kasus	310 kasus	38,75 %
2.07.05.2.0 2.03	6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	200 PUK	0 PUK	50 PUK	50 PUK	100 %	40 PUK	90 PUK	45,00 %
2.07.05.2.0 2.04	7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	60 keg.	0 keg.	12 keg.	12 keg.	100 %	12 keg.	24 keg.	40,00 %

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 5 Indikator Kinerja Program dan 51 Kegiatan
 - b) Dari 5 Inidkator kinerja program, terdapat 5 Inidkator memenuhi target,
 - c) Dari 51 Inidkator kinerja kegiatan, terdapat 45 Indikator memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 5 indikator program dan 51 indiator .
 - b) Dari 5 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.
 - c) Dari 51 indikator kinerja kegiatan, terdapat 51 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	URUSAN WAJIB TENAGA KERJA	15.792.121.269	14.253.710.171	90,26
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.750.062.990	10.750.424.890	91,49
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	4.567.400	4.085.370	89,45
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.423.150	2.143.500	88,46
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	304.030	304.030	100,00
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	304.030	304.030	100,00
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	592.200	494.000	83,42
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	360.560	360.560	100,00
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.430	479.250	82,14
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.003.011.892	8.532.659.980	94,78
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.812.075.578	8.352.709.980	94,79
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.330.000	179.450.000	94,28
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	606.314	500.000	82,47
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.196.245	483.628.925	73,59
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.994.905	11.785.000	39,29
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.698.295	22.802.600	71,94
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.015.956	22.463.025	74,84
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.463.000	16.156.250	75,27
06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.590.000	4.716.200	62,14
06.09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.040.000	40.032.900	74,08
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	482.394.089	365.530.950	75,77
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.753.953	963.109.118	80,08
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.078.953	170.875.493	59,11
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	913.675.000	792.233.625	86,71
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	882.533.500	663.713.041	75,21
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.920.000	258.770.441	60,33
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.848.500	113.570.600	72,41

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	296.765.000	291.372.000	98,18
03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	2.531.292.467	2.340.441.505	92,46
2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.355.052.395	2.177.052.305	92,44
01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.252.213.995	2.077.828.705	92,26
01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	102.838.400	99.223.600	96,48
2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	74.044.183	72.787.350	98,30
02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	74.044.183	72.787.350	98,30
2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	17.716.854	17.676.000	99,77
03.01	Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	17.716.854	17.676.000	99,77
2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	69.105.221	60.634.600	87,74
04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	69.105.221	60.634.600	87,74
2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15.373.814	12.291.250	79,95
05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.373.814	12.291.250	79,95
04	Program Penempatan Tenaga Kerja	727.656.719	595.071.632	81,78
2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	297.636.435	213.272.900	71,66
01.02	Pelayanan Antar Kerja	140.265.953	70.118.900	49,99
01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	157.370.482	143.154.000	90,97
2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	337.079.237	309.235.632	91,74
03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	213.453.082	196.695.632	92,15
03.03	Job Fair/Bursa Kerja	123.626.155	112.540.000	91,03
2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	43.993.930	36.869.600	83,81
04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	43.993.930	36.869.600	83,81
02.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota"	48.947.117	35.693.500	72,92
05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.947.117	35.693.500	72,92
05	Program Hubungan Industrial	783.109.093	671.000.600	85,68
2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota"	375.290.053	330.674.600	88,11
01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	44.654.300	33.100.300	74,13
01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	330.635.753	297.574.300	90,00
2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	407.819.040	340.326.000	83,45

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota"			
02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	102.457.995	85.524.000	83,47
02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	76.244.635	49.851.100	65,38
02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	43.041.800	32.817.800	76,25
02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	186.074.610	172.133.100	92,51

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 51 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 15.792.121.269. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp **14.253.710.171** dengan sisa sebesar Rp 1.475.411.098

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Sampai Dengan Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	RENSTRA			
						TARGET	REALISASI	PROYEKSI	
						2021	2021	2022	2023
1	Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				9	9,54	8	7,1
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				70,04	69,41	70,15	70,2
			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		70	73	72	73
			Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		76	90,8	78	79
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		64	66	68	70
			Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		54	56	58	60

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Menurunkan pengangguran”** memiliki **2 indikator kinerja yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”**, yang kurang dari target, dimana realisasinya sebesar 9,54 % dari target sebesar 9%, dan **“Tingkat Partisipasi**

Angkatan Kerja (TPAK)” yang kurang juga dari target, dimana realisasinya sebesar 69,41 % dari target sebesar 70,04%.

- b. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator “Nilai AKIP” realisasinya sebesar 73 dari target sebesar 70.
- c. Sasaran **“Meningkatnya keterampilan tenaga kerja”** dengan indikator “Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi” dimana realisasinya melampaui target dengan realisasi sebesar 90,8% dari target sebesar 76%.
- d. Sasaran **“Meningkatnya penempatan tenaga kerja”** dengan indikator “Persentase pencari kerja yang ditempatkan” dimana realisasinya melampaui target dengan realisasi sebesar 66% dari target sebesar 64%.
- e. Sasaran **“Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja”** dengan indikator “Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)” dimana realisasinya melampaui target dengan realisasi sebesar 56% dari target sebesar 54%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka cukup tinggi ;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi
3. Link and match antara pemberi kerja dan pencari kerja sehingga terjadi kesesuaian antara pemberi kerja dan pencari dalam hal kualifikasi pendidikan, keterampilan maupun keahlian;
4. Ketersediaan Informasi Pasar Kerja Belum Optimal ;
5. Perselisihan Hubungan Industrial masih cukup tinggi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;

- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 pada bidang tenaga kerja terdapat pada Prioritas Daerah 2, hal tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja;
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%. Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu **“Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran”**. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan perangkat daerah	100 %	12.906.866.543	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan perangkat daerah	100 %	12.906.866.543	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	704.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	704.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	2.659.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	2.659.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok.	2.488.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dok.	2.488.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								n RKA-SKPD			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.	1.633.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.	1.633.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.	1.244.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.	1.244.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok.	443.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok.	443.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok.	731.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok.	731.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Org/bln	10.350.167.543	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Org/bln	10.350.167.543	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok.	225.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok.	225.000.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	667.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	667.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 pkt	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 pkt	20.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 pkt	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 pkt	80.000.000	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah	5 pkt	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah	5 pkt	30.000.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Tangga yang Disediakan					Tangga yang Disediakan			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 pkt	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 pkt	35.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 pkt	27.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 pkt	27.000.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dok.	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dok.	5.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 lap	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 lap	15.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100 lap	148.456.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100 lap	148.456.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok.	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok.	5.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok.	171.850.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok.	171.850.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 unit	175.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 unit	175.500.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	350.000.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	473.054.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	473.054.400	
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	-	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanya	1 unit	318.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanya	1 unit	318.150.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Terpeliharaan kendaraan dinas operasional	25 unit	40.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Semarang	Terpeliharaan kendaraan dinas operasional	25 unit	40.350.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Operasional atau Lapangan					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 unit	126.699.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 unit	126.699.600	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	300.070.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	300.070.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65 %	162.400.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65 %	162.400.000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dok.	125.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dok.	125.000.000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 pers h.	37.400.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 pers h.	37.400.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	79 %	2.555.760.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	79 %	2.555.760.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	660 org	2.141.400.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	660 org	2.141.400.000	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 pkt	30.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 pkt	30.000.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lemb	152.600.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lemb	152.600.000	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 perizin.	15.800.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 perizin.	15.800.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 perusahaan.	48.960.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 perusahaan.	48.960.000	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	10 dok.	167.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	10 dok.	167.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70 %	824.980.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70 %	824.980.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.000 org	181.020.000	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.000 org	181.020.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.07.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 org	35.680.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 org	35.680.000	
2.07.04.2.0 1.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 org	15.300.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 org	15.300.000	
2.07.04.2.0 1.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 org	164.400.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 org	164.400.000	
2.07.04.2.0 2.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Semarang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	5 lemb.	6.220.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Semarang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	5 lemb.	6.220.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.07.04.2.0 3.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 org	120.960.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 org	120.960.000	
2.07.04.2.0 3.03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 org	126.900.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 org	126.900.000	
2.07.04.2.0 4.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 org	111.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 org	111.000.000	
2.07.04.2.0 4.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 org	32.900.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 org	32.900.000	
2.07.04.2.0 5.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah perpanjangan IMTA	200 org	30.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu)	Kota Semarang	jumlah perpanjangan IMTA	200 org	30.600.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						Daerah Kabupaten/Kota					
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	60 %	744.300.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	60 %	744.300.000	
2.07.05.2.0 1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 perush.	48.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 perush.	48.000.000	
2.07.05.2.0 1.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 perush.	48.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 perush.	48.000.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 lap	296.500.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 lap	296.500.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 perkara	98.676.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 perkara	98.676.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 perkara	26.324.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 perkara	26.324.000	

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2.07.05.2.0 2.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 AP & SP	43.200.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 AP & SP	43.200.000	
2.07.05.2.0 2.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lemb	183.600.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lemb	183.600.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Tenaga Kerja juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Untuk Dinas Tenaga Kerja, aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang adalah nihil. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja**

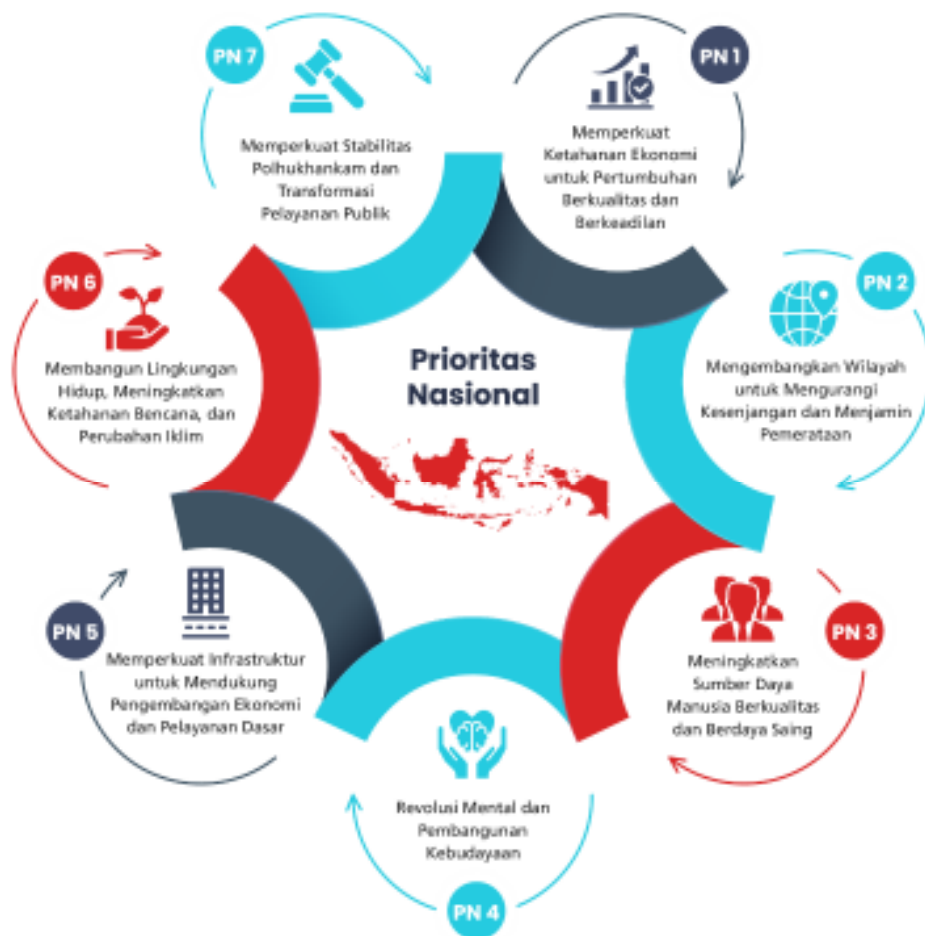
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter

- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;

- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan

Satgas

Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Tenaga Kerja juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana

tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang”,

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yaitu “Menurunkan pengangguran”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerahMeningkatnya keterampilan tenaga kerja
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja
- c. Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			8,60
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			70,10
			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,00
			Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	77,00
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	66,00
			Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	56,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Tenaga Kerja bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (2 indikator) dan indikator sasaran (4 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Tenaga Kerja memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak ... kegiatan, yang terdiri dari 27 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 25 kegiatan

- pelaksanaan/pembangunan. Dari 52 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, 1 kegiatan merupakan kegiatan DBHCHT;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 17.194.306 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 12.906.866.534 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 4.287.440.000 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah		100 %	12.906.866.543			100 %	13.165.003.874
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dok.	704.000	APBD		3 dok.	718.080
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dok.	2.659.000	APBD		1 dok.	2.712.180
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dok.	2.488.000	APBD		1 dok.	2.537.760

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dok.	1.633.000	APBD		1 dok.	1.665.660
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dok.	1.244.000	APBD		1 dok.	1.268.880
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	3 dok.	443.000	APBD/DAU		3 dok.	451.860

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dok.	731.000	APBD		3 dok.	745.620
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	72 Org/bln	10.350.167.543	APBD		72 Org/bln	10.557.170.894
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dok.	225.000.000	APBD		12 dok.	229.500.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 lap	667.000	APBD		12 lap	680.340

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	3 pkt	20.000.000	APBD		3 pkt	20.400.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	3 pkt	80.000.000	APBD		3 pkt	81.600.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	5 pkt	30.000.000	APBD		5 pkt	30.600.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	8 pkt	35.000.000	APBD		8 pkt	35.700.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	7 pkt	27.000.000	APBD		7 pkt	27.540.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	36 dok.	5.000.000	APBD		36 dok.	5.100.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	200 lap	15.000.000	APBD		200 lap	15.300.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	100 lap	148.456.000	APBD		100 lap	151.425.120
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	4 dok.	5.000.000	APBD		4 dok.	5.100.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	2 dok.	171.850.000	APBD		2 dok.	175.287.000
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	48 unit	175.500.000	APBD		48 unit	179.010.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 lap	350.000.000	APBD		12 lap	357.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 lap	473.054.400	APBD		12 lap	482.515.488
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 unit	-	APBD		1 unit	-
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanya	Kota Semarang	1 unit	318.150.000	APBD		1 unit	324.513.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Semarang	25 unit	40.350.000	APBD		25 unit	41.157.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	103 unit	126.699.600	APBD		103 unit	129.233.592
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	3 unit	300.070.000	APBD		3 unit	306.071.400
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		65 %	162.400.000			67 %	165.648.000
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Semarang	1 dok.	125.000.000	APBD		1 dok.	127.500.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Semarang	5 persh.	37.400.000	APBD		5 persh.	38.148.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		79 %	2.555.760.000			80 %	2.606.875.200
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Semarang	660 org	2.141.400.000	APBD/DBHCHT		660 org	2.184.228.000
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Semarang	4 pkt	30.000.000	APBD		4 pkt	30.600.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Semarang	20 lemb	152.600.000	APBD		20 lemb	155.652.000
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Semarang	15 perizn.	15.800.000	APBD		15 perizn.	16.116.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Semarang	10 perush.	48.960.000	APBD		10 perush.	49.939.200
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Kota Semarang	10 dok.	167.000.000	APBD		10 dok.	170.340.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		70 %	824.980.000			72 %	841.479.600
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Semarang	2.000 org	181.020.000	APBD		2.000 org	184.640.400
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Semarang	50 org	35.680.000	APBD		50 org	36.393.600

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Semarang	15 org	15.300.000	APBD		15 org	15.606.000
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	60 org	164.400.000	APBD		60 org	167.688.000
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	Kota Semarang	5 lemb.	6.220.000	APBD		5 lemb.	6.344.400
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Semarang	2500 org	120.960.000	APBD		2500 org	123.379.200

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	750 org	126.900.000	APBD		750 org	129.438.000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Semarang	30 org	111.000.000	APBD		30 org	113.220.000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Semarang	15 org	32.900.000	APBD		15 org	33.558.000
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perpanjangan IMTA	Kota Semarang	200 org	30.600.000	APBD		200 org	31.212.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		60 %	744.300.000			62 %	759.186.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Semarang	45 perush.	48.000.000	APBD		45 perush.	48.960.000
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Semarang	3 perush.	48.000.000	APBD		3 perush.	48.960.000
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Semarang	4 lap	296.500.000	APBD		4 lap	302.430.000

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Semarang	160 pkara	98.676.000	APBD		160 pkara	100.649.520
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Semarang	100 pkara	26.324.000	APBD		100 pkara	26.850.480
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Semarang	10 AP&SP	43.200.000	APBD		10 AP&SP	44.064.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Semarang	1 lemb	183.600.000	APBD		1 lemb	187.272.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Tenaga Kerja pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja;
3. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Tenaga Kerja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

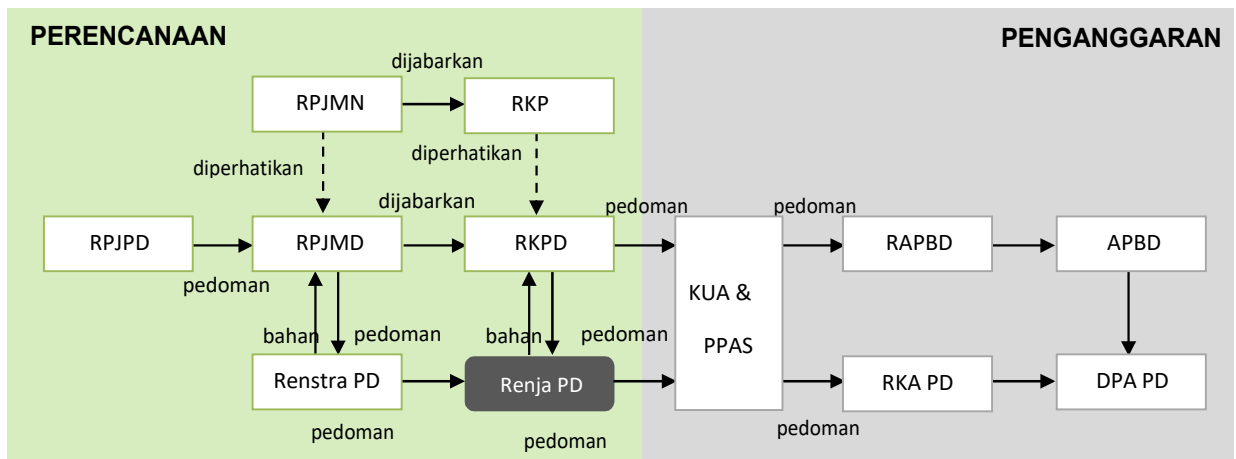
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- p. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 7 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp15.987.828.269 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 13.231.601.343 atau sebesar 82.76%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Perangkat Daerah**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DP3A)	100%					100%		
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DP3A)	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DP3A)	100%					100%		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%		100%	97,5%	97,5%	100%	50%	50%
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	100%							
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	75%	75%	100%		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	82%	82%	100%		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga		100%		100%	44%	44%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%		100%	97,98%	97,98%	100%	64.45%	64.45%
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.04 Poin					15.64 Poin		
		Jumlah petugas perlindungan di Kecamatan	16							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	90%	90%	100%		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%					100.00%		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	75%	75%	100%		
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	0%	0%	100%		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100%		100%	95%	95%	100%	50%	50%
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4							
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100					100%		
		Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	7							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01%					0.01%		
		Penyelesaian pengaudan	100%							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan								
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100%					100%	100%	100%
		Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%					100%		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan					100.00 Kelurahan		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%					100%	50%	50%
		Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat		100%					100%		
		Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan					177 Kelurahan		

Sumber:bappeda.semarangkota.go.id per triwulan II

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 OPD Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 7 Program dan 14 Indikator Kinerja Program dan 24 Kegiatan dengan 0 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 14 Indikator Kinerja Program, terdapat 0 Indikator yang melampaui target, 4 Indikator yang memenuhi target, 3 Indikator yang tidak memenuhi target
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan, 9 Program dengan 16 indikator kinerja program.
 - b) Dari 16 Indikator Kinerja Program, terdapat 0 Indikator yang melampaui target , 2 Indikator yang memenuhi target, 7 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan PD Kota Semarang Tahun 2021

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.987.828.269	13.231.601.343	82.76	2,756,226,926
	OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.987.828.269	13.231.601.343	82.76	2,756,226,926
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.960.579.250	8.687.709.864	87.22	1,272,869,386
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.202.500	3.968.380	76.28	1,234,120
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.125.000	767.580	68.23	1,048,242
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	489.060	97.81	10,940
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	497.700	99.54	2,300
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	437.580	87.52	62,420
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	291.840	58.37	208,160
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.380.000	92.00	120,000
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	577.500	104.620	18.12	472,880
2.	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.806.980.269	7.382.404.176	94.56	424,576,093
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.573.020.269	7.182.221.576	94.84	390,798,693
	c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	231.710.000	197.950.000	85.43	33,760,000
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	735.000	98.00	15,000
	e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000	499.800	99.96	200
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	750.000	750.000	100.00	-
	g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	250.000	247.800	99.12	2,200
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407.438.182	380.092.750	93.29	27,345,432
	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	57.438.182	56.860.000	98.99	578,182
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	323.232.750	92.35	26,767,250

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	950.352.144	326.885.905	34.40	623,466,239
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.179.360	2.300.950	72.37	878,410
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.581.140	59.360.000	70.18	25,221,140
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.798.960	15.757.000	63.54	9,041,960
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.864.684	56.337.010	64.12	31,527,674
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.559.070	19.689.080	47.38	21,869,990
	f. Fasilitas Kunjungan Tamu	64.000.000	6.071.500	9.49	57,928,500
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.050.080	92.445.365	16.72	460,604,715
	h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	91.318.850	74.925.000	82.05	16,393,850
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.695.763	79.550.000	91.76	7,145,763
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.891.163	57.550.000	99.41	341,163
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.804.600	22.000.000	76.38	6,804,600
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.510.392	291.423.625	89.25	35,086,767
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.035.392	80.635.500	73.28	29,399,892
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.475.000	210.788.125	97.37	5,686,875
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.400.000	223.385.028	59.19	154,014,972
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.804.000	171.074.128	71.64	67,729,872
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.630.000	23.114.600	42.31	31,515,400
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.660.000	25.194.700	70.65	10,465,300
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.306.000	4.001.600	8.28	44,304,400
B.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.181.006.625	959.129.263	81.21	221,877,362

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	163.189.020	125.674.500	77.01	37,514,520
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	50.133.400	26.476.400	52.81	23,657,000
	b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	113.055.620	99.198.100	87.74	13,857,520
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	872.714.312	696.517.954	79.81	176,196,358
	a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	782.384.232	612.392.704	78.27	169,991,528
	b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	90.330.080	84.125.250	93.13	6,204,830
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.103.293	136.936.809	94.37	8,166,484
	a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.103.293	136.936.809	94.37	8,166,484
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.770.460.690	1.295.497.736	73.17	474,962,954
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	246.780.528	176.382.900	71.47	70,397,628
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	178.941.498	121.138.300	67.70	57,803,198
	b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.839.030	55.244.600	81.43	12,594,430
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.465.758.866	1.083.765.036	73.94	381,993,830
	a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.139.396.950	1.017.753.675	1.139.396.950	121,643,275
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	326.361.916	66.011.361	20.23	260,350,555

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.921.296	35.349.800	61.03	22,571,496
	a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.280.850	27.474.500	60.68	17,806,350
	b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.640.446	7.875.300	62.30	4,765,146
D.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.401.602.913	1.145.392.625	81.72	256,210,288
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	985.175.443	834.662.675	84.72	150,512,768
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	58.851.290	32.244.000	54.79	26,607,290
	b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	926.324.153	802.418.675	86.62	123,905,478
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	416.427.470	310.729.950	74.62	105,697,520
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.032.100	14.620.100	63.48	8,412,000
	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.921.100	10.451.950	65.65	5,469,150
	c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	377.474.270	285.657.900	75.68	91,816,370
E.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	471.151.847	426.137.405	90.45	45,014,442
1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	471.151.847	426.137.405	90.45	45,014,442
	a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	248.591.042	216.253.480	86.99	32,337,562

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN
	b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	222.560.805	209.883.925	94.30	12,676,880
F.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	569.087.058	382.999.850	67.30	186,087,208
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.924.850	84.620.900	58.39	60,303,950
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	13.655.530	4.650.000	34.05	9,005,530
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	131.269.320	79.970.900	60.92	51,298,420
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	424.162.208	298.378.950	70.35	125,783,258
	a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.990.000	9.275.000	71.40	3,715,000
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.909.000	61.662.600	95.00	3,246,400
	c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	296.525.178	206.414.110	69.61	90,111,068
	d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.738.030	21.027.240	42.28	28,710,790
G.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	633.939.886	334.734.600	52.80	299,205,286
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	270.730.800	242.379.700	89.53	28,351,100
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.017.920	30.870.000	90.75	3,147,920
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	236.712.880	211.509.700	89.35	25,203,180

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	323.430.436	59.739.900	18.47	263,690,536
	a.Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.797.570	12.874.900	76.65	3,922,670
	b.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	227.401.426	18.534.700	8.15	208,866,726
	c.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17.827.040	14.115.300	79.18	3,711,740
	d.Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	61.404.400	14.215.000	23.15	47,189,400
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.778.650	32.615.000	81.99	7,163,650
	a.Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.778.650	32.615.000	81.99	7,163,650

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program dan 21 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 15.987.828.269. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 13.231.601.343 dengan sisa sebesar Rp 2,756,226,926 contoh (17,24%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp.7.573.020.269 realisasi Rp.7.182.221.576 dan sisa anggaran sebesar Rp. 390.798.693
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp.15.987.828.269 Dengan realisasi sebesar Rp13.231.601.343 dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.756.226.926

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah untuk membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	45,78	45,78				57.01	57.01		
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%			100	100	100			100	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%			66,34	68,10	69,87			66,34	68,10

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%			90	91	92			92	93
SASARAN RENSTRA											
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	%	42	45				100	100		
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24	24				20	24		
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,041	0,039				0,029	0,020		
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana	%	100	100				100	100		

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
sarana dan prasarana aparaturnya dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dan prasarana aparaturnya dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%			100	100	100			100	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%			51,24	51,27	51,29			51,29	51,32
	Jumlah Kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan			50	75	100			100	150
	Prosentase penanganan perempuan korban	%			100	100	100			100	100

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
	kekerasan										
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%			100	100	100			100	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point			701	801	801			801	801
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point			70.10	70.40	70.70			70.70	71.00

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” dan “ Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”** memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan”, “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” dan “Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sesuai dengan target.
- b. Adapun Sasaran Renstra Sebagai Berikut :
 - 1) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
 - 2) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
 - 3) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
 - 4) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, di Kota Semarang di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4**Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
Sampai Dengan Tahun 2021****Kota Semarang**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	6.9%	7%			7,13%	8,14%		
2	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4	4			4	4		
3	Cakupan program pengarusutamaan gender	78%	80%			97%	87,5%		
4	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			100%	100%			100%	100%
5	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi			100%	100%			100%	100%
6	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak			100%	100%			100%	100%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang , aspek lain yang perlu diperhatikan dalam

menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	100%			100%	100%		
2	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			15,64%	14,24%			15,64%	14,24%
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani			0,012%	0,012%			0,012%	0,012%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai
Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak										
1	Rasio KDRT		0,039%							
2	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari Tindakan kekerasan		100%							
3	Pemberdayaan terhadap korban KDRT		100%							
4	Organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam Pembangunan		4 Organisasi							
5	Indeks Pemberdayaan Gender		92,59 Poin							
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			7,50%	7,65%	7,26%	7,26%			
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			0,012%	0,012%	0,013 %	0,013%			
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)			15,64%	14,00%	17,04 %	17,04%			
9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif			100%	100%	100%	100%			
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			74,69%	74,69%	74,6%	74,67%			
11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			62,72%	64,58%					

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik
- b. Pemahaman terhadap perencanaan Anggaran Responsif Gender belum maksimal
- c. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam upaya pencegahan kasus kekerasan
- d. Koordinasi yang belum optimal dalam penanganan kasus kekerasan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan

3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan

- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
- 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:

- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
- 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
- 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
- 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:

- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
- 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
- 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
- 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
- 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
- 5) Pemenuhan lahan permakaman umum

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*

- 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu **“Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif”**.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangka berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang

- Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;

- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”,

Dan

“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Persentase implemmentasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”, “Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak”, “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”, dan “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
- b. Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga
- d. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan
- e. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)
- f. Nilai SAKIP
- g. Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
					1
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak		1 Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
			2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	64,58
		1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	1 Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
			2 Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,27
			3 Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan	Kelurahan	75

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
					1	
1	2	3	4	5	6	
				Ketahanan Keluarga		
			4	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
		2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	801
		3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point	70.40
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan			Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	91
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
					1
1	2	3	4	5	6
		Semarang			

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 8 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 24 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks

rutin), dan 17 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp.18,871,525,110 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp.10,772,274,392 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp.8,099,250,718 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.836.098.000				17.379.254.000
3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.170.140.000				6.395.533.000
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		100.00 %	10.596.205.000				9.968.721.000
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	Kota Semarang	100.00 %					
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	Kota Semarang	100.00 %					
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Semarang	100.00 %					
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	Kota Semarang	27.00 Dokumen	5.309.966				7.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<i>Perangkat Daerah</i>	<i>yang dihasilkan</i>							
		<i>Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan</i>	Kota Semarang	27.00 Dokumen					
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	Kota Semarang	2 Dokumen	589.578			1.000.000	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA murni		1 Dokumen	739.470			1.000.000	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan		1 Dokumen	872.616			1.000.000	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA murni dan pergeseran		2 Dokumen	739.470			1.000.000	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan		1 Dokumen	872.616			1.000.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian dan realisasi kinerja		6 Dokumen	989.016			1.500.000	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi		12 Dokumen	507.200			1.000.000	
2.08.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan</i>		100.00 %	8.129.203.360			8.564.755.322	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<i>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan</i>		100.00 %					
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100.00 %	7.887.320.000			8.322.805.322	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pembayaran honor PA,KPA,PPK dan Bendahara		100.00 %	239.741.000			240.000.000	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1.00 Dokumen	494.508			500.000	
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen pemeriksaan		1.00 Dokumen	494.000			500.000	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran,dokumen laporan keuangan bulanan		14.00 Dokumen	824.180			700.000	
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis keuangan		1.00 Dokumen	329.672			250.000	
2.08.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur</i>		100.00 %	360.510.000			60.000.000	
		<i>Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur</i>		100.00 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan peningkatan SDM		1.00 Kegiatan	60.510.000			50.000.000	
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangan cukai		16.00 Kegiatan	300.000.000			10.000.000	
2.08.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>		100.00 %	1.297.504.674			506.165.678	
		<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>		100.00 %					
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4.00 Jenis	2.500.000			2.500.000	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4.00 Jenis	14.219.000			8.000.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan		11.00 Jenis	30.000.000			10.000.000	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		40.00 Jenis	91.963.000			60.665.678	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		6.00 Jenis	25.434.674			25.000.000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung		400.00 Orang	65.066.000			50.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		20.00 Kegiatan	868.322.000			150.000.000	
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung SPBE		6.00 Jenis	200.000.000			200.000.000	
2.08.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>		100.00 %	57.669.000			70.000.000	
		<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>		100.00 %					
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan mebel		1.00 Jenis	16.401.000			50.000.000	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor		2.00 Jenis	12.857.000			10.000.000	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		2.00 Jenis	28.411.000			10.000.000	
2.08.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>		100.00 %	320.198.000			350.000.000	
		<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>		100.00 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan telepon, listrik, air dan internet		100.00 %	114.992.000			120.000.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		100.00 %	205.206.000			230.000.000	
2.08.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan aset dinas</i>		<i>100.00 %</i>	<i>425.810.000</i>			<i>410.300.000</i>	
		<i>Persentase pemeliharaan aset dinas</i>		<i>100.00 %</i>					
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		19.00 Unit	248.728.000			238.800.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7.00 Unit	81.373.000			90.000.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor		4.00 Jenis	39.755.000			40.000.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		1.00 Gedung	26.454.000			25.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor		1.00 Jenis	29.500.000			16.500.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		100.00 %	950.000.000			1.096.000.000	
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		100.00 %					
2.08.02.2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</i>		88.00 Progra m/ Kegi atan	105.000.000			145.000.000	
		<i>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</i>		88.00 Progra m/ Kegi atan					
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan PUG		7.00 Kegiata n	20.000.000			30.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG		1.00 Kegiatan	10.000.000			15.000.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		7.00%	65.000.000			70.000.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kegiatan pemahaman tentang PPRG		16.00 Kegiatan	10.000.000			30.000.000	
2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan</i>		100.00 %	95.000.000			130.000.000	
		<i>Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan</i>		100.00 %					
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi perempuan		16.00 Kegiatan	10.000.000			30.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan partisipasi perempuan		16.00 Kegiatan	85.000.000			100.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</i>		30.00 <i>Lemba ga</i>	750.000.000			821.000.000	
		<i>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</i>		30.00 <i>Lemba ga</i>					
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dan Fasilitasi kegiatan lembaga pemberdayaan perempuan (GOW, DWP dan GOP TKI)		100.00 %	425.000.000			465.000.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan (GOW,DWP, GOP TKI)		100.00 %	300.000.000			320.000.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan KIE pemberdayaan perempuan		100.00 %	25.000.000			36.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		15.64 Poin	2.480.339.000			2.452.033.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		(per 100.000 penduduk perempuan)							
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		15.64 Poin					
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		5.00 Dokumen	332.138.000			302.033.000	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		5.00 Dokumen					
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan perempuan		3.00 Kegiatan	150.000.000			150.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor perlindungan perempuan		12.00 Kegiatan	182.138.000			152.033.000	
2.08.03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</i>		100.00 %	1.500.000.000			1.700.000.000	
		<i>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</i>		100.00 %					
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan perlindungan perempuan dan anak		100.00 %	1.400.000.000			1.600.000.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		100.00 %	100.000.000			100.000.000	
2.08.03.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi</i>		100.00 %	648.201.000			450.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<i>Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi</i>		100.00 %					
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi sarana dan prasarana lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak		100.00 %	98.201.000			150.000.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perempuan di Kota Semarang yang sudah dilatih		470.00 Orang	300.000.000			100.000.000	
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi rumah aman(shelter) di Kota Semarang		100.00 %	25.000.000			100.000.000	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase rakor penguatan jejaring antar lembaga Layanan perlindungan perempuan		100.00 %	225.000.000			100.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi		100.00 %	1.940.001.000			1.980.000.000	
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi		100.00 %					
2.08.04.2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga</i>		100.00 %	83.922.000			30.000.000	
		<i>Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga</i>		100.00 %					
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga		1.00 Kegiatan	10.000.000			10.000.000	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE peningkatan kualitas keluarga		1.00 Kegiatan	10.000.000			10.000.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kegiatan masyarakat		100.00 %	63.922.000			10.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.04.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>		100.00 %	1.800.000.000			1.850.000.000	
		<i>Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>		100.00 %					
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga		100.00 %	1.000.000.000			1.000.000.000	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga		3.00 Lomba	600.000.000			650.000.000	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Gerakan Dasawisma Hebat		100.00 %	200.000.000			200.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.04.2.03	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender</i>		100.00 %	56.079.000			100.000.000	
		<i>Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender</i>		100.00 %					
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan berbasis gender		2.00 Kegiatan	56.079.000			100.000.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak		100.00 %	185.050.000			195.000.000	
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak		100.00 %					
2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak</i>		2.00 Kegiatan	185.050.000			195.000.000	
		<i>Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak</i>		2.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen gender dan anak		2.00 Dokumen	105.050.000				115.000.000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		19.00 Media	80.000.000				80.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak		100.00 %	399.280.000				397.500.000
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak		100.00 %					
2.08.06.2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>		8.00 Jejaring	230.825.000				250.000.000
		<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>		8.00 Jejaring					
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional		100.00 %	103.550.000				150.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi gugus tugas KLA		100.00 %	127.275.000			100.000.000	
2.08.06.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>		7.00 Lembaga	168.455.000			147.500.000	
		<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>		7.00 Lembaga					
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Forum Anak		100.00 %	75.000.000			75.000.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi		16.00 Kegiatan	61.955.000			20.000.000	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		12.00 Kegiatan	15.000.000			30.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		7.00 Lemba ga	16.500.000			22.500.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani		0.01%	215.470.000			275.000.000	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani		0.01%					
2.08.07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani</i>		100.00 %	30.000.000			45.000.000	
		<i>Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani</i>		100.00 %					
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor/sosialisasi/FG D/Bintek pencegahan kekerasan terhadap anak		2.00 Kegiata n	20.000.000			35.000.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan	Jumlah kegiatan lintas sektor		4.00 Kegiata n	10.000.000			10.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan</i>		100.00 %	75.000.000			120.000.000	
		<i>Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan</i>		100.00 %					
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Layanan perlindungan anak		100.00 %	25.000.000			35.000.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendampingan anak		100.00 %	10.000.000			10.000.000	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Persentase Kegiatan KIE anak korban kekerasan		100.00 %	20.000.000			40.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan anak		100.00 %	20.000.000			35.000.000	
2.08.07.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>		100.00 %	110.470.000			110.000.000	
		<i>Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>		100.00 %					
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus		2.00 Kegiatan	40.000.000			45.000.000	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Cakupan penyediaan layanan anak yang memerlukan		100.00 %	40.470.000			35.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan khusus							
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (sosialisasi, bintek, FGD)		2.00 Kegiatan	30.000.000			30.000.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.069.753.000			1.015.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi		100.00 %	281.900.000			275.000.000	
		Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi		100.00 %					
2.13.04.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan</i>		<i>100.00 Kelurahan</i>	<i>281.900.000</i>			<i>275.000.000</i>	
		<i>Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan</i>		<i>100.00 Kelurahan</i>					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase fasilitasi penyusunan profil kelurahan		100.00 %	50.000.000			50.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan dan lomba kelurahan		100.00 %	231.900.000			225.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		100.00 %	787.853.000			740.000.000	
		Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		100.00 %					
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum A</i>	<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan</i>		<i>177.00 Kelurahan</i>	<i>787.853.000</i>			<i>740.000.000</i>	
		<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan</i>		<i>177.00 Kelurahan</i>					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		kelurahan							
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		100.00 %	113.409.000			200.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		100.00 %	105.883.000			115.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah potensi TTG yang dimanfaatkan		2.00 Unit	49.437.000			100.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan pencanangan gerakan bulan bhakti gotong royong masyarakat		1.00 Kegiatan	519.124.000			325.000.000	

Sumber : DP3A Kota Semarang

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang.

Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

13. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I PENDAHULUAN

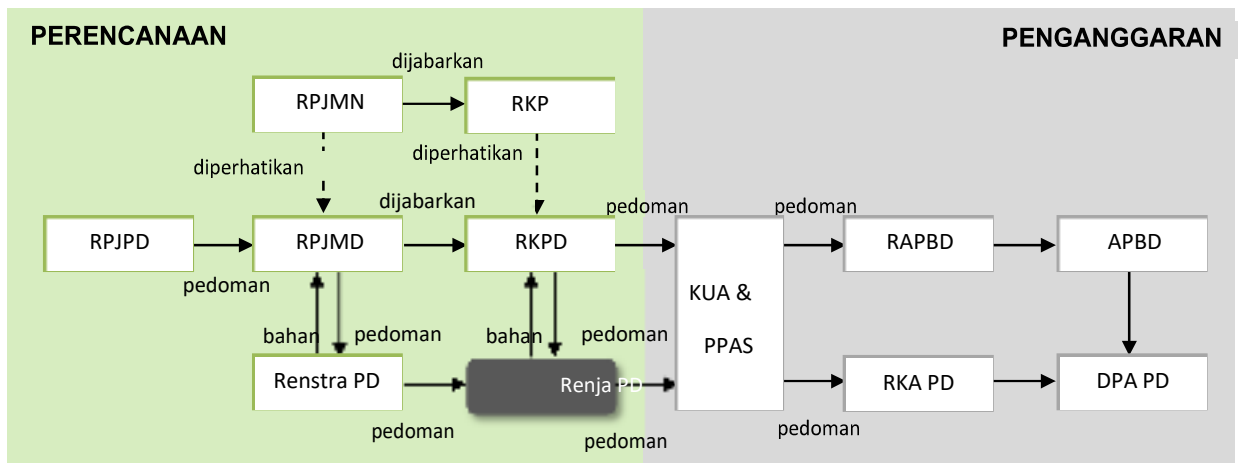
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Ketahanan Pangan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 12.085.828.144,- (Dua belas milyar Delapan puluh lima juta Delapan ratus dua puluh delapan ribu Seratus empat puluh empat rupiah). Program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran senilai Rp. 11.008.057.788,- (Sebelas milyar Delapan juta Lima puluh tujuh ribu Tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 91,08 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PANGAN										
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Renja	100%	100%	100%
			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100%	100%	100%
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100%	100%	100%
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD	100%	100%	100%	100%	Jumlah dokumen DPA yang dihasilkan	100%	100%	100%
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKPJ dan LKJIP	100%	100%	100%	100%	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelancaran administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
2.09.01.2.02.05			100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100%	100%	100%
			2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	100%	100%	100%
			1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		1 laporan	1 laporan	1 laporan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	83,90%	83,90%	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor	100%	100%	100%	100%	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		6 jenis	6 jenis	6 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Penerangan SKPD			
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		4 jenis	4 jenis	4 jenis
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		22 jenis	22 jenis	22 jenis
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ATK yang disediakan	100%	100%	100%	100%	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		45 jenis	45 jenis	45 jenis
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		9 jenis	9 jenis	9 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Perundang	100%	100%	100%	100%	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		3 jenis	3 jenis	3 jenis
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan Dan Minuman	100%	100%	16%	16%	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	100%	100%	100%
			100%	100%	16%	16%		350 orang	350 orang	350 orang
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	99,10%	99,10%	Jumlah Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100%	100%	100%
			100%	100%	99,10%	99,10%		100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	100%	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis	5 jenis	5 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Elektronik pada SKPD			
			100%	100%	100%	100%	Jumlah Petugas IT Pengelola SPBE SKPD	2 orang	2 orang	100%
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional	100%	100%	0	0	NA	NA	NA	NA
			100%	100%	0	0		NA	NA	NA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	0	0	NA	NA	NA	NA
			100%	100%	0	0		NA	NA	NA
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan	100%	100%	100%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Petugas caraka	1 orang	1 orang	1 orang	100%		100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	1 orang	1 orang	1 orang	100%	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	6 orang	6 orang	6 orang
		Pramubakti	2 orang	2 orang	2 orang	100%				
		Tenaga Keamanan Kantor	1 orang	1 orang	1 orang	100%				
		Tenaga Pengemudi	1 orang	1 orang	1 orang	100%				
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	88,75%	88,75%	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sparepart, Servis, bbm, pajak kendaraan dinas pejabat	100%	100%	100%	100%	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		1 unit	1 unit	1 unit
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sparepart, Servis, dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	100%	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 unit	22 unit	22 unit
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		4 unit	4 unit	4 unit
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%				
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	NA	NA	NA	NA	NA	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	1 unit	1 unit
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	NA	NA	NA	NA	NA	Jumlah Rapat	100%	100%	100%
			NA	NA	NA	NA	Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistik	2 rapat	2 rapat	2 rapat
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	Jumlah Dokumen	100%	100%	100%
			NA	NA	NA	NA	Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan distribusi pangan	100%	100%	100%	100%	Ketersediaan Energi / Kapita	3056.00K kal / Kapita / Tahun	3056.00K kal / Kapita / Tahun	100%
			100%	100%	100%	100%	Presentase Cakupan Distribusi	100%	100%	100%
		Skor Pola Pangan harapan	88	88	89,1	101,25 %	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang dan Aman	100%	100%	100%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100%	100%	94,44%	94,44 %	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022					
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Ketersediaan Pangan	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	100%	100%	100%				
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Neraca Bahan Pangan	1 buku	1 buku	1 buku	100%	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Prognosa Kebutuhan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
							Rakor HBKN					1 kali	1 kali	1 kali
							Rakor Satgas Harga Pangan					6 kali	6 kali	6 kali
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Data Base Pangan Terpadu	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	100%	100%	100%				
			1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%		3 pelatihan	3 pelatihan	3 pelatihan				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Obor Pangan Lestari	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon	10 pelatihan	10 pelatihan	10 pelatiha n
		Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%				
		Pelatihan pengembangan sumber daya pangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%				
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi Instansi Terkait	100%	100%	66,66%	66,66%	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	100%	100%	100%
			2 kegiatan	2 kegiatan	0	0		6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
		Petugas IT dan Aplikasi Ketahanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang	100%				
		Profil dan Selayang Pandang Dinas Ketahanan Pangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Base Distribusi Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	1 orang	1 orang
		Informasi Harga Pangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 laporan	16 laporan	16 laporan
		Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	1 orang	1 orang	100%	Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24 laporan	24 laporan	24 laporan
		Pasar Murah	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi
		Petugas Enumerator Distribusi	16 orang	16 orang	16 orang	100%	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 lokasi	16 lokasi	16 lokasi
					Jumlah Lokasi Pemantauan	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Harga Pangan			
							Jumlah Petugas Enumerator	16 orang	16 orang	16 orang
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Fasilitasi Pemasaran Produk Pangan	1 kegiatan	100%	100%	100%		100%	100%	100%
				1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	3 pelatihan	3 pelatihan	3 pelatihan
		Pemberdayaan KDPM	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Toko Tani Indonesia	20 TTI	100%	100%	100%	Jumlah Lokasi	100%	100%	100%
				20 TTI	20 TTI	100%	Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100%	100%	83,33%	83,33%	Penguatan Cadangan Pangan	100%	100%	100%
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	100%	100%	50%	50%	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	100%	100%	100%
			6 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Beras ATM	100%	100%	100%	100%	Jumlah Beras Cadangan Pangan	100%	100%	100%
			81 ton	81 ton	81 ton	100%		84500 kg	84500 kg	84500 kg
		Beras Cadangan Pangan	7 ton	7 ton	7 ton	100%				
		Presentasi Penyaluran Terhadap Lokasi Bencana	100%	100%	100%	100%				
2.09.03.2.02.03	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Petugas monev	100%	100%	100%	100%	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi	100%	100%	100%
			6 orang	6 orang	6 orang	100%		10 orang	10 orang	10 orang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras			
		Petugas Pengelola ATM Beras	20 orang	20 orang	20 orang	100%	Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan lumbung pangan	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan
							Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	16 orang	16 orang	16 orang
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100%	100%	97,92%	97,92%	Angka Kecukupan Energi	88%	88%	100%
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Diseminasi Pola Pangan Harapan (PPH)	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
			2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi	2 even	2 even	2 even

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini			
		Intervensi Pangan Anak Harapan (IPAH)	100%	100%	100%	100%	Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	1 buku	1 buku	1 buku
							Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Apresiasi B2SA Anak Usia Dini	100%	100%	95,83%	95,83%	Jumlah Kampung Tematik Produktif	100%	100%	100%
			5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%		8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
		Event promosi pangan lokal	4 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	25%	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari	16 lokasi	16 lokasi	16 lokasi
		Forum Olahan Pangan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	Jumlah Promosi Pangan Lokal	21 kegiatan	21 kegiatan	21 kegiatan
		Pelatihan Kemasan Pangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelatihan RPL (Rumah Pangan Lestari)	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%				
		Pelatihan pengembangan pangan lokal	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%				
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	NA	NA	NA	NA	NA	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	100%	100%	100%
								1263 anak	1263 anak	1263 anak
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penanganan Daerah rentan rawan pangan	100%	100%	100%	100%	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	100%	100%	100%
			133 kelurahan	133 kelurahan	133 kelurahan	100%		5%	5%	5%
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100%	100%	100%	100%	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%		2 buku	2 buku	2 buku
			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Data Kerawanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Peta FSVA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Peta SKPG	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Petugas Pemantau Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	Tertanganin ya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	2 kelurahan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder	NA	NA	NA	NA	Jumlah Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan	80	80	91,27	114,09	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81	81	100%
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	73,29%	73,29%	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	100%	100%
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Kader Keamanan Pangan	60 orang	60 orang	45 orang	75%	Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	2 dokumen	2 dokumen	100%
							Jumlah Pembinaan Kader	11 kegiatan	11 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Keamanan Pangan			
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan BIMTEK Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Jumlah Audit dan Inspeksi Perijinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30 kegiatan	30 kegiatan	100%
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi OKKPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	0	0	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha PSAT	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	48 lokasi	48 lokasi	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sosialisasi Keamanan Pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	24 lokasi	24 lokasi	100%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Petugas Pengawasan Keamanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	1 paket	100%
		Petugas Survei Keamanan Pangan	1 orang	1 orang	1 orang	100%	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 paket	1 paket	100%
		Survei Keamanan Pangan dan	77survei	77survei	44 survei	57,14%	Jumlah Petugas Pengawas	2 orang	2 orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Mini Laboratorium					Keamanan Pangan			
		Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Olahan Pangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	2 orang	2 orang	100%
		Uji dan Sampel Keamanan Pangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%
							Jumlah Survei Keamanan Pangan	72 survei	72 survei	100%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) urusan wajib Pangan, 4 (empat) Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program.
 - b) Rata-rata seluruh capaian tingkat realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 102,2% (seratus dua koma dua persen) dan termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "Sangat Baik".
- 2 Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan Wajib Pangan, 5 (lima) Program dengan 9 (sembilan) indikator program. Dari ke 9 indikator Program 2 indikator melampaui target yaitu :
 1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai target 89,1 Skor dari yang ditargetkan sebesar 88 Skor atau dengan prosentase 101,14% pencapaian tersebut lebih dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman.
 2. Indikator Tingkat Keamanan Pangan mencapai target 91,27 % dari yang ditargetkan sebesar 80% atau dengan prosentase 114,09% pencapaian target ini disebabkan oleh banyaknya Poduk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang sudah tersertifikasi Mutu dan Keamanan pangannya, sehingga mutu dan keamanan pangannya lebih terjamin dan memenuhi kreteria Kesehatan.
 - b) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait dalam mengupayakan 9 (sembilan) indikator kinerja program dapat tercapai.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Tahun 2021

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	12.838.642.000	11.008.057.788	85,74%
<i>jumlah setelah perubahan</i>	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08%

Tabel 2. 3
Rincian Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Tahun 2021

Rincian Belanja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA	PERSENTASE (%)
Belanja Tidak Langsung	9.307.561.199	8.534.282.112	773.279.087	99,26%
Belanja Langsung	2.778.266.945	2.473.775.676	304.491.269	89,04%
JUMLAH	12.085.828.144	11.008.057.788	1.077.770.356	91,08%

Tabel 2. 4
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)	SELISIH
	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08	1.077.770.356
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.307.561.199	8.534.282.112	99.26	773.279.087
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.620.310	8.751.050	56,02	6.869.260
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.983.970	2.946.350	42,19	4.037.620
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.012.810	1.531.050	76,07	481.760
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.900.310	1.447.500	76,17	452.810
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.424.200	1.245.400	87,45	178.800
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.311.700	250.000	19,06	1.061.700
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.987.320	1.330.750	66,96	656.570
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.490.341.214	7.134.185.994	95,25	356.155.220
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.175.826.144	6.913.852.194	96,35	261.973.950
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.410.000	217.459.500	70,28	91.950.500
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.701.690	1.099.500	64,61	602.190

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)	SELISIH
	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08	1.077.770.356
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.701.690	735.000	43,19	966.690
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.701.690	1.039.800	61,1	661.890
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.898.521	547.198.261	69,8	236.700.260
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.570	7.151.000	98,46	111.570
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.377.620	23.635.150	96,95	742.470
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	141.578.580	137.879.300	97,39	3.699.280
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.612.678	42.039.000	86,48	6.573.678
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.177.082	15.758.161	71,06	6.418.921
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	4.265.000	74,82	1.435.000
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.408.480	18.270.000	16,09	33.138.480
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.043.000	94.222.000	38,45	150.821.000
2 09 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	237.738.511	213.978.350	90,01	23.760.161

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)	SELISIH
	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08	1.077.770.356
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.141.154	299.879.986	80,37	73.261.168
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.941.154	95.578.386	81,04	22.362.768
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.200.000	204.301.600	80,06	50.898.400
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.560.000	544.266.821	84,44	100.293.179
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	39.927.670	99,94	22.330
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.340.000	258.187.800	77,22	76.152.200
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.930.000	22.937.500	99,96	18.992.500
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.340.000	223.213.851	97,76	5.126.149
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.321.140.513	2.083.252.621	89,75	237.887.892
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	418.614.356	324.847.958	77,6	93.766.398

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)	SELISIH
	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08	1.077.770.356
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	26.964.110	22.988.033	85,25	3.976.077
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	120.569.739	96.533.830	80,08	24.035.909
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	96.645.800	79.114.400	81,86	17.531.400
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	108.799.352	79.451.450	73,03	29.347.902
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	28.125.980	18.960.000	67,41	9.165.980
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	37.509.375	27.780.245	74,06	9.729.130
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.139.782.180	1.060.827.820	93,07	78.954.360
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	42.279.870	10.846.000	25,56	31.433.870
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	978.302.310	938.021.820	95,88	40.280.490
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.200.000	111.960.000	93,93	7.240.000

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)	SELISIH
	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08	1.077.770.356
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	762.743.977	697.576.843	91,46	65.167.134
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34.078.360	26.436.000	77,57	7.642.360
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	728.665.617	671.140.843	92,11	57.524.774
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	159.357.970	145.182.020	91,1	14.175.950
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	159.357.970	145.182.020	91,1	14.175.950
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	159.357.970	145.182.020	91,1	14.175.950
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	297.768.462	245.341.035	82,39	52.427.427
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	297.768.462	245.341.035	82,39	52.427.427
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	18.100.000	16.700.000	92,27	1.400.000
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	34.937.230	29.830.440	85,38	5.106.790

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)	SELISIH
	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.085.828.144	11.008.057.788	91,08	1.077.770.356
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	51.249.680	29.462.750	57,49	21.786.930
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	193.481.552	169.347.845	87,53	24.133.707

Sumber data Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Dari data pada Tabel 2.2 s.d. 2.4. tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan bidang Pangan, dengan 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 12.085.828.144,- (Dua belas Milyar Delapan puluh Lima Juta Delapan ratus Dua puluh delapan ribu Seratus empat puluh empat rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 11.008.057.788,- (Sebelas Milyar Delapan juta Lima puluh tujuh ribu Tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Sisa anggaran sebesar Rp 1.077.770.356,- (Satu Milyar Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Tiga ratus Lima puluh enam rupiah) dengan uraian berikut :

a. **Belanja Tidak Langsung.** Anggaran sebesar Rp. 9.307.561.199,- (Sembilan Milyar Tiga ratus tujuh juta Lima ratus enam puluh satu ribu Seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dengan Realisasi sebesar Rp. 8.534.282.112,- (Delapan Milyar Lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu serratus dua belas rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 99,26% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh enam) persen dan sisa anggaran sebesar Rp. 773.279.087,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan persentase tidak terealisasi sebesar 0,74%.

b. **Belanja langsung.** Anggaran sebesar sebesar Rp. 2.778.266.945,- (Dua Milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 2.473.775.676,- (Dua Milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 89,04% dan sisa anggaran sebesar Rp. 304.491.269 (Tiga ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan persentase tidak terealisasi sebesar 10,96%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah melaksanakan urusan bidang Pangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Pola Pangan Harapan		87,9	88,1	88,9	89	88,7	89,1	89,10	89,20
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	Presentase Ketersediaan pangan	NA	3055 Kkal/kap/hari	252,80 %	253,56 %	NA	3055 Kkal/kap/hari	366 %	368 %	
Meningkatnya pola pangan yang beragam seimbang dan aman	Tingkat Keamanan konsumsi pangan yang bergizi dan aman	80	80	81,50	82	91,26	91,27	91,27	91,27	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Pola Pangan Harapan”**, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 89,1 % dari target sebesar 88,1% .Skor Pola Pangan Harapan dapat dihitung berdasarkan (%Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali Bobot Masing-masing Kelompok Pangan)

- b. Sasaran “**Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan**” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “**Presentase Ketersediaan Pangan**” telah melebihi dari yang ditargetkan sebesar **252,81 %** terealisasi sebesar **365,54 %**. Presentase Ketersediaan Pangan dapat di hitung berdasarkan “**Jumlah Cadangan Pangan Kota (Ketersediaan Pangan Utama) dibanding Jumlah Kebutuhan Pangan Kota dikali 100%**”.
- c. Sasaran yang kedua yaitu “**Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman**” dengan Indikatornya “**Tingkat Keamanan Pangan**” Indikator inipun juga melebihi dari yang ditargetkan sebesar **80 %** dengan tingkat realisasi sebesar **91,27 %**.

Di samping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang penyelenggaraan urusan Pangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2. 6
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

URAIAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Presentase cadangan pangan masyarakat	NA	252,81%	253,56%	NA	252,81%	253,56%
Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Tingkat Keamanan Pangan	80%	80,50%	81%	91,27%	80,50%	81%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di bidang Pangan menjadi salah satu penyumbang keberhasilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang berbasis keunggulan lokal dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2.6. diatas, dapat diketahui bahwa dari kedua indicator kinerja penyelenggaraan urusan Pangan sampai dengan tahun 2021 terdapat 1 (satu) indicator yang melebihi target yaitu “Tingkat Keamanan Pangan” yang

mana target pada tahun 2021 adalah 80% (delapan puluh) persen, sedangkan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,27 % . Dikarenakan sudah banyak makanan yang beredar telah memenuhi sertifikasi B2SA sehingga makanan yang beredar telah memenuhi standart makanan Sehat dan Aman.

Selain dari indikator di atas, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dengan RPJMD Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program Renja dengan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2021, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%. Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pangan. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Skor Pola Pangan Harapan	88	88,9	89	89,1	89,1	88,9	89	89,1	
2	Presentase Cadangan Pangan Masyarakat	NA	253,56	254,318	255,07	NA	253,56	254,318	255,074	
3	Tingkat Keamanan Pangan	80%	81%	81,50%	82%	91,27%	81%	81,50%	82%	
4	Ketersediaan Energi per kapita(kkal/kapita/ Tahun)	3055	3056	3057	3058	3055	3056	3057	3058	
5	Persentase daerah rentan rawan Pangan	NA	5	4	3	NA	5	4	3	

6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	NA	81	81,5	82	NA	81	81,5	82
---	--	----	----	------	----	----	----	------	----

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang Pangan diantaranya:

- a. Masih Belum Optimalnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Penanganan Rawan Pangan;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. Terbatasnya lahan pertanian sehingga pasokan pangan masih bergantung dari wilayah lain (daerah sekitar) serta belum optimalnya peran Lumbung Pangan;
- d. Belum adanya pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan dan akses pangan masyarakat;
- e. Belum optimalnya penyaluran cadangan pangan ke daerah rawan pangan;
- f. Adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi milenial yang lebih mengutamakan kemudahan dalam konsumsi pangan kurang mempertimbangkan keberagaman dan kualitas pangan;
- g. Masih banyak makanan yang beredar di masyarakat yang belum memenuhi standart keamanan pangan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat / pelaku usaha tentang keamanan pangan yang dikonsumsi maupun yang diproduksi;
- h. Adanya pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah pangan yang mahal.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Permasalahan	Akar masalah
Masih Belum Optimalnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Penanganan Rawan Pangan	Terbatasnya Lahan Pertanian sehingga Pasokan Pangan Masih Bergantung Dari Wilayah Lain (Daerah Sekitar) Serta Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan
	Belum Adanya Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang Dapat Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
	Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	Adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi milenial yang lebih mengutamakan kemudahan dalam konsumsi pangan kurang mempertimbangkan keberagaman dan kualitas pangan
	Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
	Adanya pemahaman dari sebagaiann masyarakat bahwa pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah pangan yang mahal

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:

- Peningkatan Jumlah penduduk membawa konsekuensi sebagai berikut:
 - Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan serta bidang distribusi dan cadangan pangan dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.
 - Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan.
- Diversifikasi konsumsi belum optimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman karena harus selalu mendapat supply produksi bahan pangan. Ancaman ini perlu dirubah menjadi peluang agar dapat tercipta pangan alternatif yang berkualitas. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu
- Masih banyak beredar bahan / produk pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama dalam penggunaan bahan tambahan non pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan (natrium benzoate), penambahan zat pemutih pada beras, bahan pengawet non pangan (formalin, boraks, rhodamine methanil yellow, dll) dan lain-lain memerlukan pengawasan dibidang keamanan makanan segar agar dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan segar

b. Peluang:

- Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;
- Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
- Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai Kader Keamanan Pangan disetiap pasar tradisional di Kota Semarang yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas

Ketahanan Pangan dalam menjaga keamanan pangan di Kota Semarang khususnya di Pasar Tradisional.

- Kelurahan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menyebarkan informasi tentang penganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis:

1. Ketersediaan pangan yang tergantung pada daerah produksi, kadang tidak merata sepanjang tahun karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok. Disisi lain, lahan pertanian memiliki kondisi yang luasnya makin terbatas akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan upaya terpadu untuk pengembangan budidaya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terkini untuk meningkatkan produksi.
2. Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan. Adanya tantangan iklim dan pandemi covid 19 sangat memerlukan peran lumbung pangan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan cadangan makanan.
3. Belum Adanya Jejaring Distribusi Pangan. Belum adanya jejaring distribusi pangan membuat perumusan kebijakan terkait distribusi pangan menjadi sulit. Data mengenai informasi harga, rantai pasok, jaringan distribusi dan sistem logistik daerah yang komprehensif diperlukan untuk merumuskan intervensi yang perlu dilakukan Ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.
4. Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
5. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Konsumsi Masyarakat Terutama Generasi Milenial yang Lebih Mengutamakan Kemudahan dalam Konsumsi Pangan Kurang Mempertimbangkan Keberagaman dan Kualitas Pangan

6. Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
7. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan turunnya ketersediaan, dan keterjangkauannya dan perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait dampak Covid-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah**” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. **Prioritas Daerah 1:** Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. **Prioritas Daerah 2:** Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. **Prioritas Daerah 3:** Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. **Prioritas Daerah 4:** Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. **Prioritas Daerah 5:** Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin

- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan

- 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

- 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian **prioritas kesatu**, yaitu “**Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan**”.

Secara rinci dijabarkan dalam fokus Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:

- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
- 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
- 3) Penguatan ketahanan pangan

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				22.853.861.745	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.119.150.139	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Cakupan wilayah layanan kemandirian Pangan	100 %	275.000.000	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Cakupan wilayah layanan kemandirian Pangan	100 %	286.932.432	
2.09.02.2.01	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	275.000.000	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	286.932.432	-
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	50.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	214.591.908	-
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan	6 laporan	75.000.000	Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi	6 laporan	17.244.164	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Infrastruktur Logistik	g	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalur Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Jumlah Rencana dan Peta Jalur Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalur Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Jumlah Rencana dan Peta Jalur Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 dokumen	55.096.360	-
2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Semarang	Ketersediaan energi Kapita	3057 /kkal/kapita/tahun	8.812.000.000	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Semarang	Ketersediaan energi Kapita	3057 /kkal/kapita/tahun	2.704.743.880	-
			Presentase Cakupan Distribusi	100 %				Presentase Cakupan Distribusi	100 %		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi	100 %				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Seimbang					Bergizi Seimbang			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Semarang	Presentase tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 %	1.248.000.000	Penyediaan dan penyaluran pangan atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Semarang	Presentase tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 %	679.041.520	-
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24 laporan	80.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24 laporan	57.888.255	-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15 laporan	300.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15 laporan	94.462.968	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	13 laporan	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	13 laporan	9.591.808	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Pangan Lainnya		Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			dan Pangan Lainnya		Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	72 laporan	320.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	72 dokumen	218.062.995	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	21 unit	358.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	21 unit	255.889.372	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tanam Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tanam Indonesia yang Dikembangkan	25 unit	90.000.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tanam Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tanam Indonesia yang Dikembangkan	25 unit	43.146.122	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100 %	1.114.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100 %	1.063.602.360	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 kegiatan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 laporan	11.584.180	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 ton	975.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 ton	929.500.000	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 ton	114.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 ton	122.518.180	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88 %	6.450.000.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88 %	962.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	33 dokumen	150.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	33 dokumen	146.400.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53 laporan	1.300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53 laporan	543.100.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 laporan	5.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 laporan	272.600.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah	4 %	450.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4 %	109.195.275	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Rentan Rawar Pangan								
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	200.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	90.490.866	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4 dokumen	200.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 dokumen	90.490.866	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	250.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	18.704.409	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	18.704.409	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar	81.50 %	902.150.000	PROGRAM PENGAWASA	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar	81.50 %	675.248.970	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KEAMANAN PANGAN	ng	Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			N KEAMANAN PANGAN		Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %	902.150.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %	675.248.970	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 dokumen	150.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 dokumen	101.950.000	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 sertifikat	85.000.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 sertifikat	63.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.05.2.0 1.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	85.250.000	
2.09.05.2.0 1.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	30.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	10.000.000	
2.09.05.2.0 1.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	607.150.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	401.038.970	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.414.711.745	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	9.343.029.582	
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	10.710.815	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	12.042.170	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	2.234.770	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.516.536	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.785.849	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.549.899	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1.785.849	Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan	1 dokumen	1.470.410	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Perubahan DPA-SKPD		Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.572.682	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.925.760	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	9.087.704.548	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	6.997.096.569	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	8.796.931.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	6.768.820.139	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	284.790.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	223.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.196.710	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	924.510	
2.09.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	3.590.128	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	2.773.530	
2.09.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2 dokumen	1.196.710	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	1.078.390	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Realisasi Anggaran		Realisasi Anggaran			Realisasi Anggaran					
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	871.964.456	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	1.127.511.699	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 paket	6.874.349	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 paket	6.868.565	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.282.562	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	238.331.655	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	92.979.957	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	57.338.240	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 paket	44.163.028	Penyediaan Bahan	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 paket	45.227.891	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kantor yang Disediakan			Logistik Kantor		Disediakan			
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	26.819.018	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	44.764.981	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6.270.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.700.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	95.422.370	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	303.814.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	229.575.542	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	330.043.997	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.420.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.420.000.000	
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1.420.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100 %	350.563.789	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100 %	708.677.154	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.188.269	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	120.171.154	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	218.375.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	588.506.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	673.768.137	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	497.701.990	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 unit	39.949.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 unit	36.318.180	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	367.363.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	303.945.320	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	46.454.639	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	59.558.690	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 unit	220.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 unit	97.879.800	

Berdasarkan tabel 2.7. di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.853.861.745,- akan tetapi yang disetujui sebesar Rp. 13.119.150.139,-
2. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 memiliki 5 (Lima) program antara lain :
 - a. **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**
 - b. **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
 - c. **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**
 - d. **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**
 - e. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan *Penyelenggaraan pelatihan pengolahan pangan yang terakomodir dalam program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat* dengan sub kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* dan kegiatan *Edukasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman bagi anak usia dini yang terakomodir dalam program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat* dengan Sub kegiatan *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Ketahanan Pangan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.0

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 yang ada di Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Patemon RT 02 RW 01	Pelatihan pengembangan produk	1 kegiatan	di akomodir pada Kegiatan 2 09 03 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Balai Kelurahan Bendar Ngisor RT 0 / RW 0	Pelatihan membuat aneka kue Lebaran	1 kegiatan	di akomodir pada Kegiatan 2 09 03 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Balai Kelurahan Bendungan RT 1 RW 5	Bazar Ramadhan	1 kegiatan	di akomodir pada kegiatan 2.09.03.2.01.05 Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl.Sendangguwo No.56 RT 13 rw 02	Ray: Sosialisasi budidaya pangar	40 orang	di akomodir pada Kegiatan 2 09 03 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

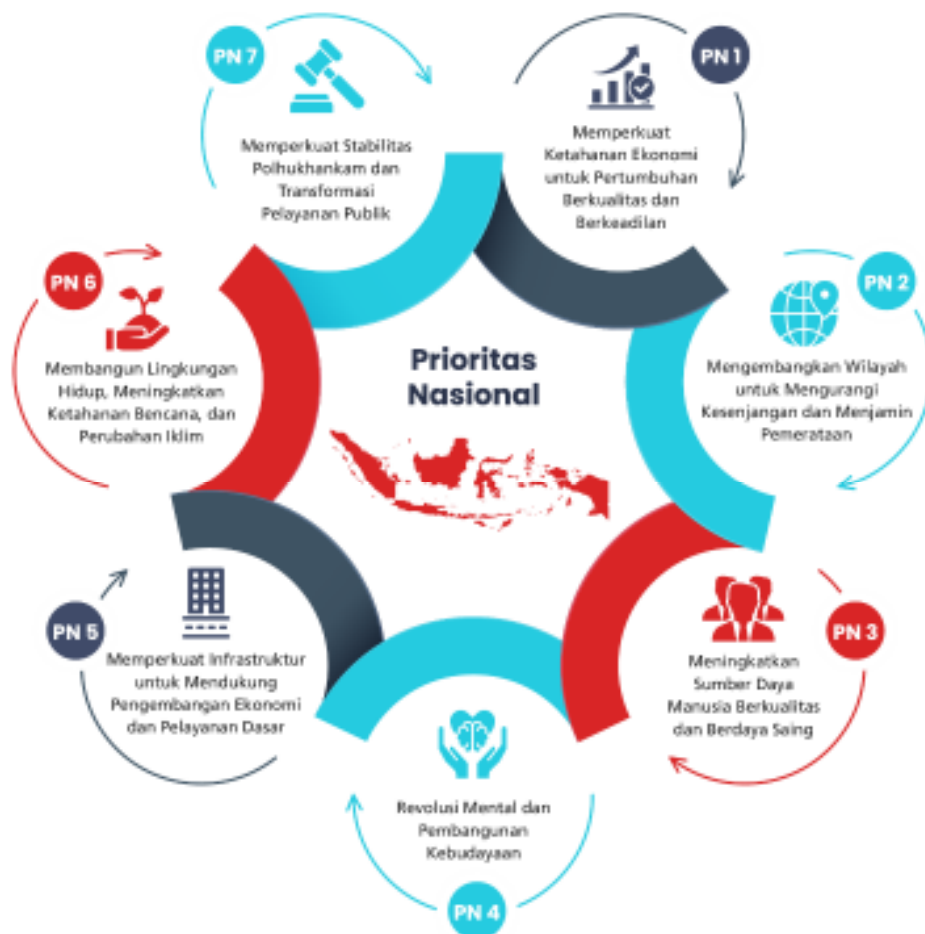
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan

- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKPD Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri,

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjaminkeselaras dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu “Meningkatkan ketahan pangan daerah”, dengan indikator tujuan “Skor Pola Pangan Harapan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu :

- “Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan”, dengan indikator sasaran “Presentase cadangan pangan masyarakat”
- “Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman” dengan indikator sasaran “Tingkat Keamanan Pangan”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Tahun 2023**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,9
SASARAN : 1. Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Presentase cadangan pangan 253 Masyarakat	%	253,563
2. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Tingkat keamanan pangan	%	81

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Mempelajari RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan bertugas menkoordinasikan pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (2 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan ketahanan pangan daerah”** dan indikator sasaran **“Presentase cadangan pangan masyarakat”**serta **“Tingkat Keamanan Pangan”**
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.119.150.139,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 9.343.029.582,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 3.776.120.557,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.119.150.139				15.271.507.000
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan		100 %	286.932.432			100 %	993.128.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Kota Semarang	1 unit	286.932.432	APBD Kota Semarang		1 unit	993.128.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kota Semarang	1 unit	214.591.908	APBD Kota Semarang	1 unit	993.128.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	Kota Semarang	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	2.704.743.880	APBD Kota Semarang	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	2.216.649.000	
		Presentase Cakupan Distribusi	Kota Semarang	100 %					
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kota Semarang	100 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kota Semarang	100 %	679.041.520	APBD Kota Semarang	-	100 %	433.400.000
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	24 laporan	57.888.255	APBD Kota Semarang	-	24 laporan	80.000.000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kota Semarang	15 laporan	94.462.968	APBD Kota Semarang	-	15 laporan	48.000.000
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	13 laporan	9.591.808	APBD Kota Semarang	-	13 laporan	15.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	72 dokumen	218.062.995	APBD Kota Semarang		72 dokumen	165.400.000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kota Semarang	21 unit	255.889.372	APBD Kota Semarang		21 unit	95.000.000
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tanam Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tanam Indonesia yang Dikembangkan	Kota Semarang	25 unit	43.146.122	APBD Kota Semarang		25 unit	30.000.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	Kota Semarang	100 %	1.063.602.360	APBD Kota Semarang		100 %	1.070.749.000
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 laporan	11.584.180	APBD Kota Semarang		4 laporan	20.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.0 2.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	11 ton	929.500.000	APBD Kota Semarang	-	11 ton	862.349.000
2.09.03.2.0 2.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kota Semarang	15 ton	122.518.180	APBD Kota Semarang	-	15 ton	188.400.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	Kota Semarang	88 %	962.100.000	APBD Kota Semarang	-	88 %	712.500.000
2.09.03.2.0 4.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	33 dokumen	146.400.000	APBD Kota Semarang	-	33 dokumen	75.000.000
2.09.03.2.0 4.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	53 laporan	543.100.000	APBD Kota Semarang	-	53 laporan	525.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	1 laporan	272.600.000	APBD Kota Semarang	1 laporan	112.500.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Kota Semarang	4 %	109.195.275	APBD Kota Semarang	4 %	293.750.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan Ketahanan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	2 buku	90.490.866	APBD Kota Semarang	2 buku	266.500.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kota Semarang	2 dokumen	90.490.866	APBD Kota Semarang	2 dokumen	266.500.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kota Semarang	2 kelurahan	18.704.409	APBD Kota Semarang	2 kelurahan	27.250.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 laporan	18.704.409	APBD Kota Semarang		12 laporan	27.250.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Semarang	81.50 %	675.248.970	APBD Kota Semarang		81.50 %	935.806.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kota Semarang	100 %	675.248.970	APBD Kota Semarang		100 %	935.806.000
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Semarang	4 dokumen	101.950.000	APBD Kota Semarang		4 dokumen	150.000.000
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 sertifikat	63.300.000	APBD Kota Semarang		100 sertifikat	85.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 dokumen	23.710.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	30.000.000
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 dokumen	85.250.000	APBD Kota Semarang		12 dokumen	30.000.000
2.09.05.2.01.05	Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 dokumen	401.038.970	APBD Kota Semarang		4 dokumen	640.806.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100 %	9.343.029.582	APBD Kota Semarang		100 %	10.832.174.000
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Semarang	100 %				100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100 %				100 %	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	Kota Semarang	8 dokumen	12.042.170	APBD Kota Semarang		8 dokumen	17.943.000
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	2.234.770	APBD Kota Semarang		3 dokumen	7.500.000
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.470.410	APBD Kota Semarang		1 dokumen	2.015.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.470.410	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.015.000
2.09.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.470.410	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.936.000
2.09.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kota Semarang	1 dokumen	1.470.410	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.815.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Perubahan DPA SKPD							
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 laporan	3.925.760	APBD Kota Semarang		3 laporan	2.662.000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dokumen	6.997.096.569	APBD Kota Semarang		4 dokumen	9.511.531.000
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	44 orang/bulan	6.768.820.139	APBD Kota Semarang		44 orang/bulan	9.236.778.000
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	6 dokumen	223.500.000	APBD Kota Semarang		6 dokumen	267.856.000
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Kota Semarang	1 laporan	924.510	APBD Kota Semarang		1 laporan	2.299.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	7 laporan	2.773.530	APBD Kota Semarang		7 laporan	2.299.000
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	2 dokumen	1.078.390	APBD Kota Semarang		2 dokumen	2.299.000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya	Kota Semarang	100 %	1.127.511.699	APBD Kota Semarang		100 %	398.900.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kebutuhan Rumah Tangga SKPD				ng			
2.09.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	30 paket	6.868.565	APBD Kota Semarang		30 paket 3.500.000	
2.09.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	5 paket	238.331.655	APBD Kota Semarang		5 paket 8.500.000	
2.09.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	4 paket	57.338.240	APBD Kota Semarang		4 paket 30.000.000	
2.09.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Kota Semarang	1 paket	45.227.891	APBD Kota Semarang		1 paket 30.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kantor yang Disediakan							
2.09.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	4 paket	44.764.981	APBD Kota Semarang		4 paket	8.000.000
2.09.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	1 dokumen	5.700.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	5.700.000
2.09.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	95.422.370	APBD Kota Semarang		12 laporan	33.200.000
2.09.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	303.814.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	80.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 dokumen	330.043.997	APBD Kota Semarang		5 dokumen	200.000.000
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	0	0	APBD Kota Semarang		0	0
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	Kota Semarang	100 %	708.677.154	APBD Kota Semarang		100 %	384.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	120.171.154	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	148.000.000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	588.506.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	236.000.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	100 %	497.701.990	APBD Kota Semarang	-	100 %	519.800.000
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kota Semarang	1 unit	36.318.180	APBD Kota Semarang	-	1 unit	40.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dibayarkan Pajaknya							
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	24 unit	303.945.320	APBD Kota Semarang		24 unit	427.800.000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	5 unit	59.558.690	APBD Kota Semarang		5 unit	25.000.000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 unit	97.879.800	APBD Kota Semarang		1 unit	27.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Ketahanan Pangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja;
3. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

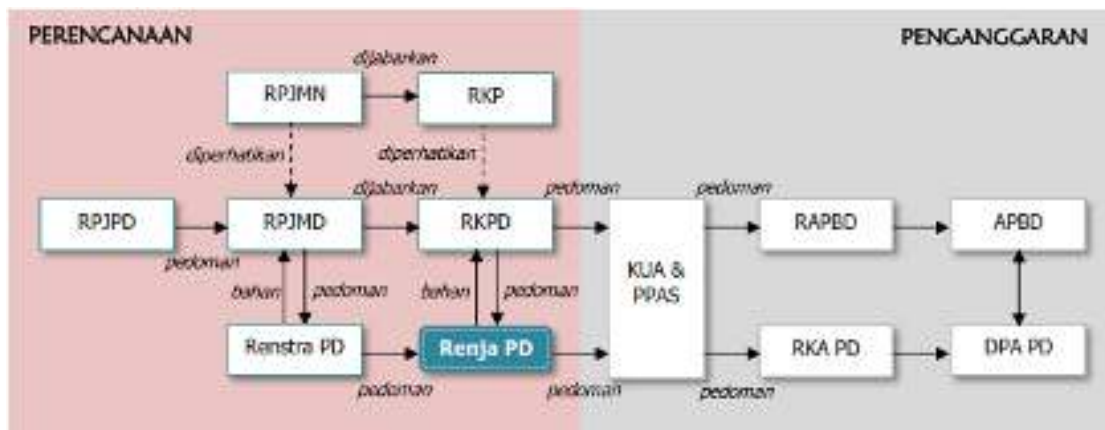
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang (FP-PUG) Kota Semarang;
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 151.233.658.334. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.730.251.034 atau sebesar 96,41%. Adapun rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Belanja Tidak Langsung	16.870.286.889	16.030.518.742	95,02
2.	Belanja Langsung	117.290.748.445	113.170.770.556	96,49
Jumlah Belanja Daerah		134.161.035.334	129.201.289.298	96,00

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00	9 dokumen	27 dokumen	90,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	5 dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Renstra DLH	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	0 dokumen	1 dokumen	100,00
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan kinerja DLH	15 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	12 dokumen	80,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DLH	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran DLH	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	100,00 % (60,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	175 jenis	54 jenis	55 jenis	59 jenis	100,00	62 jenis	175 jenis	100,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)	30 jenis	10 jenis	9 jenis	11 jenis	100,00	6 jenis	27 jenis	90,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (DLH)	45 jenis	21 jenis	9 jenis	9 jenis	100,00	9 jenis	39 jenis	86,67
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	10 jenis	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	45 buku	13 buku	9 buku	9 buku	100,00	9 buku	31 buku	68,89
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan & minuman rapat serta jamuan tamu	100,00 %	100,00 % (60,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 jenis	-	-	-	-	4 jenis	4 jenis	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		komunikasi, sumber daya air dan listrik								
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang	100,00	44 orang	100,00 %	100,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 %	100,00 % (60,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	103 buah	55 buah	15 buah	15 buah	100,00	15 buah	85 buah	82,52

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1068 unit	350 unit	350 unit	350 unit	100,00	200 unit	900 unit	84,27
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 jenis	3 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	2 jenis	10 jenis	100,00
2.11.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Lingkungan Hidup (RPPLH)								
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	4 dokumen	80,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DIKPLHD	5 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	4 dokumen	80,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	97,66
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66 %	50,00 %	55,00 %	55,00%	100,00	57,00	57,00 %	86,36

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93,00 %	80,00 %	82,00 %	82,00 %	100,00	82,00 %	82,00 %	88,17
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	25 Ha	5 Ha		5 Ha	100,00	10 Ha	20 Ha	80,00
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	2,00 %	-	-	-	-	2,00 %	2,00 %	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00 %	100,00 % (30,33 %)	100,00 %	100,00 % (33,33%)	100,00	100,00 %	100,00 % (50,00 %)	97,66

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00
		Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan	1000 buah	400 buah	200 buah	200 buah	100,00	216 buah	816 buah	81,60
		Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100,00	200 orang	200 orang	100,00
		Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100,00	200 orang	200 orang	100,00
		Jumlah IPAL usaha skala kecil yang terbangun	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	2 unit	4 unit	100,00
		Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
		Jumlah dokumen daya dukung dan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		daya tampung lingkungan hidup								
		Jumlah edisi buletin green yang tersusun	6 edisi	6 edisi	6 edisi	6 edisi	100,00	6 edisi	100,00	100,00
		Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	100,00 %	100,00 % (33,33 %)	100,00 %	100,00 % (33,33%)	100,00	100,00 %	100,00 % (34,00 %)	100,00
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi lomba toilet bersih	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	50 orang	100,00
		Jumlah pusat studi lingkungan DLH terbangun	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100,00
		Jumlah dokumen IKLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan	100,00	150 perusahaan	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	5 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	1 kegiatan	5 kegiatan	100,00
		Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	100,00	8 kali	100,00	100,00
		Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100,00	25 kali	100,00	100,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	60,00 %	35,00 %	45,00 %	45,00 5	100,00	55,00 %	55,00 %	91,67
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah perwal kelas mutu air yang ditetapkan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri	100 industri	100 industri	100 industri	100,00	100 industri	100,00	100,00
		Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik	60 titik	60 titik	60 titik	100,00	60 titik	100,00	100,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	4 dokumen	80,00
		Jumlah dokumen pemantauan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00
		evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	15 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100,00	5 lokasi	15 lokasi	100,00
		Jumlah kampung iklim yang terbangun	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah peserta sosialisasi mitigasi adaptasi perubahan iklim	3000 batang	750 batang	810 batang	810 batang	100,00	1000 batang	2560 batang	85,33
		Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklam	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
		Jumlah dokumen DED Rainwater harvesting (RWH)	15 unit	5 unit	3 unit	3 unit	100,00	7 unit	15 unit	100,00
		Pengadaan Rain Water Harvesting	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	5 dokumen	100,00
		Jumlah dokumen DED sumur resapan	35 unit	17 unit	8 unit	8 unit	100,00	10 unit	35 unit	100,00
		Pembangunan sumur resapan								
		Pelubangan biopori dan pengadaan penutup biopori	7500 lubang	2500 lubang	2000 lubang	2000 lubang	100,00	2000 lubang	6500 lubang	86,67
		Jumlah alat bor biopori yang terbeli	600 buah	250 buah	150 buah	150 buah	100,00	100 buah	500 buah	83,33
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Daerah Mitigasi Perubahan Iklim								
		Pengadaan Solar Sel Untuk Mendukung Kegiatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	25 set	-	-	-	-	17 set	17 set	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	110 jenis	29 jenis	24 jenis	24 jenis	100,00	25 jenis	102 jenis	92,72
		Jumlah peserta pendampingan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100,00	14 orang	100,00	100,00
		Jumlah titik pemantauan udara ambien	3 titik	3 titik	3 titik	3 titik	100,00	3 titik	100,00	100,00
		Jumlah monitoring kualitas air sungai	120 titik	120 titik	60 titik	60 titik	100,00	120 titik	100,00	100,00
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan	100,00	1500 kendaraan	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	60 Ha	5 Ha	40 Ha	40 Ha	100,00	50 Ha	50 Ha	83,33
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	3 unit	75,00
		Pemeliharaan daerah rehabilitasi	100,00 %	100,00 % (33,33 %)	100,00 %	100,00 % (33,33%)	100,00	100,00 %	100,00 % (34,00 %)	100,00
		Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	1000 batang	1000 batang	1000 batang	1000 batang	100,00	1000 batang	100,00	100,00
		Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	3 kegiatan	5 kegiatan	100,00
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamannya yati (kehati) di Kota Semarang	100,00 %	100,00 % (33,33 %)	100,00 %	100,00 % (33,33%)	100,00	100,00 %	100,00 % (34,00 %)	100,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana	100,00 %	100,00 % (33,33 %)	100,00 %	100,00 % (33,33%)	100,00	100,00 %	100,00 % (34,00 %)	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		keanekaragaman hayati yang tersedia								
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan FS	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00
		Penyusunan DED Sarpras kehati	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehati	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100,00	5 lokasi	100,00	100,00
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan instalasi air	2 unit	-	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	2 unit	100,00
		Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	3 unit	75,00
		Sarana dan Prasarana Taman Keanekatragaman hayati	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	3 unit	75,00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau	60,00 %	45,00 %	50,00%	50,00%	100,00	54,00%	54,00 %	90,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3								
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	50,00 perusahaan	100,00	50,00 perusahaan	100,00	100,00
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	100,00	100,00
		Penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran B3 dan Limbah B3	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	55,00 perusahaan	55,00 perusahaan	55,00 perusahaan	55,00 perusahaan	100,00	55,00 perusahaan	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah sarana prasarana yang terkelola	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	0,00
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah sarana prasarana yang terkelola	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	0,00
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan,	100,00 %	80,00 %	85,00 %	85,00 %	100,00	85,20 %	85, 20 %	85,20

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota								
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	100,00	100,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	180,00 perusahaan	180,00 perusahaan	180,00 perusahaan	180,00 perusahaa n	100,00	180,00 perusahaa n	100,00	100,00
		Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak	32 titik	32 titik	32 titik	32 titik	100,00	32 titik	100,00	100,00
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan	100,00 %	100,00 % (33,33 %)	100,00 %	100,00 % (33,33%)	100,00	100,00 %	100,00 % (34,00 %)	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	perundang-undangan								
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	100,00	120 buah	100,00	100,00
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100,00	100 orang	100,00	100,00
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun dokumen lingkungan	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100,00	80 orang	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50,00 %	45,00 %	46,00 %	46,00 %	100,00	48,00 %	48,00 %	96,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	100,00	100,00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100,00	100 orang	100,00	100,00
		Jumlah peserta peringatan HPSN	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100,00	500 orang	100,00	100,00
		Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100,00	100 orang	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100,00	100 orang	100,00	100,00
		Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100,00	150 orang	100,00	100,00
		Pemberdayaan bank sampah wilayah	135 unit	112 unit	116 unit	116 unit	100,00	135 unit	135 unit	100,00
		Jumlah Peserta Pendampingan TPST/TPS3R	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100,00	60 orang	100,00	100,00
		Studi Orientasi Bank Sampah	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Alat peraga pilah sampah dari rumah yang terbeli	1000 buah	-	-	-	-	800 buah	800 buah	100,00
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah bidang lingkungan hidup	20,00 sekolah	20,00 sekolah	20,00 sekolah	20,00 sekolah	100,00	20,00 sekolah	20,00 sekolah	100,00
		Jumlah penyelenggaraan	1,00 kali	1,00 kali	1,00 kali	1,00 kali	100,00	1 kali	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Perti Saka Kalpataru								
		Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1,00 kali	1,00 kali	1,00 kali	1,00 kali	100,00	1 kali	100,00	100,00
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00	10,00 %	100,00	100,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	100,00	100,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	100,00	50 sekolah	100,00	100,00
		Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	100,00	350 orang	100,00	100,00
		Jumlah tempat pilah yang tersedia	130 unit	-	-	-	-	-	45 unit	45 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus	100,00	60 kasus	100,00	100,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus	100,00	60 kasus	100,00	100,00
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100,00	250 orang	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan									
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100,00	250 orang	100,00	100,00
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	90,00 %	89,00 %	90,00 %	90,00 %	100,00	90,50 %	90,50 %	100,55
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	32,00 %	22,00 %	24,00%	24,00 %	100,00	26,00 %	26,00 %	81,25
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69,00 %	75,00 %	74,00 %	74,00 %	100,00	73,00 %	73,00 %	105,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Jakstrada yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	100,00	100,00
		Sosialisasi Pengisian data jakstrada	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100,00	150 orang	100,00	100,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Pembangunan site development BSI DLH	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	0,00
		Jumlah alat pengolah sampah yang terbeli	5 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	-	-	-
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan	Kebersihan di Kota Semarang yang terpelihara	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	16 kecamatan	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perda dan perwal tentang pengelolaan persampahan dikota semarang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100,00	200 orang	100,00	100,00
2.11.11.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah alat kebersihan pengelolaan persampahan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	100,00	100,00
		Pengadaan dump truk	3 unit	-	3 unit	3 unit	100,00	-	3 unit	100,00
		Pengadaan alat berat excavator	2 unit	-	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	2 unit	100,00
		Pengadaan Truk Armroll	6 unit	-	2 unit	2 unit	100,00	4 unit	6 unit	100,00
		Pengadaan Road Sweeper	2 unit	-	2 unit	2 unit	100,00	-	2 unit	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Pengadaan Kontainer sampah tertutup 6 m ²	50 unit	-	8 unit	8 unit	100,00	47 unit	155 unit	110,00
		Pengadaan kendaraan operasional	10 unit	-	8 unit	8 unit	100,00	1 unit	9 unit	90,00
		Pengadaan mesin pencacah	4 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100,00	1 unit	4 unit	100,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Pungutan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD yang tercapai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	100,00	100,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TPA Jatibarang	100,00 %	100,00 % (20,00)	100,00	100,00 % (40,00)	100,00	100,00 %	100,00 % (40,00)	100,00
		Pemeliharaan TPS diwilayah Kota Semarang	100,00 %	100,00 % (20,00)	100,00	100,00 % (40,00)	100,00	100,00 %	100,00 % (40,00)	100,00
		Jumlah kajian lingkungan pengelolaan sampah	6 kajian	1 kajian	2 kajian	2 kajian	100,00	3 kajian	6 kajian	100,00
		Jumlah pemeliharaan	100,00 %	100,00 % (20,00)	100,00	100,00 % (40,00)	100,00	100,00 %	100,00 % (40,00)	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		sarpras pengelolaan persampahan di TPA yang tersedia								
		Jumlah appraisal pengadaan lahan TPA yang tersedia	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	0,00
		Jumlah Talud Jalan Akses Operasional TPA yang terbangun	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	0,00
		DED Pembangunan TPST	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	0,00
		DED Peningkatan rumah kompos	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0,00
		Pengadaan kontainer	25 unit	18 unit	-	-	-	6 uni	24 unit	96,00

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang telah dilaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja program tersebut semua telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
 - c) Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target yang telah di tetapkan.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah dilaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja program, terdapat 1 (satu) indikator yang diperkirakan mampu melampaui target, 8 (delapan) indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 8 (delapan) indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 15 (lima belas) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 4 (empat) indikator masih dalam proses.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Semarang Tahun 2021

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		134.161.035.334	129.201.289.298	96,00	4.959.746.036
Belanja Tidak Langsung		16.870.286.889	16.030.518.74	95,02	617.535.820
Belanja Pegawai		16.870.286.889	16.030.518.74	95,02	617.535.820
1	Gaji dan Tunjangan	7.136.240.418	6.890.169.74	96,55	246.070.676
2	Tambahan Penghasilan PNS	9.734.046.471	9.140.349.00	93,90	593.697.471
Belanja Langsung		117.290.748.445	113.170.770.55	96,49	4.119.977.889
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.639.571.816	20.365.158.30	94,11	1.274.413.516
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.122.022	57.878.55	73,15	21.243.472
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.343.940	1.165.80	8,13	13.178.140
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	848.250		0	848.250
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	848.250		0	848.250
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	848.250		0	848.250
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	848.870		0	848.870
f.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.384.462	56.712.75	92,39	4.671.712
2.	Administrasi Keuangan Daerah	1.878.605.667	1.640.930.76	87,35	237.674.907
a.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	477.062.220	353.346.00	74,07	123.716.220
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.395.226.360	1.282.438.26	91,92	112.788.100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun SKPD	1.694.199	1.441.00	85,05	253.199
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.937.693	1.511.00	77,98	426.693
e.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.685.195	2.194.50	81,73	490.695
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.565.322	707.681.73	63,78	401.883.589
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.899.975	29.117.00	63,44	16.782.975
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.390.510	82.629.14	77,67	23.761.368
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.833.927	133.356.12	96,75	4.477.806
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.045.300	14.862.32	32,28	31.182.980
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.454.480		0	2.454.480
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.388.000	68.482.50	85,19	11.905.500
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	526.474.000	226.320.40	42,99	300.153.600

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	164.079.130	152.914.25	93,20	11.164.880
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	797.571.102	577.921.27	72,46	219.649.826
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.882.352	427.316.57	67,73	203.565.780
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.688.750	150.604.70	90,35	16.084.046
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.774.707.703	17.380.745.98	97,78	393.961.722
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.909.524.341	16.612.175.79	98,24	297.348.547
b.	Pemeliharaan Mebel	1.320.000	0	0	1.320.000
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.349.180	194.114.18	68,03	91.234.993
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	578.514.182	574.456.00	99,30	4.058.182
B	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	358.742.285	277.983.69	77,49	80.758.594
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	358.742.285	277.983.69	77,49	80.758.594
a.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	130.404.636	102.960.11	78,95	27.444.521
b.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	228.337.649	175.023.57	76,65	53.314.073
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.674.301.954	4.870.669.79	85,84	717.571.909
1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4.657.836.655	3.940.264.74	84,59	717.571.909
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2.959.986.166	2.304.301.18	77,85	655.684.979
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	817.129.571	787.379.07	96,36	29.750.493
c.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	880.720.918	848.584.48	96,35	32.136.437
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	553.388.822	513.137.35	92,73	40.251.470
a.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	553.388.822	513.137.35	92,73	40.251.470

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	463.076.477	417.267.70	90,11	45.808.777
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	463.076.477	417.267.70	90,11	45.808.777
D	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	790.940.082	683.272.92	86,39	107.667.157
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	790.940.082	683.272.92	86,39	107.667.154
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	169.919.990	132.746.47	78,12	37.173.514
b.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	294.667.463	240.505.60	81,62	54.161.861
c.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	326.352.629	310.020.85	95,00	16.331.779
E	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	203.722.169	164.292.85	80,65	39.429.317
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	203.722.169	164.292.85	80,65	39.429.317
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	177.710.924	159.722.85	89,88	17.988.072
b.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	26.011.245	4.570.00	17,57	21.441.245
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	561.076.175	465.320.28	82,93	95.755.888
1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	561.076.175	465.320.28	82,93	95.755.888
a.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	283.213.476	253.668.91	89,57	29.544.566
b.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	277.862.699	211.651.37	76,17	66.211.322
G	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	856.010.769	758.925.78	88,66	97.084.985
1	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	856.010.769	758.925.78	88,66	97.084.985

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	595.073.464	529.541.31	88,99	65.532.147
b.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	260.937.305	229.384.46	87,91	31.552.838
H	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	496.220.949	464.740.80	93,66	31.480.141
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	496.220.949	464.740.80	93,66	31.480.141
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	496.220.949	464.740.80	93,66	31.480.141
I	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	107.658.746	90.053.90	83,65	17.604.840
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.658.746	90.053.90	83,65	17.604.840
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota	107.658.746	90.053.90	83,65	17.604.840
J	Program Pengelolaan Persampahan	85.037.552.900	83.797.442.24	98,54	1.240.110.653
1	Pengelolaan Sampah	85.037.552.900	83.797.442.24	98,54	1.240.110.653
a.	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	26.458.907	15.392.68	58,18	11.066.222
b.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	505.363.876	457.114.74	90,45	48.249.136
c.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	64.446.090.065	63.625.458.03	98,73	820.632.032
d.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	167.163.870	62.772.50	37,55	104.391.370
e.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	9.513.785.045	9.469.365.68	99,53	44.419.356
f.	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	904.954.760	828.386.97	91,54	76.567.782
g.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.473.736.377	9.338.951.62	98,58	134.784.755

Sumber : DLH Kota Semarang, 2019

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebesar Rp 134.161.035.334. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 129.201.289.298 (96,30) dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.959.746.036 (3,69%) dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp.16.870.286.889, realisasi Rp. 16.030.518.74 (95,02 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 617.535.820 (3,66 %)
- b. **Belanja langsung** anggaran sebesar Rp. 117.290.748.445 dengan realisasi sebesar Rp. 113.170.770.55 (96,49 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.119.977.889 (3,51%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pelayanan di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Semarang Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Proyeksi	
		IKK	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	√	53,00	55,00	66,84	67,01	66,05	59,60	66,84	67,01
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	√	49,20	49,98	52,33	52,43	50,44	50,00	53,00	52,43
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	√	66,80	68,20	95,40	95,60	95,20	75,00	95,40	95,60
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	√	55	56	57	58	55,90	57,58	57	58
	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim	-	80,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	-	89,50	90,00	90,50	91,00	89,50	90,00	90,50	91,00
	Rasio pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-	2,54	2,55	2,56	2,57	2,88	2,94	2,56	2,57

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan “Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “indeks kualitas lingkungan hidup”, mampu melebihi target yang telah ditetapkan, dimana realisasinya sebesar 59,60 indeks dari target sebesar 55,00 indeks dengan capaian 108,36 %.
- b) Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ” memiliki 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator “Indeks Kualitas Air (IKA)” mampu melebihi target yang telah ditetapkan, dimana realisasi sebesar 50,00 indeks dari target sebesar 49,98 indeks (capaian sebesar 100,04 %).
2. Indikator “Indeks Kualitas Udara (IKU)” mampu melebihi target yang telah ditetapkan, dimana realisasi sebesar 75,00 indeks dari target sebesar 68,20 indeks (capaian sebesar 109,97 %).
3. Indikator “Indeks Kualitas Tutupan Lahan” mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi sebesar 57,58 indeks dari target sebesar 57 indeks (capaian sebesar 101,02 %).
4. Indikator “Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani” mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 %.
5. Indikator “Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL” mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
6. Indikator “Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim” berhasil mencapai target, dimana realisasi sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 %.
7. Indikator “Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA” berhasil mencapai target, dimana realisasi sebesar 90,00 % dari target sebesar 90,00 %.
8. Indikator “Rasio pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk” berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, dimana dimana realisasi sebesar 2,94 rasio dari target sebesar 2,55 rasio (capaian sebesar 115, 29%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan juga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Layanan Perizinan Lingkungan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Jumlah dan Jenis Izin Lingkungan	Jumlah dokumen yang diterbitkan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	AMDAL/DELH	10	6	17	7	8	13
2.	UKL/UPL dan DPLH	179	200	195	167	184	119
3.	SPPL	252	Sudah menjadi kewenangan DPMTSP Kota Semarang				

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2021

Perijinan AMDAL maupun UKL-UPL diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mengajukan dokumen kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk selanjutnya di tindak lanjuti dan dikeluarkan perijinannya. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan data yang ada untuk perijinan UKL-UPL mengalami penurunan dimana jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 119 sedangkan untuk perijinan AMDAL/DELH yang telah diterbitkan sebanyak 13.

Tabel 2.5
Perijinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah izin yang diterbitkan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	50	55	60	65	70	33
2.	Izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3	57	39	61	70	50	41

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2021

Tabel 2.6
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Pengaduan Kasus / Sengketa Lingkungan	Kasus yang ditindaklanjuti					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah mediasi sengketa lingkungan	6	54	31	14	4	10
2.	Jumlah kasus lingkungan yang masuk	50	62	54	51	53	53
3.	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	50	62	54	51	53	53

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2021

Data diatas menunjukkan bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan setiap tahunnya mampu terselesaikan dengan baik tercatat hingga tahun 2021 berhasil mencapai target sebesar 100 %. Diperoleh data untuk jumlah mediasi sengketa lingkungan yang terselesaikan sebanyak 10 kasus, jumlah kasus lingkungan yang masuk untuk ditindaklanjuti sebanyak 53 kasus, dimana setiap kasus yang masuk mampu ditindaklanjuti atau ditangani dengan baik sebanyak 53 kasus. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kerjasama, koordinasi dan komitmen bersama dengan berbagai pihak terkait.

Tabel 2.7
Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Pelayanan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sampel yang dilakukan pengujian	1.809	1.911	2.004	2.032	2.161	2.247

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2021

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak hanya melayani pengujian sampel saja namun juga melakukan pemantauan kualitas air sungai dan udara. Dalam upaya menekan pencemaran udara yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang salah satunya melalui uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya, tercatat sampai dengan tahun 2021 mampu mencapai 2.247 sampel.

Tabel 2.8
Hasil Pengujian Emisi Kendaraan
Sampai Dengan Tahun 2021

Tahun	Bensin (unit)		Solar (unit)		Total (unit)		Jumlah kendaraan yang diuji (unit)
	Lolos Uji	Tidak Lolos uji	Lolos Uji	Tidak Lolos uji	Lolos Uji	Tidak Lolos uji	
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-
2018	1.533	144	207	254	1.740	398	2.138
2019	1.497	150	193	225	1.690	375	2.065
2020	1.497	602	Tidak dilakukan pengujian		1.497	602	2.099
2021	1.584	51	243	174	1.635	417	2.052

Sumber : DLH Kota Semarang, 2016-2021

Keterangan : (-) Data belum diserahkan kepada DLH masih berada di DLHK Provinsi

Tabel 2.9
Pelayanan Pembinaan Sekolah Adiwiyata
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sekolah yang dibina	40	40	45	45	50	50
2.	Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	6	5	2	4	3	3

Sumber : DLH Kota Semarang, 2016-2021

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya mampu membina sekolah adiwiyata di Kota Semarang hingga sekolah yang terpilih mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata baik tingkat kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan hingga tahun 2021 tercapai 15,00 %, hal tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase 10,00 % di karenakan terkendala adanya COVID.

Tabel 2.10
Cakupan Skala Pelayanan Penanganan Sampah
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00

Sumber : DLH Kota Semarang, 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah berhasil meningkatkan cakupan skala pelayanan penanganan sampah di Kota Semarang dengan cakupan pelayanan meliputi 16 Kecamatan di Kota Semarang. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilaksanakan secara swakelola dan dipihak ketigakan, secara umum seluruh timbulan sampah semuanya diangkut dan dibuang ke TPA sehingga tidak ada sampah yang menginap/ ditimbun di TPS, timbulnya sampah liar, ataupun sampah yang dibakar maupun dibuang ke tempat yang tidak semestinya.

Dalam lingkup pelaksanaan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat telah melakukan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang berbasis responsif gender sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan bagi semua elemen masyarakat, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Adapun program/kegiatan yang telah berbasis responsif gender adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2023
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

BARIS 1	NAMA OPD	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN YANG DIAMPU	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	TUJUAN SUB KEGIATAN	Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah bank sampah di Kota Semarang sebanyak 250 bank sampah ➤ Pengelola Bank sampah <ul style="list-style-type: none"> L = 600 orang (48%) P = 650 orang (52%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendampingan TPST <ul style="list-style-type: none"> L = 150 orang (70%) P = 250 orang (30%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah <ul style="list-style-type: none"> Sasaran : bank sampah L = 400 orang (66.67%) P = 200 orang (33.33%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah <ul style="list-style-type: none"> Sasaran : 16 kecamatan L = 120 orang (40%) P = 180 orang (60%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pilah sampah <ul style="list-style-type: none"> L = 200 orang (40%) P = 300 orang (60%)

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 1.387.959 ton/tahun (99.54%) pada tahun 2021 ➤ Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional <ul style="list-style-type: none"> L = 250 orang (50%) P = 250 orang (50%) ➤ Studi Orentasi Bank Sampah : 1 lokasi
BARIS 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN/ PERMASALAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Akses</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan bank sampah dari segi manajemen yang kurang terkelola dengan baik termasuk masalah administrasi dan pembukuan yang belum tertata dengan baik • Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanganan dan pemilahan sampah • Sampah selama ini hanya dipandang barang tidak berguna, sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai tambah ➤ Partisipasi <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi laki-laki dalam pengelolaan bank sampah masih rendah jika dibandingkan jumlah perempuannya • Proporsi perempuan yang mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah, pilah sampah, pendampingan TPST lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki • Proporsi perempuan yang mengikuti pelatihan bank sampah lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrol <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pengelola bank sampah didominasi oleh perempuan • Perempuan lebih banyak mengambil keputusan dibandingkan laki-laki

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manfaat <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tambahan pendapatan bagi perempuan dengan jiwa kewirausahaan yang dimilikinya • Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah • Membantu melakukan pendekatan secara aktif kepada masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah khususnya kepada laki-laki
BARIS 4	FAKTOR PENYEBAB	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak semua pengambil keputusan pada OPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender ➤ Ketersediaan SDM Aparatur belum memadai untuk mendampingi seluruh kelompok bank sampah yang ada ➤ Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan bank sampah
		SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ada anggapan kuat dimasyarakat bahwa pengembangan karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga ➤ Kurangnya ketersediaan armada untuk mengantar jemput sampah
BARIS 5	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup, baik perempuan maupun laki-laki
BARIS 6	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi pelatihan bank sampah, pilah sampah, pendampingan TPST 2. Menentukan peserta pelatihan pembinaan bank sampah 3. Menentukan petugas diseminasi pendampingan dan narasumber 4. Pendampingan melalui kegiatan PKK, bank sampah, RT/RW dan kelompok – kelompok masyarakat 5. Melakukan Monitoring Evaluasi 6. Pelaksanaan Hari peduli Sampah Nasional

BARIS 7	BASELINE		Pemberdayaan bank sampah wilayah														
BARIS 8	PENGUKURAN HASIL	OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah bangunan pilah sampah yang terbangun 2) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pendampingan TPST 3) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pilah sampah 4) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah 5) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah 6) Jumlah peserta mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional 7) Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli 8) Jumlah kantong pilah sampah yang terbeli 9) Jumlah timbangan duduk yang terbeli 10) Jumlah timbangan gantung yang terbeli 11) Pemberdayaan Bank Sampah <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 5 lokasi</td> <td style="width: 50%;">8) 1600 buah</td> </tr> <tr> <td>2) 400 orang</td> <td>9) 30 buah</td> </tr> <tr> <td>3) 500 orang</td> <td>10) 64 buah</td> </tr> <tr> <td>4) 600 orang</td> <td>11) 250 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 300 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) 500 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7) 5 unit</td> <td></td> </tr> </table>	1) 5 lokasi	8) 1600 buah	2) 400 orang	9) 30 buah	3) 500 orang	10) 64 buah	4) 600 orang	11) 250 unit	5) 300 orang		6) 500 orang		7) 5 unit	
1) 5 lokasi		8) 1600 buah															
2) 400 orang		9) 30 buah															
3) 500 orang		10) 64 buah															
4) 600 orang		11) 250 unit															
5) 300 orang																	
6) 500 orang																	
7) 5 unit																	
		OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 2 kegiatan 														
		OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 50 % 														
		OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan ➤ Target Kinerja : 72 % 														
		DAMPAK/TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 67,01 														

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2023**

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 URUSAN YANG DIAMPU : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
 PROVINSI : Jawa Tengah
 TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
ANALISI SITUASI	<p>Salah satu permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan bank sampah yang bersifat <i>social engineering</i> yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA, menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih.</p> <p>Pembangunan bank sampah merupakan langkah awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah yang dipandang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat, karena saat menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki dimana mereka akan menjadi nasabah dan mendapatkan buku tabungan layaknya seperti aktivitas perbankan. Sampah-sampah yang disetorkan nantinya akan dilakukan pemilahan berdasarkan komposisinya, dimana untuk senyawa organik</p>

akan diolah menjadi kompos dan biogas sementara anorganik akan diolah menjadi tas, sandal, dan *homemade* lainnya.

Pengelolaan bank sampah sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mampu dan ingin mengelola lingkungan. Sampai dengan tahun 2023 sudah ada 250 bank sampah yang tersebar di Kota Semarang. Dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM yang ada, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait dengan pengurangan sampah yakni melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi pelatihan bank sampah, sosialisasi pilah sampah, sosialisasi pendampingan TPST dan melakukan pelatihan pembinaan bank sampah dengan sasaran 16 kecamatan dengan melibatkan RT/RW, PKK, kelompok masyarakat, maupun bank sampah. Sosialisasi dan pendampingan/pelatihan dilakukan secara terus menerus agar dapat berkelanjutan terhadap bank sampah yang ada di Kota Semarang sebagai upaya awal untuk memberikan pengetahuan dasar tentang urgensi pendirian bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan keberadaan bank sampah secara mandiri khususnya untuk sampah anorganik. Dalam menunjang bank sampah yang ada di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup ikut mendukung fasilitasi sarana prasarana bank sampah meliputi:

1. Pembangunan pilah sampah yang rencananya akan dilaksanakan pembangunan di 5 lokasi
2. Kendaraan Roda Tiga sebanyak 5 unit
3. Pemberian kantong pilah sampah yang diserahkan kepada bank sampah sebanyak 1600 buah
4. Pengadaan timbangan duduk sebanyak 30 buah
5. Pengadaan timbangan sebanyak 64 buah
6. Melaksanakan studi orientasi bank sampah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud pengembangan kompetensi sebagai bahan masukan dan evaluasi pengembangan bank sampah

Setiap tahunnya juga diselenggarakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Februari yang bertujuan mengajak masyarakat untk

	meningkatkan kepedulian, kesadaran serta keterlibatannya dalam pengelolaan sampah	
RENCANA TINDAK	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup, baik perempuan maupun laki-laki
	RENCANA TINDAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi, sosialisasi pelatihan bank sampah, sosialisasi pilah sampah, sosialisasi pendampingan TPST 2. Menentukan peserta pelatihan pembinaan bank sampah 3. Menentukan petugas diseminasi pendampingan dan narasumber 4. Pendampingan melalui kegiatan PKK, bank sampah, RT/RW dan kelompok – kelompok masyarakat 5. Melakukan Monitoring Evaluasi 6. Pelaksanaan Hari peduli Sampah Nasional
ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 2.830.752.000
	SDM	Panitia : 50 orang Peserta pelaksana L = 350 orang P = 250 orang Narasumber : 20 orang
	PERALATAN DAN MESIN	Spanduk, Materi Kit, Kamera, Sewa Gedung, Tenda, Sound System dan Genset
OUTPUT/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah bangunan pilah sampah yang terbangun 2) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pendampingan TPST 3) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pilah sampah 4) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah 5) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah 6) Jumlah peserta mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional 7) Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli 8) Jumlah kantong pilah sampah yang terbeli 9) Jumlah timbangan duduk yang terbeli 	

	<p>10) Jumlah timbangan gantung yang terbeli 11) Pemberdayaan Bank Sampah</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>1) 5 lokasi 2) 400 orang 3) 500 orang 4) 600 orang 5) 300 orang 6) 500 orang 7) 5 unit 8) 1600 buah 9) 30 buah</p> <p>10) 64 buah 11) 250 unit</p>
OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 2 kegiatan</p>
OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	<p>➤ Indikator Kinerja : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 50 %</p>
OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan ➤ Target Kinerja : 72 %</p>
DAMPAK/TUJUAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 67,01</p>

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Tabel 2.12
Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2023
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN YANG DIAMPU		Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	KEGIATAN		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	SUB KEGIATAN		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kelurahan di Kota Semarang = 177 kelurahan ➢ Jumlah peserta lomba Program Kampung Iklim (Proklim) Sasaran : 32 kelurahan dari 16 kecamatan L = 100 orang (33.33%) P = 200 orang (66.67%) ➢ Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) = 5 kelurahan ➢ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) Sasaran : 32 kelurahan yang lolos verifikasi L = 40 orang (47.06%) P = 45 orang (52.94%) ➢ Jumlah bibit tanaman yang terbeli untk kegiatan Proklim 2.825 batang
BARIS 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN/ PERMASALAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>Akses</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem kaderisasi dalam pelaksanaan kegiatan program kampung iklim • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pemahaman masyarakat

			<p>akan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim</p>
			<p>➤ Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi keterlibatan laki-laki dalam lomba kampung iklim masih rendah jika dibandingkan jumlah perempuannya • Proporsi keterlibatan perempuan dalam mengikuti sosialisasi program kampung iklim lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki
			<p>➤ Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi dalam upaya penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim lebih di dominasi oleh perempuan • Perempuan lebih banyak mengambil keputusan dibandingkan laki-laki
			<p>➤ Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk persepsi masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat untuk melaksanakan aksi nyata dalam memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

BARIS 4	FAKTOR PENYEBAB	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak semua pengambil keputusan pada OPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender ➤ Ketersediaan SDM Aparatur belum memadai untuk melakukan pendampingan di semua kelurahan ➤ Kurangnya ketersediaan sarana prasarana ➤ Belum optimalnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat
		SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa pengembangan karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga ➤ Kurangnya pembinaan dan sosialisasi serta inovasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat tentang cara memanfaatkan kegiatan pengendalian emisi GRK, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
BARIS 5	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik perempuan maupun laki-laki
BARIS 6	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kelurahan peserta Lomba Kampung Iklim (Proklim) 2. Melakukan penjaringan peserta lomba Program Kampung Iklim 3. Melakukan wawancara, mengupload video, dan melakukan entry Sistem Registri Nasional (SRN) 4. Melakukan Verifikasi 5. Penetapan petugas penilai lomba Program Kampung Iklim (Proklim) 6. Pelaksanaan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim)

		<p>7. Fasilitasi lomba Program Kampung Iklim (Proklam) dengan melibatkan PKK, LSM, dan Dinas terkait</p> <p>8. Pembinaan dan pendampingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>										
BARIS 7	BASELINE	Jumlah Program Kampung Iklim (Proklam) yang terbangun										
BARIS 8	PENGUKURAN HASIL	<p>OUTPUT/SUB KEGIATAN</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Jumlah alat bor biopori yang terbeli 3) Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklam 4) Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Jumlah dokumen DED sumur resapan 6) Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah dokumen kajian sponge city 10) Jumlah kampung iklim yang terbangun 11) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 12) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 13) Pembangunan sumur resapan 14) Pengadaan Rain Water Harvesting 15) Pengadaan motor listrik roda 3 16) Pengadaan permanen air hujan 17) Pembuatan aplikasi pemberdayaan proklam tingkat tapak <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 1 dokumen</td> <td style="width: 50%;">11) 1500 buah</td> </tr> <tr> <td>2) 100 unit</td> <td>12) 100 unit</td> </tr> <tr> <td>3) 2.825 batang</td> <td>13) 12 unit</td> </tr> <tr> <td>4) 1 dokumen</td> <td>14) 12 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 1 dokumen</td> <td>15) 4 unit</td> </tr> </table>	1) 1 dokumen	11) 1500 buah	2) 100 unit	12) 100 unit	3) 2.825 batang	13) 12 unit	4) 1 dokumen	14) 12 unit	5) 1 dokumen	15) 4 unit
1) 1 dokumen	11) 1500 buah											
2) 100 unit	12) 100 unit											
3) 2.825 batang	13) 12 unit											
4) 1 dokumen	14) 12 unit											
5) 1 dokumen	15) 4 unit											

			6) 1 dokumen 7) 1 dokumen 8) 1 dokumen 9) 1 dokumen 10) 5 lokasi	16) 10 unit 17) 1 aplikasi
		OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	➤ Indikator Kinerja : Emisi CO ₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35	
		OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	➤ Indikator Kinerja : Persentase perubahan emisi CO ₂ atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ➤ Target Kinerja : 2 %	
		OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	➤ Indikator Kinerja : Emisi CO ₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35	
		DAMPAK/TUJUAN	➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 67,01	

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2023**

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN YANG DIAMPU : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
KEGIATAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
ANALISI SITUASI	<p>Persoalan lingkungan yang terjadi akibat dari adanya aktivitas manusia, turut mendorong percepatan fenomena perubahan iklim di bumi. Isu perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak baik di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal. Kondisi tersebut perlu di sikapi dengan memperkuat aksi nyata mulai dari tingkat lokal sampai dengan global yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca serta sebagai upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi. Aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategis pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim yang terus dikembangkan dan di perkuat pelaksanaannya. Lingkungan hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak melaksanakan aksi lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan upaya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yaitu program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca</p>

serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi.

Program Kampung Iklim (Proklam) dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Hal lain yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan Proklam adalah :

- 1) Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum
- 2) Menjabatani kebutuhan masyarakat dan pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 3) Meningkatkan Kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 4) Menumbuhkan Gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan
- 5) Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim
- 6) Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global.

Pelaksanaan Proklam tidak terlepas dari sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang secara rutin dan berkala dilakukan oleh pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Penilaian Proklam mengedepankan penilaian upaya bukan hasil, artinya metode penilaian proklam mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah (problem solving) dampak

	<p>perubahan iklim di tingkat local dan potensi perbaikan ke depan.</p> <p>Dalam mendukung Program Kampung Iklim (Proklim) Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan pencegahan atau pemanfaatan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melakukan beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Pengadaan alat bor biopori 3) Pengadaan bibit tanaman untuk kegiatan Proklim 4) Penyusunan dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Penyusunan dokumen DED sumur resapan 6) Penyusunan dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah dokumen kajian sponge city 10) Jumlah kampung iklim yang terbangun 11) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 12) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 13) Pembangunan sumur resapan 14) Pengadaan Rain Water Harvesting 15) Pengadaan motor listrik roda 3 16) Pengadaan permanenan air hujan 17) Pembuatan aplikasi pemberdayaan proklim tingkat tapak 	
RENCANA TINDAK	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik perempuan maupun laki-laki
	RENCANA TINDAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kelurahan peserta Lomba Kampung Iklim (Proklim) 2. Melakukan penjarangan peserta lomba Program Kampung Iklim

		<p>3. Melakukan wawancara, mengupload video, dan melakukan entry Sistem Registri Nasional (SRN)</p> <p>4. Melakukan Verifikasi</p> <p>5. Penetapan petugas penilai lomba Program Kampung Iklim (Proklim)</p> <p>6. Pelaksanaan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim)</p> <p>7. Fasilitasi lomba Program Kampung Iklim (Proklim) dengan melibatkan PKK, LSM, dan Dinas terkait</p> <p>8. Pembinaan dan pendampingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>
ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 2.700.483.441
	SDM	<p>Panitia : 7 orang</p> <p>Peserta pelaksana</p> <p>Sasaran : 32 Kelurahan dari 16 Kecamatan</p> <p>L = 30 orang</p> <p>P = 45 orang</p> <p>Narasumber : 3 orang</p>
	PERALATAN DAN MESIN	Spanduk, Materi Kit, Kamera, Sewa Gedung, Tenda, Sound System dan Genset
OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Jumlah alat bor biopori yang terbeli 3) Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklim 4) Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Jumlah dokumen DED sumur resapan 6) Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah dokumen kajian sponge city 10) Jumlah kampung iklim yang terbangun 	

	11) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 12) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 13) Pembangunan sumur resapan 14) Pengadaan Rain Water Harvesting 15) Pengadaan motor listrik roda 3 16) Pengadaan permanenan air hujan 17) Pembuatan aplikasi pemberdayaan proklam tingkat tapak Target Kinerja : 1) 1 dokumen 11) 1500 buah 2) 100 unit 12) 100 unit 3) 2.825 batang 13) 12 unit 4) 1 dokumen 14) 12 unit 5) 1 dokumen 15) 4 unit 6) 1 dokumen 16) 10 unit 7) 1 dokumen 17) 1 aplikasi 8) 1 dokumen 9) 1 dokumen 10) 5 lokasi
OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	> Indikator Kinerja : Emisi CO ₂ > Target Kinerja : 155.619,35
OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	> Indikator Kinerja : Persentase perubahan emisi CO ₂ atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) > Target Kinerja : 2 %
OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	> Indikator Kinerja : Emisi CO ₂ > Target Kinerja : 155.619,35
DAMPAK/TUJUAN	> Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) > Target Kinerja : 67,01

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan. Selain dari aspek pelayanan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.13**Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

No.	Indikator	Target Renstra				Realisasi Kinerja		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,95	100,00	100,00
2.	Kesesuaian Program RKPD dengan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DLH Kota Semarang, 2020-2021

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 99,95 %, dimana dari 10 program perubahan RPJMD dapat terakomodir semua di dalam RKPD Tahun 2022. Dari 10 program yang terakomodir, terdapat 9 program yang berhasil mencapai target hingga akhir target akhir RPJMD namun terdapat 1 program yang termasuk capaian rendah. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam penyediaan lahan milik pemerintah yang direncanakan untuk lokasi pembangunan bank sampah serta belum didukung dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun Pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, salah satunya dengan pembentukan bank sampah di setiap kelurahan. Sampai dengan tahun 2021 ini, sudah tercatat ada 117 bank sampah yang terbentuk. Harapannya dengan dikelola masyarakat, sebagai upaya menangani jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Semarang dan semua sampah yang dihasilkan tidak dikirim ke TPA Jatibarang melainkan dilakukan pemilahan dahulu dari masyarakat.

Tabel 2.14
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,00	55,00	66,84	67,01	66,05	59,60	66,84	67,01
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	49,20	49,98	52,33	52,43	50,44	50,00	53,00	52,43
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	66,80	68,20	95,40	95,60	95,20	75,00	95,40	95,60
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	55	56	57	58	55,90	57,58	57	58
5.	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim	%	80,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
8.	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	89,50	90,00	90,50	91,00	89,50	90,00	90,50	91,00
9.	Rasio pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	rasio	2,54	2,55	2,56	2,57	2,88	2,94	2,56	2,57

Sumber: DLH Kota Semarang, 2020-2022

Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja diatas sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa untuk semua indikator mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indicator yang mampu melebihi target, 4 (empat) indicator mencapai target, dan 1 (satu) indicator yang belum mencapai target yaitu pada indikator indeks kualitas tutupan lahan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tata guna lahan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan baik perubahan Renja, LAKIP maupun Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik, banyak indikator yang mampu melebihi target maupun telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Dalam pelaksanaan program/kegiatan sudah dilakukan perencanaan, penganggaran berbasis responsif gender (PPRG), penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender.
- c. Usulan musrembang yang terakomodir dalam RKPD sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan ke depan perlu diupayakan peningkatannya.
- d. Secara umum, peningkatan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan meningkatnya jumlah bank sampah di Kota Semarang hingga tahun 2021 sudah ada 117 bank sampah yang terbentuk dan terbina serta adanya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi sarana prasarana nya maupun peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diantaranya:

- a. Peralihan sistem SIPD masih dalam tahap pengembangan, sehingga dalam perjalanannya terdapat pemutakhiran - pemutakhiran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dinamika regulasi yang ada
- b. Perlu dioptimalkan ketersediaan data dan informasi yang ada guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di OPD, serta diperlukannya publish dokumen perencanaan secara berkala
- c. Perlunya monitoring evaluasi internal terhadap capaian kinerja secara berkala dan penyesuaian yang diperlukan atas rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja
- d. Perlu lebih diintensifkan dan dioptimalkannya koordinasi antar perangkat daerah dengan berbagai stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada.
- Masih adanya regulasi yang tumpang tindih dimana belum adanya regulasi yang mengikat terkait pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup secara spesifik mengenai perubahan iklim
- Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah dikalangan masyarakat khususnya dalam upaya pengelolaan, penanganan dan pengurangan sampah.

b. Peluang:

- Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dimana disamping menjadi tantangan ternyata sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat dan tak terbatas sehingga mendorong untuk kaum milenial melek teknologi dan memudahkan dalam mendukung peningkatan kinerja secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan stakeholder harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

-

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Waki Walikota

Visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi juga dilengkapi dengan serangkaian program dan kegiatan prioritas.

b. Pengoptimalan penyediaan data dan informasi

Ketersediaan data dan informasi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang diperlukan dilakukan dengan menginventarisasi, menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber.

c. Implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Semarang terkait perencanaan pembangunan daerah

Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi jawa tengah diantaranya kebijakan terkait :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 2) Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 3) Program Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

Selain regulasi/kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan diantaranya : dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), dokumen kajian penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dokumen NA Raperda, dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Kajian Analisis Dampak Lingkungan, Kajian inovasi pemilahan sampah skala kawasan, kajian penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran B3 dan limbah B3.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah** ” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan

- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota

- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah

- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian prioritas ke tiga dan ke empat yaitu **“Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif”** dan **“Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar”**. Diperlukan koordinasi terhadap stakeolder terkait dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				142.452.944.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				131.731.704.358	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	43.891.037.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	39.441.858.878	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	33.140.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	17.321.694	-
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.754.178	-
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.376.206	-
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.593.666	-

No	Rancangan Awal RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.870.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.376.206	-
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.070.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.593.666	-
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.627.772	-
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	21.884.600.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	16.912.180.020	-
			Persentase administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase administrasi Keuangan SKPD	100%		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	19.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	15.122.896.494	-
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	588.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	441.500.224	-
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.785.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.341.390.301	-
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.884.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.727.514	-
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.982.132	-
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.216.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.683.355	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.211.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.300.506.303	-
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.650.000	-
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	105.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	109.526.000	-
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	125.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.471.000	-
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	44.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	42.457.000	-
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.284.000	-
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	78.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	134.865.000	-
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	610.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	403.035.880	-
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	472.217.423	-
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	935.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	916.240.265	-
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	725.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	713.200.000	-
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.040.265	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.2.09	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	19.826.597.000	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	20.295.610.596	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	169.471.000	-
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	19.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	19.577.046.596	-
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 Unit	1.597.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 Unit	1.293.000	-
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	255.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	250.000.000	-
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	370.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	306.800.000	-
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	513.886.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	615.559.024	
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100%	513.886.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100%	366.159.024	-
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 dokumen	218.098.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	155.282.024	
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	295.788.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	210.877.000	-

No	Rancangan Awal RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100%	249.400.000	-
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	249.400.000	-
03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 hektar	5.296.211.000	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 hektar	6.224.340.968	
			Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%				Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%		
			Persentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	2%				Persentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	2%		
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87%				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87%		
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59%				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59%		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Emisi CO2	7625348.23 KtCO2e	4.154.698.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Emisi CO2	7625348.23 KtCO2e	5.478.028.620	-
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan		-
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65%				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65%		-
			Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%				Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%		-
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,	15 Dokumen	1.223.206.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	15 Dokumen	1.723.493.493	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Air, Udara, dan Laut			Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen	1.375.110.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen	2.700.483.441	-
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.556.382.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.054.051.686	-
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	423.474.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	278.092.497	-
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	423.474.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	278.092.497	-
03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luasan Lahan yang terkonservasi	60 ha	718.039.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luasan Lahan yang terkonservasi	60 ha	468.219.851	-
03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	4 Dokumen	718.039.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	4 Dokumen	468.219.851	-
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Cakupan pengelolaan taman keanekaragamahayati (kehati) di Kota Semarang	100%	990.028.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Cakupan pengelolaan taman keanekaragamahayati (kehati) di Kota Semarang	100%	866.083.646	-
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	990.028.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	866.083.646	-
04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3 Dokumen	323.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3 Dokumen	390.880.077	-
04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,9 Ha	322.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,9 Ha	287.476.843	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 unit	345.028.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	4 unit	187.726.726	-
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56%	451.940.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56%	363.971.800	-
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	401.940.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	274.750.784	-
05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	318.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	225.726.384	-
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	83.440.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	49.024.400	-
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	50.000.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	89.221.016	-
05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	1 Dokumen	89.221.016	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,4%	936.400.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,4%	691.927.835	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100%				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	936.400.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	691.927.835	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100%				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100%		
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	80 Dokumen	616.400.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	60 Dokumen	398.060.000	-
06.2.01.03	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	320.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	293.867.835	-
08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50%	3.592.662.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50%	3.274.815.000	-
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	3.592.662.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	3.274.815.000	-
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	160 Lembaga	2.991.062.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	160 Lembaga	2.830.752.000	-

No	Rancangan Awal RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	601.600.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	444.063.000	-
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,5%	365.145.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,5%	291.129.200	-
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	365.145.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	291.129.200	-
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	365.145.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	291.129.200	-
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	198.575.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	125.108.000	-
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	198.575.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	125.108.000	-
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	149.050.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	95.908.000	-
10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	49.525.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	29.200.000	-
11	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91%	86.217.060.000	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91%	79.836.910.007	-
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27%				Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27%			

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72%				Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72%		
11.2.01	Pengelolaan Sampah		Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100%	86.217.060.000	Pengelolaan Sampah		Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100%	79.836.910.007	-
11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	110.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	98.800.000	-
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6 Laporan	592.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan	762.360.546	-
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	363 Ton	60.000.000.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	363 Ton	55.088.356.212	-
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	5 Kelompok	250.060.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	27 Kelompok	202.466.400	-
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	20 Dokumen	8.365.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	20 Dokumen	8.985.248.874	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	1.600.000.000	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	50 Dokumen	1.537.350.000	-
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40 Unit	15.300.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40 Unit	13.162.327.975	-

Berdasarkan data di atas, terdapat penyesuaian anggaran dari Rancangan Awal RKPD yang telah disusun mengalami beberapa perubahan setelah dilakukannya Forum SKP hingga musrenbang kota. Musrenbang dilaksanakan melalui penjaringan aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan, prioritas pembangunan Kota, dan pokok pikiran DPRD hingga dihasilkannya Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2023. Hasil penyesuaian Renja SKPD tersebut terdapat beberapa masukan terkait hasil forum SKPD dan musrenbang tingkat kota, adapun penyesuaian tersebut adalah :

- a. Adanya perubahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang semula Rp. 8.365.000.000 menjadi Rp. 8.985.248.874 dimana terdapat tambahan indikator kerja dalam mengakomodir usulan hasil musrenbang yang terakomodir tahun 2023 meliputi : pengadaan tempat sampah, tong sampah, gerobak sampah dan becak sampah.
- b. Adanya perubahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang semula Rp. 1.223.206.000 menjadi 1.723.493.493 dimana terdapat tambahan indikator kerja dalam mengakomodir usulan hasil musrenbang yang terakomodir tahun 2023 meliputi : pengadaan tempat sampah, tong sampah dan bangunan bank sampah.
- c. Adanya perubahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang semula Rp. 1.375.110.000 menjadi 2.700.483.441 dimana terdapat tambahan indikator kerja dalam mengakomodir usulan hasil musrenbang yang terakomodir tahun 2023 meliputi : pengadaan biopori.
- d. Terdapat penambahan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD pada program perencanaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar RP. 249.400.000.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembuatan Komposting & pagar TPS Pasar Wonodri	Jl. Wonodri Baru RT 07 RW 03 Wonodri	1 paket	Pagar TPS Pasar Wonodri akan diakomodir di APBD Tahun 2022
2.	Pembuatan atap, peninggi, dan pemunduran TPS Lamper Lor	Jl. Kanal RT 07 RW 01 Lamper Lor	1 unit	Dilaksanakan di APBD Tahun 2022
3.	Becak gerobak sampah	Kelurahan Bandarharjo	15 buah	Akan diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran
4.	Perbaiki TPS menjadi TPS 3R	Jl. Lingkar Tanjung, Panggung Lor	400 m ²	Tidak diakomodir dikarenakan keterbatasan lahan di lokasi tersebut

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Tempat Sampah	Kelurahan Bangunharjo RT 01/RW 02 Bangunharjo	100 unit	Akan diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan
6.	Penyediaan tong sampah untuk tiap unit	Karanganyar	1 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai prioritas OPD
7.	Pembuatan tempat pilah sampah (bank sampah)	Perum Wijaya Kusuma RT 04 RW 03 Karanganyar	18 m ²	Tidak diakomodir karena belum memenuhi persyaratan pengembangan bank sampah, harus ada embrio/KSM
8.	Penyediaan kontainer sampah untuk TPS	Di belakang makam RT 08 RW 02 Karanganyar	100 unit	Dilaksanakan di Tahun 2022
9.	Pekerjaan pembuatan lapangan hijau	Jl/ Oerip Soemohardjo No. 77 Semarang RT 05 RW 04 Mangkang Kulon	1 paket	Bukan Kewenangan DLH
10.	Pekerjaan pembuatan limbah peternakan	Jl. Duduhan -Tlogo RT 03 RW 03 Jatibarang	72 m ²	Tidak diakomodir, tidak sesuai prioritas OPD
11.	Permintaan bantuan tong sampah, gerobak sampah, becak sampah untuk 5 RW dan pohon turus jalan (pohon pule)	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 12,3,4,5 Bendan Ngisor	5 paket	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran untuk bantuan prasarana pengelolaan sampah, pohon turus jalan kewenangan DPU
12.	Pengadaan gerobak dan tong sampah	Candi Losmen RT 04 RW 08 Candi	40 unit	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran
7.	Bangunan Bank Sampah RW 03	Jl. Keruing Raya RT 0 RW 03 Srandol Wetan	1 buah	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran dahulu dan tanah milik Pemkot
8.	Penambahan biopori di lingkungan RW	Jl. Bina Remaja No. 39 Srandol Wetan	600 buah	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, antara lain:

1. Perlu edukasi terus menerus tentang pembuangan sampah dan limbah cair rumah tangga

Tanggapan :

- Edukasi tentang pembuangan sampah ke masyarakat selalu dilaksanakan DLH melalui kegiatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, pemasangan banner dan dimedia social.
- Terkait limbah cair rumah tangga bukan kewenangan Tupoksi DLH Kota Semarang

2. Perlu menambah unit pengolahan sampah di tiap RW

Tanggapan :

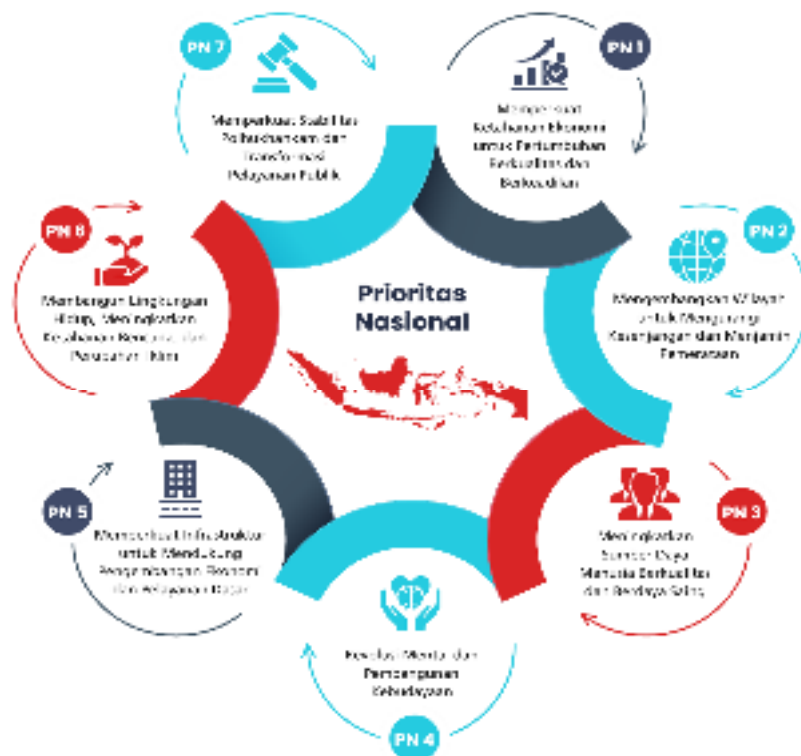
- Pembangunan unit pengolahan sampah disuatu wilayah perlu memperhatikan ketersediaan asset lahan/lokasi dan SDM pengelolanya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah penurunan emisi CO₂ atau sasaran Pembangunan Rendah Karbon dengan target pada tahun 2023 sebesar 27,02 persen.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan kesejahteraan Masyarakat Di Dukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM”** dengan prioritas sebagai berikut:

- P1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
- P2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- P3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing
- P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas. Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan tahun 2021 target Provinsi Jawa Tengah tersebut belum terlampaui dimana nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebesar 59,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” dengan indikator yang hendak dicapai antara lain :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Emisi CO₂
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara
4. Menurunnya Emisi CO₂

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota

6. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Dengan indikator sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu
3. Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu
4. Persentase Penurunan Emisi GRK
5. Persentase Ketaatan Penanggungjawan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
6. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,43
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	95,60
	- Emisi CO2	kt CO2	7625348,23
	- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	64,58
SASARAN :			
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	78,57
- Meningkatnya Kualitas Air	- Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	50,20
- Meningkatnya Kualitas Udara	- Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	50,20
- Menurunnya Emisi CO2	- Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	2,00
- Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	- Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	Persen	85,80 III-6

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
- Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan	Persen	72,00

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Lingkungan Hidup bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (4 indikator) dan indikator sasaran (6 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program, yang terdiri 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 9 (sembilan) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 12 (dua belas) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 131.731.704.358 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 39.441.858.878 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 92.289.845.480 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				131.731.704.358				143.740.228.000
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100 %	39.441.858.878		-	100 %	34.682.334.000
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD		100 %				100 %	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100 %				100 %	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	17.321.694			9 Dokumen	32.600.000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 Dokumen	2.754.178	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	14.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2.376.206	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	900.000
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2.593.666	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	900.000
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2.376.206	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	900.000
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2.593.666	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	900.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	5 Laporan	4.627.772	APBD Kota Semarang	-	5 Laporan	15.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4 Dokumen	16.912.180.020			4 Dokumen	21.779.694.000
		Persentase administrasi Keuangan SKPD		100%				100%	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	115 Orang/bulan	15.122.896.494	APBD Kota Semarang	-	115 Orang/bulan	19.800.170.141
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 Dokumen	441.500.224	APBD Kota Semarang	-	12 Dokumen	510.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	12 Dokumen	1.341.390.301	APBD Kota Semarang	-	12 Dokumen	1.463.519.859
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	2.727.514	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	1.610.000
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	1 laporan	1.982.132	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	1.842.000
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	1.683.355	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	2.552.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum		100%	1.300.506.303			100%	1.227.000.000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	45.650.000	APBD Kota Semarang	-	1 Paket	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	6 Paket	109.526.000	APBD Kota Semarang	-	6 Paket	96.000.000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket	90.471.000	APBD Kota Semarang	-	4 Paket	128.000.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket	42.457.000	APBD Kota Semarang	-	2 Paket	45.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perancang-undangan yang Disediakan	Kota Semarang	2 Dokumen	2.284.000	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	3.000.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 Laporan	134.865.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	80.000.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	403.035.880	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	625.000.000
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 Dokumen	472.217.423	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	200.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		100%	916.240.265			100%	930.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	713.200.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	735.000.000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	203.040.265	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	195.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD		100%	20.295.610.596			100%	10.713.040.000
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	3 unit	169.471.000	APBD Kota Semarang	-	3 unit	194.169.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	200 Unit	19.577.046.596	APBD Kota Semarang	-	200 Unit	9.837.115.000
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	19 Unit	1.293.000	APBD Kota Semarang	-	19 Unit	1.756.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	214 Unit	250.000.000	APBD Kota Semarang	-	214 Unit	280.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	3 Unit	306.800.000	APBD Kota Semarang	-	3 Unit	400.000.000
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100 %	615.559.024		-	100 %	419.170.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		100%	366.159.024			100%	419.170.000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Semarang	1 Dokumen	155.282.024	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	200.446.000
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	210.877.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	218.724.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		100%	249.400.000			100%	0
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Semarang	2 Dokumen	249.400.000	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air hidup		20 hektar	6.224.340.968		-	20 hektar	8.138.526.000
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		100%				100%	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air		87%				87%	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara		59%				59%	
		Persentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca		2%				2%	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2		7625348.23 KtCO2e	5.478.028.620			7625348.23 KtCO2e	7.037.406.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara		150 perusahaan				150 perusahaan	
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai		65%				65%	
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		100%				100%	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	15 Dokumen	1.723.493.493	APBD Kota Semarang	-	15 Dokumen	4.098.809.000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Semarang	15 Dokumen	2.700.483.441	APBD Kota Semarang	-	15 Dokumen	1.937.862.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kota Semarang	12 Dokumen	1.054.051.686	APBD Kota Semarang	-	12 Dokumen	1.000.735.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH		2 jenis	278.092.497			2 jenis	506.624.000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Semarang	4 Laporan	278.092.497	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	506.624.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi		60 ha	468.219.851			60 ha	594.496.000
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	4 Dokumen	468.219.851	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	594.496.000
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang		100 %	866.083.646			100 %	1.090.195.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia		3 jenis	866.083.646			3 jenis	1.090.195.000
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Semarang	3 Dokumen	390.880.077	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	7,9 Ha	287.476.843	APBD Kota Semarang	-	7,9 Ha	292.550.000
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Semarang	4 unit	187.726.726	APBD Kota Semarang	-	4 unit	297.645.000
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3		56 %	363.971.800		-	56 %	335.297.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan		50 perusahaan	274.750.784			50 perusahaan	305.297.000
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	3 Dokumen	225.726.384	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	269.835.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Semarang	50 Laporan	49.024.400	APBD Kota Semarang	-	50 Laporan	35.462.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu)	Jumlah ketersediaan sarana prasarana		1 jenis	89.221.016			1 jenis	30.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Daerah Kabupaten/Kota	pengumpulan limbah B3 yang tersedia							
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kota Semarang	1 Dokumen	89.221.016	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	30.000.000
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota		85,4 %	691.927.835		-	85,4 %	775.400.000
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan		2 kegiatan 100%	691.927.835			2 kegiatan 100%	775.400.000
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Semarang	60 Dokumen	398.060.000	APBD Kota Semarang	-	60 Dokumen	440.100.000
2.11.06.2.01.03	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Laporan	293.867.835	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	335.300.000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup		50 %	3.274.815.000		-	50%	3.610.800.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		2 kegiatan	3.274.815.000			2 kegiatan	3.610.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Semarang	160 Lembaga	2.830.752.000	APBD Kota Semarang	-	160 Lembaga	2.818.200.000
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Semarang	3 Dokumen	444.063.000	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	792.600.000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan		11,50 %	291.129.200		-	11,50 %	295.179.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan		2 jenis	291.129.200			2 jenis	295.179.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Semarang	60 Entitas	291.129.200	APBD Kota Semarang	-	60 Entitas	295.179.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100 %	125.108.000		-	100 %	213.495.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun		60 kasus	125.108.000			60 kasus	213.495.000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Semarang	1 Dokumen	95.908.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	163.970.000
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kota Semarang	1 Dokumen	29.200.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	49.525.000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA		91 %	79.836.910.007		-	91 %	4.043.294.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		27%				27%	
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		72%				72%	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan		100%	79.836.910.007			100%	94.043.294.000
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Kota Semarang	2 Dokumen	98.800.000	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	117.000.000
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Semarang	4 Laporan	762.360.546	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	1.400.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	363 Ton	55.088.356.212	APBD Kota Semarang	-	363 Ton	58.098.769.000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	Kota Semarang	27 Kelompok	202.466.400	APBD Kota Semarang	-	27 Kelompok	102.525.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kota Semarang	20 Dokumen	8.985.248.874	APBD Kota Semarang	-	20 Dokumen	3.165.000.000
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Semarang	50 Dokumen	1.537.350.000	APBD Kota Semarang	-	50 Dokumen	1.020.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Semarang	40 Unit	13.162.327.975	APBD Kota Semarang	-	40 Unit	30.140.000.000

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa perkiraan pagu anggaran yang dibutuhkan di APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 143.740.228.000 sedangkan pada Tahun 2023 pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 131.731.704.358 , terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 12.008.523.642 (8,35 %). Pada tahun 2023 terdapat beberapa prioritas pembangunan kota yang harus terakomodir di dalam penganggaran tahun 2024 diantaranya meliputi :

- a) Program Peningkatan Manajemen Internal, yang diprioritaskan pada akselerasi SPBE dengan fokus :
 - Dukungan pelaksanaan SPBE
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang diprioritaskan pada :
 1. Pengelolaan Persampahan Terpadu, dengan fokus :
 - Pengadaan Lahan Perluasan TPA
 2. Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage), dengan fokus:
 - Pembangunan Rain Water Harvesting (RWH)
 - Pembangunan Lubang Biopori
 - Pembangunan Sumur Resapan
 3. Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah, dengan fokus:
 - Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
- c) Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 1. Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo, dengan fokus :
 - Penyusunan DED

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup;
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Daerah dan Rencana Strategis OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat menentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam Menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022-2026. Renja Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Yang nantinya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 yang disusun sebagai rencana operasional pembangunan jangka menengah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026.

Dari RKPD akan digunakan sebagai acuan dalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau yang biasa disingkat KUA-PPAS yaitu dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan RKPD dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Daerah, dan sebagai dasar penetapan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

- w. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/2623/IX/2022 tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- x. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/2642/IX/2022 tentang Penetapan Renja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.
5. Acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoperasikan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kota Semarang periode tahun 2021-2024;

6. Sebagai analisis kinerja kebijakan pembangunan untuk satu tahun dalam kerangka evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Walikota;
7. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan dalam satu tahun yang mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Semarang dan Renstra SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan tentang usul program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 beserta kebutuhan dana / pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang disusun 5 (lima) tahunan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan Renja ini diperlukan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan sebagaimana Tabel 2.1.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	WAJIB										
2	Kependudukan dan Catatan Sipil										
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0		Perencanaan, Pengaangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	
2	1	0	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	
						Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	
2	1 2	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	1260 OB	945 OB	40%	
2	1 2	0 1	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1 2	0 1	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1 laporan	1 laporan	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	40%	
2	1	0	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	
2	1	0	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Sosialisasi peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100 orang	100 orang	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	1 paket	1 paket	40%	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	3 paket	3 paket	40%	
2	1	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	3 paket	3 paket	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	5 paket	5 paket	40%	
2	1	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	5 paket	5 paket	40%	
2	1	0	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	40%	
2	1	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 dokumen	9 dokumen	40%	
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100 unit	75 unit	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	36 unit	30 unit	40%	
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	40%	
2	1	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	35 unit	35 unit	40%	
2	1	0	2.0	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	125 unit	125 unit	40%	
2	1	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	450 unit	400 unit	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	18 unit	18 unit	40%	
2	1	0	2.0	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	2 unit	2 unit	40%	
2	1	0	2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	99,40%	98%	100%	95,07%	95,07%	99,30%	97,25%	97,83%	
						Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71%	60,57%	75%	61,79%	82,38%	68%	63,50%	89,43%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	428.000 dokumen	471.031 dokumen	405.825 dokumen	471.031 dokumen	116,06 %	426.000 dokumen	430.000 dokumen	22,00%	
2	1	0	2.0	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1.400 dokumen	100%	100%	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	20%	
2	1	0	2.0	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	107.500 dokumen	107.500 dokumen	20%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	20%	
2	1	0	2.0	05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320.500 dokumen	100%	100%	100%	100%	107.500 dokumen	107.500 dokumen	20%	
2	1	0	2.0		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	
					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	1 jenis dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	20%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun									
2	1 2	0 2	2.0 2	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	20%	
2	1 2	0 2	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	
2	1 2	0 2	2.0 3	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan	12 dokumen	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	12 dokumen	9 dokumen	20%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	02	Pendaftaran Penduduk										
	2	2	4		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	12 laporan	40%	
2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL										
	2	3			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		97%	86%	88%	80,04%	90,95%	96%	95,56%	91,11%	
2	1	0	2.0		Pelayanan Pencatatan Sipil										
	2	3	1		Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	100%	100%	100%	100%	48.919 dokumen	55.773 dokumen	40%	
2	1	0	2.0	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas										
	2	3	1		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen	45.425 dokumen	100%	100%	100%	100%	48.919 dokumen	45.245 dokumen	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelaporan Peristiwa Penting	atas pelaporan peristiwa penting									
2	1 2	0 3	2.0 1	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	3 layanan	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	
2	1 2	0 3	2.0 1	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	40%	
2	1 2	0 3	2.0 1	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir,	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0		selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia									
	2	3	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	12 laporan	9 laporan	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	100%	96 fasilitasi pelayanan	96 fasilitasi pelayanan	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0	2.0	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	230 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	100%	40%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 2	0 4	2.0 3	03	dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	2 fasilitasi	100%	100%	100%	100%	2 fasilitasi	2 fasilitasi	40%	
2	1 2	0 4	2.0 3	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	81%	230 lembaha pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	100%	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
					Kerjasama dengan Organisasi dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	-	-	-	-	-	-	10 dokumen	40%	
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	40%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100%	2 jenis buku	2 jenis buku	40%	

Dari Data sebagaimana Tabel 2.1.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kota Semarang. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan, dilaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki beberapa Program, antara lain :
 - a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota
- Kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan pada program-program tersebut dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2
Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator Kinerjanya

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	100%	98,48%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	75%	62,05%
		Jumlah penerbitan dokumen administrasi kependudukan	405.825 dokumen	437.254 dokumen
	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk</i>	356.906 dokumen	381.481 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	100%	100%
	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk</i>	356.906 dokumen	381.481 dokumen
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	100%	100%
	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	100%	100%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	96 pelayanan	96 pelayanan
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	100%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	100%	100%
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	90%	79,75%
		Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	48.919 dokumen	55.773 dokumen
		Jumlah penerbitan dokumen administrasi kependudukan	405.825 dokumen	437.254 dokumen
	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil</i>	48.919 dokumen	55.773 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	48.919 dokumen	55.773 dokumen
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100%	100%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Persentase pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	100%	100%
	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	96 pelayanan	96 pelayanan
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	262 lembaga pengguna	262 lembaga pengguna
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%
	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100%	100%
	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	37,50%	37,50%
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%
	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah pengelolaan informasi data kependudukan	42 elemen data	42 elemen data
		Persentase data profil kependudukan	100%	100%
	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 jenis buku	1 jenis buku
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 dokumen	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
		<i>Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga perkantoran	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	100%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100%	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolaan arsip dinamis	100%	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2021	
		Program / Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Mebel perkantoran	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin	100%	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100%	100%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%
	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran

Perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada Tabel 2.1.3 Realisasi Keuangan Tahun 2021 berikut ini :

Tabel 2.1.3

Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		24.881.524.828	22.663.267.239	91,08	2.218.257.589
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	22.386.503.668	20.360.162.689	97,95	2.026.340.979
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.163.925	125.480.550	65,3	66.683.375
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.803.030	26.779.750	74,8	9.023.280
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.218.700	5.371.250	52,56	4.847.450
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1.218.700	1.215.250	99,72	3.450
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.218.700	1.200.000	98,47	18.700
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.218.700	1.196.000	98,14	22.700
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.198.250	1.000.500	83,5	197.750
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.287.845	88.717.800	62,79	52.570.045
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.535.717.778	12.615.867.778	93,2	919.850.000
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	13.280.306.828	12.469.890.528	93,9	810.416.300

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSE N TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.065.700	138.055.000	56,1	108.010.700
02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.035.500	3.892.500	96,46	143.000
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.692.000	1.877.000	69,73	815.000
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	1.409.500	971.500	68,93	438.000
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.208.250	1.181.250	97,77	27.000
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	308.407.496	239.451.851	77,64	68.955.645
05.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	308.407.496	239.451.851	77,64	68.955.645
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.068.048.205	3.465.626.416	85,19	602.421.789
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	49.587.200	47.717.450	96,34	1.869.750
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.359.364.891	1.988.681.440	84,29	370.683.451
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.530.415	96.932.100	99,39	598.315
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	380.223.880	360.931.700	94,93	19.292.180
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.896.701	114.293.168	96,13	4.603.533
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.650.000	4.556.930	59,57	3.093.070
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.087.000	194.212.028	71,12	78.874.972

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSE N TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	781.708.118	658.247.600	84,21	123.460.518
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.290.637	518.445.600	92,7	40.845.037
07.05	Pengadaan Mebel	155.165.099	145.990.000	94,09	9.175.099
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	404.125.538	372.455.600	92,16	31.669.938
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.519.767.127	2.474.758.011	98,21	45.009.116
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	706.473.527	683.154.911	96,7	23.318.616
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.813.293.600	1.791.603.100	98,8	21.690.500
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.203.108.500	920.532.483	76,51	282.576.017
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.990.000	223.985.438	52,21	205.004.562
09.05	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	10.939.000	99,45	61.000
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	385.168.500	312.558.045	81,15	72.610.455
09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.950.000	373.050.000	98,7	4.900.000
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.376.210.880	1.319.885.350	95,91	56.325.530
2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	969.381.800	960.680.850	99,1	8.700.950
01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	916.200.000	911.731.850	99,51	4.468.150

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	53.181.800	48.949.000	92,04	4.232.800
2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	385.850.000	346.634.500	89,84	39.215.500
02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	385.850.000	346.634.500	89,84	39.215.500
2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	20.979.000	12.570.000	59,92	8.409.000
03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	20.979.000	12.570.000	59,92	8.409.000
3	Program Pencatatan Sipil	526.736.900	480.267.800	91,18	46.469.100
2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	505.546.000	459.837.800	90,96	45.708.200
01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	83.046.000	82.555.000	99,41	491.000
01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	291.200.000	267.132.800	91,74	24.067.200
01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	131.300.000	110.150.000	83,89	21.150.000
2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21.190.900	20.430.000	96,41	760.900

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	21.190.900	20.430.000	96,41	760.900
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	551.744.080	464.471.900	84,81	87.272.180
2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data	466.698.240	400.698.240	85,88	66.000.000
01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	466.698.240	400.698.240	85,88	66.000.000
2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.552.720	17.058.000	64,24	9.494.720
03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	26.552.720	17.058.000	64,24	9.494.720
2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.493.120	46.598.500	79,66	11.894.620
04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.151.540	19.658.000	92,94	1.493.540
04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	37.341.580	26.940.500	72,15	10.401.080
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	40.329.300	38.479.500	95,41	1.849.800
2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	40.329.300	38.479.500	95,41	1.849.800

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSE N TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	40.329.300	38.479.500	95,41	1.849.800

Dari data pada Tabel 2.2.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebesar Rp 24.881.524.828,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 22.663.267.239,- dengan sisa sebesar Rp 2.218.257.589,- tercapai sebesar 91,08% dengan urain berikut :

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 13.550.306.828,-, dengan realisasi Rp 12.662.560.528,- (93,15%) dan sisa anggaran sebesar Rp 927.746.300,-.
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 11.331.218.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.040.706.711,- (88,61%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.137.841.289,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai dinas yang membantu tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Rekapitulasi Hasil Realisasi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 sampai dengan Semester 1 Tahun 2022

No.	Uraian	2020	2021	2022 (SMT I)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kartu Keluarga (KK)	99.276	130.343	12.776	Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	192.884	156.523	76.061	
3	Surat Keterangan Pindah Datang	27.284	61.488	24.023	
4	SKPNP dan SKTT	1.350	1.698	510	
5	Kartu Identitas Anak (KIA)	104.869	31.429	12.380	
6	Akta Kelahiran	28.403	28.592	13.193	
7	Akta Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak	15.526	25.410	4.494	
8	Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	1.169	1.771	494	
9	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	270	0	0	
	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan	471.031	437.254	143.931	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Tujuan / Sasaran	Indikator	SPP / SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	----	100%	70%	75%	68%	71%	60,57 %	61,79%	71%	74%	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Thn	----	90%	86%	90%	97%	97,20%	96,57 %	95,56%	97,20%	97,50%	
Sasaran Renstra : Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang Berintegritas	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	----	90%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	----	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Kepemilikan KTP-el	----	100%	98%	100%	99,30%	99,40%	98,07 %	95,07%	99,30%	99,40%	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu penting.

Adapun permasalahan / isu penting yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

a. Administrasi Kependudukan

Dengan jumlah penduduk yang besar, Kota Semarang tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap

aktivitas kehidupan, diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, perbankan, imigrasi, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat yang mulai diselenggarakan pada tahun 2022. Aplikasi SIAK Terpusat adalah aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang memiliki basis data kependudukan yang dikelola secara terpusat pada basis data

kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri. Sebelum pelaksanaan SIAK Terpusat ini, basis data kependudukan masih terdistribusi pada Kabupaten / Kota masing-masing atau disebut basis data lokal, sehingga apabila terjadi perubahan data kependudukan lokal masih diperlukan konsolidasi terhadap basis data pusat. Konsolidasi basis data adalah proses mensinkronisasikan (menyesuaikan) data yang tertera pada dokumen kependudukan dan catatan sipil paling mutakhir ke *data center* Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Dengan pelaksanaan SIAK Terpusat tersebut, maka semua akses terhadap data kependudukan dari yang semula dapat dilakukan dengan mengakses database kependudukan yang terdistribusi di Kabupaten / Kota, beralih kepada akses langsung terhadap data kependudukan SIAK terpusat. Sehingga hal ini memberikan dampak terhadap beberapa lembaga pengguna yang telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Disdukcapil dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan menjadi harus menyesuaikan dengan sistem yang adanya sistem baru SIAK Terpusat tersebut. Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak harus mendapat persetujuan dan izin akses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Penerapan Digital ID atau identitas digital yaitu menggantikan KTP-el dan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang semula bersifat fisik menjadi digital dengan suatu aplikasi Digital ID dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka warga masyarakat dapat mengakses seluruh data seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, NPWP, BPJS, Bukti Kepemilikan Kendaraan

Bermotor (BPKB), hingga bagi warga masyarakat yang berstatus PNS dapat mengakses seluruh data kepegawaiannya. Penerapan Digital ID ini turut mendukung pencapaian transformasi digital Indonesia di era industri 4.0 serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4.0.

- 4) Telah beroperasinya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di beberapa tempat agar masyarakat yang ingin mencetak dokumen kependudukannya dapat mencetak secara mandiri pada ADM yang telah disediakan. Melalui ADM ini pengguna layanan dapat mencetak dokumen kependudukan sekaligus KTP-el dan KIA. Akan tetapi penggunaan dan pemanfaatan ADM oleh masyarakat dirasa kurang maksimal. Karena budaya masyarakat Kota Semarang yang belum terbiasa dengan pelayanan swadaya atau mandiri. Sehingga masih banyak warga masyarakat yang lebih senang memanfaatkan Aplikasi SiDenok untuk cetak mandiri atau mencetak KTP-el dan KIA di TPKD Kecamatan. Untuk itu perlu adanya sosialisasi lebih gencar dan luas tentang Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada masyarakat.
- 5) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Semarang yaitu Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari yang dilaksanakan pada Hari Sabtu pada minggu pertama setiap bulan. Dengan jam pelayanan akhir pekan dan malam hari yaitu pagi hari jam 08.00-12.00 dan malam hari 19.00-22.00 WIB.

b. Integritas

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai dinas penyelenggara pelayanan publik, telah mulai membangun Zona Integritas sejak tahun 2017. Selama dua tahun Pembangunan Zona Integritas terus diinternalisasi dan diimplementasikan dalam manajemen, sistem kerja serta penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga pada tahun 2019 dicanangkan untuk pertama kali Pembangunan Zona Integritas dan pada tahun yang sama berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Evaluasi pembangunan zona integritas terus dilaksanakan setiap tahun guna mempertahankan zona integritas yang telah dibangun. Karenanya pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas, akan tetapi belum berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka perwujudan dari Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang senantiasa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun perbaikan manajemen,

sistem kerja dan budaya kerja yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian juga upaya pendayagunaan sumber daya manusia sebagai aparatur negara pada dasarnya adalah melalui pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, tatalaksana, dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Dalam pengelolaan kependudukan kendala-kendala yang sering ditemui antara lain masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama di tataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan. Adanya koordinasi dan arahan yang terus menerus dari pimpinan agar adanya keseragaman pelayanan di setiap TPKD sesuai dengan peraturan terbaru. Upaya peningkatan sumber daya manusia diupayakan melalui kursus-kursus singkat di bidang penguasaan teknologi administrasi kependudukan yang terkini antara lain SIAK Terpusat dan melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai peraturan perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kependudukan demi terwujudnya pelayanan prima. Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan / profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan.

Beberapa penghargaanpun telah berhasil diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya peningkatan kualitas pelayanan dalam hal sistem dan prosedur, sumber daya manusia pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, yaitu berhasil meraih kategori Pelayanan Publik Sangat Baik dari Kemenpan-RB sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan berhasil meraih penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenpan-RB pada tahun 2021.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- 1) Jaringan SIAK yang Terpusat yang membutuhkan jaringan internet yang lebih kuat terutama pada saat pelayanan keliling dengan mobil keliling yang letaknya jauh dari pusat Kota Semarang atau di pedesaan.
- 2) Dengan sistem SIAK Terpusat yang tidak menyediakan database kependudukan terintegrasi di Kabupaten / Kota, sehingga apabila ada perangkat daerah lain yang membutuhkan data kependudukan, maka akan mengalami kesulitan dalam pengolahan dan penyajian datanya dikarenakan database kependudukan hanya dimiliki oleh pusat yaitu Dirjen Dukcapil dan Kabupaten / Kota tidak memiliki database kependudukan sendiri di tingkat Kabupaten / Kota.
- 3) Implementasi identitas digital bagi seluruh warga Kota Semarang merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan penggunaan identitas digital ini, Agar masyarakat lebih mudah, cepat menerima dan tidak ada penolakan dari masyarakat dalam perubahan ke arah

transformasi digital dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ini.

b. Peluang:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kantor pelayanan yang tersebar di 16 Kecamatan, hal ini merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan adminduk, sehingga bagi masyarakat
- 2) Transformasi digital saat ini sudah menjadi suatu tuntutan, tidak terkecuali dalam pelayanan administrasi kependudukan, Disdukcapil Kota Semarang juga telah menerapkan pelayanan online kependudukan yang diberi nama Sistem Informasi Dukcapil Online Kependudukan atau yang disingkat dengan sebutan SiDenok. Dengan Aplikasi SiDenok masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan pelayanan adminduk tanpa harus datang ke tempat pelayanan. Dengan aplikasi SiDenok maka masyarakat dapat mendaftarkan permohonan dokumen administrasi kependudukan melalui aplikasiberbasis website dan andorid.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas dengan sistem kerja yang mudah beradaptasi dengan adanya peraturan-peraturan adminduk yang terbaru. Saat ini telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan melakukan penyederhanaan persyaratan untuk penerbitan dokumen-dokumen administrasi kependudukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam menyusun Renja Tahun 2023 telah melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang ditelaah dalam tabel 2.4.1 berikut ini :

TABEL 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.475.777.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				23.443.105.241	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.475.777.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				23.443.105.241	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.40%	1.708.980.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.40%	1.824.495.957	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00%				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00%		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428.000 dokumen	1.371.980.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428000 dokumen	1.505.754.857	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Dinas	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan	6 penduduk	26.300.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non	6 dokumen	9.707.280	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kependudukan		rentan administrasi kependudukan			Administrasi Kependudukan		Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	107.500 dokumen	26.300.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107.500 dokumen	11.074.560	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		61.000.000	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		0	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12%	1.036.755.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	790.498.560	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320.500 dokumen	221.625.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	320.500 dokumen	694.474.457	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	212.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	261.307.800	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	11.839.160	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	10 jenis dokumen	197.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 dokumen	249.468.640	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	99.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	50.181.780	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	12 pelayanan	24.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	17.846520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	4 fasilitasi pelayanan	26.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	11.001.520	
2.12.02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	1 dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				0	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan sosialisasi pendaftaran penduduk	4%	28.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4 laporan	12.957.220	
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	200%	21.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	200 dokumen	8.376.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	26.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	7.251.520	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	12%	26.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	12 laporan	7.251.520	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas			0	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		0	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	679.300.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	560.206.429	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	497.500.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	421.065.804	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen	45.425 dokumen	54.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	45.425 dokumen	46.176.620	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		atas pelaporan peristiwa penting			Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	3%	311.500.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	277.405.680	
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1 dokumen	22.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	6.261.984	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	2 jenis dokumen / formulir / buku	110.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 paket	91.221.520	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	118.500.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	132.639.105	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 pelayanan	24.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	9.746.520	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	4%	21.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	103.664.545	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.02.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil		31.500.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dinas			0	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Cakupan sosialisasi terkait pencatatan sipil	4%	21.000.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 laporan	10.851.520	
2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	100%	21.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	100%	8.376.520	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	63.300.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	6.501.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12%	26.300.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	6.501.520	
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan		21.000.000	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data	Dinas			0	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil					Kependudukan terkait Pencatatan Sipil					
		Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 laporan	16.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Dinas			0	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	804.700.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	346.827.620	
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	477.500.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	51.300.310	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	12%	26.500.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	6.876.520	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		425.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas			0	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Persentase Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2%	26.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	44.423.790	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi	100%	21.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi	100%	6.971.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kependudukan		administrasi Kependudukan			Administrasi Kependudukan		administrasi Kependudukan			
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 dokumen	21.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 dokumen	6.971.520	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	186.200.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	255.756.990	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12%	29.500.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	8.071.280	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	4 fasilitasi pelayanan	49.500.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	98.140..150	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	10%	52.600.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	11.376.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	6%	33.600.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	131.251.250	
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10%	21.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	6.971.520	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	120.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	32.798.800	
2.12.04.2.04.02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Dinas	Jumlah laporan Supervisi Besama	4 laporan	33.000.000		Dinas			0	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan										
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	22.832.280	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12.707.280	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	Dinas	Cakupan SDM yang mendapatkan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan	4%	51.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	4 laporan	20.091.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Data Kependudukan		pendayagunaan data kependudukan			Data Kependudukan		Data Kependudukan			
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	96.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	121.157.880	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	96.400.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	121.157.880	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0.00	59.400.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0.00	0	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	37.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2.00	121.157.880	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	22.186.397.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	20.590.417.355	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	13.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	12.971.340	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 dokumen	1.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	819.520	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	1.308.640	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	1.608.550	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1.00	3.720.160	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dokumen DPA SKPD			
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	2.315.430	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	1.287.520	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1.950.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	1.911.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.727.692.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	12.268.557.641	
			Pelaporan Keuangan SKPD	100%							
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	17.459.092.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260.00	12.038.492.241	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	1%	260.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	226.202.840	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Laporan keuangan akhir tahun	1%	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	695.200	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Laporan Keuangan Semesteran	12%	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	1.879.840	
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1%	2.200.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	1.287.520	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	166.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	24.418.640	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Cakupan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	166.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.00	24.418.640	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.229.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	3.258.744.691	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Komponen instalasi listrik yang tersedia	100%	189.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	69.046.350	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	159.558.307	
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Peralatan rumah tangga perkantoran	100%	206.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	121.234.420	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Logistik kantor	100%	210.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00	437.262.145	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	Barang cetakan dan penggandaan	100%	210.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00	182.882.150	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Fasilitasi kunjungan tamu	100%	27.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	14.850.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100%	127.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	558.129.200	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Pengelolaan arsip dinamis	100%	52.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00	61.960.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dinas	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	160.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	12.00	1.617.822.119	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	402.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	774.709.484	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas	Mebel perkantoran	100%	122.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50.00	102.789.500	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Peralatan dan mesin	100%	280.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36.00	671.919.984	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	1.725.855.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3.024.910.859	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	716.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12.00	983.898.800	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sumber Daya Air dan Listrik		dan Listrik yang Disediakan			
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jasa pelayanan umum kantor	100%	1.009.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	2.041.012.059	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	921.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.226.104.700	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	526.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35.00	389.990.660	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Pemeliharaan mebel	100%	16.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125.00	18.907.200	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100%	114.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	515.00	383.702.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	147.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18.00	352.566.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	118.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	80.938.840	
JUMLAH					25.475.777.000					23.443.105.241	

Pada Rancangan Awal RKPD 2023 dengan hasil analisa kebutuhan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah program tetap yaitu 5 (lima) Program
- b. Jumlah kegiatan pada Rancangan Awal semula terdapat 5 Program, 19 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan.
- c. Sedangkan pada jumlah Rancangan Hasil Analisa Kebutuhan terdapat 5 Program, 19 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan.
- d. Jumlah alokasi anggaran semula pada Rancangan Awal yaitu sebesar Rp. 25.475.777.000,- terdapat efisiensi menjadi Rp. 23.443.105.241,- pada Rancangan Hasil Analisa Kebutuhan RKPD.

Untuk tahun 2023, seluruh alokasi anggaran bersumber dari APBD dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Pusat tidak mengalokasikan penyediaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, (Pasal 32, ayat 6) Dalam hal jenis DAK Non Fisik tidak dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa DAK Non Fisik sesuai dengan petunjuk teknis paling akhir yang diterbitkan oleh Kementerian Negara / Lembaga terkait.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja SKPD hasil forum SKPD dengan

cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/SKPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat kota disajikan dalam tabel 2.5.1 sebagai berikut :

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan	16 Kecamatan	Cakupan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	100%	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan jangka Panjang yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan jangka menengah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan

pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2024. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024 dengan mengangkat Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah Kebijakan dan Strategis khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas program dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Program Prioritas Pembangunan Nasional
Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tema	Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan
1	Revolusi Mental	Daya rekat sosial dalam rangka kemajemukan	Pemenuhan akta kelahiran untuk anak
2	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Akses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik

Operasionalisasi Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri pada tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang memuat di dalamnya dukungan Kemendagri atas pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Prioritas K/L. Adapun program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung prioritas tersebut dilaksanakan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pokok-pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
- b. Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota
- d. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
- e. Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
- f. Jumlah Kab/Kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan Provinsi dan Nasional
- g. Terpenuhinya Sarpras SIAK di daerah dan data center kependudukan
- h. Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online
- i. Jumlah daerah yang terfasilitasi bimbingan teknis pendampingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan
- j. Jumlah Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun
- k. Terpenuhinya Blangko KTP-el untuk daerah
- l. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- m. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik
- n. Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu, masalah yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan, sampai saat ini data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM daerah dalam pengelolaan SIAK, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas; dan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2023, maka disusun strategi pembangunan administrasi kependudukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan dan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan adalah:

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, tepat dan akurat;
2. Meningkatkan pembangunan pelayanan publik yang berkualitas di bidang Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel;
5. Pengembangan kualitas SDM;
6. Peningkatan dukungan sarana prasarana aparatur.

Beberapa hal pokok yang perlu ditindaklanjuti di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan strategis nasional adalah :

1. Dalam rangka pengembangan SAK terpadu adalah penerapan KTP elektronik dengan indikator kabupaten/kota melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk.
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator Kementerian/Lembaga dan kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan data *warehouse* NIK Nasional.
3. Tersusunnya dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang.

Sedangkan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana Tabel 3.2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023
TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang		
SASARAN :	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,40%
1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	71,00%
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	97,20%
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%
	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 (empat) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 12 (dua kegiatan pelaksanaan/pembangunan).
3. Jumlah total kebutuhan dana /pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 23.443.105.241,00 seluruhnya bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian :
 - a. Rp 20.590.417.355,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 2.852.687.886,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

4.1 Program dan Kegiatan

Didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Program kegiatan tahun 2023. Program dan kegiatan dimaksud disusun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota
Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD;
 - f. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ;
 - c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD;
 - e. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ;
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu;
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

- h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
 - i. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan mebel;
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas;
 - b. Pemeliharaan mebel;
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - d. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - e. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
2. Program Pendaftaran Penduduk
- Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
- 2.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- a. Pendataan penduduk non permanen dan rentan ;
 - b. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk;
 - c. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.

2.2. Penataan Pendaftaran Penduduk

- a. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk;
- b. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.

2.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk;
- b. Fasilitasi pendaftaran penduduk;
- c. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk;
- d. Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk.

2.4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a. Pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran penduduk;

3. Program Pencatatan Sipil

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting;
- b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil;
- c. Penyusunan tata cara, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil;
- d. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.
- e.

3.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil;
- b. Fasilitasi terkait pencatatan sipil;
- c. Sosialisasi terkait pencatatan sipil;
- d. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil.

3.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

4.1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- a. Pengolahan dan penyajian data kependudukan
- b. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah

4.2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

3.3. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- a. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- b. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- c. Penyelenggaraan dan pemanfaatan data kependudukan
 - d. Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - e. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi
- 3.4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - b. Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 4.1. Penyusunan Profil Kependudukan
- a. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 tersebut diatas beserta prakiraan maju tahun 2024 dirinci sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

TABEL 4.1.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Sumber Da- na	Cata- tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Progra m	Keluaran Sub Kegiatan								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			23.443.105.241			26.305.976.000			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.590.417.355			22.532.121.000			
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.971.340			14.600.000			
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	3 Dokumen	819.520	APBD	100%	1.950.000
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Dokumen	1.308.640	APBD	100%	1.950.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Dokumen	1.608.550	APBD	100%	1.950.000	
2	12	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Dokumen	3.720.160	APBD	100%	2.900.000	
2	12	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Dokumen	2.315.430	APBD	100%	1.950.000	
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Laporan	1.287.520	APBD	100%	1.950.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	2 Laporan	1.911.520	APBD	100%	1.950.000	
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.268.557.641		16.475.321.000		
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	89 Orang/bulan	12.038.492.241	APBD	100%	16.236.721.000	
2	12	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Dokumen	226.202.840	APBD	100%	230.000.000	
2	12	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Kinerja Administrasi dan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Laporan	695.200	APBD	100%	4.200.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
					Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	12 Laporan	1.879.840	APBD	100%	2.200.000	
2	12	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	1 Dokumen	1.287.520	APBD	100%	2.200.000	
2	12	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.418.640			40.000.000	
2	12	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	100 Orang	24.418.640	APBD	100%	40.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Sumber Da- na	Cata- tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Progra m	Keluaran Sub Kegiatan						
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.258.744.691			1.742.400.000		
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	69.046.350	APBD		100%	120.000.000	
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	159.558.307	APBD		100%	60.000.000	
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	121.234.420	APBD		100%	206.000.000	
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Paket	473.262.145	APBD		100%	450.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Paket	182.882.150	APBD	100%	210.400.000	
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	12 Laporan	14.850.000	APBD	100%	27.000.000	
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	12 Laporan	558.129.200	APBD	100%	127.000.000	
2	12	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari	100%	2 Dokumen	61.960.000	APBD	100%	52.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	1.617.822.119	APBD	100%	490.000.000	
2	12	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						774.709.484		422.000.000		
2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Unit	102.789.500	APBD	100%	122.000.000	
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 Unit	671.919.984	APBD	100%	300.000.000	
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.024.910.859		2.916.000.000		
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	100%	12 Laporan	983.898.800	APBD	100%	716.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan						
					Perkantoran SKPD	Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kelurahan									
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	2.041.012.059	APBD	100%	2.200.000.000		
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.226.104.700			921.800.000		
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 Unit	389.990.660	APBD	100%	526.000.000		
2	12	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	125 Unit	18.907.200	APBD	100%	16.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Da- na	Cata- tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Progra m	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	450 Unit	383.702.000	APBD	100%	114.000.000	
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Unit	352.566.000	APBD	100%	147.000.000	
2	12	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Unit	80.938.840	APBD	100%	118.800.000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						1.824.495.957		2.327.355.000		
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1.505.754.857		1.989.355.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	6 Dokumen	9.707.280	APBD	71,00 % 99,40 %	26.300.000	
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	107500 Dokume	11.074.560	APBD	71,00 % 99,40 %	26.300.000	
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	12 Laporan	790.498.560	APBD	71,00 % 99,40 %	1.036.755.000	
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	320500 Dokume	694.474.457	APBD	71,00 % 99,40 %	900.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk						261.307.800		213.000.000		
2	12	02	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Perekaman KTP-el	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	1 Dokumen	11.839.160	APBD	71,00 % 99,40 %	16.000.000	
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	10 Dokumen	249.468.640	APBD APBD	71,00 % 99,40 %	197.000.000	
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						50.181.780		99.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	02	2,03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	12 Dokumen	17.846.520	APBD	71,00 % 99,40 %	24.000.000	
2	12	02	2,03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	4 Laporan	11.001.520	APBD	71,00 % 99,40 %	26.000.000	
2	12	02	2,03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	4 Laporan	12.957.220	APBD	71,00 % 99,40 %	28.000.000	
2	12	02	2,03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	71,00 % 99,40 %	200 Dokumen	8.376.520	APBD	71,00 % 99,40 %	21.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan							
					Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	Terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kelurahan									
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						7.251.520				26.000.000		
2	12	02	2,04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,00 % 99,40 %	12 Laporan	7.251.520	APBD		71,00 % 99,40 %	26.000.000		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						560.206.429			610.800.000			
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil						421.065.804			497.500.000			
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	45425 Dokumen	46.176.620	APBD		97,20 %	54.000.000		
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	97,20 %	3 Layanan	277.405.680	APBD		97,20 %	311.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
							Semua Kelurahan								
2	12	03	2,01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	1 Dokumen	6.261.984	APBD	97,20 %	22.000.000	
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	2 Paket	91.221.520	APBD	97,20 %	110.000.000	
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							132.639.105			87.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	12 Laporan	9.746.520	APBD	97,20 %	24.000.000	
2	12	03	2,02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	4 Laporan	103.664.545	APBD	97,20 %	21.000.000	
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	4 Laporan	10.851.520	APBD	97,20 %	21.000.000	
2	12	03	2,02	09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	100 Dokumen	8.376.520	APBD	97,20 %	21.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Sumber Da- na	Cata- tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)					Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Progra m	Keluaran Sub Kegiatan							
							Terkait Pencatatan Sipil										
2	12	03	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						6.501.520			26.300.000			
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	12 Laporan	6.501.520	APBD		97,20 %	26.300.000		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						346.827.620			740.700.000			
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						51.300.310			52.500.000			
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	12 Dokumen	6.876.520	APBD		100%	26.500.000		
2	12	04	2,01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	97,20 %	2 Laporan	44.423.790	APBD		100%	26.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
						Pembangunan Daerah	Semua Kelurahan								
2	12	04	2,02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						6.971.520			21.000.000	
2	12	04	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,20 %	2 Dokumen	6.971.520	APBD	100%	21.000.000	
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						255.756.990			186.200.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2	12	04	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	8.017.280	APBD	100%	29.500.000	
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	98.140.150	APBD	100%	49.500.000	
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Dokumen	11.376.520	APBD	100%	52.600.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan						
						perjanjian kerjasama										
2	12	04	2,03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Laporan	131.251.520	APBD	100%	33.600.000		
2	12	04	2,03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Dokumen	6.971.520	APBD	100%	21.000.000		
2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						32.798.800			481.000.000		
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi	Persentase Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	100%	12 Laporan	12.707.280	APBD	100%	430.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Sumber Da- na	Cata- tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Progra m	Keluaran Sub Kegiatan					
					Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	Semua Kelurahan							
2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	20.091.520	APBD	100%	51.000.000	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						121.157.880			95.000.000	
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan						121.157.880			95.000.000	
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	121.157.880	APBD	100%	95.000.000	
TOTAL												23.443.105.241			26.305.976.000

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021 – 2024 yang merupakan dokumen lima tahunan bagi pelaksanaan program-program pembangunan SKPD untuk lima tahun kedepan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Renja SKPD merupakan bagian dari Renstra SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang.

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun

2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

5.3 Kesimpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam upaya ikut mendorong tercapainya visi dan misi Kota Semarang telah menyiapkan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang menunjang peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan mengutamakan pendekatan lokasi dan ekstensifikasi waktu pelayanan kepada masyarakat antara lain kegiatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan keliling, akhir pekan dan malam hari. Selain itu peningkatan pelayanan publik juga diarahkan pada peningkatan

sarana pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat pemohon.

- b. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan jumlah kepemilikan KTP-el diupayakan dengan meningkatkan jumlah perekaman KTP-el melalui pelayanan perekaman langsung ke rumah bagi penduduk yang tidak mampu datang ke tempat perekaman (sakit, lansia jompo dan difabel) yang mengajukan permohonan, melaksanakan perekaman bagi wajib KTP-el pemula dan melaksanakan pelayanan langsung di kelurahan.
 - 2) Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran diupayakan dengan melaksanakan pelayanan permohonan akta catatan sipil di Dinas dan 16 TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) Kecamatan, kerjasama pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan Rumah Sakit, pelayanan terintegrasi (Pelayanan Paket 3 in 1) dan memberikan pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran pada tahun 2023 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang.
 - 3) Meningkatkan kepemilikan KIA diupayakan dengan melaksanakan pelayanan KIA di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK Kecamatan dan melaksanakan paket pelayanan KIA bagi pemohon akta kelahiran. Selain itu juga dengan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dan KIA dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Yayasan dan Panti Asuhan.
- c. Kegiatan pelayanan mobil keliling bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lokasi di pusat keramaian yang mudah dijangkau oleh masyarakat pemohon administrasi kependudukan yang diharapkan dapat membantu menekan tingkat keterlambatan permohonan administrasi kependudukan.

5.4 Hambatan / Kendala

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang saat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan yang belum sesuai target yang ditetapkan yaitu kepemilikan KIA dan kepemilikan akta catatan sipil.
- b. Kurangnya kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan di dalam masyarakat maupun di lingkungan aparatur penyelenggara pelayanan. Jika lingkungan tersebut terbentuk maka diharapkan akan membentuk lingkungan yang baik menuju tertib administrasi kependudukan.
- c. Pelayanan di beberapa TPDK Kecamatan menempati bangunan yang kurang representatif dibandingkan TPDK Kecamatan lainnya yang sudah menempati gedung sendiri, yaitu di TPDK Kecamatan Semarang Tengah, Gayamsari dan Tugu, sehingga pelayanan menjadi kurang nyaman.
- d. Kurang optimalnya manajemen kinerja pelayanan mengakibatkan banyaknya jumlah pengaduan. Hal ini perlu disikapi dengan pembenahan dan penataan serta pengelolaan sumber daya yang terlibat baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, metode dan sistem yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dapat menjamin kelancaran dan kecepatan proses pelayanan selanjutnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

5.5 Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan jumlah kepemilikan KIA diupayakan antara lain dengan meningkatkan pelayanan KIA di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK Kecamatan, meningkatkan kapasitas cetak KIA

dengan menambah jumlah peralatan cetak yang ditempatkan di TPDK Kecamatan dan melakukan kerjasama pemanfaatan KIA dengan lembaga/instansi yang terkait untuk memberikan manfaat lebih untuk anak yang memiliki KIA. Juga dengan melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk percepatan penerbitan Kerjasama dengan sekolah SD dan SMP di Kota Semarang. Selain itu juga dengan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang, Yayasan dan Panti Asuhan.

- 2) Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran diupayakan dengan melaksanakan kerjasama penerbitan akta kelahiran dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta, melaksanakan pelayanan langsung di kelurahan dan memberikan pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran.
- b. Membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.
 - c. TPDK Kecamatan merupakan tempat pelayanan administrasi kependudukan yang terdekat dapat diakses oleh masyarakat yang diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pelayanan. Penyediaan sarana gedung kantor TPDK Kecamatan yang representatif akan memberikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat pemohon maupun bagi petugas yang melayani.
 - d. Perbaikan penyelenggaraan pelayanan akan didorong untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, antara lain melalui :
 - 1) Menjaga dan meningkatkan pembangunan Zona Integritas yang telah dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementrian Pan dan RB dengan melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas, menanamkan budaya kerja yang baik dalam melayani

masyarakat dan pencegahan gratifikasi yang dilakukan secara terus menerus agar proses internalisasi berjalan dengan baik.

- 2) Perbaiki prosedur pelayanan yang lebih memberikan kemudahan pada masyarakat.
- 3) Perluas akses pelayanan administrasi kependudukan dengan membuka pelayanan di akhir pekan dan pelayanan malam hari, sehingga bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dokumen adminduk di hari dan jam kerja tetap dapat melakukan permohonan pelayanan di akhir pekan ataupun pada malam hari.
- 4) Penyediaan pelayanan administrasi kependudukan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) dan penyediaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang dekat dengan masyarakat, juga menyediakan pelayanan online / daring (dalam jaringan).
- 5) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria pelayanan administrasi kependudukan yang baik.
- 6) Menanganani pengaduan masyarakat dengan cepat dan responsif untuk mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

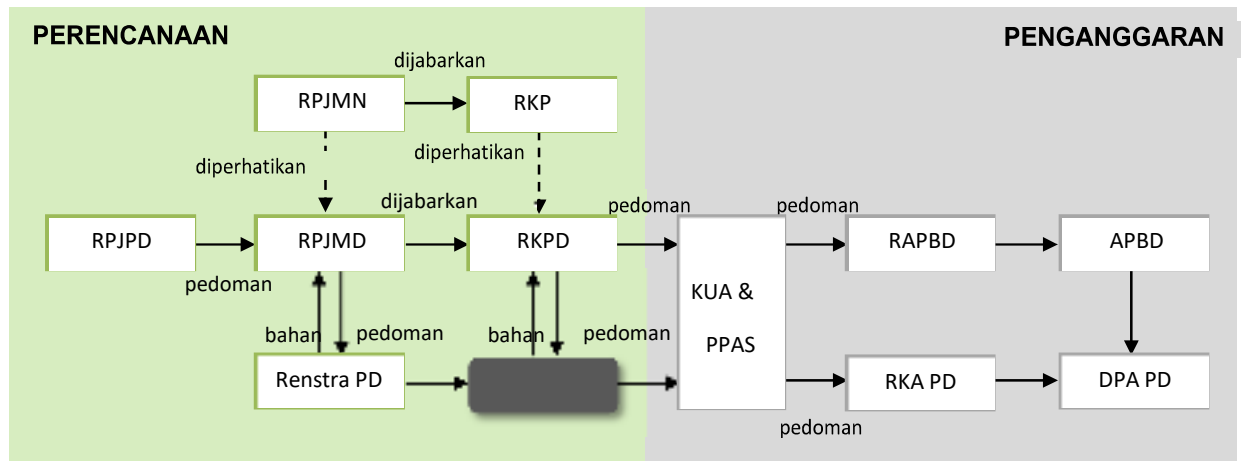
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus



melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang.

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang ;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal

RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 20.132.224.889 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 18.279.253.957 atau sebesar (90,80) %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	70,13 %	70,13 %	34,03 %
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	44,44 %	44,44%	28,89 %
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perubahan Renja Dinas	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00 %	3 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	53,40%	53,40 %	30,68%
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	14 Bln	14 Bln	100,00 %	14 Bln	8 Bln	57,00 %	31,42 %
5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	60,00%	60,00%	29,4%
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Pengendalian	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	30,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penduduk dan Keluarga Berencana									
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,94%	72,94%	34,59%
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	100,00 %	17 jenis	10 jenis	58,82 %	31,76%
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100,00 %	15 Jenis	11 Jenis	73,33 %	34,66%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100,00 %	20 jenis	13 jenis	65,00 %	33,00%
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00 %	12 jenis	10 jenis	83,33 %	36,66%
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00 %	12 jenis	9 jenis	75,00 %	35,00%
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00 %	100 Orang	78 Orang	78,00 %	35,60%
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	12 bulan	6 bulan	50,00 %	30,00%
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00 %	10 Unit	10 Unit	100,00 %	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Berbasis Elektronik pada SKPD										
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%
5.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00 %	8 Unit	8 Unit	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	30,00%
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 bulan	6 bulan	50,00%	30,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Adminstrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	100,00%	96 Orang	48 Orang	50,00%	30,00%
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	40,00%
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	100,00%	85 Unit	85 Unit	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Operasional atau Lapangan										
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	82 Unit	82 Unit	82 Unit	100,00%	82 Unit	82 Unit	100,00%	40,00%
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	1822 m2	1822 m2	1822 m2	100,00%	1822 m2	1822 m2	100,00%	40,00%
5.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.51%	98,03%	98,03%
5.01.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.51%	98,03%	98,03%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Pengendalian Kuantitas Penduduk										
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	30 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	3 Keg	50,00%	30,00%
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.01.09	Sub Kegiatan	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal									
5.01.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	15 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100,00%	3 Keg	2 Keg	66,67%	33,33%
5.01.02.2.01.13	Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	30,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Kepada Pemangku Kepentingan										
		Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	20 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100,00%	4 Keg	4 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.51%	98,03%	98,03%
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	5 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	2 Dok	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	15 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	100,00%	3 Cetak	2 Cetak	66,67%	33,33%
		Transport Kegiatan dalam kota	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
		Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021	20 keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100,00%	4 Keg	2 Keg	50,00%	30,00%
5.01.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	2100 Buku	420 Buku	420 Buku	420 Buku	100,00%	420 Buku	300 Buku	71,43%	34,29%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Lapangan dan Pelayanan KB										
		Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	30,00%
5.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	40,00%
5.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00 %	1.99 %	2.00 %	2.00 %	100,00%	2,00	2,00	100,00%	100,00%
5.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.44 %	74.99 %	78.25 %	78.25 %	100,00%	77.04 %	73.69%	95,65%	95,16%
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	9 Keg	9 Keg	9 Keg	100,00%	9 Keg	5 Keg	55,56%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00%	8 Keg	4 Keg	50,00%	30,00%
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan Dikumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00%	8 Keg	4 Keg	50,00%	40,00%
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.44%	74.99 %	78.25 %	78.25 %	100 %	77.04%	73.69%	95,65%	95,16%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.03	Kegiatan	Cakupan PUS Unmeet need	7.00 %	10.46 %	7.70 %	10.89 %	141 %	9.08%	11.26%	80,64%	62,17%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.80 %	11.74 %	11.60 %	19.63 %	59 %	11.20%	4.49 %	249,44%	240,53%
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	240 Keg	48 Keg	48 Keg	48 Keg	100,00%	48 Keg	40 Keg	83,33%	36,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	dan Kelompok Kegiatan										
5.01.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KB	240 Keg	48 Keg	48 Keg	48 Keg	100,00%	48 Keg	40 Keg	83,33%	36,67%
5.01.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	4 Keg	66,67%	33,33%
5.01.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44%	74.99 %	78.25 %	78.25 %	100 %	77.04%	73.69%	95,65%	95,16%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
5.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 kec	16 kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	47.68 %	58.89 %	58.89 %	100 %	60.02%	39.16%	65,24%	64,81%
5.01.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	47.68 %	58.89 %	58.89 %	100 %	60.02%	39.16%	65,24%	64,81%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Kesejahteraan Keluarga										
5.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%
5.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%
5.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
5.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Kec	16 kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
5.01.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%
5.01.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	47.68 %	58.89 %	58.89 %	100 %	60.02%	39.16%	65,24%	64,81%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

a. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan PUS Unmet need	7.00	10.89	64,28	10.46
2.	Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)	11.20	19.63	57.05	11.74
3.	Cakupan peserta KB Aktif	78.00	73.88	94.71	74.99

Pada tahun 2021 Cakupan PUS Unmet need capaian kinerjanya belum berhasil memenuhi target. Target 7.00 % tercapai 10.89 % (64,28 %) hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 dimana acara pertemuan dibatasi. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 0,43 % dibandingkan capaian tahun 2020 (sebesar 10.46 %).

Selain itu juga terjadi penurunan Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dari yang ditargetkan 11.20 % tercapai 19.63 % , hal tersebut dikarenakan juga kondisi pandemi covid 19, dimana Pelayanan KB/kontak langsung dibatasi. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 7.89 % dibandingkan capaian tahun 2020 (sebesar 11.74 %).

Sedangkan pada Cakupan peserta KB Aktif dari yang ditargetkan 78.00 % tercapai 73.88 % , atau belum berhasil mencapai target 100%. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 1.11 % dibandingkan capaian Tahun 2020 sebesar 74.99 %.

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
Cakupan keaktifan anggota Bina Keluarga		60.02	39.39	65.63	47.68

Pada tahun 2021 belum berhasil mencapai target Cakupan Keaktifan anggota Bina Keluarga 60,02 % tercapai 39.39 % dan terjadi penurunan sebesar 8.29% dari capaian Tahun 2020.

c. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan PUS yang istrinya < 20 th	0.50	0.58	86.2	0.58

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai belum berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 % tercapai 0,58 %. Capaian kinerja tersebut masih sama dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,58 %.

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

a. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	%	
1. Cakupan PUS Unmet need	7.00	10.89	64,28	10.46
2. Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)	11.20	19.63	57.05	11.74
3. Cakupan peserta KB Aktif	78.00	73.88	94.71	74.99

Pada tahun 2021 Cakupan PUS Unmet need capaian kinerjanya belum berhasil memenuhi target. Target 7.00 % tercapai 10.89 % (64,28 %) hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 dimana acara pertemuan dibatasi. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 0,43 % dibandingkan capaian tahun 2020 (sebesar 10.46 %).

Selain itu juga terjadi penurunan Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dari yang ditargetkan 11.20 % tercapai 19.63 % , hal tersebut dikarenakan juga kondisi pandemi covid 19, dimana Pelayanan KB/kontak langsung dibatasi. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 7.89 % dibandingkan capaian tahun 2020 (sebesar 11.74 %).

Sedangkan pada Cakupan peserta KB Aktif dari yang ditargetkan 78.00 % tercapai 73.88 %, atau belum berhasil mencapai target 100%. Terjadi

penurunan capaian kinerja sebesar 1.11 % dibandingkan capaian Tahun 2020 sebesar 74.99 %.

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan keaktifan anggota Bina Keluarga	60.02	39.39	65.62	47.68

Pada tahun 2021 belum berhasil mencapai target meningkatkan Cakupan keaktifan anggota Bina Keluarga 58,89% tercapai 39.39% dan terjadi penurunan sebesar 8.29% dari capaian Tahun 2020.

c. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan PUS yang istrinya < 20 th	0.50	0.58	86.2	0.58

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai belum berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 % tercapai 0,58 %. Capaian kinerja tersebut masih sama dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,58 %.Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan PD Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	Urusan Wajib Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.132.224.889	18.279.253.957	90.80	1.852.970.932

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.713.186.984	7.243.565.663	83.14	1.469.621.321
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.292.264	9.290.600	98.91	1.664
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.017.118	3.017.100	100.00	18
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.028.564	1.028.000	99.95	564
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	859.364	859.300	99.99	64
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	607.509	607.500	100.00	9
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	522.909	522.000	99,82	909
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.559.364	1.559.300	100.00	64
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.697.436	1.697.400	100.00	36
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.031.830.998	5.838.621.445	83.04	1.193.209.553
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.760.955.389	5.605.314.745	82.91	1.155.640.644
	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.568.727	700.000	44.62	868.727
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.894.891	1.894.800	100.00	91
	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	266.562.309	207.452.300	86.49	59.110.009
	e Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	849.682	849.600	99.99	82
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.726.662	283.763.834	80.00	70.962.828
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.624.000	5.618.000	99.89	6.000
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.642.191	7.227.500	26.15	20.414.691
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.836.196	22.168.700	97.08	667.496
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.698.796	38.199.500	98.71	499.296
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.308.449	7.984.134	96.10	324.315
	f Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.967.000	6.600.000	60.18	4.367.000
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.395.000	22.726.000	44.22	28.669.000
	h Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	189.255.030	173.240.000	91.54	16.015.030
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.334.720	23.850.000	87.25	3.484.720

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	a Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.334.720	23.850.000	87.25	3.484.720
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.406.840	389.901.402	85.43	66.505.438
	a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.106.840	53.927.402	46.05	63.179.438
	b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.300.000	335.974.000	99.02	3.326.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.595.500	698.138.382	83.75	135.457.118
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	623.140.000	541.698.125	86.93	81.441.875
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.865.000	42.814.500	99.88	50.500
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.590.500	113.625.757	67.80	53.964.743
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	643.703.207	599.094.521	93.08	44.608.686
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	293.814.067	280.565.903	95.49	13.248.164
	a Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	43.225.000	42.784.000	98.98	441.000
	b Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	77.615.737	77.615.137	100.00	600
	c Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	58.521.192	52.148.300	89.11	6.372.892
	d Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	51.534.247	46.676.500	90.57	4.857.747
	e Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	62.917.891	61.341.966	97.50	1.575.925
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	349.889.140	318.528.618	91.05	31.360.522
	a Perumusan Parameter Kependudukan	63.993.203	62.644.103	97.96	1.349.100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	b Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5.523.581	3.193.100	57.81	2.330.481
	c Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	37.250.909	35.970.000	96.56	1.280.909
	d Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.783.818	24.783.818	100.00	0
	e Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	22.223.409	21.423.409	96.40	800.000
	f Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	95.371.362	92.804.545	97.31	2.566.817
	g Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17.685.454	16.885.345	95.48	800.109
	h Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	59.685.414	53.805.800	90.15	5.879.614
	i Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	23.371.990	7.018.498	30.03	16.353.492
C	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.735.057.886	9.380.697.121	96.36	354.360.765
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.497.961.112	3.478.348.758	99.44	19.612.354
	a Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	299.941.743	285.376.270	95.14	14.565.473
	b Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	14.522.500	14.522.500	100.00	0
	c Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	389.371.869	384.324.990	98.70	5.046.879
	d Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2.596.753.000	2.596.753.000	100.00	0
	e Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	197.372.000	197.371.998	100.00	2
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.282.759.258	2.181.284.364	95.55	101.474.894
	a Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	76.574.817	71.650.000	93.57	4.924.817

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	b Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.025.983.941	930.973.364	90.74	95.010.577
	c Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.180.200.500	1.178.661.000	99.87	1.539.500
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.970.942.414	2.748.978.999	92.53	221.963.415
	a Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	256.802.000	232.733.000	90.63	24.069.000
	b Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	263.833.219	222.705.300	84.41	41.127.919
	c Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	103.667.440	87.263.100	84.18	16.404.340
	d Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	494.951.950	483.244.000	97.63	11.707.950
	e Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	83.729.805	82.919.580	99.03	810.225
	f Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	70.900.000	58.881.020	83.05	12.018.980
	g Peningkatan Kesertaan KB Pria	15.725.000	14.900.000	94.75	825.000
	h Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1.681.333.000	1.566.332.999	93.16	115.000.001
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	983.395.102	972.085.000	98.85	11.310.102
	a Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	191.715.102	180.405.000	94.10	11.310.102
	b Pembinaan Terpadu Kampung KB	791.680.000	791.680.000	100.00	0
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.040.276.812	991.921.043	95.35	48.355.769
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	918.394.003	871.986.108	94.95	46.407.895

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	a Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	139.796.954	139.775.127	99.98	21.827
	b Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	215.515.090	194.890.000	90.43	20.625.090
	c Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	86.011.183	81.475.000	94.73	4.536.183
	d Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	261.544.467	255.685.000	97.76	5.859.467
	e Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	215.526.309	200.160.981	92.87	15.365.328
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	121.882.809	119.934.935	98.40	1.947.874
	a Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	121.882.809	119.934.935	98.40	1.947.874

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 14 kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang adalah sebesar Rp 20.132.224.889,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 18.279.253.975,- dengan sisa sebesar Rp 1.852.970.914,- (90,80%) dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp.6.760.955.389,- realisasi Rp. 5.605.314.745,- dan sisa anggaran sebesar Rp 1.155.640.644,-
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 13.371.269.500,- Dengan realisasi sebesar Rp. 12.673.939.212,- (94,78 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 697.330.288,- (5,22 %).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2021-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	2020 (bila ada data)	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)			2.00 %	2.00 %	2.00 %	1.99 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Sasaran :									
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	PUS Unmeet need tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)		7.00 %	9.08 %	8.56 %	10.46 %	10.89 %	9.08 %	8.56 %
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Peserta KB Aktif		11.20 %	11.20 %	11.10 %	11.74 %	19.63 %	11.20 %	11.10 %
			78.00 %	77.04 %	77.14 %	74.99 %	73.88 %	77.04 %	77.14 %
			0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.58 %	0.58 %	0.50 %	0.50 %
	PUS yang isterinya < 20 tahun		60.02 %	60.02 %	60.02 %	47.68 %	39.39 %	60.02 %	60.02 %
	Anggota Bina Keluarga Aktif								

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan Dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)”, yang mempunyai target setiap tahunnya 2.00 %

b. Sasaran 1 **“Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB”** memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “PUS Unmeet need” belum berhasil memenuhi dari yang ditargetkan 7.00 % tercapai 10.89 % sehingga belum berhasil mencapai target. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 0,43 % dibandingkan capaian tahun 2020 (sebesar 10.46 %).
- 2) Indikator “tingkat putus alat kontrasepsi (DO)” terjadi penurunan Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dari yang ditargetkan 11.20 % tercapai 19.63 % ,namun demikian capaian kinerja menurun sebesar 7.89 % dibandingkan capaian tahun 2020 (sebesar 11.74 %).
- 3) Indikator “peserta KB Aktif” belum berhasil mencapai target dari yang ditargetkan 78.00 % tercapai 73.88 %. Hal ini menurun 1.11 % dibandingkan capaian Tahun 2020 sebesar 74.99 %.
- 4) Indikator “PUS yang isterinya < 20 tahun” belum berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 % tercapai 0,58 %. Capaian kinerja tersebut masih sama dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,58 %.

c. Sasaran 2 **“Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang”**

- 1) Indikator “keaktifan anggota Bina Keluarga” belum berhasil mencapai target meningkatkan Cakupan keaktifan anggota Bina Keluarga 60,02 % tercapai 39.39% dan terjadi penurunan sebesar 8.29% dari capaian Tahun 2020

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Menurunkan Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00 %	2.00 %	2.00 %	1.99 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %
2.	Menurunkan cakupan PUS Unmeet need	7.00 %	9.08 %	8.56 %	10.46 %	10.89 %	9.08 %	8.56 %
3.	Menurunkan cakupan tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.20 %	11.10 %	11.74 %	19.63 %	11.20 %	11.10 %
4.	Meningkatkan cakupan Peserta KB Aktif	78.00 %	77.04 %	77.14 %	74.99 %	73.88 %	77.04 %	77.14 %
5.	Menurunkan cakupan PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.58 %	0.58 %	0.50 %	0.50 %
6.	Meningkatkan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02 %	60.02 %	60.02 %	47.68 %	39.39 %	60.02 %	60.02 %

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan Fungsi Nama Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB menjadi salah satu penyumbang keberhasilan keluarga berkualitas di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD

yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber- KB, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi pengendalian penduduk, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD

serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,91 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: contoh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023

Materi Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023		
OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
Sosialisasi tentang Keluarga Berencana	Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang	45 Orang
Pengadaan Alat Peraga Penyuluhan KB	Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan	26 Unit
Pembinaan dan Pelatihan Kader Kampung KB	Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari	56 Orang

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat sinergi dan kepedulian antara Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan Mitra Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun masyarakat langsung melalui Musrenbang tahun 2022. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dan dipertimbangkan untuk masuk dalam RKPD tahun 2023.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sulitnya mencari kader yang berkompeten.
- b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di faskes (Dokter dan Bidang praktek swasta) sehingga data capaian pelayanan KB khususnya pelayanan kepada peserta KB baru belum tercapai.
- c. Masih tingginya perkawinan dini dimana usia istri kurang dari 20 tahun.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Melakukan pembinaan dengan menggunakan pola baru yaitu memperbanyak praktek dengan menggunakan Alat Peraga Edukasi (APE) serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader secara berjenjang.
- b. Meningkatkan intensitas pembinaan dan kunjungan ke Faskes khususnya ke DPS (Dokter Praktek Swasta) dan BPM (Bidan Praktek Mandiri)
- c. Meningkatkan Pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kegiatan PIK Remaja dan Pendidikan Kependudukan jalur masyarakat maupun jalur sekolah.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu

kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
- 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
- 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
- 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
- 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:

- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
- 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
- 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
- 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif”**. Namun sebagai OPD yang memiliki urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.963.500.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.963.500.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Disdalduk KB	Jumlah rekening listrik, telpon, air	100%	270.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Disdalduk KB	Jumlah rekening listrik, telpon, air dan koran	100%	270.000.000	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disdalduk KB	Jumlah pegawai Non ASN yang terbiayai	100%	360.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disdalduk KB	Jumlah pegawai Non ASN yang terbiayai	100%	360.000.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disdalduk KB	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	100%	45.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disdalduk KB	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	100%	45.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang disediakan	100%	55.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang disediakan	100%	55.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Disdalduk KB	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Disdalduk KB	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	35.000.000	
6	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdalduk KB	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	100%	8.000.000	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdalduk KB	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	100%	8.000.000	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdalduk KB	Jumlah peralatan rumah tangga	100%	8.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdalduk KB	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	8.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
			yang disediakan								
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdalduk KB	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdalduk KB	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	2.500.000	
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Disdalduk KB	Jumlah makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu	100%	80.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Disdalduk KB	Jumlah makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu	100%	80.000.000	
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	650.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	650.000.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100%	350.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100%	350.000.000	
12	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	Disdalduk KB	Jumlah pelaksanaan lembur pada tahun berkenaan	100%	100.000.000	Belanja jasa penunjang adm perkantoran	Disdalduk KB	Jumlah pelaksanaan lembur pada tahun berkenaan	100%	100.000.000	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.035.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.035.000.000	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Disdalduk KB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	100%	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Disdalduk KB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	2 unit	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Disdalduk KB	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100%	250.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Disdalduk KB	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	10 unit	250.000.000	
15	Pengadaan Meubelair		Jumlah mebeluer yang disediakan	100%	150.000.000	Pengadaan Meubelair		Jumlah mebeluer yang disediakan	10 unit	150.000.000	
16	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Disdalduk KB	Jumlah komponen gedung kantor yang diperbaiki	100%	505.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Disdalduk KB	Jumlah komponen gedung kantor yang diperbaiki	12 unit	505.000.000	
17	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Disdalduk KB	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara	100%	850.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Disdalduk KB	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara	110 unit	850.000.000	
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Disdalduk KB	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	100%	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Disdalduk KB	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	15 unit	30.000.000	
19	Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)	Disdalduk KB	Jumlah perpanjangan STNK pada tahun berkenaan	100%	50.000.000	Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)	Disdalduk KB	Jumlah perpanjangan STNK pada tahun berkenaan		50.000.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Disdalduk KB	Peningkatan penyusunan pelaporan tepat waktu dan regulatif.	100%	349.205.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Disdalduk KB	Peningkatan penyusunan pelaporan tepat waktu dan regulatif.	100%	349.205.000	
20	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Disdalduk KB	Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, BP, BPP yang diberikan	12 bln	288.315.000	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Disdalduk KB	Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, BP, BPP yang diberikan pada tahun berkenaan	12 bln	288.315.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
			pada tahun berkenaan								
21	Penyusunan Lkpj SkPerangkat Daerah	Disdalduk KB	Dokumen LKPJ	1 dok	10.913.000	Penyusunan Lkpj SkPerangkat Daerah	Disdalduk KB	Dokumen LKPJ	1 dok	10.913.000	
22	Penyusunan LKJIP	Disdalduk KB	Dokumen LKJIP	1 dok	10.438.000	Penyusunan LKJIP	Disdalduk KB	Dokumen LKJIP	1 dok	10.438.000	
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Disdalduk KB	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	10.438.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Disdalduk KB	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	10.438.000	
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	16 Kecamatan	Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	5.648.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Disdalduk KB	Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	5.648.000	
25	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Disdalduk KB	Dokumen Prognosis	1 dok	5.648.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Disdalduk KB	Dokumen Prognosis	1 dok	5.648.000	
26	Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH	Disdalduk KB	Dokumen Renja PERANGKAT DAERAH	1 dok	10.533.000	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Dokumen Renja PERANGKAT DAERAH	1 dok	10.533.000	
27	Penyusunan Rka Dan Dpa Perubahan	Disdalduk KB	DPPA	1 dok	7.272.000	Penyusunan Rka Dan Dpa Perangkat Daerah	Disdalduk KB	DPPA	1 dok	7.272.000	
28	Penyusunan Rka Dan Dpa SKPERANGKAT DAERAH	Disdalduk KB	RKA, DPA	2 dok	7.272.000	Penyusunan Rka Dan Dpa Perangkat Daerah	Disdalduk KB	RKA, DPA	2 dok	7.272.000	
IV	Program Keluarga Berencana		Cakupan PUS Unmeet need	9,88%	3.458.300.000	Program Keluarga Berencana		Cakupan PUS Unmeet need	9,88%	3.458.300.000	
			Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)	11,80%				Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)	11,80%		
29	Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Disdalduk KB	Jumlah Sarana Prasarana pelayanan KB yg disediakan	150 unit	550.000.000	Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Disdalduk KB	Jumlah Sarana Prasarana pelayanan KB yg disediakan	350 unit	550.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
30	Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Disdalduk KB	Operasional Penyuluhan/rakor KKBPK	32 keg	580.800.000	Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Disdalduk KB	Operasional Penyuluhan/rakor KKBPK	64 keg	580.800.000		
			Operasional sarana prasarana Penyuluhan KKBPK	32 keg					Operasional sarana prasarana Penyuluhan KKBPK	64 keg		
			Operasional wilayah kampung KB	32 keg					Operasional wilayah kampung KB	64 keg		
31	Pengelolaan alat dan Kontrasepsi (ALOKON)	Disdalduk KB	Jumlah Penyediaan alat dan obat kontrasepsi pada pelayanan KB	12 keg	260.000.000	Pengelolaan alat dan Kontrasepsi (ALOKON)	Disdalduk KB	Jumlah Penyediaan alat dan obat kontrasepsi pada pelayanan KB	12 keg	260.000.000		
			Jumlah kegiatan Pendistribusian Alokon pada pelayanan KB	32 keg					Jumlah kegiatan Pendistribusian Alokon pada pelayanan KB	96 keg		
32	Jaminan Pelayanan KB	Disdalduk KB	Jumlah Rumah Konesling KESPRO	2 unit	1.102.500.000	Jaminan Pelayanan KB	Disdalduk KB	Jumlah Rumah Konesling KESPRO	2 unit	1.102.500.000		
			Jumlah provider pelayanan KB yang dilatih	30 org					Jumlah provider pelayanan KB yang dilatih	30 org		
			Jumlah perusahaan yang diberikan penyuluhan KB	2 unit					Jumlah perusahaan yang diberikan penyuluhan KB	2 unit		
33	Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin	Disdalduk KB	Jumlah kegiatan Road show TPKBK melalui kegiatan pelayanan KB Statis dan Muyan	32 keg	810.000.000	Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin	Disdalduk KB	Jumlah kegiatan Road show TPKBK melalui kegiatan pelayanan KB Statis dan Muyan	56 keg	810.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
			Jumlah kegiatan Gerakan Terpadu Pogram KB bersama mitra kerja	7 keg				Jumlah kegiatan Gerakan Terpadu Pogram KB bersama mitra kerja	14 keg		
34	Peningkatan kapasitas pembina KKBPK		Jumlah kegiatan pembinaan administrasi KKBPK	3 keg	155.000.000	Peningkatan kapasitas pembina KKBPK		Jumlah kegiatan pembinaan administrasi KKBPK	3 keg	155.000.000	
			Jumlah kegiatan peningkatan kinerja pembina KKBPK	2 keg				Jumlah kegiatan peningkatan kinerja pembina KKBPK	2 keg		
V	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri	Disdalduk KB	Cakupan peserta KB Aktif	76,98%	2.773.000.000	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri	Disdalduk KB	Cakupan peserta KB Aktif	76,98%	2.773.000.000	
35	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Disdalduk KB	Jumlah kegiatan Penyebaran informasi KKBPK	12 keg	600.000.000	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Disdalduk KB	Jumlah kegiatan Penyebaran informasi KKBPK	12 keg	600.000.000	
			Jumlah kegiatan KKBPK melalui media	6 keg				Jumlah kegiatan KKBPK melalui media	6 keg		
36	Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja	Disdalduk KB	Jumlah kegiatan penguatan program KKBPK bagi mitra kerja	8 keg	723.000.000	Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja	Disdalduk KB	Jumlah kegiatan penguatan program KKBPK bagi mitra kerja	8 keg	723.000.000	
37	Fasilitasi Kegiatan PPKBD/SKD	Disdalduk KB	Jumlah PPKBD/SKD yang difasilitasi	177 org	700.000.000	Fasilitasi Kegiatan PPKBD/SKD	Disdalduk KB	Jumlah PPKBD/SKD yang difasilitasi	177 org	700.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
38	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Disdalduk KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola	16 buah	750.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Disdalduk KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola	16 buah	750.000.000	
VI	Progam Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Prosentase peningkatan anggota Bina Keluarga Aktif	56,86%	2.720.000.000	Progam Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Prosentase peningkatan anggota Bina Keluarga Aktif	56,86%	2.720.000.000	
39	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga	Disdalduk KB	Jumlah kader BKB dan BKL yang dilatih	400 org	860.000.000	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga	Disdalduk KB	Jumlah kader BKB dan BKL yang dilatih	400 org	860.000.000	
40	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Disdalduk KB	Jumlah kader UPPKS yang dilatih manajemen wirausaha	300 org	430.000.000	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Disdalduk KB	Jumlah kader UPPKS yang dilatih manajemen wirausaha	300 org	430.000.000	
41	Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan (UPPKS)	Disdalduk KB	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang dilatih ketrampilan usaha	400 org	330.000.000	Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan (UPPKS)	Disdalduk KB	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang dilatih ketrampilan usaha	400 org	330.000.000	
42	Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Disdalduk KB	Jumlah Konselor dan pendidik sebaya yang dilatih	250 org	710.000.000	Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Disdalduk KB	Jumlah Konselor dan pendidik sebaya yang dilatih	250 org	710.000.000	
43	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja	Disdalduk KB	Jumlah kader BKR yang dilatih	300 org	390.000.000	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja	Disdalduk KB	Jumlah kader BKR yang dilatih	300 org	390.000.000	
VII	Program Pengendalian Penduduk		Cakupan PUS yang	0,52%	1.548.356.000	Program Pengendalian Penduduk		Cakupan PUS yang isterinya <20th	0,52%	1.548.356.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
			isterinya <20th								
44	Pengembangan Sistem Informasi dan Data	Disdalduk KB	Jumlah dokumen data keluarga	1 dok	711.749.000	Pengembangan Sistem Informasi dan Data	Disdalduk KB	Jumlah dokumen data keluarga	1 dok	711.749.000	
	Pengendalian Penduduk		Jumlah dokumen data dasar Program KKBPK	12 dok		Pengendalian Penduduk		Jumlah dokumen data dasar Program KKBPK	12 dok		
45	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Disdalduk KB	Jumlah dokumen peta wilayah program KKBPK	17 dok	504.377.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Disdalduk KB	Jumlah dokumen peta wilayah program KKBPK	17 dok	504.377.000	
			Jumlah dokumen parameter kependudukan dan KB	1 dok				Jumlah dokumen parameter kependudukan dan KB	1 dok		
			Jumlah dokumen Analisis Dampak Kependudukan	1 dok				Jumlah dokumen Analisis Dampak Kependudukan	1 dok		
46	Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk	Disdalduk KB	Jumlah sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk	2 buah	332.230.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk	Disdalduk KB	Jumlah sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk	2 buah	332.230.000	
			Jumlah Kajian kebijakan kependudukan	1 dok				Jumlah Kajian kebijakan kependudukan	1 dok		

Penjelasan Tabel 2.5

Dari Tabel di atas dapat diamati hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19.905.166.724-.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2023 memiliki 4 Program yakni: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pengendalian Penduduk, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 14 Kegiatan dengan 64 Sub Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang

- Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara

lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak

dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”,

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan angka kelahiran total
- b. Meningkatkan anggota bina keluarga aktif
- c. Meningkatnya PUS yang isterinya <20 tahun
- d. Meningkatkan peserta KB Aktif
- e. Menurunkan tingkat putus pemakaian alat kontrasepsi
- f. Menurunkan PUS Unmet Need

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada perubahan Kedua Renstra

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2023
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00 %
	PUS Unmeet need	8.56 %
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.10 %
	Peserta KB Aktif	77.14 %
	PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50 %
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02 %

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang bertugas dalam hal Indikator Sasaran PJMD yakni Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Namun secara khusus, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB memiliki peran dalam pencapaian Misi Meningkatkan kualitas & kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul & produktif untuk mencapai kesejahteraan & keadilan sosial.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan

KB Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19.905.166.724 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 10.864.594.774 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 9.040.571.950 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan
KB Kota Semarang

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.308.870.000				3.084.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telpon, air dan koran	Disdalduk KB	100%	102.000.000	APBD		100%	182.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai Non ASN yang terbiayai	Disdalduk KB	100%	275.652.000	APBD		100%	382.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Disdalduk KB	100%	45.883.000	APBD		100%	44.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang disediakan	Disdalduk KB	100%	161.310.000	APBD		100%	300.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	Disdalduk KB	100%	31.875.000	APBD		100%	32.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.012	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Disdalduk KB	100%	10.000.000	APBD		100%	9.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdalduk KB	100%	10.000.000	APBD		100%	10.000.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu	Disdalduk KB	100%	964.900.000	APBD		100%	1.200.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdalduk KB	100%	300.000.000	APBD		100%	500.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Disdalduk KB	100%	393.750.000	APBD		100%	400.000.000
1.2.08.1.2.08.01.01.154	Belanja jasa penunjang adm perkantoran	Jumlah pelaksanaan lembur pada tahun berkenaan	Disdalduk KB	100%	13.500.000	APBD		100%	25.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	957.760.000			100%	1.412.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Disdalduk KB	100%	31.850.000	APBD		100%	75.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang disediakan	Disdalduk KB	100%	49.000.000	APBD		100%	125.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah komponen gedung kantor yang diperbaiki	Disdalduk KB	100%	100.000.000	APBD		100%	290.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara	Disdalduk KB	100%	717.900.000	APBD		100%	850.000.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	Disdalduk KB	100%	10.000.000	APBD			10.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	Disdalduk KB	100%	22.000.000	APBD		100%	27.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.095	Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)	Jumlah perpanjangan STNK pada tahun berkenaan	Disdalduk KB	100%	27.010.000	APBD		100%	35.000.000
1.2.08.1.2.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan penyusunan pelaporan tepat waktu dan regulatif.	Disdalduk KB	100%	262.380.000			100%	259.680.000
1.2.08.1.2.08.01.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, BP, BPP yang diberikan pada tahun berkenaan	Disdalduk KB	12 bln	242.700.000	APBD		12 bln	240.000.000
1.2.08.1.2.08.01.06.006	Penyusunan Lkpj SkPerangkat Daerah	Dokumen LKPJ	Disdalduk KB	1 dok	2.990.000	APBD		1 dok	2.990.000
1.2.08.1.2.08.01.06.018	Penyusunan LKJIP	Dokumen LKJIP	Disdalduk KB	1 dok	2.990.000	APBD		1 dok	2.990.000
1.2.08.1.2.08.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Disdalduk KB	1 dok	2.990.000	APBD		1 dok	2.990.000
1.2.08.1.2.08.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	16 Kecamatan	1 dok	1.495.000	APBD		1 dok	1.495.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Prognosis	Disdalduk KB	1 dok	1.495.000	APBD		1 dok	1.495.000
1.2.08.1.2.08.01.06.028	Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH	Dokumen Renja PERANGKAT DAERAH	Disdalduk KB	1 dok	2.980.000	APBD		1 dok	2.980.000
1.2.08.1.2.08.01.06.033	Penyusunan Rka Dan Dpa Perubahan	DPPA	Disdalduk KB	1 dok	2.370.000	APBD		1 dok	2.370.000
1.2.08.1.2.08.01.06.034	Penyusunan Rka Dan Dpa SKPERANGKAT DAERAH	RKA, DPA	Disdalduk KB	2 dok	2.370.000	APBD		2 dok	2.370.000
1.2.08.1.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Unmeet need		9,88	773.447.000			9,88	6.499.973.000
		Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)		11,8				11,8	
1.2.08.1.2.08.01.15.017	Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Sarana Prasarana pelayanan KB yg disediakan	16 Kecamatan	150 unit		DAK			1.430.000.000
1.2.08.1.2.08.01.15.021	Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Operasional Penyuluhan/rakor KKBPK	16 Kecamatan	32 keg				32 keg	3.831.973.000
		Operasional sarana prasarana Penyuluhan KKBPK		32 keg		DAK		32 keg	
		Operasional wilayah kampung KB		32 keg				32 keg	

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.15.022	Pengelolaan alat dan Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Penyediaan alat dan obat kontrasepsi pada pelayanan KB	16 Kecamatan	12 keg	120.000.000	APBD		12 keg	150.000.000
		Jumlah kegiatan Pendistribusian Alokon pada pelayanan KB		32 keg				32 keg	
1.2.08.1.2.08.01.15.023	Jaminan Pelayanan KB	Jumlah Rumah Konesling KESPRO	16 Kecamatan	2 unit	346.600.000	APBD		2 unit	625.000.000
		Jumlah provider pelayanan KB yang dilatih		30 org				30 org	
		Jumlah perusahaan yang diberikan penyuluhan KB		2 unit				2 unit	
1.2.08.1.2.08.01.15.024	Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin	Jumlah kegiatan Road show TPKBK melalui kegiatan pelayanan KB Statis dan Muyan	16 Kecamatan	32 keg	271.967.000	APBD		32 keg	385.000.000
		Jumlah kegiatan Gerakan Terpadu Pogram KB bersama mitra kerja		7 keg				7 keg	
1.2.08.1.2.08.01.15.028	Peningkatan kapasitas pembina KKBPK	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi KKBPK	Disdalduk KB	3 keg	34.880.000	APBD		3 keg	78.000.000
		Jumlah kegiatan peningkatan kinerja pembina KKBPK		2 keg				2 keg	

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.16	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri	Cakupan peserta KB Aktif		76,64	1.148.234.000			76,64	1.431.350.000
1.2.08.1.2.08.01.16.002	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah kegiatan Penyebaran informasi KKBPK	16 Kecamatan	12 keg	125.000.000	APBD		12 keg	330.000.000
		Jumlah kegiatan KKBPK melalui media							
1.2.08.1.2.08.01.16.003	Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja	Jumlah kegiatan penguatan program KKBPK bagi mitra kerja	16 Kecamatan	4 keg	193.114.000	APBD		4 keg	200.600.000
1.2.08.1.2.08.01.16.004	Fasilitasi Kegiatan PPKBD/SKD	Jumlah PPKBD/SKD yang difasilitasi	16 Kecamatan	177 org	680.120.000	APBD		177 org	600.000.000
1.2.08.1.2.08.01.16.005	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola	16 Kecamatan	16 buah	150.000.000	APBD		16 buah	300.750.000
1.2.08.1.2.08.01.19	Progam Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Aktif	Prosentase peningkatan anggota Bina Keluarga Aktif		56,86%	645.520.000			56,86%	713.200.000
1.2.08.1.2.08.01.19.002	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kader BKB dan BKL yang dilatih	16 Kecamatan	320 org	220.220.000	APBD		320 org	315.200.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.08.1.2.08.01.19.003	Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga								
	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kader UPPKS yang dilatih manajemen wirausaha	Kota Semarang	296 org	100.300.000	APBD		296 org	110.800.000
1.2.08.1.2.08.01.19.004	Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan (UPPKS)	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang dilatih ketrampilan usaha	Kota Semarang	110 org	105.000.000	APBD		110 org	75.800.000
1.2.08.1.2.08.01.19.005	Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah Konselor dan pendidik sebaya yang dilatih	Kota Semarang	150 org	120.000.000	APBD		150 org	125.500.000
1.2.08.1.2.08.01.19.006	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja	Jumlah kader BKR yang dilatih	Kota Semarang	128 org	100.000.000	APBD		128 org	85.900.000
1.2.08.1.2.08.01.20	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS yang isterinya <20th		0,52%	445.644.000			0,52%	846.400.000
1.2.08.1.2.08.01.20.001	Pengembangan Sistem Informasi dan Data Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen data keluarga	Kota Semarang	1 dok	115.750.000	APBD		1 dok	400.500.000
		Jumlah dokumen data dasar Program KKBPK		12 dok				12 dok	
1.2.08.1.2.08.01.20.002	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen peta wilayah program KKBPK	Kota Semarang	17 dok	113.646.000	APBD		17 dok	185.900.000

KODE REKENING	Urusan : Pengendalian Penduduk dan KB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022					PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		Jumlah dokumen parameter kependudukan dan KB		1 dok				1 dok	
		Jumlah dokumen Analisis Dampak Kependudukan		1 dok				1 dok	
1.2.08.1.2.08.01.20.005	Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk	Jumlah sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk	Kota Semarang	2 buah	216.248.000	APBD		2 buah	260.000.000
		Jumlah Kajian kebijakan kependudukan		1 dok				1 dok	
					6.541.855.000				14.246.603.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

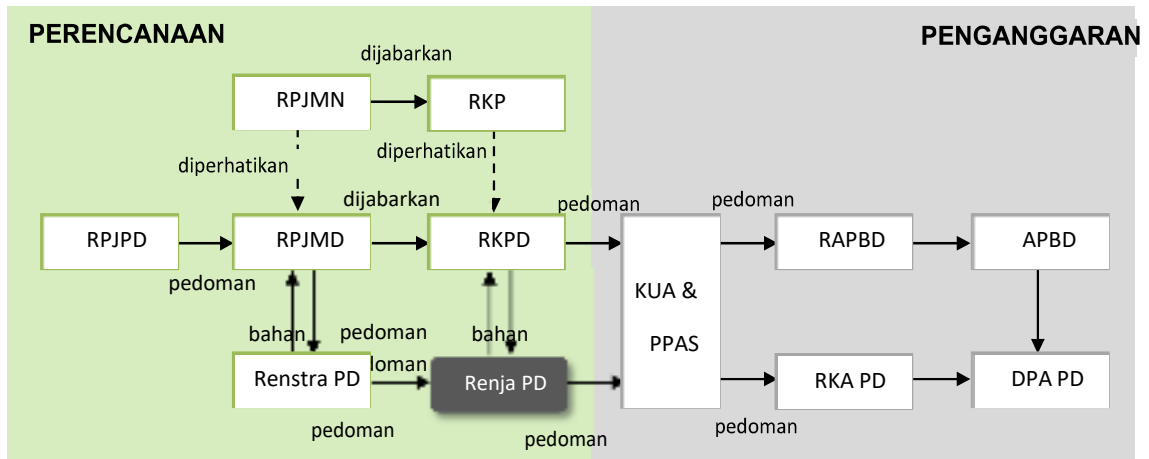
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang

bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Perhubungan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 243.777.589.490,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 234.305.213.265,00 atau sebesar 96,11%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68.15	61,73	63,13	102,27	62,96	62,96	100
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94.00	84	86,83	103,37	86	86	100
		Jml trayek BRT	15.00	11	11	100,00	12	12	100
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30.00	35	35,4	101,14	34	34	100
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7.01	6,68	5,72	85,63	8	8	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	4.00 paket	12	12	100,00	5	5	100,00
		Pengiriman trem dari belanda	1.00 paket	1	0	0,00	0 0	0	-
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2.00 dokumen	2	2	100,00	2	2	100,00
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1.00 paket	0	0	0,00	0	0	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	5.00 jenis	11	11	100,00	12	12	100,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	5.00 jenis	8	8	100,00	13	13	100,00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	4.00 jenis	3	3	100,00	6	6	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	300.00 unit	200	200	100,00	359	359	100,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	3.00	3	3	100,00	3	3	100,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	3.00 unit	3	3	100,00	3	3	100,00
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2.00 kegiatan	0	0	0,00	2	2	100,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12.00	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml kegiatan pemungutan parkir	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jml kegiatan perijinan parkir	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasa	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12.00	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji	2.00 unit	2	2	100,00	2	0	-
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	40000.00 set	40000	40000	100,00	47300	47300	100,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35.00 unit	35	35	100,00	35	35	100,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12.00	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	4.00 unit	0	0	0,00	4	4	100,00
		Detector speed	2.00 unit	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jml mesin e tiketing	20.00 unit	0	0	0,00	20	20	100,00
		Jml Shelter BRT	2.00 unit	0	0	0,00	2	1	50,00
		Komputer	22.00 unit	0	0	0,00	22	22	100,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	2.00 kegiatan	2	2	100,00	2	2	100,00
		Jml studi / jasa konsultasi	4.00 paket	3	3	100,00	2	2	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	12.00 kegiatan	12	12	100,00	12	12	100,00
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan Forum LLAJ	1.00 kegiatan	1	1	100,00	1	1	100,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1.00	0	0	0,00	1	1	100,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	2.00 kegiatan	0	0	0,00	2	2	100,00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	1.00 paket	0	0	0,00	1	1	100,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12.00	0	0	0,00	12	12	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan dan Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal atau pesawat	12.00 kegiatan	0	0	0,00	0	0	0
		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12.00 kegiatan	0	0	0,00	12	12	100,00
		Penyuluhan awak angkutan barang	1.00 kegiatan	0	0	0,00	1	1	100,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
		Pelayanan angkutan	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	31500.00 roll	0	0	0,00	31500	31500	100,00
		Operasional BRT	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1.00 dokumen	0	0	0,00	1	1	100,00
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	3.00	0	0	0,00	3	3	100,00
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	3.00 kegiatan	0	0	0,00	2	2	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2.00	2	2	100,00	2	2	100,00
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen angkutan / trayek	1.00 dokumen	3	3	100,00	1	1	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2.00	2	2	100,00	2	2	100,00
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	1.00 dokumen	1	1	100,00	2	2	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	1.00 kegiatan	12	12	100,00	1	1	100,00
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2.00	0	0	0	2	2	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.15. 02.2. 15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml aplikasi	1.00 paket	0	0	0	1	1	100,00
2.15. 02.2. 15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	2.00 kegiatan	0	0	0	3	3	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DI nas Perhubungan	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	2.00 dokumen	2	2	100,00	2	2	100,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	100.00 persen	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	100.00 persen	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semesteran	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	1.00 dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	2.00 kegiatan	2	2	100,00	2	2	100,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	41.00 jenis	41	41	100,00	41	41	100,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 set	2	2	100,00	2	2	100,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	33.00 jenis	33	33	100,00	33	33	100,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	77.00 jenis	77	77	100,00	77	77	100,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml barang cetakan	28.00 jenis	28	28	100,00	28	28	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan MInuman	8000.00 dus	8000	8000	100,00	8000	8000	100,00
X.XX. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100,00
X.XX. 01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	13.00 jenis	11	11	100,00	10	10	100,00
X.XX. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX. 01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patroli	10.00 unit	0	0	0,00	10	11	110,00
X.XX. 01.2. 07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	4.00 unit	0	0	0,00	3	2	66,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Gudang / bangunan	1.00 unit	0	0	0,00	8	8	100,00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	7.00 jenis	0	0	0,00	11	11	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	2000.00 lembar	2000	2000	100,00	2000	2000	100,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	100.00 persen	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX. 01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	1.00 unit	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	71.00 unit	71	71	100,00	85	86	101,18
X.XX. 01.2. 09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	4.00 unit	4	4	100,00	4	4	100,00
X.XX. 01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	2.00 unit	2	2	100,00	2	2	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	5.00 jenis	4	4	100,00	4	4	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	11.00 jenis	11	11	100,00	11	11	100,00
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100.00	100	100	100,00	100	100	100,00
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	12.00 bulan	12	12	100,00	12	12	100,00

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Perhubungan Kota Semarang

- a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) Urusan, 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan dengan 20 (dua puluh) Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 5 (lima) indikator memenuhi target, serta 1 (satu) indikator tidak memenuhi target.
 - c) Dari 20 (dua puluh) indikator kinerja kegiatan, seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.413.761.874	47.805.824.681	89,50	5.607.937.193
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.803.650	32.954.950	58,02	23.848.700
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.377.260	17.103.000	54,51	14.274.260
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.793.960	2.132.500	76,33	661.460
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.021.250	1.361.250	67,35	660.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.021.250	1.361.250	67,35	660.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.021.250	1.361.250	67,35	660.000
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.568.680	9.635.700	58,16	6.932.980
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.563.327.585	15.811.594.277	95,46	751.733.308
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.998.660.605	15.351.032.277	95,95	647.628.328
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538.200.000	446.600.000	82,98	91.600.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.863.690	4.762.500	53,73	4.101.190
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.757.820	4.627.500	52,84	4.130.320
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.845.470	4.572.000	51,69	4.273.470
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556.282.400	541.443.380	97,33	14.839.020
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	462.458.400	451.523.380	97,64	10.935.020
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.824.000	89.920.000	95,84	3.904.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.098.115.279	2.994.549.076	73,07	1.103.566.203
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.541.080	60.272.600	77,73	17.268.480
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.619.430	372.267.300	98,84	4.352.130
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	184.392.820	131.010.585	71,05	53.382.235
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.736.880	123.679.268	67,68	59.057.612
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	293.615.819	178.882.500	60,92	114.733.319
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	306.450.000	204.644.000	66,78	101.806.000
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.976.037.000	1.298.937.391	65,73	677.099.609
4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	700.722.250	624.855.432	89,17	75.866.818

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	318.581.110	310.698.520	97,53	7.882.590
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	318.581.110	310.698.520	97,53	7.882.590
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.259.775.050	4.843.800.105	92,09	415.974.945
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.400.000	28.000.000	92,11	2.400.000
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.006.909.050	805.364.235	79,98	201.544.815
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.222.466.000	4.010.435.870	94,98	212.030.130
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.610.876.800	4.913.169.582	74,32	1.697.707.218
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.297.348.300	2.735.822.435	63,66	1.561.525.865
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	286.750.000	282.711.500	98,59	4.038.500
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.524.898.800	1.507.709.075	98,87	17.189.725
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	501.879.700	386.926.572	77,10	114.953.128
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	19.950.000.000	18.357.614.791	92,02	1.592.385.209
8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.950.000.000	18.357.614.791	92,02	1.592.385.209
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	190.363.827.616	186.499.388.584	97,97	3.864.439.032
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.298.887.500	1.271.381.100	97,88	27.506.400
1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.298.887.500	1.271.381.100	97,88	27.506.400
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.240.903.390	6.719.572.016	92,80	521.331.374

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.438.580.020	3.205.863.006	93,23	232.717.014
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.425.338.970	1.203.729.600	84,45	221.609.370
2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.719.825.000	1.681.127.308	97,75	38.697.692
2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	657.159.400	628.852.102	95,69	28.307.298
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	360.906.400	359.600.000	99,64	1.306.400
3.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	360.906.400	359.600.000	99,64	1.306.400
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.471.426.000	1.314.288.316	89,32	157.137.684
4.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.120.600.000	992.595.316	88,58	128.004.684
4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	350.826.000	321.693.000	91,70	29.133.000
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.126.112.790	2.470.538.800	79,03	655.573.990
5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	853.617.610	745.616.000	87,35	108.001.610
5.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.442.700.180	927.500.000	64,29	515.200.180
5.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	829.795.000	797.422.800	96,10	32.372.200
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.124.232.886	4.955.179.247	96,70	169.053.639
6.1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.964.732.886	1.876.303.607	95,50	88.429.279

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.				
6.2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.159.500.000	3.078.875.640	97,45	80.624.360
9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	171.119.683.923	168.830.352.375	98,66	2.289.331.548
9.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	171.119.683.923	168.830.352.375	98,66	2.289.331.548
10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.116.227	33.598.775	72,86	12.517.452
10.1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.116.227	33.598.775	72,86	12.517.452
11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	391.147.700	386.762.000	98,88	4.385.700
11.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.825.000	193.393.000	98,76	2.432.000
11.2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.322.700	193.369.000	99,00	1.953.700
12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	184.410.800	158.115.955	85,74	26.294.845

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
12.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	139.230.000	134.759.455	96,79	4.470.545
12.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.180.800	23.356.500	51,70	21.824.300
		243.777.589.490	234.305.213.265	96,11	9.472.376.225

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 20 kegiatan dan 49 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 243.777.589.490,00. Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 234.305.213.265,00 (96,11%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 9.472.376.225,00.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Bidang Perhubungan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALI SASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurangi kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,5	0,55	0,58	0,5	0,55	0,58
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,54	0,58	0,58	0,54	0,58	0,58
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	61,73	62,96	64,22	61,73	62,96	64,22
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	65,93	66	67	65,39	66	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurangi kemacetan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kinerja lalu lintas”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100%;
- b. Sasaran 1 **“Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Konektivitas Kota”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100%;
- c. Sasaran 2 “Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase sarpras transportasi terpasang” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya 100%;
- d. Sasaran 3 “Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator yaitu “Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perhubungan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4

**Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

NO	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja lalu lintas	0,5	0,5	0,55	0,58
2	Konektivitas Kota	0,56	0,54	0,58	0,58
3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota	69,5	65,09	72,31	73,75
4	Arus penumpang angkutan umum	10.935.306	8.425.337	13.231.270	14.554.892
5	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	3	4	3	3
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	1913	1789	1951	1970
7	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,68	6,68	6,74	6,81

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang di bidang perhubungan, pada Tahun 2021 untuk indikator “Kinerja lalu lintas” sudah sesuai target namun untuk indikator-indikator lainnya masih perlu diusahakan lebih keras agar dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya.

Selain dari aspek Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPd

serta antara RKPd dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPd	100	100	100	100	100	100	100	100
		%	%	%	%	%	%	%	%
2	Kesesuaian Program dengan Program APBD	100	100	100	100	100	100	100	100
		%	%	%	%	%	%	%	%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; dimana 2 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 semuanya dapat dilaksanakan.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang perhubungan antara lain:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas;
- b. Masih terdapat wilayah yang belum terlayani angkutan umum massal;
- c. Masih kurangnya pemasangan dan pemeliharaan prasarana jalan serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peraturan dan etika dalam berlalu lintas;
 - Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);
 - Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan.

b. Peluang:

- Adanya perkembangan teknologi informasi (media sosial) yang dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas;
- Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
- Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Kecenderungan peningkatan kepadatan lalu lintas di ruas jalan tertentu yang memicu kerawanan kemacetan;
- b. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis;
- c. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;

- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Dinas Perhubungan Kota Semarang berkewajiban mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut pada prioritas ke 4 yaitu penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:

- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota;
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi;
- 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel;
- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang;
- 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023. Dari analisis kebutuhan diketahui bahwa dibutuhkan penyesuaian pagu anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya perkembangan Satuan Harga Satuan (SHS), perubahan volume kebutuhan barang/jasa/modal dan ketersediaan pagu anggaran. Meskipun dari hasil review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan Renja terdapat perbedaan nominal, volume maupun pagu anggaran namun tidak merubah secara signifikan output kegiatan / sub kegiatan sehingga indikator-indikator program / kegiatan / sub kegiatan dapat dipertahankan untuk dapat dicapai.

Review perbandingan Rancangan RKPD dengan Renja selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				319.528.611.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				310.781.289.003	
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	76.759.861.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	69.699.407.770	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100%		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100%		
2 15 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100%	175.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100%	45.537.020	
2 15 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	13.987.800	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 1 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	5.424.510	
2 15 1 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.620.420	
2 15 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 dokumen	5.424.510	
2 15 1 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.620.420	
2 15 1 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	4.705.760	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	4.753.600	
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Dishub	100%	18.101.511.577	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Dishub	100%	14.760.838.259	
2 15 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 orang	18.001.511.577	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 orang	14.137.949.459	
2 15 1 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	25.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	551.760.000	
2 15 1 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	23.709.600	
2 15 1 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 laporan	23.709.600	
2 15 1 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	23.709.600	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Realisasi Anggaran								
2 15 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100%	850.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100%	634.434.105	
2 15 1 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	400.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	263.400.000	
2 15 1 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 paket	226.670.170	
2 15 1 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1.800.000	
2 15 1 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	15.971.400	
2 15 1 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	25.600.000	
2 15 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	24.642.200	
2 15 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	50 orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	50 orang	76.350.335	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			PerundangUndangan					PerundangUndangan			
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100%	3.850.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100%	3.234.661.512	
2 15 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	150.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	133.736.963	
2 15 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	21.242.326	
2 15 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	119.120.273	
2 15 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	175.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	169.832.198	
2 15 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	350.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	299.272.040	
2 15 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	700.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	197.700.000	
2 15 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.022.015.100	
2 15 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	24.987.365	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 dokumen	750.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 dokumen	1.246.755.247	
2 15 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100%	1.666.295.923	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100%	3.378.969.080	
2 15 1 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	2.682.380.319	
2 15 1 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	546.295.923	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	606.168.571	
2 15 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	920.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	90.420.190	
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100%	4.160.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100%	3.962.208.960	
2 15 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	39.000.000	
2 15 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	1.277.669.760	
2 15 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.645.539.200	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dishub	100%	6.450.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dishub	100%	5.948.758.834	
2 15 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.313.180	
2 15 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	3.900.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	3.744.384.582	
2 15 1 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	126.836.360	
2 15 1 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1.343.099.799	
2 15 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	197.802.000	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	800.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	496.322.913	
2 15 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100%	41.507.053.500	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100%	37.734.000.000	
2 15 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	41.507.053.500	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	37.734.000.000	
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64,22%	242.768.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64,22%	241.081.881.233	
			Rasio ijin trayek per jumlah penduduk					Rasio ijin trayek per jumlah penduduk			
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88%				Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88%		
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33%				Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33%		
			Jml trayek BRT	13 trayek				Jml trayek BRT	13 trayek		
2 15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelaksanaan MRLL	100%	500.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelaksanaan MRLL	100%	1.688.376.270	
2 15 2 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk	12 dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 dokumen	1.688.376.270	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya perlengkapan jalan	100%	7.457.950.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya perlengkapan jalan	100%	8.838.477.743	
2 15 2 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 unit	6.000.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 unit	3.744.235.888	
2 15 2 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	575 unit	500.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	575 unit	1.751.962.883	
2 15 2 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118 unit	202.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118 unit	2.507.861.890	
2 15 2 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 unit	755.950.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 unit	834.417.082	
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah terminal	3 unit	700.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah terminal	3 unit	1.862.136.784	
2 15 2 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Semarang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Semarang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	1.422.046.691	
2 15 2 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Semarang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Semarang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 orang	440.090.093	
2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Semarang	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	1.450.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Semarang	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	2.587.490.630	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 2 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 dokumen	900.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 dokumen	732.674.230	
2 15 2 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	550.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.854.816.400	
2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bln	2.648.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bln	3.007.514.321	
2 15 2 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	521.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	1.622.901.474	
2 15 2 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90000 dokumen	1.130.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90000 dokumen	60.321.063	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 2 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 unit	997.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 unit	1.324.291.784	
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bln	4.016.379.192	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bln	4.833.660.338	
2 15 2 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit	991.379.192	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit	46.176.000	
2 15 2 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	450.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	712.800.000	
2 15 2 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	2.500.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	3.963.769.684	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 2 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	75.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	110.914.654	
2 15 2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pengawasan Andalalin	1 tahun	225.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pengawasan Andalalin	1 tahun	79.500.000	
2 15 2 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 laporan	66.000.000	
2 15 2 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	150.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	13.500.000	
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Semarang	Pemantauan angkutan	12 bulan	100.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Semarang	Pemantauan angkutan	12 bulan	516.106.340	
2 15 2 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	100.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	516.106.340	
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendukung pelayanan BRT	12 bulan	224.771.420.808	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendukung pelayanan BRT	12 bulan	216.853.581.537	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 2 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	259 unit	224.571.420.808	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	259 unit	216.715.988.822	
2 15 2 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 laporan	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 laporan	137.592.715	
2 15 2 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	300.000.000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	235.064.810	
2 15 2 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 dokumen	300.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 dokumen	235.064.810	
2 15 2 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	200.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	214.716.640	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 2 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	68.346.600	
2 15 2 2.11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	146.370.040	
2 15 2 2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	200.000.000	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	146.089.780	
2 15 2 2.13 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	62.805.370	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 15 2 2.13 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	83.284.410	
2 15 2 2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	200.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	219.166.040	
2 15 2 2.15 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	113.144.840	
2 15 2 2.15 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	106.021.200	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Perhubungan Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	VOLUME	CATATAN
KECAMATAN GUNUNGPATI				
1.	Pita Kejut 2	Jatirejo RT 0 RW 0 Jatirejo	2 Lokasi	Diterima
KECAMATAN GUNUNGPATI				
1.	Kaca Cembung Jalan 2	Kelurahan pakintelan RT 01 RW 02 Pakintelan	6 unit	Diterima
KECAMATAN TEMBALANG				
1.	Warning Light dan Lampu Penerangan 2	Jalan Bayem Raya RT 08 RW 07 Sendangguwo	4 Meter	Diterima

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, antara lain:

NO	HASIL RESES	FRAKSI	TANGGAPAN
1	2	3	4
1	Kami mendorong Pemkot melalui Dinas Perhubungan untuk mengatasi carut marutnya lalu lintas dan penyesuaian pengendara di kawasan Bubakan, dimana usulannya agar pintu menuju Kota Lama dibuka untuk sepeda motor dari arah Jalan Raden Patah	PKS	Diterima, Dilaksanakan.

1	2	3	4
2	Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik. Disamping itu, perlu ditambahkan CCTV tidak hanya di perkotaan saja tetapi di perempatan yang ramai walaupun daerah pinggiran Kota Semarang. Bila daerah pinggiran Kota Semarang di perempatan perempatannya yang ramai tersebut bisa dipasang CCTV pada system lalu lintas maka diharapkan keamanan serta ketertiban bisa lebih terjaga dan mudah dalam pengawasan	GOLKAR, NASDEM	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan pemasangan CCTV Analistik yg terhubung dg E Tilang. - Akan diterapkan Sistem Satu Arah (SSA) di Jl. Wahid Hasyim-Plampitan-Wotgandul dll. - Pelaksanaan parkir elektronik di Jl. Gajahmada, Depok, Tamrin, Pemuda, Batan - Dilaksanakan kajian SSA di Jl. Suyudi
3	Penambahan pengadaan unit Bus BRT untuk bisa direalisasikan di masa pandemic ini, karena penerapan protokol kesehatan sehingga kapasitas bus hanya boleh 50% sehingga banyak masyarakat yang akan menggunakan Bus BRT ini harus antri lama. Disamping itu, untuk koridor-koridor yang ramai dan strategis ada penambahan jam operasi. Mohon hal ini bisa direalisasikan demi pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Kota Semarang lebih meningkat	GOLKAR, NASDEM	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan penambahan jam operasi, untuk tahap awal rute T. Mangkang – Simpang Lima - Penambahan armada dan jam operasi sedang dalam kajian
4	Kemacetan Kota Semarang semakin panjang terutama pada jam-jam sibuk, oleh karena itu perlu segera Pemkot Semarang untuk segera melakukan terobosan untuk masalah kemacetan tersebut	GOLKAR, NASDEM	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan penyesuaian phase / waktu Traffic Light - Pengawasan dan kontrol melalui ATCS - Penambahan Sistem Satu Arah pada sebagian ruas jalan
5	Pemkot Semarang melalui dinas terkait untuk bisa mengoptimalkan terminal mangkang karena dilihat pantau masyarakat belum dioptimalkan penggunaannya dan banyak fasilitas yang rusak. Hal ini sangat disayangkan oleh masyarakat, dan sekarang banyak Bus-bus yang trayek ke arah barat banyak yang tidak masuk terminal mangkang tetapi melalui agen-agen sepanjang jalan krapyak sampai Jrasah seperti dulu	GOLKAR, NASDEM	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan kegiatan pengoptimalan Terminal Mangkang dengan sterilisasi agen-agen bus di sekitar Jl. Siliwangi Krapyak sehingga agen bus beroperasi di dalam lokasi T. Mangkang - Pengoperasian BRT malam jalur T. Mangkang - Simpanglima

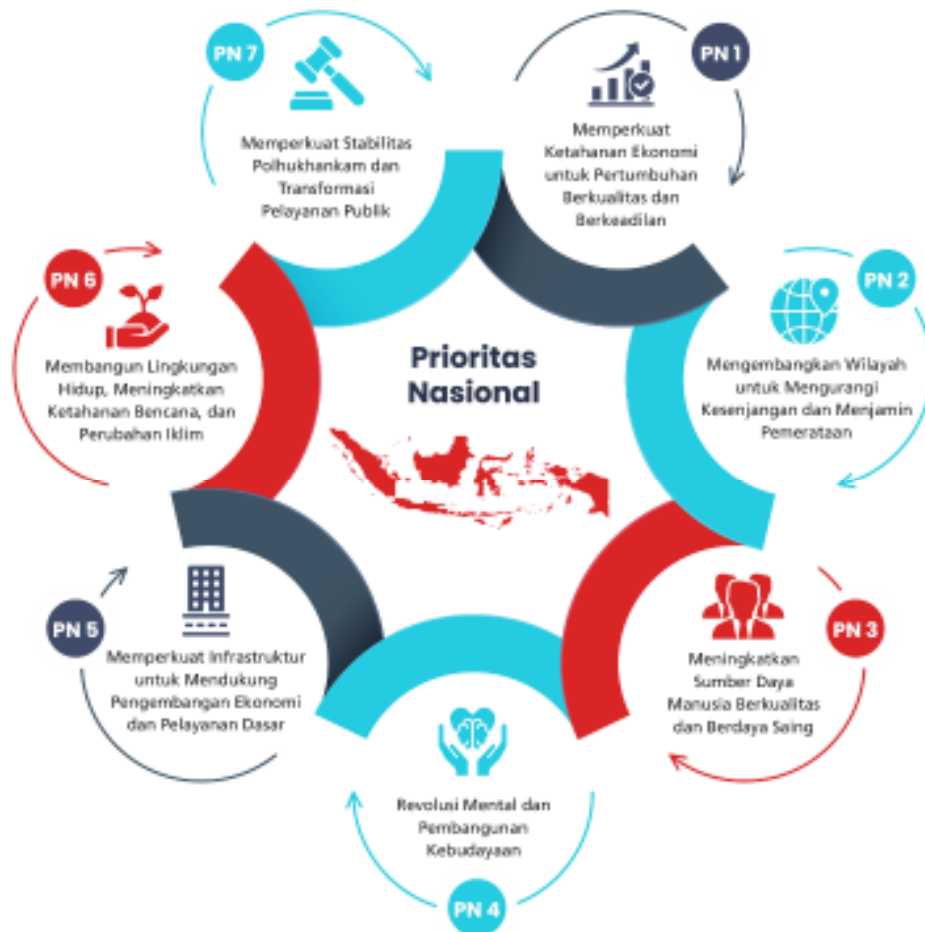
1	2	3	4
6	Pemkot Semarang untuk meningkatkan pelayanan BRT dengan menambah Bus-bus dan membuka jalur-jalur yang strategis, serta menambah jam operasi dan halte-halte yang layak dan nyaman juga	GOLKAR, NASDEM	Penambahan trayek, armada dan Shelter terus dilakukan. Pada awal tahun 2022 sdh dioperasikan tambahan 1 feeder baru.
7	Banyak Bus feeder trans Semarang kurang efektif mengangkut penumpang. Kaca jendela yang gelap membuat warga khususnya wanita agak takut	PKB	- Evaluasi terhadap efektivitas feeder sedang dilakukan. - Untuk kaca dengan warna gelap bertujuan mengurangi suhu panas dari luar. Untuk pengurangan kegelapan "Diperhatikan".
8	Perlu menambah halte untuk bus feeder Trans Semarang di beberapa komplek perumahan besar yang penduduknya padat, maupun di gang gang kampung/dusun yang padat penduduk	PKB	Penambahan shelter "Diperhatikan". Kendala pembangunan shelter terkait dengan ruang milik jalan yang terbatas, terutama jalur feeder berada pada jalan lingkungan yang tidak terlalu lebar.
9	Kebutuhan halte bus feeder maupun bus besar Trans Semarang diantaranya sangat dibutuhkan oleh warga Kecamatan Banyumanik. Diharapkan jalur Trans Semarang masuk ke kelurahan gedawang	PKB	Sda.
10	Mengharapkan kepada pemerintah agar diwilayah Mangunharjo Kecamatan Tembalang utamanya di jalan elang raya bisa dilewati BRT/Trans Semarang mengingat jalan tersebut akses menuju Rumah Sakit Wongsonegoro	DEMOKRAT	Feeder di wilayah tersebut sedang dalam kajian.

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung dan kawasan hutan produksi
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan

- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Perhubungan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas

Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;

- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perhubungan Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk mendukung prioritas pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 pada Urusan Perhubungan adalah Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah. Hal ini sudah sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Semarang pada RKPD Tahun 2023 yaitu Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke dua dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan dengan”,
dengan indikator tujuan **“Kinerja lalu lintas”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

- a. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi yang dengan indikator Konektivitas Kota;
- b. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang;
- c. Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,58

1	2	3	4
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	Rasio	0,58
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	%	64,22
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Perhubungan bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan “Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur” serta indikator sasaran “Rasio konektivitas kabupaten/ kota” dan “Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet”;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis yang berkembang saat ini;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 21 kegiatan dengan 71 sub kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang dengan 43 sub kegiatan, dan 13 kegiatan pelaksanaan / pembangunan dengan 28 sub kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 310.781.289.003,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan

perincian:

- a. Rp 69.699.407.770,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
- b. Rp 241.081.881.233,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				310.781.289.003				328.197.896.610
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	69.699.407.770			100%	80.111.871.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan		100%				100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan		100%				100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan		100%				100%	
2 15 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	Kota Semarang	100%	45.537.020			100%	175.000.000
2 15 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	13.987.800	APBD Kota Semarang		3 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.424.510	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.620.420	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.424.510	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 1 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.620.420	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	4.705.760	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 laporan	4.753.600	APBD Kota Semarang		1 laporan	25.000.000
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	Kota Semarang	100%	14.760.838.259			100%	19.476.587.156
2 15 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	111 orang	14.137.949.459	APBD Kota Semarang		111 orang	18.901.587.156
2 15 1 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 dokumen	551.760.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000.000
2 15 1 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	23.709.600	APBD Kota Semarang		1 laporan	25.000.000
2 15 1 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	4 laporan	23.709.600	APBD Kota Semarang		4 laporan	25.000.000
2 15 1 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	23.709.600	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	Kota Semarang	100%	634.434.105			100%	1.050.000.000
2 15 1 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	1 unit	263.400.000	APBD Kota Semarang		1 unit	400.000.000
2 15 1 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Semarang	300 paket	226.670.170	APBD Kota Semarang		300 paket	250.000.000
2 15 1 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 dokumen	1.800.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 1 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	1 dokumen	15.971.400	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	12 orang	25.600.000	APBD Kota Semarang		12 orang	200.000.000
2 15 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	2 orang	24.642.200	APBD Kota Semarang		2 orang	50.000.000
2 15 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 orang	76.350.335	APBD Kota Semarang		50 orang	100.000.000
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	Kota Semarang	100%	3.234.661.512			100%	2.850.000.000
2 15 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	25 paket	133.736.963	APBD Kota Semarang		25 paket	150.000.000
2 15 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	2 paket	21.242.326	APBD Kota Semarang		2 paket	50.000.000
2 15 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	15 paket	119.120.273	APBD Kota Semarang		15 paket	150.000.000
2 15 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	20 paket	169.832.198	APBD Kota Semarang		20 paket	175.000.000
2 15 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	25 paket	299.272.040	APBD Kota Semarang		25 paket	350.000.000
2 15 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	197.700.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	700.000.000
2 15 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	1.022.015.100	APBD Kota Semarang		12 laporan	500.000.000
2 15 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	24.987.365	APBD Kota Semarang		1 dokumen	25.000.000
2 15 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	11 dokumen	1.246.755.247	APBD Kota Semarang		11 dokumen	750.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	Kota Semarang	100%	3.378.969.080			100%	646.934.822
2 15 1 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	10 unit	2.682.380.319	APBD Kota Semarang		10 unit	226.934.822
2 15 1 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	7 unit	606.168.571	APBD Kota Semarang		7 unit	200.000.000
2 15 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	7 unit	90.420.190	APBD Kota Semarang		7 unit	220.000.000
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	Kota Semarang	100%	3.962.208.960			100%	5.505.590.172
2 15 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	12 laporan	39.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	60.000.000
2 15 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	12 laporan	1.277.669.760	APBD Kota Semarang		12 laporan	1.600.000.000
2 15 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	2.645.539.200	APBD Kota Semarang		12 laporan	3.845.590.172
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	Kota Semarang	100%	5.948.758.834			100%	4.750.000.000
2 15 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 unit	40.313.180	APBD Kota Semarang		1 unit	100.000.000
2 15 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	75 unit	3.744.384.582	APBD Kota Semarang		75 unit	2.900.000.000
2 15 1 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Semarang	4 unit	126.836.360	APBD Kota Semarang		4 unit	150.000.000
2 15 1 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	3 unit	1.343.099.799	APBD Kota Semarang		3 unit	900.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	5 unit	197.802.000	APBD Kota Semarang		5 unit	500.000.000
2 15 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	9 unit	496.322.913	APBD Kota Semarang		9 unit	200.000.000
2 15 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	Kota Semarang	100%	37.734.000.000			100%	45.657.758.850
2 15 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	1 unit kerja	37.734.000.000	APBD Kota Semarang		1 unit kerja	45.657.758.850
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Kota Semarang	64,22%	241.081.881.233			64,22%	248.086.025.610
		Rasio ijin trayek per jumlah penduduk		6,81%				6,87	
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street		88%				88%	
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum		33%				33%	
		Jml trayek BRT		13 trayek				13 trayek	
2 15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLI	Kota Semarang	100%	1.688.376.270			100%	641.657.180
2 15 2 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 dokumen	1.688.376.270	APBD Kota Semarang		12 dokumen	641.657.180
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	Kota Semarang	100%	8.838.477.743			100%	6.473.311.766
2 15 2 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Semarang	26 unit	3.744.235.888	APBD Kota Semarang		26 unit	6.000.000.000
2 15 2 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Semarang	575 unit	1.751.962.883	APBD Kota Semarang		575 unit	200.000.000
2 15 2 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Semarang	118 unit	2.507.861.890	APBD Kota Semarang		118 unit	117.361.766

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 2 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Semarang	250 unit	834.417.082	APBD Kota Semarang		250 unit	155.950.000
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	Kota Semarang	3 unit	1.862.136.784			3 unit	400.000.000
2 15 2 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Semarang	3 unit	1.422.046.691	APBD Kota Semarang		3 unit	200.000.000
2 15 2 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Semarang	23 orang	440.090.093	APBD Kota Semarang		23 orang	200.000.000
2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	Kota Semarang	12 bulan	2.587.490.630			12 bulan	450.000.000
2 15 2 2.04 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	800 dokumen	732.674.230	APBD Kota Semarang		800 dokumen	200.000.000
2 15 2 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 laporan	1.854.816.400	APBD Kota Semarang		12 laporan	250.000.000
2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	Kota Semarang	12 bln	3.007.514.321			12 bln	598.000.000
2 15 2 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Semarang	1 unit	1.622.901.474	APBD Kota Semarang		1 unit	321.000.000
2 15 2 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	90000 dokumen	60.321.063	APBD Kota Semarang		90000 dokumen	180.000.000
2 15 2 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Semarang	35 unit	1.324.291.784	APBD Kota Semarang		35 unit	97.000.000
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	Kota Semarang	12 bln	4.833.660.338			12 bln	1.698.087.054

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 2 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	4 unit	46.176.000	APBD Kota Semarang		4 unit	1.355.037.054
2 15 2 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 dokumen	712.800.000	APBD Kota Semarang		3 dokumen	150.000.000
2 15 2 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 laporan	3.963.769.684	APBD Kota Semarang		12 laporan	118.050.000
2 15 2 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 laporan	110.914.654	APBD Kota Semarang		1 laporan	75.000.000
2 15 2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	Kota Semarang	1 tahun	79.500.000			1 tahun	225.000.000
2 15 2 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	2 laporan	66.000.000	APBD Kota Semarang		2 laporan	75.000.000
2 15 2 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kota Semarang	12 laporan	13.500.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	150.000.000
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	Kota Semarang	12 bulan	516.106.340			12 bulan	516.106.340
2 15 2 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	12 laporan	516.106.340	APBD Kota Semarang		12 laporan	100.000.000
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT	Kota Semarang	12 bulan	216.853.581.537			12 bulan	236.268.826.000
2 15 2 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Semarang	259 unit	216.715.988.822	APBD Kota Semarang		259 unit	235.718.826.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 2 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 laporan	137.592.715	APBD Kota Semarang		1 laporan	550.000.000
2 15 2 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kota Semarang	3 kegiatan	235.064.810			3 kegiatan	235.064.810
2 15 2 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 dokumen	235.064.810	APBD Kota Semarang		3 dokumen	170.000.000
2 15 2 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kota Semarang	2 kegiatan	214.716.640			2 kegiatan	214.716.640
2 15 2 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 dokumen	68.346.600	APBD Kota Semarang		1 dokumen	100.000.000
2 15 2 2.11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 dokumen	146.370.040	APBD Kota Semarang		1 dokumen	10.000.000
2 15 2 2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kota Semarang	2 kegiatan	146.089.780			2 kegiatan	146.089.780
2 15 2 2.13 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 dokumen	62.805.370	APBD Kota Semarang		1 dokumen	100.000.000
2 15 2 2.13 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 dokumen	83.284.410	APBD Kota Semarang		1 dokumen	10.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 15 2 2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kota Semarang	2 kegiatan	219.166.040			2 kegiatan	219.166.040
2 15 2 2.15 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 laporan	113.144.840	APBD Kota Semarang		1 laporan	100.000.000
2 15 2 2.15 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 laporan	106.021.200	APBD Kota Semarang		1 laporan	100.000.000

Di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) 2023 tersebut memuat hal-hal utama sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Semarang periode Tahun 2023 serta usaha pemenuhan indikator SDGs 2018-2030 dalam bidang perhubungan yaitu :
 - a. Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi berupa pelayanan BRT Trans Semarang yang melayani 12 rute lama dan 1 tambahan rute sub feeder.
 - b. Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon yang dituangkan di dalam pengadaan bike rack dan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk armada BRT;
 - c. Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel yang dituangkan berupa Studi MRLK kawasan trem, Studi nonfairbox trem, Studi penyusunan SPM trem, dan Studi Potensi Integrasi Trem.
2. Dukungan terhadap Pengarusutamaan gender dan pelaksanaan kota cerdas (Smart City) yang tertuang di seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan seperti:
 - a. Pengoperasian Bus Wisata keliling kota gratis untuk mengenalkan potensi wisata Kota Semarang;
 - b. Pengembangan Rooftop Solar Panel Gedung di atap Terminal Gunungpati yang merupakan inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai upaya penghematan energi sekaligus kampanye penggunaan energi yang ramah lingkungan di Kota Semarang;
 - c. Pengadaan dan pengoperasian kendaraan berbasis battery / listrik untuk mendukung Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan;
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan prasarana lalu lintas guna mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan di jalan berupa Area Traffic Control System (ATCS), pantauan lalu lintas di ruas jalan melalui cctv;
 - e. Penerapan parkir elektronik sebagai usaha untuk memberikan kemudahan pembayaran retribusi parkir (secara non tunai), meningkatkan pendapatan dan mengurangi kebocoran retribusi;
 - f. Dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan perkembangan teknologi untuk memudahkan pelaksanaan tugas.
3. Dukungan terhadap pengarusutamaan gender di Kota Semarang seperti:

- a. Pemisahan penumpang perempuan dan laki-laki di armada bus BRT;
- b. Tempat duduk khusus difable armada bus BRT dan Bus Wisata Keliling Kota;
- c. Pemberlakuan tarif khusus (lebih murah) untuk pelajar, mahasiswa, lansia, dan difable;
- d. Pemasangan prasarana jalan berupa marka, zebra cross, zona aman sekolah, rambu, lampu flashing dan lalin-lain untuk melindungi kaum perempuan, anak-anak, difable dan lansia.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja;
3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

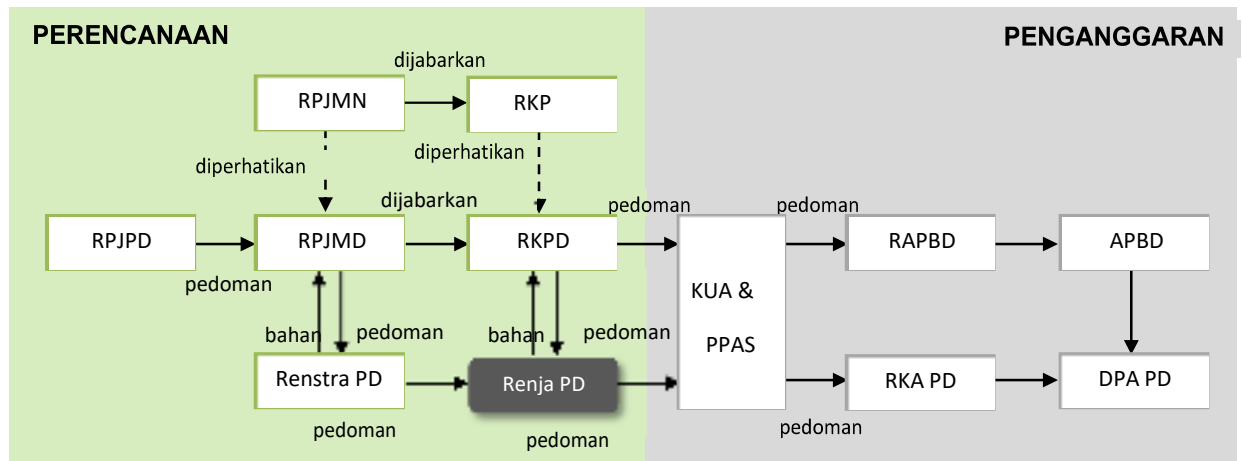
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota

Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang .



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang , analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang , review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 57.631.082.962. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 47.956.333.902 atau sebesar 83,21%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	63 %	63.00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	63 %	63.00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	63 %	63.00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	63 %	63.00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	10 dokumen	1 dokumen	16.67
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	3 dokumen	2.00	2 dokumen	2.00	100%	3 dokumen	20 dokumen	2000.00
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0.00	0.00	0.00%	1 dokumen	0 dokumen	0.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0.00	0.00	0.00%	1 dokumen	0 dokumen	0.00
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00	100%	1 dokumen	0 dokumen	0.00
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00	100%	1 dokumen	0 dokumen	0.00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1.00	100%	3 dokumen	3 dokumen	100.00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 %	N/A	12 bulan	12.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100 %	100 %	100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	100 %	1 dokumen	1.00	100%	1 laporan	0 laporan	0.00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	N/A	1 dokumen	1.00	100%	1 laporan	0 laporan	0.00
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	N/A	1 dokumen	1.00	100%	1 laporan	0 laporan	0.00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	N/A	3 buah	3.00	100%	100 %	33 %	33.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	30 %	30.00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	100 %	100%	100.00	100%	4 jenis	1 jenis	25.00
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	100 %	100%	100.00	100%	4 jenis	1 jenis	25.00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	100 %	100%	100.00	100%	100 %	25 %	25.00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	100 %	100%	100.00	100%	2 jenis	1 jenis	50.00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	7 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	7 buku	0 buku	0.00
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100 %	100 %	100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100 %	100 %	100%	100.00	100%	100 %	30 %	30.00
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	0 %	0.00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	0 unit	0.00
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	60 %	60.00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	40 %	40.00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	100 %	100%	100.00	100%	3 jenis	3 jenis	100.00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %		100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	100 %	12 bulan	12.00	100%	1 unit	1 unit	100.00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18 unit	100 %	12 bulan	12.00	100%	18 unit	18 unit	100.00
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100.00
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	2 jenis	N/A	100%	100.00	100%	2 jenis	2 jenis	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	N/A	100%	100.00	100%	3 jenis	2 jenis	66.67
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	0 paket	0.00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	4 gedung	100 %	100%	100.00	100%	4 gedung	3 gedung	75.00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 %		100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	35 %	35.00
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	50 persen	50.00
		Dokumen kajian menara telekomunikasi	1 dokumen	N/A	100%	100.00	100%	1 dokumen	0 dokumen	0.00
		Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 kegiatan	100 %	100%	100.00	100%	5 kegiatan	0 kegiatan	0.00
		Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	15 rekomendasi	N/A	N/A	N/A	N/A	15 rekomendasi	7 rekomendasi	46.67
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah penanganan pengaduan	4100 pengaduan	100 %	100%	100.00	100%	4100 pengaduan	2225 pengaduan	54.27
		kajian kebijakan pengaduan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	2 dokumen	200.00
		monitoring dan evaluasi	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	100 %	100%	100.00	100%	875 konten	496 konten	56.69

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jenis informasi publik yang disediakan	4 jenis	100 %	100%	100.00	100%	4 jenis	4 jenis	100.00
		permintaan informasi publik	2184 permintaan	N/A	N/A	N/A	N/A	2184 permintaan	1312 permintaan	60.07
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 dokumen	100 %	100%	100.00	100%	1 dokumen	0 dokumen	0.00
		jumlah kegiatan worksop dan pelatihan TIK	15 kegiatan	100 %	100%	100.00	100%	15 kegiatan	12 kegiatan	80.00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kajian Co Working Space	1 dokumen	N/A	100%	100.00	100%	1 dokumen	0 dokumen	0.00
		Jumlah kegiatan fasilitas FK Metra	8 kegiatan	100 %	100%	100.00	100%	8 kegiatan	3 kegiatan	37.50
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	50 %	50.00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	35 %	35.00
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	100.00
		Tingkat kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	90 %	100 %	N/A	N/A	N/A	90 %	95 %	105.56

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tingkat kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	95 %	100 %	N/A	N/A	N/A	95 %	99 %	104.21
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 perangkat daerah	100 %	N/A	N/A	N/A	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	80 %	100 %	N/A	N/A	N/A	80 %	70 %	87.50
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah CCTV yang terpasang	125 unit	100 %	100%	100.00	100%	125 unit	125 unit	100.00
		jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan intra	35 perangkat daerah	100 %	100%	100.00	100%	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	100.00
		jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	170 lokasi	100 %	100%	100.00	100%	170 lokasi	170 lokasi	100.00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50 perangkat daerah	100 %	25 buah	25.00	100%	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	100.00
		jumlah perangkat daerah yang terintegrasi oleh implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 perangkat daerah	N/A	25 buah	25.00	100%	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 paket aplikasi	N/A	100%	100.00	100%	3 paket aplikasi	2 paket aplikasi	66.67
		jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi	100 %	N/A	N/A	N/A	20 aplikasi	20 aplikasi	100.00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	60 %	100 %	100%	100.00	100%	60 %	50 %	83.33
		Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai Smart City	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	55 %	55.00
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	2 kegiatan	50.00
		jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City	4 kegiatan	N/A	100%	100.00	100%	4 kegiatan	2 kegiatan	50.00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	40 %	40.00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	50 %	50.00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Jumlah Elemen Data yang Terpenuhi	5000 data	N/A	N/A	N/A	N/A	5000 data	2,6 data	0.05

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Statistik Sektoral									
		Jumlah Konversi Data Sektoral Ke Dalam Data Spasial	20 data	N/A	N/A	N/A	N/A	20 data	15 data	75.00
		Jumlah Publikasi Statistik Sektoral	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	1 dokumen	50.00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah OPD yang Memiliki SDM Pengelola Data/Statistisi	35 perangkat daerah	N/A	100%	90.00	100%	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	100.00
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	20 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	20 kegiatan	10 kegiatan	50.00
		jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	35 OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	35 OPD	25 OPD	71.43
		jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1000 variabel	N/A	100%	100.00	100%	1000 variabel	500 variabel	50.00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang Mengelola Data Berdasarkan Statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	25 OPD	N/A	100%	90.00	100%	25 OPD	25 OPD	100.00
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Ketersediaan Data Seluruh OPD Kota Semarang	90 persen	N/A	100%	100.00	100%	90 persen	60 persen	66.67
		Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	25 persen	25.00
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	jumlah data yang terotorisasi	1000 data	N/A	100%	100.00	100%	1000 data	500 data	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey dan kompilasi)	50 kegiatan	N/A	100%	100.00	100%	50 kegiatan	3 kegiatan	6.00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 %	N/A	100%	100.00	100%	100 %	40 %	40.00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	40 %	40.00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	60 aplikasi	100 %	100%	100.00	100%	60 aplikasi	30 aplikasi	50.00

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 46 (empat puluh enam) sub kegiatan; Urusan pemerintahan Bidang Statistik terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan , 6 (enam) sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan.
 - b) Dari 5 (lima) Indikator kinerja program, semua indikator memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 46 (empat puluh enam) sub kegiatan; Urusan pemerintahan Bidang Statistik terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan , 6 (enam) sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan.
 - b) Dari 5 (lima) indikator kinerja program, semua indikator diperkirakan dapat memenuhi target
 - c) Dari 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 12 (dua belas) indikator yang diperkirakan masih dalam proses pencapaian target Renstra Tahun 2021-2026

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perijinan Alat Besar;
- d. Pemeliharaan Mebel;
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- f. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
- c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. Pelayanan Informasi Publik;
- e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

C. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral	100	100	%	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
- Pengembangan Infrastruktur;
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintah daerah	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non-Elektronik.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55.748.301.290	46.351.213.867	93,76	9.397.087.423
	Belanja Tidak Langsung	7.933.046.345	7.873.705.658	99,25	59.340.687
	Belanja Pegawai	7.933.046.345	7.873.705.658	99,25	59.340.687
1	Gaji dan Tunjangan	3.072.265.442	3.039.025.658	98,92	33.239.784
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.860.780.903	4.834.680.000	99,46	26.100.903
	Belanja Langsung	12.791.901.283	11.045.074.844	86,34	1.746.826.439
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.791.901.283	11.045.074.844	86,34	1.746.826.439
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.404.098	2.542.475	34,34	4.861.623
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.073.465	550.500	26,55	1.522.965
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	435.179	390.000	89,62	45.179
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	635.750	510.475	80,29	125.275
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.836.801	825.000	44,92	1.011.801
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.232.431	34.000	2,76	1.198.431
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.190.472	232.500	19,53	957.972
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.300.887.126	8.190.644.798	98,67	110.242.328
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.933.046.345	7.873.705.658	99,25	59.340.687
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	365.160.000	314.650.000	86,17	50.510.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.316.036	1.116.000	84,80	200.036

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	SKPD				
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	793.709	681.640	85,88	112.069
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	571.036	491.500	86,07	79.536
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.876.231	199.387.000	99,76	489.231
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	199.876.231	199.387.000	99,76	489.231
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.518.682.388	1.615.625.535	64,15	903.056.853
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.113.732	184.250.000	67,22	89.863.732
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.932.805	42.936.400	95,56	1.996.405
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.904.213	78.297.950	99,23	606.263
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.999.210	16.193.500	89,97	1.805.710
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	143.990.000	110.681.500	76,87	33.308.500
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.476.000	130.512.185	57,37	96.963.815
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.731.266.428	1.052.754.000	60,81	678.512.428
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.991.740	97.758.500	51,45	92.233.240
20	Pengadaan Mebel	42.283.740	40.225.000	95,13	2.058.740
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.708.000	57.533.500	38,95	90.174.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.410.400	297.587.614	83,26	59.822.786
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.410.400	297.587.614	83,26	59.822.786
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.217.649.300	641.528.922	52,69	576.120.378
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.223.000	236.099.581	78,64	64.123.419
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.472.000	128.363.941	63,40	74.108.059
25	Pemeliharaan Mebel	9.944.000	9.322.000	93,74	622.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.108.000	1.925.000	21,14	7.183.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.902.300	265.818.400	38,20	430.083.900
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.415.492.647	4.463.662.854	82,42	951.829.793
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.415.492.647	4.463.662.854	82,42	951.829.793

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.742.778.673	1.413.699.600	81,12	329.079.073
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.132.196.120	1.786.117.650	83,77	346.078.470
3	Pelayanan Informasi Publik	681.541.327	606.920.501	89,05	74.620.826
4	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	190.995.740	128.658.005	67,36	62.337.735
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	148.282.695	115.253.000	77,73	33.029.695
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	519.698.092	413.014.098	79,47	106.683.994
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	18.456.136.639	16.274.997.184	88,18	2.181.139.455
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.456.136.639	16.274.997.184	88,18	2.181.139.455
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	18.456.136.639	16.274.997.184	88,18	2.181.139.455
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.084.770.721	14.567.478.985	76,33	4.517.291.736
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	11.570.797.323	7.728.711.120	66,79	3.842.086.203
3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.365.787.330	1.290.502.400	94,49	75.284.930
4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.507.511.000	1.314.548.542	87,20	192.962.458
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.807.948.182	2.685.988.900	95,66	121.959.282
6	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.704.178.522	1.425.498.023	83,65	278.680.499
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	128.548.364	122.230.000	95,08	6.318.364
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.402.800.000	1.157.939.556	82,54	244.860.444
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.402.800.000	1.157.939.556	82,54	244.860.444
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.402.800.000	1.157.939.556	82,54	244.860.444
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	277.250.000	275.349.000	99,31	1.901.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	72.500.000	15.472.400	21,34	57.027.600
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	97.000.000	86.052.050	88,71	10.947.950
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	153.500.000	57.207.100	37,27	96.292.900
5	Pengembangan Infrastruktur	680.000.000	637.405.200	93,74	42.594.800
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100.000.000	83.235.656	83,24	16.764.344
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	479.981.672	447.180.479	93,17	32.801.193
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	479.981.672	447.180.479	93,17	32.801.193
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	479.981.672	447.180.479	93,17	32.801.193
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	479.981.672	447.180.479	93,17	32.801.193
	TOTAL	57.631.082.962	47.956.333.902	83,21	9.674.749.060

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebesar Rp (57.631.082.962). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp (47.956.333.902) dengan sisa sebesar Rp 9.674.749.060 contoh (16,78%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 7.933.046.345,00 realisasi Rp. 7.873.705.658,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 59.340.687,00.
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 49.698.036.617,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 40.082.628.244,00(80,65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.615.408.373,00 (19,35%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan

Bidang Persandian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
Mewujudkan Pelayanan Data dan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran :										
Terwujudnya Layanan Data dan Informasi yang di Dukung Oleh Teknologi Informasi	Pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			76,23%	76,25%	76,38%	78,91%	77,31%	100%	100%

Sumber : diskominfo Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan Pelayanan Data dan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**

memiliki indikator kinerja yaitu “Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi”, telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100%;

b. Sasaran

Sasaran 1 : **“Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi”** memiliki indikator kinerja yaitu “Pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi” yang telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Sasaran 2 : **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah” yang telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 77,31 dari target sebesar 76,23 (capaian sebesar 101,4%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada akhir tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Publik dapat terealisasi dengan terlaksananya forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Kegiatan pada tahun 2021 yang telah dilaksanakan PPID Utama Kota Semarang, antara lain :
 - a) Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/8 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021 dan telah disosialisasikan.
 - b) Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021;
 - c) Bintek Sederhana untuk pembuatan Website di masing-masing PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - d) Melaksanakan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 485.1/81 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021 dan telah disosialisasikan;
 - e) Pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekda Kota

Semarang Nomor 485.1/155 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Daftar Kegiatan yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021;

- f) Mengikuti penilaian Monitoring dan Evaluasi serta tahapan Uji Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif;
 - g) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021;
 - h) Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi Publik (PIP/) :
 - 1) Update website ppid.semarangkota.go.id yang memuat informasi tentang PPID dan Daftar Informasi Publik
 - 2) Pembuatan leaflet PPID
 - 3) Pembuatan leaflet PIP
2. Pengelolaan laporan yang masuk selama tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut

KATEGORI LAPORAN

Total laporan yang telah terinput dan diproses secara keseluruhan sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 6466 laporan. Dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN MASUK KESELURUHAN

NO	SUMBER	
1	Website	322
2	SMS	913
3	Android LAPOR!	38
4	iOS	10
5	WhatsApp	3512
6	Instagram	352
7	Twitter	84
8	Mobile App LAPORHENDI	163
9	LAPORGUB	1072
TOTAL JUMLAH INPUTAN		6466

LAPORAN TERKELOLA

Laporan yang sudah dikoordinasikan serta didisposisikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti dengan format serta data laporan yang jelas pada Tahun 2021 berjumlah **6466** laporan

Aspirasi / Saran : **0** laporan

Pengaduan : **6466** laporan

Permintaan Informasi : **0** laporan

NO	KATEGORI LAPORAN TERKELOLA	
1	PENGADUAN	6466
2	PERMINTAAN INFORMASI	0
3	APIRASI	0
TOTAL JUMLAH LAPORAN		6466

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	PENGADUAN
1	BELUM	160
2	PROSES	713
3	SELESAI	5210
4	SELESAI BERSYARAT	383
TOTAL		6466

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	PERMINTAAN INFORMASI
1	BELUM	0
2	PROSES	0
3	SELESAI	0
TOTAL		0

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	ASPIRASI
1	BELUM	0
2	PROSES	0
3	SELESAI	0
TOTAL		0

GAMBARAN TINDAK LANJUT OPD

Rekapitulasi Laju Tindak Lanjut OPD pada Tahun 2021

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	
1	BELUM	160
2	PROSES	713
3	SELESAI	5210
4	SELESAI BERSYARAT	383
TOTAL		6466

Persentase Laju Tindak lanjut laporan pada Tahun 2021 adalah :

BELUM : 2 %

PROSES : 11 %

SELESAI : 81 %

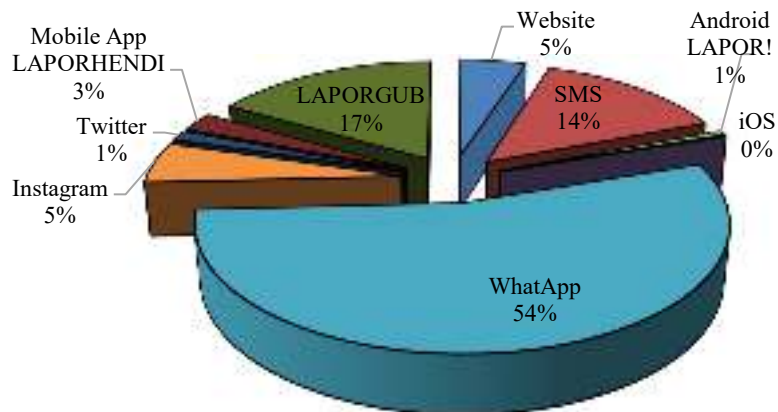
SELESAI BERSYARAT : 6 %

Rekapitulasi 5 (lima) OPD yang paling banyak mendapat laporan pada Tahun 2021

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	1217
2	Dinas Pekerjaan Umum	949
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	560
4	Dinas Sosial	472
5	Satpol PP	406

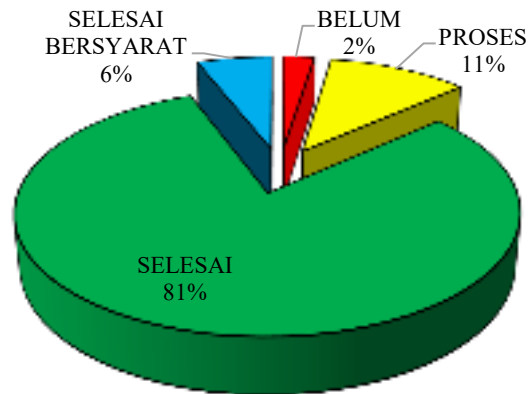
**DATA STATISTIK LAPORHENDI
TAHUN 2021**

➤ SUMBER INPUT LAPORAN

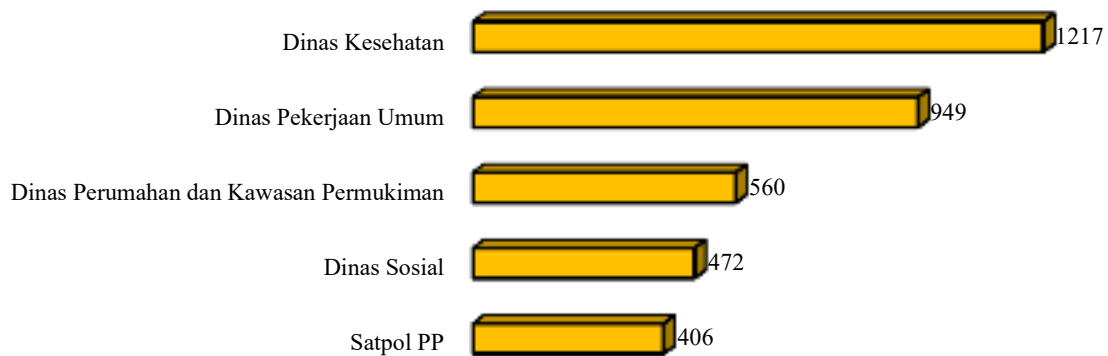


Keterangan : Grafik diatas menunjukkan trend sumber laporan WhatsApp pada Tahun 2021. Secara umum dapat dilihat bahwa sumber aduan WhatsApp yang paling di minati oleh masyarakat umum .

➤ STATUS LAPORAN



➤ OPD YANG PALING SERING MENDAPAT LAPORAN



3. Pemanfaatan website Pemerintah Kota Semarang oleh OPD-OPD sebagai media penyampaian informasi dan kegiatan kepada masyarakat.
4. Penyebarluasan Informasi ke masyarakat dapat terlaksana melalui beberapa media yaitu:
 - Spot radio/greeting
 - E-Radio
 - Media cetak lokal
 - Media nasional (TV nasional)
 - Kolom khusus di media lokal (Suara Merdeka, Radar Semarang, Tribun Jateng)
 - Baliho, spanduk dan backdrop, di Balaikota, Kalibanteng hadap bandara, Kalibanteng hadap jalan layang, Taman Kalibanteng, Depan PMI, Depan SMP 32 Semarang, Depan ADA Setiabudi Banyumanik, Depan RSUD Wongsonegoro, Jl. Citarum/Soekarno Hatta, Gedung Diskominfo, Taman

Kasmaran, Kantor Kelurahan Ngesrep, SDN 01 Candi, Rumah Pompa Madukoro, dan SMPN 6 Semarang.

- Publikasi iklan Telemarket di media sosial.
 - Penyebarluasan informasi melalui media social
 - Artikel Berita Online
5. Tersedianya peralatan studio serta penunjang Sit Room, tersedianya bandwidth domestik dan bandwidth internasional, tersedianya jaringan internet di 177 kelurahan, wifi di tempat publik, Internet monitoring CCTV RT Kota Semarang, terselenggaranya pemeliharaan Intranet, internet dan fiber optic.
 6. Terbangunnya fasilitas public baru Co Working Space di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan fasilitas ruangan ber AC, Internet kecepatan tinggi, ruang rapat, komputer desktop dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya.
 7. Tersusunnya FS Jaringan Telekomunikasi
 8. Terpenuhinya infrastruktur TIK untuk menunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Semarang, pemasangan CCTV Analytics di Kawasan Kota Lama, Simpang Lima dan Pandanaran, pengadaan scissorlift, pengelolaan Data Center dan terlaksananya video conference, live streaming dan live screening.
 9. Terbentuknya aplikasi interaktif dan terintegrasi dengan mengintegrasikan beberapa sistem yang ada dalam rangka untuk mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang.
 10. Pembuatan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
 11. Pembuatan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
 12. 18 Maret 2021 mengadakan Sosialisasi SPBE Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021
 13. Mengadakan Bimtek Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Kota Semarang (Bimtek Tahap I – Tahap IV)
 14. Melakukan Monev E-Surat dan TTE
 15. Mengadakan Pelatihan bagi SDM Pemerintah Kota Semarang khususnya Pranata Komputer, antara lain :
 - Pelatihan Frontend Web Development with Vue Js
 - Beckend Web Programming with Laravel
 - Training Web Application Penetration Testing

- Pelatihan Network Operation Center (NOC)
 - Pelatihan front end development with PWA (progressive Web Application)
16. Mengadakan pelatihan transformasi digital dan integrated smart system platform serta SSO (Single Sign On)
 17. Melaksanakan pembelian lisensi keamanan informasi
 18. Terlaksananya sosialisasi kepada para komunitas, pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang terdiri dari Workshop Basic Digital Marketing, Me Day Workshop Melek Data Analisis Data untuk Pengambilan Keputusan, Mas Hendi Ngabuburit Bareng Komunitas, Workshop Digital Marketing bersama Baznas Kota Semarang, Workshop Kontent Kreatif Satuan Tugas GERCEP Kota Semarang dan Workshop Pelatihan VIVX Design bagi anggota Komunitas DOSCOM
 19. Terlaksananya Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 35 kabupaten / kota dengan meraih Juara Harapan 1
 20. Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya FK Metra Live Streaming Youtube Pemerintah Kota Semarang sebanyak 4 kali dengan tema Vaksin, HUT Kota Semarang, Ojo Leno dan Ojo Nyepeleke
 21. Terfasilitasinya Saka Milenial Kota Semarang sebanyak 6 kegiatan dengan acara bersama SEMARCAKEP (Semarang Penyandang Cacat Kepedulian) dengan tema Pelatihan Fotografi, Pelatihan Belanja Online, Pelatihan Web Bersama Saka Milenial, Pelatihan Web Bersama Karangtaruna Kota Semarang, Pelatihan Penangkal Hoax Bersama Saka Milenial dan Pelatihan Seni Fotografi bersama GERCEP (Gerakan Remaja Cegah dan Tangkal Covid)
 22. Sosialisasi kepada provider dan pemilik menara telekomunikasi tentang perubahan rencana tata ruang wilayah kota semarang RTRW (Masterplan Menara Bersama)
 23. Tersusunnya Kajian Co-Working Space di Kecamatan yang bermaksud untuk mewujudkan ruang atau wadah yang menampung kreativitas dan inovasi masyarakat melalui kolaborasi dan kerjasama antar pengguna, sehingga dapat mempercepat pengembangan komunitas digital dan industri kreatif di Kota Semarang
 24. Tersusunnya Kajian Kreatifitas dan Estetika Kota terkait Menara Telekomunikasi Kamufase Kawasan Segitiga Emas Kota Semarang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji efektifitas dan estetika kota terkait menara telekomunikasi kamufase dikawasan segitiga emas kota semarang

25. Tersusunnya Kajian Pemberdayaan Komunitas TIK dalam Pemulihan Ekonomi di era New Normal dimaksudkan untuk menambah kapasitas atau kualitas dari komunitas TIK dalam menghadapi new normal
26. Meningkatkan ketersediaan data statistik pembangunan daerah dari yang ditargetkan sebesar 86,00 % menjadi sebesar 86,00 %, atau berhasil mencapai target dengan capaian sejumlah 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan nilai tahun 2020, yaitu sebesar 83 persen. Terwujudnya basis data yang akurat, akuntabel, dan terkini dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif sebesar 100%, dan terwujudnya Semarang Satu Data yang dapat direalisasikan sebesar 100%;
27. Pemutakhiran Updating Data Statistik Spasial pada Sistem Informasi Geospasial Warga Kota Semarang (TEGAL WARENG), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menunjang penyajian data statistik yang lebih informatif, inovatif dan tidak membosankan.
28. Menyusun satu buku publikasi Statistik Daerah Kota Semarang, yaitu Buku Statistik Sektorial Kota Semarang, yang merupakan salah satu bentuk inovasi dari Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Semarang untuk melakukan analisa hasil pembangunan daerah yang dapat dilihat dari data statistik sektorial Kota Semarang;
29. Melakukan pemutakhiran terhadap Sistem Informasi Portal Semarang Satu Data sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang telah ditetapkan terkait portal satu data di daerah (dari semarsatata.semarangkota.go.id menjadi data.semarangkota.goid), serta perubahan database menjadi per wilayah dan per gender;
30. Penyusunan Perpustakaan Statistik Digital yang mengkompilasi buku digital serta publikasi – publikasi statistik dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses melalui web digital;
31. Penyusunan Pengelolaan & Pemanfaatan Data Aktifitas Ekonomi Digital yang menampilkan data transaksi ekonomi digital (meliputi jenis dan jumlah komoditi, nilai transaksi) dan pelaku ekonomi digital di Kota Semarang, di mana data tersebut dapat memberi panduan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menyajikan insight dan analisis ekonomi khususnya ekonomi digital di Kota Semarang;
32. Penyusunan Modul Pengumpulan Data Statistik Sektorial Kota Semarang dalam Portal Semarang Satu Data ini adalah untuk mewujudkan pelayanan data sektorial dalam melakukan pengumpulan data sektorial pada level wilayah (RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) agar dapat memenuhi kebutuhan data dan

informasi yang disampaikan atau dihasilkan secara eksisting cepat dan akurat sampai ke level wilayah;

33. Melakukan Studi Penelitian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Statistik, dengan produk dihasilkan adalah :
 - Buku Penyusunan Metadata Statistik Sektor Kota Semarang;
 - Buku Penyusunan Hak Akses Dalam Pelayanan Statistik (Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Kota Semarang).
34. Meningkatnya jumlah software yang dipasang di server yang dapat melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan luar dan penggunaan Tanda Tangan Eletronik pada beberapa aplikasi yang digunakan OPD, sehingga data dan informasi yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat terlindung dan digunakan untuk merencanakan program-program pembangunan dalam rangka menuju masyarakat yang semakin sejahtera.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi ke masyarakat, maka dilakukan melalui beberapa media baik media social, media cetak dan media elektronik, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat;
- b. Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Barbasis Elektronik, maka perlu untuk membuat suatu system yang terpadu yang dapat mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang ada di kota Semarang, menuju terwujudnya Smart City di Kota Semarang;
- c. Perlu untuk membentuk basis data yang terpadu yang mengintegrasikan data-data yang ada di Kota Semarang, sebagai salah satu hal yang penting dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Perlunya pengadaan bandwidth untuk CCTV RT se-Kota Semarang, dalam rangka mendukung upaya peningkatan keamanan wilayah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian diantaranya:

- a. Dalam melaksanakan aktivitas dan menyimpan data bagi PPID Pembantu perlunya ruangan khusus;
- b. Perlunya penataan jenis data yang sudah dihimpun oleh PPID Pembantu;
- c. Masih banyak masyarakat yang mengadu tidak melalui kanal resmi, seperti melalui instagram, Sehingga perlu penginputan secara manual;
- d. Perlunya meningkatkan partisipasi kelompok perempuan (35%) dan Difabel (1%) dalam pelaporan dan pengaduan;
- e. Aplikasi-aplikasi yg telah dibuat oleh OPD perlu diintegrasikan agar penggunaannya lebih efektif;
- f. Masih tersebarunya Manajemen Data dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- g. Kondisi beberapa peralatan TIK yang perlu diremajakan;
- h. Perlunya peningkatan SDM teknis dalam pengelolaan server;
- i. SDM di bidang TIK terutama untuk keamanan informasi perlu ditambah;
- j. Jaringan internet di OPD-OPD yang sudah berumur lama perlu diupgrade;
- k. Free WIFI di area publik selama pandemik dikurangi jumlahnya karena untuk mengurangi kerumunan, namun tetap dalam posisi siap diaktifkan lagi jika dibutuhkan;
- l. Belum tersedianya regulasi serta petunjuk teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Semarang dan penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- m. Belum tersinkronisasi dan harmonisasi kewenangan data serta belum semua data tersedia konsep dan definisi yang jelas;
- n. Belum sesuai pembagian tupoksi dalam menjalankan tugas-tugas sesuai bidang urusan statistik;
- o. jumlah peralatan pengamanan informasi (firewall, IPS, IDS, antivirus) belum memadai;
- p. perlunya pelatihan terkait awareness keamanan informasi utk semua OPD;
- q. perlunya pelatihan teknis bagi tenaga keamanan informasi;
- r. perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya vulnerability assesment untuk layanan-layanan OPD yang berbasis Internet.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang TIK, terutama perempuan dan anak-anak yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang internet dan TIK;
- Untuk mendukung penggunaan TIK perlunya infrastruktur yang memadai;
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkembangan TIK dalam mendukung kegiatan baik pemerintahan, perdagangan, komunikasi dan informasi dalam pembangunan;
- Perkembangan Teknologi yang semakin cemat dan Smart sehingga memudahkan kita dalam memperoleh Informasi yg tepat dan akurat;
- Perlunya meningkatkan partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui www.semarangkota.go.id dan media sosial Pemerintah Kota Semarang lainnya;
- Masih banyak OPD memiliki data yang sangat minim baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan;
- Masih dijumpai beberapa OPD yang belum bisa mengolah data;
- Perlunya meningkatkan kesadaran terhadap pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut;
- Peningkatan SDM persandian dalam pengamanan informasi yang otentik, integrity dan nir-penyangkalan;
- Pembentukan kelembagaan PPID Pembantu di tiap OPD yaitu PPID Pembantu yang profesional sesuai permendagri No 3 Tahun 2015;
- Perlunya Unit Pengelolaan Pengaduan di tiap-tiap OPD;
- Perlunya perhatian terhadap perempuan, anak, lansia, dan disabilitas dalam menerima hasil-hasil pembangunan, sehingga perlu dimasukkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan gender terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas.

b. Peluang:

- Adanya dukungan anggaran dalam APBD Kota Semarang melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat secara umum, terutama dalam

rangka meningkatkan pengetahuan perempuan dan anak-anak tentang internet dan TIK;

- Adanya tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul yang dimanfaatkan sebagai layanan Wifi;
- Adanya komunitas-komunitas di masyarakat yang mempermudah dalam peningkatan infrastruktur TIK melalui sosialisasi dan edukasi;
- Perkembangan Teknologi yg cepat memerlukan dukungan SDM yang menguasai di bidang TIK;
- Ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang di dukung jaringan informasi dan komunikasi yg memadai di semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Statistik sebagai bahan perencanaan : Melalui berbagai metode yang dikembangkan dalam statistik (pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembuatan kesimpulan untuk pengambilan keputusan serta penyajian data), data yang dihasilkan dapat dipercaya, tepat waktu dan akurat, sehingga akan sangat membantu dalam setiap kegiatan perencanaan program;
- Statistik sebagai bahan monitoring : Dalam arti sempit statistik adalah data ringkasan berbentuk angka, maka hal ini sangat membantu di dalam suatu kegiatan monitoring. Oleh karena secara umum yang dilakukan dalam kegiatan monitoring adalah memonitor seluruh kekuatan dan kelemahan program yang menyangkut berbagai variable yang berbentuk data ringkasan;
- Statistik sebagai bahan evaluasi : Dengan mengetahui berbagai data yang dapat dipercaya maka selanjutnya kita dapat menganalisis dan memutuskan yang baik dan yang buruk. Selain itu melalui berbagai data yang ada kita dapat membandingkan dan selanjutnya membuat suatu generalisasi dari sampel yang kecil kepada populasi. Selain itu analisis data statistik dapat digunakan pula untuk meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan kondisi yang sudah lalu;
- Adanya kebijakan dari pusat yang mengatur tentang persandian, yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara;

- Penunjukan PPID Pembantu dengan SK Walikota Semarang, dengan kelengkapan aturan berjenjang yang jelas dari UU, Peraturan Komisi Informasi, Permendagri sampai Peraturan Walikota Semarang;
- Adanya peraturan perundang-undangan dari Pusat dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan tentang pengelolaan penanganan pengaduan.
- Adanya kebijakan tentang pengarusutamaan gender sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Adanya berbagai aplikasi dan sistem yang ada di Kota Semarang belum terintegrasi, sehingga dapat menimbulkan berbagai kendala contohnya dalam perencanaan perlu melakukan input data beberapa kali karena sistem yang belum terintegrasi, sehingga perlu adanya Single Sign-On dan Semarang On-Line untuk Sistem Integrasi untuk mempermudah dan mempercepat akses masuk ke dalam aplikasi terutama penggunaan ketika dalam keadaan darurat;
- b. Adanya pemanfaatan data yang berasal dari geospasial, serta pengembangan basis data yang akurat dan akuntabel sesuai dengan konsep Satu Data dan Satu Peta;
- c. Pada saat ini memasuki era digital, dimana beberapa komunitas TIK mulai bermunculan di Kota Semarang sehingga perlunya untuk membuat suatu wadah yang beranggotakan komunitas-komunitas tersebut yang dapat menjadi pusat kegiatan dan aktivitas bersama para komunitas TIK;
- d. Dalam rangka mewadahi komunitas yang ada di Kota Semarang dilakukan beberapa kegiatan yang mampu menggerakkan kreativitas komunitas tersebut salah satunya dalam bentuk Nobar (Nongkrong Bareng) Komunitas;
- e. Perkembangan teknologi yang pesat perlu didukung dengan adanya akselerasi SPBE dan Pengembangan Smart City pada lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dimana Smart City dan SPBE merupakan kebijakan nasional melalui dasar Perpres 95 tahun 2018 sehingga menjadi landasan ideologis dan praktis dalam pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan murah melalui penerapan TIK dalam pemerintahan;

- f. Penggunaan teknologi juga dikembangkan dalam pembuatan Robot Layanan (Industry 5.0) sebagai sarana berbentuk teknologi yang berguna sebagai pendukung pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh manusia mulai digantikan oleh robot yang menggunakan teknologi informasi;
- g. Layanan pengaduan Laport Henti dan CC 112, merupakan layanan pengaduan dari masyarakat yang mudah diakses, dan ditindaklanjuti dengan cepat, yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga kedepannya menjadi kanal resmi pengaduan berbasis digital yang terpercaya, untuk itu diperlukan agen Informasi dan Pengaduan yang mampu menyampaikan tentang keunggulan layanan pengaduan ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan layanan ini dengan sebaik-baiknya;
- h. Data Center/Pusat Data merupakan bangunan fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan komponen - komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Data Center yang melayani kebutuhan proses data dan aplikasi yang dikembangkan oleh OPD - OPD. Pusat Data memudahkan proses layanan data yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota antar Dinas terkait dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah kota. Kebutuhan akan informasi lebih mudah dan cepat untuk diperoleh dengan adanya pusat data dimana teknologi digital pengolahan data merupakan kuncinya. Pusat Data Pemkot Semarang telah memiliki pengakuan keamanan informasi dengan dimilikinya sertifikasi ISO 27001. Di sisi pusat data utama/primary sudah memenuhi kriteria teknologi yang modern dengan dikembangkannya teknologi cloud on - premise (local cloud); sehingga efisiensi sumber daya perangkat yang digunakan mendukung efisiensi anggaran yang digunakan. Sebagai pengembangan sistem pendukung sistem yang telah ada, diperlukan sistem kedua (secondary system) dalam hal ini berfungsi sebagai disaster recovery (proses untuk mendapatkan kembali akses dan fungsionalitas ke infrastruktur TI nya setelah peristiwa seperti bencana alam, serangan dunia maya atau bahkan gangguan bisnis yang terkait dengan pandemi, berbagai metode pemulihan bencana (DR) dapat menjadi bagian dari rencana pemulihan bencana;
- i. Pembangunan Big Data Analytics adalah suatu teknologi baru untuk analitik, dimana terdiri dari perangkat yang cukup lengkap yang terdiri dari data center, cloud, teknologi IOT, jaringan FO sehingga mampu dioptimalkan untuk analitik. Big Data merupakan penopang dalam Industri 4.0, dimana data merupakan komoditas penting dalam era informasi sekarang. Dengan data yang sah dan

diolah dengan baik memudahkan pengambilan keputusan dan pelayanan masyarakat yang tepat;

- j. Pelayanan publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan terus, salah satunya dengan menyediakan layanan internet pasca jam kerja, dimana layanan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat baik dalam rangka mengembangkan usahanya yang dilakukan melalui media digital serta juga dapat membantu menyediakan internet bagi anak-anak yang mengerjakan tugas sekolahnya menggunakan internet.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif

- 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara

berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak

- 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				52.032.065.060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				52.032.065.060	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	14.969.402.643	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	14.969.402.643	
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			100 %	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan				100 %			
Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran			100 %	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran				100 %			
Persentase peningkatan kemampuan ASN			100 %	Persentase peningkatan kemampuan ASN				100 %			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	22.029.693	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dokumen	22.029.693	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	2 dokumen	2.994.159	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	2 dokumen	2.994.159	-
			Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo	1 Dokumen				Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo	1 Dokumen		
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.296.677	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.296.677	-
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.750.617	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.750.617	-
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.296.677	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.296.677	-
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	2.177.809	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	2.177.809	-
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	4.513.754	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	4.513.754	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	11.864.026.211	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	11.864.026.211	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 persen	11.448.029.388	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 persen	11.448.029.388	-
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	406.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	406.340.000	-

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	3.401.573	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	3.401.573	-
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semesteran	14 laporan	3.401.573	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semesteran	14 laporan	3.401.573	-
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	2.853.677	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	2.853.677	-
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 %	252.852.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 %	252.852.240	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen	252.852.240	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen	252.852.240	-
			sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100 persen				sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100 persen		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	876.721.963	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	876.721.963	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 persen	19.707.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 persen	19.707.000	-
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	42.135.106	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	42.135.106	-
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 jenis	37.675.842	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 jenis	37.675.842	-
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 persen	53.659.769	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 persen	53.659.769	-
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 jenis	17.440.487	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 jenis	17.440.487	-
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku	21.556.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku	21.556.300	-
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100 persen	152.673.367	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100 persen	152.673.367	-
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100 persen	152.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100 persen	152.750.000	-
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 persen	379.124.092	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 persen	379.124.092	-
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	228.536.726	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	228.536.726	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	jumlah mebel yang disediakan	100 persen	140.259.301	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	jumlah mebel yang disediakan	100 persen	140.259.301	-

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100 persen	88.277.425	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100 persen	88.277.425	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	469.009.140	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	469.009.140	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	2 kegiatan	19.999.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	2 kegiatan	19.999.000	-
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	449.010.140	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	449.010.140	-
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	1.256.226.670	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	1.256.226.670	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan	1 unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan	1 unit	40.313.180	-
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10 unit	462.700.491	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10 unit	462.700.491	-
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	2 unit	36.504.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	2 unit	36.504.000	-
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan mebel	2 jenis	7.272.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan mebel	2 jenis	7.272.000	-
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	130.474.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	130.474.000	-
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan taman	1 paket	5.063.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan taman	1 paket	5.063.000	-
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	8 gedung	573.899.999	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	8 gedung	573.899.999	-
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 %	5.604.524.500	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 %	5.604.524.500	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 %	5.604.524.500	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 %	5.604.524.500	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	20 rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	20 rekomendasi	150.000.000	-
			Dokumen kajian menara telekomunikasi	1 Dokumen				Dokumen kajian menara telekomunikasi	1 Dokumen		

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 kegiatan				Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 kegiatan		
			Cakupan layanan telekomunikasi	100 persen				Cakupan layanan telekomunikasi	100 persen		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	jumlah penanganan pengaduan	4200 pengaduan	1.513.218.100	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	jumlah penanganan pengaduan	4200 pengaduan	1.513.218.100	-
			kajian kebijakan pengaduan	1 dokumen				kajian kebijakan pengaduan	1 dokumen		
			monitoring dan evaluasi	8 kegiatan				monitoring dan evaluasi	8 kegiatan		
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	2.541.910.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	2.541.910.000	-
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	8 Dokumen				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	8 Dokumen		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	jenis informasi publik yang disediakan	4 jenis informasi	677.796.400	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	jenis informasi publik yang disediakan	4 jenis informasi	677.796.400	-
			permintaan informasi publik	2184 informasi				permintaan informasi publik	2184 informasi		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 Dokumen	471.600.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 Dokumen	471.600.000	-
			Jumlah Kegiatan workshop dan Pelatihan TIK	10 Kegiatan				Jumlah Kegiatan workshop dan Pelatihan TIK	10 Kegiatan		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Fasilitas FK Metra	12 kegiatan	250.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Fasilitas FK Metra	12 kegiatan	250.000.000	-
			Jumlah Dokumen kajian Co working space	1 dokumen				Jumlah Dokumen kajian Co working space	1 dokumen		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	31.458.137.917	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	31.458.137.917	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	26.265.780.558	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	26.265.780.558	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yng terkoneksi di Jaringan Intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas kominfo	50 OPD	1.924.419.645	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yng terkoneksi di Jaringan Intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas kominfo	50 OPD	1.924.419.645	-
			Tingkat Kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	95 persen				Tingkat Kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	95 persen		

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tingkat Kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	97 persen				Tingkat Kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	97 persen		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 OPD	688.097.282	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 OPD	688.097.282	-
			Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	85 persen				Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	85 persen		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan intra	40 OPD	23.653.263.631	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan intra	40 OPD	23.653.263.631	-
			Jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	150 unit				Jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	150 unit		
			Jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	190 titik/lokasi				Jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	190 titik/lokasi		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	5.192.357.359	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	5.192.357.359	-
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	Jumlah OPD yang terintegrasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 OPD	2.416.381.410	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	Jumlah OPD yang terintegrasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 OPD	2.416.381.410	-
			jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50 OPD				jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50 OPD		
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	jumlah aplikasi yang terintegrasi layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi	875.649.010	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	jumlah aplikasi yang terintegrasi layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi	875.649.010	-
			jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 aplikasi				jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 aplikasi		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	70 persen	1.708.705.099	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	70 persen	1.708.705.099	-
			Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai smart city	100 persen				Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai smart city	100 persen		
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Monitoring Implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP)	4 kegiatan	191.621.840	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Monitoring Implementasi sistem Integrated Smart	4 kegiatan	191.621.840	-

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			dan Smart City Kota Semarang					System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang			
			jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	4 kegiatan				jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	4 kegiatan		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				626.003.608	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				626.003.608	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	626.003.608	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	626.003.608	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 %	626.003.608	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 %	626.003.608	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah elemen data yang terpenuhi	5100 Data	75.000.173	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah elemen data yang terpenuhi	5100 Data	75.000.173	-
			Jumlah kompilasi statistik sektoral	40 Kompilasi				Jumlah kompilasi statistik sektoral	40 Kompilasi		
			Jumlah survey statistik sektoral	30 jumlah survey				Jumlah survey statistik sektoral	30 jumlah survey		
			Jumlah publikasi Statistik Sektoral	2 dokumen				Jumlah publikasi Statistik Sektoral	2 dokumen		
			Jumlah konversi Data Sektoral ke Dalam Data Spasial	20 jenis				Jumlah konversi Data Sektoral ke Dalam Data Spasial	20 jenis		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah OPD yang memiliki SDM pengelola data/statistisi	45 OPD	75.000.580	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah OPD yang memiliki SDM pengelola data/statistisi	45 OPD	75.000.580	-
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	30 kegiatan	100.000.265	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	30 kegiatan	100.000.265	-
			Jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1500 variabel				Jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1500 variabel		
			Jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	45 OPD				Jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	45 OPD		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah OPD yang menyelenggarakan statistik sektoral	34 OPD	70.000.144	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah OPD yang menyelenggarakan statistik sektoral	34 OPD	70.000.144	-
			Jumlah OPD yang mengelola data berdasarkan statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	34 OPD				Jumlah OPD yang mengelola data berdasarkan statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	34 OPD		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan Portal Semarang Satu Data	20 OPD	175.000.023	Pengembangan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan Portal Semarang Satu Data	20 OPD	175.000.023	-
			Tersedianya ketersediaan data seluruh OPD Kota Semarang	92 persen				Tersedianya ketersediaan data seluruh OPD Kota Semarang	92 persen		

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100 persen				Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100 persen		
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah data yang terotorisasi	1500 Data	131.002.423	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah data yang terotorisasi	1500 Data	131.002.423	-
			Jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey & kompilasi)	70 kegiatan				Jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey & kompilasi)	70 kegiatan		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				690.921.720	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				690.921.720	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 %	690.921.720	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 %	690.921.720	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 %	690.921.720	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 %	690.921.720	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	74 aplikasi	690.921.720	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	74 aplikasi	690.921.720	-
			Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan				Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan		
TOTAL					53.348.990.388					53.348.990.388	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota/Forum OPD. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana berikut :

Pertanyaan dari Reses Dewan

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik. Disamping itu, perlu ditambah CCTV tidak hanya di perkotaan saja tetapi di perempatan yang ramai walaupun daerah pinggiran Kota Semarang. Bila daerah pinggiran Kota Semarang di perempatan-perempatannya yang ramai tersebut bisa dipasang CCTV pada system lalu lintas maka diharapkan keamanan serta ketertiban bisa lebih terjaga dan mudah dalam pengawasan (GOLKAR-NASDEM)

Tanggapan :

Merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan, tugas Diskominfo adalah pemasangan CCTV di jalan lingkungan

2. Layanan pengaduan masyarakat bernama Lapor Hendi telah cukup efektif menjadi sarana pengawasan dan pengaduan masalah layanan publik, Ini perlu terus ditingkatkan dan dipastikan tindak lanjut penyelesaiannya (PKB)

Tanggapan :

Dalam mengelola pengaduan masyarakat Pemkot Semarang menggunakan kanal SP4N Lapor dan Lapor Hendi yaitu melalui SMS, Website lapor.go.id, Whatsapp, Aplikasi Android, dan twitter. Melalui 5 kanal resmi tersebut, sejauh ini cukup efektif untuk mengakomodir pengaduan dan aspirasi masyarakat. Saat ini bersama seluruh Tim Lapor Hendi di masing-masing OPD, kami juga mengutamakan quick respon dalam menanggapi aduan masyarakat yang dimonitor dalam rapat Monev Admin Lapor Hendi secara rutin

3. Perlu memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap tempat pelayanan publik. Yaitu untuk mengawasi pelayanan kepada masyarakat agar dipastikan prima. Monitor CCTV tersebut perlu dipasang di tempat yang mudah dilihat masyarakat, sehingga mencegah terjadinya kemungkinan pungutan liar (PKB)

Tanggapan :

Sudah ada cctv di setiap tempat pelayanan publik

4. Penyediaan wifi gratis untuk menunjang pembelajaran siswa(PAN-PSI)

Tanggapan :

Free wifi di area publik sdh ada dan Dinas Pendidikan sudah menganggarkan lewat dana BOS utk kebutuhan pendidikan

5. Seyogyanya pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari pemerintah kota Semarang (DEMOKRAT)

Tanggapan :

Sudah dilakukan di media cetak lokal dan kanal-kanal milik pemerintah kota semarang terkait media cetak berkolaborasi dengan bagian humas

Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Untuk Penyusunan Rkpd Tahun 2023

1. Bagi RT yang belum mendapat CCTV, bagaimana tindak lanjutnya? (Kecamatan Gunungpati)

Tanggapan:

Untuk RT yang belum mendapatkan CCTV, dari kecamatan melakukan pendataan dan disampaikan kepada Bappeda dan Diskominfo untuk dimasukkan dalam prioritas kegiatan OPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang

- Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023

antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);

- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mewujudkan pelayanan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”,

dengan indikator tujuan “Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu :

1. Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi dengan indikator sasaran pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN / IKU / IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan pelayanan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi	%	100
SASARAN :			
Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi	Pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	poin	76,38
Indikator Kinerja Utama (IKU) :			
	Indeks SPBE	skor	4,2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00

TUJUAN / SASARAN / IKU / IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.00
	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00
	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00
	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	75.00

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Indeks SPBE”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5

(lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 (empat) program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 5 (lima) kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 53.348.990.388,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 14.969.402.643,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 38.379.587.745,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	10 Dokumen		APBD Kota Semarang		10 Dokumen	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	Kota Semarang	3 Dokumen	4.500.000	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	5.000.000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	4.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	5.000.000
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	3.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	4.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	4.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	4.500.000
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	3.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	4.000.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Semarang	1 Dokumen	3.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	4.500.000
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang		100 %	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang		100 %	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Kota Semarang	100 %	16.236.301.000	APBD Kota Semarang		100 %	16.642.209.000
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100 %	450.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	450.000.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	1 Laporan	3.500.000	APBD Kota Semarang		1 Laporan	4.000.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	1 Laporan	3.500.000	APBD Kota Semarang		1 Laporan	4.500.000
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Laporan	3.500.000	APBD Kota Semarang		1 Laporan	4.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Semarang	100 %	50.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	50.000.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Semarang	4 Jenis	50.000.000	APBD Kota Semarang	4 Jenis	50.000.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	4 Jenis	55.000.000	APBD Kota Semarang	4 Jenis	60.000.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Semarang	100 %	50.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	65.000.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	2 Jenis	20.000.000	APBD Kota Semarang	2 Jenis	30.000.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Semarang	7 Buku	5.000.000	APBD Kota Semarang	7 Buku	15.000.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	Kota Semarang	100 %	259.866.000	APBD Kota Semarang	100 %	174.334.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	Kota Semarang	100 %	200.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dan luar							
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	100 %	250.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	250.000.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Kota Semarang	2 Unit	45.000.000	APBD Kota Semarang	2 Unit	45.000.000	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	Kota Semarang	100 %	100.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	100.000.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Semarang	100 %	100.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	200.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	Kota Semarang	1 Kegiatan	25.000.000	APBD Kota Semarang	1 Kegiatan	35.000.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	3 Jenis	550.000.000	APBD Kota Semarang	3 Jenis	600.000.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan	Kota Semarang	1 Unit	45.000.000	APBD Kota Semarang	1 Unit	50.000.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Semarang	20 Unit	400.000.000	APBD Kota Semarang	22 Unit	420.000.000	
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Kota Semarang	1 Unit	85.000.000	APBD Kota Semarang	1 Unit	85.000.000	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel	Kota Semarang	2 Jenis	15.000.000	APBD Kota Semarang	2 Jenis	20.000.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Semarang	3 Jenis	100.000.000	APBD Kota Semarang	3 Jenis	100.000.000	
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan taman	Kota Semarang	1 Paket	10.000.000	APBD Kota Semarang	1 Paket	15.000.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Semarang	4 Gedung	150.000.000	APBD Kota Semarang	4 Gedung	150.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kemampuan ASN	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	100 %	50.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	50.000.000	
		sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	Kota Semarang	100 %	0	APBD Kota Semarang	100 %	0	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	Kota Semarang	15 Rekomendasi	65.000.000	APBD Kota Semarang	15 Rekomendasi	195.000.000	
		Dokumen kajian menara telekomunikasi	Kota Semarang	1 Dokumen	90.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	90.000.000	
		Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	Kota Semarang	5 Kegiatan	30.000.000	APBD Kota Semarang	5 Kegiatan	40.000.000	
		Cakupan layanan telekomunikasi	Kota Semarang	100 %	25.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	25.000.000	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah penanganan pengaduan	Kota Semarang	4.200 Pengaduan	406.031.000	APBD Kota Semarang	4.200 Pengaduan	1.200.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		kajian kebijakan pengaduan	Kota Semarang	1 Dokumen	0	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	0	
		monitoring dan evaluasi	Kota Semarang	2 Kegiatan	0	APBD Kota Semarang	2 Kegiatan	0	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	konten informasi publik yang disebarluaskan	Kota Semarang	875 Konten	880.000.000	APBD Kota Semarang	875 Konten	4.405.117.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	jenis informasi publik yang disediakan	Kota Semarang	4 Jenis Informasi	550.000.000	APBD Kota Semarang	4 Jenis Informasi	1.500.000.000	
		permintaan informasi publik	Kota Semarang	2.184 Informasi	0	APBD Kota Semarang	2.184 Informasi	0	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	Kota Semarang	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	175.000.000	
		Jumlah Kegiatan workshop dan Pelatihan TIK	Kota Semarang	15 Kegiatan	150.000.000	APBD Kota Semarang	15 Kegiatan	315.000.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan Fasilitas FK Metra	Kota Semarang	8 Kegiatan	150.000.000	APBD Kota Semarang	8 Kegiatan	625.000.000	
		Jumlah Dokumen kajian Co working space	Kota Semarang	1 Dokumen	90.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	90.000.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yng terkoneksi di Jaringan Intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas kominfo	Kota Semarang	50 OPD	550.000.000	APBD Kota Semarang	50 OPD	1.264.863.000	
		Tingkat Kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	Kota Semarang	95 %	0	APBD Kota Semarang	100 %	0	
		Tingkat Kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	Kota Semarang	97 %	0	APBD Kota Semarang	99,8 %	0	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kota Semarang	50 OPD	1.190.766.000	APBD Kota Semarang	50 OPD	6.580.179.000	
		Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	Kota Semarang	85 %	0	APBD Kota Semarang	90 %	0	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan intra	Kota Semarang	40 OPD	0	APBD Kota Semarang	45 OPD	0	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah CCTV yang terpasang	Kota Semarang	150 Unit	11.807.169.000	APBD Kota Semarang	175 Unit	27.000.000.000	
		Jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	Kota Semarang	190 Titik/Unit	0	APBD Kota Semarang	210 Titik/Unit	0	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah OPD yang terintegrasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	Kota Semarang	50 OPD	1.072.483.000	APBD Kota Semarang	50 OPD	7.000.000.000	
		jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kota Semarang	50 OPD	0	APBD Kota Semarang	50 OPD	0	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang terintegrasi layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	Kota Semarang	20 Aplikasi	1.000.000.000	APBD Kota Semarang	20 Aplikasi	9.764.953.000	
		jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Kota Semarang	3 Aplikasi	0	APBD Kota Semarang	3 Aplikasi	0	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	Kota Semarang	70 %	600.000.000	APBD Kota Semarang	80 %	5.000.000.000	
		Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai smart city	Kota Semarang	100 %	0	APBD Kota Semarang	100 %	0	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan Monitoring Implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	Kota Semarang	4 Kegiatan	500.000.000	APBD Kota Semarang	4 Kegiatan	2.600.000.000	
		jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Kota Semarang	4 Kegiatan	0	APBD Kota Semarang	4 Kegiatan	0	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Kota Semarang	5.100 Data	150.000.000	APBD Kota Semarang	5.200 Data	500.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah kompilasi statistik sektoral	Kota Semarang	40 Kompleksi	80.000.000	APBD Kota Semarang		50 Kompleksi	300.000.000
		Jumlah survey statistik sektoral	Kota Semarang	30 Jumlah Survey	80.000.000	APBD Kota Semarang		40 Jumlah Survey	400.000.000
		Jumlah publikasi Statistik Sektoral	Kota Semarang	2 Dokumen	0	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	0
		Jumlah konversi Data Sektoral ke Dalam Data Spasial	Kota Semarang	20 Jenis	0	APBD Kota Semarang		20 Jenis	0
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD yang memiliki SDM pengelola data/statistisi	Kota Semarang	45 OPD	60.000.000	APBD Kota Semarang		51 OPD	300.000.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	Kota Semarang	30 Kegiatan	60.000.000	APBD Kota Semarang		40 Kegiatan	400.000.000
		Jumlah variabel yang dilengkapi metadata	Kota Semarang	1.500 Variabel	60.000.000	APBD Kota Semarang		2.000 Variabel	300.000.000
		Jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	Kota Semarang	45 OPD	60.000.000	APBD Kota Semarang		51 OPD	200.000.000
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menyelenggarakan statistik sektoral	Kota Semarang	35 OPD	90.896.000	APBD Kota Semarang		45 OPD	295.561.000
		Jumlah OPD yang mengelola data berdasarkan statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	Kota Semarang	35 OPD	0	APBD Kota Semarang		45 OPD	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan Portal Semarang Satu Data	Kota Semarang	20 OPD	150.000.000	APBD Kota Semarang	30 OPD	420.000.000	
		Tersedianya ketersediaan data seluruh OPD Kota Semarang	Kota Semarang	92 %	0	APBD Kota Semarang	94 %	0	
		Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	Kota Semarang	100 %	0	APBD Kota Semarang	100 %	0	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data yang terotorisasi	Kota Semarang	1.500 Data	150.000.000	APBD Kota Semarang	2.000 Data	300.000.000	
		Jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey & kompilasi)	Kota Semarang	70 Kegiatan	100.000.000	APBD Kota Semarang	90 Kegiatan	300.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	100 %		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	Kota Semarang	74 Aplikasi	602.676.000	APBD Kota Semarang		80 Aplikasi	2.057.849.000

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang akan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 53.348.990.388,00.

Untuk kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

1. SOLUSI: Semarang On-Line Untuk Sistem Integrasi;
2. Pembangunan Data Center II;
3. Akselerasi SPBE;
4. Single Sign-On Sistem Informasi Manajemen;
5. Pembangunan Big Data Analytics;
6. Pengembangan Smart City (Cyber City);
7. Robot Layanan (Industry 5.0);
8. Pengelola Pengaduan Kota Semarang;
9. Semarang Community Center.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

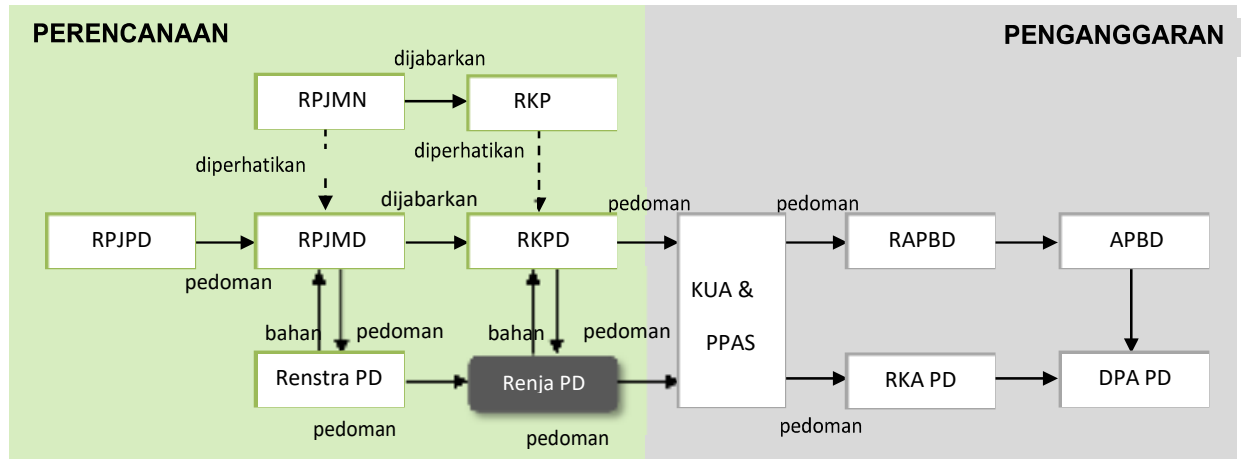
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana Semarang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022

Kualitas penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan sebanyak 8 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 21.742.870.123,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 17.634.959.089,- (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 81,11 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	45 dok	-	-	-	100%	9 dok	9 dok	20%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	8 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	20%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	4 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	12 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	20%
Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	3 jenis	3 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	5 jenis	5 jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	35 jenis	35 jenis	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	8 jenis	8 jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1800 orang	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	1800 orang	1800 orang	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100 kegiatan	100 kegiatan	100%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	5 jenis	5 jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	3 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	3 jenis	3 jenis	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	1 unit	1 unit	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	25 unit	25 unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	2 jenis	2 jenis	66.67%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	5 jenis	5 jenis	100%
Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	13 dok	2 dok	2 dok	15 dok	3 dok	3 dok	20%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	4 dok	1 dok	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	8 dok	2 dok	2 dok	10 dok	2 dok	2 dok	20%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	-	-	-	-	3%	3%	100%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	-	-	-	-	15 koperasi	15 koperasi	20%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	-	-	-	-	25 koperasi	25 koperasi	16.67%
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	-	-	-	-	2 koperasi	2 koperasi	20%
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	-	-	-	-	25 koperasi	25 koperasi	16.67%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	-	-	-	-	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	-	-	-	-	100 koperasi	100 koperasi	83.33%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	-	-	-	-	250 koperasi	250 koperasi	143%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	-	-	-	-	120 koperasi	120 koperasi	68.57%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	-	-	-	-	30%	30%	85.71%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	-	-	-	-	66%	66%	94%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	-	-	-	-	200 koperasi	200 koperasi	66.67%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	-	-	-	-	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	-	-	-	-	70%	70%	88%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	20%
Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro										
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2%	-	-	-	-	1%	1%	50%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	-	-	-	-	70%	70%	93%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	-	-	-	-	360 orang	360 orang	48%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	-	-	-	-	25%	25%	83%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	-	-	-	-	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	150 koperasi	-	-	-	-	164 koperasi	164 koperasi	109%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	125 koperasi	-	-	-	-	340 koperasi	340 koperasi	272%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200 koperasi	-	-	-	-	120 koperasi	120 koperasi	60%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	300 koperasi	-	-	-	-	500 koperasi	500 koperasi	167%
		Jumlah laporan updating data Koperasi	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro										

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	-	-	-	-	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3000 orang	-	-	-	-	600 orang	600 orang	20%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	500 Orang	-	-	-	-	500 orang	500 orang	100%
		Pembangunan Micro Library UMKM	2 paket	-	-	-	-			
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	500 orang	-	-	-	-	100 orang	100 orang	20%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	-	-	-	-	1250 orang	1250 orang	125%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	1000 orang	-	-	-	-	500 orang	500 orang	50%
Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro										
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	-	-	-	-	20%	20%	80%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	-	-	-	-	100 orang	100 orang	16.67%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	-	-	-	-	500 orang	500 orang	16.67%
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	20%

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja mengacu pada target indikator Kinerja pada Renstra 2021-2026 yang sebagian besar tidak sama dengan Target Kinerja yang tercantum pada Renstra 2016-2021 sehingga table diatas hanya mencantumkan target dan perkiraan capaian indikator Kinerja pada tahun 2022.

Adapun Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 - a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 8 Program dengan 8 Indikator Kinerja Program, 14 Kegiatan dengan 14 Indikator kinerja kegiatan dan 35 Sub kegiatan dengan 35 Indikator kinerja.
 - b. Dari 8 Indikator kinerja program, semua Indikator melampaui target.
 - c. Dari 14 Indikator kinerja kegiatan, semua Indikator melampaui target.
 - d. Dari 35 Indikator Kinerja Sub Kegiatan, semua Indikator melampaui target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Perubahan II Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 8 Program dengan 8 Indikator Kinerja Program, 14 Kegiatan dengan 14 Indikator kinerja kegiatan dan 35 Sub kegiatan dengan 35 Indikator kinerja.
 - b. Dari 8 Indikator kinerja program, semua Indikator melampaui target.
 - c. Dari 14 Indikator kinerja kegiatan, semua Indikator melampaui target.
 - d. Dari 35 Indikator Kinerja Sub Kegiatan, semua Indikator melampaui target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Semarang Tahun 2021

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.716.673.017	8.002.383.663	714.289.354
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.614.200	7.156.000	1.458.200
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.263.900	1.646.250	617.650
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	960	1.799.040
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.770.000	1.769.900	100
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.010.700	1.010.500	200
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.053.700	1.053.500	200
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.159	71.585	-64.426
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.576.762.223	7.205.654.692	371.107.531
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.325.034.123	7.001.305.942	323.728.181
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.380.000	203.020.000	47.360.000
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	672	65.325	-64.653
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	6.761	6.755	6
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.094.794	498.236.450	123.858.344
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.859.091	178.635.600	3.223.491
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.281.900	12.448.300	14.833.600
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.613.905	32.609.600	41.004.305
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.631.698	7.309.750	11.321.948
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	1.365.000	4.395.000
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.750.000	19.491.600	5.258.400
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.729.000	34.791.100	937.900
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	254.469.200	211.585.500	42.883.700
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.554.800	38.299.000	12.255.800
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.554.800	38.299.000	12.255.800
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.720.000	44.881.541	69.838.459
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.720.000	44.881.541	69.838.459
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.927.000	208.155.980	135.771.020
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.400.000	180.290.980	109.109.020
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.527.000	27.865.000	26.662.000

2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	189.916.820	145.913.100	44.003.720
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.374.560	59.350.600	15.023.960
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.374.560	59.350.600	15.023.960
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.542.260	86.562.500	28.979.760
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.542.260	86.562.500	28.979.760
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	256.267.400	183.162.850	73.104.550
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	256.267.400	183.162.850	73.104.550
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	185.915.900	129.477.850	56.438.050
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.351.500	53.685.000	16.666.500
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	508.309.000	405.601.000	102.708.000
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	508.309.000	405.601.000	102.708.000
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	508.309.000	405.601.000	102.708.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	852.277.846	722.693.250	129.584.596
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	852.277.846	722.693.250	129.584.596
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	852.277.846	722.693.250	129.584.596
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.713.421.640	1.299.591.537	413.830.103
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.713.421.640	1.299.591.537	413.830.103
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.713.421.640	1.299.591.537	413.830.103

2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.605.657.600	3.451.807.001	2.153.850.599
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5.605.657.600	3.451.807.001	2.153.850.599
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.234.157.300	1.650.005.401	584.151.899
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	60.704.000	39.024.500	21.679.500
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	269.660.000	116.425.800	153.234.200
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	345.690.300	280.234.400	65.455.900
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.695.446.000	1.366.116.900	1.329.329.100
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.900.346.800	3.423.806.688	476.540.112
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.900.346.800	3.423.806.688	476.540.112
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.900.346.800	3.423.806.688	476.540.112
					Total	21.742.870.123	17.634.959.089	4.107.911.034

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendapatkan Alokasi anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 21.742.870.123,- yang bersumber dari PAD Kota Semarang sebesar Rp 18.268.325.717,- dari Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp. 2.983.534.406,- dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 491.010.000,- dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- 1) Anggaran DAK digunakan untuk Pemberdayaan koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dengan rincian untuk :
 - kegiatan Peningkatan manajemen Pengelolaan koperasi sebesar Rp. 343.707.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 338.197.000 atau sebesar 98,40%
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas kewirausahaan untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp. 147.303.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.372.000 atau sebesar 91,22 %.

2) Anggaran DID dimaksudkan untuk Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan rincian alokasi anggaran untuk :

- Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha mikro Rp. 1.149.021.396 dengan realisasi Rp. 820.070.801,- atau sebesar 71,37 %.
- Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp. 60.704.000,- dengan realisasi Rp. 39.024.500,- atau sebesar 64,29 %
- Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Rp. 269,660,000,- dengan realisasi Rp. 116,425,800,- atau sebesar 43.18 %
- Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp. 345,690,300,- dengan realisasi Rp. 280,234,400,- atau sebesar 81.07 %.
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Rp. 2,695,446,000,- dengan realisasi Rp. 1,366,116,900,- atau sebesar 50.68 % .

Pada Tahun 2021 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sebesar Rp.21.742.870.123,-. terealisasi sebesar Rp 17.634.959.089,- (81,11%) dan sisa anggaran sebesar Rp 4.107.911.034,- (18,89 %) dengan uraian berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp 8.716.673.017,- terealisasi sebesar Rp. 8.002.383.663,- (91,81%) dan sisa anggaran sebesar Rp 714.289.354,- (8,19 %).

Sisa anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan oleh adanya selisih harga pada SSH serta belanja rutin seperti ATK dan barang cetakan tidak direalisasi karena kegiatan kantor yang tidak bisa dilaksanakan karena dampak Pandemi Covid 19. Selain itu pembayaran tagihan Listrik yang menyesuaikan tagihan pemakaian.

- b. Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian

Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dengan Total anggaran sebesar Rp 13.026.197.106,- terealisasi sebesar Rp 9.632.575.426,- (73,95%) dan sisa anggaran sebesar Rp 3.393.621.680,- (18,89 %).

Sisa anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis di bidang Koperasi dan Usaha kecil menengah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2021 masih mengacu pada Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021 karena tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
			2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023
Tujuan:									
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi Baik	-	88%	88%	88%	88,72%	88,61%	-	-
	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	-	25%	28%	32%	61.62 %	54,83%	-	-
Sasaran:									
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro	Persentase Koperasi Baik	-	88%	88%	88%	88,72%	88,61%	-	-
	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	-	25%	28%	32%	61.62%	54,83%	-	-

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah dengan Tujuan **“Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing”** dan Sasaran **“Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indikator “Persentase koperasi baik” dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 88% dapat terealisasi sebesar 88,61% (capaian sebesar 100,69%);
- 2) Indikator “Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya” dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 32% teralisasi sebesar 54,40% (capaian sebesar 170%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi dan Usaha kecil dan menengah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
sampai Dengan Tahun 2021

1	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021				REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT	TAHUN
2	3	4	5	6	1	
	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN					
1.	Prosentase Koperasi Baik	88 %	88,61%	100,69	Sangat Tinggi	88,72 %
2.	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	32 %	54,40 %	170	Sangat Tinggi	61,62 %
	INDIKATOR PROGRAM					
1	Cakupan pelayanan Admisnistarsi Perkantoran	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3	Tertib Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60 %	58,82 %	98,03	Sangat Tinggi	30,12 %
5	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	15 %	16,58 %	110,53	Sangat Tinggi	7,37 %
6	Prosentase Akses Pembiayaan	40 %	79,26 %	198,15	Sangat Tinggi	79,67 %
7	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50 %	87,91 %	175,82	Sangat Tinggi	7,05 %
8	Prosentase koperasi aktif	88,60 %	88,61 %	100,01	Sangat Tinggi	88,72 %
9	Prosentase koperasi sehat	30 %	32,54 %	108,47	Sangat Tinggi	20,61 %
10	Prosentase Omset Koperasi	0,80 %	-10,91 %	-1.363,7	Sangat Rendah	-25,66 %
11	Prosentase Akses Pemasaran	23 %	71 %	308,69	Sangat Tinggi	71,45 %

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan tingkat capaian **sangat Tinggi**. Sedang capaian 11 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2021 berhasil dicapai dengan tingkat capaian **sangat Tinggi** sebanyak 10 Indikator Kinerja, dan **Sangat Rendah** sebanyak 1 Indikator Kinerja.

Pencapaian target Kinerja **sangat rendah** pada Prosentase omset Koperasi disebabkan karena dampak pandemi covid 19 sehingga banyak anggota koperasi yang menarik simpanannya di koperasi dan banyaknya penundaan pembayaran angsuran pinjaman ke koperasi. hal tersebut sangat berpengaruh terhadap turunnya omset koperasi disebabkan karena hampir 75% koperasi di Kota Semarang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan atau mempunyai usaha simpan pinjam.

Selain dari aspek capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD

serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD dan kesesuaian program pada RKPD dengan program APBD sebesar 100 %; yang artinya bahwa semua program yang tercantum pada RPJMD, RKPD dan APBD pada Tahun 2021 adalah sama dan dapat dilaksanakan semua.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH					
	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Kec. Semarang Barat, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	3 paket	
	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	1 paket	
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Kec. Semarang Barat, Kec. Semarang Timur, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan, Kec. Gayamsari	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	6 paket	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	1 paket	
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Kec. Semarang Selatan, Kec. Semarang Barat, Kec. Candisari, Kec. Banyumanik, Kec. Gayamsari, Kec. Pedurungan,	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	6 paket	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI					
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kec. Ngaliyan	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	1 paket	
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kec. Ngaliyan	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	1 paket	
	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Kec. Banyumanik	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	1 paket	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM					
	Fasilitasi Promosi Produk Ummk	Kec. Semarang Barat, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	4 paket	
	Perluasan Akses Pasar	Kec. Semarang Barat, Kec. Gajahmungkur, Kec. Tembalang, Kec. Banyumank, Kec. Ngaliyan, Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	6 paket	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diatas merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2021 sudah baik, dimana sebagian besar indicator capaiannya 100%, bahkan beberapa indicator capaiannya melampaui 100% .

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang
- b. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko;
- c. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- d. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Optimalisasi kegiatan sosialisasi pengurusan IUMK melalui OSS RBA kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- b. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan
- c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
- Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
- Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan KUMKM.
- kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
- Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.

b. Peluang:

- Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan Perundang-undangan antara lain UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.
- Sumber daya alam yang melimpah

- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasidan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 kegiatan ekspor roduknya; dan perlunya Optimalisasi PengembanganObyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE
2. Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro terutama yang terdampak oleh Covid-19, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saiang daerah yang didukung potensi unggulan daerah**” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;

- Prioritas Daerah 2** : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3** : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- Prioritas Daerah 4** : Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5** : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:

- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi

informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

- 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas Pertama, yaitu “**Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;**” dengan focus pada Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
- 2) Pengembangan kewirausahaan baru
- 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				23.539.963.000				24.702.036.168
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		3%	220.000.000	APBD Kota Semarang		3%	214.5121.290
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam		15 kop	95.000.000	APBD Kota Semarang		80 kop	91.666.650
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 kop	95.000.000	APBD Kota Semarang		2 kop	122.854.640
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		2 kop	125.000.000	APBD Kota Semarang		2 kop	122.854.640
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	140 kop	125.000.000	APBD Kota Semarang		140 kop	122.854.640
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi		50%	548.000.000	APBD Kota Semarang		50%	554.915.380
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	Kota Semarang	490 kop	548.000.000	APBD Kota Semarang		490 kop	554.915.380

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	250 kop	260.000.000	APBD Kota Semarang		250 kop	241.871.090
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	Kota Semarang	240 kop	288.000.000	APBD Kota Semarang		240 kop	313.044.290
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	31%	180.000.000	APBD Kota Semarang		31%	366.205.089
	Penguatan Mutu Produk Usaha MikroPenilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Semarang	60.00%	180.000.000	APBD Kota Semarang		60.00%	366.205.089
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	300 Kop	180.000.000	APBD Kota Semarang		300 Kop	366.205.089
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	10%	245.000.000	APBD Kota Semarang		10%	335.896.070
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan		1%			1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	Kota Semarang	70%	145.000.000	APBD Kota Semarang		70%	335.896.070
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM/ anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 org	145.000.000	APBD Kota Semarang		300 org	335.896.070
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat pengetahuan dan keterampilan							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	25%	2.762.566.380	APBD Kota Semarang		26%	2.762.566.380
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian, Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	Kota Semarang	50%	2.762.566.380	APBD Kota Semarang		50%	2.762.566.380
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 kop	2.762.566.380	APBD Kota Semarang		80 kop	2.762.566.380
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	60 kop		APBD Kota Semarang			
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 kop		APBD Kota Semarang			
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	480 kop		APBD Kota Semarang			
		Jumlah laporan updating data Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 lap		APBD Kota Semarang			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Kota Semarang	3%	2.792.070.650	APBD Kota Semarang		3%	3.792.070.650
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan	Kota Semarang	1.050 org	2.792.070.650	APBD Kota Semarang		1.050 org	3.792.070.650

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	kelembagaan, akses pembiayaan							
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	522.672.200	APBD Kota Semarang		100 org	522.672.200
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	227.454.550	APBD Kota Semarang		100 org	227.454.550
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 org	2.080.993.000	APBD Kota Semarang		500 org	2.080.993.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 org	515.022.000	APBD Kota Semarang		200 org	515.022.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150 Org	445.928.900	APBD Kota Semarang		150 Org	445.928.900
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	20%	3.963.898.830	APBD Kota Semarang		20%	3.963.898.830
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	150 org	3.963.898.830	APBD Kota Semarang		150 org	3.963.898.830
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 org	3.963.898.830	APBD Kota Semarang		500 org	3.963.898.830
		Pengembangan Co Working Space	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 paket					
	NON URUSAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 %	12.711.962.479	APBD Kota Semarang		100%	12.711.962.479
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	Kota Semarang	100%				100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%				100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	10 dok	12.195.560	APBD Kota Semarang		10 dok	12.195.580
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	564.080	APBD Kota Semarang		2 dok	564.080
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	3.117.280
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	3.117.280	APBD Kota Semarang		1 dok	3.729.190
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	3.729.190	APBD Kota Semarang		1 dok	1.610.080
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.610.080	APBD Kota Semarang		1 dok	1.961.990
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.961.990	APBD Kota Semarang		3 dok	1.212.960
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	1.212.960			100%	9.215.117.840
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	3 dok	9.215.117.840			3 dok	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	8.960.986.160	APBD Kota Semarang		100%	8.960.986.160
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	252.840.000	APBD Kota Semarang		100%	252.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	596.480	APBD Kota Semarang		1 dok	596.480
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	695.200	APBD Kota Semarang		2 dok	695.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	1.241.092.527	APBD		100%	1.241.092.527

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kota Semarang			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 jenis	231.107.778	APBD Kota Semarang		3 jenis	231.107.778
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	27.209.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	27.209.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 jenis	94.077.190	APBD Kota Semarang		35 jenis	94.077.190
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8 jenis	46.964.379	APBD Kota Semarang		8 jenis	46.964.379
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 jenis	1.920.000	APBD Kota Semarang		2 jenis	1.920.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	54.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	54.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 keg	537.215.860	APBD Kota Semarang		100 keg	537.215.860
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	248.598.321	APBD Kota Semarang		5 jenis	248.598.320
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	95.362.120	APBD Kota Semarang		100%	95.362.120
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 jenis	44.837.384	APBD Kota Semarang		3 jenis	44.837.384
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 jenis	50.524.736	APBD Kota Semarang		2 jenis	50.524.736
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	116.640.000	APBD Kota Semarang		100%	116.640.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	116.640.000	APBD Kota Semarang		100%	116.640.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	Kota Semarang	100%	2.031.554.412	APBD Kota Semarang		100%	2.031.554.412
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 unit	36.318.180	APBD Kota Semarang		1 unit	36.318.180
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 unit	316.345.380	APBD Kota Semarang		25 unit	316.345.380
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	50.476.070	APBD Kota Semarang		5 jenis	50.476.070
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	1.628.414.782	APBD Kota Semarang		100%	1.628.414.782

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan serta pokok pikiran DPRD Kota Semarang.

Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH					
	Peningkatan mutu kemasan produksi	Kec. Semarang Utara	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu kemasan produksi	40 Orang/Ka	
	Peningkatan meracik kopi di Kampung Tematik	Kec. Semarang Utara	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan meracik kopi di Kampung Batik	14 Orang/Ha	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH					
	Sosialisasi tentang manajemen UKM	Kec. Kalibanteng Kidul	Pelaku Usaha Mikro yg mendapatkan sosialisasi tentang manajemen UKM	50 Orang	
	Sosialisasi perizinan bagi UMKM	Kec. Karangayu	Pelaku Usaha Mikro yg mendapatkan sosialisasi perizinan bagi UMKM	1 Kegiatan	
	Pelatihan pengembangan usaha mikro produktif	Kec. Karangayu	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan pengembangan Usaha Mikro Produktif	1 Kegiatan	
	Pelatihan keterampilan dibidang jasa dan kuliner era milenial	Kec. Gajahmungkur	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan keterampilan baik dibidang jasa dan pelatihan kuliner era milenial	1 Kegiatan	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI					

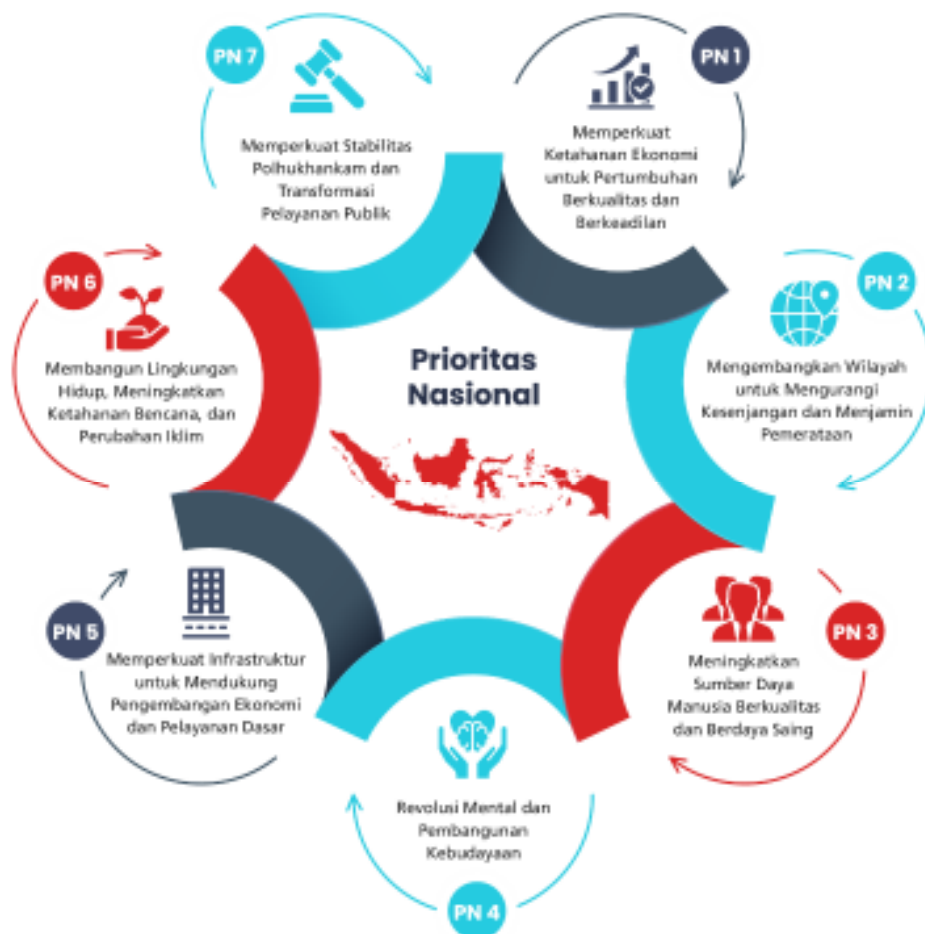
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelatihan Manajemen Koperasi	Kec. Bendan Ngisor	Kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan manajemen koperasi	1 Kegiatan	
	Sosialisasi Perijinan Sertifikasi Halal	Kec. Bendan Ngisor	Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perizinan sertifikasi halal	1 Kegiatan	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM					
	Fasilitasi Pembentukan Wadah Pemasaran UMKM secara Online dan Offline	Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapatkan fasilitasi pembentukan wadah pemasaran UMKM secara online dan offline	40 Orang	
	Pelatihan Ijin Edar Usaha/PIRT	Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapatkan pelatihan edar usaha/PIRT	40 Orang	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuan) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagi berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk

- Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai dinas teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pencapaian program Nasional yang ke 1 yaitu **“Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** khususnya pada **“PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi”**

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan tahun 2021 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dimana Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan indikator tujuan :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi

- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Koperasi aktif
- b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	54,00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	13,00
SASARAN :			
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	- Persentase Koperasi aktif	%	76,50
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	35,00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	%	77,50

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 **“Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”**. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Laju Pertumbuhan ekonomi”** dan indikator sasaran **“ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”**.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 38 Sub kegiatan, yang terdiri dari 25 Sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 13 Sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 24.702.036.168,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 12.711.962.479,- untuk program, Kegiatan dan sub kegiatan penunjang
 - b. Rp 11.990.073.689,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

Adapun rencana program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							24.702.036.168	19.860.101.000		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							24.702.036.168	19.860.101.000		
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00	Persen			214.521.290	50.000.000		
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15.00	koperasi			91.666.650	25.000.000		
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	80.00	Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.00	Unit Usaha	91.666.650	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2.00	Koperasi				122.854.640	25.000.000	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	140.00	Koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.00	Unit Usaha	122.854.640	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	Persen				554.915.380	150.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490.00	koperasi				554.915.380	150.000.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diawasi	250.00	koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370.00	Unit Usaha	241.871.090	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	240.00	koperasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	240.00	Unit Usaha	313.044.290	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi sehat	31.00	Persen				366.205.089	50.000.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60.00	Persen				366.205.089	50.000.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300.00	koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300.00	Unit Usaha	366.205.089	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	Persen				335.896.070	145.000.000	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00	Persen						
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70.00	Persen				335.896.070	145.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan		Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	300.00	Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360.00	Orang	335.896.070	145.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Kompetensi SDM Koperasi										
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26.00	Persen				2.762.566.380	290.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50.00	Persen				2.762.566.380	290.000.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	80.00	koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500.00	Orang	2.762.566.380	290.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	60.00	koperasi						
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200.00	Koperasi						
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	480.00	koperasi						
			Jumlah laporan updating data Koperasi	12.00	Laporan						
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	persen				3.792.070.650	3.496.052.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	-	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1050.00	orang				3.792.070.650	3.496.052.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Para Pemangku Kepentingan										
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	100.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	Unit Usaha	522.672.200	390.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	100.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100.00	Unit Usaha	227.454.550	830.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	500.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660.00	Unit Usaha	2.080.993.000	1.995.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	200.00	orang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500.00	Orang	515.022.000	281.052.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.00	bu	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.00	Orang	445.928.900	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00	%				3.963.898.830	2.248.021.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150.00	orang				3.963.898.830	2.248.021.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	orang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	Unit Usaha	3.963.898.830	2.248.021.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
			Pengembangan Co Working Space	1.00	paket						
NON URUSAN											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen				12.711.962.479	13.431.028.000	
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100.00	Persen						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10.00	dokumen				12.195.580	6.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	564.080	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah Dokumen RTP SKPD	1.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.117.280	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.729.190	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.610.080	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.961.990	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	1.212.960	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen				9.215.117.840	12.195.028.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35.00	Orang/bulan	8.960.986.160	11.943.028.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi		Persentase ASN yang disediakan	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12.00	Dokumen	252.840.000	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas			Pelaksanaan Tugas ASN					
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	596.480	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.00	Laporan	695.200	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen				1.241.092.527	680.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14.00	Paket	231.107.778	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00	Paket	27.209.000	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	94.077.190	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	46.964.379	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.00	Dokumen	1.920.000	5.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	100.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	54.000.000	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	537.215.860	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00	Dokumen	248.598.320	200.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen				95.362.120	50.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.00	Unit	44.837.384	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	50.524.736	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	Persentase Tersedianya	100.00	persen				116.640.000	125.000.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Pemerintahan Daerah		kebutuhan jasa kantor								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	116.640.000	125.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen				2.031.554.412	375.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	40.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	26.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.00	Unit	316.345.380	260.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.00	Unit	50.476.070	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung		Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1.00	Unit	1.628.414.782	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Kantor atau Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
JUMLAH									24.702.036.168	19.860.101.000	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan

berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

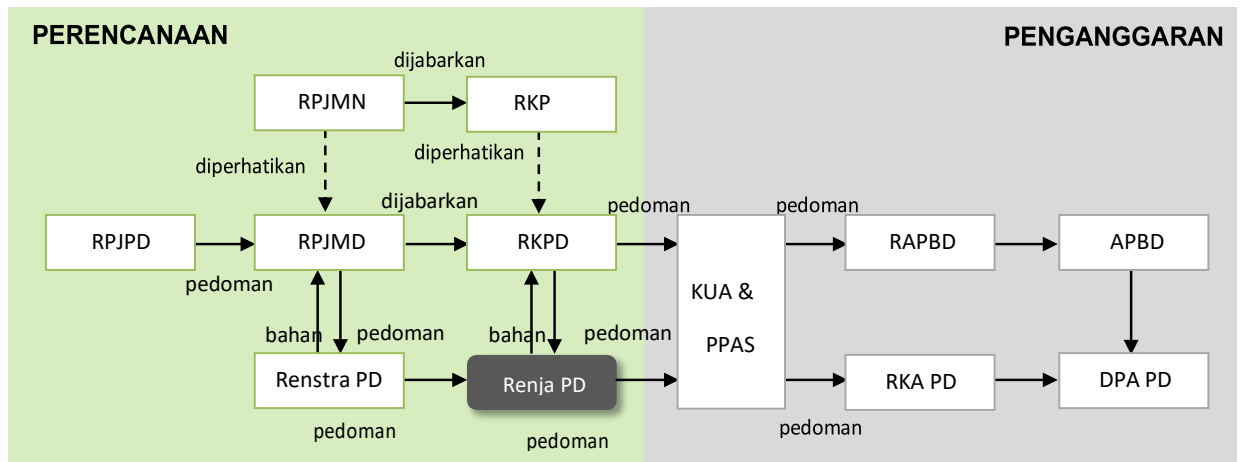
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi

antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja K Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 15.543.074.645 (lima belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 13.918.781.006 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam rupiah) atau sebesar 90 % (sembilan puluh persen).

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2021	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2022	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		100%	100%	100%	100%		100%	67,88%	67,88%
		- Jumlah Penanam Modal yang mendapat fasilitasi investasi	3672 penanam modal	3672 penanam modal	3672 penanam modal	100%	- Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3683 penanam modal	2500 penanam modal	2500 penanam modal
		- Jumlah Pranata	2 buah	2 buah	2 buah	100%				
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	83,33%	83,33%	- Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	3 buah	3 buah
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman		100%	100%	83,33%	83,33%		100%	100%	100%

	Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Tersedianya data dan analisa perizinan dalam rangka penataan kebijakan pelayanan penanaman modal dan PTSP	100%	100%	83,33%	83,33%	- SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
							- Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		100%	100%	100%	66,77%		100%	100%	100%
		Tersedianya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	66,77%	- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
							- Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	- Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Tersusunnya Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	- Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		- Tersusunnya Dokumen Potensi Investasi di Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		100%	100%	97,97%	97,97%			100%	100%	100%
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	344	344	416	120,93%		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	408 investor	408 investor	408 investor
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	75%	75%		Jumlah Promosi Investasi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	75%	75%			100%	100%	100%
		- Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	75%		Jumlah Kegiatan Pameran	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
								Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
								Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100%	100%	100,64%	100,64%			100%	100%	100%
		- Prosentase Ijin Terbit sesuai SP (%)	98,70%	98,70%	99,33%	100,64%		Persentase Ijin Terbit Sesuai SP	95%	95%	95%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan		100%	100%	100%			Terselenggaranya	100%	100%	100%

	Pelaksanaan Penanaman Modal										
								Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal								0	0	0
								Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
		- Tersusunnya laporan pengendalian kerjasama investasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
								Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	18 perusahaan	18 perusahaan	18 perusahaan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
		- Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman	94%	94%	94%	94%		Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	95%	95%	95%

		modal								
		- Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	87	87	90,1	100%				
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersedianya Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan	100%	100%	100%	100%	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	100%	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPMPTSP)	100%	100%	100%	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%
		- Tingkat disiplin aparatur (DPMPTSP)	100%	100%	100%	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%
		- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DPMPTSP)	100%	100%	100%	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%

		- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPMPTSP)	100%	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihilangkan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

		Dokumen DPA Perubahan SKPD					Perubahan DPA SKPD			
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		- Tersusunnya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	100%	100%
X.XX.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terselenggaranya gaji, tunjangan dan TPP ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terselenggaranya honorarium PA,KPA,PPK,PPTK,Be ndahara dan Pembantu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%

X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya laporan keuangan semesteran perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terpenuhiya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 buah	100 buah	100 buah	100%	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah	100 buah	100 buah
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

		- Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terpenuhiya kebutuhan alat tulis/logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terpenuhiya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis	174 jenis	174 jenis
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terpenuhiya kebutuhan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang	5000 orang	5000 orang
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah ASN dan Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan	2000 kegiatan	2000 kegiatan
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Pemenuhan dukungan	100%	100%	100%	100%	Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem	6 jenis	6 jenis	6 jenis

		pelaksanaan SPBE					Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Langganan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%
		- Langganan Telepon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
							Persentase Penyediaan	0	0	0
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Terselenggaranya administrasi keuangan dan Pembayaran honor TPHL	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		- Terselenggaranya pemeliharaan kendaran perorangan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan	1 unit	1 unit	1 unit

		dan kendaran dinas jabatan						kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan			
								Jumlah penyediaan	0	0	0
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
		- Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23 unit	23 unit	23 unit
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
		- Terpenuhiya pemeliharaan rutin mebeleur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		pemeliharaan mebeleur	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100%					
		- Terpenuhiya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

- a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (satu) urusan penanaman modal, 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program.
- b) Dari 12 (dua belas) Inidkator kinerja program, terdapat 4 (empat) Indikator yang melampaui target, 6(enam) Inidkator memenuhi target.
- c) Dari rata-rata seluruh capaian tingkat realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 101,78% (seratus satu koma tujuh puluh delapan persen) dan termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "Sangat Baik".

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai beirkut:

- a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan Penanaman Modal, 6 (enam) Program dengan 9 (sembilan) indikator program.
- b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 2 (dua) indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 6 (enam) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 1 (satu) Indikator yang masih dalam proses pencapaian target.
- c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait masih berproses mengupayakan 9 (sembilan) indikator kinerja program dapat urusan penanaman modal dapat tercapai.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang
Tahun 2021

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG	15,911,655,000.00	13,918,781,006.00	87%
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	15,543,074.645.00	13,918,781,006.00	90%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Tabel 2. 3
Rincian Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Semarang
Tahun 2021

Rincian Belanja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA	PERSENTASE (%)
Belanja Tidak Langsung	10.174.919.645.00	9.922.163.025.00	252.756.620.00	98%
Belanja Langsung	5.368.155.000.00	3.996.617.981.00	1.371.537.019.00	74%
JUMLAH	15,543,074.645.00	13,918,781,006.00	1.624.293.639.00	90%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Tabel 2. 4
Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.897.865	12.179.600	47
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.896.863	4.225.000	30
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.392.550	778.000	56

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.106.445	1.080.000	98
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.645	310.400	41
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.645	200.000	27
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.195	1.295.000	65
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.522	4.291.200	72
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.180.856.730	9.923.536.025	97
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.974.259.645	9.742.123.025	95
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.660.000	180.040.000	90
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,936,695	0	0
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.195	850.000	42
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.195	523.000	26
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.400.000	27.882.000	86
2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.400.000	27.882.000	86
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.414.766.129	948.910.207	67
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.263.900	262.240.000	96
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.918.290	24.594.056	41
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.571.973	26.332.750	29
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	161.598.545	56.537.300	35
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.413.385	137.783.101	37
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	459.000.036	441.423.000	96
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.925.000	80.672.458	90
2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	31.977.458	83

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.525.000	48.695.000	96
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.071.544	267.220.976	59
2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.560.000	187.565.060	64
2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.540.000	56.576.221	50
2.05	Pemeliharaan Mebel	27.315.544	12.685.995	46
2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.656.000	10.393.700	22
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	635.246.336	576.654.878	90
2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	362.611.788	308.442.494	85
2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	272.634.548	268.212.384	98
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	236.559.914	222.496.542	94
2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	99.049.791	91.911.001	93
2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	137.510.123	130.585.450	95
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	470.355.141	432.334.781	92
2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	470.355.141	432.334.781	92
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	901.945.076	840.044.746	93
2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	901.945.076	840.044.746	93

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	499.766.728	331.920.650	66
2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.820.000	2.124.000	4
2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.262.000	198.546.000	87
2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.684.728	133.160.650	60
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	578.284.181	523.018.234	90
2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	578.284.181	523.018.234	90

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 s.d. 2.4. tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan bidang Penanaman Modal, dengan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebesar Rp 15.543.074.645,- (lima belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 13. 918.781.006,- (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam rupiah). Sisa anggaran sebesar Rp 1.624.293.639,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan uran berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp.10.174.919.645.00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) , Rp.9.922.163.025.00 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 98% (sembilan puluh delapan) persen dan sisa anggaran sebesar Rp.252.756.620.00 (dua ratus lima puluh dua

juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan persentase tidak terealisasi sebesar 2% (dua) persen.

- b. **Belanja langsung:** anggaran sebesar sebesar Rp.5.368.155.000.00 (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp.3.996.617.981.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 74% (tujuh puluh empat) persen dan sisa anggaran sebesar Rp.1.371.537.019 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) dengan persentase tidak terealisasi sebesar 26% (dua puluh enam) persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semarang s.d Tahun 2021

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tujuan :							
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	7%	10%	7%	3%	7%	7%
Sasaran :							
1. Meningkatnya nilai investasi	1. Nilai investasi (dalam juta)	21.842.472	24.086.799	25.684.059	22.538.063	24.086.799	25.684.059

2. Terwujudnya Pelayanan Prima	2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95%	95,50%	99,33%	95%	95,50%
	3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (2021)	87%	-	-	90,1%	-	-
	4. Nilai AKIP (2022)		74	75	77,05	74	75

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “persentase peningkatan nilai investasi Kota Semarang”, belum mencapai target, dimana capaian peningkatan nilai investasi sebesar 3% dari target sebesar 7% dikarenakan wabah pandemic covid-19 yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan investasi di Kota Semarang bahkan di Indonesia namun demikian capaian target nilai investasi Kota Semarang tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan;
- b. Sasaran **“Meningkatnya Nilai Investasi dan Terwujudnya Pelayanan Prima”** memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai Investasi” telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya (dalam juta) sebesar 22.538.063 dari target sebesar 21.842.472;
 - 2) Indikator “Persentase izin terbit sesuai SP” telah melampaui target dimana nilai realisasinya adalah 99,33%, dari target sebesar 95%;
 - 3) Indikator “Survey Kepuasan Masyarakat” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 90,1% dari target sebesar 87%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang penyelenggaraan urusan penanaman modal juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 6

**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021**

URAIAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	21.842.472	24.086.799	25.684.059	22.538.063	24.086.799	25.684.059
2.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	344	408	448	416	408	448
3.	Meningkatnya persentase investasi	7%	10%	7%	3%	7%	7%
4.	Meningkatnya persentase izin terbit sesuai SP (Standar Pelayanan)	95%	95%	95,50%	99,33%	95%	95,50%

Sumber: DPMPSTSP Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di bidang penanaman modal menjadi salah satu penyumbang keberhasilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang berbasis keunggulan lokal dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat diketahui bahwa dari keempat indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2021 terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu “Persentase peningkatan nilai investasi” yang mana target pada tahun 2021 adalah 7% (tujuh) persen, sedangkan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 3% (tiga) persen. Dikarenakan wabah pandemic covid-19 yang berpengaruh pada kestabilan nilai investasi di Kota Semarang bahkan di Indonesia namun demikian permasalahan tersebut dapat segera diatasi dengan baik dengan penerapan tatanan hidup baru (new normal) salah satunya dengan upgrade prosedur perizinan baru melalui satu Platform yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (Perizinan daring terpadu berbasis resiko/OSS RBA). Selain itu beberapa upaya juga dilaksanakan diantaranya kegiatan dalam jaringan (daring) dan jemput bola investasi sehingga capaian target nilai investasi Kota Semarang tahun 2021 dapat terpenuhi bahkan telah melampaui target nilai investasi yang telah ditetapkan.

Selain dari indikator di atas, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dengan RPJMD Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program Renja dengan APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penanaman Modal. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA DPMPTSP	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA/PMDN) (investor)	408	448	492	541	416	448	492	541	
2.	Persentase Peningkatan Investasi (%)	7	7	7	7	3	7	7	7	
3.	Nilai Investasi (dalam juta)	21.842.472	24.086.799	25.684.059	27.362.089	22.538.063	24.086.799	25.684.059	27.362.089	

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penanaman modal diantaranya:

- a. Sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.
- b. Rendahnya penguasaan teknologi oleh pegawai.
- c. Terbatasnya wadah peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan diklat/bintek.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- e. Belum maksimalnya kegiatan promosi aset Kota Semarang yang dapat ditawarkan kepada investor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
 - Kejadian luar biasa yang mempengaruhi semua aspek kegiatan masyarakat, baik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan pelayanan publik serta kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPSTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti;

b. Peluang:

- Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.
- Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Terhambatnya data perkembangan investasi di Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan target promosi investasi di Kota Semarang tidak mencapai target yang ditentukan
- b. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pendampingan perizinan online dan proses tatapmuka dengan pemohon masih ada.
- c. Masih minimnya Informasi dan Edukasi tentang pemahaman pemohon dan petugas pelayanan perizinan melalui OSS secara teknis antar OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- d. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Pemohon Izin/Masyarakat.
- e. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.

- f. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan proses pelayanan perizinan terhambat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:

- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ke-1 (kesatu), yaitu **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan”**. Secara rinci dijabarkan dalam fokus peningkatan nilai investasi dengan upaya-upaya berikut ini :

- 1) Pelaksanaan promosi investasi
- 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel beriku

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				43.685.090.241	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				27.449.125.396	
2.18.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3691 penanam modal	3.356.992.226	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3691 penanam modal	1.100.000.048	
2.18.0 2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 buah	2.455.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 buah	1.100.000.048	
2.18.0 2.2.01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			1.355.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			599.999.972	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen		
2.18.0 2.2.01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			1.100.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			500.000.076	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan	3691 Kegiatan usaha				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh	3691 Kegiatan usaha		

			Kemudahan Berusaha di Daerah					Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			
2.18.0 2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	901.992.226	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	799.328.654	
2.18.0 2.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.022.000	
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	356.859.189			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		
2.18.0 2.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Semarang			545.133.037	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Semarang			699.306.654	
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen		
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	2.805.110.415	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	2.547.128.842	
2.18.0 3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	2.805.110.415	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	2.547.128.842	
2.18.0 3.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Semarang				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Semarang			298.558.968	
			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.150.000.000			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen		
2.18.0 3.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			2.248.569.874	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	8 dokumen	1.655.110.415			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	8 dokumen		

			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	6.377.437.600	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	3.732.587.965	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	6.377.437.600	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	3.732.587.965	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang			2.239.320.800	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang			1.340.912.963	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha		
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Semarang			2.102.700.800	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Semarang			1.286.698.137	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 kegiatan usaha				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 kegiatan usaha		
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	Kota Semarang			565.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	Kota Semarang			170.000.138	

	Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 kegiatan usaha				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 kegiatan usaha		
2.18.0 4.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang			1.470.416.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang			934.976.727	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha		
2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	995.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	380.076.270	
2.18.0 5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	995.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	380.076.270	
2.18.0 5.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 kegiatan usaha				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 kegiatan usaha		

2.18.0 5.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			293.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha		
2.18.0 5.2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			652.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			380.076.270	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha		
2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96%	1.671.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96%	960.524.998	
2.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	1.671.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	960.524.998	
2.18.0 6.2.01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang			1.671.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang			960.524.998	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	1 dokumen		

								Dimanfaatkan			
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	28.479.550.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.929.478.619	
		Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	18.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	13.618.180	
X.XX.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1.204.440	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		
X.XX.0 1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			1.610.080	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen		
X.XX.0 1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			1.961.990	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		

X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang			2.363.680	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen		
X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang			1.961.990	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			1.090.080	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan		
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			3.425.920	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan		
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	13.582.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	8.840.467.532	
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			13.326.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			8.549.449.852	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan		
X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang			250.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kota Semarang			287.550.000	

	ASN					Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			1.090.080
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang			1.287.520
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	
X.XX.0 1.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			1.090.080
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	
X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	126.543.150
X.XX.0 1.2.05. 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang			500.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang			126.543.150

			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	600 unit				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	600 unit	
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	10.289.150.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	5.285.492.179
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang			1.829.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang			1.111.389.874
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	
X.XX.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			228.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			188.857.180
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang			224.850.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang			129.374.420
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			256.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			41.617.200
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			1.250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			740.175.060
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
X.XX.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			6.500.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			3.074.078.445
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 dokumen				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 dokumen	

			pada SKPD					pada SKPD			
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	2.600.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	2.584.046.688	
X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			1.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			731.968.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			1.600.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			1.852.078.688	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.490.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.079.310.890	
X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			36.318.180	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit		
X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			410.454.300	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	17 unit				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	17 unit		

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
X.XX.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang			50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang			29.362.860	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	561 unit				Jumlah Mebel yang Dipelihara	561 unit		
X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			1.000.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			603.175.550	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	554 unit				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	554 unit		

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

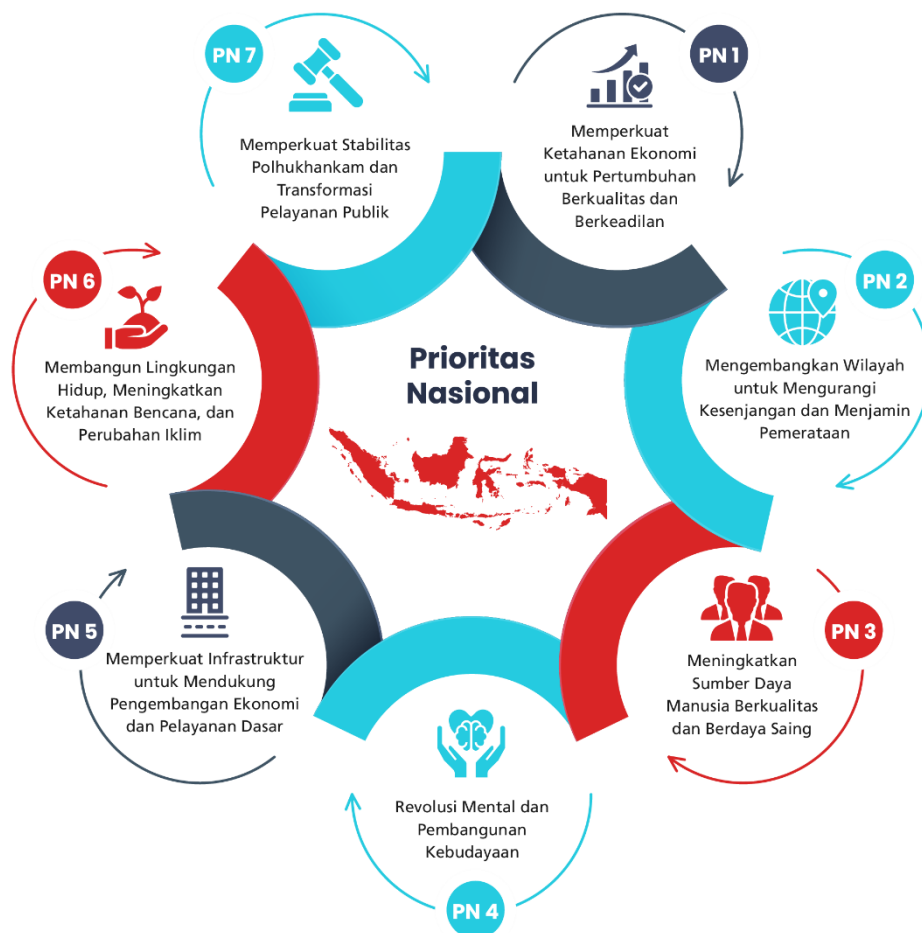
Berdasarkan table 2.7. di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 43.685.090.241,- (empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi yang disetujui sebesar Rp. 27.449.125.396,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta serratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan enam rupiah).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal.
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dalam rangka pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
- 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
- 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk

- Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengkokuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
- PP 2 Infrastruktur ekonomi
- PP 3 Infrastruktur Perkotaan
- PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
- PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
- PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- PP 3 Penegakan Hukum Nasional
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, bertanggung jawab atas program prioritas pembangunan daerah Kota Semarang di bidang "Pemberdayaan Ekonomi Local" agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional

yang ke-1 yaitu “Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Nasional menurut data BPS mencapai 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan) persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai 5,16% (lima koma enam belas) persen. Pencapaian tersebut sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan akan terus melonjak di akhir tahun 2022 dan 2023.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;

b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan

dan peternakan;

- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bertanggung jawab untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang yaitu “Pemberdayaan Ekonomi Lokal” agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada prioritas ke-3 “**Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan**”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelaynan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ”,

dengan indikator tujuan **“Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebut memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023

	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	25.684.059
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Keserasian dan keterpaduan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kota Semarang yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023

adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (lima) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 (enam) kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 6 (enam) kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu) kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping Dana Alokasi Khusus kepada Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.449.125.396,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta serratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan enam rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 17.929.478.619,- (tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 9.519.646.777,- (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				27.449.125.396	APBD Kota Semarang		17.547.823.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi		3691 penanam modal	1.100.000.048	APBD Kota Semarang	3700 penanam modal	932.965.380	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	Kota Semarang	4 buah	1.100.000.048	APBD Kota Semarang	5 buah	932.965.380	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kota Semarang		599.999.972	APBD Kota Semarang		462.795.420	
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		6 dokumen			6 dokumen		
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kota Semarang		500.000.076	APBD Kota Semarang		470.169.960	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		3691 Kegiatan usaha			3691 Kegiatan usaha		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	Kota Semarang	2 dokumen	799.328.654	APBD Kota Semarang	2 dokumen	249.622.620	

2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.022.000	APBD Kota Semarang			139.622.620
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen				1 dokumen	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Kota Semarang		699.306.654	APBD Kota Semarang			110.000.000
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 dokumen				1 dokumen	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Kota Semarang	492 Investor	2.547.128.842			492 Investor	794.251.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	Kota Semarang	8 kegiatan	2.547.128.842	APBD Kota Semarang		8 kegiatan	794.251.000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Kota Semarang		298.558.968	APBD Kota Semarang			100.000.000
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 dokumen				1 dokumen	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		2.248.569.874	APBD Kota Semarang			694.251.000
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		8 dokumen				8 dokumen	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	Kota Semarang	95%	3.732.587.965	APBD Kota Semarang		95%	1.688.503.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	Kota Semarang	100%	3.732.587.965	APBD Kota Semarang		100%	788.503.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kota Semarang		1.340.912.963	APBD Kota Semarang			788.503.000

		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2400 pelaku usaha				2400 pelaku usaha	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kota Semarang		1.286.698.137	APBD Kota Semarang			300.000.000
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		750 kegiatan usaha				750 kegiatan usaha	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Kota Semarang		170.000.138	APBD Kota Semarang			300.000.000
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		800 kegiatan usaha				800 kegiatan usaha	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Kota Semarang		934.976.727	APBD Kota Semarang			300.000.000
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		6000 kegiatan usaha				6000 kegiatan usaha	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Kota Semarang	2 (nilai)	380.076.270	APBD Kota Semarang		2 (nilai)	485.976.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	Kota Semarang	7%	380.076.270	APBD Kota Semarang		7%	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kota Semarang						145.976.000
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		19 kegiatan usaha				19 kegiatan usaha	

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kota Semarang						140.000.000
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		19 pelaku usaha				19 pelaku usaha	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kota Semarang		380.076.270	APBD Kota Semarang			200.000.000
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		19 kegiatan usaha				19 kegiatan usaha	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	Kota Semarang	96%	960.524.998	APBD Kota Semarang		96%	694.251.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kota Semarang	100%	960.524.998	APBD Kota Semarang		100%	694.251.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kota Semarang		960.524.998	APBD Kota Semarang			694.251.000
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	17.929.478.619	APBD Kota Semarang		100%	12.702.254.000
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	Kota Semarang	100%				100%	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%				100%	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%				100%	

X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	Kota Semarang	11 dokumen	13.618.180	APBD Kota Semarang		11 dokumen	5.500.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang		1.204.440	APBD Kota Semarang			1.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen				3 dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang		1.610.080	APBD Kota Semarang			500.000
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang		1.961.990	APBD Kota Semarang			500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang		2.363.680	APBD Kota Semarang			500.000
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Semarang		1.961.990	APBD Kota Semarang			500.000
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Semarang		1.090.080	APBD Kota Semarang			500.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan				1 laporan	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		3.425.920	APBD Kota Semarang			2.000.000

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 laporan				3 laporan	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	Kota Semarang	100%	8.840.467.532	APBD Kota Semarang		100%	10.692.720.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang		8.549.449.852	APBD Kota Semarang			10.490.920.000
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 orang/bulan				49 orang/bulan	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang		287.550.000	APBD Kota Semarang			200.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang		1.090.080	APBD Kota Semarang			600.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan				1 laporan	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Semarang		1.287.520	APBD Kota Semarang			600.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan				18 laporan	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang		1.090.080	APBD Kota Semarang			600.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen				1 dokumen	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Semarang	100%	126.543.150	APBD Kota Semarang		100%	35.000.000

X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Semarang		126.543.150	APBD Kota Semarang			35.000.000
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		600 unit				600 unit	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	5.285.492.179	APBD Kota Semarang		100%	1.522.034.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Semarang		1.111.389.874	APBD Kota Semarang			250.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket				1 paket	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang		188.857.180	APBD Kota Semarang			60.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket				2 paket	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Semarang		129.374.420	APBD Kota Semarang			120.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket				2 paket	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang		41.617.200	APBD Kota Semarang			140.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan				12 laporan	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang		740.175.060	APBD Kota Semarang			590.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan				12 laporan	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang		3.074.078.445	APBD Kota Semarang			362.034.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 dokumen				3 dokumen	

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	Kota Semarang	100%	2.584.046.688	APBD Kota Semarang		100%	85.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang		731.968.000	APBD Kota Semarang			40.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan				12 laporan	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang		1.852.078.688	APBD Kota Semarang			45.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan				12 laporan	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	Kota Semarang	100%	1.079.310.890	APBD Kota Semarang		100%	362.000.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang		36.318.180	APBD Kota Semarang			55.000.000
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 unit				7 unit	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		410.454.300	APBD Kota Semarang			230.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 unit				17 unit	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Kota Semarang		29.362.860	APBD Kota Semarang			30.000.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara		561 unit				561 unit	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		603.175.550	APBD Kota Semarang			47.000.000

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		554 unit				554 unit	
--	--	---	--	----------	--	--	--	----------	--

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (lima) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 (enam) kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 6 (enam) kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu) kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping Dana Alokasi Khusus kepada Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.449.125.396,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan enam rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 4. Rp. 17.929.478.619,- (tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 5. Rp. 9.519.646.777,- (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.
6. Jumlah total usulan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.547.823.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian dan jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan usulan rumusan kebutuhan untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis di tahun 2024 mendatang:
7. Rp. 12.702.254.000,- (dua belas milyar tujuh ratus dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program

dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin) dan jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan usulan rumusan kebutuhan untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis di tahun 2024 mendatang.

8. Rp. 4.845.569.000,- (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan dan jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan usulan rumusan kebutuhan untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis di tahun 2024 mendatang.
9. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat perubahan indikator sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Rancangan usulan anggaran Tahun 2024 belum mempertimbangkan perihal pemeliharaan Gedung dan peralatan perabot dan/atau mesin pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang di Mangkang.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dalam rangka pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

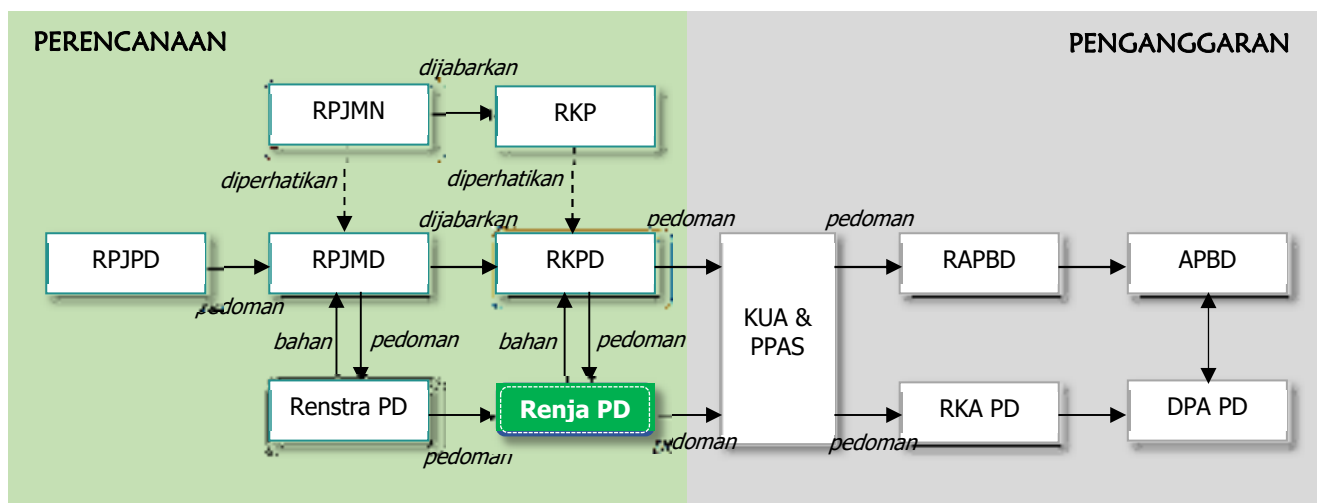
Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dispora Kota Semarang, yang berpedoman pada Renstra Dispora Kota Semarang. Untuk penyusunan Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dispora Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra tersebut.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Tahun 2023.

Selanjutnya Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora Kota Semarang Tahun 2023.

Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda serta Pembinaan Keolahragaan di arahkan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia baru, yang berkualitas merupakan salah satu kiprah yang mendesak perlu dilakukan dan seiring dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang merupakan Paradigma baru dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah.

Bertitik tolak dengan kiprah pembangunan dan pemberdayaan pemuda secara nasional, maka pembangunan dan pemberdayaan Pemuda Kota Semarang, mempunyai sasaran yang sama dan bersifat multi dimensi, upaya yang dilakukan antara lain dengan upaya mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat, menumbuhkan kembangkan kemauan dan semangat wirausaha serta melindungi generasi muda dari sifat destruktif seperti penggunaan obat terlarang dan narkoba.

Untuk bidang keolahragaan yaitu turut berperan dalam pembinaan olahraga secara umum dan khususnya bagi kalangan pemuda, dan dilakukan sejak usia dini yang bertujuan untuk membentuk disiplin, sportifitas, sifat satria,

semangat juang bagi upaya pembangunan manusia Indonesia baru yang sehat, unggul dan berketerampilan prima, serta berprestasi. Terkait upaya untuk mewujudkan sasaran, pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga di Kota Semarang.

Pada PERWAL Nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kepemudaan dan olahraga kota semarang adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, dalam hal ini terkandung maksud bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk itu sangat diharapkan Pemuda Olahraga Kota Semarang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks seperti :

1. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran Masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar Narkoba, Hiv/Aids, Minuman Keras, Perjudian dan Perilaku Kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial generasi muda yang merupakan masalah yang kompleks yang dapat mengancam masa depan generasi muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya.
2. Adanya tuntutan demokrasi yang semakin terbuka dan reformasi di segala bidang, buruknya informasi dan ideologi politik asing yang bertentangan dengan Pancasila sangat berpengaruh kepada generasi muda yang semakin mudah dan terbuka untuk diakses keinformasi global, kehidupan demokrasi politik yang masih dalam proses mencari arah dan pendewasaan.
3. Meningkatnya jumlah pemuda pengangguran sebagai dampak dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh masalah tenaga kerja, ketidakpastiaan iklim usaha, lemahnya kemampuan dan perilaku kewirausahaan dikalangan generasi muda.
4. Tuntutan reformasi di bidang olahraga, dimana masyarakat semakin kritis terhadap kinerja organisasi olahraga baik KONI maupun pengurus cabang olahraga. Tuntutan debirokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas dan diterapkannya audit publik untuk penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat guna kepentingan olahraga.
5. Masih lemahnya kinerja beberapa cabang olahraga yang diakibatkan lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pelatih, maupun profesi lain yang terkait sehingga pembina dan penanganan olahraga baik Tingkat Sekolah, Klub, Kota Semarang, maupun Tingkat Provinsi berkesan amiran, tidak serius dan tidak profesional.
6. Sarana dan Prasarana untuk semua cabang olahraga baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai, namun demikian untuk

- cabang olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal
7. Sumber daya aparatur masih perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan Bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun keterampilan teknis lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sekaligus menjadi motivator.
 8. Sistem dan Program pembinaan olahraga yang masih sporadis belum terpola dengan baik dan terbatas tenaga Profesional keolahragaan.
 9. Dana pembinaan yang masih relatif kecil, sehingga banyak program yang tidak sempat terlaksana akibat terbagi dua.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu Satu tahun kedepan, Sebagai suatu dokumen penting, sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renja, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Untuk mendukung visi Kota Semarang tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan perlu menata organisasi dan personalianya untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan agar berhasil dan berdaya guna. Dalam rangka menata organisasi dan personalianya tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Tahun 2023 . Adanya Renja dimaksudkan agar prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang dapat diterapkan dengan baik.

Proses penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengelolaan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan disajikan secara sistimatis serta dilengkapi dengan indikator tolok ukur pencapaiannya.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas KEPEMUDAAN dan Olahraga Kota Semarang tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016- 2021 ;
 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Perwal Kota Semarang No 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

20. Perwal Kota Semarang No 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelanggang Olahraga Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana Kerja ini adalah:

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam mencapai tujuan organisasi selama lima tahun ke depan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang selama tahun 2022 melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang.
3. Sebagai acuan dalam pembuatan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
4. Tersedianya dokumen perencanaan satu tahun
5. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap;

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPORA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dispora Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dispora Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kota Semarang,

review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPORA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dispora Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dispora Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISPORA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPORA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dispora Kota Semarang sampai dengan tahun 2022, yang menggunakan Renstra Dispora Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

Pada tahun 2021, Dispora Kota Semarang telah menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, dengan melaksanakan 3 program, 14 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dispora

- b) Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan 13 sub kegiatan, dimana semua sub kegiatan mencapai target sebesar 100 %. Realisasi Indikator Program ini diukur dari jumlah target 10 Dokumen dan realisasi 10 dokumen
- c) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target sebesar 100,00 %, dan realisasi sebesar 100 % Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata – rata persentase pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan administrasi perkantoran.
- d) Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100,00 %, dengan realisasi sebesar 100% Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata - rata dari persentase pengadaan sebesar 100 % dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 100 %

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dengan target sebanyak 62 Organisasi kepemudaan dan realisasi sejumlah 62 Organisasi Kepemudaan

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Jumlah Atlet yang dibina dengan target 550 orang dan realisasi 550 orang dengan prosentase 100%

2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	prosen organisasi pemuda aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dispora Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dispora Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dispora Kota Semarang Tahun 2021

NO	NO. REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.654.744.985	Rp 13.188.138.079	96,58
	2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp148.867.811	108.122.000	72,63
1	2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp141.025.711	103.122.000	73,12
2	2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.000.000	1.000.000	100,00
3	2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp987.000	900.000	91,19
4	2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp1.000.000	1.000.000	100,00
5	2 19 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp1.000.000	1.000.000	100,00
6	2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.855.100	1.100.000	28,53
	2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.911.986.309	10.840.124.309	99,34
1	2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.580.566.309	10.549.929.309	99,71
2	2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp325.920.000	285.920.000	87,73
3	2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp1.100.000	1.100.000	100,00
4	2 19 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp1.100.000	1.100.000	100,00
5	2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.100.000	975.000	88,64
6	2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp1.100.000	1.100.000	100,00
7	2 19 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp1.100.000	-	0,00
	2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.141.927.553	932.536.070	81,66
1	2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp15.069.405	14.539.530	96,48

NO	NO. REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
2	2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp83.791.830	73.089.568	87,23
3	2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp50.003.992	49.133.546	98,26
4	2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp45.107.125	43.909.981	97,35
5	2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp42.830.460	42.830.250	100,00
6	2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp8.100.000	6.750.000	83,33
7	2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp61.728.000	54.692.500	88,60
8	2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp650.909.261	480.640.695	73,84
9	2 19 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp184.387.480	166.950.000	90,54
	2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp147.497.250	144.512.500	97,98
1	2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Rp46.642.700	45.760.000	98,11
2	2 19 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp100.854.550	98.752.500	97,92
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp685.184.635	651.930.437	95,15
1	2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp9.694.545	-	0,00
2	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp164.685.600	154.078.437	93,56
3	2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp64.460.000	64.460.000	100,00
4	2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp446.344.490	433.392.000	97,10
	2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp479.289.000	452.212.763	94,35
1	2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp373.240.000	346.312.763	92,79
2	2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp106.049.000	105.900.000	99,86
	2 19 01 2.13	Penataan Organisasi	Rp139.992.427	58.700.000	41,93
1	2 19 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp42.950.750	10.200.000	23,75
2	2 19 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp97.041.677	48.500.000	49,98
	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp3.612.816.949	Rp3.348.877.356	92,69

NO	NO. REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp728.080.740	613.501.156	84,26
1	2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Rp282.384.354	202.891.806	71,85
2	2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Rp95.968.971	94.306.900	98,27
3	2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Rp349.727.415	316.302.450	90,44
	2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.884.736.209	2.735.376.200	94,82
1	2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Rp2.100.000.000	2.066.285.000	98,39
2	2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp784.736.209	669.091.200	85,26
	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp23.007.484.375	Rp20.976.121.466	91,17
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.997.369.037	3.791.814.027	94,86
1	2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Rp3.997.369.037	3.791.814.027	94,86
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.428.136.178	15.902.294.789	91,24
1	2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp16.465.588.394	15.059.344.789	91,46
2	2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Rp160.596.638	124.910.000	77,78
3	2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp801.951.146	718.040.000	89,54
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp904.268.386	628.470.600	69,50
1	2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp904.268.386	628.470.600	69,50
	2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp157.984.709	140.987.800	89,24

NO	NO. REKENING	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
1	2 19 03 2.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Rp18.215.868	15.412.500	84,61
2	2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp33.287.858	29.779.000	89,46
3	2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Rp106.480.983	95.796.300	89,97
	2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp519.726.065	512.554.250	98,62
1	2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp89.342.400	88.667.000	99,24
2	2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp271.247.510	269.140.180	99,22
3	2 19 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Rp33.242.085	33.013.000	99,31
4	2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Rp125.894.070	121.734.070	96,70
JUMLAH			Rp 40.275.046.309	37.513.136.901	93,14

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISPORA KOTA SEMARANG

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dispora Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dispora Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dispora sebagaimana tabel berikut.

Kode	Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 1		Tahun 2	
					Target	REALISAI S	Target	REALISASI
2.19.0.00.0.00.01.000 0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota Semarang	Orang	00.00	58	58	58	
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	00.00	00.01	0.001	00.01	
Sasaran	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	0,397222 222	0.39	10.35	
Sasaran	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	persen	75	72	75	69	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dispora tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Dispora Kota Semarang **Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi** mempunyai satu Indikator yaitu Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota Semarang, pada tahun 2021 Dispora Kota Semarang berhasil memperoleh target yaitu 58 orang pemuda yang berhasil baik dari prestasi olahraga maupun prestasi kepemudaan
- b. Sasaran Dispora Kota Semarang
 1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang dengan indikator Cakupan Wirausaha Muda Mandiri berhasil mencapai target sebesar 0.001% atau sebesar 100% di tahun 2021
 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan Indikator Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional dengan target 18.18 % dan berhasil mencapai 17.53 % atau mencapai 96%
 3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan Indikator Nilai AKIP dengan target 75 dan berhasil mencapai 72 sehingga mencapai 96%

Tabel 2.4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Dispora Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD adalah sebesar 100,00 %; dimana 3 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2021. Kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 % dimana 3 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2021.

Selain Indikator Pelayanan Dispora yang sudah disebutkan di atas, Dispora juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dispora Kota Semarang adalah sebagian IKK urusan Olahraga dan Kepemudaan.

Adapun capaian dari IKK pada urusan Olahraga dan Kepemudaan sesuai kewenangan Dispora Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Adapun capaian dari IKK pada urusan Olahraga dan Kepemudaan sesuai kewenangan Dispora Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Dispora Kota Semarang
Tahun 2021

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

NO	KONSEP / DEFINISI	CAPAIAN				OPD PENGAMPU
		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
		PERHITUNGAN	HASIL	PERHITUNGAN	HASIL	
1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			57 404988	0.014	Dispora

- Penjelasan IKK Output

NO	IKK Outcome	IKK Output	CAPAIAN		OPD PENGAMPU
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	80	20	Dispora
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	0	Dispora

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

- Penjelasan IKK Outcome

NO	KONSEP / DEFINISI	CAPAIAN				OPD PENGAMPU
		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
		PERHITUNGAN	HASIL	PERHITUNGAN	HASIL	
1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	1573		1573	0.388	Dispora

- **Penjelasan IKK Output**

NO	IKK Outcome	IKK Output	CAPAIAN		OPD PENGAMPU
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		1731	Dispora
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			Dispora

3) **IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga**

- **Penjelasan IKK Outcome**

-

NO	KONSEP / DEFINISI	CAPAIAN				OPD PENGAMPU
		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
		PERHITUNGAN	HASIL	PERHITUNGAN	HASIL	
1.	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	5	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	Dispora

- **Penjelasan IKK Output**

NO	IKK Outcome	IKK Output	CAPAIAN		OPD PENGAMPU
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1.	Peningkatan prestasi olahraga	1) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	255	287	Dispora
		2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	60	24	Dispora

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Semarang

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam upaya mewujudkan peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan, trampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing. Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, maka dari itu untuk menuju capaian tersebut Dinas kepemudaan mempunyai beberapa permasalahan, adapun Permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (life skill).
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.
4. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).
5. Kurangnya Sinergitas dan kemitraan dari Pemerintah Daerah dengan Stakeholder Kepemudaan maupun Olahraga
6. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga
7. Kurangnya potensi sumberdaya keolahragaan
8. Kurangnya olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dispora Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	SEMAR ANG	35.00.00	2.074.999.392	APBD	02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	SEMAR ANG	35.00.00	2.074.999.392	APBD
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	SEMAR ANG	10.00	1.299.999.792	APBD	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	SEMAR ANG	10.00	1.299.999.792	APBD
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	SEMAR ANG	05.00	250.000.000	APBD	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	SEMAR ANG	05.00	250.000.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.19.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	SEMARANG	03.00	175.000.02 2	APBD	2.19.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	SEMARANG	03.00	175.000.02 2	APBD
2.19.02.2.0 1.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	PENINGKATAN KREATIVITAS DIKALANGAN PEMUDA	SEMARANG	04.00	0	APBD	2.19.02.2.0 1.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	PENINGKATAN KREATIVITAS DIKALANGAN PEMUDA	SEMARANG	04.00	0	APBD
2.19.02.2.0 1.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	SEMARANG	01.00	274.999.77 0	APBD	2.19.02.2.0 1.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	SEMARANG	01.00	274.999.77 0	APBD
2.19.02.2.0 1.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	SEMARANG	01.00	600.000.00 0	APBD	2.19.02.2.0 1.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	SEMARANG	01.00	600.000.00 0	APBD
2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	SEMARANG	1400.00 .00	774.999.60 0	APBD	2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	SEMARANG	1400.00 .00	774.999.60 0	APBD
2.19.02.2.0 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaan	SEMARANG	10.00	224.649.98 0	APBD	2.19.02.2.0 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaan	SEMARANG	10.00	224.649.98 0	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
2.19.02.2.0 2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	SEMAR ANG	05.00	550.349.62 0	APBD	2.19.02.2.0 2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	SEMAR ANG	05.00	550.349.62 0	APBD
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	SEMAR ANG	1197.00 .00	33.934.711 .459	APBD	02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	SEMAR ANG	1197.00 .00	33.934.711 .459	APBD
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	SEMAR ANG	05.00		APBD			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	SEMAR ANG	05.00		APBD
2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	SEMAR ANG	06.00	4.440.099. 338	APBD	2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	SEMAR ANG	06.00	4.440.099. 338	APBD
2.19.03.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		SEMAR ANG		126.401.20 0	APBD	2.19.03.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		SEMAR ANG		126.401.20 0	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.19.03.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	SEMARANG	12.00	4.313.698.138	APBD	2.19.03.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	SEMARANG	12.00	4.313.698.138	APBD
2.19.03.2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	SEMARANG	06.00	1.648.395.661	APBD	2.19.03.2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	SEMARANG	06.00	1.648.395.661	APBD
2.19.03.2.0 2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Multi Event Tingkat daerah	SEMARANG	01.00	950.000.001	APBD	2.19.03.2.0 2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Multi Event Tingkat daerah	SEMARANG	01.00	950.000.001	APBD
2.19.03.2.0 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya atlet dalam mengembangkan prestasi	SEMARANG	03.00	48.600.000	APBD	2.19.03.2.0 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya atlet dalam mengembangkan prestasi	SEMARANG	03.00	48.600.000	APBD
2.19.03.2.0 2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	SEMARANG	10.00	649.795.660	APBD	2.19.03.2.0 2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	SEMARANG	10.00	649.795.660	APBD
2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	SEMARANG	1297.00	27.350.000.000	APBD	2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	SEMARANG	1297.00	27.350.000.000	APBD
2.19.03.2.0 3.01	Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlet Daerah	SEMARANG	01.00	0	APBD	2.19.03.2.0 3.01	Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlet Daerah	SEMARANG	01.00	0	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
2.19.03.2.0 3.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	SEMAR ANG	64.00.0 0	1.450.000. 000	APBD	2.19.03.2.0 3.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	SEMAR ANG	64.00.0 0	1.450.000. 000	APBD
2.19.03.2.0 3.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	SEMAR ANG	01.00	25.900.000. .000	APBD	2.19.03.2.0 3.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	SEMAR ANG	01.00	25.900.000. .000	APBD
2.19.03.2.0 3.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	SEMAR ANG	01.00	0	APBD	2.19.03.2.0 3.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	SEMAR ANG	01.00	0	APBD
2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	SEMAR ANG	63.00.0 0	49.600.000	APBD	2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	SEMAR ANG	63.00.0 0	49.600.000	APBD
2.19.03.2.0 4.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangn organisasi olahraga	SEMAR ANG	02.00	49.600.000	APBD	2.19.03.2.0 4.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangn organisasi olahraga	SEMAR ANG	02.00	49.600.000	APBD
2.19.03.2.0 4.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerjasama Organisasi Olahraga dengan Instansi Terkait	SEMAR ANG	02.00	0	APBD	2.19.03.2.0 4.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerjasama Organisasi Olahraga dengan Instansi Terkait	SEMAR ANG	02.00	0	APBD
2.19.03.2.0 4.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Olahraga Prestasi	SEMAR ANG	02.00	0	APBD	2.19.03.2.0 4.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Olahraga Prestasi	SEMAR ANG	02.00	0	APBD
2.19.03.2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi	SEMAR ANG	05.00	446.616.46 0	APBD	2.19.03.2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi	SEMAR ANG	05.00	446.616.46 0	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
2.19.03.2.0 5.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembang an dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	SEMAR ANG	03.00	83.126.730	APBD	2.19.03.2.0 5.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembang an dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	SEMAR ANG	03.00	83.126.730	APBD
2.19.03.2.0 5.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggara an pengembang an Olahraga Rekreasi	SEMAR ANG	02.00	97.686.650	APBD	2.19.03.2.0 5.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggara an pengembang an Olahraga Rekreasi	SEMAR ANG	02.00	97.686.650	APBD
2.19.03.2.0 5.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	SEMAR ANG	05.00	239.280.00 0	APBD	2.19.03.2.0 5.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	SEMAR ANG	05.00	239.280.00 0	APBD
2.19.03.2.0 5.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembang an Olahraga Petualang,wista dan Tantangan	SEMAR ANG	02.00	0	APBD	2.19.03.2.0 5.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembang an Olahraga Petualang,wista dan Tantangan	SEMAR ANG	02.00	0	APBD
2.19.03.2.0 5.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembang an Olahraga Tradisional	SEMAR ANG	02.00	26.523.080	APBD	2.19.03.2.0 5.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembang an Olahraga Tradisional	SEMAR ANG	02.00	26.523.080	APBD
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	SEMAR ANG	47.00.0 0	2.000.000. 000	APBD	02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	SEMAR ANG	47.00.0 0	2.000.000. 000	APBD
2.19.04.2.0 1.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	SEMAR ANG	03.00	0	APBD	2.19.04.2.0 1.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	SEMAR ANG	03.00	0	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
2.19.04.2.0 1.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	SEMAR ANG	01.00	2.000.000.000	APBD	2.19.04.2.0 1.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	SEMAR ANG	01.00	2.000.000.000	APBD
	NON URUSAN							NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMAR ANG	100.00.00	15.720.160.262	APBD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMAR ANG	100.00.00	15.720.160.262	APBD
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMAR ANG	100.00.00		APBD			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMAR ANG	100.00.00		APBD
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	SEMAR ANG	100.00.00		APBD			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	SEMAR ANG	100.00.00		APBD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	SEMAR ANG	08.00	40.238.172	APBD	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	SEMAR ANG	08.00	40.238.172	APBD
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	SEMAR ANG	02.00	7.265.332	APBD	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	SEMAR ANG	02.00	7.265.332	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	SEMAR ANG	01.00	5.365.330	APBD	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	SEMAR ANG	01.00	5.365.330	APBD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	SEMAR ANG	01.00	4.651.120	APBD	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	SEMAR ANG	01.00	4.651.120	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	SEMAR ANG	01.00	4.371.830	APBD	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	SEMAR ANG	01.00	4.371.830	APBD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	SEMAR ANG	01.00	4.314.240	APBD	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	SEMAR ANG	01.00	4.314.240	APBD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	SEMAR ANG	01.00	4.198.920	APBD	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	SEMAR ANG	01.00	4.198.920	APBD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEMAR ANG	01.00	10.071.400	APBD	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEMAR ANG	01.00	10.071.400	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	SEMAR ANG	100.00.00	10.028.149.812	APBD	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	SEMAR ANG	100.00.00	10.028.149.812	APBD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	SEMAR ANG	100.00.00	9.662.307.712	APBD	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	SEMAR ANG	100.00.00	9.662.307.712	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan	SEMAR ANG	100.00.00	348.450.000	APBD	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan	SEMAR ANG	100.00.00	348.450.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
		Keuangan OPD							Keuangan OPD				
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	SEMARANG	01.00	4.008.640	APBD	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	SEMARANG	01.00	4.008.640	APBD
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		SEMARANG		2.418.760	APBD	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		SEMARANG		2.418.760	APBD
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	SEMARANG	01.00	2.183.600	APBD	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	SEMARANG	01.00	2.183.600	APBD
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	SEMARANG	01.00	4.142.200	APBD	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	SEMARANG	01.00	4.142.200	APBD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Semesteran	SEMARANG	02.00	3.313.500	APBD	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Semesteran	SEMARANG	02.00	3.313.500	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	SEMARANG	01.00	1.325.400	APBD	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	SEMARANG	01.00	1.325.400	APBD
X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		SEMARANG		95.904.240	APBD	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		SEMARANG		95.904.240	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGE T CAPAIA N KINER JA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		SEMAR ANG		194.532.673	APBD	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		SEMAR ANG		194.532.673	APBD
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	SEMAR ANG	100.00.00	1.472.029.876	APBD	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	SEMAR ANG	100.00.00	1.472.029.876	APBD
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	SEMAR ANG	01.00	24.994.560	APBD	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	SEMAR ANG	01.00	24.994.560	APBD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMAR ANG	05.00	152.475.290	APBD	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMAR ANG	05.00	152.475.290	APBD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEMAR ANG	03.00	58.576.330	APBD	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEMAR ANG	03.00	58.576.330	APBD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	SEMAR ANG	12.00	53.169.820	APBD	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	SEMAR ANG	12.00	53.169.820	APBD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	SEMAR ANG	02.00	45.021.726	APBD	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	SEMAR ANG	02.00	45.021.726	APBD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	SEMAR ANG	02.00	8.940.000	APBD	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	SEMAR ANG	02.00	8.940.000	APBD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	SEMAR ANG	12.00	59.850.000	APBD	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	SEMAR ANG	12.00	59.850.000	APBD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar	SEMAR ANG	12.00	839.002.150	APBD	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar	SEMAR ANG	12.00	839.002.150	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
		dan dalam Daerah							dan dalam Daerah				
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	SEMARANG	04.00	230.000.000	APBD	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	SEMARANG	04.00	230.000.000	APBD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SEMARANG	09.00	1.907.212.698	APBD	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SEMARANG	09.00	1.907.212.698	APBD
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SEMARANG		310.732.000	APBD	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SEMARANG		310.732.000	APBD
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	SEMARANG	03.00	81.453.190	APBD	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	SEMARANG	03.00	81.453.190	APBD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	SEMARANG	06.00	1.515.027.508	APBD	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	SEMARANG	06.00	1.515.027.508	APBD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	SEMARANG	100.00	740.893.731	APBD	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	SEMARANG	100.00	740.893.731	APBD
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Updating Aplikasi	SEMARANG	01.00	0	APBD	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Updating Aplikasi	SEMARANG	01.00	0	APBD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	SEMARANG	12.00	279.358.400	APBD	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	SEMARANG	12.00	279.358.400	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	RANCANGAN AWAL					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMARANG	08.00	75.067.820	APBD	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMARANG	08.00	75.067.820	APBD
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	SEMARANG	12.00	386.467.511	APBD	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	SEMARANG	12.00	386.467.511	APBD
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	SEMARANG	100.00	1.241.199.060	APBD	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	SEMARANG	100.00	1.241.199.060	APBD
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	SEMARANG	01.00	36.318.180	APBD	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	SEMARANG	01.00	36.318.180	APBD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	SEMARANG	21.00	366.408.880	APBD	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	SEMARANG	21.00	366.408.880	APBD
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	SEMARANG	03.00	7.272.000	APBD	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	SEMARANG	03.00	7.272.000	APBD
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	SEMARANG	02.00	831.200.000	APBD	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	SEMARANG	02.00	831.200.000	APBD
JUMLAH						JUMLAH							

BAB III

TUJUAN DAN DISPORA KOTA SEMARANG

3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan

visi untuk Tahun 2018 - 2023 yaitu “**MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI. TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI**”. Dari visi Jawa

Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (Empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 – 2023 serta tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari **misi ketiga** yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk **mengurangi kemiskinan**

dan pengangguran” dan **misi keempat** yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.**Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2015-2019, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang ke pemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Untuk tahun 2023, merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan yaitu “ Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, yaitu :

- Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial;
- Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
- Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
- Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
- Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

P3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

P4 Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan

- 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinpora Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang adalah ” *Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi;* ”.

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan Olahraga
2. Peningkatan peran serta kepemudaan guna menjadikan pemuda Kota Semarang berdaya saing
3. Prestasi Olahraga Kota Semarang
4. Pola kemitraan dengan Pihak Swasta
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Semarang. Adapun sasaran pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah:

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi		Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	ORANG	58
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	%	0.01
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	%	8.92
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	%	0.60
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI	75

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dimana RKPD Tahun 2023 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 periode keempat;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. secara khusus, Dispora memiliki peran dalam pencapaian misi Pertama, yaitu 'Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dispora Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dispora Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dispora Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dispora Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 55 sub kegiatan, yang terdiri dari 36 sub kegiatan penunjang, dan 19 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 52,475,751,871,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dispora Kota Semarang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			53.729.871.113		
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			38.009.710.851		
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00 Organisasi Kpemudaan	2.074.999.392	SEMARANG	APBD
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00 Organisasi Kpemudaan		SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</i>	10.00 kegiatan	1.299.999.792	SEMARANG	APBD
		<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</i>	10.00 kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	5.00 Kegiatan	250.000.000	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	3.00 Kegiatan	175.000.022	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	1.00 Kegiatan	274.999.770	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	1.00 Kegiatan	600.000.000	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Anggota Aktif OKP</i>	<i>1400.00 Orang</i>	<i>774.999.600</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Anggota Aktif OKP</i>	<i>1400.00 Orang</i>		SEMARANG	APBD
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaan	10.00 Kegiatan	224.649.980	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	5.00 Kegiatan	550.349.620	SEMARANG	APBD
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1197.00 jumlah	33.934.711.459	SEMARANG	APBD
		jumlah Atlet prestasi	1197.00 jumlah		SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah sarana dan prasarana yang di kelola</i>	6.00 jumlah	4.440.099.338	SEMARANG	APBD
		<i>jumlah sarana dan prasarana yang di kelola</i>	6.00 jumlah		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		00.00	126.401.200	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	12.00 Bulan	4.313.698.138	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional</i>	6.00 kegiatan	1.648.395.661	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional</i>	6.00 kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Multi Event Tingkat daerah	1.00 Kegiatan	950.000.001	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya atlet dalam mengembangkan prestasi	3.00 Kegiatan	48.600.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	10.00 Kejuaraan	649.795.660	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Atlet yang dibina</i>	<i>1297.00 Orang</i>	<i>27.350.000.000</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Atlet yang dibina</i>	<i>1297.00 Orang</i>		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	64.00 Orang	1.450.000.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	1.00 kegiatan	25.900.000.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.04	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>Jumlah Organisasi Keolahragaan</i>	<i>63.00 Organisasi</i>	<i>49.600.000</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Organisasi Keolahragaan</i>	<i>63.00 Organisasi</i>		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	49.600.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi</i>	<i>5.00 jumlah</i>	<i>446.616.460</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi</i>	<i>5.00 jumlah</i>		SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	3.00 kegiatan	83.126.730	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	2.00 Kegiatan	97.686.650	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.00 jenis	239.280.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	2.00 Kegiatan	26.523.080	SEMARANG	APBD
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	47.00 Kegiatan	2.000.000.000	SEMARANG	APBD
		Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	47.00 Kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah keikutsertaan perlombaan Kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional	0.00 Kegiatan	2.000.000.000	SEMARANG	APBD
		Jumlah keikutsertaan perlombaan Kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional	0.00 Kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	1.00 kegiatan	2.000.000.000	SEMARANG	APBD
X.XX	NON URUSAN			15.720.160.262	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %	15.720.160.262	SEMARANG	APBD
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %		SEMARANG	APBD
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %		SEMARANG	APBD
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00 %		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>	<i>8.00 Dokumen</i>	<i>40.238.172</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>	<i>8.00 Dokumen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.00 Dokumen	7.265.332	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	1.00 Dokumen	5.365.330	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1.00 Dokumen	4.651.120	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	1.00 Dokumen	4.371.830	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1.00 Dokumen	4.314.240	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	1.00 Dokumen	4.198.920	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	10.071.400	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Keuangan</i>	100.00 %	10.028.149.812	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya Dokumen Keuangan</i>	100.00 %		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 persen	9.662.307.712	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan OPD	100.00 persen	348.450.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	1.00 Dokumen	4.008.640	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		00.00	2.418.760	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	2.183.600	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	1.00 Dokumen	4.142.200	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Semesteran	2.00 Dokumen	3.313.500	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	1.00 Dokumen	1.325.400	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		00.00	95.904.240	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		00.00	194.532.673	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>1.472.029.876</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1.00 Jenis	24.994.560	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.00 buah	152.475.290	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.00 Jenis	58.576.330	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	12.00 Jenis	53.169.820	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2.00 Jenis	45.021.726	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	2.00 Jenis	8.940.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	12.00 Bulan	59.850.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar dan dalam Daerah	12.00 Bulan	839.002.150	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	4.00 Jenis	230.000.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>9.00 Jenis</i>	<i>1.907.212.698</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>9.00 Jenis</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		00.00	310.732.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	3.00 Jenis	81.453.190	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	6.00 Jenis	1.515.027.508	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>740.893.731</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 Persen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	12.00 Bulan	279.358.400	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.00 jenis	75.067.820	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	12.00 Bulan	386.467.511	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>1.241.199.060</i>	SEMARANG	APBD

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
		<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 Unit	36.318.180	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21.00 Unit	366.408.880	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	3.00 jenis	7.272.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2.00 Ruang	831.200.000	SEMARANG	APBD
JUMLAH				53.729.871.113		

BAB V. PENUTUP

A. CATATAN PENTING :

1. Belum maksimalnya Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Prestasi Atletolahraga Kota Semarang
2. Perlunya kegiatan penunjang kepelatihan guna kemajuan Atlet Kota Semarang
3. Perlunya partisipasinya masyarakat dalam kemajuan Olahraga dan Kepemudaan dikota Semarang
4. Belum adanya sarana dan pasarana pendukung kegiatan Kepemudaan
5. Belum maksimalnya sekretariat/ Ruang Organisasi kepemudaan yang menyebabkan kegiatan Kepemudaan tidak bisa maksimal

B. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang.
4. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.
- 6.

C. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

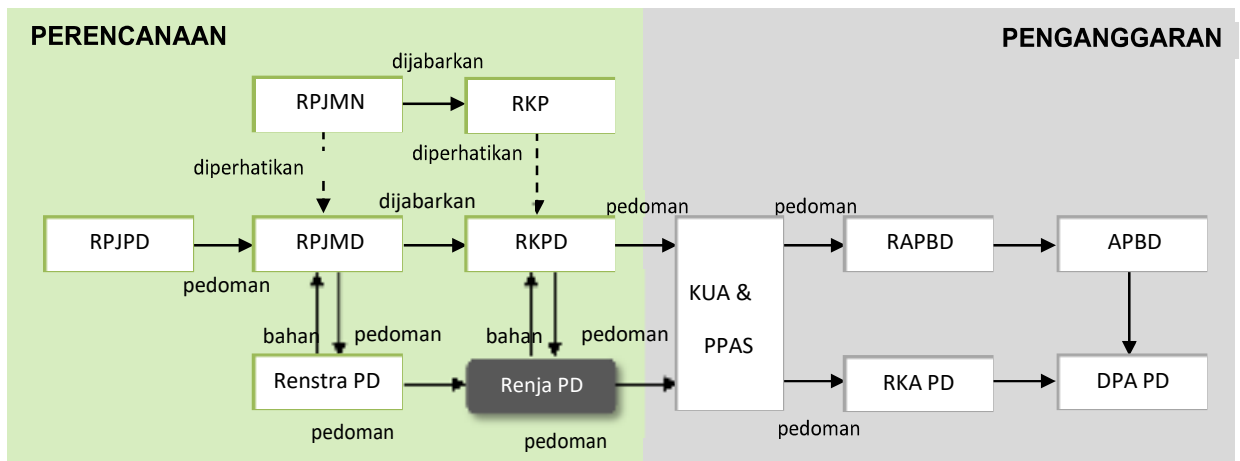
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun

2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5)
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 111);
- u.

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11).
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi yang nantinya berdampak pada indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang mengampu dua urusan yaitu urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata, melalui APBD melaksanakan 7 Program dengan 18 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota (7 kegiatan)
- b. Program Pengembangan Kebudayaan (3 kegiatan)
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (1 kegiatan)
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (1 kegiatan)
- e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (4 kegiatan)
- f. Program Pemasaran Pariwisata (4 kegiatan)
- g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 kegiatan)

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021 yang menyajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD murni sebesar Rp 80.419.236.296,- dan APBD perubahan sebesar Rp 65.512.632.974,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 59.826.237.622,- atau sebesar 91,32%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 5.686.395.352,- dengan persentase sebanyak 8,68%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN										
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	10 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	100%	9 dokumen
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	2	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2	100%	2

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen					dokumen		dokumen
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 orang/bulan	100%	100%	100%	100%	936 orang/bulan	100%	936 orang/bulan
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	100%	100%	100%	100%	12 dokumen	100%	12 dokumen
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 orang	0	597 orang	597 orang	597 orang	597 orang	100%	597 orang
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	0	74 orang	74 orang	100%	78 orang	100%	78 orang
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	100%	14 paket	14 paket	100%	14 paket	100%	14 paket
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	100%	15 paket	15 paket	100%	15 paket	100%	15 paket
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 paket	100%	54 paket	54 paket	100%	54 paket	100%	54 paket
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%	12 paket	100%	12 paket
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	100%	100%	100%	100%	600 laporan	100%	600 laporan
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	100%	100%	100%	100%	200 laporan	100%	200 laporan
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	100%	100%	100%	100%	6 dokumen	100%	6 dokumen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	100%	100%	100%	100%	7 unit	100%	7 unit
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	100%	100%	100%	100%	4 unit	100%	4 unit
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	100%	12 laporan
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	100%	12 laporan
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	100%	100%	100%	100%	20 unit	100%	20 unit
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	100%	100%	100%	100%	6 unit	100%	6 unit
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	100%	100%	100%	100%	6 unit	100%	6 unit
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi	35%	86,96%	80%	31,66%	38,57%	20%	100%	20%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya								
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	41,03%	90%	27,88%	30,97%	20%	100%	20%
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 obyek	19 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	100%	10 obyek	100%	10 obyek
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	86,96%	80%	31,66%	39,57%	20%	100%	20%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 obyek	42 kegiatan	45 kegiatan	42 kegiatan	93,33%	7 obyek	100%	7 obyek
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	95,73%	90%	27,88%	30,97%	20%	100%	20%
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2 event	2 event	2 event	100%	2.600 orang	100%	2.600 orang
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	86,96%	80%	31,66%	39,57%	20%	100%	20%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	35%	86,96%	80%	31,66%	39,57%	20%	100%	20%
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	626 sertifikat	39 kegiatan	39 kegiatan	32 kegiatan	82%	626 sertifikat	100%	626 sertifikat
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75%	124 lembaga	100%	124 lembaga
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN	Pelestarian dan	100%	92,16%	100%	167,69%	167,69%	77,85%	100%	77,85%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya								
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	92,16%	100%	167,69%	167,69%	77,85%	100%	77,85%
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 obyek	3 kategori	3 kategori	3 kategori	100%	461 obyek	100%	461 obyek
URUSAN PILIHAN PARIWISATA										
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	81 buah	15 event	25 event	25 event	100%	78 buah	100%	78 buah
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	8 unit	100%	100%	6 unit	100%	6 unit
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 lokasi	1,51 hari	1,6 hari	1,3 hari	81,25%	4 lokasi	100%	4 lokasi
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	1 unit	100%	100%	100%	100%	1 unit	100%	1 unit

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tersedia dan Terpelihara								
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	0	0	0	0	1 kegiatan	100%	1 kegiatan
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	8.619 orang	8.633 orang	339.022 orang	3.927%	100%	100%	100%
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	8 laporan	300 orang	300 orang	300 orang	100%	8 laporan	100%	8 laporan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	16 dokumen	100%	16 dokumen
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	5 laporan	100%	5 laporan
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 dokumen	100%	4 dokumen
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70%
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	3 kegiatan	3 kegiatan	7 kegiatan	233%	120 orang	233%	120 orang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 orang	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	940 orang	100%	940 orang

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 2 Urusan, 7 Program dan 7 Indikator Kinerja Program dan 18 Kegiatan dengan 18 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 7 program beserta 10 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang melampaui target, 7 indikator memenuhi target, serta 2 Indikator tidak memenuhi target yaitu Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional dengan tingkat realisasi 39,57% dan Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya dengan tingkat realisasi 38,57%.
 - c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 1 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 13 Indikator masih dalam proses serta 4 indikator tidak dapat memenuhi Renstra.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan, 7 Program dengan 7 indikator program dan 18 kegiatan dengan 18 indikator.
 - b) Dari 7 program disertai dengan 10 indikator kinerja program, terdapat 10 Indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.
 - c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 18 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi Renstra.

2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang
Tahun 2021

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	(%)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			65.512.632.974	59.826.237.622	91,32	5.686.395.352	8,68
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN			27.441.343.522	23.750.616.748	86,55	3.690.726.774	13,45
RUTIN			19.351.359.229	16.257.198.369	84,01	3.094.160.860	15,99
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			8.089.984.293	7.493.418.379	92,63	596.565.914	7,37
I	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.351.359.229	16.257.198.369	84,01	3.094.160.860	15,99
1	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.650.950	861.000	32,48	1.789.950	67,52
1	2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	730.590	150.000	20,53	580.590	79,47
2	2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	298.550	0	0	298.550	100
3	2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	322.550	150.000	46,50	172.550	53,50
4	2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	295.050	0	0	295.050	100
5	2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	322.550	322.000	99,83	500	0,17
6	2.22.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.660	239.000	35,06	442.660	64,94
2	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.290.056.176	12.557.457.765	94,49	732.598.411	5,51
7	2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.823.144.526	12.264.992.765	95,65	558.151.761	4,35
8	2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	466.240.000	292.465.000	62,73	173.775.000	37,27

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	(%)
		Pelaksanaan Tugas ASN					
9	2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	298.550	0	0	298.550	100
10	2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200.550	0	0	200.550	100
11	2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	172.550	0	0	172.550	100
3	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.000.000	315.051.000	95,47	14.949.000	4,53
12	2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	330.000.000	315.051.000	95,47	14.959.000	4,53
4	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.249.432.234	1.936.189.305	59,59	1.313.242.929	40,41
13	2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.172.529	27.847.500	38,58	44.325.029	61,42
14	2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	257.836.950	0	0	257.836.950	100
15	2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.329.818	122.097.500	78,10	34.232.318	21,90
16	2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.842.686	10.746.980	22,94	36.095.706	77,06
17	2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.198.214.263	1.044.895.440	87,20	153.318.823	12,80
18	2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703.256.000	252.181.885	35,86	451.074.115	64,14
19	2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	814.779.988	478.420.000	58,72	336.359.988	41,28
5	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.820.531	293.434.500	47,34	326.386.031	52,66
20	2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	619.820.531	293.434.500	47,34	326.386.031	52,66
6	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.605.738	724.942.169	77,82	206.663.569	22,18
21	2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	454.608.291	344.411.885	75,76	110.196.406	24,24

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	(%)
		Sumber Daya Air dan Listrik					
22	2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476.997.447	380.530.284	79,78	96.467.163	20,22
7	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.793.600	429.262.630	46,27	498.530.970	53,73
23	2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.948.000	265.916.200	82,60	56.031.800	17,40
24	2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.250.000	1.575.000	70	675.000	30
25	2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	452.103.600	144.199.430	31,90	307.904.170	68,10
26	2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.492.000	17.572.000	11,60	133.920.000	88,40
11	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	4.939.331.427	4.698.996.879	95,13	240.334.548	4,87
8	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	691.730.628	674.060.000	97,45	17.670.628	2,55
27	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	691.730.628	674.060.000	97,45	17.670.628	2,55
9	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.767.517.292	3.625.803.106	96,24	141.714.186	3,76
28	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.767.517.292	3.625.803.106	96,24	141.714.186	3,76
10	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	480.083.507	399.133.772,73	83,14	80.949.734	16,86
29	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	480.083.507	399.133.772,73	83,14	80.949.734	16,86
III	2.22.03	Program	2.899.401.828	2.555.300.500	88,13	344.101.328	11,87

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	(%)
		Pengembangan Kesenian Tradisional					
11	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.899.401.828	2.555.300.500	88,13	344.101.328	11,87
30	2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.217.439.318	2.004.185.500	90,38	213.253.818	9,62
31	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	681.962.510	551.115.000	80,81	130.847.510	19,19
IV	2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	251.251.038	239.121.000	95,17	12.130.038	4,83
12	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	251.251.038	239.121.000	95,17	12.130.038	4,83
32	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	251.251.038	239.121.000	95,17	12.130.038	4,83
URUSAN PILIHAN PARIWISATA			38.071.289.452	36.075.620.874	94,76	1.995.668.578	5,24
V	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	35.565.378.909	33.876.101.830	95,25	1.689.277.079	4,75
13	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20.088.366.364	20.034.358.000	99,73	54.008.364	0,27
33	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20.088.366.364	20.034.358.000	99,73	54.008.364	0,27
14	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.652.154.007	13.042.128.318	89,01	1.610.025.689	10,99
34	3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.652.154.007	13.042.128.318	89,01	1.610.025.689	10,99
15	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	725.330.940	722.135.512	99,56	3.195.428	0,44
35	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	123.225.428	120.030.000	97,41	3.195.428	0,44
36	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	602.105.512	602.105.512	100	0	0

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	(%)
16	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	99.527.598	77.480.000	77,85	22.047.598	22,15
37	3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	99.527.598	77.480.000	77,85	22.047.598	22,15
VI	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	1.492.523.730	1.339.184.890	89,73	153.338.840	10,27
17	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.492.523.730	1.339.184.890	89,73	153.338.840	10,27
38	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	504.444.341	485.785.000	96,30	18.659.341	3,70
39	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	509.798.791	437.525.890	85,82	72.272.901	14,18
40	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	478.280.598	415.874.000	86,95	62.406.598	13,05
VII	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.013.386.813	860.334.154	84,90	153.052.659	15,10
18	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.013.386.813	860.334.154	84,90	153.052.659	15,10
41	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	536.034.213	520.025.338	97,01	16.008.875	2,99
42	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	477.352.600	340.308.816	71,29	139.043.784	28,71
JUMLAH			65.512.632.974	59.826.237.622	91,32	5.686.395.352	8,68

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 7 program dan 18 kegiatan serta 42 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebesar Rp 65.512.632.974,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 59.826.327.622,- dengan sisa sebesar Rp 5.686.395.352,- dengan persentase sebanyak 8,68% dengan uraian sebagai berikut :

1. Urusan wajib kebudayaan anggarannya sebesar Rp 27.441.343.522,- dan realisasi sebesar Rp 23.750.616.748,- dengan silpa sebesar Rp 3.690.726.774,- dengan persentase sebanyak 13,45%.
 - a. Silpa rutin sebesar Rp 3.094.160.860,- dengan persentase sebanyak 15,99%.
 - b. Silpa program/kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp 596.565.914,- dengan persentase sebanyak 7,37%.
2. Urusan pilihan pariwisata anggarannya sebesar Rp 38.071.289.452,- dan realisasi sebesar Rp 36.075.620.874,- dengan silpa sebesar Rp 1.995.668.578,- dengan persentase sebanyak 5,24%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu penyumbang perekonomian di Kota Semarang. Beragam daya tarik pariwisata terdapat di Kota Semarang mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner wisata religi serta wisata buatan. Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, berdampak langsung terhadap sektor pariwisata di Kota Semarang, sehingga hampir semua sasaran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak tercapai.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan 1 :										
Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal	%	42,04	45,48	49,95	55,17	42,04	50,47	50,47	50,47
Sasaran 1 :										
Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	60,17	65,30	71,57	77,85	60,17	63,78	71,57	71,57
	Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	23,92	25,66	28,33	32,50	23,92	37,16	38,48	38,48
Sasaran 6 :										
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	nilai	84,52	84,53	84,55	84,60	84,61	84,61	76,20	76,20
Tujuan 2 :										
Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	%	4,9	19	19	19	10,17	7,96	19	19
Sasaran 2 :										
Jumlah	Jumlah	orang	6.207.67	3.455.92	3.663.27	3.883.07	3.260.30	2.663.68	3.663.2	3.883.07

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kunjungan Wisata Nusantara	Kunjungan Wisata Nusantara		8	1	6	3	3	4	76	3
Sasaran 3 :										
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	74.472	7.025	7.447	7.894	6.628	77	7.447	7.894
Sasaran 4 :										
Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	%	30,32	33,96	37,60	41,24	30,32	31,74	46,69	46,69
Sasaran 5 :										
Lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,4	1,25	1,30	1,35	1,4	1,32	1,43	1,43

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. **Tujuan 1 “Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 50,47% dari target sebesar 45,48%. Tujuan tersebut mengampu dua sasaran antara lain:
 - Sasaran 1 “Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal” memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - Tingkat Pelestarian Warisan Budaya, target sebesar 65,30% dan realisasinya sebesar 63,78%, tidak dapat mencapai target hal ini dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.
 - Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal, target sebesar 25,66% dan realisasinya sebesar 37,16%.
 - Sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana target nilai sebesar 84,53 dan realisasi nilai sebesar 84,61.

- b. **Tujuan 2 “Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata” tidak dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 7,96% dari target sebesar 19%. Indikator kinerja tersebut tidak dapat mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
1. Masih terdampak dari pandemi covid-19, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi covid-19. Sejak Februari 2020 pandemi covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.
 3. Keterbatasan rute penerbangan dan aturan perjalanan bagi wisatawan.
 4. Masih ditutupnya rute penerbangan luar negeri di bandara Ahmad Yani.
 5. Beralihnya pasar wisatawan nusantara yang semula dari sekolah/rombongan instansi dengan jumlah yang besar menjadi kelompok kecil atau keluarga.
 6. Larangan event dan pertunjukkan seni budaya.
 7. Pembatasan convention (rapat dan pertemuan).

Tujuan tersebut mengampu dua sasaran antara lain:

- Sasaran 2 “Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara, dimana target sebanyak 3.455.921 orang dan realisasinya sebanyak 2.663.684 orang. Indikator kinerja tersebut tidak dapat mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
1. Masih terdampak dari pandemi covid-19, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi covid-19. Sejak Februari 2020 pandemi covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.

3. Keterbatasan rute penerbangan dan aturan perjalanan bagi wisatawan.
 4. Beralihnya pasar wisatawan nusantara yang semula dari sekolah/rombongan instansi dengan jumlah yang besar menjadi kelompok kecil atau keluarga.
 5. Larangan event dan pertunjukkan seni budaya.
 6. Pembatasan *convention* (rapat dan pertemuan).
- Sasaran 3 “Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara, dimana target sebanyak 7.025 orang dan realisasinya sebanyak 77 orang. Indikator kinerja tersebut tidak dapat mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
 1. Keterbatasan rute penerbangan dan aturan perjalanan bagi wisatawan.
 2. Masih ditutupnya rute penerbangan luar negeri di bandara Ahmad Yani.
 - Sasaran 4 “Tingkat Hunian Akomodasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Hunian Akomodasi, dimana target sebanyak 33,96% dan realisasi sebanyak 31,74%. Indikator kinerja tersebut tidak dapat mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
 1. Masih terdampak dari pandemi covid-19, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi covid-19. Sejak Februari 2020 pandemi covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.
 3. Keterbatasan rute penerbangan dan aturan perjalanan bagi wisatawan.
 4. Beralihnya pasar wisatawan nusantara yang semula dari sekolah/rombongan instansi dengan jumlah yang besar menjadi kelompok kecil atau keluarga.
 5. Pembatasan *convention* (rapat dan pertemuan).

- Sasaran 5 “Lama Tinggal Wisatawan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Lama Tinggal Wisatawan, dimana target sebanyak 1,25 hari dan realisasinya 1,32 hari.

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di bidang kebudayaan dan pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Tahun 2021

PROGRAM RPJMD			PROGRAM RKPD 2023			PROGRAM DI APBD 2023		
NO	PROGRAM	INDIKATOR	NO	PROGRAM	INDIKATOR	NO	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok /Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok /Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok /Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional

PROGRAM RPJMD			PROGRAM RKPD 2023			PROGRAM DI APBD 2023		
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	6	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	6	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021 semua program targetnya dapat tercapai baik program pada urusan wajib kebudayaan maupun pada urusan pilihan pariwisata. Pada urusan wajib kebudayaan didukung oleh 4 program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program untuk kegiatan dan pada urusan pilihan pariwisata didukung oleh 3 program.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga dapat dilihat dari upaya mengkomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	USULAN 2023	PROYEKSI	
				2024	2025
1	Jumlah Usulan	Usulan	25	30	40
2	Usulan Yang Diakomodir	Usulan	5	10	20
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	20	33,33	50

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 20 %. Adapun usulan non fisik hasil musrenbang kecamatan forum SKPD tahun 2022 yang diakomodir yaitu :

1. Peringatan Hari Besar Islam.

Dengan mengisi hiburan untuk memeriahkan acara muharam.

2. Extreme sport ville (desa olah raga ekstrim).

Kajian untuk desa olah raga ekstrim.

3. Sosialisasi peningkatan pariwisata curug Kedung Kudu.

Pembinaan kelompok sadar wisata.

4. Sosialisasi peningkatan pariwisata Sendang Gede.

Pembinaan kelompok sadar wisata.

5. Kegiatan Pokdarwis.

Pembinaan kelompok sadar wisata.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang kebudayaan dan pariwisata juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RPJMD				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		SATUAN
		2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
Misi 1: Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial										
Tingkat Kearifan Budaya Lokal										
	Meningkatnya kearifan budaya lokal									
	PersentaseTingkat kearifan budaya lokal	45,48	45,95	55,17	61,05	42,05	50,47	45,95	55,17	%
Misi 2: Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila										
Laju Pertumbuhan Ekonomi										
	Meningkatnya produk unggulan daerah									
	Persentase peningkatan kunjungan wisata	6	6	6	6	(-55,28)	(-18,46)	6	6	%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Dari data pada tabel diatas dapat diperhatikan bahwa pada Misi 2 dengan indikator persentase peningkatan kunjungan wisata tidak dapat mencapai target hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- a. Masih terdampak dari pandemi covid-19, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi covid-19. Sejak Februari 2020 pandemi covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.
- c. Keterbatasan rute penerbangan dan aturan perjalanan bagi wisatawan.
- d. Masih ditutupnya rute penerbangan luar negeri di bandara Ahmad Yani.
- e. Beralihnya pasar wisatawan nusantara yang semula dari sekolah/rombongan instansi dengan jumlah yang besar menjadi kelompok kecil atau keluarga.
- f. Larangan event dan pertunjukkan seni budaya.
- g. Pembatasan *convention* (rapat dan pertemuan).

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal yang secara langsung berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang maka isu strategis sebagai berikut :

- a. Pemulihan ekonomi sektor pariwisata.
- b. Pelestarian warisan budaya.
- c. Peningkatan apresiasi dan festival seni dan budaya.
- d. Destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
- e. Inovasi produk dan perluasan pasar.
- f. Adaptasi kebiasaan baru (penerapan protokol CHSE-Cleanlines (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Kemanan) dan Environment Sustainability (kelestarian Lingkungan))
- g. Daya saing industri pariwisata.
- h. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kebudayaan dan pariwisata antara lain :

- a. Perlunya optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan kerjasama destinasi MICE.
- b. Semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya.
- c. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan daya tarik wisata baik infrastruktur maupun sumber daya manusia serta melakukan kerjasama pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
- b. Pengemasan atraksi seni budaya yang modern dan kekinian tanpa meninggalkan tradisi yang ada.
- c. Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan :

- Perubahan pola perilaku wisatawan dampak dari pandemi covid-19 yang lebih memerhatikan kesehatan dan keselamatan.
- Persaingan sektor pariwisata antar daerah yang semakin ketat,
- Penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan ramah difabel.
- Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
- Pola wisata yang *touchless* melalui kesiapan teknologi informasi dalam aktivitas wisata

b. Peluang :

- Kota Semarang merupakan kota besar dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pasca pandemi.
- Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
- Hubungan antar stakeholder pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
- Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
- Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.

- Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
- Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Daya Saing Daerah Yang Didukung Potensi Unggulan Daerah**” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Kreatif dan Berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2 : Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompetitif dan Produktif;
- d. Prioritas Daerah 4 : Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Terhadap Kelompok Rentan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyediaan Pelayanan Dasar;
- e. Prioritas Daerah 5 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya. Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian pencapaian Prioritas Daerah 1 yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Kreatif dan Berkelanjutan**, fokus pada **Peningkatan Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal**, melalui upaya-upaya:

- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang

berdaya saing.

2) Pengembangan wisata MICE.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama level daerah dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD
Urusan Wajib Kebudayaan Dan Urusan Pilihan Pariwisata

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun Berkenan	Realisasi Tahun Berkenan	Capaian thd Target Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	Ccapaian thd Target Akhir
			2021	2021	%	2021	%
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial (SEMARANG SEHAT DAN CERDAS)							
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	persen	69,22	102,42	147,96 %	69,22%	147,96 %

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun Berkenan	Realisasi Tahun Berkenan	Capaian thd Target Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian thd Target Akhir
			2021	2021	%	2021	%
Meningkatkannya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya loka	persen	69,92	102,42	147,96 %	69,92	147,96 %
MISI 2 : Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila (SEMARANG BERDAYA SAING)							
Meningkatkannya Produktivitas ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,5	5,16	79,38%	6,5	79,38%
Meningkatkan nilai perdagangan dan jasa unggulan	Persentase peningkatan kunjungan wisata	persen	6	-18,46	-55,28%	6	6%

Seperti yang terlihat di atas, indikator Persentase peningkatan kunjungan wisata perlu mendapatkan perhatian, baik oleh Pemerintah Kota Semarang maupun OPD teknis, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dikarenakan indikator tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian laju pertumbuhan ekonomi kota Semarang.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN											
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	18,343,454,309	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	24,185,530,965	
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%		
			Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%				Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	9 dokumen	1,014,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	9 dokumen	2,844,733	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	201,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	997,917	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	162,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	284,658	
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	162,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	333,478	
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 dokumen	162,600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 dokumen	284,658	
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	162,600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	333,478	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	162,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	610,544	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	12,326,941,989	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	13,997,195,952	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 orang/bulan	11,798,370,989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 orang/bulan	13,550,101,000	
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	528,083,200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	446,442,400	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	162,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	289,912	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran/ Triwulanan/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	162,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	181,320	
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	162,600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	181,320	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	355,027,240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	380,000,000	
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 orang	175,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 orang	350,000,000	
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	180,027,240	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	30,000,000	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2,129,213,459	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	3,628,493,400	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	14 paket	215,204,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	14 paket	206,918,400	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Disediakan					Disediakan			
2.22.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	90,320,980	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	150,000,000	
2.22.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 paket	136,459,470	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 paket	250,000,000	
2.22.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	47,817,577	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	75,000,000	
2.22.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	700,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	1,346,575,000	
2.22.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	493,386,792	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	800,000,000	
2.22.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	446,024,140	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	800,000,000	
2.22.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	462,062,830	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	2,000,000,000	
2.22.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	172,072,740	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	500,000,000	
2.22.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	289,990,090	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	1,000,000,000	
2.22.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,800,544,450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	500,000,000	
2.22.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	850,090,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2,773,996,880	
2.22.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	950,454,450	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	873,996,880	
2.22.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	1,268,649,741	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	1,900,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	272,890,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	1,403,000,000	
2.22.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	786,528,238	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	500,000,000	
2.22.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	209,230,703	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3,000,000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	10,463,354,290	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	11,551,300,000	
2.22.02. 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20%	2,511,018,230	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20%	2,947,100,000	
2.22.02. 2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 obyek	2,511,018,230	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 obyek	2,947,100,000	
2.22.02. 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	6,453,900,000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	6,997,100,000	
2.22.02. 2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 obyek	6,453,900,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 obyek	6,997,100,000	
2.22.02. 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20%	1,498,436,060	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20%	1,607,100,000	
2.22.02. 2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	1,498,436,060	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	1,607,100,000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20%	4,277,064,520	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20%	4,444,200,000	
2.22.03. 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20%	4,277,064,520	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20%	4,444,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	626 sertifikat	2,914,880,000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	626 sertifikat	2,697,100,000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	1,362,184,520	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	1,747,100,000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77.85%	3,395,000,000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77.85%	6,505,000,000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77.85%	3,395,000,000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77.85%	6,505,000,000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 obyek	3,395,000,000	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 obyek	6,505,000,000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kota Semarang	Pengelolaan Museum Yang Sesuai Standar	100%	963,030,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kota Semarang	Pengelolaan Museum Yang Sesuai Standar	100%	0	
2.22.06.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100%	963,030,000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100%	0	
2.22.06.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100%	963,030,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100%	0	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			17,909,344,331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			26,255,553,504	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	13,500,000,000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	20,806,420,670	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	329,265,280	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	2,100,000,000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi)	78 buah	329,265,280	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi)	78 buah	2,100,000,000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	12,500,720,960	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	16,541,000,000	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	6 unit	12,500,720,960	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	6 unit	16,541,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	315,587,400	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	550,000,000	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 lokasi	57,505,200	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 lokasi	100,000,000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	200,577,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	400,000,000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	57,505,200	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	50,000,000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	354,426,360	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	1,615,420,670	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Laporan Investasi Pariwisata	8 laporan	354,426,360	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Laporan Investasi Pariwisata	8 laporan	1,615,420,670	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3,498,424,331	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3,164,300,000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3,498,424,331	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3,164,300,000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	1,128,527,550	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	1,070,100,000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	1,299,905,391	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	1,047,100,000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	1,069,991,390	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	1,047,100,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	70%	910,920,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	70%	2,284,832,834	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70%	910,920,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70%	2,284,832,834	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	393,682,000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	1,541,732,834	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 orang	517,238,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 orang	743,100,000	
	Total				55,351,247,450					72,941,584,469	

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, belum ada program dan kegiatan yang berubah, baik di RKPD 2023 maupun di hasil analisis kebutuhan. Namun terdapat perbedaan pagu anggaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2012, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 kegiatan	Wayang Kulit Jumat Kliwon

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kota Semarang		12 kegiatan	Atraksi Budaya
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 kegiatan	Dukungan Event Seni Dan Budaya
				60 kegiatan	Fasilitasi Komunitas Seni
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	12 kegiatan	Dukungan Event Seni Tradisi
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional		
	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya		
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	12 kegiatan	Pembinaan Kelompok / Sanggar Seni Budaya
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	SDM Pariwisata		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	60 kelompok	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuan) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memedomani Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Serta Prioritas Nasional 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengampu dua urusan yaitu kebudayaan dan pariwisata sehingga dalam proses kerjanya mengacu terhadap dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/ Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2024 adalah **“Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **“Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**

Berkaitan dengan sasaran strategis Kemenparekraf, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang bersinggungan dengan sasaran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang:

1. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan

Untuk indikator kinerja jumlah pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 300-315 juta pergerakan. Sementara Untuk Kota Semarang target jumlah wisatawan nusantara dengan target 3.883.073 pada tahun 2023. Indikator

Jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 21 juta orang. Sementara Untuk Kota Semarang target jumlah wisatawan nusantara dengan target 7.894 pada tahun 2023.

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah: **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.**

Dalam sasaran Kemendikbud, tidak ada sasaran yang bersinggungan langsung dengan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Namun di level program Kementerian terdapat beberapa program yang bersinggungan dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap target nasional.

1. Program Pemajuan dan Pelestarian bahasa dan Kebudayaan. Sasaran program Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional dengan indikator Persentase Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”**

Dari visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkontribusi pada dua misi yaitu: misi 1: **Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;** serta misi ke 2 yaitu **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.**

Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goals* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

- Tujuan pada urusan wajib kebudayaan yaitu **Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.** dengan indikator tujuan **“Meningkatkan Kearifan**

Budaya Lokal". Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu:

1. **Sasaran 1: Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal**", dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Tingkat Pelestarian Warisan Budaya
- b. Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal

2. **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**", dengan indikator sasaran yaitu Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- **Tujuan pada urusan pilihan pariwisata yaitu: "Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang"** dengan indikator tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata**. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu :

1. **Sasaran 3: Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara**, dengan indikator sasaran kunjungan wisata nusantara.
2. **Sasaran 4: Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara**, dengan indikator sasaran kunjungan wisata mancanegara.
3. **Sasaran 5: Tingkat Hunian Akomodasi**, dengan indikator sasaran tingkat hunian akomodasi.
4. **Sasaran 6: Lama Tinggal Wisatawan**, dengan indikator sasaran lama tinggal wisatawan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Data Awal (capaian 2019/20 20)	2021		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TARGET	REALIS ASI TW III	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal	42.04%	41,44%	41,44%	49,95%	55,17%	61,05%	66,20%	72,50%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	84.53	84,53	76,20	84.55	84.60	84.65	84.70	84.75
Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	60,17%	65,30%	62,44%	71,57%	77,85%	85,45%	91,57%	100%
	Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	23,92%	20,45%	25,66%	28,33%	32,50%	36,66%	40,83%	45%
Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	10,17%	19%	5,37%	19%	19%	19%	19%	19%

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Data Awal (capaian 2019/20 20)	2021		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TARGET	REALIS ASI TW III	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkat nya Kunjunga n Wisatawan Nusantara	Jumlah Kunjunga n Wisata Nusantara	3.260.30 3 orang	3.455.9 21 orang	1.458.09 9 orang	3.663.2 76 orang	3.883.0 73 orang	4.116.0 57 orang	4.363.0 20 orang	4.624.8 02 orang
Meningkat nya Kunjunga n Wisatawan Mancaneg ara	Jumlah Kunjunga n Wisata Mancaneg ara	6.628 orang	7.025 orang	22 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang
Meningkat nya Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	33,96%	33,96%	31,74%	37,60%	41,24%	44,88%	48,52%	52,16%
Lama Menginap Wisatawan	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1,4 hari	1,25 hari	1,34 hari	1,3 hari	1,35 hari	1,4 hari	1,45 hari	1,5 hari

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi serta arah kebijakan akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Memelihara Warisan Budaya dan Memfasilitasi Kesenian Lokal	Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Obyek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya
			Peningkatan dan Pengembangan Atraksi Budaya dan Kualitas Kesenian Lokal
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara	Peningkatan Promosi Pariwisata, Atraksi Wisata, Produk dan Jasa Kepariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kalangan Masyarakat
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara		Peningkatan SDM Kelompok Sadar Wisata
	Meningkatnya Tingkat Hunian Akomodasi		Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Atraksi Baru
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan		Peningkatan Kerjasama Pariwisata Dari Daerah Maupun Negara Lain

Untuk mendukung ketercapaian visi dan misi, Kota Semarang Tahun 2021-2026, disusunlah program prioritas yang diharapkan mampu untuk

mencapai keberhasilan visi dan misi. Program prioritas yang menjadi andil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain:

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal, yang terdiri dari :

- Agenda tahunan event-event budaya lokal

Untuk memenuhi agenda tahunan bidang kebudayaan di Kota Semarang, berbagai macam acara diselenggarakan di Kota Semarang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai leading sector penyelenggara ikut andil dalam event-event kebudayaan tersebut antara lain : Dugderan, Semarang Night Carnival, Gebyuran Bustaman, Semarang Jelajah Musik, Wayang orang dan Wayang Kulit.

2. Program pemasaran produk/jasa daerah, yang terdiri dari :

- Promosi pariwisata bersama (Daerah Hinterland).

Kerjasama promosi wisata bersama dengan daerah sekitar antara lain KEDUNGSEPUR dan Joglosemar.

- Food street festival-kawasan kuliner.

Kota Semarang terkenal akan keanekaragaman kuliner, yang bisa dilihat dari banyaknya spot kuliner di Kota Semarang seperti wisata kuliner Pecinan, arena kuliner alun-alun Semarang dan banyak spot pujasera. Festival kuliner ini juga biasanya dibarengi dengan pagelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner.

- Unit kerja promosi kota.

Unit kerja promosi bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan promosi seperti souvenir, calender of event, leaflet, cetak elektronik, media cetak juga mengelola sosial media Kota Semarang.

3. Program kemitraan usaha, yang terdiri dari :

- Fasilitasi starup lokal sektor musik, seni, pertunjukan film tematik setiap tahun dengan skala nasional.
- Semarang creative makerspace.

Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan kerja yang kolaboratif untuk belajar, berkreatifitas dan bertukar pengalaman menggunakan teknologi atau menggunakan alat kerja lainnya. Tempat pengembangan ide sampai ke produk jadi, sekaligus menjadi ruang pameran hasil produksi. Di dalam ruang tersebut terbuka untuk pelajar, umum dan pengusaha dengan difasilitasi 3D printers, laser cutters, mesin jahit dan lain sebagainya.

4. Peningkatan daya saing daerah, yang terdiri dari :

- Pengembangan *sportourism*.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penyelenggara event seni dan budaya selalu mengagendakan pertunjukan di setiap tahunnya sebagai upaya daya tarik pariwisata.
- Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk sektor musik dan seni.

Selain program-program prioritas yang menjadi arahan kepala daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mendorong terciptanya inovasi. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi di Dinas Kebudayaan Pariwisata telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yaitu Lunpia.

Aplikasi berbasis android yang dilengkapi dengan konten transportasi umum (BRT dan online transportasi) sehingga wisatawan langsung mengakses transportasi untuk menuju tempat pariwisata yang diinginkan.

Aplikasi tersebut juga membuka ruang promosi untuk stakeholder yang bergerak di industri pariwisata untuk mempromosikan lengkap produk dan event di aplikasi tersebut tanpa biaya atau gratis.

Informasi dan akses transportasi tersebut bekerjasama dengan Angkasa Pura, Joglo Semar, KEDUNGSEPUR, pariwisata dan ekonomi kreatif diantaranya seni pertunjukkan, fotografi dan desain grafis.

Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk kawasan lindung yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi taman hutan raya, kawasan cagar budaya, kawasan pantai berhutan bakau/mangrove dan kawasan pengungsian satwa. Kawasan yang ditetapkan sebagai taman hutan raya yaitu kawasan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati dan kawasan Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati, sedangkan pengelolaan taman hutan raya meliputi pengembangan tanaman dalam mendukung RTH Kota dan pengembangan kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi konservasi. Kawasan taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi serta pelestarian budaya berupa hutan konservasi dan tidak dapat dialihfungsikan. Kawasan cagar budaya meliputi :

1. Kawasan Kota Lama.
2. Kawasan Petudungan.
3. Kawasan Kampung Kulitan.
4. Kawasan Kampung Batik.
5. Kawasan Pecinan.
6. Kawasan Johar.
7. Kawasan Kampung Melayu.
8. Kawasan Kampung Kauman.
9. Kawasan Tugu Muda.
10. Kawasan Kampung Senjoyo.
11. Kawasan Sam Po Kong.
12. Kawasan Perumahan PJKA di Kedungjati.

13. Kawasan Makam Sunan Terboyo.

14. Kawasan Kampung Sekayu.

Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi pelestarian pola sosial budaya masyarakat, pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan. Pada kawasan budidaya yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu kawasan wisata. Rencana kawasan wisata meliputi :

1. Pengembangan dan peningkatan wisata bahari di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu;
2. Pengembangan dan peningkatan kawasan wisata Kebun Binatang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan;
3. Pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (agrowisata) berada di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen;
4. Pengembangan dan peningkatan wisata mainan anak di Kecamatan Candisari;
5. Pengembangan dan peningkatan wisata mainan air di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Mijen;
6. Pengembangan dan peningkatan wisata religi meliputi :
 - Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
 - Kawasan Gereja Blenduk di Kecamatan Semarang Utara;
 - Kuil Sam Po Kong di Kecamatan Semarang Barat;
 - Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
 - Kawasan Vihara Watugong di Kecamatan Banyumanik.
7. Pengembangan dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya meliputi :
 - Kampung Pecinan di Kecamatan Semarang Tengah;
 - Kampung Melayu di Kecamatan Semarang Tengah;
 - Museum Ronggowarsito di Kecamatan Semarang Barat;
 - Kawasan PRPP di Kecamatan Semarang Barat;

- Kawasan Maerokoco di Kecamatan Semarang Utara;
- Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;
- Kawasan Kampung Batik di Kecamatan Semarang Tengah;
- Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati;
- Bendungan Jatibarang dan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati;
- Lembah Sungai Garang di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik;
- Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit di Kecamatan Tugu;
- Taman lele di Kecamatan Ngaliyan;
- Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh di Kecamatan Candisari.

8. Pengembangan dan peningkatan wisata belanja di kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran.

Pada kawasan strategis sosial budaya yang harus dilindungi meliputi :

- Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
- Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
- Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati;
- Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat;
- Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara.

Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang meliputi :

- Penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
- Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.

Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah meliputi :

- Penataan kawasan masjid agung jawa tengah; dan
- Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan masjid agung jawa tengah.

Rencana penanganan kawasan Gedong Batu meliputi :

- Penataan kawasan Gedong Batu; dan
- Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Gedong Batu.

Rencana penanganan kawasan strategis Kota Lama meliputi :

- Pemeliharaan dan pelestarian bangunan;
- Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; dan
- Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan kota lama.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja ini selain mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga berpedoman pada Rencana Induk Kepariwisata yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025. Di dalam Bab 3 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah **Semarang Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Mampu Mendorong Pembangunan, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**. Dari visi tersebut dirumuskan misi pembangunan kepariwisataan Semarang yaitu :

1. Mengembangkan dan meningkatkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan;
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggung jawab;
3. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis, antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat

Ripparkot ini bertujuan sebagai dasar hukum pengambil kebijakan terkait pengembangan pariwisata di Kota Semarang. Gambaran lingkup substansi Ripparkot ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1

Gambaran Lingkup Substansi RIPPARKOT Semarang



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (2 indikator) dan indikator sasaran (6 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal” dan “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata”. Adapun indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Tingkat Pelestarian Warisan Budaya
- b. Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
- c. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara
- d. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara
- e. Tingkat Hunian Akomodasi
- f. Lama Tinggal Wisatawan
- g. Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 6 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 11 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 55.351.247.450,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 18.343.454.309,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 19.098.448.810,- untuk urusan wajib kebudayaan dan Rp

17.909.344.331,- untuk urusan pilihan pariwisata untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				37,441,903,119				40,409,359,406
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 % 100 % 100 %	18,343,454,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 % 100 % 100 % 100 %	20,361,375,000
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerjaadisbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	8 dokumen	1,014,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 dokumen	2,650,312
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	3 dokumen	201,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	729,952
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	298,550
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	322,550

2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	295,050
2 22 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	322,550
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Laporan	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	681,660
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	12,326,941,989	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	14,213,677,180
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	936 Orang/bulan	11,798,370,989	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		936 Orang/bulan	13,753,165,530
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Dokumen	528,083,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	459,840,000
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Laporan	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	298,550
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Laporan	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	200,550
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	162,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	172,550
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 Persen	332,527,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	6,000,000

2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	597 Orang	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		597 Orang	3,000,000
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	78 Orang	157,527,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78 Orang	3,000,000
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-Disbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	2,113,257,099	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	2,666,749,879
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	14 Paket	215,204,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Paket	193,223,129
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	15 Paket	90,320,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Paket	75,842,776
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	54 Paket	136,459,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54 Paket	156,329,818
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Paket	47,817,577	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	46,842,686
2 22 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	600 Laporan	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Laporan	1,332,215,000
2.22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	200 Laporan	493,386,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Laporan	449,989,000
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Dokumen	430,067,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	412,307,470
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	462,062,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	106,456,900
2 22 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Semarang, Semarang	22 Unit	172,072,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	50,000,000

		Lapangan yang Disediakan	Tengah, Sekayu						
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	4 Unit	289,990,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	26,456,900
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	1,800,544,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	1,623,270,504
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	850,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	862,796,880
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	950,454,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	760,473,624
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	1,307,106,101	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	1,742,570,225
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20 Unit	272,890,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	1,034,150,860
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Unit	824,984,598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	554,677,365
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Unit	209,230,703	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	151,492,000
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20%	10,463,354,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20%	10,402,710,000
		Seni Budaya							
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20 persen	2,511,018,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 persen	1,902,710,000
2 22 02 2.01	Pelindungan,	Jumlah Objek	Kota	10 Objek	2,511,018,230	PENDAPATAN		10 Objek	1,902,710,000

01	Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Semarang, Semarang Tengah, Sekayu			ASLI DAERAH (PAD)			
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20 persen	6,453,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 persen	6,000,000,000
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	7 objek	6,453,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 objek	6,000,000,000
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20 persen	1,498,436,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 persen	2,500,000,000
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2600 orang	1,498,436,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2600 orang	2,500,000,000
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20 persen	4,277,064,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 persen	5,928,424,000
2 22 02 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20 persen	4,277,064,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 persen	5,928,424,000
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	629 sertifikat	2,914,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		629 sertifikat	4,178,424,000
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	124 lembaga	1,362,184,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		124 lembaga	1,750,000,000
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	77.85 persen	3,395,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77.85 persen	2,572,712,000
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	77.85 persen	3,395,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77.85 persen	2,572,712,000
2 22 05 2.02	Pelindungan Cagar	Jumlah Objek Cagar	Kota	461 objek	3,395,000,000	PENDAPATAN		461 objek	2,572,712,000

01	Budaya	Budaya yang Dilindungi	Semarang, Semarang Tengah, Sekayu			ASLI DAERAH (PAD)			
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum yang sesuai standar Pengelolaan Museum yang sesuai standar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	963,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	1,144,138,406
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Museum yang terpenuhi dan terpelihara	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	963,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	1,144,138,406
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	963,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	1,144,138,406
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				17,909,344,331				33,800,119,442
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	13,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	27,843,731,442
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	78 buah	329,265,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78 buah	329,265,280
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Kajian Pengembangan Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	4 laporan	329,265,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	329,265,280
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1293191 orang	12,500,720,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1293191 orang	26,995,029,402
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Unit	12,500,720,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	26,995,029,402
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kota Semarang,	100 persen	315,587,400	PENDAPATAN ASLI		100 persen	165,010,400

	Kabupaten/Kota		Semarang Tengah, Sekayu			DAERAH (PAD)			
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Terwujudnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 kegiatan	57,505,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kegiatan	57,505,200
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 unit	200,577,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	50,000,000
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 kegiatan	57,505,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kegiatan	57,505,200
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	85 persen	354,426,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 persen	354,426,360
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Terlaksananya Bina Pelaku Usaha Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 laporan	354,426,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 laporan	354,426,360
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	3,498,424,331	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	4,026,854,000
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100 persen	3,498,424,331	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	4,026,854,000
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	16 dokumen	1,128,527,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 dokumen	1,342,284,318

3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	5 laporan	1,299,905,391	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 laporan	1,342,284,840
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	4 dokumen	1,069,991,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 dokumen	1,342,284,842
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	70 persen	910,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 persen	1,929,534,000
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	70 persen	910,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 persen	1,929,534,000
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	120 orang	393,682,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 orang	729,534,000
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	940 orang	517,238,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		940 orang	1,200,000,000
TOTAL					55,351,247,450				74,209,478,848

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

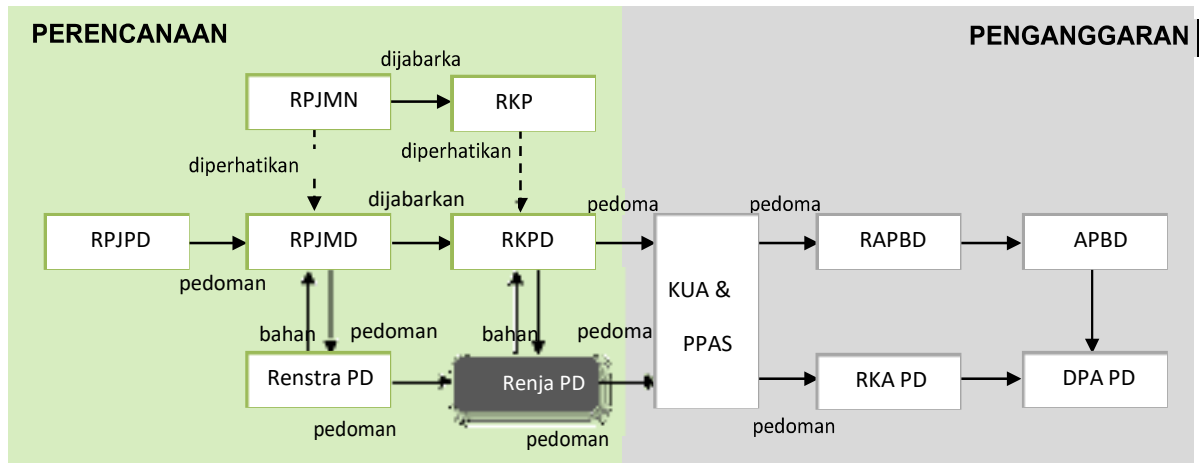
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Arsip

dan Perpustakaan Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- g. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- h. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kearsipan;
- i. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- j. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program dan kegiatan
- r. Surat Edaran Bersama Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0251/M.PPN/2005 dan 050/166/SJ, tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 OPD melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 15.042.949.000 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 12.857.547.158 atau sebesar 85,47%. Hal ini dikarenakan terdapat pengendalian belanja dan efisiensi pada perubahan APBD TA 2022

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100%	16,800.00	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100%	100.00	
		Rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00	-			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00	0.98.00	90
		Jumlah Rumah Pintar	193.00	193.00	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100%	50.00	50.00
		Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara	500.00	500.00			Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00	50.00	50.00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	91.67	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		100%	35.58%	35

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.23.02.2.0 1.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%			Jumlah e-library	77.00 lokasi	24.00	31
		Meningkatnya minat baca masyarakat	100.00 %	100.00			Jumlah koleksi e-book	10000.00 e-book	2500	25
2.23.02.2.0 1.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		100%	100.00%	2.23.02.2.0 1.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.25%	50
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/Pembinaan tentang pengelolaan perpustakaan dan rumah pintar	6.00 kegiatan	6.00			peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	10000.00 buku	18.926.00	190
2.23.02.2.0 1.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		100%	100.00%	2.23.02.2.0 1.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	66.67%	66
		Terlaksananya Rehab Rumah Pintar	1.00 Paket	1.00			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.00 keping/buku	50.00	75
2.23.02.2.0 1.08	Pengembangan Bahan Pustaka		100%	100.00%	2.23.02.2.0 1.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai		100%	450%	450

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
						dengan Standar Nasional Perpustakaan				
		terpenuhinya sarana prasarana berupa buku dan rak untuk Rumpin/Masyarakat	1.00 Paket	1.00			Pembinaan Perpustakaan Sekolah	20.00 lokasi	90	450
		Tersedianya buku yang dibutuhkan	6000.00 buku	6,000.00	2.23.02.2.0 1.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
2.23.02.2.0 1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		100%	100.00%			pembinaan perpustakaan khusus	40.00 lokasi	20.00	20.00
		terpenuhinya media informasi kegiatan perpustakaan arsip dan rumpin dalam 1 tahun	100.00 edisi	100.00	2.23.02.2.0 1.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
		Tersedianya buku yang dibutuhkan	6000.00 buku	6,000.00			Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/pustakawan	2.00 kali	1.00	1.00
2.23.02.2.0 1.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	2.23.02.2.0 1.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		100%	0.00%	0.00%
		Tersusunnya data dan informasi melalui	100.00 %	100.00			Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2.00 lokasi	0.00	0.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		kunjungan kerja perpustakaan								
2.23.02.2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	83.33	2.23.02.2.0 1.08	Pengembangan Bahan Pustaka		100%	85.00%	85.00%
2.23.02.2.0 2.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%			Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.00 eksemplar	200.00	100.00
		Terlaksananya kegiatan Perpusling	350.00 Lokasi	350.00	2.23.02.2.0 1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		100%	100.00%	100.00%
2.23.02.2.0 2.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		100%	100.00%			Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	500.00 eksemplar	100.00	100.00
		Jumlah buku yang ditukarkan	4300.00 buku	4,300.00	2.23.02.2.0 1.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%	100.00%
2.23.02.2.0 2.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		100%	50.00%			Tersusunnya data informasi dan statistik perpustakaan kota	2.00 ali/tahun	0.00	0.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Terlaksananya pameran buku	2.00 Kali	1.00	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100%	100.00			Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00	50.00	50.00
					2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	100%	25.00%	25.00%	
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerintahan berbasis elektronik	100.00	100.00			Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4.00 kegiatan	1.00	1.00
		Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan	19000.00	19,000.00	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	70.00%	70.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.24.02.2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00			persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20.00 Persen	14.00	14.00
2.24.02.2.0 1.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		100%	100.00%	2.23.02.2.0 2.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		100%	46.67%	46.67%
		Adanya pembuatan film/arsip sejarah yang ada di Kota Semarang	2.00 Paket	2.00			Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	150.00 orang	70.00	70.00
		Tersusunnya Perda Kearsipan	100.00 %	100.00	2.23.02.2.0 2.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		100%	53.33%	53.33%
2.24.02.2.0 1.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		100%	100.00%			Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	30.00 Persen	16.00	16.00
		Arsip yang disusutkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	19000.00 dokumen	19,000.00	2.23.02.2.0 2.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%	100.00%
2.24.02.2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00			Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	2.00 orang	2.00	100.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.24.02.2.0 2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		100%	100.00%	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100%	50.00	50.00
		Terlaksananya pengolahan arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip	10000.00 dokumen	10,000.00						
2.24.02.2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	100.00			Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00	50.00	50.00
2.24.02.2.0 3.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		100%	100.00%	2.23.03.2.0 1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Adanya Pembinaan Arsip Keliling Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kearsipan yang lebih bagi OPD	10000.00 Berkas	10,000.00			Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00	50.00	50.00
		Informasi / Data yang Up to Date / Terbaru	100.00 %	100.00	2.23.03.2.0 1.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		100%	100.00%	100.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.24.02.2.0 3.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%			Sosialisasi/Bin tek tentang naskah kuno	2.00 kali/tahun	2.00	2.00
		Adanya Kegiatan Pameran arsip 2 kali dalam setahun	2.00 Paket	2.00	2.23.03.2.0 1.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		100%	40.00%	40.00%
		Adanya Kegiatan Sosialisasi Tentang Arsip	1.00 Paket	1.00			Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	150.00 buah	60.00	60.00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100%	100.00	2.23.03.2.0 2	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
						Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00	50.00	50.00	
		Aksesibilitas/keter sediaan layanan informasi kearsipan	95.00	95.00	2.23.03.2.0 2.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		100%	50.00%	50.00%
		persentase jumlah arsip musnah	50.00	50.00			Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	100.00 buah	50.00	50.00
2.24.03.2.0 1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah		100%	100.00	2.23.03.2.0 2.02	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi		100%	100.00%	100.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
	Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					Budaya Etnis Nusantara				
2.24.03.2.0 1.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	100.00%			Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	100.00 buah	100.00	100.00
		Adanya penarikan/pendataan, penataan dan pengolahan arsip-arsip in aktif unit kerja di lingkungan Pemkot Semarang	10000 .00 doku men	10,000.0 0	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100%	50.00	50.00
2.24.03.2.0 4	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		100%	100.00						0
2.24.03.2.0 4.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		100%	100.00%			Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyte pemerin tahan berbasis elektronik	100.00	50.00	50.00
		Sistem Kearsipan Yang Lebih Baik/Digitalisasi Arsip	1.00 Paket	1.00	2.24.02.2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	100.00			Arsip arsip yang diarsipkan di	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						depo penyimpanan yang sudah ditangani			
					2.24.02.2.0 1.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		100%	25.00%	25.00%
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.0 0	100.00			Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00 Persen	25.00	25.00
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.0 0	100.00	2.24.02.2.0 1.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.0 0	100.00			Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00 OPD	30.00	30.00
X.XX.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100.00	2.24.02.2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
X.XX.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100.00%			Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00	50.00	50.00
		Terlaksanakannya Forum Konsultasi Publik	1.00 Paket	1.00	2.24.02.2.0 2.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli		100%	5.00%	5.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
						Arsip Terjaga Kepada ANRI				
		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja OPD	2.00 Dokumen	2.00			Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	100.00 berkas/roll/keping	5.00	5.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100.00%	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		100%	25.00%	25.00%
		RKA dan DPA OPD tersusun	2.00 Dokumen	2.00			Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60.00 OPD	15.00	15.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100.00%	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Adanya penyusunan laporan capaian kinerja OPD bulanan dan triwulanan	2.00 Dokumen	2.00			Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100.00%	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		100%	100.00%	100.00%
		Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP OPD	2.00 Dokumen	2.00			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10.00 Persen	10.00	10.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100.00	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga		100%	50.00%	50.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
						Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100.00%			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00 Persen	50.00	50.00
		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	100.00	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100%	50.00	50.00
		Terbayarnya TPP ASN	100.00 %	100.00			0			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100.00%			persentase jumlah arsip musnah	100.00	50.00	50.00
		Terbayarnya honor BP,BPP, PPTK, dll	100.00 %	100.00	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100.00%			Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00	50.00	50.00
		Tersusunnya CALK dan LPPD OPD	2.00 Dokumen	2.00	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		100%	100.00%			Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan	100.00 Persen	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
	Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD						akan dimusnahkan berdasarkan NSPK			
		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2.00 Dokumen	2.00	2.24.03.2.0 1.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	87.50			Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00 Persen	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100.00%	2.24.03.2.0 2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Peralatan atau komponen listrik dan lampu - lampu yang dibutuhkan tersedia	100.00 %	100.00			Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	100.00%	2.24.03.2.0 2.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		100%	46.67%	46.67%
		Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan yang dibutuhkan selama 1 th	100.00 %	100.00			Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	150.00 berkas	70.00	70.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100.00%	2.24.03.2.0 2.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		100%	25.00%	25.00%
		Tersedianya Alat Tulis Kantor yang	100.00 %	100.00			Presentase arsip akibat	40.00 Persen	10.00	10.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		dibutuhkan selama 1 tahun					bencana yang terselamatkan			
		Tersedianya masker untuk pencegahan Covid-19	100.0 0 %	100.00	2.24.03.2.0 3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		100%	50.00	50.00
X.XX.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100.00%			Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100.00	30.00	30.00
		Barang cetakan yang dibutuhkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang selama 1 tahun tersedia	100.0 0 %	100.00	2.24.03.2.0 3.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	87.00%	87.00%
X.XX.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	100.00%			Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	60.00 Persen	52.20	52.20
		Majalah dan surat kabar yang dibutuhkan tersedia	100.0 0 %	100.00	2.24.03.2.0 3.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100.00%			Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	60.00 Persen	30.00	30.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat-rapat	100.0 0 %	100.00	2.24.03.2.0 3.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100.00%			Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kecamatan	15.00	15.00
		Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	100.0 0 %	100.00	2.24.03.2.0 3.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		100%	50.00%	50.00%
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100.0 0 %	100.00			Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kelurahan	15.00	15.00
X.XX.01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	0.00%	2.24.03.2.0 4	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100.0 0 %	0.00			Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100.00	30.00	30.00
X.XX.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100.00	2.24.03.2.0 4.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		100%	20.00%	20.00%
X.XX.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100.00%			Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	200.00	200.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Sarana dan prasarana / perlengkapan yang dibutuhkan kantor tersedia	100.00 %	100.00	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		100%	25.00%	25.00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100.00			Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.00 berkas	250.00	250.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100.00%	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		100%	50.00	50.00
		Tersedianya biaya langganan telepon, air, listrik dan internet	100.00 %	100.00			Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100.00	30.00	30.00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100.00%	2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		100%	50.00%	50.00%
		Terjaganya kebersihan kantor di gd. Arsip Banyumanik dengan adanya jasa cleaning service	100.00 %	100.00			Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	500.00	500.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100.00	2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		100%	40.00%	40.00%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		100%	100.00%			Jumlah arsip alih media yang hilang	500.00 berkas	200.00	200.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Terjaganya kendaraan dinas	100.00 %	100.00	2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100.00%			Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1000.00 berkas	500.00	500.00
		Adanya pemeliharaan mesin dan alat-alat kantor	100.00 %	100.00	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		100%	50.00	50.00
		Terawat dan terhindarnya peralatan kerja dari kerusakan	100.00 %	100.00						0
		Terpeliharanya arsip, bahan perpustakaan dan perlengkapan kantor dari kerusakan	100.00 %	100.00			Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	90.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100.00%	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Terawatnya gedung perpustakaan / gedung arsip dari kerusakan	100.00 %	100.00			Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	90.00	25.00	25.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							dengan izin yang diberikan			
							Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5.00 SOP	2.00	2.00
					2.24.04.2.0 1.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		100%	60.00%	60.00%
							Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30.00 sk	18.00	18.00
					X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	50.00	50.00
							0			
							Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	50.00	50.00
							Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	50.00	50.00
							Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00	4.00	4.00
					X.XX.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	50.00%	50.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	50.00%	50.00%
							Jumlah RKA dan DPA OPD	2.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	50.00%	50.00%
							Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	60.00%	60.00%
							Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2.00 Dok	2.00	2.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	50.00	50.00
							Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	40.00%	40.00%
							Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	40.00	40.00
					X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	40.00%	40.00%
							Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	40.00	40.00
					X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	0.00%	0.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dok	0.00	0.00
					X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		100%	0.00%	0.00%
							Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dok	0.00	0.00
					X.XX.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	50.00	50.00
							Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	56.00%	56.00%
							Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00 Jenis	14.00	14.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	54.55%	54.55%
							Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00 Jenis	6.00	6.00
					X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	61.76%	61.76%
							Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00 Jenis	21.00	21.00
					X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	14.29%	14.29%
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7.00 Jenis	1.00	1.00
					X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	26.67%	26.67%
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15.00 Jenis	4.00	4.00
					X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	52.31%	52.31%
							Jumlah tamu yang berkunjung	65.00 Orang/bulan	34.00	52

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	52.00%	52.00%
							Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25.00 Kali/bulan	13.00	52
					X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	60.00%	60.00%
							Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10.00 Jenis	6.00	6.00
					X.XX.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	50.00	50.00
							Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	50.00%	50.00%
							Jumlah peralatan dan mesin lainya yang tersedia	4.00 Jenis	2.00	50
					X.XX.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	50.00	50.00
							Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	50.00%	50.00%
							Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12.00 bulan	6.00	50
					X.XX.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	35.00%	35.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00 Persen	35.00	35.00
					X.XX.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	50.00	50.00
							Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100.00%	100.00%
							Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1.00 unit	1.00	1.00
					X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	59.26%	59.26%
							Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27.00 unit	16.00	59

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	45.45%	45.45%
							Terpenuhinya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	11.00 unit	5.00	45
					X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100.00%	100
							Terpenuhinya pemeliharaan gedung arsip/perpustakaan	1.00 unit	1.00	100

Sumber, Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 2 Urusan (Perpusakaan dan Kearsipan), 4 Program dan 10 Indikator Kinerja.
 - b) 4 Program pada Renja 2021 adalah Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Serta Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Adapun 10 Indikator program tersebut adalah Rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Jumlah Rumah Pintar, Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara, Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerintahan berbasis elektronik, Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan, Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan, persentase jumlah arsip musnah, Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, cakupan pelayanan administrasi perkantoran.
 - d) Secara ringkas, kinerja pada tahun 2021 terlihat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yang berada pada range > 90%. Adapun keterangan capaian predikat kinerja seluruh program adalah Sangat Tinggi.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 Urusan, 6 Program dengan 8 indikator program.
 - b) Adapun 6 Program tersebut adalah Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip, Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- c) Adapun 8 Indikator tersebut adalah Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan, Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik, persentase jumlah arsip musnah, Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup, Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan, Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD.
- d) Secara ringkas, capaian target renstra 2021-2026 di tahun 2022 tentu belum menunjukkan angka yang memuaskan. Hal ini mengingat Renstra disusun untuk dicapai dalam jangka waktu yang cukup lama sementara tahun 2022 merupakan tahun-tahun awal perjalanan Renstra 2021-2026.
- e) Meskipun demikian, tentunya tidak semua target renstra *jauh panggang dari api*, artinya terdapat beberapa target renstra yang sampai tahun 2022 sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Misalnya pada Program Pembinaan Perpustakaan di mana target akhir adalah 1 dan angka tersebut sudah hampir dicapai pada tahun 2022 di mana terdapat rekrutmen sebanyak 47 CPNS baru yang meliputi pustakawan, arsiparis, dan umum.
- f) Adapun indikator-indikator lainnya tentunya sudah dan sedang berproses untuk mencapai target akhir Renstra. Peningkatan kapasitas SDM serta dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain tentu akan sangat berarti dalam pencapaian renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota
Semarang Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran
1	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp122.786.780	Rp122.786.780	Rp0
2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Rp27.742.790	Rp27.742.790	Rp0
3	Pengolahan dan Penyianan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp41.721.690	Rp41.721.690	Rp0
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan , pelestarian dan pendaftaran Naskah Kuno	Rp21.092.740	Rp21.092.740	Rp0
5	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp32.229.560	Rp32.229.560	Rp0
6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp1.495.522.735	Rp1.495.522.735	Rp0
7	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Rp198.557.210	Rp198.557.210	Rp0
8	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp47.928.810	Rp47.928.810	Rp0
9	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Rp16.959.815	Rp16.959.815	Rp0
10	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp21.536.070	Rp21.536.070	Rp0
11	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp39.902.450	Rp39.902.450	Rp0
12	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp274.547.930	Rp274.547.930	Rp0
13	Pengembangan Bahan Pustaka	Rp449.995.950	Rp449.995.950	Rp0
14	Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik	Rp0	Rp0	Rp0
15	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Rp0	Rp0	Rp0
16	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp145.549.819	Rp145.549.819	Rp0
17	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp191.501.331	Rp191.501.331	Rp0
18	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	Rp0
19	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.524.180	Rp7.524.180	Rp0

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran
20	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/kota	Rp51.519.170	Rp51.519.170	Rp0
21	Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0
22	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp292.884.830	Rp292.884.830	Rp0
23	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp57.155.910	Rp57.155.910	Rp0
24	Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rp153.965.270	Rp153.965.270	Rp0
25	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Rp31.826.840	Rp31.826.840	Rp0
26	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp36.026.810	Rp36.026.810	Rp0
27	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Rp13.910.000	Rp13.910.000	Rp0
28	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Rp0	Rp0	Rp0
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp10.674.203.303	Rp10.674.203.303	Rp0
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp232.852.289	Rp232.852.289	Rp0
31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp1.845.760	Rp1.845.760	Rp0
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp49.560.000	Rp49.560.000	Rp0
33	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp1.280.908	Rp1.280.908	Rp0
34	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp559.716	Rp559.716	Rp0
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.427.660	Rp1.427.660	Rp0
36	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp1.476.390	Rp1.476.390	Rp0
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp226.027.829	Rp226.027.829	Rp0
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp379.569.620	Rp379.569.620	Rp0
39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp337.838.824	Rp337.838.824	Rp0
40	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp203.129.800	Rp203.129.800	Rp0
41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp7.070.000	Rp7.070.000	Rp0
42	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp49.902.130	Rp49.902.130	Rp0
43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp23.150.282	Rp23.150.282	Rp0
44	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.075.888.328	Rp8.075.888.328	Rp0
45	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp147.560.096	Rp147.560.096	Rp0

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp118.263.600	Rp118.263.600	Rp0
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp39.949.998	Rp39.949.998	Rp0
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp494.199.860	Rp494.199.860	Rp0
49	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp15.273.600	Rp15.273.600	Rp0
50	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp17.852.470	Rp17.852.470	Rp0
51	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp248.807.000	Rp248.807.000	Rp0
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp717.143	Rp717.143	Rp0
53	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Rp11.575.240	Rp11.575.240	Rp0
54	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup	Rp0	Rp0	Rp0
55	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Rp11.575.240	Rp11.575.240	Rp0
56	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp260.574.270	Rp260.574.270	Rp0
57	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Rp21.081.780	Rp21.081.780	Rp0
58	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Rp0	Rp0	Rp0
59	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp28.126.960	Rp28.126.960	Rp0
60	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Rp9.000.000	Rp9.000.000	Rp0
61	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Rp7.494.170	Rp7.494.170	Rp0
62	Pendampingan penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Rp13.747.500	Rp13.747.500	Rp0
63	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp41.022.720	Rp41.022.720	Rp0
64	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Rp9.450.000	Rp9.450.000	Rp0
65	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp0	Rp0	Rp0
66	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp37.147.720	Rp37.147.720	Rp0
67	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp11.350.670	Rp11.350.670	Rp0
68	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp50.561.300	Rp50.561.300	Rp0

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran
69	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Rp31.591.450	Rp31.591.450	Rp0

Sumber : Diolah oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 6 program dan 63 Subkegiatan pada OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah sebesar Rp 12.857.547.158. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 12.857.547.158.

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 4.781.658.830
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 8.075.888.328.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI		
		IKK	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK)		45	46	47	48	49	44	45	46	47

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban		56	57	58	59	60	55	56	57	58
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya		77	78	79	80	81	76	77	78	79
	Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat		57	58	59	60	61	56	57	58	59
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		91	92	93	94	95	90	91	92	93
SASARAN RENSTRA											
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD	Meningkatnya nilai AKIP OPD		80	81	82	83	84	70	70.3	81	82

Sumber : Diolah oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif”** memiliki 4 indikator kinerja yaitu:
 1. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
4. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

Sementara tujuan **“Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab”** memiliki 1 indikator yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan public, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

b. Adapun Sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social dengan indicator Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 2) Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK dengan indicator Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik dengan indicator Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat dengan indicator Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 5) Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD dengan indicator meningkatnya nilai AKIP OPD, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam pelaksanaan fungsinya pada urusan perpustakaan dan urusan kearsipan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4**Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI KINERJA	PROYEKSI	
		2022	2022	2023	2024
1	Hasil penilaian tingkat kegemaran membaca masyarakat	46%	46%	47%	48%
2	Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun	24%	24%	25%	26%
3	Hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat	58%	58%	59%	60%
4	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	78%	78%	79%	80%
5	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	57%	57%	58%	59%
6	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148880	148880	149500	151000

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di urusan perpustakaan dan kearsipan, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun. Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun merupakan Perbandingan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Semarang.

Hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat merujuk pada Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Pada indikator ini, dukungan dari berbagai pihak diperlukan termasuk Dinas Pendidikan, Kemendikbud, Kopertis, serta Kemenag mengingat basis data sensus diperlukan untuk menghitung UPLM tersebut.

Sementara indikator Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40

dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengarah kepada persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu ternu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Indikator Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat merujuk pada tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban + tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota + tingkat kesesuaian kegiatan pencaian arsip statis dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Sedangkan Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi merujuk pada Jumlah arsip yang bernilai sejarah yang dipelihara baik lokal maupun nasional.

Selain dari aspek indikator di atas, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan RPJMD Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari table di bawah.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD

serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	98,91	100,0	100,0
		0	0	0	%	0	%	0	0
		%	%	%		%		%	%
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
		0	0	0	%	0	0	0	0
		%	%	%		%	%	%	%

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan

Selanjutnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang juga dapat dilihat dari upaya koordinasi dan bermitra dengan dewan dan masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023. Adapun matriksnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6

Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023

Materi Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan	
Pertanyaan Reses Dewan	Perlu menggalakkan gerakan gemar membaca, serta menambah koleksi pustaka di setiap perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah (pkb)
Usulan Non Fisik Hasil Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Tahun 2022	Sarpras perpustakaan anak Tambakaji RT0 RW0 Tambakaji sebesar Rp. 10.000.000,-
Usulan Non Fisik Hasil Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Tahun 2022	Pengadaan Perpustakaan untuk warga kelurahan Wonosari RT 1 RW 8 Wonosari Rp. 20.000.000,-

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2022.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat sinergi dan kepedulian antara dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Mitra Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun masyarakat langsung melalui Musrenbang tahun 2022. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dan dipertimbangkan untuk masuk dalam RKPD tahun 2023.

Adapun jawaban untuk Dewan terkait Gerakan gemar membaca adalah bahwa Gerakan gemar membaca selalu digalakkan oleh Dinas Arpus kota Semarang salah satunya dengan adanya kegiatan perpustakaan keliling dengan mobil pintar ke sekolah-sekolah (TK, SD, SMP), kegiatan pojok baca hebat (Kepocah), pembinaan perpustakaan sekolah yang bertujuan memberikan informasi tentang pentingnya budaya membaca sejak usia dini, pengembangan digital e book (Si Booky) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses koleksi buku digital tanpa perlu dating langsung ke perpustakaan daerah dll.

Sementara jawaban untuk perihal Musrenbang adalah sebagai berikut: (1) Selama ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang hanya memberikan bantuan hibah sarpras kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal dengan persyaratan utama berbadan hukum sesuai dengan perwal nomor 45 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan hibang dan bantuan social yang bersumber dari APBD; (2) Saat ini jumlah rumah pintar yang ada di Kota Semarang ada sekitar

192 namun yang aktif hanya beberapa dan pengadaan perpustakaan untuk warga kelurahan WOnosari RT 1 RW 8 kemungkinan akan diusulkan tahun 2023.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Perpindahan gedung perpustakaan Kota Semarang lama di pertengahan Tahun 2021 yang semula berada di Gedung Pandanaran lantai 2 Jl. Pemuda Nomor. 148 Semarang ke Gedung Arsip di Jl. Prof . Sudharto Nomor 116 Semarang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat / pemustaka hal ini disebabkan oleh salah satunya gedung perpustakaan Kota Semarang yang kurang representatif seperti layaknya Perpustakaan Daerah lain, karena Gedung tersebut menjadi satu area dengan Depo Arsip (perpustakaan berada di lantai 1 dengan luas hanya $\pm 130 \text{ m}^2$ dan Depo arsip terletak satu lokasi yaitu berada di lantai 2 dengan luas $\pm 180 \text{ m}^2$);
- b. Selain itu, Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 2015, pasal 17 huruf f dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk peruntukan Depo Arsip tidak diperbolehkan menjadi satu dengan area kerja/perkantoran;
- c. Ditambah lagi, hasil pengawasan kearsipan eksternal Pemerintah Kota Semarang tanggal 21 Desember Tahun 2021 uraian hasil pengawasan pada point 28 dengan aspek/komponen yang dinilai terkait ruang penyimpanan arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum memenuhi kriteria yang diharapkan yaitu ruang penyimpanan arsip statis diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya sehingga adanya rekomendasi dari tim pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah yang harus dipenuhi

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perpustakaan dan kearsipan diantaranya:

- a. Masih belum optimalnya kehadiran Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Kecamatan
- b. Tidak semua OPD di kota Semarang memiliki pengelolaan arsip dengan baik, termasuk Sarana Prasarana maupun SDM kearsipan
- c. Masih terdapatnya arsip-arsip OPD yang dialihmediakan, tata naskah dinas belum sesuai dengan keseragaman ANRI

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Arsip dan Perpustakaan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif**”. Namun sebagai OPD yang memiliki urusan kearsipan dan perpustakaan, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki kewajiban dalam hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Kota Semarang			Rp23.798.535.035	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Kota Semarang			Rp14.584.496.882	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	01.00	Rp2.176.378.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,98.00	-	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00.00	Rp1.616.378.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00.00	-	-
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang			Rp603.515.972	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang			Rp260.973.780	
	Kota Semarang	Jumlah koleksi e-book	11000.00	Rp303.514.604		Kota Semarang	Jumlah koleksi e-book	11000.00	-	-
	Kota Semarang	Jumlah e-library	102.00.00	Rp300.001.368		Kota Semarang	Jumlah e-library	102.00.00	-	-
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp125.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp64.875.810	-

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	11000.00	Rp125.000.000		Kota Semarang	peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	11000.00	-	-
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp153.848.506	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp94.584.010	-
	Kota Semarang	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah/ unik	100.00.00	Rp153.848.506		Kota Semarang	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah/ unik	100.00.00	-	-
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang			Rp75.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang			Rp29.369.690	
	Kota Semarang	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	25.00.00	Rp75.000.000		Kota Semarang	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	25.00.00	-	
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp75.000.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp20.441.100	
	Kota Semarang	pembinaan perpustakaan khusus	60.00.00	Rp75.000.000		Kota Semarang	pembinaan perpustakaan khusus	60.00.00	-	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp75.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp22.516.820	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/pustakawan	02.00	Rp75.000.000		Kota Semarang	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/pustakawan	02.00	-	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp75.000.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp12.159.930	
	Kota Semarang	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	02.00	Rp75.000.000		Kota Semarang	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	02.00	-	
Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang			Rp200.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang			Rp306.573.300	
	Kota Semarang	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.000	Rp200.000.000		Kota Semarang	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.000	-	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang			Rp194.013.522	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang			Rp37.243.480	
	Kota Semarang	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	1500.000	Rp194.013.522		Kota Semarang	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	1500.000	-	
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp40.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp71.681.940	
	Kota Semarang	Tersusunnya data informasi dan statistik perpustakaan kota	02.00	Rp40.000.000		Kota Semarang	Tersusunnya data informasi dan statistik perpustakaan kota	02.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00.00	Rp560.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00.00	-	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang			Rp60.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang			Rp101.554.070	
	Kota Semarang	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	04.00	Rp60.000.000		Kota Semarang	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	04.00	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp310.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp85.175.527	
	Kota Semarang	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40.00.00	Rp310.000.000		Kota Semarang	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40.00.00	-	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang			Rp60.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang			Rp131.410.220	
	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	175.00.00	Rp60.000.000		Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	175.00.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang			Rp80.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang			Rp34.025.680	
	Kota Semarang	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	35.00.00	Rp80.000.000		Kota Semarang	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	35.00.00	-	
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp50.000.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp35.336.580	
	Kota Semarang	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	03.00	Rp50.000.000		Kota Semarang	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	03.00	-	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00.00	Rp270.503.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00.00	-	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00.00	Rp160.000.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00.00	-	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang			Rp80.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang			38.916.150	
	Kota Semarang	Sosialisasi/Bin tek tentang naskah kuno	02.00	Rp80.000.000		Kota Semarang	Sosialisasi/Bin tek tentang naskah kuno	02.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang			Rp80.000.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang			3.521.220	
	Kota Semarang	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	200.00.00	Rp80.000.000		Kota Semarang	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	200.00.00	-	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00.00	Rp110.503.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00.00	-	
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang			Rp50.000.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang			Rp15.254.920	
	Kota Semarang	Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	150.00.00	Rp50.000.000		Kota Semarang	Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	150.00.00	-	
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang			Rp60.503.000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang			Rp30.723.643	
	Kota Semarang	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	150.00.00	Rp60.503.000		Kota Semarang	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	150.00.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	Rp20.296.043.035	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	-	
	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00			Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	-	
	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00.00			Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00.00	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	08.00	Rp129.092.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	08.00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			Rp5.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			Rp4.878.000	
	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	02.00	Rp5.500.000		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	02.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			Rp2.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			Rp1.400.440	
	Kota Semarang	Jumlah RKA dan DPA OPD	02.00	Rp2.600.000		Kota Semarang	Jumlah RKA dan DPA OPD	02.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			Rp57.496.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			Rp908.380	
	Kota Semarang	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	02.00	Rp57.496.100		Kota Semarang	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	02.00	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			Rp63.495.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			Rp705.760	
	Kota Semarang	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	02.00	Rp6.000.000		Kota Semarang	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	02.00	-	
	Kota Semarang	Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	05.00	Rp57.495.900		Kota Semarang	Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	05.00	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00.00	Rp17.284.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00.00	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			Rp17.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			Rp9.128.481.882	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00.00	Rp17.200.000.000		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00.00	-	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			Rp80.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			Rp199.360.000	
	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00.00	Rp80.000.000		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			Rp2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			Rp1.170.160	
	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	01.00	Rp2.250.000		Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	01.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang			Rp2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang			Rp1.311.520	
	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	01.00	Rp2.250.000		Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	01.00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	Rp874.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang			Rp32.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang			Rp25.659.959	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00.00	Rp32.000.000		Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00.00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang			Rp57.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang			Rp18.482.067	
	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00	Rp57.500.000		Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			Rp89.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			Rp22.084.831	
	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00.00	Rp89.500.000		Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00.00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang			Rp85.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang			Rp18.981.626	
	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	07.00	Rp85.000.000		Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	07.00	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang			Rp55.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang			Rp14.400.000	
	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15.00	Rp55.000.000		Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15.00	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			Rp55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			Rp24.300.000	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	70.00.00	Rp55.000.000		Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	70.00.00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			Rp50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			Rp205.615.240	
	Kota Semarang	Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25.00.00	Rp50.000.000		Kota Semarang	Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25.00.00	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			Rp450.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			Rp571.836.846	
	Kota Semarang	Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10.00	Rp450.000.000		Kota Semarang	Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10.00	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	Rp110.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			Rp110.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			Rp54.212.044	
	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	05.00	Rp110.000.000		Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	05.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	Rp838.451.035	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			Rp230.219.035	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			Rp257.332.112	
	Kota Semarang	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12.00	Rp230.219.035		Kota Semarang	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12.00	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			Rp608.232.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			Rp471.450.000	
	Kota Semarang	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00.00	Rp608.232.000		Kota Semarang	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00.00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00.00	Rp1.060.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00.00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			Rp100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			Rp36.318.180	
	Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	02.00	Rp100.000.000		Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	02.00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			Rp630.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			Rp490.608.960	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27.00.00	Rp630.000.000		Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27.00.00	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			Rp210.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			Rp116.306.140	
	Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	12.00	Rp210.000.000		Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	12.00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang			Rp120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang			Rp605.890.075	
	Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan gedung arsip/ perpustakaan	01.00	Rp120.000.000		Kota Semarang	Terpenuhinya pemeliharaan gedung arsip/ perpustakaan	01.00	-	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100.00.00	Rp581.729.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100.00.00	-	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00.00	Rp201.729.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00.00	-	
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang			Rp65.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang			Rp65.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00.00	Rp65.000.000		Kota Semarang	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00.00	-	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang			Rp65.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang			Rp44.200.000	
	Kota Semarang	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100.00.00	Rp65.000.000		Kota Semarang	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100.00.00	-	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp71.729.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp107.719.010	
	Kota Semarang	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00.00	Rp71.729.000		Kota Semarang	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00.00	-	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00.00	Rp160.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00.00	-	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang			Rp65.000.000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang			Rp44.074.300	
	Kota Semarang	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	105.00.00	Rp65.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	105.00.00	-	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang			Rp95.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang			Rp93.920.000	
	Kota Semarang	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60.00.00	Rp95.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60.00.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00.00	Rp220.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00.00	-	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang			Rp70.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang			Rp5.891.030	
	Kota Semarang	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	20.00	Rp70.000.000		Kota Semarang	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	20.00	-	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp150.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp215.686.650	
	Kota Semarang	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00.00	Rp150.000.000		Kota Semarang	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00.00	-	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100.00.00	Rp435.795.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100.00.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00.00	Rp90.000.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00.00	-	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang			Rp58.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang			Rp34.200.000	
	Kota Semarang	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100.00.00	Rp58.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100.00.00	-	
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang			Rp32.000.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang			Rp21.609.690	
	Kota Semarang	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00.00	Rp32.000.000		Kota Semarang	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00.00	-	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00.00	Rp44.000.000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00.00	-	
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang			Rp22.000.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang			Rp16.597.120	
	Kota Semarang	Jumlah arsip akibat bencana yang	200.00.00	Rp22.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip akibat bencana yang	200.00.00	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
		teridentifikasi dan terevaluasi					teridentifikasi dan terevaluasi			
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang			Rp22.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang			Rp15.001.620	
	Kota Semarang	Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	50.00.00	Rp22.000.000		Kota Semarang	Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	50.00.00	-	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70.00.00	Rp91.795.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70.00.00	-	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp22.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp7.778.500	
	Kota Semarang	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	70.00.00	Rp22.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	70.00.00	-	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp25.795.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			Rp9.500.000	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Kota Semarang	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	70.00.00	Rp25.795.000		Kota Semarang	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	70.00.00	-	
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang			Rp22.000.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang			Rp7.580.720	
	Kota Semarang	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	05.00	Rp22.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	05.00	-	
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang			Rp22.000.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang			Rp11.217.320	
	Kota Semarang	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	05.00	Rp22.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	05.00	-	
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70.00.00	Rp116.000.000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70.00.00	-	
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang			Rp58.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang			Rp51.545.390	
	Kota Semarang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00.00	Rp58.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00.00	-	
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai	Kota Semarang			Rp58.000.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai	Kota Semarang			Rp77.577.830	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					
	Kota Semarang	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.000	Rp58.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.000	-	
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70.00.00	Rp94.000.000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70.00.00	-	
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang			Rp38.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang			Rp19.100.000	
	Kota Semarang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.000	Rp38.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.000	-	
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang			Rp28.000.000	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang			Rp19.999.980	
	Kota Semarang	Jumlah arsip alih media yang hilang	500.000	Rp28.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip alih media yang hilang	500.000	-	
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang			Rp28.000.000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang			Rp19.399.990	
	Kota Semarang	Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1000.000	Rp28.000.000		Kota Semarang	Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1000.000	-	

Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00.00	Rp38.087.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00.00	-	
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60.00.00	Rp38.087.000	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60.00.00	-	
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang			Rp21.000.000	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang			Rp17.287.870	
	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	05.00	Rp21.000.000		Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	05.00	-	
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang			Rp17.087.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang			-	
	Kota Semarang	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30.00.00	Rp17.087.000		Kota Semarang	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30.00.00	Rp11.577.770	

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Penjelasan Tabel 2.5

Dari Tabel di atas dapat diamati hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.798.535.035, akan tetapi disetujui sebesar Rp. 14.584.489.882,-.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2023 memiliki 6 Program yakni: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip.
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebanyak 19 Kegiatan dengan 63 Sub Kegiatan.
4. Sebagai tambahan informasi dari table yang disajikan, bahwa pada tahun 2023 dalam rangka pengarusutamaan gender, Dinas Arsip memiliki agenda pemilihan duta baca yang berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan untuk menunjukkan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, agenda pengarusutamaan gender juga diwujudkan melalui pemberian penghargaan Bunda Literasi kepada Ibu Walikota Semarang serta kepada Ibu-Ibu Camat dan Ibu-Ibu Lurah yang ada di kota Semarang dengan jumlah kurang lebih 177 perempuan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

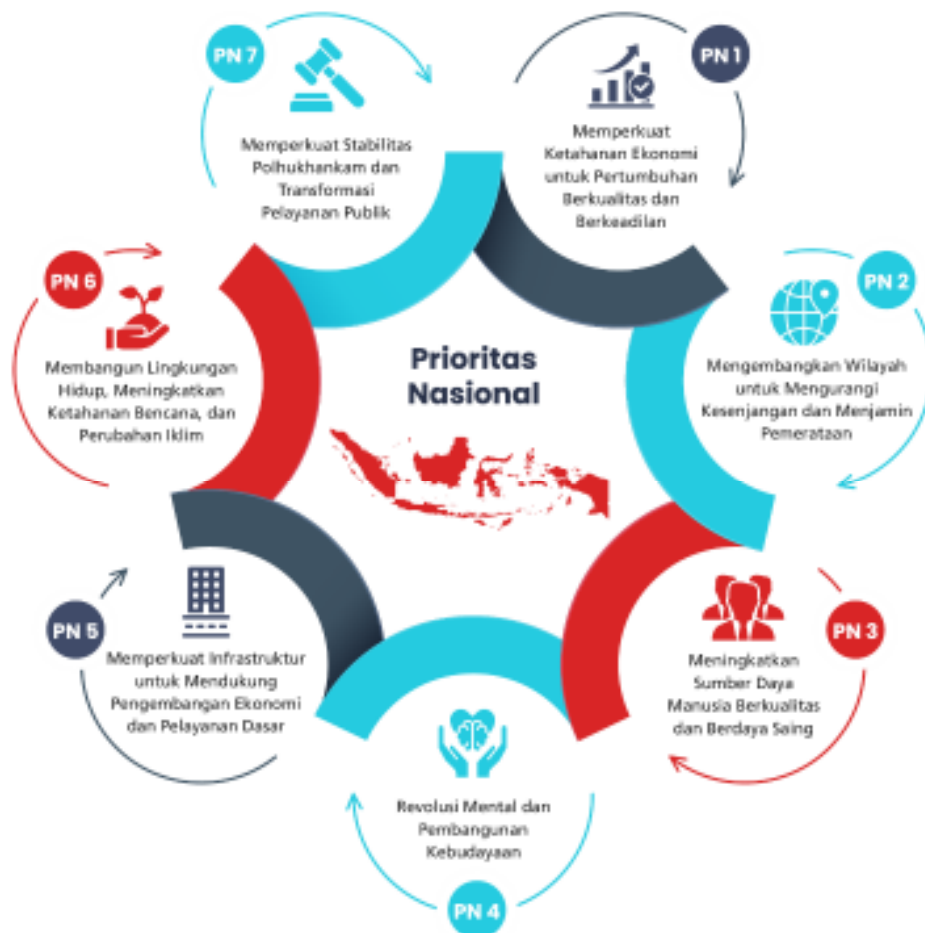
Khusus untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada OPD Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk

- Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan memiliki kewajiban dalam pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif”

dan

“Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab”

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun
- b. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban
- c. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya
- d. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
- b. Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK
- c. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik
- d. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat
- e. Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SATUAN TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN :		
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK)	47
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	58
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	79
	Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat	59
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	93
SASARAN :		
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100
Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	100
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	100
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100
Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD	Meningkatnya nilai AKIP OPD	82

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang bertugas dalam hal Indikator Sasaran PJMD yakni Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Namun secara khusus, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran dalam pencapaian Misi Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial serta Misi Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 13 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.584.496.882,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 9.128.481.882,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 5.456.015.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 OPD Kota Semarang

Kode	Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.23.2. 24.0.0 0.01.0 000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					14.584.496.882	APBD Kota Semarang		17.501.396.258	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.668.032.092	APBD Kota Semarang		16.401.638.510	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.307.921.937	APBD Kota Semarang		1.569.506.324	
2.23.02 .2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan				920.419.860	APBD Kota Semarang		1.104.503.832	
2.23.02 .2.01.0 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kota Semarang	5.00	Layanan	260.973.780	APBD Kota Semarang	5.00	313.168.536	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
			Kota Sema rang				APBD Kota Semara ng		-	
2.23.02 .2.01.0 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kota Sema rang	5.00	Perpust akaan	64.875.810	APBD Kota Semara ng	5.00	77.850.972	
2.23.02 .2.01.0 3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kota Sema rang	100.0 0	Eksemp lar	94.584.010	APBD Kota Semara ng	100.00	113.500.812	
2.23.02 .2.01.0 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Sema rang	5.00	Perpust akaan	29.369.690	APBD Kota Semara ng	5.00	35.243.628	
2.23.02 .2.01.0 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Sema rang	5.00	Perpust akaan	20.441.100	APBD Kota Semara ng	5.00	24.529.320	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.23.02 .2.01.0 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	60.00	Orang	22.516.820	APBD Kota Semara ng	60.00	27.020.184	
2.23.02 .2.01.0 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kota Sema rang	5.00	Layana n	12.159.930	APBD Kota Semara ng	5.00	14.591.916	
2.23.02 .2.01.0 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Kota Sema rang	200.0 0	Eksem plar	306.573.300	APBD Kota Semara ng	200.00	367.887.960	
2.23.02 .2.01.0 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kota Sema rang	100.0 0	Eksem plar	37.243.480	APBD Kota Semara ng	100.00	44.692.176	
2.23.02 .2.01.1 0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	12.00	Dokum en	71.681.940	APBD Kota Semara ng	12.00	86.018.328	
2.23.02 .2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan literasi pada masyarkat serta kebermanfaatannya				387.502.077	APBD Kota Semara ng		465.002.492	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.23.02 .2.02.0 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kota Sema rang	15.00	Lokus	101.554.070	APBD Kota Semara ng	15.00	121.864.884	
2.23.02 .2.02.0 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	20.00	Perpust akaan	85.175.527	APBD Kota Semara ng	20.00	102.210.632	
2.23.02 .2.02.0 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kota Sema rang	5.00	Orang	131.410.220	APBD Kota Semara ng	5.00	157.692.264	
2.23.02 .2.02.0 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kota Sema rang	5.00	Perpust akaan	34.025.680	APBD Kota Semara ng	5.00	40.830.816	
2.23.02 .2.02.0 5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kota Sema rang	2.00	Orang	35.336.580	APBD Kota Semara ng	2.00	42.403.896	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					88.415.933	APBD Kota Semara ng		106.099.120	
2.23.03 .2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota				42.437.370	APBD Kota Semara ng		50.924.844	
2.23.03 .2.01.0 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Sema rang	5.00	Orang	38.916.150	APBD Kota Semara ng	5.00	46.699.380	
2.23.03 .2.01.0 2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Sema rang	5.00	Eksemp lar	3.521.220	APBD Kota Semara ng	5.00	4.225.464	
2.23.03 .2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah					45.978.563	APBD Kota Semara ng		55.174.276	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
	Daerah Kabupaten/Kota									
2.23.03 .2.02.0 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kota Sema rang	2.00	Eksemp lar	15.254.920	APBD Kota Semara ng	2.00	18.305.904	
2.23.03 .2.02.0 2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kota Sema rang	5.00	Eksemp lar	30.723.643	APBD Kota Semara ng	5.00	36.868.372	
	NON URUSAN						APBD Kota Semara ng		-	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.271.694.222	APBD Kota Semara ng		14.726.033.066	
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.892.580	APBD Kota Semara ng		9.471.096	
X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Sema rang	3.00	Dokum en	4.878.000	APBD Kota Semara ng	3.00	5.853.600	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
X.XX.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Sema rang	2.00	Dokum en	1.400.440	APBD Kota Semara ng	2.00	1.680.528	
X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Sema rang	4.00	Lapora n	908.380	APBD Kota Semara ng	4.00	1.090.056	
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Sema rang	8.00	Lapora n	705.760	APBD Kota Semara ng	8.00	846.912	
			Kota Sema rang				APBD Kota Semara ng		-	
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.330.323.562	APBD Kota Semara ng		11.196.388.274	
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Sema rang	94.00	Orang/ bulan	9.128.481.882	APBD Kota Semara ng	94.00	10.954.178.258	
X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Sema rang	12.00	Dokum en	199.360.000	APBD Kota	12.00	239.232.000	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Tugas ASN						Semara ng			
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Sema rang	4.00	Lapora n	1.170.160	APBD Kota Semara ng	4.00	1.404.192	
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Kota Sema rang	12.00	Lapora n	1.311.520	APBD Kota Semara ng	12.00	1.573.824	
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					901.360.569	APBD Kota Semara ng		1.081.632.683	
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Sema rang	3.00	Paket	25.659.959	APBD Kota Semara ng	3.00	30.791.951	
X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Sema rang	3.00	Paket	18.482.067	APBD Kota Semara ng	3.00	22.178.480	
X.XX.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Sema rang	3.00	Paket	22.084.831	APBD Kota Semara ng	3.00	26.501.797	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Sema rang	2.00	Paket	18.981.626	APBD Kota Semara ng	2.00	22.777.951	
X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Sema rang	5.00	Dokum en	14.400.000	APBD Kota Semara ng	5.00	17.280.000	
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Kota Sema rang	12.00	Lapora n	24.300.000	APBD Kota Semara ng	12.00	29.160.000	
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sema rang	12.00	Lapora n	205.615.240	APBD Kota Semara ng	12.00	246.738.288	
X.XX.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Sema rang	12.00	Dokum en	571.836.846	APBD Kota Semara ng	12.00	686.204.215	
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					54.212.044	APBD Kota Semara ng		65.054.453	
X.XX.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Sema rang	20.00	Unit	54.212.044	APBD Kota Semara ng	20.00	65.054.453	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					728.782.112	APBD Kota Semara ng		874.538.534	
X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Sema rang	12.00	Lapora n	257.332.112	APBD Kota Semara ng	12.00	308.798.534	
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Sema rang	12.00	Lapora n	471.450.000	APBD Kota Semara ng	12.00	565.740.000	
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.249.123.355	APBD Kota Semara ng		1.498.948.026	
X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Sema rang	5.00	Unit	36.318.180	APBD Kota Semara ng	5.00	43.581.816	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Sema rang	12.00	Unit	490.608.960	APBD Kota Semara ng	12.00	588.730.752	
X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Sema rang	10.00	Unit	116.306.140	APBD Kota Semara ng	10.00	139.567.368	
X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Sema rang	1.00	Unit	605.890.075	APBD Kota Semara ng	1.00	727.068.090	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					916.464.790	APBD Kota Semara ng		1.099.757.748	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					576.490.990	APBD Kota Semara ng		691.789.188	
2.24.02 .2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					216.919.010	APBD Kota Semara ng		260.302.812	
2.24.02 .2.01.0 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kota Sema rang	1000. 00	Berkas	65.000.000	APBD Kota	1000.00	78.000.000	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
							Semara ng			
2.24.02 .2.01.0 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Sema rang	5000. 00	Berkas	44.200.000	APBD Kota Semara ng	5000.00	53.040.000	
2.24.02 .2.01.0 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	31.00	Lapora n	107.719.010	APBD Kota Semara ng	31.00	129.262.812	
2.24.02 .2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					137.994.300	APBD Kota Semara ng		165.593.160	
2.24.02 .2.02.0 1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kota Sema rang	250.0 0	Arsip	44.074.300	APBD Kota Semara ng	250.00	52.889.160	
2.24.02 .2.02.0 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kota Sema rang	500.0 0	Arsip	93.920.000	APBD Kota Semara ng	500.00	112.704.000	
2.24.02 .2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					221.577.680	APBD Kota Semara ng		265.893.216	
2.24.02 .2.03.0 1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Sema rang	100.0 0	Penggu na	5.891.030	APBD Kota Semara ng	100.00	7.069.236	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota melalui JIKN									
2.24.02 .2.03.0 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	31.00	Lapora n	215.686.650	APBD Kota Semara ng	31.00	258.823.980	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					311.108.160	APBD Kota Semara ng		373.329.792	
2.24.03 .2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					55.809.690	APBD Kota Semara ng		66.971.628	
2.24.03 .2.01.0 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	Kota Sema rang	5000. 00	Arsip	34.200.000	APBD Kota Semara ng	5000.00	41.040.000	
2.24.03 .2.01.0 2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kota Sema rang	2500. 00	Berkas	21.609.690	APBD Kota Semara ng	2500.00	25.931.628	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.24.03 .2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota					31.598.740	APBD Kota Semarang		37.918.488	
2.24.03 .2.02.0 1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kota Sema rang	500.0 0	Arsip	16.597.120	APBD Kota Semarang	500.00	19.916.544	
2.24.03 .2.02.0 2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kota Sema rang	500.0 0	Arsip	15.001.620	APBD Kota Semarang	500.00	18.001.944	
2.24.03 .2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					36.076.540	APBD Kota Semarang		43.291.848	
2.24.03 .2.03.0 1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	7.00	Daftar	7.778.500	APBD Kota Semarang	7.00	9.334.200	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.24.03 .2.03.0 2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Sema rang	7.00	Arsip	9.500.000	APBD Kota Semara ng	7.00	11.400.000	
2.24.03 .2.03.0 3	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Sema rang	100.0 0	Arsip	7.580.720	APBD Kota Semara ng	100.00	9.096.864	
2.24.03 .2.03.0 4	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Sema rang	100.0 0	Arsip	11.217.320	APBD Kota Semara ng	100.00	13.460.784	
2.24.03 .2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					129.123.220	APBD Kota Semara ng		154.947.864	
2.24.03 .2.04.0 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Kota Sema rang	250.0 0	Arsip	51.545.390	APBD Kota Semara ng	250.00	61.854.468	
2.24.03 .2.04.0 2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Sema rang	376.0 0	Arsip	77.577.830	APBD Kota Semara ng	376.00	93.093.396	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
	Penjaminan Keabsahan Arsip									
2.24.03 .2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					58.499.970	APBD Kota Semarang		70.199.964	
2.24.03 .2.05.0 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kota Semarang	500.00	Arsip	19.100.000	APBD Kota Semarang	500.00	22.920.000	
2.24.03 .2.05.0 2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	500.00	Arsip	19.999.980	APBD Kota Semarang	500.00	23.999.976	
2.24.03 .2.05.0 3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kota Semarang	500.00	Arsip	19.399.990	APBD Kota Semarang	500.00	23.279.988	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					28.865.640	APBD Kota Semarang		34.638.768	
2.24.04 .2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					28.865.640	APBD Kota Semarang		34.638.768	

Kode	Program/Keg/S ubKeg	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Targ et	Satua n	PAGU INDIKATIF	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.24.04 .2.01.0 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Kota Sema rang	5.00	SOP	17.287.870	APBD Kota Semara ng	5.00	20.745.444	
2.24.04 .2.01.0 2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Sema rang	250.0 0	Arsip	11.577.770	APBD Kota Semara ng	250.00	13.893.324	
JUMLAH						14.584.496.882			17.501.396.258	

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Dari Tabel di atas, dapat dicermati beberapa hal termasuk rencana tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2024. Adapun sekelumit deskripsi adalah sebagai berikut:

1. Total pagu anggaran untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.584.496.882,- ;
2. Anggaran tersebut digunakan untuk **belanja langsung** sebesar Rp. 9.128.481.882,- sementara untuk **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 5.456.015.000,-. Anggaran tersebut tentunya meningkat dibandingkan dengan anggaran yang disediakan pada tahun sebelumnya sebagai berikut **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 4.781.658.830 **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 8.075.888.328.
3. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
4. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 13 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
5. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2023 terdapat perubahan indikator subkegiatan yang bersumber dari aturan nomenklatur Kepmen 050-5889, misalnya pada Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik di mana menggunakan indikator terbaru yakni Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management). Sehingga, Dinas Arsip dan Perpustakaan perlu menyiapkan Langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan subkegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
6. Pada tahun 2024, yang merupakan tahun percepatan pencapaian target dapat dilihat bahwa setidaknya diperlukan estimasi penambahan anggaran sebesar 20 persen pada tiap-tiap subkegiatan untuk mencapai percepatan keberhasilan pencapaian.
7. Catatan tambahan pada tahun 2024, perihal penambahan anggaran belum mempertimbangkan perihal pembangunan / rehab / renov / perluasan Gedung mengingat Gedung perpustakaan menjadi salah satu isu sentral

dalam pelayanan perpustakaan dan dukungan pencapaian tujuan baik secara langsung maupun tak langsung.

8. Sebagai tambahan informasi dari table yang disajikan, bahwa pada tahun 2023 dalam rangka pengarusutamaan *gender*, Dinas Arsip memiliki agenda pemilihan duta baca yang berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan untuk menunjukkan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, agenda pengarusutamaan *gender* juga diwujudkan melalui pemberian penghargaan Bunda Literasi kepada Ibu Walikota Semarang serta kepada Ibu-Ibu Camat dan Ibu-Ibu Lurah yang ada di kota Semarang dengan jumlah kurang lebih 177 perempuan demi peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Arsip dan perpustakaan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Arsip dan perpustakaan ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, di mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Arsip dan perpustakaan;
3. Penyusunan Renja Dinas Arsip dan perpustakaan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Arsip dan perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

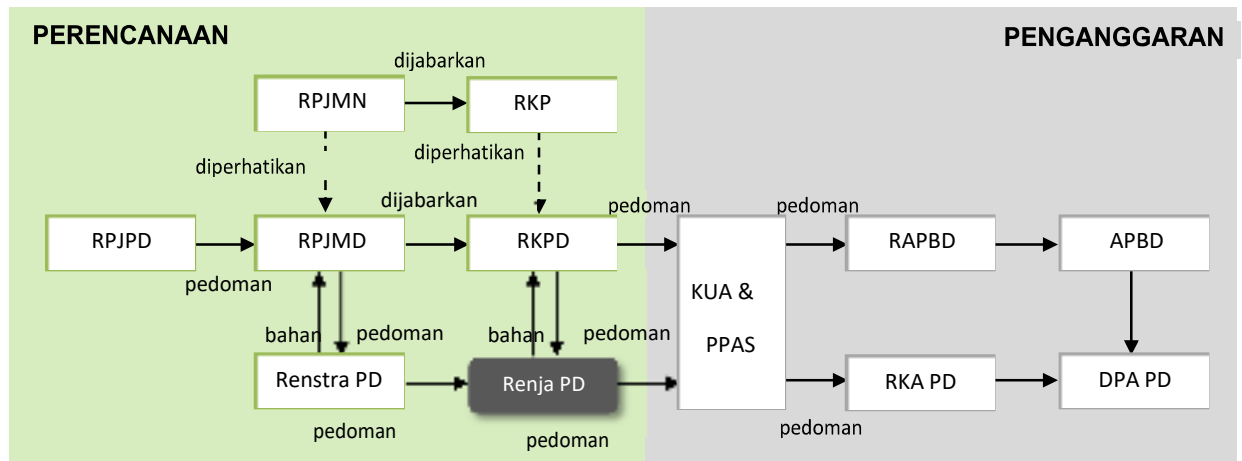
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun

2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perikanan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Perikanan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Perikanan Kota Semarang melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp12.348.585.774,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp11.037.849.407,00 atau sebesar 89,39%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Perikanan Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen LKjIP dan LKPJ	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap									
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	- Honorarium Non ASN - Jumlah Kajian Jasa Konsultasi - Jumlah Nelayan Tervalidasi - Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG - Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Magang Nelayan - Restocking								
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- Forum KUB Nelayan - Gerakan Bersih Pantai dan Laut - Pelatihan Nelayan - Sosialisasi Nelayan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Fasilitasi Pembangunan TPI - Honorarium Non ASN TPI - Monev TPI - Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI - Pendataan Perikanan Tangkap - Sarpras Pengelolaan TPI - Sosialisasi Optimalisasi	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		TPI								
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	- Honorarium Non ASN - Panen Raya Ikan - Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayuran dalam Ember (BUDIKDAMBER) - Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam terpal - Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau - Pelatihan Teknologi Pakan Ikan - Sosialisasi hama dan Penyakit Ikan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	- FGD Ijin Usaha Perikanan - Jasa Konsultasi - Pembinaan Pokmaswas - Temu Usaha Perikanan - Uji Mutu Hasil Perikanan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Bintek/Magang - Honorarium Non ASN - Monev Pedagang Ikan Hias - Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Coocking Class - Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK - Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi - Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan - Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran BahanBaku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah - Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	- FS dan DED Pusat Bisnis Teknologi dan Studi di PIH MIna Rejomulyo - Honorarium Non ASN - Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung - Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH - Sarana Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Perikanan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 5 Program dan 5 Indikator Kinerja Program dan 16 Kegiatan dengan 16 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 5 Inidkator kinerja program, terdapat 5 Indikator yang melampaui target, 0 Indikator memenuhi target, serta 0 Indikator tidak memenuhi target (bila ada).
 - c) Darp 16 Inidkator kinerja kegiatan, seluruh indicator kinerja memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 6 indikator program dan 16 kegiatan dengan 16 indikator
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 16 indikator kinerja kegiatan, terdapat 16 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.348.585.774	11.037.849.711	89,38	1.310.736.063
	Belanja Tidak Langsung	5.599.606.376	5.525.440.606	95,86	231.965.770
	Belanja Pegawai	5.599.606.376	5.367.640.606	95,86	231.965.770
1	Gaji dan Tunjangan	2.222.366.399	2.092.640.606	94,16	129.725.793
2	Tambahan Penghasilan PNS	3.377.239.977	3.275.000.000	96,97	102.239.977
	Belanja Langsung	6.748.973.398	5.670.209.145	84,02	1.078.770.253
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.605.429.761	6.215.047.649	94,09	390.382.112
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.411.220	3.034.000	8,82	31.377.220
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.880	575.000	3,83	14.424.880
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.949.775	562.500	14,24	3.387.275
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.487.275	784.000	52,71	703.275
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.987.275	0	70	1.987.275
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.987.275	685.000	34,47	1.302.275
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.740	427.500	4,28	9.572.240
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.784.258.646	5.522.428.106	95,47	261.830.540
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.599.606.376	5.367.640.606	95,86	231.965.770
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.710.000	153.590.000	84,06	29.120.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.942.270	1.197.500	61,65	744.770
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	0
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.876.520	3.172.000	81,83	704.520
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.876.520	3.172.000	81,83	704.520
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.993.572	222.081.000	96,56	7.912.572
4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.908.000	60.838.000	99,89	70.000
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.670.492	28.340.000	98,85	330.492
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.257.580	30.162.000	93,50	2.095.580
4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.925.000	20.925.000	100,00	0
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.450.000	21.166.000	98,68	284.000
4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.782.500	60.650.000	92,20	5.132.500
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.743.150	53.694.200	81,67	12.048.950
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.743.150	53.694.200	81,67	12.048.950
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.797.185	188.797.683	88,72	23.999.442
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.497.185	113.996.311	86,69	17.500.874
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.300.000	74.801.372	92,01	6.498.628
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.349.468	221.840.600	80,86	52.508.868
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.047.468	167.585.600	76,16	52.461.868
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.302.000	54.255.000	99,91	77.000
B	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.709.284.478	1.382.544.869	80,88	326.739.609
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	662.454.005	501.056.136	75,64	121.397.869
1.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	662.454.005	501.056.136	75,64	121.397.869
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	239.520.810	168.797.500	70,47	70.723.310
2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	239.520.810	168.797.500	70,47	70.723.310
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	807.309.663	712.691.233	88,28	94.618.430

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Pelelangan Ikan (TPI)				
3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	807.309.663	712.691.233	88,28	94.618.430
C	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.460.100.399	2.210.839.253	89,87	249.261.146
1	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	282.373.130	232.389.650	82,30	49.983.480
1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	282.373.130	232.389.650	82,30	49.983.480
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.177.727.269	1.978.449.603	90,85	199.2763.367
2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.233.174.934	1.169.807.103	94,86	63.367.831
2.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan diDarat	944.552.335	808.642.500	85,61	135.909.835
D	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	184.562.037	132.442.209	71,76	52.119.828
1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	184.562.037	132.442.209	71,76	52.119.828
1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	184.562.037	132.442.209	71,76	52.119.828
E.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.389.209.099	1.096.975.791	78,96	292.233.308
1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	173.278.329	143.579.508	82,86	29.698.821
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.278.329	143.579.508	82,86	29.698.821
2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	356.377.894	245.145.400	68,79	111.232.894
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	356.377.894	245.145.400	68,79	111.232.894

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
3.	Penyediaan dan Penyaluran BahanBaku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	859.552.876	708.250.883	82,40	151.301.993
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	859.552.876	708.250.883	82,40	151.301.993
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.348.585.774	11.037.849.711	89,38	1.310.736.063

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebesar Rp 12.348.585.774. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 11.037.849.407 dengan sisa sebesar Rp 1.310.736.367 (10,61%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 5.599.606.376, realisasi Rp. 5.367.640.606 (95,86%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 231.965.770 (4,14%)
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 6.748.979.398 Dengan realisasi sebesar Rp. 5.670.209.145 (84,02%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.078.770.253 (15,98%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		IKK	2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Tujuan : Meningkatnya produk-produk unggulan daerah di bidang perikanan	Wilayah perikanan terpadu (wilayah)	3 Wilayah	3 Wilayah	-	-	3 Wilayah	3 Wilayah	-	-
Sasaran : Meningkatnya produktivitas perikanan	Produksi perikanan tangkap (Ton)	2.726,49	2.862,81	3.005,61	3.055,90	2.801,12	2901,45	3.080,576	3.972,67
	Produksi perikanan budidaya (Ton)	3.452,55	3.625,17	3.775,93	3.845,95	3.738	3.810,67	3.855,28	4.999,74
	Produksi ikan olahan (Ton)	16.806,42	17.113,32	17.495,45	17.557,29	17.485	17.506,107	17.511,169	22.824,48

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan tahun 2021 berdasarkan target Renstra 2016-2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya produk-produk unggulan daerah di bidang perikanan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “jumlah wilayah perikanan terpadu”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 %.
- b. Sasaran **“Meningkatnya produksi perikanan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 6.712,12 dari target sebesar 6.487,98 ton (capaian sebesar 103,45 %).

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perikanan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan

sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan budidaya.
- b. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan karena alih fungsi lahan.
- c. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan tangkap.
- d. Belum optimalnya pengembangan diversifikasi ikan olahan.
- e. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Semakin berkurangnya potensi perikanan tangkap
- b. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan darat
- c. Penyakit ikan yang belum tertangani
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap produk dan sumberdaya perikanan
- e. Kurangnya diversifikasi usaha ikan olahan

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Keterbatasan kemampuan SDM pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan
- Pengelolaan BBI dan TPI belum optimal
- PIH masih belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya
- Perlu memperluas jaringan distribusi pemasaran bagi kelompok pelaku usaha perikanan

b. Peluang:

- Peningkatan dan pengembangan usaha perikanan mulai hulu sampai hilir
- Pengembangan pasar distribusi ikan
- Dapat menciptakan areal lokasi pusat penjualan hasil perikanan bagi kelompok pelaku usaha perikanan
- Pengembangan kawasan perikanan terpadu sebagai pusat kegiatan perikanan dari hulu ke hilir

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan, dapat diformulasikan isu-isu strategis

yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan budidaya
- b. Daya saing pengolahan dan pemasaran ikan olahan masih rendah
- c. Angka konsumsi ikan di Kota Semarang masih dibawah rata-rata nasional
- d. Sarpras dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Semarang belum optimal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel

- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perikanan mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu "Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan" . Dinas Perikanan sebagai dinas teknis memiliki kewajiban melaksanakan prioritas perencanaan pembangunan daerah

dalam bidang perikanan, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perikanan Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.361.104.49	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.797.214.894	
3.25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		4.396.744.000	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang		8.00	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			4.400.000	-
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	3.00	1.500.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	5.00	1.650.000	-
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen RKA	1.00	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen RKA	1.00	550.000	-
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1.00	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1.00	550.000	-
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen DPA	1.00	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen DPA	1.00	550.000	-
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1.00	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1.00	550.000	-
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen LKJIP dan LKPJ	2.00	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen LKJIP dan LKPJ	2.00	550.000	-
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang		100.00	5.697.029.449	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang			6.266.732.394	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	5.464.569.449	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32.00	6.011.026.394	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100.00	231.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	1.00	255.046.000	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1.00	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1.00	220.000	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan Semesteran	2.00	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan Semesteran	2.00	220.000	
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1.00	200.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1.00	220.000	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang		2.00	43.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang			47.740.000	
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.00	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.00	11.000.000	
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.00	33.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.00	36.740.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang		100.00	769.794.963	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang			846.774.459	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	10.00	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	10.00	38.500.000	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Alat Tulis Kantor	35.00	76.462.399	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Alat Tulis Kantor	35.00	84.108.639	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	8.00	51.252.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	8.00	56.377.695	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	700.00	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.00	44.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
3.25.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.00	299.956.520	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.00	529.952.172	
3.25.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Peralatan Kantor Elektronik	3.00	267.123.594	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Peralatan Kantor Elektronik	3.00	293.835.953	
3.25.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang		3.00	507.418.462	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang			558.160.308	
3.25.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			423.953.400	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang		1.00	466.348.740	
3.25.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	3.00	83.465.062	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	3.00	91.811.568	
3.25.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang		100.00	547.157.216	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang			601.872.938	
3.25.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100.00	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12.00	220.000.000	
3.25.01. 2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	Jasa perlengkapan Kantor	2.00	74.964.816	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	Jasa perlengkapan Kantor	2.00	82.461.298	
3.25.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.00	272.192.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.00	299.411.640	
3.25.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang		100.00	513.364.359	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang			564.700.795	
3.25.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	44.344.498	
3.25.01. 2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	28.00	369.266.497	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	28.00	406.193.147	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	pemeliharaan, pajak rumah, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					pemeliharaan, pajak rumah, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang		4.00	39.454.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang		48.00	43.399.620	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Gedung Kantor	2.00	64.330.482	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Gedung Kantor	2.00	70.763.530	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang		3055.90	1.643.400.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang			1.807.740.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang		2500.00.00	650.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			715.000.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	- Honorarium Non ASN - Jumlah Kajian Jasa Konsultasi - Jumlah Nelayan Tervalidasi - Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG - Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap - Magang Nelayan - Restocking	100.00	650.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	- Honorarium Non ASN - Jumlah Kajian Jasa Konsultasi - Jumlah Nelayan Tervalidasi - Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG - Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap - Magang Nelayan - Restocking	1.00	715.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang		120.00	445.400.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			489.940.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	- Forum KUB Nelayan - Gerakan Bersih Pantai dan Laut - Pelatihan Nelayan - Sosialisasi Nelayan	60.00	445.400.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	- Forum KUB Nelayan - Gerakan Bersih Pantai dan Laut - Pelatihan Nelayan - Sosialisasi Nelayan	120.00	489.940.000	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang		100.00	548.000.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang			602.800.000	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan	Kota Semarang	- Fasilitasi Pembangunan TPI - Honorarium Non ASN TPI - Monev TPI - Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI	100.00	548.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan	Kota Semarang	- Fasilitasi Pembangunan TPI - Honorarium Non ASN TPI - Monev TPI - Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI	6.00	602.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		- Pendataan Perikanan Tangkap - Sarpras Pengelolaan TPI - Sosialisasi Optimalisasi TPI			Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		- Pendataan Perikanan Tangkap - Sarpras Pengelolaan TPI - Sosialisasi Optimalisasi TPI			
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang		3845.95	2.956.852.885	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang			3.252.538.170	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Semarang		340.00	688.400.00	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Semarang			757.240.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	- Honorarium Non ASN - Panen Raya Ikan - Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayuran dalam Ember (BUDIKDAMBER) - Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam terpal - Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau - Pelatihan Teknologi Pakan Ikan - Sosialisasi hama dan Penyakit Ikan	200.00	688.400.00	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	- Honorarium Non ASN - Panen Raya Ikan - Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayuran dalam Ember (BUDIKDAMBER) - Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam terpal - Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau - Pelatihan Teknologi Pakan Ikan - Sosialisasi hama dan Penyakit Ikan	20.00	757.240.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang		60.00	2.268.452.88	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang		100 %	2.495.298.174	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Honor Non ASN - Lomba Mancing - Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan - Pembinaan UPR - Rehab Kolam dan Saluran BBI - Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI - Tersedianya Induk Ikan - Tersedianya Obat-Obatan Ikan - Tersedianya Pakan Ikan	4.00	1.415.452.885	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Honor Non ASN - Lomba Mancing - Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan - Pembinaan UPR - Rehab Kolam dan Saluran BBI - Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI - Tersedianya Induk Ikan - Tersedianya Obat-Obatan Ikan - Tersedianya Pakan Ikan	3.00	1.356.998.174	
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan diDarat	Kota Semarang	- Panti Benih Ikan Air Payaudi Kecamatan Tugu - Pembangunan Kawasan Minapolitan - Pemeliharaan Kolam dan Saluran Minapolitan - Sosialisasi Minapolitan		853.000.000	Perencanaan, Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan diDarat	Kota Semarang	- Panti Benih Ikan Air Payaudi Kecamatan Tugu - Pembangunan Kawasan Minapolitan - Pemeliharaan Kolam dan Saluran Minapolitan - Sosialisasi Minapolitan	1.00	938.300.000	
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang		4.00	283.192.355	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang			311.511.591	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang		50.00	283.192.355	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang			311.511.591	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- FGD Ijin Usaha Perikanan - Jasa Konsultasi - Pembinaan Pokmaswas - Temu Usaha Perikanan - Uji Mutu Hasil Perikanan	1.00	283.192.355	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- FGD Ijin Usaha Perikanan - Jasa Konsultasi - Pembinaan Pokmaswas - Temu Usaha Perikanan - Uji Mutu Hasil Perikanan	1.00	311.511.591	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang		1755 7.29	1.395.494.760	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang			1.535.044.236	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang		30.00	207.134.760	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang			227.848.236	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Bintek/Magang - Honorarium Non ASN - Monev Pedagang Ikan Hias - Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	30.00	207.134.760	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Bintek/Magang - Honorarium Non ASN - Monev Pedagang Ikan Hias - Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	1.00	227.848.236	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang		150.0 0	213.360.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang			234.696.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	- Coocking Class - Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK - Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi - Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan - Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan - Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah - Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	40.00	213.360.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	- Coocking Class - Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK - Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi - Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan - Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan - Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah - Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	15.00	234.696.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang		4.00	975.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			1.072.500.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Kota Semarang	- FS dan DED Pusat Bisnis Teknologi dan Studi di PIH Mina Rejomulyo - Honorarium Non ASN - Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung - Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH - Sarana Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo	2.00	975.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Kota Semarang	- FS dan DED Pusat Bisnis Teknologi dan Studi di PIH Mina Rejomulyo - Honorarium Non ASN - Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung - Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH - Sarana Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo	17000.00	1.072.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Perikanan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perikanan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang dan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Pembuatan Makanan Berbahan Dasar Ikan	Jl. Sri Rejeki Utara XV Rt 6 Rw 1 Kalibanteng Kidul	Terlaksananya pelatihan budidaya	75 Orang	
2	Pelatihan Budidaya Ikan melalui Dambar	Wilayah Kelurahan Karangayu Rt 0 Rw 0	Terlaksananya pelatihan budidaya	1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	Wilayah Kelurahan Karangayu Rt 0 Rw 0	Terlaksananya pelatihan budidaya	1 Kegiatan	
4	Pelatihan Olahsan Ikan	Jl. Kalisegoro Raya Rt 03 Rw 02 Kalisegoro	Terlaksananya pelatihan budidaya	1 Kegiatan	
5	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	Balai Kelurahan Bendan Ngisor Rt 0 Rw 0 Bendan Ngisor	Terlaksananya pelatihan budidaya	1 Kegiatan	
6	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56 rt 13 Rw 02 Sendangguwo	Terlaksananya pelatihan budidaya	45 Orang	
7	Bibit Ikan	Wilayah Kelurahan Pudukpayung Rt 2 Rw 4 Pudukpayung	Terlaksananya pelatihan budidaya	1.500 ekor	
8	Bibit Lele	Jl. Sriwidodo Utara Rt 02 rw 01 Purwoyoso	Terlaksananya pelatihan budidaya	5.000 ekor	
9	Penyuluhan Pengembangan Perikanan Perkotaan	Kelurahan Tambakrejo Rw 01 s/d 09 Rt 05 Rw 03 Tambakrejo	Terlaksananya pelatihan budidaya	50 Orang	
10	Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Dasar Ikan	Wilayah Kelurahan Karangayu Rt 0 Rw 0 Karangayu	Terlaksananya pelatihan pengolahan	1 Kegiatan	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Perikanan, yaitu :

1. Perlu pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha budidaya ikan, pertanian, kerajinan, produksi boga dan sebagainya.

Jawaban dari Dinas Perikanan :

1. Pada Tahun 2021 Dinas Perikanan Kota Semarang telah melaksanakan pelatihan budidaya ikan di kolam terpal dengan peserta muda sekitar 30 persen dari total peserta 100 orang. Dan telah melaksanakan pelatihan budidaya ikan dalam ember (BUDIKDAMBER) dengan peserta muda sekitar 30 persen dari total peserta 100 orang.

2.6. Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh pelaku usaha perikanan , yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang diadakan oleh Dinas Perikanan dilakukan secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Kelompok Pelaku Usaha Perikanan yang hasilnya dibawa ke Forum Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan. Dari hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Perikanan tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi pelaku usaha perikanan maupun pemangku kepentingan dari sector perikanan.

Dari hasil Forum Perangkat Daerah tersebut, telah terjaring beberapa aspirasi para pelaku usaha perikanan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, maupun pertanyaan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perikanan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

NO	PELAKU USAHA	USULAN PROGRAM /KEGIATAN
1.	Pembudidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan budidaya ikan dalam ember- Pelatihan budidaya ikan di kolam terpal- Pelatihan pembuatan pakan

NO	PELAKU USAHA	USULAN PROGRAM /KEGIATAN
		ikan mandiri - Pelatihan pembenihan - Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan
2.	Pengolah dan pemasar hasil olahan ikan	- Pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan - Pelatihan pengemasan dan pelabelan - Pelatihan pemasaran secara online - Sosialisasi perijinan usaha pengolahan ikan
3.	Nelayan	- Pelatihan perbaikan mesin kapal - Pelatihan perbaikan alat tangkap ikan - Pelatihan penanaman mangrove

2.7. Pelibatan OPD Lain Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, ada beberapa program dan kegiatan yang membutuhkan OPD lain dalam upaya pencapaian hasil program dan kegiatan dimaksud. Beberapa program dan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan OPD lain yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OPD YANG TERLIBAT	JENIS KETERLIBATAN
1.	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- DPMPTSP - DKK - BPOM	- Terkait perijinan dan HAKI - PIRT - Ijin edar - Tutor pengolahan

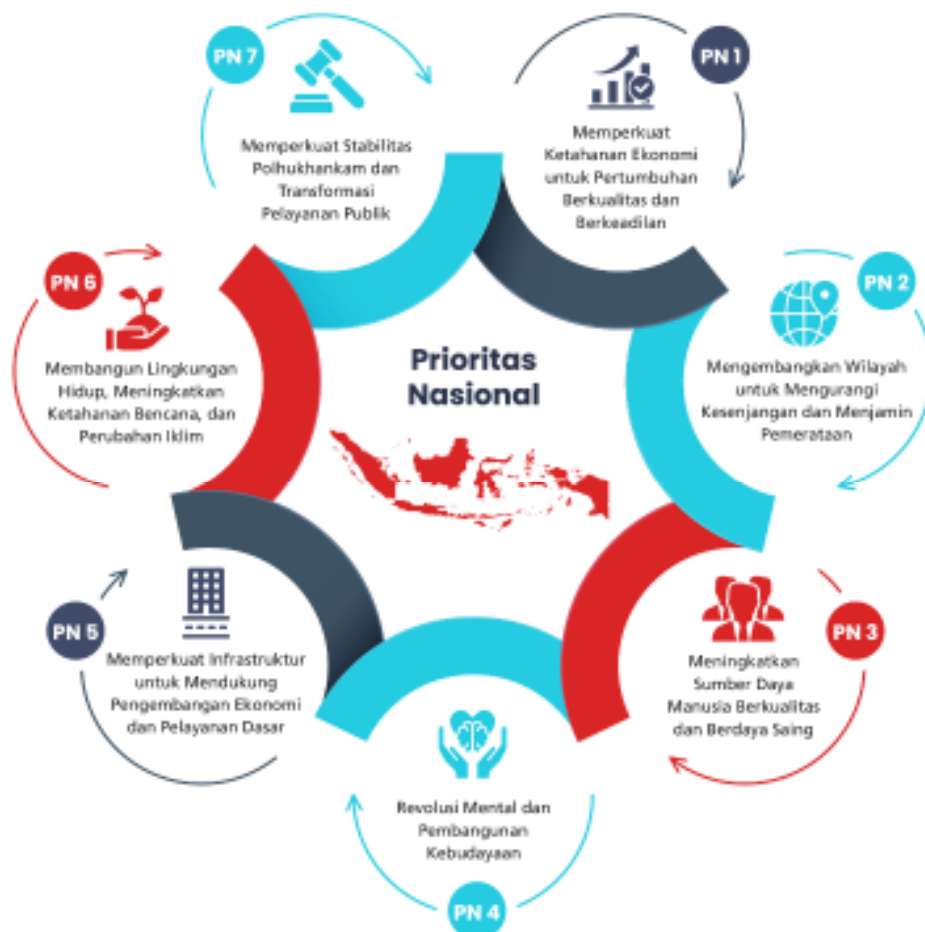
NO	PROGRAM/KEGIATAN	OPD YANG TERLIBAT	JENIS KETERLIBATAN
		- AKS Ibu Kartini	ikan
2.	Pembangunan kawasan Minapolitan di Gunungpati dan Kolam Pembenihan di Tugu	-DPU - Disperkim	- Infrastruktur
3.	Pelatihan bagi nelayan	- BP3 Tegal - BPPI Semarang - KPL Camar	- Pelatihan alat tangkap - Pelatihan perbaikan mesin kapal - Pelatihan penanaman mangrove
4.	Pelatihan budidaya ikan	- Undip	- Hama penyakit ikan - Pembuatan pakan ikan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
- 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
- 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk

- Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 rencana pembangunan bidang perikanan diarahkan pada :

1. pembangunan dalam budidaya ikan diarahkan pada revitalisasi tambak, meningkatnya produksi perikanan budidaya ikan menjadi 10,32 Juta ton, serta meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun.
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional.
3. Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024.

Sedangkan dalam tema Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Khusus untuk industri pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan, penerapan standarisasi mutu, penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri dan penguatan branding produk perikanan Indonesia.

Dalam bidang kemaritiman dan kelautan, peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai basis spasial dalam pembangunan dan pemanfaatan kelautan dan perikanan, yang meliputi strategi: (1) meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan kelembagaan WPP sesuai dengan prinsip berkelanjutan; dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan, serta pengelolaan ruang laut; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, dan mutu produk kelautan dan perikanan termasuk ikan, rumput laut dan garam; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset

Adapun sentra produksi perikanan budidaya dan garam diarahkan untuk pembudidayaan ikan nila, bandeng lele, patin, rumput laut, udang dan garam.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;

- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah**; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perikanan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain meliputi:

1. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor Perikanan (1 %)
2. Produksi perikanan (1.042.610,71 ton/tahun)
3. Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah (33,67 Kg/Kap/Thn)
4. Produksi garam (392.136,46 ton)
5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 109
6. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar 101
7. Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (85 %)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas

Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya produk unggulan perikanan daerah”,

dengan indikator tujuan “Meningkatnya kontribusi sub sector perikanan terhadap sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang yaitu “ Meningkatkan produksi perikanan” dan “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan” dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Produksi perikanan (tangkap dan budidaya) 6.901,85 ton
- b. Nilai AKIP sebesar 71

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,97%
SASARAN : - Meningkatkan produksi perikanan - Meningkatkan konerja SKPD	- Produksi perikanan (tangkap dan budidaya) - Nilai AKIP	ton	6.901,85 ton 71,5

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas

Dinas Perikanan Kota Semarang memiliki 5 program dengan 16 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan telah dilakukan perumusan untuk mendapatkan kegiatan prioritas. Hasil dari perumusan kegiatan prioritas Dinas Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - c. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Perikanan bertugas melaksanakan pembangunan sector perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan hasil olahan beserta pemasarannya, serta pengawasan dan pengendalian terhadap sumberdaya perikanan di Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Perikanan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Tercapainya jumlah wilayah perikanan terpaduMeningkatnya produk-produk unggulan daerah di bidang perikanan”** dan indikator sasaran **“Tercapainya jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produksi ikan olahan dan jumlah konsumsi ikan per kapita”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik pembangunan perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan hasil olahan beserta pemasarannya , serta pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanananya.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan sektor perikanan;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan Kegiatan Prioritas

Dinas Perikanan Kota Semarang memiliki 5 program dengan 16 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan telah dilakukan perumusan untuk mendapatkan kegiatan prioritas. Hasil dari perumusan kegiatan prioritas Dinas Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - c. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 9 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 16 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, 1 kegiatan direncanakan sebagai kegiatan dengan dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.361.104.449,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 8.082.164.449,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 6.278.940.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25					14.361.104.449			14.084.755.000	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	14.361.104.449		-	100 %	14.084.755.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		Kota Semarang	100 % 100 %	14.361.104.449	APBD Kota Semarang	-	100 % 100 %	16.434.671.839
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang	29 Unit	8.082.164.449	APBD Kota Semarang	-	29 Unit	9.436.837.839
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang	100 %	3.099.960	APBD Kota Semarang	-	100 %	3.409.956
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	Kota Semarang	100 %	813.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	894.300
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	Kota Semarang	100 %	415.690	APBD Kota Semarang	-	100 %	457.259

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Kota Semarang	100 %	454.690	APBD Kota Semarang	-	100 %	500.159
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	Kota Semarang	100 %	454.690	APBD Kota Semarang	-	100 %	500.159
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Kota Semarang	100 %	454.690	APBD Kota Semarang	-	100 %	500.159
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan DokumenLKjIP dan LKPJ	Kota Semarang	100 %	507.200	APBD Kota Semarang	-	100 %	557.920
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang	100 %	5.694.274.249	APBD Kota Semarang	-	100 %	6.810.158.619
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	100 %	5.464.569.449	APBD Kota Semarang	-	100 %	6.557.483.339
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	Kota Semarang	100 %	229.100.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	252.010.000
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	Kota Semarang	100 %	201.600	APBD Kota Semarang	-	100 %	221.760

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	100 %	201.600	APBD Kota Semarang	-	100 %	221.760
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	Kota Semarang	100 %	201.600	APBD Kota Semarang	-	100 %	221.761
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang	100 %	42.758.300	APBD Kota Semarang	-	100 %	47.034.130
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Kota Semarang	100 %	10.336.100	APBD Kota Semarang	-	100 %	11.369.710
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 %	32.422.200	APBD Kota Semarang	-	100 %	35.664.420
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Semarang	100 %	769.259.014	APBD Kota Semarang	-	100 %	846.184.915

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	Kota Semarang	100 %	35.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	38.500.000
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	100 %	76.462.399	APBD Kota Semarang	-	100 %	84.108.639
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	100 %	51.252.450	APBD Kota Semarang	-	100 %	56.377.695
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	100 %	43.053.192	APBD Kota Semarang	-	100 %	47.358.511
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Semarang	100 %	299.956.520	APBD Kota Semarang	-	100 %	329.952.172
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	Kota Semarang	100 %	263.534.453	APBD Kota Semarang	-	100 %	289.887.898
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang	100 %	519.815.031	APBD Kota Semarang	-	100 %	571.796.534
3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang	100 %	423.953.400	APBD Kota Semarang	-	100 %	466.348.740

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	Kota Semarang	100 %	95.861.631	APBD Kota Semarang	-	100 %	105.447.794
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang	100 %	539.593.536	APBD Kota Semarang	-	100 %	593.552.890
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kota Semarang	100 %	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	220.000.000
3.25.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perlengkapan Kantor	Kota Semarang	100 %	67.401.136	APBD Kota Semarang	-	100 %	74.141.250
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	100 %	272.192.400	APBD Kota Semarang	-	100 %	299.411.640
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang	100 %	513.364.359	APBD Kota Semarang	-	100 %	564.700.795

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	100 %	40.313.180	APBD Kota Semarang	-	100 %	44.344.498
3.25.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak rumah, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	100 %	369.266.497	APBD Kota Semarang	-	100 %	406.193.147
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang	100 %	39.454.200	APBD Kota Semarang	-	100 %	43.399.620
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Semarang	100 %	64.330.482	APBD Kota Semarang	-	100 %	70.763.530
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Kota Semarang	100 %	1.643.400.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.807.740.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Semarang	100 %	650.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	715.000.000
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Non ASN - Jumlah Kajian Jasa Konsultasi - Jumlah Nelayan Tervalidasi - Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG - Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap - Magang Nelayan - Restocking 	Kota Semarang	100 %	650.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	715.000.000
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang	100 %	445.400.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	489.940.000
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Forum KUB Nelayan - Gerakan Bersih Pantai dan Laut - Pelatihan Nelayan 	Kota Semarang	100 %	445.400.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	489.940.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Sosialisasi Nelayan							
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Kota Semarang	100 %	548.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	602.800.000
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Fasilitasi Pembangunan TPI - Honorarium Non ASN TPI - Monev TPI - Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI - Pendataan Perikanan Tangkap - Sarpras Pengelolaan TPI - Sosialisasi Optimalisasi TPI	Kota Semarang	100 %	548.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	602.800.000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Kota Semarang	100 %	2.956.852.885	APBD Kota Semarang	-	100 %	3.252.538.174
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Kota Semarang	100 %	688.400.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	757.240.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Non ASN - Panen Raya Ikan - Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayuran dalam Ember (BUDIKDAMBER) - Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam terpal -Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau - Pelatihan Teknologi Pakan Ikan - Sosialisasi hama dan Penyakit Ikan 	Kota Semarang	100 %	688.400.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	757.240.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Kota Semarang	100 %	2.268.452.885	APBD Kota Semarang	-	100 %	2.495.298.174

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Non ASN - Lomba Mancing - Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan - Pembinaan UPR - Rehab Kolam dan Saluran BBI - Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI - Tersedianya Induk Ikan - Tersedianya Obat-Obatan Ikan - Tersedianya Pakan Ikan 	Kota Semarang	100 %	1.415.452.885	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.556.998.174
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> - Panti Benih Ikan Air Payaudi Kecamatan Tugu - Pembangunan Kawasan Minapolitan - Pemeliharaan Kolam dan Saluran Minapolitan - Sosialisasi Minapolitan 	Kota Semarang	100 %	853.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	938.300.000
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Kota Semarang	100 %	283.192.355	APBD Kota Semarang	-	100 %	311.511.591

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Kota Semarang	100 %	283.192.355	APBD Kota Semarang	-	100 %	311.511.591
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	- FGD Ijin Usaha Perikanan - Jasa Konsultasi - Pembinaan Pokmaswas - Temu Usaha Perikanan - Uji Mutu Hasil Perikanan	Kota Semarang	100 %	283.192.355	APBD Kota Semarang	-	100 %	311.511.591
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Kota Semarang	100 %	1.395.494.760	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.535.044.236
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Kota Semarang	100 %	207.134.760	APBD Kota Semarang	-	100 %	237.848.236

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Bintek/Magang - Honorarium Non ASN - Monev Pedagang Ikan Hias - Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan 	Kota Semarang	100 %	207.134.760	APBD Kota Semarang	-	100 %	237.848.236
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Kota Semarang	100 %	213.360.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	234.696.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Coocking Class - Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK - Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi - Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan - Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan - Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah - Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk 	Kota Semarang	100 %	213.360.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	234.696.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang	100 %	975.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.072.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - FS dan DED Pusat Bisnis Teknologi dan Studi di PIH Mina Rejomulyo - Honorarium Non ASN - Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung - Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH - Sarana Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo 	Kota Semarang	100 %	975.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.072.500.000
	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		Kota Semarang	100 %	14.361.104.449	APBD Kota Semarang	-	100 %	16.434.671.839

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perikanan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja OPD ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perikanan;
3. Penyusunan Renja Dinas Perikanan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

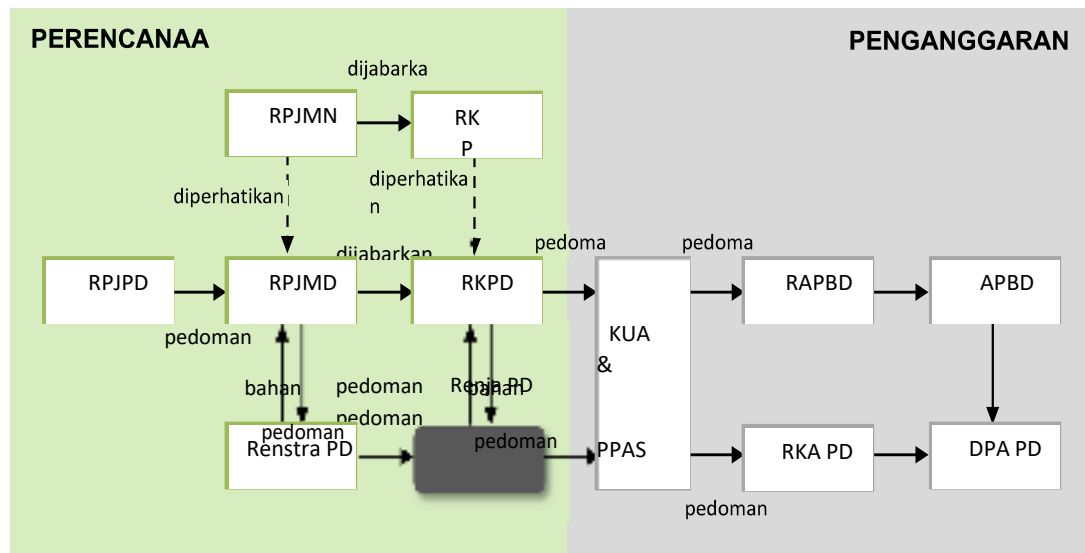
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

- Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian

Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanian Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pertanian yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanian.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pertanian sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Pertanian melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 29.796.334.753,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 27.205.074.730,- atau sebesar 91,3%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Semarang

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Dinas Pertanian Kota Semarang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Progran dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, & perkebunan	56.657 ton	56.657 ton	53.527,47 ton	94,48%	94,48%	51.283,73 ton	50.439,36 ton	50.439,36 ton	98,35%
		Jumlah produksi hasil peternakan	34.874,01 ton	34.874,01 ton	33.254,34 ton	95,36%	95,36%	36.822 ton	35.627,50 ton	35.627,50 ton	96,76%
		Jumlah kelompok tani yg telah melakukan diversifikasi usaha pertanian	58 kelompok	58 kelompok	58 kelompok	100,00%	100,00%				
		Jumlah kawasan pertanian perkotaan	85 kelurahan	85 kelurahan	104 kelurahan	138,88%	138,88%				
		Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100,00%	100,00%				
		Luas tanaman pangan organik (ha)	13 ha	13 ha	20 ha	153,85%	153,85%				
3.27.02.2.01		jumlah kelompok tani yang diawasi						150 kelompok	20 kelompok	30 kelompok	20,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)	
	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>penggunaan sarana pertaniannya</i>										
		<i>Penggunaan sarana pertanian terawasi</i>	100%	100%	100%	100,00%	100,00%					
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Alat ubinan	3.00 unit	3 unit	3 unit	100,00%	100,00%					
		Demplot Jagung Organik	2.00 unit	2 unit	2 unit	100,00%	100,00%					
		Demplot Mina Padi	1.00 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%					
		Demplot Padi Organik	10.00 unit	10 unit	10 unit	100,00%	100,00%					
		Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi spesifik lokasi							66,2 ha	21,2 ha	16 ha	24,17%
		jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan empon-empon							31 kelompok	5 kelompok	3 kelompok	9,68%
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan							10 kelompok	2 kelompok	1 kelompok	10,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan						23 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	21,74%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bintek APPO	1.00 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%				
		Bintek P2HP (Pengamatan Susut Hasil Padi)	1.00 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%				
		Bintek P2HP (Penyusunan Dokumen Sistem Mutu)	2.00 Kali	2 Kali	2 Kali	100,00%	100,00%				
		Bintek Pengendalian OPT TP	1.00 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%				
		Bintek Pertanian Perkotaan	1.00 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%				
		Data informasi Harga Produk Peternakan	12.00 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	100,00%				
		Data Statistik Peternakan	12.00 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	100,00%				
		Demplot Agensi Hayati (PPAH)	1.00 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
		Demplot Pembuatan Rumah Burung Hantu (RUBUHA)	1.00 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	100,00%				
		Fasilitasi Lomba Pemanfaatan Pekarangan	8.00 Kali	8 Kali	8 Kali	100,00%	100,00%				
		Gerakan Minum Susu	2.00 Kali	2 Kali	4 kali	200,00%	200,00%				
		Hand Sprayer	5.00 buah	5 buah	5 kali	100,00%	100,00%				
		Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Pelaku Pertanian Perkotaan	16.00 kelompok	16 kelompok	16 kelompok	100,00%	100,00%				
		Pembuatan HMT	1.00 Paket	1 Paket	1 paket	100,00%	100,00%				
		Pengolah Pupuk Organik	1.00 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%				
		Peralatan pembuat kripik buah	2.00 paket	2 paket	2 paket	100,00%	100,00%				
		peralatan pembuat tepung sukun	1.00 paket	1 paket	1 paket	100,00%	100,00%				
		Perlengkapan Ternak (Pendampingan Relokasi Sapi TPA Jatibarang)	1.00 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	100,00%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
		Pompa Air	2.00 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	100,00%				
		Uji Sampel Pakan	21.00 Sampel	21 Sampel	21 Sampel	100,00%	100,00%				
		jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16.00 Paket	16 Paket	16 Paket	100,00%	100,00%	82 paket	18 kelompok	20 kelompok	24,39%
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	6100.00 Batang	6100 Batang	6100 batang	100,00%	100,00%	510 batang	110 batang	110 batang	21,57%
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	20000.00 Batang	20000 Batang	20000 batang	100,00%	100,00%	135.000 batang	13.000 batang	18.500 batang	13,70%
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	100,00%	15 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	20,00%
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak						28 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	35,71%
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP						23 kelompok	12 kelompok	7 kelompok	30,43%
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan						60 kegiatan	12 kali	12 kali	20,00%
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Persentase kebun dinas yang produktif						87,5%	62,50%	62,50%	71,43%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
	<i>Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Mutu komoditas pertanian daerah terkelola dengan baik</i>	100,0%	100%	100%	100,00%	100,00%				
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bintek Budidaya Ternak Kelinci dan Observasi lapang	1.00 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%				
		Pengembangan Pembibitan Anggrek	1.00 paket	1 paket	1 paket	100,00%	100,00%				
		jumlah kebun dinas yang dikelola	14.00 unit	14 unit	14 unit	100,00%	100,00%	16 unit	16 unit	16 unit	100,00%
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dr SDG	2.639 batang	2.639 batang	2.639 batang	100,00%	100,00%	4.000 batang	500 batang	2.000 batang	50,00%
		Jumlah pohon induk yang dihasilkan						500 pohon	-	-	0,00%
		jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh						3 sertifikat	-	-	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.2.02.03	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan</i>						65%	40%	40%	61,54%
3.27.2.02.03.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan ternak						60 laporan	12 laporan	12 laporan	20,00%
		Jumlah kelompok ternak yg mendapat fasilitasi penguatan pakan						20 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	45,00%
3.27.2.02.04	<i>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</i>	<i>Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina</i>						100%	20%	20%	20,00%
3.27.2.02.04.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pembinaan pengecer obat hewan						108 pengecer obat hewan	36 pengecer obat hewan	36 pengecer obat hewan	33,33%
3.27.2.02.06	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1</i>	<i>Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak</i>						445 ekor	53 ekor	35 ekor	7,87%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
	<i>(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	<i>populasi ternak bertambah</i>	<i>128 ekor</i>	<i>128 ekor</i>	<i>128 ekor</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>				
3.27.2.02.06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah bibit ternak yg diadakan						445 ekor	100 ekor	35 ekor	7,87%
		Jumlah kecamatan yg masuk pendataan ternak						16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00%
		Pemantauan ternak bantuan pemerintah	12.00 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%				
		Perlengkapan Ternak	1.00 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	100,00%				
		Ternak Kelinci	25.00 ekor	25 ekor	25 ekor	100,00%	100,00%				
		Ternak Sapi PO Jantan	103.00 ekor	103 ekor	103 ekor	100,00%	100,00%				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun						6,38 ton/ha	6,38 ton/ha	6,38 ton/ha	100,00%
		Sentra produk unggulan pertanian	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	100,00%	100,00%				
		Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	1.626,16 ha	1.626,16 ha	2.251,41 ha	138,45%	138,45%				
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	100,00%	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.3.02.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yang disusun						1 dokumen	1 dokumen	-	0,00%
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%
		sosialisasi asuransi pertanian/peternakan	7.00 kali	7 kali	7 kali	100,00%	100,00%				
3.27.3.02.01.4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun						1 dokumen	1 dokumen	-	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	34 unit	34 unit	34 unit	100,00%	100,00%	61 unit	28 unit	27 unit	44,26%
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%	7 unit	3 unit	3 unit	42,86%
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yg dibangun/ direhab	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%	3 unit	2 unit	1 unit	33,33%
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/ direhab	5 unit	5 unit	5 unit	100,00%	100,00%	6 unit	1 unit	1 unit	16,67%
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/ direhab	2 unit	2 unit	2 unit	100,00%	100,00%	unit	-	-	0,00%
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan	Jumlah BPP yg direhab	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%	unit	-	-	0,00%
		Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	3 paket	3 paket	3 paket	100,00%	100,00%	3 paket	-	-	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
	serta sarana pendukungnya										
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	22 unit	22 unit	22 unit	100,00%	100,00%	42 unit	22 unit	22 unit	52,38%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular						-5%	-5%	-5%	100,00%
		Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)	9 sertifikat	9 sertifikat	22 sertifikat	244,44%	244,44%				
		Jumlah kasus penyakit hewan menular	26 kasus	26 kasus	24 kasus	107,69%	107,69%				
3.27.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular</i>						13 kelurahan	15 kelurahan	15 kelurahan	84,62%
		<i>upaya penjaminan kesehatan hewan terlaksana</i>	100%	100%	100%	100,00%	100,00%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bintek Keswan dan Kesmavet	3.00 kali	3 kali	4 kali	133,33%	133,33%				
		Obat-obatan Hewan	1.00 paket	1 paket	1 paket	100,00%	100,00%				
		Peralatan medis Veteriner	2.00 paket	2 paket	2 paket	100,00%	100,00%				
		Surveillance PHM	10.00 kelurahan	10 kelurahan	31 kelurahan	310,00%	310,00%				
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	4000.00 ekor	4000 ekor	4802 ekor	120,05%	120,05%	11.000 ekor	3.500 ekor	3.500 ekor	41,67%
		Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak						60 kali	25 kali	25 kali	41,67%
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet						95%	90%	90%	94,74%
		Peredaran BAH & produk BAH terpantau	100%	100%	100%	100,00%	100,00%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peredaran BAH dan Produk Hewan Terpantau	12.00 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%				
		persentase peredaran BAH & produk asal hewan yang terawasi						100%	20%	20%	20,00%
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)						100%	20%	20%	20,00%
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan						85%	75%	75%	88,24%
3.27.5.02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim						37 kelompok	7 kelompok	7 kelompok	18,92%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
3.27.5.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT						18 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	22,22%
3.27.5.02.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan						19 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	15,79%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	24 kelompok	24 kelompok	24 kelompok	100,00%	100,00%	36 kelompok	26 kelompok	26 kelompok	72,22%
		Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1.557 orang	1.557 orang	1.760 orang	113,04%	113,04%				
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian						65%	35%	35%	53,85%
		penyuluhan pertanian terlaksana	100%	100%	100%	100,00%	100,00%				
3.27.07.2.01.01		Demplot / Kaji Terap	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Latihan dan Kunjungan / LAKU	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%					
		Pembinaan Saka Taruna Bumi	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%					
		Programa Penyuluhan	5.00 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	100,00%					
		Temu Teknis Penyuluh Pertanian Swadaya	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%					
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas							5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100,00%
		Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi							13 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	38,46%
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Data Kelompok Tani yang terupdate	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%					
		Lomba Poktan / Gapoktan / Kelembagaan Ekonomi / Petani	2.00 kali	2 kali	2 kali	100,00%	100,00%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
		Pembinaan Kelembagaan Petani	50.00 kali	50 kali	28 kali	56,00%	56,00%				
		UFCs (Urban Farming Courses/Pelatihan Pertanian Perkotaan)	24.00 kali	24 kali	14 kali	58,33%	58,33%				
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani						25 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	20,00%
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya						900 orang	300 orang	300 orang	33,33%
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani						19 kegiatan	10 kegiatan	8 kegiatan	42,11%
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia						100%	20%	20%	20,00%
		Media penyuluhan	3.00 paket	3 paket	3 paket	100,00%	100,00%				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan						131 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	19,85%
		Tertib perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	100,00%	26 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	19,23%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan & evaluasi kinerja OPDkinerja	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100,00%	100,00%	105 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	20,00%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan OPD						100%	20%	20%	20,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
		<i>Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD</i>						20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	20,00%
		<i>Tertib administrasi keuangan</i>	100%	100%	100%	100%	100%				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100,00%	100%	100,00%	100%	100%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20,00%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	20,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20,00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	50 jenis	10 jenis	10 jenis	20,00%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA retribusi bidang pertanian	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%				
		NA retribusi bidang peternakan	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	150 jenis	30 jenis	30 jenis	20,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	55 jenis	11 jenis	11 jenis	20,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
X.XX.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan						15 jenis	3 jenis	3 jenis	20,00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13 jenis	11 jenis	11 jenis	100,00%	84,62%	34 jenis	14 jenis	14 jenis	41,18%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan						1 unit	-	-	0,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan						12 unit	-	-	0,00%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yang diadakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100,00%	100,00%	16 jenis	4 jenis	4 jenis	25,00%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100,00%	100,00%	19 jenis	5 jenis	5 jenis	26,32%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%	20,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Renja(%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9=(7/4)	10	11	12	13=(12/10)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	100,00%	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	55 unit	55 unit	55 unit	100,00%	100,00%	67 unit	55 unit	55 unit	82,09%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100,00%	100,00%	48 jenis	9 jenis	9 jenis	18,75%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	10 gedung	10 gedung	10 gedung	100,00%	100,00%	46 gedung	9 gedung	9 gedung	19,57%

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2021

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Pertanian Kota Semarang
 - a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 urusan, 5 program dan 15 indikator kinerja program, 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan, dan 38 subkegiatan dengan 84 indikator kinerja subkegiatan.
 - b. Dari 15 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang melampaui target, 7 indikator memenuhi target, serta 2 indikator tidak memenuhi target. Dua indicator yang tidak memenuhi target yaitu jumlah produksi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebuna) yang tercapai 94,48%, dan jumlah produksi hasil peternakan yang tercapai 95,36%.
 - c. Dari 14 indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
 - d. Dari 84 indikator kinerja subkegiatan, 4 indikator melampaui target, 78 indikator memenuhi target, serta 2 indikator tidak memenuhi target. Indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu pembinaan kelembagaan tani yang tercapai 56% dan pelatihan pertanian perkotaan yang tercapai 58,33%. Kedua indikator tersebut tidak terpenuhi targetnya karena factor pandemi covid-19 yang masih berlangsung sehingga kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bersifat tatap muka tidak bisa dimaksimalkan.
- 2) Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dan 15 indikator kinerja program, 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan, dan 38 subkegiatan dengan 84 indikator kinerja subkegiatan.
 - b. Dari 15 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang dapat melampaui target, 7 indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 2 indikator yang tidak memenuhi target akhir periode Renstra. Kedua indicator tersebut akan menjadi focus kembali pada Renstra 2021-2026.
 - c. Dari 14 indikator kinerja kegiatan, seluruhnya telah memenuhi target akhir periode Renstra.
 - d. Dari 84 indikator subkegiatan, 4 indikator melampaui target akhir periode Renstra, 78 indikator memenuhi target akhir periode Renstra, dan hanya 2 indikator yang tidak memenuhi target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN :	29.796.334.753	27.205.074.730	91,30
01	Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	15.940.639.157	15.281.847.137	95,87
2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PD	11.699.740	10.902.100	93,18
2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.702.820	4.775.200	91,41
2.01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.996.920	4.775.200	95,56
2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.451.914.925	11.933.341.020	95,84
2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji & Tunjangan Asn	12.261.463.225	11.763.710.620	95,94
2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.280.000	165.490.000	88,84
2.02.05	Subkegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1.157.860	1.152.000	99,49
2.02.07	Subkegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	1.855.860	1.832.900	98,76
2.02.08	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.157.920	1.155.500	99,79
2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PD	795.371.982	754.221.002	94,83
2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	63.663.000	55.980.550	87,93
2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	106.784.000	105.184.000	98,50

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.000.000	171.338.820	99,04
2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	32.227.000	32.226.850	100,00
2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.424.000	44.289.282	89,61
2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi Skpd	43.306.000	40.239.000	92,92
2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	326.967.982	304.962.500	93,27
2.07	KEGIATAN PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PD	205.319.940	193.727.000	94,35
2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	123.094.380	113.927.000	92,55
2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	82.225.560	79.800.000	97,05
2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	742.339.500	699.134.652	94,18
2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	148.771.500	147.336.052	99,04
2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.568.000	551.798.600	92,96
2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA	1.733.993.070	1.690.521.363	97,49
2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	34.069.819	85,28
2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	310.354.000	305.419.636	98,41
2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	123.881.100	121.713.450	98,25
2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	1.259.807.970	1.229.318.458	97,58

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
02	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.045.120.873	5.844.460.178	82,96
2.01	KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	2.936.861.636	1.951.621.211	66,45
2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi & Spesifik Lokasi	104.781.776	94.428.200	90,12
2.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.832.079.860	1.857.193.011	65,58
2.02	KEGIATAN PENGELOLAAN SDG HEWAN, TUMBUHAN, & MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KAB/KOTA	2.297.567.828	2.149.311.850	93,55
2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman	2.297.567.828	2.149.311.850	93,55
2.06	KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK & HIJAUAN PAKAN TERNAK YG SUMBERNYA DLM 1 DAERAH KAB/KOTA LAIN	1.810.691.409	1.743.527.117	96,29
2.06.01	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yg Sumbernya Dari Daerah Kab/Kota Lain	1.810.691.409	1.743.527.117	96,29
03	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.338.158.705	4.796.970.240	89,86
2.01	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	118.426.950	117.656.500	99,35
2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	118.426.950	117.656.500	99,35
2.02	KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	5.219.731.755	4.679.313.740	89,65
2.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	87.212.000	86.326.400	98,98
2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi &	120.000.000	117.250.000	97,71

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Pemeliharaan Embung Pertanian			
2.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	939.835.328	915.860.000	97,45
2.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit	240.000.000	236.000.000	98,33
2.02.08	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	242.381.200	242.381.200	100,00
2.02.09	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.590.303.227	3.081.496.140	85,83
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESWAN & KESMAVET	568.433.038	523.823.850	92,15
2.01	KEGIATAN PENJAMINAN KESWAN, PENUTUPAN & PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DLM KAB/KOTA	398.086.751	370.763.450	93,14
2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Hewan & Zoonosis	398.086.751	370.763.450	93,14
2.04	KEGIATAN PENERAPAN & PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESMAVET	170.346.287	153.060.400	89,85
2.04.02	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan & Produk Hewan	170.346.287	153.060.400	89,85
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	903.982.980	757.973.325	83,85
2.01	KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	903.982.980	757.973.325	83,85
2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan & Desa	62.883.000	56.420.550	89,72
2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan & Desa	774.594.980	636.391.775	82,16

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan & Pemanfaatan Sarana & Prasarana Penyuluhan Pertanian	66.505.000	65.161.000	97,98

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 14 kegiatan, dan 38 subkegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp 29.796.334.753,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 27.205.074.730,- dengan sisa sebesar Rp 2.591.260.023,- (8,7%) dengan uraian berikut:

- a. **Eks-Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 12.261.463.225,- realisasi Rp 11.763.710.620,- (95,94%) dan sisa anggaran sebesar Rp 497.752.605,- (4,06%).
- b. **Eks-Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 17.534.871.528,- dengan realisasi sebesar Rp 15.441.364.110,- (88,06%) dan sisa anggaran sebesar Rp 2.093.507.418,- (11,94%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
TUJUAN: Renstra 2016-2021 Meningkatnya produk unggulan Pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal	Jumlah wilayah produk unggulan pertanian		4	4	-	-	3	4	-	-
Renstra 2021-2026 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB		-	-	0,792%	0,794%	0,806%	0,791%	0,792%	0,794%
SASARAN: 1. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	1. Jumlah produksi pertanian (Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026)		90.760 ton	91.531 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton	86.425,02 ton	86.781,81 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton
	2. Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan (Renstra 2016-2021)		4.140 kg	5.100 kg	-	-	4.600 kg	5.841 kg	-	-
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian (Renstra 2021-2026)		-	71,84*	72	72,2	75,76	75,76	73,06	72,2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022

Ket : *) daa awal periode Renstra 2021-2026

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Renstra Tahun 2016-2021 **“Meningkatnya produk unggulan Pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi local”** memiliki 1 indikator yaitu **“Jumlah wilayah produk unggulan Pertanian”**. Tahun 2021 merupakan tahun akhir periode Renstra Tahun 2016-2026 dengan capaian indicator memenuhi target akhir periode Renstra yaitu terwujud 4 kawasan wilayah produk unggulan Pertanian di Kota Semarang yaitu Agro Cepoko, Agro Purwosari, Agro Wates, dan Agro Plalangan. Meskipun secara jumlah sudah terpenuhi targetnya tetapi ke depan ke-empat Kawasan agro tersebut akan terus dikembangkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi local Kota Semarang.
- b. Tujuan Renstra Tahun 2021-2026 **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”**. Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Renstra 2021-2026. Pada tahun 2021 kontribusi sector Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku adalah sebesar 0,791%. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 0,8% maka realisasi tahun 2021 tersebut mencapai 98,88%.
- c. Renstra Tahun 2016-2021 memiliki 1 sasaran **“Meningkatnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan”** dengan 2 indikator yaitu indicator 1 **“jumlah produksi hasil Pertanian”** dan indicator 2 **“jumlah produksi hasil Pertanian perkotaan”**. Pada tahun 2021 yang merupakan tahun akhir periode Renstra 2016-2021, indicator 1 tidak bisa memenuhi target yaitu tercapai 94,81%, sedangkan indicator 2 melampaui target atau tercapai sebesar 114,53%. Salah satu factor utama yang menyebabkan indicator 1 tidak tercapai adalah berkurangnya luas lahan baku sawah sebesar 1.482,48 ha yaitu dari 3.701,27 ha pada tahun 2016 menjadi 2.218,79 ha pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan produksi turun meskipun dari segi produktivitas lahan terdapat peningkatan sebesar 8,75% dari 6,17 ton/ha pada tahun 2016 menjadi 6,71 ton/ha pada tahun 2021. Berdasarkan capaian selama periode Renstra 2016-2026 maka pada Renstra 2021-2026 penetapan target produksi pertanian disesuaikan dengan kapasitas sumber daya lahan yang ada.
- d. Pada Renstra Tahun 2021-2026 memiliki 2 sasaran. Sasaran 1 **“Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“jumlah produksi pertanian”**. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2016-2021 sebesar 88.105,73 ton maka capaian indicator Sasaran 1 tersebut adalah 98,09%.

Sasaran 2 **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian”** memiliki 1 indikator yaitu **“Nilai AKIP Dinas Pertanian”**. Tahun 2021 nilai AKIP Dinas Pertanian adalah 75,76 atau melampaui target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 yaitu 72,8.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 Layanan Urusan Pilihan Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
RPJMD 2016-2021											
1	Jumlah produksi Pertanian	Ton	56.317	56.657	-	-	51.379,31	53.527,47	-	-	
2	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	21	24	-	-	24	24	-	-	
3	Jumlah Kawasan Pertanian perkotaan	Kelurahan	69	85	117	132	91	104	117	132	Masih relevan untuk periode 2021-2026
4	Sentra produk unggulan pertanian	Kawasan	4	4	4	5	3	4	4	5	Masih relevan untuk periode 2021-2026
RPJMD 2021-2026											
1	Produktivitas Pertanian per ha per tahun	Ton/ha	-	-	6,38	6,38	6,38	6,71	6,38	6,38	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	-	-5	-5	-48,15	71,42	-5	-5	
3	Sentra produk unggulan Pertanian	Kawasan	4	4	4	5	3	4	4	5	
4	Jumlah Kawasan Pertanian perkotaan	Kelurahan	69	85	117	132	91	104	117	132	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	-	-	75	75	-	-	75	75	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	-	-	75	81,25	-	-	75	81,25	

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Dalam penyelenggaraan urusan Pertanian, pada periode RPJMD Tahun 2016-2021, dari 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu Dinas Pertanian 1 indikator tercapai melebihi target akhir RPJMD, 2 indikator tercapai sesuai target akhir RPJMD, dan 1 indikator tidak tercapai sesuai target akhir RPJMD. Indikator yang melebihi target yaitu jumlah Kawasan Pertanian perkotaan yang tercapai 104 kelurahan dibandingkan target 85 kelurahan atau tercapai 122,35%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan di lingkungan wilayahnya masing-masing. Gerakan Pertanian perkotaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan dengan *tagline* “**AYO NANDUR**” mendorong masyarakat khususnya di wilayah perkotaan untuk budidaya tanaman di pekarangan masing-masing. Adapun indikator yang belum bisa mencapai target yaitu jumlah produksi pertanian yaitu tercapai 94,48% dari target. Hal ini disebabkan terutama karena berkurangnya lahan Pertanian akibat alih fungsi lahan ke non pertanian dimana dari tahun 2016-2021 luas lahan baku sawah berkurang sebesar 1.482,48 ha yaitu dari 3.701,27 ha pada tahun 2016 menjadi 2.218,79 ha pada tahun 2021.

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat 6 Indikator Kinerja Daerah yang diampu Dinas Pertanian dimana 2 dari 6 indikator tersebut merupakan indikator yang juga ada pada RPJMD Tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 yang merupakan tahun awal perencanaan periode RPJMD 2021-2026, dari 6 indikator tersebut 2 indikator belum ada datanya karena merupakan indikator baru, 3 indikator meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, dan 1 indikator menurun dibanding tahun 2020. Indikator yang realisasinya lebih rendah dibanding tahun 2020 tersebut adalah Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, dimana pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kasus penyakit hewan menular dibanding tahun 2020. Hal ini dipengaruhi diantaranya oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian penyakit hewan menular di wilayahnya.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan Pertanian merupakan ancaman terhadap upaya peningkatan produksi Pertanian terutama produksi tanaman pangan. Koordinasi *multi stakeholder* lintas fungsi diperlukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan tersebut.
- b. Produktivitas Pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan produksi, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana Pertanian perlu ditingkatkan dan dioptimalkan penggunaannya.
- c. Pengembangan Pertanian perkotaan merupakan solusi untuk peningkatan produksi Pertanian ditengah tekanan keterbatasan lahan yang tersedia untuk budidaya Pertanian.
- d. Dalam 5 tahun periode Renstra 2016-2021 pertanian perkotaan tumbuh pesat di Kota Semarang dimana 104 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang menjadi kawasan pengembangan pertanian perkotaan.
- e. Kualitas kelembagaan petani secara umum masih rendah dimana dari 406 kelompok tani yang ada hanya sekitar 5% (24 kelompok) yang berkualitas tinggi atau berada pada kelas kemampuan madya dan utama.
- f. Status Kesehatan hewan perlu ditingkatkan supaya kejadian kasus penyakit hewan menular terutama yang strategis dan/atau bersifat zoonosis dapat dicegah lebih dini penyebarannya. Surveillans maupun pelaporan kasus harus lebih didorong dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, diantaranya:

- a. Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
- b. Pengembangan sentra produk pertanian masih rendah.
- c. Pengembangan pertanian perkotaan belum optimal, masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri, belum berorientasi pasar.
- d. Dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masih belum optimal (sarana klinik hewan, puskesmas, BPP, pengendalian OPT, dll)
- e. Tingkat produktivitas tannaman yang masih rendah dan pendapatan usaha yang relatif rendah karena kecilnya skala usaha tani.
- f. Perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian) masih rendah.
- g. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan carrying capacity.
- h. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
- i. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif rendah.
- j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi dan sarana prasarana

- k. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan.
- l. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.
- m. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Semarang.
- Resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Semarang relatif tinggi dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Tengah.
- Mudahnnya produk pertanian dari luar masuk ke Kota Semarang dengan harga yang bersaing.
- Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap kontinuitas, kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan peternakan.
- Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan, jalan pertanian, dan kelembagaan pertanian belum optimal.
- Praktek pertanian konvensional yang mengandalkan input produksi berbasis bahan kimia anorganik.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha dan terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian.
- Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

b. Peluang:

- Meningkatnya konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) di tingkat masyarakat.
- Pasar komoditas pertanian yang terbuka luas terutama dengan adanya pasar bebas Asia (MEA).
- Peluang investasi dibidang pertanian meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di agrobisnis
- Berkembangnya pola kemitraan usaha agribisnis antara petani dg pengusaha/produsen

- Peningkatan intensifikasi pertanian dengan menerapkan Sapta Usaha Tani melalui *Good Agricultural Practice* (GAP) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pengembangan infrastruktur pertanian sehingga mengurangi beban SKPD Kota Semarang.
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pengamanan usaha tani.
- Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kota Semarang.
- Pengembangan fungsi kebun dinas sebagai sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, serta wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan pertanian di Kota Semarang.
- Penerapan peraturan tentang tata ruang dan penetapan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
- Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.
- Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19
- b. Keterbatasan lahan pertanian
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
- e. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produl unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
- f. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

- g. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.
- h. Masih adanya potensi paparan zoonosa maupun penyakit hewan menular strategis lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi

- 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
- 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi

- 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

- 3) Penguatan Manajemen Risiko
- 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan”**, dengan focus Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:

1. Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular;
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian berbasis perkotaan;
3. Penguatan ketahanan pangan.

Secara umum, sebagai salah satu dinas teknis yang termasuk dalam rumpun ekonomi, Dinas Pertanian Kota Semarang akan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor pertanian maupun peternakan dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		produksi hasil peternakan	35922 ton	8.327.324.000	produksi hasil peternakan	35922 ton	5.918.669.202	
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50647,76 ton		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50647,76 ton		
02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	40 kelompok	4.549.724.000	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	40 kelompok	2.901.177.602	
02.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Dinas Pertanian	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi		19 ha	895.500.000		
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	4 kelompok	Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	4 kelompok			
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5 kelompok	Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5 kelompok			
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	2 kelompok	Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	2 kelompok			
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	<i>11 Laporan</i>	<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	<i>12 Laporan</i>			

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
02.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket	3.654.224.000	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket	2.212.985.402	
			jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok		
			jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	8 kelompok		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	8 kelompok		
			Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	22750 batang		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	22750 batang		
			Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan		
			Jumlah pengembangan tanaman sukun	110 batang		Jumlah pengembangan tanaman sukun	110 batang		
			Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali		
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	<i>63 Laporan</i>		<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	<i>30 Laporan</i>		
02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	62,5 persen	2.763.000.000	Persentase kebun dinas yang produktif	62,5 persen	2.258.438.400	
02.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	2.763.000.000	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	2.258.438.400	
			Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	1500 batang		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	1500 batang		
			<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman</i>	<i>6 Dokumen</i>		<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman</i>	<i>6 Dokumen</i>		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
02.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45 persen	755.000.000	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45 persen	595.720.000	
02.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	755.000.000	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	595.720.000	
			Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitas penguatan pakan	2 kelompok		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitas penguatan pakan	2 kelompok		
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	12 Laporan		<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	12 Laporan		
02.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100 persen	25.000.000	Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	0 persen	0	
02.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	18 toko	25.000.000	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	0 toko	0	
			<i>Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar</i>	12 Laporan		<i>Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar</i>	0 Laporan		
02.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	70 ekor	234.600.000	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	60 ekor	163.333.200	
02.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	70 ekor	234.600.000	<i>Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	60 ekor	163.333.200	
			Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan		Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	8.633.400.000	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	5.181.664.800	
02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	3 Dokumen	300.000.000	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2 Dokumen	197.280.000	
02.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian	jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yang disusun	1 dokumen	100.000.000	jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yang disusun	0 dokumen	0	
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola</i>	1 Dokumen		<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola</i>	0 Dokumen		
02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dinas Pertanian	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	1 dokumen	100.000.000	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	1 dokumen	97.680.000	
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 Laporan		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 Laporan		
02.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dinas Pertanian	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun	1 dokumen	100.000.000	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun	1 dokumen	99.600.000	
			<i>Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan</i>	1 Dokumen		<i>Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan</i>	1 Dokumen		
02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	34 unit	8.333.400.000	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	28 unit	4.984.384.800	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
02.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	3 unit	550.000.000	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 unit	349.400.000	
02.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	500.000.000	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	
02.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	425.000.000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	199.800.000	
02.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Dinas Pertanian	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	400.000.000	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	274.400.000	
02.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Dinas Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- unit	0	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	
02.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25 unit	6.458.400.000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 unit	4.160.784.800	
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 %	935.000.000	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 %	494.652.000	
02.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	700.000.000	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	402.352.000	
02.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	25 kali	700.000.000	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	25 kali	402.352.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3500 ekor		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3500 ekor		
			<i>Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	12 Laporan		<i>Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	12 Laporan		
02.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92 persen	235.000.000	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92 persen	92.300.000	
02.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	235.000.000	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	92.300.000	
			Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen		
			Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	4 laporan		Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	4 laporan		
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>	20 Laporan		<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>	12 Laporan		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75 %	499.008.000	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75 %	187.400.000	
02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	17 kelompok	499.008.000	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7 kelompok	187.400.000	
02.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Dinas Pertanian	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi	10 kelompok	345.948.000	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi	4 kelompok	125.780.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		penguatan perlindungan tanaman dari OPT			penguatan perlindungan tanaman dari OPT			
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	150 Ha		<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	100 Ha		
02.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	7 kelompok	153.060.000	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	3 kelompok	61.620.000	
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>	70 Ha		<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>	40 Ha		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28 kelompok	1.330.720.000	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28 kelompok	749.107.400	
02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40 persen	1.330.720.000	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40 persen	749.107.400	
02.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5 kegiatan	282.000.000	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5 kegiatan	148.200.000	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga		<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	5 unit		
02.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	918.720.000	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	546.986.200	
			Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	840 orang		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	840 orang		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	5 kegiatan		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	5 kegiatan		
			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	54 Unit		<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	40 Unit		
02.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	130.000.000	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	53.921.200	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	9 Unit		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	4 Unit		
NON URUSAN									
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	23.121.552.000	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	19.666.743.843	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 %		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 %		
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	31 dokumen	11.500.000	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	26 dokumen	11.439.366	
02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5.952.265	
02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	5.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	5.487.101	
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7 dokumen	15.211.852.000	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7 dokumen	14.051.723.863	
			Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	14.879.482.000	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	13.825.874.245	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		
02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pertanian	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	323.870.000	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	222.100.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	1.292.978	
02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	4.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	1.637.760	
02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	818.880	
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.728.000.000	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.481.592.614	
02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	200.000.000	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	68.832.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>		
02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	316.000.000	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	355.910.614	
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>11 Paket</i>		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>11 Paket</i>		
02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	40.000.000	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	40.000.000	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>		
02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pertanian	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	7.000.000	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	10.080.000	
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>3 Dokumen</i>		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>1 Dokumen</i>		
02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pertanian	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	40.000.000	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	36.000.000	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>12 Laporan</i>		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>12 Laporan</i>		
02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	325.000.000	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	284.823.000	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>		
02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	5 jenis	800.000.000	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	5 jenis	685.947.000	
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem</i>	<i>1 Dokumen</i>		

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			<i>Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>			<i>Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>			
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	2.307.000.000	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	703.630.000	
02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	250.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
02.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Pertanian	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	13 jenis	2.007.000.000	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	13 jenis	604.016.000	
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	48 Unit		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	100 Unit		
02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	6 jenis	50.000.000	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	6 jenis	99.614.000	
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	25 Unit		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	21 Unit		
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.584.600.000	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.344.137.000	
02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	360.000.000	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	206.773.000	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan		
02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanian	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	1.224.600.000	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	1.137.364.000	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan		
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	2.278.600.000	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	2.074.221.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.314.000	
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 unit	521.600.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 unit	540.161.000	
02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	7 jenis	250.000.000	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	7 jenis	193.746.000	
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>250 Unit</i>		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>210 Unit</i>		
02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	9 gedung	1.470.000.000	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11 gedung	1.300.000.000	
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>11 Unit</i>		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>11 Unit</i>		
JUMLAH					41.912.004.000			32.198.237.245	

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 11 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 45 kegiatan, yang terdiri dari 23 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 22 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 41.912.004.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 23.121.552.000,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 18.790.452.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

Selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan atas rancangan awal Renja tahun 2023 tersebut. Analisa dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, skala prioritas berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk ditangani, serta isu-isu strategis Dinas Pertanian tahun 2023. Dari hasil analisa kebutuhan, maka Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 akan dilaksanakan melalui:

1. 6 program sebagaimana pada rancangan awal RKPD 2023;
2. 16 kegiatan yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang dan 10 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Kegiatan yang dieliminir yaitu kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer dengan pertimbangan subatansi kegiatan yang berupa monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dapat diakomodir dengan anggaran operasional rutin penunjang tugas pokok dan fungsi.
3. 40 subkegiatan yang terdiri dari 22 subkegiatan penunjang dan 18 subkegiatan pelaksana/pembangunan. 5 subkegiatan yang dieliminir merupakan subkegiatan yang outputnya dapat ditunda realisasinya pada tahun perencanaan berikutnya.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 32.198.237.245,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 19.666.743.843,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 12.531.493.402,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Dalam proses pengakomodiran aspirasi masyarakat tersebut Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Bappeda sebagai pihak yang bertugas mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pertanian, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pertanian Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran	Keterangan
DINAS PERTANIAN				609.453.420	
KECAMATAN SEMARANG SELATAN				10.000.000	
KELURAHAN LAMPER KIDUL				10.000.000	
1	Pembinaan perawatan tanaman dan bibit tanaman	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 LAMPER KIDUL	50 orang	10.000.000	Diakomodir melalui kegiatan Pelatihan Pertanian Perkotaan
KECAMATAN SEMARANG BARAT				60.000.000	
KELURAHAN KRAPYAK				30.000.000	
2	PENGADAAN TANAMAN TOGA DAN BUAH	KAMPUNG TEMATIK AGRO DAN TOGA RT 06 RW 01 KRAPYAK	1 kegiatan	30.000.000	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.
KELURAHAN KARANGAYU				30.000.000	
3	PELATIHAN BUDI DAYA MANGGA	WILAYAH KELURAHAN KARANGAYU RT 0 RW 0 KARANGAYU	1 kegiatan	30.000.000	Diakomodir, menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di Dispertern
KECAMATAN MIJEN				170.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran	Keterangan
KELURAHAN KARANGMALANG				170.000.000	
4	Alat Pertanian Traktor	DK. GEDUNGAN RT 4 RW 1 KARANGMALANG	2 paket	20.000.000	Karena hibah sehingga harus melalui mekanisme pengajuan proposal dahulu ke Walikota
5	Pembuatan Taman	DK. KRAJAN RT 2 RW 2 KARANGMALANG	1 paket	150.000.000	Kewenangan Disperkim
KECAMATAN BANYUMANIK				160.000.000	
KELURAHAN PUDAKPAYUNG				40.000.000	
6	Bibit tanaman keras/buah	Wilayah Kelurahan Pudakpayung RT 2 RW 4 PUDAKPAYUNG	400 bibit	40.000.000	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.
KELURAHAN NGESREP				20.000.000	
7	Alat dan perlengkapan penanaman secara hidroponik	jatiluhur RT 02 RW 04 RT 2 RW 4 NGESREP	1 set	20.000.000	Diakomodir pada kegiatan pengembangan Pertanian perkotaan. Sebelumnya akan ditindaklanjuti dengan proses CPCL
KELURAHAN TINJOMOYO				100.000.000	
8	Penanaman Tanaman Keras & Pembuatan biopori	TINJOMOYO RT 01-07 RW 01-08	300 Buah	100.000.000	Kewenangan DLH
KECAMATAN NGALIYAN				184.453.420	
KELURAHAN BRINGIN				3.000.000	
9	Bibit Tanaman Toga	Beringin RT 000 RW 000 Bringin	300 Bibit	3.000.000	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.
KELURAHAN PURWOYOSO				29.450.000	
10	Alat Biopori	Jl. Sriwiodod Utara RT 02 RW 01 PURWOYOSO	40 Paket	20.000.000	Kewenangan DLH
11	Komposter	Jl. Sriwiodod Utara RT 02 RW 01 PURWOYOSO	27 Paket	9.450.000	Kewenangan DLH
KELURAHAN KALIPANCUR				15.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran	Keterangan
12	green house tanaman hidroponik	Kelurahan Kalipancur RT 0 RW 0 KALIPANCUR	1 paket	15.000.000	Diakomodir pada kegiatan pengembangan Pertanian perkotaan. Sebelumnya akan ditindaklanjuti dengan proses CPCL
KELURAHAN BAMBANKEREP				3.905.620	
13	Spiner	Jl. Untung Suropati RT 0 RW 0 BAMBANKEREP	1 Unit	3.905.620	Fungsi dan penggunaan alat tidak jelas
KELURAHAN NGALIYAN				40.800.000	
14	BANTUAN PERALATAN HIDROPONIK	BALAI KELURAHAN NGALIYAN RT 06 RW 01 NGALIYAN	13 Unit	7.800.000	Diakomodir pada kegiatan pengembangan Pertanian perkotaan. Sebelumnya akan ditindaklanjuti dengan proses CPCL
15	BANTUAN BIBIT TANAMAN TOGA DAN BUAH	BALAI KELURAHAN NGALIYAN RT 06 RW 01 NGALIYAN	1 Paket	20.000.000	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.
16	BANTUAN ALAT PEMBUATAN BIOPORI	BALAI KELURAHAN NGALIYAN RT 06 RW 01 NGALIYAN	1 Paket	13.000.000	Kewenangan DLH
KELURAHAN TAMBAKAJI				92.297.800	
17	ALAT BIOPORI	POSBINDU RT 0 RW 0 TAMBAKAJI	20 Buah	11.425.400	Kewenangan DLH
18	BENIH TOGA	Tambakaji RT 01 RW 01 TAMBAKAJI	170 PAKET	14.778.100	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.
19	WARUNG HIDUP	Tambakaji RT 01 RW 01 TAMBAKAJI	170 PAKET	23.891.800	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran	Keterangan
20	TANAMAN PENGHIJAUAN	Tambakaji RT 0 RW 0 TAMBAKAJI	170 PAKET	42.202.500	Diakomodir untuk diintegrasikan dlm kegiatan pengadaan bibit untuk social planting.
KECAMATAN GAYAMSARI				25.000.000	
KELURAHAN TAMBAKREJO				25.000.000	
21	PENYULUHAN PERTANIAN PERKOTAAN	KELURAHAN TAMBAKREJO RW 01 S/D 09	40 ORANG	25.000.000	Diakomodir melalui kegiatan Pelatihan Pertanian Perkotaan

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Dari 21 usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, 13 usulan diakomodir dan akan diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Dinas Pertanian Tahun 2023. Adapun usulan yang tidak bisa diakomodir sebanyak 8 usulan, yang terdiri dari 6 usulan yang merupakan kewenangan OPD lain, 1 usulan bersifat hibah sehingga tidak bisa langsung diakomodir karena harus melalui mekanisme pengajuan proposal hibah kepada Walikota, dan 1 usulan yang tidak bisa memberikan konfirmasi kejelasan usulan yang diajukan.

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, antara lain:

- 1. Perlu pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha. Budidaya Ikan, pertanian, kerajinan, produksi boga dan sebagainya (Fraksi PKB).**

Tanggapan:

Dinas Pertanian sudah melaksanakan pembinaan kepada para generasi muda/milenial baik yang berminat maupun yang sudah terjun di bidang usaha pertanian, melalui pelatihan-pelatihan, dialog, temu usaha, dll.

Untuk menarik generasi muda bertani Dinas Pertanian juga membuat UFC (*Urban Farming Corner*) yang merupakan wahana *one stop service* pelayanan pertanian yang meliputi edukasi, sosialisasi, promosi, dan *home care* yang dikemas sesuai selera anak muda.

- 2. Mohon ditertibkan terkait pemberian bantuan benih untuk petani karena saat pemberian bukan petaninya yang menerima. (Fraksi PAN-PSI)**

Tanggapan:

Pemberian bantuan benih tanaman pangan (padi/jagung) selama ini sudah dilaksanakan sesuai CPCL (calon petani calon lokasi) dengan

salah satu kriteria penerimanya adalah anggota kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian) Kementerian Pertanian. Penetapan CPCL tersebut dilakukan setahun sebelumnya.

Disamping bantuan benih padi/jagung kepada petani tersebut, juga ada benih/bibit tanaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat umum maupun perorangan untuk menggerakkan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Dengan semangat "**ayo nandur**" yang digelorkan gelorkan kepada seluruh lapisan masyarakat, Dinas Pertanian menggalakkan pertanian perkotaan sebagaimana amanah Perwal 24/2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan pertanian Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait focus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,30%-5,90%
2. Tingkat pengangguran terbuka 5,30%-6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29-73,35
5. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103-105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105-107
8. Tingkat kemiskinan sebesar 7,50-8,50%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Tema pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**. Sedangkan prioritas pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, konduktivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Target sasaran pembangunan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-5,60%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka kemiskinan sebesar 9,51-9,29%
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,63-4,80%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”,

dengan indikator tujuan “Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:

- a. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan, dengan indikator Jumlah produksi pertanian;
- b. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	persen	0,794
SASARAN : 1. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	Ton	86.569,76
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada focus RKPD 2023 yaitu **“Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*)”** melalui upaya-upaya:

- a. Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular;
- b. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian berbasis perkotaan; dan
- c. Penguatan ketahanan pangan.

Pada perspektif nasional, program dan kegiatan Renja 2023 diarahkan untuk mendukung Prioritas 1 **“Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** yaitu pada upaya **“Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi”**. Sedangkan di tingkat propinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian terkait dengan prioritas 1 **“Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana”**.

Selanjutnya dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2023, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan diantaranya yaitu:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;

3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis bidang pertanian;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Keterkaitan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sedangkan keterkaitan Program Dinas Pertanian tahun 2023 dengan prioritas RKPd Kota Semarang Tahun 2022 dan program unggulan pada visi dan misi walikota dan wakil walikota dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Keterkaitan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

SASARAN RENJA TAHUN 2023		PRIORITAS RKPd TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROPINSI YANG TERKAIT
1.	Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Prioritas 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan , dengan focus Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas Propinsi 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
2.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian		

Tabel 3.3

Keterkaitan Program Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 dengan Prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Program Unggulan Pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

No	Program Dinas Pertanian Kota Semarang	Prioritas RKPD	Fokus RKPD	UPAYA	Program Unggulan pada Visi dan Misi KDH
1	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Penguatan ketahanan pangan	PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu - <i>Fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)</i>
2	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian			<ul style="list-style-type: none"> a. Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular; b. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian berbasis perkotaan c. Penguatan ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan <i>Urban Farming</i> b. Gelar Hidroponik c. Kawasan empon-empon d. Kampung Tematik Produktif - <i>Dukungan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Non fisik) dari OPD Rumpun Ekonomi</i>

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternaka dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota terutama yang terkait Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
5. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya secara khusus berdasarkan tujuan dan saranan Dinas Pertanian tahun 2023 serta keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang, Prioritas Propinsi Jawa Tengah, dan Prioritas Nasional tahun 2023, terdapat kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian tahun 2023 yaitu:

1. Penguatan kelembagaan P4S (Pusat Penyuluhan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) sebagai komunitas pelatihan Pertanian regeneratif. P4S ini akan menjadi pusat pengembangan pertanian regeneratif melalui kegiatan-kegiatan percontohan (demo plot) maupun peningkatan kapasitas petani maupun pelaku usaha di bidang pertanian.
2. Peningkatan kapasitas SDM pertanian berbasis perkotaan meliputi pelatihan, talk show melalui platform Kobar Tani (Nongkrong Bareng Petani), bimbingan teknis, dan sosialisasi. Peningkatan SDM pertanian ini juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di

sector pertanian.

3. Penumbuhan dan pengembangan pertanian perkotaan melalui pemanfaatan lahan-lahan pekarangan baik di lingkungan pemukiman, perkantoran, sekolah, maupun di ruang publik lainnya.
4. Pengembangan sukun sebagai upaya diversifikasi pangan khususnya pangan berbasis sumberdaya lokal, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari rangkaian pengembangan sukun sebagai alternatif pengganti sumber pangan pokok.
5. Pembangunan kampung sawah di kelurahan Tambangan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan serta penumbuhan ekonomi local berbasis pertanian.
6. Surveilans dan pengobatan ternak untuk meningkatkan status kesehatan hewan dengan focus pada penyakit-penyakit hewan menular dan zoonosis, terutama pada PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menjadi wabah pada tahun 2022.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Laju pertumbuhan ekonomi**" dan indikator sasaran "**Kontribusi kategori-kategori yg terkait dengan perdagangan & jasa terhadap PDRB**";
3. Keserasian dan keterpaduan sector-sektor lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan sector Pertanian Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian Kota Semarang;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 10 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 40 kegiatan, yang terdiri dari 22 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 18 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah

sebesar Rp 32.198.237.245,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

- a. Rp 19.666.743.843,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin);
 - b. Rp 12.531.493.402,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.
5. Terdapat 3 sub kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan data pilah yaitu sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi , sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut secara eksplisif dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				32.198.237.245				25.401.029.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan		35922 ton	5.918.669.202			36219 ton	5.492.384.000
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		50647,76 ton				50857,23 ton	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya		40 kelompok	2.901.177.602			29 kelompok	2.218.155.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	Dinas Pertanian	19 ha	688.192.200	PAD		10 ha	1.023.155.000
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon		4 kelompok				6 kelompok	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan		5 kelompok				2 kelompok	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan		2 kelompok				4 kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pengembangan tanaman perkebunan							
		<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>		12 Laporan				12 Laporan	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	Dinas Pertanian	16 paket	2.212.985.402	PAD		16 paket	1.195.000.000
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak		6 kelompok				5 kelompok	
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP		8 kelompok				4 kelompok	
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting		22750 batang				30000 batang	
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi		3 kegiatan				3 kegiatan	
		Jumlah pengembangan tanaman sukun		110 batang				100 batang	
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan		12 kali				12 kali	
		<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>		30 Laporan				30 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif		62,5 persen	2.258.438.400			68,75 persen	2.092.244.000
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	Dinas Pertanian	16 unit	2.258.438.400	PAD		16 unit	2.092.244.000
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG		1500 batang				1000 batang	
		jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh						1 sertifikat	
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		6 Dokumen				6 Dokumen	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan		45 persen	595.720.000			50 persen	30.000.000
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	Dinas Pertanian	12 laporan	595.720.000	PAD		12 laporan	30.000.000
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan		2 kelompok				2 kelompok	
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan		12 Laporan				12 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>							
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak		60 ekor	163.333.200			75 ekor	1.126.985.000
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i> Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	Dinas Pertanian	60 ekor 16 kecamatan	163.333.200	PAD		75 ekor kecamatan	1.126.985.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun		6,38 ton/ha	5.181.664.800			6,38 ton/ha	322.130.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun		2 Dokumen	197.280.000			- Dokumen	0
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	Dinas Pertanian	1 dokumen 1 Laporan	97.680.000	PAD		- dokumen - Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun <i>Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan</i>	Dinas Pertanian	1 dokumen	99.600.000	PAD		- dokumen	0
				1 Dokumen				- Dokumen	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab		28 unit	4.984.384.800			1 unit	322.130.000
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Dinas Pertanian	2 unit	349.400.000	PAD		- unit	0
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian	1 unit	199.800.000	PAD		- unit	0
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian	2 unit	274.400.000	PAD		- unit	0
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian	23 unit	4.160.784.800	PAD		1 unit	322.130.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		-5 %	494.652.000			-5 %	367.189.000
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular		14 kelurahan	402.352.000			14 kelurahan	217.189.000
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	Dinas Pertanian	25 kali	402.352.000	PAD		25 kali	217.189.000
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas		3500 ekor				3500 ekor	
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		12 Laporan				12 Laporan	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet		92 persen	92.300.000			94 persen	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	Dinas Pertanian	100 persen	92.300.000	PAD		100 persen	150.000.000
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)		100 persen				100 persen	
		Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan		4 laporan				- laporan	
		<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>		12 Laporan				12 Laporan	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan		75 %	187.400.000			80 %	125.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim		7 kelompok	187.400.000			7 kelompok	125.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	Dinas Pertanian	4 kelompok	125.780.000	PAD		3 kelompok	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		100 Ha				100 Ha	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	Dinas Pertanian	3 kelompok	61.620.000	PAD		4 kelompok	50.000.000
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		40 Ha				40 Ha	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama		28 kelompok	749.107.400			31 kelompok	601.170.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		40 persen	749.107.400			50 persen	601.170.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	Dinas Pertanian	5 kegiatan	148.200.000	PAD		2 kegiatan	80.000.000
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 unit				5 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	Dinas Pertanian	5 kelompok	546.986.200	PAD		5 kelompok	446.170.000
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya		840 orang				100 orang	
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani		5 kegiatan				2 kegiatan	
		<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>		40 Unit				40 Unit	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Dinas Pertanian	100 persen	53.921.200	PAD		100 persen	75.000.000
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>		4 Unit				4 Unit	
NON URUSAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100 %	19.666.743.843			100 %	18.493.156.000
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100 %		100 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD		100 %		100 %			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan &		27 dokumen	11.439.366			27 dokumen	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja PD yang dihasilkan							
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	6 dokumen	5.952.265	PAD		6 dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	21 dokumen	5.487.101	PAD		21 dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD		7 dokumen	14.051.723.863			4 dokumen	15.829.456.000
		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD		100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	Dinas Pertanian	100 persen	13.825.874.245	PAD		100 persen	15.623.456.000
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		95 Orang/bulan				95 Orang/bulan	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	Dinas Pertanian	100 persen	222.100.000	PAD		100 persen	200.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen				1 Dokumen	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	2 dokumen	1.292.978	PAD		2 dokumen	1.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	4 dokumen	1.637.760	PAD		4 dokumen	3.000.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	1 dokumen	818.880	PAD		2 dokumen	1.500.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum		100 persen	1.481.592.614			100 persen	802.000.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	11 jenis	68.832.000	PAD		10 jenis	40.000.000
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket				1 Paket	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	11 jenis	355.910.614	PAD		30 jenis	240.000.000
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		11 Paket				11 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	Dinas Pertanian	10 jenis	40.000.000	PAD		11 jenis	60.000.000
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		2 Paket				2 Paket	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Dinas Pertanian	3 Jenis	10.080.000	PAD		3 Jenis	7.000.000
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		1 Dokumen				1 Dokumen	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Dinas Pertanian	100 persen	36.000.000	PAD		100 persen	75.000.000
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		12 Laporan				12 Laporan	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	Dinas Pertanian	100 persen	284.823.000	PAD		100 persen	180.000.000
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		12 Laporan				12 Laporan	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	Dinas Pertanian	5 jenis	685.947.000	PAD		5 jenis	200.000.000
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem</i>		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>							
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100 persen	703.630.000			100 persen	133.200.000
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	Dinas Pertanian	13 jenis	604.016.000	PAD		3 jenis	50.000.000
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		100 Unit				100 Unit	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	Dinas Pertanian	6 jenis	99.614.000	PAD		3 jenis	83.200.000
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		21 Unit				21 Unit	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor		100 persen	1.344.137.000			100 persen	1.028.500.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Dinas Pertanian	100 persen	206.773.000	PAD		100 persen	220.000.000
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan				12 Laporan	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	100 persen	1.137.364.000	PAD		100 persen	808.500.000
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan</i>		12 Laporan				12 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Umum Kantor yang Disediakan</i>							
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD		100 persen	2.074.221.000			100 persen	690.000.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Pertanian	1 unit	40.314.000	PAD		1 unit	40.000.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pertanian	66 unit	540.161.000	PAD		66 unit	350.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanian	7 jenis	193.746.000	PAD		10 jenis	125.000.000
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		210 Unit				210 Unit	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	Dinas Pertanian	11 gedung	1.300.000.000	PAD		9 gedung	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11 Unit				11 Unit	

Untuk perencanaan tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang juga mengajukan usulan anggaran dan kegiatan kepada pemerintah pusat melalui eproposal pada Kementerian Pertanian, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik. Khusus untuk DAK fisik, tahun 2023 Kota Semarang masuk dalam lokasi prioritas untuk DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian. Adapun total anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat adalah Anggaran yang diajukan kepada pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 24.401.299.853,- yang terdiri dari Rp 857.500.000,- eproposal Kementerian Pertanian, Rp 2.022.199.992,- DAK non Fisik, dan Rp 21.521.599.861,-. Rincian usulan kegiatan ke pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 4.2 – 4.4 berikut:

Tabel 4. 2.
Pengajuan Kegiatan e-Proposal Kementerian Pertanian Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volume	Unitcost	Total
1.	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Aneka Cabai	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Tanpa Sub Komponen	Hortikultura	Aneka cabai	1	12.000.000	12.000.000
2.	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Pisang	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Tanpa Sub Komponen	Hortikultura	Pisang	1	20.750.000	20.750.000
3.	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Kelompok Masyarakat	Optimalisasi Reproduksi	Pelatihan SDM IB	Pelatihan Petugas IB	Peternakan	Sapi Perah	2	13.000.000	26.000.000
4.	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Kelompok Masyarakat	Ternak Ruminansia Perah	Sapi Perah	Tanpa Sub Komponen	Peternakan	Sapi Perah	24	25.333.333	607.999.992
5.	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Kelompok Masyarakat	Ternak Ruminansia Potong	Sapi Potong	Tanpa Sub Komponen	Peternakan	Sapi Potong	5	17.250.000	86.250.000
6.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor	Cultivator	PSP	Semua Komoditas Hortikultura	5	18.000.000	90.000.000

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volume	Unitcost	Total
	Alat Mesin Pertanian	Hidup	Hortikultura	Hortikultura						
7.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Kabupaten)	Tanpa Sub Komponen	PSP	Semua Komoditas	1	87.200.000	87.200.000
8.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik Lainnya	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	PSP	Semua Komoditas Peternakan	4	200.000.000	800.000.000
9.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Traktor Roda 2 (6,5 HP)	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	1	23.000.000	23.000.000
10.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa)	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa)	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa)	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	1	127.000.000	127.000.000
11.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	1	120.000.000	120.000.000

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volume	Unitcost	Total
12.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Hand Sprayer (Elektrik)	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	22	1.000.000	22.000.000
13.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik kepada masyarakat	e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung Kartu Tani (Kabupaten)	Tanpa Sub Komponen	PSP	Semua Komoditas	1	108.340.000	108.340.000
14.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Jaringan Irigasi Tersier	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Tanpa Sub Komponen	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	5	75.000.000	375.000.000
JUMLAH										20.22.199.992

Tabel 4. 3.
Usulan DAK Non Fisik Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Kegiatan	Komponen	Sub sektor	Volume	Unitcost	Total
1	Biaya Operasional Puskesmas	Pengadaan obat	Peternakan	2	40.000.000	80.000.000
2	Biaya Operasional Puskesmas	Operasional Petugas pelapor ke iSIKHNAS	Peternakan	2	3.600.000	7.200.000
3	Biaya Operasional Puskesmas	Operasional pelayanan kesehatan hewan	Peternakan	1	27.000.000	27.000.000
4	Biaya Operasional Puskesmas	Operasional surveilans	Peternakan	1	22.500.000	22.500.000
5	Biaya Operasional Puskesmas	Koordinasi	Peternakan	1	3.000.000	3.000.000
6	Biaya Operasional Puskesmas	Pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BBVet/Bvet	Peternakan	2	3.900.000	7.800.000
7	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Pengadaan sarana perbenihan	Hortikultura	5	25.000.000	125.000.000
8	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Pengembangan demplot	Hortikultura	8	30.000.000	240.000.000
9	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Pertanaman	Hortikultura	8	15.000.000	90.000.000
10	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Penanganan pascapanen	Hortikultura	1	10.000.000	10.000.000
11	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Operasional kegiatan P2L	Hortikultura	1	5.000.000	5.000.000
12	Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian	Pusat Pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM Pertanian (pelatihan tematik)	Penyuluhan	12	20.000.000	240.000.000
JUMLAH						857.500.000

Tabel 4. 4.
Usulan DAK Fisik Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang

DETAIL RINCIAN	VOLUME	SATUAN	NILAI USULAN
09-Pertanian			
02-Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)			
01-Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian			
01-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)			
3374.010.005-PURWOSARI	1	Unit / 50 Ha	176.000.000
3374.010.006-TAMBANGAN	1	Unit / 50 Ha	320.000.000
3374.010.013-WONOLOPO	1	Unit / 50 Ha	240.000.000
3374.020.003-SUMUREJO	1	Unit / 50 Ha	400.000.000
3374.020.008-NONGKOSAWIT	1	Unit / 50 Ha	400.000.000
3374.020.009-CEPOKO	1	Unit / 50 Ha	640.000.000
3374.030.003-JABUNGAN	1	Unit / 50 Ha	200.000.000
3374.150.002-TUGUREJO	1	Unit / 50 Ha	136.000.000
3374.150.007-MANGKANG KULON	1	Unit / 50 Ha	320.000.000
3374.160.001-PODOREJO	1	Unit / 50 Ha	640.000.000
3374.160.003-BRINGIN	1	Unit / 50 Ha	400.000.000
3374.160.010-WONOSARI	1	Unit / 50 Ha	160.000.000
02-Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor tanaman pangan			
3374.140.013-TAWANGSARI	1	Unit	140.000.000
03-Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor hortikultura			
3374.020.005-MANGUNSARI	1	Unit	140.000.000
11-Pembangunan embung sektor peternakan			
3374.020.003-SUMUREJO	1	Unit	120.000.000
02-Pembangunan Jalan Pertanian			
01-Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan			
3374.010.003-KARANGMALANG	1	Unit	70.000.000
04-Pembangunan Jalan Produksi sektor Peternakan			
3374.010.012-NGADIRGO	1	Unit	160.000.000
03-Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya			
01-Ruang data dan sistem informasi			
1105-BPP Mijen	1	Unit	100.000.000
1107-BPP Gayamsari	1	Unit	100.000.000
1108-BPP Banyumanik	1	Unit	100.000.000
1109-BPP Ngaliyan	1	Unit	100.000.000
02-Ruang multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi)			
1105-BPP Mijen	1	Unit	150.000.000
1106-BPP Gunungpati	1	Unit	150.000.000
1107-BPP Gayamsari	1	Unit	150.000.000

DETAIL RINCIAN	VOLUME	SATUAN	NILAI USULAN
1108-BPP Banyumanik	1	Unit	150.000.000
1109-BPP Ngaliyan	1	Unit	150.000.000
03-Ruang klinik agribisnis			
1105-BPP Mijen	1	Unit	100.000.000
1106-BPP Gunungpati	1	Unit	100.000.000
1107-BPP Gayamsari	1	Unit	100.000.000
1108-BPP Banyumanik	1	Unit	100.000.000
1109-BPP Ngaliyan	1	Unit	100.000.000
04-Laboratorium mini			
1105-BPP Mijen	1	Unit	100.000.000
1106-BPP Gunungpati	1	Unit	100.000.000
05-Green house/percontohan			
1105-BPP Mijen	1	Unit	75.000.000
1106-BPP Gunungpati	1	Unit	75.000.000
1107-BPP Gayamsari	1	Unit	75.000.000
1108-BPP Banyumanik	1	Unit	75.000.000
1109-BPP Ngaliyan	1	Unit	75.000.000
06-Sarana keinformasian			
1105-BPP Mijen	1	Unit	100.000.000
1106-BPP Gunungpati	1	Unit	100.000.000
1107-BPP Gayamsari	1	Unit	100.000.000
1108-BPP Banyumanik	1	Unit	100.000.000
1109-BPP Ngaliyan	1	Unit	100.000.000
07-Alat bantu penyuluhan pertanian			
1105-BPP Mijen	1	Unit	50.000.000
1106-BPP Gunungpati	1	Unit	50.000.000
1107-BPP Gayamsari	1	Unit	50.000.000
1108-BPP Banyumanik	1	Unit	50.000.000
1109-BPP Ngaliyan	1	Unit	50.000.000
04-Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya			
02-Peralatan laboratorium			
3374.100-GAYAMSARI	1	Unit	100.000.000
03-Peralatan nekropsis, pengambil dan pengemasan contoh uji			
3374.010-MIJEN	1	Unit	50.000.000
04-Peralatan klinik			
3374.010-MIJEN	1	Unit	50.000.000
3374.100-GAYAMSARI	1	Unit	50.000.000
05-Peralatan bedah			
3374.010-MIJEN	1	Unit	50.000.000
3374.100-GAYAMSARI	1	Unit	50.000.000

DETAIL RINCIAN	VOLUME	SATUAN	NILAI USULAN
06-Peralatan reproduksi dan kebidanan			
3374.010-MIJEN	1	Unit	50.000.000
3374.100-GAYAMSARI	1	Unit	50.000.000
07-Peralatan produksi ternak			
3374.010-MIJEN	1	Unit	50.000.000
3374.100-GAYAMSARI	1	Unit	50.000.000
08-Peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak (mobile) USG			
3374.010-MIJEN	1	Unit	120.000.000
3374.100-GAYAMSARI	1	Unit	120.000.000
06-Sarana dan Prasarana Pertanian			
01-Unit pengolahan hasil komoditas pertanian			
3374.090-GENUK	2	Unit	300.000.000
02-Bangunan Rice Milling Unit (RMU)			
3374.010-MIJEN	1	Unit	200.000.000
03-Bangunan Dryer padi Kapasitas 10 ton			
3374.010-MIJEN	1	Unit	350.000.000
04-Sarana pra panen			
3374.010-MIJEN	6	Paket	120.000.000
3374.020-GUNUNG PATI	5	Paket	140.000.000
3374.030-BANYUMANIK	6	Paket	120.000.000
3374.040-GAJAH MUNGKUR	2	Paket	20.000.000
3374.070-TEMBALANG	1	Paket	10.000.000
3374.090-GENUK	1	Paket	20.000.000
3374.120-SEMARANG UTARA	1	Paket	20.000.000
3374.140-SEMARANG BARAT	2	Paket	40.000.000
3374.150-TUGU	4	Paket	80.000.000
3374.160-NGALIYAN	3	Paket	60.000.000
05-Sarana pascapanen			
3374.010-MIJEN	13	Paket	710.000.018
3374.020-GUNUNG PATI	13	Paket	740.000.001
3374.030-BANYUMANIK	5	Paket	245.000.000
3374.050-SEMARANG SELATAN	2	Paket	100.000.000
3374.070-TEMBALANG	7	Paket	329.999.999
3374.080-PEDURUNGAN	1	Paket	65.000.000
3374.090-GENUK	2	Paket	115.000.000
3374.120-SEMARANG UTARA	1	Paket	50.000.000
3374.140-SEMARANG BARAT	2	Paket	115.000.000
3374.160-NGALIYAN	4	Paket	195.000.000

DETAIL RINCIAN	VOLUME	SATUAN	NILAI USULAN
07-Pertanian presisi dan regeneratif			
01-Sarana dan prasarana pertanian presisi			
3374.020-GUNUNG PATI	3		1.500.000.000
3374.030-BANYUMANIK	1	Paket	500.000.000
3374.040-GAJAH MUNGKUR	2	Paket	1.000.000.000
02-Instalasi pertanian regeneratif			
3374.010-MIJEN	1	Unit	3.000.000.000
3374.070-TEMBALANG	1	Unit	2.949.599.843
JUMLAH			21.521.599.861

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanian ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program beserta indikatornya pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja 2023. Adapun pada level kegiatan dan subkegiatan, tidak semua kegiatan maupun subkegiatan yang ada pada Renstra untuk tahun 2023 termuat dalam Renja 2023. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran subkegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian;
3. Indikator *output*/keluaran pada subkegiatan selain mengacu pada indikator yang terdapat dalam Renstra Tahun 2021-2026 juga mengacu pada indikator *output* yang dibakukan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan Pertanian di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijadikan pedoman kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun dan memiliki fungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis. Renja OPD perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Dalam upaya mewujudkan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah, maka Renja merupakan sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah, yang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disamping itu kedudukan RENSTRA akan dijabarkan dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Organisasi Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang akan APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.

Ukuran tingkat kualitas baik dan buruknya dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari 6 (enam) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang; tahap perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Nomor: 13);
- 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor: 8 Tambahan Nomor: 43);
- 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
- 12 Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- 13 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk 1 (satu) tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun 2023, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang, proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang, keterkaitan antara Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan dokumen RKPD, dengan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perdagangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan Kota Semarang dan atau realisasi APBD.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Perdagangan Kota Semarang, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menguraikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Menjelaskan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah yang langsung ditunjukkan kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan/kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang

4.2. Rencana Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP Berisikan uraian berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah- kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 2021

Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2021 telah melaksanakan 7 (tujuh) program yang tercantum dalam penetapan kinerja yang terdiri dari 1 (satu) program yang bersifat pendukung terhadap program utama dan 6 (enam) program yang menjadi urusan pilihan pada bidang perdagangan. Terhadap masing-masing program tersebut telah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaannya dengan hasil sebagai berikut

2.1.1. Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 42.610.228.105,- proporsi realisasi anggaran sebesar 91,02% atau Rp. 38.782.240.740,- Indikator programnya adalah Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, serta Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.
Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :
 - a. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%.
 - b. Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%.
 - c. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun dengan output sebesar 100%.
 - d. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk karcis retribusi dan blangko-blangko administrasi memperoleh output sebesar 100%.
 - e. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor memperoleh output sebesar 100%.
 - f. Tersedianya peralatan rumah tangga memperoleh output sebesar 100%.

- g. Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat-rapat memperoleh output sebesar 100%.
- h. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah memperoleh output sebesar 100%.
- i. Tersedianya pelayanan jasa Administrasi Perkantoran selama 12 bulan memperoleh output sebesar 100%.
- j. Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%
- k. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua memperoleh output sebesar 100%.
- l. Terpeliharanya gedung kantor Dinas Perdagangan memperoleh output sebesar 100%.
- m. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor memperoleh output sebesar 100%.
- n. Tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD, LKJIP Dinas Perdagangan tahun 2020, memperoleh output sebesar 100%.
- o. Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perdagangan tahun 2020, memperoleh output sebesar 100%.
- p. Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Semester I Dinas Perdagangan tahun 2021, memperoleh output sebesar 100%.
- q. Tersusunnya dokumen Prognosis Anggaran Semester II Dinas Perdagangan tahun 2021, memperoleh output sebesar 100%.
- r. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan tahun 2022, memperoleh output sebesar 100%.
- s. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perdagangan tahun 2021, memperoleh output sebesar 100%.
- t. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan tahun 2022, memperoleh output sebesar 100%.

2.1.2 Program Urusan Pilihan Perdagangan

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, alokasi anggaran sejumlah Rp. 246.399.135,- realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 240.392.871,- atau 97,56%. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, memiliki 1 indikator kinerja yaitu Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani dengan tingkat capaian 100%.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja

kuantitatif berbanding realisasi sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, realisasi keuangan tercatat 97,56% atau Rp. 240.392.871,- fisik 100% dari pagu Rp. 246.399.135,- dengan hasil yaitu penerbitan surat izin tempat dasaran bagi pedagang pasar dan PKL secara tepat waktu serta updating data pedagang pada sistem yang terintegrasi secara elektronik;

2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, alokasi anggaran sejumlah Rp.988.336.640,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.873.842.368,- atau 88,42%, Indikator programnya yaitu Persentase alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang sesuai standar dengan realisasi sebesar 100% sesuai target, yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 90%. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang realisasi keuangan tercatat 84,39% atau Rp.489.207.600,- dari pagu Rp.579.722.208,- hasilnya yaitu operasional pelayanan tera dan tera ulang selama 12 bulan, memperoleh output sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, realisasi keuangan 94,13% atau Rp.384.634.768 dari pagu Rp.408.614.432, hasilnya yaitu sosialisasi metrologi legal kepada wajib tera dengan output sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi anggaran sejumlah Rp. 22.539.356.391,- dengan realisasi fisik 94,7% dan keuangan Rp. 21.037.349.141,- atau 93,34%, Indikator programnya yaitu Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif dengan realisasi sebesar 18 pasar tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 19 pasar sebab ketersediaan anggaran digunakan untuk perbaikan ringan/rehab bangunan di beberapa pasar di Kota Semarang yang sebagian besar memerlukan penanganan segera karena kondisi bangunan rusak membahayakan pedagang dan pengunjung pasar. Besaran output yang diperoleh

berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi keuangan 94,55% atau Rp.7.967.890.008 dari pagu Rp.8.426.996.254, hasilnya perbaikan bangunan fisik dan perbaikan instalasi listrik pasar di 6 korwil Pasar dengan output sebesar 100%;
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi keuangan 93,34% atau Rp.7.381.574.054 dari pagu Rp.7.908.298.549, hasilnya pemenuhan layanan kebersihan serta operasional sarana prasarana pasar di 6 korwil pasar dengan output sebesar 100%;
 - c. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi keuangan 87,85% atau Rp.2.837.243.048 dari pagu Rp.3.229.715.245, hasilnya penertiban pasar tumpah serta patroli rutin keamanan dan ketertiban pedagang pasar dengan output sebesar 100%;
 - d. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi keuangan 95,84% atau Rp.2.850.642.031 dari pagu Rp.2.974.346.343, hasilnya optimalisasi pendapatan retribusi pasar dan PKL dengan output sebesar 100%.
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, alokasi anggaran sejumlah Rp.187.129.641,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.156.292.026,- atau 83,52%, Indikator programnya yaitu Stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dengan realisasi sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, realisasi keuangan 84,37% atau Rp.109.850.809 dari pagu Rp.130.193.777, hasilnya pelaksanaan pasar murah dalam event bazar ramadhan dengan output sebesar 100%;
- b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, realisasi keuangan 81,57% atau Rp.46.441.217 dari pagu Rp.56.935.864, hasilnya monitoring harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dengan output sebesar 100%.

5. Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor, alokasi anggaran sejumlah Rp.1.003.993.237,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.815.767.569,- atau 81,25%, Indikator programnya yaitu Nilai ekspor perdagangan non migas dengan realisasi sebesar US\$ 1.117.549.543 tidak sesuai target yang ditetapkan sebesar US\$ 1,522,987,000, disebabkan adanya kondisi pandemi covid yang masih berlangsung juga adanya pembatasan dari negara tujuan untuk menekan impor dari negara eksportir Indonesia mengingat barang harus menjalani karantina yg membutuhkan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dari Indonesia. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 97,53% atau Rp.130.689.580 dari pagu Rp.133.999.727, hasilnya pembinaan pelaku usaha potensial ekspor dengan output sebesar 100%;
- b. Pameran Dagang Nasional, realisasi keuangan 78,75% atau Rp.685.077.989 dari pagu Rp.869.993.510, hasilnya fasilitasi UMKM dalam pameran berskala nasional dengan output sebesar 100%;

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, alokasi anggaran sejumlah Rp.431.325.095,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.405.812.403,- atau 94,09%, Indikator programnya yaitu Prosentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan dengan realisasi sebesar 15% sesuai target yang ditetapkan. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 92,13% atau Rp.240.273.500 dari pagu Rp.260.795.093, hasilnya pelaksanaan Semarang Great Sale dengan output sebesar 100%;
- b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 97,25% atau Rp.71.572.903 dari pagu Rp.73.600.000, hasilnya fasilitasi UMKM dalam pameran lokal dengan output sebesar 100%;

- c. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, realisasi keuangan 96,94% atau Rp.93.966.000 dari pagu Rp.96.930.002, hasilnya pembinaan terhadap pelaku usaha toko modern dengan output sebesar 100%;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang, adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tugas

Dinas Perdagangan Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- 2 perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3 pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- 4 penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5 penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- 6 penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- 7 penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;
- 8 penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- 9 penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- 10 penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- 11 penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 12 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang, maka Struktur Organisasi Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga
- d. Bidang Bina Usaha
- e. Bidang Penataan dan Penetapan
- f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan
- g. UPTD Metrologi Legal
- h. Jabatan fungsional

Dilihat dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.68.006.768.244 terealisasi Rp.62.311.697.118 atau 91,62%, target fisik 100% realisasi fisik 100%, sementara untuk realisasi keuangan dibandingkan target masih ada selisih minus 8,38%.

Secara ringkas berikut perhitungan pagu dan realisasi keuangan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
A	Belanja Operasi	64.043.169.548	58.843.437.223	5.199.732.325	91,88
	Belanja Pegawai	31.129.681.744	29.175.614.321	1.954.067.423	93,72
	Belanja Barang dan Jasa	32.913.487.804	29.667.822.902	3.245.664.902	90,14
B	Belanja Modal	3.963.598.696	3.468.259.895	495.338.801	87,50
	Belanja Tanah	956.273	0	956.273	0
	Belanja Peralatan dan Mesin	799.843.420	753.983.000	45.860.420	94,27
	Belanja Bangunan dan Gedung	2.675.460.133	2.297.266.137	378.193.996	85,86
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	487.388.870	417.010.758	70.328.112	85,57
	JUMLAH	68.006.768.244	62.311.697.118	5.695.071.126	91,63

Sisa lebih pada belanja disebabkan karena efisiensi pada belanja perjalanan dinas, penggandaan/cetak, belanja air, listrik, dan telepon, belanja komponen listrik kantor, belanja BBM kendaraan operasional. Disamping itu adanya Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) pada proses negosiasi pada saat pengadaan barang/jasa.

Kemudian untuk capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang terdiri dari 7 Program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Prosentase tercapainya penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi, target 100% realisasi 100%
 - Prosentase terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, target 100% realisasi 100%.
 - Prosentase terlaksananya tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, target 100% realisasi 100%
2. Program Pengembangan Ekspor
 - Nilai ekspor non migas, realisasi sebesar US\$ 1.117.549.543 menurun dari tahun sebelumnya sebesar US\$ 3.084.439.326.
 - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, realisasi sebesar 31,34% sudah sesuai target yang ditetapkan dan meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 31,27%.
3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Persentase alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang sesuai standar realisasi 100% sesuai target dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 90%.

4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pada tahun 2021 berhasil meningkatkan jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif dari tahun sebelumnya yang hanya 17 pasar menjadi 18 pasar, walaupun masih kurang dari target seharusnya yaitu 19 pasar, disebabkan ketersediaan anggaran digunakan untuk perbaikan ringan/rehab bangunan di beberapa pasar di Kota Semarang yang sebagian besar memerlukan penanganan segera karena kondisi bangunan rusak membahayakan pedagang dan pengunjung pasar.
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil memenuhi target stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, dari yang ditargetkan sebesar 100% dapat terealisasi sepenuhnya, atau berhasil mencapai target sebesar 100%.
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil memenuhi target prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani, dari yang ditargetkan sebesar 100% dapat terealisasi sepenuhnya, atau berhasil mencapai target sebesar 100%.
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil memenuhi target prosentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan, dari yang ditargetkan sebesar 15% dapat terealisasi sepenuhnya, atau berhasil mencapai target sebesar 100%

2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Kinerja pelayanan OPD dan Hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
Pelayanan OPD sektor perdagangan diarahkan untuk (1) penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri; (2) peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing; (3) optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk; (4) peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online.

B. Permasalahan dan Hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya :

(1) kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri; (2) belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan; (3) belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan rendahnya penggunaan produk dalam negeri; (4) kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen; (5) belum optimalnya penanganan dan pengawasan perdagangan berbasis sistem elektronik.

C. Peluang dan Tantangan

Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :

Tantangan :

- 1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen
- 2) Persaingan perdagangan di dalam negeri belum sehat;
- 3) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
- 4) Banyak sawah dan perkebunan yang berubah fungsi;

Peluang :

- 1) Permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat;
- 2) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
- 3) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan.

2. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :

Tantangan :

- 1) Adanya kecenderungan masih tingginya impor bahan baku atau penolong untuk kegiatan ekspor, sehingga perlu diupayakan tumbuhnya industri yang mendukung substitusi impor;
- 2) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (*emerging market*) termasuk produk dari Kota Semarang;
- 3) Makin gencarnya isu lingkungan yakni adanya tuntutan negara maju agar produk yang masuk ke negaranya tidak merusak lingkungan;
- 4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
- 5) Masih banyak pengusaha yang belum menerapkan hasil - hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) perguruan tinggi sehingga produk-produk inovatif dan kreatif belum dikembangkan sesuai selera pasar.

Peluang :

- 1) Selain ASEAN, pasar non tradisional perlu dikembangkan untuk itu perlu dilakukan penetrasi ke pasar di negara-negara seperti : Amerika Latin maupun Amerika Tengah, Timur Tengah dan Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Rusia, Kawasan Australia dan Selandia Baru (kewilayahan pasar non tradisional);
- 2) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (*Dumping, Subsidy, Safeguard*) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forum-forum ekspor;
- 3) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Kota Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang.

3. Perlindungan Konsumen;

Tantangan :

- 1) Banyaknya arus masuk produk-produk barang dan jasa sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif terkait produk-produk impor dan lokal yang sesuai SNI dan persyaratan teknis lainnya (Label dan MKG Berbahasa Indonesia);

- 2) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen;
- 3) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen.

Peluang :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia yang cukup dinamis;
- 2) Regulasi/kebijakan perdagangan yang mempermudah investasi dan perijinan berusaha;
- 3) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);
- 4) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kota Semarang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan kesepakatan hasil musrenbang Kota.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang selaku OPD yang membidangi urusan perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan adalah Pembangunan Pasar Ngaliyan, Pembuatan Lahan Parkir Pasar Wonodri dan Pembangunan dan Penataan Pasar Klithikan yang akan diakomodir dalam kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pertumbuhan yang berkualitas yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2023, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Penjelasan secara singkat masing-masing prioritas nasional sebagai berikut :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital; (4) memperbaiki iklim usaha dan

meningkatkan investasi; (5) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (6) meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN; (7) meningkatkan industri halal dan produk sehat. Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian dan non pertanian akan difokuskan pada (1) industri hulu strategis agro, kimia dan logam; dan (2) industri yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik, elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki. Dukungan bagi industrialisasi terintegrasi hulu-hilir dan yang berbasis hilirisasi sumber daya alam, salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa yang mencakup (1) fasilitasi investasi dan perizinan pembangunan kawasan industri (KI) Teluk Weda, KI/KEK Galang Batang, KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI/KEK Palu, KI Surya Borneo, KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, dan KI/KEK Bitung, (2) fasilitasi koordinasi, perizinan dan pembangunan KI Kuala Tanjung, KI Bintang Aerospace, KI Tanjung Enim, dan KI Jorong, (3) inisiasi kerjasama pembangunan KI Tanah Kuning, KI Madura, KI Teluk Bintuni, KI Tanggamus, KI Sadai, KI Kemingking, dan KI Way Pisang, (4) percepatan pembangunan KEK Sorong, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan KEK Tanjung ApiApi. KI Teluk Bintuni difasilitasi dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dukungan untuk Kawasan Industri juga mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga, lembaga pendidikan, industri dan Pemerintah Daerah. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi untuk menyusun Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang (RRTR/RDTR) di sekitar kawasan industri. Khusus kawasan industri di pantai utara Jawa akan diintegrasikan dengan dukungan konektivitas serta pasokan energi dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Dukungan ini diharapkan dapat menurunkan biaya, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) meningkatkan sertifikasi kompetensi; (4) meningkatkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi.

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global (investasi inbound dan outbound); (4) meningkatkan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi; (5) mengelola impor; (6) meningkatkan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri; (7) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; (8) memfasilitasi start-up teknologi yang memasok produk dan jasa ke pasar internasional. Strategi peningkatan ekspor akan difokuskan pada peningkatan ekspor produk manufaktur berteknologi menengah dan tinggi melalui rantai produksi global, serta perluasan pasar ekspor terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Peningkatan ekspor juga akan disinergikan dengan penguatan diplomasi ekonomi termasuk melalui skema ekspansi dan investasi perusahaan Indonesia ke luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah pada diplomasi ekonomi juga akan dioptimalkan. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata akan difokuskan pada keterpaduan pemasaran, dan didukung dengan kerja sama diplomasi gastronomi

Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengembangkan skema pembiayaan berbasis HKI; (3) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; (4) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (5) meningkatkan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan; (6) mereformasi fiskal; (7) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dari 5 prioritas nasional tersebut Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan diharapkan di bawah 9% tahun 2022, karena pada tahun 2020 berhasil di bawah 10%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik menjadi 72,5%, Gini rasio diharapkan turun ke rentang 0,375-0,380 dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan dijaga di kisaran 4,8%-5,1%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Tujuan hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Adapun Tujuan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen.

Penguatan sektor ekspor merupakan tujuan dari misi keempat yaitu Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan Kota Semarang. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai defisit perdagangan.

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak konsumen. Perlindungan konsumen diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan usaha perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang dan sebagai upaya terwujudnya tujuan diatas maka **sasaran** Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah :

- Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan
- Peningkatan nilai ekspor non migas
- Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan kualitas perlindungan konsumen

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	40
		Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	3
		Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	4,09
		Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	5

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan Kota Semarang mempunyai Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - ✓ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah; sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ✓ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; sub kegiatan :
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Mebel
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan; sub kegiatan :
 - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; sub kegiatan :
 - ✓ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - ✓ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
 - ✓ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
 - ✓ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

5) Program Pengembangan Ekspor

Terdiri dari kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :

- ✓ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
- ✓ Pameran Dagang Nasional

6) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Terdiri dari kegiatan :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; sub kegiatan :

- ✓ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- ✓ Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

7) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Terdiri dari kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; sub kegiatan :

- ✓ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- ✓ Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- ✓ Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA
DINAS PERDAGANGAN
KOTA SEMARANG

Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah, dengan memperhatikan pencapaian target kinerja urusan perdagangan tahun 2021 telah merencanakan program dan kegiatan sebagaimana tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perdagangan Kota Semarang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Perdagangan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Selain target RPJMD, Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
2. Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas
3. Persentase koefisien variasi harga antar waktu
4. Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan dalam hal ketersediaan anggaran kegiatan. Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022
Kota Semarang

DINAS PERDAGANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3									
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	1							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	30	1	2						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	41	8	8	100%	8	8	100%
3	30	1	2	1					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	1	1	100%	1	1	100%
3	30	1	2	4					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20	4	4	100%	4	4	100%
3	30	1	2	7					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3	3	100%	3	3	100%
3	30	1	2						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	30	1	2	1					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	895	179	179	100%	174	174	100%
3	30	1	2	2					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	100%	1	1	100%
3	30	1	2	5					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3 30 1 2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240	48	48	100%	48	48	100%
3 30 1 2 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	10	10	100%	10	10	100%
3 30 1 2 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	11	11	100%	11	11	100%
3 30 1 2 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	100%	1	1	100%
3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 30 2 2	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 30 2 2 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9000	1800	1800	100%	1800	1800	100%
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	46%	36%	36%	100%	38%	38%	100%
3 30 3 2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	23	18	18	100%	19	19	100%
3 30 3 2 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	50	50	100%	50	50	100%
3 30 3 2 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	50	50	100%	50	50	100%
3 30 3 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	50	50	100%	50	50	100%
3 30 3 2 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60	12	12	100%	12	12	100%
3 30 3 2 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60	12	12	100%	12	12	100%
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,8%	4,11%	14%	0%	4,09%	4,09%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3 30 4 2	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 30 4 2 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60	12	12	100%	12	12	100%
3 30 4 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 30 4 2 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	60	12	12	100%	12	12	100%
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1,817,484,281	1,522,987,000	1,117,549,543	73%	1,568,676,610	1,568,676,610	100%
3 30 5 2	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36%	6%	6%	100%	12%	12%	100%
3 30 5 2 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	150	30	30	100%	30	30	100%
3 30 5 2 2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15	3	3	100%	3	3	100%
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91%	66%	66%	100%	71%	71%	100%
3 30 6 2	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91%	66%	66%	100%	71%	71%	100%
3 30 6 2 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	110110	80210	80210	100%	85910	85910	100%
3 30 6 2 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300	50	50	100%	50	50	100%
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60%	10%	10%	100%	20%	20%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3 30 7 2	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	500	100	100	100%	100	100	100%
3 30 7 2 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150	30	30	100%	30	30	100%
3 30 7 2 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100	20	20	100%	20	20	100%
3 30 7 2 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5	1	1	100%	1	1	100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kota Semarang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya nilai ekspor		Nilai ekspor	US\$ 1.339.164.982	US\$ 1.400.434.987	US\$ 1.461.712.992	US\$ 1.522.987.000	US\$ 1.163.718.499	US\$ 1.100.148.140	US\$ 3.084.439.326	US\$ 1.117.549.543	
2	Berkembang dan tertatanya pasar tradisional		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	15 pasar	17 pasar	19 pasar	21 pasar	15 pasar	17 pasar	17 pasar	18 pasar	
3	Tertatanya PKL		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	8 sentra	9 sentra	10 sentra	11 sentra	8 sentra	9 sentra	9 sentra	9 sentra	
4	Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen		Prosentase alat UTTP bertera	80%	85%	90%	100%	80%	85%	90%	100%	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2023 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Dinas
 Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				68,644,999,286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				68,644,999,286	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	37,783,834,286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	37,783,834,286	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	5,010,680	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	5,010,680	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1,879,440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1,879,440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	1,789,280	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	1,789,280	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1,341,960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1,341,960	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	26,371,280,969	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	26,371,280,969	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	25,960,951,529	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	25,960,951,529	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	408,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	408,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	776,480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	776,480	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	776,480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	776,480	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	776,480	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	776,480	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	997,597,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	997,597,600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	151,974,204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	151,974,204	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	350,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	350,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	177,750,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	177,750,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	277,873,396	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	277,873,396	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	148,424,316	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	148,424,316	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	148,424,316	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	148,424,316	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan	100%	9,081,080,721	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan	100%	9,081,080,721	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7,840,419,721	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7,840,419,721	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,240,661,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,240,661,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	1,180,440,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	1,180,440,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	623,272,430	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	623,272,430	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	14,544,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	14,544,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	311,603,570	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	311,603,570	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	231,020,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	231,020,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	126,338,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	126,338,000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	126,338,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	126,338,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	126,338,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	126,338,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	40%	28,444,442,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	40%	28,444,442,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	20	22,483,601,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	20	22,483,601,000	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	14,341,461,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	14,341,461,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8,142,140,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8,142,140,000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	5,960,841,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	5,960,841,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3,688,161,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3,688,161,000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	2,272,680,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	2,272,680,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,07%	150,566,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,07%	150,566,000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	150,566,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	150,566,000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	150,566,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	150,566,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1,615,736,908	627,695,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1,615,736,908	627,695,000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	18%	627,695,000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	18%	627,695,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	37,143,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	37,143,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	590,552,000	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	590,552,000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76%	804,852,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76%	804,852,000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	804,852,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	804,852,000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	91960	552,044,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	91960	552,044,000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	252,808,000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	252,808,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	25%	707,272,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	25%	707,272,000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	707,272,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	707,272,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	575,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	575,000,000	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	132,272,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	132,272,000	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jalan Ngaliyan Semarang	Pembangunan Pasar Ngaliyan	1 lokasi	
	2. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jl. Wonodri Baru RT 1 RW 6	Pembuatan Lahan Parkir Pasar Wonodri	1 lokasi	
	3. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sawah Besar XIII/Pasar Klithikan Waru RT 5 RW 6 Kaligawe	Pembangunan dan Penataan Pasar Klithikan	1 lokasi	

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							68,644,999,286	159,054,433,000		
3	30	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase kinerja administrasi dan pelaporan						37,783,834,286	47,454,777,000		
3	30	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja					5,010,680	32,000,000		
3	30	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 dokumen	100 persen	1,879,440	8,000,000
3	30	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	4 dokumen	100 persen	1,789,280	12,000,000

3	30	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	3 dokumen	100 persen	1,341,960	12,000,000
3	30	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase kinerja administrasi	Persentase kinerja administrasi						26,371,280,969	33,404,777,000
3	30	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	174 orang	100 %	25,960,951,529	32,908,777,000

3	30	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	100 persen	100 %	408,000,000	484,000,000
3	30	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 dokumen	100 %	776,480	4,000,000
3	30	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 dokumen	100 %	776,480	4,000,000
3	30	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 dokumen	100 %	776,480	4,000,000
3	30	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan	persentase ketersediaan						997,597,600	1,725,000,000
3	30	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 paket	100 persen	10,000,000	10,000,000

3	30	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 paket	100 persen	30,000,000	30,000,000
3	30	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 paket	100 persen	151,974,204	200,000,000
3	30	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 paket	100 persen	350,000,000	800,000,000
3	30	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	120 laporan	100 persen	177,750,000	185,000,000
3	30	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	24 laporan	100 persen	277,873,396	500,000,000
3	30	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah	persentase ketersediaan	persentase ketersediaan						148,424,316	100,000,000
3	30	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 paket	100 persen	148,424,316	100,000,000

3	30	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	ketersediaan kebutuhan jasa	ketersediaan kebutuhan jasa							9,081,080,721	10,907,000,000
3	30	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	12 laporan	100 persen		7,840,419,721	10,000,000,000
3	30	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	12 laporan	100 persen		1,240,661,000	907,000,000
3	30	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan sarana prasarana	pemeliharaan sarana prasarana							1,180,440,000	1,286,000,000
3	30	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	48 unit	100 persen		623,272,430	721,000,000
3	30	1	2	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	10 jenis	100 persen		14,544,000	16,000,000
3	30	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	11 persen	100 persen		311,603,570	316,000,000
3	30	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemenuhan kebutuhan sarpras kantor	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 persen	1 unit	100 persen		231,020,000	233,000,000

3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN	Persentase pelayanan									126,338,000	235,000,000
3	30	2	2		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar	Prosentase pengurusan izin	Prosentase pengurusan izin								126,338,000	235,000,000
3	30	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan distribusi perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	100 Persen	1800 dokumen	100 persen	126,338,000	235,000,000		
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN	Tingkat ketersediaan									28,444,442,000	103,238,520,000
3	30	3	2		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	Jumlah sarana prasarana	Jumlah sarana prasarana								22,483,601,000	97,188,520,000
3	30	3	2	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan distribusi perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	20 pasar	50 pasar	100 persen	14,341,461,000	89,688,520,000		
3	30	3	2	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan distribusi perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	20 pasar	50 pasar	100 persen	8,142,140,000	7,500,000,000		

3	30	3	2		Pembinaan Terhadap Pengelola	jumlah sarana prasarana	jumlah sarana prasarana							5,960,841,000	6,050,000,000
3	30	3	2	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan distribusi perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	20 pasar	12 dokumen	100 persen		3,688,161,000	3,178,000,000
3	30	3	2	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan distribusi perdagangan	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	20 pasar	12 dokumen	100 persen		2,272,680,000	2,872,000,000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA	Persentase koefisien variasi								150,566,000	150,000,000
3	30	4	2		Pengendalian Harga, dan Stok	Persentase laporan harga	Persentase laporan harga							150,566,000	150,000,000
3	30	4	2	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	4.07 Persen	12 laporan	100 persen		150,566,000	150,000,000

3	30	5			PROGRAM	Nilai ekspor non								627,695,000	900,000,000
3	30	5	2		PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Promosi Dagang	PUPAS Persentase pelaku usaha yang	Persentase pelaku usaha yang							627,695,000	900,000,000
3	30	5	2	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai ekspor non migas	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Peningkatan pemasaran produk lokal	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	1615736908 US\$	30 orang	100 persen	37,143,000	100,000,000	
3	30	5	2	2	Pameran Dagang Nasional	Nilai ekspor non migas	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Peningkatan pemasaran produk lokal	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	1615736908 US\$	3 UMKM	100 persen	590,552,000	800,000,000	
3	30	6			PROGRAM	Persentase alat -								804,852,000	1,076,136,000
3	30	6	2		Pelaksanaan	Persentase alat-	Persentase alat-							804,852,000	1,076,136,000
3	30	6	2	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Peningkatan Perlindungan konsumen	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	76 Persen	91960 buah	100 persen	552,044,000	644,322,000	
3	30	6	2	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Peningkatan Perlindungan konsumen	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	76 Persen	50 orang	100 persen	252,808,000	431,814,000	

3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi							707,272,000	6,000,000,000
3	30	7	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi						707,272,000	6,000,000,000
3	30	7	2	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan pemasaran produk lokal	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	25 Persen	30 orang	100 %	575,000,000	1,000,000,000
3	30	7	2	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Peningkatan pemasaran produk lokal	Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo	25 Persen	20 orang	100 %	132,272,000	5,000,000,000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

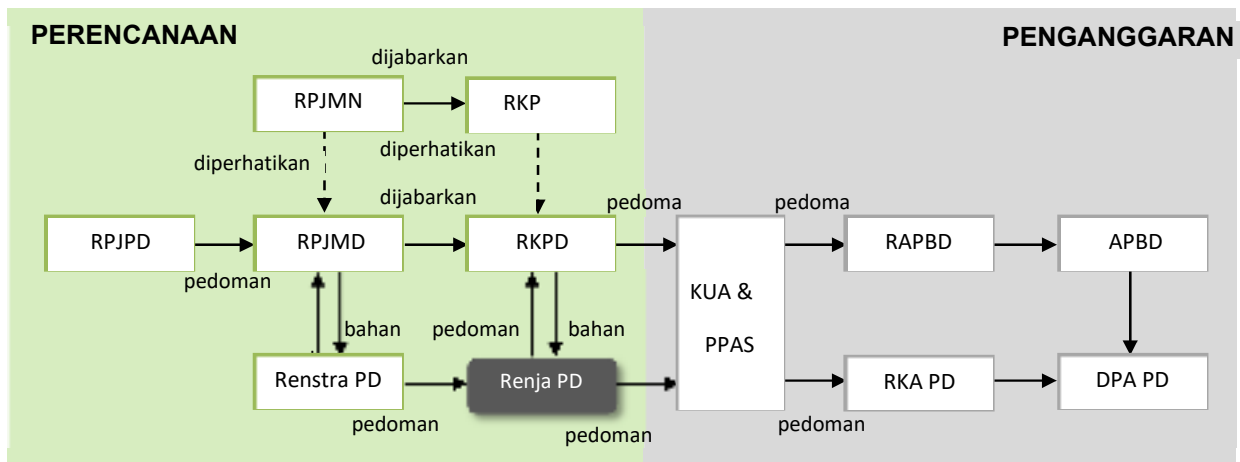
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perindustrian Kota Semarang, evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD. Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Perindustrian yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 34.449.809.242. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 32.857.600.953 atau sebesar 95,38%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021, Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021, Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	46 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	11 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	18% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian								100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	79,59%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	99,59%	99,59%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	77,35%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,71% (98,56% pelaksanaan renja)	19,71% (98,56% pelaksanaan renja)	97,06%	97,06%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian	100%	80% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20% (100% pelaksanaan renja)
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	28% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	28%(100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	28% (100% pelaksanaan renja)
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	79,31%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,74% (98,69% pelaksanaan renja)	19,74% (98,69% pelaksanaan renja)	99,04%	99,04%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	79,31%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,74% (98,69% pelaksanaan renja)	19,74% (98,69% pelaksanaan renja)	99,04%	99,04%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	75,49%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,20% (96% pelaksanaan renja)	19,20% (96% pelaksanaan renja)	94,69%	94,69%	83 jenis	15 jenis	15 jenis	18% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,60% (98% pelaksanaan renja)	19,60% (98% pelaksanaan renja)	99,60%	99,60%	102 jenis	20 jenis	20 jenis	19% (100% pelaksanaan renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
	Perlengkapan Kantor				pelaksanaan renja)	pelaksanaan renja)	pelaksanaan renja)						pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100%	79,88%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,40% (97% pelaksanaan renja)	19,40% (97% pelaksanaan renja)	99,28%	99,28%	205 jenis	40 jenis	40 jenis	19% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100%	79,89%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,99% (99,94% pelaksanaan renja)	19,99% (99,94% pelaksanaan renja)	99,87%	99,87%	60 jenis	12 jenis	12 jenis	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	100%	79,90%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,98% (99,89% pelaksanaan renja)	19,98% (99,89% pelaksanaan renja)	99,87%	99,87%	6300 orang	1250 orang	1250 orang	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perindustrian	100%	79,99%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (99,98% pelaksanaan renja)	20% (99,98% pelaksanaan renja)	99,98%	99,98%	75 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	33% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100,00%	100,00%	25 jenis	5 jenis	5 jenis	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	73,69%	20% (100% pelaksanaan renja)	19% (97% pelaksanaan renja)	19% (97% pelaksanaan renja)	93%	93%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya Mebel	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5 unit	1 unit	1 unit	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	79,90%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	99,90%	99,90%	5 jenis	1 jenis	1 jenis	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor - DISPERIN	100%	67,48%	20% (100% pelaksanaan renja)	18,60% (93,04% pelaksanaan renja)	18,60% (93,04% pelaksanaan renja)	86,09%	86,09%	5 jenis	1 jenis	1 jenis	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	79,14%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,85% (98,99% pelaksanaan renja)	19,85% (98,99% pelaksanaan renja)	98,99%	98,99%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	77,41%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,56% (97,78% pelaksanaan renja)	19,56% (97,78% pelaksanaan renja)	96,97%	96,97%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	79,62%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,95% (99,74% pelaksanaan renja)	19,95% (99,74% pelaksanaan renja)	99,57%	99,57%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	5 unit	1 unit	1 unit	20%(100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	78%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,79% (98,94% pelaksanaan renja)	19,79% (98,94% pelaksanaan renja)	98%	98%	100 unit	20 unit	20 unit	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5 unit	1 unit	1 unit	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	15 unit	3 unit	3 unit	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	5 unit	1 unit	1 unit	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM								100%	84%	84%	84% (100% pelaksanaan renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan Sentra IKM								5 IKM	1 IKM	1 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK - PERDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50%
		Jumlah Sosialisasi dan evaluasi PERDA - RPIK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4 Sosialisasi	0 sosialisasi	0 sosialisasi	0%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	100%	55,60%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,75% (98,76% pelaksanaan renja)	19,75% (98,76% pelaksanaan renja)	95,35%	95,35%	20 sentra	4 sentra	4 sentra	20% (100% pelaksanaan renja)
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5 sentra	1 sentra	1 sentra	20% (100% pelaksanaan renja)
		Jumlah Temu Usaha Industri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Operasional Gedung Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
		Persentase Pengembangan sentra IKM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)
		Persentase tahapan perencanaan dan perijinan (KIHT)	100%	78,49%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,70% (98,50% pelaksanaan renja)	19,70% (98,50% pelaksanaan renja)	98,19%	98,19%	100%	0%	0%	0%
		Jumlah Gedung Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 gedung	0 gedung	0 gedung	0 gedung
		Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
		Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50%
		Jumlah Katalog Industri Rokok	100%	78,74%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,70% (98,51% pelaksanaan renja)	19,70% (98,51% pelaksanaan renja)	98,17%	98,17%	5 buku	0%	0%	0%
		Persentase Pertambahan IKM								2,5%	0,5%	0,5%	20%(100% pelaksanaan renja)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM								100 IKM	20 IKM	20 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi HKI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	450 IKM	90 IKM	90 IKM	17% (100% pelaksanaan renja)
		Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM	100%	80%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	100%	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10% (100% pelaksanaan renja)
		Jumlah Workshop/Sosialisasi/Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/ Semarang online sale	100%	77%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	98,45%	97%	3930 IKM	660 IKM	660 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi PIRT/ Halal / BPOM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1350 IKM	270 IKM	270 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)
		Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	100%	61%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	89,83%	79%	450 IKM	90 IKM	90 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Monev Industri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	79,98%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,69% (98,47% pelaksanaan renja)	19,69% (98,47% pelaksanaan renja)	99,68%	99,68%	16%	4%	4%	20% (100% pelaksanaan renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016- 2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021- 2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
	KABUPATEN/KOT A												
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	79,98%	20% (100% pelaksana an renja)	19,69% (98,47% pelaksana an renja)	19,69% (98,47% pelaksana an renja)	99,68%	99,68%	75 IKM	15 IKM	15 IKM	20% (100% pelaksana an renja)
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	100%	79,98%	20% (100% pelaksana an renja)	19,69% (98,47% pelaksana an renja)	19,69% (98,47% pelaksana an renja)	99,68%	99,68%	105 izin	21 izin	21 izin	20% (100% pelaksana an renja)
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, UIPI, UIKI, IPKI	100%	79,98%	20% (100% pelaksana an renja)	19,69% (98,47% pelaksana an renja)	19,69% (98,47% pelaksana an renja)	99,68%	99,68%	260 Kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan	15% (100% pelaksana an renja)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	100%	79,84%	20% (100% pelaksana an renja)	19,98% (99,91% pelaksana an renja)	19,98% (99,91% pelaksana an renja)	99,82%	99,82%	2,5%	0,5%	0,5%	20% (100% pelaksana an renja)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	100%	79,84%	20% (100% pelaksana an renja)	19,98% (99,91% pelaksana an renja)	19,98% (99,91% pelaksana an renja)	99,82%	99,82%	16%	4%	4%	20% (100% pelaksana an renja)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Target Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Renja Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11	12	13	14 = (13/11)
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	100%	79,84%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,98% (99,91% pelaksanaan renja)	19,98% (99,91% pelaksanaan renja)	99,82%	99,82%	100 IKM	20 IKM	20 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data informasi dan analisa industri	100%	79,84%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,98% (99,91% pelaksanaan renja)	19,98% (99,91% pelaksanaan renja)	99,82%	99,82%	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20% (100% pelaksanaan renja)
		Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10 Buku	2 Buku	2 Buku	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	100%	79,84%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,98% (99,91% pelaksanaan renja)	19,98% (99,91% pelaksanaan renja)	99,82%	99,82%	100 IKM	20 IKM	20 IKM	20% (100% pelaksanaan renja)

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Perindustrian Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 8 Indikator Kinerja Program dan 42 Kegiatan dengan 55 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 55 Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 4 Program dengan 8 indikator program dan 42 kegiatan dengan 55 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 8 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target.
 - c) Dari 55 indikator kinerja kegiatan, terdapat 55 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
Urusan Pilihan : Perindustrian					
OPD : Dinas Perindustrian		34.449.809.242	32.857.600.953	95,38	1.592.208.289
	Belanja Tidak Langsung	6.544.797.296	5.959.640.067	91,06	585.157.229
	Belanja Pegawai	6.544.797.296	5.959.640.067	91,06	585.157.229
1	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.295.797.296	5.731.380.067	91,04	564.417.229
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	249.000.000	228.260.000	91,67	20.740.000
	Belanja Langsung	27.905.011.946	26.897.960.886	96,39	1.007.051.060
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.823.187.150	2.461.830.138	87,20	361.357.012
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.223.875	4.147.300	98,19	76.575
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.129.400	1.100.000	97,4	29.400
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	517.050	516.000	99,8	1.050
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	930.975	906.300	97,35	24.675
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	517.050	516.000	99,8	1.050
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.129.400	1.109.000	98,19	20.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.659.080	1.614.000	91,06	45.080
	a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	444.000	440.000	99,1	4.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	762.200	735.000	96,43	27.200
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	226.440	219.000	96,71	7.440
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	226.440	220.000	97,16	6.440
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.778.000	157.849.300	79,01	41.928.700
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	199.778.000	157.849.300	79,01	41.928.700
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.992.029	520.440.928	69,86	224.551.101
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.340.350	12.984.500	60,84	8.355.850
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.378.685	44.628.000	88,59	5.750.685
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.349.404	48.303.600	99,91	45.804
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.063.082	95.343.600	98,23	1.719.482
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.427.800	40.218.000	70,03	17.209.800
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.079.708	144.217.228	72,81	53.862.480

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	272.353.000	134.746.000	49,47	137.607.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.362.140	71.239.000	94,53	4.123.140
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.362.140	71.239.000	94,53	4.123.140
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.266.904.120	1.245.477.209	98,31	21.426.911
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.879.120	230.534.009	94,92	- 187.654.889
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.024.025.000	1.014.943.200	99,11	9.081.800
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.267.906	461.062.401	86,95	69.205.505
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	397.454.609	342.014.401	86,05	55.440.208
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.839.546	38.705.000	99,65	134.546
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.826.751	44.826.000	99,998	751
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.147.000	35.517.000	72,27	13.630.000
B	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	24.157.823.047	23.681.890.400	98,03	475.932.647
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	24.157.823.047	23.681.890.400	98,03	475.932.647
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	36.500.000	36.500.000	100	-
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	707.771.041	458.195.795	64,74	249.575.246
	c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	138.335.292	130.809.965	94,56	7.525.327
	d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.275.216.714	23.056.384.640	99,06	218.832.074
C	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	97.989.980	57.111.048	58,28	40.878.932
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	97.989.980	57.111.048	58,28	40.878.932
	a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan \ Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	47.415.980	37.783.598	79,69	9.632.382
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.574.000	19.327.450	38,22	31.246.550
D	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	826.011.769	697.129.300	84,4	128.882.469
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	826.011.769	697.129.300	84,4	128.882.469

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	217.250.209	204.697.000	94,22	12.553.209
	b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	552.620.772	477.402.300	86,39	75.218.472
	c. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	56.140.788	15.030.000	26,77	41.110.788

Sumber : LRA Dinas Perindustrian Kota Semarang 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 10 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 34.449.809.242. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 32.857.600.953 dengan sisa sebesar Rp 1.592.208.289 (4,62%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 6.295.97.296, realisasi Rp 5.731.380.067 dan sisa anggaran sebesar Rp 564.417.229 (8,69%).
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 28.154.011.946, realisasi sebesar Rp 27.126.220.886 (96,35%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.027.791.060 (3,65%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun				Tahun		Tahun		
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Renstra 2016-2021													
Tujuan: "Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Semarang"		Indikator Tujuan											
	1	Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)			3607 IKM	3635 IKM	-	-	3587 IKM (99.45%)	3638 IKM (105.58%)	-	-	
Sasaran: "Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang"		Indikator Sasaran											
	1	Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)			3607 IKM	3635 IKM	-	-	3587 IKM (99.45%)	3638 IKM (105.58%)	-	-	
	2	Persentase Penguatan Sentra Industri			91.56%	100%	-	-	85%	100%	-	-	
	3	Persentase Penambahan Industri Kreatif			628 IKM	658 IKM	-	-	618 IKM (98.41%)	660 IKM (100.30%)	-	-	
Renstra 2021-2026													
Tujuan: "Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan"		Indikator Tujuan											
	1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB			-	-	28.66%	28.70%	-	-	28.66%	28.70%	
		Indikator Sasaran											
Sasaran: - Meningkatkan Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) - Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah	1	Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah			-	-	0.50%	0.50%	-	-	0.50%	0.50%	
	2	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran OPD tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 3638 IKM (105.58%) dari target sebesar 3635 IKM;
- b. Sasaran **“Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang”** memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 3638 IKM (105.58%) dari target sebesar 3635 IKM;
 - 2) Indikator “Persentase Penguatan Sentra Industri” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar sebesar 100%;
 - 3) Indikator “Persentase Penambahan Industri Kreatif” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 660 IKM (100.30%) dari target sebesar 658 IKM.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, permasalahan utama di Kota Semarang yang terkait dengan dinas perindustrian adalah pada permasalahan ke-2 yaitu “Produktifitas dan Daya saing potensi ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan”.
- b. Akar permasalahan dari permasalahan utama poin a adalah “Produktivitas dan daya saing produk belum optimal”.
- c. Permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perindustrian yaitu “Belum optimalnya kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan”

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang diantaranya:

- a. Belum berkembangnya IKM dan Sentra IKM
- b. Belum adanya data industri
- c. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perindustrian

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan

pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
- Permasalahan IKM terkait :
 - o Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
 - o Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
 - o Strategi pemasaran yang belum tepat
 - o Inovasi produk IKM agar bisa lebih kompetitif
 - o Banyaknya usaha IKM yang belum berijin
- Me-link and match-kan IKM di kota Semarang dengan stakeholder sehingga produk IKM bisa terserap
- Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
- Masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan start up dan sektor industri kreatif
- Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang

b. Peluang:

- Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (ekspor) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions), PIRT).
- Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektronik (online) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.
- Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
- Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.

- Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide-ide kreatif.
- Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
- Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
- Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain : Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.
- Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti :
 - o Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
 - o Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (Harbor Toll)
Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan Industri Kendal, Bandara International Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang
 - o Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port
Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal Pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan

pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah serta industri kreatif
- b. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perindustrian beserta pendanaan yang dijabarkan dalam Program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikatornya sudah mengakomodir Program unggulan yang menjadi Prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan Misi 2 Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Berdasarkan Misi 2 Walikota dan Wakil Walikota diatas maka Prioritas dari Dinas Perindustrian dijabarkan pada program-program sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal yang difokuskan pada
 - a. Pengembangan Kampung Tematik Produktif
 - b. Pengembangan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Terpadu
 - c. Fasilitasi Industri Rumah Tangga
2. Program penguatan kemitraan usaha yang difokuskan pada
 - a. Pemberdayaan Startup Lokal
 - b. Link and Match Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Swalayan/Mall

- c. Pembangunan Semarang Creative Makerspace
- 3. Program peningkatan daya saing daerah yang difokuskan pada
 - a. Pameran Dagang Produk Lokal
 - b. Pengembangan Klinik Hak Kekayaan Intelektual
 - c. Semarang Online Sale

Selain dari Misi 2, Dinas Perindustrian juga mengkomdir pada Misi 5 Walikota dan Wakil Walikota yaitu tentang “Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Misi 5 Walikota dan Wakil Walikota diatas maka Prioritas dari Dinas Perindustrian mengkomodir pada Program Peningkatan Manajemen Internal

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN				14.917.740.261			14.917.740.261	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.700.420.771			9.700.420.771	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	11 dokumen	16.714.980	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	11 dokumen	16.714.980	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RTP	3 dokumen	2.439.000	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RTP	3 dokumen	2.439.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.536.000	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.536.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	3.715.100	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	3.715.100	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.028.800	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.028.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	1 dokumen	2.972.080	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	1 dokumen	2.972.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan PUG ; LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	4 dokumen	3.024.000	Jumlah Dokumen Laporan PUG ; LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	4 dokumen	3.024.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor		6.634.178.260	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor		6.634.178.260	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/bulan	6.359.459.355	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/bulan	6.359.459.355	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	261.960.000	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	261.960.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 dokumen	8.558.905	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 dokumen	8.558.905	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD da Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.008.000	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD da Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1.008.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.400.000	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.400.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	792.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	792.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	95.000.000	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	95.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	70 orang	95.000.000	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	70 orang	95.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	711.146.261	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	711.146.261	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	27.300.000	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	27.300.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	40.000.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	52 paket	69.489.621	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	52 paket	69.489.621	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	55.000.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	55.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	63.000.000	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	63.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	257.507.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	257.507.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	198.850.000	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	198.850.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	26.100.000	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	26.100.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	16 unit	26.000.000	Jumlah paket mebel yang disediakan	16 unit	26.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	50.000	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	50.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	50.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	50.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.897.026.510	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.897.026.510	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	964.020.510	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	964.020.510	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 laporan	54.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 laporan	54.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	879.006.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	879.006.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	320.254.400	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	320.254.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	36.400.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	36.400.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	265.100.000	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	265.100.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	120 unit	8.726.400	Jumlah mebel yang dipelihara	120 unit	8.726.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	28.000	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	28.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				4.652.019.490			4.652.019.490	
			Persentase Pertambahan IKM	0.50%		Persentase Pertambahan IKM	0.50%		
			Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	88%		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	88%		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				4.652.019.490			4.652.019.490	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan,	6 dokumen	264.500.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan,	6 dokumen	264.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			penyebaran dan perwilayahan industri			penyebaran dan perwilayahan industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	19 dokumen	959.200.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	19 dokumen	959.200.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	12 dokumen	1.739.059.490	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	12 dokumen	1.739.059.490	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	6 dokumen	1.420.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	6 dokumen	1.420.000.000	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry	1 dokumen	169.260.000	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry	1 dokumen	169.260.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	176.460.000	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	176.460.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS	2 dokumen	133.060.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS	2 dokumen	133.060.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industry dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	43.400.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industry dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	43.400.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	388.840.000	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	388.840.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 dokumen	265.000.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 dokumen	265.000.000	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.		Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	3 dokumen	99.000.000	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	3 dokumen	99.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	20 IKM	24.840.000	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	20 IKM	24.840.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perindustrian Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perindustrian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
kepada Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Batik	Kelurahan Karangayu	Pelatihan Batik	1 kegiatan	usulan diakomodir pada sub kegiatan 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2	Pelatihan Kerajinan Bambu	Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1	Pelatihan Kerajinan Bambu	1 kegiatan	
3	Pelatihan Souvenir dan oleh-oleh khas	Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1	Pelatihan Kerajinan Bambu	1 kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2023

Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk

- Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri jasa dan

perdagangan juga dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Tahun 2021 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,55 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,54 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,37 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,54 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;

- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perindustrian Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Tabel 3.1 Program APBN, Program APBD I, Program APBD II

No	Program APBN	Program APBD I	Program APBD II
1	Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
3	Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penunjang urusan pemerintahan daerah
4	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan”,

dengan indikator tujuan **“Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu *“Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian”*, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.
- b. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disperin Semarang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan		Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	28,70 %
		Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.	0,5 %
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian merupakan bentuk atau upaya yang akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada dan mendukung pada Visi dan Misi Walikota Semarang.

Perumusan program dan kegiatan ini sekaligus merupakan implementasi perencanaan yang mencakup program dan kegiatan satu tahun ke depan yakni tahun 2023.

Kedudukan Dinas Perindustrian sebagai unit organisasi yang bersifat teknis yang tidak lepas dari unit organisasi lain yang bersifat teknis maupun administratif, maka dalam penetapan program dan kegiatan didasarkan pada anggaran yang juga merupakan kunci keberhasilan dari kegiatan tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator 1 : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Indikator : Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tahun 2023 : Rp. 2.439.000
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tahun 2023 : Rp. 2.536.000
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tahun 2023 : Rp. 3.715.100
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Tahun 2023 : Rp. 2.028.800
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Tahun 2023 : Rp. 2.972.080
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tahun 2023 : Rp. 3.024.000

Indikator 2 : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Indikator : Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun 2023 : Rp. 6.359.459.355
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tahun 2023 : Rp, 261.960.000
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tahun 2023 : Rp. 8.558.905
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun 2023 : Rp. 1.008.000
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Tahun 2023 : Rp. 2.400.000
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Tahun 2023 : Rp. 792.000

Indikator 3 : Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

Indikator : Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2023 : Rp. 95.000.000

Indikator 4 : Persentase tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tahun 2023 : Rp. 27.300.000
- Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tahun 2023 : Rp. 40.000.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tahun 2023 : Rp. 69.489.621

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tahun 2023 : Rp. 55.000.000
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
Tahun 2023 : Rp. 63.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tahun 2023 : Rp. 257.507.000
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tahun 2023 : Rp. 198.850.000

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Pengadaan Mebel
Tahun 2023 : Rp. 26.000.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tahun 2023 : Rp. 50.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tahun 2023 : Rp. 50.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun 2023 : Rp. 964.020.510
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tahun 2023 : Rp. 54.000.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tahun 2023 : Rp. 879.006.000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Indikator : Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tahun 2023 : Rp. 36.400.000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tahun 2023 : Rp. 265.100.000
- Pemeliharaan Mebel
Tahun 2023 : Rp. 8.726.400
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tahun 2023 : Rp. 10.000.000
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tahun 2023 : Rp. 28.000

2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Indikator 1 : Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Pertambahan Sentra IKM

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Tahun 2023 : Rp. 100.000.000
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Tahun 2023 : Rp. 264.500.000
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Tahun 2023 : Rp. 1.420.000.000

Indikator 2 : Persentase Pertambahan IKM

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Pertambahan IKM

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Tahun 2023 : Rp. 959.200.000
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Tahun 2023 : Rp. 1.739.059.490
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Tahun 2023 : Rp. 169.260.000

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Indikator 1 : Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Tahun 2023 : Rp 133.060.000
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.
Tahun 2023 : Rp 43.400.000

4. Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator 1 : Tersedianya Data Informasi Industri

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tahun 2023 : Rp 265.000.000

- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

Tahun 2023 : Rp 99.000.000

- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Tahun 2023 : Rp 24.840.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "*Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB*" dan indikator sasaran "*Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian*";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan

penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 3 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 14.917.740.261 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 9.700.420.771 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 5.217.319.490 untuk program dan kegiatan pelaksanaan / pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			14.917.740.261				35.028.699.000
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.700.420.771				10.839.630.000
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase tersedianya Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	16.714.980			9 Dokumen	6.980.175
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.439.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 dokumen	1.551.150
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.536.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	775.575

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	3.715.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	775.575
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.028.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	775.575
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.972.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	775.575
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian	3 Laporan	3.024.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	2.326.725
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.634.178.260			100%	8.203.175.419
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	6.359.459.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42 Orang/Bulan	7.929.920.950
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	261.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	271.337.499
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	8.558.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	666.000
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.008.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	571.650
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran Dinas Perindustrian	12 Laporan	2.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	339.660

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	792.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	339.660
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian	100%	95.000.000			100%	1.000.000
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	70 Orang	95.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 Orang	1.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	711.146.621			100%	632.753.966
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Paket	27.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Paket	25.340.266
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Paket	75.148.405
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	69.489.621	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52 Paket	43.444.705
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Paket	85.063.082
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	63.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	58.677.800
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 Laporan	257.507.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	145.079.708
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	4 Dokumen	198.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	26.100.000			100%	12.000.000
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 unit	1.000.000
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	50.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	10.000.000
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	50.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	1.000.000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.897.026.510			100%	1.513.473.527
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	964.020.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	340.279.120
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Laporan	54.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Laporan	71.676.546
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	879.006.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.101.517.861
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	320.254.400			100%	470.246.913
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	36.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	265.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 unit	413.246.913
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	120 unit	8.726.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120 unit	1.000.000
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	10.000.000
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	28.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	1.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			4.652.019.490			100%	23.349.069.000
		Persentase Pertambahan IKM	0,50 %		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,50 %	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88 %		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.652.019.490				23.349.069.000
		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM				20 IKM	
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM				1 Sentra IKM	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen	264.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	500.000.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	959.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Akomodir Gender	19 Dokumen	1.400.000.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	1.739.059.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Akomodir Gender	12 Dokumen	550.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	1.420.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	20.649.069.000
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	169.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	200.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	176.460.000			4%	300.000.000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	176.460.000			15 ikm	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	133.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	200.000.000
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten / Kota	2 Dokumen	43.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	100.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	388.840.000			0.50 %	540.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4%	388.840.000			4%	540.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	265.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	300.000.000
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten / Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	99.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	170.000.000
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data keSIINas	1 Dokumen	24.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	70.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perindustrian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja;
3. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

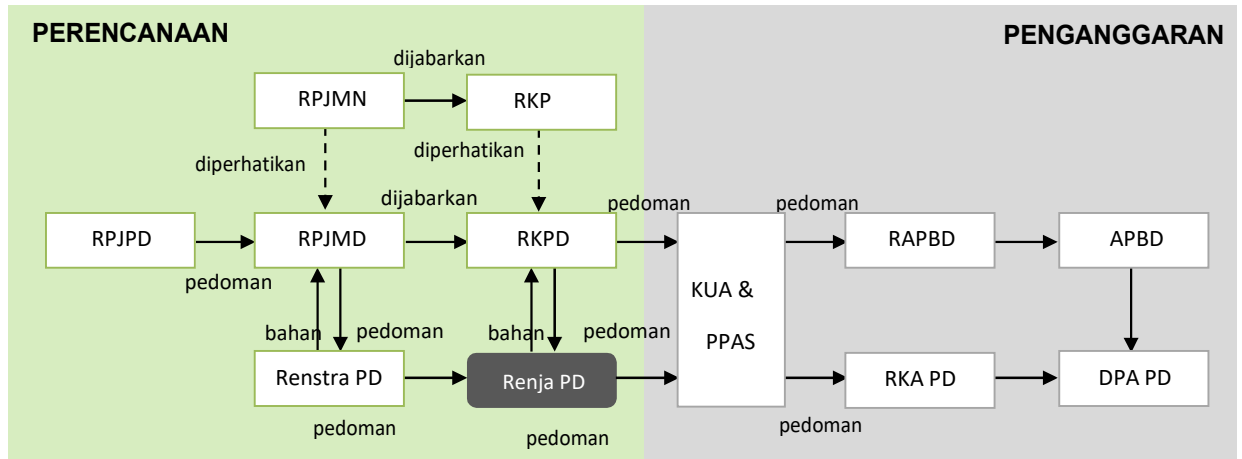
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk

menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja mempedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota

Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Sekretariat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan /permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp.184.047.230.585,- Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.157.069.669.459,- atau sebesar 85,34 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencana an	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	8	50.00	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	20.00 %	5.00 %	20.00 %	30	150.00	
		Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	10.00 %	5.00 %	20.00 %	10	50.00	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Monitoring Kegiatan Otonomi Daerah	15.00 Dokumen	109.61 Dokumen	15.00 Dokumen	8	53.33	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 Kegiatan	54.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	5	55.56	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaanya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	54.00 kegiatan	9.00 kegiatan	5	55.56	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MTQ & Pesparawi dan pembinaan tenaga pendidik keagamaan formal & non formal dan a pendidikan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	46	46.00	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan kegiatan perawat jenazah dan pemberian sarana dan prasarana tempat ibadah dan pemberian honor kegiatan untuk petugas kemakmuran masjid	100.00 %	100.00 %	100.00 %	41	41.00	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pembinaan UKS, sosial kemasyarakatan dan penyuluhan bahaya	100.00 %	100.00 %	100.00 %	26	26.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
		narkotika dan aids bagi pelajar						
		Indek Pelayanan Publik	99.00 %	133.00 %	113.00 %	87.35	77.30	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	99.00 %	133.00 %	113.00 %	2.85	2.52	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya : Raperda 9 perda, Raperwal 36 Perwal , SK Walikota 400 SK Walikota dan Surat perjanjian 120 Surat perjanjian	99.00 %	133.00 %	113.00 %	11.25	9.96	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesainya penanganan Perkara hukum litigasi di lembaga peradilan perdata 20 perkara, bantuan hukum warga miskin 30 perkara	99.00 %	133.00 %	113.00 %	1.79	1.58	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terdokumentasikannya Produk hukum (Perda dan Perwal)	99.00 %	133.00 %	113.00 %	1.3	1.15	
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	20.00 %	5.00 %	20.00 %	30	150.00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota	10.00 %	5.00 %	20.00 %	10	50.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
		Semarang						
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	10.00 Dokumen	1.05 Dokumen	18.00 Dokumen	14	77.78	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Laporan Sister City dengan Luar Negeri	3.00 Dokumen/tahun	7.06 Dokumen/tahun	3.00 Dokumen/tahun	1	33.33	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	100.00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	26.00 dokumen	100.00 dokumen	164117003 8.00 dokumen	16	0.00	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen kajian BUMD dalam menghadapi pandemi, pembahasan RKAP BUMD, peraturan tentang BUMD	11.00 dokumen	100.00 dokumen	100.00 dokumen	12	12.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah dokumen Monev evaluasi LPG, pupuk bersubsidi Forum koordinasi LPG dan pupuk, Kajian tentang perlindungan konsumen, Monitoring data CSR, pengelolaan data CSR dan Rakor perlindungan konsumen	8.00 dokumen	100.00 dokumen	100.00 dokumen	1	1.00	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	jumlah dokumen rakor TPAKD tim percepatan akses keuangan daerah TPID Tim pengendalian Inflasi Daerah, pendataan perkembangan LKM, fasilitasi pameran, Sosialisasi Program KUR bagi usaha mikro, dan pemantauan harga sarana dan prasarana menjelang idhul fitri	7.00 dokumen	100.00 dokumen	100.00 dokumen	1	1.00	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan bangunan, Upah, dan Analisa Pekerjaan	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0	0.00	
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00 dokumen	5.00 dokumen	1.00 dokumen	NA	0.00	
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00 dokumen	5.00 dokumen	1.00 dokumen	NA	0.00	
		Dokumen standarisasi harga	1.00 dokumen	100.00 dokumen	1.00 dokumen	NA	0.00	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pelaksanaan peresmian hasil pembangunan TA. 2021 dan rapat koordinasi pengendalian kegiatan OPD (DAK, Ban-Keu, DID)	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	12.00 Dokumen	3	25.00	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantauan kegiatan SKPD dan Penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Semarang	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	12.00 Dokumen	3	25.00	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	1150.00 Dokumen	1150.00 Dokumen	200.00 Dokumen	123	61.50	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi Sistem Pelelangan/Pengadaan secara Elektronik, Sosialisasi dan Pelatihan LPSE & Rencana Umum Pengadaan	100.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan	25.00 Kegiatan	4	16.00	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan / sosialisasi terhadap pelaku pengadaan barang jasa, Sosialisasi peningkatan kematangan UKPBJ	100.00 Kegiatan	125.00 Kegiatan	32.00 Kegiatan	5	15.63	
		prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	100.00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	3.00 dokumen	10.00 dokumen	10.00 dokumen	9	90.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah dokumen penyaluran BLT, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	3.00 dokumen	100.00 dokumen	100.00 dokumen	3	3.00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis Setda Kota Semarang	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0	0.00	
		%tase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		%tase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA,KPA,PPK,PPTK dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5.00 dokumen	26.00 dokumen	5.00 dokumen	1	20.00	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan BMD	2.00 dokumen	100.00 dokumen	2.00 dokumen	NA	0.00	
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Pengelolaan BMD	3.00 dokumen	100.00 dokumen	3.00 dokumen	1	33.33	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	49	49.00	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	3.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	NA	0.00	
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	
		Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT)	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	25.00 jenis	26.00 jenis	26.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	50.00 jenis	50.00 jenis	45.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	70.00 jenis	70.00 jenis	65.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	22.00 jenis	22.00 jenis	15.00 jenis	NA	0.00	
		%tase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Administrasi Umum Setda yang lebih baik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	54	54.00	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	51	51.00	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makanan dan Minuman bagi tamu Pemerintah Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di Lingkungan Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100	100.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	48	48.00	
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Kegiatan Peringatan HUT RI	0.00 %	100.00 %	100.00 %	20	20.00	
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	49	49.00	
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis Teknologi informasi	6.00 jenis	8.00 jenis	6.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan	1.00 jenis	2.00 jenis	0.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional/lapangan	2.00 jenis	2.00 jenis	1.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sarana transportasi /operasional tidak bermotor	1.00 jenis	1.00 jenis	1.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebelair	14.00 jenis	20.00 jenis	11.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor dan mesin lainnya	3.00 jenis	6.00 jenis	4.00 jenis	NA	0.00	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	2.00 jenis	3.00 jenis	2.00 jenis	NA	0.00	
		%tase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat	0.00 %	100.00 %	100.00 %	52	52.00	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan listrik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran Forsesdasi	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100	100.00	
		Honor TPHL Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	0.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		%tase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	20	20.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50	50.00	
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	26.00 jenis	26.00 jenis	26.00 jenis	NA	0.00	
		%tase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	
		Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	20	20.00	
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional KDH dan KDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		%tase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga KDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	37.00 OPD	0.00 OPD	39.00 OPD	5	12.82	
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.68 indeks	0.00 indeks	87.50 indeks	174.7	199.66	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1	100.00	
		Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	NA	0.00	
		Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	NA	0.00	
		Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1	100.00	
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengelolaan Proses Bisnis	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1	100.00	
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25.00 OPD	25.00 OPD	25.00 OPD	7	28.00	
		Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara	25.00 OPD	25.00 OPD	25.00 OPD	NA	0.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
		Pelayanan Publik						
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25.00 OPD	25.00 OPD	25.00 OPD	NA	0.00	
		Survey Kepuasan Masyarakat	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	NA	0.00	
		Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	NA	0.00	
		Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	NA	0.00	
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1	100.00	
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	10.00 %	5.00 %	20.00 %	NA	0.00	
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	10.00 %	5.00 %	20.00 %	10	50.00	
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Kinerja Pemerintah	20.00 dokumen	165.01 dokumen	20.00 dokumen	10	50.00	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	0.00 %	100.00 %	100.00 %	25	25.00	

Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022		Keterangan
						capaian	Rasio	
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pelayanan keprotokolan dan kegiatan seremoni pimpinan daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi kebijakan dan kegiatan Pimpinan daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	0.00 %	100.00 %	100.00 %	NA	0.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								
Predikat Kinerja (%)								

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2

Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
1.	Hukum	1.320.069.748	949.548.266	71,93
2.	Tata Pemerintahan	1.946.894.374	1.696.255.550	87,13
3.	Organisasi	518.741.671	510.149.596	98,34
4.	Kerjasama dan Otonomi Daerah	5.617.700.424	5.130.050.699	91,32
5.	Perekonomian dan SDA	4.906.988.181	3.280.440.023	66,85
6.	Administrasi Pembangunan	504.151.147	461.666.850	91,57
7.	Kesejahteraan Rakyat	30.912.159.481	30.009.993.690	97,08
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2.099.519.700	1.656.357.618	78,89
9.	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	11.377.986.860	9.113.143.344	80,09
10.	Tata Usaha	71.701.573.416	55.811.018.471	77,84
11.	Rumah Tangga	44.716.920.909	42.398.617.565	94,82
12.	Keuangan	8.424.524.674	6.052.427.787	71,84
	JUMLAH	184.047.230.585	157.069.669.459	85,34

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penunjang Unsur Pendukung sebagai berikut :

Tabel 2.1.3**Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021****Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
	Bagian Hukum			
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.690.069.748	949.548.266	56,18
2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.690.069.748	949.548.266	56,18
03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	496.993.939	422.506.492	85,01
03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	992.254.310	392.196.550	39,53
03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.821.499	134.845.224	67,15
	Bagian Tata Pemerintahan			
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.946.894.374	1.696.255.550	87,13
2.01	Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan	1.946.894.374	1.696.255.550	87,13
01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	259.366.572	202.634.500	78,13
01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	116.334.224	52.784.500	45,37
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.571.193.578	1.439.836.550	91,64
	Bagian Organisasi			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	518.741.671	510.149.596	98,34
2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	518.741.671	510.149.596	98,34
13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	118.088.055	115.698.674	97,98
13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	349.464.389	343.270.922	98,23

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	51.189.277	51.180.000	99,98
	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah			
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.943.293.239	4.509.949.656	91,16
2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.907.154.239	4.480.623.904	91,30
04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	4.855.321.963	4.459.994.278	91,85
04.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	51.832.276	20.629.626	39,80
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	36.139.000	25.790.252	71,36
1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	18.069.500	12.895.126	71,36
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.266.000	32.861.252	98,78
2.13	Penataan Organisasi	33.266.000	32.861.252	98,78
3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	16.633.000	16.430.626	98,78
	Bagian Perekonomian dan SDA			
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.906.988.181	3.280.440.023	66,85
2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	765.664.398	724.143.182	94,58
01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	373.643.953	365.578.429	97,84
01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	123.222.727	116.840.062	94,82
01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	268.797.718	241.724.691	89,93

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.141.323.783	2.556.296.841	51,42
04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4.141.323.783	2.556.296.841	52,10
	Bagian Administrasi Pembangunan			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.785.248	3.650.000	96,43
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.785.248	3.650.000	96,43
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.785.248	3.650.000	96,43
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	500.365.899	458.016.850	91,54
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	500.365.899	458.016.850	91,54
02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	122.681.500	121.305.000	98,88
02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	175.441.291	173.819.450	99,07
02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	202.243.108	162.892.400	80,54
	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	30.912.159.481	30.014.838.690	97,18
2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.912.159.481	30.014.838.690	97,18
02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24.844.730.515	24.260.371.990	97,65

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.306.154.791	5.218.985.500	98,36
02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	761.274.175	535.481.200	70,34
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.099.519.700	1.656.357.618	78,89
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.099.519.700	1.656.357.618	78,89
03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.475.164.700	1.066.811.506	72,32
03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	227.395.000	207.809.756	91,39
03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	396.960.000	381.736.356	96,16
	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol			
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	11.377.986.860	9.113.143.344	80,09
2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	11.377.986.860	9.113.143.344	80,09
14.01	Fasilitasi Keprotokolan	965.976.500	907.554.800	93,95
14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7.651.345.630	6.102.997.341	79,76
14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.760.664.730	2.102.591.203	76,16
	Bagian Tata Usaha			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	71.701.573.416	55.625.218.471	77,58

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.000	0	0
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bagian Tata Usaha	385.000	0	0
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.437.610.525	29.425.821.945	99,96
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Tata Usaha	28.829.104.275	28.829.104.275	100
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bagian Tata Usaha	607.750.000	596.490.000	98,15
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bagian Tata Usaha	756.250	378.100	50,00
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	326.660.982	270.710.900	82,87
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagian Tata Usaha	326.660.982	270.710.900	82,87
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.216.387.082	13.636.052.691	46,67
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Tata Usaha	391.440.000	290.301.500	74,16
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Bagian Tata Usah	12.066.027.617	8.578.718.756	71,10
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Tata Usaha	16.758.919.465	4.767.032.435	28,44
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.778.848.497	5.395.981.913	93,37

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bagian Tata Usaha	173.520.000	164.630.612	94,88
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bagian Tata Usaha	4.461.118.000	4.457.956.155	99,93
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Tata Usaha	835.829.472	504.175.146	60,32
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagian Tata Usaha	308.381.025	269.220.000	87,30
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.244.131.430	3.244.131.430	100
11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	144.380.430	144.380.430	100
11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	3.099.751.000	3.099.700.000	100
2.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.697.549.900	3.652.570.672	98,78
12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	2.437.007.435	2.429.412.272	99,67
12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	1.260.542.465	1.223.158.400	97,03
	Bagian Rumah Tangga			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	31.358.763.866	29.987.710.436	95,63
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.725.000	10.522.626	98,11

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.725.000	10.522.626	98,11
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.480.846.486	1.202.996.852	81,24
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30.974.590	30.200.000	97,50
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	590.816.676	507.062.500	85,82
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.084.290	275.309.252	89,07
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	362.863.850	245.400.100	67,63
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	187.107.080	145.025.000	77,51
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.968.731.525	9.603.892.010	96,34
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.707.959.080	4.701.950.000	99,87
07.05	Pengadaan Mebel	5.164.500	5.100.000	98,75
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.735.500	140.971.000	90,52
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.099.872.945	4.755.871.010	93,25
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.560.000	1.037.190.440	98,63
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.051.560.000	1.037.190.440	98,63
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.665.563.585	17.959.447.008	96,22

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.360.000	133.500.160	72,41
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.009.763.073	2.695.226.674	89,55
09.05	Pemeliharaan Mebel	120.000.000	118.608.000	98,84
09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.983.878.639	11.673.658.097	97,41
09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.408.133.873	2.400.801.500	99,70
09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	959.428.000	937.652.577	97,73
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	181.337.270	173.661.500	95,77
11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	181.337.270	173.661.500	95,77
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	149.427.650	93.562.626	62,61
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	149.427.650	93.562.626	62,61
2.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	149.427.650	93.562.626	62,61
	Bagian Keuangan			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	8.424.524.674	6.052.427.787	71,84

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%tase (%)
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.892.299	2.432.000	84,09
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.892.299	2.432.000	84,09
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.740.315.786	4.820.226.580	71,51
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.441.944.486	4.672.306.580	72,53
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	297.650.000	147.920.000	49,70
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	721.300	0	0,00
2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.477.700	13.900.778	96,02
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.477.700	13.900.778	96,02
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.642.019.396	1.191.954.053	72,59
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.642.019.396	1.191.954.053	72,59
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.819.493	23.914.376	96,35
11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.819.493	23.914.376	96,35

Dari data pada Tabel 2.1.3 tersebut diatas dapat dikehahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 20 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp.184.047.230.585,-. Dari anggaran

tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp Rp.157.069.669.459,- dengan sisa sebesar Rp.26.977.561.126,- (14,66%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian RPJMD Kota Semarang khususnya pada Misi 5 **“Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI	TARGET (Tahun)	
No	Uraian	No	Uraian		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,00	72,00	74,00
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00	87,50	88,00
		3	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/Predikat	>70/BB	>72/BB	>74/BB
		4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,44/ST	3,45/ST	3,46/ST
A	Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	1	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	Persentase	100%	100%	100%
		2	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	Persentase	100%	100%	100%
		3	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%
		4	Persentase produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan	Persentase	100%	100%	100%

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI	TARGET (Tahun)	
No	Uraian	No	Uraian		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			Walikota) yang ditetapkan				
		5	Persentase Produk Hukum Penetapan (Keputusan Wali Kota dan Keputusan Sekda) yang ditetapkan	Persentase	100%	100%	100%
		6	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	Persentase	100%	100%	100%
		7	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase	100%	100%	100%
B	Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	1	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase	100%	100%	100%
		2	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%
		3	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	Persentase	100%	100%	100%

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI	TARGET (Tahun)	
No	Uraian	No	Uraian		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase	100%	100%	100%
		5	Indeks tata kelola PBJ:	Nilai/predikat	2 53,93 (cukup)	3 cukup	3 cukup
C	Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	1	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	Persentase	100%	100%	100%
		2	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	Persentase	100%	100%	100%
		3	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota yang terlayani	Persentase	100%	100%	100%
		4	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	Persentase	100%	100%	100%
		5	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%
		6	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	Persentase	100%	100%	100%
		7	Persentase penyediaan sarana	Persentase	100%	100%	100%

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI	TARGET (Tahun)	
No	Uraian	No	Uraian		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			prasarana kantor				
		8	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	Persentase	100%	100%	100%

Capaian hasil kinerja Urusan Penunjang Unsur Pendukung pada Sekretariat Daerah, dapat dilihat pada indikator kinerja sebagai berikut:

1) Bagian Hukum

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Bagian Hukum

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah kegiatan fasilitasi penanganan permasalahan hukum di Lembaga Pengadilan (bagi warga miskin)	25	13	52	6
2.	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	7	23	329	17
3.	Jumlah pendampingan penghadapan kepada ASN Pemerintah Kota Semarang yang terkena masalah hukum	15	15	100	71
4.	Jumlah Produk Hukum :				
	Peraturan Daerah	10	13	130	5
	Peraturan Walikota	94	124	132	94
	Keputusan Walikota	426	533	125	426

Masih tingginya kasus Covid-19 dalam kurun waktu tahun 2021, menyebabkan diterapkannya metode kerja di rumah (work from home) terjadwal bagi pegawai. Namun hal tersebut tidak mengurangi kinerja sebagai abdi negara. Hal tersebut dibuktikan dengan telah ditetapkannya Produk Hukum Daerah yang terdiri dari :

- Peraturan Daerah sebanyak : 13 buah
- Peraturan Walikota sebanyak : 124 buah
- Keputusan Walikota sebanyak : 533 buah

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu Peraturan Daerah naik 30%, Peraturan Walikota naik 32% dan Keputusan Walikota naik 25%.

Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang terdapat 1 Program (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), 1 Kegiatan (Fasilitasi dan Koordinasi Hukum) dan 3 Sub Kegiatan (Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum) yang rinciannya sebagai berikut :

Dalam kegiatan fasilitasi dengan OPD telah menghasilkan 13 Peraturan Daerah, yang terdiri dari 5 Inisiatif Dewan dan 8 inisiatif Eksekutif. Dalam hal Penyusunan Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Walikota telah terfasilitasi dan harmonisasinya sehingga terbit 124 Peraturan Walikota di Tahun 2021.

Selanjutnya upaya untuk menyebarkan informasi produk hukum telah dilaksanakan Sosialisasi Produk Hukum di 13 Kecamatan dan 2 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Podorejo Kec Ngaliyan
2. Kelurahan Karangmalang Kec Mijen
3. Kecamatan Semarang Barat
4. Kecamatan Semarang Tengah
5. Kecamatan Semarang Selatan
6. Kecamatan Semarang Timur
7. Kecamatan Pedurungan
8. Kecamatan Gajahmungkur
9. Kecamatan Banyumanik
10. Kecamatan Candisari
11. Kecamatan Gunungpati
12. Kecamatan Mijen
13. Kecamatan Ngaliyan
14. Kecamatan Tugu
15. Kecamatan Tembalang

Adapun kegiatan legislasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap Produk Hukum Daerah dan meningkatkan kemampuan dalam merancang peraturan perundang-undangan, dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan pengembangan aplikasi www.eling.semarangkota.go.id

- b. Pembuatan Lembaran Daerah lepas atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah lepas atas Peraturan Walikota serta Himpunan Keputusan Walikota.
- c. Keputusan Walikota yang telah ditetapkan di Tahun 2021 ada 533.

Sub Kegiatan Bantuan Hukum pada umumnya adalah memberikan fasilitasi / bantuan terkait permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang maupun warga Kota Semarang, yang meliputi :

- a. Penanganan permasalahan hukum perkara di Lembaga Peradilan dengan hasil :
 - 1) Perdata sejumlah 20 perkara di Pengadilan Negeri (PN), terdiri dari:
 - Tingkat pertama ada 14 perkara
 - Tingkat banding 2 perkara
 - Tingkat Kasasi 2 perkara
 - Peninjauan Kembali 1 perkara
 - Permohonan eksekusi 1 perkara
 - 2) Tata Usaha Negara ada 3 perkara seluruhnya di Tingkat pertama (2 Inkracht, 1 dicabut).
 - 3) Kegiatan Pendampingan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang untuk dimintai keterangan ataupun sebagai saksi di Kepolisian sebanyak 14, Kejaksaan sebanyak 1 orang (kejaksaan meminta 1 orang ASN untuk menjadi saksi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan Workshop Penanganan Perkara dengan tema "Pemahaman Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2021" yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pencegahan dan penanganan perkara bagi ASN dan OPD. Dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 di Hotel Pesona Kota Semarang dengan narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan dari Bagian Hukum, serta diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari OPD, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Semarang serta tamu undangan.
- c. Fasilitasi/bantuan hukum terhadap warga miskin yang mengalami kesulitan biaya dalam penyelesaian permasalahan

hukum yang terjadi Kota Semarang juga menjadi salah satu kegiatan pada sub kegiatan ini, sehingga setiap warga miskin di Kota Semarang mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan Hukum, yang difasilitasi melalui Lembaga Bantuan Hukum yang telah bersertifikasi dari Kemenkumham. Adapun jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan hukum ada 13 perkara pidana, antara lain :

- Narkoba : 9 perkara
- Pencurian : 4 perkara

d. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, yang bertujuan untuk Penegakan Supremasi Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM yang dilakukan melalui pendekatan kepada para anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di masing-masing Kelurahan, sehingga banyak menyoroti masalah-masalah dalam keluarga dan sosialisasi tentang Perda No 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, Perda No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Perda No 2 Tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak, Perwal No 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak.

e. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tahun 2021 dilaksanakan di 10 Kelurahan dan diikuti @ 30 orang peserta, yaitu :

- 1) Kel. Pekunden – Kec. Semarang Utara
- 2) Kel. Mlatiharjo – Kec. Semarang Tengah
- 3) Kel. Kaligawe – Kec. Semarang Timur
- 4) Kel. Petompon – Kec. Gunungpati
- 5) Kel. Penggaron Lor – Kec. Pedurungan
- 6) Kel. Kalicari – Kec. Pedurungan
- 7) Kel. Lamper Lor – Kec. Semarang Selatan
- 8) Kel. Tegalsari – Kec. Candisari
- 9) Kel. Jangli – Kec. Gajahmungkur
- 10) Kel. Gedawang – Kec. Banyumanik

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum:

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bagian Hukum adalah menyusun produk hukum daerah yang selanjutnya perlu

didokumentasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat dan OPD. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan informasi Peraturan Perundang-undangan yang lengkap dan akurat, dan mempermudah masyarakat dan OPD untuk mengakses produk hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota baik secara langsung datang ke JDIIH pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang atau dapat juga mengakses informasi produk hukum daerah tersebut melalui website www.jdiih.semarangkota.go.id.

2) Bagian Tata Pemerintahan

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Bagian Tata Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2021 di Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat indikator terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berhasil mencapai realisasi 100% dari target yang ditentukan 100%.

Tabel 2. 2. 4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Bagian Tata Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2021 terdapat indikator meningkatnya tata kelola pemerintahan di wilayah yang berhasil mencapai realisasi 100% dari target yang ditentukan 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Kecamatan/Kelurahan yang berkinerja baik dengan realisasi 87,13% dari target yang telah ditentukan sebesar 100%.

Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan dan Monitoring Administrasi, 16 Kecamatan; Jumlah rapat koordinasi OPD, Camat dan Lurah se-Kota Semarang, 4 kegiatan; Pelaksanaan kajian pedoman evaluasi kinerja kecamatan, 1 kegiatan; Pelaksanaan survey kinerja pemerintahan, 1 kegiatan; Jumlah tertib administrasi dan peningkatan kinerja kecamatan, 16 kecamatan.

Tabel 2. 2 . 5

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Tata Pemerintahan**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Kecamatan / Kelurahan yang berkinerja baik	100%	87,13%	87,13	100%

Jumlah kelurahan yang dilakukan pengelolaan data potensi dan perlembangan kelurahan, 177 kelurahan; persentase fasilitas kegiatan lomba evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, 100%; persentase fasilitas kegiatan LPMK, 100%; persentase fasilitas penyelenggaraan peringatan bulan bhakti gotong royong, 100%.

3) Bagian Organisasi

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Organisasi

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai indeks)	72	71,03	98,65	69,78
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87,35	100,4	86,68

Pada tahun 2021 terdapat dua indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Semarang dalam rangka mendukung Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, Bagian Organisasi berhasil memperoleh realisasi melebihi target pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 87,35 dari target yang ditetapkan sebesar 87. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Semarang selalu menjaga dan senantiasa meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.

Sedangkan untuk target Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan sebesar 72 belum diketahui nilai capaian yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang untuk penilaian tahun 2021, yang merupakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, dimana hasilnya belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Tabel 2. 2 . 7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Organisasi

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai indeks)	72	71,03	98,65	69,78
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87,35	100,4	86,68
3.	Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100	80
4.	Perangkat daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	100	25 perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
	Prosedur (SOP)				
5.	Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah	100%	100%	100	85%
6.	Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah yang Susunan Kelembagaannya sesuai Kebutuhan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	100	6 Unit Kerja

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dari yang ditargetkan 87 menjadi 87,35 atau berhasil melebihi target 100% sejumlah 100,4%. Untuk indikator Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Kota Semarang, Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah dan Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang susunan kelembagaannya sesuai kebutuhan berhasil mencapai realisasi 100 % dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik untuk penilaiannya.

Hal ini secara umum menunjukkan bahwa Bagian Organisasi Setda Kota Semarang dapat mempertahankan capaiannya realisasi kinerjanya sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 100%.

4) Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Hasil yang dicapai pada indikator kinerja Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar	100%	100%	100	100

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
	dan tepat waktu (LKPJ ATA/AMJ, LKJIP, LPPD, ILPPD)				
2.	Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJIP/LAKIP benar dan tepat waktu	100%	100%	100	90
3.	Persentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka Otonomi Daerah	100%	100%	100	100
4.	Tersedianya pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot Semarang	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen
5.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100	90
6.	Tersedianya pranata / perjanjian / dokumen kerjasama antar pemerintah daerah / lembaga / institusi / pihak ketiga dan luar negeri	58	58	100	130 dokumen

Pada Tahun 2021 persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJIP/LAKIP benar dan tepat waktu sebesar 100%. Ini berarti kesadaran dan tanggungjawab Perangkat Daerah untuk menyelesaikan laporan tepat waktu sudah baik, ini menunjukkan progres yang sangat bagus dan berarti kesadaran dari OPD tinggi untuk mengumpulkan bahan dan data.

Pada tahun 2021, kinerja yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja pemerintah 100%, atau sesuai dengan target serta berhasil mencapai target tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepatwaktu (LKPJ ATA/AMJ, LKjIP, LPPD, ILPPD) sejumlah 4 laporan menjadi 4 laporan, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Capaian kinerja tersebut didukung melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2. 2 . 9
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100%	100%	100	100%
2.	Fasilitasi Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	100%	100%	100	100%
3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Monitoring Kegiatan Otonomi Daerah	100%	100%	100	100%
4.	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100	100%
5.	Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	10 dokumen	17 dokumen	170	20
6.	Laporan Sister City dengan Luar Negeri	6 dokumen / tahun	6 dokumen / tahun	100	6

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini bisa dibuktikan dengan hasil realisasi dari 6 indikator kinerja hasilnya memuaskan sebesar 100%.

Namun pada Tahun 2021 Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Tahun 2020 sebanyak 20 Dokumen, ini dikarenakan tergantung pada Permohonan Pihak ke-tiga yang mengajukan untuk difasilitasi Pemerintah Kota Semarang, yang jumlahnya juga menurun.

Capaian lain pada kegiatan Kerjasama adalah Pemerintah Kota Semarang berhasil menyelenggarakan kegiatan Festival HAM pada tahun 2021. Festival HAM 2021 mengangkat tema “Bergerak Bersama

Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi”. Pemilihan tema ini merepresentasikan optimisme terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ini. Keberagaman menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk mencapai satu tujuan bersama. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari (16-19 November 2021) dengan jumlah peserta sebanyak 1000 orang dari perwakilan daerah kab/kota, provinsi dan pemerintah pusat, perwakilan stakeholder dalam bidang HAM, serta perwakilan duta besar yang ada di Indonesia.

Penyelenggara Utama:

- a. Pemerintah Kota Semarang
- b. Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)
- d. Kantor Staf Presiden (KSP)

Lembaga Mitra sebagai Co-organizer

- a. Kemitraan dan *Raoul Wallenberg Institute* (RWI)
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Kebudayaan)
- c. *United Cities and Local Governments Asia Pacific* (UCLG ASPAC)
- d. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- e. *Asian Democracy Network* (ADN)
- f. *International Labour Organization* (ILO)
- g. *Save the Children*
- h. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet)
- i. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
- j. *Open Government Indonesia* (OGI)
- k. Universitas di Kota Semarang
- l. Lembaga mitra lain yang berminat untuk terlibat

Tujuan Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia (HAM):

- a. Memperluas dan memperkuat jaringan kerja salam mengimplementasikan *human rights city* di Indonesia;
- b. Mengidentifikasi praktik-praktik baik dan pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan *human rights city* di Indonesia;

- c. Merumuskan agenda bersama untuk menyempurnakan pelaksanaan *human rights city* di Indonesia serta memperkuat kerjasama baik di tingkat lokal maupun internasional;
 - d. Menyediakan ruang dialog yang mempertemukan gagasan, pengetahuan dan pengalaman terkait pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat daerah.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 2. 2 . 10
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100	100%
2.	Peningkatan Kualitas Kinerja OPD	100%	100%	100	100%
3.	Meningkatnya Perencanaan dan Kinerja Pemerintah	20 dokumen	20 dokumen	100	20

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki hasil yang cukup baik. Ini dapat dibuktikan dari realisasi tiga indikator kinerja yang hasilnya sesuai target yang direncanakan, yaitu sebesar 100%.

5) Bagian Perekonomian

- Program Perekonomian dan Pembangunan

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 11
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Perekonomian

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil mewujudkan layanan administrasi terbaik di Bidang Pembinaan Perekonomian Daerah dan mampu memberikan layanan administratif kepada semua pihak yang membutuhkan, sesuai kewenangan yang diberikan, yaitu dalam hal penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perekonomian Daerah.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD : Capaian deviden dari seluruh BUMD Kota Semarang telah melebihi jumlah yang ditargetkan di tahun 2020 yang disetor di Tahun 2021, tersusunnya Peraturan Walikota Tentang Pengadaan Barang Jasa BUMD sesuai dengan Amanat PP 54 tahun 2017 Tentang BUMD, tersusunnya Laporan Keuangan Triwulanan BUMD, tersusunnya Laporan Evaluasi RKAP/RBB BUMD;
- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian : Kegiatan Forum Komunikasi CSR sudah diselenggarakan dan ada tambahan 13 perusahaan yang bergabung dalam CSR, FGD dan Pengelolaan Aplikasi CSR sudah dilaksanakan, terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kajian Pengaruh Produktivitas Lahan Sempit terhadap Tingkat Ekonomi dan Ketahanan Pangan Keluarga, FGD dan Monitoring LPG;
- c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil : Terselenggaranya fasilitasi pameran, terlaksananya penyaluran BLT kepada 1000 buruh rokok, tersedianya kajian dan aplikasi Laporan DBHCHT, terlaksananya pengumpulan informasi dan pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

6) Bagian Administrasi Pembangunan

- Program Perekonomian dan Pembangunan

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 12

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Administrasi Pembangunan**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100	97,60%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa, dari yang ditargetkan 100% berhasil terealisasi sejumlah 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 97,60%.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. 13

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Administrasi Pembangunan**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari yang ditargetkan 100% berhasil terealisasi sejumlah 100%.

7) Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 14**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Kesejahteraan Rakyat**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan koordinasi dan fasilitasi keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9	9	100	100

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dari yang ditargetkan 9 kegiatan menjadi 9 kegiatan, atau berhasil mencapai target kinerja sejumlah 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan 3 sub kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Program Perekonomian dan Pembangunan

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 15**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan	100%	93,71%	93,71	97,60%

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
	jasa				
2.	Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) serta terwujudnya efisiensi melalui pengadaan secara elektronik	315 paket	216 paket	68,57	103 paket

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa dari yang ditargetkan 100% menjadi 93,71%. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 97,60 %.

Capaian indikator kinerja tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan persentase jumlah paket tender yang telah dilaksanakan yakni sebanyak 216 paket, yang terdiri dari 60 paket pengadaan barang, 110 paket konstruksi, 13 paket jasa lainnya, dan 33 paket jasa konsultasi dan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan untuk pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kota Semarang.

Persentase capaian indikator kinerja tahun 2021 ini menurun karena target paket pada Renja ditetapkan sebanyak 315 paket namun paket yang masuk untuk ditenderkan hanya sebanyak 216 paket. Dan hal ini diluar prediksi jumlah target tahunan paket yang ditenderkan karena anggaran yang terbatas dan dialihkan untuk penanggulangan *Covid-19*.

9) Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten / Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Pimpinan dan Protokol

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 16**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan pelayanan kedinasan bagi pimpinan	100%	100%	100	100%
2.	Cakupan dokumentasi dan pemberitaan kegiatan kedinasan Kepala Daerah	100%	100%	100	100%
3.	Terlayannya kegiatan keprotokolan dan tugas dinas pimpinan	100%	100%	100	100%
4.	Jumlah <i>press release</i> dan pemuatan berita di media cetak dan TV Nasional	100%	100%	100	100%
5.	Jumlah peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	100%	100%	100	100%
6.	Penyusunan naskah sambutan dan pemuatan berita di media sosial	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil mempertahankan pelayanan kegiatan keprotokolan dan tugas dinas pimpinan dari yang ditargetkan 100%, realisasinya 100%. Hal ini mempertahankan yang dicapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 100%, persentase pemuatan berita tentang program dan kebijakan kepala daerah di media cetak dan juga melalui TV Nasional yang dapat dipertahankan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sebagian besar masyarakat memperoleh informasi tentang apa yang sudah dan akan dikerjakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kemudian, jumlah peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, penyusunan naskah sambutan dan berita di media online dari yang ditargetkan 100% dan mampu direalisasikan sebesar 100%. Hal ini mempertahankan yang dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

10) Bagian Tata Usaha

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 17

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Bagian Tata Usaha

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	100

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan yang telah ditargetkan, yaitu sebesar 100%, sehingga dapat menunjang Urusan Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

11) Bagian Rumah Tangga

Hasil yang dicapai pada indikator kinerja Bagian Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 18

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Bagian Rumah Tangga

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	100%
2.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%
3.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100%
4.	Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Bagian Rumah Tangga adalah berhasil mendukung kelancaran pelayanan dan administrasi

perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, pengelolaan barang milik daerah dan penyusunan standar satuan harga (SSH) dengan capaian sebesar 100%, sehingga dapat mendukung pelayanan tugas-tugas administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing program diuraikan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 2. 2 . 19

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Rumah Tangga**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	100%
2.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%
3.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan sarana dan prasarana aparatur dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah (BMD) sebesar 100%, sehingga dapat mendukung tugas-tugas pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

- Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 2. 2 . 20**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Rumah Tangga**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100%

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target penyusunan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 sebesar 100%, sehingga bisa dipergunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang Tahun 2022.

12) Bagian Keuangan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Capaian kinerja pada program ini yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 . 21**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Bagian Keuangan**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100	100 %

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Dinamika perubahan regulasi yang cepat, bahkan munculnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan telah mendapatkan putusan, menyebabkan keraguan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan daring (pertimbangan masa pandemi) termasuk jaringan internet;
- 3) Kurang maksimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) Kurangnya SDM dalam pengelolaan JDIH;
- 5) OPD seringkali terlambat dalam mengajukan Raperda, Raperwal dan Keputusan Walikota, serta kurang respon terhadap perbaikan/koreksi dari Bagian Hukum, yang menyebabkan sering mengalami keterlambatan waktu dalam menganalisis dan mensinkronisasi dengan peraturan lainnya;
- 6) Kurangnya pemahaman OPD dan/atau ASN terkait penanganan perkara;
- 7) Adanya Pandemi *Covid-19* menyebabkan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya, antara lain : Audiensi/Jalan Sehat Walikota Semarang dengan Masyarakat dan kegiatan yang bersifat lomba;
- 8) Pemahaman tentang Teknologi Informasi untuk mengelola *website* LPMK masih terbatas;
- 9) Pelaksanaan sosialisasi perubahan kebijakan baik dalam rangka penataan organisasi, penyusunan proses bisnis, evaluasi pelayanan publik dan standar operasional (SOP), serta road map reformasi birokrasi, karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka dalam masa pandemi dilaksanakan secara daring, sehingga dikhawatirkan pemahaman perangkat daerah kurang optimal;
- 10) Sangat dinamisnya perubahan kebijakan yang mengatur penataan organisasi menyebabkan seringkali terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 11) Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri terdapat Kegiatan yang belum terlaksana optimal dikarenakan Pandemi *Covid-19* yang

- belum kunjung usai dan dengan diterbitkannya Surat himbauan dari Menteri Dalam Negeri tentang penundaan pelaksanaan Ke Luar Negeri;
- 12) Dalam Aplikasi CSR masih banyak perusahaan yang belum bergabung dan admin yang sering berubah, sehingga kegiatan CSR yang telah terlaksana belum terupload;
 - 13) Dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penyebaran virus *Covid-19*, beberapa potensi bisnis BUMD menjadi berkurang;
 - 14) Terkait dengan penyaluran BLT kepada buruh rokok, realisasi anggaran hanya terserap 62% dikarenakan penyaluran BLT dilaksanakan pada anggaran perubahan, dan data buruh pabrik rokok yang semula 1300 orang, setelah di verifikasi dan di validasi menjadi 1000 orang. Selain itu ada penambahan Silpa Tahun 2020 yang masuk;
 - 15) Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran digunakan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkadang belum sepenuhnya dipahami oleh petugas di Perangkat Daerah;
 - 16) Belum adanya aplikasi secara online untuk evaluasi kegiatan yang bersumber dari Non-PAD, kecuali Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
 - 17) Kurangnya SDM yang ada dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - 18) Data pengelola kegiatan keagamaan di masyarakat yang diterima masih kurang akurat, dan kurangnya narasumber yang berkompeten dalam memberikan pembinaan ataupun sosialisasi, yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas bagi modin perawat jenazah dan tempat ibadah yang ada di Kota Semarang;
 - 19) Pembinaan dan sosialisasi kegiatan keagamaan belum bisa mencakup seluruh institusi yang ada di Kota Semarang, karena kurangnya sarana prasarana yang mendukung, misalnya narasumber;
 - 20) Sebelas orang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa yang telah diangkat masih belum mencukupi, karena masih dibutuhkan 40 orang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa sesuai perhitungan analisa beban kerja. Hal ini karena kurangnya minat ASN Pemerintah Kota Semarang yang telah bersertifikat dasar, untuk menjadi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang;

- 21) Dengan bertambahnya personil yang mutasi ke BLPBJ dari OPD lain dan adanya rencana penambahan personil dari pengangkatan CPNS di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, tidak diimbangi dengan penambahan ruangan maupun prasarana dan sarana penunjang. Sehingga ruangan dan fasilitas yang ada tidaklah cukup;
- 22) Pengembangan kompetensi dan pembinaan karier untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan belum terakomodir karena terbatasnya jumlah peserta diklat fungsional dan diklat teknis yang diadakan oleh LKPP sebagai instansi pembina;
- 23) Pemberitaan tentang Kota Semarang masih dirasa kurang masif. Potensi-potensi unggulan misalnya potensi pariwisata kurang terpublikasikan dengan baik;
- 24) Banyak kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran mengingat perubahan SOTK dari nomenklatur sebelumnya, dengan nama dan tugas Bagian yang lama menjadi Bagian dengan nomenklatur dan tugas baru, yang berdampak pada administrasi keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:

- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja

- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas

e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
- 2) Peningkatan prestasi olahraga
- 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
- 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:

- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
- 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
- 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
- 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:

- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
- 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
- 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
- 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
- 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
- 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum

- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

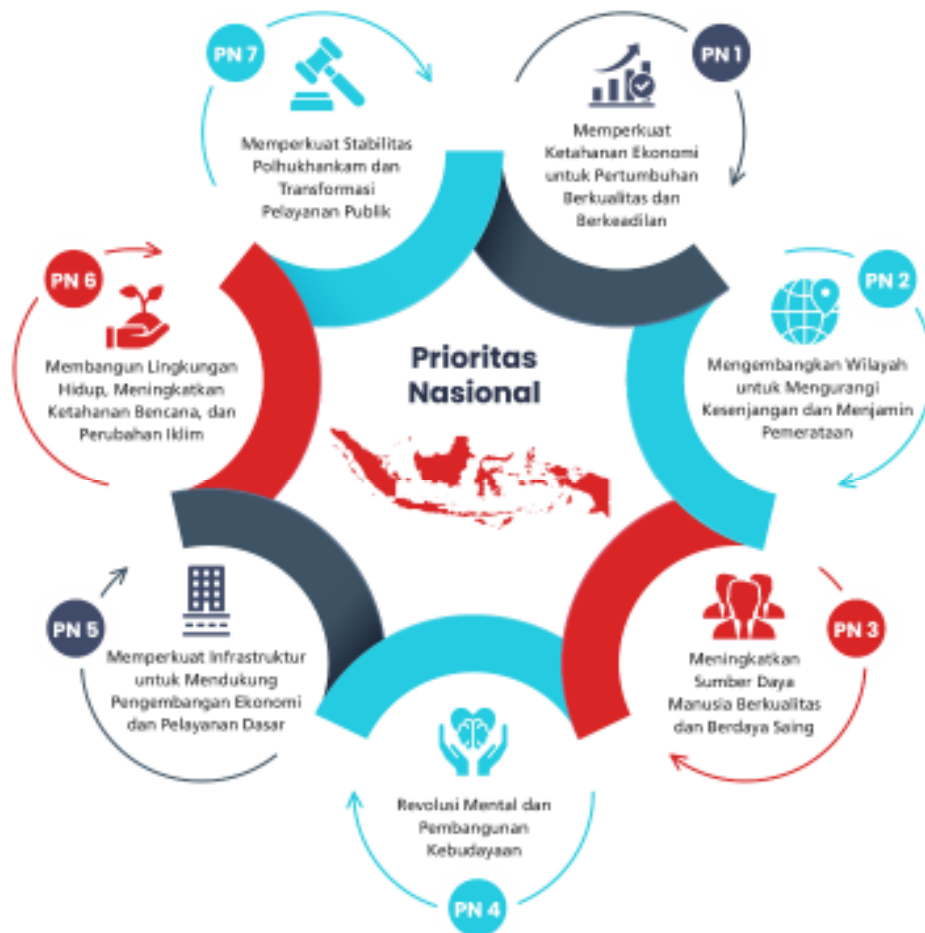
- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah mendukung pencapaian **prioritas kelima**, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”**. Namun dalam tugasnya membantu Walikota, Sekretariat Daerah memiliki kewajiban, baik dalam perumusan kebijakan daerah, maupun dalam pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas daerah serta pelayanan administratif, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP 1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP 6 Penguatan Kemiskinan
- PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai lembaga administratif yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas

daerah serta pelayanan administratif, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola di Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah juga memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas daerah serta pelayanan administratif Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memantapkan tata Kelola pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah”

dengan indikator tujuan **“nilai AKIP, nilai EKPPD, dan IKM Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu:

1. **Meningkatkannya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik;
 - b. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik;
 - c. Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan;
 - d. Nilai AKIP Sekretariat Daerah;
 - e. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu;
 - f. Persentase produk hukum (Perda, Perwal) yang ditetapkan;
 - g. Persentase warga yang diberikan bantuan;
 - h. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP;
 - i. Nilai IKM Sekretariat Daerah.

2. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD;
 - b. Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu;
 - d. Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi;
 - e. Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi;
 - f. Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis.

3. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase berita dan press release yang terpublikasi;
 - b. Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah;
 - c. Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani;
 - d. Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani;
 - e. Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu;
 - f. Persentase fasilitasi pengelolaan aset;
 - g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor;
 - h. Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
SASARAN : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah. Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	%	100
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan	%	100
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	75
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikn laporan kinerja tepat waktu	%	100
	Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan	%	100
	Persentase warga yang diberikan bantuan	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	100
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	89
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD	%	100
	Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	%	100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	%	100
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi	%	100
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100
	Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis		3
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	%	100
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	%	100
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani	%	100
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	%	100
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu	%	100
	Persentase fasilitasi pengelolaan aset	%	100
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	%	100
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	%	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari 3 (tiga) program penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan, yang terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin);
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 198.962.303.560,- (seratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 198.962.303.560,- (seratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
4.01.0.0 0.0.00.0 1.0000		SEKRETARIS DAERAH						198.962.303.560	172.416.202.860	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						198.962.303.560	172.416.202.860	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	118.00	%				47.104.561.945	33.154.052.000	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00	%						
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00	Kegiat an						
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00	Keca matan	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			1.243.070.919	2.282.218.000	
		Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40.00	%						
4.01.02. 2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2.00	Doku men	350.000.000	776.026.000	BAGIAN TATA PEMERINTAH AN
4.01.02. 2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.00	Doku men	300.000.000	554.305.000	BAGIAN TATA PEMERINTAH AN
4.01.02. 2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6.00	Doku men	593.070.919	951.887.000	BAGIAN TATA PEMERINTAH AN
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	15.00	Doku men			BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Daerah					
4.01.02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00	kegiat an				33.648.595.679	22.047.122.000	
4.01.02. 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MTQ & Pesparawi dan pembinaan tenaga pendidik keagamaan formal & non formal dan a pendidikan	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.00	Doku men	27.308.446.907	10.200.000.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.02. 2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan kegiatan perawat jenazah dan pemberian sarana dan prasarana tempat ibadah dan pemberian honor kegiatan untuk petugas kemakmuran masjid	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11.00	Doku men	5.594.949.562	9.847.122.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.02. 2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pembinaan UKS, sosial kemasyarakatan dan penyuluhan bahaya narkoba dan aids bagi pelajar	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7.00	Doku men	745.199.210	2.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT
4.01.02. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118.00	%	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum, Terfasilitasinya Bantuan Hukum dan Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			2.572.584.100	6.979.601.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.02. 2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya : Raperda 9 Perda, Raperwal 36 Perwal, SK Walikota 400 SK Walikota, Surat Perjanjian 120 Surat Perjanjian dan Pembaharuan Aplikasi Eling	100.00	%	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565.00	Doku men	515.389.690	2.393.200.200	BAGIAN HUKUM
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565.00	Doku men			SEKRETARIS DAERAH
4.01.02. 2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya Penanganan Perkara Hukum litigasi di Lembaga Peradilan 20 Perkara,Bantuan Hukum Warga Miskin 35 Perkara, Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dan Penanganan perkara, Terselenggaranya Sosialisasi dan	118.00	%	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55.00	Kasu s	1.526.396.830	2.943.200.400	BAGIAN HUKUM

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
		Pembinaan KADARKUM serta RANHAM								
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55.00	Kasu s		SEKRETARIS DAERAH	
4.01.02. 2.03.03	Pendokumentas ian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksanakannya Sosialisasi Produk Hukum, Terdokumentasika nnya Produk hukum (Perda dan Perwal) dan Pengelolaan JDIH,terpenuhinya Perbaikan sarana dan prasarana Ruangan JDIH	100.00	%	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas i	1000.0 0	Doku men	530.797.580 1.643.200.400	BAGIAN HUKUM	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas i	1000.0 0	Doku men		SEKRETARIS DAERAH	
4.01.02. 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40.00	%				9.640.311.247	1.845.111.000	
4.01.02. 2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	15.00	Doku men	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15.00	Doku men	1.105.200.523	100.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02. 2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Laporan Sister City dengan Luar Negeri	5.00	Doku men/t ahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5.00	Doku men	8.535.110.724	1.745.111.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00	%				4.537.339.432	4.767.881.860	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	%						
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00	doku men						
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.03. 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	111741 69030. 00	doku men				1.300.838.200	1.005.910.860	
4.01.03. 2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi PerekonomianKoor dinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pengendalian dan distribusi perekonomian	12.00	lapora n	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12.00	Lapo ran	318.188.798	375.663.236	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN SUMBER DAYA ALAM
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12.00	Lapo ran			BAGIAN PEREKONOMI AN
4.01.03. 2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan	Koordinasi perencanaan dan pengawasan	10.00	doku men	Jumlah Dokumen Hasil	10.00	Doku men	602.629.125	630.247.624	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Ekonomi Mikro kecil	Ekonomi Mikro Kecil			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				SUMBER DAYA ALAM	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12.00	Dokumen		BAGIAN PEREKONOMIAN	
4.01.03. 2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	9.00	Dokumen	380.020.277	0	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00	%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			683.498.400	1.207.474.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00	doku men						
4.01.03. 2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1.00	Doku men	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1.00	Doku men	165.797.200	633.552.035	BAGIAN ADMINISTRAS I PEMBANGUNA N
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3.00	Doku men			SEKRETARIS DAERAH
4.01.03. 2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00	Lapor an	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00	Lapo ran	387.821.560	289.025.450	BAGIAN ADMINISTRAS I PEMBANGUNA N
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00	Lapo ran			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.03. 2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00	Lapor an	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00	Lapo ran	129.879.640	284.896.515	BAGIAN ADMINISTRAS I PEMBANGUNA N
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00	Lapo ran			SEKRETARIS DAERAH
4.01.03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00	%				2.353.002.832	2.544.497.000	
4.01.03. 2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	230.00	Doku men	1.221.062.000	1.594.497.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
4.01.03. 2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12.00	Doku men	568.850.832	450.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03. 2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10.00	Oran g	563.090.000	500.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang- undangan di bidang cukai	10.00	doku men				200.000.000	10.000.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
4.01.03. 2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10.00	Doku men	200.000.000	10.000.000	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN SUMBER DAYA ALAM
NON URUSAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	%				147.320.402.18 3	134.494.269.00 0	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00	%						
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41.00	OPD						
		%tase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100.00	%						
		%tase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00	%						
		%tase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00	%						
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00	%						
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana	100.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
		perkantoran SKPD								
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	%						
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40.00	%						
X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	%			17.424.780	22.713.000		
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00	%						
X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Doku men	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Doku men	5.041.600	22.713.000	BAGIAN ADMINISTRAS I PEMBANGUNA N
		Jumlah Dokumen RTP Perangkat Daerah	1.00	Doku men						
					Jumlah Dokumen Perencanaan	3.00	Doku men			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
					Perangkat Daerah					
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen			BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.268.000	0	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1.00	Dokumen	3.905.910	0	BAGIAN KEUANGAN

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen		SEKRETARIS DAERAH	
X.XX.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.363.680	0	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD					
X.XX.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	1.00	Doku men	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Doku men	2.845.590	0	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Doku men			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrai keuangan Setda yang lebih baik	100.00	%				37.410.568.199	41.115.023.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
X.XX.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100.00	%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234.00	Oran g/bu lan	36.526.053.799	40.018.573.000	BAGIAN KEUANGAN
		Gaji dan Tunjuangan PNS Setda Kota Semarang	100.00	%						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234.00	Oran g/bu lan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA,KPA,PPK,PPTK dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Doku men	881.400.000	1.080.450.000	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Doku men			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
X.XX.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Setda Kota Semarang	100.00	%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Lapo ran	695.200	8.000.000	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Lapo ran			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Setda Kota Semarang	100.00	%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	1.00	Lapo ran	2.419.200	8.000.000	BAGIAN KEUANGAN

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
					Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan		SEKRETARIS DAERAH	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5.00	dokumen				1.429.031.720	110.034.000	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Dokumen perencanaan BMD	2.00	dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan	2.00	Dokumen	45.712.034	51.762.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Barang Milik Daerah SKPD				Barang Milik Daerah SKPD					
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00	Dokumen		SEKRETARIS DAERAH	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00	Dokumen			
X.XX.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Pengelolaan BMD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.00	Laporan	1.383.319.686	58.272.000	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00	%				3.288.695.351	5.767.495.000	
		Pelayanan Kepegawaian	100.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
		Perangkat Daerah								
X.XX.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4.00	jenis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.00	Pake t	3.241.295.351	5.767.495.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.00	Pake t			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.00	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.00	Oran g	47.400.000	0	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.00	Oran g			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum	Administrasi Umum Setda yang	100.00	%				43.532.182.354	31.971.963.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Perangkat Daerah	lebih baik								
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00	%						
X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	5.00	paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	322.146.827	400.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4.00	Paket			

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Disediakan					
X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12.00	paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00	Pake t	3.222.967.256	1.500.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.00	Pake t			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	6.00	paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.00	Pake t	837.239.512	1.600.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.00	Pake t			SEKRETARIS DAERAH
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.00	Pake t			
X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4.00	paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4.00	Pake t	504.931.999	625.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
							Disediakan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Pake t	SEKRETARIS DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Pake t	
X.XX.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	100.00	%			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	268.00	Doku men	338.040.000 220.500.000 BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jamuan Makanan dan Minuman bagi tamuh Pemerintah Kota Semarang	100.00	%			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	2.00	Lapo ran	10.086.609.600 9.659.445.000 BAGIAN TATA USAHA
		Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di	100.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
		Lingkungan Setda Kota Semarang								
X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100.00	%	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00	Lapo ran	25.160.188.976	17.217.018.000	BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00	%						
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00	%						
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk	100.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
		koordinasi dan konsultasi dalam daerah								
		Kegiatan Peringatan HUT RI	100.00	%						
X.XX.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis Teknologi informasi	2.00	paket	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	3.060.058.184	750.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	4.00	Dokumen			

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Berbasis Elektronik pada SKPD					
X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00	%				8.730.483.416	14.351.216.000	
X.XX.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan	3.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.00	Unit	1.900.000.000	4.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas operasional/lapangan	21.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	7.00	Unit	4.527.080.692	5.342.523.895	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satua n			
	atau Lapangan				atau Lapangan yang Disediakan					
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20.00	Unit		SEKRETARIS DAERAH	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15.00	Unit			
X.XX.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebelair	66.00	unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66.00	Unit	271.535.833	900.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40.00	Unit			
X.XX.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor dan mesin lainnya	11.00	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5.00	Unit	1.276.981.147	800.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
					Disediakan					
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11.00	Unit		SEKRETARIS DAERAH	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit			
X.XX.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	1.00	unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	754.885.744	3.308.692.105	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit			
X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%				10.153.130.772	9.371.714.000	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	%						
X.XX.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat	100.00	%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	Lapo ran	163.006.000	270.000.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan listrik	3.00	lapora n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00	Lapo ran	6.403.219.632	6.994.807.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00	Laporan		SEKRETARIS DAERAH	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00	Laporan		BAGIAN TATA USAHA	
X.XX.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	1.672.656.439 981.530.000	BAGIAN TATA USAHA	
X.XX.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran Forsesdasi	100.00	%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3.00	Laporan	1.914.248.701 1.125.377.000	BAGIAN TATA USAHA	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
					Umum Kantor yang Disediakan					
		Honor TPHL Setda Kota Semarang	100.00	%						
		Dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00	%						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.00	Laporan		SEKRETARIS DAERAH	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00	Laporan		BAGIAN RUMAH TANGGA	
X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	%				20.235.876.858	12.677.814.000	

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
	Urusan Pemerintahan Daerah									
X.XX.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	4.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.00	Unit	169.123.596	139.333.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai	200.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	200.00	Unit	3.248.791.512	2.238.292.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dengan kebutuhan			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200.00	Unit		SEKRETARIS DAERAH	
X.XX.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	1500.0 0	unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500.0 0	Unit	121.078.800	90.391.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500.0 0	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai	17.00	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	17.00	Unit	12.702.266.022	8.000.889.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
		dengan kebutuhan			ehabilitasi					
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	17.00	Unit		SEKRETARIS DAERAH	
X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	650.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	650.00	Unit	2.779.788.694	1.506.389.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	650.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
X.XX.01. 2.09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	725.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	725.00	Unit	1.214.828.234	702.520.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	725.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00	%				4.132.488.432	5.185.672.000	
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	%						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
X.XX.01. 2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100.00	%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00	Oran g/Bu lan	182.400.632	209.572.000	BAGIAN KEUANGAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00	Oran g/Bu lan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	24.00	paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24.00	Pake t	850.336.800	850.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	24.00	Pake t			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Kepala Daerah yang Disediakan					
X.XX.01. 2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional KDH dan KDH	100.00	%	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00	Oran g/ Bu lan	3.099.751.000	4.126.100.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01. 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00	%				3.955.000.000	4.568.025.000	
X.XX.01. 2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12.00	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Pake t	2.575.000.000	2.974.125.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Pake t			SEKRETARIS DAERAH
					Jumlah Paket Kebutuhan	12.00	Pake t			BAGIAN TATA USAHA

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					
X.XX.01. 2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12.00	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Pake t	1.380.000.000	1.593.900.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Pake t			SEKRETARIS DAERAH
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Pake t			BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01. 2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	indek s				849.666.396	1.065.951.000	
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	40.00	%						
X.XX.01. 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1.00	Doku men	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan	2.00	Doku men	114.667.937	350.493.737	BAGIAN ORGANISASI

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
							dan Analisis Jabatan			
		Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1.00	Doku men						
		Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.00	Doku men						
		Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1.00	Doku men						
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.00	Doku men			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengelolaan Proses Bisnis	1.00	Doku men	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.00	Lapo ran	367.211.980	545.674.206	BAGIAN ORGANISASI
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25.00	OPD						

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
		Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	25.00	OPD						
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25.00	OPD						
		Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1.00	Doku men						
		Survey Kepuasan Masyarakat	1.00	Doku men						
		Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1.00	doku men						
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.00	Lapo ran		SEKRETARIS DAERAH	
X.XX.01. 2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1.00	Doku men	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00	Doku men	146.581.690	129.353.057	BAGIAN ORGANISASI

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00	Doku men		SEKRETARIS DAERAH	
X.XX.01. 2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20.00	Doku men	221.204.789	40.430.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
X.XX.01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00	%				13.585.853.905	8.286.649.000	
X.XX.01. 2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12.00	lapora n	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12.00	Lapo ran	1.126.880.000	786.649.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12.00	Lapo ran			SEKRETARIS DAERAH

Kode	Program/Keg/ SubKeg	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan /			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1)	Unit Pelaksana
					Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)				Rp.	
		Uraian	Target	Satua n	Uraian	Target	Satu an			
X.XX.01. 2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.00	lapora n	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.00	Lapo ran	8.885.460.385	6.300.000.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.00	Lapo ran			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01. 2.14.03	Pendokumentas ian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.00	lapora n	Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	12.00	Lapo ran	3.573.513.520	1.200.000.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
					Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	12.00	Lapo ran			SEKRETARIS DAERAH
JUMLAH								198.962.303.56 0	172.416.202.86 0	

BAB V PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat Daerah;
3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD

Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) guna integrasi dengan RPJMD. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Semarang sehingga ada keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dengan program prioritas Pemerintah Kota Semarang.

Dokumen Renstra dan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kota Semarang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terangkum dalam APBD Kota Semarang.

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Semarang sebagai salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah memandang perlu untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk penyusunan dokumen Rencana Kerja tahun 2023 dalam rangka untuk mewadahi informasi yang terjadi selama tahun anggaran 2023.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 adalah merupakan rencana anggaran yang menggambarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dinas yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang.

Dalam Rencana Kerja dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, kendala, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dan disertai indikator kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
12. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 - 2026.
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengaruh Kesetaraan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang di tahun 2023 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk Tahun 2023 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2023 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD Kota Semarang Tahun 2023.

Selain itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 juga menjadi dokumen perencanaan di tahun pertama dari dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2023 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Semarang;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Semarang Tahun 2023;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD Tahun 2023, serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2023

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang

Pada Tahun anggaran 2021, Sekretariat DPRD Kota Semarang telah melaksanakan 2 Program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021

SEKRETARIAT DPRD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTAS E (%)
Belanja Operasi	107.932.839.308	76.402.372.51 2	70.79
Belanja Modal	2.652.102.736	1.998.711.000	75.36
Jumlah	110.584.942.04 4	78.401.083.5 12	70.90

Sesuai dengan tabel diatas, pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp110.584.942.044. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp78.401.083.512 atau setara 70,90% dari total anggaran yang tersedia.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	62.481.927.565	100%	85.71	85.71%	100%	63,772,365,259	100%
		Jumlah raperda yang disetujui DPRD	14		14.00 raperda	12	90%	14.00 raperda		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	19.793.247.889	100%	22	22	100%	18,829,868,980	100%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		100%	19.793.247.889	100%	22.00%	22.00%	100%	18,829,868,980	100%
		Dokumen penyusunan Raperda	100.00%		100%	22	22	100%		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	12.681.112.984	100%	71.38	71.38	100%	13,104,305,484	100%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		100%	9.493.731.184	100%	93.75%	93.75%	100%	9,858,730,184	100%
		Dokumen Kajian	16.00		16	15	95%	16		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dokumen		dokumen			dokumen		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		100%	3.187.381.800	100%	49.00%	49.00%	100%	2,445,575,300	100%
		Dialog Interaktif	100.00%		100%	49	49%	100%		100%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	4.952.682.909	100%	100	100%	100%	6,055,579,168	100%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses		100%	4.952.682.909	100%	100.00%	100.00%	100%	6,055,579,168	100%
		Penjaringan Aspirasi Masyarakat	3.00 kegiatan		3 kegiatan	3	3	3 kegiatan		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		100%	25.054.883.783	100%	57.5	57.5	100%	25,782,611,627	100%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		100%	23.053.479.784	100%	70.00%	70.00%	100%	23,181,207,628	100%
		Dokumen Kunjungan Kerja Dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00%		100%	70	70%	100%		
		Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00%		100%	70	70%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00%		100%	70	70%	100%		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		100%	2.001.403.999	100%	45.00%	45.00%	100%	2,601,403,999	100%
		Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik	100.00%		100%	0	0	100%		
		Rapat Paripurna	100.00%		100%	90	90%	100%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	57.291.989.262	100%	88.33	88.33%	100%	63,476,235,741	100%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100		100.00%	90	90%	100.00%		100%
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		100.00%	75	75%	100.00%		100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		100.00%	100	100%	100.00%		100%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	49.106.382	100%	100	100%	100%	59,454,620	100%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	14.339.880	100%	100.00%	100.00%	100%	14,500,000	100%
		Dokumen Renja OPD	1.00 Dokumen		1 Dokumen	1	1	1 Dokumen		
		Dokumen Renstra	1.00 dokumen		1 dokumen	1	1	1 dokumen		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	5.940.937	100%	100.00%	100.00%	100%	5,470,880	100%
		Dokumen RKA	1.00 dokumen		1 dokumen	1	1	1 dokumen		100%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	18.862.020	100%	100.00%	100.00%	100%	13,467,716	100%
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	100.00%		100%	100	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	9.963.545	100%	100.00%	100.00%	100%	4,161,520	100%
		Tersusunnya Dokumen LAKIP	1.00 dokumen		1 dokumen	1	1	1 dokumen		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.553.096.000	100%	33.33	33.33%	100%	8,297,535,552	100%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	7.553.096.000	100%	100.00%	100.00%	100%	7,835,046,000	100%
		Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%		100%	100	100	100%		
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	0	100%	0.00%	0.00%	100%	462,489,552	100%
		Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas	12.00 bulan		12 bulan	0	0	12 bulan		
		Honor BP, BPP, Pengurus Barang yang terbayar	12.00 bulan		12 bulan	0	0	12 bulan		
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	0	100%	0.00%	0.00%	100%	10,927,380	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100.00%		100%	0	0	100%		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	417.000.000	100%	100	100%	100%	473,100,000	100%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100%	417.000.000	100%	100.00%	100.00%	100%	473,100,000	100%
		Bimtek/Workshop Bagi Sekretariat DPRD	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	3.062.960.053	100%	55.43	55.43	100%	5,561,515,005	100%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	50.265.900	100%	100.00%	100.00%	100%	50,000,000	100%
		Jumlah alat - alat listrik yang digunakan	12.00 bulan		12 bulan	12	12	12 bulan		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	417.627.845	100%	100.00%	100.00%	100%	417,627,845	100%
		Jumlah Alat Pengharum Ruangan yang	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terpakai								
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	573.413.980	100%	0.00%	0.00%	100%	473,413,980	100%
		Jumlah Jamuan Makan dan Minum yang tersedia	1.00 tahun		1 tahun	0	0	1 tahun		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	214.999.700	100%	41.00%	41.00%	100%	323,617,400	100%
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100.00%		100%	41	41	100%		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	357.646.268	100%	47.00%	47.00%	100%	339,944,180	100%
		Koran/Majalah dan bahan bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang terbayar	100.00%		100%	47	47	100%		100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		100%	0	100%	0.00%	0.00%	100%	0	0
		Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	12.00 bulan		12 bulan	0	0	12 bulan		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	1.449.006.360	100%	100.00%	100.00%	100%	2,625,931,360	100%
		Peningkatan Kualitas SDM Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.060.881.790	100%	50	50	100%	2,095,772,760	100%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	200.650.000	100%	0.00%	0.00%	100%	260,000,000	100%
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda \$	100.00%		100%	0	0	100%		
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	665.158.950	100%	75.00%	75.00%	100%	1,750,000,000	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	1.00 Tahun		1 Tahun	0.75	0.75	1 Tahun		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	1.195.072.840	100%	75.00%	75.00%	100%	708,981,548	100%
		Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi	1.00 Tahun		1 Tahun	0.75	0.75	1 Tahun		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.609.031.256	100%	100	100	100%	2,496,477,256	100%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	12.145.000	100%	100.00%	100.00%	100%	12,145,000	100%
		Jumlah Materai yang terpakai	12.00 bulan		12 bulan	12	12	12 bulan		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	167.162.256	100%	100.00%	100.00%	100%	167,162,256	100%
		Rekening Listrik, Telepon, Air, dan TV Kabel Terbayar	12.00 Bulan		12 Bulan	12	12	12 Bulan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	2.429.724.000	100%	100.00%	100.00%	100%	2,317,170,000	100%
		Honorarium bagi tenaga kebersihan yang terbayar	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
		Tenaga Operasional yang terbayar (Pengemudi dan Pantry)	1.00 tahun		1 tahun	1	1	1 tahun		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.426.934.826	100%	100	100	100%	2,095,772,760	100%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	1.112.544.366	100%	100.00%	100.00%	100%	890,000,000	100%
		Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD terpelihara	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	340.014.560	100%	100.00%	100.00%	100%	340,014,560	100%
		Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang terawat	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	561.044.000	100%	100.00%	100.00%	100%	561,044,000	100%
		Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD yang terpelihara	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
		Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Sekretariat DPRD yang terpelihara	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
		Tenaga Ketertiban dan Pengamanan kantor DPRD Kota Semarang terbayar	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	413.331.900	100%	100.00%	100.00%	100%	304,714,200	100%
		Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang terawat	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	37.960.612.255	100%	80.33	80.33	100%	40,573,399,000	100%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		100%	36.980.390.000	100%	100.00%	100.00%	100%	39,903,399,000	100%
		Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.00 tahun		1 tahun	1	1	1 tahun		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		100%	824.222.255	100%	100.00%	100.00%	100%	670,000,000	100%
		Jumlah Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		100%	156.000.000	100%	41.00%	41.00%	100%	0	0%
		Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00%		100%	41	41	100%		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		100%	1.152.366.700	100%	100	100	100%	1,200,000,000	100%
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		100%	1.152.366.700	100%	100.00%	100.00%	100%	1,200,000,000	100%
		Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	1.00 Tahun		1 Tahun	1	1	1 Tahun		

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	13		14
Kegiatan	4.02.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,851,855	48,737,350	72.90%	18,114,505
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,339,880	11,770,000	82.08%	2,569,880
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,940,937	2,970,250	50.00%	2,970,687
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,940,937	4,523,000	76.13%	1,417,937
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,863,599	5,691,000	97.06%	172,599
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,940,937	4,826,500	81.24%	1,114,437
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,862,020	16,317,000	86.51%	2,545,020
Sub Kegiatan	4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	9,963,545	2,639,600	26.49%	7,323,945
Kegiatan	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,983,207,363	7,301,504,785	91.46%	681,702,578
Sub Kegiatan	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,444,267,000	7,004,023,785	94.09%	440,243,215
Sub Kegiatan	4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538,940,363	297,481,000	55.20%	241,459,363
Kegiatan	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217,000,000	192,700,000	88.80%	24,300,000
Sub Kegiatan	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	217,000,000	192,700,000	88.80%	24,300,000
Kegiatan	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,257,825,293	3,120,071,690	73.28%	1,137,753,603

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sisa Anggaran
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,665,900	45,649,650	91.91%	4,016,250
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	415,227,845	304,945,700	73.44%	110,282,145
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	573,413,980	309,617,245	54.00%	263,796,735
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	214,999,700	149,868,500	69.71%	65,131,200
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	357,646,268	234,646,965	65.61%	122,999,303
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,638,665,240	1,631,072,270	99.54%	7,592,970
Sub Kegiatan	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,008,206,360	444,271,360	44.07%	563,935,000
Kegiatan	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,597,881,790	2,008,252,000	77.30%	589,629,790
Sub Kegiatan	4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550,650,000	501,288,000	91.04%	49,362,000
Sub Kegiatan	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	839,158,950	510,137,000	60.79%	329,021,950
Sub Kegiatan	4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,208,072,840	996,827,000	82.51%	211,245,840
Kegiatan	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,610,431,256	2,301,572,210	88.17%	308,859,046
Sub Kegiatan	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,145,000	12,130,000	99.88%	15,000
Sub Kegiatan	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,162,256	63,903,456	38.23%	103,258,800
Sub Kegiatan	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,431,124,000	2,225,538,754	91.54%	205,585,246
Kegiatan	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,523,974,826	1,547,813,193	61.32%	976,161,633
Sub Kegiatan	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	1,111,344,366	593,506,203	53.40%	517,838,163

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sisa Anggaran
	Dinas Operasional atau Lapangan				
Sub Kegiatan	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340,014,560	214,922,800	63.21%	125,091,760
Sub Kegiatan	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	559,284,000	538,089,090	96.21%	21,194,910
Sub Kegiatan	4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513,331,900	201,295,100	39.21%	312,036,800
Kegiatan	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	37,160,337,939	35,541,845,828	95.64%	1,618,492,111
Sub Kegiatan	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	36,180,115,684	34,838,503,013	96.29%	1,341,612,671
Sub Kegiatan	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	824,222,255	593,845,000	72.05%	230,377,255
Sub Kegiatan	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	156,000,000	109,497,815	70.19%	46,502,185
Kegiatan	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	1,149,966,700	1,144,167,499	99.50%	5,799,201
Sub Kegiatan	4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,149,966,700	1,144,167,499	99.50%	5,799,201
Kegiatan	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	17,893,247,889	5,458,051,898	30.50%	12,435,195,991
Sub Kegiatan	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17,893,247,889	5,458,051,898	30.50%	12,435,195,991
Kegiatan	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	12,686,153,441	8,855,579,116	69.81%	3,830,574,325
Sub Kegiatan	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5,040,457	4,050,000	80.35%	990,457
Sub Kegiatan	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9,493,731,184	6,339,942,500	66.78%	3,153,788,684
Sub Kegiatan	4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3,187,381,800	2,511,586,616	78.80%	675,795,184
Kegiatan	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4,952,682,909	3,538,665,590	71.45%	1,414,017,319
Sub Kegiatan	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	4,952,682,909	3,538,665,590	71.45%	1,414,017,319
Kegiatan	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	16,485,380,783	7,342,122,353	44.54%	9,143,258,430

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sisa Anggaran
Sub Kegiatan	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14,483,976,784	6,341,731,272	43.78%	8,142,245,512
Sub Kegiatan	4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,001,403,999	1,000,391,081	49.98%	1,001,012,918
Jumlah		110,584,942,044	78,401,083,512	70.90%	32,183,858,532

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp110.584.942.044. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp78.401.083.512 atau setara 70.90%

c. Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio						Keterangan	
					2017	2018	2019	2020	2021	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Rasio		
TUJUAN RENSTRA																	
	Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik dan melayani	Index Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SASARAN RENSTRA																	
-	Terwujudnya birokrasi Sekretariat DPRD yang baik dan melayani	Meningkatkan produktifitas kinerja Anggota DPRD dalam menciptakan produk-produk hukum bagi Kota Semarang	20.00 Perda	120.00 Perda	40.00 Perda	60.00 Perda	80.00 Perda	100.00 Perda	120.00 Perda	3	60	1	0	0	21.75		
		Terserapnya seluruh aspirasi masyarakat melalui Komisi-komisi yang di lembaga DPRD maupun melalui Reses yang nantinya akan digunakan Pemerintah sebagai dasar bagi terselenggaranya pembangunan	0.00 kali	15.00 kali	3.00 kali	6.00 kali	9.00 kali	12.00 kali	15.00 kali	3	6	3	0	0	46.67		

	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio						Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Rasio	
		Menjadikan lembaga DPRD sebagai mitra kerja Pemerintahan yang dapat bekerja sama dengan baik	20.00 Perda	120.00 Perda	40.00 Perda	60.00 Perda	80.00 Perda	100.00 Perda	120.00 Perda	3	60	1	0	0	21.75	
-	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Cakupan Jumlah Raperda yang Dihasilkan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25	2	25	0	0	10.4	

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran OPD Tahun 2021 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Index Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD” . Dari Target yang ditentukan sebesar 100%, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 100%;
- b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
 1. “Terwujudnya birokrasi Sekretariat DPRD yang baik dan melayani” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut;
 - a) Meningkatkan produktifitas kinerja Anggota DPRD dalam menciptakan produk-produk hukum bagi Kota Semarang;
 - b) Terserapnya seluruh aspirasi masyarakat melalui Komisi-komisi yang di lembaga DPRD maupun melalui Reses yang nantinya akan digunakan Pemerintah sebagai dasar bagi terselenggaranya pembangunan;
 - c) Menjadikan lembaga DPRD sebagai mitra kerja Pemerintahan yang dapat bekerja sama dengan baik;
 2. “Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat” memiliki 1 indikator kinerja Cakupan Jumlah Raperda yang Dihasilkan.

Disamping hal-hal tersebut di atas, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:

- 1) Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2021 Tentang Penyempurnaan Raperda Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
- 2) Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 Tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- 3) Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rkyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2019-2024.
- 4) Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/4 Tahun 2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2020 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- 5) Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/5 Tahun 2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- 6) Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/6 Tahun 3032 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- 7) Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/7 Tahun 2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :

- 1) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2021 Tentang Usul Prakarsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengarusutamaan Gender;
- 2) Keputusan DPRD kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengarusutamaan Gender;
- 3) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Semarang Masa Jabatan 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 202;
- 5) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2019-2024;
- 6) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/6 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kecamatan Menjadi Peraturan Daerah;
- 7) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020
- 8) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/8 Tahun 2021 tentang Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020;
- 9) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/9 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Menjadi Peraturan Daerah;
- 10) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/10 Tahun 2021 tentang Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- 11) Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/11 Tahun 2021 tentang Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- 12)Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang;
- 13)Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang;
- 14)Keputusan DPRD Nomor 172.1/14 Tahun 2021 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Perseroan Terbatas (PT) Cakrawala Sakti Kencana;
- 15)Keputusan DPRD Nomor 172.1/15 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Menjadi Peraturan Daerah;
- 16)Keputusan DPRD Nomor 172.1/16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- 17)Keputusan DPRD Nomor 172.1/17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026
- 18)Keputusan DPRD Nomor 172.1/18 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Semarang Kota Semarang tahun 2020 Menjadi Peraturan Daerah;
- 19)Keputusan DPRD Nomor 172.1/19 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 Menjadi Peraturan Daerah;
- 20)Keputusan DPRD Nomor 172.1/20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- 21)Keputusan DPRD Nomor 172.1/21 Tahun 2021 tentang persetujuan Permohonan Perpanjangan Kerjasama Antara Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kota Fuzhou Provinsi Fujian Republik Rakyat Tiongkok;
- 22)Keputusan DPRD Nomor 172.1/22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2022;
- 23)Keputusan DPRD Nomor 172.1/23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2021;
- 24)Keputusan DPRD Nomor 172.1/24 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Daerah;

- 25) Keputusan DPRD Nomor 172.1/25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemerintah Kota Semarang kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025;
- 26) Keputusan DPRD Nomor 172.1/26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 27) Keputusan DPRD Nomor 172.1/27 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Menjadi Peraturan Daerah;
- 28) Keputusan DPRD Nomor 172.1/28 Tahun 2021 tentang Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas Menjadi Peraturan Daerah;
- 29) Keputusan DPRD Nomor 172.1/29 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025 Menjadi Peraturan Daerah;
- 30) Keputusan DPRD Nomor 172.1/30 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengarusutamaan Gender Menjadi Peraturan Daerah;
- 31) Keputusan DPRD Nomor 172.1/31 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan daerah Kota Semarang Tahun 2022;
- 32) Keputusan DPRD Nomor 172.1/32 tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah;
- 33) Keputusan DPRD Nomor 172.1/33 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Menjadi Peraturan Daerah.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

- 1) Raperda tentang Kecamatan.
- 2) Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
- 3) Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum daerah;
- 4) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang Tahun anggaran 2020;
- 5) Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.
- 6) Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021
- 7) Raperda tentang ekonomi Kreatif
- 8) Raperda tentang Penyandang Disabilitas
- 9) Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PT Bank Jawa Tengah Tahun 2022-2025
- 10) Raperda tentang Pengarusutamaan Gender
- 11) Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
- 12) Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mengenai pembahasan terhadap Raperda-raperda perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa DPRD telah Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebanyak 14 (empat belas) Raperda. Adapun sampai saat ini telah disetujui penetapan sebanyak 12 (dua belas) Raperda sebagaimana tersebut diatas.

Perjalanan Dinas DPRD Tahun 2021

No	NAMA KEGIATAN PERJALANAN DINAS	JUMLAH KEGIATAN
		2021
1	Kunjungan Kerja	120
2	Konsultasi ke Pemerintahan Pusat	0
3	Bimbingan Teknis / Workshop	6
4	Undangan	0

Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2021

No	RAPAT DINAS	JUMLAH KEGIATAN
		2021
1	Rapat Paripurna	26
2	Rapat Pimpinan	9
3	Rapat Badan Musyawarah	13
4	Rapat Badan Anggaran	13
5	Rapat Badan pembentukan Perda	10
6	Rapat Badan Kehormatan	3
7	Rapat Komisi A	33
8	Rapat Komisi B	23
9	Rapat Komisi C	29
10	Rapat Komisi D	33
11	Rapat Panitia Khusus	16

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD Kota Semarang, hal ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD Kota Semarang banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di banding dengan institusi pelayanan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah kota Semarang. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 4 (empat) orang Pimpinan DPRD namun juga pada 49 Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD, namun kenyataannya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasnya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari Partai Politik di Kota Semarang dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap, dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para Wakil Rakyat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.3.1. Peningkatan Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

DPRD Kota Semarang bertekad menjadi parlemen modern. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi ke pada para wakil rakyat.

Dulu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD harus mengirimkan surat atau berkunjung langsung ke kantor DPRD. Surat yang dikirimkan tentu butuh waktu hingga bisa sampai ke tangan para anggota DPRD. Begitupula dengan datang langsung untuk mengadu, belum tentu saat ini juga bisa bertemu dengan anggota dewan yang diinginkan.

Proses penyampaian aspirasi juga bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan reses dewan. Fakta di lapangan, aspirasi dari rakyat belum sepenuhnya mampu tersampaikan pada anggota dewan.

Tapi kini sudah berubah. Masyarakat bisa mengadu kapanpun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat berujung ke kantor DPRD. Aplikasi e-Sarapan membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan uneg-uneg-nya ke DPRD.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

Secara rutin DPRD Kota Semarang juga menyampaikan hasil kerja mereka dalam menanggapi aspirasi masyarakat lewat media massa. Media cetak, online, radio, dan televisi ikut menyebarkan informasi dan kinerja DPRD Kota Semarang kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesekretariatan dan keuangan. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2022-2026, Sekretariat DPRD Kota Semarang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan pemerintahan, perkembangannya ditunjukkan pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Raperda yang diusulkan	23	19	15	16	14
2	Prosentase Peningkatan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), terdapat perubahan pada pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2022-2026 yang mempunyai visi “**Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika**” telah diupayakan agar selaras dengan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat yang berwujud usulan-usulan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara normatif, Sekretyariat DPRD Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan adminstrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
2. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang terkait dengan Raperda Inisiatif Legislatif;
3. Penyelenggaraan Penyerapan Aspirasi dan Penyampaian Informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
5. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
6. Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Semarang;

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2022-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Semarang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas & kapasitas sumber daya manusia yang unggul & produktif untuk mencapai kesejahteraan & keadilan sosial;
- 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing & stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset & inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- 3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- 4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- 5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis & menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretariat DPRD Kota Semarang terkait dengan misi 5, yaitu menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta

peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- 1) Perkembangan Tehnologi yang semakin cemat dan Smart sehingga memudahkan kita dalam memperoleh Informasi yg tepat dan akurat;
- 2) Masih rendahnya partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui <http://dprd.semarangkota.go.id/sarapan> dan media sosial Pemerintah Kota Semarang lainnya;
- 3) Masih banyak OPD memiliki data yang sangat minim baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan ;
- 4) Masih kurangnya kesadaran terhadap pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut;
- 5) Peningkatan SDM persandian dalam pengamanan informasi yang otentik, integrity dan nir-penyangkalan;

Peluang dalam perumusan kebijakan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD antara lain sebagai berikut :

1. Adanya dukungan anggaran dalam APBD Kota Semarang melalui kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam rangka meningkatkan serapan aspirasi dari masyarakat ;
2. Adanya tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul yang dimanfaatkan sebagai layanan Wifi;
3. Adanya komunitas-komunitas di masyarakat yang mempermudah dalam peningkatan infrastruktur TIK melalui sosialisasi dan edukasi;
4. Perkembangan Teknologi yg cepat tidak diikuti dengan baik untuk peningkatan SDM di pemerintah khususnya SDM dibidang TIK;
5. Ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang di dukung jaringan informasi dan komunikasi yg memadai di semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
6. Statistik sebagai bahan perencanaan : Melalui berbagai metode yang dikembangkan dalam statistik (pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembuatan kesimpulan untuk pengambilan keputusan serta penyajian data), data yang dihasilkan dapat dipercaya, tepat waktu dan akurat, sehingga akan sangat membantu dalam setiap kegiatan perencanaan program;
7. Statistik sebagai bahan monitoring : Dalam arti sempit statistik adalah data ringkasan berbentuk angka, maka hal ini sangat membantu di dalam suatu kegiatan monitoring. Oleh karena secara umum yang dilakukan dalam kegiatan monitoring adalah memonitor seluruh kekuatan dan kelemahan program yang menyangkut berbagai variable yang berbentuk data ringkasan;
8. Statistik sebagai bahan evaluasi : Dengan mengetahui berbagai data yang dapat dipercaya maka selanjutnya kita dapat menganalisis dan memutuskan yang baik dan yang buruk. Selain itu melalui berbagai data yang ada kita dapat membandingkan dan selanjutnya membuat suatu generalisasi dari sampel yang kecil kepada populasi. Selain itu analisis data statistik dapat digunakan pula untuk meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan kondisi yang sudah lalu;

9. Adanya peraturan perundang-undangan dari Pusat dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan tentang pengelolaan penanganan pengaduan.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting (rekomendasi dan catatan strategis) yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 :

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan sudah barang tentu banyak dijumpai permasalahan yang timbul sesuai dengan berjalannya waktu. Munculnya permasalahan karena semata sebagai pemenuhan kebutuhan atau karena ada kasus yang harus diselesaikan. Akan lebih mudah mengatasi masalah yang terjadi apabila ada inventarisasi dan rencana tindak lanjut.

Pemecahan terhadap masalah dapat dilakukan dengan menentukan isu-isu strategis yang nantinya menjadi acuan menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah tiap-tiap Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk merumuskan strategi kebijakan program dan kegiatan, terlebih dahulu kita akan mengadakan analisa strategis baik dilingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sebuah organisasi.

Lingkungan strategis ini akan dianalisis dengan menggunakan instrument analisis SWOT yaitu suatu analisa yang didasarkan adanya faktor Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan (*Threats*).

1. Kondisi Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

- a. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat factor-faktor strategis antara lain:

- Eksistensi Lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan integral dari manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Dukungan tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat Fraksi;

- b. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain:

- c. Minimnya fasilitas ruang/prasarana Gedung kantor sekretariat DPRD;
- d. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas Peraturan Perundangan;

Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan;

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Faktor Peluang (*Oportunities*)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD;
3. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan;
4. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;
5. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan;
6. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
8. Terbentuknya jejaring kerja dengan Stakeholder, Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Media Masa dan Elektronik;

b. Faktor Tantangan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang;
- 2) Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal;
- 3) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 4) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan;
- 5) Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga wakil rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Adapun upaya untuk mengatasi minimnya fasilitas ruang/prasarana Gedung kantor Sekretariat DPRD dimana menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang maka Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023.

Rekomendasi Sekretariat DPRD Kota Semarang :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Semarang diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan evaluasi capaian kerja sampai dengan tahun 2023;
- b) DPRD memandang perlu memberikan perhatian dan prioritas terhadap pemilihan strategi dan penetapan kebijakan pembangunan tahun 2023, untuk memberikan ruang yang cukup bagi pemanfaatan, pendayagunaan, dan pemberdayaan seluruh potensi Kota Semarang.

Catatan Strategis :

Perlunya Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas. Terkait sisa Raperda yang belum dibahas pada Tahun 2022, dimungkinkan bisa diusulkan atau tidak diusulkan lagi pada Program Pembentuk Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan

- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.02	SEKRETARIAT DPRD			140.105.450.000				129.984.475.359
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	69.969.720.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	66.842.330.639
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100%			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%			persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	9 dokumen	79.268.000	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	9 dokumen	33.012.494
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	3 dokumen	15.950.000	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	3 dokumen	10.128.674

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen	6.545.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen	3.117.280
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen	6.545.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen	3.199.030
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	13.035.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	8.392.480
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	6.545.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	3.199.030
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	20.748.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	3.064.480
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	9.900.000	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	1.911.520
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	9.127.288.000	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	7.513.194.569
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	8.618.550.000	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	7.140.519.359

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	508.738.000	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	362.871.050
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	3.708.000
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	18 dokumen		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	18 dokumen	6.096.160
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	-	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	50.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	-	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	50.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81 orang	520.410.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81 orang	520.410.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	81 orang	520.410.000	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	81 orang	520.410.000

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	6.149.655.000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	5.297.189.645
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	100%	55.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	100%	50.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	100%	459.390.000	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	100%	417.627.845
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	520.755.000	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100%	236.499.000	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100%	323.617.400
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	100%	393.410.000	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	100%	339.944.180
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	100%	2.890.695.000	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	100%	2.151.180.240

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	100%	1.593.906.000	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	100%	1.541.406.000
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.971.408.000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	3.063.167.270
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	286.000.000	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	1.929.154.315
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	1.925.000.000	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	878.332.835
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Kantr/Bangunan Lainnya	100%	760.408.000	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Kantr/Bangunan Lainnya	100%	255.680.120
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	2.746.124.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	2.504.332.256
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah materai yang terpakai	12 bulan	13.359.000	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah materai yang terpakai	12 bulan	20.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	12 bulan	183.878.000	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	12 bulan	167.162.256
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	12 bulan	2.548.887.000	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	12 bulan	2.317.170.000
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.424.829.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.144.272.760
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100%	979.000.000	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100%	938.500.000
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	100%	374.016.000	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	100%	340.014.560
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	100%	617.148.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	100%	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	100%	454.665.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	100%	304.714.200

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	50 orang/bulan	44.630.738.000	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	50 orang/bulan	44.516.751.645
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	12 bulan	43.722.138.000	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	12 bulan	43.508.088.950
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100 bulan	737.000.000	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100 bulan	1.008.662.695
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	100 persen	1.320.000.000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	100 persen	1.200.000.000
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.320.000.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.200.000.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16 dokumen	70.135.730.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16 dokumen	63.142.144.720
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	16 dokumen	20.712.855.000	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	16 dokumen	19.162.791.094
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	14 buah	20.712.855.000	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	14 buah	19.162.791.094
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	14.414.735.000	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	13.089.905.484

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Laporan Penyebarluasan informasi Raperda 300 titik	100%	880.000.000	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Laporan Penyebarluasan informasi Raperda 300 titik	100%	785.600.000
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah Dokumen Kajian	100%	10.844.603.000	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah Dokumen Kajian	100%	9.858.730.184
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tersampainya Informasi melalui Baliho yang terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV dan Radio	100%	2.690.132.000	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tersampainya Informasi melalui Baliho yang terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV dan Radio	100%	2.445.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	150 dokumen	6.647.202.000	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	150 dokumen	6.063.055.494
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Reses 150	150 dokumen	6.647.202.000	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Reses 150	150 dokumen	6.063.055.494
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	28.360.938.000	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	24.826.392.648
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	25.499.394.000	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	22.276.888.649

NO	Rancangan Awal RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik Rapat Paripurna	100%	2.861.544.000	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik Rapat Paripurna	100%	2.549.503.999

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2020, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama. Proses perencanaan pembangunan Tahun 2023, masukan-masukan dari DPRD pada prinsipnya, setiap substansi dalam pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen, dan akan dituangkan dalam Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh para Anggota Dewan dalam bentuk pelaksanaan Reses. Adapun tujuan kegiatan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Kegiatan Reses dimanfaatkan semua Anggota Dewan Kota Semarang untuk “Belanja Masalah” langsung dari sumber masalah. Atas semua aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan sesuai prosedur/dilanjut oleh Kepala Dinas Terkait semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan di APBD 2023. Dengan harapan kegiatan Reses dapat meringankan beban masyarakat, seluruh persoalan di masyarakat bisa secepatnya rampung.

Tabel 2.7
Rekap Usulan dan Program Kegiatan Reses Tahun 2021

No	Nama	Nama Dewan	Dapil	Aspirasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sobirin, S.Pd.	HM Rohaini - FPKB	Dapil 3	Permohonan pembangunan Talud Drainase supaya tidak terjadi Banjir saat Hujan
2	Agustin Rahayu	Jauhar Awaluddin - FPKS	Dapil 3	Penanganan Banjir di RW 4 Klipang Sendangmulyo
3	Isna Imam Safii	Hanik Khoirul S - FPDIP	Dapil 2	Lampu Penerangan Lapangan
4	Bangun	Suryanto - F Nasdem	Dapil 3	Aspal Jalan Kampung
5	Hadi Santoso	Danur Rispriyanto FDemokrat	Dapil 3	Mohon Perbaikan / Pembangunan Talud Jalan di Wilayah RT04/09

Selain melalui kegiatan Reses, penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilakukan juga melalui aplikasi online yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD yakni “*e-Sarapan*” yang merupakan kepanjangan dari Sampaikan Aspirasi, Saran dan Harapan Anda kepada Dewan. Aplikasi berbasis web ini secara mudah dapat diakses oleh warga Kota Semarang melalui situs <https://dprd.semarangkota.go.id/sarapan/>.

Tabel 2.8
Rekap Penyampaian Aspriasi melalui e-Sarapan

No (1)	Nama (2)	Lokasi (3)	Dapil (4)	Aspirasi (5)
1	Ciptoadi Hendra M	Kecamatan Semarang Barat	Dapil 1	Tolong sistem drainase dibenarkan atau Pompanya ditambah supaya daerah perumahan tidak terdampak banjir
2	Ciptomukti Hardiani Puspita	Kecamatan Banyumanik	Dapil 5	Supaya ditambah wifi gratis untuk masyarakat dan bisa digunakan untuk pembelajaran daring yang paling tida dengan kecepatan minim 75mbps
3	Yakla Ibnu Sina fakturobby	Kecamatan Genuk	Dapil 3	Memohon untuk diperindah taman supaya warga atau masyarakat bisa menggunakan taman tersebut dengan semaksimal mungkin
4	Fara Maulida	Kecamatan Semarang Timur	Dapil 2	Pembuatan Taman bertujuan untuk memberikan suasana menjadi lebih asri
5	Irama Angkasa	Kecamatan Semarang Barat	Dapil 1	Kepada DPRD Kota Semarang usul tolong adakan Kegiatan Parlemen Remaja seperti yg diadakan DPR RI setiap tahun-nya yang menysasar anak SMA SMK ,bedanya kalau Parlemen Remaja ini yang tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk anak SMA SMK agar mereka bisa menjadi generasi melek politik dan mereka bisa mencoba simulasi menjadi anggota legislatif untuk bekal pendidikan di dunia politik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
 1. Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 2. Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
 - a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap

melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;

f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;

i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);

b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;

c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

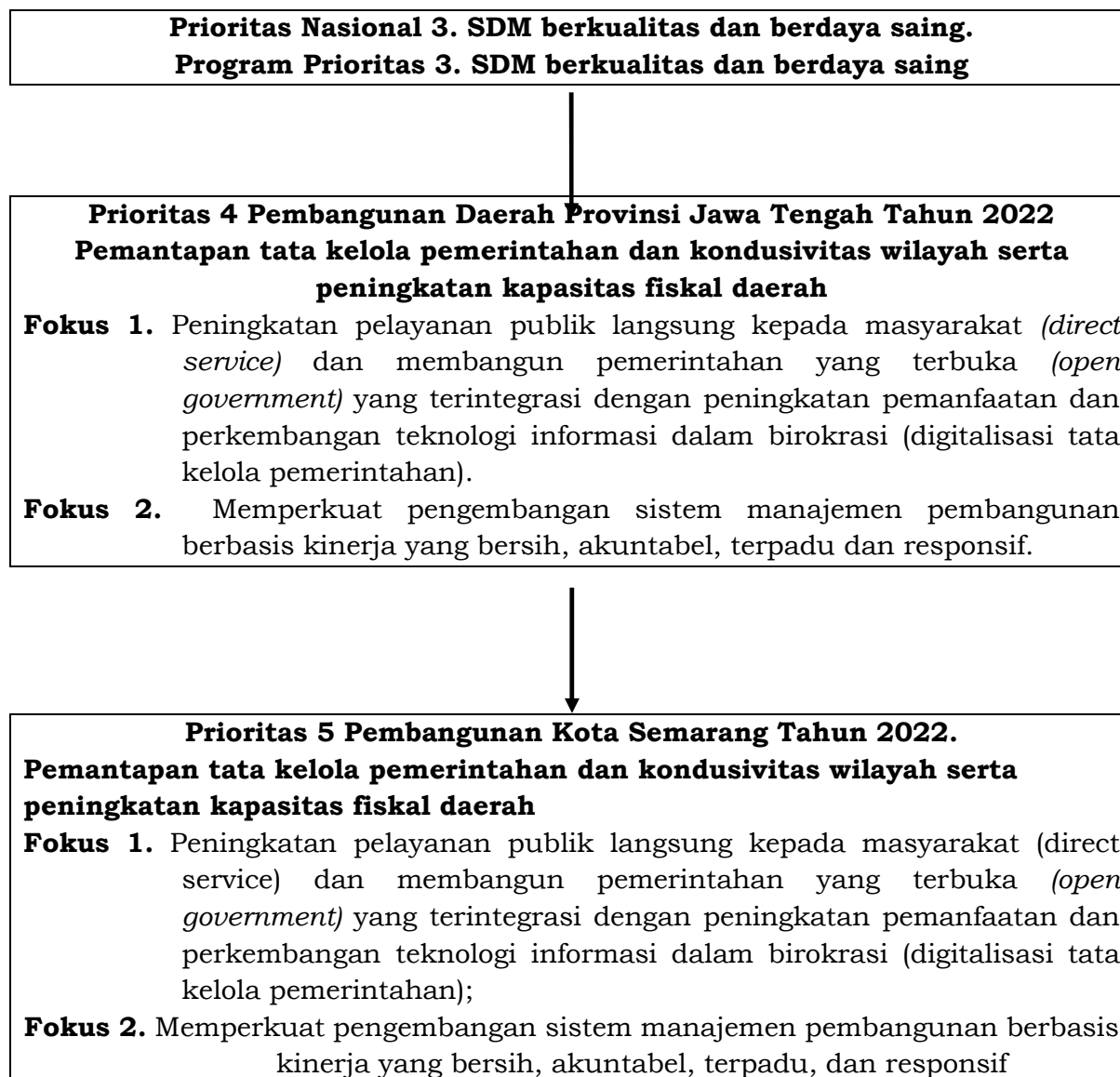
d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;

e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Semarang
dengan Prioritas Pembangunan Nasional Maupun Daerah



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023, adalah :

“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD”

Dalam rangka untuk mencapai tujuan , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda
2. Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	90%
SASARAN :			
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	%	82.35%
Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	%	81.00%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2023 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 40 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan rutin dan 7 (tujuh) sub kegiatan pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 sebesar Rp 129.984.475.359 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembila Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.02	SEKRETARIAT DPRD				129.984.475.359			142.982.922.895
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	Kota Semarang	100%	66.842.330.639	APBD Daerah	100%	73.526.563.703
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD		100%			100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD		100%			100%	
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD		100%			100%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kota Semarang	9 dokumen	33.012.494	APBD Daerah	9 dokumen	36.313.743
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	Kota Semarang	3 dokumen	10.128.674	APBD Daerah	3 dokumen	11.141.541
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	Kota Semarang	1 dokumen	3.117.280	APBD Daerah	1 dokumen	3.429.008
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	Kota Semarang	1 dokumen	3.199.030	APBD Daerah	1 dokumen	3.518.933

Kode Rekening	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	Kota Semarang	1 dokumen	8.392.480	APBD Daerah	1 dokumen	9.231.728
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	Kota Semarang	1 dokumen	3.199.030	APBD Daerah	1 dokumen	3.518.933
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Semarang	1 dokumen	3.064.480	APBD Daerah	1 dokumen	3.370.928
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	Kota Semarang	1 dokumen	1.911.520	APBD Daerah	1 dokumen	2.102.672
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	Kota Semarang	100%	7.513.194.569	APBD Daerah	100%	8.264.514.026
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	Kota Semarang	100%	7.140.519.359	APBD Daerah	100%	7.854.571.295
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	100%	362.871.050	APBD Daerah	100%	399.158.155
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Kota Semarang	1 dokumen	3.708.000	APBD Daerah	1 dokumen	4.078.800
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Kota Semarang	18 dokumen	6.096.160	APBD Daerah	18 dokumen	6.705.776

Kode Rekening	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen administrasi Pengamanan BMD	Kota Semarang	100%	50.000.000	APBD Daerah	100%	55.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	50.000.000	APBD Daerah	1 dokumen	55.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Semarang	81 orang	520.410.000	APBD Daerah	81 orang	572.451.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	Kota Semarang	81 orang	520.410.000	APBD Daerah	81 orang	572.451.000
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	Kota Semarang	100%	5.297.189.645	APBD Daerah	100%	5.826.908.610
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	Kota Semarang	100%	50.000.000	APBD Daerah	100%	55.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	Kota Semarang	100%	417.627.845	APBD Daerah	100%	459.390.630
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Kota Semarang	100%	473.413.980	APBD Daerah	100%	520.755.378

Kode Rekening	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	Kota Semarang	100%	323.617.400	APBD Daerah	100%	355.979.140
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	Kota Semarang	100%	339.944.180	APBD Daerah	100%	373.938.598
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	Kota Semarang	100%	2.151.180.240	APBD Daerah	100%	2.366.298.264
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	Kota Semarang	100%	1.541.406.000	APBD Daerah	100%	1.695.546.600
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	Kota Semarang	100%	3.063.167.270	APBD Daerah	100%	3.369.483.997
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Semarang	100%	1.929.154.315	APBD Daerah	100%	2.122.069.747

Kode Rekening	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	Kota Semarang	100%	878.332.835	APBD Daerah	100%	966.166.119
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Kantr/Bangunan Lainnya	Kota Semarang	100%	255.680.120	APBD Daerah	100%	281.248.132
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	Kota Semarang	12 bulan	2.504.332.256	APBD Daerah	12 bulan	2.754.765.482
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah materai yang terpakai	Kota Semarang	12 bulan	20.000.000	APBD Daerah	12 bulan	22.000.000
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	Kota Semarang	12 bulan	167.162.256	APBD Daerah	12 bulan	183.878.482
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	Kota Semarang	12 bulan	2.317.170.000	APBD Daerah	12 bulan	2.548.887.000
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	Kota Semarang	100%	2.144.272.760	APBD Daerah	100%	2.358.700.036
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Kota Semarang	100%	938.500.000	APBD Daerah	100%	1.032.350.000

Kode Rekening	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	Kota Semarang	100%	340.014.560	APBD Daerah	100%	374.016.016
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	Kota Semarang	100%	561.044.000	APBD Daerah	100%	617.148.400
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	Kota Semarang	100%	304.714.200	APBD Daerah	100%	335.185.620
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	Kota Semarang	50 orang/bulan	44.516.751.645	APBD Daerah	50 orang/bulan	48.968.426.810
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	Kota Semarang	12 bulan	43.508.088.950	APBD Daerah	12 bulan	47.858.897.845
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	Kota Semarang	100 bulan	1.008.662.695	APBD Daerah	100 bulan	1.109.528.965
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	Kota Semarang	100 persen	1.200.000.000	APBD Daerah	100 persen	1.320.000.000
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	Kota Semarang	100%	1.200.000.000	APBD Daerah	100%	1.320.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

1. Seiring dengan pulihnya kondisi kesehatan global dan dengan bergulirnya kembali perekonomian setelah dampak pandemi, kegiatan-kegiatan konsultasi Pendampingan dapat terserap dengan optimal.
2. Sesuai dengan Program Pembentukan Perda tahun 2023, Komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kebijakan maupun jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang pun mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Semarang tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.
3. Akibatnya dari rendahnya jumlah raperda yang disetujui berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Konsultasi dan Kunjungan Kerja Pansus, karena dalam rangkaian pembahasan Raperda selalu diikuti dengan kegiatan – kegiatan Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah.
4. Penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tidak mungkin lagi dihindari sehingga ASN di Sekretariat DPRD Kota Semarang harus meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan IT (Informasi Teknologi) untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
5. Perlu dibangun sistem-sistem lain untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
6. Terkait sisa Raperda yang belum dibahas pada Tahun 2022, dimungkinkan bisa diusulkan atau tidak diusulkan lagi pada Program Pembentuk Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan -perubahan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023;
4. Penyusunan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
5. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi;
6. Peranan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
7. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.
2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
3. Sekretariat DPRD terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, hal yang dibanggakan Sekretariat DPRD ikut memberikan kontribusi, memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dalam mempersiapkan bahan pembahasan Anggaran Tahun 2023 dan Pembahasan Anggaran Murni tahun 2023 sehingga dapat berjalan dengan lancar dan persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

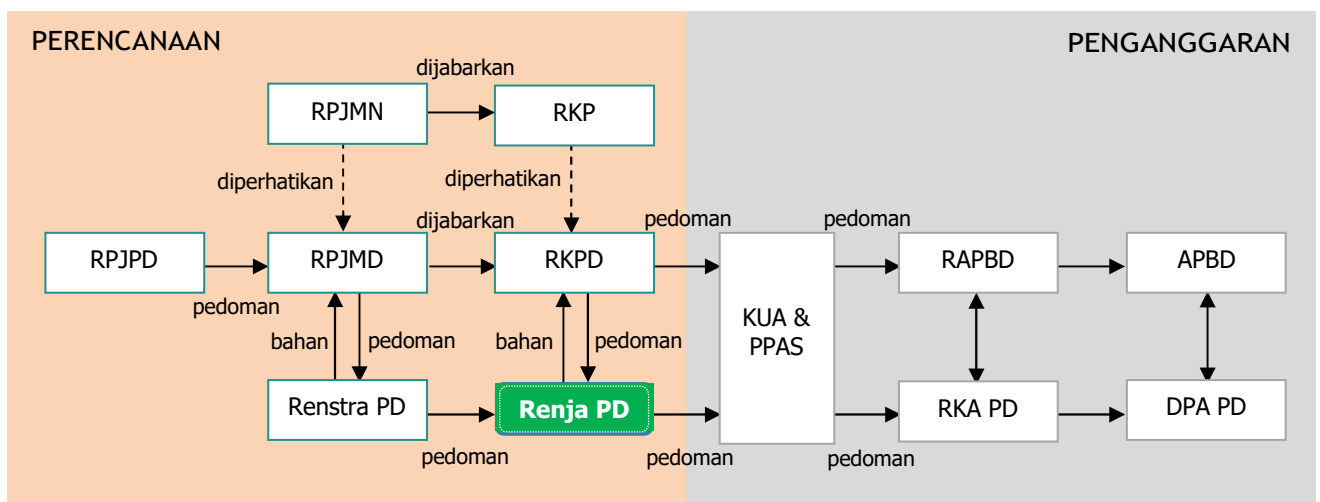
Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Bappeda Kota Semarang, yang berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang. Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra tersebut.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Tahun 2023.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2023.

I.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 44).

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2023.

I.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2022, yang menggunakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

Pada tahun 2021, Bappeda Kota Semarang telah menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, dengan melaksanakan 4 program, 16 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan

serta pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda sesuai ketentuan, yaitu sebanyak 25 dokumen dari total 25 dokumen yang harus terpenuhi.

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan 11 sub kegiatan, dimana terdapat satu sub kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi sebesar 91,67 %.

- b) Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan target sebesar 80,00 % dan realisasi sebesar 98,11 % (capaian 122,64 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui persentase aparatur (PNS) Bappeda yang telah ditingkatkan kapasitasnya, yaitu sebanyak 52 orang dari total 53 orang pegawai.
- c) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target sebesar 100,00 %, dan realisasi sebesar 89,42 % (capaian 89,42 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata - rata persentase pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan administrasi perkantoran.
- d) Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100,00 %, dengan realisasi sebesar 89,54 % (capaian 89,54 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata - rata dari persentase pengadaan sebesar 84,21 % dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 94,87 %.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Persentase Pengakomodiran Usulan Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan, dengan target tahun 2021 sebesar 75,00 % dan realisasi sebesar 87,00 % (capaian 116,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui jumlah usulan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebanyak 5.521 usulan, dari 6.346 usulan masyarakat.
- b) Persentase Kesesuaian Muatan antar Dokumen Perencanaan dan dengan Dokumen Pelaksanaan Antar Waktu, dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Persentase kesesuaian tersebut diukur melalui kesesuaian program RKPD Tahun 2021 terhadap program RPJMD tahun berkenaan sebesar 100,00 %, dan kesesuaian program APBD terhadap program RKPD sebesar 100,00 %.

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Capaian Indikator Sasaran Misi 1 dan 2 RPJMD terhadap Target Tahunan, dengan target tahun 2021 sebesar 92,00 % dan realisasi sebesar 102,18 % (capaian 111,06 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata – rata capaian 15 indikator sasaran pada misi 1 dan 2 RPJMD.
- b) Persentase Kesesuaian Muatan antar Dokumen Perencanaan Antar Waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya), dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Persentase kesesuaian tersebut diukur melalui kesesuaian program Renstra OPD terhadap program RPJMD tahun berkenaan sebesar 100,00 %, serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja OPD terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan RKPd sebesar 100,00 %. Adapun untuk Persentase kesesuaian muatan Renja terhadap Renstra tidak dapat diukur kesesuaiannya, karena terdapat perbedaan nomenklatur antara Renstra dan Renja.
- c) Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan dengan target tahun 2021 sebesar 92,00 % dan realisasi sebesar 97,33 % (capaian 105,79 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata – rata capaian dari 7 indikator sasaran RPJMD.
- d) Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Persentase kesesuaian tersebut diukur melalui kesesuaian program Renstra OPD terhadap program RPJMD tahun berkenaan sebesar 100,00 %, serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja OPD terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan RKPd sebesar 100,00 %. Adapun untuk Persentase kesesuaian muatan Renja terhadap Renstra tidak dapat diukur kesesuaiannya, karena terdapat perbedaan nomenklatur antara Renstra dan Renja.
- e) Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan dengan target tahun 2021 sebesar 92,00 % dan realisasi sebesar 93,95 % (capaian 102,12 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata – rata capaian dari 5 indikator sasaran RPJMD.

- f) Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Rumpun Perekonomian) dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Persentase kesesuaian tersebut diukur melalui kesesuaian program Renstra OPD terhadap program RPJMD tahun berkenaan sebesar 100,00 %, serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja OPD terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD sebesar 100,00 %. Adapun untuk Persentase kesesuaian muatan Renja terhadap Renstra tidak dapat diukur kesesuaiannya, karena terdapat perbedaan nomenklatur antara Renstra dan Renja.

4) Program Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Persentase Hasil Kajian Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan target tahun 2021 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 96,00 % (capaian 96,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur dari jumlah hasil kelitbangan yang terpublikasi, tersosialisasi, dijadikan referensi atau acuan penelitian atau kebijakan, serta dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk realisasi tahun 2021 ini tidak mencapai target, dikarenakan terdapat beberapa komponen indikator yang secara tidak langsung terdampak pandemi COVID-19, dimana jumlah hasil kelitbangan yang tersosialisasi hanya terealisasi sebanyak 31 kali dari yang ditargetkan sebanyak 35 kali.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	-	100,00 %	100,00 %	100,00	8 Dokumen	8 Dokumen	19,51
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,72 %	99,72	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00 %	-	100,00 %	99,72 %	99,72	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 %	-	100,00 %	91,67 %	91,67	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	-	100,00 %	100,00 %	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00 %	76,19 %	80,00 %	98,11 %	122,64	100,00 %	100,00	100,00
X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	15 Kegiatan	-	100,00 %	100,00 %	100,00	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20,00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi	15 Kegiatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	89,54 %	89,54	100,00 %	100,00	100,00
X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 %	-	100,00 %	71,06 %	71,06	100,00 %	100,00	100,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 Jenis	100,00 %	100,00 %	57,14 %	57,14	3 Jenis	3 Jenis	15,79
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	100,00 %	100,00 %	72,13 %	72,13	12 Jenis	12 Jenis	20,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118 Jenis	100,00 %	100,00 %	69,70 %	69,70	28 Jenis	28 Jenis	23,73
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35Jenis	100,00 %	100,00 %	81,82 %	81,82	7 Jenis	7 Jenis	20,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	25900 Orang	100,00 %	100,00 %	95,84 %	95,84	6000 Orang	6000 Orang	23,17
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	775 Kegiatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	210 Kegiatan	210 Kegiatan	27,10
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	33 Jenis	100,00 %	100,00 %	69,00 %	69,00	8 Jenis	8 Jenis	24,24

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	-	100,00 %	89,36 %	89,36	100,00 %	100,00	100,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,83 %	95,83	100,00 %	100,00%	100,00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	88,89 %	88,89	100,00 %	100,00%	100,00
X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00 %	-	100,00 %	94,78 %	94,78	100,00 %	100,00	100,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	100,00 %	100,00 %	97,92 %	97,92	1 Unit	1 Unit	20,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	145 Unit	100,00 %	100,00 %	97,92 %	97,92	29 Unit	29 Unit	20,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	0	1 Paket	1 Paket	93,77	1 Gedung	1 Gedung	100,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00	100,00
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	100,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan	-	-	-	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	5 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJPD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	1 Kegiatan	-	-	-	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10 Dokumen	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	20,00
		Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah dokumen background study RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	6 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	20,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perwal Renstra PD Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPDP	20 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	-	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kelurahan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review Grand Design Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Penganggaran di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Kegiatan TOT/Bintek PPRG	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
		Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Sinergitas Forum anak dan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Kajian E-Library di Kawasan Publik dalam mendukung Semarang Smart City	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Kajian Mekanisme Layanan Informasi, Publikasi, Edukasi Khusus untuk Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah LP2KD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Sehat Kota Semarang 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Semarang 2018 - 2030	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2022, 2023, 2024	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Kota Inklusif 2026 - 2031	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Rating Kelurahan Sehat	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Jumlah Dokumen Pemetaan Objek PBB Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	
		Jumlah Dokumen Strategi Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	
		Jumlah Dokumen Penguatan Budaya Perusahaan BUMD di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00	
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pola Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review Pengembangan Pariwisata Lokal berbasis Desa Wisata & Kearifan Lokal	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Kewenangan OPD Pemkot terhadap Pelaku Usaha di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.02.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	4 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sektor SDA mendukung green economy	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Industrialisasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam mendukung Blue Economy di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Kebijakan Publik pada Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sistem Pangan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Fasilitas Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Hunian vertikal	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen RAD AMPL	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) Dadapsari-Kuningan	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review RISPK	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen EHRA (Environmental Health Risk Assesment)	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Review RP2KPKPK	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Transportasi rendah karbon	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen NA dan Draft Peraturan Daerah Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Perda Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Semarang Lama	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perwal Vertical / Roof Garden	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	4 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen Air skala Kampung	4 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Fasilitas Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	5 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00 %	95,96 %	100,00 %	96,00 %	96,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	16,67
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	8 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	25,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sejarah Perkembangan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 1 Sejarah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 2 Sejarah Pemerintahan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 3 (Sejarah Budaya Arsitektur & Kuliner Masyarakat Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 4 Kawasan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	14 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	21,43
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	14 Dokumen	13 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	21,43
		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	5 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,00
		Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	5 Kegiatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,00
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	5 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	10 edisi	8 edisi	2 Edisi	2 Edisi	100,00	2 Edisi	2 Edisi	20,00
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	10 Kegiatan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	5 Kegiatan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	26.461.867.140	22.233.818.590	84,02
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN	24.476.501.100	20.654.768.812	84,39
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	15.631.064.524	13.408.076.952	85,78
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.623.000	2.885.900	43,57
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.506.000	55.500	3,69
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	919.180	698.000	75,94
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.780	882.000	73,45
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.001.220	850.000	84,90
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.282.820	67.200	5,24
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	713.000	333.200	46,73
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.202.564.326	10.760.522.749	96,05
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.823.021.826	10.422.653.499	96,30
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.665.000	337.780.000	89,20
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	522.200	25.000	4,79
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	196.900	43.000	21,84
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	158.400	21.250	13,42
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	6.300.000	25,20
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	6.300.000	25,20

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.468.731.498	1.246.108.385	50,48
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.964.822	2.165.000	73,02
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.444.650	12.524.000	36,36
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.893.758	12.297.855	29,35
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.933.656	26.797.045	40,04
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.896.572	4.834.250	11,54
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1.363.600	196.500	14,41
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.316.700	19.587.245	37,44
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.259.000	102.097.277	97,93
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.122.658.740	1.065.609.213	50,20
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.167.500	66.691.248	61,09
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.323.500	3.906.449	53,34
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.844.000	62.784.799	61,65
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.818.978.200	1.325.568.670	72,87
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.540.000	307.080.444	69,23
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.375.438.200	1.018.488.226	74,05
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.196.405.580	1.269.585.291	57,80
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.486.166.850	896.850.758	60,35
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	84.502.500	74.455.500	88,11
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	41.448.600	36.508.650	88,08
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	86.360.050	69.797.075	80,82
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	101.454.200	10.886.450	10,73
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.172.401.500	705.203.083	60,15
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	148.562.100	99.616.594	67,05
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	138.571.350	99.391.594	71,73
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	9.990.750	225.000	2,25

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	561.676.630	273.117.939	48,63
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	344.293.000	155.592.240	45,19
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	217.383.630	117.525.699	54,06
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.649.030.996	5.977.106.569	89,89
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.535.050.000	1.267.047.279	82,54
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.500.000	55.039.049	49,81
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	150.000.000	140.269.100	93,51
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	736.550.000	574.969.582	78,06
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	538.000.000	496.769.548	92,34
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.559.100.000	1.395.622.331	89,51
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	896.000.000	843.440.095	94,13
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	185.600.000	119.227.549	64,24
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	470.000.000	427.992.887	91,06
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7.500.000	4.961.800	66,16
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.554.880.996	3.314.436.959	93,24
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.353.380.000	2.310.069.933	98,16
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	466.703.772	422.182.238	90,46
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	464.252.408	340.883.369	73,43
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	270.544.816	241.301.419	89,19

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	URUSAN PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.985.366.040	1.579.049.778	79,53
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.985.366.040	1.579.049.778	79,53
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	102.900.000	101.836.765	98,97
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	102.900.000	101.836.765	98,97
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	205.900.000	202.527.680	98,36
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	205.900.000	202.527.680	98,36
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.010.177.200	998.877.347	98,88
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	302.482.000	300.214.320	99,25
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	605.408.200	600.506.967	99,19
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	102.287.000	98.156.060	95,96
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	666.388.840	275.807.986	41,39
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	134.579.730	103.390.500	76,82
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	325.943.640	130.277.026	39,97
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	174.867.720	29.206.900	16,70
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	30.997.750	12.933.560	41,72

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Selain realisasi anggaran di atas, di tahun anggaran 2021 terdapat paket pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum terbayarkan, dengan jumlah total sebesar Rp 609.378.452,- pada tiga sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp 434.240.000,-
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 76.232.612,-
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebesar Rp 98.905.840,-

Selanjutnya pada tahun anggaran 2022 ketiga paket pekerjaan tersebut telah terbayarkan setelah melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 16 kegiatan dan 55 sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang sebesar Rp 26.461.867.140,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.233.818.590,- (dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 84,02 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.228.048.550,- atau sebesar 15,98 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang akibat masih berlangsungnya Pandemi COVID-19;
- Terdapat paket pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum terbayarkan, dengan jumlah total sebesar Rp 609.378.452,- pada tiga sub kegiatan;
- Terdapat pelaksanaan paket pekerjaan yang tidak optimal, sehingga pembayarannya menyesuaikan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :									
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	-	-	91,60 %	92,20 %	90,71 %	94,04 %	90,64 %	91,00 %
Sasaran :									
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	-	-	72,00 %	74,00 %	70,21 %	70,64 %	70,64 %	70,70 %
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	95,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,96 %	96,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	-	-	89,60 %	89,70 %	87,33 %	80,60 %	81,05 %	81,65 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”**. Pada Tahun 2021, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebesar 94,04 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,71 % ;

b. Sasaran Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang konsisten dan Akuntabel, dengan Indikator “Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja”. Pada tahun 2021, Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja adalah sebesar 70,64 %, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,21 %. Kenaikan ini berdasarkan kenaikan pada komponen perencanaan kinerja tahun 2021;
- 2) Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator “Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Pada tahun 2021, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 96,00%, dimana kali ini lebih tinggi dari kondisi pada tahun sebelumnya sebesar 95,96%;
- 3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda, dengan Indikator “Nilai AKIP Bappeda”. Pada tahun 2021, Nilai AKIP Bappeda sebesar 80,60% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,33%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik, akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini telah dibuktikan dimana pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik tingkat kota untuk Penghargaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPД
serta antara RKPД dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPД	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,16 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPД dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPД adalah sebesar 100,00 %, dimana 156 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPД Tahun 2021. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPД dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 159 program Perubahan RKPД yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2021.

Selain Indikator Pelayanan Bappeda yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pekerjaan Umum.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pekerjaan Umum sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kota Semarang
Tahun 2019 s.d 2021

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		2,81 %	12,19 %	17,14 %
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	51 OPD	51 OPD	51 OPD
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	65 Program / 91 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan / 108 Sub Kegiatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM					
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten / kota	Ada	Ada	Ada
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Ada
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 izin	1 izin	1 izin
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Bappeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut : Dari 4 program, 16 kegiatan, dan 55 sub kegiatan pada Bappeda di tahun 2021, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (50,00 %), 3 kegiatan (18,75 %) dan 4 sub kegiatan (7,27 %). Dari jumlah anggaran pada Bappeda Kota Semarang di tahun

2021 sebesar Rp 28.656.991.000,- , jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 1.891.644.740,- (6,60 %).

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 9 penelitian reguler yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang, yaitu :

- a. Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Ekonomi;
- b. Kajian pengembangan investasi di Kota Semarang;
- c. Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang;
- d. Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Kajian Kecamatan Dalam Pelayanan E-Government;
- f. Kajian Capaian Pembelajaran Praktik di SMK Pada Era Pandemi Covid-19;
- g. Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan;
- h. Kajian Potensi Mata Air dan Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Kota Semarang;
- i. Kerjasama Penelitian Pembangunan Kota (Kajian Pendekatan Eco-Socio Sistem dalam Pengelolaan Banjir di Kota Semarang).

Selain kajian penelitian Bappeda yang dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi, pada tahun 2021 juga dilaksanakan beberapa kajian tambahan sebagai berikut :

- a. Dokumen Roadmap SIDA Kota Semarang;
- b. Penyusunan Studi Integrasi Angkutan Barang Kota Semarang;
- c. Penyusunan Rencana Induk Satu Data Kota Semarang;
- d. Kajian Land Value Capture Kota Semarang;
- e. Kajian Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sampah Kota Semarang.

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dicapai Bappeda Kota Semarang, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	100,00 %	100,00 %	95,96 %	96,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SiDa)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (SiDa)	-	-	100,00 %	100,00 %	95,31 %	97,00 %	100,00 %	100,00 %
5	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	-	-	29,41 %	35,29 %	21,57 %	25,49 %	29,41 %	35,29 %
6	Indeks Inovasi Daerah	-	-	62	64	N/A	57,49	60	61

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,38	0,35	-	-	0,29	0,46	0,46**	0,35	0,35	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,33	6,50	5,5-6,0	5,6-6,1	6,55	6,52*	6,86	-1,61	5,16	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Laju Inflasi	%	2,8±1	2,7±1	2,6±1	2,5±1	3,64	2,76	3,09	1,49	1,49*	-
4	Indeks Gini	Poin	0,3332	0,33301	-	-	0,33*	0,33*	0,33*	0,33*	0,33*	-
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,34	31,41	28,70	28,77	31,80	31,80	30,74	28,56	28,12	-
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,50	27,54	28,68	28,70	27,55	26,74	27,44	28,64	28,65	-
Fokus Kesejahteraan Sosial												
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	82,80	83,23	83,20-83,60	83,60-84,00	82,01	82,72	83,19	83,05	83,55	-
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.087,94	15.468,62	15.600	15.800	14.334	14.895	15.550	15.243	15.425	-
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,25	77,26	-	-	77,21	77,23	77,25	77,34	77,51	-
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,88	10,96	-	-	10,50	10,51	10,52	10,53	10,78	-
	d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,00	15,07	-	-	15,20	15,50	15,51	15,52	15,53	-
8	Angka Kemiskinan	%	4,60	4,53	4,24-4,34	4,04-4,24	4,62	4,14	3,98	4,34	4,56	-
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,77	4,57	8,7-9,0	8,3-8,6	6,61	5,29	4,54	9,57	9,54	-
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,08	70,30	-	-	69,87	65,56	66,42	69,89	69,41	-
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	85	87	-	-	83,25	86,37	83,81	86,68	87,35	-
12	Opini BPK	Opini/Predikat	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
13	Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	99,98	-	-	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	-
ASPEK DAYA SAING												
Kemampuan Ekonomi Daerah												
1	PDRB per kapita berlaku	Ribu Rp	119.477,32	129.805,87	103,16	103,54	91.194,92	98.213,96*	105.587,44**	119.477,32	123.982,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					CATATAN ANALISIS
			2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Nilai Ekspor	US\$	1.461.712.992	1.522.987.000	-	-	1.826.171.393	1.163.718.499,18	1.101.478.622,00	3.084.439.326,82	1.117.549.543,14	-
Penataan Wilayah												
	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	86,36	91,77	-	-	74,83	78,32	88,2	99,57	89,32	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Live Streaming Musrenbang Tingkat Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang. Siaran langsung Musrenbang juga bisa disaksikan melalui videotron Pemerintah Kota Semarang.

b. Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (dedicated) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.

c. Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

d. Pangripta

Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

e. Jurnal Riptek Online

Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

f. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)

Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan dengan kedetailan data tingkat keluarahan di seluruh Kota Semarang.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2021 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator “persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah”, “cakupan pelayanan administrasi perkantoran”, serta “cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur”.
- b. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, diantaranya Laju Pertumbuhan Ekonomi; Kontribusi Kategori-kategori yang terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB; Pengeluaran per Kapita disesuaikan, PDRB per Kapita Berlaku; Nilai Ekspor; Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang); Tingkat Partisipasi Masyarakat; Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks Reformasi Birokrasi; Hasil Evaluasi

SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban; Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Jumlah Titik / Ruas Rawan Macet; Persentase Lingkungan Permukiman Sehat; Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara); serta Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Secara umum anggaran disusun dengan asumsi pandemi akan berakhir. Namun pada kenyataannya, pandemi masih terus berlangsung. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti :
 - a. Pengaruh pandemi terhadap seluruh aspek kehidupan berpengaruh pada ketidaktercapaian beberapa indikator makro di Kota Semarang;
 - b. Pandemi mengakibatkan terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah Kota Semarang, sehingga dilakukan refocussing anggaran yang menyebabkan terdapat beberapa sub kegiatan atau output yang tidak dapat terlaksana. Hal ini juga mengakibatkan beberapa capaian indikator kinerja tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan;
 - c. Perlu penyesuaian terhadap waktu pelaksanaan kegiatan, yang mengikuti pemberlakuan PPKM. Juga penyesuaian pelaksanaan kegiatan tatap muka menjadi sistem hybrid (gabungan antara kehadiran secara langsung / offline dan online), atau bahkan secara online, dimana hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu dimaksimalkannya ketersediaan serta updating data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini peran Bappeda dalam penyelenggaraan Forum Satu Data terkendala masih belum adanya petunjuk yang jelas dari Koordinator Pusat (Bappenas). Selain itu juga terdapat permasalahan yang terjadi saat proses pengumpulan data dari perangkat daerah, baik dalam hal kelengkapan maupun validitas data.
3. Terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan di Kota Semarang, diantaranya adalah :
 - a. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan

perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan maupun terhadap beberapa nomenklatur sub kegiatan. Hal ini berpengaruh dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, serta perlu diikuti dengan Reviu terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- b. Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mencantumkan perubahan komponen AKIP yang dievaluasi menjadi hanya 4 komponen. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja perangkat daerah, baik pada sasarannya maupun dalam hal target kinerjanya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2023 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 3) Perencanaan dan penganggaran dengan “*e-performance based budgeting*”.
Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “*e-performance based budgeting*” sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 4) Penanganan Pandemi Covid-19 beserta Dampaknya
Saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung, baik di Kota Semarang maupun berbagai daerah lainnya. Sebagai *leading sector* perencanaan di Kota Semarang, Bappeda harus mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mengatasi pandemi yang masih berlangsung, serta dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
- 5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
Selain permasalahan terkait pandemi Covid-19, sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas.

Sebagaimana diketahui bersama, pada masa pandemi saat ini terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran yang mengalami penurunan atau tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Pandemi juga menyebabkan beberapa rencana program dan atau kegiatan prioritas tidak dapat terlaksana akibat adanya *refocusing* anggaran.

Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- b. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk tahun 2023, secara umum Bappeda Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

- 1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
- 2) Magang Tematik;

- 3) Kampung Tematik Produktif;
- 4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah;
- 5) Unit Kerja Promosi Kota;
- 6) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);
- 7) Kawasan Wisata Minapolitan;
- 8) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
- 9) Gerakan Bersama Forum CSR;
- 10) Kota Ramah HAM;
- 11) Musrenbang perempuan;
- 12) Semarang Kota Inklusif;
- 13) Rooftop solar panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
- 14) Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage);
- 15) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 16) Revitalisasi Semarang Lama;
- 17) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
- 18) Pembangunan Tram;
- 19) Transportasi Massal Terintegrasi;
- 20) Pengelolaan Manajemen Risiko 2022-2026.

Selain itu, pada tahun 2023 juga terdapat beberapa program prioritas yang dilaksanakan Bappeda secara langsung, yaitu :

1. Pembahasan Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT 2023;
2. Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD (tahap persiapan);
3. Review Masterplan Transportasi (telah dilaksanakan pada tahun 2022).

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Berdasarkan hasil evaluasi, sampai dengan tahun 2021, nilai AKIP Kota Semarang belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Internal. Dan dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda perlu memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan.

Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :

1. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
2. Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Inovasi Daerah.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang, serta berbagai dokumen kebijakan lainnya.

- f. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 disampaikan bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Semarang perlu memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan pilkada sesuai dengan kewenangan Bappeda.
- g. Hampir Berakhirnya Periode RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025
RPJPD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Dan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak, RPJPD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program bagi para calon kepala daerah.
- h. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi
Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.
- i. Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampaknya
Saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung, baik di Kota Semarang maupun berbagai daerah lainnya. Sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda harus mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mengatasi pandemi yang masih berlangsung, meminimalisir dampak yang ditimbulkan, serta pemulihan paska pandemi, dengan tetap memperhatikan pencapaian visi dan misi ataupun program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang.
- j. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda
Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				27.003.436.010	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				27.003.436.010	
	URUSAN PERENCANAAN				24.955.986.010	URUSAN PERENCANAAN				24.955.986.010	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.844.128.510	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.844.128.510	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100 %	14.991.560			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100 %	14.991.560	
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	14.991.560	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	14.991.560	
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	2 Dokumen	537.480	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	537.480	-
			Jumlah Dokumen RTP Bappeda	1 Dokumen							
x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	3.014.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	-
x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	3.534.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	-
x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	3.014.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.014.400	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	3.534.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	-
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1.356.480	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.356.480	-
			Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	1 Dokumen							
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	12.465.738.490			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	12.465.738.490	
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.465.738.490	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.465.738.490	
			Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %				Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %		
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen		
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	12.101.850.010	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	12.101.850.010	-
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	363.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	363.000.000	-
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	296.160	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	296.160	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	1 Dokumen	296.160	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	296.160	-
x.xx.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	296.160	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	296.160	-
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	92.990.680			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	92.990.680	
x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	92.990.680	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	92.990.680	
x.xx.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi	6 Kegiatan	92.990.680	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	74 Orang	92.990.680	-
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %	2.270.407.780			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %	2.270.407.780	
x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.473.365.488	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.473.365.488	
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	150.194.597	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	150.194.597	-
x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Jenis	51.180.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	51.180.000	-
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	67.456.039	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	67.456.039	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	47.113.098	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	47.113.098	-
x.xx.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Tamu yang Berkunjung	6000 Orang	63.900.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	63.900.000	-
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210 Kegiatan	489.420.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	489.420.000	-
x.xx.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	8 Jenis	604.101.754	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	604.101.754	-
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	154.920.692	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	154.920.692	
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100 %	10.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	10.440.000	-
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	100 %	144.480.692	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	144.480.692	-
x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	642.121.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	642.121.600	
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.313.180	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	368.502.820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 Unit	368.502.820	-
x.xx.01. 2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	233.305.600	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	233.305.600	-
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.317.020.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.317.020.000	
			Persentase capaian kinerja perencanaan tataran kota	100 %	2.317.020.000			Persentase capaian kinerja perencanaan tataran kota	100 %	2.317.020.000	
5.01.02. 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	1.726.030.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	1.726.030.000	
5.01.02. 2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	133.300.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	133.300.000	-
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan							
5.01.02. 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	94.250.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	94.250.000	-
5.01.02. 2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	317.450.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	317.450.000	-
5.01.02. 2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	132.180.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	132.180.000	-
			Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	1.048.850.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.048.850.000	-
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen								
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	1 Dokumen								
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	181.950.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	181.950.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1 Dokumen	88.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	88.000.000	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	93.950.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profi Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	93.950.000	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	409.040.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	409.040.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	147.200.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	147.200.000	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	261.840.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	261.840.000	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4 Dokumen								

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				7.794.837.500	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah				7.794.837.500	
			Persentase Capaian Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.044.350.000			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.044.350.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.044.350.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.044.350.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	383.460.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	383.460.000	-
			Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi							
			Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen							
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	40.910.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	40.910.000	-
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	846.580.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	846.580.000	-
			Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1 Kegiatan							
			Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen							
			Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	1 Dokumen							
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah LP2KD	1 Dokumen	773.400.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	773.400.000	-
			Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Dokumen							
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	1.880.800.000			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	1.880.800.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	1.880.800.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	1.880.800.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1.121.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	1.121.000.000	-
			Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Berbasis Potensi Lokal	1 Dokumen							
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	302.300.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	302.300.000	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	279.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	279.500.000	-
			Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	178.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	178.000.000	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen							
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	3.869.687.500			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	3.869.687.500	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	3.869.687.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	3.869.687.500	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	2.180.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	2.180.000.000	-
			Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen RAD AMPL	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen RISPK	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen							
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	585.187.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	585.187.500	-
			Jumlah Dokumen Fasilitas Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi SPALDT	1 Dokumen							
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	594.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	594.500.000	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama	1 Dokumen							
5.01.03. 2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	510.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	510.000.000	-
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen							
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.047.450.000	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.047.450.000	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100 %	2.047.450.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100 %	2.047.450.000	
5.05.02. 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	93.500.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	93.500.000	
5.05.02. 2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	93.500.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	93.500.000	-
5.05.02. 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	471.400.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	471.400.000	
5.05.02. 2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	471.400.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	6 Dokumen	471.400.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	840.800.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	840.800.000	
5.05.02.2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian & Perdagangan	6 Dokumen	420.400.000	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	6 Dokumen	420.400.000	-
5.05.02.2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen	420.400.000	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 Dokumen	420.400.000	-
			Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen							
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	641.750.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	641.750.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	255.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	255.000.000	-
			Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	1 Dokumen							
			Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	1 Kegiatan							
			Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	1 Kegiatan							
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	1 Dokumen	106.250.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	106.250.000	-
			Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen							

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi	255.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	4 Laporan	255.000.000	-
			Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	1 Dokumen							
			Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2 Kegiatan							
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen							
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	25.500.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25.500.000	-

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, telah terjaring aspirasi berupa usulan kegiatan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Bappeda Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membentuk Kampung Tematik Difabel	Kecamatan Candisari	Pembangunan Kampung Tematik	1 Kegiatan	Kampung Tematik Difabel di Kecamatan Candisari agar diusulkan pada awal tahun 2023 melalui mekanisme perencanaan kampung tematik
2	Membentuk Kampung Pancasila	Kecamatan Gayamsari	Pembangunan Kampung Pancasila	1 Kegiatan	Pembentukan Kampung Pancasila akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan instansi terkait, dan memperhatikan tujuan, output dan indikatornya

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Selain aspirasi melalui Musrenbang, juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021, cukup mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, beragama dan kemasyarakatan di Kota Semarang. Seperti adanya larangan mudik, lesunya kegiatan ekonomi dan usaha, pembatasan kegiatan berkumpul warga, dan berbagai hal lainnya. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya program dan kegiatan pemulihan ekonomi yang jelas dan signifikan, dalam rangka pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Semarang. Diantaranya adalah program-program stimulan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi agar dapat kembali melanjutkan usahanya.
2. Pemerintah Kota Semarang diharap lebih memberikan perhatian untuk masalah yang timbul di daerah-daerah pinggiran, yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial budaya dan sebagainya, sebagai penopang aktivitas di tengah kota. Perhatian tersebut hendaknya dilakukan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan penyediaan sistem keamanan, pembuangan sampah, air bersih, infrastruktur, penerangan jalan, dan transportasi umum.
3. Pemerintah Kota Semarang agar memaksimalkan kegiatan kampung tematik karena sudah mendapatkan support anggaran dari pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
4. Pemerintah Kota Semarang agar merealisasikan pembangunan fasilitas umum dalam bentuk infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase yang telah diusulkan oleh masyarakat dalam Musrenbang. Selain itu juga terdapat usulan dimana LPMK agar diberikan fasilitas yang sama seperti FKK dan kelurahan.
5. Perlunya penyediaan ruang publik yang dapat mendorong kreativitas serta memfasilitasi perwujudan ide-ide kreatif, antara lain dalam bentuk kegiatan, media, audio, visual, grafis maupun koreografi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

MP 2 Pengelolaan Terpadu UMKM

MP 3 Food Estate

MP 4 Destinasi Wisata Prioritas

MP 5 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay

MP 2 Pembangunan Ibu Kota Nusantara

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

MP 2 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

MP 3 Reformasi Pendidikan Keterampilan

MP 4 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

MP 2 Transformasi Digital

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30 - 5,90 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30 - 6,00 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 - 8,50 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,375 - 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29 – 73,35;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %;
- g. Nilai Tukar Petani 103 – 105;
- h. Nilai Tukar Nelayan 106 – 107.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun kelima sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Terkait hal tersebut, pembangunan tahun 2023 diarahkan pada “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**”, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

P2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);

- P3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- P4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60 %;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 - 9,29%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 %.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Untuk tahun 2023, merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan yaitu “ Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, yaitu :

- Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial;
- Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
- Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
- Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
- Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

P3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan

- 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

P4 Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel

- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
- 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif,

dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10 %;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24 %;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60 %.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”**

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”**.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel**
Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)”**.
- 2. Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**
Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”**.
- 3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda**
Dengan indikator sasaran yaitu **“Nilai AKIP Bappeda”**.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023, mengacu pada target yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra Bappeda Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	%	92,20
	<i>SASARAN 1</i> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	%	74,00
	<i>SASARAN 2</i> Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100,00
	<i>SASARAN 3</i> Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	%	89,70

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dimana RKPD Tahun 2023 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 periode keempat;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, baik dalam fungsi koordinatif, maupun pelaksanaan oleh Bappeda secara langsung, yaitu :
 - (1) Pembahasan Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT;
 - (2) Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD (tahap persiapan);
4. Melaksanakan program / kegiatan dedicated Pemerintah Kota Semarang, yaitu :
 - (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu untuk Pembahasan Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT;
 - (2) Kajian perencanaan Pengembangan Balkondes Wisata Alam (Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Berbasis Potensi Lokal).
5. Merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19;
6. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;

7. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
8. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
9. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 53 sub kegiatan, yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang, dan 29 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.003.436.010,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	1.500.000
x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	2.000.000
x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	1.500.000
x.xx.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	2.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.356.480	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Laporan	500.000
		Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Dokumen								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	1 Dokumen								
x.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	12.465.738.490				100 %	14.714.924.616
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.465.738.490					14.714.924.616
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %	12.464.850.010				100 %	14.714.024.616
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74.00 Orang/Bulan	12.101.850.010	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	74.00 Orang /Bulan	14.339.024.616

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	363.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	375.000.000
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	888.480				3 Dokumen	900.000
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	296.160	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	500.000
x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	296.160	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	296.160	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	200.000
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	92.990.680				100 %	20.000.000
x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	92.990.680				3 Kegiatan	20.000.000
x.xx.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	6 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.00 Orang	92.990.680	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	74.00 Orang	20.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %	2.270.407.780				100 %	1.378.950.418
x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.473.365.488				100 %	831.450.418
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.194.597	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Paket	15.000.000
x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	51.180.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	12 Paket	40.000.000
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	67.456.039	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	20 Paket	50.000.000
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	47.113.098	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	7 Paket	33.450.418

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	6000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	63.900.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	120.000.000
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	489.420.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	500.000.000
x.xx.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	8 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	604.101.754	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	73.000.000
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	154.920.692				100 %	107.500.000
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	10.440.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	7.500.000
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	144.480.692	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	642.121.600				100 %	440.000.000
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	40.000.000
x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	368.502.820	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	29 Unit	400.000.000
x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	233.305.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					2.317.020.000					1.830.000.000
		Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100 %	Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100 %	2.317.020.000				100 %	1.830.000.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	1.726.030.000				100 %	1.215.000.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	133.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Berita Acara	60.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan								
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	94.250.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Berita Acara	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	317.450.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Berita Acara	75.000.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800.00 Usulan	132.180.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Responsif gender	800.00 Usulan	100.000.000
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	1 Dokumen								
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.048.850.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	930.000.000
		Jumlah Dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen								
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	1 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	181.950.000				100 %	195.000.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	88.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	180.000.000
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	93.950.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Buku	15.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	409.040.000				100 %	420.000.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	147.200.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	120.000.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	261.840.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Laporan	300.000.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					7.794.837.500					6.113.149.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2.044.350.000				100 %	1.835.000.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %			2.044.350.000				100 %	1.835.000.000
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	383.460.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	100.000.000
		Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen								
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	40.910.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	160.000.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	846.580.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Responsif gender	7 Dokumen	850.000.000
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen								
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	1 Dokumen								
		Jumlah Perencanaan Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1 Kegiatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	773.400.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	Responsif gender	1 Laporan	725.000.000
		Jumlah LP2KD	1 Dokumen								
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen								
		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Dokumen								
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %			1.880.800.000				100 %	1.628.149.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 %			1.880.800.000				100 %	1.628.149.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	1.121.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	6 Dokumen	600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Berbasis Potensi Lokal	1 Dokumen								
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	302.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	500.000.000
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	279.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	500.000.000
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	3.869.687.500				100 %	2.650.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	3.869.687.500				100 %	2.650.000.000
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	9 Dokumen	2.180.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Dokumen	750.000.000
Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT		1 Dokumen									
Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)		1 Dokumen									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen RAD AMPL	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen RISPK	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen								
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	585.187.500	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	800.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	510.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	650.000.000
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen								
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100 %	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100 %	2.047.450.000				100 %	1.360.000.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	93.500.00				100 %	110.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Plaksanan & Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahn Umum	1 Laporan	93.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	110.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial & Kependudukan	100 %	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	471.400.000				100 %	170.000.000
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6 Dokumen	471.400.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	170.000.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100 %	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100 %	840.800.000				100 %	550.000.000
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	420.400.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen	220.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 Dokumen	420.400.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Dokumen	330.000.000
		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen								
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	641.750.000				100 %	530.000.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	255.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	170.000.000
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	1 Dokumen								
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	1 Kegiatan								
		Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	1 Kegiatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	106.250.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	2 Laporan	120.000.000
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen								
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	255.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Laporan	200.000.000
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	1 Dokumen								
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2 Kegiatan								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen								
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Laporan	40.000.000

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, Bappeda Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Live Streaming Musrenbang Tingkat Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang. Siaran langsung Musrenbang juga dapat disaksikan melalui videotron Pemerintah Kota Semarang.

2. Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Dialokasikan anggaran (dedicated) untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, sebagai bentuk realisasi dari proses partisipatif hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

3. Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. Pangripta

Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

5. Jurnal Riptek Online

Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

6. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat - Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)

Merupakan sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan, dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.

7. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)

Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

BAB V

P E N U T U P

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian , terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

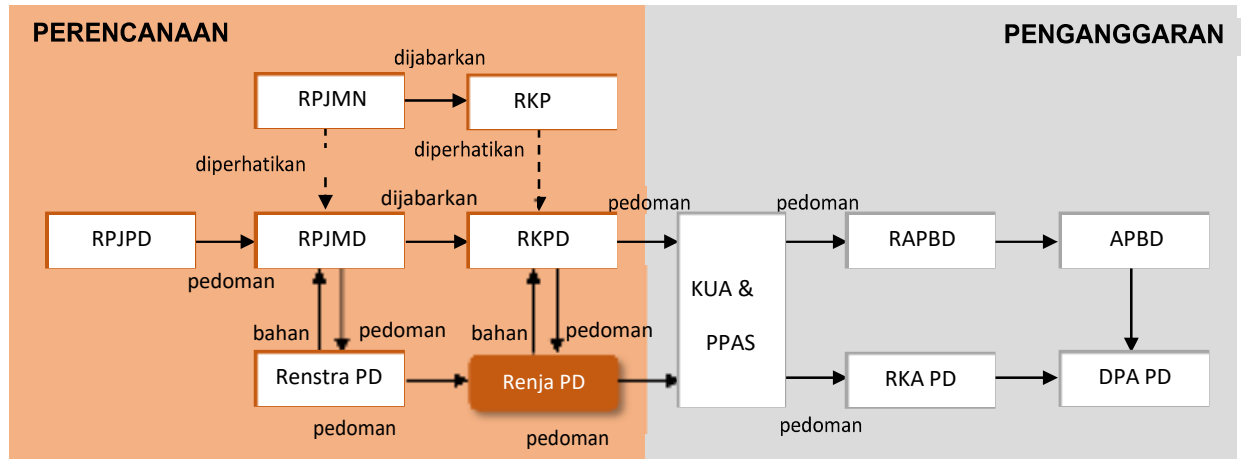
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen

perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melaksanakan sebanyak 3 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 217.149.374.540,00 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 177.361.909.889,00 atau sebesar 81,68 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- a) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KEUANGAN										
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD - Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD - Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD 	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,50 %	97,50	100,00 %	99,20 %	99,20
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	100,00 %	9 Dok	9 Dok	100,00	8 Dok	8 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra ,Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 Dok	1 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00	4 Dok	4 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	

			Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	12 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	12 kgtn	12 kgtn	100,00
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	12 kgtn	12 kgtn	100,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,50 %	94,50	100,00 %	98,17 %	98,17
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	8 Jenis	8 Jenis	100,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	8 Jenis	8 Jenis	100,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	14 jenis	14 jenis	100,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	30 jenis	30 jenis	100,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	8 jenis	8 jenis	100,00

X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25	-	100,00 %	95,00 %	95,00	25	25	100,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang berkunjung	5.500 orang	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	5.000 orang	4.900 orang	89,09
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kgtn	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00	1.693 kgtn	1.580 kgtn	93,33
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00	11 jenis	10 jenis	90,91
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	54,00 %	54,00	100,00 %	84,67 %	84,67
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas jabatan	1,00 unit	-	100,00 %	80,00 %	80,00	1,00 unit	1,00 unit	100,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	100,00 %	-	-	-	58 unit	58 unit	100,00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	100,00 %	100,00 %	0	0	250 unit	250 unit	100,00 %
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	-	100,00 %	100,00 %	100,00	20 unit	20 unit	100,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	100,00 %	100,00 %	0	0	1 gedung	1 gedung	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 unit	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	10 unit	10 unit	100,00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22 %	100,00 %	1,62 %	1,6 %	98,76	1,42 %	1,41 %	115
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,67 %	96,67	100,00 %	98,89 %	98,89
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dok	-	100,00 %	100,00 %	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
		- Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
		- Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00	3 Dok	3 Dok	100,00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	70,00 %	70,00	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kgtn	-	100,00 %	100,00 %	100,00	1 kgtn	1 kgtn	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase Penyerapan Anggaran	100,00 %	-	100,00 %	89,14 %	89,14	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Koordinasi	22 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	22 kgtn	21 kgtn	95,00 %
		- Laporan Harian Kasda	6.300 lmbr	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	6.300 lmbr	6.089 lmbr	96,00 %
		- Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bln	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	12 bln	12 bln	100,00 %
		- Laporan Pendapatan Transfer	52 Dok	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	52 Dok	50 Dok	96,00 %
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Jumlah Bendel SPD	2 Dok	100,00 %	100,00 %	93,00 %	93,00	2 Dok	2 Dok	100,00
		- Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	93,00	100,00 %	98,00 %	98,00
		- Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	93,00	100,00 %	98,00 %	98,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
		- Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang	100,00 %	-	100,00 %	98,00 %	98,00	100,00 %	99,00 %	99,00
		- Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 Dok	-	100,00 %	98,00 %	98,00	2 Dok	2 Dok	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 Dok	-	100,00 %	98,00 %	98,00	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	- Jumlah SP2D di diselesaikan	17.222 Dok	100,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00	17.222 Dok	16.935 Dok	98,00
		- Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	2 Dok	-	100,00 %	95,00 %	95,00	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	12 kgtn	-	100,00 %	83,00 %	83,00	12 kgtn	11 kgtn	92,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,00 %	85,00	100,00 %	95,00 %	95,00
		- Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 Dok	100,00 %	100,00 %	85,00 %	85,00	1.456 Dok	1384 Dok	95,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kgtn	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00	6 kgtn	6 kgtn	100,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00 %	-	100,00 %	95,00 %	95,00	100,00 %	98,00 %	98,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	100,00 %	97,00 %	97,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 Dok	-	100,00 %	90,00 %	90,00	12 Dok	12 Dok	100,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Persentase laporan keuangan SKPD, BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	100,00 %	97,00 %	97,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Jumlah data yang dikelola	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 Dok	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Dok	-	100,00 %	90,00 %	90,00	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 Dok	-	100,00 %	100,00 %	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 Kgtn	-	-	-	-	2 Kgtn	2 Kgtn	100,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00 %	100,00 %	1 Tahun	1 Tahun	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Legalitas Aset	80,48 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	70,72 %	70,72 %	100,00
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Managemen Aset	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,89 %	93,89	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	- Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100,00
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	100,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 Dok	-	100,00 %	95,00 %	95,00	3 Dok	3 Dok	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Persentase penatausahaan aset daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00	100,00 %	98,00 %	98,00
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00	100,00 %	98,00 %	98,00
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah aset yang telah bersertifikat	20.615 sertifikat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	18.115 sertifikat	18.115 sertifikat	87,87
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	- Persentase BMD yang dinilai	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00	100,00 %	94,00 %	94,00
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00	10 kgtn	10 kgtn	100,00
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	100,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00	102 orang	102 orang	100,00

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang
 - 1) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 3 Program dan 6 Indikator Kinerja Program, serta 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan.
 - 2) Dari 3 Indikator kinerja program, 1 Indikator yang memenuhi target, dan 2 Indikator yang tidak memenuhi target.
 - 3) Dari 12 Indikator kinerja kegiatan, 5 indikator kinerja kegiatan memenuhi target, 7 indikator kinerja kegiatan tidak memenuhi target, karena beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran direcofusing.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 3 Program dengan 3 indikator program dan 12 kegiatan dengan 12 indikator;
 - b) Dari 3 indikator kinerja program, terdapat 2 Indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target, dan 1 Indikator yang tidak memenuhi target Renstra;
 - c) Dari 12 indikator kinerja kegiatan, 8 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, dan 4 Indikator tidak dapat memenuhi Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BPKAD Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN KEUANGAN	217.149.374.540	177.361.909.889	81,68	39.787.464.651
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	156.544.378.617	140.872.014.022	89,99	15.672.364.595
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.256.372	68.029.178	77,08	20.227.194
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.807.258	42.981.928	81,39	9.825.330
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.690.268	3.854.250	67,73	1.836.018
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.018.925	4.442.000	73,80	1.576.925
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.107.125	5.643.500	79,41	1.463.625
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.863.505	3.576.500	61,00	2.287.005
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.769.291	7.531.000	69,93	3.238.291
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.768.283.366	62.851.969.004	91,40	5.916.314.362
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.328.101.886	62.453.631.304	91,40	5.874.470.582
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.663.750	391.630.000	90,94	39.033.750
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.205.480	1.295.000	58,72	910.480
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.892.970	3.328.500	68,03	1.564.470
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.419.280	2.084.200	86,15	335.080
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	577.266.400	188.830.400	32,71	388.436.000
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	577.266.400	188.830.400	32,71	388.436.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.996.535.235	1.269.105.251	63,57	727.429.984
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.109.450	17.245.000	61,35	10.864.450
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.804.833	143.200.000	65,15	76.604.833
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.537.971	22.924.500	83,25	4.613.471
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.515.444	36.169.725	73,05	13.345.719
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.546.850	17.769.500	90,91	1.777.350

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.206.473	3.149.499	60,49	2.056.974
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.920.000	63.285.792	62,71	37.634.208
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	817.682.000	341.844.815	41,81	475.837.185
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.272.800	10.788.000	95,70	484.800
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	716.939.414	612.728.420	85,46	104.210.994
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.125.000	26.100.000	70,30	11.025.000
1	Pengadaan Mebel	37.125.000	26.100.000	70,30	11.025.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.477.834.874	76.206.978.081	90,21	8.270.856.793
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	307.500	30,75	692.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.143.294.874	75.873.618.369	90,17	8.269.676.505
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.540.000	333.052.212	99,85	487.788
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.077.370	261.002.108	43,57	338.075.262
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.580.000	213.115.108	45,29	257.464.892
2	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	0
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	39.336.000	10.750.000	27,33	28.586.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.161.370	37.137.000	41,65	52.024.370
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	55.225.679.839	32.085.467.616	58,10	23.140.212.223
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.992.267.153	2.268.148.893	75,80	724.118.260
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	106.102.550	99.130.000	93,43	6.972.550
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	107.653.990	90.916.375	84,45	16.737.615
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	180.150	150.000	83,26	30.150
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	180.150	150.000	83,26	30.150
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	438.157.598	346.264.600	79,03	91.892.998
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	434.421.416	296.159.300	68,17	138.262.116

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	364.912.095	284.443.138	77,95	80.468.957
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.538.859.204	1.149.135.480	74,67	389.723.724
9	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.800.000	1.800.000	100	0
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.032.092.195	804.923.757	77,99	227.168.438
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	175.781.548	149.453.087	85,02	26.328.461
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78.054.158	63.450.485	81,29	14.603.673
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48.701.260	42.985.500	88,26	5.715.760
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	154.136.060	136.100.000	88,30	18.036.060
5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	248.284.000	197.165.000	79,41	51.119.000
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	122.457.896	89.201.685	72,84	33.256.211
7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	204.677.273	126.568.000	61,84	78.109.273
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	904.254.554	623.494.702	68,95	280.759.852
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	71.727.201	36.277.300	50,58	35.449.901
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	96.385.903	57.795.950	59,96	38.589.953
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	257.927.687	208.832.452	80,97	49.095.235
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	91.738.371	79.674.500	86,85	12.063.871
5	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7.983.280	6.779.200	84,92	1.204.080

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	56.004.596	45.251.500	80,80	10.753.096
7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	144.578.296	136.706.000	94,55	7.872.296
8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	177.909.220	52.177.800	29,33	125.731.420
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	50.297.065.937	28.388.900.264	56,44	21.908.165.673
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	0
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.297.065.937	28.388.900.264	56,44	21.908.165.673
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.379.316.084	4.404.428.251	81,88	974.887.833
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.379.316.084	4.404.428.251	81,88	974.887.833
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.410.235	13.865.000	89,97	1.545.235
2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	512.914.697	418.468.228	81,59	94.446.469
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	387.114.040	336.032.041	86,80	51.081.999
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.862.140	67.497.000	42,49	91.365.140
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.639.386.036	2.491.807.932	94,41	147.587.104
6	Penilaian Barang Milik Daerah	772.480.467	536.399.500	69,44	236.080.967
7	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	77.964.676	61.682.500	79,12	16.282.176
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	395.313.159	295.408.300	74,73	99.904.859
9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	419.870.634	183.267.750	43,65	236.602.884

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 12 kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 217.149.374.540. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 177.361.909.889 dengan persentase sebesar 81,68% sisa anggaran sebesar Rp 39.787.464.651 persentase dari anggaran perubahan sebesar 18 % dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp. 165.915.266.487, realisasi anggaran Rp. 148.191.876.706 (89,32 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 17.723.389.781 (10,68 %);
- b. **Belanja Modal**, anggaran sebesar Rp. 937.042.116 Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 781.132.919 (83,36 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 155.909.197 (16,64 %);
- c. **Belanja Tidak Terduga**, anggaran sebesar Rp. 50.297.065.937 Dengan realisasi sebesar Rp. 28.388.900.264 (56,44 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 21.908.165.673 (43,56 %).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran :										
1. Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset			65 %	65 %	75 %	95 %	95 %	95 %	100 %

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Hasil Opini BPK”, telah dapat sesuai target, dimana realisasinya Kota Semarang meraih opini WTP.
- b. Sasaran **“Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”** memiliki 2 indikator kinerja, antara lain :
 - 1) Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang, telah sesuai target.
 - 2) Persentase nilai pemanfaatan aset pada tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Renstra yang ditetapkan dengan SK Kepala BPKAD secara tepat waktu	-	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-	-
2	Tersedianya dokumen Renja yang ditetapkan dengan SK Kepala BPKAD secara tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di Keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2021 telah tersedia dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja), setiap tahun disusun 2 dokumen Renja, yaitu dokumen Renja Tahun n+1 dan dokumen Perubahan Renja Tahun n.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan BPKAD di bidang Keuangan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RENSTRA dengan RENJA
serta antara RENJA dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RENSTRA dengan Program RENJA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RENJA dengan Program APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2022

Dari Tabel 2.5 diatas Kesesuaian program RENSTRA dengan RENJA dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 100 %, dan Kesesuaian program RENJA dengan APBD dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 100 %.

Kesesuaian program RENSTRA dan RENJA dapat dilihat pada RPJMD Kota Semarang melalui Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang pada Aspek Urusan Penunjang Keuangan melalui Persentase Silpa terhadap APBD. Pada tahun 2020 kondisi kinerja Persentase Silpa terhadap APBD sebesar 1,82% dan tahun 2021 sebesar 1,62% hal tersebut menggambarkan kinerja pelayanan BPKAD bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2021 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target, diantaranya adalah indikator “Persentase nilai pemanfaatan aset”, berhasil mencapai 95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 65%.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi keuangan diantaranya:

- a. Belum optimalnya integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan daerah;
- b. Belum optimal pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan
 - 1) kebijakan dan sistem penatausahaan keuangan yang selalu berkembang;
 - 2) kapasitas SDM pengelola keuangan yang belum merata;
 - 3) kebijakan penganggaran sering berubah;

- 4) pelaporan keuangan dari perangkat daerah yang belum akurat dan tepat waktu;
- 5) belum efektifnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran;
- 6) pencatatan aset yang belum maksimal;
- 7) belum optimalnya kepedulian perangkat daerah selaku pengguna barang;
- 8) mekanisme dan tahapan administratif penghapusan aset.

b. Peluang

- 1) Adanya sosialisasi dan pembelajaran aplikasi dari Pemerintah Pusat maupun BPKAD mengenai aplikasi keuangan sehingga terdapat kesesuaian realisasi anggaran antara OPD se-Kota Semarang dengan yang ada di BPKAD Kota Semarang;
- 2) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan data keuangan dan pengelolaan aset daerah Kota Semarang;
- 3) Pendataan dan pemanfaatan aset menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi petugas untuk melakukan pendataan aset daerah lebih valid dan terintegrasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis:

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas.

Sebagaimana diketahui bersama, pada masa pandemi saat ini terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran yang mengalami penurunan atau tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Pandemi juga menyebabkan

beberapa rencana program dan atau kegiatan prioritas tidak dapat terlaksana akibat adanya refocusing anggaran.

- b. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin

- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi

- 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
- 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan

pariwisata

- 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				Rp. 167.934.451.827	KEUANGAN				Rp. 167.934.451.827	
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100 %	Rp. 100.298.487.866	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100 %		
		BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100 %			BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100 %		
		BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100 %			BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100 %		
		BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %			BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	Rp. 35.824.480	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	Rp. 35.824.480	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Renstra Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 dok	Rp. 6.486.400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Renstra Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 dok	Rp. 6.486.400	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 dok	Rp. 6.383.510	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 dok	Rp. 6.383.510	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 dok	Rp. 7.619.420	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 dok	Rp. 7.619.420	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 dok	Rp. 4.745.810	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 dok	Rp. 4.745.810	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 dok	Rp. 7.619.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 dok	Rp. 7.619.420	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 dok	Rp. 2.969.920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 dok	Rp. 2.969.920	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	Rp. 12.643.976.046	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi Keuangan BPKAD	100%	Rp. 12.643.976.046	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100%	Rp. 12.189.075.406	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100%	Rp. 12.189.075.406	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	Rp. 454.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	Rp. 454.300.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok	Rp. 300.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 dok	Rp. 300.320	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	Rp. 300.320	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	Rp. 300.320	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	12 kgtn	Rp. 126.213.309	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	12 kgtn	Rp. 126.213.309	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kgtn	Rp. 126.213.309	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kgtn	Rp. 126.213.309	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %	Rp. 1.936.892.444	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %	Rp. 1.936.892.444	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	Rp. 15.418.188	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	Rp. 15.418.188	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	Rp. 102.740.854	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	Rp. 102.740.854	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	Rp. 32.731.556	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	Rp. 32.731.556	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	Rp. 170.248.333	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	Rp. 170.248.333	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	Rp. 6.737.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	Rp. 6.737.600	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	Rp. 5.820.180	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	Rp. 5.820.180	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah tamu yang berkunjung	5.500 orang	Rp. 179.725.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah tamu yang berkunjung	5.500 orang	Rp. 179.725.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kgtn	Rp. 1.000.831.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kgtn	Rp. 1.000.831.000	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00 %	Rp. 5.998.860	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00 %	Rp. 5.998.860	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	Rp. 416.640.873	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	Rp. 416.640.873	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	Rp. 67.044.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	Rp. 67.044.200	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	80 unit	Rp. 67.044.200	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	85 unit	Rp. 67.044.200	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	Rp. 84.800.006.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	Rp. 84.800.006.400	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00 %	Rp. 200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00 %	Rp. 200.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00 %	Rp. 84.139.506.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00 %	Rp. 84.139.506.400	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00 %	Rp. 660.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00 %	Rp. 660.300.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00 %	Rp. 688.530.987	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00 %	Rp. 688.530.987	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1,00 unit	Rp. 35.326.170	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1,00 unit	Rp. 35.326.170	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	Rp. 433.041.441	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	Rp. 433.041.441	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	Rp. 4.035.960	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	Rp. 4.035.960	
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	Rp. 49.480.137	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	Rp. 49.480.137	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah pemeliharaan bangunan Gedung	1 gedung	Rp. 64.871.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah pemeliharaan bangunan Gedung	1 gedung	Rp. 64.871.000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 unit	Rp. 101.776.279	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 unit	Rp. 101.776.279	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22 %	Rp. 63.203.258.455	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22 %	Rp. 63.203.258.455	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00 %	Rp. 3.253.359.150	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00 %	Rp. 3.253.359.150	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dok	Rp. 139.117.766	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dok	Rp. 139.117.766	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dok	Rp. 153.317.950	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dok	Rp. 153.317.950	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	Rp. 74.575.433	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	Rp. 74.575.433	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00 %	Rp. 62.835.410	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00 %	Rp. 62.835.410	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	Rp. 32.112.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	Rp. 32.112.600	
		BPKAD	Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00 %			BPKAD	Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00 %		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	Rp. 14.174.910	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	Rp. 14.174.910	
		BPKAD	Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00 %			BPKAD	Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00 %		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dok	Rp. 570.935.347	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dok	Rp. 570.935.347	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	Rp. 435.153.667	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	Rp. 435.153.667	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 Dok	Rp. 242.919.203	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 Dok	Rp. 242.919.203	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00 %	Rp. 1.125.029.012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00 %	Rp. 1.125.029.012	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00 %	Rp. 130.122.042	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00 %	Rp. 130.122.042	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00 %	Rp. 110.698.860	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00 %	Rp. 110.698.860	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kgtn	Rp. 162.366.950	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kgtn	Rp. 162.366.950	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00 %	Rp. 2.357.850.765	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00 %	Rp. 2.357.850.765	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Koordinasi	22 kgtn	Rp. 550.562.013	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Koordinasi	22 kgtn	Rp. 550.562.013	
		BPKAD	Laporan Harian Kasda	6.300 lmr			BPKAD	Laporan Harian Kasda	6.300 lmr		
		BPKAD	Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bln			BPKAD	Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bln		
		BPKAD	Laporan Pendapatan Transfer	52 Dok			BPKAD	Laporan Pendapatan Transfer	52 Dok		

No	Rancangan RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Bendel SPD	2 Dok	Rp. 215.636.850	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Bendel SPD	2 Dok	Rp. 215.636.850	
		BPKAD	Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00 %			BPKAD	Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00 %		
		BPKAD	Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00 %			BPKAD	Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00 %		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00 %	Rp. 169.669.850	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00 %	Rp. 169.669.850	
		BPKAD	Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00 %			BPKAD	Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00 %		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Kegiatan Asistensi, Koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3 kgtn	Rp. 162.392.310	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Kegiatan Asistensi, Koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3 kgtn	Rp. 162.392.310	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang	100,00 %	Rp. 146.409.500	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang	100,00 %	Rp. 146.409.500	
		BPKAD	Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 Dok			BPKAD	Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 Dok		
		BPKAD	Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 Dok			BPKAD	Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 Dok		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah SP2D di diselesaikan	17.222 Dok	Rp. 137.014.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah SP2D di diselesaikan	17.222 Dok	Rp. 137.014.480	
		BPKAD	Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	2 Dok			BPKAD	Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	2 Dok		
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	12 kgtn	Rp. 312.148.240	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	12 kgtn	Rp. 312.148.240	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00 %	Rp. 147.051.075	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00 %	Rp. 147.051.075	
		BPKAD	Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 Dok			BPKAD	Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 Dok		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kgtm	Rp. 516.966.447	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kgtm	Rp. 516.966.447	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00 %	Rp.2.565.029.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00 %	Rp.2.565.029.200	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00 %	Rp. 51.242.500	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00 %	Rp. 51.242.500	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitaspendapatan,belanja pembiayaan,dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00 %	Rp. 135.215.500	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitaspendapatan,belanja pembiayaan,dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00 %	Rp. 135.215.500	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 Dok	Rp. 370.929.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 Dok	Rp. 370.929.500	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00 %	Rp. 463.096.500	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00 %	Rp. 463.096.500	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 Dok	Rp. 335.491.500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 Dok	Rp. 335.491.500	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00 %	Rp. 28.693.500	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00 %	Rp. 28.693.500	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00 %	Rp. 127.665.500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00 %	Rp. 127.665.500	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah data yang dikelola	1 Dok	Rp. 75.957.200	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah data yang dikelola	1 Dok	Rp. 75.957.200	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 Dok	Rp. 259.189.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 Dok	Rp. 259.189.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Dok	Rp. 341.596.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Dok	Rp. 341.596.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp. 180.771.500	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp. 180.771.500	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 Kgtn	Rp. 195.181.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 Kgtn	Rp. 195.181.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00 %	Rp. 55.027.019.340	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00 %	Rp.55.027.019.340	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	100,00 %	Rp. 27.019.340	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	100,00 %	Rp. 27.019.340	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00 %	Rp. 55.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00 %	Rp. 55.000.000.000	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	80,48 %	Rp. 4.432.705.506	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	80,48 %	Rp. 4.432.705.506	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100,00 %	Rp. 4.432.705.506	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100,00 %	Rp. 4.432.705.506	
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	Rp. 277.830.000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	Rp. 277.830.000	
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	Rp. 128.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	Rp. 128.000.000	
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 Dok	Rp. 168.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 Dok	Rp. 168.000.000	
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penatausahaan aset daerah	100,00 %	Rp. 372.216.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penatausahaan aset daerah	100,00 %	Rp. 372.216.600	
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100,00 %	Rp. 94.520.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100,00 %	Rp. 94.520.000	
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang telah bersertifikat	20.615 sertifikat	Rp. 1.436.344.097	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang telah bersertifikat	20.615 sertifikat	Rp. 1.436.344.097	
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dinilai	100,00 %	Rp. 1.036.612.190	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dinilai	100,00 %	Rp. 1.036.612.190	

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kgtn	Rp. 157.563.608	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kgtn	Rp. 157.563.608	
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100,00 %	Rp. 625.394.011	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100,00 %	Rp. 625.394.011	
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	Rp. 136.225.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	Rp. 136.225.000	

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.5 diatas, Review Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 telah sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, sebagai berikut:

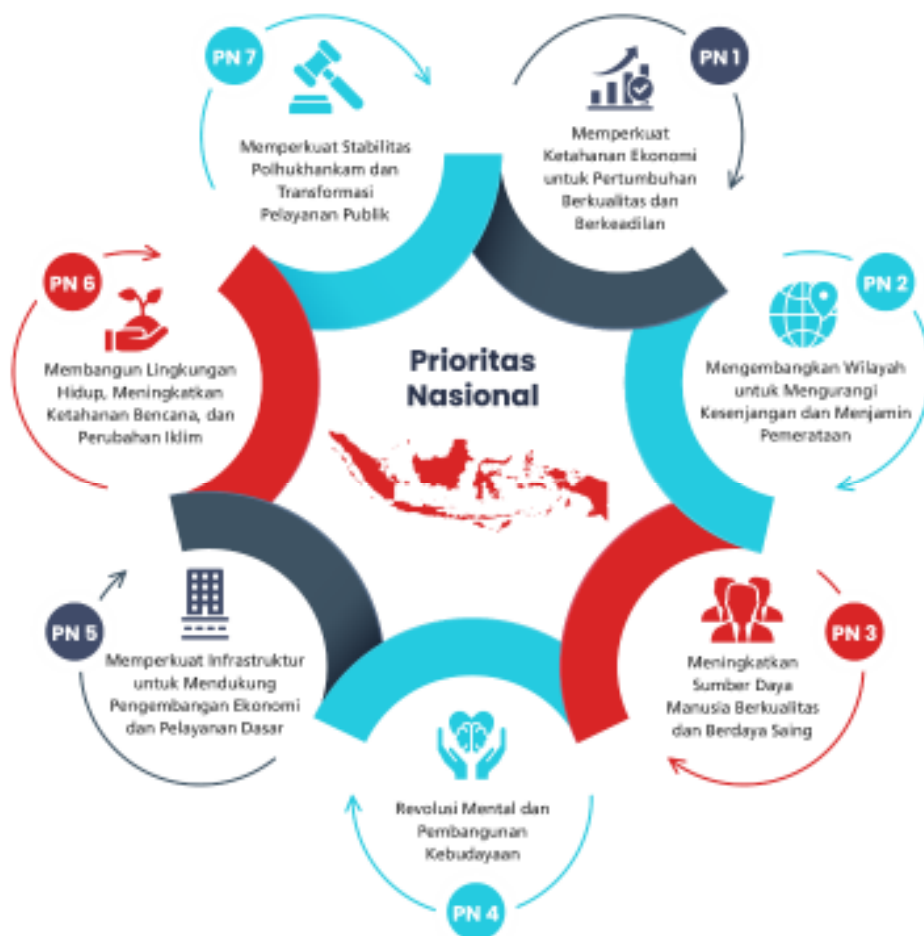
- 1) Tahun 2023, melaksanakan 1 urusan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 167.934.451.827,-
- 2) Dari 1 urusan, melaksanakan 3 Program, 6 Indikator Kinerja Program, dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan, dan 77 sub kegiatan dengan 89 indikator kinerja sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter

PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial

PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar

PP 2 Infrastruktur ekonomi

PP 3 Infrastruktur Perkotaan

PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan

PP 5 Transformasi Digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim

PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

PP 3 Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.

PP 1 Konsolidasi Demokrasi

PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

PP 3 Penegakan Hukum Nasional

PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;

- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah**; dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 7,48-6,48 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,3;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6 – 6,0 %;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 45,35 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,56;
- j. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,15;
- k. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73;
- l. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,25;
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,26.

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Tahun 2021 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,55, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,67, serta PDRB per kapita sebesar 123,98 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,56 %, dan Inflasi sebesar 1,49 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,78, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,54 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 59,60. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan”,

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Hasil Opini BPK”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang dengan indikator sasaran, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan indikator sasaran yaitu, **“Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang”**

- b. Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional.

Dengan indikator sasaran yaitu, **“Persentase nilai pemanfaatan aset”**

- c. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD

Dengan indikator sasaran yaitu, **“SAKIP”**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan	Hasil Opini BPK	opini	WTP
SASARAN :			
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	%	100,00
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	%	75,00
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	SAKIP	skor	81,00

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan:

“Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan”

dan indikator tujuan **“Hasil Opini BPK”**;

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Melalui program Peningkatan kapasitas keuangan daerah difokuskan pada salah satunya Optimalisasi Aset-Aset Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Misi Nomor 5 Kota Semarang yaitu Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program ini diarahkan pada

Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan Peningkatan pelaporan barang milik daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Legalitas Aset.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 2 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 5 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 5 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, 1 kegiatan merupakan kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang kepada Warga Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 167.934.451.827,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 100.298.487.866,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 67.635.963.961,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02	URUSAN KEUANGAN				Rp. 167.934.451.827				Rp. 190.172.965.000
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	Kota Semarang	100 %	Rp. 100.298.487.866	APBD Kota Semarang	-	100 %	Rp. 105.002.662.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	Kota Semarang	100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	8 Dok	Rp. 35.824.480	APBD Kota Semarang	-	8 Dok	Rp. 190.500.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	Kota Semarang	4 dok	Rp. 6.486.400	APBD Kota Semarang	-	4 dok	Rp. 65.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	Kota Semarang	1 dok	Rp. 6.383.510	APBD Kota Semarang	-	1 dok	Rp. 17.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	Kota Semarang	1 dok	Rp. 7.619.420	APBD Kota Semarang	-	1 dok	Rp. 25.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	Kota Semarang	1 dok	Rp. 4.745.810	APBD Kota Semarang	-	1 dok	Rp. 25.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	Kota Semarang	1 dok	Rp. 7.619.420	APBD Kota Semarang	-	1 dok	Rp. 25.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	Kota Semarang	2 dok	Rp. 2.969.920	APBD Kota Semarang	-	2 dok	Rp. 33.500.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	Kota Semarang	100%	Rp. 12.643.976.046	APBD Kota Semarang	-	100%	Rp. 13.992.777.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	Kota Semarang	100%	Rp. 12.189.075.406	APBD Kota Semarang	-	100%	Rp. 13.186.777.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100 %	Rp. 454.300.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	Rp. 800.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 300.320	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 3.000.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 300.320	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 3.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	Kota Semarang	12 kgtn	Rp. 126.213.309	APBD Kota Semarang	-	12 kgtn	Rp. 680.000.000
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	Kota Semarang	12 kgtn	Rp. 126.213.309	APBD Kota Semarang	-	12 kgtn	Rp. 680.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 1.936.892.444	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 3.259.262.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kota Semarang	8 jenis	Rp. 15.418.188	APBD Kota Semarang	-	10 jenis	Rp. 55.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kota Semarang	8 jenis	Rp. 102.740.854	APBD Kota Semarang	-	10 jenis	Rp. 350.000.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	Kota Semarang	14 jenis	Rp. 32.731.556	APBD Kota Semarang	-	14 jenis	Rp. 65.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Kota Semarang	30 jenis	Rp. 170.248.333	APBD Kota Semarang	-	30 jenis	Rp. 90.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	Kota Semarang	8 jenis	Rp. 6.737.600	APBD Kota Semarang	-	8 jenis	Rp. 15.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	25 jumlah	Rp. 5.820.180	APBD Kota Semarang	-	25 jumlah	Rp. 45.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	5.500 orang	Rp. 179.725.000	APBD Kota Semarang	-	6.000 orang	Rp. 220.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	Kota Semarang	1.693 kgtn	Rp. 1.000.831.000	APBD Kota Semarang	-	1.693 kgtn	Rp. 1.600.000.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 5.998.860	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 55.125.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	Kota Semarang	11 jenis	Rp. 416.640.873	APBD Kota Semarang	-	11 jenis	Rp. 764.137.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 67.044.200	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 400.000.000
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	Kota Semarang	80 unit	Rp. 67.044.200	APBD Kota Semarang	-	85 unit	Rp. 400.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 84.800.006.400	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 84.601.000.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 200.000	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 1.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 84.139.506.400	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 84.000.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 660.300.000	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 600.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 688.530.987	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 1.879.123.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	Kota Semarang	1,00 unit	Rp. 35.326.170	APBD Kota Semarang	-	1,00 unit	Rp. 44.123.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	58 unit	Rp. 433.041.441	APBD Kota Semarang	-	58 unit	Rp. 750.000.000
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	Kota Semarang	250 unit	Rp. 4.035.960	APBD Kota Semarang	-	250 unit	Rp. 80.000.000
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	pemeliharaan tanaman-tanaman	Kota Semarang	20 unit	Rp. 49.480.137	APBD Kota Semarang	-	20 unit	Rp. 55.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan Gedung	Kota Semarang	1 gedung	Rp. 64.871.000	APBD Kota Semarang	-	1 gedung	Rp. 600.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	12 unit	Rp. 101.776.279	APBD Kota Semarang	-	15 unit	Rp. 350.000.000
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	Kota Semarang	1,22 %	Rp. 63.203.258.455	APBD Kota Semarang	-	1,02 %	Rp. 77.361.003.000
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 3.253.359.150	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 8.734.003.000
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 139.117.766	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 350.000.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 153.317.950	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 74.575.433	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 350.000.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase RKA perubahan terverifikasi	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 62.835.410	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 375.000.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 32.112.600	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 309.003.000
		Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	Kota Semarang	100,00 %		APBD Kota Semarang	-	100,00 %	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 14.174.910	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 300.000.000
		Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	Kota Semarang	100,00 %		APBD Kota Semarang	-	100,00 %	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	Kota Semarang	2 Dok	Rp. 570.935.347	APBD Kota Semarang	-	2 Dok	Rp. 300.000.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	Kota Semarang	2 Dok	Rp. 435.153.667	APBD Kota Semarang	-	2 Dok	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	Kota Semarang	3 Dok	Rp. 242.919.203	APBD Kota Semarang	-	3 Dok	Rp. 600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 1.125.029.012	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 4.000.000.000
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Anggaran Belanja Daerah	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 130.122.042	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 50.000.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 110.698.860	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 50.000.000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	Kota Semarang	2 kgtn	Rp. 162.366.950	APBD Kota Semarang	-	2 kgtn	Rp. 1.000.000.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 2.357.850.765	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 7.300.000.000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi	Kota Semarang	22 kgtn	Rp. 550.562.013	APBD Kota Semarang	-	22 kgtn	Rp. 700.000.000
		Laporan Harian Kasda	Kota Semarang	6.300 lmbr		APBD Kota Semarang	-	6.300 lmbr	
		Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	Kota Semarang	12 bln		APBD Kota Semarang	-	12 bln	
		Laporan Pendapatan Transfer	Kota Semarang	52 Dok		APBD Kota Semarang	-	52 Dok	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Bendel SPD	Kota Semarang	2 Dok	Rp. 215.636.850	APBD Kota Semarang	-	2 Dok	Rp. 700.000.000
		Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	Kota Semarang	100,00 %		APBD Kota Semarang	-	100,00 %	
		Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	Kota Semarang	100,00 %		APBD Kota Semarang	-	100,00 %	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 169.669.850	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 800.000.000
		Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	Kota Semarang	100,00 %		APBD Kota Semarang	-	100,00 %	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Kegiatan Asistensi, Koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kota Semarang	3 kgtm	Rp. 162.392.310	APBD Kota Semarang	-	3 kgtm	Rp. 0
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 146.409.500	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 900.000.000
		Laporan Progres Transaksi Non Tunai	Kota Semarang	2 Dok		APBD Kota Semarang	-	2 Dok	
		Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	Kota Semarang	1 Dok		APBD Kota Semarang	-	1 Dok	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D di diselesaikan	Kota Semarang	17.222 Dok	Rp. 137.014.480	APBD Kota Semarang	-	17.222 Dok	Rp. 900.000.000
		Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	Kota Semarang	2 Dok		APBD Kota Semarang	-	2 Dok	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	Kota Semarang	12 kgtn	Rp. 312.148.240	APBD Kota Semarang	-	12 kgtn	Rp. 1.000.000.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 147.051.075	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 1.100.000.000
		Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	Kota Semarang	1.456 Dok		APBD Kota Semarang	-	1.456 Dok	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	6 kgtn	Rp. 516.966.447	APBD Kota Semarang	-	6 kgtn	Rp. 1.200.000.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 2.565.029.200	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 8.500.000.000
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 51.242.500	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 600.000.000
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitaspendapatan,belanja pembiayaan,dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 135.215.500	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	Kota Semarang	12 Dok	Rp. 370.929.500	APBD Kota Semarang	-	12 Dok	Rp. 900.000.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 463.096.500	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	Kota Semarang	2 Dok	Rp. 335.491.500	APBD Kota Semarang	-	2 Dok	Rp. 600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 28.693.500	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 127.665.500	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 800.000.000
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah data yang dikelola	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 75.957.200	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 259.189.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 341.596.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 700.000.000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 180.771.500	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 900.000.000
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kota Semarang	2 Kgtn	Rp. 195.181.000	APBD Kota Semarang	-	2 Kgtn	Rp. 500.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 55.027.019.340	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 52.827.000.000
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 27.019.340	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 55.000.000.000	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 52.827.000.000
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	Kota Semarang	80,48 %	Rp. 4.432.705.506	APBD Kota Semarang	-	90,24 %	Rp. 7.809.300.000
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 4.432.705.506	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 7.809.300.000
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	Kota Semarang	1 Dok	Rp. 277.830.000	APBD Kota Semarang	-	1 Dok	Rp. 270.000.000
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	Kota Semarang	2 Dok	Rp. 128.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 Dok	Rp. 135.000.000
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	Kota Semarang	3 Dok	Rp. 168.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 Dok	Rp. 289.300.000
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 372.216.600	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 460.000.000
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD baru yang diinventarisir	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 94.520.000	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 180.000.000
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang telah bersertifikat	Kota Semarang	20.615 sertifikat	Rp. 1.436.344.097	APBD Kota Semarang	-	23.115 sertifikat	Rp. 4.600.000.000
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dinilai	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 1.036.612.190	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 750.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengawasan dan pengendalian	Kota Semarang	10 kgtn	Rp. 157.563.608	APBD Kota Semarang	-	10 kgtn	Rp. 165.000.000
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	Kota Semarang	100,00 %	Rp. 625.394.011	APBD Kota Semarang	-	100,00 %	Rp. 600.000.000
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	Kota Semarang	102 orang	Rp. 136.225.000	APBD Kota Semarang	-	102 orang	Rp. 360.000.000

Dari Data sebagaimana tabel 4.1 diatas, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, sebagai berikut:

- 1) Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023, melaksanakan 1 urusan, 3 Program, 6 Indikator Kinerja Program, dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan, dan 77 sub kegiatan dengan 89 indikator kinerja sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 167.934.451.827,-
- 2) Prakiraan Maju Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang melaksanakan 1 urusan, 3 Program, 6 Indikator Kinerja Program, dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan, dan 75 sub kegiatan dengan 89 indikator kinerja sub kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 190.172.965.000,-
- 3) Pada tahun 2024, terdapat kenaikan target capaian kinerja di beberapa subkegiatan.

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
3. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

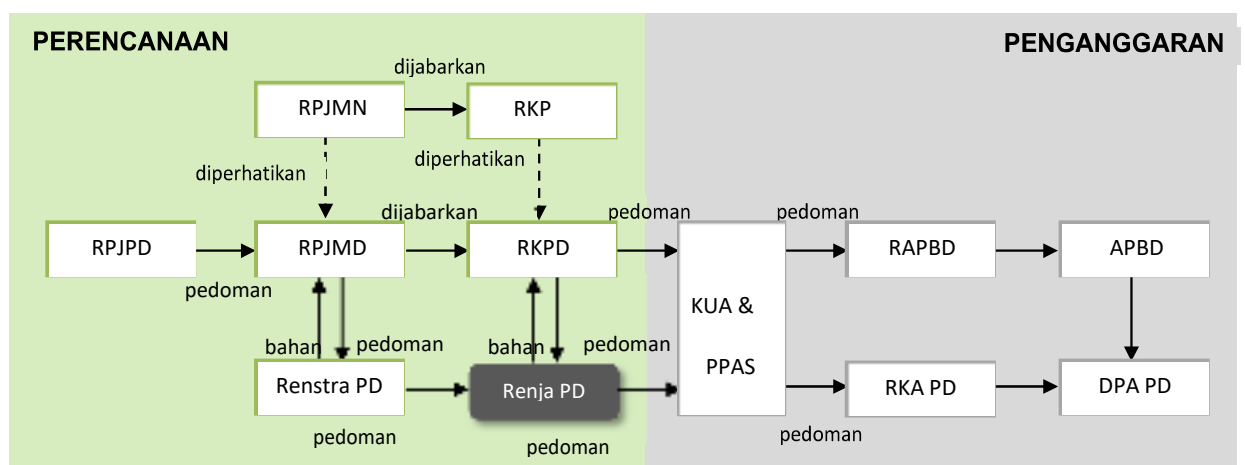
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.



Gambar 1. 1 **Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 120);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG melaksanakan sebanyak 3 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 85.784.152.071. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 73.301.176.059 atau sebesar 85,45%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Tahun Kota Semarang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	0.00	0.00	100.00						
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100.00	67.27	100.00	100.00	100.00	Tercapainya realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100%	0%
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		100.00	67.27	100.00			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	3 Dokumen	3 Dokumen	0

									Dana Transfer Lainnya			
			Dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	104.00 Dokumen	80.69	1.00						
			Jumlah laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi	104.00 Dokumen	97.73	1.00						
			Prosentase koordinasi penggunaan dana transfer	301.00 %	85.33	100.00						
			Prosentase tersajinya data DAU dan DAK yang tepat waktu dan tepat sasaran	400.00 %	276.66	100.00						
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100.00	75.00	100.00	200.00	200.00	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	1 dokumen	1 dokumen	0
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100.00	75.00	100.00			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	0
			Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	4.00 Dokumen	3.00	1.00						
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		0.00	0.00	100.00	65.66	65.66				

			Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	0.00	253.58	47.00			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		100.00	57.49	100.00	92.31	92.31	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		100.00	55.35	100.00			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
			Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	300.00 %	166.06	100.00						
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		100.00	66.67	100.00			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan
			Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya	0.00 %	0.00	100.00						
			Jumlah WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal	0.00 Wajib Pajak	0.00	1,500.00						
			Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah	300.00 %	200.00	100.00						

			Prosentasewajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya	0.00 %	0.00	100.00						
			Rakornis Evaluasi Pendapatan	0.00 %	0.00	100.00						
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			100.00	64.09	100.00			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
			Prosentase tersedianya validasi Data Pajak Daerah	400.00 %	256.34	100.00						
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			100.00	53.11	100.00			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			Data pendapatan pajak daerah yang valid tercapai	300.00 %	83.33	100.00						
			Prosentase tersedianya Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik	300.00 %	187.34	100.00						
			Prosentase pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah yang memadai	300.00 %	183.33	100.00						
			Paket Modul sistem informasi pendapatan daerah terupdate	300.00 %	183.33	100.00						

5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100.00	66.03	100.00			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 Obyek Pajak	86000 Obyek Pajak	86000 Obyek Pajak
		Prosentase penilaian NJOP PBB dan BPHTB	400.00 %	261.54	100.00						
		Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	32,000.00 WP	21,334.00	8,000.00						
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		100.00	71.67	100.00			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	12.00 dokumen	9.00	3.00						
		SPPT PBB tepat waktu yang tersampaikan	400.00 %	286.02	100.00						
		Prosentase tertib administrasi pelaksanaan PBB	400.00 %	274.06	100.00						
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		100.00	64.50	100.00			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan
		Fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak	300.00 %	193.49	100.00						

5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		100.00	64.80	100.00			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
		Prosentase verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	400.00 %	273.96	100.00						
		Target penerimaan PAD tercapai	300.00 %	183.33	100.00						
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah		100.00	62.35	100.00			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Konfirmasi tunggakan PBB DI 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan	400.00 %	226.67	100.00						
		Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi sisir 700 SSPD	400.00 %	224.47	100.00						
		Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih	400.00 %	267.99	100.00						
		Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	400.00 %	278.50	100.00						
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		100.00	52.37	100.00			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Kompensasi dan restitusi PBB dan BPHTB tersampaikan	400.00 %	209.48	100.00						

5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		100.00	63.98	100.00			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
		Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah	400.00 %	266.66	100.00						
		Prosentase peningkatan kepatuhan para wajib pajak	0.00 %	0.00	100.00						
		Prosentase terpungutnya setoran pajak	400.00 %	245.20	100.00						
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		100.00	62.48	100.00			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		Prosentase penerimaan pajak dan peningkatan PAD	300.00 %	183.33	100.00						
		Target penerimaan retribusi daerah tercapai	300.00 %	191.57	100.00						
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		80.00	51.99	100.00	99.48	99.48				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (BAPENDA)	500.00	382.90	100.00			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	100%	100%

			Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan (BAPENDA)	0.00	352.47	100.00			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	100%	100%
			Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur (BAPENDA)	500.00	200.66	100.00			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100%	100%	100%
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran (BAPENDA)	500.00	363.72	100.00			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	100%	100%
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur (BAPENDA)	500.00	352.47	100.00						
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00	45.82	100.00	91.67	91.67	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.00	37.50	100.00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
			dokumen Renja dan Renja Perubahan	4.00 dokumen	3.00	2.00						
			dokumen Renstra dan Perubahan Renstra	0.00 dokumen	3.00	2.00						

X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100.00	66.67	100.00			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		dokumen RKA Bapenda murni	6.00 Dokumen	4.00	1.00						
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100.00	95.75	100.00			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		dokumen RKA Bapenda perubahan	106.00 Dokumen	101.50	1.00						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100.00	0.00	100.00			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		dokumen DPA Bapenda murni	0.00 Dokumen	0.00	1.00						
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100.00	0.00	100.00			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

			dokumen DPA Perubahan	0.00 Dokumen	0.00	1.00						
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00	75.00	100.00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
			Dokumen LAKIP/LKJIP dan LKPJ Bapenda	4.00 dokumen	3.00	2.00						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00	69.36	100.00	100.00	100.00	Tercapainya administrasi keuangan SKPD			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.00	0.00	100.00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	116 Orang/bulan	116 Orang/bulan
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	0.00 %	0.00	100.00						
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.00	58.38	100.00			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 Dokumen	76 Dokumen	76 Dokumen
			Dokumen group band/korps musik Pemkot untuk kegiatan ceremonial	400.00 %	267.05	100.00						
			Dokumen penunjang Kinerja PA, PPK, PPTK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran	400.00 %	200.00	100.00						

	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100.00	99.03	100.00			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	103.00 Dokumen	102.00	1.00						
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100.00	97.17	100.00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
			Bahan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	106.00 dokumen	103.00	2.00						
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100.00	92.23	100.00			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
			Laporan Prognosis dan realisasi anggaran	103.00 Dokumen	95.00	1.00						
	X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100.00	394.17	100.00	100.00	100.00		100.00		

X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		100.00	33.33	100.00			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Prosentase SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi	300.00 %	100.00	100.00						
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		100.00	755.00	100.00			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Laporan realisasi penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi	3.00 Dokumen	22.65	1.00						
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.00	25.00	100.00	50.00	50.00		50.00		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100.00	0.00	100.00			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	
		Tersedianya pakaian dinas dan atribut Korsik	0.00 %	0.00	100.00						
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100.00	50.00	100.00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	46 Orang	
		Tersedianya biaya bagi peserta sosialisasi, bintek dan workshop	400.00 %	200.00	100.00						

	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.00	59.36	100.00	100.00	100.00		100.00		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100.00	43.81	100.00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	315.00 %	138.01	100.00						
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100.00	0.00	100.00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	45 Paket
			Tersedianya peralatan rumah tangga	0.00 %	0.00	100.00						
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100.00	71.20	100.00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	90 Paket
			Kebutuhan Logistik Kantor terpenuhi	450.00 %	320.39	100.00						
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100.00	62.39	100.00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket
			Barang cetakan dan penggandaan tersedia	400.00 %	249.56	100.00						

	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100.00	63.64	100.00			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	320.00 %	203.65	100.00						
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100.00	67.23	100.00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan
			Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	400.00 %	268.91	100.00						
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.00	71.99	100.00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	400.00 %	287.94	100.00						
	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100.00	84.62	100.00			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Terpenuhinya penatausahaan arsip dinamis kantor	1,300.00 %	1,100.00	100.00						
	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100.00	69.40	100.00			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	70 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen

									Elektronik pada SKPD			
			Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	400.00 %	277.58	100.00						
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.00	23.13	100.00	100.00	100.00		100.00		
	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	0.00 %	0.00	0.00 %			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 unit	1 unit	1 unit
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100.00	0.00	100.00			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			Mebel kantor tersedia	0.00 %	0.00	100.00						
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100.00	69.40	100.00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit
			Peralatan dan mesin kantor tersedia	400.00 %	277.58	100.00						
	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100.00	0.00	100.00			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit

			Aset tetap lainnya tersedia	0.00 %	0.00	100.00						
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00	46.79	100.00	100.00	100.00	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100.00	65.78	100.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			Surat-surat Dinas terkirim	53,984.00 paket	35,509.00	9,000.00						
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.00	55.84	100.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			Jasa komunikasi, SDA dan Listrik tersedia	301.00 %	168.09	100.00						
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.00	0.00	100.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 Laporan	168 Laporan	168 Laporan
			Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0.00 %	0.00	100.00						
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.00	65.56	100.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

			Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	330.00 %	216.34	100.00						
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	30.76	100.00	100.00	100.00	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100.00	73.88	100.00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara	476.00 %	351.65	100.00						
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.00	0.00	100.00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 Unit	131 Unit	131 Unit
			pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tersedia	0.00 %	0.00	100.00						
	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100.00	0.00	100.00			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	150 Unit

			Pemeliharaan mebel tersedia	0.00 %	0.00	100.00						
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00	53.74	100.00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 Unit	520 Unit	520 Unit
			Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	400.00 %	214.94	100.00						
			Pemeliharaan peralatan gedung kantor	400.00 %	214.94	100.00						
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100.00	0.00	100.00			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	42 Unit
			Terpeliharanya aset tetap lainnya	0.00 %	0.00	100.00						
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.00	56.97	100.00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit
			Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan	400.00 %	227.89	100.00						

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan 3 Program dan Indikator Kinerja Program dan 3 Kegiatan dengan 11 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) 3 program dalam Renja 2021 adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c) Adapun 3 indikator program tersebut adalah Prosentase realisasi terhadap target dana transer yang ditentukan, Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah), Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
 - d) Secara ringkas, kinerja pada tahun 2021 terlihat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yang berada pada range $\geq 90\%$. Adapun keterangan capaian kinerja seluruh program adalah Sangat Tinggi.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan 3 Program dengan 3 indikator program dan 11 kegiatan dengan 14 indikator
 - b) 3 program dalam Renja 2021 adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c) Adapun 3 indikator program tersebut adalah Prosentase realisasi terhadap target dana transfer yang ditentukan, Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah), Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan

administrasi perkantoran dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.

- d) Secara ringkas, capaian target renstra 2021-2026 di tahun 2022 tentu belum menunjukkan angka yang memuaskan. Hal ini mengingat Renstra disusun untuk dicapai dalam jangka waktu yang cukup lama sementara tahun 2022 merupakan tahun-tahun awal perjalanan renstra 2021-2026.
- e) Adapun terdapat target renstra yang sampai dengan tahun 2022 telah mencapai target. Misalnya pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi 10% telah melebihi target renstra sebesar 10%.
- f) Untuk indicator-indicator lainnya masih berproses untuk mencapai target akhir renstra. Peningkatan kapasitas SDM serta dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah daerah serta pihak-pihak lainnya akan sangat membantu dalam pencapaian target renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.118.412.859	62.605.629.237	85,62
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.555.695	16.417.800	99,17%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.908.245	7.814.000	98,81%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.769.375	3.769.000	99,99%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.878.075	4.834.800	99,11%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.753.206.886	57.375.384.857	85,95%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.155.627.345	56.844.487.957	85,93%
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	586.580.000	521.830.000	88,96%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.352.475	3.351.000	99,96%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.068.015	2.938.900	72,24%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.579.051	2.777.000	77,59%
III	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.748.350	7.090.140	65,96%
12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1.624.950	550.000	33,85%
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.123.400	6.540.140	71,69%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.181.430	82.885.000	99,64%
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.181.430	82.885.000	99,64%
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.276.414.783	1.841.603.146	80,90%
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.132.000	32.333.000	89,49%
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.860.430	63.104.996	98,82%
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.882.050	223.576.650	81,63%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
19	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	490.955.285	432.745.100	88,14%
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.090.000	9.090.000	100,00%
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.451.000	90,85%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.337.000	171.769.400	58,76%
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.283.108	32.973.000	99,07%
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.070.874.910	870.560.000	81,29%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	404.004.680	349.069.000	86,40%
25	Pengadaan Mebel	147.298.760	134.687.000	91,44%
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.978.720	212.230.000	83,56%
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.727.200	2.152.000	78,91%
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.044.531.095	1.805.055.414	88,29%
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.000.000	97.058.900	96,10%
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.288.896	347.985.459	86,50%
30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.730.200	49.201.055	78,43%
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.478.511.999	1.310.810.000	88,66%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.529.769.940	1.128.123.880	73,74%
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	904.076.000	661.253.680	73,14%
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.760.000	40.040.200	57,40%
34	Pemeliharaan Mebel	0	0	0%
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	293.349.530	177.852.500	60,63%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
36	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.033.410	7.950.000	98,96%
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.551.000	241.027.500	94,69%
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50.939.825	19.985.000	39,23%
IX	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	47.725.000	18.365.000	38,48%
38	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47.725.000	18.365.000	38,48%
X	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.214.825	1.620.000	50,39%
39	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.214.825	1.620.000	50,39%
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12.614.799.387	10.675.561.822	84,63%
XI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	12.614.799.387	10.675.561.822	84,63%
40	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	412.239.763	369.692.150	89,68%
41	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.409.818.318	2.068.870.968	85,85%
42	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	199.431.430	185.388.100	92,96%
43	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	928.756.510	778.384.950	83,81%
44	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	930.513.521	435.837.500	46,84%
45	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.549.296.664	3.304.617.800	93,11%
46	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	301.304.024	281.065.000	93,28%
47	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	108.899.080	87.856.500	80,68%
48	Penagihan Pajak Daerah	1.733.976.135	1.273.082.150	73,42%
49	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	45.425.940	18.879.500	41,56%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
50	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.980.929.252	1.859.682.204	93,88%
51	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14.208.750	12.205.000	85,90%
Total		85.784.152.071	73.301.176.059	85,45%

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 11 kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 85.784.152.071. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 73.301.176.059 (85,45%) dengan sisa sebesar Rp 12.482.976.012 (14,55%) dengan uran berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 66.155.627.345 realisasi Rp 56.844.487.957 (85,95%) dan sisa anggaran sebesar Rp 9.311.139.388 (14,05)
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 19.628.524.726 Dengan realisasi sebesar Rp 16.456.688.102 (83,84%) dan sisa anggaran sebesar Rp (16,16%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis

ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 dan 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah		9,34	8,16		-3,61	9,60		
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)		44,65	47,43		46,02	49,47		
	2. Prosentase Realisasi Terhadap Dana transfer yang telah ditentukan		100	100		96,16	97,16		
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				54,57				54,57
Sasaran:	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah				10				10
	2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah				74				74

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya Pendapatan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase Peningkatan Daerah”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 9,60 dari target sebesar 8,16%;
- b. Sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) ” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 49,47% dari target sebesar 47,43% (capaian sebesar 104,30%);

- 2) Indikator “Prosentase Realisasi terhadap Dana Transfer yang telah ditentukan” belum dapat mencapai target sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 97,03% (capaian sebesar 97,03%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 3

Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)	44,65	47,43			46,02	49,47		
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			54,57	54,57			54,57	54,57

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam upaya mencapai target tingkat kemandirian keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 50,97% diperoleh realisasi sebesar 49,47% yang diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &\text{Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah} = \\
 &\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.385.944.758.477}{\text{Rp } 4.822.887.281.737} \times 100\% \\
 &= 49,47\%
 \end{aligned}$$

Lebih tinggi Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 46,02%, dimana pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen dan pendapatan yang paling berdominan dari sektor pajak daerah yang pada tahun 2021 tidak dapat melampaui target dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat pandemi covid-19 yang

mempengaruhi kunjungan wisatawan di Kota Semarang sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan terhadap target penerimaan dana transfer diperoleh dari :

Prosentase Peningkatan Penerimaan terhadap target penerimaan dana transfer

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan dana transfer} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan dana transfer}}$$

$$= \frac{\text{Rp 2.436.942.523.260}}{\text{Rp 2.508.089.278.881}} \times 100\%$$

$$= 97,16\%$$

Dalam pelaksanaan fungsi Nama Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di bidang keuangan dengan indikator Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan formula tersebut di atas dapat diketahui bahwa Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN DAERAH	5.115.782.364.563	4.822.887.281.737	94,27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.607.693.085.682	2.385.944.758.477	91,50
1.1.1	PAJAK DAERAH	2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	71,66
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	87.617.710.256	96.448.844.019	110,08

1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	66.895.891.301	66.895.891.301	100,00
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	436.545.036.771	777.428.723.606	178,09
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.385.062.664.824	2.320.535.370.128	97,29
A	PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT	1.710.552.675.577	1.764.434.028.103	103,15
1	BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK/SDA	147.814.881.000	211.320.991.472	142,96
2	DANA ALOKASI UMUM	1.167.622.970.000	1.167.622.970.000	100,00
3	DANA ALOKASI KHUSUS	330.500.482.577	320.875.724.631	97,09
4	DANA INSENTIF DAERAH	64.614.342.000	64.614.342.000	100,00
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	674.509.989.247	556.101.342.025	82,45
1	DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI & PEMDA LAINNYA	639.001.989.247	532.561.552.641	83,34
2	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	35.508.000.000	23.539.789.384	66,29
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.026.614.057	116.407.153.132	94,62
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HIBAH)	123.026.614.057	116.407.153.132	94,62

Data Pendapatan 31 Desember 2021 (sesuai data Laporan LRA ALL SKPD dari BPKAD (audited BPK))

Target dan Realisasi Pajak Daerah Pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (+/-) (%)
1.	Pajak Hotel	174.000.000.000	69.954.889.289	40,20
2.	Pajak Restoran	249.070.166.000	129.367.077.520	51,94
3.	Pajak Hiburan	66.800.000.000	8.379.554.932	12,54
4.	Pajak Reklame	44.000.000.000	26.332.031.520	59,85
5.	Pajak Penerangan Jalan	249.500.000.000	227.284.554.256	91,10
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29.223.600	32.259.600	110,39
7.	Pajak Parkir	51.414.237.000	11.786.312.589	22,92
8.	Pajak Air Tanah	20.220.320.754	17.837.303.034	88,21
9.	Pajak Sarang Burung Walet	500.000	500.000	100,00
10.	Pajak BPHTB	711.600.000.000	477.946.170.903	67,17

No	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (+/-) (%)
11.	PBB Pedesaan & Perkotaan	450.000.000.000	476.250.645.908	105,83
TOTAL		2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	71,66

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Indikator Lainnya	Target Renstra				Realisasi Kinerja		Proyeksi	
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Kemandirian (Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	%	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah		44,65%	47,43			46,02%	49,47	54,57%	54,57%
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		Peningkatan Pelayanan Administrasi	100%				91,90%	-	-	-
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				82,04%	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%				100%	-	-	-
5	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				86,44%	-	-	-
6	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		Proses Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB Tiap Tahun	9,22%				0,19%	-	-	-
		%		Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Tiap Tahun	19,83%				22,05%	-	-	-
		%		Prosentase Peningkatan Penerimaan Terhadap Target Penerimaan Dana Transfer	100%				96,16%	-	-	-
		Dok		Tertib Pelaporan Pendapatan	12 Dok				12 dok	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Kinerja		Proyeksi	
7	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%			1,02%	10%	105	21,33%	10%	10%	
8	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%			100%	100%	100%	96,16%	97,44%	-	-
9	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	%		Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	%		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		%		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		%		Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		%		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	%		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	dok		Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9	8	9	9	8	9	
		%		Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam lima tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah antara lain :

2.3.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2) Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
- 4) Tuntutan transparansi informasi publik.
- 5) Adanya pengaruh perekonomian global dan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia, yang selanjutnya akan berdampak pula kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk Kota Semarang, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

- 1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

- 2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
- 3) Adanya website sebagai media informasi publik.
- 4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
- 5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- 7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Nama BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG Kota Semarang sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada.
5. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparaturnya dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah**” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya

saing

2) Pengembangan wisata MICE

d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:

1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa

2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi

3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan

4) Peningkatan nilai dan produk ekspor

e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:

1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular

2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan

3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:

1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin

3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin

4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:

1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan

2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:

1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif

2) Peningkatan dukungan dan sinergitas BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender

secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
 - c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
 - d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%
6. Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya BADAN PENDAPATAN DAERAH "KOTA SEMARANG mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”**, dengan focus Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya - upaya ntensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				97.046.778.157	BADAN PENDAPATAN DAERAH				97.883.898.157	
5.02	KEUANGAN				28.334.173.757	KEUANGAN				29.170.293.757	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	28.334.173.757	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	29.170.293.757	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	28.334.173.757	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	29.170.293.757	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Semarang	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00 kajian/NA	707.122.891	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Semarang	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00 kajian/NA	707.122.891	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1500.00 wajib pajak	4.008.229.871	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1500.00 wajib pajak	4.024.229.871	
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah validasi data pajak daerah	1050.00 NPWPD	3.859.903.422	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah validasi data pajak daerah	1050.00 NPWPD	3.880.903.422	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan pendapatan	12.00 dokumen	4.693.658.080	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan pendapatan	12.00 dokumen	4.733.658.080	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Semarang	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	1020.00 wajib pajak	260.636.731	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Semarang	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	1020.00 wajib pajak	275.336.731	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15750.00 SKPD	3.180.148.377	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15750.00 SKPD	3.705.748.377	

5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12.00 kegiatan	4.004.481.685	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12.00 kegiatan	4.032.641.685	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7875.00 SKPD	1.042.276.590	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7875.00 SKPD	1.075.876.590	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1050.00 dokumen	5.190.147.420	Penagihan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1050.00 dokumen	5.314.647.420	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150.00 dokumen	30.000.020	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150.00 dokumen	30.000.020	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	165.00 SKPD	939.665.250	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	165.00 SKPD	972.225.250	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	1.00 kegiatan	417.903.420	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	1.00 kegiatan	417.903.420	
X.XX	NON URUSAN	Kota Semarang			68.712.604.400	NON URUSAN	Kota Semarang			68.713.604.400	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	68.712.604.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	68.713.604.400	
		Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %			Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %		
		Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %			Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		
		Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %			Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		
		Kota Semarang	Persentase Peningkatan	100.00 %			Kota Semarang	Persentase Peningkatan	100.00 %		

			Kemampuan ASN Bapenda					Kemampuan ASN Bapenda			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00 dokumen	55.411.980	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00 dokumen	55.411.980	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	2.00 Dokumen	13.821.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	2.00 Dokumen	13.821.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	9.145.180	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	9.145.180	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1.00 Dokumen	9.093.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1.00 Dokumen	9.093.800	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	1.00 Dokumen	8.313.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	1.00 Dokumen	8.313.800	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	7.430.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	7.430.200	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 Dokumen	7.608.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 Dokumen	7.608.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	57.451.142.743	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	57.451.142.743	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	56.349.563.143	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	56.349.563.143	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	1.097.346.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	1.097.346.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Dokumen	1.411.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Dokumen	1.411.200	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.00 Dokumen	1.411.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.00 Dokumen	1.411.200	

X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.411.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.411.200	
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	87.042.170	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	87.042.170	
X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00 Kegiatan	50.620.280	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00 Kegiatan	50.620.280	
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00 Dokumen	36.421.890	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00 Dokumen	36.421.890	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	260.073.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	260.073.005	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	1.00 paket	102.925.505	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	1.00 paket	102.925.505	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	48.00 orang	157.147.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	48.00 orang	157.147.500	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	3.504.900.784	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	3.505.900.784	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	12.00 jenis	70.046.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	12.00 jenis	70.046.760	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00 jenis	89.878.109	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00 jenis	89.878.109	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00 jenis	184.168.209	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00 jenis	184.168.209	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00 jenis	852.351.307	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00 jenis	852.351.307	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Persentase langganan Surat Kabar	100.00 persen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Persentase langganan Surat Kabar	100.00 persen	15.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	2535.00 orang	52.650.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	2535.00 orang	52.650.000	

X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00 kegiatan	1.051.281.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00 kegiatan	1.052.281.000	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penatusahaan Arsip	1.00 kegiatan	37.137.960	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penatusahaan Arsip	1.00 kegiatan	37.137.960	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6.00 jenis	1.152.387.439	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6.00 jenis	1.152.387.439	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	1.669.500.259	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	1.669.500.259	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel kantor tersedia	3.00 jenis	631.974.810	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel kantor tersedia	3.00 jenis	631.974.810	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00 jenis	1.031.705.269	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00 jenis	1.031.705.269	
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	7.00 buku	5.820.180	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	7.00 buku	5.820.180	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	2.480.912.647	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	2.480.912.647	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	surat menyurat kedinasan	19360.00 dokumen	144.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	surat menyurat kedinasan	19360.00 dokumen	144.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 persen	632.623.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 persen	632.623.440	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis	63.586.457	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis	63.586.457	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa pelayanan umum kantor	100.00 persen	1.640.702.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa pelayanan umum kantor	100.00 persen	1.640.702.750	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	3.203.620.812	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	3.203.620.812	

X.XX.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 unit	36.318.180	
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	131.00 unit	1.064.380.710	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	131.00 unit	1.064.380.710	
X.XX.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	135.00 unit	13.318.668	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	135.00 unit	13.318.668	
X.XX.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.00 jenis	564.089.510	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.00 jenis	564.089.510	
X.XX.01.2.09 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.00 jenis	7.294.444	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.00 jenis	7.294.444	
X.XX.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.00 gedung	1.518.219.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.00 gedung	1.518.219.300	
JUMLAH					97.046.778.157					97.883.898.157	

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Berdasarkan table di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 97.046.778.157,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), dan disetujui sebesar Rp. 97.883.898.157,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyah Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Serratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Adapun jumlah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan dengan 49 (empat puluh Sembilan) sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
- 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
- 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitis Bangsa yang

- Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak

dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Keuangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan kemandirian keuangan daerah”

Dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
SASARAN : 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Nilai	74

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 (satu)

program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 (satu) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 97.883.898.157 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 68.713.604.400 (Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 29.170.293.757 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan
Maju Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024	
	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana / Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana / Indikatif
5.02.0.00.0.00.0 2.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				97.883.898.157				93.612.969.728
5.02	KEUANGAN				29.170.293.757				15.962.382.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah		10.00 %	29.170.293.757			10.00 %	15.962.382.000
5.02.04.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>Kota Semarang</i>	10.00 %	29.170.293.757		<i>Kota Semarang</i>	10.00 %	15.962.382.000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	<i>Kota Semarang</i>	8.00 kajian/NA	707.122.891	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	8.00 kajian/NA	585.000.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	<i>Kota Semarang</i>	1500.00 wajib pajak	4.024.229.871	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1500.00 wajib pajak	3.143.012.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	<i>Kota Semarang</i>	1050.00 NPWPD	3.880.903.422	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1050.00 NPWPD	407.528.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan	<i>Kota Semarang</i>	12.00 dokumen	4.733.658.080	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	12.00 dokumen	2.612.461.000

5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	<i>Kota Semarang</i>	1020.00 wajib pajak	275.336.731	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1020.00 wajib pajak	1.271.193.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	<i>Kota Semarang</i>	15750.00 SKPD	3.705.748.377	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	15750.00 SKPD	2.523.666.000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	<i>Kota Semarang</i>	12.00 kegiatan	4.032.641.685	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	12.00 kegiatan	560.629.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	<i>Kota Semarang</i>	7875.00 SKPD	1.075.876.590	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	7875.00 SKPD	305.646.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	<i>Kota Semarang</i>	1050.00 dokumen	5.314.647.420	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1050.00 dokumen	1.959.049.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	<i>Kota Semarang</i>	150.00 dokumen	30.000.020	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	150.00 dokumen	108.756.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	<i>Kota Semarang</i>	165.00 SKPD	972.225.250	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	165.00 SKPD	2.190.466.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	<i>Kota Semarang</i>	1.00 kegiatan	417.903.420	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 kegiatan	294.976.000
X.XX	NON URUSAN		<i>Kota Semarang</i>		68.713.604.400		<i>Kota Semarang</i>		77.650.587.728
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	68.713.604.400		<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	77.650.587.728
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %			<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %			<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %			<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	

		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %			<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	
<i>X.XX.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>8.00 dokumen</i>	<i>55.411.980</i>		<i>Kota Semarang</i>	<i>8.00 dokumen</i>	<i>40.176.690</i>
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	<i>Kota Semarang</i>	2.00 Dokumen	13.821.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	2.00 Dokumen	19.624.632
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	9.145.180	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	3.475.949
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	9.093.800	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	3.370.303
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	8.313.800	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	4.161.132
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	7.430.200	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	4.159.614
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	<i>Kota Semarang</i>	2.00 Dokumen	7.608.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	2.00 Dokumen	5.385.060
<i>X.XX.01.2.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>57.451.142.743</i>		<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>67.847.215.765</i>
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	56.349.563.143	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	66.545.200.926
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	1.097.346.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	1.289.872.100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	1.411.200	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	3.700.902
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	<i>Kota Semarang</i>	2.00 Dokumen	1.411.200	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	2.00 Dokumen	4.490.810
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	1.411.200	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	3.951.027
<i>X.XX.01.2.04</i>	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Pendapatan SKPD</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>87.042.170</i>		<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>52.442.295</i>

X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Kegiatan	50.620.280	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Kegiatan	32.190.598
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	36.421.890	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 Dokumen	20.251.697
<i>X.XX.01.2.05</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>260.073.005</i>		<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>323.353.313</i>
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	<i>Kota Semarang</i>	1.00 paket	102.925.505	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 paket	110.714.483
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	<i>Kota Semarang</i>	48.00 orang	157.147.500	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	48.00 orang	212.638.830
<i>X.XX.01.2.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>3.505.900.784</i>		<i>Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>4.142.047.767</i>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	<i>Kota Semarang</i>	12.00 jenis	70.046.760	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	12.00 jenis	66.386.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	<i>Kota Semarang</i>	45.00 jenis	89.878.109	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	45.00 jenis	84.998.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	<i>Kota Semarang</i>	69.00 jenis	184.168.209	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	69.00 jenis	484.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	<i>Kota Semarang</i>	25.00 jenis	852.351.307	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	25.00 jenis	968.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan Surat Kabar	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	15.000.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	26.620.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	<i>Kota Semarang</i>	2535.00 orang	52.650.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	2535.00 orang	62.390.625
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	<i>Kota Semarang</i>	60.00 kegiatan	1.052.281.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	60.00 kegiatan	1.195.353.325
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatusahaan Arsip	<i>Kota Semarang</i>	1.00 kegiatan	37.137.960	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 kegiatan	44.299.817
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Kota Semarang</i>	6.00 jenis	1.152.387.439	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	6.00 jenis	1.210.000.000

X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	1.669.500.259		<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	587.546.814
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	<i>Kota Semarang</i>	3.00 jenis	631.974.810	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	3.00 jenis	281.000.720
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	<i>Kota Semarang</i>	6.00 jenis	1.031.705.269	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	6.00 jenis	301.072.200
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	<i>Kota Semarang</i>	7.00 buku	5.820.180	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	7.00 buku	5.473.894
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor</i>	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	2.480.912.647		<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	2.410.133.843
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	<i>Kota Semarang</i>	19360.00 dokumen	144.000.000	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	19360.00 dokumen	144.514.656
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	632.623.440	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	628.539.481
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Kota Semarang</i>	2.00 jenis	63.586.457	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	2.00 jenis	69.249.837
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	1.640.702.750	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	100.00 persen	1.567.829.869
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Aset SKPD</i>	<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	3.203.620.812		<i>Kota Semarang</i>	100.00 %	2.247.671.241
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Kota Semarang</i>	1.00 unit	36.318.180	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	1.00 unit	43.737.580
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	<i>Kota Semarang</i>	131.00 unit	1.064.380.710	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	131.00 unit	1.158.609.031

X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	<i>Kota Semarang</i>	135.00 unit	13.318.668	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	135.00 unit	15.765.235
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	10.00 jenis	564.089.510	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	10.00 jenis	513.634.127
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	5.00 jenis	7.294.444	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	5.00 jenis	11.513.509
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	5.00 gedung	1.518.219.300	APBD Kota Semarang	<i>Kota Semarang</i>	5.00 gedung	504.411.759
JUMLAH					97.883.898.157				93.612.969.728

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 (satu) kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 97.883.898.157 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 68.713.604.400 (Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 29.170.293.757 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Jumlah total usulan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.547.823.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian dan jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan usulan rumusan kebutuhan untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis di tahun 2024 mendatang;
4. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat perubahan indicator sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil

pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan terjabar ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tertuang bahwa penyesuaian nomenklatur program kegiatan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja Perangkat Daerah adalah sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah yang mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, Tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah.

Tahap pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan wadah menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, atau antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan dengan Perangkat Daerah. Peran forum Perangkat Daerah dapat mendorong penerapan pendekatan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan dari atas ke bawah (*top-down planning*), yang

diselaraskan melalui Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari Forum Perangkat Daerah ini adalah untuk menselaraskan program kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, mempertajam indikator serta target program kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, menselaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPP
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi BKPP Kota Semarang
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPP Kota Semarang
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPP

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Tahun anggaran 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

Evaluasi terhadap jalannya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berlangsung pada tahun yang telah lalu sangatlah penting. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya baik berupa anggaran/keuangan maupun fisik/kinerja agar kita dapat menganalisis data tersebut.

Berikut capaian indikator kegiatan dan keuangan terhadap evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 dapat dilihat tabel pada tabel 2.1.

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	03 Dokumen	03 Dokumen	3	3	100	3	3	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	05 kegiatan	05 kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	02 Dokumen	02 Dokumen	2	2	100	2	2	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	02 Dokumen	02 Dokumen	2	2	100	2	2	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	03 kegiatan	03 kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemerintahan Daerah yang berjalan baik								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	01 kegiatan	01 kegiatan						
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	115 Orang	115	115	100	115	115	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen						
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	08 kegiatan	08 kegiatan						
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah								
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	01 kegiatan	01 kegiatan						
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	34 Unit	34 Unit	0	12	0	34	22	65
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor									
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	04	kegiatan	04	kegiatan					
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
							Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	207.65	Persen	207.65	Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	02	kegiatan	02	kegiatan						
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300	Orang	300	Orang	300	300	100	300	300	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022			
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100	Orang	100	Orang	100	100	100	306	306	100
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	01	Buku	01	Buku	1	1	100	1	1	100
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	01	Buku	01	Buku	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pelaksanaan UKPPI	01	Kegiatan	01	Kegiatan	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
							Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	05	Orang	05	Orang	5	5	100	4	4	100
		Pelaksanaan ujian dinas	01	Kegiatan	01	Kegiatan	1	1	100	1	1	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100	Persen	100	Persen						
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	03	kegiatan	03	kegiatan						
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	01	Kali	01	Kali	1	1	100	1	1	100
		Mutasi Intern PNS	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
							Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perubahan Jabatan ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
		Tes Mutasi Masuk PNS	03	Kegiatan	03	Kegiatan	3	3	100	3	3	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	02	Kali	02	Kali	2	2	100	2	2	100
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	08	Kegiatan	08	Kegiatan	8	8	100	6	6	100
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	04	Bulan	04	Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	04	Kegiatan	04	Kegiatan	4	4	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
							Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	04	Bulan	04	Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	01	Kegiatan		Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pembuatan aplikasi	02	aplikasi	02	aplikasi	2	2	100	2	1	100
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	01	Kegiatan	01	Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Penilaian mandiri sistem merit	01	Kegiatan	01	Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	01	Kegiatan	01	Kegiatan	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Uji kompetensi JPT Pratama	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pelantikan struktural	03 Kegiatan	03 Kegiatan	3	3	100	5	3	60
		Uji Kompetensi Administrasi	00 Kegiatan	00 Kegiatan	0	0	100	1	1	100
		Penyusunan Perwal	02 Kegiatan	02 Kegiatan	2	2	100	0	0	0
		Managemen Talenta ASN	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	01.00	100	4	3	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase akurasi data kepegawaian								
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	05 kegiatan	05 kegiatan						
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	300 Orang	300	300	100	320	320	100
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	03 Buku	03 Buku	3	3	100	3	3	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	12000 Orang	1200	1200	100	1200	1221	101
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	75 Orang	75 Orang	75	75	100	75	75	100
			775	775 Surat Keputusan	775	775	100	775	775	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	Surat Keputusan							
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	01 aplikasi	01 aplikasi	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang	10 Orang	10	10	100	0	0	0
		Layanan pengurusan kartu istri	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	200	200
		Layanan pengurusan kartu suami	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	207	207
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	500 Orang	500 Orang	500	500	100	1500	929	61
		Layanan update data pegawai	10.000 Orang	100000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	11895	99.15

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan arsip pegawai	100000 Orang	100000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	11895	99.15
		Layanan kartu pegawai	100 Orang	100 Orang	100	100	100	200	200	100
		Layanan cetak id card	1150 buah	1150 buah	1150	1150	100	1150	1150	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin								
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	04 kegiatan	04 kegiatan						
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan senam pegawai	44 Kali	44 Kali	44	44	100	22	21	95
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	01 Buku	01 Buku	1	1	100	1	1	100
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	50 Orang	50 Orang	50	50	100	20	12	60
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	60 Orang	60 Orang	60	60	100	60	41	68
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	180 Piagam	180 Piagam	180	180	100	175	38	28
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 berkas	40 berkas	40	40	100	40	40	100
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	03 Orang	03 Orang	3	3	100	9	9	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sosialisasi TPP	00 Kegiatan	00 Kegiatan	0	0	100	2	2	100
		Verifikasi e-cuti	480 berkas	480 berkas	480	480	100	250	250	90
		Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	00 berkas	00 berkas	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tersusunnya Perkada TPP	01 Dokumen	01 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90 Kegiatan	90 Kegiatan	90	90	100	5	5	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	05 Kegiatan	05 Kegiatan	5	5	100	5	5	100
		Pelepasan haji	02 Kegiatan	02 Kegiatan	2	2	100	1	1	100
		Bimbingan mental	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14	14	100	8	8	100
		Pembekalan disiplin	03 Kegiatan	03 Kegiatan	3	3	100	1	1	100
		Sosialisasi LHKASN	02 Kegiatan	02 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Sosialisasi LHKPN	02 Kegiatan	02 Kegiatan	2	2	100	1	0	0
		Sosialisasi Disiplin ASN	01 kegiatan	01 kegiatan	1	1	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemrosesan penghadapan PNS yang diminta keterangan oleh APH	75 Orang	75 Orang	75	75	100	63	32	50
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	02 Kasus	02 Kasus	2	2	100	2	1	50
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12	12	100	12	10	83
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	02 Kegiatan	02 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27	27	100	27	20	74
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemrosesan ijin perceraian	30 Kasus	30 Kasus	30	30	100	27	15	55

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya								
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik								
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Urusan Pemerintahan Umum									
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Sertifikasi Manajemen Mutu Pelatihan	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	514 Orang	514 Orang	514	514	100	746	826	110,72
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Evaluasi Pasca Diklat	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	01.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	01 Kegiatan	01 Kegiatan	1	1	100	1	01.00	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	01 kegiatan	01 kegiatan						
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	236 Orang	236 Orang	236	236	100	560	520	92
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	05 Orang	05 Orang	05	05	100	5	5	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30 Orang	30 Orang	30	30	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
							Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	60	Orang	60	Orang	60	60	100	0	0	0
		Jumlah peserta latsar (pengiriman)	12	Orang	12	Orang	12	12	100	0	0	0
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35	Orang	35	Orang	35	35	100	174	49	28
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik										
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	01	kegiatan	01	kegiatan						
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	04	Kegiatan	04	Kegiatan	04	04	100	1	1	100
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Monev penilaian kinerja ASN	02 Kegiatan	02 Kegiatan	02	02	100	02	02	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16 Persen	16 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	01 kegiatan	01 kegiatan						
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	01 Kegiatan	01 Kegiatan	01	01	100	01	01	100
		Kenaikan jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	03	01	33
		Pembekalan jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	03	03	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	03	00	00
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	03	03	100
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	15	03	20
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	03	03	100
		Update data jabatan fungsional	03 Kegiatan	03 Kegiatan	03	03	100	03	03	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 Persen	100 Persen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	01 kegiatan	01 kegiatan						
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	20	46	230
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	15	15	100
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	1000 Orang	1000 Orang	1000	1000	100	400	403	100.75
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	750 Orang	750 Orang	750	750	100	250	105	42

Sumber Data : Aplikasi Monev Bappeda 2021

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah memenuhi target kinerja. Hal ini dikarenakan pelaksanaan/realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja sesuai yang direncanakan adalah lebih disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi/kondisi yang terjadi ataupun sangat tergantung, yaitu dari segi evaluasi terhadap anggaran tidak menunjukkan progress yang baik dikarenakan terdapatnya pengalihan atau memfokuskan kembali (*refocusing*) anggaran untuk percepatan penanganan *covid-19*.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan BKPP Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan BKPP Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel. 2.2
Realisasi Keuangan BKPP Kota Semarang Tahun 2021

KODE REK	Program Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
5	URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.871.994.764	30.484.831.478	87,42
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.375.007.936	16.595.019.983	90.31
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.663.281	20.389.466	60.57
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.064.881	6.995.302	77.17
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.666.813	1.742.000	30.74
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.177.693	3.502.238	67.64
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.823.350	2.088.977	73.99
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.283.350	417.000	18.26
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.647.194	5.643.949	65.27
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.526.334.135	12.030.030.553	96.04
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.171.692.874	11.718.382.207	96.28
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	345.480.000	308.130.000	89.19
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.546.973	0	0.00

KODE REK	Program Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.080.019	1.996.946	64.84
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.534.269	1.521.400	60.03
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.068.882	27.581.500	80.96
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.068.882	27.581.500	80.96
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.770.640.340	1.290.577.920	72.89
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.737.260	48.052.500	94.71
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	223.529.663	194.477.960	87.00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.505.070	141.545.333	94.05
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	234.892.835	199.853.800	85.08
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.181.760	1.358.000	62.24
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	186.411.000	92.339.085	49.54
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.618.772	222.039.442	48.95
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	468.763.980	390.911.800	83.39
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	613.879.560	501.437.250	81.68
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	613.879.560	501.437.250	81.68
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.089.998	1.367.544.865	77.35
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.427.678	181.241.376	40.33
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	355.362.320	247.602.360	69.68
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	963.300.000	938.701.129	97.45
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.628.331.740	1.357.458.429	83.36
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.945.000	20.204.636	45.98
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.679.670	353.194.473	63.56
05	Pemeliharaan Mebel	75.760.000	72.830.000	96.13

KODE REK	Program Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	952.947.070	911.229.320	95.62
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.347.008.741	7.169.570.986	76.70
01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.971.450.806	4.286.636.824	86.23
02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.286.226	8.166.600	32.30
03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4.212.759.838	3.754.623.985	89.13
06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	442.843.453	256.288.430	57.87
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	130.748.109	129.428.470	98.99
11	Pengelolaan Data Kepegawaian	159.813.180	138.129.339	86.43
02	Mutasi dan Promosi ASN	1.705.221.515	1.174.436.583	68.87
01	Pengelolaan Mutasi ASN	181.015.900	117.466.020	64.89
02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455.776.150	454.341.551	99.69
03	Pengelolaan Promosi ASN	1.068.429.465	602.629.012	56.40
03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.232.209.396	711.980.175	57.78
01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	481.707.247	178.912.495	37.14
04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	170.048.686	145.833.250	85.76
13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	400.805.150	310.042.512	77.35
14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	179.648.313	77.191.918	42.97
04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.438.127.024	996.517.404	69.29
02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	172.321.399	77.302.600	44.86
04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	529.815.513	327.960.258	61.90
07	Pembinaan Disiplin ASN	639.199.475	541.909.329	84.78
08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.683.383	44.224.717	51.61
09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	11.107.254	5.120.500	46.10
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.149.978.087	6.720.240.509	93.99
01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.828.638.652	2.648.468.544	93.63
01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	125.359.696	110.168.900	87.88
02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	330.969.660	309.509.049	93.52

KODE REK	Program Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.239.325.696	2.112.647.570	94.34
04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	132.983.600	116.143.025	87.34
02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.321.339.435	4.071.771.965	94.22
07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.321.339.435	4.071.771.965	94.22

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah memiliki tolok ukur Sasaran dan Indikator Kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki tiga indikator kinerja, dengan rencana target capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASA RAN	SAT	TARGET					KONDIS I AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	2022
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Tercapainya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai target	Indeks	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	83,84
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pegawai	Indeks	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80	91,97
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,65	0,68	0,73	0,78	0,81	0,66

Sumber Data : RENSTRA BKPP 2016-2021

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKPP Kota Semarang secara garis besar masih menghadapi berbagai kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, secara umum sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepegawaian;
- 2) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
- 3) Kurangnya kompetensi ASN;
- 4) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ASN

Kondisi internal BKPP terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan BKPP sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKPP dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKPP dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai unsur penunjang pelaksana di bidang kepegawaian khususnya PNS, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Semarang. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi BKPP sebagaimana tugas dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut :

1. Peluang

- a. BKPP Kota Semarang Kota Semarang sering dijadikan sebagai *pilot project* dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
- b. Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
- c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
- d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;
- e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
- f. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
- g. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait;

2. Tantangan

- a. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
- b. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja;
- c. Pengadaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
- d. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
- e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
- f. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- g. Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
- i. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- j. Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya

RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerintah Kota Semarang, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPP Kota Semarang Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel 2.4 :

TABEL 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN				26.694.710.466	URUSAN KEPEGAWAIAN				26.694.710.466			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.674.001.291	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.674.001.291			
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen				
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02 .2.01.0 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520	-
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku				Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku		
5.03.02 .2.01.0 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100	
5.03.02 .2.01.0 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381	
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK				Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429	
5.03.02 .2.01.1 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048	
			Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang				Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang				Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang		
			Layanan update data pegawai	10000 Orang				Layanan update data pegawai	10000 Orang		
			Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang				Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang		
			Layanan kartu pegawai	300 Orang				Layanan kartu pegawai	300 Orang		
			Layanan cetak id card	1150 buah				Layanan cetak id card	1150 buah		
			Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang				Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang		
5.03.0 2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02 .2.02.0 1		Kota Semarang	Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan			Kota Semarang	Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan	578.084.000	
			Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan				Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan		
			Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan				Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan		
5.03.02 .2.02.0 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770	
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan				Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan		
			Pembuatan daftar penjaminan kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Pembuatan daftar penjaminan kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan				Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan		
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan				Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan		
5.03.02 .2.02.0 3	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290	

Rancangan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan				Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan				Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan				Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan				Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan				Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan				Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan				Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan		
5.03.0 2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	
5.03.02 .2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813	
		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang	Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building				100.00 Orang			
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun				1.00 Buku			
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun				1.00 Buku			
		Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	Penyelesaian ijin belajar				12.00 Bulan			

Rancangan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.03.02 .2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijazah	12.00 Bulan	1.242.565.450	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijazah	12.00 Bulan	1.242.565.450	
			Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan		
			Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang				Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang		
			Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan		
5.03.02 .2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960	
			Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
5.03.02 .2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530	Fasilitasi Pengembangan	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530	

Rancangan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	dalam Jabatan Fungsional		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang		Karir dalam Jabatan Fungsional		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang		
			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang				Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276	
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN				12.00 Bulan			
		Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan	Monev penilaian kinerja ASN				1.00 Kegiatan			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685	
		Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali	Pelaksanaan senam pegawai				22.00 Kali			
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah Kajian TPP yang tersusun				1.00 Buku			
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang	Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan				20.00 Orang			
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang	Penghargaan bagi PNS meninggal dunia				30.00 Orang			
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam	Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan				200.00 Piagam			
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas	Penyelesaian berkas ijin cuti				40.00 berkas			
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan				9.00 Orang			

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
			Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan			
			Verifikasi e-cuti	250.00 berkas				Verifikasi e-cuti	250.00 berkas			
			Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210		
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan			
			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				Pelepasan haji	1.00 Kegiatan			
			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				Bimbingan mental	10.00 Kegiatan			
			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan			
			Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan			
			Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan			
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang		71.111.430	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH		65.00 Orang	71.111.430
			Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus				Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus			
			Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan				Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan			

Rancangan RKPD Tahun 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan		
			Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen				Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Perprosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Perprosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.605.345.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.605.345.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.605.345.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.605.345.000	
			Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen				Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.04.02 .2.01.0 2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880	
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		
5.04.02 .2.01.0 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000	
5.04.02 .2.01.0 4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100	
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan				Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000	
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang		
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang				Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang		
X.XX	NON URUSAN					NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan	100.00 Persen	16.883.123.184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan	100.00 Persen	16.883.123.184	

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			serta evaluasi kinerja perangkat daerah					serta evaluasi kinerja perangkat daerah			
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen		
			Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen				Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen		
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.176.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.176.800	
X.XX.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	3.040.380	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	3.040.380	
			Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen				Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen		
X.XX.0 1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	
X.XX.0 1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	
X.XX.0 1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	6.805.030	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	6.805.030	
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen				Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.0 1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520	
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466	
X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000	
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480	
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200	
X.XX.0 1.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080	
X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-	
X.XX.0 1.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991	
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466	

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170	
X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200	
X.XX.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200	
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550	
X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060	
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500	
Penyediaan makanan dan minuman rapat			12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat				12 Bulan			
Penyediaan makanan dan minuman tamu			12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman tamu				12 Bulan			
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692	
Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota			12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota				12 Bulan			
X.XX.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094	
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.00 Kegiatan	106.837.850	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.00 Kegiatan	106.837.850	

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Daerah yang berjalan baik					Daerah yang berjalan baik			
X.XX.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850	
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	
X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759	
X.XX.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848	
			Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan				Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800	
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	
X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180	
X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK	12 Bulan	509.651.239	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK	12 Bulan	509.651.239	

	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas operasional			Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas operasional			
X.XX.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630	
X.XX.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386	

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan hasil LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 terkait peningkatan kualitas tenaga IT untuk mendukung pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah melaksanakan:

- a. Bekerja sama dengan Kecamatan dan kelurahan telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi SDM bidang IT sesuai penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

JUMLAH PELATIHAN / BIMTEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

NO	NAMA PELATIHAN/BIMTEK	INSTANSI PENYELENGGARAAN	METODE PEMBELAJARAN	JUMLAH PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Teknologi Informasi	Kelurahan Purwosari	Klasikal	28	09 April 2021
2	Pelatihan & Bimbingan Pemasaran Melalui Online	Kelurahan Karangroto	Klasikal	40	24 Mei 2021
3	Pelatihan Komputer	Kelurahan Randugarut	Klasikal	40	24 Juni 2021
4	Bimbingan Teknis Komputer	Kelurahan Karanganyar	Klasikal	50	14 Agustus 2021
5	Pelatihan Komputer bagi Tim Penggerak PKK	Kel. Gisikdrono	Klasikal	60	19 Agustus 2021
6	Sosialisasi Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19	Kelurahan Terboyo Wetan	Klasikal	50	08 Oktober 2021
7	Sosialisasi Teknologi Informasi	Kelurahan Jatibarang	Klasikal	25	10 Oktober 2021
8	Sosialisasi Aplikasi Digital Marketing	Kelurahan Ngijo	Klasikal	20	22 Oktober 2021
9	Sosialisasi tentang Pemasaran UMKM berbasis online	Kelurahan Pedurungan Lor	Klasikal	77	8 November 2021
10	Pelatihan dan Sosialisasi Digital marketing	Kelurahan Sadeng	Klasikal	20	21 November 2021

Sumber Data: BKPP Kota Semarang tahun 2021

- b. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari perekrutan CPNS Formasi tahun 2019 yang telah diangkat sebagai CPNS TMT 1

Desember 2020 dan melaksanakan tugas per tanggal 4 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
PENEMPATAN CPNS FORMASI TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG PADA KECAMATAN DAN
KELURAHAN

No	OPD	JML
1	Kecamatan Semarang Selatan	0
	Kelurahan Pleburan	1
	JUMLAH	1
2	Kecamatan Semarang Utara	1
	Kelurahan Bulu Lor	1
	Kelurahan Panggung Lor	2
	Kelurahan Panggung Kidul	1
	Kelurahan Purwosari	1
	Kelurahan Kuningan	1
	Kelurahan Bandarharjo	1
	Kelurahan Tanjung Mas	1
	Kelurahan Dadapsari	1
JUMLAH =	10	
3	Kecamatan Semarang Tengah	0
	Kelurahan Jagalan	2
	Kelurahan Kranggan	1
	Kelurahan Bangunharjo	1
	Kelurahan Kauman	1
	Kelurahan Gabahan	2
	Kelurahan Kembangsari	1
	Kelurahan Sekayu	1
	Kelurahan Pandansari	1
	Kelurahan Purwodinatan	1
	Kelurahan Pendrikan Kidul	1
	Kelurahan Pendrikan Lor	1
	Kelurahan Miroto	1
JUMLAH =	14	
4	Kecamatan Pedurungan	4
	Kelurahan Plamongansari	1
	Kelurahan Pedurungan Lor	2
	Kelurahan Kalicari	1
	Kelurahan Palebon	1
	Kelurahan Penggaron Kidul	1
	Kelurahan Tlogomulyo	1
	Kelurahan Tlogosari Wetan	1
Kelurahan Tlogosari Kulon	1	

No	OPD	JML
	Kelurahan Muktiharjo Kidul	1
	Kelurahan Pedurungan Tengah	1
	Kelurahan Gemah	1
	JUMLAH =	16
5	Kecamatan Gayamsari	4
	Kelurahan Pandean Lamper	1
	Kelurahan Tambakrejo	2
	Kelurahan Gayamsari	1
	Kelurahan Kaligawe	1
	Kelurahan Sawahbesar	1
	Kelurahan Sambirejo	1
	JUMLAH =	11
6	Kecamatan Genuk	4
	Kelurahan Sembungharjo	2
	Kelurahan Kudu	2
	Kelurahan Genuksari	2
	Kelurahan Banjardowo	2
	Kelurahan Gebangsari	2
	Kelurahan Trimulyo	2
	Kelurahan Bangetayu Kulon	2
	Kelurahan Bangetayu Wetan	1
	Kelurahan Karangroto	1
	Kelurahan Penggaron Lor	1
	Kelurahan Muktiharjo Lor	1
	Kelurahan Terboyo Kulon	1
	Kelurahan Terboyo Wetan	1
	JUMLAH =	24
7	Kecamatan Tembalang	0
	Kelurahan Mangunharjo	2
	Kelurahan Meteseh	1
	Kelurahan Jangli	1
	Kelurahan Tandang	1
	Kelurahan Kedungmundu	1
	Kelurahan Sendangguwo	1
	Kelurahan Sendangmulyo	1
	Kelurahan Sambiroto	1
	JUMLAH =	9
8	Kecamatan Banyumanik	1
	Kelurahan Sronдол Kulon	1
	Kelurahan Jabungan	2
	Kelurahan Banyumanik	1
	Kelurahan Pidakpayung	1
	Kelurahan Pedalangan	1
	Kelurahan Padangsari	1
	Kelurahan Sronдол Wetan	1
	Kelurahan Sumurboto	1

No	OPD	JML
	Kelurahan Ngesrep	1
	Kelurahan Tinjomoyo	1
	Kelurahan Gedawang	1
	JUMLAH =	13
9	Kecamatan Candisari	0
	Kelurahan Wonotingal	1
	Kelurahan Jatingaleh	1
	Kelurahan Kaliwiru	1
	Kelurahan Jomblang	1
	Kelurahan Candi	0
	Kelurahan Karanganyar Gunung	1
	JUMLAH =	5
10	Kecamatan Gajahmungkur	2
	Kelurahan Sampangan	1
	Kelurahan Petompon	2
	Kelurahan Bendan Ngisor	2
	Kelurahan Bendungan	2
	Kelurahan Gajahmungkur	1
	Kelurahan Karangrejo	1
	Kelurahan Lempongsari	1
	Kelurahan Bendan Duwur	1
	JUMLAH =	13
11	Kecamatan Gunungpati	4
	Kelurahan Kalisegoro	2
	Kelurahan Sukorejo	2
	Kelurahan Nongkosawit	2
	Kelurahan Pakintelan	1
	Kelurahan Gunungpati	1
	Kelurahan Ngijo	1
	Kelurahan Sadeng	1
	Kelurahan Mangunsari	1
	Kelurahan Plalangan	1
	Kelurahan Kandri	1
	Kelurahan Sumurejo	1
	Kelurahan Jatirejo	1
	Kelurahan Cepoko	1
	Kelurahan Sekaran	1
	Kelurahan Patemon	1
	Kelurahan Pongangan	1
	JUMLAH =	23
12	Kecamatan Ngaliyan	4
	Kelurahan Gondoriyo	3
	Kelurahan Kalipancur	2
	Kelurahan Bambankerep	2
	Kelurahan Podorejo	2
	Kelurahan Ngaliyan	1

No	OPD	JML
	Kelurahan Wates	2
	Kelurahan Bringin	1
	Kelurahan Purwoyoso	1
	Kelurahan Wonosari	1
	JUMLAH =	19
13	Kecamatan Mijen	4
	Kelurahan Bubakan	2
	Kelurahan Cangkiran	2
	Kelurahan Ngadirgo	3
	Kelurahan Polaman	2
	Kelurahan Purwosari	2
	Kelurahan Pesantren	2
	Kelurahan Karangmalang	1
	Kelurahan Tambangan	2
	Kelurahan Wonolopo	2
	Kelurahan Mijen	2
	Kelurahan Jatisari	1
	Kelurahan Jatibarang	1
	Kelurahan Kedungpane	1
	Kelurahan Wonoplumbon	1
	JUMLAH =	28

Sumber Data: BKPP Kota Semarang tahun 2021

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil di Pemerintah Kota Semarang, melalui manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki kewajiban meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen ASN yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen ASN telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia.

Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep *the right man on the right place* menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang dibentuk Berdasarkan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

Berdasarkan aturan tersebut di atas BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BKPP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;

- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra BKPP Kota Semarang

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPP Kota Semarang

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

3.2.2 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”**

3.2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”** selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, terdiri dari :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN).

Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu lima tahun tertuang kedalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional		Tujuan : Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	82,28	N/A	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Sasaran I: Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Nilai	80,30	N/A	80,60	80,90	81,20	81,50	81,50	81,50
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Sasaran II: Indeks Merit Sistem	Nilai	0,61	N/A	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66

Sumber Data: RENSTRA BKPP Kota Semarang tahun 2021

3.2.4 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021-2026 di susun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI			
MISI KE-V : Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pelayanan administrasi ASN BKPP
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN BKPP
		Meningkatkan akurasi database Kepegawaian	Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi informasi
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya	Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat dan sejenisnya
			Peningkatan dan pengembangan kelembagaan diklat
		Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur ASN	Peningkatan proses recruitment ASN
			Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir ASN
			Penguatan sistem reward and punishment ASN

Sumber Data: RENSTRA BKPP Kota Semarang tahun 2021

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Rencana Strategis.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”**

Tujuan tersebut memiliki kesepakatan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus mampu mewujudkan aparatur Pemerintah Kota Semarang yang bertindak secara profesional sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan Kota Semarang melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menentukan “Indeks Profesionalitas ASN” sebagai indikator tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”** selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu :

1. Sasaran ke-1 meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
2. Sasaran ke-2 meningkatnya sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Indeks Merit Sistem.

Selanjutnya strategi yang merupakan rumusan penjelasan langkah prioritas untuk mencapai sasaran adalah (1) Meningkatkan kelembagaan dan kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (2) Meningkatkan akurasi database Kepegawaian (3) Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya (4) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur ASN .

Kemudian dijabarkan melalui arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan pelayanan administrasi ASN BKPP, (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN BKPP, (3) Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi informasi, (4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi, (5) Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat dan sejenisnya, (6) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan diklat, (7) Peningkatan proses *recruitment* ASN, (8) Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir ASN,(9) Penguatan sistem *reward and punishment* ASN.

Dan untuk mewujudkan kebijakan tersebut berbagai langkah yang akan dan telah ditempuh BKPP antara lain:

1. Meningkatkan Sistem Rekrutmen Pegawai

Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pembenahan dalam sistem perekrutan pegawai. Sistem diawali dengan penyusunan pedoman pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi, perumusan dan penyusunan formasi yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai. Mekanisme ini akan menghasilkan acuan atau pedoman dalam pengadaan pegawai.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara dengan Jumlah Pelamar CPNS di Pemerintah Kota Semarang, 21.821 (dua puluh satu ribu delapan

ratus dua puluh satu) serta Jumlah Pelamar PPPK 3555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima). Pelaksanaan seleksi terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Seleksi Administrasi;
2. Tahap Seleksi Kompetensi Dasar;
3. Tahap Seleksi Kompetensi Bidang.

Peserta CPNS yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi adalah 1.155 Peserta dan 2.087 Peserta Calon PPPK. Sehingga para CASN ini yang nantinya diharapkan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai formasi tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, peningkatan sistem rekrutmen pegawai melalui usulan formasi Perangkat Daerah se-Kota Semarang diajukan kepada Walikota Semarang dengan mengajukan usul Persetujuan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Jawa Tengah. Mekanisme pengajuan usulan formasi tersebut dilakukan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu e-formasi.

Tujuan ditetapkan formasi adalah agar satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing satuan organisasi. Proyeksi kebutuhan pegawai yang dihasilkan akan menginformasikan jumlah pegawai yang dibutuhkan daerah untuk mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan kemanfaatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Penguatan peran BKPP dalam pelaksanaan seleksi calon peserta baik seleksi diklat teknis maupun diklat formal,

merupakan suatu kebutuhan dalam mendukung peran dan fungsi BKPP untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan profesionalisme aparatur. Banyaknya penawaran diklat dan beasiswa, dari berbagai lembaga penyelenggara diklat baik dalam maupun luar negeri memberikan peluang yang terbuka bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalitasnya, namun demikian, perlu diupayakan filter agar pilihan diklat dan peserta diklatnya tidak jauh berbeda dengan perencanaan diklat dan kebutuhan organisasi.

- 2) Pemberian kesempatan dan fasilitasi bantuan biaya tugas belajar dan diklat lain-lain untuk mengirimkan aparatur dalam pendidikan dan latihan baik yang bersifat kedinasan (gelar) maupun diklat teknis fungsional (non gelar) serta melakukan sosialisasi dan fasilitasi atas tawaran kerjasama penyelenggaraan diklat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Kota Semarang. Pengiriman aparatur dalam tugas belajar dan ikatan dinas dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan yang ada.
- 3) Pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi aparatur untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, kompetensi dan kinerja pegawai serta mendukung Pemerintah Kota Semarang. Pengiriman aparatur dalam pendidikan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi serta perubahan pola pikir, moral dan perilaku aparatur.
- 4) Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam implementasi peraturan perundangan di bidang kepegawaian, yaitu dalam rangka pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga tidak ada salah tafsir.
- 5) Pengembangan sumber daya Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan mewujudkan lembaga pengukuran kompetensi pegawai yang handal dan berdaya saing, dengan dilakukan berbagai macam pelatihan assessor, magang serta meningkatkan promosi.

3. Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensi

Pelaksanaan penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip “*menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat*” sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dimiliki. Penerapan prinsip ini memerlukan alat yang bisa mengenali kompetensi PNS dan alat untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS dalam Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi. Sedangkan penempatan dan distribusi PNS dalam jabatan mempertimbangkan hasil penilaian potensi sesuai rekomendasi hasil Tes Psikologi maupun hasil *Assessment Center* tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi dan keadilan. Rekomendasi ini mengacu pada analisis jabatan yang akuntabel terutama menyangkut kualifikasi pegawai meliputi pendidikan, diklat teknis serta penjurangan minat dan bakat pegawai. Penempatan seseorang dalam jabatan diharapkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, bakat, kemampuan, peminatan pegawai serta kebutuhan instansi. Pada masa mendatang, adanya rencana perubahan manajemen kepegawaian akan membawa konsekuensi pada penataan personil pada jabatan yang baru maupun pemenuhan kelembagaan yang terbentuk.

Peranan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan penilaian yang memadai. Pegawai yang akan ditempatkan dalam jabatan tertentu merupakan pegawai yang benar-benar telah diseleksi secara obyektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *merit system*.

Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala sebagai upaya penyegaran kerja dan peningkatan wawasan dan keahlian kerja. Rotasi pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelusuran kemampuan kerja dan keinginan setiap PNS sesuai prinsip *The Ability-Job fit and The Personality-Job Fit*. Untuk kepuasan dan efektivitas kerja perlu ada kesesuaian antara kemampuan dan jenis kepribadian kerja dengan kualifikasi pegawai yang akan dirotasi.

4. Mengembangkan pola karir PNS

Keberadaan pedoman dan *guidance* penyusunan pola karir secara nasional dan institutional perlu menjadi prioritas. Draft pola karir perlu dikembangkan dan dirumuskan sebagai pedoman pola karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pola karir akan menjadi pedoman atau *guidance* yang jelas tentang perjalanan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sejak menjadi CPNS sampai pensiun. Adanya pola karir yang jelas akan mendorong PNS untuk terus meningkatkan prestasi kerjanya.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

Dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, selama kurun waktu ini akan dilaksanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau *reward* bagi PNS sesuai dengan kerjanya.

Penghargaan lain bagi PNS berupa pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya (dengan perhitungan per 10, 20 dan 30 tahun masa kerja). Selain diberikan tunjangan tambahan penghasilan tersebut, selama kurun waktu 1-5 tahun juga diupayakan peningkatan kesejahteraan jasmani melalui pembinaan kegiatan olahraga bagi PNS, pelaksanaan *general check up*, pemberian bantuan uji kesehatan, pemberian bantuan perawatan yang sakit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemberian kesejahteraan jasmani dan pelayanan kesehatan bagi PNS merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang terhadap sumber daya aparaturnya.

6. Membentuk PNS yang berkarakter dan melestarikan budaya.

Pembentukan karakter PNS yang berbudaya dapat dimulai sejak CPNS pengembangan ketika sudah menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Sipil

Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya.
- Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Karakter ini dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa dan mendukung Daerah Kota Semarang dalam aspek sumber daya aparatur. Dukungan dalam aspek kebudayaan yakni dengan pengungkapan kembali kebudayaan lokal untuk pelestariannya di lingkungan PNS Pemerintah Kota Semarang.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian terintegrasi

Sistem Informasi Kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan di bidang kepegawaian. Data dan informasi kepegawaian yang akurat dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepegawaian. Perencanaan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang melalui sistem informasi SIMPATIK yang memberikan pelayanan kepegawaian terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, Sistem Informasi Kepegawaian akan dikembangkan secara bertahap agar sesuai pemanfaatannya. Sehingga sistem ini akan mampu menyediakan informasi yang akurat serta *up to*

date bagi pengambilan kebijakan. Beberapa aplikasi kepegawaian yang telah ada saat ini seperti:

Website : <https://simpatik.semarangkota.go.id> memberikan pelayanan kepegawaian terintegrasi sebagai berikut:

1. SISDM

Sistem Informasi untuk mengelola data kepegawaian. Merupakan pusat data dan dokumentasi riwayat kepegawaian setiap pegawai yang akan digunakan sebagai dasar data dan dokumen bagi layanan kepegawaian lainnya.

2. E-KINERJA

Aplikasi untuk membuat laporan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021, baik secara laporan harian, bulanan dan tahunan. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

3. E-TPP

Aplikasi untuk pengajuan dan pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai. Data pegawai terintegrasi dari SISDM dan E-KINERJA.

4. SILK

Aplikasi untuk pengajuan dan pengelolaan Layanan Kepegawaian. terdiri dari:

a. SINAGA

Aplikasi pengusulan, penjagaan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala. Data pegawai terintegrasi dari SISDM. Sedang diupgrade untuk bisa Tanda Tangan Elektronik untuk Surat Pemberitahuan KGB bertanda tangan Kepala BKPP Kota Semarang dan Sekretaris Daerah dan terintegrasi dengan Aplikasi Tantekepo (Tanda Tangan Elektronik Kepegawaian Onsystem). Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>, rencana akan diupgrade notifikasi pengingat pengusulan dan status verifikasi melalui Whatsapp PNS yang bersangkutan.

b. SIPIJAR

Aplikasi pengusulan dan pembuatan Surat Ijin Belajar. Data pegawai terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website

bkpp.semarangkota.go.id, rencana akan diupgrade notifikasi status verifikasi melalui Whatsapp PNS yang bersangkutan dan akan diintegrasikan secara efektif dengan Aplikasi Tantekepo.

5. E-DISIPLIN

Aplikasi untuk pelaporan disiplin dan kehadiran pegawai pada kondisi dan saat tertentu. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

6. E-KENAIKAN PANGKAT

Aplikasi untuk pengusulan Kenaikan Pangkat untuk diajukan ke BKN melalui Aplikasi SAPK dan Docudigital. Data dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id> dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan ke e-mail PNS yang bersangkutan. Rencana akan diupgrade dengan notifikasi pengingat pengusulan dan verifikasi via Whatsapp.

7. E-FUNGSIONAL

Aplikasi untuk pengusulan dan pembuatan lampiran SK dan Petikan SK Kenaikan Jabatan, Pengangkatan Dalam Jabatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>. Rencana akan diupgrade pemberitahuan notifikasi via Whatsapp dan juga efektivitas tanda tangan elektronik.

8. E-PENSIUN <baru>

Aplikasi untuk penjagaan dan pengusulan pensiun untuk diajukan ke BKN melalui SAPK dan Aplikasi Semar. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diupgrade dengan cek status verifikasi di website <https://bkpp.semarangkota.go.id> dan notifikasi pengingat pengusulan dan verifikasi Whatsapp.

9. E-UJIAN DINAS

Aplikasi untuk mendaftar Ujian Dinas. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diupgrade notifikasi Whatsapp.

10. SIGELAR

Aplikasi pengusulan dan pembuatan Surat Ijin Penggunaan Gelar. Data Pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diintegrasikan secara efektif dengan Tantekepo dan notifikasi Whatsapp.

11. E-CUTI <baru>

Aplikasi untuk pengajuan izin cuti. <masih dalam tahap reviu dan pengembangan>. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diintegrasikan secara efektif dengan Tantekepo dan notifikasi Whatsapp.

12. SIKAPUAS <baru>

Aplikasi pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami untuk diusulkan ke BKN Kanreg 1 Yogyakarta melalui Aplikasi Semar. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>. Rencana akan diupgrade pemberitahuan notifikasi via Whatsapp.

13. SISKA <baru>

Sistem Informasi Kompetensi Aparatur. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

14. SIPETE <baru>

Learning Management System (LMS) yang dapat mengakomodir semua kebutuhan media pembelajaran dalam 1 aplikasi Untuk memperoleh pelayanan pendaftaran diklat secara cepat dan lebih efisien, sebagai literasi digital bagi ASN di Pemerintah Kota Semarang dan memberikan kemudahan layanan (Pendaftaran Pra Diklat Online, Absensi Online, Mengakses Materi, Mengelola Aktivitas Pembelajaran) bagi Penyelenggara, Peserta Diklat dan Widya Iswara.

Selain itu terdapat layanan kepegawaian pendukung yang juga telah terintegrasi antara lain:

1. Website <https://bkpp.semarangkota.go.id>
2. CAT BKPP

Aplikasi Computer Assisted Test sebagai media tes/ujian pegawai berbasis komputer. Dapat diakses melalui alamat website <http://cat.bkpp.semarangkota.go.id>

3. sinona.semarangkota.go.id <baru>
Aplikasi pusat data pegawai kontrak Pemerintah Kota Semarang.
4. Aplikasi Presensi berbasis Android
Aplikasi presensi menggunakan handphone android bagi setiap pegawai, dengan pelacakan GPS. Juga dapat digunakan ketika WFH. Fitur pengenalan wajah sedang dalam tahap pengembangan.
5. Daftar Pegawai
Publik dapat mengakses keterbukaan informasi daftar pegawai melalui link website <https://data.scymark.semarangkota.go.id> atau <http://smartcity.semarangkota.go.id/DaftarPns>.
6. Statistik Pegawai
Informasi statistik pegawai dapat diakses melalui link website <https://sisdm.semarangkota.go.id/publik/statistik>
7. Tantekepo
Aplikasi pengajuan Tanda Tangan Elektronik Kepegawaian Onsystem (TTE) melalui website <https://tantekepo.semarangkota.go.id>
8. Pemantauan Covid
9. Pelaporan Pegawai terkena COVID-19
10. Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengangkatan CPNS ke PNS
11. Aplikasi Mutasi Internal antar OPD
12. Laporan data Mutasi PNS Keluar Pemerintah Kota Semarang
13. Laporan data PNS Tugas Belajar
14. Laporan data PNS Meninggal
15. Laporan data PNS CLTN
16. Laporan data Satya Lencana
17. Laporan data Hukuman Disiplin
18. ADAGADIS
Pengolahan data Penegakan Disiplin (sidak)
19. <https://panseljpt.semarangkota.go.id>
Website informasi dan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

20. E-BAPERJAKAT

Aplikasi pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural.

21. PIK

Papan Informasi Kegiatan melalui website
<http://pik.bkpp.semarangkota.go.id>

22. E-OFFICE

Aplikasi administrasi surat masuk dan disposisi internal BKPP melalui website

23. UKPPI

Cek kelengkapan dokumen persyaratan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. e-file, e-sisdm, e-kin, e-tp, e-silk telah diintegrasikan melalui jalur aplikasi simpatik. Dimana aplikasi simpatik ini menjadi gerbang awal menuju aplikasi-aplikasi tersebut sehingga hanya dengan 1 (satu) username dan 1 (satu) password dapat mengakses semua aplikasi tersebut.

8. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja

Lembaga pengukuran kompetensi di daerah lain telah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini memacu lembaga sejenis untuk senantiasa mengembangkan diri untuk meraih pangsa pasar dan menghadapi persaingan. Tahap awal perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya diikuti dengan pembenahan manajemen, pembenahan metode pemasaran agar efektif serta mengembangkan jejaring untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Pembenahan manajemen dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Sebagai bahan pengambilan kebijakan, produk pengukuran kompetensi dituntut memiliki tingkat akurasi, relevansi dan kehandalan yang tinggi. Pengembangan UPTB Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diupayakan melalui kaderisasi dan peningkatan kualitas SDM, pengembangan alat ukur, peningkatan sarana prasarana serta penguatan jejaring kemitraan dengan daerah lain secara bertahap dan berkelanjutan.

9. Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat

Adanya kesenjangan dalam penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat bagi PNS merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Perbaikan pelayanan senantiasa harus dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi intensif dengan BKN RI maupun BKN Regional sebagai mitra kerja dalam penyelesaian kenaikan pangkat PNS. Untuk mempertahankan konsistensi pelayanan, perlu penjagaan *bezeeting* yang terintegrasi antar instansi disertai optimalisasi fungsi Sistem Informasi Kepegawaian yang sudah ada. Pada fase ini akan dioptimalkan peran Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk mendukung layanan kenaikan pangkat bagi PNS. Pemanfaatan Sistem yang didukung oleh akurasi data kepegawaian yang terintegrasi akan memudahkan proses layanan. Sehingga diharapkan semua usulan KP dapat selesai pada waktunya.

Pemberian kenaikan pangkat bagi PNS pada masa mendatang akan lebih mempertimbangkan kualifikasi persyaratan jabatan formasi dan kebutuhan organisasi, artinya seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam pangkat dan golongan lebih tinggi dapat diangkat selama formasinya ada dan memungkinkan, untuk mendukung hal ini, ke depan akan disusun persyaratan dan kualifikasi jabatan pada setiap jenis jabatan dengan mensyaratkan golongan dan pangkat yang ditentukan sesuai dengan beban kerjanya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan kedepan komposisi PNS yang belum ideal, diharapkan secara bertahap mendekati ke bentuk idealnya.

Sementara itu, keterlambatan SK pengangkatan bagi PNS golongan IV/c ke atas dikarenakan birokrasi dari BKN RI dan juga koordinasi ke Sekretariat Negara memang prosesnya lebih lama. Keterlambatan ini sendiri sudah diantisipasi dengan pengajuan lebih awal, namun kendala keterlambatan ini belum sepenuhnya bisa dihindari tapi keterlambatan hanya bisa dikurangi.

10. Meningkatkan Pengelolaan Pensiun PNS

Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian menjadi salah satu penyebab masih adanya kesenjangan dalam penyelesaian pensiun PNS/PTT. Perlu *bezeeting* PNS calon pensiun secara akurat sehingga terinformasikan data semua pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pensiun yang akan merugikan pegawai calon pensiun. Pemanfaatan SAPK juga sangat mendukung layanan pengelolaan pensiun bagi PNS.

Pembekalan bagi PNS calon pensiun akan dilaksanakan secara reguler dan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun. Pembekalan reguler dititikberatkan pada pemberian pengetahuan pada aspek administratif dan psikologis PNS calon pensiun. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan administrasi berkaitan dengan dokumen kelengkapan pensiun serta diberikan wawasan lain sebagai bekal kesiapan menghadapi masa purna tugas. Sedangkan pembekalan kewirausahaan dilakukan dengan penjaringan minat dan bakat pegawai calon pensiun. Pelaksanaan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun diharapkan sesuai dengan minat dan ketertarikan pegawai calon pensiun yang tentunya akan berguna sebagai bekal pegawai untuk menghadapi masa pensiunnya. Pada kurun waktu tertentu akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan ini.

11. Meningkatkan Sarana Prasarana

Gedung Diklat yang telah difungsikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan PNS. Saat ini terus dilakukan penambahan fasilitas seperti asrama, ruang makan maupun ruang terbuka hijau serta pemanfaatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari persewaan per kamar dengan target pendapatan pada tahun ini sebesar Rp. 44.000.000,-.

3.3. Program dan Kegiatan

Berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD Kota Semarang, disamping kegiatan rutin maka BKPP Kota Semarang juga melaksanakan program yang berwujud sebagai proyek pembangunan yang bersifat non fisik dengan didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tertuang bahwa penyesuaian nomenklatur program kegiatan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2022 sebanyak 3 program 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7.3. Pemeliharaan Mebel
- 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Kepegawaian Daerah

- 8. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian ASN.
 - 1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN;
 - 1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - 1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - 1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian
- 9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.
 - 9.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 9.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 9.3. Pengelolaan Promosi ASN
- 10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.
 - 10.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - 10.2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 10.3. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - 10.4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 11.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 11.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 11.3. Pembinaan Disiplin ASN
 - 11.4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - 11.5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

12. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

12.1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

12.2. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

12.3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

12.4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

13. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

13.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Lokasi Program dan Kegiatan :

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2022 menjalankan 50 Sub Kegiatan, 13 Kegiatan dan 3 Program, dilaksanakan di Kota Semarang, dengan Jumlah Belanja sebesar Rp. 36.482.718.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Adapun rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar 34.579.248.679 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- b. Belanja Modal sebesar 1.903.469.321 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3:

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN					26.694.710.466					26.694.710.466
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					9.674.001.291	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		9.674.001.291
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen					239.43 Persen	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen					99.00 Persen	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen					99.00 Persen	
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen		Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	81.00 Persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen					19.19 Persen	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen					100.00 Persen	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	2.235.951.478
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520				300.00 Orang	51.405.520
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku	Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku					3.00 Buku	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100				12000 Orang	1.517.957.100
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381				150 Orang	417.997.381
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK	Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK					743 SK	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429				3 aplikasi	125.026.429

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048				1000 Orang	123.565.048
		Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang					1000 Orang	
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang	Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang					1000 Orang	
		Layanan update data pegawai	10000 Orang	Layanan update data pegawai	10000 Orang					10000 Orang	
		Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang	Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang					10000 Orang	
		Layanan kartu pegawai	300 Orang	Layanan kartu pegawai	300 Orang					300 Orang	
		Layanan cetak id card	1150 buah	Layanan cetak id card	1150 buah					1150 buah	
		Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang					8.00 Orang	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Kegiatan	3.147.966.060
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000				1.00 Kali	578.084.000
		Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan	Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan	Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan	Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770				2.00 Kali	465.387.770
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan					6.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan					4.00 Bulan	
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan	Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan					4.00 Kegiatan	
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan					4.00 Bulan	
		Penyelesaian adminstrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan	Penyelesaian adminstrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290				1.00 Kegiatan	2.104.494.290
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan	Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan	Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan	Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan	Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan	Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan	Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan					4.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	2.794.495.753
5.03.02.2.03.01		Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813				300.00 Orang	1.175.733.813

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100.00 Orang	Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100.00 Orang					100.00 Orang	
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450				12.00 Bulan	1.242.565.450
		Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan	Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang				6.00 Orang			
		Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan				1.00 Kegiatan			
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960			1.00 Kegiatan	266.577.960		
		Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				3.00 Kegiatan			
		Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan	Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				2.00 Kegiatan			
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				3.00 Kegiatan			
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				3.00 Kegiatan			
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				3.00 Kegiatan			
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				3.00 Kegiatan			
		Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				3.00 Kegiatan			
				Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530			20.00 Orang	109.618.530
		5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang				15.00 Orang	
Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang	600.00 Orang			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang	600.00 Orang				600.00 Orang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		jabatan fungsional PNS		jabatan fungsional PNS							
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang					1000.00 Orang	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	1.495.588.000
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276				2.00 Kegiatan	285.220.276
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan	Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685				12.00 Bulan	771.598.685
		Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali	Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali					22.00 Kali	
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang	Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang					20.00 Orang	
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang	Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang					30.00 Orang	
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam	Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam					200.00 Piagam	
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas	Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas					40.00 berkas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang					9.00 Orang	
		Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan	Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Verifikasi e-cuti	250.00 berkas	Verifikasi e-cuti	250.00 berkas					250.00 berkas	
		Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas	Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas					50.00 berkas	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210				80.00 Kegiatan	350.864.210
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan	Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan					5.00 Kegiatan	
		Pelepasan haji	1.00 Kegiatan	Pelepasan haji	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Bimbingan mental	10.00 Kegiatan	Bimbingan mental	10.00 Kegiatan					10.00 Kegiatan	
		Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan	Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan	Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan	Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	71.111.430				65.00 Orang	71.111.430
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus	Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus					2.00 Kasus	
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan					12.00 Kegiatan	
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen	Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen					24.00 Dokumen	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemrosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	Pemrosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399				28.00 Kasus	16.793.399
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					8.605.345.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		8.605.345.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8.605.345.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		8.605.345.000
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen					40.00 Persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	1.694.660.000
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020				1.00 Kegiatan	68.573.020
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880				1.00 Kegiatan	289.336.880
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000				621.00 Orang	1.197.480.000
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100				1.00 Kegiatan	139.270.100
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan	Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	6.910.685.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000				1000.00 Orang	6.910.685.000
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang					3.00 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang					30.00 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang					90.00 Orang	
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang	Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang					35.00 Orang	
X.XX	NON URUSAN						Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.883.123.184	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		16.883.123.184
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan,	100.00 Persen	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan,	100.00 Persen					100.00 Persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah		penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah							
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen	Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen					100.00 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.176.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	82 Nilai	31.176.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	3.040.380				2.00 Dokumen	3.040.380
		Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen	Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen					1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	6.805.030				1.00 Dokumen	6.805.030
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen					1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520				3.00 Dokumen	4.179.520
X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Kegiatan	12.031.789.226
X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466				12.00 Bulan	11.672.312.466
X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000				12.00 Bulan	357.095.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480				1.00 Dokumen	596.480
X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200				2.00 Dokumen	695.200
X.XX.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080				2.00 Dokumen	1.090.080
X.XX.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Kegiatan	-
X.XX.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991				115.00 Orang	137.585.991
X.XX.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 Kegiatan	1.674.090.466
X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170				12 Bulan	55.585.170
X.XX.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200				12 Bulan	268.844.200
X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200				12 Bulan	99.229.200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550				12 Bulan	101.144.550
X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060				12 Bulan	1.940.060
X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500				12 Bulan	100.732.500
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan					12 Bulan	
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692				12 Bulan	377.229.692
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094				12 Bulan	669.385.094
X.XX.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	106.837.850	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	106.837.850
X.XX.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850				12 Bulan	106.837.850

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	1.894.145.407
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759				12 Bulan	459.402.759
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848				12 Bulan	329.057.848
		Perbaiki peralatan kerja	12 Bulan	Perbaiki peralatan kerja	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800				12 Bulan	1.105.684.800
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Kegiatan	1.145.083.435
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180				12 Bulan	40.313.180
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239				12 Bulan	509.651.239

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630				12 Bulan	73.696.630
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386				12 Bulan	521.422.386

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana kerja dibuat terkait dengan visi misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2023. Renja diharapkan bisa dijadikan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan organisasi dan Pemerintah Kota Semarang.

Penyusunan Renja tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2022 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023, semoga apa yang tertuang didalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Semarang.

BAB I PENDAHULUAN

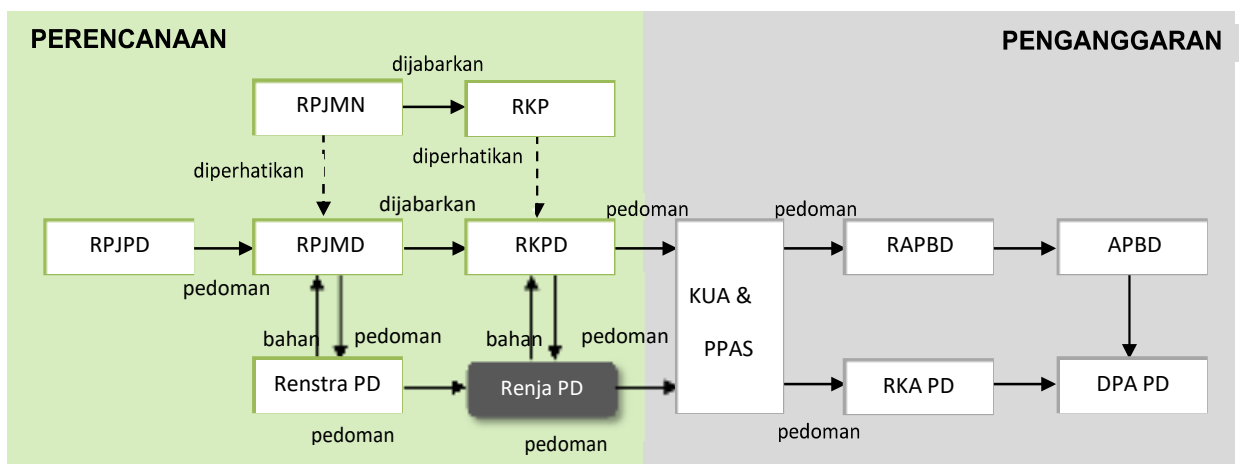
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerha Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD (Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor

- 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang Kota Semarang;

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44) .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Inspektorat Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 25.353.452.000 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 17.557.735.973 atau sebesar 76,54 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Inspektorat Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Inspektorat Kota Semarang

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Inspektorat Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 OPD Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) Urusan, 3 (tiga) Program dan ... Indikator Kinerja Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dengan Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari Indikator kinerja program, terdapat Indikator yang melampaui target, Indikator memenuhi target, serta Indikator tidak memenuhi target (bila ada).
 - c) Dari... Inidkator kinerja kegiatan, seluruh
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan,.... Program dengan indikator program dankegiatan dengan indikator
 - b) Dari ... indikator kinerja program, terdapat ... indikator yang dipekrirakan dapat melampaui target, Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta Inidkator yang masih dalam proses pencapian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari indikator kinerj akegiatan, terdapat indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, Indikator masih dalam proses serta ... Indikator tidak dapat memenuhi Renstra (bila ada).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Inspektorat Kota Semarang
Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.722.459.530	20.367.136.532	93,76	1.355.322.998
	Belanja Tidak Langsung	9.497.618.000	8.880.082.180	93,50	617.535.820
	Belanja Pegawai	9.497.618.000	8.880.082.180	93,50	617.535.820
1	Gaji dan Tunjangan	4.372.143.000	4.211.282.680	96,32	160.860.320
2	Tambahan Penghasilan PNS	5.125.475.000	4.668.799.500	91,09	456.675.500
	Belanja Langsung	12.224.841.530	11.487.054.352	93,96	737.787.178
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.753.061.530	2.494.575.812	90,61	258.485.718
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	211.000	21,10	789.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000	11.332.470	90,66	1.167.530
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	14.000.000	12.663.250	90,45	1.336.750
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.500.000	11.191.419	89,53	1.308.581
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	31.341.900	78,35	8.658.100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.811.530	19.267.150	64,63	10.544.380
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000	726.000	19,36	3.024.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	5.857.750	39,05	9.142.250
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.070.300	71,35	429.700
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30.000.000	23.479.700	78,27	6.520.300
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.220.000.000	2.129.055.714	95,90	90.944.286
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	263.000.000	143.600.000	54,60	119.400.000
13	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	80.000.000	77.443.659	96,80	2.556.341
14	Pengelolaan Sistem Informasi	30.000.000	27.335.500	91,12	2.664.500
B	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	365.030.000	319.187.123	87,44	45.842.877
1	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	108.630.000	106.167.120	97,73	2.462.880
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	250.000.000	206.620.003	82,65	43.379.997
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	6.400.000	6.400.000	100,00	0
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	153.000.000	152.786.500	99,86	213.500
1	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	153.000.000	152.786.500	99,86	213.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	293.250.000	284.830.500	97,13	8.419.500
1	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	277.250.000	275.349.000	99,31	1.901.000
2	Penyusunan LKPJ SKPD	3.000.000	2.432.500	81,08	567.500
3	Penyusunan LAKIP	1.500.000	1.409.500	93,97	90.500
4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	1.500.000	912.500	60,83	587.500
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.000.000	70.750	7,08	929.250
7	Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	150.000	15,00	850.000
8	Penyusunan Renja Skpd	2.000.000	910.000	45,50	1.090.000
9	Penyusunan RKA Skpd dan DPA Skpd	6.000.000	3.596.250	59,94	2.403.750
E	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.953.000.000	1.859.688.777	95,22	93.311.223
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	1.953.000.000	1.859.688.777	95,22	93.311.223
F	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.046.500.000	1.034.153.300	98,82	12.346.700
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	390.500.000	380.676.600	97,48	9.823.400
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	656.000.000	653.476.700	99,62	2.523.300
G	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.160.500.000	2.036.677.135	94,27	123.822.865
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.160.500.000	2.036.677.135	94,27	123.822.865
H	Program Penelitian dan Pengembangan	1.362.500.000	1.320.852.700	96,94	41.647.300
1	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	400.000.000	395.663.800	98,92	4.336.200
2	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	385.000.000	377.515.650	98,06	7.484.350
3	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	577.500.000	547.673.250	94,84	29.826.750
I	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	2.138.000.000	1.984.302.505	92,81	153.697.495
1	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	648.000.000	624.447.504	96,37	23.552.496
2	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	80.000.000	71.443.534	89,30	8.556.466
3	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)	70.000.000	63.858.413	91,23	6.141.587
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	1.340.000.000	1.224.553.054	91,38	115.446.946
URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		21.722.459.530	20.367.136.532	93,76	1.355.322.998

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 11 kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang adalah sebesar Rp. 22.939.096.283. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 17.557.735.973 dengan sisa sebesar Rp. 5.381.360.310 (23,46%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp. 19.011.956.699 dengan realisasi sebesar Rp. 14.241.870.674 (74,96%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.760.086.025 (25,04%)
- b. **Belanja Modal**, anggaran sebesar Rp. 3.927.139.584 dengan realisasi sebesar Rp. 3.305.865.299 (84,18%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 621.274.285 (15,82%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Semarang Sampai Dengan
Tahun 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 98,50%.

b. Sasaran “**Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan**” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 107,38% dari target sebesar 90,50% (capaian sebesar 118,65%);
- 2) Indikator “Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu” belum dapat mencapai target sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 99,68% (capaian sebesar 99,68%);
- 3) Indikator “Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 92,14% dari target sebesar 85,00% (capaian sebesar 108,40%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan OPD dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Inspektorat Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

Dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,91 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 98,91 %; dimana 274 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 hanya dapat terakomodir sejumlah 271 program pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 (3 program tidak dapat terakomodir). Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penyesuaian anggaran, sehingga terdapat 2 program yang ditunda pelaksanaannya. Sementara 1 program yang lain tidak dilaksanakan karena output dari kegiatan pada program tersebut disinergikan dengan output pada kegiatan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen

perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Usulan	Usulan					4.567	4.235		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					3.390	3.182		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	71,00	72,00	73,00	74,00	74,23	75,14	75,00	75,00

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 75,14 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2018 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 74,23 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan
Tahun 2021

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran pengawasan yang memadai sesuai dengan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2020; dan
- b. Dukungan dari Bapak Walikota Semarang, Ibu Wakil Walikota Semarang, serta Sekretaris Daerah yang fokus pada pembenahan birokrasi, pendampingan/asistensi kegiatan OPD, serta pencegahan korupsi.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya:

- a. Terjadi refocusing anggaran guna penanganan Covid-19, dan
- b. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena masa pandemi sehingga terdapat pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi untuk mencegah penularan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik guna mendukung penanganan Covid-19, serta adaptasi kebiasaan baru; dan
- b. Melaksanakan asistensi/pendampingan, pemeriksaan, serta kegiatankegiatan lainnya dengan mematuhi protokol kesehatan, serta beradaptasi dengan era new normal.

Disamping permasalahan – permasalahan yang ada, terdapat pula peluang – peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Semarang, yaitu :

- a. Tersedianya anggaran pengawasan yang memadai sesuai dengan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2020;
- b. Dukungan dari Bapak Walikota Semarang, Ibu Wakil Walikota Semarang, serta Sekretaris Daerah yang fokus pada pembenahan birokrasi, pendampingan/asistensi kegiatan OPD, serta pencegahan korupsi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:

- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi

- 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah

- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Inspektorat Kota Semarang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Inspektorat juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Inspektorat, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Inspektorat Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6

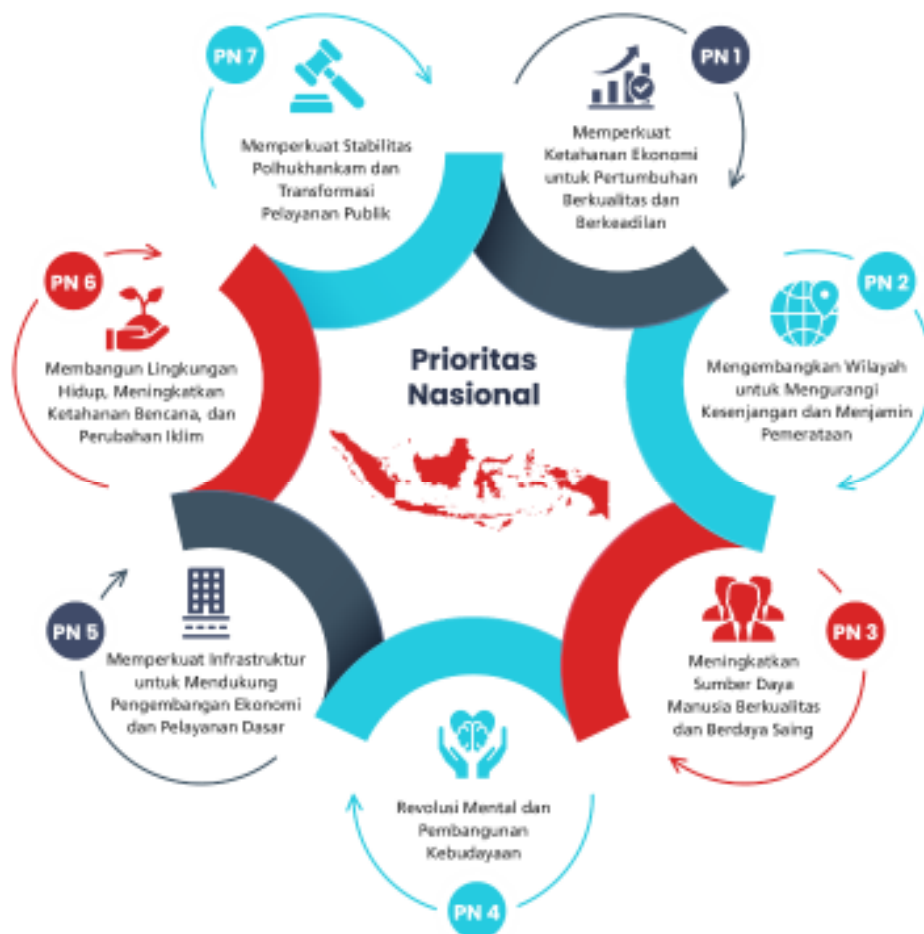
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Inspektorat Kota Semarang**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, OPD Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

"Mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel",

dengan indikator tujuan **"Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Semarang yaitu **"Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel"**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai Maturitas SPIP
- b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko
- c. Level Kapabilitas APIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA
Mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,04
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	2
	Level Kapabilitas APIP	3

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Inspektorat Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah. Namun secara khusus, Inspektorat Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Indeks Reformasi Birokrasi**" dan indikator sasaran "**Opini BPK**";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 2 (dua) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 14 (empat belas) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.889.644.124 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin) sebesar Rp. 19.914.295.601
 - b. Program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan sebesar Rp.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024 Inspektorat Kota Semarang

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja;
3. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh APIP. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

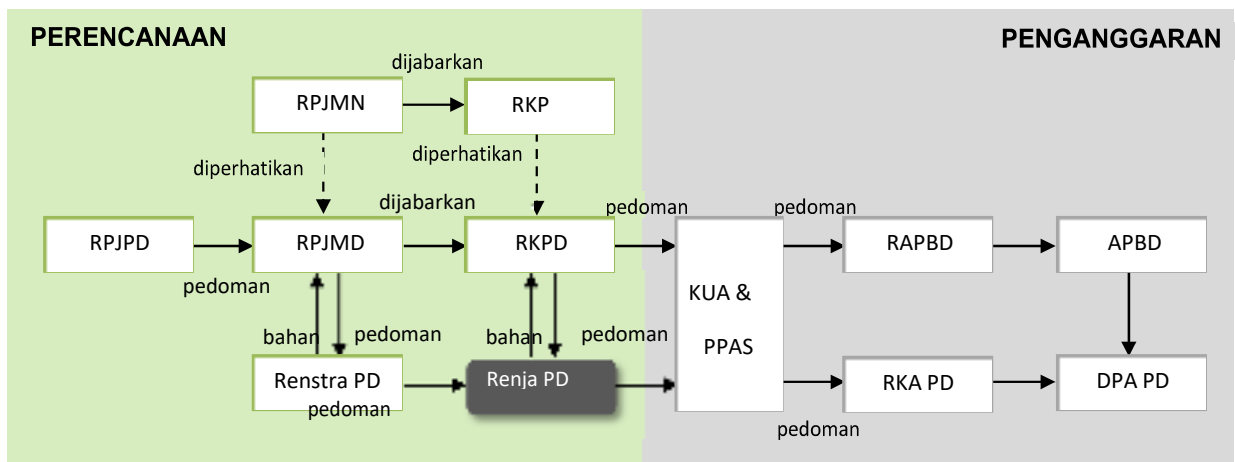
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima ahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerha Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Selatan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan

Semarang Selatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan.



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Semarang Selatan melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 36.557.072.011,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 31.711.282.185,- atau sebesar 86,74%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100%	100%	100%	100%	100%			
		- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100%	100%	100%	100%	100%			
		- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (2022)	100%					100%	100%	100%
			100%							

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100% (2022)	100%					100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD % (2022)						100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100%
		- Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	89.07 %	89.07%	100 %	100 %	100 %
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (2022)	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	88.94 %	88.94 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	100 %	94.77 %	94.77 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 dokumen	1 dokumen	100 %
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3853 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	2833 orang	2833 orang	100 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		Koordinasi penunjang tugas kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %			
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	229 kegiatan					229 kegiatan	229 kegiatan	100 %
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100 %
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	langganan rekening telpon, air, listrik dan koran kantor	100	100 %	100 %	100 %	100 %			
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis					13 jenis	13 jenis	100 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	50 unit					50 unit	50 unit	100 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100 %
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		rumah dinas yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100 %
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 %	95 %	95%	89%	93%	95 %	100 %	100 %
		Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan (2021)	95%	95%	95%	95%	100 %			
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) (2021)	95 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	100 %			
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Semarang Selatan) (2021)	477561 pelayanan	477561 pelayanan	477561 pelayanan	477561 pelayanan	100 %			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1	1	1	100 %	1 angka	1 angka	100 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %			
			7 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	100 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65 %	66 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	300 kegiatan	300 kegiatan	300 kegiatan	317 kegiatan	105 %			
		Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	8 kegiatan	80 %			
		Persentase jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	72 %	72 %			
		Persentase Jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %			
		Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan sekecamatan	50 %	50 %	50 %	42 %	84 %			
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan					4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2022)	100 %					100 %	100 %	100 %
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang(Semarang Selatan) (2021)	55%	55%	55%	48,6%	88 %			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	327 kegiatan	327 kegiatan	327 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	82 kegiatan	82 kegiatan	82 kegiatan	100 %	368 kegiatan	368 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bulustalan	12 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	10 paket	10 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Barusari	14 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	17 paket	17 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Randusari	14 paket	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	100 %	14 paket	14 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mugassari	12 paket	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	9 paket	9 paket	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pleburan	14 paket	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	100 %	16 paket	16 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Wonodri	12 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	9 paket	9 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Peterongan	11 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	10 paket	10 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Lamper Lor	15 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	13 paket	13 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Lamper Kidul	14 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	9 paket	9 paket	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	14 paket	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	15 paket	15 paket	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
		Kecamatan dan Kelurahan Lamper Tengah								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	32 kegiatan	32 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	22 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	22 kegiatan	22 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	19 kegiatan	19 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	20 kegiatan	20 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	19 kegiatan	19 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	19 kegiatan	19 kegiatan	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	19 kegiatan	19 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	17 kegiatan	17 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	17 kegiatan	17 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	20 kegiatan	20 kegiatan	100 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	18 kegiatan	18 kegiatan	100 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100 %
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
		Jumlah kegiatan lembaga - kemasyarakatan kelurahan (LPMK dn PKK)	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	74 kegiatan	88 %			
		Jumlah pembinaan, Monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %			
		Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	80 %	80 %	80 %	72 %	90 %			
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	100 %
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran - Ketentraman dan Ketertiban Umum (2022)	30 %					10 %	6%	60 %
		Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT (2021)	90%	90%	90%	83,2%	92,4%			
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	25	25	25	100 %	68 angka	39 angka	50 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	30 %	30 %	30 %	34 %	113%			
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (2022)	50 kegiatan					50 kegiatan	50 kegiatan	100 %
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (2022)	100 persen					100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan (2022)	4 kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (2022)	10 kegiatan					10 kegiatan	10 kegiatan	100 %

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (empat) Program dengan 9 (sembilan) Indikator Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan 82 (delapan puluh dua) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

b) Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 6 indikator memenuhi target, serta 1 indikator tidak memenuhi target.

Di tahun 2021 penyebaran covid-19 berkurang secara berangsur-angsur. Hal tersebut membuat pelaksanaan kembali *work form office* sehingga Kecamatan Semarang Selatan dapat memenuhi target kegiatan administrasi yang berkaitan dengan dokumen pelaporan, pemeliharaan SKPD, dan pembuatan inovasi.

c) Dari 12 kegiatan, terdapat 11 kegiatan yang memenuhi target, serta 1 kegiatan tidak memenuhi target. Sedangkan dari 82 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, 66 indikator memenuhi target, serta 13 indikator tidak memenuhi target. Indikator yang melebihi target adalah jumlah pelayanan administratif di Kecamatan dan Kelurahan.

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 5 (lima) Program dengan 7 (tujuh) Indikator Program, 12 (dua belas) Kegiatan dengan 14 (empat belas) indikator sub kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan 68 (delapan puluh dua) Indikator Kinerja Sub Kegiatan

b) 7 indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renja 2022.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi pada Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021

SKPD : KECAMATAN SEMARANG SELATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
Urusan Wajib Kewilayahan	36.557.072.011	31.711.282.185	86,74%

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021

No	Kode Rekening	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih Anggaran (Rp)
		URUSAN KEWILAYAHAN				
		Belanja Tidak Langsung	11.088.424.011	9.875.715.083	89.06%	1.212.708.928
		<i>Belanja Pegawai</i>				
		Gaji dan Tunjangan	4.259.529.810	4.074.824.458		184.705.352
		Tambahan	6.591.254.201	5.575.670.625		1.015.583.576
		Honorarium PNS	237.640.000	225.220.000		12.420.000
		Belanja Langsung	25.468.648.000	21.835.567.102	85.73	3.633.080.898
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.377.532.071	10.667.852.769	79.74	2.709.679.302
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.550.000	12.592.000	71.75	4.958.000
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.650.000	3.650.000	100.00	0
2	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.650.000	1.650.000	100.00	0

No	Kode Rekening	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih Anggaran (Rp)
3	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.650.000	0	00	1.650.000
4	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.650.000	0	00	1.650.000
5	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.650.000	0	00	1.650.000
6	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.650.000	3.647.000	99.92	30.000
7	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.650.000	3.645.000	99.86	5.000
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.093.724.011	9.881.010.083	89.07	1.212.713.928
8	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.850.784.011	9.650.495.083	88.94	1.200.288.928
9	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.640.000	225.220.000	94.77	12.420.000
10	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.650.000	100,00	
11	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.650.000	3.645.000	99.86	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.850.060	246.233.362	22.29	858.616.698
12	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.300.000	11.000.000	89.43	1.300.000
13	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.580.060	75.000.000	94.24	4.580.060
14	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.700.000	18.902.200	48.84	19.797.800
15	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.770.000	6.487.162	24.23	20.282.838
16	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.000.000	28.650.000	39.79	43.350.000
17	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	15.360.000	51.20	14.640.000
18	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	845.500.000	90.834.000	0,46	754.666.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.300.000	43.317.000	57.53	31.983.000
19	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.300.000	43.317.000	57.53	31.983.000
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.500.000	40.171.661	46.98	45.328.339

No	Kode Rekening	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih Anggaran (Rp)
20	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.500.000	40.171.661	46.98	45.328.339
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.608.000	444.528.663	44.43	556.079.337
21	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.858.000	96.556.063	46.68	110.301.937
22	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.950.000	10.985.000	05.44	190.965.000
23	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	493.850.000	317.279.700	64.25	176.570.300
24	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.950.000	19.707.900	20.12	78.242.100
	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.999.663.990	8.130.889.316	90.35	868.774.674
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.431.000	26.090.000	64.53	14.341.000
25	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.431.000	26.090.000	64.53	14.341.000
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.463.880.290	7.642.944.716	90.30	820.935.574
26	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	681.800.000	608.660.800	89.27	73.139.200
27	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	500.720.000	462.221.111	92.30	38.498.889
28	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	693.222.290	622.783.646	89.84	70.438.644
29	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	808.400.000	726.951.542	89.92	81.448.458

No	Kode Rekening	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih Anggaran (Rp)
30	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	867.000.000	784.953.700	90.54	82.046.300
31	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	757.338.000	686.128.171	90.60	71.209.829
32	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	1.249.400.000	1.119.472.304	89.60	129.927.696
33	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	795.800.000	718.282.004	90.26	77.517.996
34	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	632.000.000	563.678.096	89.19	68.321.904
35	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	644.600.000	588.397.674	91.28	56.202.326
36	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	833.600.000	761.415.668	91.34	72.184.332
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	495.352.700	461.854.600	93.24	33.498.100
37	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	495.352.700	461.854.600	93.24	33.498.100
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.845.275.950	12.588.538.900	90.92	1.256.737.050
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.710.975.950	12.511.370.600	91.25	1.199.605.350
38	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	88.106.600	71.399.500	81.04	16.707.100
39	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.620.700.000	6.338.360.000	95.74	282.340.000
40	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	490.000.000	479.126.250	97.78	10.873.750

No	Kode Rekening	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih Anggaran (Rp)
41	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	453.447.182	441.562.450	97.38	11.884.732
42	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	507.000.000	496.690.000	97.97	10.310.000
43	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	407.900.000	403.246.400	98.86	4.653.600
44	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	500.612.000	492.516.400	98.38	8.095.600
45	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN WONODRI	485.800.000	481.470.250	99.11	4.329.750
46	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	436.356.000	431.168.860	98.81	5.187.140
47	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	501.000.000	492.070.600	98.22	8.929.400
48	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	467.795.000	459.871.800	98.31	7.923.200
49	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	497.000.000	490.156.800	98.62	6.843.200
50	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	273.393.640	138.851.000	50.79	134.542.640
51	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	191.080.000	190.679.110	99.79	400.890
52	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	236.730.528	141.726.750	59.87	95.003.778
53	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	181.400.000	141.726.750	78.13	39.673.250
54	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	197.600.000	109.044.747	55.18	88.555.253
55	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	171.650.000	161.331.500	93.99	10.318.500
56	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	219.400.000	157.743.650	71.90	61.656.350

No	Kode Rekening	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Selisih Anggaran (Rp)
57	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	193.000.000	102.349.500	53.03	90.650.500
58	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	179.000.000	112.355.078	62.77	66.644.922
59	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	216.405.000	43.998.761	20.33	172.406.239
60	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	195.600.000	133.924.444	68.47	61.675.556
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	134.300.000	77.168.300	57.46	57.131.700
61	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.000.000	66.828.300	67.50	32.171.700
62	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35.300.000	10.340.000	29.29	24.960.000
	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	334.600.000	324.001.200	96.83	10.598.800
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	334.600.000	324.001.200	96.83	10.598.800
63	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	334.600.000	324.001.200	96.83	10.598.800

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 36.557.072.011,- (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sebelas Rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 31.711.282.185,- (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan sisa sebesar Rp 4.845.789.826,- (13,26%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar 11.088.424.011 realisasi 9.875.715.083,- (89,06%) dan sisa anggaran sebesar Rp1.212.708.928,- (10.94%).

- b. **Belanja langsung:** anggaran sebesar Rp25.468.648.000,- Dengan realisasi sebesar Rp21.835.567.102,- (85,73%) dan sisa anggaran sebesar Rp3.633.080.898 (14,27%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat,

Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;

- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;

- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;

- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;

- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;

- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;

- bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;

- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;

- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;

- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran OPD sebagaimana tabel berikut.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
TUJUAN : Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 IKM						87.00 IKM		
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	75%						75%		
SASARAN : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	17.50 %						17.50 %		
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	99.00 %						99.00 %		
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100.00 %						100.00 %		
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat		87%	88%	89 %	90 %	91%		41 %	87 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi										
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP		75.25	77.70	79.60	80.30	82.00		70,36	75.25
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan		1	1	1	1	1		0	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		100	100	100	100	100		50%	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		10	15	20	25	30		4	10
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan		90	92	95	98	100		48	90

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, indikator ini telah memenuhi target capaian yaitu sebesar 87 % dimana realisasinya sebesar 100 % dari target

sebesar 87%;

- b. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Tingkat Partisipasi Masyarakat”** indikator ini juga telah memenuhi target capaian yaitu sebesar 75% dengan persenan realisasi mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 75%.
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu, Indikator **“Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 17.50% (capaian sebesar 17.50%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator **“Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan”** telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 99.00% (capaian sebesar 99.00%);
 - 2) Indikator **“Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan”** telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2022 pada triwulan kedua adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, pada triwulan II indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 41% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2022 sebesar 87% ;
- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“NILAI AKIP”** pada triwulan II indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 70,36% dari target pada akhir periode 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.25%;
- c. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja**

pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan”, pada triwulan II indikator ini belum mencapai target di akhir periode yang telah ditentukan;

- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, pada triwulan II indikator ini telah mencapai target sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2022 yaitu sebesar 100%;
- e. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pada triwulan II Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah mencapai realisasi 4% dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% pada akhir masa periode 2022;
 - 2) Pada triwulan II Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah mencapai realisasi 48% dari target sebesar 90% yang telah ditetapkan di akhir periode 2022.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Selatan Kota Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas

menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021 - 2022

No	Uraian	Tahun Renja	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	177 usulan	317 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	124 usulan	136 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	70,07 %	42,9 %

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 42,90 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) yang sebesar 70,07 % di karenakan jumlah usulan yang mengalami kenaikan tidak sebanding dengan pagu anggaran yang ada sehingga masih banyak usulan yang belum terakomodir.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2020 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan untuk ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Terhambatnya kelancaran pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan dikarenakan penyebaran Covid-19 yang masih aktif. Fenomena ini juga berdampak hingga ke dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan aspek aspek lainnya.
- b. Lesunya pembangunan ekonomi diakibatkan keterbatasan ruang gerak akibat adanya covid-19. Walaupun angka penyebaran covid-19 sudah menurun, namun efeknya bagi pembangunan ekonomi masih jelas terasa. Sehingga diperlukan kegiatan yang membentuk sebuah pola atau sistem untuk memperbaiki pembangunan ekonomi.

- c. Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pemenuhan gizi yang cukup. Sehingga diperlukan program yang mampu mengatasi angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:

- Terdapat perbedaan pemahaman di beberapa kelompok masyarakat terkait proses perencanaan pembangunan. Keterwakilan suara masyarakat akan proses perencanaan akan berpengaruh terhadap kualitas program yang dihasilkan. Sehingga diperlukan wadah untuk menyuarakan pendapat serta pengakomodiran yang tepat sasaran.
- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- Cakupan wilayah Kota Semarang yang cukup luas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di berbagai aspek membuat proses perencanaan pembangunan harus dilandaskan pada prinsip efektif dan efisien. Sehingga potensi sumber daya dapat diberdayakan secara maksimal.

- b. Peluang:

- Adanya pembaruan paradigma bagi birokrasi pemerintahan sehingga memungkinkan munculnya inovasi – inovasi yang baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia.

- Majunya teknologi informasi dan komunikasi yang membuat arus pembaruan semakin cepat dan tanpa batas.
- Pemerintahan yang menganut asas keterbukaan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyumbangkan suaranya mengenai penyusunan regulasi dan kebijakan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan

musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7

Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			38.419.238.041	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			38.419.238.041
07.01	KECAMATAN			38.419.238.041	KECAMATAN			38.419.238.041
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 persen	2.543.940.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 persen	2.543.940.100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	95.446.800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	95.446.800
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	95.446.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	95.446.800
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.538.850.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.538.850.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.538.850.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.538.850.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	12 Laporan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	12 Laporan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	909.643.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	909.643.300
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	909.643.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	909.643.300
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 persen	23.836.928.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 persen	23.836.928.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang	3 kegiatan	13.222.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang	3 kegiatan	13.222.800.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.950.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.950.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER TENGAH	16 Unit	10.912.850.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER TENGAH	16 Unit	10.912.850.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BULUSTALAN	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BULUSTALAN	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BARUSARI	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BARUSARI	13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN RANDUSARI	14 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN RANDUSARI	14 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN MUGASSARI	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN MUGASSARI	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PLEBURAN	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PLEBURAN	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN WONODRI	11 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN WONODRI	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PETERONGAN	11 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PETERONGAN	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER LOR	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER LOR	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER KIDUL	11 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER KIDUL	11 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.209.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.209.000.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	8 Pokmas / Ormas	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	8 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	8 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan	8 dokumen	10.614.128.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan	8 dokumen	10.614.128.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.564.550.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.564.550.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BULUSTALAN	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BULUSTALAN	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BARUSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BARUSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN RANDUSARI	9 Lembaga Masyarakat			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN RANDUSARI	9 Lembaga Masyarakat	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN MUGASSARI	9 Lembaga Masyarakat			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN MUGASSARI	9 Lembaga Masyarakat	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN PLEBURAN	9 Lembaga Masyarakat			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN PLEBURAN	9 Lembaga Masyarakat	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN WONODRI	9 Lembaga Masyarakat			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN WONODRI	9 Lembaga Masyarakat	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN PETERONGAN	9 Lembaga Masyarakat			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN PETERONGAN	9 Lembaga Masyarakat	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER LOR	9 Lembaga Masyarakat			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER LOR	9 Lembaga Masyarakat	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER KIDUL	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER KIDUL	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER TENGAH	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER TENGAH	9 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	49.578.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	49.578.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 persen	87.930.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 persen	87.930.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban	52 angka	87.930.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban	52 angka	87.930.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	87.930.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	87.930.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 persen	83.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 persen	83.000.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	83.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	83.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	83.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	83.000.000
	NON URUSAN				NON URUSAN			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.867.439.941	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.867.439.941
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	18.999.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	18.999.200
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.222.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.222.600
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.200.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.760.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.760.700

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.200.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.320.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.320.700
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.121.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.121.600
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.173.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.173.600
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	10.664.562.841	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	10.664.562.841
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	10.346.738.041	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	10.346.738.041
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	311.040.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	311.040.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	2.261.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	2.261.600

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.261.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.261.600
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.261.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.261.600
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	375.442.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	375.442.400
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.900
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.900.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.637.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.637.900
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.746.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.746.600
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	61.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	61.800.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.946.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.946.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	96.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	96.600.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		31.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		31.500.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.500.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		224.280.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		224.280.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.500.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.780.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.780.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	552.655.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	552.655.500
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.900.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	74.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	74.700.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.965.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.965.500
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	209.090.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	209.090.000
JUMLAH				38.419.238.041				38.419.238.041

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya. sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

NO	PEKERJAAN	ALAMAT	UKURAN	PAGU	OPD PENGAMPU
1	Pembuatan Talud	Wilayah RT 8 RW 4 BARUSARI	160 M2	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Perbaiki Talud	Jl. Mugas RT 07 RW 02 MUGASSARI	60 meter	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Perbaiki Saluran dan Peremajaan Talud Saluran	Jl. Singosari Timur (Samping & Belakang PIP) RT 1 RW 1, 7, 9, 1 WONODRI	16000 m2	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Perbaiki Saluran	Jl. Gayam & Jl. Atmodirono RT 1, 2, 4 RW 10 WONODRI	9000 m2	475.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Pedestrian	Jl. Wonodri Krajan RT 1 RW 1, 6, 9 WONODRI	1 paket	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Rehab Gedung Kantor dan Balai Kelurahan Wonodri	Jl. Wonodri Baru I/1 RT 1 RW 1 WONODRI		800.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
7	Pekerjaan Saluran	Sepanjang Jl. Lampersari RT 0 RW 07 PETERONGAN	2500 M2	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Pembangunan trotoar	Jl. Kopol Maksum RT 06, 07 RW 07 PETERONGAN	2000 M2	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Pengaspalan Jalan	Jl. Jambu Raya RW 5 dan RW 4 RT 01 RW 05 LAMPER KIDUL	3000 m2	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Pembuatan Crossing, Sodetan Air, dan Normalisasi Saluran	Sepanjang Bantaran Sungai Durian Barat RT 07 RW 01 LAMPER KIDUL	300 m	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Pavingisasi Trotoar	Sepanjang Jalan Jl. Lampersari RW 2, RW 4 dan RW 6 RT 02 RW 04 LAMPER KIDUL	1000 m2	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Rehab Rumah Dinas Lurah Peterongan	jl. pandean lamper II No 29 RT 07 RW 08 PETERONGAN		300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
13	Rehab Gedung PKK/POS PAUD	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 LAMPER KIDUL	64 m	250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
14	PENINGGIAN DAN PENGASPALAN	JL LAMPER TENGAH XV DEPAN PUSKESMAS LAMPER TENGAH RT 6 RW 1 LAMPER TENGAH	1200 m2	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	LANJUTAN PERBAIKAN SALURAN	JL LAMPER MIJEN RAYA RT 005 %u2013 006 %u2013 007 RT 00 RW 6 LAMPER TENGAH	270 m	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	PELEBARAN JEMBATAN JL LAMPER MIJEN	JL LAMPER MIJEN RT 1 RW 5 LAMPER TENGAH	50 m2	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PEKERJAAN	ALAMAT	UKURAN	PAGU	OPD PENGAMPU
	KE ARAH UTARA 4 METER JL LAMPER MIJEN RT 1 RW 5				
17	PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI BAJAK DAN PEKERJAAN OPRIDE JALAN KANAN DAN KIRI (p : 1000 m x l : 10 m) JL KEDONDONG KELURAHAN LAMPER TENGAH MENUJU JL LAMPER SARI KELURAHAN LAMPER KIDUL RT 005 RW 004	JL KEDONDONG RT 0 RW 4 LAMPER TENGAH	240 m2	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	RENOVASI DAN PELEBARAN GEDUNG PKK KEL LAMPER TENGAH	JL NANAS NO. 8 RT 4 RW 1 LAMPER TENGAH	60 m2	225.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
19	REHAB RUMAH DINAS KELURAHAN LAMPER LOR	JL Cempedak Utara RT 04 RW 01 LAMPER LOR	1 unit	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
20	Pembuatan Talud	Wonosari RT 4 RW 3 RANDUSARI	500 M3	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21	Pengadaan penerangan jalan umum	Jl. Bulustalan I,V dan Jl. Lemah gempal I,IIIB RT 0 RW 01 s/d 04 BULU STALAN	41 unit	205.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22	Perbaiki saluran air dan grill	Jl. Bulustalan I RT 03,06,07 RW 01 BULU STALAN	412 Meter	340.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23	pavingisasi Jalan	Wilayah RT 2,3,7,8 RW 4 BARUSARI	1160 M2	215.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
24	Perbaiki Saluran air/got	Blok 12A RT 7 RW 7 BARUSARI	450 M1	230.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
25	Perbaiki Gorong- Gorong	Jl. Kyai Saleh RT 05 RW 02 MUGASSARI	300 meter	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26	Normalisasi saluran	Jl. Singosari Raya RT 01 RW 06 PLEBURAN	400 meter	900.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PEKERJAAN	ALAMAT	UKURAN	PAGU	OPD PENGAMPU
27	Rehab RTLH di Kelurahan Wonodri	Jl. Wonodri Baru, Jl. Wonodri Joho, Jl. Wonodri Kopen, Jl. Wonodri Grajen, Jl. Wonodri Sendang, Jl. Wonodri Kebondalem, Jl. Wonodri Krajan RW. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 12 RT RW WONODRI	1 paket	300.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28	PERBAIKAN SALURAN	JL SOMPOK II RT 05 RW 04 LAMPER LOR	180 M	300.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
29	PENGASPALAN JALAN	JL KANAL RW 01, 03 RT 00 RW 00 LAMPER LOR	4000 M2	350.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
30	PENGASPALAN JALAN	JL SOMPOK II RT 05 RW 04 LAMPER LOR	2000 M2	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31	PAVINGISASI BAHU JALAN	JL JERUK RAYA RT 00 RW 04 LAMPER LOR	1000 M2	350.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32	PEMBUATAN TAMAN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU	KANTOR KECAMATAN SEMARANG SELATAN RT 8 RW 3 LAMPER LOR	1045 M2	550.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33	Pembangunan Lapangan Ramah Anak, Lansia dan UMKM Garot	Lapangan Garot Jl. Durian Barat RT 04 RW 01 LAMPER KIDUL	1600 m2	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34	PERBAIKAN SALURAN DENGAN TUTUP BETON SISI KANAN DAN KIRI JALAN	JL LAMPER TENGAH RT 6 RW 2 LAMPER TENGAH	125 m	210.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35	Pembuatan Komposting & Pagar TPS Pasar Wonodri	Jl. Wonodri Baru RT 7 RW 3 WONODRI	1 paket	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
36	PEMBUATAN ATAP, PENINGGIAN, DAN PEMUNDURAN TPS LAMPER LOR	Jl Kanal RT 07 RW 01 LAMPER LOR	1 unit	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi

- PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- PP 3 Penegakan Hukum Nasional
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari

pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

Kemiskinan :

basic life access, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran :

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil

- dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Terkait hal-hal tersebut di atas, Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2.

Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4.

Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5.

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”**.

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60 - 84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2023 berdasarkan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3. 2

**Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN MUGASSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER KIDUL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan kinerja OPD
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2023
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	87.00
	Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75.25
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Angka	1.00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2023
		dan Kelurahan		
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	10.00
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	90.00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026;
- b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/
Kelurahan;

- d. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program dengan 7 indikator program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan.
- c. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 38.419.238.041,-** yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Semarang Selatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 4

Rancangan Program / Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			38.419.238.041		38.770.476.000
07.01	KECAMATAN			38.419.238.041		38.770.476.000
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 persen	2.543.940.100	92 persen	2.928.314.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	95.446.800	1 angka	90.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	95.446.800	12 Dokumen	90.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.538.850.000	100 persen	1.842.850.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.538.850.000	12 Laporan	1.842.850.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	909.643.300	100 persen	995.464.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	909.643.300	12 Laporan	995.464.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 persen	23.836.928.000	98 persen	22.734.467.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat meelalui forum musrenbang	3 kegiatan	13.222.800.000	3 kegiatan	22.444.467.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.950.000	9 Lembaga Kemasyarakatan	119.525.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	10.912.850.000	16 Unit	11.935.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	49.578.000	1 Laporan	55.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 persen	87.930.000	15 persen	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban	52 angka	87.930.000	52 angka	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	87.930.000	2 Laporan	0
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	92 persen	83.000.000	92 persen	75.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	83.000.000	3 kegiatan	75.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	83.000.000	60 Orang	75.000.000
	NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.867.439.941	100%	13.032.695.000
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	18.999.200	6 dokumen	36.000.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.222.600	2 Dokumen	6.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.200.000	1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.760.700	1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.200.000	1 Dokumen	5.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Penyusunan Dokumen DPA SKPD				
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.320.700	1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.121.600	1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.173.600	1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	10.664.562.841	100 persen	11.599.195.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	10.346.738.041	63 Orang/bulan	11.189.494.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	311.040.000	12 Dokumen	392.581.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.261.600	1 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.261.600	18 Laporan	5.650.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.261.600	1 Dokumen	5.470.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	375.442.400	100 persen	489.000.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.900	1 Paket	22.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.900.000	1 Paket	80.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.637.900	1 Paket	40.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.746.600	1 Paket	32.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	61.800.000	12 Laporan	90.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.946.000	12 Laporan	65.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	96.600.000	1 Dokumen	160.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		31.500.000		150.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.500.000	2 Unit	150.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		224.280.000		178.500.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.500.000	12 Laporan	138.500.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.780.000	12 Laporan	40.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	552.655.500	100 persen	580.000.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.900.000	12 Unit	275.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	74.700.000	11 Unit	160.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.965.500	1 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	209.090.000	1 Unit	95.000.000
JUMLAH				38.419.238.041		38.770.476.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 sesuai RKPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel (terlampir).

Tabel 4. 1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Pada Renja Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			38.419.238.041
07.01	KECAMATAN			38.419.238.041
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		92 persen	2.543.940.100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	95.446.800
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	95.446.800
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.538.850.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.538.850.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	909.643.300
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	909.643.300
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		98 persen	23.836.928.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang	3 kegiatan	13.222.800.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.950.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	10.912.850.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.209.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan	8 dokumen	10.614.128.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.564.550.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	49.578.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		15 persen	87.930.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban	52 angka	87.930.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	87.930.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		92 persen	83.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	83.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	83.000.000
	NON URUSAN			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	11.867.439.941
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	18.999.200
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.222.600
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.200.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.760.700
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.200.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.320.700
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.121.600
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.173.600
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	10.664.562.841
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	10.346.738.041
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	311.040.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.261.600
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.261.600
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.261.600
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	375.442.400
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.900
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.900.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.637.900
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.746.600
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	61.800.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.946.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	96.600.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		31.500.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.500.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		224.280.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.500.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.780.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	552.655.500
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.900.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	74.700.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.965.500
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	209.090.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

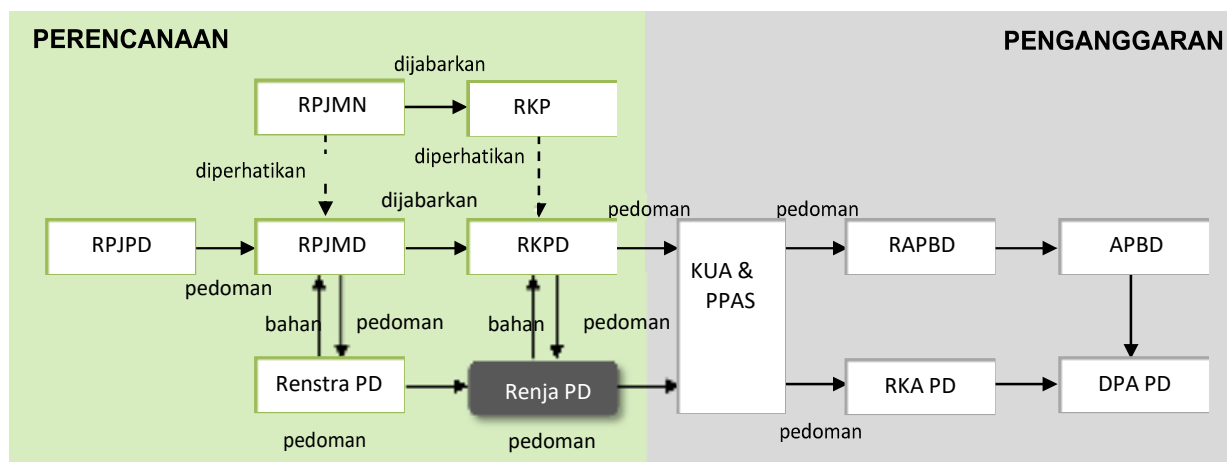
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Utara, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Utara.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;
- v. Keputusan Camat Semarang Utara Nomor 414.34/177/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan

- target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara serta solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan Semarang Utara tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi Rencana Kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Semarang Utara tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SEMARANG UTARA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Utara

Kualitas Renja Kecamatan Semarang Utara yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Utara.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021 dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100%	12.974.036.879		0	100%	12.974.036.879	92,9%	12.058.333.704
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85				85		85	
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Semarang Utara)	477561				477561		477561	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	100%	0		0	100%	0	100%	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	0		0	100%	0	100%	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	11.687.023.778		0	100%	11.687.023.778	100%	10.764.407.346
7.01.02.2.02.03			100%	11.687.023.778		0	100%	11.687.023.778	100%	10.764.407.346

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100%		0		100%	1.071.364.546	100%	1.061.177.453
		OPRASIONAL KELURAHAN	100%		0		100%	720.205.540	100%	649.044.554
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%		0		100%	1.515.050.000	100%	1.383.522.673
		Operasional Kelurahan	100%		0		100%	745.400.000	100%	683.204.183
		Operasional Kelurahan	100%		0		100%	1.312.405.837	100%	1.200.740.185
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%		0		100%	1.198.991.791	100%	1.103.884.091
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%		0		100%	1.892.000.000	100%	1.733.908.670
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%		0		100%	480.805.246	100%	429.486.701
		Operasional Kelurahan	100%		0		100%	947.000.681	100%	871.673.442
	Operasional Kelurahan	100%		0		100%	1.803.800.137	100%	1.647.765.394	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.287.013.101		0	100%	1.287.013.101	100%	1.293.926.358
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	100%	1.287.013.101		0	100%	1.287.013.101	100%	1.293.926.358
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95%	14.091.642.304		0	95%	14.091.642.304	95%	13.672.243.148
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan (Semarang Utara)	19.954				19.954		19.954	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	13.929.552.848		0	100%	13.929.552.848	100%	13.530.589.594
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase jumlah RW yang mengusulkan ke musrenbang	100%	92.203.923		0	100%	92.203.923	100%	46.934.454
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah fasilitasi hasil musrenbang	100%	5.115.227.487		0	100%	5.115.227.487	100%	5.095.371.826
		JUMLAH PAKET KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PLOMBOKAN	100%		0		100%	660.926.988	100%	657.608.563
		JUMLAH PAKET KEGIATAN SARANA DAN PRASARAN	100%		0		100%	1.080.830.669	100%	1.068.651.833
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%		0		100%	527.613.336	100%	524.415.859
		Jumlah paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%		0		100%	1.060.014.674	100%	1.046.734.450
		JUMLAH PAKET KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	100%		0		100%	422.172.292	100%	419.826.500
		JUMLAH PAKET KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA	100%		0		100%	817.870.849	100%	801.725.500
		JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN	100%		0		100%	909.000.000	100%	876.374.084

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%		0		100%	406.981.276	100%	404.764.250
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%		0		100%	904.003.933	100%	879.683.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pelaksanaan hasil musrenbang	100%			0	100%	12.155.818	100%	11.610.000
		JUMLAH LEMBAGA DI KELURAHAN PLOMBOKAN	100%		0		100%	201.443.366	100%	160.412.960
		JUMLAH LEMBAGA DIKELURAHAN	100%		0		100%	206.495.294	100%	195.184.057
		Jumlah Lembaga di Kelurahan	100%		0		100%	208.672.659	100%	189.486.970
		Jumlah Lembaga DiKelurahan	100%		0		100%	215.917.511	100%	202.775.586
		JUMLAH LEMBAGA DI KELURAHAN PANGGUNG LOR	100%		0		100%	202.913.907	100%	176.383.949
		JUMLAH KELEMBAGAAN DI KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	100%		0		100%	227.373.692	100%	206.563.050
		JUMLAH LEMBAGA DI KELURAHAN	100%		0		100%	231.105.530	100%	182.387.548
		Jumlah Lembaga di Kelurahan	100%		0		100%	210.244.611	100%	194.687.897
		Jumlah Lembaga di Kelurahan	100%		0		100%	216.385.033	100%	189.007.258
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100%	162.089.456		0	100%	162.089.456	100%	141.653.554
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	100%	111.689.456		0	100%	111.689.456	100%	96.003.554

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100%		0		100%		100%	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	100%	50.400.000		0	100%	50.400.000	100%	45.650.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	369.960.000		0	100%	369.960.000	100%	351.293.937
		Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90				90		90	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	369.960.000		0	100%	369.960.000	100%	351.293.937
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan se kecamatan	100%	369.960.000		0	100%	369.960.000	100%	351.293.937
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.560.465.538		0	100%	13.560.465.538	100%	11.703.684.143
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Semarang Utara)	100%				100%		100%	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Semarang Utara)	100%				100%		100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Semarang Utara)	100%				100%		100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	12.581.943		0	100%	12.581.943	100%	10.781.943
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ	100%	10.109.443		0	100%	10.109.443	100%	8.309.443
		Dokumen Renja	100%		0		100%		100%	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA yang disusun	100%	0		0	100%	0	100%	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LAKIP	100%	2.472.500		0	100%	2.472.500	100%	2.472.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.738.719.622		0	100%	10.738.719.622	100%	9.005.651.13
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN Kecamatan Semarang Utara	12 bulan	10.438.189.622		0	12 bulan	10.438.189.622	12 bulan	8.740.211.139
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	298.530.000		0	100%	298.530.000	100%	263.440.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	1.000.000		0	100%	1.000.000	100%	1.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan semesteran	100%	500.000		0	100%	500.000	100%	500.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis realisasi anggaran	100%	500.000		0	100%	500.000	100%	500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.405.760.170		0	100%	1.405.760.170	100%	1.354.888.084
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik dan penerangan bangunan	100%	5.400.637		0	100%	5.400.637	100%	5.380.500
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan gedung kantor	100%	1.074.479.858		0	100%	1.074.479.858	100%	1.066.684.001
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan ATK kantor kecamatan	100%	23.560.143		0	100%	23.560.143	100%	22.205.700
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kebutuhan barang cetak, fotocopy, dan jilid	100%	22.434.562		0	100%	22.434.562	100%	19.175.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamud	jamuan makan minum rapat	100%	199.380.000		0	100%	199.380.000	100%	166.109.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada tahun yang berkenaan	100%	16.555.000		0	100%	16.555.000	100%	12.355.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	63.949.970		0	100%	63.949.970	100%	62.978.883
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	638.186.196		0	100%	638.186.196	100%	624.088.94
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	langganan telephon, listrik, PDAM, dan Koran	100%	144.872.160		0	100%	144.872.160	100%	133.939.956
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Printer, komputer, Laptop	100%	493.314.036		0	100%	493.314.036	100%	490.148.986

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang Dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	765.217.607		0	100%	765.217.607	100%	708.274.035
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan service kendaraan dinas	100%	150.914.218		0	100%	150.914.218	100%	122.647.723
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat dan bahan pembersih	100%	75.820.000		0	100%	75.820.000	100%	70.601.322
		Gedung kantor bersih dan indah	100%		0		100%		100%	
		gedung kantor layak pakai	100%		0		100%		100%	
		Pemenuhan pemeliharaan kantor kecamatan	100%		0		100%		100%	
		perlengkapan perkantoran yang layak pakai	100%		0		100%		100%	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	538.483.389		0	100%	538.483.389	100%	515.024.990
Rata-rata capaian riil semua kegiatan										
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)										
Predikat Kinerja Program										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								40.996.104.721		37.785.554.932
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut :

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
 - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan bisa lebih baik.
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
 - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2022 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2022 Triwulan II

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN			
KECAMATAN SEMARANG UTARA	37.711.318.329	15.735.507.239	41,73

Adapun perincian pelaksanaan program dan Sub Kegiatan pada Urusan Penunjang Kewilayahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib
Kewilayahan Tahun 2022 Triwulan II

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.458.585.064	1.890.316.327	54,66
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.177.600	9.750.000	46,04
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.177.600	9.750.000	46,04
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.437.407.464	1.880.566.327	54,71
7.01.02.2.02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.811.536.902	1.438.915.798	51,18
7.01.02.2.02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	73.000.000	49.504.859	67,81
7.01.02.2.02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	67.936.400	54.892.162	80,80
7.01.02.2.02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOSARI)	67.209.140	52.784.856	78,54
7.01.02.2.02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUNINGAN)	78.500.000	50.881.533	64,82
7.01.02.2.02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULU LOR)	75.015.360	51.935.886	69,23
7.01.02.2.02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	68.046.480	47.283.905	69,49
7.01.02.2.02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	48.916.202	30.726.517	62,81
7.01.02.2.02.03	i. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)	62.836.410	49.248.245	78,38

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.02.2.02.03	j. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	84.410.570	54.392.566	64,44
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.387.819.394	6.988.992.454	31,22
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.137.286.124	6.936.245.814	31,33
7.01.03.2.02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81.365.975	60.825.000	74,75
7.01.03.2.02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.720.990.000	72.808.000	4,23
7.01.03.2.02.02	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	725.000.000	115.920.000	15,99
7.01.03.2.02.02	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.298.000.000	35.799.000	2,76
7.01.03.2.02.02	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	844.784.900	-	-
7.01.03.2.02.02	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	736.000.000	25.702.000	3,49
7.01.03.2.02.02	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	756.219.210	3.000.000	0,40
7.01.03.2.02.02	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	1.661.000.000	-	-
7.01.03.2.02.02	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	681.591.164	-	-
7.01.03.2.02.02	j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	597.500.000	-	-
7.01.03.2.02.02	k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	782.837.258	143.108.000	18,28
7.01.03.2.02.03	l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	859.120.487	182.439.272	21,24
7.01.03.2.02.03	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	888.400.000	433.339.170	48,78
7.01.03.2.02.03	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.392.800.000	874.924.830	62,82
7.01.03.2.02.03	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	883.480.000	489.282.430	55,38

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.02.03	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.464.445.040	724.529.968	49,47
7.01.03.2.02.03	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	1.391.815.050	746.068.790	53,60
7.01.03.2.02.03	r. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	1.632.234.400	1.028.413.790	63,01
7.01.03.2.02.03	s. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	624.131.120	350.180.944	56,11
7.01.03.2.02.03	t. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	1.105.021.520	591.547.220	53,53
7.01.03.2.02.03	u. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	2.010.550.000	1.058.357.400	52,64
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	250.533.270	52.746.640	21,05
7.01.03.2.03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.133.270	45.621.640	22,80
7.01.03.2.03.04	b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.400.000	7.125.000	14,14
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.000.000	52.140.000	51,12
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.000.000	52.140.000	51,12
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	102.000.000	52.140.000	51,12
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000	16.550.000	47,29
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000	16.550.000	47,29
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35.000.000	16.550.000	47,29
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.727.913.871	6.787.508.458	57,87
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.128.722	5.040.000	33,31
X.XX.01.2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.628.722	1.800.000	27,15
X.XX.01.2.01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.590.000	79,50
X.XX.01.2.01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	-	-
X.XX.01.2.01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	-	-
X.XX.01.2.01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	1.650.000	82,50
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.589.989.946	6.368.487.935	60,14

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
X.XX.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.117.029.946	6.155.427.935	60,84
X.XX.01.2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.960.000	213.060.000	45,05
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.669.529	136.781.550	37,41
X.XX.01.2.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.149.235	5.372.400	58,72
X.XX.01.2.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.049.037	77.911.000	99,82
X.XX.01.2.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	5.623.650	28,12
X.XX.01.2.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	3.405.000	56,75
X.XX.01.2.06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.200.000	27.547.500	46,53
X.XX.01.2.06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.780.000	11.755.000	15,93
X.XX.01.2.06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.491.257	5.167.000	4,32
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	83.461.078	52,16
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	83.461.078	52,16
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.125.674	193.737.895	32,45
X.XX.01.2.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180	19.710.120	19,84
X.XX.01.2.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.945.440	25.104.625	45,69
X.XX.01.2.09.09	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.853.054	148.923.150	33,63

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2022 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektifitas belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, capaian sasarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2022 Triwulan II

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi	Catatan Analisis	
			2021	2022	2022		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	97	48		
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	Angka	67,76	68	71,11	
2	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	50	
3	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	80	75	47	
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	5	10	4	
5	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	0	60	50	

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah** realisasi nilai AKIP sebesar 71.11 melampaui dari target sebesar 68;
2. Indikator **Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan** realisasi 50% dari

- target 100%;
3. Indikator **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 47% dari target sebesar 75%;
 4. Indikator **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik** realisasi inovasi sebanyak 4 inovasi dari target 10 (capaian sebesar 40%);
 5. Indikator **Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 50% dari target sebesar 60% (capaian sebesar 84%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2027.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Presentase Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	194 usulan	126 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	180 usulan	116 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	65%	64%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 64 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 65%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Genuk yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan
Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi	%	95
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	15
3	Nilai AKIP	%	71,11
4	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	20
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	23
6	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	18,25
7	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	22
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	2
9	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	70
10	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	20
11	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Angka	5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah nilai AKIP yang melampaui target, Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Meskipun Tingkat Partisipasi Masyarakat, Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang dan Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang turun namun patut diapresiasi bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat. Dalam kondisi pandemi Covid 19 Kecamatan Semarang Utara mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan kepada masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara, maupun isu- isu yang bersifat eksternal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport RT/RW, transport PKK RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing – masing Seksi

SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.

Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat-surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Utara tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait.

Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan

stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN SEMARANG UTARA			42.868.026.091			42.868.026.091
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.066.793.880	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.066.793.880
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.063.793.880	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.063.793.880
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.063.793.880	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.063.793.880
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.603.793.880		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.603.793.880
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	55.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	55.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pangg Kidul	43.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan PangguKidul	43.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.873.761.780	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	26.079.900.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.873.761.780	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25.869.500.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			53.561.780	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		60.000.000
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.948.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		10.956.300.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.248.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.248.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.650.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		14.853.200.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	150.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan Dadapsari			Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	150.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.222.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.222.200.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			14.422.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		14.422.200.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	2.009.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	2.009.800.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan	705.400.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan	705.400.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		yang dilaporkan di Kelurahan Pangg Kidul			yang dilaporkan di Kelurahan Pangg Kidul	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000
		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.501.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.501.800.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			800.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		800.000.000
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	5.550.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	5.550.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
	sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5.550.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5.550.000
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.550.000		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.550.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	69.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	69.750.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
	belakang lainnya					
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			69.750.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	11.852.170.431	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	10.551.922.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana			Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12.156.060	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	14.499.236
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.562.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.999.236

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	5.562.600		Rencana Kerja (Renja SKPD)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.049.510	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.000.000
		DPA SKPD	2.049.510		DPA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.120.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.500.000
		Perubahan RKA SKPD	1.120.420		Perubahan RKA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.049.510	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.000.000
		DPA SKPD	2.049.510		DPA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.120.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.000.000
		Perubahan RKA SKPD	1.120.420		Perubahan RKA SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			253.600			
		Evaluasi Kinerja	253.600			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase administrasi Keuangan SKPD	11.372.987.491	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	9.738.822.764
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.830.605.091	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.496.267.764
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.830.605.091		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			539.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		242.555.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			201.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	201.600		Laporan Keuangan Akhir Tahun	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.419.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.419.200		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			201.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	162.808.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	295.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.186.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.000.000
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	4.186.200		Komponen instalasi listrik yang tersedia	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.758.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000.000
		Peralatan dan perlengkapan kantor	82.758.880		Peralatan dan perlengkapan kantor	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.846.770	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.000.000
		Logistik Kantor	14.846.770		Logistik Kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.517.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.000.000
		barang cetakan dan penggandaan	2.517.000		barang cetakan dan penggandaan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			41.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		88.000.000
		Fasilitasi kunjungan tamu	41.400.000		Fasilitasi kunjungan tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		65.000.000
		Rapat yang terselenggara	17.100.000		Rapat yang terselenggara	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	177.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	160.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			177.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		160.000.000
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	127.218.030	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	343.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.327.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		81.600.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.000.000
		Peralatan dan mesin lainnya	20.000.000		Peralatan dan mesin lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.890.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		67.000.000
		Jumlah Gedung yang dipelihara	7.890.850		Jumlah Gedung yang dipelihara	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		150.000.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	0		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

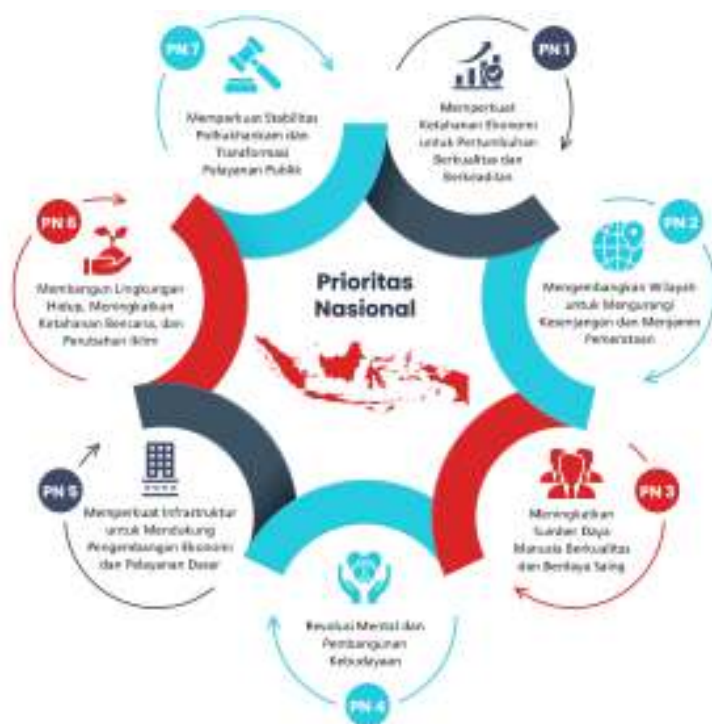
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Semarang Utara pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat

Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim

- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera**

dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);

- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Semarang Utara juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di

Kecamatan dan Kelurahan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2023 berbeda nomenklatur dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan nomenklatur tersebut dikarenakan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun pemetaan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
7.01.0.0.0200	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Target 2023
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94.00
SASARAN: Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	69.00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	15.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	70

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rancangan Program / Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
KECAMATAN SEMARANG UTARA			42.868.026.091	45.440.107.656	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.066.793.880	3.250.801.513	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000	3.180.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.000.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.063.793.880	3.247.621.513	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.063.793.880	3.247.621.513	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.603.793.880	2.760.021.513	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	55.000.000	58.300.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000	54.060.000	KELURAHAN BULU LOR

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000	50.880.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000	56.180.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	43.000.000	45.580.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000	61.480.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000	48.760.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000	48.760.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000	63.600.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.873.761.780	29.546.187.487	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.873.761.780	29.546.187.487	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			53.561.780	56.775.487	

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780	56.775.487	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.948.000.000	11.604.880.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000	1.272.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandharharjo	1.248.000.000	1.322.880.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000	1.082.260.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000	1.185.080.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000	1.707.660.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.650.000.000	1.749.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000	318.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN KUNINGAN

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.222.200.000	16.135.532.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			14.422.200.000	15.287.532.000	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000	187.620.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandharharjo	2.009.800.000	2.130.388.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000	1.703.632.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000	1.368.460.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000	1.848.004.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Kidul	705.400.000	747.724.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000	2.510.716.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000	1.053.004.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000	1.086.076.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.501.800.000	2.651.908.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			800.000.000	848.000.000	
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000	848.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	5.550.000	848.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5.550.000	5.883.000	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	5.883.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latarbelakang lainnya	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	69.750.000	5883000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			69.750.000	73.935.000	
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	73.935.000	

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	11.852.170.431	12.563.300.657	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12.156.060	12.885.424	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.562.600	5.896.356	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	5.562.600	5.896.356	Dokumen Renja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.049.510	2.172.481	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		RKA SKPD	2.049.510	2.172.481	Dokumen RKA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.120.420	1.187.645	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Perubahan RKA SKPD	1.120.420	1.187.645	Perubahan RKA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.049.510	2.172.481	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		DPA SKPD	2.049.510	2.172.481	Dokumen DPA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.120.420	1.187.645	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Perubahan DPA SKPD	1.120.420	1.187.645	Perubahan DPA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			253.600	253.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Evaluasi Kinerja	253.600	253.600	Dokumen Evkin

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase administrasi Keuangan SKPD	11.372.987.491	11.372.987.491	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.830.605.091	10.830.605.091	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.830.605.091	10.830.605.091	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			539.560.000	539.560.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000	539.560.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			201.600	201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	201.600	201.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.419.200	2.419.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.419.200	2.419.200	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			201.600	201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	162.808.850	162.808.850	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.186.200	4.186.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	4.186.200	4.186.200	

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.758.880	82.758.880	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peralatan dan perlengkapan kantor	82.758.880	82.758.880	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.846.770	14.846.770	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Logistik Kantor	14.846.770	14.846.770	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.517.000	2.517.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		barang cetakan dan penggandaan	2.517.000	2.517.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			41.400.000	41.400.000	
		Fasilitasi kunjungan tamu	41.400.000	41.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.100.000	17.100.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Rapat yang terselenggara	17.100.000	17.100.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	177.000.000	177.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			177.000.000	177.000.000	
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	177.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	127.218.030	127.218.030	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.327.180	99.327.180	KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180	99.327.180	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.890.850	7.890.850	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Gedung yang dipelihara	7.890.850	7.890.850	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	0	0	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Utara bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (30 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Indeks Reformasi Birokrasi**" dan indikator sasaran "**Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 10

- kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas:
- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan Usaha Mikro) di seluruh Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara;
 - b. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dalam proses pembangunan tugas dari lembaga kemasyarakatan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal Sumber Daya Manusia, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi lembaga kemasyarakatan tersebut meliputi, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK;
 - c. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang pada setiap hari Sabtu di minggu pertama di gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam akses pelayanan pada hari kerja;
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama pemerintah, membahas dan menyepakati daftar skala prioritas pembangunan di Kecamatan dari hasil murenbangkel dan prioritas Kecamatan.
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dalam rangka peningkatan keterlibatan forkompimcam serta untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 42.868.026.091,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan rincian:
- a. Rp 14.994.264.311,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 27.873.761.780,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

Adapun rencana program, kegiatan dan indikator kinerja serta sumber pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Pada Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
KECAMATAN SEMARANG UTARA		42.868.026.091	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.066.793.880	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.063.793.880	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.063.793.880	
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.603.793.880	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	55.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000	KELURAHAN BULU LOR
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	43.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.873.761.780	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.873.761.780	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		53.561.780	

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		10.948.000.000	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.248.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000	KELURAHAN BULU LOR
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	950.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.650.000.000	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000	KELURAHAN BULU LOR
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	150.000.000	KELURAHAN DADAPSARI

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	150.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	150.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	150.000.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.222.200.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		14.422.200.000	
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	2.009.800.000	KELURAHAN BANDARHARJO
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000	KELURAHAN BULU LOR
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000	KELURAHAN KUNINGAN
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Kidul	705.400.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
	Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.501.800.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		800.000.000	

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	5.550.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5.550.000	
	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	69.750.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		69.750.000	
	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	11.852.170.431	
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		
	Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12.156.060	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.562.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Rencana Kerja (Renja SKPD)	5.562.600	Dokumen Renja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.049.510	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	RKA SKPD	2.049.510	Dokumen RKA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.120.420	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Perubahan RKA SKPD	1.120.420	Perubahan RKA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.049.510	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	DPA SKPD	2.049.510	Dokumen DPA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.120.420	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Perubahan DPA SKPD	1.120.420	Perubahan DPA

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		253.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Evaluasi Kinerja	253.600	Dokumen Evkin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	11.372.987.491	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.830.605.091	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.830.605.091	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		539.560.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	201.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2.419.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.419.200	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	162.808.850	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.186.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Komponen instalasi listrik yang tersedia	4.186.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		82.758.880	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Peralatan dan perlengkapan kantor	82.758.880	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14.846.770	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Logistik Kantor	14.846.770	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.517.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	barang cetakan dan penggandaan	2.517.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		41.400.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	41.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		17.100.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Rapat yang terselenggara	17.100.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	177.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		177.000.000	

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	127.218.030	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		99.327.180	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		7.890.850	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Jumlah Gedung yang dipelihara	7.890.850	

BAB V

P E N U T U P

Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang

Utara Tahun 2023 ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 setiap triwulan.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

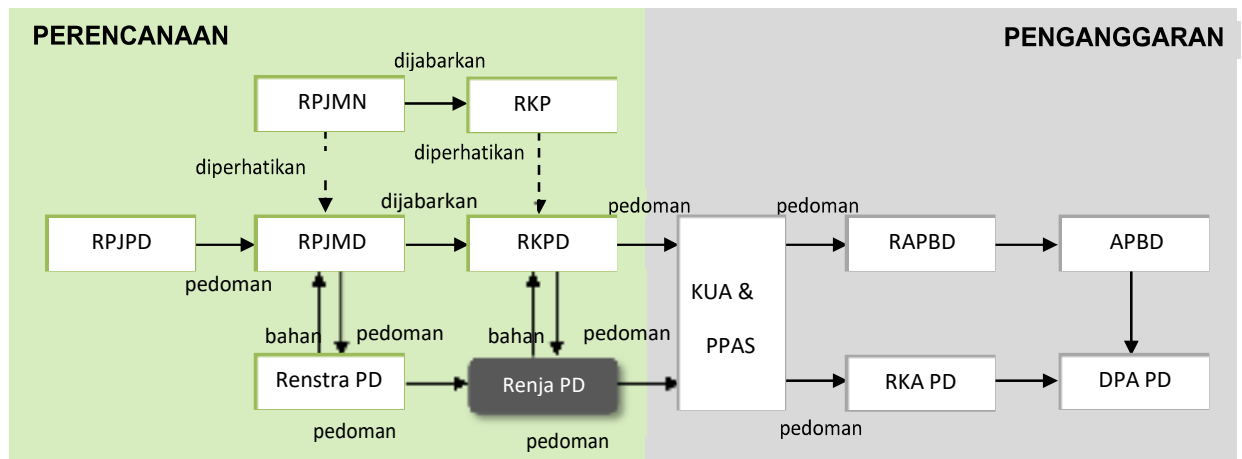
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang

bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Barat, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Barat tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Barat.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun

2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Barat.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 58.388.999.975 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 55.357.870.019 atau sebesar 94,81%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening	Urusan /Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB KEWILAYAHAN									
7,01,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	100%	23,13	23,13	0	2413%	24,13
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100	100	100,00%	6	6	0	106	1,06
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85,00%	22	22	91	198	2,329411765
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	16	16	16,00 kelompok	6	6	0	22	1,375
7,01,02,2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25	25	0	26	26

		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	0	0	0	0	0	1	0	0
7,01,02,2,01,02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	125,00%	1,25
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Penunjang Capaian Kinerja	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7,01,02,2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0	0	0	100	0	0
7,01,02,2,02,03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan	100%	100%	100%	25	25	0	26	26

7,01,02,2,04,03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	0	1	1
		Jumlah Aset yang Dikelola di Kecamatan Kelurahan, Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura, Persentase Jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan, Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan G	100,00%	100,00%	0 0	0	0	0	1	1
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan						5		
7,01,03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	14,28	14,28	0	15,28	15,28
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95	95	95,00%	20	20	0	115	1,210526316
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	19954	19954	19954	1.500	1.500	0	21454	1,075172898
7,01,03,2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
7,01,03,2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	25	25	0	26	26

		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100		
7,01,03,2,02,01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Lokasi yang Masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50		
7,01,03,2,02,02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang, Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkunga	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26

		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26

		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan						50		
7,01,03,2,02,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan, Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26

		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan						20		
7,01,03,2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25	25	0	26	26

		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya						17		
7,01,03,2,03,01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		kegiatan pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan						17		
7,01,03,2,03,04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		penanggulangan kemiskinan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan						1		
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan						16		
7,01,04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	22,22	22,22	0	23,22	23,22
		Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90	90	90,00%	20	20	0	110	1,222222222
7,01,04,2,03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani						20		

7,01,04,2,03,01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		kapasitas perlindungan masyarakat	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							0		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						92		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan						5		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5		
X,XX,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100,00%	25	25	0	125	1,25

		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100,00%	25	25	0	125	1,25
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100,00%	25	25	0	125	1,25
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD						100		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD						100		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD						100		
X,XX,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	41,67	41,67	0	42,67	42,67
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan						5		
		Dokumen pelaporan						2		
X,XX,01,2,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50,00%	50,00%	0	1,5	1,5
		Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	2	2	2	1	1	0	3	1,5
		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun						2		
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Barat						1		
X,XX,01,2,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	50,00%	50,00%	0	1,5	1,5
		Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	4	4	4	2	2	0	6	1,5

		Dokumen RKA SKPD							1		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD							1		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD							1		
X,XX,01,2,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	66,67%	66,67%	0	1,6667	1,6667	
		Dokumen LPPD,EKK dan Evkin kelurahan	3	3	3	2	2	0	5	1,666666667	
		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1			
X,XX,01,2,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	0	1	1	
		Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1	1	1	0	0	0	1	1	
		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD						1			
X,XX,01,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	30	30	0	31	31	
X,XX,01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25	
		Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Semarang Barat dan Pemenuhan Tunjangan ASN Kecamatan Semarang Barat	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan						100			
X,XX,01,2,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25	

		Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu	12	12	12	3	3	0	15	1,25
		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas						100		
X,XX,01,2,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	0	2	2
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1	1	1	1	1	0	2	2
		Laporan akhir tahun						1		
X,XX,01,2,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	0	1	1
		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	1	1	0	0	0	1	1
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran						2		
X,XX,01,2,02,08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	0	1	1
		Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1	1	1	0	0	0	1	1
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran						1		
X,XX,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
X,XX,01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25

X,XX,01,2,06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah						10		
X,XX,01,2,06,11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Terpenuhi Kebutuhan Sarpras Komunikasi dan Informasi	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD						5		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya						5		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor						5		
X,XX,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Tersedianya kebutuhan jasa kantor						100		
X,XX,01,2,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Langganan Rekening Telepon, Listrik, Koran	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26

		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12		
X,XX,01,2,08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						5		
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						100		
X,XX,01,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
X,XX,01,2,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
X,XX,01,2,09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan						58		
X,XX,01,2,09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Penyediaan Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
X,XX,01,2,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25

		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Rehabilitasi Gedung						2		
X,XX,01,2,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Pemeliharaan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	0	0	0	0	5	0	0
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	0	0	0	0	0	3	0	0

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

- a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (Satu) Urusan, 4 (Empat) Program dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Program dan 32 (Tiga Puluh Dua) Kegiatan dengan 65 (Enam Puluh Lima) Indikator kinerja kegiatan.
- b) Dari 10 (Sepuluh) indikator kinerja program, terdapat 1 (Satu) indikator yang melampaui target, 6 (Enam) indikator memenuhi target, serta 2 indikator tidak memenuhi target.

Pada tahun 2021 pandemi covid-19 berangsur-angsur berkurang sehingga jumlah pelayanan administratif yang diberikan kepada masyarakat meningkat, berdampak pada pencapaian pada indikator jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Semarang Barat melampaui target yang telah ditentukan. Sedangkan pada indikator jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan indikator persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang tidak memenuhi target dikarenakan meskipun pandemi covid-19 sudah berkurang tetapi pendapatan belum sepenuhnya pulih, sehingga anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas, yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik.

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-206 sampai dengan Tahun 2022 sebagai beirkut:

- a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (Satu) Urusan, 5 (Lima) Program dengan 7 (Tujuh) indikator program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan 14 (Empat Belas) indicator
- b) Dari 7 (Tujuh) indikator kinerja program, terdapat 1 (Satu) indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 (Lima) indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 1 (Satu) Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
- c) Dari 14 (Empat Belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 13 (Tiga Belas) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra dan 1 Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Urusan Wajib Kewilayahan	58.388.999.975	55.357.870.019	94,81%	3.031.129.956
	Belanja Tidak Langsung	13.969.015.126	13.653.982.925	97,74%	315.032.201
	Belanja Pegawai	13.969.015.126	13.653.982.925	97,74%	315.032.201
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.969.015.126	13.653.982.925	97,74%	315.032.201
	Belanja Langsung	44.419.984.849	41.703.887.094	93,89%	2.716.097.755
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.459.702.489	2.201.881.259	89,52%	257.821.230
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.700.621	9.532.500	98,27%	168.121
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.336.118	2.275.500	97,41%	60.618
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.118.963	4.107.000	99,71%	11.963
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.438.395	1.403.500	97,57%	34.895
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.807.145	1.746.500	96,64%	60.645
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	486.875.254	442.150.000	90,81%	44.725.254
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	482.540.000	437.900.000	90,75%	44.640.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.419.809	1.401.000	98,68%	18.809
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.382.218	1.353.500	97,92%	28.718
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.533.227	1.495.500	97,54%	37.727
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.409.020.366	1.391.658.660	98,77%	17.361.706
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.507.090	13.450.000	99,58%	57.090
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.882.000	11.202.000	75,27%	3.680.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.690.302	22.690.010	100,00%	292
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.838.890	15.788.650	99,68%	50.240
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.365.272	108.189.000	96,28%	4.176.272
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	925.000	917.000	99,14%	8.000
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.228.811.812	1.219.422.000	99,24%	9.389.812

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.874.000	98.062.688	81,80%	21.811.312
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.874.000	98.062.688	81,80%	21.811.312
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.232.248	260.477.411	59,99%	173.754.837
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.532.971	160.697.547	51,09%	153.835.424
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.974.364	15.219.364	43,52%	19.755.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00%	-
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.585.000	24.460.000	99,49%	125.000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.139.913	60.100.500	99,93%	39.413
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.990.408.889	16.502.289.059	91,73%	1.488.119.830
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.949.388.000	2.898.391.400	98,27%	50.996.600
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.949.388.000	2.898.391.400	98,27%	50.996.600
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	14.684.984.571	13.305.529.659	90,61%	1.379.454.912
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.143.327	66.861.000	93,98%	4.282.327
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Ngemplak Simongan	972.392.130	865.276.934	88,98%	107.115.196
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Manyaran	1.451.000.000	1.318.638.810	90,88%	132.361.190
c	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Krapyak	775.002.260	704.798.189	90,94%	70.204.071
d	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tambakharjo	456.637.834	410.064.093	89,80%	46.573.741
e	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon	752.554.407	673.218.892	89,46%	79.335.515
f	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalibanteng Kidul	597.387.565	542.041.471	90,74%	55.346.094
g	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gisikdrono	1.555.145.748	1.418.335.639	91,20%	136.810.109
h	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bongsari	959.600.000	869.898.882	90,65%	89.701.118
i	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bojongsalaman	912.217.750	829.895.756	90,98%	82.321.994
j	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Cabean	554.791.180	496.526.737	89,50%	58.264.443
k	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Salaman Mloyo	416.001.500	369.048.131	88,71%	46.953.369
l	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangayu	695.428.996	628.380.265	90,36%	67.048.731

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
m	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Krobokan	1.377.224.183	1.258.303.052	91,37%	118.921.131
n	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tawang Sari	770.983.675	702.891.091	91,17%	68.092.584
o	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tawangmas	826.748.941	741.440.835	89,68%	85.308.106
p	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kembangarum	1.540.725.075	1.409.909.882	91,51%	130.815.193
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	356.036.318	298.368.000	83,80%	57.668.318
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	356.036.318	298.368.000	83,80%	57.668.318
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.908.557.563	22.938.911.776	95,94%	969.645.787
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.218.687.443	21.268.303.276	95,72%	950.384.167
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	61.593.046	23.805.000	38,65%	37.788.046
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana	12.419.285.409	12.205.130.860	98,28%	214.154.549
c	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngemplak Simongan	252.622.450	251.912.000	99,72%	710.450
d	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manyaran	253.237.183	252.227.000	99,60%	1.010.183
e	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Krapyak	599.339.338	597.282.038	99,66%	2.057.300
f	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakharjo	483.795.786	481.990.000	99,63%	1.805.786
g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibanteng Kulon	473.201.985	471.199.877	99,58%	2.002.108
h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibanteng Kidul	615.023.230	612.449.185	99,58%	2.574.045
i	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gisikdrono	236.316.207	235.022.000	99,45%	1.294.207
j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bongsari	252.909.183	252.456.000	99,82%	453.183
k	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojongsalaman	386.514.740	385.496.000	99,74%	1.018.740
l	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cabean	394.935.270	393.614.000	99,67%	1.321.270
m	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Salaman Mloyo	714.001.445	710.743.000	99,54%	3.258.445
n	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangayu	463.286.204	462.241.000	99,77%	1.045.204
o	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Krobokan	254.447.957	252.902.000	99,39%	1.545.957
p	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawang Sari	427.436.246	425.655.000	99,58%	1.781.246
q	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangmas	365.229.974	363.315.000	99,48%	1.914.974
r	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangarum	258.616.095	257.800.133	99,68%	815.962
s	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	411.926.755	341.225.000	82,84%	70.701.755
t	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngemplak Simongan	180.574.590	89.302.750	49,45%	91.271.840
u	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manyaran	184.424.972	167.307.600	90,72%	17.117.372
v	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Krapyak	192.026.177	176.177.100	91,75%	15.849.077
w	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakharjo	177.148.078	109.460.305	61,79%	67.687.773
x	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalibanteng Kulon	187.459.455	146.083.411	77,93%	41.376.044

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
y	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalibanteng Kidul	185.772.652	162.686.550	87,57%	23.086.102
z	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gisikdrono	235.616.665	190.395.204	80,81%	45.221.461
aa	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongsari	180.805.500	151.078.389	83,56%	29.727.111
bb	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongsalaman	126.514.010	108.835.000	86,03%	17.679.010
cc	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cabean	202.783.842	140.253.500	69,16%	62.530.342
dd	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Salaman Mloyo	146.643.302	104.298.910	71,12%	42.344.392
ee	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangayu	153.474.432	133.524.000	87,00%	19.950.432
ff	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Krobokan	192.727.360	139.291.201	72,27%	53.436.159
gg	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tawang Sari	176.726.535	168.517.350	95,35%	8.209.185
hh	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tawangmas	138.795.860	98.633.663	71,06%	40.162.197
ii	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangarum	233.475.510	205.993.250	88,23%	27.482.260
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.689.870.120	1.670.608.500	98,86%	19.261.620
a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	89.870.120	77.415.500	86,14%	12.454.620
b	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.600.000.000	1.593.193.000	99,57%	6.807.000
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.315.908	60.805.000	99,17%	510.908
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	61.315.908	60.805.000	99,17%	510.908
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	61.315.908	60.805.000	99,17%	510.908
	Urusan Wajib Kewilayahan	58.388.999.975	55.357.870.019	95%	3.031.129.956

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan kewilayahan program dan kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 58.388.999.975. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 55.357.870.019 dengan sisa sebesar Rp 3.031.129.956 (5%) dengan uran berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 13.969.015.126, realisasi Rp. 13.653.982.925 (97,74%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 315.032.201
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 44.419.984.849 Dengan realisasi sebesar Rp. 41.703.887.094 (93,74%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.716.097.755 (6%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Barat Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Barat dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik

- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. **Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;

- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;

- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;

- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);

- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;

- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;

- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI		
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat			87 Angka	87 Angka	88 Angka			87 Angka	88 Angka
Sasaran :										
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP			71.87	75.70	79.21		71.87	75.70	79.21
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan			1 Angka	1 Angka	1 Angka		1 Angka	1 Angka	1 Angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			100%	100%	100%		100%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			17%	17%	20%		17%	17%	20%

Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan				100%	100%	100%			100%	100%	100%
---	--	--	--	------	------	------	--	--	------	------	------

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan Adapun kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 87 angka dari target sebesar 87 angka.
- b. Sasaran **”Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai AKIP” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 71,87 dari target sebesar 71,87 (capaian sebesar 100%);
- c. Sasaran **“ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik ”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 1 angka dari target sebesar 1 angka (capaian sebesar 100%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator **“Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif”** telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% angka (capaian sebesar 100%);
- e. Sasaran **“Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 17% dari target sebesar 17% angka (capaian sebesar 100%);
 - 2) Indikator “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% angka (capaian sebesar 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	Dokumen pelaporan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
3	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
4	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam menerima Pelayanan berbasis Teknologi Informasi (SPBE)	85%	91%	92%		85%	91%	92%	
5	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	97%	98%		95%	97%	98%	
6	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	10%	15%		0%	10%	15%	
7	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85%	90%	92%		85%	90%	92%	
8	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	87,50	90,11	91,56	92,84	87,50	90,11	91,56	92,84
9	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	82,50	84,34	86,68	88,52	82,50	84,34	86,68	88,52

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Keterangan tentang tabel diatas:

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 98,91 %; dimana 274 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 hanya dapat terakomodir sejumlah 271 program pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 (3 program tidak dapat terakomodir). Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penyesuaian anggaran, sehingga terdapat 2 program yang

ditunda pelaksanaannya. Sementara 1 program yang lain tidak dilaksanakan karena output dari kegiatan pada program tersebut disinergikan dengan output pada kegiatan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPd, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPd Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPd)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020/2021	2021/2022	2019/2020	2020/2021
1	Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka		50	50	50	50	50/50		50

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 50 telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPd Tahun 2018 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 74,23 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	
			2019	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	87.00	87.00	88.00	-	-	-	-
2	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	-	0.00	1.00	1.00	-	-	-	-
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
4	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	17.00	17.00	20.00	-	-	-	-
5	Nilai AKIP	Angka	-	71.87	75.70	79.24	-	-	-	-
6	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
7	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
8	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
9	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
10	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Persen	-	85.00	91.00	92.00	-	-	-	-
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	-	95.00	97.00	98.00	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	
			2019	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
12	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	-	0.00	10.00	15.00	-	-	-	-
13	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	-	85.00	90.00	92.00	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Semarang Barat

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta

keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat intergratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
- b. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- c. Kurang efektif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat
- Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik
- Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Barat tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

- Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran
- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang:

- Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
- Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
- Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan

merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas
- Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.

- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen

RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi

- 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
- 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
- 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
- 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
- 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:

- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
- 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
- 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
- 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia

d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
- 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas

e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya- upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan

- 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

- 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Barat mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Semarang Barat

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	URUSAN KEWILAYAHAN				65.297.081.000	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				61.368.563.101	
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	4.977.081.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	4.079.931.298	
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 Angka	2.950.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 Angka	2.850.778.023	-
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,00 Dokumen	2.950.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,00 Dokumen	2.850.778.023	-
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.712.081.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.210.128.452	-
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.712.081.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.210.128.452	-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	12 Laporan		-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gisikdrono)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gisikdrono)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bongsari)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bongsari)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bojongsalaman)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bojongsalaman)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salaman mloyo)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salaman mloyo)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawang Sari)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawang Sari)	12 Laporan		-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	12 Laporan		-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)	12 Laporan		-
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	315.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	19.024.923	-
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	315.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.024.923	-
01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kota Semarang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	37.938.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kota Semarang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	39.716.555.539	-
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	21.668.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	20.111.134.978	-
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00 Lembaga Kemasyarakatan	76.280.480	-
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00 Unit	19.768.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00 Unit	16.943.000.000	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngemplak Simongan)	16.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngemplak Simongan)	16.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Manyaran)	11.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Manyaran)	11.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krapyak)	8.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krapyak)	8.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakharjo)	11.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakharjo)	11.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12.00 Unit		-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	9.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	9.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gisikdrono)	15.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gisikdrono)	15.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bongsari)	16.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bongsari)	16.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bojongsalaman)	11.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bojongsalaman)	11.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Salaman mloyo)	11.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Salaman mloyo)	11.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cabean)	8.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cabean)	8.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangayu)	13.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangayu)	13.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krobokan)	12.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krobokan)	12.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawangsari)	11.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawangsari)	11.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawangmas)	8.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawangmas)	8.00 Unit		-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kembangarum)	15.00 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kembangarum)	15.00 Unit		-
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.00 Pokmas/ Ormas	1.800.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.00 Pokmas/ Ormas	3.091.854.498	-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngemplak Simongan)	10.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngemplak Simongan)	10.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manyaran)	6.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manyaran)	6.00 Pokmas/ Ormas		-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyak)	7.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyak)	7.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tambakharjo)	10.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tambakharjo)	10.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kulon)	7.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kulon)	7.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kidul)	5.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kidul)	5.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gisikdrono)	4.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gisikdrono)	4.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bongsari)	8.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bongsari)	8.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bojongsalaman)	6.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bojongsalaman)	6.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Salaman Mloyo)	8.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Salaman Mloyo)	8.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cabean)	6.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cabean)	6.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangayu)	7.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangayu)	7.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krobokan)	4.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krobokan)	4.00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawang Sari)	7.00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawang Sari)	7.00 Pokmas/ Ormas		-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangmas)	4,00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangmas)	4,00 Pokmas/ Ormas		-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kembangarum)	5,00 Pokmas/ Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kembangarum)	5,00 Pokmas/ Ormas		-
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17,00 Dokumen	16.270.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17,00 Dokumen	19.605.420.561	-
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7,00 Lembaga Kemasyarakatan	16.270.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7,00 Lembaga Kemasyarakatan	19.595.900.472	-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Manyaran)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Manyaran)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krapyak)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krapyak)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakharjo)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakharjo)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gisikdrono)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gisikdrono)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bongsari)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bongsari)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bojongsalaman)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bojongsalaman)	7,00 Lembaga Kemasyarakatan		-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Salaman Mloyo)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Salaman Mloyo)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cabean)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cabean)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangayu)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangayu)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krobokan)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krobokan)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawang Sari)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawang Sari)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawangmas)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawangmas)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kembangarum)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kembangarum)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan		-
04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00 Laporan	9.520.089	-
01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	20.000.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	14.232.061	-
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00 Angka	20.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00 Angka	14.232.061	-
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.00 Laporan	20.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.00 Laporan	14.232.061	-
01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan	92.00 Persen	30.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	84.043.922	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	30.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	84.043.922	-
02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.00 Orang	30.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.00 Orang	84.043.922	-
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	22.332.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	17.473.800.181	-
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	24.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	11.291.637	-
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	1.566.286	-
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen		-
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.735.291	-
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	2.114.331	-
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	2.091.788	-
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.895.173	-
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.00 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.00 Dokumen	1.151.290	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Dokumen	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Dokumen	737.478	-
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4,00 Dokumen	17.907.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4,00 Dokumen	15.585.787.196	-
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85,00 Orang/bulan	17.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85,00 Orang/bulan	14.725.508.393	-
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	900.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	857.000.000	-
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1.262.093	-
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,00 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,00 Laporan	1.008.355	-
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	2.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1.008.355	-
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12,00 Bulan	1.000.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12,00 Bulan	390.545.824	-
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,00 Paket	80.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,00 Paket	68.270.200	-
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00 Paket	50.850.465	-
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5,00 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5,00 Paket	45.250.104	-
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6,00 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6,00 Paket	28.777.404	-
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang			85.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	58.651.616	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	69.650.000	-
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Dokumen	500.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Dokumen	69.096.035	-
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	1.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	508.840.275	-
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	337.565.687	-
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	171.274.588	-
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	400.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	201.300.616	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	163.887.840	-
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Laporan	37.412.776	-
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	1.500.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	776.034.633	-
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58.00 Unit	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58.00 Unit	587.051.950	-
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	130.570.585	-
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00 Unit	36.194.038	-
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	22.218.060	-

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2022

Dari data sebagaimana Tabel 2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023 Kecamatan Semarang Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil Review terhadap Target Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Barat pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 Urusan, 5 Program, 13 Kegiatan ,dan 101 Sub Kegiatan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan. Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2. 6

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

NIHIL

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Semarang Barat pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat

berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme,

dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Semarang Barat juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi. Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan public, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yaitu “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public, Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai AKIP
- b. Jumlah inovasi pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan
- c. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- e. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	79,24
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	1. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	20,00
	2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Barat bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4

program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 61.368.563.101 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 17.473.800.181 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 43.894.762.920 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01	URUSAN KEWILAYAHAN							61.368.563.101	60.318.890.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT							61.368.563.101	60.318.890.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		92.00	Persen	4.079.931.398	-	92.00	4.525.083.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan		2.00	Angka	2.850.778.023	-	2.00	2.850.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	1.00	Dokumen	2.850.778.023	APBD Kota Semarang	-	1.00	2.850.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100.00	Persen	1.210.128.452	-	100.00	1.453.083.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	Kota Semarang	100.00	Persen	1.210.128.452	APBD Kota Semarang	-	100.00	1.453.083.000
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Kota Semarang	4.00	Kegiatan			-	4.00	

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	Kota Semarang	100.00	Persen				100.00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100.00	Persen	19.024.923		-	100.00	222.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Kota Semarang	5.00	Kegiatan	19.024.923	APBD Kota Semarang	-	5.00	222.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		98.00	Persen	39.716.555.539		-	98.00	38.654.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100.00	Kegiatan	20.111.134.978		-	100.00	38.514.600.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	50.00	Angka	76.280.480	APBD Kota Semarang	-	50.00	100.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Kota Semarang	16.00	Kegiatan	16.943.000.000	APBD Kota Semarang	-	16.00	19.468.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Kota Semarang	107.00	Kegiatan	3.091.854.498	APBD Kota Semarang	-	107.00	18.946.600.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya		17.00	Dokumen	19.605.420.561		-	17.00	140.000.000

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Kota Semarang	17.00	Dokumen	19.595.900.472	APBD Kota Semarang	-	17.00	120.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Kota Semarang	16.00	Kegiatan	9.520.089	APBD Kota Semarang	-	16.00	20.000.000
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan		1.00	Kelurahan			-	1.00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum		15.00	Persen	14.232.061		-	15.00	20.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		20.00	Angka	14.232.061		-	20.00	20.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	10.00	Kegiatan	14.232.061	APBD Kota Semarang	-	10.00	20.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		92.00	Persen	84.043.922		-	92.00	40.000.000

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan		5.00	Angka	84.043.922		-	5.00	40.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Semarang	5.00	Kegiatan	84.043.922	APBD Kota Semarang	-	5.00	40.000.000
NON URUSAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100.00	Persen	17.473.800.181		-	100.00	17.079.207.000
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100.00	%				100.00	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100.00	%				100.00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		5.00	Dokumen	11.291.637		-	5.00	29.500.000
		Dokumen pelaporan		2.00	Dokumen				2.00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	Kota Semarang	2.00	Dokumen	1.566.286	APBD Kota Semarang	-	2.00	4.500.000

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Barat	Kota Semarang	1.00	Dokumen		APBD Kota Semarang	-	1.00	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1.00	Dokumen	1.735.291	APBD Kota Semarang	-	1.00	4.500.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1.00	Dokumen	2.114.331	APBD Kota Semarang	-	1.00	4.500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1.00	Dokumen	2.091.788	APBD Kota Semarang	-	1.00	4.500.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1.00	Dokumen	1.895.173	APBD Kota Semarang	-	1.00	4.500.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1.00	Dokumen	1.151.290	APBD Kota Semarang	-	1.00	3.500.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Semarang	1.00	Dokumen	737.478	APBD Kota Semarang	-	1.00	3.500.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4.00	Dokumen	15.585.787.196		-	4.00	15.809.500.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100.00	Persen	14.725.508.393	APBD Kota Semarang	-	100.00	15.000.000.000

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100.00	Persen	857.000.000	APBD Kota Semarang	-	100.00	800.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	Kota Semarang	1.00	Dokumen	1.262.093	APBD Kota Semarang	-	1.00	3.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	2.00	Dokumen	1.008.355	APBD Kota Semarang	-	2.00	3.000.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1.00	Dokumen	1.008.355	APBD Kota Semarang	-	1.00	3.500.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum		12.00	Bulan	390.545.824		-	12.00	600.207.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	20.00	Jenis	68.270.200	APBD Kota Semarang	-	20.00	65.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	5.00	Jenis	50.850.465	APBD Kota Semarang	-	5.00	45.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Semarang	5.00	Jenis	45.250.104	APBD Kota Semarang	-	5.00	35.207.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	6.00	Jenis	28.777.404	APBD Kota Semarang	-	6.00	30.000.000

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	100.00	orang	58.651.616	APBD Kota Semarang	-	100.00	60.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Semarang	10.00	kegiatan	69.650.000	APBD Kota Semarang	-	10.00	65.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5.00	Jenis	69.096.035	APBD Kota Semarang	-	5.00	300.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100.00	Persen	508.840.275		-	100.00	200.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kota Semarang	5.00	Jenis	337.565.687	APBD Kota Semarang	-	5.00	140.000.000
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	5.00	Jenis	171.274.588	APBD Kota Semarang	-	5.00	60.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor		100.00	Persen	201.300.616		-	100.00	200.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	12.00	bulan	163.887.840	APBD Kota Semarang	-	12.00	160.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Semarang	5.00	jenis	37.412.776	APBD Kota Semarang	-	5.00	40.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.00	Persen	776.034.633		-	100.00	240.000.000

Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Kota Semarang	58.00	unit	587.051.950	APBD Kota Semarang	-	58.00	100.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	Kota Semarang	2.00	gedung	130.570.585	APBD Kota Semarang	-	2.00	50.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	5.00	jenis	36.194.038	APBD Kota Semarang	-	5.00	50.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	Kota Semarang	3.00	jenis	22.218.060	APBD Kota Semarang	-	3.00	40.000.000
JUMLAH						61.368.563.101				60.318.890.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Barat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

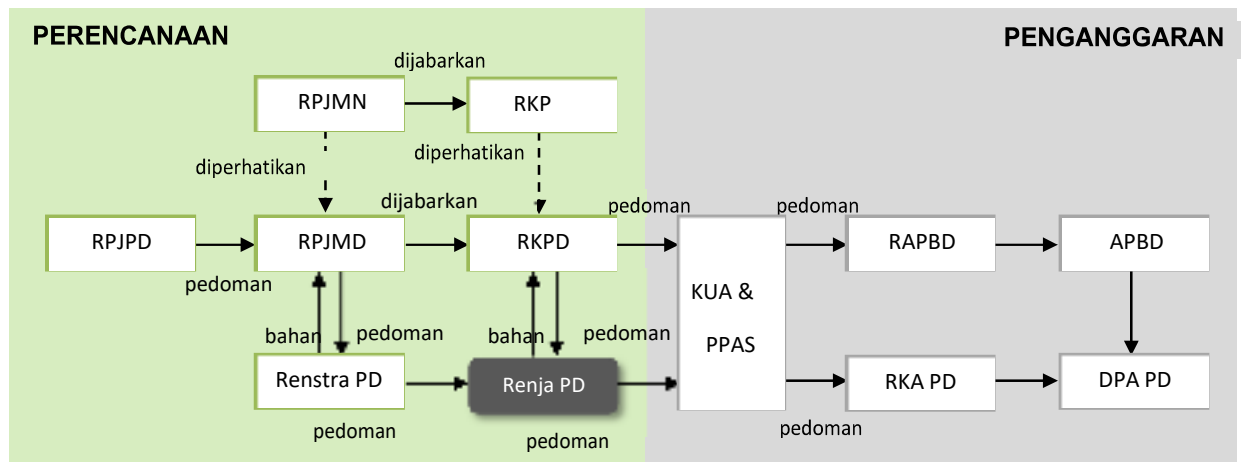
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk

menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Timur, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Timur.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Timur di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta

sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, serta tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan Kecamatan Semarang Timur.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Timur

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Timur.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Semarang Timur melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 40.050.821.717 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 37.016.420.657 atau sebesar 92%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Timur

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	-	100	100	100	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	-	100	100	100	-	-	-
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	-	100	100	100	-	-	-
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	-	-	-	-	100	45	45
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	-	-	-	-	100	50	50
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	-	-	-	-	100	40	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	-	100	100	100			
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen					2 dokumen	1 dokumen	50%
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2 dokumen					2 dokumen	1 dokumen	50
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Dokumen LKPJ	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	2 dokumen	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-	100%	98,2%	98,2			
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%					100%	30%	30%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen					3 dokumen	1 dokumen	33,33
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
.		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	-	-	-	-	100	50	50
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja PA,KPA,PPK,Bendahara dan Bendahara Pembantu Terpenuhi	100%	-	100%	91	91	-	-	-
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	-	-	-	100%	45%	45

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	-	100%	89,03	89,03	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%					100%	30%	30
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	2 jenis	40%
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	-	-	-	-	4 jenis	3 jenis	75%
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23 jenis	-	-	-	-	23 jenis	23 jenis	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	95	95			
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	90	90			
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis					5 jenis	1 jenis	20
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Jamuan rapat	100%	-	100%	90	90			
		Jumlah tamu yang berkunjung	1.700 orang					1.700 orang	155 orang	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	100%	-	100%	95	95			
		Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	-	100%	10	10			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	-	100%	50	50			
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	9 kegiatan					10 kegiatan	1 kegiatan	10
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	-	100%	86	86			
			8 jenis					8 jenis	2 jenis	25%
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%					100%	30%	30
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	-	100%	100	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1 jenis					2 jenis	1 jenis	50
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	-	-		100%	40%	40
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	-	-	-	100%	40%	40
		Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	-	-	-	0%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	-	-	-	-	9 jenis	5 jenis	55,56
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	98,75	98,75	-	-	-
		Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	-	-	-	-	100%	40%	40
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai	26 unit	-	26 unit	26 unit	100	-	-	-
		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	0	-	-	-	-	26 unit	12 unit	46,15
		pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	26 unit	-	-	-	-	0 unit	0 unit	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah instalasi listrik kantor yang diperbaiki/dinaikkan	2 unit	-	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor	2 buah	-	2 buah	2 buah	100	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	-	-	-	-	2 gedung	2 gedung	100
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenan	11 gedung	-	11 gedung	11 gedung	100	-	-	-
		Jumlah Rumah dinas yang di pelihara	10 unit	-	10 unit	9 unit	90	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	13 jenis	-	-	-	-	13 jenis	4 jenis	30,77
7.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	-	10 unit	10 unit	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 buah		0 buah	0 buah	0	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95%		95%	-	-	-	-	-
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	477.561 pelayanan	-	477.561 pelayanan	16.000 pelayanan		-	-	-
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	19.000 pelayanan		19.000 pelayanan	16.000 pelayanan		-	-	-
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	-	-	-	-	91%	89,51%	98,43
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	200%	200			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	100%					100%	0%	0%
7.01.0.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	-	1 kegiatan	2 kegiatan	200			
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen					4 dokumen	1 dokumen	25
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	100%	107,02%	107,02			
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-				100%	20%	20
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	4 kegiatan	-	1 kegiatan	2 kegiatan	200	2 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah pelayanan administratif di kantor kecamatan dan kelurahan	19.000 jumlah pelayanan		19.000 jumlah pelayanan	16.000 jumlah pelayanan		-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan					2 kegiatan	0 kegiatan	0
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	-	-	-	-	100%	34%	34%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100%					100%	32%	32
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100%					100%	32%	32
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100%					100%	27%	27
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	100%					100%	34%	34
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kebonagung)									
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100%					100%	30%	30
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100%					100%	22%	22
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100%					100%	27%	27

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100%					100%	33%	33
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100%					100%	26%	26
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100%					100%	26%	26
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	-	100%	79%	79	100%	30%	30
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 kegiatan	-	3 kegiatan	2 kegiatan	79	-	-	-
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	-	-	-	100%	30%	30
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	19.954 kegiatan	-	19.954 kegiatan	440 kegiatan		-	-	-
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	55%	-	55%	55%	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95%	-				97%	44%	45,36
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	-	100%	78,15%	78,15			
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 kegiatan	-				327 kegiatan	63 kegiatan	19,27
7.01.03.2.02.01	Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	147 lokasi	-	147 lokasi	147 lokasi	100	-	-	-
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	136 angka	-	-	-	-	136 angka	136 angka	100
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	10 paket		10 paket	10 paket	100	10 kegiatan	0 kegiatan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan	48 paket		48 paket	48 paket	100	-	-	-
		Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	42 paket		42 paket	42 paket	100	-	-	-
		Jumlah pembangunan gapuro, Balai RW, Poskamling, Taman di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	1 paket		1 paket	1 paket	100	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 kegiatan					10 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan kemijen	14 kegiatan					14 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	5 paket	-	0 paket	0 paket	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan rejomulyo	15 kegiatan					15 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	7 paket	-	7 paket	7 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan mlatibaru	12 kegiatan					12 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatiharjo	13 kegiatan					13 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	3 paket		3 paket	3 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	8 kegiatan					8 kegiatan	0 kegiatan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kebonagung								
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	5 paket	-	5 paket	5 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bugangan	14 kegiatan					14 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	7 paket	-	7 paket	7 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sarirejo	11 kegiatan					11 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejosari	13 kegiatan					13 kegiatan	0 kegiatan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangturi	16 kegiatan					16 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan	6 paket	-	6 paket	6 paket	100			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangtempel	10 kegiatan					10 kegiatan	0 kegiatan	0
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan	10 kegiatan	-	10 kegiatan	5 kegiatan	50	-	-	-
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan	48 kegiatan		0 kegiatan	0 kegiatan	0			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 kegiatan					30 kegiatan	4 kegiatan	13,33
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	10 kegiatan	-	5 kegiatan	7 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	10 kegiatan					10 kegiatan	9 kegiatan	90
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	0 kegiatan	0 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	12 kegiatan					12 kegiatan	4 kegiatan	33,33
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	0 kegiatan	0 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	15 kegiatan					15 kegiatan	7 kegiatan	46,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	5 kegiatan	4 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	15 kegiatan				15 kegiatan	2 kegiatan	13,33	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	5 kegiatan	3 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	14 kegiatan				14 kegiatan	7 kegiatan	50	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	7 kegiatan	5 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	17 kegiatan				17 kegiatan	8 kegiatan	47,06	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	9 kegiatan	-	4 kegiatan	2 kegiatan				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	20 kegiatan					20 kegiatan	8 kegiatan	40
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	13 kegiatan					13 kegiatan	7 kegiatan	53,85
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	0 kegiatan	0 kegiatan		19 kegiatan	4 kegiatan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	19 kegiatan					19 kegiatan	4 kegiatan	21,05
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan	5 kegiatan	-	0 kegiatan	0 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	13 kegiatan					13 kegiatan	3 kegiatan	23,08

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen					8 dokumen	4 dokumen	50
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jasa Tenaga Non ASN untuk menunjang administrasi Perkantoran	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan	480 kegiatan	-	480 kegiatan	440 kegiatan				
		Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	6 kegiatan	-	6 kegiatan	3 kegiatan	50	-	-	-
		Laporan Hasil Monev dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	100%	-	100%	100%	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen					8 dokumen	4 dokumen	50
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	730 kegiatan	-	730 kegiatan	730 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	30 kegiatan		30 kegiatan	5 kegiatan		-	-	-
		Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	80%	-	80%	80%	100	-	-	-
		Persentase Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100%	-	100%	100%	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan	80%	-	80%	87%		-	-	-
		Persentase jumlah titik pantau adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	50%	-	50%	40%		-	-	-
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	-	-	-	-	1 kelurahan	0 kelurahan	-
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah siskamling dilingkungan RT	90 %	-	90 %	80 %	88,89 %	-	-	-
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	-	-	-	-	10%	4%	40
7.01.04.2.03	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	-	100 %	83,75 %	83,75 %			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 angka					40 angka	24 angka	60
7.01.04.2.03.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	80%	-	80%	70%				
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	50%	-	50%	40%				
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 angka	-	-	-	-	2 angka	1 angka	50
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	-	-	-	-	100%	0%	0
07.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	0 kegiatan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
07.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 kegiatan	-	-	-	-	100%	0%	0

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021 :

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Timur pada Tahun 2021 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (empat) Program dengan 16 (Enam Belas) Indikator Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan 80 (delapan puluh) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

b) Dari 16 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang melampaui target, 8 indikator memenuhi target, serta 7 indikator tidak memenuhi target. Pada tahun 2021 pandemi covid-19 berangsur-angsur berkurang sehingga jumlah pelayanan administratif yang diberikan kepada masyarakat meningkat, berdampak pada pencapaian pada indikator jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Semarang Timur melampaui target yang telah ditentukan.

Sedangkan pada indikator jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan indikator persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang tidak memenuhi target dikarenakan meskipun pandemi covid-19 sudah berkurang tetapi pendapatan belum sepenuhnya pulih, sehingga anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas, yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik.

c) Dari 12 kegiatan, terdapat 5 kegiatan yang memenuhi target, serta 7 kegiatan tidak memenuhi target. Sedangkan dari 80 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, 46 indikator memenuhi target, serta 33 indikator tidak memenuhi target. Indikator yang melebihi target adalah jumlah pelayanan administratif di Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan 33 indikator yang tidak memenuhi target kinerja yaitu salah satunya adalah sebagai berikut:

- Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan
- Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
- a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 7 indikator program, 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan 60 indikator
 - b) Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 indikator diperkirakan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 dapat memenuhi target serta 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra .
 - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra dan 1 Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2**Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan
Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
Urusan Wajib Kewilayahan		40.050.821.717	37.016.420.657	92%	3.034.401.060
OPD : Kecamatan Semarang Timur					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.862.623.159	12.479.257.182	90%	1.383.365.977
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.259.456	7.965.000	46%	9.294.456
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.717.830	3.810.000	81%	907.830
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.190.900	761.000	35%	1.429.900
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.943.100	796.000	27%	2.147.100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.247.418	761.000	34%	1.486.418
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.243.418	761.000	34%	1.482.418
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	759.330	0	0	759.330
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.157.460	1.076.000	50%	1.081.460
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.351.927.421	10.440.455.112	92%	911.472.309
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.868.414.851	10.015.112.112	92%	853.302.739
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	479.680.000	422.460.000	88%	57.220.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.242.300	1.881.000	84%	361.300
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	752.090	460.000	61%	292.090
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	838.180	542.000	65%	296.180
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.191.857.685	963.881.397	81%	227.976.288
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.979.800	3.971.000	66%	2.008.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.367.059	131.153.155	91%	13.213.904
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.724.940	12.087.242	49%	12.637.698

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.651.131	10.448.000	77%	3.203.131
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	77.655.000	40.534.000	52%	37.121.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.184.000	15.065.000	29%	37.119.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	873.295.755	750.623.000	86%	122.672.755
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.729.655	143.254.210	68%	68.475.445
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.729.655	143.254.210	68%	68.475.445
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.844.973	67.492.387	71%	27.352.586
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.844.973	67.492.387	71%	27.352.586
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.003.969	856.209.076	86%	138.794.893
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.490.000	135.456.500	69%	60.033.500
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240.601.499	196.491.000	82%	44.110.499
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	514.903.550	501.660.276	97%	13.243.274
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.008.920	22.601.300	51%	21.407.620
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.223.081.415	9.160.884.074	90%	1.062.197.341
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.036.390	3.656.500	13%	25.379.890
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.036.390	3.656.500	13%	25.379.890
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.625.841.273	8.710.379.148	90%	915.462.125
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	868.136.544	817.294.529	94%	50.842.015
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	1.232.474.989	1.118.417.458	91%	114.057.531
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	668.780.000	603.776.456	90%	65.003.544

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)				
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	979.836.029	868.862.798	89%	110.973.231
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	656.219.073	588.216.052	90%	68.003.021
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	446.249.846	389.649.409	87%	56.600.437
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	1.008.349.908	922.418.828	91%	85.931.080
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	786.599.926	711.284.978	90%	75.314.948
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	1.903.970.052	1.740.999.334	91%	162.970.718
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	456.074.885	388.096.663	85%	67.978.222
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	619.150.021	561.362.643	91%	57.787.378
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	568.203.752	446.848.426	79%	121.355.326
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	568.203.752	446.848.426	79%	121.355.326
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.672.101.006	15.091.228.905	96%	580.872.101
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.645.111.205	14.095.729.505	96%	549.381.700
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	116.520.452	110.868.000	95%	5.652.452
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	7.166.935.574	7.072.319.633	99%	94.615.941
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	720.372.636	713.142.000	99%	7.230.636

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	606.399.981	593.449.000	98%	12.950.981
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	349.720.600	315.345.000	90%	34.375.600
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	487.163.118	479.770.000	98%	7.393.118
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	644.067.666	638.083.000	99%	5.984.666
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	276.533.802	273.205.000	99%	3.328.802
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	276.154.572	272.803.000	99%	3.351.572
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	606.607.983	599.769.000	99%	6.838.983
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	661.170.063	652.785.020	99%	8.385.043
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	660.798.628	654.080.000	99%	6.718.628
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	164.044.724	76.697.550	47%	87.347.174
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	215.024.699	204.862.528	95%	10.162.171
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	166.319.864	151.876.615	91%	14.443.249
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	175.049.632	136.050.906	78%	38.998.726
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	195.972.509	141.986.700	72%	53.985.809
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	179.167.135	131.680.193	73%	47.486.942
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	248.504.159	228.694.801	92%	19.809.358
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	174.610.082	145.090.029	83%	29.520.053
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	220.277.904	193.204.000	88%	27.073.904

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	198.963.681	189.214.890	95%	9.748.791
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	134.731.741	120.752.640	90%	13.979.101
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.026.989.801	995.499.400	97%	31.490.401
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	98.927.801	67.699.400	68%	31.228.401
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	928.062.000	927.800.000	99,97 %	262.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	293.016.137	285.050.496	97%	7.965.641
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	293.016.137	285.050.496	97%	7.965.641
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	293.016.137	285.050.496	97%	7.965.641

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan kewilayahan, 4 program dan 12 kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur adalah sebesar Rp 40.050.821.717. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 37.016.420.657 dengan sisa sebesar Rp 3.034.401.060 dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar 11.348.094.851 realisasi 10.437.572.112 (91,98%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 910.522.739 (30%)
- b. **Belanja Langsung**: anggaran sebesar Rp.28.702.726.866 Dengan realisasi sebesar Rp. 26.578.848.545 (92,6%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.123.878.321 (70%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Timur

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.
1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian

- Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, protokol dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba

- pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
 - t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
 - u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
 - v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
 - w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
 - x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;

- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahannya penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat; Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 38
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan

- Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
 - v. menyiapkan kegiatan administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
 - w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
 - x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
 - y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
 - z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
 - aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur mengacu pada indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran OPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR									
Tujuan :									
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	81,95%	83,17%	-	-	80,25%	80,50%	-	-
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	87%	-	-	89%	90%	-	-
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	87,50	88	-	-	90	91

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Informasi									
Sasaran :									
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	81,95%	83,17%	-	-	80,50%	80,50%	-	-
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	-	-	64	65			70%	71%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	1	1			1	2
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	100%	100%			100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	45%	50%			45%	50%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	-	-	20%	40%			20%	40%

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Tingkat Partisipasi Masyarakat”**, masih dibawah target, dimana realisasinya sebesar 80,50 % dari target sebesar 83,17%;

Tujuan **“Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, telah

melebihi target, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 90%; Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD” telah menyamai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%.
 - 2) Indikator “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan”, telah menyamai target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100%*;
- b. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu indikator “Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan” masih dibawah target, dimana realisasinya sebesar 80,50% dari target sebesar 83,17%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Timur di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah,

dimana dalam kurun waktu tahun 2016-2021 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2015-2020, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Persentase Usulan Musrenbang yang
Diakomodir dalam Renja Kecamatan Semarang Timur
Sampai Dengan Tahun 2020 -2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	Tahun Renja	
			2021	2022
1	Jumlah Usulan	Usulan	354	200
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan	193	136
3	Persentase Usulan yang terakomodir	%	54,52%	68%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 68 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 54,52 %.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Timur

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Timur tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan

komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Semarang Timur. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6
Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.1	URUSAN KEWILAYAHAN				41.507.726.000	URUSAN KEWILAYAHAN				41.634.104.531	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.824.069.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.045.351.032	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
X.XX.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen pelaporan	10 dokumen	17.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	25.058.043	
X.XX.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	4.141.123	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		
X.XX.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.702.950	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen		
X.XX.01 .2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.261.150	

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		
X.XX.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.702.950	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen		
X.XX.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.261.150	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.079.360	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1.909.360	

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen		
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	12.053.493.723	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.877.152.083	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	11.417.826.212	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	10.343.477.531	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	630.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	528.560.000	
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.767.511	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.157.760	
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.060.320	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	700.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	896.472	
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	743.375.277	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	851.408.680	
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	301.500.395	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.375.277	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.080.755	
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12.966.770	

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	84.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	118.609.958	
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	182.930.474	
X.XX.01 .2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	300.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	179.320.328	
X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	225.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	37.467.640	
X.XX.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	225.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	37.467.640	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit		
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	305.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	635.546.316	
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	155.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	269.599.756	
X.XX.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	365.946.560	
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	480.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	618.718.270	
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	177.717.970	
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	122.032.710	
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	115.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	220.898.860	
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	98.068.730	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	92%	3.112.757.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	92%	3.080.253.499	

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PELAYANAN PUBLIK		berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			PELAYANAN PUBLIK		berbasiskan teknologi informasi (SPBE)			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	40.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	70.607.920	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	70.607.920	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.125.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.005.048.104	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2.125.600.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2.005.048.104	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	947.157.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.004.597.475	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	947.157.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	1.004.597.475	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	24.545.900.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	25.385.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391 kegiatan	24.271.900.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391 kegiatan	13.422.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	68.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	65.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	12.517.225.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	11.167.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit		

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	11.686.675.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.190.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	94 dokumen	274.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	94 dokumen	11.963.200.000	

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	4 lembaga kemasyarakatan	174.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	4 lembaga kemasyarakatan	11.913.200.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	9 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Usaha	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Usaha	1 Laporan	50.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	35.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	35.000.000	

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	88.300.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan2	2 kegiatan	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan2	2 kegiatan	88.300.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	25.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	88.300.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.7**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan****Tahun 2022 Kota Semarang**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehab Saluran dengan Bis U	Saluran Lancar dan Indah	128,4 M2	Saluran rusak dan air mengalir tidak lancar
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehab Saluran dengan Bis U	Saluran Lancar dan Indah	111 M2	Saluran rusak dan air mengalir tidak lancar
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Betonisasi Jalan	Jalan Layak Pakai	787,5 M	Jalan Rusak dan sebagian jalan sudah dibetonisasi
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Betonisasi Jalan	Jalan Layak Pakai	6.120 M	Jalan Rusak
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Betonisasi Jalan	Jalan Layak Pakai	225 M	Jalan Rusak
6	Pemberdayaan Masyarakat di	Penerangan jalan umum	Penerangan yang baik	100 UNIT	penerangan kurang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Kelurahan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				memadai
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peninggian jalan Jl. Ciliwung 9 RT 07 RW 05	Jalan Layak Pakai	600 M	Jalan Rusak
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembuatan tutup saluran bagian depan dan belakang Jl. Ciliwung 2 RT 09 RW 05	Saluran Lancar dan Indah	214 M	Saluran Tidak Lancar
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peninggian Jalan Jl.Ciliwung Raya RT 01 RW 05	Jalan Layak Pakai	1.524 M	Jalan Rusak
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peninggian jalan (lanjutan) Jl. Cilosari 01, 02	Jalan Layak Pakai	600 M	Jalan Rusak
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Betonisasi Jl Musi Raya	Jalan Layak Pakai	5.250 M	Jalan Rusak
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Perbaikan Rumah Dinas Kelurahan Buganagan Jl.Citandui Sltm No.30	Rumah Dinas Layak Huni	1 UNIT	Rumah Dinas Rusak
13	Pemberdayaan	Perbaikan	Balai	1 UNIT	Balai Rusak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Masyarakat di Kelurahan	Balai Kelurahan Bugangan	Kelurahan Layak Guna		
14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengaspalan Jalan Kp. Slamet	Jalan Layak Pakai	180 M	Aspal sudah Mengelupas
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengaspalan Jalan Kp.Subuh	Jalan Layak Pakai	400 M	Paving rusak berat diganti aspal baru

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Semarang Timur pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang sebanyak 15 Buah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8

- 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
- 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

PP6 Penguatan Kemiskinan

PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter

PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial

PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar

PP 2 Infrastruktur ekonomi

PP 3 Infrastruktur Perkotaan

PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan

PP 5 Transformasi Digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim

PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
- PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- PP 3 Penegakan Hukum Nasional
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, OPD Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan

fokus pada:

Kemiskinan : basic life access, penguatan sustainable livelihood, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;

- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:
- a. Direct services (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, OPD juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;

- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3-8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	Indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,70
11	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	Indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur

Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Timur yaitu:

- a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran NILAI AKIP
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator sasaran Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
- c. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	angka	65
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	50
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	persen	40

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2023 berdasarkan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nomenklatur Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.KEMIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.REJOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.MLATIBARU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.MLATIHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.KEBONAGUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.BUGANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.SARIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		KEL.REJOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.KARANGTURI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL.KARANGTEMPEL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KEMIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. REJOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MLATIHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MLATIBARU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KEBONAGUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Kelurahan yang Terbangun KEL. BUGANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SARIREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. REJOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGTURI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGTEMPEL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KEMIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. REJOMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MLATIHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MLATIBARU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KEBONAGUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BUGANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SARIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		KEL. REJOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGTURI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. KEMIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. REJOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. MLATIHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. MLATIBARU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. KEBONAGUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. BUGANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. SARIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. REJOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. KARANGTURI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan KEL. KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
	Masyarakat	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,	Tertib Penyusunan Dokumen

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Semarang Timur
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Semarang Timur
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
	ran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Semarang Timur
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Semarang Timur
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Semarang Timur
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Semarang Timur
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE	PROGRAM / KEG / SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026;
- b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isuisu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/ Kelurahan;
- d. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program dengan 7 indikator program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2022 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan.
- c. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2022 adalah sebanyak 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 43.078.731.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Semarang Timur sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rancangan Program / kegiatan rencana kerja (RENJA) Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.1	URUSAN KEWILAYAHAN			41.634.104.531		41.507.726.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.045.351.032	100 %	13.824.069.000
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %		100 %	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Semarang Timur	2 dokumen	25.058.043	2 dokumen	17.200.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	4.141.123	1 dokumen	3.500.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.702.950	1 dokumen	2.700.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.261.150	1 dokumen	2.400.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.702.950	1 dokumen	2.800.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.261.150	1 dokumen	2.800.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.079.360	1 dokumen	1.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1.909.360	2 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Semarang Timur	100%	10.877.152.083	100%	12.053.493.723
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	10.343.477.531	66 Orang/bulan	11.417.826.212
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	528.560.000	12 dokumen	630.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.157.760	1 Laporan	3.767.511
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.060.320	1 Laporan	700.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	896.472	1 dokumen	700.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Semarang Timur	100%	851.408.680	100%	743.375.277
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	1 Paket	7.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	301.500.395	3 Paket	200.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.080.755	12 Paket	22.375.277
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12.966.770	10 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	118.609.958	12 Laporan	84.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	182.930.474	10 Laporan	120.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	179.320.328	3 dokumen	300.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Semarang Timur	100%	37.467.640	100%	225.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	37.467.640	4 unit	225.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Semarang Timur	100%	635.546.316	100%	305.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	269.599.756	12 laporan	155.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	365.946.560	7 laporan	150.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Semarang Timur	100%	618.718.270	100%	480.000.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	177.717.970	26 unit	180.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	122.032.710	2 unit	150.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	220.898.860	3 unit	115.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	98.068.730	2 unit	35.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.080.253.499	92%	3.112.757.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	70.607.920	1 angka	40.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	70.607.920	4 dokumen	40.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	2.005.048.104	100%	2.125.600.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 laporan	2.005.048.104	12 laporan	2.125.600.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		12 laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		12 laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.004.597.475	100%	947.157.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	1.004.597.475	3 laporan	947.157.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	25.385.200.000	98%	24.545.900.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	391 kegiatan	13.422.000.000	391 kegiatan	24.271.900.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	65.000.000	94 lembaga kemasyarakatan	68.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	7 unit	11.167.000.000	7 unit	12.517.225.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	11 unit		11 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	13 unit		13 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	12 unit		12 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	8 unit		8 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	8 unit		8 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	9 unit		9 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	11 unit		11 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	14 unit		14 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	17 unit		17 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	10 unit		10 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		4 pokmas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		4 pokmas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		4 pokmas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas		4 pokmas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	94 dokumen	11.963.200.000	94 dokumen	274.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	11.913.200.000	4 lembaga kemasyarakatan	174.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		9 lembaga kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	35.000.000	15%	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35.000.000	35 angka	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	2 laporan	35.000.000	2 laporan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	88.300.000	92%	25.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan ²	2 kegiatan	88.300.000	2 kegiatan	25.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	88.300.000	200 orang	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 sesuai RKPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel (terlampir).

Tabel 4. 1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA RENJA KCAMATAN
SEMARANG TIMUR TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.1	URUSAN KEWILAYAHAN			41.634.104.531
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.045.351.032
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	25.058.043
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	4.141.123
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.702.950
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.261.150
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.702.950
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.261.150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.079.360
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1.909.360
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Semarang Timur	100%	10.877.152.083
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	10.343.477.531
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	528.560.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.157.760
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.060.320
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	896.472
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Semarang Timur	100%	851.408.680
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	301.500.395
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.080.755
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12.966.770
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	118.609.958
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	182.930.474
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	179.320.328
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Semarang Timur	100%	37.467.640
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	37.467.640
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Semarang Timur	100%	635.546.316
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	269.599.756
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	365.946.560

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Semarang Timur	100%	618.718.270
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	177.717.970
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	122.032.710
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	220.898.860
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	98.068.730
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.080.253.499
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	70.607.920
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	70.607.920
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	2.005.048.104

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.004.597.475
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	1.004.597.475
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	25.385.200.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	391 kegiatan	13.422.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	65.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	11.167.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	94 dokumen	11.963.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	11.913.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	35.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	35.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	88.300.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	88.300.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	88.300.000

Adapun Program Kegiatan Tahun 2023 yang merupakan Program Kegiatan berkelanjutan yang menjadi Prioritas adalah :

1. Kegiatan Pengembangan budaya Inovasi Pelayanan akhir Pekan dan Malam Hari yang di gelar pada minggu pertama setiap bulan dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Semarang memperpanjang pelayanan ini hingga Tahun 2023
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Pengembangan sistem teknologi informasi mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
4. Untuk menunjang kelancaran urusan Pemerintahan umum dibentuk FORKOPINCAM

Urusan Pemerintahan Umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
 - b. Pembinaan Pesatuan dan kesatuan bangsa
 - c. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama ras dan Golongan lainnya
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang Undangan
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- Forkopincam diketuai oleh Camat dengan anggota terdiri dari :

- a. Kepala kepolisian sektor
- b. Komandan Komando Rayon Militer

Tugas FORKOPINCAM adalah memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada forkopincam

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Timur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD

Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

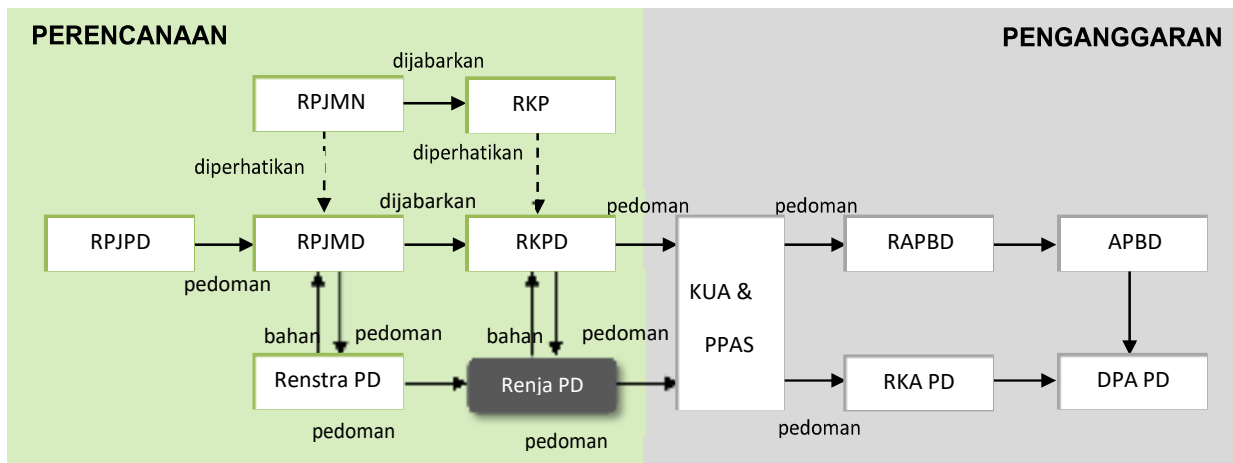
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Tengah, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja OPD Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang

Tengah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Semarang Tengah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 46.898.285.755,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 42.676.466.340,00 atau sebesar 91%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	92%	85%	85%	100%	92%	92%	96,8%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	1 angka				1 angka	1 angka	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dok				4 dok	4 dok	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%				100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Jagalan										
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Gabahan										
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Sekayu										
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pekunden										
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kelurahan										
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	210 angka	220 angka		220		220 angka	220 angka	104%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 kegiatan	9 kegiatan				9 kegiatan	9 kegiatan	90%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13 kegiatan	13 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12 kegiatan	12 kegiatan	10%	10%	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 kegiatan	17 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	17 kegiatan	17 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Gabahan

Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13 kegiatan	13 kegiatan	6 kegiata n	6 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%
Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiata n	10 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9 kegiatan	9 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	9 kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 kegiatan	12 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Bangunharjo										
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15 kegiatan	15 kegiatan	10 kegiata n	10 kegiatan	100%	15 kegiatan	15 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18 kegiatan	18 kegiatan	5 kegiata n	5 kegiatan	100%	18 kegiatan	18 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12 kegiatan	12 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13 kegiatan	13 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	12 kegiatan	12 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelurahan Karangkidul								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10 kegiatan	10 kegiatan	6 kegiata n	6 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10 kegiatan	10 kegiatan	6 kegiata n	6 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28 kegiatan	28 kegiatan				28 kegiatan	28 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67 kegiatan	67 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	67 kegiatan	67 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	57 kegiatan	57 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	57 kegiatan	57 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pembangunan di Kelurahan Jagalan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67 kegiatan	67 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	67 kegiatan	67 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66 kegiatan	66 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	66 kegiatan	66 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64 kegiatan	64 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	100%	64 kegiatan	64 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61 kegiatan	61 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	61 kegiatan	61 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	71 kegiatan	71 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	71 kegiatan	71 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelurahan Kembanghari								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68 kegiatan	68 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	68 kegiatan	68 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57 kegiatan	57 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	57 kegiatan	57 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57 kegiatan	57 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	57 kegiatan	57 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73 kegiatan	73 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	73 kegiatan	73 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64 kegiatan	64 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	100%	64 kegiatan	64 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Purwodinatan										
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64 kegiatan	64 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	64 kegiatan	64 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62 kegiatan	62 kegiatan	27 kegiata n	27 kegiatan	100%	62 kegiatan	62 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Usaha Ekonomi Masyarakat										
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	5 kelurahan	1 kelurahan			0	1 kelurahan	1 kelurahan	20%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	19%	12%	2%	2%	100%	12%	12%	63%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24%	34%				34%	34%	41,6%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	2 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60%	30%				30%	30%	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20 dokumen	20 dokumen	20 dokum en	20 dokume n	100%	20 dokume n	20 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan	14 dokumen	14 dokumen	14 dokum en	14 dokume n	100%	14 dokume n	14 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	2 dokume n	100%	2 dokume n	2 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokum en	1 dokume n	100%	1 dokume n	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 jenis	12 jenis	100%	100%	100%	12 jenis	12 jenis	80%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45 jenis	45 jenis	100%	100%	100%	45 jenis	45 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 jenis	5 jenis	100%	100%	100%	5 jenis	5 jenis	71,42%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamud	Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	2500 orang				2500 orang	2500 orang	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40 kegiatan	40 kegiatan	100%	100%	100%	40 kegiatan	40 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 jenis	1 jenis				1 jenis	1 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100			100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	10 jenis	9 jenis	100%	100%	100%	9 jenis	9 jenis	90%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Bangunan Lainnya										
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	1 gedung	3 gedung	3 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/Su bKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Lainnya										
		Jumlah pemeliharaan/reha bilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	1 jenis	100%	100%	100%	1 jenis	1 jenis	100%

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Semarang Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Semarang Tengah:
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 16 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 16 Indikator kinerja program, tidak terdapat indikator yang melampaui target, 12 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 16 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 16 Indikator kinerja program, tidak terdapat indikator yang melampaui target, 12 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%	SELISIH ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.528.545.698	16.051.440.700	86,63%	2.477.104.998
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.285.711	2.549.504	34,99%	4.736.207
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.842.640	-	0,00%	3.842.640
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	780.276	736.450	94,38%	43.826
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	805.145	759.200	94,29%	45.945
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	618.355	370.616	59,94%	247.739
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	618.355	575.564	93,08%	42.791
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	287.980	-	0,00%	287.980
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.960	107.674	32,34%	225.286
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.303.722.550	13.824.066.321	90,33%	1.479.656.229

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%	SELISIH ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.555.688.760	13.239.748.157	90,96%	1.315.940.603
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	745.819.140	582.225.000	78,07%	163.594.140
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.822.800	1.809.966	99,30%	12.834
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	391.850	283.198	72,27%	108.652
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.209.207.426	1.126.121.310	93,13%	83.086.116
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.384.150	3.003.000	47,04%	3.381.150
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.804.290	162.579.000	90,42%	17.225.290
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.742.911	16.174.648	62,83%	9.568.263
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.360.081	7.572.050	80,90%	1.788.031
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.172.560	39.163.686	62,99%	23.008.874
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.415.000	53.702.926	77,37%	15.712.074
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	856.328.434	843.926.000	98,55%	12.402.434
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.323.662	291.813.582	76,73%	88.510.080
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	380.323.662	291.813.582	76,73%	88.510.080
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.554.409	77.035.484	95,63%	3.518.925
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.554.409	77.035.484	95,63%	3.518.925
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.547.451.940	1.370.202.399	88,55%	177.249.541
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.204.000	167.104.139	59,21%	115.099.861
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	453.507.180	449.363.000	99,09%	4.144.180
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	741.850.760	707.959.760	95,43%	33.891.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.890.000	45.775.500	65,50%	24.114.500
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.395.390.506	1.346.837.953	93,14%	99.178.001
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.180.000	25.630.000	72,85%	9.550.000
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.180.000	25.630.000	72,85%	9.550.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%	SELISIH ANGGARAN
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.974.525.972	8.024.628.688	89,42%	949.897.284
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.974.525.972	8.024.628.688	89,42%	949.897.284
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	385.684.534	357.233.953	92,62%	28.450.581
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	385.684.534	357.233.953	92,62%	28.450.581
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.755.724.931	5.614.447.987	92,34%	465.890.983
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.645.270.211	17.284.125.739	92,70%	1.361.144.472
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415.442.650	74.047.000	17,82%	341.395.650
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15.303.134.379	15.085.662.320	98,58%	217.472.059
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.926.693.182	2.124.416.419	72,59%	802.276.763
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	110.454.720	85.276.260	77,20%	25.178.460
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	84.579.010	61.650.300	72,89%	22.928.710
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25.875.710	23.625.960	91,31%	2.249.750
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	218.624.620	207.783.100	95,04%	10.841.520
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	218.624.620	207.783.100	95,04%	10.841.520
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	218.624.620	207.783.100	95,04%	10.841.520
	TOTAL	46.898.285.755	42.676.466.340	91,00%	4.221.819.415

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah sebesar Rp (46.898.285.755). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp (42.676.466.340) dengan sisa sebesar Rp 4.221.819.415 (9%) dengan uraian berikut:

- Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 15.300.928.760,00. Dengan realisasi Rp. 13.821.698.157,00 (90,33%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.479.230.603,00

- Belanja Langsung, anggaran sebesar Rp 31.597.356.995,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 28.854.768.183,00 (91,3%) dan sisa anggaran sebesar Rp 2.742.588.812,00 (8,68%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana Tabel 2.3a dan Tabel 2.3b.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 (Tujuan & sasaran lama)

Tujuan	Indikator	Target pada Akhir Renstra Tahun 2021	Capaian Kinerja			Capaian 2020	
			Target 2021	Realisasi 2021	%		
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	87%	87%	87%	100	85%	
Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Angka	75 angka	75 angka	100	75 angka	
Sasaran	Indikator	Target pada Akhir Renstra Tahun 2021	Capaian Kinerja			Capaian 2020	
			Target 2021	Realisasi 2021	%		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	82,45%	82,45%	82,45%	100%	81,99%
2	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan	Persentase capaian kinerja kecamatan	98%	98%	98%	100%	94,41%

Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Tabel 2. 4

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Semarang Sampai Dengan Tahun 2022 (Tujuan & sasaran baru)

Tujuan	Indikator	Target pada Renstra Tahun 2022	Target pada Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja						
				Target 2022	Proyeksi 2022	%	Target 2023	Proyeksi 2023	%	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5 angka	88 angka	87,5 angka	87,5 angka	100	88 angka	88 angka	100%	
Sasaran	Indikator	Target pada Renstra Tahun 2022	Target pada Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja						
				Target 2022	Proyeksi 2022	%	Target 2023	Proyeksi 2023	%	
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	68,5	69	68,5	75,61	110%	69	75,61	109%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0	1	1	1		1	1	100%
3	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	84%	86%	84%	84%	100%	86%	86%	100%
4	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman	7%	12%	7%	7%	100%	12%	12%	100%
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	20%	30%	20%	20%	100%	30%	30%	100 [^]

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat partisipasi masyarakat”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 87%;
- b. Tujuan “Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 75 angka dari target sebesar 75 angka;
- c. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan telah sesuai dengan target dimana realisasinya 82,45% dari target sebesar 82,45%.
- d. Sasaran 2 “Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase capaian kinerja kecamatan” telah sesuai dengan target, dimana realisasinya sebesar 98% dari target sebesar 98% (capaian sebesar 100%);
 - 2) Indikator “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik” telah sesuai dengan target sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 5

Evaluasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dari Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (kegiatan)	590 kegiatan	581 kegiatan	98,47%	140 kegiatan
2	Persentase kondisi sarpras lingkungan Kelurahan yang ditangani melalui musrenbang yang telah dilaksanakan (%)	55%	55%	100%	51%
3	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang (%)	99,5%	99,5%	100%	97%
4	Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang yang telah dilaksanakan (%)	95%	90%	94,73%	79,41%
5	Persentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90%	90%	100%	90%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Tabel 2. 6**Evaluasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dari Sasaran 2**

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	
	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	3 kelurahan	3 kelurahan	100%	9 kelurahan
2	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan	14750 pelayanan	14399 pelayanan	97,62%	18.225 pelayanan
3	Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN	100%	100%	100%	60%/ 9 kelurahan
4	Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	15 kelurahan	15 kelurahan	100%	15 kelurahan
6	Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95,69%	90%	94%	83%
7	Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	68 unit	68 unit	100%	68 unit

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Tabel 2. 7**Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan**

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJA TAHUN 2022
		2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	87,5%	90,11%	91,56%
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	82,5%	84,34%	86,68%
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	91%	91%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	95%	97%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Dari hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah nilai AKIP yang melampaui target, Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat, persentase kehadiran dalam Musrenbang sudah sesuai target, namun persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang perlu ditingkatkan lagi. namun patut diapresiasi bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa indikator yang masih dibawah target seperti jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di kantor Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini disebabkan makin luas dan mudahnya akses untuk melakukan pembayaran PBB seperti melalui internet banking, aplikasi online (Tokopedia, OVO, dll).
- b. Indikator jumlah kegiatan Lembaga masyarakat aktif dan persentase kehadiran RT dalam Musrenbang juga masih dibawah target. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan jumlah orang yang hadir dalam kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga kerapian dan kebersihan wilayahnya;
- b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- c. Masih terdapat PKL yang berada di trotoar maupun badan jalan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- e. Kurangnya kompetensi pegawai kecamatan maupun kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Menjaga kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
- Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tengah
- Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
- Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan

b. Peluang:

- Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
- PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
- Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah perkotaan dengan fungsi campuran (*mix used*) perlu diperhatikan penataan dan kebersihan wilayahnya sehingga dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan dan derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penanganan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta

- pengecahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum

- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.00.00.00.05	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					51.222.538.734	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					51.222.538.734	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00.00	persen	3.597.428.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00.00	persen	3.597.428.550	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00	Angka	24.620.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00	Angka	24.620.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					24.620.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					24.620.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00	Dokumen	24.620.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00	Dokumen	24.620.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00.00	persen	2.462.923.381	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00.00	persen	2.462.923.381	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.462.923.381	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.462.923.381	-
		KELURAHAN MIROTO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100.00.00	persen	73.000.000		KELURAHAN MIROTO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100.00.00	persen	73.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPД 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00.00	persen	73.000.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00.00	persen	73.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KRANGGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN GABAHAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PANDANSARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PANDANSARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN BANGUNHARJO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN BANGUNHARJO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN SEKAYU	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KARANGKIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PURWODINATAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00.00	Persen	73.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KAUMAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00.00	persen	1.367.923.381		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00.00	persen	1.367.923.381	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	02.00	Kegiatan	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	02.00	Kegiatan	0	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00.00	Persen	1.109.885.169	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00.00	Persen	1.109.885.169	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.109.885.169	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.109.885.169	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00	Kegiatan	1.109.885.169		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00	Kegiatan	1.109.885.169	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00.00	Persen	29.570.558.177	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00.00	Persen	29.570.558.177	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00.00	kegiatan	29.394.982.756	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00.00	kegiatan	29.394.982.756	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					57.900.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					57.900.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	220.00.00	angka	57.900.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	220.00.00	angka	57.900.000	-
7.01.03 .2.02.0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.400.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.400.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	09.00	kegiatan	1.150.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	09.00	kegiatan	1.150.000.000	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10.00	kegiatan	950.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
									Kelurahan Jagalan				
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	09.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	09.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	09.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	09.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12.00	Kegiatan	950.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangsari	10.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangsari	10.00	Kegiatan	950.000.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13.937.082.756	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13.937.082.756	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00.00	Kegiatan	389.982.756		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00.00	Kegiatan	389.982.756	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00.00	Kegiatan	1.057.000.000		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00.00	Kegiatan	1.057.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57.00.00	Kegiatan	1.081.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	57.00.00	Kegiatan	1.081.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
									Kelurahan Jagalan				
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67.00.00	Kegiatan	943.600.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67.00.00	Kegiatan	943.600.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00.00	Kegiatan	861.400.000		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00.00	Kegiatan	861.400.000	-
		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00.00	Kegiatan	729.400.000		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00.00	Kegiatan	729.400.000	-
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00.00	Kegiatan	1.132.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00.00	Kegiatan	1.132.000.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00.00	Kegiatan	920.500.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00.00	Kegiatan	920.500.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68.00.00	Kegiatan	674.200.000		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68.00.00	Kegiatan	674.200.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00.00	Kegiatan	756.400.000		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00.00	Kegiatan	756.400.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00.00	Kegiatan	662.800.000		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00.00	Kegiatan	662.800.000	-
		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00.00	Kegiatan	823.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00.00	Kegiatan	823.000.000	-
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64.00.00	Kegiatan	956.200.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64.00.00	Kegiatan	956.200.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00.00	Kegiatan	912.400.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00.00	Kegiatan	912.400.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00.00	Kegiatan	1.100.800.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00.00	Kegiatan	1.100.800.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00.00	Kegiatan	936.400.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00.00	Kegiatan	936.400.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan lembaga masyarakat	Jumlah laporan lembaga masyarakat yang seharusnya	15.00	dokumen	175.575.421	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan lembaga masyarakat	Jumlah laporan lembaga masyarakat yang seharusnya	15.00	dokumen	175.575.421	-
7.01.03 .2.03.0 1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat					135.549.538	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat					135.549.538	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah laporan lembaga masyarakat yang dilaporkan	15.00	dokumen	135.549.538		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah laporan lembaga masyarakat yang dilaporkan	15.00	dokumen	135.549.538	-
7.01.03 .2.03.0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					40.025.883	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					40.025.883	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	02.00	kegiatan	40.025.883		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	02.00	kegiatan	40.025.883	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	01.00	kelurahan	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	01.00	kelurahan	0	-
07.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.00	Persen	22.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.00	Persen	22.500.000	-
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34.00.00	angka	22.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34.00.00	angka	22.500.000	-
7.01.04 .2.01.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					22.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					22.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	02.00	Kegiatan	22.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	02.00	Kegiatan	22.500.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00.00	persen	82.455.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00.00	persen	82.455.000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00	kegiatan	82.455.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00	kegiatan	82.455.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					82.455.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					82.455.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	02.00	Kegiatan	82.455.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	02.00	Kegiatan	82.455.000	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	%	17.949.597.007	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	%	17.949.597.007	-
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%		-
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00.00	%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00.00	%		-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	43.740.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	43.740.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Dokumen pelaporan	14.00	dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	14.00	dokumen		-
X.XX.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.380.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.380.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	02.00	dokumen	6.380.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	02.00	dokumen	6.380.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	01.00	dokumen	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	01.00	dokumen	0	-
X.XX.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.400.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000	-
X.XX.01 .2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.400.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000	-
X.XX.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.580.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen DPA SKPD	01.00	dokumen	3.580.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen DPA SKPD	01.00	dokumen	3.580.000	-
X.XX.01 .2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					3.580.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00	dokumen	3.580.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00	dokumen	3.580.000	-
X.XX.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.160.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	berkas	16.160.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	berkas	16.160.000	-
X.XX.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.240.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.240.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	02.00	Dokumen	3.240.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	02.00	Dokumen	3.240.000	-
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00	dokumen	16.602.419.734	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00	dokumen	16.602.419.734	-
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00.00	persen				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00.00	persen		-
X.XX.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.892.729.734	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.892.729.734	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00.00	persen	15.892.729.734		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00.00	persen	15.892.729.734	-
X.XX.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					700.020.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					700.020.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00.00	persen	700.020.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00.00	persen	700.020.000	-
X.XX.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.660.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.660.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	01.00	dokumen	3.660.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	01.00	dokumen	3.660.000	-
X.XX.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					4.540.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	06.00	dokumen	4.540.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	06.00	dokumen	4.540.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.470.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.470.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	01.00	dokumen	1.470.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	01.00	dokumen	1.470.000	-
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	persen	311.660.798	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	persen	311.660.798	-
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	7.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	7.500.000	-
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.777.020	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.777.020	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	02.00	Jenis	19.777.020		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	02.00	Jenis	19.777.020	-
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00.00	Jenis	30.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00.00	Jenis	30.000.000	-
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	05.00	Jenis	12.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	05.00	Jenis	12.500.000	-
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					110.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu					110.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00.00	orang	110.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00.00	orang	110.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					43.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					43.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00.00	Kegiatan	43.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00.00	Kegiatan	43.500.000	-
X.XX.01 .2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					88.383.778	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					88.383.778	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	02.00	jenis	88.383.778		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	02.00	jenis	88.383.778	-
X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	persen	9.421.458	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	persen	9.421.458	-
X.XX.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.421.458	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.421.458	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	01.00	jenis	9.421.458		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	01.00	jenis	9.421.458	-
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa kantor	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	persen	205.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa kantor	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	persen	205.000.000	-
X.XX.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					140.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					140.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00.00	persen	140.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00.00	persen	140.000.000	-
X.XX.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	09.00	jenis	65.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	09.00	jenis	65.000.000	-
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan asset SKPD	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00.00	persen	777.355.017	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan asset SKPD	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00.00	persen	777.355.017	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					332.390.820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					332.390.820	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.00.00	unit	332.390.820		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.00.00	unit	332.390.820	-
X.XX.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					209.972.602	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					209.972.602	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	01.00	gedung	209.972.602		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	01.00	gedung	209.972.602	-
X.XX.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					89.991.595	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					89.991.595	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	02.00	jenis	89.991.595		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	02.00	jenis	89.991.595	-
X.XX.01 .2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					145.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					145.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	01.00	Jenis	145.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	01.00	Jenis	145.000.000	-

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Tengah, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Semarang Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	92 pesen	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	827 kegiatan	Kegiatan fisik dan non fisik di kecamatan dan kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kecamatan Semarang Tengah

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
- 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
- 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang

- Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang kewilayahan, meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi

sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Selanjutnya pada tingkat Kota Semarang, penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Utama Kota Semarang dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem	indeks	84,5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Infrastruktur		
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
17	Opini BPK	predikat	WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”
dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator **sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:**

SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai AKIP

SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik

Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan

SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan

Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	69
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	12

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	30

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah ,2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota

Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 51.222.538.734 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 17.949.597.007,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 33.272.941.727,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				51.222.538.734	APBD Kota Semarang		50.587.221.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		92	3.597.428.550	APBD Kota Semarang	94	4.304.912.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan		1	24.620.000	APBD Kota Semarang	0	25.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	4	24.620.000	APBD Kota Semarang	4	25.300.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	2.462.923.381	APBD Kota Semarang	100	3.081.212.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	KELURAHAN MIROTO	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	KELURAHAN BRUMBUNGAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	KELURAHAN JAGALAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	KELURAHAN KRANGGAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	KELURAHAN KEMBANGSARI	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	KELURAHAN GABAHAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	KELURAHAN PANDANSARI	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	KELURAHAN BANGUNHARJO	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	KELURAHAN SEKAYU	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	KELURAHAN KARANGKIDUL	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	KELURAHAN PURWODINATAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	KELURAHAN PEKUNDEN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	KELURAHAN KAUMAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100	1.367.923.381	APBD Kota Semarang	100		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	0		2		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	1.109.885.169	APBD Kota Semarang	100	1.198.400.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.109.885.169	APBD Kota Semarang		1.198.400.000	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	1.109.885.169	APBD Kota Semarang	2	1.198.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		92	29.570.558.177	APBD Kota Semarang	93	28.812.787.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	827	29.394.982.756	APBD Kota Semarang	827	28.812.787.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan				57.900.000	APBD Kota Semarang		83.187.000	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	220	57.900.000	APBD Kota Semarang		220	83.187.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				15.400.000.000				16.718.220.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	9	1.150.000.000	APBD Kota Semarang		9	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	KELURAHAN MIROTO	13	950.000.000	APBD Kota Semarang		13	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	KELURAHAN BRUMBUNGAN	12	950.000.000	APBD Kota Semarang		12	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	KELURAHAN GABAHAN	17	950.000.000	APBD Kota Semarang		17	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	KELURAHAN KRANGGAN	13	950.000.000	APBD Kota Semarang		13	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	KELURAHAN JAGALAN	10	950.000.000	APBD Kota Semarang		10	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	KELURAHAN SEKAYU	9	950.000.000	APBD Kota Semarang		9	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	KELURAHAN PANDANSARI	9	950.000.000	APBD Kota Semarang		9	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	KELURAHAN BANGUNHARJO	12	950.000.000	APBD Kota Semarang		12	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	KELURAHAN KAUMAN	15	950.000.000	APBD Kota Semarang		15	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kelurahan Kauman							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil							
		Musyawarah							
		Perencanaan							
		Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	KELURAHAN PURWODINATAN	18	950.000.000	APBD Kota Semarang		18	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil							
		Musyawarah							
		Perencanaan							
		Pembangunan di Kelurahan Pekunden	KELURAHAN PEKUNDEN	12	950.000.000	APBD Kota Semarang		12	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil							
		Musyawarah							
		Perencanaan							
		Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	13	950.000.000	APBD Kota Semarang		13	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil							
		Musyawarah							
		Perencanaan							
		Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	KELURAHAN KARANGKIDUL	12	950.000.000	APBD Kota Semarang		12	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil							
		Musyawarah							
		Perencanaan							
		Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	10	950.000.000	APBD Kota Semarang		10	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	KELURAHAN KEMBANGSARI	10	950.000.000	APBD Kota Semarang	10	11.802.380.000	
					13.937.082.756				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	28	389.982.756	APBD Kota Semarang	28		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	KELURAHAN MIROTO	67	1.057.000.000	APBD Kota Semarang	67		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	KELURAHAN JAGALAN	57	1.081.000.000	APBD Kota Semarang	57		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	KELURAHAN BRUMBUNGAN	67	943.600.000	APBD Kota Semarang	67		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	KELURAHAN KRANGGAN	66	861.400.000	APBD Kota Semarang	66		

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah							
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	KELURAHAN PANDANSARI	64	729.400.000	APBD Kota Semarang		64	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	KELURAHAN GABAHAN	61	1.132.000.000	APBD Kota Semarang		61	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	KELURAHAN KEMBANGSARI	71	920.500.000	APBD Kota Semarang		71	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	KELURAHAN SEKAYU	68	674.200.000	APBD Kota Semarang		68	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	KELURAHAN BANGUNHARJO	57	756.400.000	APBD Kota Semarang		57	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	KELURAHAN KAUMAN	57	662.800.000	APBD Kota Semarang		57	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	KELURAHAN KARANGKIDUL	73	823.000.000	APBD Kota Semarang		73	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	KELURAHAN PURWODINATAN	64	956.200.000	APBD Kota Semarang		64	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	KELURAHAN PEKUNDEN	64	912.400.000	APBD Kota Semarang		64	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	62	1.100.800.000	APBD Kota Semarang		62	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	63	936.400.000	APBD Kota Semarang		63	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kelurahan Pendrikan Kidul							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan	15	175.575.421				209.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				135.549.538	APBD Kota Semarang			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	15	135.549.538		15		134.000.000
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	40.025.883	APBD Kota Semarang			75.000.000
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1	0		1		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		12%	22.500.000	APBD Kota Semarang		14%	30.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	34 angka	22.500.000	APBD Kota Semarang		30 angka	30.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				22.500.000	APBD Kota Semarang			30.000.000
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 kegiatan	22.500.000	APBD Kota Semarang		2 kegiatan	30.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		30%	82.455.000	APBD Kota Semarang		40%	30.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	82.455.000	APBD Kota Semarang		2 kegiatan	30.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	82.455.000	APBD Kota Semarang		2 kegiatan	30.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100	17.949.597.007	APBD Kota Semarang		100%	17.409.522.000
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase Kinerja administrasi dan		100		APBD Kota Semarang		100%	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		pelaporan Keuangan SKPD							
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	20 dokumen	43.740.000	APBD Kota Semarang	20 dokumen	44.000.000	
		Jumlah Dokumen pelaporan		14					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 dokumen	6.380.000	APBD Kota Semarang	2 dokumen	10.000.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	0	APBD Kota Semarang	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.400.000	APBD Kota Semarang		7.500.000	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	5.400.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.400.000	APBD Kota Semarang		7.500.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	5.400.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	7.500.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.580.000				
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	3.580.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.000.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.580.000				

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	3.580.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.000.000	
					16.160.000				
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	12 dokumen	16.160.000	APBD Kota Semarang	12 dokumen	1.000.000	
					3.240.000				
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 dokumen	3.240.000	APBD Kota Semarang	2 dokumen	6.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh	8 dokumen	16.602.419.734	APBD Kota Semarang	8 dokumen	16.110.522.000	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD		100%			100%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.892.729.734			15.294.304.707	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100%	15.892.729.734	APBD Kota Semarang	100%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				700.020.000				
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100%	700.020.000	APBD Kota Semarang	100%	810.217.293	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.660.000				3.500.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 laporan	3.660.000	APBD Kota Semarang	1 laporan		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4.540.000				1.500.000
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	6 laporan	4.540.000	APBD Kota Semarang	6 laporan		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.470.000				
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 laporan	1.470.000	APBD Kota Semarang	1 laporan		1.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	100%	311.660.798	APBD Kota Semarang	100%		402.500.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000				
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	12 jenis	7.500.000	APBD Kota Semarang	12 jenis		10.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.777.020				

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 jenis	19.777.020	APBD Kota Semarang	2 jenis	35.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	45 jenis	30.000.000	APBD Kota Semarang	45 jenis	25.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	5 jenis	12.500.000	APBD Kota Semarang	5 jenis	12.500.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu yang berkunjung	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2500 orang	110.000.000	APBD Kota Semarang	2500 orang	100.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	40 kegiatan	43.500.000	APBD Kota Semarang	40 kegiatan	120.000.000	
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 jenis	88.383.778	APBD Kota Semarang	2 jenis	100.000.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	9.421.458		100%		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.421.458				

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 jenis	9.421.458	APBD Kota Semarang	2 jenis	100.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Tersedianya jasa kantor	100%	205.000.000		100%	220.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000			120.000.000	
		persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100%	140.000.000	APBD Kota Semarang	100%		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000				
		Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	9 jenis	65.000.000	APBD Kota Semarang	10 jenis	100.000.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	Terwujudnya pemeliharaan asset SKPD	100%	777.355.017		100%	532.500.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				332.390.820				
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	50 unit	332.390.820	APBD Kota Semarang	50 unit	350.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				209.972.602				
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 gedung	209.972.602	APBD Kota Semarang	1 gedung	75.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 jenis	89.991.595	APBD Kota Semarang	2 jenis	57.500.000	
					89.991.595				
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 jenis	145.000.000	APBD Kota Semarang	1 jenis	145.000.000	
					145.000.000				

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Tengah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

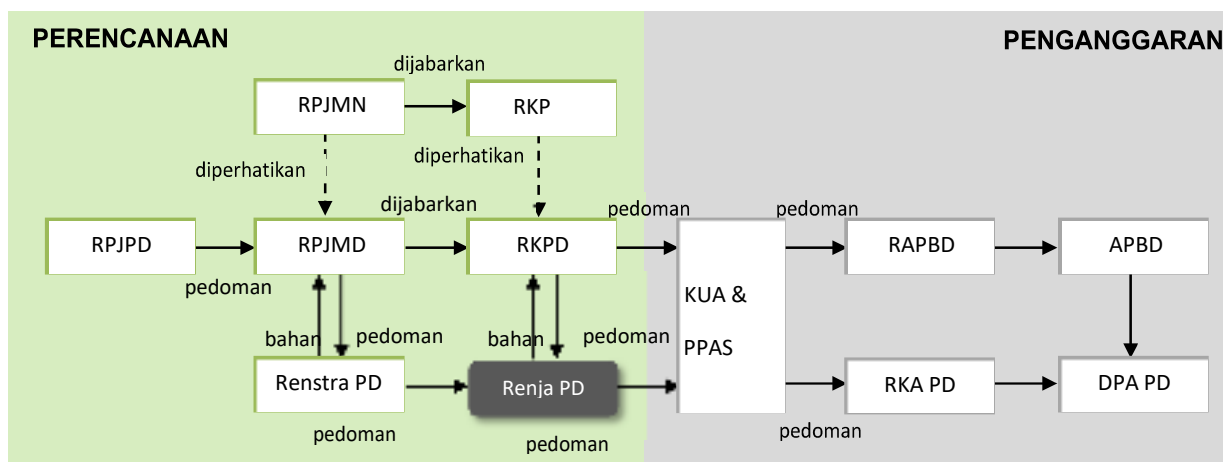
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Gunungpati, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungpati tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Gunungpati.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Gunungpati Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);
- w. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 900/29.1/VIII/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan

Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran RenjaKecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Gunungpati.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Gunungpati sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Gunungpati melaksanakan sebanyak 4 Program dan 12 Kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 50.782.897.106,00 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 47.245.869.161,00 atau sebesar 93,04%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.06 3.1.06.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		96,92%						
3.1.06 3.1.06.04 01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Langganan rekening telepon, air, listrik dan koran kantor		97,9						
3.1.06 3.1.06.04 01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- alat tulis kantor yang disediakan		95,84						
3.1.06 3.1.06.04 01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan yang disediakan - penggandaan yang disediakan		87,73						
3.1.06 3.1.06.04 01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	- Komponen listrik yang disediakan		100						
3.1.06 3.1.06.04 01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Penyediaan jamuan rapat		91,84						
3.1.06 3.1.06.04 01.018	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		99,89						
3.1.06 3.1.06.04 01.028	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	- Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan		85,97						
3.1.06 3.1.06.04 01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Jasa tenaga NON ASN untuk menunjang administrasi perkantoran		0						
3.1.06.3.1.06.06.01.321	Operasional Kelurahan Sukorejo	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		99,82						
3.1.06.3.1.06.06.01.322	Operasional Kelurahan Sadeng	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		98,75						
3.1.06.3.1.06.06.01.323	Operasional Kelurahan Kandri	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		95,43						
3.1.06.3.1.06.06.01.324	Operasional Kelurahan Sekaran	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		99,53						
3.1.06.3.1.06.06.01.325	Operasional Kelurahan Pongangan	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		91,87						
3.1.06.3.1.06.06.01.326	Operasional Kelurahan Kalisegoro	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		99,16						
3.1.06.3.1.06.06.01.327	Operasional Kelurahan Jatirejo	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		85						
3.1.06.3.1.06.06.01.328	Operasional Kelurahan Ngijo	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		91,53						
3.1.06.3.1.06.06.01.329	Operasional Kelurahan Patemon	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		99,81						
3.1.06.3.1.06.06.01.330	Operasional Kelurahan Nongkosawit	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		94,32						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.1.06.3.1.06.06.01.331	Operasional Kelurahan Cepoko	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		94,48						
3.1.06.3.1.06.06.01.332	Operasional Kelurahan Gunungpati	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		98,02						
3.1.06.3.1.06.06.01.333	Operasional Kelurahan Mangunsari	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		99,91						
3.1.06.3.1.06.06.01.334	Operasional Kelurahan Pakintelan	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		98,19						
3.1.06.3.1.06.06.01.335	Operasional Kelurahan Plalangan	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		99,6						
3.1.06.3.1.06.06.01.336	Operasional Kelurahan Sumurrejo	- Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan		97,12						
3.1.06 3.1.06.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		94,73						
3.1.06 3.1.06.04 02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai		0						
3.1.06 3.1.06.04 02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai		3,23						
3.1.06 3.1.06.04 02.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	- Jumlah rumah dinas yang dipelihara		99,07						
3.1.06 3.1.06.04 02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Komponen Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan		99,8						
3.1.06 3.1.06.04 02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Mendukung Kerja Pegawai		95,11						
3.1.06 3.1.06.04 02.026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara		0						
3.1.06 3.1.06.04 02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara		95,06						
3.1.06 3.1.06.04 02.042	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	- Jumlah Perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor		99,94						
3.1.06 3.1.06.04 02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan	- Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		97,33						
3.1.06 3.1.06.04 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	- Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100						
3.1.06 3.1.06.04 06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	- Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu terpenuhi		100%						
3.1.06 3.1.06.04 06.006	Penyusunan Lkpi Skpd	- Dokumen LKPJ		1 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	- Dokumen LKJIP Perangkat Daerah		1 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 06.018	Penyusunan Lkjiip	- Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		1 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 06.028	Penyusunan Renja Skpd	- Jumlah Renja Perangkat daerah		1 dokumen						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.1.06 3.1.06.04 06.030	Penyusunan Rka Dan Dpa	- Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Murni dan Perubahan)		2 dokumen						
3.1.06 3.1.06.04 16	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	- Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura yang Tertangani		100						
3.1.06 3.1.06.04 16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	- Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan Yang Tertangani		100						
3.1.06 3.1.06.04 16.003	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	- Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan		64 Kegiatan						
3.1.06 3.1.06.04 18	Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan	- Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) RT - Persentase Jumlah Siskamling di Lingkungan RT		100						
3.1.06 3.1.06.04 18.006	Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	- Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan se Kecamatan		100						
3.1.06 3.1.06.04 20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	- Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)		100						
3.1.06 3.1.06.04 20.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	- Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)		100						
3.1.06 3.1.06.04 20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	- Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan		100						
3.1.06 3.1.06.04 21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	- Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang - Persentase jumlah RT yang mengusulkan Pembangunan dalam Musrenbang - Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	- Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	- Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.003	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	- Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	- Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan	- Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil		100						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Musrenbang								
3.1.06 3.1.06.04 21.007	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorejo	- Jumlah Pembangunan Gapuro,Balai RW,Poskamling,Taman di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.008	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sadeng	- Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.009	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.048	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sekaran	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.049	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pongangan	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.050	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kalisegoro	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.051	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jatirejo	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.052	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ngijo	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.053	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Patemon	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.054	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Nongkosawit	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.055	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cepoko	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.056	Pembangunan Sararana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungpati	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.1.06 3.1.06.04 21.057	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunsari	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.058	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pakintelan	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.059	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Plalangan	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 21.060	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sumurrejo	- Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta saluran lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang		100						
3.1.06 3.1.06.04 22	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	- Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN - Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kelurahan - Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Berstandar PATEN		99.59%						
3.1.06 3.1.06.04 22.001	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	- Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		100						
3.1.06 3.1.06.04 22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	- Jumlah pelayanan administratif di kantor kecamatan dan kelurahan		100						
3.1.06 3.1.06.04 22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)	- Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan		99.59%						
3.1.06 3.1.06.04 23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		100						
3.1.06 3.1.06.04 23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	- Persentase Kegiatan Kelurahan / Kecamatan Sehat yang Difasilitasi - Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS		100						
3.1.06 3.1.06.04 25	Program Pengelolaan Aset Pemerintah	- Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan		86.28 %						
3.1.06 3.1.06.04 25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	- Persentase umlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan		86.28 %						
3.1.06 3.1.06.04 26	Program Peningkatan	- Prosentase jumlah WP yang		100						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah								
		- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen		100,00%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Gunungpati, pemenuhan Tunjangan ASN Kecamatan Gunungpati		-	100%	100%	100%			
		- persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%				100%	50 Persen	50,00%	
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Target Kinerja PA,KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu		-	100%	100%	100%			
		- persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100%				100%	50%	50,00%	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Gunungpati		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		- laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen				1 Dokumen	1 dokumen	100,00%	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan Gunungpati		-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		- laporan keuangan semesteran	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat daerah kecamatan Gunungpati		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		- laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen				1 Dokumen	1 dokumen	100,00%	
		- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	-	100%		12 Bulan	12 Bulan	100,00%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan		-	100%	100%	100%			
		- jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis				20 Jenis	20 Jenis	100,00%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan Perlengkapan kantor yang mendukung kerja Pegawai		-	100%	100%	100%			
		- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis				30 Jenis	30 Jenis	100,00%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan		-	100%	100%	100%			
		- jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis				2500 Jenis	2500 Jenis	100,00%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan ,Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan		-	100%	100%	100%			
		- jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis				5 Jenis	5 Jenis	100,00%	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jamuan Rapat dan kegiatan - jumlah tamu yang berkunjung		-	100%	100%	100%	3300 Orang	3300 Orang	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan - jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	-	100%	100%	100%	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100,00%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE - jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	-	100%	100%	100%	10 Jenis	10 Jenis	100,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Penyediaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai - tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	-	100%	100%	100%	2 Jenis	2 Jenis	100,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan rekening telepone, listrik, koran, Air - waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	-	-	-	-	15 Jenis	15 Jenis	100,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun berkenaan - Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional - jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	55 Unit	-	100%	100%	100%	55 Unit	55 Unit	100,00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Perbaikan sedang , berat gedung kantor pada tahun berkenaan - jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	-	100%	100%	100%	3 Gedung	3 Gedung	100,00%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan gedung kantor - Pemeliharaan rumah dinas Camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja - jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	-	100%	100%	100%	5 Jenis	5 Jenis	100,00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	- Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan		-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan								
		- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis					5 Jenis	5 Jenis	100,00%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	-	85%			91%	91%	100,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	3					2	2	100,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)			20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%			
		- Jumlah pembinaan, Monitoring , dan Evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan			3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
		- Penunjang capaian kinerja			100%	100%	100%			
		- Presentase Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS			80 Persen	80 Persen	100%			
		- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen					2 Dokumen	2	100,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	100%			100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan Pembinaan aparatur Kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja kegiatan		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%			
		- Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di kecamatan dan Kelurahan			43.169 Kegiatan		40.490 kegiatan			
		- Jumlah Sarana Prasarana komunikasi dan informasi masyarakat standar PATEN			2 Buah	2 Buah	100%			
		- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan						2 Kegiatan	100%	100,00%
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor		-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sadeng								
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo						100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongksawit		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongksawit	100%					100%	100%	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor		-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cepoko								
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintekan		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintekan	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo		-	100%	100%	100%			
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%				100%	100%	100,00%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	49%	49%	100%	100%	100%	100,00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Kegiatan kebersihan		-	64 Kegiatan	64 Kegiatan	100%			
		- Persentase pembayaran PBB			81%	89%	110%			
		- Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan					3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	-	100%	100%	100,00%	97,00%	97,00%	100,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	-	100%	100%	100%	192 Kegiatan	192 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat RW , kelurahan dan Kecamatan		-	136	136	100%			
		- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	200 Kegiatan					192 Kegiatan	192 Kegiatan	100,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Paket kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pembangunan hasil Musrenbang		-	28 Paket	28 Paket	100%			
		- Jumlah paket kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan			44 Paket	44 Paket	100%			
		- Jumlah paket kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas saluran Lingkungan			76 Paket	76 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sukorejo		-	4 Paket	4 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan					15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sadeng		-	4 Paket	4 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8 Kegiatan					8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kandri		-	5 Paket	5 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan					15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sekaran		-	5 Paket	5 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Pongangan		-	8 Paket	8 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	11 Kegiatan					11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan		-	6 Paket	6 Paket	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		hasil Musrenbang Kelurahan Kalisegoro								
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	12 Kegiatan					12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Jatirejo		-	6 Paket	6 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	12 Kegiatan					12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Ngijo		-	100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	8 Kegiatan					8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Patemon		-	6 Paket	6 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	19 Kegiatan					19 Kegiatan	19 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Nongkosawit		-	7 Paket	7 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Cepoko		-	4 Paket	4 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	9 Kegiatan					9 Kegiatan	9 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Gunungpati		-	7 Paket	7 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan gunungpati	18 Kegiatan					18 Kegiatan	18 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan		-	6 Paket	6 Paket	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		hasil Musrenbang Kelurahan Mangunsari								
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Pakintelan		-	6 Paket	6 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	18 Kegiatan					18 Kegiatan	18 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Plalangan		-	6 Paket	6 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	15 Kegiatan					15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sumurrejo		-	6 Paket	6 Paket	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurrejo	17 Kegiatan					17 Kegiatan	17 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah kegiatan Kelompok Masyarakat di kelurahan sebagai Media Pembinaan dan pemberdayaan		-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%			
		Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan			29 Kegiatan	29 Kegiatan	100%			
		- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan					59 Kegiatan	59 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukorejo		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sukorejo			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17 Kegiatan					17 Kegiatan	17 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sadeng		-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Sadeng			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13 Kegiatan					13 Kegiatan	13 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kandri		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kandri			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan					15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sekaran		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sekaran			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	15 Kegiatan					15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pongangan		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pongangan			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	20 Kegiatan					20 Kegiatan	20 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kalisegoro		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kalisegoro			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	19 Kegiatan					19 Kegiatan	19 Kegiatan	100,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirejo		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Jatirejo			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	15 Kegiatan					15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ngijo		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Ngijo			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Patemon		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Patemon			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	13 Kegiatan					13 Kegiatan	13 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Nongkosawit		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Nongkosawit			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Cepoko		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Cepoko			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11 Kegiatan					11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungpati		-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Gunungpati			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan					14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangunsari		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Mangunsari			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan					18 Kegiatan	18 Kegiatan	100,00%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakintelan		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Pakintelan			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11 Kegiatan					11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Plalangan		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Plalangan			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	16 Kegiatan					16 Kegiatan	16 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sumurrejo		-	100%	100%	100%			
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sumurrejo			100%	100%	100%			
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan					12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	100%	100%	100%	97 Persen	97 Persen	100,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan		-	8067 Kegiatan	8067 Kegiatan	100%			
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah aset yang dikelola di kecamatan dan kelurahan		-	350 Bidang	302 Bidang	86,28%			
		- Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon di jalan protokol dan lingkungan sekitarnya			3000 Kegiatan	3000 Kegiatan	100%			
		- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%			
		- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan			5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%			
		- Persentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tertangani			100%	100%	100%			
		- Persentase Jumlah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan			95,69 %	88,81%	98,68%			
		- Persentase penurunan jumlah pelanggaran Peraturan dan gangguan Trantibum dikelurahan se Kecamatan Gunungpati			80%	80%	100%			
		- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan					1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum		-	95%	95%	100%			
		- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Persen					10 Persen	10 Persen	100,00%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum		-	95%	95%	100%			
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	5 Angka					2 Angka	2 Angka	100,00%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum		-	95%	95%	100%			
		- jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Kegiatan					3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- presentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan	100%					90%	90%	100,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	200				75	75	100,00%	

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 4 Program dan 6 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan 14 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator memenuhi target.
 - c) Dari 14 indikator kinerja kegiatan, seluruhnya sudah memenuhi target
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan 4 Program dengan 6 indikator program dan 12 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 6 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 0 Inidkator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 14 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
	KECAMATAN GUNUNGPATI	50.782.897.106	47.245.869.161	93,04	3.537.027.945
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	18.563.112.181	16.852.851.888	90,79%	1.710.260.293
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.889.700	950.700	50,31%	939.000

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
7.01.01.2.01.06	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.889.700	950.700	50,31%	939.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.936.161.106	14.462.869.939	90,76%	1.473.291.167
7.01.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.355.361.106	13.901.749.939	90,53%	1.453.611.167
7.01.01.2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	580.800.000	561.120.000	96,61%	19.680.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.170.535	1.130.136.040	88,01%	154.034.495
7.01.01.2.06.01	a. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.029.350	8.738.000	87,12%	1.291.350
7.01.01.2.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.956.000	139.450.000	73,41%	50.506.000
7.01.01.2.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.005.250	19.758.965	79,02%	5.246.285
7.01.01.2.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.068.100	6.893.750	27,50%	18.174.350
7.01.01.2.06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.778.000	25.117.500	70,20%	10.660.500
7.01.01.2.06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.600.000	2.160.000	28,42%	5.440.000
7.01.01.2.06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	990.733.835	928.017.825	93,67%	62.716.010
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.113.200	66.030.818	91,57%	6.082.382
7.01.01.2.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.113.200	66.030.818	91,57%	6.082.382
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.268.777.640	1.192.864.391	94,02%	75.913.249
7.01.01.2.09.02	a. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.051.600	149.187.591	97,48%	3.864.009
7.01.01.2.09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.126.000	245.470.000	98,93%	2.656.000
7.01.01.2.09.10	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	823.872.500	773.086.800	93,84%	50.785.700
7.01.01.2.09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.727.540	25.120.000	57,45%	18.607.540
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.958.289.605	1.786.630.452	91,23%	171.659.153
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.019.843	6.625.000	11,04%	53.394.843
7.01.02.2.01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.019.843	6.625.000	11,04%	53.394.843
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	871.011.390	806.237.625	92,56%	64.773.765
7.01.02.2.02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	871.011.390	806.237.625	92,56%	64.773.765
7.01.02.2.02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUKOREJO	1.255.613.045	1.154.373.596	91,94%	1.255.613.045
7.01.02.2.02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SADENG	846.472.331	769.628.609	90,92%	846.472.331

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
7.01.02.2.02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN KANDRI	440.700.000	401.034.474	91,00%	440.700.000
7.01.02.2.02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SEKARAN	545.909.000	500.166.154	91,62%	545.909.000
7.01.02.2.02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PONGANGAN	480.800.000	436.220.291	90,73%	480.800.000
7.01.02.2.02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN KALISEGORO	417.600.000	385.491.237	92,31%	417.600.000
7.01.02.2.02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JATIREJO	291.768.720	265.625.396	91,04%	291.768.720
7.01.02.2.02.03	i. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGLJO	368.250.000	338.950.931	92,04%	29.299.069
7.01.02.2.02.03	j. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PATEMON	493.400.000	448.487.612	90,90%	493.400.000
7.01.02.2.02.03	k. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NONGKOSAWIT	443.000.000	407.718.466	92,04%	443.000.000
7.01.02.2.02.03	l. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN CEPOKO	317.000.000	288.665.950	91,06%	317.000.000
7.01.02.2.02.03	m. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GUNUNGPATI	745.400.000	683.560.857	91,70%	745.400.000
7.01.02.2.02.03	n. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	455.600.000	418.651.157	91,89%	455.600.000

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Kecamatan KELURAHAN MANGUNSARI				
7.01.02.2.02.03	o. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PAKINTELAN	465.980.000	431.128.444	92,52%	465.980.000
7.01.02.2.02.03	p. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLALANGAN	390.400.000	362.588.716	92,88%	390.400.000
7.01.02.2.02.03	q. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURREJO	518.600.000	479.564.388	92,47%	518.600.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.027.258.372	973.767.827	94,79%	53.490.545
7.01.02.2.04.03	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.027.258.372	973.767.827	94,79%	53.490.545
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.696.285.105	10.293.873.788	96,24%	402.411.317
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.759.064.306	9.441.464.788	96,75%	317.599.518
7.01.03.2.02.01	a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	118.378.350	90.100.500	76,11%	28.277.850
7.01.03.2.02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9.341.628.523	9.172.385.288	98,19%	169.243.235
7.01.03.2.02.02	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUKOREJO	471.920.000	461.432.587	97,78%	10.487.413
7.01.03.2.02.02	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SADENG	446.413.975	435.678.070	97,60%	10.735.905
7.01.03.2.02.02	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN KANDRI	446.000.000	439.084.000	98,45%	6.916.000
7.01.03.2.02.02	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SEKARAN	464.571.000	434.057.126	93,43%	30.513.874
7.01.03.2.02.02	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PONGANGAN	474.778.000	467.878.548	98,55%	6.899.452
7.01.03.2.02.02	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN KALISEGORO	479.000.000	473.957.000	98,95%	5.043.000
7.01.03.2.02.02	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JATIREJO	482.530.083	469.208.490	97,24%	13.321.593
7.01.03.2.02.02	j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGLJO	448.000.000	438.555.462	97,89%	9.444.538
7.01.03.2.02.02	k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PATEMON	447.000.000	435.762.723	97,49%	11.237.277
7.01.03.2.02.02	l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NONGKOSAWIT	482.140.000	471.530.979	97,80%	10.609.021
7.01.03.2.02.02	m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN CEPOKO	467.000.000	458.192.702	98,11%	8.807.298

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
7.01.03.2.02.02	n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GUNUNGPATI	447.000.000	439.777.212	98,38%	7.222.788
7.01.03.2.02.02	o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN MANGUNSARI	461.560.000	446.670.544	96,77%	14.889.456
7.01.03.2.02.02	p. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PAKINTELAN	476.000.000	466.059.936	97,91%	9.940.064
7.01.03.2.02.02	q. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PLALANGAN	476.390.000	462.401.715	97,06%	13.988.285
7.01.03.2.02.02	r. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURREJO	447.000.000	434.380.606	97,18%	12.619.394
7.01.03.2.02.03	s. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.057.433	178.979.000	59,85%	120.078.433
7.01.03.2.02.03	t. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUKOREJO	223.666.955	173.208.000	77,44%	50.458.955
7.01.03.2.02.03	u. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SADENG	229.196.694	187.472.500	81,80%	41.724.194
7.01.03.2.02.03	v. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KANDRI	221.800.000	204.909.600	92,38%	16.890.400
7.01.03.2.02.03	w. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SEKARAN	219.720.000	201.222.050	91,58%	18.497.950
7.01.03.2.02.03	x. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PONGANGAN	195.172.000	169.809.300	87,00%	25.362.700
7.01.03.2.02.03	y. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KALISEGORO	195.000.000	173.448.455	88,95%	21.551.545
7.01.03.2.02.03	z. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JATIREJO	189.701.197	159.530.000	84,10%	30.171.197
7.01.03.2.02.03	aa. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGIJO	261.050.000	243.370.000	93,23%	17.680.000
7.01.03.2.02.03	bb. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PATEMON	233.100.000	219.175.000	94,03%	13.925.000
7.01.03.2.02.03	cc. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NONGKOSAWIT	181.860.000	166.199.750	91,39%	15.660.250
7.01.03.2.02.03	dd. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN CEPOKO	196.300.000	174.573.750	88,93%	21.726.250
7.01.03.2.02.03	ee. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GUNUNGPATI	241.280.000	207.180.800	85,87%	34.099.200
7.01.03.2.02.03	ff. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MANGUNSARI	200.040.000	190.209.500	95,09%	9.830.500
7.01.03.2.02.03	gg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PAKINTELAN	192.770.000	183.693.500	95,29%	9.076.500
7.01.03.2.02.03	hh. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLALANGAN	207.720.000	198.484.000	95,55%	9.236.000
7.01.03.2.02.03	ii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURREJO	222.950.000	206.471.250	92,61%	16.478.750
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	937.220.799	852.409.000	90,95%	84.811.799
7.01.03.2.03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	122.473.071	79.850.000	65,20%	42.623.071
7.01.03.2.03.04	b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	814.747.728	772.559.000	94,82%	42.188.728
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	260.087.215	247.071.600	95,00%	13.015.615

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	260.087.215	247.071.600	95,00%	13.015.615
7.01.04.2.03.01	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	260.087.215	247.071.600	95,00%	13.015.615

Sumber : Kecamatan Gunungpati, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebesar Rp 50.782.897.106. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 47.245.869.161 dengan sisa sebesar Rp 3.537.027.945,00 contoh (6,96%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp. 32.788.079.322,00 realisasi Rp. 29.659.378.823,00 (90,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp 3.128.700.499, 00 (9,54%)
- b. **Belanja Modal**: anggaran sebesar Rp 17.994.817.784 Dengan realisasi sebesar Rp 17.586.490.338 (97,73%) dan sisa anggaran sebesar Rp 408.327.446,00 (2.63 %).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati adalah melaksanakan fungsi sebagai bagian wilayah dari daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tujuan :									
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat		93%	93%	93,50%	94,92%	93%	93,50%
Sasaran :									
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1 Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan		23,39%			23,97%		
2	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD		100%			100%		
		2 Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan		100%			100%		
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1 Nilai AKIP			71,87	73		71,87	73
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1 Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan			1	2		1	2
5	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			97%	100%		97%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
6	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	1 Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			10%	15%		10%	15%
		2 Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan			60%	70%		60%	70%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 94,92% dari target sebesar 93%;
- b. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 102.48 % dari target sebesar 23.97 % (capaian sebesar 23.97 %).
- c. Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Kecamatan Gunungpati” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %).
 - 2) Indikator “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.:

Tabel 2.4

Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan Di Kota Semarang Sampai dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat	87,50%	90,11%	91,56%	92,84%	87,50%	90,11%	91,56%	92,84%
2	persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	82,50%	84,34%	86,68%	88,52%	82,50%	84,34%	86,68%	88,52%
3	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85,00%	91,00%	91,00%	92,00%	85,00%	91,00%	91,00%	92,00%
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	95,00%	97,00%	97,00%	98,00%	95,00%	97,00%	97,00%	98,00%

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 dan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2020 maupun tahun 2021 bisa mencapai 100 % dari target yang direncanakan. Begitu juga dengan persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan, persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE) dan Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif bisa mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
- c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang optimalnya

peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;

- d. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai bagian wilayah dari Kota Semarang diantaranya:

- a. Kondisi geografis Kecamatan Gunungpati yang berbukit dengan kondisi tanah yang rawan longsor mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor maupun pohon tumbang di musim penghujan
- b. Kurang optimalnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat akibat terbatasnya SDM yang memadai baik di Kecamatan maupun Kelurahan
- c. Rata-rata jalan raya yang ada di kecamatan Gunungpati adalah jalan desa sehingga penanganan jika terjadi kerusakan kecil kurang optimal
- d. Belum optimalnya Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gunungpati sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, walau semua belum terakomodir karena kebijakan anggaran maupun efisiensi di Kota Semarang, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan, anak maupun lansia termasuk disabilitas dalam Musrenbang. hal ini berkaitan dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
- d. Pengoptimalan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
- e. Sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan serta sosialisasi kegiatan yang responsive gender
- f. Pengoptimalan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembuatan pedoman pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara

rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin

- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah

- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata

- 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif,

dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gunungpati mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif”**. Namun sebagai bagian wilayah di Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target			Satuan
7	URUSAN KEWILAYAHAN						KECAMATAN GUNUNGPATI					54.152.779.933				
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI					58.242.168.987	KECAMATAN GUNUNGPATI					54.152.779.933				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen	4.361.617.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen			3.753.773.720		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00	Angka	60.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan		55.750.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	55.750.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	3.000.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan		2.014.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelaksanaan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00	Persen	3.000.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelaksanaan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	2.014.000.000	
		KECAMATAN GUNUNGPATI						KECAMATAN GUNUNGPATI				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN SUKOREJO						KELURAHAN SUKOREJO				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN SADENG						KELURAHAN SADENG				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN KANDRI						KELURAHAN KANDRI				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		

Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program / Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target			Satuan
		KELURAHAN SEKARAN					KELURAHAN SEKARAN					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN PONGANGAN					KELURAHAN PONGANGAN					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN KALISEGORO					KELURAHAN KALISEGORO					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN JATIREJO					KELURAHAN JATIREJO					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN NGLJO					KELURAHAN NGLJO					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN PATEMON					KELURAHAN PATEMON					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN CEPOKO					KELURAHAN CEPOKO					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN GUNUNGPATI					KELURAHAN GUNUNGPATI					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN MANGUNSARI					KELURAHAN MANGUNSARI					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN PAKINTELAN					KELURAHAN PAKINTELAN					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
		KELURAHAN PLALANGAN					KELURAHAN PLALANGAN					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan		

Rancangan Awal RKPD 2023							Hasil Analisis Kebutuhan							Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator							
			Indikator Renstra						Indikator			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target			Satuan
												Wilayah Kecamatan				
		KELURAHAN SUMURREJO						KELURAHAN SUMURREJO				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	1.301.617.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.684.023.720	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	1.301.617.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	1.684.023.720	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persen	32.192.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persen				32.259.967.518	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.00	Kegiatan	21.537.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.00	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			19.772.167.518	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.00	Kegiatan	145.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.00	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	171.300.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21.00	Kegiatan	17.914.977.200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21.00	Unit	16.559.530.000	
		KELURAHAN SUKOREJO						KELURAHAN SUKOREJO				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		
		KELURAHAN SADENG						KELURAHAN SADENG				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit		
		KELURAHAN KANDRI						KELURAHAN KANDRI				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit		
		KELURAHAN SEKARAN						KELURAHAN SEKARAN				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		
		KELURAHAN PONGANGAN						KELURAHAN PONGANGAN				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		
		KELURAHAN KALISEGORO						KELURAHAN KALISEGORO				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit		
		KELURAHAN JATIREJO						KELURAHAN JATIREJO				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit		
		KELURAHAN NGIJO						KELURAHAN NGIJO				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit		
		KELURAHAN PATEMON						KELURAHAN PATEMON				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19.00	Unit		
		KELURAHAN NONGKOSAWI						KELURAHAN NONGKOSAWI				Jumlah Sarana dan Prasarana	14.00	Unit		

Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan									Catatan Penting				
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator							Pagu Indikatif (Rp)			
			Indikator Renstra						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir							
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan					
		T																	
		KELURAHAN CEPOKO						KELURAHAN CEPOKO				Kelurahan yang Terbangun							
		KELURAHAN GUNUNGPATI						KELURAHAN GUNUNGPATI				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit					
		KELURAHAN MANGUNSARI						KELURAHAN MANGUNSARI				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit					
		KELURAHAN PAKINTELAN						KELURAHAN PAKINTELAN				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit					
		KELURAHAN PLALANGAN						KELURAHAN PLALANGAN				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit					
		KELURAHAN SUMURREJO						KELURAHAN SUMURREJO				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit					
		KELURAHAN SUMURREJO						KELURAHAN SUMURREJO				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	29.00	Kegiatan	3.477.022.800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	29.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.00	Pokmas / Ormas	3.041.337.518				
		KECAMATAN GUNUNGPATI						KECAMATAN GUNUNGPATI				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN SUKOREJO						KELURAHAN SUKOREJO				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN SADENG						KELURAHAN SADENG				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN KANDRI						KELURAHAN KANDRI				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN SEKARAN						KELURAHAN SEKARAN				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN PONGANGAN						KELURAHAN PONGANGAN				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN KALISEGORO						KELURAHAN KALISEGORO				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.00	Pokmas / Ormas					
		KELURAHAN JATIREJO						KELURAHAN JATIREJO				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.00	Pokmas / Ormas					

Rancangan Awal RKPD 2023							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator						Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Renstra						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target			Satuan
		KELURAHAN NGLJO					KELURAHAN NGLJO					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN PATEMON					KELURAHAN PATEMON					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN CEPOKO					KELURAHAN CEPOKO					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN GUNUNGPATI					KELURAHAN GUNUNGPATI					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN MANGUNSARI					KELURAHAN MANGUNSARI					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN PAKINTELAN					KELURAHAN PAKINTELAN					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN PLALANGAN					KELURAHAN PLALANGAN					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas		
		KELURAHAN SUMURREJO					KELURAHAN SUMURREJO					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.00	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	148.00	dokumen	10.655.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	148.00	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan			12.487.800.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	Dokumen	10.405.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyar akatan	12.237.800.000	
		KELURAHAN SUKOREJO					KELURAHAN SUKOREJO					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN SADENG					KELURAHAN SADENG					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN KANDRI					KELURAHAN KANDRI					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN SEKARAN					KELURAHAN SEKARAN					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN PONGANGAN					KELURAHAN PONGANGAN					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN KALISEGORO					KELURAHAN KALISEGORO					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN JATIREJO					KELURAHAN JATIREJO					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan		
		KELURAHAN NGLJO					KELURAHAN NGLJO					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9.00	Lembaga Kemasyar		

Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan								Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator							
			Indikator Renstra						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target			Satuan
		KELURAHAN PATEMON						KELURAHAN PATEMON				yang Diselenggarakan				akatan
		KELURAHAN NONGKOSAWIT						KELURAHAN NONGKOSAWIT				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
		KELURAHAN CEPOKO						KELURAHAN CEPOKO				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
		KELURAHAN GUNUNGPATI						KELURAHAN GUNUNGPATI				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
		KELURAHAN MANGUNSARI						KELURAHAN MANGUNSARI				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
		KELURAHAN PAKINTELAN						KELURAHAN PAKINTELAN				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
		KELURAHAN PLALANGAN						KELURAHAN PLALANGAN				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
		KELURAHAN SUMURREJO						KELURAHAN SUMURREJO				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9.00		Lembaga Kemasyar akatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	250.000.000	
		KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan			KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen	85.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				48.522.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00	Angka	85.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan			48.522.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00	kegiatan	85.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.00	Laporan	48.522.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	Persen	60.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	Persen				75.675.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	2.00	kegiatan	60.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	2.00	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan			75.675.000	

Rancangan Awal RKPD 2023							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting	
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator							Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra						Indikator Renstra			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
			Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan					Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	angka	60.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	Orang	75.675.000	
	NON URUSAN						NON URUSAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%	21.543.151.987	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				18.014.841.495	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%					
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen				Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	Dokumen	46.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah			11.011.860	
			Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen				Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	487.800	
		KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen			KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen					
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.108.110	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.720.020	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.470.410	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.770.320	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.00	Laporan	201.600	

Rancangan Awal RKPD 2023							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting	
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program /Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator							Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra						Indikator			Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan		
												Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	253.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitasi keuangan SKPD	100.00	Persen	18.765.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			16.579.435.733	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	18.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117.00	Orang/bulan	15.764.630.933	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	750.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	814.200.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	201.600	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00	Laporan	201.600	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	201.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00	bulan	1.202.151.987	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00	bulan	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			602.072.379	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.00	jenis	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00	jenis	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	190.935.119	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500.00	jenis	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	52.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00	jenis	42.151.987	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	20.809.842	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah tamu yang berkunjung	3300.00	orang	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah tamu yang berkunjung	3300.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	8.925.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	25.00	kegiatan	95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	25.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12.00	Laporan	84.167.000	

Rancangan Awal RKPD 2023							Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting	
Kode	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator							Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Renstra						Indikator Mutakhir							
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan					
			daerah					daerah			SKPD					
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10.00	jenis	500.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	225.235.418	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			76.091.788	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	3.00	jenis	450.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	3.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	76.091.788	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	205.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran			144.132.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	96.232.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15.00	jenis	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00	Laporan	47.900.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100.00	persen	875.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran			602.097.735	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.00	unit	275.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55.00	Unit	245.097.735	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	225.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	62.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	70.000.000	
JUMLAH						58.242.168.987	JUMLAH						54.152.779.933			

Dari Tabel 2.5 diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 Kecamatan Gunungpati melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 100 sub kegiatan dengan indicator keluaran yang sesuai dengan Renstra Kecamatan Gunungpati Tahun 2021-2026 dan di mix dengan inditator mutakhir sesuai dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang entang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rancangan awal kebutuhan anggaran sebesar Rp. 58.242.168.987 dan untuk tahun 2024 direncanakan Rp. 58.242.168.987.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Gunungpati juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gunungpati, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2023 Kecamatan Gunungpati Kota
Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Kampung Tematik Jahe Merah (Kajera)	Kp. Ngablak RW.III Kelurahan Jatirejo	Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	14 kegiatan	
2	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan usaha mikro)	16 Kelurahan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	16 Kelurahan @ Rp. 50,000,000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
3	Honorarium forkompincam	Kecamatan Gunungpati	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		
KELURAHAN SUKOREJO					
4	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Makam Bunda Maria RT 03 RW 10, Sukorejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	100 meter	
5	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Makam Astana Putri RT 01 RW 12, Sukorejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	200 meter	
KELURAHAN SADENG					
6	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Dk. Bendosari RT 01 RW 08, Sadeng	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Unit	
7	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Dk. Sadeng RT 01 RW 02, Sadeng	Persentase Pemberayaan Masyarakat	20 pal	
8	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Dk. Desel RT 01 RW 03, Sadeng	Persentase Pemberayaan Masyarakat	40 pal	
9	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Dk. Desel RT 03 RW 03, Sadeng	Persentase Pemberayaan Masyarakat	500 M2	
10	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Bukit Manyaran Permai RT 01 RW 05, Sadeng	Persentase Pemberayaan Masyarakat	500 m2	
KELURAHAN KANDRI					
11	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jln Kandri Raya RT 01 RW 01, Kandri	Persentase Pemberayaan Masyarakat	60 unit	
12	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jln Siwarak Raya RT 01 RW 02, Kandri	Persentase Pemberayaan Masyarakat	40 unit	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
13	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jln Kol Sugiarto RT 00 RW 00, Kandri	Persentase Pemberayaan Masyarakat	326.4 M	
KELURAHAN SEKARAN					
14	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jl. Margasatwa dan Kalimas RT- RW 05, Sekaran	Persentase Pemberayaan Masyarakat	45 titik	
15	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jl.Raya Banaran RT 05 RW 04, Sekaran	Persentase Pemberayaan Masyarakat	35 titik	
KELURAHAN PONGANGAN					
16	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Pongangan RT 03 RW 02, Pongangan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Buah	
17	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jatisari RT 08 RW 05, Pongangan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Buah	
18	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Pongangan RT 02 RW 02, Pongangan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Buah	
KELURAHAN KALISEGORO					
19	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Kalisegoro, Lapangan Volly RT 06 RW 01, Kalisegoro	Persentase Pemberayaan Masyarakat	200 M3	
20	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jalan Menuju Makam RW 01, RT 00 RW 01, Kalisegoro	Persentase Pemberayaan Masyarakat	40 M2	
21	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jalan Sapin RT 06 RW 02, Kalisegoro	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1250 M2	
22	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan	Jetis RT 05 RW 01, Kalisegoro	Persentase Pemberayaan Masyarakat	20 M2	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati				
23	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Ampel Gading RT 00, Kalisegoro	Persentase Pemberayaan Masyarakat	500 M2	
KELURAHAN JATIREJO					
24	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jatirejo RT- RW-, Jatirejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	330 meter2	
KELURAHAN NGIJO					
25	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	NGIJO RT3,5,6,RW 2 ,NGIJO	Persentase Pemberayaan Masyarakat	15 titik	
KELURAHAN NONGKOSAWIT					
26	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	JL. JEDUNG RT 03 RW 03, Nongkosawit	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	
27	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	JL. LINGKUNGAN RT 06 RW 01, Nongkosawit	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	
28	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	JL. KALAAN RAYA RT 03 RW 04, Nongkosawit	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	
29	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	JL.JEDUNG UTARA RT 04 RW 03, Nongkosawit	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	
30	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	JL. RANDUSARI RT 01 RW 02, Nongkosawit	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	
KELURAHAN CEPOKO					
31	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan	Mundingan,Jetis,Sukorame RT 05,01,03,05 RW 02,03 , Cepoko	Persentase Pemberayaan Masyarakat	70 Titik	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati				
32	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jl.Getas RT 05 RW 01, Cepoko	Persentase Pemberayaan Masyarakat	600 m ¹	
33	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jl. Cepoko- Sukorame RT 03 RW 01, Cepoko	Persentase Pemberayaan Masyarakat	600 m ¹	
KELURAHAN GUNUNGPATI					
34	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Ngrembel- Sekalongan RT 08 RW 01, Gunungpati	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Pal	
35	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Nglarang- Siroto RT 02 RW 09, Gunungpati	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Pal	
36	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Tk.Magersari- Perbalan RT 01 RW 02, Gunungpati	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Pal	
37	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Malon RT 03 RW 06, Gunungpati	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Pal	
38	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jalan Baru RT 01,2,3 RW 03, Gunungpati	Persentase Pemberayaan Masyarakat	20 pal	
KELURAHAN MANGUNSARI					
39	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	RT.1,3 RT 0 RW 05,Mangunsari	Persentase Pemberayaan Masyarakat	30 Unit	
40	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Mangunsari RT 04 RW 04, Mangunsari	Persentase Pemberayaan Masyarakat	600 m ²	
KELURAHAN PAKINTELAN					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
41	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Wilayah Pakintelan 2 Penghubung antar RW 2 dan RW 5, RT 00 RW 05, Pakintelan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	20 unit	
42	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Jl. Sitrombo (Penghubung RW 001 dengan RW 003) RT 00 RW 01, Pakintelan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	10 unit	
KELURAHAN SUMURREJO					
43	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Karanggeneng RT 00 RW 00, Sumurrejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 M	
44	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Sumurgunung RT 06 RW 05, Sumurrejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 M	
45	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Sumurrejo RT 01 RW 04, Sumurrejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	45 Titik	
46	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Sumurgunung RT 06 RW 05, Sumurrejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1500 M2	
47	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Karanggeneng RT 00 RW 00, Sumurrejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 kegiatan	
48	Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk Kecamatan Gunungpati	Sumurgunung RT 06 RW 05, Sumurrejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 kegiatan	
SUKOREJO					
49	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Perbaikan Jembatan Jalan Dewi Sartika	Persentase Pemberayaan Masyarakat	800 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
50	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Jalan Utama Kalialang Lama	Persentase Pemberayaan Masyarakat	750 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
51	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Pembangunan Jembatan Bendosari	Persentase Pemberayaan Masyarakat	800 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati				
SADENG					
52	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Perbaiki saluran dan gorong-gorong	Persentase Pemberayaan Masyarakat	600 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM
53	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pengaspalan Jalan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	500 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM
SEKARAN					
54	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Saluran + trotoar	Persentase Pemberayaan Masyarakat	2.000 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Jembatan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 paket	DINAS PEKERJAAN UMUM
56	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pengaspalan Jalan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
57	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Perawatan Lapangan Bola Volly	Persentase Pemberayaan Masyarakat	650 m2	DINAS PENATAAN RUANG
PONGANGAN					
58	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	perbaiki gedung kantor kelurahan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Buah	DINAS PENATAAN RUANG
KALISEGORO					
59	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Gedung Serba Guna atau Pertemuan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	100 M2	DINAS PENATAAN RUANG
60	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Gedung Pos Paud	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 paket/tahu	DINAS PENATAAN RUANG
61	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pelatihan Olahsan Ikan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 kegiatan	DINAS PERIKANAN
JATIREJO					
62	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Kantor Kelurahan Jatirejo	Persentase Pemberayaan Masyarakat	300 meter	DINAS PENATAAN RUANG
63	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	penyediaan Sumur Bor	Persentase Pemberayaan Masyarakat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
64	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pita Kejut	Persentase Pemberayaan Masyarakat	2 Lokasi	DINAS PERHUBUNGAN
PATEMON					
65	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Aspal jalan AMD RT 02 RW 01	Persentase Pemberayaan Masyarakat	3000 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Kantor Kelurahan Patemon	Persentase Pemberayaan Masyarakat	216 M2	DINAS PENATAAN RUANG
67	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pelatihan Pengemasan Produk	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 KEGIATAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
NONGKOSAWIT					
68	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	PEMBANGUNAN TALUD DAN SALURAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	DINAS PEKERJAAN UMUM
69	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	PEKERJAAN TALUD DAN SALURAN	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 PAKET	DINAS PEKERJAAN UMUM
PAKINTELAN					
70	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Pagar Bumi Kantor Kelurahan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	400 meter	DINAS PENATAAN RUANG
71	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Sumur Bor	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 kegiatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
72	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Kaca Cembung Jalan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	6 unit	DINAS PERHUBUNGAN
73	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pengeprasan Jalan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM
PLALANGAN					
74	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Talud	Persentase Pemberayaan Masyarakat	210 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pembangunan Toilet dan Tribun	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PENATAAN RUANG
76	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pengerasan jalan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	4000 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
77	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pengaspalan Jalan	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1500 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM
78	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pelatihan kerajinan bambu	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PERINDUSTRIAN
79	skala prioritas pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kewenangan opd teknis Kecamatan Gunungpati	Pelatihan souvenir dan oleh oleh khas	Persentase Pemberayaan Masyarakat	1 Kegiatan	DINAS PERINDUSTRIAN
80	Kegiatan Pelayanan akhir pecan dan malam hari	Kecamatan Gunungpati	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	12 Kegiatan	

Sumber : Kecamatan Gunungpati, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Tujuh Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai Bagian Wilayah dari Kota Semarang memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;**
dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas

Kemiskinan
Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Gunungpati juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah

terlampai. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Sedangkan indicator kinerja utama Daerah Kota Semarang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Loka	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,7
11	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik

Indikator Sasaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan

- b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan

Indikator Sasaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

- c. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- d. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator Sasaran : NILAI AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan

Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	93,5
SASARAN			
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	2
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	15
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	73

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Gunungpati bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Gunungpati memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Indeks Kepuasan Masyarakat**" dan indikator sasaran "Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Nikai AKIP";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota

Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 54.152.779.933 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 21.543.151.987,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 36.699.017.000,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI								54.152.779.933				53.710.675.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen					3.753.773.720		93	persen	3.861.894.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan				55.750.000		2	Angka	55.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	55.750.000	APBD Kota Semarang	2	Dokumen	55.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan				2.014.000.000		100	Persen	2.650.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	2.014.000.000	APBD Kota Semarang	100	Persen	2.650.000.000
		Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2	Kegiatan							2	Kegiatan	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	2.014.000.000	APBD Kota Semarang	100	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN SUKOREJO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	KELURAHAN SADENG			100.00	Persen	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		Sadeng			Wilayah Kecamatan								
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN KANDRI			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN SEKARAN			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN PONGANGAN			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN KALISEGORO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN JATIREJO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN NGIJO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN PATEMON			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN CEPOKO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN GUNUNGPATI			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN MANGUNSARI			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12.00	Laporan	KELURAHAN PAKINTELAN			100.00	Persen	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		Pakintelan			Wilayah Kecamatan								
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN PLALANGAN			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN SUMURREJO			100.00	Persen	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.684.023.720		100	Persen	1.156.894.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	1.684.023.720	APBD Kota Semarang	3	Kegiatan	1.156.894.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persen					32.259.967.518		99	Persen	32.190.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.00	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan				19.772.167.518		200	Kegiatan	31.790.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.00	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyar akatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	171.300.000	APBD Kota Semarang	200	Kegiatan	160.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21.00	Unit	KECAMATAN GUNUNGPATI	16.559.530.000	APBD Kota Semarang	14	Kegiatan	18.795.000.000
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	15	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit	KELURAHAN SUKOREJO			15	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit	KELURAHAN SADENG			8	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit	KELURAHAN KANDRI			15	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	14	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit	KELURAHAN SEKARAN			14	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	11	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit	KELURAHAN PONGANGAN			11	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	12	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit	KELURAHAN KALISEGORO			12	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatirejo	12	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit	KELURAHAN JATIREJO			12	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	8	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit	KELURAHAN NGIJO			8	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	19	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19.00	Unit	KELURAHAN PATEMON			19	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit	KELURAHAN NONGKOSAWIT			14	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	9	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit	KELURAHAN CEPOKO			9	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit	KELURAHAN GUNUNGPATI			18	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	14	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit	KELURAHAN MANGUNSARI			14	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit	KELURAHAN PAKINTELAN			18	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	15	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit	KELURAHAN PLALANGAN			15	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit	KELURAHAN SUMURREJO			17	Kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	15	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN NONGKOSAWIT	3.041.337.518	APBD Kota Semarang	15	Kegiatan	12.835.000.000
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	50	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.00	Pokmas / Ormas	KECAMATAN GUNUNGPATI			59	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SUKOREJO			17	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SADENG			13	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN KANDRI			15	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	15	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SEKARAN			15	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pongangan	20	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN PONGANGAN			20	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	19	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN KALISEGORO			19	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatirejo	15	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN JATIREJO			15	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	14	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN NGIJO			14	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	13	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN PATEMON			13	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN CEPEKO			11	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN GUNUNGPATI			14	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	18	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN MANGUNSARI			18	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN PAKINTELAN			11	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	16	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN PLALANGAN			16	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurrejo	12	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SUMURREJO			12	Kegiatan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	148.00	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan				12.487.800.000				400.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	4.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyar akatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	12.237.800.000	APBD Kota Semarang	6		200.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		dilaporkan											
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN SUKOREJO			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN SADENG			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN KANDRI			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN SEKARAN			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN PONGANGAN			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN KALISEGORO			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN JATIREJO			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN NGIJO			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN PATEMON			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN CEPOKO			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN GUNUNGPATI			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN MANGUNSARI			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN PAKINTELAN			9	Dokumen	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		dilaporkan											
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMURREJO			9	Dokumen	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	250.000.000	APBD Kota Semarang	1.00	kegiatan	200.000.000
		Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan							1.00	kelurahan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen					48.522.200		20	persen	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan				48.522.200		4	Angka	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	48.522.200	APBD Kota Semarang	3	kegiatan	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	Persen					75.675.000		95	Persen	80.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan				75.675.000		2	kegiatan	80.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan	100.00	angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	100.00	Orang	KECAMATAN GUNUNGPATI	75.675.000	APBD Kota Semarang	100	angka	80.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
	dan Ketahanan Nasional	wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%					18.014.841.495		100.00	%	17.578.781.000
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%							100.00	%	
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen							100.00	persen	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah				11.011.860		6.00		41.000.000
		Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen							2.00		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	487.800	APBD Kota Semarang	2.00	Dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	3.108.110	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	3.720.020	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	1.470.410	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	1.770.320	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	201.600	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	3.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	253.600	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	8.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminstrasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan				16.579.435.733		100.00	Persen	16.180.197.864
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen							3.00	dokumen	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117.00	Orang/bulan	KECAMATAN GUNUNGPATI	15.764.630.933	APBD Kota Semarang	100.00	persen	15.405.197.864
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi administrasi pelaksanaan Tugas ASN	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	814.200.000	APBD Kota Semarang	100.00	persen	760.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	201.600	APBD Kota Semarang	1.00	dokumen	5.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	201.600	APBD Kota Semarang	1.00	dokumen	5.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	201.600	APBD Kota Semarang	1.00	dokumen	5.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminstrasi umum	12.00	bulan	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah				602.072.379		12.00	bulan	517.583.136
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	KECAMATAN GUNUNGPATI	20.000.000	APBD Kota Semarang	20.00	jenis	37.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	KECAMATAN GUNUNGPATI	190.935.119	APBD Kota Semarang	30.00	jenis	100.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	KECAMATAN GUNUNGPATI	52.000.000	APBD Kota Semarang	2500	jenis	40.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	KECAMATAN GUNUNGPATI	20.809.842	APBD Kota Semarang	5.00	jenis	40.583.136
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3300.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	8.925.000	APBD Kota Semarang	3300.00	orang	70.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	84.167.000	APBD Kota Semarang	25.00	kegiatan	80.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	KECAMATAN GUNUNGPATI	225.235.418	APBD Kota Semarang	10.00	jenis	150.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				76.091.788		100.00	persen	30.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	3.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	KECAMATAN GUNUNGPATI	76.091.788	APBD Kota Semarang	3.00	jenis	30.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran				144.132.000		100.00	persen	220.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	96.232.000	APBD Kota Semarang	12.00	bulan	120.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00	Laporan	KECAMATAN GUNUNGPATI	47.900.000	APBD Kota Semarang	15.00	jenis	100.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran				602.097.735		100.00	persen	590.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55.00	Unit	KECAMATAN GUNUNGPATI	245.097.735	APBD Kota Semarang	55.00	unit	290.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	KECAMATAN GUNUNGPATI	225.000.000	APBD Kota Semarang	3.00	gedung	100.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	KECAMATAN GUNUNGPATI	62.000.000	APBD Kota Semarang	5.00	jenis	100.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	KECAMATAN GUNUNGPATI	70.000.000	APBD Kota Semarang	5.00	jenis	100.000.000
JUMLAH									54.152.779.933		53.710.675.000		

Dari Tabel 4.1 diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 Kecamatan Gunungpati melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 100 sub kegiatan dengan indikator keluaran yang sesuai dengan Renstra Kecamatan Gunungpati Tahun 2021-2026 dan di mix dengan inditator mutakhir sesuai dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang entang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rancangan awal kebutuhan anggaran sebesar Rp. **54.152.779.933** dan untuk tahun 2024 direncanakan Rp. **53.710.675.000**.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gunungpati pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gunungpati ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

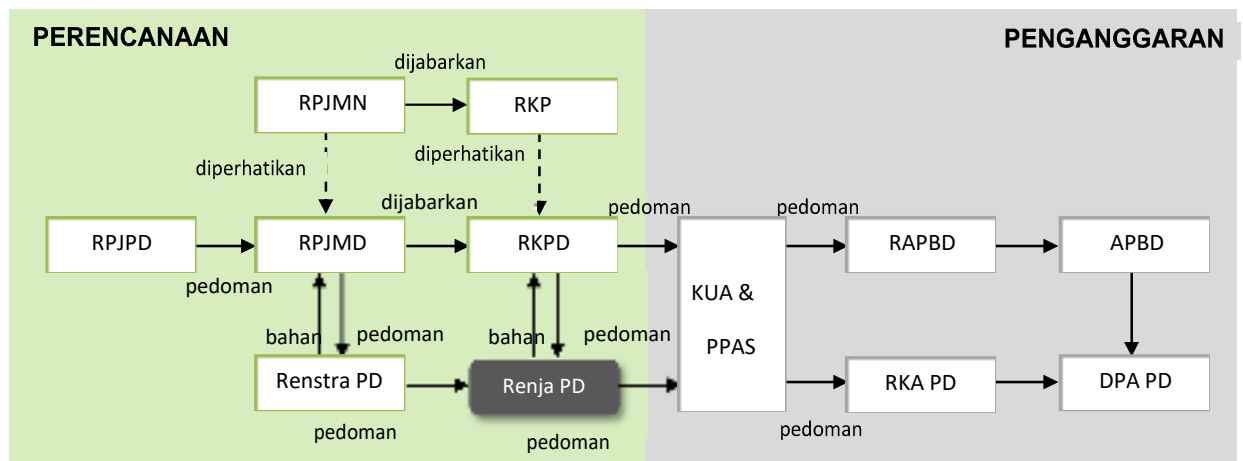
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Tugu, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Tugu.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Tugu Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota

- Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang

- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);
 - w. Surat Keputusan Camat Tugu Kota Semarang Nomor 050/280/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencaa Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang.
 - x. Surat Keputusan Camat Tugu Kota Semarang Nomor 050/281/2022 tentang Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Tugu yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Tugu.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 23,666,149,180 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 21,747,387,916 atau sebesar 97.89%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Kecamatan Tugu

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	91.89%	100%	91.89%	91.89%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen pelaporan	100%	33.76%	100%	33.76%	33.76%	100%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun			100%	43.16%	43.16%	100%		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			100%	59.66%	59.66%	100%		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD			100%	22.06%	22.06%	100%		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD			100%	32.85%	32.85%	100%		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			100%	48.74%	48.74%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100%	-	-	100%		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD			100%	29.05%	29.05%	100%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100%	92.82%	100%	92.82%	92.82%	100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan			100%	94.53%	94.53%	100%		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas			100%	107.35%	107.35%	100%		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			100%	86.03%	86.03%	100%		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran			100%			100%		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			100%	13.97%	13.97%	100%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	92.34%	100%	92.34%	92.34%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	81.33%	100%	81.33%	81.33%	100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	81.33%	81.33%	100%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	78.44%	100%	78.44%	78.44%	100%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan			100%	55.97%	55.97%	100%		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor			100%	90.95%	90.95%	100%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor			100%	82.49%	82.49%	100%		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	100%	83.05%	100%	83.05%	83.05%	100%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	90.25%	100%	90.25%	90.25%	100%		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata			100%	90.25%	90.25%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	100%	92.18%	100%	92.18%	92.18%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan			100%	96.69%	96.69%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon			100%	92.63%	92.63%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo			100%	90.59%	90.59%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan			100%	91.26%	91.26%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut			100%	90.27%	90.27%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan			100%	91.60%	91.60%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kantor Kelurahan Karanganyar								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo			100%	91.90%	91.90%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah			100%	90.83%	90.83%	100%		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	86.22%	100%	86.22%	86.22%	100%		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan			100%	86.22%	86.22%	100%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	95.75%	100%	95.75%	95.75%	100%		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	95.85%	100%	95.85%	95.85%	100%		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			100%	53.59%	53.59%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			100%	99.07%	99.07%	100%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Kulon			100%	98.84%	98.84%	100%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangunharjo			100%	99.21%	99.21%	100%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Wetan			100%	98.39%	98.39%	100%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan			100%	99.09%	99.09%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		di Kecamatan dan Kelurahan Randugarut								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar			100%	98.96%	98.96%	100%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tugurejo			100%	98.96%	98.96%	100%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jerakah			100%	99.00%	99.00%	100%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			100%	72.49%	72.49%	100%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik			100%	88.73%	88.73%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo			100%	67.20%	67.20%	100%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan			100%	91.85%	91.85%	100%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut			100%	82.36%	82.36%	100%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar			100%	84.36%	84.36%	100%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah			100%	77.74%	77.74%	100%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah			100%	93.39%	93.39%	100%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100%	92.76%	100%	92.76%	92.76%	100%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan			100%	80.31%	80.31%	100%		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan			100%	98.04%	98.04%	100%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	97.51%	100%	97.51%	97.51%	100%		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	97.51%	100%	97.51%	97.51%	100%		
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	97.51%	97.51%	100%		

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Tugu Kota Semarang

a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) Urusan, 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan 52 Indikator kinerja sub kegiatan.

b) Dari 9 (Sembilan) Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 9 Indikator memenuhi target.

Pada tahun 2021 pandemi covid-19 berangsur-angsur berkurang sehingga jumlah pelayanan administrative yang diberikan kepada masyarakat meningkat, berdampak pada pencapaian pada indikator jumlah pelayanan administrative kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Tugu melampaui target yang telah ditentukan.

Sedangkan pada indikator jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan indikator persentase kondisi sarana dan prasarana kelurahan dna kecamatan yang ditangani melalui musrenbang tidak memenuhi target dikarenakan meskipun pandemic covid-19 sudah berkurang tetapi pendapatan belum sepenuhnya pulih, sehingga anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas, yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik.

c) Dari 52 Indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 10 indikator program dan 52 kegiatan dengan 52 indikator

b) Dari 10 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 9 Indikator memenuhi targ.

c) Dari 52 Indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

KECAMATAN TUGU	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
Urusan Wajib Kewilayahan	23.666.149.180	22.245.053.036	93,99

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23,666,149,180	21,747,387,916	91,89	1,918,761,264
	Belanja Tidak Langsung	7.688.360.180	7.302.552.491	94,98	617.535.820
	Belanja Pegawai	7.688.360.180	7.302.552.491	94,98	617.535.820
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Gaji dan Tunjangan	7.415.510.180	7.009.642.491	94,53	405.867.689
2	Tambahan Penghasilan PNS	272.850.000	292.910.000	107,35	(20.060.000)
	Belanja Langsung	15,977,789,000	14,444,835,425	90.4	1,532,953,575
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,228,344,802	891,155,926	72.54	337,188,876
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.141.000	4.436.000	33.76	8,705,000
2	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.655.300	1.577.500	43.16	2,077,800
3	b Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.190.100	710.000	59.66	480,100
4	c Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.190.100	262.500	22.06	927,600
5	d Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	1.190.100	391.000	32.85	799,100
6	e Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.190.100	580.000	48.74	610,100
7	f Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.575.100	-	-	
8	g Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.150.200	915.000	29.05	2,235,200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.150.200	1.575.000	49.99	1,575,200
10	c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1.575.100	1.355.000	86.03	2,235,200
11	d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.575.100	220.000	13.97	1,355,100
12	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.953.602	674.026.500	92.34	55,927,102
13	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.884.700	9.200.000	84.52	1,684,700
14	b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	160.118.000	158.068.000	98.72	2,050,000
15	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.606.200	73.616.200	98.67	990,000
16	d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	11.309.852	9.378.900	82.93	1,930,952
17	e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	53.494.800	45.901.500	85.81	7,593,300
18	f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	40.594.000	38.509.000	94.86	2,085,000
19	g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd Pengelolaan Sistem Informasi	378.986.050	339.352.900	89.54	39,633,150
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.500.000	70.350.025	81.33	16,149,975
21	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	86.500.000	70.350.025	81.33	16,149,975
22	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.600.000	310.320.411	78.44	85,279,589
23	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	132.960.000	74.419.811	55.97	58,540,189
24	b Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	227.600.000	206.997.600	90.95	20,602,400
25	c Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	35.040.000	28.903.000	82.49	6,137,000
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.486.732.497	3.726.066.395	83.05	760,666,102

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	377.222.500	340.441.652	90.25	36,780,848
2	a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	377.222.500	340.441.652	90.25	36,780,848
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	3.672.776.997	3.385.624.743	92.18	287,152,254
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	560.800.000	542.254.398	96.69	18,545,602
	b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangkang Kulon	398.641.254	369.270.695	92.63	29,370,559
	c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangunharjo	492.645.856	446.298.647	90.59	46,347,209
	d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangkang Wetan	656.259.875	598.926.220	91.26	57,333,655
	e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Randugarut	245.161.801	221.318.665	90.27	23,843,136
	f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karanganyar	416.155.716	381.184.195	91.60	34,971,521
	g. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tugurejo	566.663.425	520.778.596	91.90	45,884,829
	h. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jerakah	336.449.070	305.593.327	90.83	30,855,743
3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	436.733.000	376.538.400	86.22	60,194,600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	436.733.000	376.538.400	86.22	60,194,600
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.221.111.701	9.787.046.904	95.75	434,064,797
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.888.860.701	9.478.841.904	95.85	410,018,797
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	15.935.000	8.540.000	53.59	7,395,000
	b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	4.082.272.360	4.044.312.000	99.07	37,960,360
	c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mangkang Kulon	459.091.097	453.743.000	98.84	5,348,097
	d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangunharjo	397.769.440	394.626.000	99.21	3,143,440
	e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangkang Wetan	443.633.272	436.471.000	98.39	7,162,272
	f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Randugarut	721.891.737	715.358.000	99.09	6,533,737
	g. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karanganyar	808.038.853	799.635.000	98.96	8,403,853
	h. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tugurejo	477.337.365	472.369.000	98.96	4,968,365
	i. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Jerakah	632.710.933	626.409.000	99.00	6,301,933
	j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	184.628.500	133.839.000	72.49	50,789,500
	k. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Kulon	222.802.751	197.689.700	88.73	25,113,051
	l. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo	261.009.879	175.408.950	67.20	85,600,929
	m. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Wetan	261.688.858	240.357.667	91.85	21,331,191
	n. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Randugarut	226.030.000	186.163.800	82.36	39,866,200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SELISIH ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
	o. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar	209.880.321	177.062.677	84.36	32,817,644
	p. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tugurejo	250.211.365	194.521.520	77.74	55,689,845
	q. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jerakah	186.228.970	173.910.300	93.39	12,318,670
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	332.251.000	308.205.000	92.76	24,046,000
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	98.920.000	79.441.000	80.31	19,479,000
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	233.331.000	228.764.000	98.04	4,567,000
D	Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	41.600.000	40.566.200	97.51	1,033,800
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.600.000	40.566.200	97.51	1,033,800
2	a Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	41.600.000	40.566.200	97.51	1,033,800
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23,666,149,180	21,747,387,916	93,76	1,918,761,264

Sumber : Kecamatan Tugu, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dan 52 kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebesar Rp 23,666,149,180. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 21,747,387,916 dengan sisa sebesar Rp 1,918,761,264 (93,76%) dengan urain berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar 7.688.360.180 realisasi 7.302.552.491 dan sisa anggaran sebesar Rp 617.535.820
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 15,977,789,000 Dengan realisasi sebesar Rp 14,444,835,425 (90,4%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1,532,953,575

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tugu dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi

Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;

- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;

- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolah, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;

- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan public, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat			97	97,08	98		92.05		

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan			1	1	1		1	1	
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP			76,00	77,00	78,00	72,55	70,01	77,00 %	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0 %	75,00 %	80,00 %		100%	80,00 %	

Sumber: Kecamatan Tugu, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 92.05% dari target sebesar 97%;
- b. Sasaran 1 **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 1 dari target sebesar 1;
- c. Sasaran 2 **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%;
- d. Sasaran 3 **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Nilai AKIP”, dimana realisasinya sebesar 70,01 dari target sebesar 76;
- e. Sasaran 4 **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 75%;

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tugu dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tugu Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Kecamatan Tugu, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD

serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,91 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 98,91 %; dimana 274 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 hanya dapat terakomodir sejumlah 271 program pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 (3 program tidak dapat terakomodir). Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penyesuaian anggaran, sehingga terdapat 2 program yang ditunda pelaksanaannya. Sementara 1 program yang lain tidak dilaksanakan karena output dari kegiatan pada program tersebut disinergikan dengan output pada kegiatan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021 / 2022	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Usulan	Usulan					4.567	4.235		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					3.390	3.182		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	71,00	72,00	73,00	74,00	74,23	75,14	75,00	75,00

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 75,14 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2018 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 74,23 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2019	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,47	0,44	0,41	0,38	0,29	0,46	0,41	0,38	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	5,98	6,16	6,33	5,64	6,52	6,52	6,52	-
3	Laju Inflasi	%	3,3±1	3,1±1	3,0±1	2,8±1	3,64	2,76	2,8±1	2,8±1	-
4	Indeks Gini	Poin	0,3424	0,3393	0,3362	0,3332	0,33	0,346*	0,3362	0,3332	-
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,13	31,20	31,27	31,34	31,80	31,80*	31,80	31,80	-
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,38	27,42	27,46	27,50	27,55	26,74*	27,46	27,50	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tugu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke

tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

- b. Persentase usulan Musrembang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrembang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam musrembang, dimana terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender, namun hasil ini dinilai belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan yang ideal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Wilayah Kecamatan Tugu tergolong pesisir dan dilewati aliran Sungai Kaliberingin menyebabkan sering terjadi banjir dan rob
- b. Kurangnya personil administrator dan pelaksana di Kecamatan Tugu dan Kelurahan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal;
- c. Masih dalam masa pandemic covid-19, dan adanya refocusing anggaran menyebabkan pelaksanaan pelayanan masyarakat belum optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi media social membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam upayanya memperoleh informasi secara otonom. Kebebasan mengakses segala bentuk informasi menuntut Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk dapat mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan media social.
 - Sebagai kota metropolitan, tidak dapat dilepaskan perkembangan dan permasalahan berbagai aspek yang ada di masyarakat Kota Semarang. Untuk itu Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu mengembangkan strategi yang tepat dan menguatkan komitmen dalam mengarahkan perkembangan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dari masyarakat Kota Semarang.
 - Berkembangnya pemahaman dan melek terhadap mekanisme perencanaan dan pembangunan membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam penyampaian aspirasi dan tuntutan, Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu menyiapkan adanya wadah dan ruang untuk mengakomodir demi perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis, menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tugu agar memiliki kapasitas yang mumpuni untuk dapat mengakomodir dan menerapkan dinamisme regulasi dan kebijakan yang ada.

b. Peluang:

- Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Tugu dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
- Pengoptimalan sumber daya aparatur dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment* agar kedepannya sumber daya aparatur Kecamatan Tugu dapat berperan optimal dalam kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Perwal, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tugu.
- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Pengembangan penerapan kapasitas sumber daya aparatur di Kelurahan dan Kecamatan Tugu dalam kaitannya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tugu. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan dengan pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment*.

- b. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Tugu dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
- c. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tugu.
- d. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas

- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

- 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik

 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon

 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum

 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Tugu mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Tugu memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Tugu Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Tugu Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	2.016.869.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	2.087.256.917	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	1.191.895.966	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 2. Langganan telepon	4 Dokumen	26.037.510	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1.191.895.966	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	26.037.510	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	671.804.604	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.428.105.036	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	146.804.604	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	938.105.036	-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	70.000.000	-
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	70.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	70.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	70.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	70.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	75.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	70.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	153.168.430	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	633.114.371	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3302 Kegiatan	153.168.430	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3302 Kegiatan	633.114.371	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	14.385.085.686	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	14.641.600.509	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	10.157.973.710	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	9.928.120.910	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Angka	64.147.270	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Angka	58.125.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	10 Unit	1.600.126.440	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.500.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	12 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	17 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	17 Unit	950.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	11 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	11 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	9 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	9 Unit	950.000.000	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	950.000.000	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	6 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	6 Unit	950.000.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	618.700.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	494.995.910	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas/Ormas	175.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas/Ormas	175.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas/Ormas	175.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas/Ormas	175.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas/Ormas	175.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas/Ormas	175.000.000	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas/Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas/Ormas	175.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.227.111.976	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.713.479.599	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	163.822.609	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	418.800.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	487.800.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	679.200.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.720.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	339.000.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	589.800.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	502.800.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	387.000.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.000.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	927.231.510	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	599.400.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	606.835.480	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	511.200.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	726.200.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	262.711.976	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	32.070.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15%	25.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15%	22.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 angka	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 angka	22.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	22.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	72.667.550	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	72.667.550	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	72.667.550	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.115.552.254	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	9.756.263.069	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	7 dokumen 4 dokumen	13.581.831	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	7 dokumen 4 dokumen	5.689.660	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	2 Dokumen 1 dokumen	3.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	2 Dokumen 1 dokumen	487.800	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.309.110	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	924.510	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.120.420	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	924.510	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.120.420	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	1.992.721	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	604.800	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	2.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	507.200	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	11.582.114.627	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	8.707.601.845	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	11.193.307.242	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	8.352.937.045	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	384.980.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	354.060.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.309.110	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	201.600	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	201.600	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.308.275	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	201.600	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	934.515.964	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	509.837.584	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 jenis	10.837.164	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 jenis	9.800.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	178.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	124.776.916	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	72.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	79.824.100	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 jenis	16.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 jenis	15.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	150 orang	102.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	150 orang	33.163.200	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 kegiatan	106.678.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 kegiatan	37.249.200	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	448.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	210.024.168	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	15.359.996	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	48.883.430	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	15.359.996	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	48.883.430	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	202.223.836	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	163.375.550	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	127.223.836	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	115.494.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	75.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	47.881.550	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	367.756.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	320.875.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	18 unit	180.256.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	18 unit	120.875.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1 gedung	87.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1 gedung	100.000.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 jenis	57.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 jenis	50.000.000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 jenis	43.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 jenis	50.000.000	
JUMLAH					29.642.506.940					26.580.288.045	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tugu juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tugu, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembuatan Jalan Alternatif Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu		1 Paket	
2	Normalisasi pembangunan talud dan pelebaran kali Plumbon	Kelurahan Mangkang Kulon		1 Paket	
3	Revitalisasi dan pengembangan destinasi wisata Pantai Mangunharjo	Kelurahan Mangkang Kulon		1 Paket	
4	Pembuatan Lampu Pengatur Lalu Lintas di Jl. Walisongo KM 12	Jalan Walisongo KM 12, Pintu Masuk KIW		1 Paket	

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Tugu pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang sebagaimana dipaparkan dalam table diatas diharapkan dapat terlaksana pada Tahun Anggaran 2023.

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Kecamatan Tugu, antara lain:

1. Permohonan pelibatan warga dalam pelaksanaan musrenbang melalui swakelola (Kecamatan Tugu)

Tanggapan:

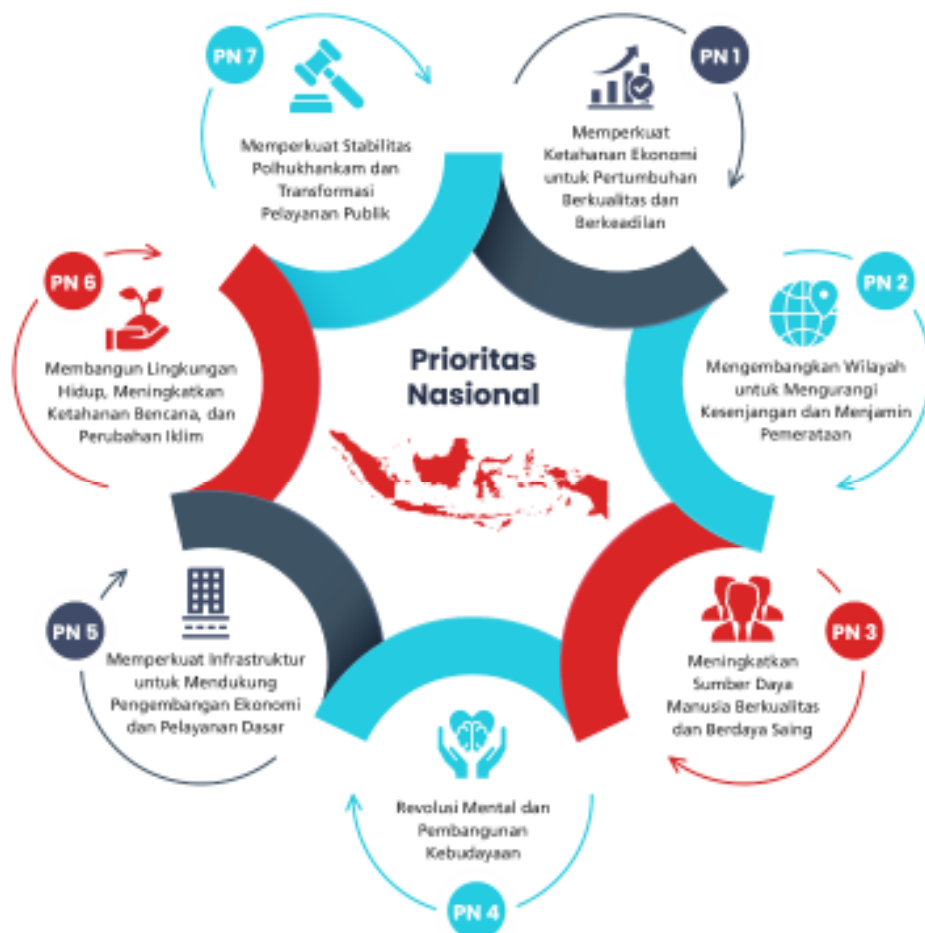
Permohonan pelibatan warga dalam pelaksanaan Musrenbang dengan swakelola dapat dilakukan bila ada warga yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota Semarang

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitiandan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;

- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan

Satgas

Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Tugu juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3-8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04 – 4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6 – 6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta RP)	103,54
7	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta RP)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks demokrasi	Indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,70
11	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,01
13	Indeks kinerja sistem infrastruktur	Indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2023

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Kota Semarang yaitu :

- a. Sasaran 1 **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”;
- b. Sasaran 2 **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”;
- c. Sasaran 3 **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Nilai AKIP”;
- d. Sasaran 4 **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”;
 - 2) Indikator “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat		98,00
SASARAN : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	- Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		100,00%
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- NILAI AKIP		78,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	- Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan		80,00% 70,00%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (5 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** dan indikator sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”, “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”, “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”, “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang

- pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 11 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 2 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
 3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 29.642.506.940 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 19,116,777,230 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp10,525,729,710 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				29.642.506.940				26.164.461.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		92%	2.016.869.000		-	93 %	2.006.313.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tugu	4 Dokumen	1.191.895.966	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	1.105.561.757
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	4 Dokumen	1.191.895.966	APBD Kota Semarang	-	4 Dokumen	1.105.561.757
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	100%	671.804.604	APBD Kota Semarang	-	100 %	747.582.813
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	6 Laporan	146.804.604	APBD Kota Semarang	-	100 %	747.582.813

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Wilayah Kelurahan Mangunharjo							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	100%	153.168.430	APBD Kota Semarang	-	100 %	153.168.430
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	3302 Kegiatan	153.168.430	APBD Kota Semarang	-	3302 Kegiatan	153.168.430
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		98%	14.385.085.686		-	99%	14.085.500.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	297 Kegiatan	10.157.973.710	APBD Kota Semarang	-	297 Kegiatan	13.747.950.931
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	120 Angka	64.147.270	APBD Kota Semarang	-	120 Angka	64.147.270
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	Kecamatan Tugu	10 Unit	1.600.126.440	APBD Kota Semarang	-	22 Kegiatan	8.857.155.343
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah		12 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo		17 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar		10 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut		11 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan		9 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon		13 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo		6 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	4 Pokmas /Ormas	618.700.000	APBD Kota Semarang	-	55 kegiatan	4.826.648.318
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah		18 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 kegiatan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		16 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar		22 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut		17 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan		23 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon		20 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo		26 Pokmas /Ormas	175.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Tugu	27 Dokumen	4.227.111.976	APBD Kota Semarang	-	27 Dokumen	337.549.069
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	APBD Kota Semarang	-	24 Dokumen	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah		9 Lembaga Kemasyarakatan	418.800.000	APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo		9 Lembaga Kemasyarakatan	679.200.000	APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar		9 Lembaga Kemasyarakatan	339.000.000	APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut		9 Lembaga Kemasyarakatan	502.800.000	APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan		9 Lembaga Kemasyarakatan	780.000.000	APBD Kota Semarang	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon		9 Lembaga Kemasyarakatan	599.400.000	APBD Kota Semarang	-		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Mangunharjo		9 Lembaga Kemasyarakatan	511.200.000	APBD Kota Semarang	-		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tugu	3 Kegiatan	262.711.976	APBD Kota Semarang	-	3 Kegiatan	238.829.069
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum		15%	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	20%	30.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kecamatan Tugu	2 angka	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 angka	30.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	2 Kegiatan	25.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 Kegiatan	30.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang		92%	100.000.000	APBD Kota Semarang	-	95%	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Tugu	2 Kegiatan	100.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 Kegiatan	100.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	2 Kegiatan	100.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 Kegiatan	100.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100%	13.115.552.254	APBD Kota Semarang	-	100%	9.942.648.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	Kecamatan Tugu	7 dokumen 4 dokumen	13.581.831	APBD Kota Semarang	-	7 dokumen 4 dokumen	12.950.168

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	Kecamatan Tugu	2 Dokumen 1 dokumen	3.900.000	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen 1 dokumen	3.960.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.309.110	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.309.110
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.210.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.210.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.210.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.210.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.210.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.210.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	3 dokumen	1.992.721	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	1.420.456
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	1 dokumen	2.750.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.630.602
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kecamatan Tugu	3 dokumen	11.582.114.627	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	8.543.077.157
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD		100%		APBD Kota Semarang	-	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Tugu	100%	11.193.307.242	APBD Kota Semarang	-	100%	8.160.653.716
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kecamatan Tugu	100%	384.980.000	APBD Kota Semarang	-	100%	378.762.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.309.110	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.252.272
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.210.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.157.465
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	1 dokumen	1.308.275	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.251.704
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Kecamatan Tugu	100%	934.515.964	APBD Kota Semarang	-	100%	672.848.473
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Tugu	2 jenis	10.837.164	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	10.311.958
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Tugu	3 jenis	178.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	66.306.016
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Tugu	2 jenis	72.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	84.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Tugu	1 jenis	16.500.000	APBD Kota Semarang	-	1 jenis	15.783.610
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Kecamatan Tugu	150 orang	102.000.000	APBD Kota Semarang	-	150 orang	110.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Tugu	6 kegiatan	106.678.000	APBD Kota Semarang	-	6 kegiatan	144.364.403
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	4 jenis	448.500.000	APBD Kota Semarang	-	4 jenis	242.052.486
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Tugu	100%	15.359.996	APBD Kota Semarang	-	100%	14.693.104
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Tugu	3 jenis	15.359.996	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	14.693.104
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Tugu	100%	202.223.836	APBD Kota Semarang	-	100%	204.299.948
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	12 bulan	127.223.836	APBD Kota Semarang	-	12 bulan	131.687.916
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Tugu	7 jenis	75.000.000	APBD Kota Semarang	-	7 jenis	72.612.032
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Tugu	100%	367.756.000	APBD Kota Semarang	-	100%	494.779.150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kecamatan Tugu	18 unit	180.256.000	APBD Kota Semarang	-	18 unit	229.905.915
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	Kecamatan Tugu	1 gedung	87.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 gedung	87.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kecamatan Tugu	2 jenis	57.500.000	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	86.306.016
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	Kecamatan Tugu	5 jenis	43.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 jenis	91.567.219

Adapun Program Kegiatan tahun 2023 yang merupakan Program Kegiatan Prioritas dan berkelanjutan adalah :

1. Kegiatan pengembangan budaya inovasi pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan pada tahun 2022 dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Semarang melanjutkan program ini di tahun 2023.
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui Board Learning Center (BLC).
4. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2023. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Tugu. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.
5. Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Forkopimcam. Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. Keanggotaan forkopimcam berasal dari 3 unsur sebagai berikut:
 - 1) Camat, sebagai ketua.
 - 2) Kepolisian di kecamatan, sebagai anggota.
 - 3) Pimpinan Kewilayahan TNI di kecamatan, sebagai anggota.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam. Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tugu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Tugu ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tugu;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Tugu ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

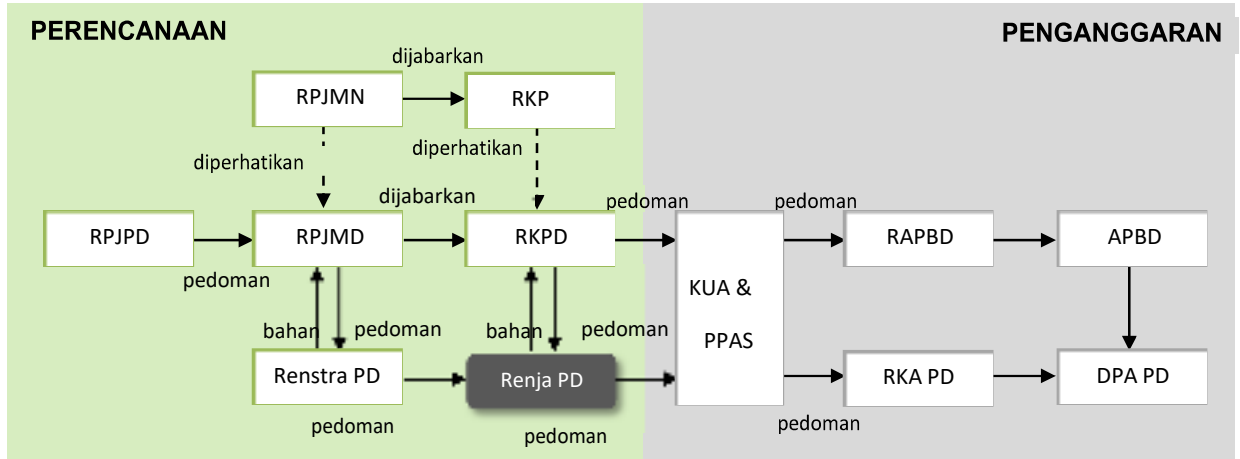
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Mijen Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan

secara simultan/paralel. Hal tersebut dilakukan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Mijen Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. di atas dijelaskan bahwa penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada pelaksanaan Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Mijen di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Mijen Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Kecamatan Mijen Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 48.890.547.858 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 45.778.205.450 atau sebesar 93,63%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Mijen Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN										
3.1.06.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Langganan rekening telpon, air, listrik dan koran	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	-Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	-Pengadaan jamuan rapat	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		-Pengadaan Jamuan Peserta Kegiatan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		-Pengadaan Jamuan Tamu	100%	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.01.018	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.01.028	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	-Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.01.290	Operasional Kelurahan Cangkiran	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.291	Operasional Kelurahan Bubakan	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.292	Operasional Kelurahan Karangmalang	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.293	Operasional Kelurahan Polaman	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.294	Operasional Kelurahan Purwosari	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.295	Operasional Kelurahan Tambangan	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.296	Operasional Kelurahan Wonolopo	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.297	Operasional Kelurahan Mijen	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.298	Operasional Kelurahan Jatibarang	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.299	Operasional Kelurahan Kedungpane	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.300	Operasional Kelurahan Ngadirgo	-Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.01.301	Operasional Kelurahan Wonoplumbon	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.302	Operasional Kelurahan Jatisari	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.303	Operasional Kelurahan Pesantren	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.010	Pengadaan Meubelair	- Jumlah meubelair kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	2	4	-	-	-	-	4	200
3.1.06.08.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada tahun Berkenaan	100%	75%	-	-	-	-	75%	75
3.1.06.08.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada tahun Berkenaan	100%	75%	-	-	-	-	75%	75
3.1.06.08.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	75%	-	-	-	-	75%	75

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	- Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100 %	-	-	-	-	100 %	100
3.1.06.08.06.005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	- Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100%	75%	-	-	-	-	75%	75%
3.1.06.08.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	- Jumlah LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.06.018	Penyusunan LKJIP	- Jumlah LKJIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.028	Penyusunan Renja SKPD	- Jumlah Renja Perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.029	Penyusunan Renstra SKPD	- Tersusunnya Renstra Perangkat daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.06.033	Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Jumlah RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	- Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.16	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	- Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100%	100 %	-	-	-	-	100 %	100
		- Cakupan Kegiatan Kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.16.003	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	-Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3.216 Kegiatan	804 Kegiatan	-	-	-	-	804 Kegiatan	25
3.1.06.08.18	Program pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	-Persentase jumlah siskamling di lingkungan RT	90%	72,37%	-	-	-	-	72,37%	80,41
3.1.06.08.18.006	Pendampingan Penegakan Perda di kecamatan dan pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	-Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan Se Kecamatan Mijen	25%	35%	-	-	-	-	35%	140
3.1.06.08.20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan	1578 Kegiatan	804 Kegiatan	-	-	-	-	804 Kegiatan	50,95
3.1.06.08.20.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	-Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	806 Kegiatan	201 Kegiatan	-	-	-	-	201 Kegiatan	24,93
3.1.06.08.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	100	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	- Persentae Kehadiran RT Dalam Musrenbang	99,50%	98,64%	-	-	-	-	98,64%	99,14
		- Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	95%	92,53%	-	-	-	-	92,53%	97,40
		- persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	55%	51,16%	-	-	-	-	51,16%	93,02
3.1.06.08.21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	-Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	- Jumlah paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, dan Jembatan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.009	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	-	-	6 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.141	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cangkiran	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.142	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubakan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.143	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangmalang	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.144	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polaman	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.145	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	-	-	6 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kelurahan Purwosari	Pelaksanaan Hasil Musrenbang								
3.1.06.08.21.146	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambangan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.147	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonolopo	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.148	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mijen	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7 Kegiatan	7 Kegiatan	-	-	-	-	7 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.149	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibarang	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.150	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungpane	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.151	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngadirgo	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.152	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonoplumbon	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.153	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisari	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.21.154	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pesantren	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.22	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	- Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan Berstandar PATEN - Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100% 37.773 Pelayanan	71,43% 5.009 Pelayanan	-	-	-	-	71,43% 5.009 Pelayanan	71,43 13,26
3.1.06.08.22.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	- Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	4 kegiatan	100
3.1.06.08.22.001	Pengembangan Budaya Kerja dan apratur	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5.780 Pelayanan	5.009 pelayanan	-	-	-	-	5.009 pelayanan	86,66
3.1.06.08.22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)	- Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - Kelurahan yang Melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	177% 14 Kelurahan	100% 14 Kelurahan	-	-	-	-	100% 14 Kelurahan	56,50 100
3.1.06.08.23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	- Persentase Jumlah RW di Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.25	Program Pengelolaan Asset Pemerintah	- Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	24 Jumlah Aset	24 Jumlah Aset	-	-	-	-	24 Jumlah Aset	100
3.1.06.08.25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	- Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	219 Bidang Tanah	218 Bidang Tanah	-	-	-	-	218 Bidang Tanah	99,54
3.1.06.08.25	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	- Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95,69%	71,38	-	-	-	-	71,38	75,60
3.1.06.08.25.003	Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	- Persentase jumlah penerimaan PBB di Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	100%	60,41%	-	-	-	-	60,41%	60,41
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Mijen)	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Mijen)	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		- Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		- Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	6 Dokumen	13 Dokumen	185,71
		- Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN MIJEN)	- Dokumen Renstra dan Renja OPD	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	3 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	2	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	150
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN MIJEN)	- Kinerja ASN - Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan 100%	- -	12 Bulan -	12 Bulan -	100 -	- 100%	12 Bulan 100%	100 100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN MIJEN)	- Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu - Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan 100%	- -	12 Bulan -	12 Bulan -	100 -	- 100%	12 Bulan 100%	100 100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100% 15 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 15 Jenis	100% 15 Jenis	100 100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Pengadaan Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai - Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mendukung kerja pegawai - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100% 100% 3 Jenis	- - -	100% 100% -	100% 97,57% -	100 97,57 -	- - 3 Jenis	100% 97,57% 3 Jenis	100 97,57 100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100% 60 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 60 Jenis	100% 60 Jenis	100 100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang Cetak yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(KECAMATAN MIJEN)	-Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan -Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100% 11 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 11 Jenis	100% 11 Jenis	100 100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN MIJEN)	-Pengadaan Jamuan Peserta Kegiatan -Pengadaan Jamuan Rapat -Pengadaan Jamuan Tamu -Jumlah tamu yang berkunjung	100% 100% 100% 2.000 Orang	- - - -	25% 100% 25% -	25% 100% 25% -	100 100 100 -	- - - 2.000 Orang	25% 100% 25% 2.000 Orang	25 100 25 100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN MIJEN)	-Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan -Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan -Koordinasi untuk menunjang tugas kantor -Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100% 100% 100% 50 Kegiatan	- - - -	100% 100% 100% -	100% 100% 100% -	100 100 100 -	- - - 50 Kegiatan	100% 100% 100% 50 Kegiatan	100 100 100 100
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (KECAMATAN MIJEN)	-Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE -Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100% 4 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 4 Jenis	100% 4 Jenis	100 100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	-Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN MIJEN)	- Langganan listrik, telepon, air dan koran - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Sumber daya air dan listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	- - -	12 Bulan - -	12 Bulan - -	100 - -	- 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 100 100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100% 100% 8 Jenis	- - -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 8 Jenis	100% 100% 8 Jenis	100 100 100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN MIJEN)	- Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan - Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	100% 32 Unit	- -	100% -	100% -	100 -	- 32 Unit	100% 32 Unit	100 100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - kegiatan pemeliharaan gedung kantor - Rehabilitasi gedung	100% 100% 3 Gedung	- - -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 3 Gedung	100% 100% 3 Gedung	100 100 100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) - Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Mijen)	85%	-	85%	1,59%	1,87	91%	92,59%	108,93
			100%	-	100%	-	-	-	-	-
			477.561 Pelayanan	-	5.780 Pelayanan	7.625 Pelayanan	131,92	-	7.625 Pelayanan	1,60
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan - Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%	-	100%	98,49%	98,49	-	98,49%	98,49
			1 Angka	-	-	-	-	1 Angka	1 Angka	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran - Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan - Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) - Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja - Laporan Hasil Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100
			100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
			4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	-	4 Kegiatan	100
			806 Kegiatan	-	806 Kegiatan	745 Kegiatan	92,43	-	745 Kegiatan	92,43
			100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
			2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	-	2 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Hasil Musrenbang								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	100%	102,82%	102,82	-	102,82%	102,82
		- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat - Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan - Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	5.780 Pelayanan 2 Jenis 4 Kegiatan 100%	- - - -	5.780 Pelayanan - 4 Kegiatan -	7.625 Pelayanan - 4 Kegiatan -	131,92 - 100 -	- - 100%	7.625 Pelayanan - 7 Kegiatan 100%	131,92 - 100 -
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN CANGKIRAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100%	-	100%	100%	100	100%	200%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUBAKAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGMALANG)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN POLAMAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PURWOSARI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAMBANGAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOLOPO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MIJEN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATIBARANG)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NGADIRGO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATISARI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PESANTREN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	-	100%	93,93%	93,93	100%	193,93%	193,93
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkar bangunan tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah	209 Bidang 3.216 Kegiatan	- -	218 Bidang 3.216 Kegiatan	197 Bidang 3.216 Kegiatan	90,37 100	- -	197 Bidang 3.216 Kegiatan	94,26 100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun berkenaan - Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan - Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS - Jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani - Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan - Penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan - Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan 	100%	-	100%	79,64%	79,64	-	79,64%	79,64
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan 	90%	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS 	98%	-	98%	92,42%	94,30	-	92,42%	94,30
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani 	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan 	6 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan 	35%	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan 	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan(Mijen) 	95%	-	95%	5,57%	5,86	97%	102,57%	107,97
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan(Mijen) 	19.954 Kegiatan	-	806 Kegiatan	745 Kegiatan	92,43	-	745 Kegiatan	3,73
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 	100%	-	100%	113,55%	113,55	-	113,55%	113,55
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 	502 Kegiatan	-	-	-	-	502 Kegiatan	502 Kegiatan	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum 	15 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100	-	15 Dokumen	100
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum 	83 Angka	-	-	-	-	83 Angka	83 Angka	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	16 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	13 Kegiatan	29 Kegiatan	181,25
		- Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	61 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	-	20 Kegiatan	32,79
		- Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	54 Kegiatan	-	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100	-	25 Kegiatan	46,30
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	8 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	9 Kegiatan	24 Kegiatan	300
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	8 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	10 Kegiatan	23 Kegiatan	287,5
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	10 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	9 Kegiatan	21 Kegiatan	210
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	9 Kegiatan	22 Kegiatan	200

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Polaman								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	7 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	12 Kegiatan	24 Kegiatan	342,86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	7 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	12 Kegiatan	26 Kegiatan	371,43
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	6 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	14 Kegiatan	30 Kegiatan	500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	8 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	11 Kegiatan	22 Kegiatan	275
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	12 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	12 Kegiatan	23 Kegiatan	191,67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	6 Kegiatan	-	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	18 Kegiatan	25 Kegiatan	416,67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	10 Kegiatan	16 Kegiatan	266,67

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(KELURAHAN NGADIRGO)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	6 Kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	12 Kegiatan	22 Kegiatan	366,67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	7 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	10 Kegiatan	16 Kegiatan	228,57
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	8 Kegiatan	-	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	12 Kegiatan	21 Kegiatan	262,50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	14 Kegiatan	100
		- Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	30 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	26 Kegiatan	42 Kegiatan	140
		- Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	98%	-	98%	95%	96,94	-	95%	96,94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	20 Kegiatan	31 Kegiatan	281,82

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	12 Kegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	24 Kegiatan	32 Kegiatan	266,67
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	10 Kegiatan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	23 Kegiatan	28 Kegiatan	280
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	20 Kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	20 Kegiatan	37 Kegiatan	185
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	16 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	22 Kegiatan	38 Kegiatan	237,50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	19 Kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	28 Kegiatan	45 Kegiatan	236,84
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan wonolopo	20 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	32 Kegiatan	48 Kegiatan	240
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	10 Kegiatan	-	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	22 Kegiatan	31 Kegiatan	310

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	22 Kegiatan	37 Kegiatan	246,67
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPAPE)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	24 Kegiatan	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100	31 Kegiatan	50 Kegiatan	208,33
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	20 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	18 Kegiatan	38 Kegiatan	190
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	17 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	25 Kegiatan	41 Kegiatan	241,18
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	28 Kegiatan	-	28 Kegiatan	28 Kegiatan	100	25 Kegiatan	53 Kegiatan	189,29
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	16 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	23 Kegiatan	36 Kegiatan	225
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Jumlah jenis laporan lembaga	100% 18 Dokumen	- -	100% -	100% -	100 -	- 18 Dokumen	100% 18 Dokumen	100 100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kemasyarakatan yang seharusnya								
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) - Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	220 Kegiatan 4 Kegiatan 10 Dokumen	- - -	220 Kegiatan 4 Kegiatan -	220 Kegiatan 4 Kegiatan -	100 100 -	- - 10 Dokumen	220 Kegiatan 4 Kegiatan 10 Dokumen	100 100 100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Kampung Tematik Yang Terbangun - Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	2 Kegiatan 6 Kegiatan 1 Kegiatan	- - -	6 Kegiatan - -	6 Kegiatan - -	100 - -	6 Kegiatan - 1 Kegiatan	12 Kegiatan - 1 Kegiatan	600 - 100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT - Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	90% 30%	- -	100% -	100% -	100 -	- 10%	100% 10%	111,11 33,33
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100% 36 Angka	- -	100% -	100% -	100 -	- 108 Angka	100% 108 Angka	100 300
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	- Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di	25%	-	25%	25%	100	-	25%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	- Kelurahan se Kecamatan Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	150
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	-	-	-	-	90%	90%	90
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	1 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200

Dari data sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Mijen Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 11 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 9 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 5 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 7 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	
Urusan Kewilayahan					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.814.867.858	18.478.002.849	93,25	1.336.865.009
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.820.000	8.829.700	89,92	(990.300)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.315.000	2.095.000	90,50	(220.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.070.000	1.032.200	96,47	(37.800)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.095.000	925.000	84,47	(170.000)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	945.000	835.000	88,36	(110.000)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	945.000	835.000	88,36 (110.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.175.000	1.015.000	86,38 (160.000)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.275.000	2.092.500	91,98 (182.500)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.470.079.858	15.327.238.086	93,06 (1.142.841.772)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.873.919.858	14.840.595.586	93,49 (1.033.324.272)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	594.340.000	484.930.000	81,59 (109.410.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.125.000	1.020.000	90,67 (105.000)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	695.000	692.500	99,64 (2.500)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.342.285.000	1.273.576.900	94,88 (68.708.100)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.922.200	58,44 (2.077.800)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	481.416.000	455.411.100	94,60 (26.004.900)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	18.401.500	76,67 (5.598.500)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	13.470.100	89,80 (1.529.900)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.005.000	33.680.500	84,19 (6.324.500)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.047.000	2.816.500	14,05 (17.230.500)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	756.817.000	746.875.000	98,69 (9.942.000)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.238.000	113.940.309	68,77 (59.297.691)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.600.000	100.330.309	76,24 (31.269.691)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.638.000	13.610.000	32,69 (28.028.000)
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.819.445.000	1.754.417.854	96,43 (65.027.146)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.585.000	115.141.954	83,08 (23.443.046)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.680.860.000	1.639.275.900	97,53 (41.584.100)
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.298.040.000	8.506.972.347	91,49 (791.067.653)
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.730.000	10.915.000	69,39 (4.815.000)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.730.000	10.915.000	69,39	(4.815.000)
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.719.410.000	7.975.869.947	91,47	(743.540.053)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	824.730.000	785.310.400	95,22	(39.419.600)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN CANGKIRAN)	662.300.000	605.169.246	91,37	(57.130.754)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUBAKAN)	377.850.000	342.983.409	90,77	(34.866.591)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGMALANG)	253.270.000	229.539.846	90,63	(23.730.154)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN POLAMAN)	208.700.000	189.107.778	90,61	(19.592.222)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PURWOSARI)	372.500.000	341.972.851	91,80	(30.527.149)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAMBANGAN)	284.300.000	252.281.658	88,74	(32.018.342)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOLOPO)	877.000.000	800.240.112	91,25	(76.759.888)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MIJEN)	694.200.000	633.729.380	91,29	(60.470.620)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATIBARANG)	322.100.000	294.499.750	91,43	(27.600.250)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	637.100.000	585.535.826	91,91	(51.564.174)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NGADIRGO)	694.360.000	630.282.523	90,77	(64.077.477)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	455.600.000	408.831.531	89,73	(46.768.469)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATISARI)	1.594.700.000	1.459.772.824	91,54	(134.927.176)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PESANTREN)	460.700.000	416.612.813	90,43	(44.712.600)
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	562.900.000	52.187.400	92,41	(42.712.600)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	562.900.000	52.187.400	92,41	(42.712.600)
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.520.640.000	18.544.273.054	95,00	(976.366.946)
9	Kegiatan Pemberdayaan	18.230.600.000	17.292.898.854	94,86	(937.701.146)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	67.700.000	41.232.500	60,90	(26.467.500)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	5.180.100.000	5.129.041.000	99,01	(51.059.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	924.000.000	913.687.000	98,88	(10.313.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	982.000.000	971.699.000	98,95	(10.301.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	931.000.000	915.260.000	98,31	(15.740.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	948.000.000	937.385.000	98,88	(10.615.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	900.000.000	887.263.000	98,58	(12.737.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	923.000.000	903.131.300	97,85	(19.868.700)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	979.000.000	965.075.000	98,58	(13.925.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	683.878.000	673.259.800	98,45	(10.618.200)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	605.067.000	595.185.000	98,37	(9.882.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	311.436.000	306.892.000	98,54	(4.544.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	284.331.000	279.534.000	98,31	(4.797.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	687.750.000	682.765.000	99,28	(4.985.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	360.580.000	353.037.000	97,91	(7.543.000)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	480.958.000	475.158.000	98,79	(5.800.000)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	273.980.000	199.642.500	72,87	(74.337.500)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	199.400.000	185.821.000	93,19	(13.579.000)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	147.850.000	104.206.000	70,48	(43.644.000)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	195.430.000	141.915.100	72,62	(53.514.900)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	185.400.000	131.288.947	70,81	(54.111.053)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	191.100.000	149.701.850	78,34	(41.398.150)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	188.200.000	151.586.500	80,55	(36.613.500)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	215.700.000	162.847.651	75,50	(52.852.349)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	198.300.000	158.320.000	79,84	(39.980.000)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	193.800.000	159.433.150	82,27	(34.366.850)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	193.800.000	154.830.300	79,89	(38.969.700)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	209.340.000	171.825.750	82,08	(37.514.250)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonoplumbon (KELURAHAN WONOPLUMBON)	182.300.000	155.488.000 85,29	(26.812.000)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisari (KELURAHAN JATISARI)	219.000.000	138.290.500 63,15	(80.709.500)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pesantren (KELURAHAN PESANTREN)	188.200.000	98.097.006 52,12	(90.102.994)
10	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lembaga Tingkat	1.290.040.000	1.251.374.200 97,00	(38.665.800)
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.040.000	68.913.200 69,58	(30.126.800)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.191.000.000	1.182.461.000 99,28	(8.539.000)
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	257.000.000	248.957.200 96,87	(8.042.800)
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	257.000.000	248.957.200 96,87	(8.042.800)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	257.000.000	248.957.200 96,87	(8.042.800)
	TOTAL	48.890.547.858	45.778.205.450 93,63	(3.112.342.408)

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 48.890.547.858. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 45.778.205.450 dengan sisa sebesar Rp 3.112.342.408 (93,63%) dengan uraian berikut:

- Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 15.873.919.858 realisasi Rp 15.412.875.586 (97,1%) dan sisa anggaran sebesar Rp 461.044.272 (2,9%).
- Belanja Langsung**: anggaran sebesar Rp 33.016.628.000 Dengan realisasi sebesar Rp 30.365.329.864 (91,97%) dan sisa anggaran sebesar Rp 2.651.298.136 (8,03%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mijen dan Kelurahan yang ada, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1). Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;

- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- ab. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;

- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;

- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;

- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;

- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan/jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ab. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ac. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- ad. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ae. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- af. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;

- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	27,38%	28,95%	-	-	27,38%	28,90%	-	-
Tujuan: Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	87%	-	-	90,21%	90,27%	-	-
Sasaran: 2. Meningkatkan manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
Tujuan: Meningkatkan kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat serta wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	86 Angka	87 Angka	-	-	86 Angka	87 Angka
Sasaran: 1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	-	72	73	-	-	72	73
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	1 Angka	1 Angka	-	-	1 Angka	1 Angka
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	84%	86%	-	-	84%	86%
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	43%	45%	-	-	43%	45%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	60%	65%	-	-	60%	65%

Sumber: Kecamatan Mijen Tahun 2020, 2021 dan 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat”, dimana realisasinya sebesar 90,21% dari target sebesar 95%;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 28,90% dari target sebesar 28,95%.
- b. Tujuan **“Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 90,27 % dari target sebesar 87%;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan” dan “Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% & 100% dan 100%.

Di samping hal-hal tersebut di atas, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG /TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
1	Jumlah Usulan	Usulan					678	674		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					347	371		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%					51,16	55		

Sumber: Kecamatan Mijen, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 55 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 51,16 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	87,50	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	96,68	16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	82,50	84,34	86,68	88,52	90,86	93,20	95,04	95,04	16 Kecamatan
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	91	92	93	94	95	95	16 Kecamatan
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	95	97	98	99	100	100	100	16 Kecamatan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mijen sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Namun demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen tidak terlepas dari tantangan, peluang, dan permasalahan yang bersifat dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Mijen, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun tantangan, peluang, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Mijen yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas.
- 5) Kondisi masyarakat Kecamatan Mijen yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Mijen hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi

yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.

SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill*, *hard skill*, *social skill* dan *mental skill*. *Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill* menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM.

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2023, antara lain:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas

wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM)

Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.

3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klusterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;

- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan

- 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi

- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah

terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya- upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya- upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air

- 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60-6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Mijen mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif, Efisien, dan Inovatif**”. Kecamatan Mijen memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023

No	Rancangan Akhir RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				53.460.064.934	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				53.460.064.934	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	20.610.986.734	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	20.610.986.734	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	17.663.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	17.663.000	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.330.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.330.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.884.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.884.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.469.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.469.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.675.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.675.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.870.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.870.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	972.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	972.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.463.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.463.000	
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.397.539.642	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.397.539.642	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD	3 Dokumen		
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang	16.573.379.642	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang	16.573.379.642	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	821.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	821.160.000	
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	775.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	775.000	
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.549.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.549.000	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	676.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	676.000	
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.277.661.848	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.277.661.848	
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.753.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.753.000	
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	454.085.848	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	454.085.848	
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.870.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.870.000	
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.000.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.000.000	
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.175.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.175.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.248.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.248.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	598.530.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	598.530.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	11.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	11.250.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.250.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.250.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	221.157.244	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	221.157.244	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.045.244	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.045.244	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.112.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.112.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.685.715.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.685.715.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	171.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	171.150.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	66.565.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	66.565.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.078.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.078.000.000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	370.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	370.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.542.321.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.542.321.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	172.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	172.400.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	172.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	172.400.000	
7.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.072.421.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.072.421.200	
7.01.02. 2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	2.072.421.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	2.072.421.200	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan			Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan		
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan			Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan		
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan			Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan		
		Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan			Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan		
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan			Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan		
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan			Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan		
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan			Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan		
		Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan			Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan			Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan		
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	12 Laporan			Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	12 Laporan		
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan			Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan		
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan			Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan		
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan			Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan		
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan			Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.297.500.000	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.297.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.297.500.000	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.297.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	29.165.235.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	29.165.235.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	17.424.435.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	17.424.435.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	14.650.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	14.650.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit			Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit		
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit			Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit		
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit			Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit		
		Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit			Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit		
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit			Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit		
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit			Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit		
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	8 Unit			Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	8 Unit		
		Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit			Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit		
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit			Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit		
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit			Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit		
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit			Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit		
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit			Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit		
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	10 Unit			Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	10 Unit		
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit			Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	2.725.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	di Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	2.725.000.000	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	4 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Cangkiran)					Cangkiran)			
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	11.740.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	11.740.800.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.490.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.490.800.000	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	
		Kecamatan Mijen	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan			Kecamatan Mijen	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	50.830.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	50.830.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	90.692.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	90.692.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	90.692.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	90.692.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	90.692.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	90.692.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Mijen Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN CANGKIRAN					
1.	Pelebaran Jembatan	Jalan Jatikalangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 M2	Kondisi kontur jalan naik turun sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN BUBAKAN					
2.	Penerangan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	960.000.000/32 Tiang	Kurangnya Penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
3.	Pengaspalan Gg	Jalan Gg kelengkeng	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	640.000.000/4500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)
4.	Pembangunan DAM	Sungai Gendruwo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.400.000.000/17112,29 M3	Rusak Berat (Dinas Pekerjaan Umum)
5.	Pengaspalan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.350.000.000/7500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan umum)
KELURAHAN KARANGMALANG					
6.	Taman Kota	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000/1 paket	Belum adanya taman kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
7.	Penerangan Jalan Umum	RW 1, 2, DAN 3 KELURAHAN KARANGMALANG	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/33 Tiang lamp	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Joging Track dan lampu lapangan	DK. KRAJAN	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/800 Meter	Belum adanya Joging Track dan lampu lapangan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
9.	Talud dan Bronjong	DK. SEBUMI	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
10.	Talud dan Bronjong	DK. GEDUNGAN	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
11.	Pembangunan Talud Irigasi	DK. GERUNG	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/900 Meter	Belum adanya talud saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12.	Pengecoran Jl. Dawung	DK. DAWUNG	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Pekerjaan Umum)
13.	Alat Rebana	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	150.000.000/1 Paket	menndukung kegiatan warga (Dinas Pendidikan)
14.	Alat Pertanian Traktor	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000/2 Pake	Mendukung ekonomi warga di sektor pertanian (Dinas Pertanian)
15.	PHBI Tingkat Kelurahan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	50.000.000/1 Paket	mendukung kegiatan warga (Dins Kebudayaan dan Pariwisata)
16.	Nyadran Kelurahan Karangmalang di 3 RW	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000/3 Paket	mendukung kegiatan warga (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
17.	Pembuatan Taman	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150.000.000/1 Paket	Belum adanya taman kota (Dinas Pariwisata)
KELURAHAN POLAMAN					
18.	Sarana dan Prasarana penunjang kolam ASA MINA MULIA	Kelurahan Polaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	205.000.000/1 paket	Menunjang ekonomi masy (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
19.	Talud Jalan	Jalan Seduren	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/120 0 M3	Jalan longsor ke saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN PURWOSARI					
20.	Pembangunan Jembatan	Jl. Tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/100 M2	jembatan masih bambu (Dinas Pekerjaan Umum)
21.	Pembangunan betonisasi jalan 20 cm	Jl. Jatiombo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	525.000.000/300 0 Meter	Lanjutan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN TAMBANGAN					
22.	Pavingisasi Jalan Masuk Kampung Ternak Sapi/Kambing	Tambangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/400 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
23.	Pengaspalan Jalan	Jalan Raya Genuk-Duwet	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/600 Meter	Kondisi Jalan Rusak Berat (Lanjutan) (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
24.	Jembatan	Sidorejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Kondisi Jembata Rusak Parah Akibat Terkena Banjir (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
25.	Talud Jalan	Jl. Tembus RW 01-RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/100 0 Meter	Belum Ada Talud Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pembangunan Jalan Raya Bandungsari	Bandungsari	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/240 Meter	Kondisi jalan Parah/Pengecoran (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman) Rusak Jalan
27.	Pembangunan Jalan	Jl. Danang Citro Duwet-Sidorejo	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/400 0 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
28.	Gedung Pos Paud	Duwet	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/1 Paket	Belum Ada Gedung Masih Berupa Tanah dan Siswa Belajar Di Balai RT (dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN WONOLOPO					
29.	Pelebaran Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	358.000.000/250 0 Meter	Jalan terlalu sempit untuk berpapasan mobil (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
30.	Pekerjaan PJU	WONOLOPO	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/15 Titik	tidak adanya penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
31.	Talud Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/250 0 Meter	Saluran kurang berfungsi dengan baik (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
32.	Pelebaran Jalan masuk Lapangan Leri	JL. TEGALSARI	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/175 0 Meter	Jalan sempit dan rusak (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
33.	Pembangunan Kantor Baru	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/4 00 M3	Kondisi Gedung Rusak (Dinas Penataan Ruang)
34.	Peningkatan sarpras kampung tematik embung	Jalan Embung Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.000.000.000/1 8.000.000 Meter	Sarpras Belum Optimal (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN MIJEN					
35.	Pembangunan Balai Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.500.000.000/6 00 M ²	Belum ada Balai Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN JATIBARANG					
36.	Pembangunan kantor kelurahan jatibarang	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/ 300 Meter Pers	Urgen dikarenakan gedung teribas SORR (Semarang Outer Ring Road) (Dinas Penataan Ruang)
37.	Pekerjaan beton jalan	Dk Tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/ 600 Meter Pers	Sangat dibutuhkan untuk kegiatan akses utama warga tegalsari (Dinas Pekerjaan Umum)
38.	Pekerjaan bahu beton jalan (kanan-kiri)	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	510.000.000/400 Meter	sangat dibutuk untuk manuver kendaraan karena sering terjadinya intensitas kecelakaan (Dinas Pekerjaan Umum)
39.	Saluran Air Irigasi/Pengendali Banjir	Tlogo tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000/ 600 Meter	sangat diperlukan sebagai irigasi lahan pertanian dan pengendalian banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
40.	Pekerjaan pembangunan limbah peternakan	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/72 Meter Pers	Pengelolaan limbah kotoran sapi dimanfaatkan energi listrik dll (Dinas Lingkungan Hidup)
KELURAHAN KEDUNGPADE					
41.	Rehab Rumah Dinas Kedungpane Lurah	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/72 M2	Dinas Penataan Ruang
42.	Pembangunan Saluran dan Talud Saluran	Sepanjang Jl. Untung Suropati RW. 01-RW. 04	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/8 00 M2	Dinas Pekerjaan Umum
43.	Rehab Balai Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/200 M2	Dinas Penataan Ruang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	Rehab TK Pertiwi 22 Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/60 M2	Dinas Penataan Ruang
45.	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/1 000 M2	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN NGADIRGO					
46.	Pekerjaan Penerangan jalan Umum	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 0 Unit	Kondisi jalan yang gelap perlu adanya penerangan jalan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
47.	Jembatan	Jalan RT 02 RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 0 Meter	Menurunnya kualitas jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
48.	Jembatan	Jalan RT 05 RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	450.000.000/ 0 Meter	kondisi jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
49.	Pekerjaan Pintu air	RT 01 RW 06	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 0 Meter	kondisi pintu air yang kecil mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan lebat dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
50.	Pengaspalan Jalan	Jalan RW 02, RW 03, RW 07	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/200 0 Meter	kondisi jalan yang kecil sehingga kesulitan ketika berpapasan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
51.	Pembangunan Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan Ngadirgo	Jl. Raya Ngadirgo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.500.000.000/ 0 Meter	Kondisi Kantor dan Balai sudah banyak yang rusak perlu adanya renovasi dan sudah diusulkan sejak tahun 2015 (Dinas Penataan Ruang)
52.	Jembatan	Jalan RW 03 dan RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.000/ 0 Meter	tidak adanya penghubung antar RW karena dipisahkan oleh sungai sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN WONOPLUMBON					
53.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan Djahuri	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundun sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
54.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundun sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
55.	Pembangunan Pavingisasi jalan dan talud jalan	DK Talun wilayah RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/600 M2	Perlunya peningkatan insfratraktur jalan raya (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56.	Pembangunan Pavingisasi Jalan dan talud jalan	Jalan Sepedet Wonoplumbon	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/400 0 M2	Perlunya pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalan penghubung antara RT.04;RT.05;RT.07;RT.09 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
57.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Jalan raya Wonoyoso RW.04	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/25 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
58.	Pembangunan pengaspalan jalan dan pelebaran jalan di wilayah Sebeluk RW 03 menuju ke RW 04 Wonoyoso	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/400 0 Meter	Perlunya peningkatan insfratraktur jalan raya (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN JATISARI					
59.	Lampu PJU	Jatisari	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 1 Paket	belum ada penerangan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
60.	Penambahan peralatan dan sarana olahraga	Jatisari Asri	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
61.	Pemb. Talud Saluran	Jatisari	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 300 M2	belum ada talud (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
62.	Pemb. Gedung Olahraga	Jatisari Permai	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Penataan Ruang)
63.	Pelebaran Jalan	Jl. RM Hadi Soebeno Mijen	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100.000.000.00 0/1.600.000 M2	Setiap Pagi Hari dan Ketika Weekend Selalu Terjadi Kemacetan (Dinas Pekerjaan Umum)
64.	Pembuatan Saluran dan Embung	Jatisari	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000/ 10.000 M2	Banjir Ketika Curah Hujan Lebat dan Lama (Dinas Pekerjaan Umum)
65.	Pembangunan Gedung PAUD	Jatisari Elok	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/ 100 M2	untuk sarana belajar anak usia dini (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN PESANTREN					
66.	Pekerjaan Saluran	Jalan robyong depan villa lonjaten	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	270.000.000/2 50 Meter	Belum ada saluran (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Mijen, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Mijen pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 66 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk

- Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
- c. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

- f. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
- g. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
- h. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;

- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;

- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Sedangkan target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,60-84,00 indeks
- b. Tingkat Kearifan Budaya Lokal sebesar 55,17%
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,3-8,6%
- d. Angka Kemiskinan sebesar 4,04-4,24 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6-6,1 %
- f. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 103,54 Juta rupiah
- g. Persentase peningkatan Nilai Investasi sebesar 7% (25.684.059 Juta rupiah)
- h. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 6%
- i. Indeks Demokrasi sebesar 72,4 indeks
- j. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,70 indeks
- k. Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebesar 10,52 %
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,01 indeks
- m. Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur sebesar 84,5 indeks
- n. Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan sebesar 3,32 %
- o. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,00 indeks
- p. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88 indeks
- q. Opini BPK adalah WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang

Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 mencakup rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Mijen Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang beserta indikatornya sebagai berikut:

- SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**
Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik**
Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mijen pada tahun 2023 mengacu pada nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 seperti dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.0 8.0000	KECAMATAN MIJEN	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BUBAKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. POLAMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. WONOLOPO

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JATIBARANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. NGADIRGO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JATISARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PESANTREN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BUBAKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGMALANG

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. POLAMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PURWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. WONOLOPO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JATIBARANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. NGADIRGO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JATISARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PESANTREN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BUBAKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. POLAMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PURWOSARI

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. WONOLOPO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JATIBARANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. NGADIRGO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JATISARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BUBAKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. POLAMAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PURWOSARI

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. WONOLOPO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JATIBARANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. NGADIRGO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JATISARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PESANTREN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Mijen
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Mijen
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Mijen
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Mijen
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Mijen
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Mijen
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	73
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	65

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Mijen bertugas menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 program

pelaksanaan/pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 53.460.064.934 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp 20.610.986.734 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 32.849.078.200 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Mijen Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				53.460.064.934	APBD			50.069.020.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kec. Mijen	100 %	20.610.986.734	APBD		100 %	17.601.406.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%		100 %				100 %	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100 %				100 %	
X.X X.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kec. Mijen	7 Dokumen	17.663.000	APBD		6 Dokumen	20.500.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan		3 Dokumen				2 Dokumen	
X.XX. 01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mijen	3 Dokumen	2.330.000	APBD			4.000.000
X.XX. 01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Mijen	1 Dokumen	3.884.000	APBD			2.500.000
X.XX. 01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Mijen	1 Dokumen	4.469.000	APBD			2.500.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Mijen	1 Dokumen	1.675.000	APBD		2.500.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Mijen	1 Dokumen	1.870.000	APBD		2.500.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mijen	1 Laporan	972.000	APBD		2.500.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mijen	2 Laporan	2.463.000	APBD		4.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kec. Mijen	100%	17.397.539.642	APBD	100%	15.779.906.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		3 Dokumen			4 Dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mijen	107 Orang	16.573.379.642	APBD		15.100.536.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Mijen	12 Dokumen	821.160.000	APBD		671.870.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mijen	1 Laporan	775.000	APBD		2.500.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Mijen	2 Laporan	1.549.000	APBD		2.500.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Mijen	1 Dokumen	676.000	APBD		2.500.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kec. Mijen	100%	1.277.661.848	APBD		100%	686.000.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mijen	6 Paket	6.753.000	APBD		7.500.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mijen	5 Paket	454.085.848	APBD		200.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mijen	12 Paket	41.870.000	APBD		66.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mijen	12 Paket	17.000.000	APBD		27.500.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mijen	12 Laporan	32.175.000	APBD		85.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mijen	12 Laporan	127.248.000	APBD		100.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Mijen	8 Dokumen	598.530.000	APBD		200.000.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Mijen	100%	11.250.000	APBD		100%	100.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Mijen	3 Unit	11.250.000	APBD		100.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kec. Mijen	100%	221.157.244	APBD		100%	255.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mijen	12 Laporan	167.045.244	APBD			175.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mijen	12 Laporan	54.112.000	APBD			80.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Mijen	100%	1.685.715.000	APBD		100%	760.000.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Mijen	32 Unit	171.150.000	APBD			225.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mijen	6 Unit	66.565.000	APBD			210.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mijen	6 Unit	1.078.000.000	APBD			100.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mijen	2 Unit	370.000.000	APBD			225.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi	Kec. Mijen	92%	3.542.321.200	APBD		93%	3.788.214.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DAN PELAYANAN PUBLIK	(SPBE)							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Mijen	1 Angka	172.400.000	APBD		1 Angka	50.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mijen	9 Dokumen	172.400.000	APBD			50.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Mijen	100%	2.072.421.200	APBD		100%	2.325.714.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	Kec. Mijen	12 Laporan	2.072.421.200	APBD			2.325.714.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	Kel. Cangkiran	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	Kel. Bubakan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	Kel. Karangmalang	12 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	Kel. Polaman	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	Kel. Purwosari	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	Kel. Tambangan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	Kel. Wonolopo	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	Kel. Mijen	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	Kel. Jatibarang	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	Kel. Kedungpane	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	Kel. Ngadirgo	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kel. Wonoplumbon	12 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	Kel. Jatisari	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	Kel. Pesantren	12 Laporan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mijen	100%	1.297.500.000	APBD		100%	1.412.500.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mijen	12 Laporan	1.297.500.000	APBD		3 Kegiatan	1.412.500.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan	Kec. Mijen	98%	29.165.235.000	APBD		99%	28.509.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mijen	498 Kegiatan	17.424.435.000	APBD		502 Kegiatan	28.104.600.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mijen	4 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	APBD			65.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	Kec. Mijen	14 Unit	14.650.000.000	APBD			16.312.800.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	Kel. Cangkiran	10 Unit					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	Kel. Bubakan	9 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	Kel. Karangmalang	9 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	Kel. Polaman	9 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	Kel. Purwosari	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	Kel. Tambangan	16 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	Kel. Wonolopo	8 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	Kel. Mijen	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	Kel. Jatibarang	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	Kel. Kedungpane	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	Kel. Ngadirgo	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	Kel. Wonoplumbon	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	Kel. Jatisari	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	Kel. Pesantren	14 Unit					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.0 3.2.02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	Kec. Mijen	4 Pokmas/Ormas	2.725.000.000	APBD			11.726.800.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	Kel. Cangkiran	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	Kel. Bubakan	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	Kel. Karangmalang	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	Kel. Polaman	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	Kel. Purwosari	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	Kel. Tambangan	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	Kel. Wonolopo	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	Kel. Mijen	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	Kel. Jatibarang	4 Pokmas/Ormas					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	Kel. Kedungpane	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	Kel. Ngadirgo	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kel. Wonoplumbon	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	Kel. Jatisari	4 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	Kel. Pesantren	4 Pokmas/Ormas					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kec. Mijen	130 Dokumen	11.740.800.000	APBD		18 Dokumen	405.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	Kec. Mijen	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.490.800.000	APBD			115.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	Kel. Cangkiran	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	Kel. Bubakan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	Kel. Karangmalang	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	Kel. Polaman	9 Lembaga Kemasyarakatan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	Kel. Purwosari	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	Kel. Tambangan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	Kel. Wonolopo	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	Kel. Mijen	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	Kel. Jatibarang	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	Kel. Kedungpane	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	Kel. Ngadirgo	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kel. Wonoplumbon	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	Kel. Jatisari	9 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	Kel. Pesantren	9 Lembaga Kemasyarakatan					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mijen	2 Laporan	250.000.000	APBD		290.000.000	
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	Kec. Mijen	1 Kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mijen	15%	50.830.000	APBD		20%	84.900.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kec. Mijen	84 Angka	50.830.000	APBD	72 Angka		84.900.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mijen	15 Laporan	50.830.000	APBD			84.900.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mijen	92%	90.692.000	APBD	95%		84.900.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kec. Mijen	2 Kegiatan	90.692.000	APBD	2 Kegiatan		84.900.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mijen	100 Orang	90.692.000	APBD			84.900.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Mijen pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Mijen ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Mijen;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Mijen ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Mijen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD

Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

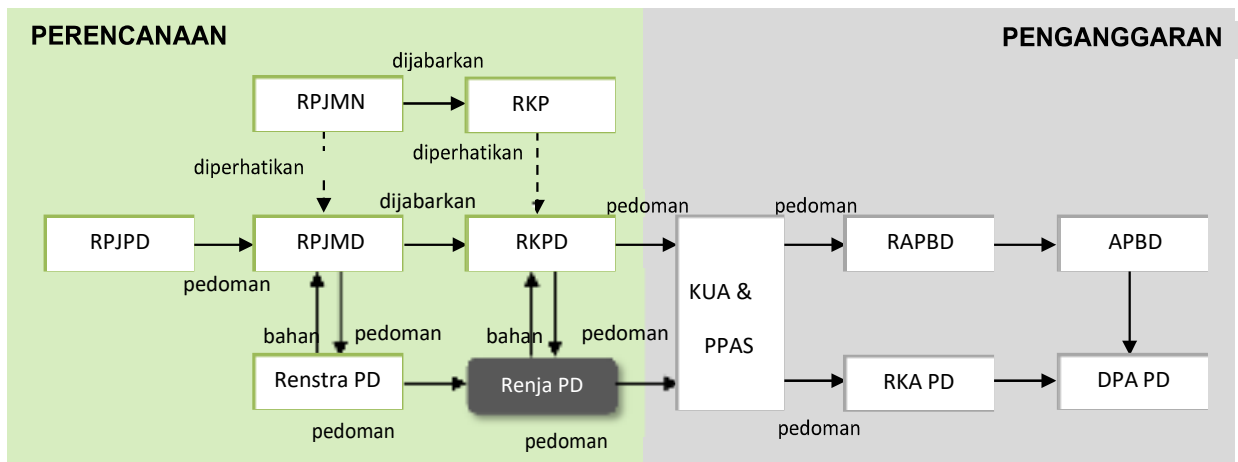
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD”. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk

menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Genuk, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Genuk.



Gambar 1. 1
 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
 (Sumber : Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Genuk Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GENUK TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Genuk yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Genuk.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Genuk melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 49.958.118.126,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 45.746.174.035,00 atau sebesar 91,57 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Genuk Kota Semarang

Tabel 2. 1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra
sampai dengan tahun 2022 Perangkat Daerah**

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	14.374.794.897	0	0	85%	4.374.794.897	89,82	12.911.419.323
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100%		0		100%		100%	
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Kecamatan Genuk)	477.561 jumlah		0		462.524 jumlah		462.524 jumlah	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN (Kecamatan Genuk)	100%		0		100%		100%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	84.890.000		0	1	84.890.000	1	73.350.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	12 kegiatan	84.890.000	0		12 kegiatan	84.890.000	12 kegiatan	73.350.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	13.589.626.749		0	100%	13.589.626.749	100%	12.278.683.113
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	13.589.626.749		0	100%	3.589.626.749	100%	12.278.683.113
		Jumlah pelayanan administrasi di kantor kecamatan	12 bulan		0		12 bulan	711.362.663	12 bulan	674.019.715

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Operasional Pelayanan Administrasi Dan Kemeliharaan Kantor Kelurahan	100%		0		100%	1.224.819.545	100%	1.098.008.823
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	1.043.494.260	100%	961.587.243
		Operasional Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%		0		100%	1.848.749.513	100%	1.678.441.601
		Pemenuhan operasional kelurahan	100%		0		100%	1.417.086.223	100%	1.274.228.114
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	1.062.625.910	100%	968.927.061
		Operasional Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan	100%		0		100%	1.071.950.000	100%	950.368.781
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	486.200.000	100%	425.554.378
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	739.568.055	100%	668.048.917
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	525.946.163	100%	479.348.971
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	1.565.522.274	100%	1.419.609.861
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	1.323.815.699	100%	1.199.779.483

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Operasional Pelayanan Adminitrasi dan Pemeliharaan	100%		0		100%	276.926.171	100%	252.634.244
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%		0		100%	291.560.273	100%	228.125.921
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	700.278.148		0	100%	700.278.148	100%	559.386.210
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Capaian peningkatan pelaksanaan urusan pemerintahan	12 bulan	700.278.148	0		12 bulan	700.278.148	12 bulan	559.386.210
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95%	18.280.367.516		0	87%	18.165.747.852	93,6%	17.007.748.324
		Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	19954				19954 kegiatan		19954 kegiatan	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	16.916.121.685		0	100%	16.801.502.021	100%	15.804.853.664
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penyusunan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	14 dokumen	47.488.722	0		14 dokumen	47.488.722	14 dokumen	29.916.500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.117.085.094		0		5.117.085.094		14.738.642.500
		jumlah pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan	13 kelurahan		0		13 kelurahan	4.666.138.187	13 kelurahan	4.612.031.500
		Sarana dan Prasarana Kelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	1.025.000.000	100%	1.019.100.000
		Sarana dan Prasarana di Kelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	916.729.375	100%	908.097.000
		Sarana dan Prasarana Kelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	1.070.606.114	100%	875.386.000
		Sarana dan Prasarana diKelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	583.117.697	100%	581.051.000

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sarana dan Prasarana Kelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	725.000.000	100%	722.509.000
		Pemberdayaan Masyarakat	100%		0		100%	904.000.000	100%	900.513.000
		jumlah pemeliharaan sarpras dan pemberdayaan masyarakat	3 lokasi		0		3 lokasi	827.000.000	3 lokasi	817.769.000
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	710.186.448	100%	706.280.000
		Sarana Prasarana di Kelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	717.000.000	100%	637.565.000
		Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan	5 titik		0		5 titik	725.877.454	5 titik	722.138.000
		presentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (genuk)	55%		0		55%		55%	
		Sarana dan Prasarana di Kelurahan Terpenuhi	100%		0		100%	1.003.000.000	100%	999.088.000
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	531.000.000	100%	529.175.000
		jumlah pemeliharaan sarpras dan pemberdayaan masyarakat	100%		0		100%	712.429.819	100%	707.940.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.751.547.869		0		1.636.928.205		1.036.294.664
		jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kecamatan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	4 kelompok		0		4 kelompok	441.065.783	4 kelompok	286.603.200
		Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%		0		100%	100.000.000	100%	39.487.500
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%		0		100%	56.314.780	100%	37.102.558
		Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%		0		100%	83.047.401	100%	55.150.900

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%		0		100%	82.000.272	100%	78.216.500
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	84.000.000	100%	46.636.100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%		0		100%	92.470.391	100%	91.486.200
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan		0		1 kegiatan	18.529.828	1 kegiatan	12.085.000
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	76.226.830	100%	64.019.250
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	50.000.000	100%	49.617.650
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%		0		100%	67.765.006	100%	52.973.750
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	100.000.000	100%	69.241.000
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%		0		100%	80.116.805	100%	74.195.431
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%		0		100%	305.391.109	100%	79.479.625
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100%	1.364.245.831		0	100%	1.364.245.831	100%	1.202.894.660
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	99.175.416		0	100%	99.175.416	100%	59.891.350
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.265.070.415		0	100%	1.265.070.415	100%	1.143.003.310
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	259.350.000		0	100%	259.350.000	100%	244.136.766
		Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90				90%		90%	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	259.350.000		0	100%	259.350.000	100%	244.136.766
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban wilayah	100%	259.350.000		0	100%	259.350.000	100%	244.136.766
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.043.605.713		0	100%	17.158.225.377	100%	15.582.870.422
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GENUK)	100				100%		100%	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GENUK)	100				100%		100%	
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100				100%		100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	15.467.941		0	100%	15.467.941	100%	14.312.860
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	2 dokumen	3.424.800	0		2 dokumen	3.424.800	2 dokumen	2.739.800
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA yang disusun	4 dokumen	2.193.832	0		4 dokumen	2.193.832	4 dokumen	1.860.760
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	2.367.254	0		1 dokumen	2.367.254	1 dokumen	2.358.400
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA	1 dokumen	1.096.255	0		1 dokumen	1.096.255	1 dokumen	1.076.200
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1.096.255	0		1 dokumen	1.096.255	1 dokumen	1.090.700
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun	1 dokumen	5.289.545	0		1 dokumen	5.289.545	1 dokumen	5.187.000
		Penyusunan Dokumen LKPJ Kecamatan	1 dokumen		0		1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.473.543.744		0	100%	14.473.543.744	100%	13.253.239.730
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	13.900.920.126	0		12 bulan	13.900.920.126	12 bulan	12.819.958.480
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Target Kinerja PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pembantu	12 bulan	569.280.000	0		12 bulan	569.280.000	12 bulan	429.990.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan	1 dokumen	2.256.818	0		1 dokumen	2.256.818	1 dokumen	2.249.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Semester	1 dokumen	1.086.800	0		1 dokumen	1.086.800	1 dokumen	1.042.250
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.291.850.640		0	100%	1.406.470.304	100%	1.298.236.573
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan komponennya di kantor kecamatan	100%	13.126.473	0		100%	13.126.473	100%	12.613.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase peralatan kantor yang mendukung kerja aparatur	100%	242.037.781	0		100%	242.037.781	100%	184.864.482
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	33.930.160	0		100%	33.930.160	100%	29.858.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan	100%	7.619.036	0		100%	7.619.036	100%	5.028.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kegiatan rapat, jamuan tamu, pelatihan, penyuluhan dan even-even kegiatan masyarakat	100%	38.400.000	0		100%	38.400.000	100%	15.425.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun		0		1 tahun	7.980.000	1 tahun	1.480.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan sarana kerja yang memadahi	100%	956.737.190	0		100%	1.063.376.854	100%	1.048.968.091
		prosentase peralatan kantor yang mendukung kerja aparatur	100%		0		100%		100%	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang dievaluasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	216.436.960		0	100%	216.436.960	100%	101.092.366
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langgaran Telepon, Listrik dan Air	12.00 bulan	162.066.960	0		12 bulan	162.066.960	12 bulan	81.224.451
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	54.370.000	0		100%	54.370.000	100%	19.867.915
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.046.306.428		0	100%	1.046.306.428	100%	915.988.893
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	18 unit	183.636.000	0		18 unit	183.636.000	18 unit	115.327.939
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan sedang/berat gedung kantor kecamatan	100%	172.076.374		0	100%	172.076.374	100%	169.451.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase komponen gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenan	100%	690.594.054		0	100%	690.594.054	100%	631.209.954
Rata-rata capaian riil semua kegiatan									100	11.453.653.760
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)										
Predikat Kinerja Program										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								49.958.118.126		45.746.174.835
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Genuk Kota Semarang

- a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 12 Indikator Kinerja Program dan 11 Kegiatan dengan 11 Indikator kinerja kegiatan dan 70 Sub Kegiatan.
- b) Dari 12 indikator kinerja program, terdapat 2 Indikator yang melampaui target, 9 Indikator memenuhi target, serta 1 Indikator tidak memenuhi target.
- c) Sebanyak 2 Program terdapat semua Kegiatan dan semua Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja (diatas 70 %)
- d) Sebanyak 1 Program terdapat semua Kegiatan telah memenuhi target (diatas 70 %) namun terdapat beberapa Sub Kegiatan tidak memenuhi target kinerja (kurang dari 70 %)
- e) Sebanyak 1 Program terdapat 1 Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan tidak memenuhi target kinerja (kurang dari 70%)
- f) Dari 4 Program : Semuanya memenuhi target kinerja
- g) Dari 11 Kegiatan :
 - 10 kegiatan telah memenuhi target kinerja dengan capaian 70-100%,
 - 1 kegiatan tidak memenuhi target dengan capaian 0-69 %,
- g) Dari 70 Sub Kegiatan :
 - 54 Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja dengan capaian 70-100%,
 - 16 Sub Kegiatan tidak memenuhi target kinerja dengan capaian 0-69%
 - 0 Sub Kegiatan tidak dilaksanakan

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.158.225.377	15.582.869.622	1.575.355.755	90.82
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.467.941	14.312.060	1.155.881	92.53
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.424.800	2.739.000	685.800	79.98
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.193.832	1.860.760	333.072	84.82
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.367.254	2.358.400	8.854	99.63
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.096.255	1.076.200	20.055	98.17
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.096.255	1.090.700	5.555	99.49
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.289.545	5.187.000	102.545	98.06
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.473.543.744	13.253.239.730	1.220.304.014	91.57
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.900.920.126	12.819.958.480	1.080.961.646	92.24
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.280.000	429.990.000	139.290.000	75.53
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.818	2.249.000	7.818	99.65
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.086.800	1.042.250	44.550	95.90
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.470.304	1.298.236.573	108.233.731	92.30
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.126.473	12.613.000	513.473	96.09
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.037.781	184.864.482	57.173.299	76.38
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.930.160	29.858.000	4.072.160	88.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.619.036	5.028.000	2.591.036	65.99
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	38.400.000	15.425.000	22.975.000	40.17
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.980.000	1.480.000	6.500.000	18.55
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.063.376.854	1.048.968.091	14.408.763	98.64

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.436.960	101.092.366	115.344.594	46.71
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.066.960	81.224.451	80.842.509	50.12
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.370.000	19.867.915	34.502.085	36.54
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.046.306.428	915.988.893	130.317.535	87.54
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.636.000	115.327.939	68.308.061	62.80
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.076.374	169.451.000	2.625.374	98.47
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	690.594.054	631.209.954	59.384.100	91.40
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.374.794.897	12.911.419.323	1.463.375.574	89.82
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.890.000	73.350.000	11.540.000	86.41
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.890.000	73.350.000	11.540.000	86.41
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.589.626.749	12.278.683.113	1.310.943.636	90.35
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	711.362.663	674.019.715	37.342.948	94.75
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TERBOYO WETAN)	291.560.273	228.125.921	63.434.352	78.24
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TERBOYO KULON)	276.926.171	252.634.244	24.291.927	91.23
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	1.323.815.699	1.199.779.483	124.036.216	90.63

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANGETAYU KULON)	1.565.522.274	1.419.609.861	145.912.413	90.68
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	1.224.819.545	1.098.008.823	126.810.722	89.65
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KUDU)	1.043.494.260	961.587.243	81.907.017	92.15
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGROTO)	1.848.749.513	1.678.441.601	170.307.912	90.79
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GENUKSARI)	1.417.086.223	1.274.228.114	142.858.109	89.92
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANJARDOWO)	1.062.625.910	968.927.061	93.698.849	91.18
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GEBANGSARI)	1.071.950.000	950.368.781	121.581.219	88.66
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TRIMULYO)	486.200.000	425.554.378	60.645.622	87.53
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PENGGARON LOR)	739.568.055	668.048.917	71.519.138	90.33
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	525.946.163	479.348.971	46.597.192	91.14
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	700.278.148	559.386.210	140.891.938	79.88
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	700.278.148	559.386.210	140.891.938	79.88
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	18.165.747.852	17.007.748.324	1.157.999.528	93.63

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16.801.502.021	15.804.853.664	996.648.357	94.07
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.488.722	29.916.500	17.572.222	63.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.666.138.187	4.612.031.500	54.106.687	98.84
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO WETAN)	531.000.000	529.175.000	1.825.000	99.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO KULON)	712.429.819	707.940.000	4.489.819	99.37
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	1.003.000.000	999.088.000	3.912.000	99.61
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU KULON)	725.877.454	722.138.000	3.739.454	99.48
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	1.025.000.000	1.019.100.000	5.900.000	99.42
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KUDU)	916.729.375	908.097.000	8.632.375	99.06
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGROTO)	1.070.606.114	875.386.000	195.220.114	81.77
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GENUKSARI)	583.117.697	581.051.000	2.066.697	99.65
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANJARDOWO)	725.000.000	722.509.000	2.491.000	99.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GEBANGSARI)	904.000.000	900.513.000	3.487.000	99.61
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TRIMULYO)	827.000.000	817.769.000	9.231.000	98.88

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PENGGARON LOR)	710.186.448	706.280.000	3.906.448	99.45
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	717.000.000	637.565.000	79.435.000	88.92
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	441.065.783	286.603.200	154.462.583	64.98
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO WETAN)	100.000.000	39.487.500	60.512.500	39.49
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO KULON)	56.314.780	37.102.558	19.212.222	65.88
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	83.047.401	55.150.900	27.896.501	66.41
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU KULON)	82.000.272	78.216.500	3.783.772	95.39
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	84.000.000	46.636.100	37.363.900	55.52
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KUDU)	92.470.391	91.486.200	984.191	98.94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGROTO)	18.529.828	12.085.000	6.444.828	65.22
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GENUKSARI)	76.226.830	64.019.250	12.207.580	83.99
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANJARDOWO)	50.000.000	49.617.650	382.350	99.24
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GEBANGSARI)	67.765.006	52.973.750	14.791.256	78.17
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TRIMULYO)	100.000.000	69.241.000	30.759.000	69.24
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.116.805	74.195.431	5.921.374	92.84

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	(KELURAHAN PENGGARON LOR)				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	305.391.109	79.479.625	225.911.484	26.03
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.364.245.831	1.202.894.660	161.351.171	88.17
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.175.416	59.891.350	39.284.066	60.39
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.265.070.415	1.143.003.310	122.067.105	90.35
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	259.350.000	244.136.766	15.213.234	94.13
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	259.350.000	244.136.766	15.213.234	94.13
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	259.350.000	244.136.766	15.213.234	94.13
	Total Keseluruhan	49.958.118.126	45.746.174.035	4.211.944.091	91.57

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebesar Rp 49.958.118.126,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 45.746.174.035,00 dengan sisa sebesar Rp 4.211.944.091,00 (91,57%) dengan uraian berikut :

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp 32.232.792.197,00 , realisasi Rp 28.644.587.030,00 (88,87%) dan sisa anggaran sebesar Rp Rp 3.588.205.167,00 (11,13%)
- b. **Belanja Modal**: anggaran sebesar Rp 17.101.587.278,00 Dengan realisasi sebesar Rp 17.101.587.278,00 (96,48%) dan sisa anggaran sebesar Rp 623.738.651,00 (3,52%).
- c. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2021**

Tabel 2. 3
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja (Capaian
71% < X < 100%)

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.158.225.377	15.582.869.622	1.575.355.755	90.82
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.467.941	14.312.060	1.155.881	92.53
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.424.800	2.739.000	685.800	79.98
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.193.832	1.860.760	333.072	84.82
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.367.254	2.358.400	8.854	99.63
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.096.255	1.076.200	20.055	98.17
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.096.255	1.090.700	5.555	99.49
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.289.545	5.187.000	102.545	98.06
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.473.543.744	13.253.239.730	1.220.304.014	91.57
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.900.920.126	12.819.958.480	1.080.961.646	92.24
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.280.000	429.990.000	139.290.000	75.53
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.818	2.249.000	7.818	99.65
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.086.800	1.042.250	44.550	95.90
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.470.304	1.298.236.573	108.233.731	92.30
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.126.473	12.613.000	513.473	96.09
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.037.781	184.864.482	57.173.299	76.38
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.930.160	29.858.000	4.072.160	88.00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.063.376.854	1.048.968.091	14.408.763	98.64
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.046.306.428	915.988.893	130.317.535	87.54
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.076.374	169.451.000	2.625.374	98.47
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	690.594.054	631.209.954	59.384.100	91.40

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.374.794.897	12.911.419.323	1.463.375.574	89.82
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.890.000	73.350.000	11.540.000	86.41
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.890.000	73.350.000	11.540.000	86.41
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.589.626.749	12.278.683.113	1.310.943.636	90.35
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	711.362.663	674.019.715	37.342.948	94.75
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TERBOYO WETAN)	291.560.273	228.125.921	63.434.352	78.24
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TERBOYO KULON)	276.926.171	252.634.244	24.291.927	91.23
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	1.323.815.699	1.199.779.483	124.036.216	90.63
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANGETAYU KULON)	1.565.522.274	1.419.609.861	145.912.413	90.68
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	1.224.819.545	1.098.008.823	126.810.722	89.65
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KUDU)	1.043.494.260	961.587.243	81.907.017	92.15
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGROTO)	1.848.749.513	1.678.441.601	170.307.912	90.79
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GENUKSARI)	1.417.086.223	1.274.228.114	142.858.109	89.92
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.062.625.910	968.927.061	93.698.849	91.18

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
	(KELURAHAN BANJARDOWO)				
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GEBANGSARI)	1.071.950.000	950.368.781	121.581.219	88.66
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TRIMULYO)	486.200.000	425.554.378	60.645.622	87.53
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PENGGARON LOR)	739.568.055	668.048.917	71.519.138	90.33
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	525.946.163	479.348.971	46.597.192	91.14
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	700.278.148	559.386.210	140.891.938	79.88
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	700.278.148	559.386.210	140.891.938	79.88
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.165.747.852	17.007.748.324	1.157.999.528	93.63
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16.801.502.021	15.804.853.664	996.648.357	94.07
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.666.138.187	4.612.031.500	54.106.687	98.84
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO WETAN)	531.000.000	529.175.000	1.825.000	99.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO KULON)	712.429.819	707.940.000	4.489.819	99.37
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	1.003.000.000	999.088.000	3.912.000	99.61
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU KULON)	725.877.454	722.138.000	3.739.454	99.48
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	1.025.000.000	1.019.100.000	5.900.000	99.42
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KUDU)	916.729.375	908.097.000	8.632.375	99.06
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGROTO)	1.070.606.114	875.386.000	195.220.114	81.77

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GENUKSARI)	583.117.697	581.051.000	2.066.697	99.65
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANJARDOWO)	725.000.000	722.509.000	2.491.000	99.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GEBANGSARI)	904.000.000	900.513.000	3.487.000	99.61
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TRIMULYO)	827.000.000	817.769.000	9.231.000	98.88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PENGGARON LOR)	710.186.448	706.280.000	3.906.448	99.45
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	717.000.000	637.565.000	79.435.000	88.92
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU KULON)	82.000.272	78.216.500	3.783.772	95.39
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KUDU)	92.470.391	91.486.200	984.191	98.94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GENUKSARI)	76.226.830	64.019.250	12.207.580	83.99
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANJARDOWO)	50.000.000	49.617.650	382.350	99.24
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GEBANGSARI)	67.765.006	52.973.750	14.791.256	78.17
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PENGGARON LOR)	80.116.805	74.195.431	5.921.374	92.84
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.364.245.831	1.202.894.660	161.351.171	88.17
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.265.070.415	1.143.003.310	122.067.105	90.35
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	259.350.000	244.136.766	15.213.234	94.13
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	259.350.000	244.136.766	15.213.234	94.13
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	259.350.000	244.136.766	15.213.234	94.13

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2021

Tabel 2. 4
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target
(Capaian 1 % < X < 70 %)

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.619.036	5.028.000	2.591.036	65.99
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.400.000	15.425.000	22.975.000	40.17
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.980.000	1.480.000	6.500.000	18.55
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.436.960	101.092.366	115.344.594	46.71
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.066.960	81.224.451	80.842.509	50.12
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.370.000	19.867.915	34.502.085	36.54
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.636.000	115.327.939	68.308.061	62.80
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.488.722	29.916.500	17.572.222	63.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	441.065.783	286.603.200	154.462.583	64.98
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO WETAN)	100.000.000	39.487.500	60.512.500	39.49
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TERBOYO KULON)	56.314.780	37.102.558	19.212.222	65.88
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	83.047.401	55.150.900	27.896.501	66.41
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	84.000.000	46.636.100	37.363.900	55.52
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGROTO)	18.529.828	12.085.000	6.444.828	65.22
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TRIMULYO)	100.000.000	69.241.000	30.759.000	69.24
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	305.391.109	79.479.625	225.911.484	26.03
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.175.416	59.891.350	39.284.066	60.39

Terdapat 16 Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya kurang memenuhi target, hal ini dikarenakan masa pandemi dimana kegiatan yang mengumpulkan masyarakat masih dibatasi, disamping itu adanya kebijakan refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dari yang direncanakan Renja Awal Tahun Anggaran 2021

**Tabel 2. 5
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan (Anggaran 0 Rupiah)**

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
	NIHIL				

Tidak terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk kegiatan yang melebihi target pada tahun anggaran 2021 tidak ada.

**Tabel 2. 6
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan Dan Capaiannya Melebihi 100 %**

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Lebih (Rp)	Persentase (%)
	NIHIL				

Dari data pada Tabel 2.4 tentang Realisasi Anggaran Kecamatan Genuk Tahun Anggaran 2021 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 Urusan, 4 Program 11 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan pada OPD Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Genuk dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik

- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan

- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;

- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan

- ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
 - q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
 - r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
 - t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
 - v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
 - w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
 - x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
 - y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
 - z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
 - aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;

- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran OPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 7

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran KECAMATAN GENUK Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

a. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2016 – 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI TH 2022	CATATAN ANALISIS
		TH 2020	TH 2021	TH 2020	TH 2021		
TUJUAN 1 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	69,00	72,50	69,00	72,50	-	Proyeksi tahun 2022 menggunakan tujuan Renstra Th 2021-2026
TUJUAN 2 Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	87,00	85,00	87,00	-	Proyeksi tahun 2022 menggunakan tujuan Renstra Th 2021-2026
SASARAN 1 Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	98	100	98	100	-	Proyeksi tahun 2022 menggunakan sasaran Renstra Th 2021-2026
SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	11,4	17,5	11,4	17,5	-	Proyeksi tahun 2022 menggunakan sasaran Renstra Th 2021-2026-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI TH 2022	CATATAN ANALISIS
		TH 2020	TH 2021	TH 2020	TH 2021		
	dan kelurahan						
SASARAN 3 Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik di Kecamatan	100	100	100	100	-	Proyeksi tahun 2022 menggunakan sasaran Renstra Th 2021-2026

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

b. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

Sasaran	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2020	TH 2021	TH 2022	
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	88,00	88,50	-	-	88,00	Realisasi Th 2020 dan 2021 menggunakan sasaran Renstra 2016-2021
SASARAN 1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	69,89	71,50	72,50	-	-	71,50	Realisasi Th 2020 dan 2021 menggunakan sasaran Renstra 2016-2021

Sasaran	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2020	TH 2021	TH 2022	
SASARAN 2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	Realisasi Th 2020 dan 2021 menggunakan sasaran Renstra 2016-2021
SASARAN 3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	80,00	85,00	86,00	-	-	85,00	Realisasi Th 2020 dan 2021 menggunakan sasaran Renstra 2016-2021
SASARAN 4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,00	40,00	45,00	-	-	40,00	Realisasi Th 2020 dan 2021 menggunakan sasaran Renstra 2016-2021
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	0,00	60,00	70,00	-	-	60,00	Realisasi Th 2020 dan 2021 menggunakan sasaran Renstra 2016-2021

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran KECAMATAN GENUK tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan 1 **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat”, telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 72,50 % dari target sebesar 72,50 %;
- b. Tujuan 2 **“Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar

87,00 % dari target sebesar 87,00 %

- c. Sasaran 1 **“Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan” telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
- d. Sasaran 2 **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan kelurahan” telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 17,5% dari target sebesar 17,5% (capaian sebesar 100%);
- e. Sasaran 3 **“Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik di Kecamatan” telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Genuk dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 8 Ketersediaan Dokumen Perencanaan KECAMATAN GENUK Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	1 dokumen	1 dokumen

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Tersedia 2 dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra), setiap tahun disusun 1 dokumen Renstra, yaitu dokumen Renstra Perubahan. Dokumen perencanaan tahunan lainnya adalah dokumen Rencana Kinerja (Renja), setiap tahun disusun 2 dokumen Renja, yaitu Renja Tahun n+1 dan dokumen Perubahan Renja Tahun n.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
**Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

Unsur Kewilayahan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021			EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021		
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021			EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021		
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	pelayanan	477.561,00	477.561,00	100,00%	477561,00	477.561,00	100,00%
	Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	95,00	89,58	94,29%	95,00	89,58	94,29%
	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	kelurahan	177,00	177,00	100,00%	177,00	177,00	100,00%
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
	Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	kelurahan	177,00	177,00	100,00%	177,00	177,00	100,00%
	Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021			EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021		
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	55,00	56,12	102,04%	55,00	56,12	102,04%
	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	kegiatan	19.954,00	144.457,00	723,95%	19954,00	144.457,00	723,95%
	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	kelurahan	177	177,00	100,00%	177,00	177,00	100,00%
	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	95,00	95,42	100,44%	95,00	95,42	100,44%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase jumlah Siskamling di lingkungan RT	%	90,00	94,60	ST	90,00	94,60

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRA M RPJMD	RKPD				APBD			
		PR OG RA M	KE GIA TAN	SUB KE GIA TAN	ANGGARAN	PR OG RA M	KE GIA TAN	SUB KE GIA TAN	ANGGARAN
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	5	22	17.043.605.713	1	5	22	17.158.225.377
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	3	3	1.496.530.811	1	3	3	2.009.987.693
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	2	5	6.633.558.187	1	2	5	2.520.734.553
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	1	1	259.350.000	1	1	1	259.350.000

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; dimana terdapat 4 Program RPJMD dan dapat terakomodir sejumlah 4 Program. Berikut uraian dari 4 Program tersebut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang terdiri dari 5 kegiatan dengan 22 sub kegiatan.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, yang terdiri dari 3 kegiatan dengan 3 sub kegiatan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, yang terdiri dari 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.

Selanjutnya kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 10**Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun Renja	
		2020	2021
1	Jumlah Usulan	314 usulan	283 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	183 usulan	157 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	58,28 %	55,48 %

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 55,48 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 58,28 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Genuk yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 11**Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
UNSUR KEWILAYAHAN							
Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	90,1 1	91,5 6	92,8 4	94,2 9	95,7 3	96,68
Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	84,3 4	86,6 8	88,5 2	90,8 6	93,2	95,04
Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	91	91	92	93	94	95
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	97	98	99	100	100

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Genuk, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Genuk terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Masih minimnya Aparatur Sipil Negara dalam menguasai Teknologi Informasi yang menyangkut sistem aplikasi.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan dan penularan COVID-19.
- e. Sebagian besar wilayah masih rawan banjir, menyebabkan aktivitas masyarakat terdampak

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung.

Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan :

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui

pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam

musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Genuk yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Genuk Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2. 12
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GENUK			53.551.718.618	KECAMATAN GENUK			50.173.409.000
07.01	KECAMATAN			53.551.718.618	KECAMATAN			53.551.718.618
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	3.292.260.490	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	3.292.260.490
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	156.777.240	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	156.777.240
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	156.777.240	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	156.777.240
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	2.108.016.280	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	2.108.016.280
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.108.016.280	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.108.016.280

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU KULON	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU KULON	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KUDU	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KUDU	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGROTO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGROTO	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GENUKSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GENUKSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANJARDOWO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANJARDOWO	12 Laporan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GEBANGSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GEBANGSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TRIMULYO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TRIMULYO	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PENGGARON LOR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PENGGARON LOR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO KULON	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO KULON	12 Laporan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO WETAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO WETAN	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.027.471.970	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.027.471.970
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	13 Kegiatan	1.027.471.970	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.027.471.970
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	32.883.632.793	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	32.883.632.793
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	17.422.334.583	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	100 %	17.422.334.583
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240 angka	111.064.635	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	111.064.635
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	13 Unit	14.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	13 Unit	14.275.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SEMBUNGHARJO	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SEMBUNGHARJO	13 Unit	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KUDU	7 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KUDU	7 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGROTO	9 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGROTO	9 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GENUKSARI	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GENUKSARI	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANJARDOWO	14 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANJARDOWO	14 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GEBANGSARI	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GEBANGSARI	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TRIMULYO	8 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TRIMULYO	8 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PENGGARON LOR	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PENGGARON LOR	13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU KULON	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU KULON	13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU WETAN	9 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU WETAN	9 Unit	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO KULON	8 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO KULON	8 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO WETAN	8 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO WETAN	8 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	12 Pokmas/ Ormas	3.036.269.948	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	12 Pokmas/ Ormas	3.036.269.948
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANJARDOWO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANJARDOWO	12 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KUDU	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KUDU	12 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGROTO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGROTO	12 Pokmas/ Ormas	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GENUKSARI	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GENUKSARI	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GEBANGSARI	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GEBANGSARI	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TRIMULYO	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TRIMULYO	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PENGGARON LOR	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PENGGARON LOR	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU KULON	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU KULON	12 Pokmas/Ormas	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO KULON	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO KULON	12 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO WETAN	12 Pokmas/Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO WETAN	12 Pokmas/Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	15.461.298.210	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	15.461.298.210
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.572.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.572.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KUDU	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KUDU	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGROTO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGROTO	12 Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GENUKSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GENUKSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANJARDOWO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANJARDOWO	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GEBANGSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GEBANGSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TRIMULYO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TRIMULYO	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PENGGARON LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PENGGARON LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	49.678.050	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	49.678.050
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	68.535.710	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	68.535.710
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	27 Persen	68.535.710	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	27 Persen	68.535.710
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Angka	68.535.710	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	68.535.710
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	108.581.540	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	108.581.540
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kepemudaan	6 Angka	108.581.540	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kepemudaan	6 Angka	108.581.540

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	108.581.540	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	108.581.540
	NON URUSAN				NON URUSAN			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	17.198.708.085	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	17.198.708.085
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Genuk	100 %	28.696.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Genuk	100 %	28.696.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.096.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.096.120
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.158110	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.158110
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.069.290	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.069.290

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.558.290	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.558.290
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.558.290	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.558.290
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2.242.960	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2.242.960
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.910.080	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.910.080
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	15.288.399.218	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	15.288.399.218
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14.693.408.618	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14.693.408.618
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	589.830.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	589.830.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.075.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.075.320

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	1.583.680	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	1.583.680
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	501.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	501.600
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Genuk	100 %	761.678.807	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Genuk	100 %	761.678.807
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	13.744.810	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	13.744.810
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	442.908.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	442.908.500
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Jenis	48.741.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Jenis	48.741.400
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	22.597.837	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	22.597.837
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190 Orang	54.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190 Orang	54.750.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Kegiatan	114.895.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Kegiatan	114.895.500

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	64.040.760	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	64.040.760
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Genuk	100 %	304.769.220	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Genuk	100 %	304.769.220
X.XX.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	304.769.220	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	304.769.220
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Genuk	100 %	267.667.030	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Genuk	100 %	267.667.030
X.XX.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	149.329.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	149.329.440
X.XX.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	118.337.590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	118.337.590
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Genuk	100 %	551.600.670	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Genuk	100 %	551.600.670
X.XX.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	286.362.040	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	286.362.040
X.XX.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung	182.144.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Gedung	182.144.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi						
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Jenis	35.272.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Jenis	35.272.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	47.822.630	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	47.822.630

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Genuk juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Genuk, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
SEMBUNGHARJO				1.094.000.000
1.	Pavingisasi Jalan	Jl. Krajan Bagus Dalam 2	437.5 meter	85.000.000
2.	Talud Saluran Air	Jl. Perbal Raya	87 meter	85.000.000
3.	Talud Saluran Air	Jl. Perbal Raya	81 meter	80.000.000
4.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Bagus Raya	81 meter	80.000.000
5.	Talud Saluran Air	Jl. Kenanga 1	87 meter	85.000.000
6.	Talud Saluran Air	Jl. Tlogoharjo	81 meter	80.000.000
7.	Talud Saluran Air	Jl. Sukorejo	88.5 meter	86.000.000
8.	Talud Saluran Air	Jl. Palem 3	60 meter	80.000.000
9.	Talud Saluran Air	Jl. Nur Alim	87 meter	85.000.000
10.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Bagus Raya	87 meter	85.000.000
11.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Raya	85.5 meter	83.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
12.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Bagus 3	90 meter	90.000.000
13.	Talud Saluran Air	Jl. Kenanga 2	90 meter	90.000.000
KUDU				1.000.000.000
14.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Rejomulyo Kudu Kramat Rt 04 Rw 01	60 meter	66.500.000
15.	Pembangunan Talud Saluran	Jl kudu dempel gang 1 Rt 01 & Rt 02 Rw 01	60 meter	66.500.000
16.	Pembangunan Talud Saluran	Jl kaumandowo I RT 1 Rw3	60 meter	66.500.000
17.	Pavingisasi Jalan	Jl Perumahan Salsabilla RT 7 RW 3	125 meter	66.500.000
18.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Kaumandowo VII RT 01 RW 04	120 meter	133.000.000
19.	Pavingisasi Jalan	Jl Ki Dalem Gg 14,18 RT 04 RW 06	125 meter	66.500.000
20.	Pavingisasi Jalan	Jl Ki Dalem Barat RT 03 RW 06	125 meter	66.500.000
21.	Pavingisasi Jalan	Jl Kisenari III RT 08 RW 05	125 meter	66.500.000
22.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Kisenari 06 RT 06 RW 05	60 meter	66.500.000
23.	Peninggian Jalan	Jl Kidalem IV RT 7 RW 7	1000 meter	133.000.000
24.	Pembangunan Talud saluran	Jl Raya Kauman Kudu RT 01 RW 02	60 meter	66.500.000
25.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Kramat II RT 02 RW 02	60 meter	66.500.000
26.	Peninggian jalan	JL. Ki Dalem RT 07 RW 07	500 meter	69.000.000
Karangroto				1.213.000.000
27.	Talud Saluran	Samping Kelurahan	30 meter	60.000.000
28.	Perbaikan Saluran	Karangroto	72 meter	95.000.000
29.	Pavingisasi	Arah Makam	325 meter	90.000.000
30.	Talud Saluran	karangroto	30 meter	65.000.000
31.	Talud dan Saluran	Karangroto	60 meter	125.000.000
32.	Talud Saluran	Sekitar Perum Handik III	30 meter	60.000.000
33.	Peninggian dan pavingisasi	Karangroto	350 meter	85.000.000
34.	Pavingisasi dan talud jalan	Jalan Kresen	225 meter	115.000.000
35.	Saluran Air	Karangroto	30 meter	60.000.000
36.	Talud Saluran	Karangroto	42 meter	90.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
37.	Pavingisasi Jalan	Jalan Beringin	250 meter	65.000.000
38.	Peninggian Jalan	Karangroto	500 meter	140.000.000
39.	Peninggian dan Pavingisasi	Jl. Kenanga	375 meter	100.000.000
40.	Peninggian jalan dan pavingisasi	Karangroto	225 meter	63.000.000
Genuksari				1.261.000.000
41.	Pavingisasi Jalan	Genuksari	150 meter	78.000.000
42.	Saluran	Genuksari	39 meter	78.000.000
43.	Pembangunan Saluran	Genuksari	39 meter	78.000.000
44.	Pembangunan Saluran	Genuksari	39 meter	78.000.000
45.	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Widuri	150 meter	78.000.000
46.	Pavingisasi dan Peninggian	Genuksari	150 meter	78.000.000
47.	Pembuatan Saluran	Jl. RT 05 RW 09	60 meter	78.000.000
48.	Saluran	Genuksari	67.5 meter	78.000.000
49.	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Genuksari	325 meter	78.000.000
50.	Pavingisasi dan Talud	Genuksari	175 meter	84.000.000
51.	Saluran	Genuksari	45 meter	85.000.000
52.	Saluran	Genuksari	37.5 meter	78.000.000
53.	Pavingisasi Jalan Tembus	Genuksari	412.5 meter	78.000.000
54.	Pavingisasi Jalan	Genuksari	150 meter	78.000.000
55.	pavingisasi jalan	Genuksari	150 meter	78.000.000
56.	Talud dan peninggian Jalan	Genuksari	150 meter	78.000.000
BANJARDOWO				1.000.000.000
57.	Peninggian jalan & pavingisasi	Jl. Langgar Deprok 2 Utara	131.25 meter	65.000.000
58.	Peninggian jalan & pavingisasi	Jl. Tanggul Angin 1	262.5 meter	65.000.000
59.	Peninggian jalan & pavingisasi	Jl. Banjarsari 3	200 meter	70.000.000
60.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tambi	262.5 meter	65.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
61.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo Indah	262.5 meter	65.000.000
62.	Peninggian Jembatan	Jl. Langgar Deprok IV (RT 1, 4, 5 RW 2)	212.5 meter	80.000.000
63.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo Biru Raya	325 meter	80.000.000
64.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Angin	275 meter	70.000.000
65.	Pembuatan saluran got U	Jl. Abdul Hamid	57 meter	85.000.000
66.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo ke makam Bergota	250 meter	65.000.000
67.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tanggul Rejo II B	350 meter	85.000.000
68.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Kauman	250 meter	65.000.000
69.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Bitaran (RT 1, 2 RW 3)	262.5 meter	65.000.000
70.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Bitaran	300 meter	75.000.000
GEBANGSARI				1.000.000.000
71.	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Tengah II	400 meter	90.000.000
72.	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Padi XIII	200 meter	90.000.000
73.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Timur III	250 meter	90.000.000
74.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas IX	300 meter	90.000.000
75.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Padi Utara IV	300 meter	90.000.000
76.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Utara II	300 meter	80.000.000
77.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Utara XI	300 meter	90.000.000
78.	Perbaikan Balai / Posyandu RW 04	Jl. Padi Tengah 16	1 Paket	90.000.000
79.	Perbaikan Balai RW / Gedung PKK RW 03	Jl. Padi Tengah VIII	1 Paket	100.000.000
80.	Perbaikan Talud saluran	JL Ngablak	36 meter	90.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
81.	Peninggian Gorong - Gorong (2 Lokasi)	Jl.padi Utara XIII dan jl. Padi Utara XI.	36 meter	100.000.000
TRIMULYO				1.000.000.000
82.	Peninggian Jalan dan pavingisasi	Trimulyo	250 meter	110.000.000
83.	Peninggian jalan dan pavingisasi	RT 03 RW 01	250 meter	125.000.000
84.	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 02 RW 01	200 meter	133.000.000
85.	Pekerjaan Talud	RT 04 RW 03	20 meter	125.000.000
86.	Pekerjaan Talud	RT 04 RW 02	20 meter	150.000.000
87.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan	Trimulyo	268.85 meter	125.000.000
88.	Pembangunan gedung Posyandu	RT 03 RW 03	200 meter	133.000.000
89.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	TRIMULYO	250 meter	99.000.000
PENGGARON LOR				1.000.000.000
90.	PAVINGISASI JALAN	JL. FLAMBOYAN II	304.55 meter	83.000.000
91.	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN	Jl. Mawar	196 meter	70.000.000
92.	Pembangunan Talud dan Pengurukan	Jl. Syuhadak II	4.5 meter	80.000.000
93.	Pembangunan Talud dan Pengurukan	Jl. Sapiwatu III	120 meter	70.000.000
94.	Pembangunan Talud Saluran	Jl. Mawar III	51 meter	71.000.000
95.	Pembangunan Talud Jalan dan Peninggian Pavingisasi	Jl. Makam	100 meter	83.000.000
96.	Pembangunan Talud jalan	Jl. Makadam I	150 meter	82.000.000
97.	Pavingisasi Jalan	Gang RT.03 RW.04	250 meter	83.000.000
98.	Pavingisasi Jalan dan Talud	Gang RT. 05 RW.03	200 meter	70.000.000
99.	Pembangunan talud Saluran	Jl. Kenanga VI	51 meter	71.000.000
100.	Pavingisasi dan talud Jalan	Jl. Kenanga IV	250 meter	80.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
101.	Pavingisasi dan Talud Jalan	Jl. Flamboyan IV	250 meter	82.000.000
102.	Pavingisasi jalan dan talud Saluran	Penggaron Lor	200 meter	75.000.000
MUKTIHARJO LOR				1.000.000.000
103.	lanjutan peninggian jalan dan bongkar pasang (pavingisasi)	Jl Ngablak Indah	375 meter	85.000.000
104.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi (bongkar pasang)	Jl Ngablak Indah (gang buntu)	250 meter	120.000.000
105.	pembangunan pondasi saluran	Jl Sendang Indah	42 meter	70.000.000
106.	pembangunan saluran air	Jl Sendang Indah	45 meter	60.000.000
107.	peninggian jalan dan pavingisasi	Jl Sendang Indah Barat	300 meter	100.000.000
108.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi	Jl Singoyudan	450 meter	130.000.000
109.	Peninggian Jalan dan pavingisasi RT 01-03	Jl Sendang Indah	375 meter	135.000.000
110.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi dan talud	Jl Singoyudan	250 meter	100.000.000
111.	Peninggian jalan dan pavingisasi RT 04 RW 02	Jl Sendang Indah	375 meter	100.000.000
112.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi RT 01-06	Jl Sendang Indah	360 meter	100.000.000
BANGETAYU KULON				1.154.000.000
113.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Utama Sedayu Pelem	437.5 meter	120.000.000
114.	Pembangunan Talud Saluran Jl. Widuri I RT, 01 RW. 05 Tembus RT. 07 RW. 05	Jl. Widuri I RT, 01 RW. 05 Tembus RT. 07 RW. 05	62.1 meter	81.000.000
115.	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Ngablak Indah RW. 04	125 meter	86.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
116.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl, Ngablak Indah	237 meter	65.000.000
117.	Pavingisasi Jalan	Gang Sejahtera RT 04 RW. 08	190 meter	90.000.000
118.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Sumur Adem III dan V Wilayah RW. 11	JL. Sumur Adem III dan V	190 meter	90.000.000
119.	Pembangunan Talud an Saluran RW. 02	Jl. Kwaron RW. 02	92.16 meter	120.000.000
120.	Perbaiki Jalan Wilayah RW. 03	Jl. Bugen Utara Raya	300 meter	120.000.000
121.	Pembangunan Saluran Induk wilayah RW. 06	Jl. Banget Prasetya	61.35 meter	80.000.000
122.	Pembangunan Saluran Primer wilayah RW. 07	Jl. widuri IV	63.75 meter	83.000.000
123.	Pembangunan Talud Saluran Air Wilayah RW. 09	Jl. Widuri II Dalam RT. 02 RW. 09	63.6 meter	83.000.000
124.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Widuri baru 1 rw. 10	302.5 meter	83.000.000
125.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Gang damai II rt. 03 rw. 08	109.75 meter	53.000.000
BANGETAYU WETAN				1.003.000.000
126.	Pavingisasi jalan	Bangetayu Wetan	270 m2	87.000.000
127.	Pembangunan Talud dan Pavingisasi Jalan	Bangetayu Wetan RT 05 dan 07 RW 06	312.5 m2	89.000.000
128.	Pavingisasi jalan	Bangetayu Wetan RT 04 dan 05 RW 04	2000 m2	90.000.000
129.	Pembangunan Talud Saluran	Bangetayu Wetan RT 03 RW 01	60 meter	83.000.000
130.	Lanjutan pembangunan talud dan saluran air	Wilayah RT 06 dan 11 RW 02	127.5 meter	85.000.000
131.	Lanjutan pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Kyai Nawawi RT 01 RW 03	187.5 m2	82.000.000
132.	Pembangunan Talud dan Saluran air	Jl. Ganginsari II RT 04 RW 04	150 meter	80.000.000
133.	Pavingisasi jalan	Jl.Taman Bayu Prasetya Timur II	250 m2	81.000.000

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
134.	Lanjutan Pembangunan Talud Saluran Air	Jl. Kelapa Gading Raya RT 01,02,03,04 RW 08	240 m3	83.000.000
135.	Pavingisasi Jalan	Bangetayu Wetan	375 meter	80.000.000
136.	Normalisasi Saluran / Talud	Bangetayu Wetan RT 01, 07, 03, 02 dan RW 05	150 m3	83.000.000
137.	Peninggian, Pavingisasi dan Talud Jalan	Bangetayu Wetan	250 m2	80.000.000
TERBOYO KULON				1.000.000.000
138.	Terusan Penerangan Lampu jln	RW 01 DAN RW 02	45 meter	86.000.000
139.	Pembangunan Kantor Sekretariat PKK	Terboyo Kulon RT 01 RW 02	50 meter	149.000.000
140.	Peninggian dan pavingisasi jalan	Jalan nila	360 meter	150.000.000
141.	Peninggian dan pavingisasi jalan	jalan nila	500 meter	148.500.000
142.	Peninggian dan pavingisasi jalan	Terboyo Kulon	250 meter	135.000.000
143.	Pintu Air dan Penerangan Jalan RW I	Terboyo Kulon	4 meter	90.000.000
144.	PEMBANGUNAN TUTUP GOT U-30 RW 2	Terboyo Kulon	36 meter	118.000.000
145.	REHAP GEDUNG POSYANDU	Terboyo Kulon	35 meter	123.500.000
TERBOYO WETAN				1.000.000.000
146.	Peninggian Pavingisasi Jalan	Jl. Sringin II	264 meter	138.000.000
147.	Melanjutkan Perbaikan Saluran Depan	Jl. Sringin IV	30 meter	145.000.000
148.	Pembangunan Saluran Depan	Jl. Sringin II	45 meter	146.000.000
149.	Pembangunan Saluran Belakang	Jl. Sringin V	30 meter	143.000.000
150.	Pavingisasi Jalan	Jl. Terboyo Industri Raya	250 meter	149.000.000
151.	Perbaikan Saluran Air dan Pengadaan Tutup Saluran	Jl. Sringin I	34.5 meter	139.000.000

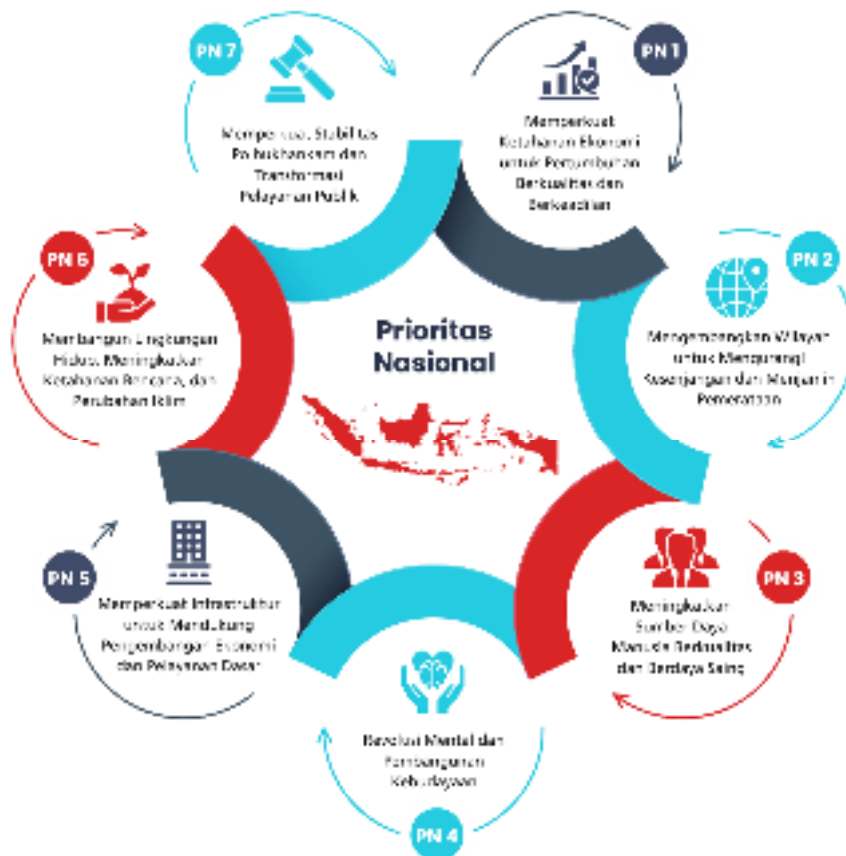
No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran
-1	-2	-3	-7	-8
	Air (Kanan dan Kiri)			
152.	Pondasi Talud Saluran Air dan Tutup Saluran	Gg. Macan Buntu	45 meter	140.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Prioritas Nasional

Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk

- Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara

lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, KECAMATAN GENUK juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada KECAMATAN GENUK Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang”,

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang yaitu :

- a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran Nilai AKIP
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan indikator sasaran Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan.
- c. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, dengan indikator sasaran :

- Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

Tabel 3. 2**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,50
SASARAN 1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	72,50
SASARAN 2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1,00
SASARAN 3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86,00
SASARAN 4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	70,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Genuk Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Genuk Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 sesuai RKPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel (terlampir).

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 13 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 53.551.718.618,00 yang bersumber dari dana APBD Kota

Tabel 4. 1

***Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Genuk Kota Semarang***

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GENUK			53.551.718.618	KECAMATAN GENUK			53.551.718.618	50.173.409.000
07.01	KECAMATAN			53.551.718.618	KECAMATAN			53.551.718.618	50.173.409.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	3.292.260.490	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	3.292.260.490	3.540.624.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	156.777.240	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	156.777.240	65.335.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	156.777.240	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	156.777.240	65.335.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100 %	2.108.016.280	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100 %	2.108.016.280	1.946.071.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	yang ada di Kecamatan	Daerah yang ada di Kecamatan				Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.108.016.280	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.108.016.280	1.946.071.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU KULON	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU KULON	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KUDU	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KUDU	12 Laporan		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/S UB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGROTO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGROTO	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GENUKSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GENUKSARI	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANJARDOWO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANJARDOWO	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GEBANGSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GEBANGSARI	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/S UB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Kecamatan KEL. TRIMULYO				Kecamatan KEL. TRIMULYO			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PENGGARON LOR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PENGGARON LOR	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO KULON	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO KULON	12 Laporan		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO WETAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TERBOYO WETAN	12 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.027.471.970	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.027.471.970	1.529.218.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	13 Kegiatan	1.027.471.970	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.027.471.970	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	32.883.632.793	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	32.883.632.793	31.647.027.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	17.422.334.583	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	100 %	17.422.334.583	31.255.027.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240 angka	111.064.635	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	111.064.635	67.250.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	13 Unit	14.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	13 Unit	14.275.000.000	14.74.177.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SEMBUNGHARJO	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SEMBUNGHARJO	13 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KUDU	7 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KUDU	7 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGROTO	9 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGROTO	9 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GENUKSARI	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GENUKSARI	12 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANJARDOWO	14 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANJARDOWO	14 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GEBANGSARI	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GEBANGSARI	10 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TRIMULYO	8 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TRIMULYO	8 Unit		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PENGGARON LOR	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PENGGARON LOR	13 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU KULON	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU KULON	13 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU WETAN	9 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BANGETAYU WETAN	9 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO KULON	8 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO KULON	8 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO WETAN	8 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TERBOYO WETAN	8 Unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	12 Pokmas/ Ormas	3.036.269.948	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	12 Pokmas/ Ormas	3.036.269.948	16.443.600.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/S UB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANJARDOWO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANJARDOWO	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KUDU	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KUDU	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGROTO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGROTO	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	12 Pokmas/ Ormas		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/S UB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Kelurahan KEL. GENUKSARI				Kelurahan KEL. GENUKSARI			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GEBANGSARI	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GEBANGSARI	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TRIMULYO	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TRIMULYO	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PENGGARON LOR	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PENGGARON LOR	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Pokmas/ Ormas		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/S UB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU KULON	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU KULON	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO KULON	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO KULON	12 Pokmas/ Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO WETAN	12 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TERBOYO WETAN	12 Pokmas/ Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	15.461.298.210	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	15.461.298.210	392.000.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.411.620.160	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.411.620.160	124.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SEMBUNGHARJO	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KUDU	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KUDU	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGROTO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGROTO	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GENUKSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GENUKSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANJARDOWO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANJARDOWO	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GEBANGSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GEBANGSARI	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TRIMULYO	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TRIMULYO	12 Lembaga Kemasyarakatan		

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PENGGARON LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PENGGARON LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MUKTIHARJO LOR	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BANGETAYU WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO KULON	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TERBOYO WETAN	12 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	49.678.050	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	49.678.050	268.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	68.535.710	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	68.535.710	33.610.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunna Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenytaman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	27 Persen	68.535.710	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	27 Persen	68.535.710	33.610.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	JumlahKegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Angka	68.535.710	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	68.535.710	33.610.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	108.581.540	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	108.581.540	47.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, dan	6 Angka	108.581.540	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	6 Angka	108.581.540	47.000.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Organisasi Kepemudaan				Keagamaan, dan Organisasi Kepemudaan			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	108.581.540	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	108.581.540	47.000.000
	NON URUSAN				NON URUSAN				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	17.198.708.085	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	17.198.708.085	14.905.148.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 %	28.696.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 %	24.593.140	15.566.380

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Genuk				Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Genuk			
X.XX.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.096.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.096.120	3.424.800
X.XX.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.158110	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.158110	2.193.820
X.XX.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.069.290	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.069.290	2.367.250
X.XX.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.558.290	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4.558.290	1.096.250
X.XX.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.558.290	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.558.290	1.096.250

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2.242.960	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2.242.960	3.500.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.910.080	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.910.080	1.888.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	15.288.399.218	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	15.288.399.218	13.972.048.010
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14.693.408.618	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14.693.408.618	13.625.621.210
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	589.830.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	589.830.000	341.590.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	3.075.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	3.075.320	1.250.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Keuangan Akhir Tahun SKPD				Keuangan Akhir Tahun SKPD			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	1.583.680	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	1.583.680	2.500.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	501.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	501.600	1.086.800
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Genuk	100 %	761.678.807	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Genuk	100 %	761.678.807	330.106.630
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	13.744.810	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	13.744.810	12.126.470
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	442.908.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	442.908.500	124.500.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Jenis	48.741.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Jenis	48.741.400	25.930.160

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	22.597.837	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	22.597.837	7.650.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	190 Orang	54.750.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	190 Orang	54.750.000	41.400.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Kegiatan	114.895.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Kegiatan	114.895.500	113.500.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	64.040.760	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	64.040.760	5.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Genuk	100 %	304.769.220	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Genuk	100 %	304.769.220	5.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	304.769.220	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	304.769.220	5.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Genuk	100 %	267.667.030	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Genuk	100 %	267.667.030	228.306.980
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	149.329.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	149.329.440	159.306.980

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	118.337.590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	118.337.590	69.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Genuk	100 %	551.600.670	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Genuk	100 %	551.600.670	354.120.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	286.362.040	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	286.362.040	300.120.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Gedung	182.144.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Gedung	182.144.000	13.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Jenis	35.272.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Jenis	35.272.000	30.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Jenis	47.822.630	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Jenis	47.822.630	11.000.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Perkiraan (N+1)
	PROGRAM/KEG/S UB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilit asi				Dipelihara/Direhabilit asi			

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Genuk pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Genuk ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Genuk;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Genuk ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja KECAMATAN GENUK Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

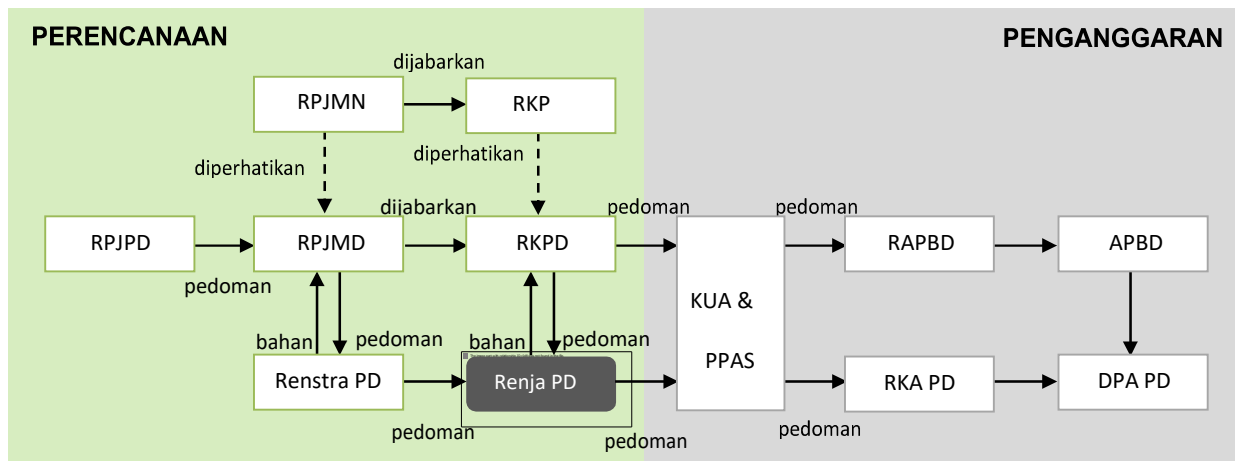
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Gajahmungkur, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gajahmungkur tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Gajahmungkur.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai

alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANA RENCANA KERJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Gajahmungkur.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 31.069.203.577,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 28.972.200.976,- atau sebesar 93.25%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	-	85%	80%	94%	93,00%	95,00%	102%
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Gajahmungkur)	6.200 Pelayanan	-	6.200 Pelayanan	10.696 Pelayanan	173%	-	-	-
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	8 kelurahan	-	2 kelurahan	2 kelurahan	100%	-	-	-
		Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan(Gajahmungkur)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Gajahmungkur)	8 kelurahan	-	8 kelurahan	8 kelurahan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan						1 Angka	1 Angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat	-	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	-	100%	98,09%	98,09%			
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	98,09%	98,09%			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	5 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6.200 Pelayanan	-	6.200 Pelayanan	10.696 Pelayanan	173%	-	-	-
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	-	100%	98%	98%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	-	100%	97%	97%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	-	100%	97%	97%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	-	100%	97%	97%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	100%	-	100%	98%	98%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	-	100%	97%	97%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	-	100%	98%	98%	100%	98%	98%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	-	100%	97%	97%	100%	98%	98%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	-	-	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	-	-	-	-	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95%	-	95%	93%	98%	96,00%	95%	98,96%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan (Gajahmungkur)	800 Kegiatan	-	800 Kegiatan	560 jumlah	70%	-	-	-
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (Gajahmungkur)	55%	-	55%	53%	96,36%	-	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	-	100%	98,33%	98,33%			
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						272 Angka	272 Angka	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	-	100%	95.63%	95,63%			
		Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	160 Lokasi		160 Lokasi	153 Lokasi	95,63%	-	-	-
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	-	272 Angka	272 Angka	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	-	100%	99.38%	99,38%			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	6 kegiatan	-	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	23 kegiatan	-	23 kegiatan	22 kegiatan	95,65%	-	-	-
		Sarana dan Prasarana Lingkungan Masyarakat yang terpelihara	11 kegiatan	-	11 kegiatan	11 kegiatan	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Bendan Duwur	12 kegiatan	-	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Bendan Ngisor	10 kegiatan	-	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Gajahmungkur	5 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	11 kegiatan	11 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Karangrejo	14 kegiatan	-	13 kegiatan	8 kegiatan	61,54%	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Lemponsari	9 kegiatan	-	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Petompon	6 kegiatan	-	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Sampangan	7 kegiatan	-	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Bendungan	9 kegiatan	-	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	-	100%	100.00%	100%			
		Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11.00	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	80 Kegiatan	-	80 Kegiatan	80 Kegiatan	100%	37 kegiatan	37 kegiatan	100%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Benda Duwur Pelaksanaan Hasil musrenbang	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%	124 kegiatan	124 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Benda Duwur	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Benda Ngisor Pelaksanaan Hasil musrenbang	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	122 kegiatan	122 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Gajahmungkur Pelaksanaan Hasil musrenbang	16 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%	123 kegiatan	123 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Karangrejo Pelaksanaan Hasil musrenbang	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%	119 kegiatan	119 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Lempongsari Pelaksanaan Hasil musrenbang	19 Kegiatan	-	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100%	125 kegiatan	125 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Petompon Pelaksanaan Hasil musrenbang	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%	119 kegiatan	119 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Sampangan Pelaksanaan Hasil musrenbang	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	120 kegiatan	120 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Bendungan Pelaksanaan Hasil musrenbang	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	119 kegiatan	119 kegiatan	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	92,50%	92,50%			
		Jumlah Laporan Lembaga Masyarakat yang Seharusnya	-	-	-	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat		100%	-	100%	85%	85%			
		Jumlah Kegiatan lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK dan PKK)	800 Kegiatan	-	800 Kegiatan	560 Kegiatan	70%	-	-	-
		Penunjang capaian kinerja	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Lembaga Masyarakat yang Dilaporkan	-	-	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan(jml bidang tanah)	49 Aset	-	49 Aset	49 Aset	100%	-	-	-
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan	-	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90%	-	90%	90%	100%	-	-	-
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	10.00 %	10.00 %	100%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		-				38 Angka	35 Angka	92,11%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase jumlah siskamling yang ada di lingkungan RT	90%	-	90%	90%	100%	-	-	-
		Persentase RT yang memiliki petugas linmas	90%	-	90%	90%	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	80%	80%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	-	-	-	-			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	-	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%			
		Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	-	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	100.00%	100%			
		Penyusunan LKPJ dan LKJIP Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	99,25%	99,25%			
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur		-	-	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	-	100%	100%	100%			
		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	-	100%	100%	100%			
		Target kinerja dan ikhtisar KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen CALK	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	-	100%	97%	97%			
		Jumlah Dokumen Prognosis	100%	-	100%	97%	97%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%			
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	-			
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	9 Jenis	9 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Penyediaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	-	100%	100%	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	-	100%	100%	100%			
		Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan dan Kelurahan)	100%	-	100%	100%	100%	35 Jenis	35 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	-	100%	100%	100%			
		Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan Gajahmungkur)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	-	100%	100%	100%			
		Jamuan Rapat dan Kegiatan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	-	-	-	-	-	1000 Orang	1000 Orang	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	-	100%	100%	100%			
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100%	-	100%	100%	100%	50 Kegiatan	50 Kegiatan	100%
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-	-	-	-			
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	8 Jenis	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	90%	90%			
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	100%	90%	90%			
		Peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	-	100%	90%	90%	4 Jenis	4 Jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	100%	100%	100%			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Langganan rekening telepon air listrik dan koran	100%	-	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-						
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	16 Jenis	16 Jenis	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100%			
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	-	100%	100%	100%			
		Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	-	100%	100%	100%	20 Unit	20 Unit	100%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%			
		Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100%	2 Gedung	2 Gedung	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%			
		Kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Pemeliharaan rumah dinas camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	-	-	24 Jenis	24 Jenis	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%			
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021 :

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur pada Tahun 2021 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (empat) Program dengan 9 (sembilan) Indikator Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan 80 (delapan puluh) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

b) Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang melampaui target, 6 indikator memenuhi target, serta 2 indikator tidak memenuhi target.

Pada tahun 2021 pandemi covid-19 berangsur-angsur berkurang sehingga jumlah pelayanan administratif yang diberikan kepada masyarakat meningkat, berdampak pada pencapaian pada indikator jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Gajahmungkur melampaui target yang telah ditentukan.

Sedangkan pada indikator jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan indikator persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang tidak memenuhi target dikarenakan meskipun pandemi covid-19 sudah berkurang tetapi pendapatan belum sepenuhnya pulih, sehingga anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas, yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik.

c) Dari 12 kegiatan, terdapat 7 kegiatan yang memenuhi target, serta 5 kegiatan tidak memenuhi target. Sedangkan dari 80 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, 66 indikator memenuhi target, serta 13 indikator tidak memenuhi target. Indikator yang melebihi target adalah jumlah pelayanan administratif di Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan 13 indikator yang tidak memenuhi target kinerja yaitu sebagai berikut:

- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan
- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan
- Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan
- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
- Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Karangrejo
- Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 7 indikator program, 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
- b) Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 indikator diperkirakan

dapat memenuhi target serta 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

- c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra dan 1 Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2021 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021

SKPD : KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
Urusan Wajib Kewilayahan	31.069.203.577,00	28.972.200.976	93,25%

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI		PERSEN TASE Rp.	SELISIH ANGGARAN Rp.
		Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.310.642.577	11.442.828.667	92,95%	867.813.910
7.1.1.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.750.000	30.331.000	95,53%	1.419.000
7.1.1.2,01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.525.000	7.022.700	93,32%	502.300
7.1.1.2,01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.750.000	4.662.500	98,16%	87.500
7.1.1.2,01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.750.000	4.643.100	97,75%	106.900

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI		PERSEN TASE	SELISIH ANGGARAN
		Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6
7.1.1.2,01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.350.000	3.244.600	96,85%	105.400
7.1.1.2,01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.350.000	3.273.800	97,73%	76.200
7.1.1.2,01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.675.000	2.588.600	96,77%	86.400
7.1.1.2,01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.350.000	4.895.700	91,51%	454.300
7.1.1.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.392.967.577	9.668.516.356	93,03%	724.451.221
7.1.1.2,02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.059.017.577	9.378.727.956	93,24%	680.289.621
7.1.1.2,02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.740.000	284.690.000	86,60%	44.050.000
7.1.1.2,02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.260.000	3.199.600	98,15%	60.400
7.1.1.2,02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.950.000	1.898.800	97,37%	51.200
7.1.1.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	997.525.000	965.159.424	96,76%	32.365.576
7.1.1.2,06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000	4.278.500	99,50%	21.500
7.1.1.2,06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.320.000	170.305.000	94,97%	9.015.000
7.1.1.2,06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.814.810	99,07%	185.190
7.1.1.2,06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.775.000	6.695.000	98,82%	80.000
7.1.1.2,06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.750.000	35.370.000	77,31%	10.380.000
7.1.1.2,06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.557.000	94.643.714	94,12%	5.913.286
7.1.1.2,06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	640.823.000	634.052.400	98,94%	6.770.600
7.1.1.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.215.000	6.280.000	87,04%	935.000
7.1.1.2,07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.215.000	6.280.000	87,04%	935.000
7.1.1.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.300.000	100.145.063	72,41%	38.154.937
7.1.1.2,08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.300.000	100.145.063	72,41%	38.154.937

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI		PERSEN TASE	SELISIH ANGGARAN
		Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6
7.1.1.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.885.000	672.396.824	90,51%	70.488.176
7.1.1.2,09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.750.000	105.907.904	86,28%	16.842.096
7.1.1.2,09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.000.000	145.013.500	96,04%	5.986.500
7.1.1.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.260.000	390.576.620	92,28%	32.683.380
7.1.1.2,09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.875.000	30.898.800	67,35%	14.976.200
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.125.017.800	6.494.956.850	91,16%	630.060.950
7.1.2.2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.600.000	117.685.000	79,20%	30.915.000
7.1.2.2,01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.600.000	117.685.000	79,20%	30.915.000
7.1.2.2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.158.875.000	5.653.237.561	91,79%	505.637.439
7.1.2.2,02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	660.875.000	633.959.500	95,93%	26.915.500
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	506.000.000	459.280.474	90,77%	46.719.526
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	505.200.000	461.495.674	91,35%	43.704.326
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	1.299.800.000	1.178.738.473	90,69%	121.061.527
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGREJO)	569.000.000	514.386.952	90,40%	54.613.048
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	633.800.000	583.304.741	92,03%	50.495.259

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI		PERSEN TASE	SELISIH ANGGARAN
		Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PETOMPON)	619.400.000	565.820.990	91,35%	53.579.010
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	871.400.000	800.831.252	91,90%	70.568.748
7.1.2.2,04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	493.400.000	455.419.505	92,30%	37.980.495
7.1.2.2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	817.542.800	724.034.289	88,56%	93.508.511
7.1.2.2,04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	817.542.800	724.034.289	88,56%	93.508.511
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.327.543.200	10.757.355.959	94,97%	570.187.241
7.1.3.2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.792.108.200	10.313.342.359	95,56%	478.765.841
7.1.3.2,02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	97.065.000	45.724.800	47,11%	51.340.200
7.1.3.2,02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.525.653.200	4.444.565.250	98,21%	81.087.950
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BENDAN DUWUR)	467.200.000	453.568.000	97,08%	13.632.000
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BENDAN NGISOR)	525.159.000	523.703.000	99,72%	1.456.000
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	287.700.000	286.703.709	99,65%	996.291
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGREJO)	560.920.000	549.171.000	97,91%	11.749.000
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LEMPONGSARI)	597.200.000	594.669.200	99,58%	2.530.800
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PETOMPON)	785.600.000	783.820.125	99,77%	1.779.875
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMPANGAN)	404.025.000	401.856.000	99,46%	2.169.000
7.1.3.2,02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BENDUNGAN)	608.450.000	605.766.000	99,56%	2.684.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI		PERSEN TASE	SELISIH ANGGARAN
		Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6
7.1.3.2,02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	177.000.000	141.808.750	80,12%	35.191.250
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	223.552.000	184.633.400	82,59%	38.918.600
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	216.650.000	207.016.250	95,55%	9.633.750
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	222.400.000	157.711.250	70,91%	64.688.750
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGREJO)	211.234.000	151.606.156	71,77%	59.627.844
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LEMPONGSARI)	225.335.000	211.101.019	93,68%	14.233.981
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PETOMPON)	219.065.000	186.918.250	85,33%	32.146.750
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMPANGAN)	217.870.000	197.292.700	90,56%	20.577.300
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDUNGAN)	220.030.000	185.707.500	84,40%	34.322.500
7.1.3.2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	535.435.000	444.013.600	82,93%	91.421.400
7.1.3.2,03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	89.370.000	56.154.500	62,83%	33.215.500
7.1.3.2,03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	446.065.000	387.859.100	86,95%	58.205.900
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	306.000.000	277.059.500	90,54%	28.940.500
7.1.4.2,03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	306.000.000	277.059.500	90,54%	28.940.500
7.1.4.2,03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	306.000.000	277.059.500	90,54%	28.940.500
JUMLAH BELANJA		31.069.203.577	28.972.200.976	93,25%	2.097.002.601

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah sebesar **Rp.**

31.069.203.577,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp. 28.972.200.976,-** dengan sisa sebesar **2.097.002.601** (6,25%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 10.059.017.577 (93,24%), realisasi Rp. 9.378.727.956 dan sisa anggaran sebesar Rp. 680.289.621 (6,76%).
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 21.010.186.000 dengan realisasi sebesar Rp.19.593.473.020 (93,26%) dan sisa anggaran sebesar Rp.1.416.712.980 (6,74%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Gajahmungkur dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :

- 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
- 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;

- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;

- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;

- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;

- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;

- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;

- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;

- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana,

penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;

- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran OPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR										
Tujuan :										
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	%	100	100	-	-	99%	100		-
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	87	-	-	85	87		-
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	-	-	93	94	-	-	95	96
Sasaran :										
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	%	15	15	-	-	15	15		-
Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan capaian kinerja kecamatan dan	%	100	100	-	-	100	100		-

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
kelurahan	kelurahan									
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	%	100	100	-	-	100	100		-
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	-	-	71	72	-	-	72	73
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	-	-	1	1	-	-	2	3
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	-	-	80	85	-	-	80	85
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	-	-	40	45	-	-	40	45
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	-	-	60	65	-	-	60	65

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- i. **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Tingkat partisipasi masyarakat”**, telah

dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100%;

- ii. **Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani**” memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”**, telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 87%

b. Sasaran

1. **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** realisasinya sebesar 15 % dari target sebesar 15 % (capaian sebesar 100 %).
2. **”Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan kelurahan”** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
 - a) Indikator **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dan Capaian Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan** realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100 %).
 - b) Indikator **Cakupan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan** realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2020-2021

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Gajahmungkur di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2016-2021 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2015-2020, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2020 - 2021

No	Uraian	Tahun Renja	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	135 usulan	130 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	121 usulan	128 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	89,63%	98,46%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 98,46% telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) yang sebesar 89,63%.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Gajahmungkur tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gajahmungkur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;

- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:

- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis

teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga

- 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh,

melalui upaya-upaya:

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
- 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:

- 1) Konservasi sumber daya air
- 2) Pendayagunaan sumber daya air
- 3) Pengendalian daya rusak air

f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
- 2) Optimalisasi barang milik daerah

b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
- 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
- 3) Optimalisasi BUMD

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
- 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gajahmungkur mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”.

Untuk selanjutnya, review terhadap RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00. 10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR			33.350.181.442	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR			33.350.181.442
07.01	KECAMATAN			33.350.181.442	KECAMATAN			33.350.181.442
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.741.415.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.741.415.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	62.020.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	62.020.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	62.020.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	62.020.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	1.495.855.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	1.495.855.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.495.855.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.495.855.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN DUWUR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN DUWUR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN NGISOR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN NGISOR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GAJAHMUNGKUR	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GAJAHMUNGKUR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGREJO	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGREJO	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. LEMPONGSARI	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. LEMPONGSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PETOMPON	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PETOMPON	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMPANGAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMPANGAN	12 Laporan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDUNGAN	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDUNGAN	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.183.540.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.183.540.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.183.540.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.183.540.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	18.434.750.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	18.434.750.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	100 %	10.816.250.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	100 %	10.816.250.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	175.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	175.500.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR	17 Unit	8.875.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR	17 Unit	8.875.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN	13 Unit	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		NGISOR				NGISOR		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4 Pokmas/ Ormas	1.765.750.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4 Pokmas/ Ormas	1.765.750.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN NGISOR	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN NGISOR	4 Pokmas/ Ormas	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. LEMPONGSARI	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. LEMPONGSARI	4 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN	4 Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4 Pokmas/ Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4 Pokmas/ Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	7.618.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	7.618.500.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.572.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.572.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9 Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGREJO	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGREJO	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9 Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	46.300.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	46.300.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	79.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	79.800.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Persen	79.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Persen	79.800.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	79.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	79.800.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 %	77.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 %	77.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100 %	77.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100 %	77.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	77.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	77.000.000
	NON URUSAN				NON URUSAN			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.017.216.442	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.017.216.442

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	KABUPATEN/KOTA				KABUPATEN/KOTA			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	100 %	28.696.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	100 %	28.696.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	10.735.399.442	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	10.735.399.442
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	10.332.283.442	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	10.332.283.442
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	396.381.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	396.381.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 %	584.822.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 %	584.822.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.925.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.925.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	106.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	106.250.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.936.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.936.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	128.879.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	128.879.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	236.907.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	236.907.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	71.298.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	71.298.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	71.298.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	71.298.000

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	198.926.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	198.926.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.500.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.426.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.426.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	398.075.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	398.075.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	149.325.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.325.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000
	JUMLAH			33.350.181.442				33.350.181.442

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya, sebagaimana tersaji pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Semarang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	KELURAHAN KARANGREJO				
1	Rehab Kantor Kelurahan	Jl. Karangrejo Tengah No. 19	Meningkatnya kualitas gedung kantor	1 Unit	DINAS PENATAAN RUANG
2	Rehab Balai Kelurahan	Jl. Karangrejo Tengah No. 19	Meningkatnya kualitas balai kelurahan	1 Unit	DINAS PENATAAN RUANG
3	Pembuatan Lapangan Volley Indoor	Jl. Karangrejo	Tersedianya sarpras olah raga yang memadai	1 Unit	DINAS PENATAAN RUANG
4	Pembuatan Taman	Jl. Telaga Bodas	Tersedianya sarpras publik yang memadai	1 Paket	DINAS PENATAAN RUANG
5	Pengaspalan	Jl. Karangbendo	Meningkatnya kualitas jalan	1 Paket	DINAS PENATAAN RUANG
6	Pelatihan Keterampilan Baik dibidang Jasa dan Pelatihan Kuliner Era Milenial	Balai Kelurahan Karangrejo	Meningkatnya keterampilan berwira usaha	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	KELURAHAN BENDAN NGISOR				
7	Pelatihan Manajemen Koperasi	Balai Kelurahan Bendan Ngisor	Meningkatnya keterampilan berwira usaha	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
8	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	Balai Kelurahan Bendan Ngisor	Meningkatnya keterampilan berwira usaha	1 Kegiatan	DINAS PERIKANAN
9	Sosialisasi Perijinan Sertifikasi Halal	Balai Kelurahan Bendan Ngisor	Meningkatnya keterampilan berwira usaha	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
10	Pelatihan Membuat Aneka Kue Lebaran	Balai Kelurahan Bendan Ngisor	Meningkatnya keterampilan berwira usaha	1 Kegiatan	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	Permintaan Bantuan Tong Sampah, Gerobak Sampah, Becak Sampah untuk 5 RW & Pohon Turus Jalan (Pohon Pule)	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04 & RW 05	Tersedianya sarpras kebersihan yang memadai	5 Paket	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Paket Pembuatan Saluran Air Sepanjang Jl.Lamongan Raya Sisi Timur dan Barat	Jl. Lamongan Raya Kelurahan Bendan Ngisor & Kelurahan Sampangan	Meningkatnya kualitas saluran	7200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
KELURAHAN LEMPONGSARI					
13	Normalisasi Sungai	Jalan Menoreh Raya	Berfungsinya sungai dengan maksimal	4000 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	Perbaikan Gedung Kantor dan Balai kelurahan	Jalan Menoreh Raya	Meningkatnya kualitas gedung kantor dan balai kelurahan	500 m2	DINAS PENATAAN RUANG
KELURAHAN GAJAHMUNGKUR					
15	Pengecoran Jalan	Jl. Cikuray Raya (Gapura Merapi sampai batas RW. 05)	Meningkatnya kualitas jalan	2000 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Renovasi Total Kantor Kelurahan, Balai dan Rumah Dinas Lurah Gajahmungkur	Jl. Merapi No. 2A	Meningkatnya kualitas Gedung Kantor, Balai dan Rumah Dinas kelurahan	800 m2	DINAS PENATAAN RUANG
KELURAHAN LEMPONGSARI					
17	Pembangunan Talud	PDAM	Meningkatnya kualitas talud	240,8 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	KELURAHAN PETOMPON				
18	Pekerjaan Saluran	Jl. Kelud Raya	Meningkatnya kualitas saluran	840 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
	KELURAHAN BENDUNGAN				
19	Renovasi Kantor Dan Balai Kelurahan Bendungan	S.Parman 12 B	Meningkatnya kualitas gedung kantor dan balai kelurahan Bendungan	3750 m2	DINAS PENATAAN RUANG
20	Renovasi Rumah Dinas Kelurahan Bendungan	Jl Sumbing	Meningkatnya kualitas rumah dinas kelurahan Bendungan	80 m2	DINAS PENATAAN RUANG
21	Bazar Ramadhan	Balai Kelurahan Bendungan	Meningkatnya perekonomian	1 Kegiatan	DINAS KETAHANAN PANGAN
22	Extreme Sport Ville (Desa Olah Raga Ekstrim)	Wilayah Kelurahan Bendungan	Meningkatnya perekonomian dan destinasi wisata	1 Kegiatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	KELURAHAN KARANGREJO				
23	Pengaspalan	Jl. Karangbendo (Dpn Rumah Bp. Imron Sampai Rmh Bp. Sartono)	Meningkatnya kualitas jalan	1 Paket	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
	KELURAHAN BENDAN DUWUR				
24	Pengaspalan Jalan	Jl.Talang Sendang I Dan Ii	Meningkatnya kualitas jalan	500 m ¹	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
25	Pembangunan Talud Jalan	Jl. Talangsari	Meningkatnya kualitas talud	300 m ¹	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
26	Pembangunan Talud Jalan	Jl.Talangsari	Meningkatnya kualitas talud	300 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
	KELURAHAN BENDAN NGISOR				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
27	Pelebaran Jembatan	Jl. Lamongan II	Meningkatnya kualitas jembatan	30 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
28	Pembuatan Sumur Resapan & Pembuatan Jamban Komunal di Wilayah RW 01 s.d RW 05	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05	Tersedianya sarpras sumur resapan dan jamban komunal yang memadai	1 Paket	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
29	Paket Renovasi Pagar Makam Bendan Ngisor (Pagar Makam Keliling, Gapura Makam, Penerangan Jalan Umum Makam)	RW. 05	Meningkatnya kualitas pagar dan tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
	KELURAHAN SAMPANGAN				
30	Pengaspalan Jalan	Jalan Menoreh Tengah VIII	Meningkatnya kualitas jalan	720 m2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
31	Renovasi lapangan Sepakbola	Jalan menoreh Utara	Meningkatnya kualitas sarpras olah raga	600 m2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
32	Pengaspalan Jalan	Jalan Menoreh Utara IV	Meningkatnya kualitas jalan	1000 m2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
33	Pengaspalan Jalan	Jalan Kendeng Barat	Meningkatnya kualitas jalan	1200 m2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
	KELURAHAN LEMPONGSARI				
34	Pembangunan Talud	Lempongsari depan ruman Bp. Jajok sampai rumah Bp. Yadi	Meningkatnya kualitas talud	30 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
35	Pembangunan Talud	Jl. Lemponsari belakang rumah Bp. Simin sampai belakang rumah Bu Lintang	Meningkatnya kualitas talud	40 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
36	Pembangunan talud jalan dan talud saluran	lemponsari depan rumah Bp. Umar Said	Meningkatnya kualitas talud	30 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
37	Pembangunan talud lanjutan	Lemponsari samping rumah Bp. Aris	Meningkatnya kualitas talud	216 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
38	Pembangunan Talud	Lemponsari rumah Bp. Tarkam, Sri Subandini	Meningkatnya kualitas talud	275,45 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
39	Renovasi Kampung Tematik	Lemponsai Kali Kotak	Meningkatnya kualitas sarpras kampung tematik	1 Paket	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
KELURAHAN PETOMPON					
40	Pemasangan PJU	JL. Tampomas Selatan I	Tersedianya penerangan jalan umum	100 titik	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
41	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Kelud Selatan	Meningkatnya kualitas jalan	500 meter	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
KELURAHAN BENDUNGAN					
42	Revitalisasi Taman Ngaglik / Taman Dinosaurus	S. Parman	Meningkatnya kualitas taman/sarpras umum	1 Paket	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
43	Pembangunan Talud di Pura Girinatha	Kintelan	Meningkatnya kualitas talud	1 Paket	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023
(Sumber: RPJMN tahun 2020-2024)

Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung

PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan

PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan

PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi

PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi

PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8

- 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023
74,05-82,43
- 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target
2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP 1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP 6 Penguatan Kemiskinan
 - PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
 - PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.

PP 1 Konsolidasi Demokrasi

PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

PP 3 Penegakan Hukum Nasional

PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan tahun 2021 beberapa target nasional tersebut telah terlampaui, seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,55 dan Tingkat Kemiskinan sebesar 4,56 %. Sedangkan untuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,54 % belum mencapai target nasional, namun diharapkan akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2022.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;

b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;

f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;

g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;

- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Gajahmungkur juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 7,48- 6,48 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,30;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6- 6,0 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 45,35 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,56;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,25;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,26;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,15.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan akhir tahun 2021 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui.

Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,55, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,67. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,56 %, menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16 %, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,78, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,54 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 59,60. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi keempat indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021- 2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 IV.2
- Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan %	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2022
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	93.00
	Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71.00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1.00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2022
	Publik			
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	40.00
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	60.00

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase capaian indikator tujuan	%	94,00
SASARAN Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	85,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	45,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	65,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2023 berdasarkan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nomenklatur Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00. 10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN DUWUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN NGISOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. LEMPONGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PETOMPON

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMPANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDUNGAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN NGISOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN NGISOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. LEMPONGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program dengan 7 indikator program.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan.
3. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **34.158.653.000,-** yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Sedangkan rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 (empat) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 (tujuh) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.350.181.442,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 12.017.216.442,- (dua belas milyar tujuh belas juta dua ratus enam

belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

- b. Rp. 21.332.965.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Gajahmungkur sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rancangan Program / Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR			33.350.181.442		31.946.589.000
07.01	KECAMATAN			33.350.181.442		31.946.589.000
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.741.415.000	94 %	3.151.169.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	62.020.000	100 %	120.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	62.020.000	4 Dokumen	120.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	1.495.855.000	100 %	1.845.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.495.855.000	12 Laporan	1.845.000.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN DUWUR	12 Laporan		12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN NGISOR	12 Laporan		12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GAJAHMUNGKUR	12 Laporan		12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGREJO	12 Laporan		12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. LEMPONGSARI	12 Laporan		12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PETOMPON	12 Laporan		12 Laporan	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMPANGAN	12 Laporan		12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDUNGAN	12 Laporan		12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.183.540.000	100 %	1.186.169.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.183.540.000	1 Laporan	1.186.169.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	18.434.750.000	97 %	17.766.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	100 %	10.816.250.000	100 %	17.572.800.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	175.500.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR	17 Unit	8.875.000.000	17 Unit	9.801.280.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11 Unit		11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN NGISOR	13 Unit		13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13 Unit		13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12 Unit		12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13 Unit		13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10 Unit		10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16 Unit		16 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13 Unit		13 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4 Pokmas/ Ormas	1.765.750.000	4 Pokmas/ Ormas	7.671.520.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024		
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN NGISOR	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. LEMPONGSARI	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN	4	Pokmas/ Ormas		4	Pokmas/ Ormas

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4 Pokmas/ Ormas		4 Pokmas/ Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100 %	7.618.500.000	100 %	194.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4 Lembaga Kemasyar akatan	7.572.200.000	4 Lembaga Kemasyar akatan	174.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9 Lembaga Kemasyar akatan		9 Lembaga Kemasyar akatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9 Lembaga Kemasyar akatan		9 Lembaga Kemasyar akatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9 Lembaga Kemasyar akatan		9 Lembaga Kemasyar akatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGREJO	9 Lembaga Kemasyar akatan		9 Lembaga Kemasyar akatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9 Lembaga Kemasyar akatan		9 Lembaga Kemasyar akatan	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024			
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON	9	Lembaga Kemasyarakatan		9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9	Lembaga Kemasyarakatan		9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9	Lembaga Kemasyarakatan		9	Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	46.300.000	2	Laporan	20.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	%	79.800.000	15	%	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35	Persen	79.800.000	35	Persen	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	79.800.000	16	Laporan	0

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 %	77.000.000	85 %	30.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100 %	77.000.000	100 %	30.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	77.000.000	100 Orang	30.000.000
	NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.017.216.442	100 %	10.998.620.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %		100 %	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %		100 %	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	100 %	28.696.000	100 %	31.750.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000	3 Dokumen	7.525.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000	1 Dokumen	4.750.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000	1 Dokumen	4.750.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000	1 Dokumen	3.350.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000	1 Dokumen	3.350.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000	1 Laporan	2.675.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000	2 Laporan	5.350.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	10.735.399.442	100 %	9.918.870.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	10.332.283.442	74 Orang/bulan	9.626.980.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	396.381.000	12 Dokumen	280.680.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000	1 Laporan	3.260.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000	1 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000	1 Dokumen	1.950.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec. Gajahmungkur	100 %	584.822.000	100 %	507.810.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.925.000	6 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	106.250.000	10 Paket	60.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.000.000	12 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.936.000	6 Paket	12.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000	12 Laporan	100.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	128.879.000	10 Laporan	125.810.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	236.907.000	5 Dokumen	130.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	71.298.000	100 %	15.000.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	71.298.000	57 Unit	15.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	198.926.000	100 %	235.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.500.000	12 Laporan	160.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.426.000	12 Laporan	75.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	398.075.000	100 %	290.190.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000	12 Unit	140.190.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.325.000	2 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000	2 Unit	50.000.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000	1 Unit	50.000.000
	JUMLAH			33.350.181.442		31.946.589.000

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 sesuai RKPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR			33.350.181.442
07.01	KECAMATAN			33.350.181.442
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 %	2.741.415.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	62.020.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	62.020.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	1.495.855.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.495.855.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN DUWUR	12 Laporan	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDAN NGISOR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GAJAHMUNGKUR	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGREJO	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. LEMPONGSARI	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PETOMPON	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMPANGAN	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BENDUNGAN	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.183.540.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.183.540.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	18.434.750.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	100 %	10.816.250.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakan	175.500.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN DUWUR	17	Unit	8.875.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	11	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDAN NGISOR	13	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAJAHMUNGKUR	13	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGREJO	12	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. LEMPONGSARI	13	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PETOMPON	10	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMPANGAN	16	Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BENDUNGAN	13	Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4	Pokmas/ Ormas	1.765.750.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN DUWUR	4	Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDAN NGISOR	4	Pokmas/ Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAJAHMUNGKUR	4	Pokmas/ Ormas	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGREJO	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. LEMPONGSARI	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PETOMPON	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMPANGAN	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BENDUNGAN	4	Pokmas/Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100	%	7.618.500.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	Lembaga Kemasyarakatan	7.572.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN DUWUR	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDAN NGISOR	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAJAHMUNGKUR	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGREJO	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. LEMPONGSARI	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PETOMPON	9	Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMPANGAN	9	Lembaga Kemasyarakan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BENDUNGAN	9	Lembaga Kemasyarakan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	46.300.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %		79.800.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35	Persen	79.800.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	79.800.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 %		77.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100	%	77.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	77.000.000
	NON URUSAN				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %		12.017.216.442
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	%	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	100 %	28.696.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	10.735.399.442
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	10.332.283.442
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	396.381.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 %	584.822.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.925.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	106.250.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.936.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	128.879.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	236.907.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	71.298.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	71.298.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 %	198.926.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.500.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.426.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 %	398.075.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Daerah			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.325.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000
	JUMLAH			33.350.181.442

Adapun Program Kegiatan tahun 2023 yang merupakan Program Kegiatan Prioritas dan berkelanjutan adalah :

1. Kegiatan pengembangan budaya inovasi pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan pada tahun 2022 dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Semarang melanjutkan program ini di tahun 2023.
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui Board Learning Center (BLC).
4. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2023. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.

5. Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Forkopimcam. Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.

Keanggotaan forkopimcam berasal dari 3 unsur sebagai berikut:

- 1) Camat, sebagai ketua.
- 2) Kepolisian di kecamatan, sebagai anggota.
- 3) Pimpinan Kewilayahan TNI di kecamatan, sebagai anggota.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam. Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB V

P E N U T U P

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gajahmungkur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gajahmungkur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

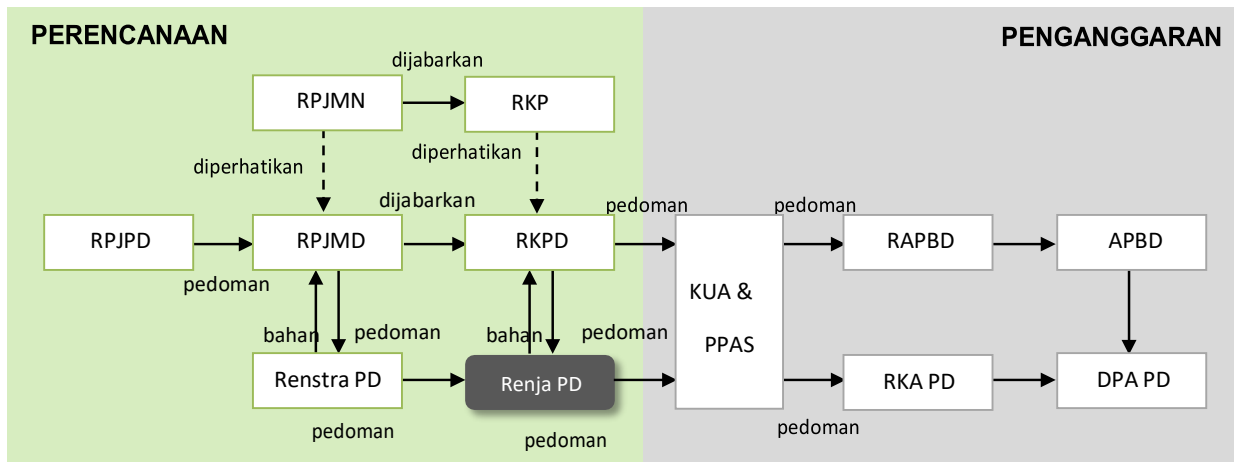
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerha Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Tembalang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembalang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Tembalang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Tembalang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

- Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan

Tembalang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target – target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG

KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Tembalang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Tembalang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Tembalang melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 55.966.936.071. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 52.260.307.777 atau sebesar 93,38%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 – 2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kecamatan Tembalang

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00	-	85.00%	100.00	100	90,00%	90,00%	100
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Tembalang)	209.968	35.498	35.125	33.755	96,10	-	-	-
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100 kelurahan	3 kelurahan	2 kelurahan	0 kelurahan	0	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan (Tembalang)	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Tembalang)	12 kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan	100	-	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan						1 Angka	1 Angka	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100			
		Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat	-	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	-	100%	102.90	102.90			
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	102,90	102.90			
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	2 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	24.000 Pelayanan	-	24.000 Pelayanan	33.755 Pelayanan	173	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	4 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kantor Kelurahan Sendangmulyo								
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00 %		100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00 %		100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00 %		100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00 %		100.00 %	100.00	100	100%	100%	100
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	-	-	-	-	-	100%	100%	100
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	-	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	-	100%	100	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	-	100%	91,97%	91,97			
		Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani	100%	-	100%	100	100	-	-	-
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	100%	100	100
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95%	-	95%	56	58,95	97,00%	97%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan (Tembalang)	19.954 Kegiatan	-	1.032 Kegiatan	962 kegiatan	93,22	-	-	-
		persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (Tembalang)	55%	-	55%	56	101,82	-	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	-	100%	97,59%	97,59			
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						410 kegiatan	410 kegiatan	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	-	100%	100%	100			
		Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	230 Lokasi		230 Lokasi	230 Lokasi	100	-	-	-
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah	-	-	-	-	-	410 Angka	481 Angka	117

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	-	100%	99.38%	99,38			
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	65 Paket	-	65 Paket	65 Paket	100	10 kegiatan	10 kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	65.00 paket	-	65 paket	65.00	100	17 kegiatan	17 kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Meteseh	18.00 paket kegiatan	-	18 paket kegiatan	18.00	100	23 kegiatan	23 kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	10.00 paket kegiatan	-	10 paket kegiatan	10.00	100	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Mangunharjo								
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tandang	14.00 paket kegiatan	-	14 paket kegiatan	14.00	100	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo	14.00 paket kegiatan	-	14 paket kegiatan	14.00	100	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jangli	10.00 paket kegiatan	-	10 paket kegiatan	10.00	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	10.00 paket kegiatan	-	10 paket kegiatan	10.00	100	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kedungmundu								
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembalang	7.00 paket kegiatan	-	7 paket kegiatan	7.00	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo	22.00 paket kegiatan	-	22 paket kegiatan	22.00	100	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bulusan	9.00 paket kegiatan	-	9 paket kegiatan	9.00	100	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramas	6.00 paket kegiatan	-	6 paket kegiatan	5.00	100	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rowosari	12.00 paket kegiatan	-	12 paket kegiatan	12.00	100	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambiroto	9.00 paket kegiatan	-	9 paket kegiatan	9.00	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	-	100%	94,06	94,06			
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Meteseh	88.00 kegiatan	-	88 kegiatan	17.00	100	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	81.00 kegiatan	-	81 kegiatan	80.00	100	94 Kegiatan	94 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tandang	82.00 kegiatan	-	82 kegiatan	79.00	100	95 Kegiatan	95 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo	86.00 kegiatan	-	86 kegiatan	77.00	100	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jangli	86.00 kegiatan	-	86 kegiatan	82.00	100	91 kegiatan	91 kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedungmundu	87.00 kegiatan	-	87 kegiatan	81.00	100	96 Kegiatan	96 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembalang	81.00 kegiatan	-	81 kegiatan	75.00	100	95 Kegiatan	95 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo	77.00 kegiatan	-	77 kegiatan	79.00	100	86 Kegiatan	86 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bulusan	85.00 kegiatan	-	85 kegiatan	72.00	100	90 Kegiatan	90 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramas	81.00 kegiatan	-	81 kegiatan	80.00	100	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rowosari	93.00 kegiatan		93 kegiatan	79.00	100	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambiroto	84.00 kegiatan	-	84 kegiatan	84.00	100	92 Kegiatan	92 Kegiatan	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	-	-	-	-	-	29 Dokumen	29 Dokumen	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	15 Kegiatan	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	-	-	-	-	-	29 Dokumen	29 Dokumen	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan(jml bidang tanah)	3 bidang	-	3 bidang	3 bidang	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	-	-	-	-	-	1 kelurahan	1 kelurahan	100
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	10.00 %	10.00 %	100
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		-				38 Angka	35 Angka	92,11

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	100%	100			
		Persentase jumlah siskamling yang ada di lingkungan RT	90%	-	90%	91%	101	-	-	-
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	5 kegiatan	5 kegiatan	100
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	65%	65%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
	KABUPATEN/KOTA									
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN TEMBALANG)	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN TEMBALANG)	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	85,71	85,71			
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Tembalang	-	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100			
		Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	-	100%	100%	100			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	-	100%	100%	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	100.00%	100			
		Penyusunan LKPJ dan LKJIP Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-	100%	100	100			
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Tembalang		-	-	-	-	100%	100%	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	-	100%	100%	100			
		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	100%	100%	100			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		100%	-	100%	100%	100			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
	Tugas ASN									
		Target kinerja dan ikhtisar KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	-	-	-	-	-	100%	100	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	-	100%	100%	100			
		Jumlah Dokumen CALK	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	-	100%	98,81	98,81			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah Dokumen Prognosis	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100			
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Tembalang	-	-	-	-	-	100%	100%	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	-	100%	100.00%	100			
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100	10 Jenis	10 Jenis	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	100%	100.00%	100			
		Penyediaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100.00 %	-	100.00 %	100.00	100			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	-	100%	100.00%	100			
		Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan dan	100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100			

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kelurahan)								
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	-	100%	100.00%	100			
		Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100			
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan Tembalang)	100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100	-	-	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	-	100%	100.00%	100			
		Jamuan Rapat dan Kegiatan	100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100	-	-	-
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	100%	-	100%	91.67%	91,67	3000 Orang	3000 Orang	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100			
		Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilakukan	100.00 %	-	100.00 %	75.00	75	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100.00%	100	-	-	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100.00 %	-	100.00 %	100.00%	100			
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	-	100%	100.00%	100	3 Jenis	3 Jenis	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	90%	90			
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Tembalang	-	-	-	-	-	100%	100%	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	100%	90%	90	1 Jenis	1 Jenis	100
		Peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	-	100%	90%	90	4 Jenis	4 Jenis	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100	100%	100	100
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Tembalang	-	-	-	-	-	100%	100%	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	100%	100%	100			
		Langganan rekening telepon air listrik dan koran	100%	-	100%	100%	100			
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-						
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	80%	80	100%	100%	100
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Tembalang	-	-	-	-	-	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	-	100%	100%	100			
		Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	-	100%	100%	100	20 Unit	20 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100			
		Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100			
		Kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Pemeliharaan rumah dinas camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	-	-	24 Jenis	24 Jenis	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100			
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100	-	-	-
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Tembalang Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 4 Program, 12 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator melampaui target, 6 indikator memenuhi target, 1 indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan 5 Program dengan 7 indikator program, 13 Kegiatan dengan 15 indikator kegiatan, dan 74 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra dan 1 Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Tahun 2021

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
KECAMATAN TEMBALANG	55.966.936.071	52.260.307.777	93,38%
JUMLAH	55.966.936.071	52.260.307.777	93,38%

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan pada Urusan Wajib
Kewilayahan Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Urusan Penunjang Kewilayahan	55.966.936.071	52.260.307.777	93,38	3.706.628.294
	OPD : Kecamatan Tembalang				

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.182.892.921	16.090.810.702	93,64	1.092.082.219
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.642.000	17.870.900	58,32	12.771.100
7.01.01.2.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	622.000	515.900	82,94	106.100
7.01.01.2.01.02	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.422.350	4.642.000	44,54	5.780.350
7.01.01.2.01.03	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.042.550	4.162.000	59,10	2.880.550
7.01.01.2.01.04	d Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.445.100	1.680.000	37,79	2.765.100
7.01.01.2.01.05	e Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.240.000	3.907.000	92,15	333.000
7.01.01.2.01.06	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	500.000	100,00	0
7.01.01.2.01.07	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.370.000	2.464.000	73,12	906.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.485.926.071	12.690.201.451	94,10	795.724.620
7.01.01.2.02.01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.871.638.071	12.107.176.951	94,06	764.461.120
7.01.01.2.02.02	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	607.790.000	576.940.000	94,92	30.850.000
7.01.01.2.02.05	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.388.000	4.984.500	92,51	403.500
7.01.01.2.02.08	d Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.110.000	1.100.000	99,10	10.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.363.963.880	2.142.404.886	90,63	221.558.994
7.01.01.2.06.01	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.400	7.430.000	95,25	370.400
7.01.01.2.06.02	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.228.860	41.139.750	93,02	3.089.110
7.01.01.2.06.04	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.875.400	35.512.796	96,30	1.362.604
7.01.01.2.06.05	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.502.000	13.572.000	37,18	22.930.000
7.01.01.2.06.08	e Fasilitasi Kunjungan Tamu	167.500.000	91.235.340	54,47	76.264.660
7.01.01.2.06.09	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.910.000	106.515.000	72,01	41.395.000
7.01.01.2.06.11	g Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.923.147.220	1.847.000.000	96,04	76.147.220
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.939.070	35.800.000	87,45	5.139.070
7.01.01.2.07.06	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.939.070	35.800.000	87,45	5.139.070
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.173.200	75.302.276	90,54	7.870.924
7.01.01.2.08.02	a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.173.200	75.302.276	90,54	7.870.924
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.178.248.700	1.129.231.189	95,84	49.017.511
7.01.01.2.09.02	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.460.000	139.173.400	80,70	33.286.600
7.01.01.2.09.09	b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	425.700.700	423.360.000	99,45	2.340.700
7.01.01.2.09.10	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	532.568.000	519.177.789	97,49	13.390.211
7.01.01.2.09.11	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.520.000	47.520.000	100,00	0
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.044.138.050	17.183.408.562	90,23	1.860.729.488
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.120.500	40.340.000	20,89	152.780.500

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
7.01.02.2.01.02	a Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.120.500	40.340.000	20,89	152.780.500
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.319.546.083	16.670.479.862	91,00	1.649.066.221
7.01.02.2.02.03	a Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.052.915.543	954.466.189	90,65	98.449.354
7.01.02.2.02.03	b Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Meteseh)	2.900.285.200	2.648.464.925	91,32	251.820.275
7.01.02.2.02.03	c Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	1.108.817.886	1.009.706.060	91,06	99.111.826
7.01.02.2.02.03	d Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tandang)	1.793.552.196	1.641.046.593	91,50	152.505.603
7.01.02.2.02.03	e Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangguwo)	1.675.226.240	1.523.055.408	90,92	152.170.832
7.01.02.2.02.03	f Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jangli)	695.169.901	621.217.529	89,36	73.952.372
7.01.02.2.02.03	g Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungmundu)	1.095.781.500	994.273.978	90,74	101.507.522
7.01.02.2.02.03	h Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tembalang)	605.487.700	551.838.440	91,14	53.649.260
7.01.02.2.02.03	i Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangmulyo)	3.979.432.896	3.641.998.631	91,52	337.434.265
7.01.02.2.02.03	j Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulusan)	721.312.600	645.692.035	89,52	42.720.746
7.01.02.2.02.03	k Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kramas)	482.915.700	440.194.954	91,15	67.857.213
7.01.02.2.02.03	l Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	768.381.596	700.524.383	91,17	142.266.388
7.01.02.2.02.03	m Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambiroto)	1.440.267.125	1.298.000.737	90,12	142.266.388
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	531.471.467	472.588.700	88,92	58.882.767
7.01.02.2.04.03	a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	531.471.467	472.588.700	88,92	58.882.767
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.449.055.100	18.714.036.943	96,22	735.018.157
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19.191.792.457	18.483.435.243	96,31	708.357.214
7.01.03.2.02.01	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.679.200	36.550.000	99,65	129.200
7.01.03.2.02.02	b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.686.200.000	6.649.848.000	99,46	36.352.000
7.01.03.2.02.02	c Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	1.159.994.985	1.151.890.000	99,30	8.104.985
7.01.03.2.02.02	d Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	603.073.489	599.786.000	99,45	3.287.489
7.01.03.2.02.02	e Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tandang)	1.308.574.739	1.301.840.000	99,49	6.734.739
7.01.03.2.02.02	f Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	1.009.312.485	1.003.302.000	99,40	6.010.485

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
7.01.03.2.02.02	g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jangli)	560.170.859	556.755.000	99,39	3.415.859
7.01.03.2.02.02	h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	535.313.785	531.876.000	99,36	3.437.785
7.01.03.2.02.02	i	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	584.775.435	580.999.000	99,35	3.776.435
7.01.03.2.02.02	j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	1.574.461.514	1.565.311.500	99,42	9.150.014
7.01.03.2.02.02	k	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	678.097.185	673.930.000	99,39	4.167.185
7.01.03.2.02.02	l	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kramas)	491.723.191	486.875.000	99,01	4.848.191
7.01.03.2.02.02	m	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	810.889.739	805.555.000	99,34	5.334.739
7.01.03.2.02.02	n	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	648.755.410	645.048.000	99,43	3.707.410
7.01.03.2.02.03	o	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	751.944.625	567.708.500	75,50	184.236.125
7.01.03.2.02.03	p	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	153.997.315	116.852.121	75,88	37.145.194
7.01.03.2.02.03	q	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	137.286.125	114.724.250	83,57	22.561.875
7.01.03.2.02.03	r	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)	164.990.565	101.431.415	61,48	63.559.150
7.01.03.2.02.03	s	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	154.988.775	78.897.462	50,91	76.091.313
7.01.03.2.02.03	t	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)	135.036.740	98.208.290	72,73	36.828.450
7.01.03.2.02.03	u	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	143.932.215	87.329.600	60,67	56.602.615
7.01.03.2.02.03	v	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	142.529.365	130.961.937	91,88	11.567.428
7.01.03.2.02.03	w	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	137.353.090	115.649.600	84,20	21.703.490
7.01.03.2.02.03	x	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	138.217.715	108.726.030	78,66	29.491.685
7.01.03.2.02.03	y	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)	150.907.781	110.879.427	73,47	40.028.354
7.01.03.2.02.03	z	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	159.651.165	154.822.840	96,98	4.828.325
7.01.03.2.02.03	aa	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	132.934.965	107.678.271	81,00	25.256.964
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		257.262.643	230.601.700	89,64	26.660.943
7.01.03.2.03.01	a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.256.510	73.201.700	73,75	26.054.810
7.01.03.2.03.04	b	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	158.006.133	157.400.000	99,62	606.133
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		290.850.000	272.051.570	93,54	18.798.430
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		290.850.000	272.051.570	93,54	18.798.430
7.01.04.2.03.01	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	290.850.000	18.798.430	93,54	18.798.430

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebesar Rp 55.966.936.071. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 52.260.307.777 dengan sisa sebesar Rp 3.706.628.294 (6,62%) dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp. 36.862.399.272, realisasi sebesar Rp. 33.340.452.527 (90,45%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.521.946.745.
- b. **Belanja Modal**, anggaran sebesar Rp. 19.104.536.799 Dengan realisasi sebesar Rp. 18.919.855.250 (99,03%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 184.681.549.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- 3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tembalang dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; Camat
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang-barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan

- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;

- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolah, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;

- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;

- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan,

- kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
 - o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
 - p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
 - q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
 - s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;

- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- aa. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- bb. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- cc. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang adalah melaksanakan fungsi sebagai bagian wilayah dari daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		73%	75%	-	-	72%	75%	-	-
Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan		69%	75%	-	-	70%	75%	-	-

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
		IKK	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan									
Tujuan : Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85%	87%	-	-	81%	94%	-	-
Sasaran :										
2. Meningkatkan manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan		100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan		97%	98%	-	-	98%	98%	-	-
Tujuan: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	-	87,50 Angka	88 Angka	-	-	88 Angka	88,35 Angka
Sasaran:										
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		-	-	71,50	72	-	-	72	72,50
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan		-	-	1 Angka	1 Angka	-	-	1 Angka	1 Angka
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		-	-	80%	84%	-	-	97%	97%
4. Meningkatkan wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	35%	40%	-	-	33%	35%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan		-	-	30%	40%	-	-	30%	40%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat”, dimana realisasinya sebesar 75% dari target sebesar 75%;
 - Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 75% dari target sebesar 75%.
- b. Tujuan **“Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 94%;
 - Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan” dan “Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% & 98% dan 98%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai bagian wilayah dari Kota Semarang pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan serta Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum juga dapat dilihat dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	-

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Tembalang di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2016-2021 menggunakan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2015-2020, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen kecuali jika ada perubahan RPJMD Kota Semarang akan diikuti dengan perubahan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 - 2022

No	Uraian	Tahun Renja	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	1022 usulan	978 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	461 usulan	481 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	45%	49%

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 49% telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 45%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Tembalang juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			Realisasi 2021	Target 2022
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	75	91,56
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	94	
3	Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang	%	94	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			Realisasi 2021	Target 2022
4	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang	%	90	
5	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang	%	72	
6	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%		86,68
7	Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%		91
8	Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%		97
9	Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%		11,14

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tembalang sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan

- a) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan

Tembalang tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- b) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- c) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- d) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2. Peluang

- a) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.

- b) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- c) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

- d) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3. Permasalahan
- a) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
 - b) Belum Optimalnya sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Kecamatan Tembalang pada level bawah;
 - c) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
 - d) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Tembalang;
 - e) Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif;
 - g) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
 - h) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - i) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2023, antara lain:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024
Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)
Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.
3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam

mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klusterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Tembalang yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TEMBALANG								59.760.618.417				58.135.219.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00	Persen					2.931.990.000		92	persen	3.652.023.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan				63.500.000		1	Angka	80.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	63.500.000	APBD Kota Semarang	4	Dokumen	80.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan				1.888.140.000		100	Persen	2.570.023.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	1.888.140.000	APBD Kota Semarang	100	Persen	2.570.023.000
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN SENDANGMULYO			100	Persen	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN METESEH			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN MANGUNHARJO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN TANDANG			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN SENDANGGUWO			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN JANGLI			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU			100.00	Persen	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN TEMBALANG			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN BULUSAN			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN KRAMAS			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN ROWOSARI			100.00	Persen	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KELURAHAN SAMBIROTO			100.00	Persen	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				980.350.000		100	Persen	1.002.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	980.350.000	APBD Kota Semarang	3	Kegiatan	1.002.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persen					41.619.350.000		99	Persen	39.321.720.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415.00	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan				17.841.150.000		420	Kegiatan	39.166.720.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415.00	Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	82.150.000	APBD Kota Semarang	420	Angka	80.720.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	18.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit	KECAMATAN TEMBALANG	15.466.000.000	APBD Kota Semarang	19	Kegiatan	17.673.000.000
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	18	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit	KELURAHAN MANGUNHARJO			19	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	24	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23.00	Unit	KELURAHAN METESEH			25	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	22	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit	KELURAHAN TANDANG			23	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit	KELURAHAN SENDANGGUWO			18	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	16	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit	KELURAHAN JANGLI			17	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit	KELURAHAN KEDUNGUNDU			18	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	16	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit	KELURAHAN TEMBALANG			17	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	20	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22.00	Unit	KELURAHAN SENDANGMULYO			21	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	17	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit	KELURAHAN BULUSAN			18	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	15	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit	KELURAHAN KRAMAS			16	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	15	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit	KELURAHAN ROWOSARI			16	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	11	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit	KELURAHAN SAMBIROTO			12	Kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KECAMATAN TEMBALANG	2.293.000.000	APBD Kota Semarang	21	Kegiatan	21.413.000.000
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	94	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN METESEH			96	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	96	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN MANGUNHARJO			98	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	97	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN TANDANG			99	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	93	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SENDANGGUWO			95	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	93	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN JANGLI			96	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu	99	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN KEDUNGUNDU			102	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	98	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN TEMBALANG			101	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	88	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SENDANGMULYO			90	Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	92	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN BULUSAN			94	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	94	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN KRAMAS			96	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	98	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN ROWOSARI			100	Kegiatan	
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	94	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	KELURAHAN SAMBIROTO			96	Kegiatan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112.00	Dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan				23.778.200.000				155.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	30.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	23.148.200.000	APBD Kota Semarang	30	Dokumen	105.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN METESEH			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNHARJO			9	Dokumen	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN TANDANG			9	Dokumen	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
		dilaporkan											
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN SENDANGGU WO			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN JANGLI			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN KEDUNGMU DU			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN TEMBALANG			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN SENDANGMU LYO			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN BULUSAN			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN KRAMAS			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN ROWOSARI			9	Dokum en	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyar akatan	KELURAHAN SAMBIROTO			9	Dokum en	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	630.000.000	APBD Kota Semarang	1.00	kegiata n	50.000.000
		Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	Keluraha n							1.00	kelurah an	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	Persen					50.000.000		20	persen	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan				50.000.000		30	Angka	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	50.000.000	APBD Kota Semarang	5	kegiatan	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.00	Persen					96.000.000		75	Persen	61.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	Kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan				96.000.000		3	kegiatan	61.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150.00	Orang	KECAMATAN TEMBALANG	96.000.000	APBD Kota Semarang	2	kegiatan	61.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%					15.063.278.417		100.00	%	15.100.476.000
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%							100.00	%	
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%							100.00	%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.090.000		6.00	Dokumen	29.180.000
		Dokumen pelaporan	3.00	Dokumen							3.00	Dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	300.000	APBD Kota Semarang	2.00	Dokumen	650.000
		Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	1.730.000	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	11.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	2.030.000	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	4.502.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	1.440.000	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	4.608.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	1.750.000	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	4.395.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	440.000	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	525.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	400.000	APBD Kota Semarang	1.00	Dokumen	3.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitration keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan				14.040.888.417		100.00	Persen	13.184.596.000
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	Dokumen							3.00	dokumen	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Orang/bulan	KECAMATAN TEMBALANG	13.420.308.417	APBD Kota Semarang	100.00	persen	12.554.296.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	619.590.000	APBD Kota Semarang	100.00	persen	621.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	330.000	APBD Kota Semarang	1.00	dokumen	7.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	330.000	APBD Kota Semarang	1.00	dokumen	1.150.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	330.000	APBD Kota Semarang	1.00	dokumen	1.150.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah				579.300.000		100.00	persen	967.700.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	KECAMATAN TEMBALANG	20.000.000	APBD Kota Semarang	11.00	jenis	15.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	KECAMATAN TEMBALANG	108.150.000	APBD Kota Semarang	4.00	jenis	150.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	KECAMATAN TEMBALANG	22.700.000	APBD Kota Semarang	26.00	jenis	37.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	KECAMATAN TEMBALANG	4.950.000	APBD Kota Semarang	5.00	jenis	37.505.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2700.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	102.300.000	APBD Kota Semarang	3111.00	orang	139.995.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	267.600.000	APBD Kota Semarang	70.00	kegiatan	188.200.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	KECAMATAN TEMBALANG	53.600.000	APBD Kota Semarang	5.00	jenis	400.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000		100.00	persen	100.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023						Lokasi	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024		
		Indikator Renstra			Indikator Pemutakhiran				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Renstra)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan				Target	Satuan	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	KECAMATAN TEMBALANG	5.000.000	APBD Kota Semarang	4.00	jenis	100.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran				195.000.000		100.00	persen	195.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	120.000.000	APBD Kota Semarang	12.00	bulan	133.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	KECAMATAN TEMBALANG	75.000.000	APBD Kota Semarang	7.00	jenis	62.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	Persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran				235.000.000		100.00	persen	624.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	KECAMATAN TEMBALANG	110.000.000	APBD Kota Semarang	28.00	unit	174.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	KECAMATAN TEMBALANG	110.000.000	APBD Kota Semarang	3.00	gedung	174.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	KECAMATAN TEMBALANG	25.000.000	APBD Kota Semarang	4.00	jenis	50.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	KECAMATAN TEMBALANG	10.000.000	APBD Kota Semarang	3.00	jenis	200.000.000
JUMLAH									59.760.618.417				58.135.219.000

Dari Tabel 2.8 diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 Kecamatan Tembalang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 84 sub kegiatan dengan indikator keluaran yang sesuai dengan Renstra Kecamatan Tembalang Tahun 2021-2026 dan di mix dengan indikator mutakhir sesuai dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rancangan awal kebutuhan anggaran sebesar Rp. 59.760.618.417 dan untuk tahun 2024 direncanakan Rp. 58.135.219.000.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Tembalang diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tembalang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tembalang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Tembalang
Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kampung Tematik Dung tungkul (Meteseh)	Dukuh Rejosari RT.03 RW 10	Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	8 kegiatan	
2	Kampung Tematik Haskar	Gang Bulusari RT.02 RW 03	Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	5 kegiatan	
3	Kampung Tematik Turonggo Seto	Jl. Gondang Timur III RW.02	Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	4 kegiatan	
KELURAHAN BULUSAN					
4	Normaalisasi Saluran	Jalan Gondang Timur V, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200m/ 275.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pengecoran lapangan Volley	Jalan Gondang Timur III, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 240.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Renovasi Balai Kelurahan (Peninggian)	Jalan Gondang Raya, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 600.000.000	Dinas Penataan Ruang
7	Pekerjaan Sumur artetis	Jalan Gondang Timur III, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 210.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
8	Peninggian dan pengaspalan Jalan	Jalan Gondang Raya, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3000 m/ 1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
9	Pembangunan gedung kantor	Jalan Gondang Raya 68, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 1.400.000.000	Dinas Penataan Ruang
10	Pembangunan Jalur Penyelamatan	Jalan Kol Iman Soeparto Tjakrajoeda / sigar bencah, Bulusan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 1.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
KELURAHAN JANGLI					
11	Aspal Jalan dikarenakan jalan berlobang	jl Burangrang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350 m/ 1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
12	Pembangunan Pustu	Jangli Gabeng	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	132 m/ 750.000.000	Dinas Penataan Ruang
13	Talud Tebing	Jl Pancursari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	58 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
KELURAHAN KRAMAS					
14	PEMBANGUNAN SALURAN AIR	JL MULAWARMAN SELATAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500 m/ 400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
15	PEMBANGUNAN SALURAN AIR	JL MULAWARMAN SELATAN (DEPAN PERMATA)	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	162,5 m/ 300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
16	PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN	JL MULAWARMAN UTARA I	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	875 m/ 275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
17	PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN	JL MULAWARMAN UTARA DALAM I	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
18	PEMBANGUNAN PAGAR KELURAHAN	JL MULAWARMAN RAYA	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500 m/ 800.000.000	Dinas Penataan Ruang
19	PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN	TPA BLOK G,O&H	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

KELURAHAN KEDUNGUMUNDU					
20	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kedungmundu		10 Rumah/ 210.000.000	Perlu adanya perbaikan rumah karena rusak dan tidak layak untuk dihuni (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
21	Talud Sungai	Jl. Sinar Lestari	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
22	Pembuatan Talud Makam Khususul Khotimah	Jl. Tegalkangkung	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200 m/ 300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
23	Pembatasan Pagar Wilayah	Jl. Semawis Blok Q	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
24	Pengaspalan jalan	Jl. Gemah Sari Raya Barat	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.200 m/ 202.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
25	Pengaspalan jalan	Jl. Gemahsari IX, X, XI DAN XII	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19.125 m/ 286.875.000	Dinas Pekerjaan Umum
26	Pengaspalan jalan	Jl. Gemahsari II	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.302 m/ 209.250.000	Dinas Pekerjaan Umum
KELURAHAN MANGUNHARJO					
27	Penerangan Jalan ke RSD UNDIP	Mangunharjo	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembuatan Talud Makam/pondasi	Jl. Durenan Indah	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Talud Tebing Lapangan Sepak Bola RW 02	Jl. Durenan Indah	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 350.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pengecoran Jalan Tembus ke UNDIP	Mangunharjo	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
31	Normalisasi Saluran	Jl. Prof Suharso	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	420 m/ 2.184.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
32	Renovasi Balai Kelurahan Mangunharjo Tembalang	Jl. Kopol R Soekanto No. 10	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 300.000.000	Dinas Penataan Ruang
33	GALERI BATIK KAMPUNG TEMATIK BATIK DURENAN INDAH	PERUM DURENAN	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 750.000.000	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN METESEH					
34	Pembangunan Talud Sungai	JL. Dinar Elok	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500 m/ 250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Pavingisasi jalan	Dadapan	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500 m/ 250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
36	Pembangunan Saluran & Pavingisasi Jalan	Bukit Kelapa Gading IV	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600 m/ 300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	RTLH	RW.04, RW.05, RW.07, RW.08 & RW.10	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	20 unit/ 400.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Perbaiki Saluran	Jl. Prof Suharso	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
39	Pembangunan Kantor Kelurahan	JL. TUNGGU RAYA	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000 m/ 1.500.000.000	Dinas Penataan Ruang
40	Pembangunan Sport	JL. TUNGGU RAYA	Meningkatkannya	2.000 m/	Dinas Penataan

	Centre		kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000	Ruang
KELURAHAN ROWOSARI					
41	PEMBANGUNAN REHAB RTLH	ROWOSARI, RW IV, V	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	10 Paket/ 210.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN	Jl. Krajan Pungkruk Rt 1,3,4	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000 m/ 210.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
43	PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA VOLLY	Jl. Muntuksari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 paket/ 210.000.000	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN SAMBIROTO					
44	Perbaikan Sarpras Lapangan Bla Kelurahan Sambiroto	Jl. Kopol R Soekanto	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250 m/ 1.400.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Perluasan Kantor Kelurahan Sambiroto	Jl. Kopol R Soekanto	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100 m/ 300.000.000	Dinas Penataan Ruang
46	Rehab Rumah Dinas	Jl. Kopol R Soekanto	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150 m/ 250.000.000	Dinas Penataan Ruang
47	Perbaikan Jembatan Kembar	Jl. Kopol R Soekanto	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500 m/ 500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
48	Perbaikan Saluran Air	Jl. Sambiroto Asri Barat I	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	810 m/ 240.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
49	Alat Musik Rebana	Jl. Kopol R Soekanto	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	10 set/ 250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KELURAHAN SENDANGGUWO					
50	Saluran Air	Jalan Karang Gawang Lama RT 16 RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200 m/ 210.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
51	Perbaikan Jalan	Jalan Sendangguwo Raya RT 10 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200 m/ 250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52	Pengaspalan Jalan	Jalan Bayem RT 01 RW 07	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.100 m/ 210.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
53	Pembangunan Talud Tebing	Jalan Gemah Permai RT 02 RW 08	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	50 m/ 210.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Perbaikan Balai RT 16	Jalan Sendangguwo RT 16 RW 09	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400 m/ 210.000.000	Dinas Penataan Ruang
55	Warning Light dan Lampu Penerangan	Jalan Bayem Raya	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	4 m/ 210.000.000	Dinas Perhubungan
56	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	45 orang/ 15.000.000	Dinas Perikanan
57	Sosialisasi Bahaya Penyakit HIV dan AIDS	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	45 orang/ 15.000.000	Dinas Kesehatan
58	Sosialisasi tentang KDRT terhadap Perempuan dan Anak	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	40 orang/ 15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
59	Sosialisasi Budidaya Pangan	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	40 orang/ 15.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
60	Sosialisasi tentang Keluarga Berencana	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	45 orang/ 15.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	Sosialisasi tentang Disabilitas	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	45 orang/ 15.000.000	Dinas Sosial

KELURAHAN SENDANGMULYO					
62	Betonisasi Jalan RW 08	Jl Gendong I	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500 m/ 500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
63	Pavingisasi Peninggian jalan	Jl. Bukit Seruni I	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	660 m/ 300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
64	Betonisasi Jalan	Jl Bougenville Raya	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.000 m/ 1.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
65	Melanjutkan pem GOR RW.III	Jl. Klipang Raya W1B	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	240 m/ 250.000.000	Dinas Penataan Ruang
66	Pembuatan Sumur Artitis RW.III	Jl. Klipang KKIII	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 titik/ 300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
67	Talud Sungai	Jl Ketileng II	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500 m/ 1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
68	Pembangunan Sumur Artetis	Jl Ketileng Indah	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
KELURAHAN TANDANG					
69	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	RT01, RW 01 RT5 RW2 RT6 RW3 RT6 RW4 RT2 RW5 RT5 RW6 RT2 RW7 RT6 RW9 RT2 RT3 RW10RT14 RW11 RT6 RW12 RT6 RT11 RW 13 RT5 RT7 RW14 Kel. Tandang	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	18 Rumah/ 360.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
70	PENGASPALAN JALAN	JL. ROGOJEMBANGAN TIMUR VII	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600 m/ 240.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
KELURAHAN TEMBALANG					
71	Pembangunan Talud dan pagar BRC bantaran kali	Jl.Bulusari 1	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	20 m/ 250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
72	Pembangunan Saluran Air	Jl. Iwenisari Raya	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	390 m/ 350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
73	Pembangunan Saluran Air	Jl. Gondang Raya	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	144 m/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
74	Pembangunan Saluran Air	Jl. Sirajudin Raya	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	432 m/ 450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
75	Pembangunan Trotoar	Jl. Sirajudin Raya	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600 m/ 300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
76	Pembangunan Sumur Artetis	Jl. Jurang Blimbing	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 unit/ 250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
77	Pembangunan Kantor Kelurahan Tembalang	Jalan Banjarsari Raya No.35	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket/ 1.250.000.000	Dinas Penataan Ruang

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2022

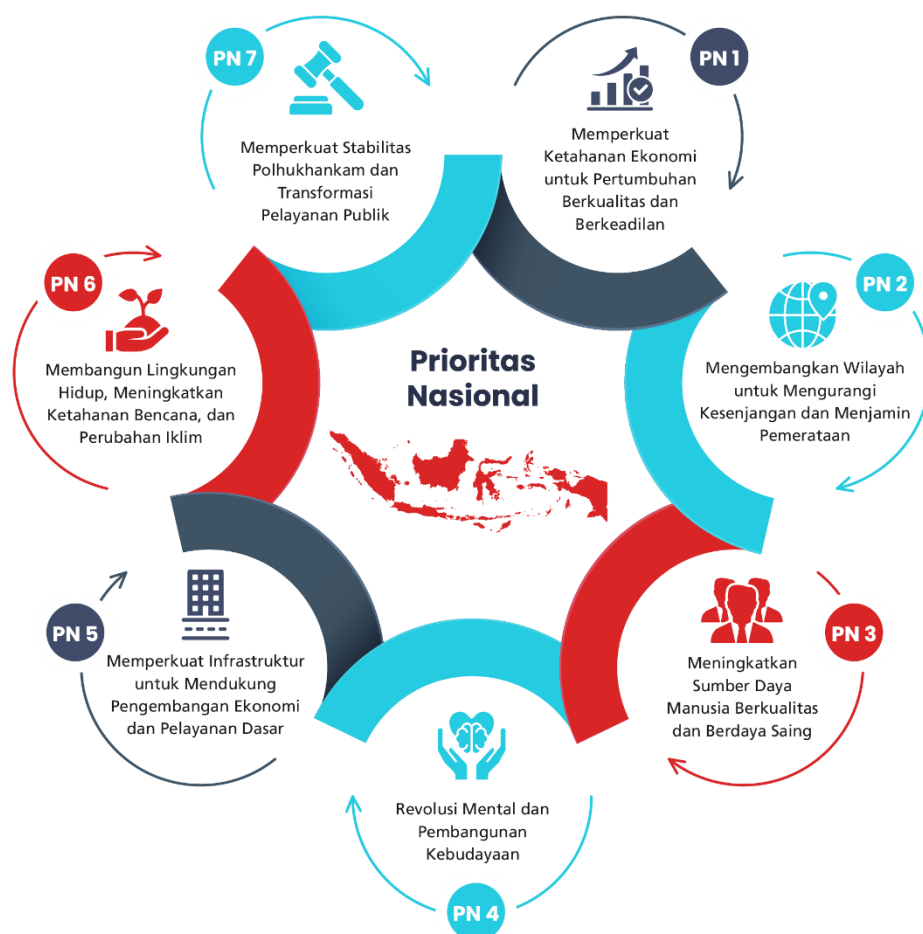
Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Tembalang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 77 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 12 Kelurahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah

- (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

- PP 3 Penegakan Hukum Nasional
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai Bagian Wilayah dari Kota Semarang memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan

Satgas

Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Tembalang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan

Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Sedangkan target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,60-84,00 indeks;
- b. Tingkat Kearifan Budaya Lokal sebesar 55,17%;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,3-8,6%;
- d. Angka Kemiskinan sebesar 4,04-4,24%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6-6,1%;
- f. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 103,54 Juta rupiah;
- g. Persentase peningkatan Nilai Investasi sebesar 7% (25.684.059 Juta rupiah);
- h. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 6%;
- i. Indeks Demokrasi sebesar 72,4 indeks;
- j. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,70 indeks;
- k. Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebesar 10,52%;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,01 indeks;
- m. Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur sebesar 84,5 indeks;
- n. Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan sebesar 3,32%;
- o. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,00 indeks;
- p. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88 indeks;
- q. Opini BPK adalah WTP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun

2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator Sasaran : NILAI AKIP
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator Sasaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
- c. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator Sasaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tembalang pada tahun 2023 berdasarkan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nomenklatur Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN TEMBALANG	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BULUSAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JANGLI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KRAMAS
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MANGUNHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. METESEH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. ROWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMBIROTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SENDANGGUWO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SENDANGMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TANDANG

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TEMBALANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BULUSAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JANGLI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KEDUNGMUNDU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KRAMAS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. METESEH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. ROWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMBIROTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SENDANGGUWO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SENDANGMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TANDANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TEMBALANG

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BULUSAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JANGLI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KEDUNGMUJUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KRAMAS
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. METESEH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. ROWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMBIROTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SENDANGGUWO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SENDANGMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TANDANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TEMBALANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BULUSAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JANGLI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KEDUNGMUJUR

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KRAMAS
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MANGUNHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. METESEH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. ROWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMBIROTO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SENDANGGUWO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SENDANGMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TANDANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TEMBALANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec. Tembalang
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec. Tembalang
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec. Tembalang
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Tembalang
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec. Tembalang
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec. Tembalang
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88
SASARAN			
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	84
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	40
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	72

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
TEMBALANG KOTA SEMARANG

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Tembalang Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Tembalang Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Tembalang Tahun 2023 sesuai RKPD Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel (terlampir).

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN TEMBALANG TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN TEMBALANG			59.760.618.417
07.01	KECAMATAN			59.760.618.417
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 %	2.931.990.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	63.500.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	63.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	1.888.140.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.888.140.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BULUSAN	12 Laporan	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JANGLI	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KEDUNGMUNDU	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KRAMAS	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MANGUNHARJO	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. METESEH	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. ROWOSARI	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMBIROTO	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SENDANGGUWO	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SENDANGMULYO	12	Laporan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TANDANG	12	Laporan

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TEMBALANG	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	980.350.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	980.350.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	41.619.350.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	415 kegiatan	17.841.150.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	82.150.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN	18 Unit	15.466.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BULUSAN	15 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JANGLI	15 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KEDUNGMUNDU	14 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KRAMAS	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MANGUNHARJO	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. METESEH	23 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. ROWOSARI	16 Unit	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMBIROTO	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SENDANGGUWO	16 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SENDANGMULYO	22 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TANDANG	17 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TEMBALANG	11 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN	4 Pokmas/Ormas	2.293.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BULUSAN	5 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JANGLI	4 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KEDUNGMUNDU	4 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KRAMAS	5 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MANGUNHARJO	6 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. METESEH	4 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. ROWOSARI	6 Pokmas/Ormas	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMBIROTO	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SENDANGGUWO	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SENDANGMULYO	4	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TANDANG	5	Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TEMBALANG	5	Pokmas/Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	100	%	23.778.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN	4	Lembaga Kemasyarakatan	23.148.200.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BULUSAN	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JANGLI	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KEDUNGMUNDU	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KRAMAS	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MANGUNHARJO	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. METESEH	9	Lembaga Kemasyarakatan	

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023		
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. ROWOSARI	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMBIROTO	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SENDANGGUWO	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SENDANGMULYO	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TANDANG	9	Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TEMBALANG	9	Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	Laporan	630.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %		50.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35	angka	50.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50.000.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 %		96.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	3	kegiatan	96.000.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	96.000.000
	NON URUSAN			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	15.063.278.417
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.090.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	300.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.730.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.030.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.440.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	440.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	400.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan	3 Dokumen	14.040.888.417
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	13.420.308.417
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	619.590.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	330.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	330.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	330.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	579.300.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.150.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.700.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4.950.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.300.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	267.600.000

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	53.600.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningktanya Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	5.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningktanya Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	195.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningktanya Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	235.000.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	110.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000
	JUMLAH			59.760.618.417

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tembalang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Tembalang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Tembalang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tembalang;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Tembalang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

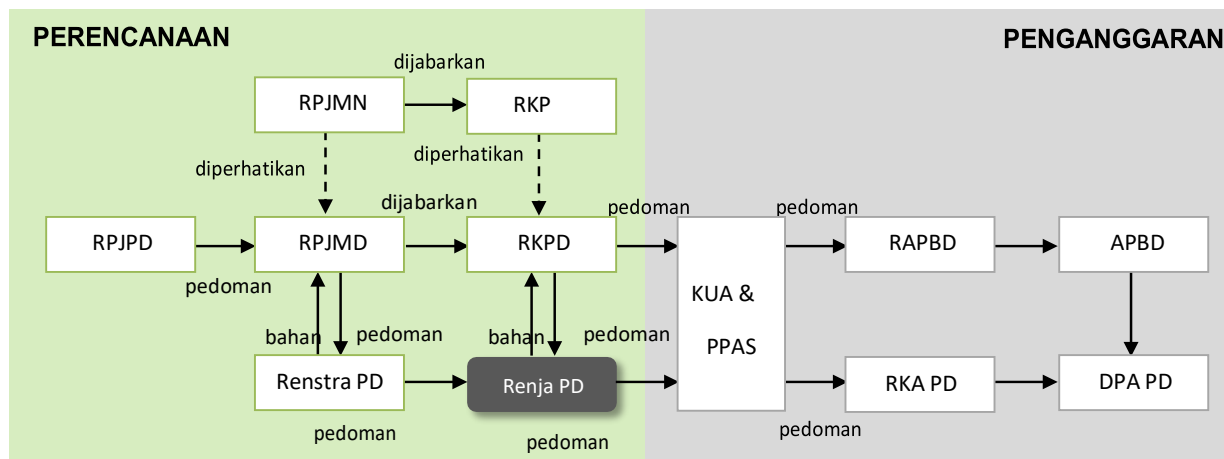
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Candisari, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Candisari tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Candisari.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Candisari Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Candisari yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Candisari.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 OPD melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 31.412.215.590,- Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 29.179.939.874,- atau sebesar 92,89%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Candisari Kota Semarang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Kecamatan Candisari

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	52,50 %	52,50
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	00,00 %	00,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	1.00 dokumen	50.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	- Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	48,42 %	48,42

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kecamatan										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten (Kec.Candisari)	7000.00 angka	7000.00 angka	7000.00 angka	7000.00 angka	7000.00 angka	7000.00 angka	2,036.00 angka	29,08
			100,00 %	100,00 %				100,00 %		52,58
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh			100,00 %	100,00 %	100,00 %		52,58 %	
			100,00 %	100,00 %				100,00 %		47,08
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal			100,00 %	100,00 %	100,00 %		47,08 %	
			100,00 %	100,00 %				100,00 %		50,11
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tegalsari			100,00 %	100,00 %	100,00 %		50,11 %	
			100,00 %	100,00 %				100,00 %		49,86
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaliwiru			100,00 %	100,00 %	100,00 %		49,86 %	
			100,00 %	100,00 %				100,00 %		44,78
		- Persentase Operasional Pelayanan dan			100,00 %	100,00 %	100,00 %		44,78 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar Gunung	100,00 %	100,00 %						49,73
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Candi			100,00 %	100,00 %				49,73 %
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jomblang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			45,89
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	49,26 %	49,26
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan(Kec.Candisari)	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	1.00 kegiatan	12.5
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	31,20 %	31,20
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	61,25%	61,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	100.00
		- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	14.00 Kegiatan	93.33
		- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	100.00
		- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	15.00 kegiatan	93.75
		- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	13.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 Kegiatan	11.00 kegiatan	84.62

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru	13.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	13.00 Kegiatan	Kegiatan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	100.00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi			13.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	11.00 Kegiatan	84.62
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang			16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	75.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	12.00 kegiatan	57,14
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	11.00 Kegiatan	73,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatingaleh	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan				15.00 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Wonotingal	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	09.00 Kegiatan	60,00
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Tegalsari	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	09.00 Kegiatan	60,00
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kaliwiru	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	66,66
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Karanganyar Gunung	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	09.00 Kegiatan	60,00
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah			15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan		09.00 Kegiatan	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perencanaan pembangunan di Kelurahan Candi								53,33
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jomblang			15.00 Kegiata	15.00 Kegiata	15.00 Kegiata		08.00 Kegiata	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang seharusnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	100,00
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	0.00 kelurahan	0,00
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	50,00
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Candisari)	5.00 kegiatan	5.00 kegiatan	5.00 kegiatan	5.00 kegiatan	5.00 kegiatan	5.00 kegiatan	2.00 kegiatan	40,00
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	00,00 %	00,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	00,00 %	00,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	00,00 %	00,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD - Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran - Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	45,00 % 49,00% 56,00%	45,00 49,00 56,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun (Kec.Candisari)	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	1.00 dokumen	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Kec.Candisari)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kec.Candisari)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (Kec.Candisari)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Kec.Candisari)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kec.Candisari)	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	1.00 dokumen	33,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	1.00 dokumen	50,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	48,80%	48,80
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	47,00 jenis	47,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	58,00 jenis	58,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,40%	39,40
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	45,00%	45,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100.00 orang	100.00 orang	100.00 orang	100.00 orang	100.00 orang	100.00 orang	72 orang	72,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	57.00 kegiatan	57,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	51 jenis	51,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	00,00%	00,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	100.00 jenis	0.00 jenis	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,10%	50,10
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	06.00 bulan	50,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	4.00 jenis	66,66

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	47,33%	47,33
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	11.00 unit	11.00 unit	11.00 unit	11.00 unit	11.00 unit	11.00 unit	5 unit	45,45
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	0.00 gedung	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	11.00 jenis	11.00 jenis	11.00 jenis	11.00 jenis	11.00 jenis	11.00 jenis	4 jenis	36,36
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	24,00%	24,00

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Kecamatan Candisari Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 5 Program dan 8 Indikator Kinerja Program dan 49 Kegiatan dengan 71 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 8 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, serta 7 Indikator belum memenuhi target karena capaian kinerja baru dilakukan sampai dengan Triwulan II.
 - c) Dari 71 Indikator kinerja kegiatan, terdapat 5 indikator yang sudah memenuhi target dan terdapat 66 indikator yang belum memenuhi target (karena capaian baru dilakukan sampai dengan Triwulan II.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program dengan 8 indikator program dan 49 kegiatan dengan 71 indikator.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 7 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 7 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 71 indikator kinerja kegiatan, terdapat 5 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 66 Indikator masih dalam proses.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari
Kota Semarang Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.092.142.586	9.236.590.304	91,52%
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.269.024	5.722.200	78,72%
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.480.155	1.059.000	71,55%
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	346.041	345.550	99,86%
7.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	346.041	169.550	48,99%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	346.041	345.500	99,84%
7.1.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	346.100	345.500	99,83%
7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.449.382	1.922.900	78,51%
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.955.264	1.534.200	78,47%
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.229.684.872	7.573.653.530	92,03%
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.916.148.590	7.303.474.148	92,26%
7.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	311.640.000	268.703.382	86,22%
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.896.282	1.476.000	77,84%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	966.553.227	865.435.742	89,54%
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.973.747	52.750.600	97,73%
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.000.000	30.097.642	39,60%
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.091.310	47.525.000	69,79%
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.840.909	8.794.100	99,47%
7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.500.000	37.113.600	85,32%
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.515.000	10.195.000	45,28%
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	693.632.261	678.959.800	97,88%
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.750.000	10.796.000	78,52%
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.750.000	10.796.000	78,52%
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.766.400	91.423.152	68,35%
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.766.400	91.423.152	68,35%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.119.063	689.559.680	93,04%
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.240.000	127.894.061	93,87%
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.240.000	215.040.000	99,45%
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	354.119.063	341.375.619	96,40%
7.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.520.000	5.250.000	15,21%
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.386.022.353	8.302.476.391	88,46%
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	248.530.113	141.898.500	57,09%
7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	248.530.113	141.898.500	57,09%
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.182.360.326	7.510.951.905	91,79%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	860.718.636	831.360.047	96,59%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATINGALEH)	958.035.081	877.210.606	91,56%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOTINGAL)	772.609.508	698.330.936	90,39%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEGALSARI)	1.463.711.241	1.340.098.858	91,55%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG)	801.050.000	732.409.943	91,43%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALIWIRU)	428.696.000	392.187.360	91,48%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN CANDI)	1.094.340.199	994.553.137	90,88%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JOMBLANG)	1.803.199.661	1.644.801.018	91,22%
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	955.131.914	649.625.986	68,01%
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	955.131.914	649.625.986	68,01%
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.630.381.469	11.356.265.997	97,64%
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.721.092.087	10.490.076.256	97,85%
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.214.613	8.029.025	97,74%
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.750.367.356	3.741.943.000	99,78%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATINGALEH)	834.360.404	831.840.000	99,69%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOTINGAL)	687.153.322	677.650.000	98,62%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEGALSARI)	590.670.388	583.528.000	98,79%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG)	907.060.026	895.468.000	98,72%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KALIWIRU)	490.848.865	483.965.000	98,59%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN CANDI)	850.342.741	837.392.000	98,47%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JOMBLANG)	934.421.975	922.389.000	98,71%
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	214.847.549	130.913.470	60,93%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATINGALEH)	212.054.506	201.025.550	94,79%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WONOTINGAL)	193.544.442	184.166.000	95,15%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEGALSARI)	211.335.956	200.284.270	94,77%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG)	186.390.683	181.045.800	97,13%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KALIWIRU)	175.906.744	167.634.656	95,29%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN CANDI)	230.375.698	224.752.000	97,56%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JOMBLANG)	243.196.819	218.050.485	89,66%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	909.289.382	866.189.741	95,26%
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.162.132	68.728.741	69,31%
7.1.3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	810.127.250	797.461.000	98,44%
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	303.669.182	284.607.182	93,72%
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	303.669.182	284.607.182	93,72%
7.1.4.2.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	303.669.182	284.607.182	93,72%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 53 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp **31.412.215.590,-**. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp **29.179.939.874,-** (92,89%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Candisari dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. **Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;

- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;

- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, Ketenteraman, dan	Indeks Kepuasan Masyarakat		87 angka	89,00 angka	90,00 angka	87 angka	95,55 angka	89,00 angka	90,00 angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
		IKK	2021	2022	2023	2021	2022	2022
ketertiban umum di Kecamatan da Kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi								
Sasaran :								
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		74,53 angka	75 angka	75,5 angka	71,06 angka	75 angka	75,5 angka
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		1 angka	1 angka	1 angka	0 angka	1 angka	1 angka
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		100 %	100 %	100 %	52%	100 %	100 %
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		40%	45%	50%	33%	45%	50%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 95,55 % dari target sebesar 89,00%;
- b. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” belum mencapai target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dimana realisasinya sebesar 52% dari target sebesar 100% .
- c. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” belum mencapai target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dimana realisasinya sebesar 33% dari target sebesar 45% .

- d. Sasaran “**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik**” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” belum mencapai target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dimana realisasinya sebesar 0 angka dari target sebesar 1 angka.
- e. Sasaran “**Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Indikator “Nilai AKIP” belum mencapai target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dimana realisasinya sebesar 71,06 angka dari target sebesar 75 angka.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Candisari dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Candisari Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen		

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta perubahan Renja Tahun ke-n dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja

pelayanan Kecamatan Candisari di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKP
serta antara RKP dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan
Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKP	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,72 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: Kecamatan Candisari

Keterangan tentang tabel diatas :

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKP sebesar 72,72 %; dimana 11 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2020 hanya dapat terakomodir sejumlah 8 program (3 program tidak dapat terakomodir).

Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi penyesuaian anggaran, sehingga terdapat 3 program yang tidak dilaksanakan karena output dari kegiatan pada program tersebut disinergikan dengan output pada kegiatan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Candisari di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKP, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPd)		PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2021 / 2022	2022 / 2023
1	Jumlah Usulan	Usulan				159	243		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan				129	226		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%				81,13	93	94	94

Sumber: Kecamatan Candisari

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 93% telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPd Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 81,13 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Candisari yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Candisari sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Candisari Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
ASPEK KEWILAYAHAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	82	88	90	82	95,55	96	90	-
2	Jumlah inovasi pelayanan Publik di kecamatan dan kelurahan	angka		1	1		0	1	1	-
3	Persentase lembaga Kemasyarakatan aktif	%		100	100		52	100	100	-
4	Persentase peningkatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		45	50		33	45	50	-

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
5	Persentase pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional di kecamatan dan kelurahan	%		60	70					-
6	Nilai AKIP	%		75	75,5		71,06	75	75,5	-
7.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD			100	100		45	100	100	
8.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	%		100	100		56	100	100	
9.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%		100	100		49	100	100	
10.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%		91	92		95,5	96	92	
11.	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%		100	100		31,2	100	100	
12.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%		10	15		5	10	15	
13.	Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	angka		2	5		0	2	5	

Sumber : Kecamatan Candisari

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan

dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk keperluan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Kurangnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan dan penularan COVID-19.
- f. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan:
 - Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
 - Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
 - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh

terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Candisari tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang :

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut :

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya,

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.

- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).
- e. Pembentukan Forkopimcam; Pembentukan bertujuan untuk menunjang kelancaran Urusan Pemerintahan Umum. Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, Forkopimcam dibentuk untuk mendukung :
 1. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
 2. Peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penganganan dini
 3. Penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
 4. Pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

Forkopimcam bertugas melaksanakan :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
 4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- f. Gelar Pelayanan Akhir Pekan Dan Malam Hari

Kegiatan tersebut merupakan inovasi baru dari Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan ini merupakan suatu terobosan bagi warga masyarakat yang kesulitan dalam mengurus perizinan maupun hal lain saat jam kerja, sehingga Pemerintah melakukan inovasi dengan mengadakan Gelar Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari yang dilaksanakan tiap sebulan sekali yaitu pada hari Sabtu di pekan pertama tiap bulannya. Kegiatan dilakukan dalam dua waktu, yaitu pukul 07.30 – 13.00 WIB dan pukul 19.00 - 22.00 WIB yang sebagian besar pelaksanaannya berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan.

Beberapa pelayanan yang terdapat dalam gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari ini yaitu seperti Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, Pelayanan Administrasi Kependudukan (TPDK), Pelayanan PBB, Bazar UMKM Lokal, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPTSP (Perijinan OSS-RBA, SPP-IRT), Dinas Arsip dan Perpustakaan, Pelayanan Vaksinasi, hiburan solo organ dan band lokal.

Dengan adanya Gelar Pelayanan Akhir Pekan dan Malam hari warga dihimbau dapat memanfaatkan acara ini untuk mengurus pelayanan, karena terdapat berbagai macam dinas yang bisa melayani perizinan dengan mudah dan cepat. Layanan ini dapat digunakan oleh Masyarakat umum guna meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi warga kota Semarang.

- g. Gerai Kopimi

Gerakan Terintegrasi Koperasi dan Usaha Mikro (Gerai Kopimi) merupakan kegiatan yang bertujuan agar UMKM bisa bangkit dan menggerakkan perekonomian warga. Selain mendorong UMKM juga untuk membantu warga yang terkena dampak pandemi Covid 19 dengan diadakannya program tebus murah. Kegiatan program tebus murah dilaksanakan dengan syarat harus berbelanja di UMKM. Sehingga bisa menjadi contoh teman-teman pengusaha yang lain, atau para stake holder untuk saling membantu menguatkan perekonomian rakyat dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat melalui UMKM Gerai Kopimi.

Dalam hal ini diperlukan andil baik lurah, camat dan tokoh masyarakat serta menggandeng lembaga yang ada, misalnya LPMK, Karang Taruna, FKK dan PKK ikut berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian warga. Kegiatan tersebut bias terjadwal sehingga ada

kesinambungan agar produk UMKM warga baik kerajinan, makanan dan minuman, busana bisa laku terjual.

h. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.

Pemilihan Kepala Daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan Pemilihan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut terdiri atas :

- Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
- Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota
- Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut.
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin

- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Kecamatan Candisari.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Candisari mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif”**. Namun sebagai bagian wilayah di Kota Semarang, Kecamatan Candisari memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Candisari Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	URUSAN KEWILAYAHAN				34.372.692.470	URUSAN KEWILAYAHAN				31.372.393.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.484.718.636	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.400.661.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	125.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ngan	Kecamatan Candisari	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	100.000.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	125.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	100.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	1.544.718.636	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.544.718.636	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten	100%	125.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.544.718.636	
		Kelurahan Jatingaleh						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Wilayah Kecamatan			
		Kelurahan Wonotingal						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Kelurahan Tegalsari						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Kelurahan Kaliwiru						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Kelurahan Karanganyar Gunung						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Kelurahan Candi						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Kelurahan Jomblang						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	815.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	755.942.364	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	815.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tingkat Kecamatan	3 Laporan	755.942.364	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	19.340.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi	100 %	18.888.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								informasi (SPBE)			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	10.953.200.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	80 kegiatan	18.314.800.000	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	276 kegiatan	42.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	10 kegiatan	8.993.984.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	9.195.311.500	
		Kelurahan Jatingaleh						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit		
		Kelurahan Wonotingal						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit		
		Kelurahan Tegalsari						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 unit		
		Kelurahan Kaliwiru						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit		
		Kelurahan Karanganyar Gunung						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit		
		Kelurahan Candi						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit		
		Kelurahan Jomblang						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil	19 kegiatan	1.917.216.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas/Ormas	9.094.488.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		Kelurahan Jatingaleh							3 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Wonotingal							4 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tegalsari							1 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Kaliwiru							12 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Karanganyar Gunung							1 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Candi							1 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Jomblang							55 Pokmas/Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	67 kegiatan	8.387.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya		574.000.000	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 kegiatan	7.937.600.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	174.000.000	
		Kelurahan Jatingaleh						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		
		Kelurahan Wonotingal						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		
		Kelurahan Tegalsari						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		

No	Rancangan Awal RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Kaliwiro						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		
		Kelurahan Karanganyar Gunung						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		
		Kelurahan Candi						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		
		Kelurahan Jomblang						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	450.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	400.000.000	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	100.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Candisari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	100.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	0	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 kegiatan	100.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 laporan	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	5 angka	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	5 angka	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Ketahanan Nasional					Ketahanan Nasional			
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi	2 kegiatan	40.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Terlaksananya Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	45.000.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	40.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	45.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Candisari	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	12.407.173.834	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	10.037.932.000	
			Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100 %		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	0	-
			Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 dokumen	44.750.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Tertibnya penyusunan dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Kecamatan Candisari	2 dokumen	50.250.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 dokumen	7.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Candisari	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		
7.01.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	2.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	3.750.000	
7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	11.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	12.750.000	
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Administrasi Keuangan SKPD	100 %	9.370.182.232	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Tertibnya pengelolaan Administrasi Keuangan di Kecamatan Candisari	100 %	8.411.592.347	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen							
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	8.903.182.232	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	7.911.307.318	
7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		Presentase ASN yang disediakan Administrasi	100 %	452.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	480.785.029	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	ASN		Pelaksanaan Tugas			ASN					
7.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	6.500.000	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan		
7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	6.500.000	
7.01.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	6.500.000	
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.536.740.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Terpenuhinya Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kecamatan Candisari	100 %	530.000.000	-
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 jenis	55.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	60.000.000	
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 jenis	85.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	85.000.000	
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 jenis	62.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	67.500.000	
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 jenis	17.240.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	7.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	55.000.000	
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000	
7.01.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 jenis	1.177.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 dokumen	180.000.000	
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	12.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	20.000.000	-
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya	100 jenis	12.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	20.000.000	
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	184.061.602	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor di Kecamatan Candisari	100 %	210.000.000	-
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	169.061.602			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	190.000.000	
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	1.5000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	20.000.000	
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	PresenPersentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.259.440.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Candisari	100 %	816.089.653	-
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 unit	517.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	517.240.000	
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 gedung	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	198.849.653	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3 jenis	342.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	50.000.000	
7.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100 %	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 unit	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Candisari diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2023 Kecamatan Candisari
Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN	OPD YANG BERWENANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pekerjaan penerangan jalan	RT 01 RW 08 Kelurahan Candi	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	12 Titik	Gelap saat malam hari	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pekerjaan talud tebing	Jomblang Perbalan RT 09 RW 02 Kelurahan Candi	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	250 M3	Rawan longsor	Dinas Pekerjaan Umum
3	Pembuatan talud	Candi Losmen RT 03 RW 08 Kelurahan Candi	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	250 M3	Rawan longsor	Dinas Pekerjaan Umum
4	Pembuatan sapiteng komunal	Wilayah Kelurahan Jatingaleh	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	315 KRT	Banyaknya warga yang menggunakan sungai sebagai jamban	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pengaspalan jalan	Jl. Lompobatang mulai gapura	Jumlah sarana dan prasarana	5430 M2	Aspal mengelupas	Dinas Pekerjaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN	OPD YANG BERWENANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Lompobatang RT 05 sampai pertigaan Gg. III dan Gg. IV RT 07 Kelurahan Kaliwiru	kelurahan yang terbangun			Umum
6	Pembangunan talud sungai RT 01 RW 03	RT 01 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1800 Meter	Perlu nya dibangun talud sungai wilayah tersebut	Dinas Pekerjaan Umum
7	Pemasangan penerangan jalan umum	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	105 Titik	Banyak titik lokasi gelap dan rawan di daerah pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Pembangunan saluran bis U-30	RT 05 RW 02 samping rumah pak Manto sampai depan TK Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	100 Meter	Saluran pembuangan air kurang memadai	Dinas Pekerjaan Umum
9	Pembangunan talud jalan rawan longsor	RT 06 RW 04 Karanganyar Legok Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	750 Meter	Jalan yang sering dilalui adalah wilayah rawan longsor	Dinas Pekerjaan Umum
10	Pembangunan talud sungai rawan longsor	RT 01 RW 04 Karanganyar Legok Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	500 Meter	Lereng sungai rawan longsor	Dinas Pekerjaan Umum
11	Pembuatan trotoar / pengeprasan berem dan gorong-gorong	Jalan Wilis RT 03 RW 10 Kelurahan Tegalsari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	500 Meter	Usulan baru sangat penting karena rusak	Dinas Pekerjaan Umum
12	Pengaspalan Jalan	Jalan Wilis RT 04 RW 07 Kelurahan Tegalsari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1500 Meter	Usulan baru sangat penting karena rusak parah	Dinas Pekerjaan Umum
13	Pembuatan talud pada lokasi kolam lele	Jomblang Perbalan RT 04 RW 01 Kelurahan Candi	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	600 M2	Rawan longsor	Dinas Pekerjaan Umum
14	Pengadaan grobag dan tong sampah	Candi Losmen RT 04 RW 08 Kelurahan Candi		40 Unit	Untuk menjaga lingkungan tetap bersih	Dinas Lingkungan Hidup
15	Renovasi Balai Palupi	Jomblang Barat RT 00 RW 03	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Paket	Rusak	Dinas Pentaan Ruang
16	Rehab gedung kantor 2 lantai Kelurahan Jatingaleh	Jl. Jatingaleh III No. 391 A RT 01 RW 04 Kelurahan Jatingaleh	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Unit	Kondisi kantor yang sudah tidak layak	Dinas Penataan Ruang
17	Pengadaan gamelan untuk Kelompok Kesenian Dewandaru	Jl. Lompobatang I RT 01 RW 04 Kelurahan Kaliwiru		1 Set	Gamelan tidak lengkap dan rusak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Drainase Jl. Tentara Pelajar	RT 00 RW 01 Kelurahan Jomblang	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Paket	Jika hujan air sering meluap ke jalan	Dinas Pekerjaan Umum
19	Pengaspalan Jalan	Bundaran Cinde RT 00 RW 05 Kelurahan Jomblang		1 Paket	Jalan rusak	Dinas Pekerjaan Umum
20	Saluran Sisingamangaraja	Jl. Sisingamangaraja RT 01 RW 02 Kelurahan Wonotingal	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 Meter	Sangat penting	Dinas Pekerjaan Umum
21	Talud Sungai	Stom RT 01 RW 03 Kelurahan Wonotingal	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	15 Meter	Sangat penting	Dinas Pekerjaan Umum

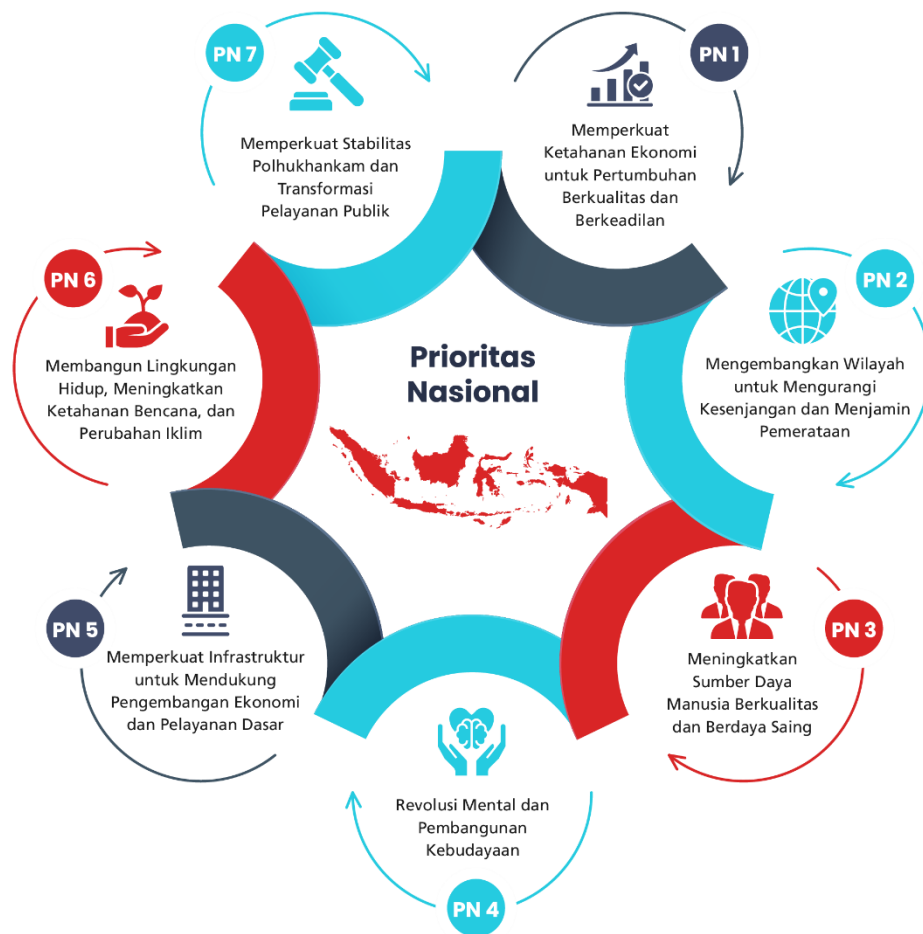
Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan

- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi

- PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- PP 3 Penegakan Hukum Nasional
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan

Satgas

Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan

masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Candisari juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7 %;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 45,35 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2021 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketigaindikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Loka	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,7
11	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi.”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan; Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik; dan Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah ”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- b. Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- c. Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- d. Nilai AKIP

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Candisari pada tahun 2023 berdasarkan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nomenklatur Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00. 12.0000	KECAMATAN CANDISARI	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JATINGALEH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TEGALSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. CANDI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. WONOTINGAL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KALIWIRU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JOMBLANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JATINGALEH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TEGALSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. CANDI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. WONOTINGAL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KALIWIRU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JOMBLANG
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JATINGALEH

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TEGALSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. CANDI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. WONOTINGAL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KALIWIRU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JOMBLANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JATINGALEH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TEGALSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. CANDI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. WONOTINGAL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KALIWIRU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JOMBLANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Candisari
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Candisari
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Candisari
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Candisari
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Candisari

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Candisari
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kinerja pelayanan publik, pemberdayaan, masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90,00
SASARAN :			
- Meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100
- Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	- Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	45

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
dan kelurahan			
- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	- Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	angka	1
- Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	angka	75,5

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Candisari bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (4 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Indeks Kepuasan Masyarakat**" dan indikator sasaran "**Nilai AKIP**";
3. Keresasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 58 kegiatan, yang terdiri dari 26 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 32 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 33.204.494.580 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 10.736.158.454 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 22.468.336.126 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	URUSAN KEWILAYAHAN				33.204.494.580			31.372.393.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN		92 %	2.698.777.036		-	92 %	2.400.661.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	2 dokumen	187.244.950	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	100.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 laporan	1.709.226.826	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	1.544.718.636
			Kelurahan Jatingaleh	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	
			Kelurahan Wonotingal	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	
			Kelurahan Tegalsari	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Kelurahan Kaliwiru	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	
			Kelurahan Karanganyar Gunung	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	
			Kelurahan Candi	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	
			Kelurahan Jomblang	12 laporan		APBD Kota Semarang	-	12 laporan	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	3 kegiatan	802.305.260	APBD Kota Semarang		3 kegiatan	755.942.364
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	6 lembaga kemasyarakatan	51.395.590	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	25.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Candisari	10 unit	8.511.125.000	APBD Kota Semarang		10 unit	9.195.311.500
			Kelurahan Jatingaleh	14 unit		APBD Kota Semarang	-	14 unit	
			Kelurahan Wonotingal	14 unit		APBD Kota Semarang	-	14 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Kelurahan Tegalsari	17 unit		APBD Kota Semarang	-	17 unit	
			Kelurahan Kaliwiru	10 unit		APBD Kota Semarang	-	10 unit	
			Kelurahan Karanganyar Gunung	10 unit		APBD Kota Semarang	-	10 unit	
			Kelurahan Candi	13 unit		APBD Kota Semarang	-	13 unit	
			Kelurahan Jomblang	22 unit		APBD Kota Semarang	-	22 unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	4 pokmas	1.467.100.000	APBD Kota Semarang		4 pokmas	9.094.488.500
			Kelurahan Jatingaleh	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	
			Kelurahan Wonotingal	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	
			Kelurahan Tegalsari	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	
			Kelurahan Kaliwiru	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karanganyar Gunung	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	
			Kelurahan Candi	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	
			Kelurahan Jomblang	4 pokmas		APBD Kota Semarang	-	4 pokmas	
			Kecamatan Candisari	4 lembaga kemasyarakatan	9.539.600.000	APBD Kota Semarang	-	4 lembaga kemasyarakatan	174.000.000
			Kelurahan Jatingaleh	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	
			Kelurahan Wonotingal	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	
			Kelurahan Tegalsari	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Kelurahan Kaliwiru	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	
			Kelurahan Karanganyar Gunung	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	
			Kelurahan Candi	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	
			Kelurahan Jomblang	9 lembaga kemasyarakatan		APBD Kota Semarang	-	9 lembaga kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	2 laporan	45.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 laporan	400.000.000
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan		1 kelurahan					
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kecamatan Candisari	10 laporan	80.000.000	APBD Kota Semarang	-	0 laporan	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		SumberDana	Target Capaian Kinerja
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia						
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		5 angka	75.338.500	-	5 angka	45.000.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		92 %				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		50 orang	75.338.500		50 orang	45.000.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD		100 %	10.736.158.454	-	100 %	10.037.932.000
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran		100 %				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD		100 %					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	1 dokumen	2.887.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Candisari	1 dokumen	4.088.870	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	1 dokumen	5.141.150	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Candisari	1 dokumen	5.582.950	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	1 dokumen	5.141.150	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.750.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Candisari	1 laporan	3.099.360	APBD Kota Semarang	1 laporan	3.750.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	2 laporan	2.159.360	APBD Kota Semarang	2 laporan	12.750.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	51 orang/bulan	8.263.615.580	APBD Kota Semarang	51 orang/bulan	7.911.307.318	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	12 dokumen	402.390.000	APBD Kota Semarang	12 dokumen	480.785.029	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	1 laporan	2.700.320	APBD Kota Semarang	1 laporan	6.500.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	12 laporan	2.700.320	APBD Kota Semarang	12 laporan	6.500.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	1 dokumen	2.700.320	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.500.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	6 paket	20.148.080	APBD Kota Semarang	6 paket	60.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	6 paket	325.822.781	APBD Kota Semarang	6 paket	85.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 paket	80.447.860	APBD Kota Semarang	12 paket	67.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Candisari	6 paket	17.517.297	APBD Kota Semarang	6 paket	7.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	12 laporan	97.875.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	55.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	12 laporan	111.700.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	75.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	12 laporan	97.875.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	55.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	10 dokumen	370.554.684	APBD Kota Semarang	10 dokumen	180.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Candisari	10 unit	109.819.117	APBD Kota Semarang	10 unit	20.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 laporan	166.701.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	190.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 laporan	25.136.150	APBD Kota Semarang	12 laporan	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Candisari	29 unit	305.150.685	APBD Kota Semarang		29 unit	517.240.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Candisari	3 unit	300.000.000	APBD Kota Semarang		3 unit	198.849.653
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Candisari	3 unit	20.306.170	APBD Kota Semarang		3 unit	50.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Candisari	113 unit	82.772.450	APBD Kota Semarang		113 unit	50.000.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2023 dan tahun 2024 hampir semua sama, hanya terdapat 2 target indikator yang berbeda. Selain itu, kebutuhan anggaran di tahun 2024 dibanding 2023 relatif menurun, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang membutuhkan kebutuhan anggaran yang lebih besar di tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Candisari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Candisari ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Candisari;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Candisari ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

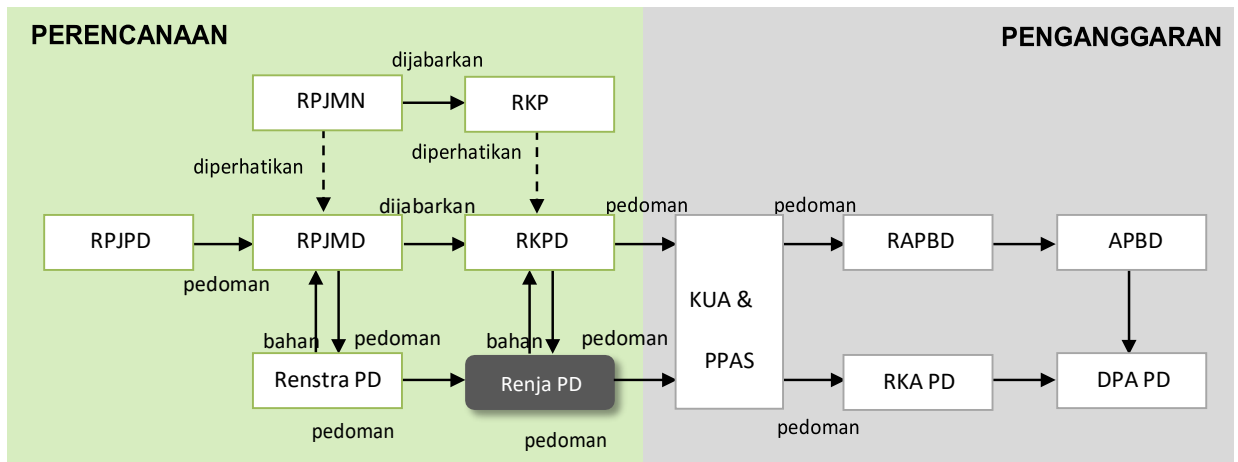
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Banyumanik, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumanik tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Banyumanik.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Banyumanik Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

- Pengarustamaan Gender;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Banyumanik.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Banyumanik melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 47.247.941.532. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 45.193.218.870 atau sebesar 95,65 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,00 %	-	100 %	50,32 %	50,32	100 %	87,91 %	87,91
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95,00 %	-	85,00 %	85,00 %	89,47	91,00 %	80,00	
		Jumlah Pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor	477.561 jumlah	-	477.561 jumlah	3.035 jumlah	0,63	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Kecamatan dan Kantor Kelurahan								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00 angka	-	-	-	-	1,00 angka	1,00 angka	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata	1,00 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100,00 %	-	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	50,00 %	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100,00 %	-	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	32,69 %	
		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan untuk	100,00 %	-	100 %	100,00 %	100,00	2,00 kegiatan	1,00 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		peningkatan kapasitas dan etos kerja								
		Pelayanan administrasi di kantor kecamatan dan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudukpayung	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Spondol Kulon	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sron dol Wetan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	50,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	20,00 %	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10,00 kegiatan	-	-	-	-	10,00 kegiatan	2,00 kegiatan	
		Bimbingan anggota Linmas Kecamatan Kelurahan	50,00 orang		50,00 orang	50,00 orang	100,00	-	-	-
		Monitoring Pengendalian Aset	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Optimalisasi PBB	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan	12,00 kali		12,00 kali	12,00 kali	100,00	-	-	-
		Penanggulangan kemiskinan gerbang hebat kelurahan	2,00 kelurahan		2,00 kelurahan	2,00 kelurahan	100,00	-	-	-
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Presentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tertangani	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Presentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Service dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	-	100 %	50,00 %	50,00	100,00 %	61,86 %	61,86
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95,00 %	-	95,00 %	95,00 %	100,00	100,00 %	60,00 %	
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan	19954 angka	-	19954 angka	0,00	0	-	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100,00 %	-	100 %	100,00 %	100,00	100 %	49,00 %	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457,00 angka	-	-	-	-	449,00 angka	220,00 angka	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	92,31 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	169,00 angka	-	-	-	-	169,00 angka	156,00 angka	
		dokumen skala prioritas pembangunan kelurahan kecamatan	1,00 dokumen	-	1,00 dokumen	1,00 dokumen	100,00	-	-	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Pembangunan Fisik Prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	12 kegiatan	12 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	17 kegiatan	17 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	14 kegiatan	14 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	18 kegiatan	18 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	12 kegiatan	12 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	16 kegiatan	16 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	11 kegiatan	11 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	17 kegiatan	17 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	19 kegiatan	19 kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	48 kegiatan	48 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	18 kegiatan	18 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	21 kegiatan	21 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	24 kegiatan	24 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	18 kegiatan	18 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	20 kegiatan	20 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	28 kegiatan	28 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	20 kegiatan	20 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	19 kegiatan	19 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	21 kegiatan	21 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	23 kegiatan	23 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	25 kegiatan	25 kegiatan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100,00 %	-	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	60,00 %	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5,00 dokumen	-	-	-	-	5,00 dokumen	3,00 dokumen	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	60,00 %	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang di laporkan	5,00 dokumen	-	-	-	-	5,00 dokumen	3,00 dokumen	
		Pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100,00 %	-	100,00 %	0,00 %	0	100 %	50,00 %	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1,00 kelurahan	-	-	-	-	1,00 kelurahan	0,00 kelurahan	
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1,00 kegiatan	-	-	-	-	1,00 kegiatan	1,00 kegiatan	
		Bimbingan anggota Linmas Kecamatan Kelurahan	50,00 orang	-	0	0	0	-	-	-
		Patroli Wilayah dan Pemantauan Trantibum Kecamatan	12,00 kali	-	0	0	0	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Penanggulangan kemiskinan gerbang hebat kelurahan	2,00 kelurahan	-	0	0	0	-	-	-
		Presentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertangani	100,00 %	-	0	0	0	-	-	-
		Service dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput	100,00 %	-	0	0	0	-	-	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100,00 %	-	100,00 %	105,56 %	105,56	100 %	90,00	90,00
		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	30,00 %	-	-	-	-	10,00 %	90,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Presentase jumlah siskampling di lingkungan RT	90,00 %	-	90,00 %	95,00 %	105,55	-	-	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	57,14 %	
		Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	25,00 angka	-	-	-	-	35,00 angka	20,00 angka	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	66,67 %	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan	3,00 kegiatan	-	-	-	-	3,00 kegiatan	2,00 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		ketentraman dan ketertiban umum								
		Peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam gangguan trantibmas	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	88,89 %	88,89
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00 %	-	-	-	-	90,00 %	80,00 %	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	50,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2,00 kegiatan	-	-	-	-	2,00 kegiatan	1,00 kegiatan	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional		100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	50,00 %	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2,00 kegiatan	-	-	-	-	2,00 kegiatan	1,00 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	50,00
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Kecamatan Banyumanik)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Banyumanik)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kecamatan Banyumanik)	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan		100,00 %	-	100,00 %	107,14 %	100,00	100 %	78,57 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	7,00 dokumen	-	-	-	-	7,00 dokumen	4,00 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan	2,00 dokumen	-	-	-	-	2,00 dokumen	2,00 dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Jumlah Dokumen LKJIP Kecamatan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen LKPJ Kecamatan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	-	100,00 %	97,50 %	97,50	100,00 %	45,83 %	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	25,00 %	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3,00 dokumen	-	-	-	-	3,00 dokumen	2,00 dokumen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00 %	-	100,00 %	90,00 %	90,00	100,00 %	25,00 %	
		Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100,00 %	-	100,00 %	90,00 %	90,00	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	0,00 %	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	25,00	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	57,14 %	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7,00 jenis	-	7,00 jenis	7,00 jenis	100,00	7 jenis	4,00 jenis	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2,00 jenis	-	-	-	-	2,00 jenis	1,00 jenis	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50,00 jenis	-	-	-	-	50,00 jenis	25,00 jenis	
		Penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4,00 jenis	-	4,00 jenis	4,00 jenis	100,00	4,00 jenis	2,00 jenis	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Jumlah tamu yang berkunjung	2500,00 orang	-	-	-	-	2500,00 orang	625,00 orang	
		Penyediaan jamuan rapat	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	66,67 %	
		Jumah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	15,00 kegiatan	-	-	-	-	15,00 kegiatan	10,00 %	
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaham		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2,00 jenis	-	-	-	-	2,00 jenis	2,00 jenis	
		Peralatan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	2 jenis	2 jenis	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	25,00 %	
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pengadaan kendaraan dinas dan operasional roda 3	3 unit	-	3 unit	3 unit	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	-	-
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	1,00 jenis	-	-	-	-	1,00 jenis	-	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	25,00 %	
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 bulan	-	-	-	-	12,00 bulan	3,00	
		Langganan Rekening Listrik, telepon, koran dan air	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	33,33 %	
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6,00 jenis	-	-	-	-	6,00 jenis	2,00 jenis	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	25,00 %	
		Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	30 unit	30 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,00 gedung	-	-	-	-	2,00 gedung	2,00 gedung	
		Perbaikan ringan/sedang gedung kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,00 jenis	-	-	-	-	3,00 jenis	3,00 jenis	
		Gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	5,00 jenis	-	-	-	-	5,00 jenis	5,00 jenis	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan								
		Pemenuhan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	-	-	-
		Peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan 2022 Kecamatan Banyumanik adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Banyumanik
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 8 (delapan) indikator program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan 87 (delapan puluh tujuh) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 8 (delapan) Indikator program, terdapat 1 (satu) Indikator yang melampaui target, 5 (lima) Indikator memenuhi target, serta 2 (dua) Indikator tidak memenuhi target.
 - c) Dari 12 (dua belas) Indikator kegiatan, terdapat 1 (satu) indikator kegiatan yang melampaui target, 9 (sembilan) indikator kegiatan memenuhi target, dan 2 (dua) indikator kegiatan tidak memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan, 5 (lima) Program dengan 7 (tujuh) indikator program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 15 (lima belas) indicator kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan 76 (tujuh puluh enam) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Terdapat 12 (dua belas) indikator sub kegiatan yang telah memenuhi target, dan indikator lainnya masih dalam proses pencapaian target akhir periode renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Banyumanik Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan
Wajib Kewilayahan Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN	47.247.941.532	45.193.218.870	95,65	2.054.722.652
	Belanja Langsung	47.247.941.532	45.193.218.870	95,65	2.054.722.652
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.536.495.160	15.549.617.732	94,03	986.877.428
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.467.777	9.467.777	100	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.591.654.532	12.222.669.022	97,10	11.368.985.510
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.892.945.454	1.790.444.922	94,59	102.500.532

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.612.382	82.950.000	99,21	662.382
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.747.114	141.160.059	94,27	8.587.055
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.190.473	759.125.656	92,33	63.064.817
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.892.485.186	12.726.739.283	91,61	1.165.745.903
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.160.909	5.770.000	70,70	2.390.909
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.220.631.000	12.150.628.483	91,91	1.070.002.517
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	663.693.277	570.340.800	85,93	93.352.477
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.631.001.341	17.290.491.651	98,07	340.509.690
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16.218.655.136	15.909.106.651	98,09	309,548,485
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.412.346.205	1.381.385.000	97,81	30,961,205
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.837.273	168.534.800	96,40	6.302.473
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	174.837.273	168.534.800	96,40	6.302.473

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebesar Rp. 47.247.941.532,- (Empat Pulu Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 45.193.218.870,- (Empat Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan sisa sebesar Rp. 2.054.722.652,- dengan uran berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 12.591.169.532,-, realisasi Rp. 12.226.205.222,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 364.964.310
- b. **Belanja langsung**, anggaran sebesar Rp. 34.656.772.000,- Dengan realisasi sebesar Rp. 32.967.013.648 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.689.758.342,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang,

yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Banyumanik Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Banyumanik Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Banyumanik Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Banyumanik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tujuan :								
1.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	83,17 %	91,56%		83,1 %		
2.	Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00 angka indeks	88 angka		87,00 % angka indeks	87,5 angka	88 angka
Sasaran :								
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	17,50 %			17,50 %		
2.	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Presentase capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	100,00 %			100,00 %		
		Cakupan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan umum, Pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	100,00 %			100,00 %		
Tujuan :	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	91	92	91	91	92

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		IKK	2021	2022	2023	2021	2022
Sasaran :							
1.	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		75 angka	75,5 angka		71 angka	75 angka
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik		1 angka	1 angka		1 angka	1 angka
3.	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan		95 %	97%		95 %	97%
4.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan		49 %	52 %		49 %	52 %
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan dan kelurahan		60 %	70 %		60 %	70 %

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat partisipasi masyarakat”, telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 83,17 % dari target sebesar 83,17 %;
- b. Tujuan **“Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 87,00 % dari target sebesar 87,00 %
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”, telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 17,50 % dari target sebesar 17,50 %
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
 - 1) “Presentase capaian kinerja kelurahan dan kecamatan” telah dapat memenuhi target sebesar 100 % dari target sebesar 100 %
 - 2) “Cakupan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan umum, Pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” telah dapat memenuhi target sebesar 100 % dari target sebesar 100 %

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAANMUSRENBANG / TAHUN RKPD)	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022
1	Jumlah Usulan	Usulan	-	135	130	169	135	130
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan	-	121	128	158	121	128
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	-	89,63	98,46	93,49	89,63	98,46

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 98,46 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 89,63 %.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Banyumanik sudah cukup baik, dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Dengan harapannya dapat terus meningkat dari tahun ke tahun
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dengan harapan kedepannya dapat terus ditingkatkan. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait kesetaraan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
 - Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
 - Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
 - Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan
- b. Peluang:
 - Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

- Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
- Dukungan stakeholder (tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga terkait)

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain :
 1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabe).
 2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
 4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- e. Persiapan Pilkada Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pemilihan umum (pemilu) dimana Pada tanggal 14 Februari 2024 akan ada pemilu presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

f. Pelayanan Publik Akhir Pekan

Kecamatan Banyumanik bersama Kecamatan lainnya di Kota Semarang telah menyelenggarakan layanan publik akhir pekan selama 5 kali pada tahun 2022. Antusiasme masyarakat sangat besar dengan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan ini. Secara ekonomi sangat membantu UMKM dalam memasarkan produk-produknya, disamping masyarakat dapat menerima layanan publik yang baik.

g. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FOKOMPIMCAM)

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan Muspida/Muspika yang dinamai Forkopimda/Forkopimcam. Dalam Forum ini diharapkan tercipta sinergi antara Kecamatan dan TNI/POLRI dalam menciptakan suasana kondusif masyarakat serta mengawal pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

h. Pemberdayaan Ekonomi

Adanya pandemi covid-19 selama 2 tahun memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam semua aktifitas masyarakat. Salah satunya adalah sektor ekonomi dimana banyak PHK dan meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Kecamatan Banyumanik pada tahun 2023 dan 2024 akan membangun shelter UMKM yang diharapkan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif

- 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas Kecamatan Banyumanik untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Kecamatan Banyumanik

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Banyumanik

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
7.01.0.00 .00.13. 0000	KECAMATAN BANYUMANIK					50.326.189.483	KECAMATAN BANYUMANIK					49.179.820.000	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.782.930.570	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	3.092.722.000	-		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	67.454.624	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	50.000.000	-		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	67.454.624	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	50.000.000	-		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	1.647.976.036	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	1.915.000.000	-		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	1.647.976.036	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	1.915.000.000	-		
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 %			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 %		-		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.067.499.910	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.127.722.000	-		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10 kegiatan	1.067.499.910	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10 kegiatan	1.127.722.000	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	32.075.320.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	30.931.386.000	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	14.644.300.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	30.232.700.000	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	170 angka	66.300.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	170 angka	50.000.000	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	12.183.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	13.868.630.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	2.395.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	16.314.070.000	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	17.431.020.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	698.686.000	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	17.374.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	174.000.000	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	56.820.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	524.686.000	-
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan		-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	16.200.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	0	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32 angka	16.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32 angka	0	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	16.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	0	-
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	70.579.764	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	55.000.000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	70.579.764	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	55.000.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	70.579.764	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	55.000.000	-
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	15.381.159.149	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	15.100.712.000	-
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %			Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %			Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	4.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	11.200.000	-
			Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen		-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	3.000.000	-
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen		-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.500.000	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.500.000	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.500.000	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.100.000	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1.100.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	13.849.845.483	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	13.515.445.000	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		-
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	13.277.265.483	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	12.965.195.000	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	571.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	544.500.000	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	2.750.000	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1.500.000	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.500.000	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	756.452.202	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	657.817.000	-
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	36.300.000	-
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	415.934.379	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	181.517.000	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 jenis	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 jenis	45.000.000	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	22.764.955	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	20.000.000	-

Rancangan Akhir RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
X.XX.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	89.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	75.000.000	-
X.XX.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 kegiatan	105.373.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 kegiatan	100.000.000	-
X.XX.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	48.279.868	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	200.000.000	-
X.XX.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	16.129.654	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	80.000.000	-
X.XX.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	16.129.654	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	80.000.000	-
X.XX.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	330.441.150	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	321.250.000	-
X.XX.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	116.235.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	151.250.000	-
X.XX.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	126.363.150	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	60.000.000	-
X.XX.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	87.842.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	110.000.000	-
X.XX.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	423.790.660	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	515.000.000	-
X.XX.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 unit	223.790.660	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 unit	240.000.000	-
X.XX.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	150.000.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	50.000.000	-
X.XX.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	75.000.000	-

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Banyumanik juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Banyumanik, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Banyumanik beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Banyumanik

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengaspalan	Jl. Payung Prasetya Raya RT 1 RW 13	Bangunan Fisik	600 m ²
2	Pekerjaan Talud	Jl. Kepodang Timur VI B RT 8 RW 12	Bangunan Fisik	500 m ²
3	Pekerjaan Saluran	Jl. Permata Raya RT 14 RW 6	Bangunan Fisik	500 m ²
4	Pembangunan Lapangan, Jogging Track, Tribun Penonton	Jl.H. Suradi RT 7 RW 3	Bangunan Fisik	1 lapangan
5	Pembukaan Jalan	Jl. Sendang Usodo (Bukit Ndanggi) RT 3 RW 3	Bangunan Fisik	500 m ²
6	Pavingisasi Jalan	Jalan Menuju Makam Mbah Kramat RT 1 RW 3	Bangunan Fisik	500 m ²
7	Pembangunan Balai Kelurahan	Jl. Mr. Abdoel Madjid Djojoningrat	Bangunan Fisik	1000 m ²
8	Perbaikan Jembatan	Jl. Ringin Bakti	Bangunan Fisik	1000 m ²
9	Pembangunan Kantor Kelurahan	Kelurahan Pedalangan RT 1 RW 1	Bangunan Fisik	300 m ²
10	Wisata Air	Jl. Mulawarman RT 4 RW 4	Bangunan Fisik	1000 m ²
11	Pelebaran Jalan	Jl. Klentengsari Raya RT 3 RW 2	Bangunan Fisik	1350 m ²
12	Pengaspalan Jalan	Jl. Ondorante RT 6 RW 5	Bangunan Fisik	1050 m ²
13	Pembangunan Joging Track	Jl. Sendang Gede RT 10 RW 2	Bangunan Fisik	1050 m ²
14	Pembuatan Talud Sungai RW 16	Jl. Keruing X RT 4 RW 16	Bangunan Fisik	500 m ²
15	Pembuatan Talud Sungai RW 18	Taman Setiabudi RW 18 RT 0 RW 1	Bangunan Fisik	500 m ²
16	Penambahan Biopori di Lingkungan RW	Jl. Bina Remaja No. 39	Bangunan Fisik	600 buah
17	Pelebaran Jembatan	Jl. Plansari RT 4 RW 9	Bangunan Fisik	120 m ²
18	Pekerjaan Saluran Air	Jl. Potrosari I RT 5 RW 2	Bangunan Fisik	250 m ²
19	Pembangunan Kantor Kelurahan dan Balai	Jl. Teuku Umar No. 56 RT 1 RW 1	Bangunan Fisik	300 m ²

Kelurahan				
20	Pembuatan Pos Paud Terintegrasi Pos Lansia Terpadu	Jl. Jatiluhur RT 4 RW 5	Bangunan Fisik	350 m ²
21	Pekerjaan Talud Sungai di jalan jatiluhur	Jl. Jatiluhur RT 4 RW 5	Bangunan Fisik	80 m ²
22	Pelebaran jalan jatingaleh I	Jatingaleh I antara RT 4 RW 1 dan RT 5 RW 2	Bangunan Fisik	450 m ²
23	Pagar Keliling Kantor Kelurahan Tinjomoyo	Jl. Taman Teuku Umar No.1 RT 1 RW 3	Bangunan Fisik	300 m ²
24	Bronjong	Jl. Gombel Lama RT 1 RW 5	Bangunan Fisik	250 m ²
25	Pelebaran Jalan	Jl. Suren Raya RW 5	Bangunan Fisik	500 m ²
26	Penerangan Jalan Umum	Jl. Wisma Prasetya I RT 5 RW 16	Bangunan Fisik	300 m ²
27	Perbaikan Talud	Jl. Puri RT 3 RW 4	Bangunan Fisik	84 m ³
28	Rehab Balai Kelurahan Sumurboto	Jl. Prof. Soedarto, SH No.71 RT 1 RW 4	Bangunan Fisik	375 m ²
29	Pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga	Jl. Bukit Umbul RT 5 RW 4	Bangunan Fisik	3500 m ²
30	Perbaikan jalan, saluran dan pedestrian	Jl. Prof Soedarto, SH No.71 RT 1 RW 4	Bangunan Fisik	700 m ²

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

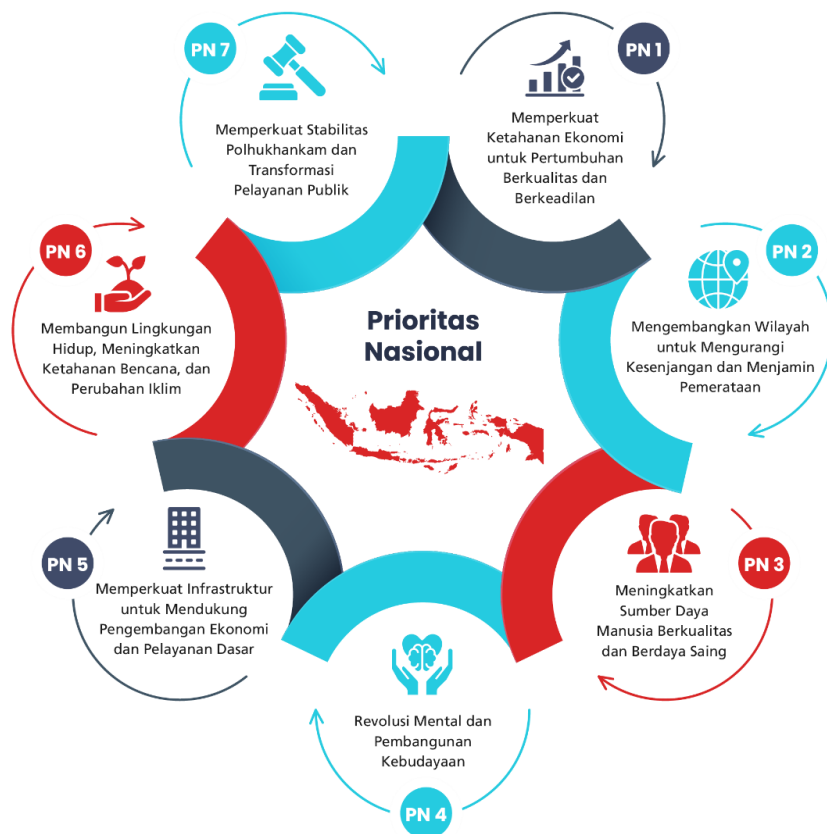
Dari 30 usulan masyarakat tersebut sudah disampaikan kepada OPD Teknis yang menangannya. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam mengakomodir usulan tersebut antara lain tingkat urgensi proyek, dan ketersediaan dana APBD untuk membiayai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Prioritas Nasional

Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah

- (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Banyumanik juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjaminkeselaras dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja

OPD Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu :

- a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator sasaran Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- c. Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indikator sasaran yaitu :
 1. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3-8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			(25.684.059)
8	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	Indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,70
11	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	Indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

Sumber : RKPd Kota Semarang Tahun 2023

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	75,5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	98
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	52
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	70

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Banyumanik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat seras penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator sasaran “Nilai AKIP, Jumlah Inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, presentase lembaga kemasyarakatan aktif, presentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				50.326.189.483				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Kecamatan Banyumanik	92 %	2.782.930.570	APBD Kota Semarang	-	92 %	2.782.930.570
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	1 angka	67.454.624	APBD Kota Semarang	-	1 angka	67.454.624
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	67.454.624	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	67.454.624
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	100 %	1.647.976.036	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.647.976.036
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	2 kegiatan	1.647.976.036	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	1.647.976.036
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	Kecamatan Banyumanik	100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	100 %	1.067.499.910	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.067.499.910

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	10 kegiatan	1.067.499.910	APBD Kota Semarang	-	10 kegiatan	1.067.499.910
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	98 %	32.075.320.000	APBD Kota Semarang	-	98 %	32.075.320.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	450 kegiatan	14.644.300.000	APBD Kota Semarang	-	450 kegiatan	14.644.300.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	170 angka	66.300.000	APBD Kota Semarang	-	170 angka	66.300.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	12.183.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 kegiatan	12.183.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	Kecamatan Banyumanik	20 kegiatan	2.395.000.000	APBD Kota Semarang	-	20 kegiatan	2.395.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Banyumanik	5 dokumen	17.431.020.000	APBD Kota Semarang	-	5 dokumen	17.431.020.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Kecamatan Banyumanik	5 dokumen	17.374.200.000	APBD Kota Semarang	-	5 dokumen	17.374.200.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Banyumanik	2 kegiatan	56.820.000	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	56.820.000
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan		1 kelurahan		APBD Kota Semarang	-	1 kelurahan	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	15 %	16.200.000	APBD Kota Semarang	-	15 %	16.200.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kecamatan Banyumanik	32 angka	16.200.000	APBD Kota Semarang	-	32 angka	16.200.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	3 kegiatan	16.200.000	APBD Kota Semarang	-	3 kegiatan	16.200.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	92 %	70.579.764	APBD Kota Semarang	-	92 %	70.579.764
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Banyumanik	2 kegiatan	70.579.764	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	70.579.764
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	2 kegiatan	70.579.764	APBD Kota Semarang	-	2 kegiatan	70.579.764
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	100 %	15.381.159.149	APBD Kota Semarang	-	100 %	15.381.159.149
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100 %		APBD Kota Semarang	-	100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kecamatan Banyumanik	7 dokumen	4.500.000	APBD Kota Semarang	-	7 dokumen	4.500.000
		Jumlah Dokumen pelaporan		2 dokumen		APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	Kecamatan Banyumanik	2 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	500.000
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)		1 dokumen		APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kecamatan Banyumanik	100 %	13.849.845.483	APBD Kota Semarang	-	100 %	13.849.845.483
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		3 dokumen		APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Banyumanik	100 %	13.277.265.483	APBD Kota Semarang	-	100 %	13.277.265.483

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kecamatan Banyumanik	100 %	571.080.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	571.080.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	1 dokumen	500.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	500.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Kecamatan Banyumanik	100 %	756.452.202	APBD Kota Semarang	-	100 %	756.452.202
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Banyumanik	7 jenis	15.000.000	APBD Kota Semarang	-	7 jenis	15.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Banyumanik	3 jenis	415.934.379	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	415.934.379
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Banyumanik	50 jenis	60.000.000	APBD Kota Semarang	-	50 jenis	60.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Banyumanik	4 jenis	22.764.955	APBD Kota Semarang	-	4 jenis	22.764.955
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Kecamatan Banyumanik	2500 orang	89.100.000	APBD Kota Semarang	-	2500 orang	89.100.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Banyumanik	15 kegiatan	105.373.000	APBD Kota Semarang	-	15 kegiatan	105.373.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	3 jenis	48.279.868	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	48.279.868
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Banyumanik	100 %	16.129.654	APBD Kota Semarang	-	100 %	16.129.654
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Banyumanik	2 jenis	16.129.654	APBD Kota Semarang	-	2 jenis	16.129.654
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Banyumanik	100 %	330.441.150	APBD Kota Semarang	-	100 %	330.441.150
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	12 bulan	116.235.600	APBD Kota Semarang	-	12 bulan	116.235.600
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Banyumanik	6 jenis	126.363.150	APBD Kota Semarang	-	6 jenis	126.363.150
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	100 %	87.842.400	APBD Kota Semarang	-	100 %	87.842.400
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Banyumanik	100 %	423.790.660	APBD Kota Semarang	-	100 %	423.790.660
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Kecamatan Banyumanik	30 unit	223.790.660	APBD Kota Semarang	-	30 unit	223.790.660
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	2 gedung	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 gedung	150.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Banyumanik	3 jenis	30.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 jenis	30.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Banyumanik	5 jenis	20.000.000	APBD Kota Semarang	-	5 jenis	20.000.000

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Banyumanik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder

pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

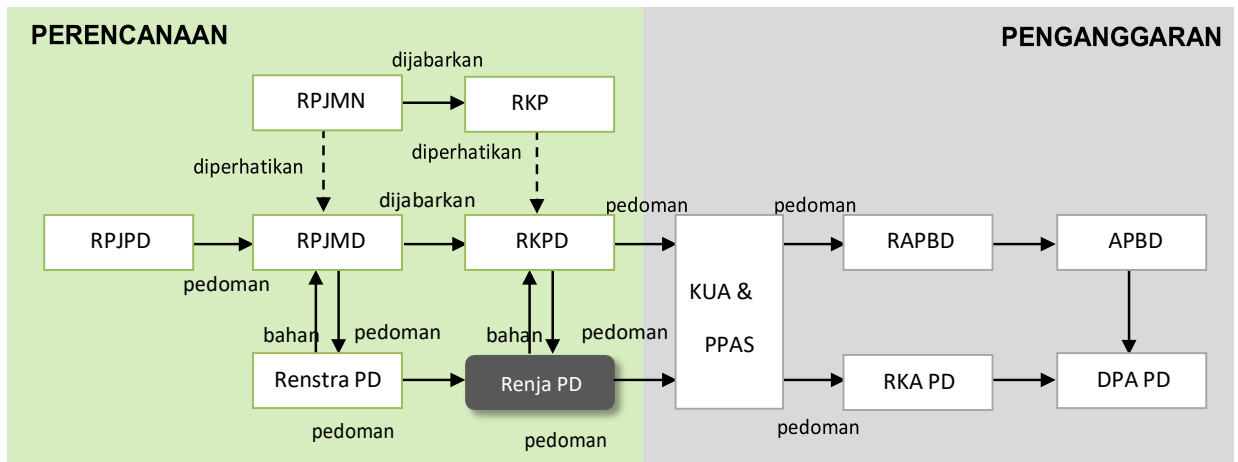
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Ngaliyan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngaliyan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Ngaliyan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Ngaliyan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

- Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target – target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Ngaliyan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Ngaliyan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Ngaliyan melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp48.081.712.690,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 44.316.760.745,00 atau sebesar 92,17%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	-	100%	148.82%	148.82%	100%	71.43%	71.43%
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi	95%	-	-	-	-	91%	65%	71.43%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	-	-	-	-	1 Angka	1 Angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Tingkat Kecamatan								
		Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran	100%		100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	76 Kegiatan	-	76 Kegiatan	76 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan	4 Kali	-	4 Kali	4 Kali	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan								
		Persentase Jumlah RW di Kelurahan yang Memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS	80.00 %	-	80 %	80%	100%	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	63.30%	63.30%
		Persentase Penyelenggaraan	100%	-	-	-	-	100%	63.30%	63.30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	51.39%	51.39%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Peningkatan Kapasitas	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		dan Etos Kerja								
		Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6500 Pelayanan	-	6500 Pelayanan	6500 Pelayanan	100%	-	-	-
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 Buah		2 Buah	2 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	2 kegiatan	66.67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambangrejo								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Tambakaji								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	-	100%	100%	100%	100%	51.17%	51.17%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	-	-	-	100%	51.17%	51.17%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3900 Angka	-	3900 Angka	3900 Angka	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan	6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kemiskinan di Kelurahan								
		Persentase Jumlah Aset yang Tercatat dan Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se-Kecamatan Tahun Berkenaan	85 %	-	85%	85%	85%	-	-	-
		Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang	100 %	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Tertangani								
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	60 %	-	60%	60%	60%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		100%	-	100%	4003		100%	51.55%	51.55%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	DAN KELURAHAN									
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	-	95%	64.66%	68%	97%	50%	51.54%
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95%	-	95%	14964		-	-	-
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan (Ngaliyan)	19954 Jumlah	-	19954 Jumlah	14964 Jumlah	75%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (Ngaliyan)	55%	-	55%	64.66%	117%	-	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	-	100%	100%	100%	100%	47.48%	47.48%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227 Kegiatan	-	-	-	-	377 kegiatan	179 kegiatan	47.48%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Lokasi yang Masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	165 Lokasi	-	165 Lokasi	165 Lokasi	100%	-	-	-
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	182 Angka	-	-	-	-	182 Angka	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kecamatan Ngaliyan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	-	100%	98.89%	98.89%	100%	0%	0
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Bringin								
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Kalipancur	15 Paket	-	15 Paket	13 Paket	87%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Berkenaan di Kelurahan Ngaliyan								
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wates	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Tambakai	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan								
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Podorejo	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Purwoyoso	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14 kegiatan	-	-	-	-	14 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	16 kegiatan	-	-	-	-	16 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	16 kegiatan	-	-	-	-	16 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	15 kegiatan	-	-	-	-	15 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambangremp								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	13 kegiatan	-	-	-	-	13 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	11 kegiatan	-	-	-	-	11 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	23 kegiatan	-	-	-	-	23 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	20 kegiatan	-	-	-	-	20 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Pembangunan di Kelurahan Wonosari								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	13 kegiatan	-	-	-	-	13 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	24 kegiatan	-	-	-	-	24 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Purwoyoso								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	17 kegiatan	-	-	-	-	17 kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	-	100%	100%	100%	100%	0	0
		Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai	17 Kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Media Pembinaan dan Pemberdayaan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	20 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Bringin	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Kalipancur	15 Paket	-	15 Paket	8 Paket	53%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Berkenaan di Kelurahan								
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Ngaliyan	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wates	5 Paket	-	5 Paket	5 Paket	100%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Tambakaji	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wonosari	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Berkenaan di Kelurahan Podorejo								
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Purwoyoso	15 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	-	15 Paket	15 paket	100%	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	56 kegiatan	-	-	-	-	56 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kecamatan Ngaliyan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	14 kegiatan	-	-	-	-	14 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Kalipancur								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	17 kegiatan	-	-	-	-	17 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Ngaliyan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	9 kegiatan	-	-	-	-	9 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15 kegiatan	-	-	-	-	15 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Tambakaji								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	13 kegiatan	-	-	-	-	13 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	11 kegiatan	-	-	-	-	11 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Podorejo								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	26 kegiatan	-	-	-	-	26 kegiatan	0	0
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	19 kegiatan	-	-	-	-	19 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Kelurahan Gondoriyo								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8	-	-	-	-	8 dokumen	4 dokumen	50%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	8 Kegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	0	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	-	-	-	-	1 kelurahan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 kegiatan	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90%	-	90%	90%	100%	-	-	-
		Persentase penurunan pelanggaran	30%	-	-	-	-	10%	10%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	-	100%	100%	100%	100%	52.63%	52.63%
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	0	-	-	-	-	38 Angka	20 Angka	52.63%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	80%	-	80%	80%	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	-	-	-	-	5 kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	-	-	-	-	90%	90%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	-	-	-	-	100%	0	0
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	0	0
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	KABUPATEN/KOTA									
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN NGALIYAN)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN NGALIYAN)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(Ngaliyan)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	-	100%	42.86%	42.86%	100%	80%	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	3 dokumen	60%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	0	0
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan		100%	-	100%	0	0	100%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Perubahan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	-	1 dokumen	0	0	1 dokumen	0	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	-	100%	0	0	100%	0%	0
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1.00 dokumen	-	1 dokumen	0	0	1 dokumen	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Realisasi Kinerja SKPD								
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen LKjIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0	0	-	-	-
		Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0	0	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja KECAMATAN	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		NGALIYAN								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-	100%	68.75%	68.75%	100%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	2 dokumen	50%
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	-	100%	100%	100%	100%	23.10%	23.10%
		Persentase ASN yang	100%	-	100%	100%	100%	100%	23.10%	23.10%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		disediakan Gaji dan Tunjangan	persen							
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	-	100%	75%	75%	100%	25%	25%
		Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100%	-	100%	75%	75%	-	-	-
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi	100%	-	-	-	-	100%	25%	25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Pelaksanaan Tugas								
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	-	-	-	-	100%	0%	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	0	0
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	-	100%	100%	100%	100%	0	0
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Cakupan pelaksanaan	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		administrasi umum								
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	-	100%	100%	100%	100%	20%	20%
		Komponen Listrik yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	1 jenis	20%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	100%	100%	100%		33.33%	33.33%
		Fasilitas Perlengkapan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	1 jenis	33.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	-	100%	100%	100%	100%	11.43%	11.43%
		Alat Tulis Kantor yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	-	-	-	-	35 jenis	35 jenis	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		100%	-	100%	100%	100%	100%	16.67%	16.67%
		Barang Cetak yang Disediakan Pada	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Tahun Berkenaan								
		Penggandaan yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	1 jenis	16.67%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	-	100%	100%	100%	100%	23.73%	23.73%
		Penyediaan Jamuan Rapat	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah tamu yang berkunjung	1500 orang	-	-	-	-	1500 orang	356 orang	23.73%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	21.67%	21.67%
		Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilakukan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	-	-	-	-	60 kegiatan	13 Kegiatan	21.67%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis	-	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	-	-	-	-	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	100%	100%	100%	100%	12.84%	12.84%
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	-	100%	100%	100%	100%	12.84%	12.84%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	-	-	-	100%	33.33%	33.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	2 jenis	33.33%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,		100%	-	100%	100%	100%	100%	8.33%	8.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	24 unit	-	-	-	-	24 unit	2 unit	8.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
		Lapangan								
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0
		Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	-	-	-	-	1 gedung	0	0
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung		100%	-	100%	100%	100%	100%	33.33%	33.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
	Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Komponen Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Rumah Dinas yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	1 jenis	33.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	11 = (10/9)
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0
		Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	0	0

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (empat) Program dengan 10 (sepuluh) Indikator Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan 90 (Sembilan puluh) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
 - b) Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program, terdapat 1 (satu) indikator yang melampaui target, 7 (tujuh) indikator memenuhi target, serta 2 (dua) indikator tidak memenuhi target.
 - c) Dari 11 kegiatan, terdapat 9 kegiatan yang memenuhi target, serta 2 kegiatan tidak memenuhi target. Sedangkan dari 90 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 77 indikator memenuhi target, serta 13 indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan, 5 (lima) Program dengan 7 (tujuh) indikator program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan 76 (tujuh puluh enam) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Terdapat 2 (dua) indikator program yang telah memenuhi target, dan indikator lainnya masih dalam proses pencapaian target akhir periode renstra.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Urusan Wajib Kewilayahan	48.081.712.690,00	44.316.760.745,00	92,17%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.330.182.000	15.015.107.166,00	86,6%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.675.000,00	4.202.500,00	25,2%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.970.000,00	1.200.000,00	60,9%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.225.000,00	1.791.600,00	55,6%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.465.000,00	356.500,00	10,3%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.805.000,00	546.825,00	19,5%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.625.000,00	307.575,00	11,7%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.485.000,00	0	0,0%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.132.084.000,00	11.921.067.225,00	84,4%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.635.776.000,00	11.465.277.225,00	84,1%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	492.743.000,00	455.790.000,00	92,5%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	0	0,0%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	370.000,00	0	0,0%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.974.079.000,00	1.786.405.150,00	90,5%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	4.141.600,00	51,8%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.200.000,00	388.731.500,00	78,2%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.700.000,00	35.561.015,00	77,8%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.854.000,00	6.578.435,00	47,5%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.400.000,00	53.773.600,00	95,3%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000,00	53.977.000,00	94,7%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.295.925.000,00	1.243.642.000,00	96,0%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.007.600,00	118.692.594,00	97,3%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.007.600,00	118.692.594,00	97,3%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.546.000,00	1.184.739.697,00	91,5%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.326.000,00	90.786.933,00	52,7%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.730.000,00	392.678.000,00	98,2%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	692.800.000,00	686.816.264,00	99,1%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.690.000,00	14.458.500,00	48,7%
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.383.356.000	1.318.231.895,00	55,3%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.041.000,00	5.245.000,00	86,8%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.041.000,00	5.245.000,00	86,8%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	958.000.000,00	881.601.898,00	92,0%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	958.000.000,00	881.601.898,00	92,0%
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	550.665.000,00	431.384.997,00	78,3%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	550.665.000,00	431.384.997,00	78,3%
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.922.405.400	10.581.740.014,00	96,9%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.423.405.400,00	10.092.579.575,00	96,8%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.255.000,00	15.647.525,00	85,7%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.081.916.000,00	9.847.216.750,00	97,7%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323.234.400,00	229.715.300,00	71,1%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	499.000.000,00	489.160.439,00	98,0%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.000.000,00	92.160.439,00	93,1%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	400.000.000,00	397.000.000,00	99,3%
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	210.200.000,00	204.261.580,00	97,2%
1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	210.200.000,00	204.261.580,00	97,2%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	210.200.000,00	204.261.580,00	97,2%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebesar Rp 48.081.712.690,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 44.316.760.745,- dengan sisa sebesar Rp 3.764.951.945,- (7,83%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 14.128.439.000,- realisasi Rp 11.921.067.225,00 (84,37%) dan sisa anggaran sebesar Rp2.207.371.775,00 (15,62%)
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 33.953.273.690,00 dengan realisasi sebesar Rp32.395.693.520,00 (95,41%) dan sisa anggaran sebesar Rp1.557.580.170,00 (4,59%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah melaksanakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Semarang Sampai
Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan :										
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	%	81,95	83,17	-	-	99	100		-
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	87	-	-	85	87		-
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	87.50	88.00	-	-	91,00	91,00
Sasaran:										
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	%	15	17	-	-	10	16	-	-
Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	%	99	99	-	-	99	99	-	-
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	%	100	100	-	-	100	100	-	-
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan	Nilai AKIP		-	-	75.00	75.50	-	-	75,00	75,50
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		-	-	1	1	-	-	11	11
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		-	-	86.00	88.00	-	-	100	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	-	50.00	55.00	-	-	50.00	55.00
	Persentase pembinaan Wawasan		-	-	70.00	80.00	-	-	70.00	80.00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan									

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan”**, memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Tingkat partisipasi masyarakat”**, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 83,17% (capaian sebesar 120,24%);
- b. Tujuan **“Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani”**, memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 87% (capaian sebesar 100%)
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu, Indikator “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan” belum dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 16% dari target sebesar 17% (capaian sebesar 94,18%). Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- d. Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan” dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 99% dari target sebesar 99.00% (capaian sebesar 100%);
 - 2) Indikator “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2022 pada triwulan kedua adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi ”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 87.50 dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 91,00% (capaian 104%);
- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Nilai AKIP”**, target sebesar 75.00 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 71.61 (capaian 95,48%);

- c. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”**, target sebesar 1 inovasi dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 11 inovasi (capaian 1.100%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”**, target sebesar 84% dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 100% (capaian 119,05%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator **“Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** dapat mencapai target sebesar 50%, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 100%);
 - 2) Indikator **“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** dapat mencapai target sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 70% (capaian sebesar 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (SPBE) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	91	92	93	90	91.54	92	93

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) menjadi salah satu penyumbang keberhasilan Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari aspek Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE), aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yaitu jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan pada tahun 2021, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	66	66	98,00 %	99,00 %	66	66	100,00 %	100,00 %
2	Jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan	62	64	100,00 %	100,00 %	66	66	100,00 %	100,00 %
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	95,00 %	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi Persentase Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 100% melebihi target renstra yang harus dicapai yaitu sebesar 97%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari upaya menurunkan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021 / 2022	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Pelanggaran Perda tahun perencanaan	Usulan					4.567	4.235		
2	Jumlah pelanggaran perda tahun n	Usulan					3.390	3.182		

3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	71,00	72,00	73,00	74,00	74,23	75,14	75,00	75,00
---	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kecamatan Ngaliyan, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa persentase persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngaliyan sebesar 75,14 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2020 sebesar 74,23 %.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan sampai tahun 2021 sudah cukup baik, dimana sebagai target yang ditetapkan dapat dicapai pada Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian pada akhir periode Tahun 2021 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal. Selain itu, cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Terhambatnya kelancaran pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan dikarenakan penyebaran Covid-19 yang masih aktif. Fenomena ini juga berdampak hingga ke dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan aspek aspek lainnya.
- b. Lesunya pembangunan ekonomi diakibatkan keterbatasan ruang gerak akibat adanya covid-19. Walaupun angka penyebaran covid-19 sudah menurun, namun efeknya bagi pembangunan ekonomi masih jelas terasa. Sehingga diperlukan kegiatan yang membentuk sebuah pola atau sistem untuk memperbaiki pembangunan ekonomi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan
 - 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
 - 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
 - 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaianya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis:

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat

kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.

- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain :
 1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabe).
 2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
 4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- e. Persiapan Pilkada Tahun 2024
Tahun 2024 merupakan tahun pemilihan umum (pemilu) dimana Pada tanggal 14 Februari 2024 akan ada pemilu presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- f. Pelayanan Publik Akhir Pekan
Kecamatan Ngaliyan beserta Kecamatan lainnya di Kota Semarang menyelenggarakan layanan publik akhir pekan pada tahun 2022. Antusiasme masyarakat sangat besar dengan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan ini. Secara ekonomi sangat

membantu UMKM dalam memasarkan produk-produknya, disamping itu masyarakat dapat menerima layanan publik yang baik.

- g. Adanya Fasilitas Aduan 24 jam
LAPOR DULUR NGALIYAN merupakan inovasi Pelayanan Aduan Kecamatan Ngaliyan yang siap melayani 24 jam bagi masyarakat apabila ada Keluhan, kritik, dan saran dari Pelayanan Kecamatan Ngaliyan. Selain itu warga masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait pelayanan, baik pelayanan umum, kebersihan, kebencanaan, aduan warga dan lain-lain dapat menghubungi ke nomor aduan 081226626206.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa

- 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas Kecamatan Ngaliyan untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan

kebangsaan

- 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel

- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Kecamatan Ngaliyan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Ngaliyan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 Kecamatan Ngaliyan melakukan review dengan melakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				49.668.402.192	KECAMATAN NGALIYAN				48.794.811.000	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngaliyan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.686.896.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	3.365.520.000	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	62.492.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	100.000.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	62.492.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	100.000.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	1.353.804.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	2.035.000.000	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	1.353.804.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.035.000.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.270.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.230.520.000	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	1.270.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1.230.520.000	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	32.754.762.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 %	31.131.600.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	14.169.489.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	30.797.600.000	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	109 angka	50.374.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	5 kegiatan	12.053.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	12.053.000.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	23 Kegiatan	2.066.115.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	16.793.800.000	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	18.585.273.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	334.000.000	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen	18.374.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	134.000.000	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1 kegiatan	211.273.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000	-
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan		-
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	63.283.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	50.000.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	63.283.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	50.000.000	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	63.283.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000	-
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	92.469.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	30.000.000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	92.469.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	30.000.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 kegiatan	92.469.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	30.000.000	-
NON URUSAN											
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	14.070.992.192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	14.217.691.000	-
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %			Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %			Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	18.516.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	17.000.000	-
			Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen		-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	5.530.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	2.000.000	-
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen		-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.530.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.000.000	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.855.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	2.000.000	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.925.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.000.000	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.159.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.093.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	856.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Laporan	3.000.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	12.795.614.192	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	12.207.399.924	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen		-
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	12.306.355.192	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang/bulan	12.306.355.192	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	486.035.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	499.000.000	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.333.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	3.200.000	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	896.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3.100.000	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	995.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.700.000	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	365.081.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.008.000.000	-
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	8.000.000	-
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	132.763.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	100.000.000	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	55.000.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	9.111.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	13.000.000	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2000 orang	8.892.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	65.000.000	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	70.956.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	100.000.000	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	107.359.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	667.000.000	-
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	59.912.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100.000.000	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	59.912.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	100.000.000	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	221.714.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	235.291.076	-
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	121.348.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	175.291.076	-
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	100.366.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	60.000.000	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	610.155.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	650.000.000	-
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	158.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	200.000.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	271.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	200.000.000	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	5.125.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	100.000.000	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 jenis	175.530.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	150.000.000	-

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Kecamatan Ngaliyan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Daftar Usulan Prioritas Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Uraian Permasalahan	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengecoran Jalan Di Jl. Bukit Gondoriyo	Jl. Gondoriyo %U2013 Beringin (Bukit Gondoriyo) Rt 04 Rw 04 Gondoriyo	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	50 m	
2	Saluran Air Pasangan Batu	Jalan Palir-Podorejo Rt 00 Rw 03 Podorejo	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	245.16 m	
3	Pengaspalan Jalan	Jl.Banjarsari Rt 001 Rw 020 Bringin	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	1044 m ²	
4	Pengaspalan Jalan Rt 02 Rw 03	Jl. Sriwibowo V RT 02 RW 03 PURWOYOSO	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	1044 m ²	
5	Betonisasi Jalan	Jl.Candi Penataran Selatan Rt 0 Rw 04	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	625 m ²	
6	Saluran Air	Jalan Simongan Raya Rt 0 Rw 01 Kalipancur	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	36 m ³	
7	Talud Saluran Air Kampung Tematik Kp. Kalipancur Rt. 08 Rw. 03	Kp. Kalipancur Rt 08 Rw 03 Bambankerep	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	156 m ³	
8	Pembuatan Saluran Air	Jl. Wismasari Raya Rt 02 Rw 01 Ngaliyan	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	1 Paket	
9	Pembuatan Talud Saluran	Perbatasan Antara RT 06 RW 01 TAMBAKAJI (Sendang Ngetuk)	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	200 m ²	
10	Talud Jalan	Perum Beringin Asri Rt 8 Rw 11 Wonosari	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	106.00 m	
11	Pengaspalan Jalan	Jalan Kampung Jambu Kristal Rt 0 Rw 2 Wates	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	1040 m ²	
12	Pavingisasi Halaman Kantor Kec. Ngaliyan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1 Ngaliyan	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	500 m ²	
13	Perbaikan Lapangan Olahraga Kecamatan Ngaliyan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1 Ngaliyan	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di Wilayah Kecamatan	1250 m ²	

Tabel 2.9
Daftar Skala Prioritas Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Melalui Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
GONDORIYO				
1	Pembangunan Talud Saluran Air	Jl. Kalikangkung Rt 01 Rw 01	125 X 0,5 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Pengecoran Jalan Gang	Jl. Kalikangkung Rt 01 Rw 02	130 X 2,5 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pembangunan Talud Jalan	Jl. Jلودang Rt 02 Rw 03	100 X1 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pembangunan Talud Jalan	Jl. Salamkerep Rt 03 Rw 02	100X1 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Pengaspalan	Jl. Salamkerep Rt 03 Rw 01	115 X 2,5 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pavingisasi Jalan Rt 02 & Rt 04 Rw 04	Jl. Gondoriyo Rt 03 Rw 01	100 X 2,5 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Saluran Air (Jalan Bukit Gondoriyo)	Jl. Gondoriyo - Beringin (Bukit Gondoriyo) Rt 04 Rw 07	200 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pavingisasi Jalan	Jl. Gondoriyo Rt 04 Rw 01	100 X 2,5 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Talud Tebing	Jl. Bukit Beringin Selatan Blok F Rt 05 Rw 04	85 X 0,75 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Talud Saluran Rt 01 & Rt 05	Jl. Bukit Beringin Asri Rt 06 Rw 01	150 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pembuatan Saluran Air Rt 01 & Rt 02 Rw 07	Jl. Bukit Beringin Asri Rt 07 Rw 01	300 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Perbaikan Saluran Air	Jl. Griya Lestari Rt 08 Rw 04	100 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Gorong Gorong Jalan Bukit Gondoriyo	Jl. Gondoriyo - Beringin (Bukit Gondoriyo)	125 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
14	Perbaikan Saluran Air	Jl. Griya Lestari Rt 09 Rw 02	100X0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Pembangunan Balai Rw 10	Jl. Bukit Beringin Timur Rt 10 Rw 03	20 X 10 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
16	Talud Saluran Air	Jl. Graha Beringin Mas Raya Rt 11 Rw 04	100 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
17	Crossing Saluran Air Dengan Bis U	Jl. Bukit Beringin Selatan Blok G Rt 12 Rw 02	125 X 0,4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
PODOREJO				
1	Balai RW	Jalan Kaliancar-Podorejo	100 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Pengaspalan Jalan	Jalan Palir-Podorejo	500 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pelebaran Jalan	Jalan Padaan-Podorejo	290 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Pengaspalan Jalan	Jalan Padaan-Podorejo	456.5 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Saluran Air	Jalan Grujugan -Podorejo	55.4 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Talud Saluran Bis U 20	Jalan Grujugan -Podorejo	380 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pavingisasi Jalan	Jalan Podorejo	371 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Balai RW	Jalan Palir Sejahtera-Podorejo	24 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Talud Jalan Menuju Makam RW 10	Jalan Podorejo	72 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
12	Saluran Bis U-20	Jalan Palir Asri-Podorejo	220 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Pengaspalan Jalan	Jalan Palir Utama RT 12 RW 05	1050 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Rehab Kantor Kelurahan (Atap dan Plafon)	Jalan Kauman No.02 RT 10 RW 03	1 Paket	Alokasi Dasar/Afirmasi
BRINGIN				
1	Saluran Air	Jl.Beringin	133 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Saluran Air	Jl.Pandana Merdeka	88 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Talud Saluran	Jl.Duwet RT 04 RW 02	115 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Saluran Air	Jl.Mega Raya	115 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Saluran Air	Jl.Dharma Raya	213 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Saluran Air	Jl.Bukit Barisan	131 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Saluran Air	Jl.Mega Permai	133 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Saluran Air	Jl.Taman Beringin Elok	133 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Talud Jalan	Jl.Bukit Mandiri Beringin RT 16 RW 03	88 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Saluran Air	Jl.Taman Puri Banjaran	106 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Saluran Air	Jl.Banjaran	88 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pengaspalan Jalan	Jl.Pengilon II	390 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pengaspalan Jalan	Jl.Wates	338 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pengaspalan Jalan	Jl.Anggrek	390 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Rehab Bangunan Kantor Kelurahan	Jl.Beringin Raya	1 ls	Alokasi Dasar/Afirmasi
PURWOYOSO				
1	Pengaspalan Jalan RT 04,05,06,07 RW 01	Jl. Sriwidodo Selatan	470 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Pengaspalan Jalan RT 02, 03, 04 RW 02	Jl. Sriwidodo I, V dan IX	516 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Talud Sungai Silandak RT 01 RW 04	Jl. Sriyatno Selatan	78 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Saluran Air RT 02 RW 06	Jl. Srikaton Barat III dan IV	133 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Saluran Air RT 01 dan 03 RW 07	Jl. Srikaton	91 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 08	Klampisan	332 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Perbaikan Talud Jalan RT 04 RW 08	Klampisan	47 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pembangunan Balai RW XI	Jl. Segaran II / Gang Buntu	1 Paket	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Konstruksi Beton Bertulang Tower	Jl. Honggowongso	1 Paket	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pelebaran Jembatan RT 01 RW 12	Jl. Purwoyoso I	104 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Saluran Air RT 11 RW 13	Jl. Silandak Selatan	133 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
12	Balai RW 13	Jl. Silandak	1 Paket	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Talud Jalan RT 05 RW 14	Jl. Borobudur	90 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
14	Pengaspalan Jalan C	Jl. Srikaton Utara	475 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Saluran Air RT 03 RW 10	Perum BPI	107 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
KALIPANCUR				
1	Saluran air	Jalan Candi Pawon Selatan X RT 05 dan RT 07 RW 01	18,45 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Perbaiki gedung serba guna	Mayangsari	65 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Perbaiki lapangan	Mayangsari	809 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Saluran air dan gorong- gorong	Jalan Candi Penataran Selatan	12,75 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Saluran air	Jalan Candi Penataran Timur	8,64 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Renovasi Balai RW	Jalan Candi Penataran Raya RW 4	65 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Saluran air	Jalan Candi Tembaga Tengah I	7,35 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Saluran air	Jalan Candi Mas Raya	16,5 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Saluran air	Candi Kencana Raya	12,45 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Renovasi Balai RW	Jalan Candi Prambanan VII RW 10	33 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pembangunan Balai RW	Jalan Penataran Utara II RW 12	33 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Pekerjaan talud saluran	Jalan Candi Kalasan Timur I	25,8 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Saluran air	Jalan Candi Kalasan VII dan VIII	17,55 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
14	Rehab pagar dan tempat parkir Kantor Kelurahan	Jalan Abdulrahman Saleh 291	187,5 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
BAMBAKEREK				
1	Saluran Air Dengan Bis U Pucung Rt. 01 Rw. 01	Pucung	409 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Saluran Air Dengan Bis U Pucung Rt. 02 Rw. 01	Pucung	409 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Saluran Air Dengan Bis U Pucung Rt. 03 Rw. 01	Pucung	409 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pengaspalan Jalan Bambankerep Rt. 01 Rw. 02	Bambankerep	350 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Pavingisasi Jalan Bambankerep Rt. 01 Rw. 02	Bambankerep	315 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Talud Saluran Air Kp. Kalipancur Rt. 01 Dan 04 Rw. 03	Kp. Kalipancur	98 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Talud Saluran Air Gunung Payung Rt. 06 Rw. 03	Gunung Payung	59 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pengaspalan Jalan Poros Jl. Candisari Rw.Iv	Jl. Candisari	1.050 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
9	Talud Jalan Jl. Candisari Rt. 10 Rw. 04	Jl. Candisari	39 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh Rt. 07 Rw. 04	Jl. Candi Sukuh	39 m ³	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pengaspalan Jalan Jl. Candisari Rt.01 Rw.V	Jl. Candisari	525 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Pavingisasi Jalan Jl Candi Sukuh Rt. 05 Rw. 05	Jl Candi Sukuh	477 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Rehab Kantor Kelurahan Bambankerep	Jl. Untung Suropati	1 unit	Alokasi Dasar/Afirmasi
NGALIYAN				
1	Normalisasi Saluran	Jl. Wismasari Selatan	40 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Talud Saluran	Klampisan	200 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pengaspalan Jalan	Jl. Karonsih Utara V	500 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Karonsih Iv	480 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Talud Saluran	Jl. Karonsih Timur Raya Iv	200 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pengaspalan Jalan	Jl. Karonsih Selatan Vi	550 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Pembangunan Gapura	Jl. Bukit Ngaliyan Permai Blok. G	1 Paket	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pipanisasi Air	Jl. Wismasari	150 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Pembuatan Saluran Air	Desel	200 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pembuatan Talud Saluran	Kedungpane	150 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pembuatan Talud Sungai	Kedungpane	150 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Pembuatan Talud Lapangan	Jl. Karonsih Baru	75 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Pembuatan Talud Saluran	Depan Kantor Kelurahan	50 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
TAMBAKAJI				
1	Pengaspalan Jalan	Jalan Sunan Malik Ibrahim	758 m ² /tahun	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Normalisasi Kalisegaran	Belakang Kampus I Uin Walisongo	74 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pavingisasi Jalan Gang Buntu	Dekat Hotel Tugu Indah	275 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Balai Rw 08	Rt 03 Rw 08	24 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Pavingisasi	Jalan Gang Rt 02	242 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Rehabilitasi Talud Tandon Air Bersih (Bongkar & Pasangan Baru)	Jl.Koro Raya	90 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Pembuatan Talud Penahan Tebing	Jl.Kapri Raya	48 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Talud Badan Jalan	Jalan Utama	43 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Talud Badan Jalan	Jalan Utama	43 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
10	Pengaspalan Jalan	Jalan Utama	457 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Saluran Air	Tegalrejo Dari Barat Ke Timur Sepanjang Jalan Pembatas Rt 09 Dan Rt 06	84 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Talud Jalan	Jl. Puncaksari Timur	32 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Saluran Air	Gang No 5 Jl. Margosari Kampung Tegalrejo (Gang Tpq Darussalam)	63 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
14	Perbaiki Saluran Air Llingkungan	Perumahan Pondok Ngaliyan Asri	43 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Membuat Balai Rw	Tanah Fasum, Sebelah Mushola Al-Fatah	42 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
16	Membuat Talud Mushola AL-Ijlah Halamin	Sebelah Mushola Al-Ishlahul Amin	32 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
17	Pengaspalan Jalan	Jalan Sunan Kudus	400 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
18	Perbaiki Saluran Air	Jalan Sunan Kudus	80 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
19	Perbaiki Saluran Air	Jalan Utama	60 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
20	Saluran Air	Jl. Raya Beji	100 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
21	Perbaiki Saluran Air	Villa Ngaliyan Permai Rt 03 Rw 14	300 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
22	Pembangunan Saluran Dan Pagar Pengaman	Jl. Tambakaji Rt 5	25 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
23	Rehab Lapangan Olahraga	Perum Bank Niaga Rt 02 Rw 14	38,08 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
24	Pavingisasi	Lingkungan Kantor Kelurahan	300 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
WONOSARI				
1	Pengaspalan Jalan	Jl. Rowosari 5b	196 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Balai Rw	Jl. Kuda Rw 7	27 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pengaspalan Jalan	Jl. Wonosari	196 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pengaspalan Jalan	Jl. Wonosari Masjid	196 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Pembangunan Rumpin	Bukit Beringin Utara	27 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pengaspalan Jalan	Jl. Kav Permata Beringin Raya Gg 1	196 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Renovasi Kantor Kelurahan	Wonosari	34 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Talud Dan Saluran Air	Jl. Gunung Jati	42.9 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Talud Dan Saluran Air	Jl. Plumbon	42.9 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pengaspalan Jalan	Wonosari	196 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Talud Dan Saluran Air	Jl. Wonosari Rt 05 Rw 05	40 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Talud Tebing	Wonosari Rt 06 Rw 04	29.7 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Talud Dan Saluran Air	Wonosari	42.9 m	Alokasi

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
				Dasar/Afirmasi
14	Talud Dan Saluran Air	Jl. Karangnongko Raya 1	42.9 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Talud Dan Saluran Air	Wonosari	40 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
16	Talud Dan Saluran Air	Wonosari Rt 012 Rw 03	40 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
17	Talud Dan Saluran Air	Wonosari Rt 13 Rw 01	40 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
18	Talud Dan Saluran Air	Wonosari Rt 14 Rw 12	40 m	Alokasi Dasar/Afirmasi
WATES				
1	Pavingisasi Jalan	Jl Manggis Rt 02, 05, 11	390 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Pengaspalan Jalan	Jl Rejomulyo I	380 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Saluran Air	Jl Rejomulyo Raya	43.5 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pengaspalan Jalan	Wates Rt 01,02,11	420 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Saluran Air Bis U	Wates Rt 03,04,05,07,12	54 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pavingisasi Jalan	Wates Rt 06,08	260 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Saluran Air Bis U	Wates Rt 01,02,03	45 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Saluran Air Bis U	Wates Rt 04,07,10	37.5 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Talud Jalan	Jl Sirendeng	48 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pengaspalan Jalan	Jl Wates Permai Raya	450 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Saluran Air Bis U	Jl Sirendeng Rt 01,02,03	57 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Pengaspalan Jalan	Kantor Kelurahan Wates	300 m ²	Alokasi Dasar/Afirmasi

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

Tabel 2.10
Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Melalui Fasilitas Musrenbang Kelurahan Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
KELURAHAN GONDORIYO				
1	Pelatihan Pengelolaan Limbah Sampah Menjadi Sumber Pendapatan	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Pengelolaan Limbah Sampah Menjadi Sumber Pendapata
2	Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Dan Pola Asuh Anak Usia Dibawah 5 Tahun	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kurangnya Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang
3	Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kurangnya Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
4	Sosialisasi Tentang Pernikahan Dini Untuk Anggota Fatayat Muslimat	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kurangnya Sosialisasi Tentang Pernikahan Dini
5	Pelatihan Membuat Aneka Masakan Berbahan Dasar Ikan	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Cara Membu
6	Sosialisasi Kelompok Wanita Tani (Urban Farming)	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kurangnya Sosialisasi Tentang Urban Farming
7	Pelatihan Ekoprint	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kerangnya Pengetahuan Tentang Ekoprint
8	Lomba Baca Surat-Surat Pendek Al Qur'an (Juz Amma) Untuk Anak-Anak Usia 6-11 Tahun	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Pengembangan Baca Surat- Surat Pendek Al Qur'an Un
9	Lomba Publik Speaking Tentang Covid-19 Untuk Anak Anak Usia 16-21 Tahun	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Pengembangan Publik Speaking Untuk Anak Usia 16-21
10	Rembug Perempuan	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Rembug Perempuan
11	Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba Dan Cara Penanggulangannya	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Kurangnya Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba
KELURAHAN PODOREJO				
1	Sosialisasi Parenting Anak (Narkoba)	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Mencegah Anak Dalam Hal Penggunaan Narkoba
2	Pelatihan Konselor Sebaya	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Meningkatkan Keterampilan
4	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Meningkatkan Kompetensi Kader
5	Sosialisasi Menggunakan Medsos Yang Baik dan Menumbuhkembangkan	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Penggunaan Medsos yang Baik
7	Pelatihan Pembuatan Sabun Cair Bagi Penyandang Disabilitas, Remaja, dan IRT	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Meningkatkan Keterampilan
8	Sosialisasi KBM, MKJP untuk Usia Produktif	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Menumbuhkan Pengetahuan
10	Rembug Sang Puan	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Menambahkan Pengetahuan
11	Lomba Menghafal Surat Pendek untuk Anak Usia 9-12th	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Meningkatkan Kemampuan Anak
13	Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Menumbuhkan Pengetahuan Lembaga Forum Anak
14	Pelatihan Pembuatan Menu Sehat Bayi dan Balita	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Meningkatkan Keterampilan
16	Penyuluhan untuk Meningkatkan Keimanan Karakter dan Mental Perempuan	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Meningkatkan Kerohanian dan Mental
KELURAHAN BRINGIN				
1	Pelatihan Untuk Anak Difabel Sebagai Bekal Pondasi Awal	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Ketrampilan
2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi IT Bagi Ibu-ibu	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan
3	Pelatihan SAR dan Evakuasi Bagi Anak-anak	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
4	Penyuluhan Psikologi - Konseling Penyembuhan Trauma	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan
5	Penyuluhan KB dari Segi Agama	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan
6	Penyuluhan Lanjutan Tentang Kesehatan Reproduksi Bahaya Seks Bebas dan Pernikahan Dini	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan
7	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba untuk Anak	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan
8	Sosialisasi dan Pelatihan Bisnis untuk Anak	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Ketrampilan
9	Lomba Bulutangkis Anak dan Pameran Buku	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan & Ketrampilan
10	Sosialisasi dan Pendidikan Anti Korupsi untuk Anak	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan
KELURAHAN PURWOYOSO				
1	Sosialisasi Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Beretika Bagi Orang Tua	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
2	Pelatihan Pendamping untuk Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
3	Pelatihan Kader Pos Paud	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
4	Sosialisasi Pengasuhan pada Anak Usia Dini dan Remaja	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
5	Sosialisasi Pengaruh Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Remaja	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
6	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
7	Sosialisasi Pengaruh Media Sosial di Kalangan Remaja	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
8	Penguatan Forum Anak dalam Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
9	Pelatihan Pembuatan APE Bagi Tenaga Pendidik	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
10	Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
11	Sosialisasi Penanganan Anak Korban Penyalahgunaan Gadget dan Korban Pornografi	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
12	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
13	Musyawarah Sang Puan	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (AD)
KELURAHAN KALIPANCUR				

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
1	Posyandu untuk Penyandang Difabel	Kelurahan Kalipancur	12 kegiatan	
2	Sosialisasi Pendidikan Karakter Anak untuk Pencegahan Pernikahan Dini	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
3	Pembinaan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan menuju era digital, bagi orang tua	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
4	Pelatihan dan simulasi Kesiapsiagaan Bencana Bagi Anak dan remaja	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
5	Penyuluhan tentang Kenakalan Remaja dan Penanggulangan Narkoba bagi Remaja	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
6	Penguatan Pengurus Forum Anak Dalam meningkatkan Partisipasi anak untuk pembangunan	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
7	Penyuluhan Pendampingan Anak Penyandang Kebutuhan Khusus	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
8	Pelatihan Untuk Peningkatan Kualitas Kader Pos PAUD dan Rumpin (IT, Admintrasi, dll)	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
9	Pelatihan Pengolahan Makanan untuk Menggugah Selera Makan Anak	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
10	Pelatihan Public Speaking/MC Bagi Anak & Remaja	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
KELURAHAN BAMBANKEREP				
1	Pengajian	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
2	Penguatan Forum Anak	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
4	Sosialisasi Gemar Membaca & Penggunaan Gedged dengan baik untuk anak	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
5	Pelatihan Pembuatan pangan alternatif	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
7	Pelatihan Pengelolaan Sampah limbah Rumah Tangga	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
8	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
9	Lomba Hafalan ayat pendek Al'Quran untuk anak	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
11	Sosialisasi Gemar makan ikan	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
12	Pelatihan Melukis diatas kain	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
13	Pelatihan Public speaking bagi perempuan	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
15	Pelatihan membuat Tas Rajut	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
KELURAHAN NGALIYAN				
1	Sosialisasi Perlunya Kwt (Kelompok Wanita Tani)	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
2	Sosialisasi Pembuatan Mpasi Untuk Mencegah Stunting	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
3	Sosialisasi Tentang Edukasi Sex Pada Anak Usia Dini	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Wawasan Anak Usia Dini
4	Sosialisasi Permainan Tradisional Pada Anak - Anak	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Wawasan Anak - Anak
5	Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Edukasi (Ape) Untuk Anak Usia Dini Dari Bahan Dasar Limbah Kardus Dan Kain Perca	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
6	Lomba Administrasi Posyandu Terintegrasi	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
7	Lomba Keterampilan Dari Bahan Dasar Kain Perca	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
8	Pelatihan Memasak Aneka Puding	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
KELURAHAN TAMBAKAJI				
1	Pemulasaran Jenazah Perempuan	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
2	Parenting Pola Asuh Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
3	Sosialisasi Pendidikan Kesadaran Bela Negara	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
4	Penguatan Forum Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
5	Sosialisasi Peran Keluarga Dalam Pendidikan Kesetaraan Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
6	Pelatihan Pembuatan Menu Makanan	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
7	Sosialisasi Dampak Buruk Penggunaan Gadget Pada Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
8	Sosialisasi Penguatan Kampung Dan Administrasi Kb Kelurahan Tambakaji	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
9	Sosialisasi / Motivasi Gemar Membaca Pada Anak	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
10	Sosialisasi Penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Jppa) Kelurahan Tambakaji	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
KELURAHAN WONOSARI				
1	Penguatan Kapasitas Forum Anak	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
2	Penguatan Kapasitas Bahaya Narkoba	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
3	Penguatan Kapasitas Urban Farming	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
4	Penguatan Kapasitas Pencegahan Kdrt Ibu Dan Anak	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(10)
5	Penguatan Kapasitas Kepribadian / Public Speaking Untuk Remaja	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
6	Penguatan Kapasitas Parenting (Pola Asuh Orang Tua Terhadap Nak)	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
7	Penguatan Kapasitas Kader Pola Asuh Anak Dan Remaja	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
8	Penguatan Kapasitas Penggunaan Gadget Secara Efektif	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
9	Penguatan Kapasitas Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
KELURAHAN WATES				
1	Penguatan Forum Anak	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
2	Pelatihan Urban Farming	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
3	Penyuluhan Pola Asuh Anak	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
4	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Miras	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
5	Sosialisasi Kelompok Wanita Tani	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
6	Pelatihan Kecantikan Wajah (Bauty Class)	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
7	Penguatan dan Pencegahan KDRT	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
8	Sosialisasi Pengelolaan Pokdarwis	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas
9	Sosialisasi Digital Marketing	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru/Prioritas

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

Tabel 2.11

**Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi Dan Usaha Mikro) Melalui Fasilitas Musrenbang Kelurahan Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
KELURAHAN GONDORIYO					
1	Sosialisasi Perijinan Online Nib & Iumk	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
2	Sosialisasi Perijinan Pirt & Produk Halal	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
3	Pelatihan Peningkatan Pelayanan	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
4	Gelar Produk Usaha Mikro Kelurahan Saat Hut Ri	Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
5	Gelar Produk Usaha Mikro Kelurahan Saat Hut Kota Semarang	Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
6	Gelar Produk Usaha Mikro Kelurahan Saat Menjelang Lebaran	Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
7	Rapat Koordinasi Rutin	Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
8	Tranport Kegiatan	Kelurahan Gondoriyo	105 Orang	Baru	Prioritas Bidang Ekonomi
KELURAHAN PODOREJO					
1	Rapat Koordinasi Rutin	Balai Kelurahan Podorejo	12 Bulan	Baru	Meningkatkan Koordinasi
2	Sosialisasi Perizinan PIRT dan Halal	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Keterampilan Warga
3	Sosialisasi Pemasaran Secara Online	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Keterampilan Warga
4	Sosialisasi Budi Daya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER)	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Keterampilan Warga
5	Gelar Produk Saat HUT Kota Semarang	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru	Mengenalkan Produk-Produk Unggulan Podorejo
6	Pelatihan Olahhan Pisang	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Keterampilan
7	Pelatihan Olahhan Singkong	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Keterampilan
8	Temu Usaha (Berbagai Macam Usaha / Mitra)	Balai Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Keterampilan
9	Transport Pengurus	Balai Kelurahan Podorejo	0	Baru	
KELURAHAN Bringin					
1	Sosialisasi Kredit Wibawa	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Perekonomian
2	Sosialisasi dan Pelatihan OSS	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Pengetahuan Ekonomi
3	Pelatihan dan Perijinan PIRT	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Pengetahuan Ekonomi
5	Pelatihan dan Sertifikasi Halal	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Pengetahuan Ekonomi
6	Bazar Produk Koperasi dan Usaha Mikro Lokal Kelurahan HUT Kota Semarang	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Perekonomian
7	Kegiatan Rutin GKS Bringin	Jl.Beringin Raya	11 Bulan	Baru	Meningkatkan Ketrampilan Perekonomian
8	Bazar Produk Koperasi dan Usaha Mikro Lokal Kelurahan HUT RI	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Baru	Meningkatkan Perekonomian
10	Transport GKM	Jl.Beringin Raya	11 Bulan	Baru	Pemberdayaan Perekonomian (AD)
KELURAHAN PURWOYOSO					
1	Rapat Koordinasi Rutin GKS	jl. Sriwidodo Utara	9 Bulan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
2	Kegiatan Pelatihan Pemasaran Secara Online	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
3	Sosialisasi Perijinan PIRT	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
4	Pelatihan Pembuatan Kemasan	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
5	Kegiatan Pelatihan Perijinan OSS	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
6	Gelar Produk Usaha Mikro Lokal Kelurahan Blanja Wargo	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
7	Transport	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
8	Pembuatan Makanan Tradisional	jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Ekonomi (AD)
KELURAHAN KALIPANCUR					
1	Rapat Koordinasi Rutin	Kelurahan Kalipancur	12 kegiatan	Baru	
2	Sosialisasi Pengembangan Produk Lokal	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	Baru	
3	Pelatihan Pemasaran Online	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	Baru	
4	Temu Usaha bagi Pelaku UMKM	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	Baru	
5	Gelar Produk dalam rangka HUT Kota Semarang	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	Baru	
6	Gelar Produk dalam rangka HUT RI	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	Baru	
7	Gelar Produk Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	1 kegiatan	Baru	
8	Rakor Persiapan Pelaksanaan Event	Kelurahan Kalipancur	2 kegiatan	Baru	
9	Transport Pengurus	Kelurahan Kalipancur	12 bulan	Baru	
KELURAHAN BAMBANKEREP					
1	Pelatihan Pemasaran Secara On Line	Balai Kelurahan Bambangkerep	1 Kegiatan	Baru	
2	Pelatihan Pengembangan Produk Lokal Kelurahan	Balai Kelurahan Bambangkerep	1 Kegiatan	Baru	
3	Sosialisai dan Pelatihan perijinan OSS	Balai Kelurahan Bambangkerep	1 Kegiatan	Baru	
4	Sosialisasi Kredit Wibawa	Balai Kelurahan Bambangkerep	1 Kegiatan	Baru	
5	Temu Usaha	Balai Kelurahan Bambangkerep	2 Kegiatan	Baru	
6	Gelar Produk UMKM tiap RW	Balai Kelurahan Bambangkerep	1 Kegiatan	Baru	
7	Transport kegiatan	Balai Kelurahan Bambangkerep	1 Tahun	Baru	
8	Rapat Koordinasi Rutin (6 kali)	Balai Kelurahan Bambangkerep	6 Kegiatan	Baru	
KELURAHAN NGALIYAN					
1	Rapat Koordinasi Rutin Pengurus	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Tahun	Baru	Konsumsi, Fotokopi, Atk
2	Sosialisasi Perizinan Oss	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Baru	Meningkatkan Keterampilan Warga
3	Gelar Produk 1	Lapangan Volly Depan Kec. Ngaliyan	1 Paket	Baru	Pameran Produk Umkm Kelurahan Ngaliyan
4	Pelatihan Memasak Makanan Khas Semarang	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Baru	Meningkatkan Keterampilan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
					Warga
5	Gelar Produk 2 (Bazar Ramadhan)	Depan Kantor Kelurahan	1 Paket	Baru	Mengenalkan Kepada Warga Produk Umkm Kel Ngaliyan
6	Sosialisasi Pemasaran Secara Online Bagi Umkm	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Baru	Meningkatkan Keterampilan Warga
7	Transport Pengurus	Kantor Kelurahan Ngaliyan	1 Tahun	Baru	Transport Untuk Menghadiri Kegiatan Bagi Pengurus
KELURAHAN TAMBAKAJI					
1	Pelatihan Pengembangan produk lokal usaha mikro kelurahan	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
2	Pelatihan Pemasaran secara on-line	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
3	Sosialisasi perijinan OSS & Prosedur kredit wibawa	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
4	Sosialisasi Pemberdayaan lele	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
5	Sosialisasi ijin P-IRT	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
6	Gelar produk usaha mikro lokal kel. saat HUT kota semarang	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
7	Rapat Koordinasi Rutin	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
8	Transport Kegiatan 1 Tahun GERAI KOPI MI	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru	Baru Prioritas
KELURAHAN WONOSARI					
1	Transport	Balai Kelurahan Wonosari	0 -	Baru	Untuk Anggota
2	Sosialisasi Packaging	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Baru	Untuk Kepentingan Masyarakat
3	Pelatihan Pembuatan Olahan Pangan	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Baru	Untuk Kepentingan Masyarakat
4	Pelatihan Pemasaran Secara Online	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Baru	Untuk Kepentingan Masyarakat
5	Gelar Produk Usaha Mikro Dan Lokal Kelurahan	Shelter Semarang Zoo	2 Kegiatan	Baru	Untuk Kepentingan Masyarakat
6	Rapat Rutin Pengurus	Balai Kelurahan Wonosari	12 Bulan	Baru	Untuk Kepentingan Koordinasi Kegiatan
KELURAHAN WATES					
1	Gelar Produk (Bazaar)	Wates	1 Tahun	Baru	Baru/Prioritas
2	Rutin GKS	Wates	1 Tahun	Baru	Baru/Prioritas
3	Transport Kegiatan	Wates	1 Tahun	Baru	Baru/Prioritas
4	Sosialisasi GKS Dan NIB	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas
5	Sosialisasi Kredit Wibawa Dan Perijinan	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
6	Pelatihan Pengemasan Dan Pemasaran	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas
7	Pelatihan Administrasi Keuangan (Literasi Keuangan)	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas
8	Pelatihan Pengolahan Jambu Kristal	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas
9	Pelatihan Kerajinan Tangan (Craft, Buket Bunga)	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas
10	Lomba Kreasi Hasil Produk Bazaar	Kantor Kelurahan Wates	1 Kegiatan	Baru	Baru/Prioritas

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

Tabel 2.12
Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya Melalui Fasilitas Musrenbang Kelurahan Tahun 2023 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KELURAHAN GONDORIYO				
1	Pelatihan Lanjutan Bela Negara Bagi Anggota Linmas	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Pelatihan Untuk Anggota Linmas
2	Pelatihan Simulasi Penanggulangan Bencana Dan Basic Life Support	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
3	Pelatihan Penguatan Jaringan Usaha Bagi Lembaga Masyarakat & Pelaku Usaha	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
4	Sosialisasi Sop (Standart Operating Prosedure) Di Tempat Pariwisata	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
5	Sosialisasi Manajemen Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
6	Pelatihan Seni Baca Alqur'an Untuk Anggota Muslimat Dan Anggota Kelembagaan Masyarakat	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
7	Lomba / Turnamen Futsal Antar Rw	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
8	Rembug Warga	Balai Kelurahan Gondoriyo	1 Kegiatan	Prioritas
KELURAHAN PODOREJO				
1	Wayangan	Kelurahan Podorejo	1 Kegiatan	Acara Sekedah Bumi Warga Podorejo
KELURAHAN BRINGIN				
1	Pra Musrenbang	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik
2	Musyawaharah Sang Puan	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pembangunan Non Fisik
3	Pelatihan untuk Kader Baru Pos PAUD	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan & Ketrampilan
4	Pelatihan Ecoprint	Jl.Beringin Raya	1 Kegiatan	Meningkatkan Ketrampilan
5	Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna	Jawa Tengah	1 Kegiatan	Meningkatkan SDM Remaja

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KELURAHAN PURWOYOSO				
1	Keterampilan Membuat Tas Rajut	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
2	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
3	Penyuluhan bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
5	Pelatihan tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
6	Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
8	Pelatihan Pengolahan Sampah	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
9	Pelatihan Pemanfaatan Barang Habis Pakai (Minyak Jelantah)	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
10	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penerapan PHBS	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
13	Rembug Warga	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
14	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
16	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
17	Sosialisasi Urban Farming	Jl. Sriwidodo Utara	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (AD)
KELURAHAN KALIPANCUR				
1	Pagelaran Wayang	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
2	Pelatihan LINMAS	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
3	Pelatihan membuat Eco Enzym	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
4	Sosialisasi mengenai Permasalahan Hasil Panen, Memilih Bibit Unggulan, Pemanfaatan Limbah Dapur	Kelurahan Kalipancur	1 kegiatan	
KELURAHAN BAMBANKEREP				
1	Sosialisasi Pendidikan Nasionalisme Bagi Generasi Muda	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Pencegahan Radikalisme	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
3	Sosialisasi & Pelatihan Penangan Bencana Alam (2 Kegiatan)	Balai Kelurahan Bambankerep	2 Kegiatan	
3	Pelatihan Urban Farming	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
4	Pagelaran Wayang Kulit	Balai Kelurahan Bambankerep	1 Kegiatan	
KELURAHAN NGALIYAN				
1	Sosialisasi Psikologis Bagi Lansia	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
2	Sosialisasi Pembuatan Obat Tradisional Dari Hasil Toga	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pelatihan Pembuatan Keterampilan Berbahan Dasar Minyak Jelantah	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
4	Pelatihan Pembuatan Administrasi Keuangan Umkm Perempuan	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
5	Pelatihan Membuat Souvenir Berbahan Limbah Rumah Tangga Dan Layak Dijual	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
6	Sosialisasi Lingkungan Bersih Dan Sehat (Lbs) Dan Pembuatan Biopori	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
7	Pelatihan Cara Bertanam Hidroponik Dan Tabulampot	Balai Kelurahan Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga
KELURAHAN TAMBAKAJI				
1	Pelatihan / Workshop Pengukuran Antrometri Dalam Upaya Mendukung Pencegahan Stunting Di Kelurahan Tambakaji	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
2	Pemberian Timbangan Badan Dan Alat Ukur Tinggi Badan	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
3	Kirim Do'a Arwah Jamak Rw 01 Tambakaji	Sendang Ngetuk	1 Kegiatan	Baru Prioritas
4	Pengajian Umum Rw 12 Tambakaji	Balai Kelurahan Tambakaji	1 Kegiatan	Baru Prioritas
KELURAHAN WONOSARI				
1	Sedekah Desa Khol Kh. Safi'i Prio Ngoro	Pondok Luhur Dondong	1 Kegiatan	Untuk Melestarikan Budaya
2	Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Meningkatkan Kemampuan Dalam Penanganan Benc
3	Penguatan Kapasitas Kader Membuat Olahan Dari Bahan Ikan	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Meningkatkan Kemampuan Dalam Olahan Ikan
4	Tepat Guna Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk	Balai Kelurahan Wonosari	1 Kegiatan	Untuk Kepentingan Masyarakat
KELURAHAN WATES				
1	Sedekah Desa Kelurahan Wates	Wates	1 Kegiatan	Untuk melestarikan budaya turun-temurun
2	Penguatan Kader Kelembagaan	Wates	1 Kegiatan	Untuk meningkatkan kapasitas kader kelembagaan

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

Tabel 2.13
Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya
Melalui Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)
1	Lomba Tari Gambang Semarang Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
2	Lomba Tari Warak Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
3	Lomba Tari senam denok tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
4	Lomba Gobak sodor Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
5	Karnaval Dugderan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
6	Updating Data Penyandang Masalah Sosial	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
7	Rapat LPTQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
8	Rapat Gerai KopiMi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
9	Bazar UMKM	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
10	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
11	Rapat Persiapan Lomba Pokdarwis Tingkat Kota Semarang (3x)	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
12	Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
13	Revitalisasi UKS	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
14	Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
15	UMKM Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
16	Porseni Kecamatan Ngaliyan	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
17	PORWAKOS	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
18	Gebyar Pos PAUD dan Workshop	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
19	Billyard Tingkat Kota (6x)	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
20	Lomba Menyanyi Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
21	Sosialisasi Undang-Undang No.8 Th.2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
22	Pelatihan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
23	Penguatan Kelembagaan Lansia 2x	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
24	Mewujudkan Lansia yang Sehat	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
25	Batko TPQ	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
26	Sosialisasi Pola Asuh Anak	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
27	Pelatihan Olahan Pangan B2SA	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
28	Pembinaan Mental Spiritual Bagi Lansia	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)
29	Lomba Menghidangkan Masakan Bagi Lansia	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
30	Senam & Jalan Sehat Lansia	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Rt 3 Rw 1	1 Kegiatan	Baru
31	Lomba Senam Lansia dan Pra Lansia Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
32	Transport Kegiatan LANSIA	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
33	Pelatihan content creator anak dan remaja	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
34	Lomba denok dan kenang remaja tingkat kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
35	Pelatihan pengelolaan sampah menuju zero sampah	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
36	Sosialisasi Pengolahan Makanan Sehat Bagi Anak	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
37	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Wanita	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
38	Sosialisai Pola Asuh Anak	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
39	Pelatihan Marketing Digital	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
40	Sosialisasi Dampak Buruk Penggunaan Gadget	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
41	Peningkatan kualitas kader posyandu	Jl. Prof Dr.Hamka No.234	1 Kegiatan	Baru
42	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru
43	Peningkatan Kualitas Kader Posyandu	Kecamatan Ngaliyan	1 Kegiatan	Baru

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Perangkat Daerah Teknis Kota Semarang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.14
DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEWENANGAN OPD TEKNIS
KECAMATAN NGALIYAN

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GONDORIYO					
1.	Perbaikan Kantor & Balai & Rumah Dinas Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan	JL. KRT Wongsonegoro RT 1 RW 7 Kel. Gondoriyo	3 Bangunan	Gedung sudah banyak kerusakan	Dinas Penataan Ruang
2.	Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Paud	Kelurahan Gondoriyo	5 Paud		Dinas Pendidikan
3.	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Rebana	Kelurahan Gondoriyo	2 Set	Kelompok RW 11 & RW 04	Dinas Sosial
4.	Pengadaan Meja Kursi	Kelurahan	12		Dinas Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Posyandu	Gondoriyo	Posyandu		
5.	Pengadaan Outdoor Playground Untuk Curug Gondoriyo	Curug Gondoriyo	1 Set		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
6.	Alat Peraga Edukasi Untuk PAUD	Kelurahan Gondoriyo	5 Paud		Dinas Pendidikan
PODOREJO					
7.	Rehab Balai Kelurahan Podorejo	Jalan Kauman No.02 RT 3 RW 10	1 Paket	Rusak, Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Penataan Ruang
8.	Pembangunan Baru Kantor Kelurahan Podorejo	Jalan Kauman No.02 RT 3 RW 10 Kel. Podorejo	1 Paket	Rusak, Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Penataan Ruang
9.	Jembatan RW 10	Jalan Kauman 02 RW 10 Kel. Podorejo	90 m2	Rusak, Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Pekerjaan Umum
10.	Saluran Air Pasangan Batu	Jalan Podorejo RW 8 Kel. Podorejo	255,5 m	Rusak, Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Pekerjaan Umum
11.	Saluran Air Pasangan Batu	Jalan Palir Podorejo RW 3 Kel. Podorejo	367 m	Rusak, Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Pekerjaan Umum
12.	Betonisasi Jalan	Jalan Kyai Padak RW 8 Kel. Podorejo	1 paket	Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Pekerjaan Umum
13.	Saluran Air Pasangan Batu	Jalan Palir Podorejo RW 09, RW 11, RW 12 Kel. Podorejo	1 paket	Dibutuhkan bersifat mendesak	Dinas Pekerjaan Umum
14.	Meja Posyandu	Podorejo RW.01 s/d RW.12 Kel. Podorejo	60 meja	Membutuhkan 5 Meja x 12 Posyandu	Dinas Kesehatan
15.	Kursi Posyandu	Podorejo RW.01 s/d RW.12 Kel. Podorejo	120 kursi	Membutuhkan 10 Kursi x 12 Posyandu	Dinas Kesehatan
16.	Alat Test Gula Darah	Podorejo RW.01 s/d RW.12 Kel. Podorejo	12 Unit	Membutuhkan 1 Unit x 12 Posyandu	Dinas Kesehatan
17.	Alat Test Asam Urat	Podorejo RW.01 s/d RW.12 Kel. Podorejo	12 Unit	Membutuhkan 1 Unit x 12 Posyandu	Dinas Kesehatan
18.	Alat Tensi Digital	Podorejo RW.01 s/d RW.12 Kel. Podorejo	12 Unit	Membutuhkan 1 Unit x 12 Posyandu	Dinas Kesehatan
19.	Meja dan Kursi Pos Paud Bintang Utama	Jalan Palir Utama V B-125 RT 2 RW 12 Kel. Podorejo	15 Paket	Meningkatkan Proses Kegiatan Belajar	Dinas Pendidikan
BRINGIN					
20.	Meja dan Kursi untuk Posyandu	Kel. Beringin	66 Set	Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Dinas Kesehatan
21.	Alat Olahraga	Kel. Beringin	22 Buah	Meningkatkan Pembangunan Fisik	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Bibit Tanaman Toga	Kel. Beringin	300 Bibit	Meningkatkan Pembangunan Non Fisik	Dinas Pertanian
23.	Meja dan Kursi untuk Pos PAUD	Kel. Beringin	66 Set	Meningkatkan Pembangunan Non Fisik	Dinas Pendidikan
24.	Pengadaan Sound System	Kel. Beringin	22 Buah	Meningkatkan Pembangunan Fisik	Sekretaris Daerah
25.	Pengadaan Hotspot Area	Kel. Beringin	22 Titik	Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Sekretaris Daerah
26.	Pengadaan Rak Buku	Kel. Beringin	4 Buah	Meningkatkan Pembangunan Non Fisik	Dinas Pendidikan
27.	Pembangunan Talud Bronjong	Jl.Permata Puri RT 1 RW 8 Kel. Beringin	333 M3	Rusak, di butuhkan bersifat Mendesak	Dinas Pekerjaan Umum
28.	Peningkatan Jalan KRT. Wongsonegoro	JL. KRT Wongsonegoro Kel. Beringin	12000 M2	Arus Lalu Lintas Padat	Dinas Pekerjaan Umum
PURWOYOSO					
29.	Kursi Posyandu	Jl. Sriwidod Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	170 Kursi	10 kursi X 17 Posyandu = 170 kursi RW 1 s/d RW 14	Dinas Kesehatan
30.	Rehab Balai Kelurahan	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	1 Paket	Fasilitasi OPD Distaru	Dinas Penataan Ruang
31.	Rehab Sekretariat PKK dan FKK	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	1 Paket	Fasilitasi OPD Distaru	Dinas Penataan Ruang
32.	Rehab Sekretariat Karang Taruna	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	1 Paket	Fasilitasi OPD Distaru	Dinas Penataan Ruang
33.	Peningkatan Jl. Gatot Subroto	JL. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso	8000 M2	Arus Lalu Lintas Padat	Dinas Pekerjaan Umum
34.	Meja Posyandu	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	85 meja	5 meja X 17 Posyandu = 85 meja RW 1 s/d RW 14	Dinas Kesehatan
35.	Alat test gula darah	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	17 Posyandu	1 X 17 Posyandu RW 1 s/d RW 14	Dinas Kesehatan
36.	Alat test asam urat	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	17 Posyandu	1 X 17 Posyandu RW 1 s/d RW 14	Dinas Kesehatan
37.	Alat tensi digital	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	17 Posyandu	1 X 17 Posyandu RW 1 s/d RW 14	Dinas Kesehatan
38.	Alat Biopori	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	40 Paket	40 paket RW 1 dan RW 9	Dinas Pertanian
39.	Komposter	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	27 Paket	27 Paket RW 14	Dinas Pertanian
40.	Meja dan Kursi Pos Paud	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel.	15 Paket	15 Paket RW 2 Pos Paud	Dinas Pendidikan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Purwoyoso		Sriwidodo	
41.	Tikar untuk pengajian	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	10 Tikar	Pengajian Kelurahan	Sekretaris Daerah
42.	Bibit Lele	Jl. Sriwidodo Utara RT 2 RW 1 Kel. Purwoyoso	5000 Ekor	RW 1	Dinas Perikanan
KALIPANCUR					
43.	Pembangunan Baru Kantor Kelurahan	Jalan Abdulrahman Saleh 291 RT 4 RW 11 Kel. Kalipancur	1 unit		Dinas Penataan Ruang
44.	Pengadaan komputer	Kelurahan Kalipancur	2 set	untuk menunjang operasional Gerai Kopi&Mi dan PKK	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
45.	Pengadaan alat pengeras suara/speaker	Kelurahan Kalipancur	2 buah	untuk kegiatan POSBINDU	Dinas Kesehatan
46.	Alat Test Gula darah	Kelurahan Kalipancur	14 buah	Cek Gula darah untuk 13 Posyandu lansia dan 1 posy	Dinas Kesehatan
47.	Timbangan Badan/Tinggi Badan	Kelurahan Kalipancur	14 buah	Timbangan dan tinggi badan untuk 13 Posyandu lansia	Dinas Kesehatan
48.	Tensimeter Digital	Kelurahan Kalipancur	14 set	Tensimeter untuk 13 Posyandu lansia dan 1 posyandu	Dinas Kesehatan
49.	Pengadaan meja	Kelurahan Kalipancur	5 buah	Peralatan untuk posyandu difable	Dinas Kesehatan
50.	Pengadaan kursi	Kelurahan Kalipancur	10 buah	Peralatan untuk posyandu difable	Dinas Kesehatan
51.	Pengadaan Mesin Potong Kayu	Kelurahan Kalipancur	1 buah	alat potong pohon tumbang untuk SIBAT	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
52.	Pengadaan Tandu Lipat	Kelurahan Kalipancur	2 set	alat evakuasi bencana oleh sibat	Dinas Kesehatan
53.	Alat Pemadam Powder Dry Chemical ABC (Cartridge) Ukuran 6 Kg	Kelurahan Kalipancur	3 unit	Alat pencegahan kebakaran oleh sibat	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
54.	Pengadaan Handy Talky (HT)	Kelurahan Kalipancur	3 unit	alat komunikasi daerah bencana oleh sibat	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
55.	Green House Tanaman Hidroponik	Kelurahan Kalipancur	1 paket	KWT Tunas Teratai	Dinas Pertanian

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56.	Ban Dalam Ukuran 900	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	10 buah	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
57.	Ban Dalam Ukuran 700	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	10 buah	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
58.	Alat Tambal Ban Listrik	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	1 set	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
59.	Pelampung	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	15 buah	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
60.	Pelindung Siku Dan Lutut	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	15 buah	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
61.	Pelindung Kepala (Helm)	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	15 buah	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
62.	Sepatu Karet	Mayangsari RW 2 Kel. Kalipancur	10 pasang	POKDARWIS River Tubing Mayangsari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
BAMBankEREP					
63.	Pagar Makan Kalipancur Gunung Payung RT. 05 RW. 03	Gunung Payung RT 5 RW 3 Kel. Bambankerep	400 M ³		Dinas Penataan Ruang
64.	Talud Tebing Candisari RW. 04	Candisari RW 4 Kel. Bambankerep	400 M ³		Dinas Pekerjaan Umum
65.	Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan Jl. Untung Suropati RW. 05	Jl. Untung Suropati RW 5 Kel. Bambankerep	2400 M ²		Dinas Penataan Ruang
66.	Sound System Portable	Jl. Untung Suropati Kel. Bambankerep	1 Unit	Fatayat NU Anak Ranting	Sekretaris Daerah
67.	Spiner	Jl. Untung Suropati Kel. Bambankerep	1 Unit	Kelompok Wanita Tani Bambankerep	Dinas Pertanian
NGALIYAN					
68.	Pengadaan Alat Peraga Penyuluhan Kb	RT 6 RW 1 Kel. Ngaliyan	26 Unit	Meningkatkan Pengetahuan Warga Tentang Kb	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
69.	Bantuan Peralatan Hidroponik	RT 6 RW 1 Kel. Ngaliyan	13 Unit	Meningkatkan Keterampilan Warga	Dinas Pertanian
70.	Bantuan Bibit Tanaman Toga Dan Buah	RT 6 RW 1 Kel. Ngaliyan	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Warga	Dinas Pertanian
71.	Bantuan Alat Pembuatan Biopori	RT 6 RW 1 Kel. Ngaliyan	1 Paket	Mengurangi Genangan Air Warga	Dinas Pertanian
TAMBAKAJI					
72.	Meja Posyandu	Kel. Tambakaji	1 Paket	Harga SSH 2021 5X32 POSYANDU = 160	Dinas Kesehatan
73.	Kursi Posyandu	Kel. Tambakaji	1 Paket	Harga SSH 2021 5X32 POSYANDU = 320	Dinas Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74.	Alat Tes Gula Darah	Kel. Tambakaji	5 Unit	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Kesehatan
75.	Alat Tes Asam Urat	Kel. Tambakaji	5 Unit	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Kesehatan
76.	Alat Tensi Digital	Kel. Tambakaji	5 Unit	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Kesehatan
77.	Alat Cek Kolestrol	Kel. Tambakaji	5 Unit	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Kesehatan
78.	Timbangan Digital	Kel. Tambakaji	5 Unit	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Kesehatan
79.	Alat Pengukur Suhu	Kel. Tambakaji	5 Unit	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Kesehatan
80.	Alat Biopori	Kel. Tambakaji	20 Buah	Untuk 5 POSBINDU, Harga Mencari Di SSH 2021	Dinas Pertanian
81.	Alat Untuk Administrasi Komputer Dll	Kel. Tambakaji	1 Paket	Sekretariat Geraikopimi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
82.	Ape Ayunan	Kel. Tambakaji	2 Paket	Untuk 2 Pos Paud Di RW 9 Dan 11	Dinas Pendidikan
83.	Balok	Kel. Tambakaji	2 Paket	Untuk 2 Pos Paud Di RW 9 Dan 11	Dinas Pendidikan
84.	Perosotan	Kel. Tambakaji	2 Paket	Untuk 2 Pos Paud Di RW 9 Dan 11	Dinas Pendidikan
85.	Benih Toga	RT 1 RW 1 Kel. Tambakaji	170 Paket	Untuk Kegiatan Lpmk	Dinas Pertanian
86.	Warung Hidup	RT 1 RW 1 Kel. Tambakaji	170 Paket	RW 1 - 16 Usulan LPMK	Dinas Pertanian
87.	Tanaman Penghijauan	Kel. Tambakaji	170 Paket	RW 1 - 16 Usulan LPMK	Dinas Pertanian
88.	Sarpras Bkb	Kel. Tambakaji	5 Paket	Untuk Bkb	Dinas Pendidikan
89.	Sarpras Perpustakaan Anak	Kel. Tambakaji	1 Paket	Forum Anak	Dinas Pendidikan
WONOSARI					
90.	Perkuatan Talud Brojong	JL. Griya Beringin Asri RT 3 RW 13 Kel. Wonosari	616.5 M	Rawan Longsor, Sungai Beringin	Dinas Pekerjaan Umum
91.	Pembuatan Talud Sungai	JL. Griya Beringin Asri RT 3 RW 13 Kel. Wonosari	1800 M	Penahan Banjir Sungai Beringin	Dinas Pekerjaan Umum
92.	Peningkatan Jalan Koptu Suyono	JL. Koptu Suyono Kel. Wonosari	30000 M ²	Arus Lalu Lintas Padat	Dinas Pekerjaan Umum

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan	Kewenangan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93.	Pengadaan Perpustakaan Untuk Warga	RT 1 RW 8 Kel. Wonosari	1 Paket	Pengadaan Buku Dan Rak / Almari Buku	Dinas Pendidikan
94.	Bantuan Alat Bantu Dengar Untuk Disabilitas	Kel. Wonosari	1 Paket	Disabilitas Rungu Kurang Lebih 10 Orang	Dinas Sosial
95.	Pengadaan Alat Untuk Posyandu Lansia Dan Remaja	Kel. Wonosari	1 Paket	Timbangan, Pengukur Tinggi Badan, Alat Ukur Tensi	Dinas Kesehatan
96.	Pengadaan Meja Pingpong Untuk Menunjang Kegiatan Karang Taruna	Kel. Wonosari	3 buah	Pengajuan 3 Meja Pingpong	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
97.	Pengadaan Meja Kursi Untuk Menunjang Kegiatan Posyandu	Kel. Wonosari	27 Unit	Untuk 27 Posyandu Di Wilayah Kel. Wonosari	Dinas Kesehatan
98.	Pengadaan Alat Olah Raga Untuk Menunjang Kegiatan Anak - Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba	RW 10 Kel. Wonosari	15 Orang	Untuk 15 Anak - Anak Binaan Ibm Damarwulan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
WATES					
99.	Peninggian Jembatan	RT 7 RW 2 Kel. Wates	60 M ²	Jembatan rendah dan rusak berat	Dinas Pekerjaan Umum
100	Peninggian Jembatan dan Normalisasi Sungai Sikere	RT 4 RW 3 Kel. Wates	20 M ²	Jembatan rendah dan sungai terdapat sedimentasi	Dinas Pekerjaan Umum
101	Perbaikan Balai Kelurahan	RW 1 Kel. Wates	500 M ²	Kondisi balai rusak parah	Dinas Penataan Ruang
102	Saluran Irigasi Tersier LP2B	RT 11 RW 3 Kel. Wates	200 M ²	Untuk lahan pertanian	Dinas Pekerjaan Umum
103	Meja Posyandu	Kel. Wates	35 Buah	5 Meja x 7 Posyandu	Dinas Kesehatan
104	Kursi Posyandu	Kel. Wates	70 Buah	10 Kursi x 7 Posyandu	Dinas Kesehatan
105	Alat Tensi Digital	Kel. Wates	7 Buah	1 x 7 Posyandu	Dinas Kesehatan
106	Almari Arsip 2 Pintu Swing	Kel. Wates	7 Buah	1 x 7 Posyandu	Dinas Kesehatan
107	PMT Lansia	Posyandu Cempaka 1, Cempaka 2, Mawar, Kenanga 1, Kenanga 2, Aster, Nusa Indah Kel. Wates	451 Orang	PMT Lansia 7 Posyandu	Dinas Kesehatan
108	Ayunan	Kel. Wates	5 Buah	Sarana Bermain Anak	Dinas Pendidikan
109	Prosotan	Kel. Wates	5 Buah	Sarana Bermain Anak	Dinas Pendidikan
110	Jungkat-jungkit	Kel. Wates	5 Buah	Sarana Bermain Anak	Dinas Pendidikan

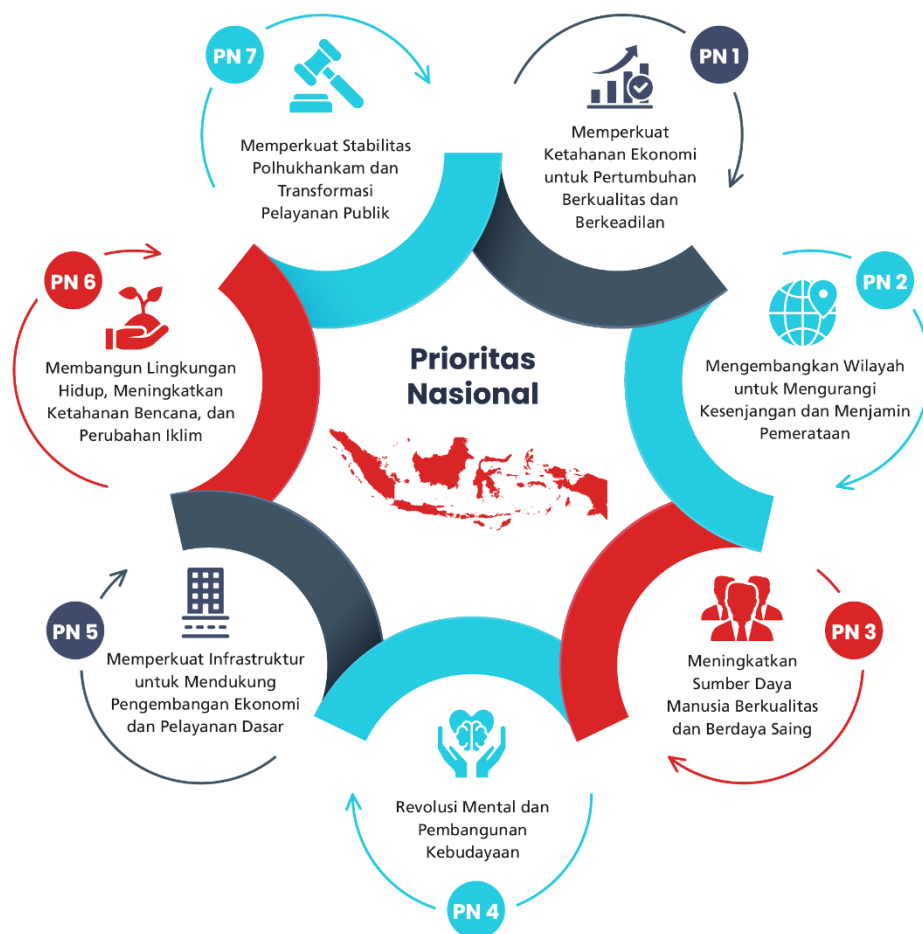
Sumber : Kecamatan Ngalihan Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan

- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi

- PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- PP 3 Penegakan Hukum Nasional
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas

Kemiskinan
Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai

pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Ngaliyan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan

dan sasaran pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP”;
2. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”;
3. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” dengan indikator kinerja “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”;
4. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”; dan
 - 2) “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
						A
						2023
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat			Angka	88

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
						A
						2023
			Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	75,5
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	50
				Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	persen	70

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Indeks Reformasi Birokrasi**" dan indikator sasaran "**Indeks Pelayanan Publik**";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp49.668.402.192,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 14.070.992.192,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 35.597.410.000,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.14.0 000	KECAMATAN NGALIYAN			49.668.402.192				48.794.811.000
7.01	KECAMATAN			35.597.410.000				34.577.120.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	2.686.896.000				3.365.520.000
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan</i>	<i>1.00 Angka</i>	<i>62.492.000</i>				<i>100.000.000</i>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	62.492.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		100.000.000
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>1.353.804.000</i>				<i>2.035.000.000</i>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100.00 persen	1.353.804.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		2.035.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakaji	100.00 persen					
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100.00 persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100.00 persen					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambangkerep	100.00 persen					
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>1.270.600.000</i>				<i>1.230.520.000</i>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	1.270.600.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		1.230.520.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	32.754.762.000				31.131.600.000
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>279.00 kegiatan</i>	<i>14.169.489.000</i>				<i>30.797.600.000</i>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	109.00 Angka	50.374.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		25.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	5.00 kegiatan	12.053.000.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		13.978.800.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambangkerep	10.00 kegiatan					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	10.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	10.00 kegiatan					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	23.00 kegiatan	2.066.115.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		16.793.800.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	21.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	27.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	23.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	34.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	24.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	43.00 kegiatan					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
		Ngaliyan						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	22.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	21.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	22.00 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	19.00 kegiatan					
7.01.03.2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya</i>	8.00 dokumen	18.585.273.000				334.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00 dokumen	18.374.000.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		134.000.000
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bringin	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Podorejo	7.00 laporan					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Gondoriyo	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kalipancur	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tambakaji	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wonosari	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwoyoso	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Ngaliyan	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wates	7.00 laporan					
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bambankerep	7.00 laporan					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kegiatan	211.273.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		200.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	63.283.000				50.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00 Angka	63.283.000				50.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
	<i>Umum</i>							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban Umum	5.00 Kegiatan	63.283.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		50.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.469.000				30.000.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan</i>	3.00 kegiatan	92.469.000				30.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00 kegiatan	92.469.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		30.000.000
X.XX	NON URUSAN			14.070.992.192				14.217.691.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	14.070.992.192				14.217.691.000
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %					
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	5.00 dokumen	18.516.000				17.000.000
		<i>Jumlah Dokumen pelaporan</i>	2.00 dokumen					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2.00 dokumen	2.098.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		3.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	5.530.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		2.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	4.855.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		2.000.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1.925.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		2.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	2.159.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		2.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	1.093.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		3.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen	856.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		3.000.000
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</i>	4.00 dokumen	12.795.614.192				12.207.399.924
		<i>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</i>	100.00 persen					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	12.306.355.192	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		11.699.399.924

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	486.035.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		499.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1.333.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		3.200.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	896.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		3.100.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	995.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		2.700.000
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>365.081.000</i>				<i>1.008.000.000</i>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.00 jenis	6.000.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		8.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	132.763.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		100.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis	30.000.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		55.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00 jenis	9.111.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		13.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2000.00 orang	8.892.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		65.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00 kegiatan	70.956.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		100.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis	107.359.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		667.000.000
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>59.912.000</i>				<i>100.000.000</i>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
	<i>Pemerintah Daerah</i>							
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1.00 jenis	59.912.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		100.000.000
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>221.714.000</i>				<i>235.291.076</i>
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 persen	121.348.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		175.291.076
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	100.366.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		60.000.000
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>610.155.000</i>				<i>650.000.000</i>
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00 unit	158.100.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		200.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00 gedung	271.400.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		200.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3.00 jenis	5.125.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		100.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis	175.530.000	Kec. Ngaliyan	APBD Kota Semarang		150.000.000
JUMLAH				49.668.402.192				48.794.811.000

Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2022

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Ngaliyan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

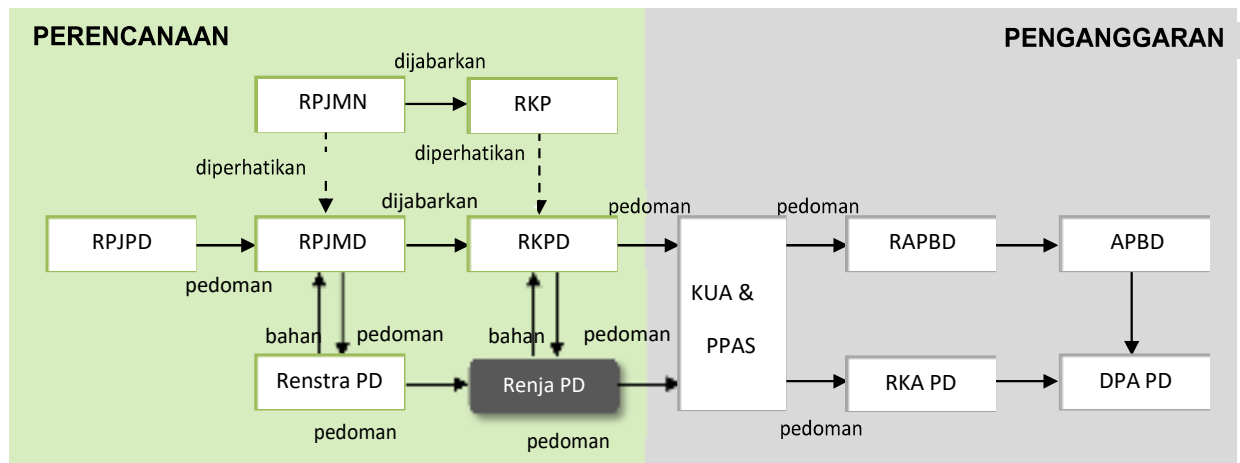
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel. Hal tersebut dilakukan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. di atas dijelaskan bahwa penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada pelaksanaan Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang

- Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Gayamsari di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Gayamsari I Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 30.403.539.809 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 28.622.268.285 atau sebesar 94,14%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN										
3.1.06.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Langganan rekening telpon, air, listrik dan koran	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	-Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	-Pengadaan jamuan rapat	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		-Pengadaan Jamuan Peserta Kegiatan	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Pengadaan Jamuan Tamu	100%	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.01.018	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.028	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	- Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.01.290	Operasional Kelurahan Tambakrejo	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.291	Operasional Kelurahan Kaligawe	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.292	Operasional Kelurahan Sawah Besar	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.293	Operasional Kelurahan Siwalan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.294	Operasional Kelurahan Sambirejo	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.295	Operasional Kelurahan Pandean Lamper	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.01.296	Operasional Kelurahan Gayamsari	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-Pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-Pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-Kendaraan Dinas Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada tahun Berkenaan	100%	75%	-	-	-	-	75%	75
3.1.06.08.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada tahun Berkenaan	100%	75%	-	-	-	-	75%	75
3.1.06.08.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	-Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	75%	-	-	-	-	75%	75
3.1.06.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	- Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100 %	-	-	-	-	100 %	100
3.1.06.08.06.005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	-Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100%	75%	-	-	-	-	75%	75%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	- Jumlah LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.06.018	Penyusunan LKJIP	- Jumlah LKJIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.028	Penyusunan Renja SKPD	- Jumlah Renja Perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.029	Penyusunan Renstra SKPD	- Tersusunnya Renstra Perangkat daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.06.033	Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Jumlah RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.06.034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	- Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3.1.06.08.16	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	- Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100%	100 %	-	-	-	-	100 %	100
		- Cakupan Kegiatan Kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.16.003	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	- Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3.216 Kegiatan	804 Kegiatan	-	-	-	-	804 Kegiatan	25
3.1.06.08.18	Program pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	- Persentase jumlah siskamling di lingkungan RT	90%	90%	-	-	-	-	90%	100
3.1.06.08.18.006	Pendampingan Penegakan Perda di kecamatan dan pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	- Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan Se Kecamatan GAYAMSARI	25%	35%	-	-	-	-	35%	140
3.1.06.08.20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	- Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan	768 Kegiatan	768 Kegiatan	-	-	-	-	768 Kegiatan	100
3.1.06.08.20.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	- Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	768 Kegiatan	768 Kegiatan	-	-	-	-	768 Kegiatan	100
3.1.06.08.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	- Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	100	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	- Persentase Kehadiran RT Dalam Musrenbang	99,50%	99,50%	-	-	-	-	99,50%	100
		- Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	95%	99,40%	-	-	-	-	99,40%	104,63
		- persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	55%	55%	-	-	-	-	55%	100
3.1.06.08.21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	- Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
3.1.06.08.21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	- Jumlah paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, dan Jembatan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.009	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	-	-	6 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.21.141	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakrejo	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.142	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaligawe	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.143	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Besar	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.144	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siwalan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.145	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambirejo	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	-	-	6 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.146	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Lamper	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	100
3.1.06.08.21.147	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gayamsari	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, jalan dan jembatan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.22	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	- Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan Berstandar PATEN	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		- Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	12.000 Pelayanan	12.000 Pelayanan	-	-	-	-	12.000 Pelayanan	100
3.1.06.08.22.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	- Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	4 kegiatan	100
3.1.06.08.22.001	Pengembangan Budaya Kerja dan apratur	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	12.000 Pelayanan	12.000 pelayanan	-	-	-	-	12.000 pelayanan	100
3.1.06.08.22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)	- Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		- Kelurahan yang Melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	7 Kelurahan	7 Kelurahan	-	-	-	-	7 Kelurahan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.06.08.23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	-Persentase Jumlah RW di Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS	100%	-	-	-	-	-	-	-
3.1.06.08.25	Program Pengelolaan Asset Pemerintah	-Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	16 Jumlah Aset	15 Jumlah Aset	-	-	-	-	15 Jumlah Aset	100
3.1.06.08.25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	-Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	218 Bidang Tanah	217 Bidang Tanah	-	-	-	-	218 Bidang Tanah	99,54
3.1.06.08.25	Program Peningkatan Intensifikasi PAD	-Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	85%	97,71	-	-	-	-	97,71	114,95
3.1.06.08.25.003	Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	-Persentase jumlah penerimaan PBB di Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	100%	60,41%	-	-	-	-	60,41%	60,41
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (GAYAMSARI)	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (GAYAMSARI)	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		- Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		- 100% Persentase Tersedianya sarana	100%	-	-	-	-	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan prasarana perkantoran SKPD 100%								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	6 Dokumen	13 Dokumen	185,71
		- Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Dokumen Renstra dan Renja OPD	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	3 Dokumen	100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	2	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	150
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100% 100% 4 Dokumen	- - -	100% - -	100% - -	100 - -	- 100% 4 Dokumen	100% 100% 4 Dokumen	100 100 100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Kinerja ASN - Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan 100%	- -	12 Bulan -	12 Bulan -	100 -	- 100%	12 Bulan 100%	100 100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu - Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan 100%	- -	12 Bulan -	12 Bulan -	100 -	- 100%	12 Bulan 100%	100 100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	ran SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)									
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100% 15 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 15 Jenis	100% 15 Jenis	100 100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Pengadaan Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai - Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mendukung kerja pegawai - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100% 100% 3 Jenis	- - -	100% 100% -	100% 97,57% -	100 97,57 -	- - 3 Jenis	100% 97,57% 3 Jenis	100 97,57 100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100% 60 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 60 Jenis	100% 60 Jenis	100 100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang Cetak yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(KECAMATAN GAYAMSARI)	-Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan -Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100% 11 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 11 Jenis	100% 11 Jenis	100 100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Pengadaan Jamuan Peserta Kegiatan -Pengadaan Jamuan Rapat -Pengadaan Jamuan Tamu -Jumlah tamu yang berkunjung	100% 100% 100% 100 Orang	- - - -	25% 100% 25% -	25% 100% 25% -	100 100 100 -	- - - 100 Orang	25% 100% 25% 100 Orang	25 100 25 100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan -Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan -Koordinasi untuk menunjang tugas kantor -Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100% 100% 100% 50 Kegiatan	- - - -	100% 100% 100% -	100% 100% 100% -	100 100 100 -	- - - 50 Kegiatan	100% 100% 100% 50 Kegiatan	100 100 100 100
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (KECAMATAN GAYAMSARI)	-Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE -Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100% 4 Jenis	- -	100% -	100% -	100 -	- 4 Jenis	100% 4 Jenis	100 100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Langganan listrik, telepon, air dan koran - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Sumber daya air dan listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	- - -	12 Bulan - -	12 Bulan - -	100 - -	- 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 100 100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100% 100% 6 Jenis	- - -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 6 Jenis	100% 100% 6 Jenis	100 100 100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan - Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	100% 42 Unit	- -	100% -	100% -	100 -	- 42 Unit	100% 42 Unit	100 100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - kegiatan pemeliharaan gedung kantor - Rehabilitasi gedung	100% 100% 1 Gedung	- - -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 1 Gedung	100% 100% 1 Gedung	100 100 100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Jenis	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) - Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan(GAYAMSARI)	85% 100% 477.561 Pelayanan	- - -	85% 100% 5.780 Pelayanan	1,59% - 7.625 Pelayanan	1,87 - 131,92	91% - -	92,59% - 7.625 Pelayanan	108,93 - 1,60
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat	100%	-	100%	98,49%	98,49	-	98,49%	98,49

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kecamatan - Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	-	-	-	-	1 Angka	1 Angka	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran - Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan - Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) - Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja - Laporan Hasil Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang	2 Dokumen 100% 4 Kegiatan 768 Kegiatan 100% 2 Dokumen	- - - - -	- 100% 4 Kegiatan 768 Kegiatan 100% 2 Dokumen	- 100% 4 Kegiatan 768 Kegiatan 100% 2 Dokumen	- 100 100 100 100	2 Dokumen - - - -	2 Dokumen 100% 4 Kegiatan 768 Kegiatan 100% 2 Dokumen	100 100 100 100 100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	100%	-	100%	102,82%	102,82	-	102,82%	102,82

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kecamatan - Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat - Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan - Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	5.780 Pelayanan 2 Jenis 2 Kegiatan 100%	- - - -	5.780 Pelayanan - 2 Kegiatan -	7.625 Pelayanan - 2 Kegiatan -	131,92 - 100 -	- - 2 Kegiatan 100%	7.625 Pelayanan - 2 Kegiatan 100%	131,92 - 100 -
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakrejo	100%	-	100%	100%	100	100%	200%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALIGAWA)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaligawe	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sawah Besar	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SIWALAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Siwalan	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIREJO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambirejo	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PANDEAN LAMPER)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandean Lamper	100 %	-	100 %	100 %	100	100%	200%	200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GAYAMSARI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gayamsari	100 %	-	100%	100%	100	100%	200%	200
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	-	100%	93,93%	93,93	100%	193,93%	193,93

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN GAYAMSARI)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkar bangunan tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun berkenaan - Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan - Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS - Jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani - Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan - Penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan - Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan 	<p>218 Bidang</p> <p>3.216 Kegiatan</p> <p>85%</p> <p>90%</p> <p>98%</p> <p>100%</p> <p>6 kegiatan</p> <p>35%</p> <p>1200 Kegiatan</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>218 Bidang</p> <p>3.216 Kegiatan</p> <p>85%</p> <p>-</p> <p>98%</p> <p>100%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>217 Bidang</p> <p>3.216 Kegiatan</p> <p>97,71%</p> <p>-</p> <p>98%</p> <p>100%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>99,54</p> <p>100</p> <p>114,95</p> <p>-</p> <p>100</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1200 Kegiatan</p>	<p>197 Bidang</p> <p>3.216 Kegiatan</p> <p>79,64%</p> <p>-</p> <p>98%</p> <p>100%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1200 Kegiatan</p>	<p>94,26</p> <p>100</p> <p>93,69</p> <p>-</p> <p>100</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100</p>

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	-	95%	5,57%	5,86	97%	102,57%	107,97
		- Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan(GAYAMSARI)	768 Kegiatan	-	768 Kegiatan	768 Kegiatan	100	-	768 Kegiatan	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	-	-	-	-	80 Kegiatan	80 Kegiatan	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	15 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100	-	15 Dokumen	100
		- Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan GAYAMSARI	80 Angka	-	-	-	-	80 Angka	80 Angka	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan GAYAMSARI	9 Kegiatan	-	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100
		- Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	63 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	-	20 Kegiatan	32,79
		- Jumlah kegiatan pembangunan	57 Kegiatan	-	-	25 Kegiatan	100	-	25 Kegiatan	46,30

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang			25 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KALIGAWA)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	13 Kegiatan	13 Kegiatan	92,85
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	9 Kegiatan	9 Kegiatan	90
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SIWALAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	109,09
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMBIREJO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANDEAN LAMPER)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	9 Kegiatan	-	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	111,11
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	85,71
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	14 Kegiatan	100
		- Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	32 Kegiatan	-	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100	21 Kegiatan	21 Kegiatan	65
		- Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	7 Kelurahan	-	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100	-	95%	96,94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	17 Kegiatan	17 Kegiatan	130
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	17 Kegiatan	17 Kegiatan	130

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	KALIGAWA)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	20 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	17 Kegiatan	17 Kegiatan	85
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SIWALAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	17 Kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	18 Kegiatan	18 Kegiatan	105
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIREJO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	12 Kegiatan	-	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	125
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANDEAN LAMPER)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	17 Kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	20 Kegiatan		20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	21 Kegiatan	21 Kegiatan	105

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	-	-	-	-	768 Angka	640 Angka	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	220 Kegiatan	-	220 Kegiatan	220 Kegiatan	100	-	220 Kegiatan	100
		- Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	-	4 Kegiatan	100
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	768 Angka	-	-	-	-	768 Angka	640 Angka	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	133,33	4 Kegiatan	4 Kegiatan	133,33
		- Jumlah Kampung Tematik Yang Terbangun	3 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		- Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	60%	-	-	-	-	40%	40%	40

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
		- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	16 Angka	-	-	-	-	24 Angka	24 Angka	150
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan - Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
			10 Kegiatan	-	-	-	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	-	-	-	-	90%	90%	90
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	7 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	71,42

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN GAYAMSARI)	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	7 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	71,42

Dari data sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 11 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 9 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 5 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 7 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gayamsari Kota
Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
Urusan Kewilayahan				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.517.871.504	10.693.581.665	92,84 (824.289.839)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.820.000	8.829.700	89,92 (2.442.944)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.949.781	7.839.000	98,60 (110.781)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.975.000	1.775.000	89,87 (200.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.075.000	2.075.000	100,00 0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.925.000	1.775.000	89,87 (150.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.907.000	1.256.000	65,86 (651.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.563.163	1.232.000	48,06 (1.331.163)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.518.090.573	8.796.749.762	92,42 (721.340.811)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.150.148.809	8.494.743.462	92,83 (655.405.347)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.490.000	298.720.000	80,75 (63.770.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.789.655	1.625.000	42,87 (2.164.655)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	730.527	730.300	99,96 (227)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	931.582	931.000	99,93 (582)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.157.754.384	1.120.756.134	96,80 (36.998.250)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.510.845	3.879.000	31,01 (8.631.845)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.642.972	82.389.000	99,69 (253.972)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.632.106	26.035.285	97,75 (596.821)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.194.790	4.485.850	40,07 (6.708.940)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.050.000	108.156.999	96,52 (3.893.001)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.940.000	28.050.000	68,51	(12.890.000)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	871.783.671	867.760.000	99,53	(4.023.671)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.900.000	79.522.849	75,09	(26.347.151)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.900.000	79.522.849	75,09	(26.347.151)
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.731.603	680.600.920	94,82	(37.130.683)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.360.000	76.185.920	75,16	(25.174.080)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	206.691.891	206.000.000	99,66	(691.891)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	385.569.712	375.715.800	97,44	(9.853.912)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.110.000	22.699.200	94,14	(1.410.800)
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.832.182.775	7.202.972.716	91,96	(629.210.059)
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.427.343.328	6.827.493.716	91,92	(599.849.612)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN GAYAMSARI)	589.345.000	571.331.800	96,94	(18.013.200)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	837.375.271	767.520.642	91,65	(69.854.629)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALIGAWA)	1.148.550.803	1.049.163.669	91,34	(99.387.134)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	870.788.081	799.082.947	91,76	(71.705.134)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	593.949.650	540.765.371	91,04	(53.184.279)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)		SELISIH ANGGARAN (Rp)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SIWALAN)				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIREJO)	832.765.847	760.949.568	91,37	(71.816.279)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PANDEAN LAMPER)	1.528.527.671	1.402.646.822	91,76	(125.880.849)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GAYAMSARI)	1.026.041.005	936.032.897	91,22	(90.008.108)
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	404.839.447	375.479.000	92,74	(29.360.447)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	404.839.447	375.479.000	92,74	(29.360.447)
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.797.215.575	10.558.468.378	97,78	(238.747.197)
8	Kegiatan Pemberdayaan	10.091.081.048	9.880.272.678	97,91	(210.808.370)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	18.986.146	9.888.750	52,08	(9.097.396)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	3.293.725.537	3.274.624.176	99,42	(19.101.361)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	989.845.322	979.268.816	98,93	(10.576.506)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KALIGAWA)	726.932.401	723.844.750	99,57	(3.087.651)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	454.341.279	449.156.405	98,85	(5.184.874)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SIWALAN)	744.805.464	739.067.798	99,22	(5.737.666)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMBIREJO)	590.044.561	551.782.046	93,51	(38.262.515)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANDEAN)	868.706.727	864.854.500	99,55	(3.852.227)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN % (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	LAMPER)			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GAYAMSARI)	728.975.742	725.973.250 99,58	(3.002.492)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN GAYAMSARI)	237.865.693	163.245.124 68,62	(74.620.569)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBAKREJO)	216.181.407	215.384.450 99,63	(796.957)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KALIGawe)	196.306.796	192.730.610 98,17	(3.576.186)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAWAH BESAR)	212.766.640	209.672.550 98,54	(3.094.090)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SIWALAN)	188.916.886	185.933.300 98,42	(2.983.586)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIREJO)	208.279.592	196.995.553 94,58	(11.284.039)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANDEAN LAMPER)	200.912.602	194.579.350 96,84	(6.333.252)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GAYAMSARI)	213.488.253	203.271.250 95,21	(10.217.003)
9	Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Tingkat Kecamatan	706.134.527	678.195.700 96,04	(24.938.827)
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	91.934.527	67.929.200 73,88	(24.005.327)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	614.200.000	610.266.500 99,35	(3.933.500)
IV	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	256.269.055	249.642.000 97,41	(6.627.055)
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	256.269.055	249.642.000 97,41	(6.627.055)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	256.269.055	249.642.000 97,41	(6.627.055)
	TOTAL	30.403.539.809	28.704.664.759 94,41	(1.698.875.049)

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 30.403.539.809. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 28.704.664.759 dengan sisa sebesar Rp 1.698.875.049 (5,59%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 9.512.638.809 realisasi Rp 8.763.463.462 (92,43%) dan sisa anggaran sebesar Rp 719.175.347 (7,57%).
- b. **Belanja Langsung**: anggaran sebesar Rp 20.890.901.000 Dengan realisasi sebesar Rp 19.911.201.297 (95,31%) dan sisa anggaran sebesar Rp 979.699.702 (4,68%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Gayamsari dan Kelurahan yang ada, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1). Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

h. Jabatan Fungsional.

1. **Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan,

Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

- w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Kecamatan;
- x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- ab. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;

- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/ pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;

- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;

- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan/jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;

- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. menyiapkan kegiatan Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
- w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ab. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ac. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- ad. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;

- ae. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- af. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;

- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pemberian petunjuk bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;

- k. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran OPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	81,95%	83,17%	-	-	81,95%	83,17%	-	-
Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	14%	17,50%	-	-	14%	17,50%	-	-
Tujuan: Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	87%	-	-	85%	87%	-	-
Sasaran: 2. Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kecamatan dan Kelurahan	dan pelayanan publik di Kecamatan Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
Tujuan: Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	89 Angka	90 Angka	-	-	89 Angka	90 Angka
Sasaran:									
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	-	75,50	76	-	-	75,50	76
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	1 Angka	1 Angka	-	-	1 Angka	1 Angka
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	71%	72%	-	-	71%	72%
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	40%	45%	-	-	40%	45%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	60%	70%	-	-	60%	70%

Sumber: Kecamatan Gayamsari Tahun 2020, 2021 dan 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat”, dimana realisasinya sebesar 81,95% dari target sebesar 81,95%;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 17,50% dari target sebesar 17,50%.

- b. Tujuan **“Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 87%;
- 1) Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan” dan “Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% & 100% dan 100%.

Di samping hal-hal tersebut di atas, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG /TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
1	Jumlah Usulan	Usulan					303	382		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					212	272		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%					69,96	71,20		

Sumber: Kecamatan Gayamsari, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 71,20 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 69,96 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	87,50	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	96,68	16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	82,50	84,34	86,68	88,52	90,86	93,20	95,04	95,04	16 Kecamatan
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	91	92	93	94	95	95	16 Kecamatan
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	95	97	98	99	100	100	100	16 Kecamatan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gayamsari sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait

pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Namun demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari tidak terlepas dari tantangan, peluang, dan permasalahan yang bersifat dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun tantangan, peluang, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Gayamsari adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Gayamsari yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas.
- 5) Kondisi masyarakat Kecamatan Gayamsari yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gayamsari adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Gayamsari hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang

lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill*, *hard skill*, *social skill* dan *mental skill*. *Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill* menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2023, antara lain:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024
Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)
Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi

Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.

3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klusterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin

- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upayaantisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan

stunting secara terintegrasi

- 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik

- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,

melalui upaya- upaya:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60-6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gayamsari mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif, Efisien, dan Inovatif”**. Kecamatan Gayamsari memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Gayamsari					Urusan Kewilayahan Kecamatan Gayamsari					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.786.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.786.400.000	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	32.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	32.000.000	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		I	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI I	- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan GAYAMSARI I	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI I	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI RI	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	11.582.114.627	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	11.582.114.627	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen					Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		3 Dokumen
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan GAYAMSARI RI	- Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	10.950.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	10.950.000.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan GAYAMSARI I	- Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	386.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	386.400.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan GAYAMSARI I	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan GAYAMSARI I	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan GAYAMSARI	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.611.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.611.000.000	
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	600.000.000	
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000	
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000	
X.XX.01 .2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	750.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	750.000.000	
X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	
X.XX.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	189.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	189.000.000	
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	139.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	139.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Disediakan					Disediakan			
X.XX.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan GAYAMSA RI	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	367.756.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	367.756.000	
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	150.000.000	
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan GAYAMSA RI	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	2.776.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	2.776.000.000	
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	50.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	50.000.000	
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	50.000.000	
7.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Kecamatan GAYAMSA RI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	100%	1.747.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	100%	1.747.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah yang ada di Kecamatan		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02. 2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan GAYAMSARI)	12 Laporan	1.607.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan GAYAMSARI)	12 Laporan	1.607.000.000	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	12 Laporan			Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	12 Laporan		
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	12 Laporan			Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	12 Laporan		
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	12 Laporan			Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	12 Laporan		
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	12 Laporan			Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	12 Laporan		
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	12 Laporan			Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	12 Laporan		
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	12 Laporan			Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	12 Laporan		
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			(Kelurahan Gayamsari)					(Kelurahan Gayamsari)			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan GAYAMSARI	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	979.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan GAYAMSARI	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	979.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	600 Kegiatan	979.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	600 Kegiatan	979.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	19.223.900.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	19.223.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	18.573.900.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	18.573.900.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Angka	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Angka	50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan GAYAMSARI)	9 Unit	8.454.340.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan GAYAMSARI)	9 Unit	8.454.340.000	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit			Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit		
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	13 Unit			Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	13 Unit		
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	9 Unit			Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	9 Unit		
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	12 Unit			Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	12 Unit		

No	Rancangan Akhir RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	10 Unit			Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	10 Unit		
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	10 Unit			Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	10 Unit		
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	12 Unit			Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	12 Unit		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI I	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan GAYAMSARI I)	7 Pokmas/Ormas	10.069.560.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan GAYAMSARI I)	7 Pokmas/Ormas	10.069.560.000	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	7 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	7 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	7 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	7 Pokmas/Ormas			Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	7 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)					di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	4.479.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	4.479.600.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan GAYAMSARI)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.029.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan GAYAMSARI)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.029.600.000	
		Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	12 Laporan	450.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	12 Laporan	450.000.000	
		Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan			Kecamatan GAYAMSARI	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Kecamatan GAYAMSARI	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan	15%	50.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						KETERTIBAN UMUM		Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 Angka	50.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 Angka	50.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	50.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan GAYAMSA RI	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan GAYAMSA RI	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	50.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	50.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan GAYAMSA RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Gayamsari Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2023 Kecamatan Gayamsari
Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN TAMBAKREJO					
1.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Gembongsari RT 03 RW 07 Tambakrejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	230.000.000 / 80 Meter	Jalan Rawan Banjir
2.	Betonisasi Jalan	Jl. Purwosari Raya RT 05 RW 03 Tambakrejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 / 1440 Meter	Jalan Rusak
3.	Pembentukan Wadah Pemasaran UMKM Online dan Offline	Kelurahan Tambakrejo	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000 / 40 Orang	Pemberdayaan Ekonomi
4.	Pelatihan Ijin Edar Usaha / PIRT	Kelurahan Tambakrejo	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000 / 40 Orang	Pemberdayaan Ekonomi
5.	Penyuluhan Pengembangan Perikanan Perkotaan	Kelurahan Tambakrejo	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000 / 60 Orang	Pemberdayaan Masyarakat
KELURAHAN KALIGAWA					
6.	Normalisasi Kali	Jl. Sawah Besar Raya RT 05 RW 06 Kaligawe	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 / 900 Meter	Sedimen Saluran Tinggi, Banjir
7.	Pembangunan dan Penataan Pasar Klithikan	Sawah Besar XIII / Pasar Klithikan Waru RT 05 RW 06 Kaligawe	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.000.000.000 / 19,2 m2	Rusak dan Banjir
KELURAHAN SAWAH BESAR					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Peninggian dan Betonisasi Jalan Raya	Jl. Tambak Dalam Raya RT 01 – 07 RW 03 Sawah Besar	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	4.500.000.000 / 3600 m2	Jalan Sering banjir dan rusak
KELURAHAN SIWALAN					
9.	Pembinaan dan Pelatihan Kader Kampung KB	Balai Kelurahan Siwalan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000 / 50 Orang	Tertib Administrasi
10.	Kegiatan Pokdarwis	Balai Kelurahan Siwalan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000 / 100 Orang	Mempromosikan Pariwisata
KELURAHAN PANDEAN LAMPER					
11.	Perbaikan Saluran Got U – 30 Cm	Jl. Bintoro I RT 03 RW 07 Pandean Lamper	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200.500.000 / 320 Meter	Tidak berfungsinya saluran pemukiman
12.	Pembuatan Saluran Sektor Timur – Barat Got U – 30 Cm Kanan Kiri dan Tutup	Jl. Patianus I RT 05/06 RW 11 Pandean Lamper	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	368.800.000 / 500 Meter	Tidak berfungsinya saluran pemukiman
KELURAHAN GAYAMSARI					
13.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kanguru V RT 01 RW 04 Gayamsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200.500.000 / 131 Meter	Rusak rendah banjir

Sumber: Kecamatan Gayamsari, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gayamsari pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 13 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 7 Kelurahan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial

- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
- c. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
- f. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
- g. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
- h. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan

Satgas

Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);

- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Sedangkan target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,60-84,00 indeks
- b. Tingkat Kearifan Budaya Lokal sebesar 55,17%
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,3-8,6%
- d. Angka Kemiskinan sebesar 4,04-4,24 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6-6,1 %
- f. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 103,54 Juta rupiah
- g. Persentase peningkatan Nilai Investasi sebesar 7% (25.684.059 Juta rupiah)
- h. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 6%
- i. Indeks Demokrasi sebesar 72,4 indeks
- j. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,70 indeks
- k. Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebesar 10,52 %
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,01 indeks

- m. Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur sebesar 84,5 indeks
- n. Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan sebesar 3,32 %
- o. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,00 indeks
- p. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88 indeks
- q. Opini BPK adalah WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Untuk menjaminkeselaras dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 mencakup rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang beserta indikatornya sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---|
| SASARAN 1 | : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah |
| Indikator | : Nilai AKIP |
| SASARAN 2 | : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik |
| Indikator | : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan |
| SASARAN 3 | : Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan |
| Indikator | : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif |
| SASARAN 4 | : Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan |
| Indikator | : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan |

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gayamsari pada tahun 2023 mengacu pada nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 seperti dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.0 8.0000	KECAMATAN GAYAMSARI	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TAMBAKREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KALIGAWA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAWAH BESAR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SIWALAN

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. SAMBIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PANDEAN LAMPER
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GAYAMSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TAMBAKREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KALIGAWÉ
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAWAH BESAR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SIWALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. SAMBIREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PANDEAN LAMPER
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GAYAMSARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TAMBAKREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KALIGAWA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAWAH BESAR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SIWALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. SAMBIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PANDEAN LAMPER
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GAYAMSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TAMBAKREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KALIGAWA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAWAH BESAR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SIWALAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. SAMBIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PANDEAN LAMPER
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GAYAMSARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec. Gayamsari
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec. Gayamsari
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec. Gayamsari
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Gayamsari
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec. Gayamsari
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec. Gayamsari
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
<p>TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90
<p>SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah</p>	Nilai AKIP	Angka	76
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	72
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	70

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Gayamsari bertugas menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun secara khusus, Kecamatan Gayamsari memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab”;
3. Kereseragaman dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 program pelaksanaan/pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 35.886.300.000 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp 13.786.400.000 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

- b. Rp 22.099.900.000 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan GAYAMSARI
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				35.886.300.000				31.627.150.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		92%	2.776.000.000		-	92%	2.249.862.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	1	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	1	93.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	48 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	48 Dokumen	93.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	100%	1.747.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	1.379.462.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	1.152.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	1.379.462.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		di Wilayah Kelurahan Tambakrejo							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kaligawe		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sawah Besar		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Siwalan		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambirejo		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Pandean Lamper		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gayamsari		12 Laporan	85.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	100%	979.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	777.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	600 Kegiatan	979.000.000	APBD Kota Semarang	-	600 Kegiatan	777.400.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		98%	19.223.900.000		-	98%	18.405.200.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	80 Kegiatan	18.573.900.000	APBD Kota Semarang	-	80 Kegiatan	18.031.200.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	80 Angka	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	80 Angka	25.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	9 Unit	1.691.340.000	APBD Kota Semarang	-	9 Unit	8.804.340.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tambakrejo		11 Unit	1.063.000.000	APBD Kota Semarang	-	11 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kaligawe		13 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	13 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sawah Besar		9 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	9 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Siwalan		12 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sambirejo		10 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 Unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Pandean Lamper		10 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Gayamsari		12 Unit	950.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	7 Pokmas/Ormas	724.860.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	9.201.860.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakrejo		7 Pokmas/Ormas	1.194.160.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaligawe		7 Pokmas/Ormas	1.517.560.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Besar		7 Pokmas/Ormas	1.212.640.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siwalan		7 Pokmas/Ormas	900.000.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambirejo		7 Pokmas/Ormas	1.166.440.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Lamper		7 Pokmas/Ormas	1.956.460.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas/Ormas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gayamsari		7 Pokmas/ Ormas	1.397.440.000	APBD Kota Semarang	-	7 Pokmas /Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Gayamsari	768 angka	650.000.000	APBD Kota Semarang	-	768 angka	374.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Gayamsari	Kecamatan Gayamsari	4 Lembaga Kemasyar akatan	200.000.000	APBD Kota Semarang	-	4 Lembaga Kemasy arakata n	174.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tambakrejo		9 Lembaga Kemasyar akatan	418.800.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasy arakata n	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kaligawe		9 Lembaga Kemasyar akatan	679.200.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasy arakata n	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sawah Besar		9 Lembaga Kemasyar akatan	339.000.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasy arakata n	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Siwalan		9 Lembaga Kemasyar akatan	502.800.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasy arakata n	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								n	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sambirejo		9 Lembaga Kemasyarakatan	780.000.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Pandean Lamper		9 Lembaga Kemasyarakatan	599.400.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Gayamsari		9 Lembaga Kemasyarakatan	511.200.000	APBD Kota Semarang	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	450.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	200.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum		15%	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	15%	50.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kecamatan Gayamsari	24 angka	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	24 angka	50.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	12 Kegiatan	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Kegiatan	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		92%	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	92%	30.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Gayamsari	6 Kegiatan	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	6 Kegiatan	30.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	120 Orang	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	120 Orang	30.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100%	13.786.400.000	APBD Kota Semarang	-	100%	10.942.088.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100%		APBD Kota Semarang	-	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	Kecamatan Gayamsari	7 dokumen 4 dokumen	32.000.000	APBD Kota Semarang	-	7 dokumen 4 dokumen	15.000.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	Kecamatan Gayamsari	2 Dokumen 1 dokumen	3.000.000	APBD Kota Semarang	-	2 Dokumen 1 dokumen	3.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	3 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kecamatan Gayamsari	3 dokumen	11.582.114.627	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	9.602.716.978

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD		100%		APBD Kota Semarang	-	100%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Gayamsari	100%	10.950.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	9.222.052.978
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kecamatan Gayamsari	100%	386.400.000	APBD Kota Semarang	-	100%	373.664.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	4.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.500.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	1 dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.500.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Kecamatan Gayamsari	100%	1.611.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	550.000.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Gayamsari	1 paket	11.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 paket	8.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Gayamsari	10 paket	600.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 paket	100.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Gayamsari	1 paket	40.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 paket	30.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Gayamsari	1 paket	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 paket	12.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	80.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	50.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	120.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	50.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	750.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	300.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Gayamsari	100%	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	200.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Gayamsari	3 Unit	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	3 Unit	200.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Gayamsari	100%	189.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	172.371.022
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	139.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	122.371.022
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	12 Laporan	50.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Gayamsari	100%	367.756.000	APBD Kota Semarang	-	100%	402.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Gayamsari	42 Unit	150.000.000	APBD Kota Semarang	-	42 Unit	102.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kecamatan Gayamsari	1 Unit	300.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	180.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Gayamsari	1 Unit	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	70.000.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Gayamsari	1 Unit	50.000.000	APBD Kota Semarang	-	1 Unit	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gayamsari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Gayamsari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

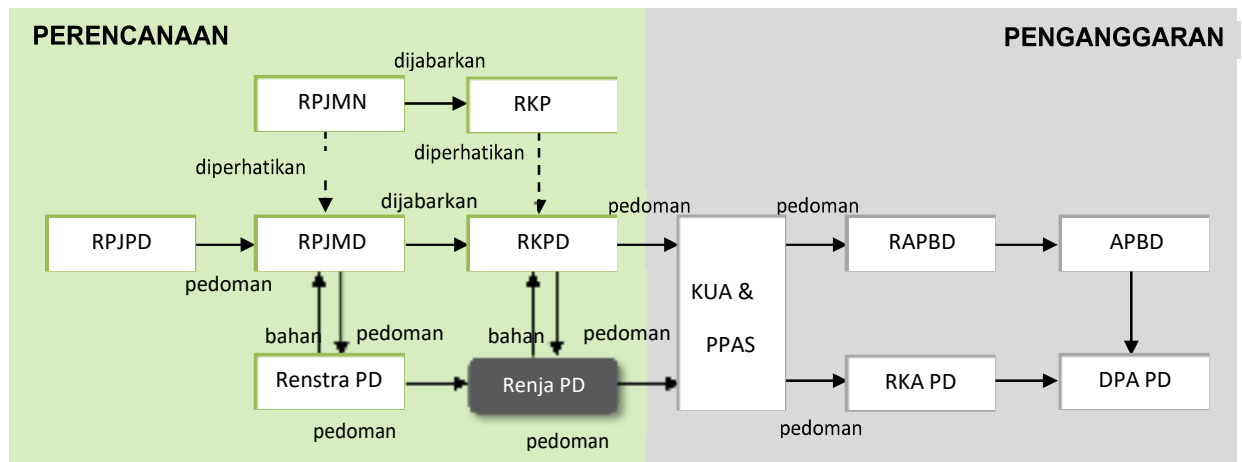
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan

yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel. Hal tersebut dilakukan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. di atas dijelaskan bahwa penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada pelaksanaan Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Pedurungan melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 59.104.196.738,00 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 54.453.901.440,00 atau sebesar 92,13%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 	100%	60%	60	100%	-	-
			100%	75%	75	100%	-	-
			100%	75%	75	100%	-	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dokumen	6 dokumen	60	10 dokumen	6 dokumen	60
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	33	3 dokumen	2 dokumen	60
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	75%	75	100%	50 %	50 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 %	75 %	75	100 %	50 %	50 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	75%	75	100%	50 %	50 %
		Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100%	75%	75	100%	50 %	50 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	50 %	50 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	100 %	54%	54	100		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	2 jenis	40	100		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Jenis	1 jenis	14	100		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 Jenis	15 jenis	68	100		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	2 jenis	40	100		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	4700	3200	68	100		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 Kegiatan	48 kegiatan	80	100		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	7 Jenis	5 jenis	71	100		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	25 %	25	100		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	4 Jenis	1 jenis	25	100		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	75%	75	100		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	9 bulan	75	100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100 %	66%	66	100		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	28 Unit	21 unit	75	100		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Gedung	3 gedung	60	100		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	5 jenis	4 jenis	80	100		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 jenis	2 jenis	50	100		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	persentase kepuasan masyarakat dlm menerima	85 %	54 %	54	100		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PELAYANAN PUBLIK	pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1	1	100	100	208.41	208.41
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100	100	50	50
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	75 %	75	100	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	75 %	75	100	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan penggaron kidul	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100 %	75 %	75	100	25	25

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongan Sari	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	100 %	75 %	75	100	25	25

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalicari	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	64	64	100	25	25
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	100	33.33	33.33
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95 %	48,45 %	51	100		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.177 kegiatan	728 kegiatan	61	100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	- Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah	230 dokumen	230 dokumen	100	100		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	diKelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	17 kegiatan	17 kegiatan	100	13 kegiatan	12 kegiatan	92,31
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Penggaron kidul	18 kegiatan	7 kegiatan	40	8 kegiatan	6 kegiatan	75,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gemah	12 kegiatan	12 kegiatan	100	13 kegiatan	7 kegiatan	53,85
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogomulyo	10 kegiatan	10 kegiatan	100	11 kegiatan	5 kegiatan	45,45
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	9 kegiatan	9 kegiatan	100	25 kegiatan	16 kegiatan	64,00

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Muktiharjo kidul						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari kulon	6 kegiatan	5 kegiatan	85	14 kegiatan	12 kegiatan	85,71
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	10 kegiatan	10 kegiatan	100	13 kegiatan	8 kegiatan	61,54
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Plamongan Sari	14 kegiatan	14 kegiatan	100	15 kegiatan	6 kegiatan	40,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	7 kegiatan	7 kegiatan	100	12 kegiatan	9 kegiatan	75,00

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	10 kegiatan	10 kegiatan	100	11 kegiatan	7 kegiatan	63,64
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Palebon	14 kegiatan	14 kegiatan	100	11 kegiatan	6 kegiatan	54,55
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kalicari	22 kegiatan	22 kegiatan	100	8 kegiatan	6 kegiatan	75,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari wetan	9 kegiatan	9 kegiatan	100	12 kegiatan	10 kegiatan	83,33
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	17 kegiatan	8 kegiatan	80			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		di Kecamatan						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron kidul	88 kegiatan	39 kegiatan	45			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	93 kegiatan	47 kegiatan	50			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	81 kegiatan	51 kegiatan	60			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	85 kegiatan	46 kegiatan	55			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	81 kegiatan	51 kegiatan	65			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		di Kelurahan Tlogosari Kulon						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	86 kegiatan	45 kegiatan	55			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongsari	82 kegiatan	39 kegiatan	50			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	81 kegiatan	53 kegiatan	65			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	87 kegiatan	41 kegiatan	50			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	86 kegiatan	37 kegiatan	45			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	77 kegiatan	42 kegiatan	55			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	84 kegiatan	40 kegiatan	48			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	29 dokumen	15 dokumen	50			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	29 dokumen	15 dokumen	50			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Kampung tematik	3 Kegiatan 1 Kelurahan	3 Kegiatan 1 Kelurahan	100			
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	6 %	4 %	66			

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	UMUM	dan Ketertiban Umum						
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	18 Angka	18	100			
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	3	60			

Dari data sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 11 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 9 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 5 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 7 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Tahun 2021

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Penunjang Kewilayahan			
	OPD : Kecamatan Pedurungan	59.104.196.738	54.453.901.440	92,13 %
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.690.280.549	16.852.851.888	90,79%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.670.782	11.066.500	92,47%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.854.091	2.820.191	98,81%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.007.691	1.963.791	97,81%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.995.000	1.995.000	100,00%
7.01.01.2.01.04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.995.000	1.995.000	100,00%
7.01.01.2.01.05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.995.400	1.995.250	99,99%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.994.400	489.250	24,53%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.001.000	1.994.400	99,67%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.971.927.734	13.844.385.245	92,47%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.658.782	442.743.982	73,71%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.854.091	2.820.191	98,81%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.007.691	1.963.791	97,81%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.314.636.487	2.191.353.547	94,67%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.773.000	22.679.300	99,59%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.712.364	205.298.000	97,90%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.416.100	25.532.406	56,22%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.103.000	11.506.550	32,78%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.587.203	73.769.200	69,87%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.997.200	2.185.000	14,57%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.881.047.620	1.850.383.091	98,37%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.814.000	135.850.000	97,16%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.814.000	135.850.000	97,16%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.970.401	117.245.340	64,08%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.970.401	117.245.340	64,08%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.515.910.000	1.112.339.289	75,79%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.384.000	59.030.681	25,85%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	505.010.363	418.805.000	82,93%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	585.910.000	572.039.608	97,63%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.298.000	62.464.000	42,12%
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.958.289.605	1.786.630.452	91,23%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.064.000	29.599.499	68,73%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.064.000	29.599.499	68,73%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	767.575.000	702.887.047	91,57%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo kidul)	3.104.200.000	2.844.686.096	91,64%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	3.580.838.159	3.277.716.577	91,53%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	657.200.000	596.391.164	90,75%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	1.337.929.257	1.224.620.375	91,53%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	921.658.116	845.295.258	91,71%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongsari)	1.415.742.294	1.280.121.792	90,42%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah)	1.572.616.057	1.439.475.729	91,53%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul Lor)	934.400.000	855.709.218	91,58%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	1.325.000.000	1.210.690.200	91,37%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	1.202.021.000	1.101.414.127	91,63%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul)	1.085.600.000	997.272.177	91,86%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	555.400.000	508.177.063	91,50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	632.735.055	459.431.655	72,61%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	632.735.055	459.431.655	72,61%
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.645.000	17.539.200	99,40%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.001.476.530	5.959.082.911	99,29%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo kidul)	418.397.322	411.370.000	98,32%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	680.553.000	676.138.000	99,35%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	943.044.190	940.407.000	99,72%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	989.666.227	986.495.000	99,68%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	688.540.000	691.422.155	99,58%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	932.574.900	920.818.000	98,74%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah)	737.964.332	728.556.000	98,73%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul Lor)	750.871.533	743.092.000	98,96%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gemah)	1.041.828.648	1.032.468.000	99,10%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Palebon)	811.047.498	808.504.000	99,69%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul)	790.940.000	787.601.000	99,58%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	952.080.527	944.847.000	99,24%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143.931.514	125.200.995	86,99%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo kidul)	3.827.097.322	3.533.225.846	77,44%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	4.562.246.202	4.211.261.427	92,31%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	1.822.530.990	1.705.549.664	93,58%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	2.562.993.328	2.422.960.625	94,54%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	1.760.168.508	1.851.904.234	95,05%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	2.587.241.769	2.387.768.347	92,29%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah)	2.563.089.989	2.409.649.520	94,01%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul Lor)	1.902.325.771	1.802.944.318	94,78%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	2.617.593.648	2.469.075.100	94,33%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	2.253.608.498	2.144.149.523	95,14%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul)	2.116.454.936	2.012.466.577	95,09%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	1.716.504.163	1.647.345.113	95,97%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.108.102.000	499.895.450	45,11%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	99.000.000	58.275.450	58,86%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.009.102.000	441.620.000	43,76%
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	315.796.240	298.716.212	94,59%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Umum			
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	315.796.240	298.716.212	94,59%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pedurungan)	315.796.240	298.716.212	94,59%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 59.104.196.738. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 54.453.901.440 dengan sisa sebesar Rp 4.650.295.298 (92,13 %) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 15.572.586.516,00 realisasi Rp 14.087.129.227,00 (90,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.485.457.289,00 (9,54%).
- b. **Belanja Langsung**: anggaran sebesar Rp 43.531.610.222,00 Dengan realisasi sebesar Rp 40.366.772.213,00 (92,73%) dan sisa anggaran sebesar Rp 3.164.838.009,00 (7,27%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pedurungan dan Kelurahan yang ada, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1). Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. Penyelenggaraan kerjasama;
- f. Penyelenggaraan sekretariat;
- g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, seksi pelayanan publik, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan;
- k. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi kecamatan;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan;

- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota;
- n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- o. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan kecamatan;
- q. Pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan kecamatan;
- r. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan kecamatan;
- t. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- w. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi kecamatan;
- x. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di kecamatan;
- y. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;

- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- h. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan;
- i. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan;
- j. Menyiapkan kegiatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan;
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. Menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan rencana kerja tingkat kelurahan;
- n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- o. Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan kecamatan;
- p. Menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- r. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- s. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- t. Menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- v. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. Menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. Menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. Menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. Menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. Menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;

- t. Menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. Menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;

- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, perPlamongansari, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan/jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- r. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. Menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi kesejahteraan sosial;
- h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks);
- i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (psdks);
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (up2k);
- p. Menyiapkan kegiatan data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, bkm);
- q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pkk, program peningkatan pengarusutamaan gender, umkm, dan karang taruna;
- r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
- t. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. Menyiapkan kegiatan administasi badan amil zakat (baz) dan pmi;
- w. Menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;

- x. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. Menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan uptd/b bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ab. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ac. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- ad. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ae. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- af. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. Menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. Menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. Menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;

- l. Menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. Menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;

- l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. Menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. Menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pemberian petunjuk bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. Pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kelurahan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan publik;
- p. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi kelurahan;
- q. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;

- r. Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kelurahan;
- t. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kelurahan;
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	92%	80,25%	-	-	98,25%	90,21%	-	-
Sasaran: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	48%	80,25%	-	-	30%	62%	-	-
Tujuan: Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	81%	-	-	78%	79%	-	-
Sasaran: 2. Meningkatkan manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
Tujuan: Meningkatkan kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	86 Angka	87 Angka	-	-	86 Angka	87 Angka

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
dengan pemanfaatan Teknologi Informasi									
Sasaran:									
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	-	72	73	-	-	72	73
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	1 Angka	1 Angka	-	-	1 Angka	1 Angka
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	-	-	84%	86%	-	-	84%	86%
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	43%	45%	-	-	43%	45%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	60%	65%	-	-	60%	65%

Sumber: Kecamatan Pedurungan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat”, dimana realisasinya sebesar 90,21% dari target sebesar 80,25 %;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 30 % dari target sebesar 62%.
- b. Tujuan **“Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 90,27 % dari target sebesar 87%;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan” dan “Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% & 100% dan 100%.

Di samping hal-hal tersebut di atas, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG /TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
1	Jumlah Usulan	Usulan					382	310		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					211	159		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%					55,24	51,30		

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 51,30 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 55,24 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	87,50	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	96,68	16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	82,50	84,34	86,68	88,52	90,86	93,20	95,04	95,04	16 Kecamatan
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	91	92	93	94	95	95	16 Kecamatan
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	95	97	98	99	100	100	100	16 Kecamatan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya

mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Namun demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan tidak terlepas dari tantangan, peluang, dan permasalahan yang bersifat dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun tantangan, peluang, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Pedurungan yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas.
- 5) Kondisi masyarakat Kecamatan Pedurungan yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan

Pedurungan hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.

SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill*, *hard skill*, *social skill* dan *mental skill*. *Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill* menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM.

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2023, antara lain:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan

sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)
Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.
3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klusterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:

- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi

informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya- upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya- upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko

bencana

- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024

- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60-6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Pedurungan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif, Efisien, dan Inovatif”**. Kecamatan Pedurungan memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023

No	Rancangan Akhir RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80 %	17.209.331.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80 %	17.209.331.934	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	24.779.770	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	24.779.770	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.704.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.779.770	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	4.449.180	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3 Dokumen	3.884.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.617.790	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.704.440	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	3.988.590	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	4.449.180	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.394.290	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5.617.790	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.187.520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.988.590	
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.437.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.394.290	
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.981.020.690	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.981.020.690	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen		
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	14.419.764.810	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	14.419.764.810	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553.741.720	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553.741.720	
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	947.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	947.760	
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.369.920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.369.920	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.196.480	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.196.480	
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	636.693.595	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	636.693.595	
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.370.605	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.370.605	
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.842.640	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.842.640	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.426.550	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.426.550	
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	90.141.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	90.141.000	
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.956.000	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.956.000	
X.XX.01 .2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	110.956.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	110.956.800	
X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	392.413.448	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	392.413.448	
X.XX.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	392.413.448	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	392.413.448	
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437.629.130	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437.629.130	
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.312.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.312.160	
X.XX.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.316.970	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.316.970	
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	736.795.301	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	736.795.301	
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	192.081.570	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	192.081.570	
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.087.140	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.087.140	
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	374.626.591	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	374.626.591	
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi	92%	3.542.321.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi	92%	3.922.205.594	

No	Rancangan Akhir RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			informasi (SPBE)					informasi (SPBE)			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	172.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	914.120.384	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	172.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	914.120.384	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.910.935.678	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.910.935.678	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	1.910.935.678	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	1.910.935.678	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	100 Laporan			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	100 Laporan			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	100 Laporan			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	12 Laporan		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
			(Kelurahan Plamongsari)					(Kelurahan Plamongsari)					
		Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	100 Laporan			Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	12 Laporan				
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Laporan				
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	12 Laporan				
		Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	100 Laporan			Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	12 Laporan				
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	12 Laporan				
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	100 Laporan			Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	12 Laporan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.097.149.532	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.097.149.532	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Urusan yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.097.149.532	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Urusan yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.097.149.532	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	40.338.273.512	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	29.165.235.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 Kegiatan	16.548.584.172	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 Kegiatan	17.424.435.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.350.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	13 unit	13.983.982.992	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	13 unit	14.650.000.000	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongsari)	14 Unit			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongsari)	14 Unit		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit			Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	10 Unit			Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	10 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit			Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	19 Pokmas/Ormas			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	19 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penggaron Kidul)					Penggaron Kidul)			
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	27 Pokmas/Ormas			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	27 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	18 Pokmas/Ormas			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	18 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/Ormas			Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/Ormas			Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/Ormas			Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	76 Dokumen	23.731.984.580	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	76 Dokumen	23.731.984.580	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongsari)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongsari)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	57.704.760	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	57.704.760	
		Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan			Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	50.830.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.830.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	50.830.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.980.350	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.980.350	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	50.980.350	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	50.980.350	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150 Orang	50.980.350	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150 Orang	50.980.350	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Pedurungan Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN TLOGOMULYO					
1.	Saluran U Ditch Kanan Kiri	Jl. Taman Tlogomulyo Raya RT 5 RW 5 TLOGOMULYO	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.000.000.000/50 0 m'	SALuran tidak lancar sehingga sering terjadi banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN MUKTI HARJO KIDUL					
2.	Pembersihan Saluran di Dempel Raya	Jalan Dempel	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000/1500 M3	Memperlancar drainase (DPU)
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL					
3.	Pembuatan Pintu Air untuk lokasi kali tenggang	Jalan Zebra Raya	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/1 paket	Menghindari banjir (DPU)
KELURAHAN PLAMONGANSARI					
4.	Pembangunan Saluran ke Makam antara Makam penduduk asli dan makam warga Plamongan Indah	Jl. Plamongansari RT 03 RW 02	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/300 M2	DISPERKIM
5.	Pembangunan Taman Bermain cm	Jl. Plamongansari V RT 03 RW 09	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/200 M2	DISPERKIM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN PALEBON					
6.	Perbaikan MCK Umum	Jl. Pedurungan Tengah VI RT 1 RW 2 PALEBON	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/400 Meter	MCK tidak layak (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
7.	Pengaspalan Jalan	Jl. Panda Raya RT 3 & 10 RW III RT 3 RW 3 PALEBON	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/600 Meter	Kondisi Jalan Rusak Berat (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
8.	Lampu Penerangan Jalan	Jl. Tlogo Timur RT 3 RW 11 PALEBON	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/1 Paket	Kondisi jalan gelap (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Pedurungan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 8 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 5 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk

- Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
- c. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

- f. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
- g. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
- h. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
 - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;

- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;

- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Sedangkan target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- v. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,60-84,00 indeks
- w. Tingkat Kearifan Budaya Lokal sebesar 55,17%
- x. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,3-8,6%
- y. Angka Kemiskinan sebesar 4,04-4,24 %
- z. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6-6,1 %
- aa. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 103,54 Juta rupiah
- bb. Persentase peningkatan Nilai Investasi sebesar 7% (25.684.059 Juta rupiah)
- cc. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 6%
- dd. Indeks Demokrasi sebesar 72,4 indeks
- ee. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,70 indeks
- ff. Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebesar 10,52 %
- gg. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,01 indeks
- hh. Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur sebesar 84,5 indeks
- ii. Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan sebesar 3,32 %
- jj. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,00 indeks
- kk. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88 indeks
- ll. Opini BPK adalah WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 mencakup rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang beserta indikatornya sebagai berikut:

- SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**
Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik**
Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2023 mengacu pada nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 seperti dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.0 8.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PLAMONGANSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GEMAH

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PALEBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KALICARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PLAMONGANSARI

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GEMAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PALEBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KALICARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PLAMONGANSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GEMAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PALEBON

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KALICARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MuktiHarjo Kidul
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PLAMONGANSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GEMAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PALEBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KALICARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Pedurangan
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	73
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	65

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Pedurungan bertugas menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota

Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 program pelaksanaan/pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp.61.569.270.810,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp 17.209.331.934 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 44.359.938.876,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	APBD			60.514.018.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	80 %	17.209.331.934	APBD		100 %	18.620.352.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%		100 %			100 %		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100 %			100 %		
X.X X.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kec. Pedurungan	7 Dokumen	24.779.770	APBD		7 Dokumen	29.000.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan		3 Dokumen			3 Dokumen		
X.XX. 01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	2.704.440	APBD			3.000.000
X.XX. 01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	4.449.180	APBD			3.000.000
X.XX. 01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	5.617.790	APBD			3.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	3.988.590	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	2.394.290	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	1 Laporan	2.187.520	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	2 Laporan	3.437.960	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kec. Pedurungan	100%	14.981.020.690	APBD	100%	16.838.246.358	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4 Dokumen			4 Dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pedurungan	100 Orang	14.419.764.810	APBD		16.173.246.358	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pedurungan	12 Dokumen	553.741.720	APBD		650.000.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	947.760	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	5.369.920	APBD		5.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX. 01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	1.196.480	APBD		5.000.000	
X.XX. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kec. Pedurungan	100%	636.693.595	APBD		100%	590.000.000
X.XX. 01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	4 Paket	25.000.000	APBD		10.000.00000	
X.XX. 01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	230.370.605	APBD		100.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	51.842.640	APBD		50.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	21.426.550	APBD		30.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pedurungan	25 Laporan	90.141.000	APBD		100.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pedurungan	12 Laporan	106.956.000	APBD		100.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	110.956.800	APBD		200.000.000	
X.XX. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pedurungan	100%	392.413.448	APBD		100%	250.000.000
X.XX. 01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pedurungan	6 Unit	392.413.448	APBD		250.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kec. Pedurungan	100%	437.629.130	APBD		100%	325.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	260.312.160	APBD			250.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	177.316.970	APBD			75.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pedurungan	100%	736.795.301	APBD		100%	588.105.642
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Pedurungan	29 Unit	192.081.570	APBD			250.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	20.087.140	APBD			100.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	374.626.591	APBD			138.105.642
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	150.000.000	APBD			100.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Kec. Pedurungan	92%	3.542.321.200	APBD		93%	3.713.566.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pedurungan	1 Angka	172.400.000	APBD		1 Angka	100.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	172.400.000	APBD			100.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Pedurungan	100%	1.910.935.678	APBD		100%	2.250.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	12 Laporan	1.910.935.678	APBD			2.250.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kel. Tlogomulyo	100 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongsari)	Kel. Plamongsari	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kel. Pedurungan Tengah	100 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	100 Laporan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pedurungan	100%	1.097.149.532	APBD		100%	1.363.566.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pedurungan	3 Laporan	1.097.149.532	APBD		3 Kegiatan	1.363.566.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kec. Pedurungan	98%	40.338.273.512	APBD		99%	38.155.100.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pedurungan	407 Kegiatan	16.548.584.172	APBD		502 Kegiatan	37.816.100.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pedurungan	6 Lembaga Kemasyarakan	50.350.000	APBD			50.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	13 unit	13.983.982.992	APBD			15.976.290.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	8 Unit					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	13 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	15 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	14 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	8 Unit					
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan	Kec. Pedurungan	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	APBD			21.789.810.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Penggaron	19 Pokmas/O					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kidul	rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	19 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	14 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	20 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	27 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	18 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	21 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	16 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	15 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	22 Pokmas/O rmas					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	18 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	16 Pokmas/Ormas					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kec. Pedurungan	76 Dokumen	23.731.984.580	APBD		18 Dokumen	339.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	APBD			175.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongsari)	Kel. Plamongsari	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	6 Lembaga Kemasyaraktan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	6 Lembaga Kemasyaraktan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	6 Lembaga Kemasyaraktan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	6 Lembaga Kemasyaraktan					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pedurungan	1 Laporan	57.704.760	APBD			164.000.000
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	Kec. Pedurungan	1 Kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pedurungan	15%	50.830.000	APBD		20%	100.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kec. Pedurungan	35 Angka	50.830.000	APBD	35 Angka		100.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	50.830.000	APBD			100.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	Kec. Pedurungan	92%	50.980.350	APBD	95%		25.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kec. Pedurungan	2 Kegiatan	50.980.350	APBD	2 Kegiatan		25.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pedurungan	150 Orang	50.980.350	APBD			25.000.000

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Pedurungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Pasal 1 Ayat (11) undang-undang dimaksud menyebutkan “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pula keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu tertuang dalam Pasal 273 ayat (2) yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum nantinya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

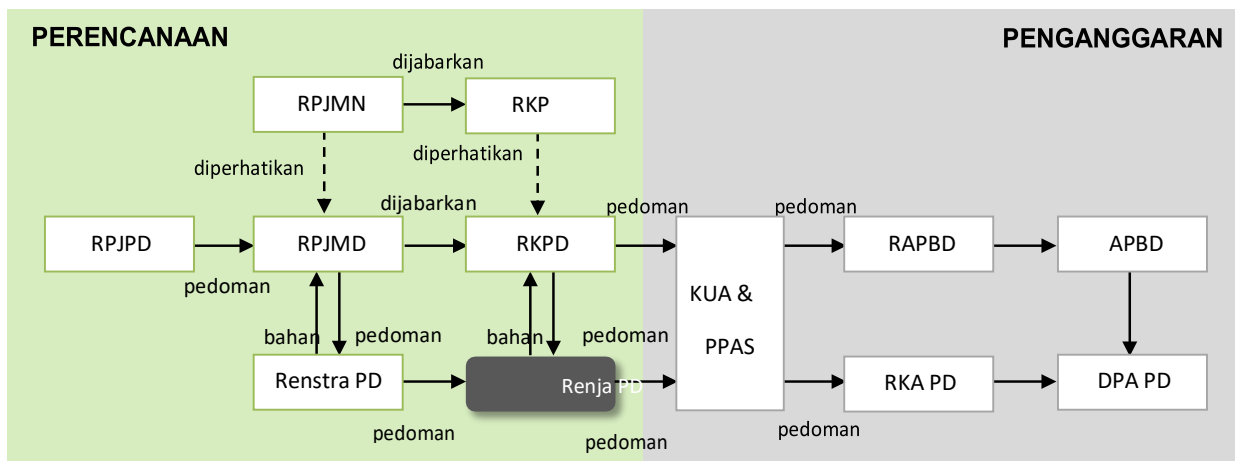
Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai penyusunan renja kerja perangkat daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (30), disebutkan bahwa “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 – dan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan di tiap perangkat daerah dapat digambarkan dalam gambar sebagaimana berikut :



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja OPD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja perangkat daerah memedomani pada Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja perangkat daerah juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023. Dengan memperhatikan kondisi aktual pandemi Covid-19, maka rencana kerja pembangunan Kota Semarang pada tahun 2023 diarahkan pada **“Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Daerah yang didukung Potensi Unggulan Daerah”**.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kebupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara sistematis dan terorganisir, di antaranta melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sbb :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian renstra Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik; analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; review terhadap rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Memuat rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan dala Renja dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan maupun permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 18.341.175.374,- (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 16.422.100.212,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus ribu dua ratus dua belas rupiah) atau sebesar 89.54%. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut :

Tabel 2. 1.
Anggaran dan Serapan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	18.341.175.374	16.422.100.212	89.54
Jumlah	18.341.175.374	16.422.100.212	89.54

Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pada tahun 2021, kinerja yang dicapai adalah :

1. “Indeks Pengamalan Pancasila” dari yang ditargetkan 2 indeks tercapai 3.46 indeks sehingga mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan.
2. “Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun” dari yang ditargetkan 4 kejadian tercapai 1 kejadian sehingga mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan, atau tercapai 175%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai angka 2 kejadian. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.2.
Capaian Program Penguatan Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	%	

1	Indeks Pengamalan Pancasila	2.00	3.46	173	-
2	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun	4	1	175	167
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Th. 2021					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (80%);
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (110%).

B. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Program Peningkatan Peran Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, yaitu “Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila” dari yang ditargetkan 3.40 indeks terealisasi 3.46 indeks atau tercapai 101.76%%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 3.35 indeks. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 3.
Capaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN
	TARGET	REALISASI	%	
		I		

					2020
1	Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	3.40	3.46	101.76	3.35
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Th. 2021					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (100%);
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (78.76%);
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (100.00%).

C. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dari yang ditargetkan 100 organisasi tercapai 100 organisasi atau tercapai 100 %. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 lalu yang

mencapai angka 85 organisasi. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 4.
Capaian Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI	%	
1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara	100	100	100	85
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021				

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (99%);
- b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (222.86%).

D. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah “Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan” dari yang ditargetkan 1 tercapai 0 atau tercapai 200 %. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 lalu yang mencapai angka 1 kejadian. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 5.
Capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	REALISASI
-------------------	------------	-----------

		TARGET	REALISAS I	%	TAHUN 2020
1	Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	1	0	200	1
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi TW IV Th 2021					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (112.5%);
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (95%).

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam dari yang ditargetkan 80% tercapai 80 % atau tercapai 100%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 lalu yang mencapai angka 79%. Secara lebih jelas, capaian program dimaksud dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 6.
Capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
	TARGE T	REALISAS I	%	
1 Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap	80	80	100	79

	gangguan ipoleksosbudhanka m				
Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi TW IV Th 2021					

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

Kegiatan Perumusan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (131.25%);
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (133.33%);
- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (112.08.%).

Secara lebih jelas, rekapitulasi evaluasi dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 7. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang s.d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Lembar : 1 dari 15 halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8 0101	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 dok	-	-	-	-	8 dok	8 dok	20%
02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	11 dok	-	-	-	-	2 dok	2 dok	18,18%
02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 2 dari 15 halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dok	-	-	-	-	4 dok	4 dok	20%
02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	20%
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	275 orang	-	-	-	-	55 orang	20%	20%
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	20%
02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	20%
02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 jenis	-	-	-	-	20 jenis	20 jenis	20%
02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	-	-	-	-	5 jenis	5 jenis	20%
02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	140 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	20%
02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	-	-	-	-	1000 orang	1000 orang	20%
02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	500 kegiatan	-	-	-	-	100 kegiatan	100 kegiatan	20%
02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	-	-	-	-	5 jenis	5 jenis	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	10 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	20%
02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	20%
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	20%
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	-	-	-	-	22 unit	22 unit	20%
02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	50 Unit	-	-	-	-	10 unit	10 unit	20%
02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	250 Unit	-	-	-	-	50 unit	50 unit	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	-	-	-	-	2 indeks	2 indeks	83.33%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	1 Kejadian	-	-	-	-	2 Kejadian	2 Kejadian	0%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	270 orang	-	-	-	-	45 orang	45 orang	16,68%
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	455 orang	-	-	-	-	55 orang	55 orang	12,09%
		Jumlah Peserta Event Pembauran Kebangsaan	420 orang	-	-	-	-	20 orang	20 orang	4,76%
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	475 orang	-	-	-	-	75 orang	75 orang	15,79%
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	265 orang	-	-	-	-	40 orang	40 orang	15,09%
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	265 orang	-	-	-	-	0 orang	0 orang	0,00%
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	165 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	30,30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	46 Kali	-	-	-	-	0 kali	0 kali	0,00%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	240 Kali	-	-	-	-	5 kali	5 kali	2,08%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kampung Tematik Pancasila	22 Lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	4,55%
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	2300 Orang	-	-	-	-	300 orang	300 orang	13,04%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	30 Forum	-	-	-	-	4 Forum	4 Forum	13,33%
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	930 orang	-	-	-	-	180 orang	180 orang	19,35%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	5 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	20,00%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	5 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	20,00%
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	60 dokumen	-	-	-	-	12 dok	12 dok	20,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	-	-	-	-	62.00 angka indeks	62.00 angka indeks	77,50%
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	32.500 laporan dan usulan	-	-	-	-	5.500 laporan dan usulan	5.500 laporan dan usulan	73,33%
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70%					0%	0%	
2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	10 kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	10,00%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	15 konten	-	-	-	-	2 Konten	2 Konten	13,33%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	44 konten	-	-	-	-	4 Konten	4 Konten	9,09%
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	96 paket	-	-	-	-	16 Paket	16 Paket	16,67%
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	2450 orang	-	-	-	-	250 orang	250 orang	10,20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	280 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	17,86%
2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	45%	-	-	-	-	35%	35%	35%
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%					0%	0%	0,00%
2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta bimtek pengeloan bantuan keuangan kepada partai politik	215 orang	-	-	-	-	45 orang	45 orang	20,93%
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	175 orang	-	-	-	-	25 orang	25 orang	14,29%
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	30 event					0 event	0 event	0 event

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	5 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	20,00%
		Jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	42 dokumen	-	-	-	-	8 dok	8 dok	19,05%
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	580 dokumen	-	-	-	-	100 dok	100 dok	17,24%
		Jumlah Monitoring Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	240 dokumen					0 dok	0 dok	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	60 indeks	-	-	-	-	55 indeks	55 indeks	91,67%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	36%	-	-	-	-	33%	33%	91,67%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	22 organs	-	-	-	-	4 organs	4 organs	18,18%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	54 organs	-	-	-	-	11 organs	11 organs	20,37%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	9 organs	-	-	-	-	0 organs	0 organs	0,00%
		jumlah peserta ormas award	42 organs	-	-	-	-	12 organs	12 organs	28,57%
		Jumlah peserta ormas expo	20 organs	-	-	-	-	0 organs	0 organs	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 orang	-	-	-	-	10 orang	10 orang	25,00%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	430 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	11,63%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	655 dok	-	-	-	-	110 dok	110 dok	16,79%
		Jumlah pengukuran indeks kinerja Ormas dan jumlah peserta seminar Indeks kinerja Ormas	70 ormas	-	-	-	-	10 ormas	10 ormas	14,29%

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Lembar : 12 dari 15 halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72 indeks	-	-	-	-	70 indeks	70 indeks	97,22%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kejadian	-	-	-	-	1 Kejadian	1 Kejadian	0%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	350 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	14,29%
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	950 orang	-	-	-	-	350 orang	350 orang	36,84%
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	640 orang	-	-	-	-	90 orang	90 orang	14,06%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	22 konten	-	-	-	-	6 konten	6 konten	27,27%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	15 konten	-	-	-	-	5 konten	5 konten	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	40 dokumen	-	-	-	-	6 dok	6 dok	15,00%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	37 kali	-	-	-	-	32 kali	32 kali	86,49%
		jumlah event penggunaan dana hibah untuk pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama	16 organs	-	-	-	-	5 organs	5 organs	31,25%
		jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	550 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	9,09%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penelitian pengukuran indeks kerukunan umat beragama	5 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	20,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	85%	78%	79%	79%	100%	80%	80%	94,12%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	21 kejadian	-	-	-	-	25 Kejadian	25 Kejadian	80,95%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	126 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	9,52%
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	510 orang	-	-	-	-	60 orang	60 orang	11,76%
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	400 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	12,50%
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100%	-	-	-	-	100%	100%	20,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(9)	11 = (9/4)
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	7 Kelompok	-	-	-	-	1 Kelompok	1 Kelompok	14,29%
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	15 kali	-	-	-	-	3 Konten	3 Konten	20,00%
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	144 Kali	-	-	-	-	24 Kali	24 Kali	16,67%
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	405 orang	-	-	-	-	0 Kali	0 Kali	0,00%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Situasi Daerah	1825 Dokumen	-	-	-	-	365 dok	365 dok	20,00%
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	78 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	15,38%
02.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	78 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	7,69%

Dari tabel 2.7 diatas, evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2021 dan perkiraan capaian target renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat disampaikan bahwa “perkiraan realisasi capaian resntra s/d tahun 2022” di tingkat sub kegiatan tergolong rendah, yaitu di kisaran angka 20%. Hal itu wajar mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026. Sedangkan capaian masing-masing indikator program dan kegiatan memang tergolong tinggi mengingat dasar yang digunakan untuk menetapkan target indikator program dan kegiatan adalah dinamika capaian di tahun-tahun sebelumnya – baik capaian indikator serupa di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang tahun 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 8. Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSE N TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.341.175.374	16.422.100.212	89,54	1.919.075.162
	BELANJA OPERASI	17.974.180.531	16.189.398.280	90,07	1.784.782.251
	BELANJA MODAL	366.994.843	232.701.932	63,41	134.282.911
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.147.160.639	5.527.604.757	89,92	619.555.882
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.083.324	5.700.000	70,52	2.383.324
	a SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.333.108	2.400.000	72,00	933.108
	b SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	382.018	300.000	78,53	82.018
	c SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	368.836	300.000	81,34	68.836
	d SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	382.018	0	0,00	382.018
	e SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	368.836	300.000	81,34	68.836

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	f SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.248.508	2.400.000	73,88	848.508
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.832.561.911	4.517.915.357	93,49	314.646.554
	a SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.594.600.374	4.310.054.457	93,81	284.545.917
	b SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	227.100.000	202.840.000	89,32	24.260.000
	c SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.510.555	0	0,00	2.510.555
	d SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.936.745	3.919.900	56,51	3.016.845
	e SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.414.237	1.101.000	77,85	313.237
3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	25.295.145	21.463.000	84,85	3.832.145
	a SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.295.145	21.463.000	84,85	3.832.145
4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	637.070.681	511.729.779	80,33	125.340.902
	a SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.659.130	5.054.500	89,32	604.630
	b SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	35.482.056	15.935.600	44,91	19.546.456
	c SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.000.000	72.024.082	84,73	12.975.918
	d SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000	9.890.000	65,93	5.110.000
	e SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.239.636	0	0,00	1.239.636
	f SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000	42.985.000	85,97	7.015.000
	g SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	211.138.675	205.263.665	97,22	5.875.010
	h SUB KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	233.551.184	160.576.932	68,75	72.974.252
5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	135.044.023	74.205.000	54,95	60.839.023
	a SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL	94.376.193	38.395.000	40,68	55.981.193
	b SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.667.830	35.810.000	88,05	4.857.830
6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA	166.558.400	141.751.072	85,11	24.807.328

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	a SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	0	0	#DIV/0!	0
	b SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	72.998.400	48.934.701	67,04	24.063.699
	c SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	93.560.000	92.816.371	99,21	743.629
7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	342.547.155	254.840.549	74,40	87.706.606
	a SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	282.493.155	211.162.549	74,75	71.330.606
	b SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN MEBEL	6.600.000	4.450.000	67,42	2.150.000
	c SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	53.454.000	39.228.000	73,39	14.226.000
B	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	507.949.920	357.948.066	70,47	150.001.854
1	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	507.949.920	357.948.066	70,47	150.001.854
	a SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	468.379.643	325.479.521	69,49	142.900.122
	b SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	39.570.277	32.468.545	82,05	7.101.732
C	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	5.729.634.516	5.272.555.082	92,02	457.079.434

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
1	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	5.729.634.516	5.272.555.082	92,02	457.079.434
	a SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	4.411.528.437	4.297.196.601	97,41	114.331.836
	b SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.140.409.244	859.367.881	75,36	281.041.363
	c SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	177.696.835	115.990.600	65,27	61.706.235
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.846.436.476	3.627.957.679	94,32	218.478.797
1	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.846.436.476	3.627.957.679	94,32	218.478.797

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSE N TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)	
	a	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	3.703.457.241	3.547.394.079	95,79	156.063.162
	b	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	142.979.235	80.563.600	56,35	62.415.635
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		340.615.823	309.913.535	90,99	30.702.288
1	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		340.615.823	309.913.535	90,99	30.702.288
	a	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	110.203.753	95.669.526	86,81	14.534.227
	b	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	230.412.070	214.244.009	92,98	16.168.061
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.769.378.000	1.326.121.093	74,95	443.256.907
1	KEGIATAN PERUMUSAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.769.378.000	1.326.121.093	74,95	443.256.907

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
a	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELLJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	161.948.000	113.779.448	2,93	48.168.552
b	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELLJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	656.129.000	530.720.800	80.89	125.408.200
c	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELLJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	951.301.000	681.620.845	71.65	269.680.155
TOTAL		18.341.175.374	16.422.100.212	3,75	1.919.075.162

Dari data pada Tabel 2.8 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebesar Rp Rp. 18.341.175.374,- Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 16.422.100.212 dengan sisa sebesar Rp 1.919.075.162 (6,24%) dengan uran berikut:

- a. **Belanja Operasi**, anggaran sebesar Rp 17.974.180.531,- realisasi Rp. 16.189.398.280,- dan sisa anggaran sebesar Rp 1.784.782.251,-

- b. **Belanja Modal:** anggaran sebesar Rp 366.994.843,- Dengan realisasi sebesar Rp 232.701.932,- dan sisa anggaran sebesar Rp134.282.911,-

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sub unsur dari urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tah un 202 6	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tah un 202 6	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>		<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>		<i>13</i>
1.	Indeks Demokrasi	-	v	72.2 0	72.4 0	72.8 0	73.20	73.6 0	72.2 0	72.40	72.80	73.2 0	73. 60	
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	-	v	73.0 0	73.5 0	74.0 0	74.50	75.0	73.0 0	73.50	74.00	74.5 0	75. 0	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki tujuan **“meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan indikator tujuan adalah **“Indeks Demokrasi”**.
- b. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah **Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan** dengan indikator sasaran **“Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”** (selanjutnya disebut IP2WK).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- 1) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat
 - (a) Perlunya upaya-upaya kreatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 di tengah-tengah kondisi paska pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
 - (b) Perlunya upaya peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh rendahnya persentase keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu 30% dari keseluruhan calon legislatif (caleg). Hal itu berimbas pada partai politik yang tidak mengajukan 30% calon perempuan di masing-masing daerah pemilihan (dapil) – dengan ketentuan tambahan setiap tiga caleg laki-laki maka ada satu orang caleg perempuan – maka akan gagal pada dapil tersebut. Dengan kewajiban tersebut pada pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi sayangnya, jumlah keterwakilan atau keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Semarang malah makin menurun. Jika pada tahun 2014-2018 ada 11 orang atau 22% anggota legislatif perempuan,

pada tahun 2019-2024 jumlahnya menurun, yaitu 10 orang atau 20% anggota legislatif perempuan.

- (c) Perlunya dilakukan upaya-upaya strategis dalam menanggulangi peredaran narkoba dan zat aditif lainnya di Kota Semarang mengingat Kota Semarang tergolong peringkat pertama kategori daerah rawan (bahaya) narkoba se-Jawa Tengah. Upaya ini tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh *stakeholder* terkait.
 - (d) Peningkatan kemampuan analisa intelijen strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan;
 - (e) Perlunya diambil tindakan untuk mengantisipasi tindak penolakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu;
 - (f) Perlunya pengambilan kebijakan strategis untuk mengantisipasi kemunculan aksi-aksi yang dilatarbelakangi oleh ideologi non-Pancasila;
 - (g) Kenakalan remaja yang makin mengarah pada aksi kriminalitas membutuhkan intervensi yang lebih inovatif;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi OPD

Pandemi covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2021, menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021, antara lain :

1. Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mengantisipasi munculnya konflik sosial, kerawanan sosial, ataupun disintegrasi bangsa maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang perlu melakukan upaya-upaya sosialisasi untuk meng-counter isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat. Kondisi pandemi berimplikasi pada pembatasan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berwujud tatap muka atau mengumpulkan banyak orang

sehingga dibutuhkan upaya-upaya inovatif untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi;

2. Munculnya kembali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Orang Asli Papua yang mengatasnamakan dari kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) KK Semarang dan Hipmapas (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang). Adapun isu yang selalu diangkat dalam setiap aksi unjuk rasa dari orang asli papua yang mengatasnamakan pelajar dan mahasiswa Papua adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua;
 - b) Menolak New York Agreement yang ditandatangani Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962, karena perjanjian itu dinilai menjadi awal pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua;
 - c) Menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri (Referendum);
 - d) Menganggap Republik Indonesia saat ini sedang menjajah Papua;
 - e) Sering membawa simbol simbol mirip dengan bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka).
3. Munculnya aksi penolakan masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok syi'ah apabila kelompok tersebut melaksanakan kegiatan di luar kelompoknya;
4. Maraknya kembali kejadian tawuran antar pelajar Kota Semarang;
5. Partisipasi kaum perempuan dalam penyelenggaraan umum, yaitu perempuan sebagai pemilih, tergolong tinggi, yaitu mencapai angka 83.76% pada pemilihan umum anggota legislatif lalu. Namun sayangnya, partisipasi aktif kaum perempuan – yaitu perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif – justru hanya 39.53% dari keseluruhan calon legislatif.

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, **nilai investasi yang semakin besar**, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Tuntutan perubahan pola pelayanan ke masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19;
- b) Ancaman peningkatan aksi intoleran terhadap kelompok tertentu;
- c) Berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- d) Kenakalan remaja yang kian mengarah pada aksi kriminalitas;

- e) Peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilihan umum anggota legislatif;
- f) Kecenderungan penurunan minat untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kota Semarang;
 - c) Jaringan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
 - d) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing, meng-*counter* informasi *hoax* yang beredar di masyarakat, maupun sosialisasi informasi yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19.
 - e) Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 :
- a) ***Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang***

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya upaya-upaya kreatif untuk mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 pada kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19;
2. Perlunya mengintensifkan sinergi dengan partai politik untuk mendorong partisipasi aktif kaum perempuan;
3. Perlunya peningkatan pendidikan politik dan kesadaran kebangsaan pada generasi muda dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik secara masif kepada generasi muda;
4. Perlunya tindakan penanggulangan kenakalan remaja yang mengarah pada bibit-bibit kriminalitas dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendorong generasi muda berkompetisi secara sehat dan kreatif serta untuk menyalurkan hobi dan energi generasi muda.

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2023 dapat disampaikan sbb :

1. Perubahan pola pelayanan selama masa pandemi – dari tatap muka menjadi virtual. Oleh karena itu, fasilitas maupun kemampuan aparatur perlu dipersiapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala yang signifikan;
2. Perlunya melibatkan pemangku kewilayahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah;
3. Perlunya peningkatan pelibatan stakeholder terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi

- 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP

- 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan

- 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah

- 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya- upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya- upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”. Namun memiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memiliki kewajiban dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 26 halaman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					80.066.616.600					51.131.882.876	
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					80.066.616.600					51.131.882.876	
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	8.054.900.000	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	6.194.066.876		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			
		Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 dok	18.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 dok	12.103.000		

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
 Lembar : 2 dari 26 halaman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	3.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	847.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok		
		Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok			Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok		
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.269.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok		
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.219.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok		
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1.611.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.962.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok		
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	639.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok		
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	1.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	556.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	6.305.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	5.094.162.876	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok		
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	6.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	4.824.045.876	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	267.320.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%		
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	815.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok			Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dok	1.582.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok		
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	400.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok		
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	26.075.000	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	26.075.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang			Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.021.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	444.320.000	
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.015.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis		
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Jenis	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Jenis	14.984.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis		
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis	125.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis	55.053.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis			Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis		
2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	10.554.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis			Kota Semarang	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	1.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	432.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	100 buku			Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	100 buku		
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	65.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	65.005.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang			Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang		
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	214.005.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan		
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dok	500.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dok	74.272.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis			Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	140.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	24.523.000	
2.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	19.523.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis		
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.000.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis		
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	185.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	272.903.000	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.103.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen		
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	130.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	235.800.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	345.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	319.980.000	
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.319.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	251.300.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit		
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	6.750.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit		
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	25.611.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
08.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.10 indeks	2.054.251.600	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.10 indeks	1.091.118.000		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Ke	2.054.251.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	1.091.118.000		
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	27 Dok	1.400.727.600	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	27 Dok	614.802.000	Indikator Mutakhir SIPD	
Kota Semarang		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	900 orang				Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	900 orang			
Kota Semarang		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	120 orang				Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	120 orang			
Kota Semarang		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	50 orang				Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	50 orang			
Kota Semarang		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	50 orang				Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	50 orang			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	70 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	70 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	120 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	120 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organ			Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organ		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 dokumen	148.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 dokumen	113.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	50 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	50 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	6 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	6 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	540 orang	155.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	540 orang	405.158.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi			Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	520 orang	265.324.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	520 orang	51.879.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	5 Forum			Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	5 Forum		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	85.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	19.166.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	3 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	3 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	64 angka indeks	57.572.465.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	64 angka indeks	36.517.196..000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6000 laporan dan usulan	57.572.465.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6000 laporan dan usulan	36.517.196..000	
		Kota Semarang	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0%			Kota Semarang	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0%		
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	905.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	227.165.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	5 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	5 Konten		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	600 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	600 orang		
		Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	20 Paket			Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	20 Paket		
		Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	4 Kali			Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	4 Kali		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	54.595.465.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	35.733.853.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	70 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	70 Orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%			Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	1		
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 orang	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 orang	25.997.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	50 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	50 orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	0%			Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	0		
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	0%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	0		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1281 orang	1.655.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1281 orang	323.090.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	10 event			Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	10 event		
		Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloan bantuan keuangan kepada partai politik	45 event			Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloan bantuan keuangan kepada partai politik	45 event		
		Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	36 orang			Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	36 orang		

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	220 Laporan	367.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	220 Laporan	207.091.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	60 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	60 dok		
		Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok			Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok		
		Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali			Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali		
		Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	120 dok			Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	120 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	27 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	27 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	57 Indeks	2.115.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	57 Indeks	1.673.762.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	34%	2.115.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	34%	1.673.762.000	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	19 dok	1.610.000.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	19 dok	808.282.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	6 ormas			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	6 ormas		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2 organ		
		Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	0			Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	0		
		Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	30 organ			Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	30 organ		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organ		
		Kota Semarang					Kota Semarang				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dok	40.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dok	500.000.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 Orang		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 orang	90.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 orang	205.500.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90 Orang		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 dokumen	375.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 dokumen	159.980.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 Dok			Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 Dok		
		Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	15 ormas			Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	15 ormas		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	70,50 indeks	6.960.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	70,50 indeks	3.143.816.000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	6.960.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	3.143.816.000	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	1.170.000.000	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	72.750.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten		
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	3 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	3 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	200 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	200 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	150 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	150 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	200 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	200 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	165 orang	230.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	165 orang	114.980.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	12 Dok			Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	12 Dok		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 orang	5.470.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 orang	2.956.086.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	200 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	200 orang		
		Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	9 Kali			Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	9 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	4 organ			Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	4 organ		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	90.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82 prosentase	3.310.000.000	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82 prosentase	2.511.924.000		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	24 Kej	3.310.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	24 Kej	2.511.924.000		
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	660 orang	1.065.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	660 orang	350.229.000	Indikator Mutakhir SIPD	
Kota Semarang		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75 Orang	Kota Semarang			Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75 Orang				
Kota Semarang		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	75 orang	Kota Semarang			Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	75 orang				
Kota Semarang		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen	Kota Semarang			Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen				
Kota Semarang		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali	Kota Semarang			Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1070 orang	1.245.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1070 orang	383.532.000	Indikator Mutakhir SIPD	
		Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali			Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali			
		Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok			Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	45 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	45 orang			
		Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten			Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 laporan	600.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 laporan	173.565.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen		
		Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.604.598.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12 Kali			Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12 Kali		

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.131.882.876,-. Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam renja dimaksud memiliki kesesuaian 100% (seratus persen) dengan rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Usulan dari masyarakat dijangar dari pelaksanaan musrenbang yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun Desember lalu di tingkat RT/ RW. Adapun masukan dari masyarakat yang diajukan ke OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sbb :

Tabel 2. 11.
Hasil Reses DPRD Kota Semarang Masa Sidang III
Tahun 2021

NO	HASIL RESES	FRAKSI	TANGGAPAN
1	2	3	4
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG			
1	Maraknya kasus kriminalitas di wilayah Kota Semarang memerlukan solusi dari pemerintah dan aparat keamanan	PDI-P	<p>Dalam penanganan kasus kriminalitas di Kota Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bergerak di ranah preemtif dan preventif untuk deteksi dini, antisipasi dini dan cegah dini dengan menyelenggarakan kegiatan :</p> <p>✓ Pembinaan kesadaran bela negara, pembauran kebangsaan, sosialisasi penguatan karakteristik dan jiwa patriotik generasi muda serta sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan melalui media mainstream maupun media sosial untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi, radikalisme dan terorisme;</p> <p>✓ Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</p>

NO	HASIL RESES	FRAKSI	TANGGAPAN												
1	2	3	4												
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi moderasi beragama untuk membentengi masyarakat dari berkembangnya radikalisme berbasis agama; ✓ Pemberdayaan organisasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Petamas (Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat) untuk mencegah konflik intra umat beragama dan antar umat beragama; ✓ Mengintensifkan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk deteksi dini potensi-potensi gangguan trantibmas di wilayahnya; ✓ Pelatihan penanganan konflik sosial dan pelatihan mediasi konflik sosial; ✓ Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban. <p>Ke depannya, untuk mengantisipasi tindak kriminalitas yang termasuk dalam kategori kenakalan remaja maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berencana untuk menyelenggarakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan yang menumbuhkan persahabatan antar sekolah untuk menekan angka tawuran antar pelajar di Kota Semarang, antara lain : kemah pembauran dan pendidikan pelatihan bela negara; ✓ Kegiatan untuk penyaluran energi dan kreativitas pelajar dengan kompetisi-kompetisi yang positif seperti lomba pembuatan mural, lomba pembuatan konten di media sosial. <p>Sebagai pembanding, dapat kami sampaikan kejadian angka kriminalitas di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N O</th> <th>TAHUN</th> <th>CAPAIA N</th> <th>KENAIKA PENURUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2019</td> <td>1151 Kejadian</td> <td>Turun kejadian-25,36% tahun 2018 mencapai kejadian</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2020</td> <td>1330 Kejadian</td> <td>Naik kejadian-15,55% angka kriminalitas tahun 2019</td> </tr> </tbody> </table>	N O	TAHUN	CAPAIA N	KENAIKA PENURUN	1	2019	1151 Kejadian	Turun kejadian-25,36% tahun 2018 mencapai kejadian	2	2020	1330 Kejadian	Naik kejadian-15,55% angka kriminalitas tahun 2019
N O	TAHUN	CAPAIA N	KENAIKA PENURUN												
1	2019	1151 Kejadian	Turun kejadian-25,36% tahun 2018 mencapai kejadian												
2	2020	1330 Kejadian	Naik kejadian-15,55% angka kriminalitas tahun 2019												

NO	HASIL RESES	FRAKSI	TANGGAPAN				
1	2	3	4				
			3	2021	1253 Kejadian	Turun kejadian-atau 5,79% dari kriminalitas tahun 2020	77 angka
			<p>Angka kriminalitas di Kota Semarang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 sejumlah 292 kejadian – atau 15,55 % jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Namun pada tahun 2021, angka kriminalitas kembali mengalami penurunan sejumlah 77 kejadian- atau 5,79% dari tahun 2020.</p>				

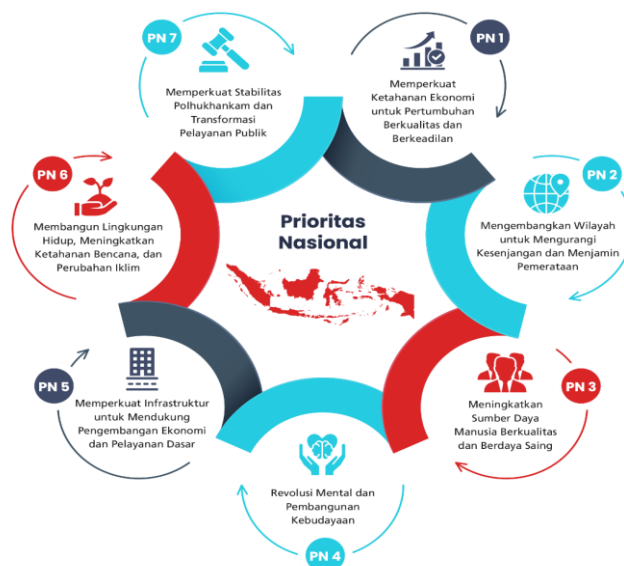
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1. Prioritas Nasional



3.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Tema pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi**

Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

3.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “**Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**” sebagaimana RPJMD 2018-2023.

Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju Sumber Daya Manusia berdaya saing.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%.

3.1.3. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

Prioritas Pembangunan pada RKPD kota Semarang Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2022 serta isu-isu strategis di tahun 2023.

Rumusan prioritas pembangunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---|
| Prioritas Daerah 1. | Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan |
| Prioritas Daerah 2. | Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran |
| Prioritas Daerah 3. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |

yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya, sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro dan koperasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro, terutama yang berbasis e-commerce.
 - 2) Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah
 - 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 4) Pengembangan kewirausahaan baru berbasis nilai tambah
 - 5) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - 6) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan peran dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu
 - 2) Pelaksanaan promosi investasi
 - 3) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata unggulan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Revitalisasi sarpras perdagangan

- 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya Pertanian berbasis perkotaan
 - 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya perikanan
 - 4) Pemenuhan cadangan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Land Banking)
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar dan representatif
 - 3) Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi
 - 4) Pengembangan pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi informasi
 - 5) Pengembangan kawasan strategis heritage
 - 6) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang ekonomi
 - 7) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang pariwisata

- 8) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau
 - 2) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu
 - 3) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur
 - 4) Upaya peningkatan konservasi lingkungan
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan pemeliharaan sistem drainase pengendalian banjir
 - 2) Peningkatan kapasitas dan fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir
 - f. Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi aset-aset kota
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD
Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
 - 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
 - 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada gambar sbb :

Gambar 3. 2
Keterkaitan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Maupun Daerah Tahun 2023



3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu **“meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan indikator tujuan adalah **“Indeks Demokrasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu :

- a. meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan indikator sasaran “Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” (selanjutnya disebut IP2WK);
- b. terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran “nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatkan kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	angka indeks	72.4
Sasaran 1 : Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	indeks	73.50
Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	nilai	76.00

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 yaitu :

- ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- ✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak **6 (Enam) program** dengan **12 (Dua Belas) kegiatan, 51 (Lima Puluh Satu) Sub Kegiatan** yang terdiri dari terdiri dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan rutin dan 23 (dua puluh) sub kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasionalPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Mebel
 - 5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan aparatur
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 1.5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- 1.3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- 1.4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 1.3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 1.4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam MUSPIDA Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan) serta generasi muda (pelajar maupun mahasiswa), dan tidak lupa para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertugas melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun secara khusus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila” dengan indikator tujuan adalah “Indeks Demokrasi”.
3. Keserasian dan keterpaduan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 51.131.882.876 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 6.194.066.876,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 44.937.81.6000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar

: 1 dari 21 halaman

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				51.131.882.876				154.001.844.000
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				51.131.882.876				154.001.844.000
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	6.194.066.876	APBD Kota Semarang		100%	6.773.508.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	11 dok	12.103.000	APBD Kota Semarang			8.652.000
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 dok	847.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen perencanaan	Kota Semarang	2 dok		APBD Kota Semarang		2 dok	
		Jumlah dokumen RTP	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang			

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok	3.269.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	3.219.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.611.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.962.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	2 dok	639.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	2 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	1.700.000
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dok	556.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	1.700.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	5.094.162.876	APBD Kota Semarang		100%	5.604.334.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		4 dok	
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	35 orang/bulan	4.824.045.876	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	5.055.882.000
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12.00	267.320.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	520.000.000
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1.00	815.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	10.000.000
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	10 dok	1.582.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	12.000.000
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dok	400.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	6.452.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	100%	26.075.000	APBD Kota Semarang		100%	32.037.000
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		55 orang	26.075.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Semarang	55 orang		APBD Kota Semarang		55 orang	32.037.000
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	444.320.000	APBD Kota Semarang		100%	587.100.000
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	10.015.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	7.000.000
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	2 Jenis	14.984.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	20.000.000
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Jenis	55.053.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang	20 Jenis		APBD Kota Semarang		20 Jenis	110.000.000
2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 Jenis	10.554.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	5 Jenis		APBD Kota Semarang		100%	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Semarang	10 Dok	432.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Semarang	100 buku		APBD Kota Semarang		10 buku	1.200.000
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	50 Laporan	65.005.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang		APBD Kota Semarang		1000 orang	50.000.000
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	100 laporan	214.005.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Semarang	100 kegiatan		APBD Kota Semarang		100 kegiatan	168.900.000
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	4 dok	74.272.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 Jenis		APBD Kota Semarang		5 Jenis	200.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	24.523.000	APBD Kota Semarang		100%	60.009.000
2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	50 Unit	19.523.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	Kota Semarang	3 Jenis		APBD Kota Semarang		2 Jenis	15.000.000
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	4 Unit	5.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	2 jenis		APBD Kota Semarang		2 jenis	45.009.000
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	272.903.000	APBD Kota Semarang		100%	169.950.000
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	37.103.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kota Semarang	100 persen		APBD Kota Semarang		100%	49.950.000
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	24 Laporan	235.800.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Kota Semarang	100 persen		APBD Kota Semarang		100%	120.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	Kota Semarang	100%	319.980.000	APBD Kota Semarang		100%	311.426.000
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	36.319.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1 Unit		APBD Kota Semarang		1 Unit	45.000.000
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	22 Unit	251.300.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	22 Unit		APBD Kota Semarang		22 Unit	218.000.000
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	50 Unit	6.750.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	10 Unit		APBD Kota Semarang		10 Jenis	8.426.000
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	100 Unit	25.611.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Semarang	50 unit		APBD Kota Semarang		20 Jenis	40.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	2.10 indeks	1.091.117.000	APBD Kota Semarang		2.20 Indeks	3.823.570.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	Kota Semarang	2 Kejadian	1.091.117.000	APBD Kota Semarang		2 Kejadian	3.823.570.000
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	27 Dok	614.802.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Kota Semarang	900 orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	190.000.000
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	120 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	100.000.000
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	250.000.000
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	300.000.000
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	Kota Semarang	120 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	300.000.000
		Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	Kota Semarang	70 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	200.000.000
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	120 orang		APBD Kota Semarang		40 orang	108.000.000
		Jumlah Hibah yang disalurkan	Kota Semarang	1 organ		APBD Kota Semarang			

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	5 dokumen	113.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	Kota Semarang	50 Kali		APBD Kota Semarang		70 kali	140.000.000
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	Kota Semarang	6 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	600.000.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	540 orang	405.158.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah Kampung Tematik Pancasila	Kota Semarang	3 Lokasi		APBD Kota Semarang		9 Lokasi	685.570.000
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	Kota Semarang	500 orang		APBD Kota Semarang		500 orang	190.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	520 orang	51.879.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Semarang	5 Forum		APBD Kota Semarang		10 Forum	300.000.000
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	180 orang		APBD Kota Semarang		210 Orang	250.000.000
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	3 Laporan	19.166.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	70.000.000
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	Kota Semarang	3 dok		APBD Kota Semarang		1 Kali	70.000.000
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		12 Dokumen	70.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	Kota Semarang	64 angka indeks	36.517.196.000	APBD Kota Semarang		62 angka indeks	132.584.460.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Semarang	6000 laporan dan usulan	36.517.196.000	APBD Kota Semarang		6000 laporan dan usulan	132.584.460.000
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	Kota Semarang	0%		APBD Kota Semarang		-	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	26 Dokumen	227.165.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	Kota Semarang	5 Konten		APBD Kota Semarang		4 Kali	90.000.000
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	Kota Semarang	10 Konten		APBD Kota Semarang		10 Konten	50.000.000
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	Kota Semarang	600 orang		APBD Kota Semarang		800 Orang	200.000.000
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang	20 Paket		APBD Kota Semarang		20 paket	90.000.000
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	Kota Semarang	4 Kali		APBD Kota Semarang		3 Paket	80.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	12 Dokumen	35.733.853.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	Kota Semarang	70 Orang		APBD Kota Semarang		70 Orang	120.000.000
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10
		Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Kota Semarang	50 orang	25.997.000	APBD Kota Semarang		100%	129.300.000.000
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	Kota Semarang	0%		APBD Kota Semarang		35%	2.019.460.000
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	Kota Semarang	0%		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	1281 orang	323.090.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	Kota Semarang	10 event		APBD Kota Semarang		40 Orang	70.000.000
		jumlah peserta bimtek pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	Kota Semarang	45 event		APBD Kota Semarang		20 event	200.000.000
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	Kota Semarang	36 orang		APBD Kota Semarang		30 orang	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	220 Laporan	207.091.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Monitoring Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	Kota Semarang	60 dok		APBD Kota Semarang		180 dokumen	100.000.000
		jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	Kota Semarang	12 dok		APBD Kota Semarang		8 Dok	75.000.000
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Kota Semarang	1 kali		APBD Kota Semarang		1 Kall	60.000.000
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	Kota Semarang	120 dok		APBD Kota Semarang		120 dokumen	100.000.000
		Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Semarang	27 dok		APBD Kota Semarang			

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	Kota Semarang	57 Indeks	1.673.762.000	APBD Kota Semarang		58 Indeks	3.192.199.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	Kota Semarang	34%	1.673.762.000	APBD Kota Semarang		0,35	3.192.199.000
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	19 dok	808.282.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	Kota Semarang	6 ormas		APBD Kota Semarang		4 Organs	100.000.000
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	Kota Semarang	2 organ		APBD Kota Semarang		3 organs	15.000.000
		jumlah peserta ormas award	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		15 organs	150.000.000
		Jumlah peserta ormas expo	Kota Semarang	30 organ		APBD Kota Semarang			
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	Kota Semarang	10 organ		APBD Kota Semarang		23 Organisasi	2.343.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	1 dok	500.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	Kota Semarang	40 Orang		APBD Kota Semarang		20 Orang	20.000.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	90 orang	205.500.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	Kota Semarang	90 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	100.000.000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	120 dokumen	159.980.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	Kota Semarang	120 Dok		APBD Kota Semarang		130 Dok	394.199.000
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	Kota Semarang	15 ormas		APBD Kota Semarang		30 organs	70.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	Kota Semarang	70,50 indeks	3.143.816.000	APBD Kota Semarang		71 indeks	2.374.009.000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	Kota Semarang	1 Kej	3.143.816.000	APBD Kota Semarang		1 Kej	2.374.009.000
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	11 Dokumen	72.750.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	Kota Semarang	6 Konten		APBD Kota Semarang		5 konten	10.000.000
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	Kota Semarang	3 Konten		APBD Kota Semarang		3 konten	30.000.000
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		150 orang	158.000.000
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang	150 orang		APBD Kota Semarang		150 orang	120.000.000
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		250 orang	250.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	165 orang	114.980.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	Kota Semarang	12 Dok		APBD Kota Semarang		11 Dok	216.009.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	350 orang	2.956.086.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		150 orang	150.000.000
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	Kota Semarang	9 Kali		APBD Kota Semarang		2 kali	60.000.000
		Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	Kota Semarang	4 organ		APBD Kota Semarang		3 organisasi	1.350.000.000
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	1 Laporan		APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kota Semarang	1 Kali	-	APBD Kota Semarang		1 Kali	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Kota Semarang	82 prosentase	2.511.924.000	APBD Kota Semarang		83%	5.254.098.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	Kota Semarang	24 Kej	2.511.924.000	APBD Kota Semarang		23 kejadian	5.254.098.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	660 orang	350.229.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	Kota Semarang	75 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	300.000.000
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	Kota Semarang	75 orang		APBD Kota Semarang		200 Orang	500.000.000
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	Kota Semarang	100 persen		APBD Kota Semarang		100%	250.000.000
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	Kota Semarang	18 Kali		APBD Kota Semarang		48 Kali	850.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	1070 orang	383.532.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	Kota Semarang	24 Kali		APBD Kota Semarang		48 Kali	904.098.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	1 Kelompok		APBD Kota Semarang		1 Kelompok	500.000.000
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	Kota Semarang	45 orang		APBD Kota Semarang		120 orang	350.000.000
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	Kota Semarang	3 Konten		APBD Kota Semarang		3 Konten	150.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	377 laporan	173.565.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	Kota Semarang	365 Dokumen		APBD Kota Semarang		365 Dokumen	300.000.000
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	250.000.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Dokumen		APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	Kota Semarang	12 Kali	1.604.598.000	APBD Kota Semarang		24 Kali	900.000.000

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.131.882.876,-. Demikian pula pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan tetap menyelenggarakan hal yang sama dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang pada gilirannya akan menunjang pencapaian visi dan misi Walikota Semarang – namun tentu saja dengan besaran kebutuhan anggaran yang berbeda menyesuaikan dengan fluktuasi harga barang dan penetapan SHS (Standar Harga Satuan) Kota Semarang.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun point-point yang perlu ditekankan dalam perencanaan program dan kegiatan mendatang, antara lain :

1. Perlunya upaya-upaya yang lebih intensif untuk mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 di tengah-tengah kondisi pemulihan ekonomi paska melandanya pandemi Covid-19;
2. Demikian pula dibutuhkan upaya menjaga kondusivitas Kota Semarang menjelang, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 agar suksesi kepemimpinan berjalan dengan aman dan kondusif;
3. Perlunya upaya peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
4. Dalam rangka mengantisipasi berkembang luasnya aliran radikalisme yang mengancam integrasi bangsa maka kegiatan – kegiatan yang sifatnya deradikalisasi perlu lebih ditingkatkan, terutama bagi generasi muda. Selain itu, perlu juga diformulasikan suatu aksi yang sifatnya pembinaan dan pendampingan kepada para napi eks-terorisme agar tidak kembali terjebak dalam paham-paham radikal.
5. Menghadapi fenomena meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika maka perlu disusun rencana aksi pencegahan peredaran dan pengayalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
6. Peningkatan kemampuan analisa intelijen strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan;
7. Perlunya diambil tindakan untuk mengantisipasi tindak penolakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu;
8. Perlunya pengambilan kebijakan strategis untuk mengantisipasi kemunculan aksi-aksi yang dilatarbelakangi oleh ideologi non-ancasila;

9. Kenakalan remaja yang makin mengarah pada aksi kriminalitas membutuhkan intervensi yang lebih inovatif;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang;
4. Peranan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan;
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD;
6. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023;
7. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
8. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004